

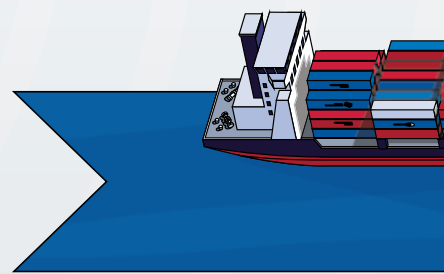


Solid Performance for a Progressive Indonesian Maritime Growth

Kinerja Solid untuk Kemajuan Pertumbuhan Maritim Indonesia

Solid Performance for a Progressive Indonesian Maritime Growth

Kinerja Solid untuk Kemajuan Pertumbuhan Maritim Indonesia



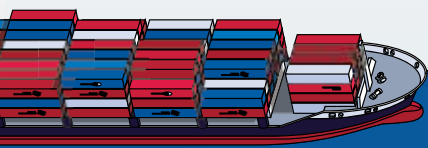
TEMA DAN ARTI TEMA

THEMES AND EXPLANATION OF THEMES

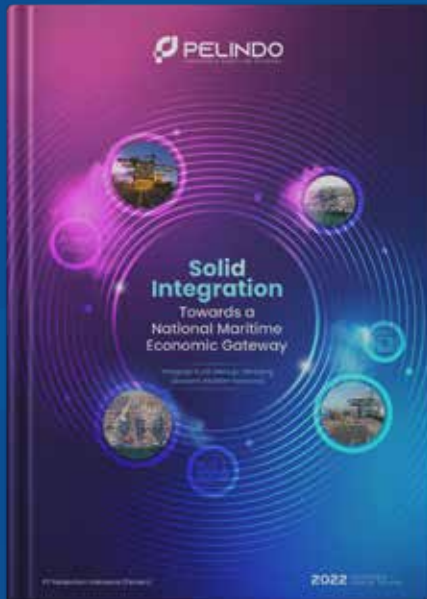


PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) atau Pelindo menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar pulau, serta keberlanjutan sektor maritim Indonesia, sehingga memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi kemajuan bangsa. Dukungan teknologi terbaru seperti *Terminal Operating System (TOS)*, *Pelindo Terminal Operating System Multipurpose (PTOS-M)*, dan *Phinnisi* memberikan dampak signifikan terhadap industri pelayaran dan logistik, dengan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi waktu yang signifikan. Selain itu, pada tahun 2023 Perseroan memasuki *fase business expansion and partnership* yaitu, akan berfokus pada peningkatan pengembangan bisnis melalui *strategic partnership*, kolaborasi dengan pelayaran domestik dan global untuk peningkatan konektivitas laut serta pengembangan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan pelaku industri logistik darat. Dengan berbagai strategi dan pengelolaan yang tersentralisasi, pada tahun 2023 Perseroan mencatat pertumbuhan yang solid dalam kinerja operasionalnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) or Pelindo emphasized its commitment to supporting economic growth, inter-island connectivity and the sustainability of Indonesia's maritime sector, thereby providing a sustainable positive contribution to the nation's progress. The latest technology support such as the Terminal Operating System (TOS), Pelindo Terminal Operating System Multipurpose (PTOS-M), and Phinnisi has had a significant impact on the shipping and logistics industry, with significant reductions in costs and increased time efficiencies. In 2023 the Company will enter the business expansion and partnership phase, where it will focus on increasing business development through strategic partnerships, collaborations with domestic and global shipping to increase sea connectivity, as well as develop connectivity and logistics ecosystems through collaborations with land logistics industry businesses. By following its strategies and centralized management, in 2023 the Company recorded solid growth in its operational performance.



KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY

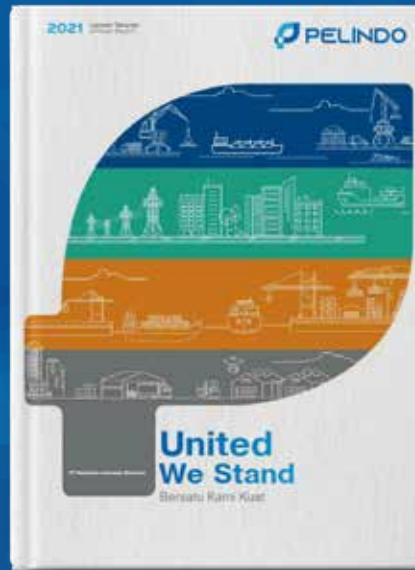


2022

Integrasi Kuat Menuju Gerbang Ekonomi Maritim Nasional Strong Integration Towards The National Maritime Economy Gateway

Pasca penggabungan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memiliki visi untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi dan berkelas dunia, dan misi untuk mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan jasa kepelabuhanan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Malaka. Tahun 2022 merupakan fase *business alignment and integration* yaitu Perseroan akan berfokus pada penyelarasan bisnis pasca integrasi melalui standarisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan, melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis serta reorganisasi perusahaan dan pengembangan budaya terintegrasi.

Following the merger, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo has a vision to become an integrated and world-class maritime ecosystem leader, and a mission to create a national maritime ecosystem network by increasing network connectivity and service integration to support Indonesia's economic growth. This will be realized by providing reliable and integrated ports and maritime services with industrial estates to support the Indonesian and global logistics network by maximizing the economic benefits of the Malacca Straits. 2022 was the business alignment and integration phase, where the Company focused on post-integration business alignment through operational and commercial standardization and integration to improve service quality, integrated investments for business development, and reorganized the Company to develop an integrated culture.

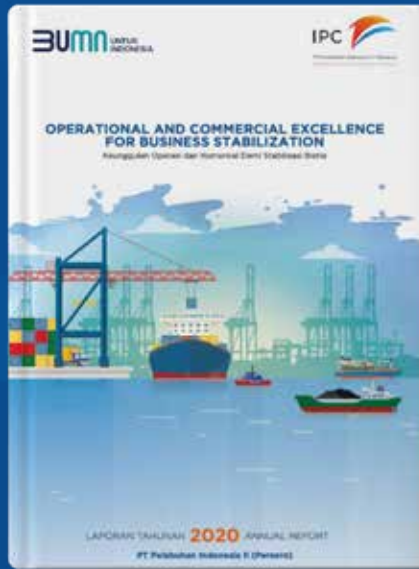


2021

United We Stand Bersatu Kami Kuat

Inisiatif strategis pemerintah untuk mewujudkan jaringan koneksi nasional dan ekosistem logistik yang lebih kokoh diwujudkan melalui penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan selanjutnya menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan penggabungan ini, diharapkan jaringan koneksi maritim, baik koneksi antara pelabuhan-pelabuhan dalam negeri maupun di luar negeri akan semakin meningkat. Melalui penggabungan ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), selanjutnya disebut Pelindo, memiliki kendali strategis yang lebih baik dan dukungan faktor finansial yang kuat sehingga operasional bisnis Pelindo akan lebih terkoordinasi, efisien, efektif, dan memiliki standar tertentu yang nantinya akan memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama pengguna jasa.

The government's strategic initiative to create a stronger national connection network and logistics ecosystem was realized through the merger of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) that subsequently became PT Pelabuhan Indonesia (Persero). With this merger, it is hoped that the maritime connection network between domestic and international ports will grow. Through this merger, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), hereinafter referred to as Pelindo, will have better strategic control and strong financial support so that Pelindo's business operations will be more coordinated, efficient, effective, and standards that will have a good impact on the communities, especially service users.



2020

Operational and Commercial Excellence for Business Stabilization Keunggulan Operasi dan Komersial demi Stabilisasi Bisnis

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mulai bersiap untuk menjadi *World Class Maritime Ecosystem*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tahapan yang ingin dicapai Perseroan pada tahun 2020 sebagai pijakan menuju visi di tahun 2024 adalah Stabilisasi Bisnis Perusahaan melalui Keunggulan Operasi dan Komersial.

Untuk mendukung stabilitas bisnis, Perseroan melakukan 5 (lima) *milestone* utama, yang meliputi kesehatan dan keselamatan lingkungan, improvisasi proses bisnis, optimalisasi pendapatan dan peningkatan efektivitas biaya, peningkatan kemampuan digital, serta optimalisasi *capital expenditure* guna menghadirkan nilai tambah.

Operational and Commercial Excellence for Business Stabilization PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is starting to prepare to become a World Class Maritime Ecosystem. In connection with this, the stage that the Company wants to achieve in 2020 as a stepping stone towards the vision for 2024 is the "Stabilization of the Company's Business through Operational and Commercial Excellence".

To support business stability, the Company has implemented 5 (five) main milestones, which include environmental health and safety, business process improvement, revenue optimization and cost effectiveness improvement, digital capability enhancement, and capital expenditure optimization to provide added value.



TENTANG LAPORAN TAHUNAN

ABOUT THIS ANNUAL REPORT

Laporan Tahunan ini merupakan laporan terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek Perseroan di masa depan, sehingga diharapkan dapat membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis Perseroan dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Laporan tahunan ini berisi ikhtisar data keuangan penting selama 5 (lima) tahun terakhir, profil perusahaan, laporan Direksi dan Dewan Komisaris, analisis dan pembahasan manajemen yang meliputi pencapaian kinerja Perseroan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, proyeksi kinerja serta prospek Perseroan. Laporan Tahunan ini juga melaporkan penerapan tata kelola perusahaan yang meliputi struktur dan proses tata kelola termasuk penerapan sistem manajemen risiko yang di antaranya menggambarkan profil risiko dan pengelolaannya.

This Annual Report is an integrated report that places historical performance into context and describes the Company's risks, and future opportunities and prospects, to help shareholders and stakeholders understand the Company's strategic objectives and its progress in creating sustainable value. This annual report contains an overview of important financial data for the last 5 (five) years, the Company profile, reports from the Board of Directors and Board of Commissioners, management discussion and analysis that includes the Company's performance achievements compared to the previous years' performance, and the Company's performance projections and prospects. This Annual Report also reports on the corporate governance implementation, the governance structures and processes, the risk management system, the risk profiles and their management.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

3	Tema dan Arti Tema Themes and Explanation of Themes	8	Daftar Isi Table of Content	14	Pelindo Group Pasca Penggabungan Pelindo Corporate Structure After the Merger
4	Kesinambungan Tema Theme Continuity	10	Sekilas Tentang Perseroan The Company at a Glance	18	Pencapaian 2023 2023 Achievement
7	Tentang Laporan Tahunan About this Annual Report	11	Jejak Langkah Milestone		

01 Kilas Kinerja 2023 2023 Performance Review

22	Pencapaian Kinerja Penting Tahun 2023 Important Performance Achievements in 2023
23	Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Data Overview
34	Informasi Saham Stock Information
35	Informasi Obligasi, Sukuk, Dan Atau Obligasi Konversi Bonds, Sukuk and/or Convertible Bond Information
37	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya Information On Other Funding Sources
38	Peristiwa Penting Important Events

02 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors Report and Board of Commissioners Report

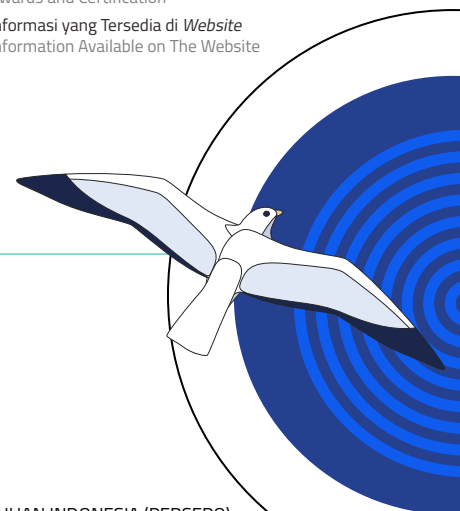
44	Laporan Direksi Board of Directors' Report
58	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report
72	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Statement by The Members of The Board of Directors and Members of The Board of Commissioners Concerning Responsibility for The 2023 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

03 Profil Perusahaan Company Profile

76	Identitas Perusahaan Company Identity	98	Profil Direksi Board of Directors' Profiles	152	Kronologi Penerbitan Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi Chronology of Bonds, Sukuk and/or Convertible Bonds Issuance
78	Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Names and Addresses of Regional Offices and Branch Offices	110	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profiles	154	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Issuance and/or Other Securities Listing Chronology
82	Brand Perusahaan Company Brand	125	Profil Pekerja Employee Profiles	155	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP) Services
83	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of The Company	129	Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders	156	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Supporting Institutions and/or Professionals
85	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture	130	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Majority and Controlling Shareholder	158	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification
87	Kegiatan Usaha Business Activities	131	Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama List of Subsidiaries, Associate Companies and Joint Venture Companies	172	Informasi yang Tersedia di Website Information Available on The Website
93	Wilayah Operasional Operating Areas	148	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure		
94	Daftar Keanggotaan Asosiasi Association Membership	150	Kronologi Penerbitan Saham Share Issuance Chronology		
96	Struktur Organisasi Organizational Structure				

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan Management Analysis and Discussion on The Company's Performance

176	Tinjauan Perekonomian Economic Review	247	Tinjauan Keuangan Financial Review
183	Tinjauan Operasional Operational Review		





05 Sumber Daya Manusia

Human Resources

- 356 Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia
Human Resources Management Strategy
- 369 Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia
Human Resource Management Policy and Implementation
- 377 Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
Human Resources Information Systems
- 380 Internalisasi Budaya
Internalization Of Culture
- 386 Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia
Human Resource Management Structure
- 387 Rencana Kerja Sumber Daya Manusia 2024
Human Resources Work Plan for 2024

06 Teknologi Informasi

Information Technology

- 390 Teknologi Informasi
Information Technology

07 Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

- 400 Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Achievements In Corporate Governance
- 401 Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Basis of Corporate Governance Implementation
- 402 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Structure And Mechanism Of Corporate Governance
- 650 Manajemen Risiko
Risk Management
- 667 Perkara Hukum
Legal Cases
- 671 Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perseroan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya
Administrative Sanctions Imposed on The Company, Members of Board of Commissioners and Board of Directors by Capital Market Authorities and Other Authorities
- 671 Akses Informasi dan Data Perseroan
Access to Company Information and Data
- 679 Kode Etik
Code of Conduct
- 685 Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja
Performance-Based Long-Term Compensation Policy
- 685 Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi serta Pelaksanaannya
Policy on Information Disclosure of Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership and The Implementation
- 686 Whistleblowing System
Whistleblowing System
- 695 Program Anti Korupsi
Anti-Corruption Program
- 704 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
State Official Wealth Report (LHKPN)
- 704 Insider Trading
Insider Trading
- 705 Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance
- 707 Penerapan Pedoman Tata Kelola Perseroan Terbuka
Implementation of Public Company Governance Guidelines

08 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Social and Environmental Responsibility (SER) Program

- 747 Kinerja Program TJSL
SER Program Performance
- 761 Realisasi Program TJSL Tahun 2023
SER Program Realization in 2023
- 778 KPI Program TJSL
SER Program KPIs
- 783 Informasi TJSL Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023
SER Fulfillment Related to Minister of Soes Regulation No. PER-01/MBU/03/2023
- 783 Informasi TJSL Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021
SER Fulfillment Related to Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021

09 Lampiran

Appendix

- 786 Referensi Silang SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies
- 808 Laporan Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Statements

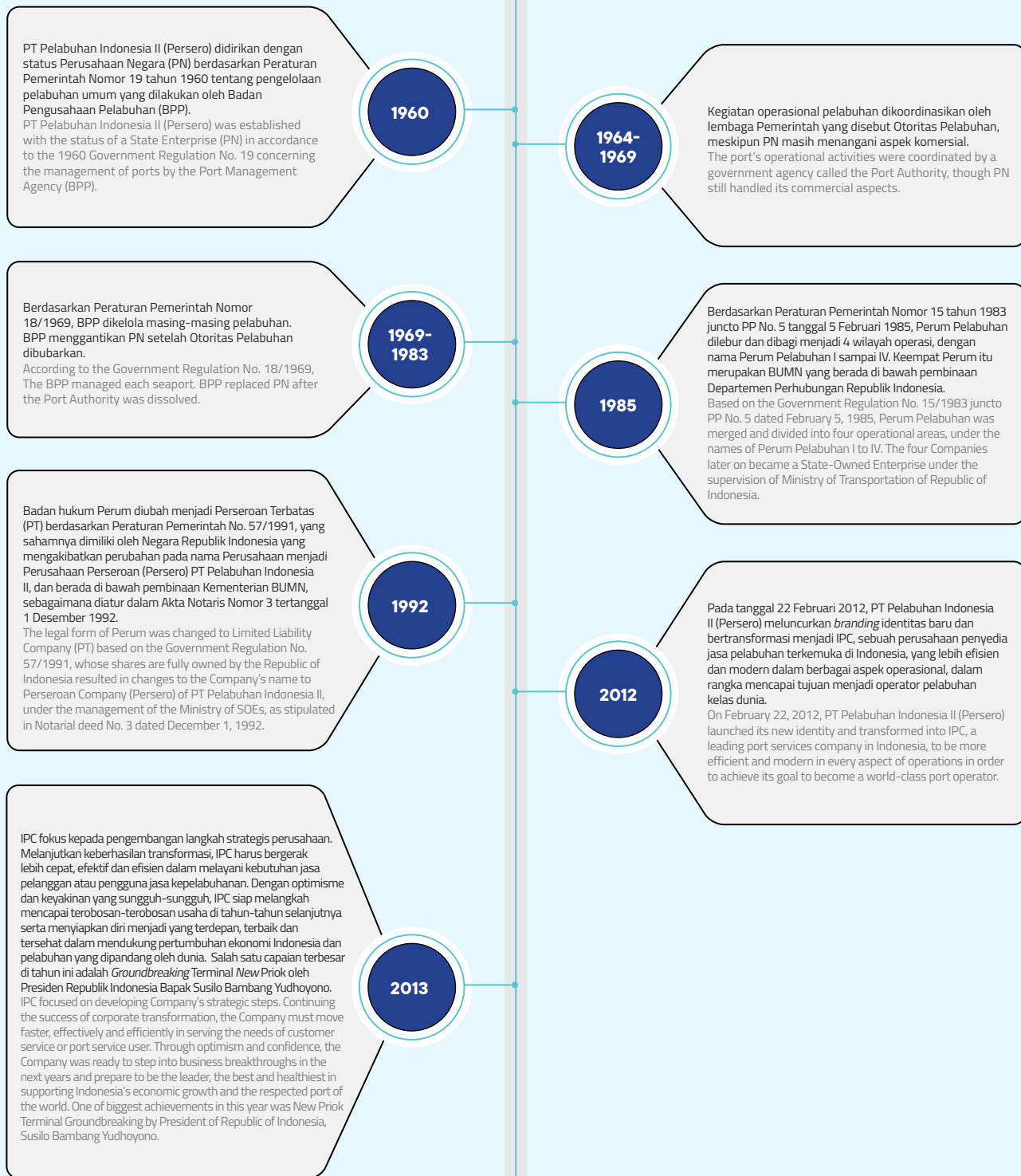
SEKILAS TENTANG PERSEROAN

THE COMPANY AT A GLANCE





JEJAK LANGKAH MILESTONE



Di tahun ini, IPC berhasil menerbitkan obligasi di pasar modal internasional atau *global bond* sebesar USD1,6 miliar. Selain itu, IPC juga semakin menorehkan prestasi di jaringan komunitas pelabuhan dunia dengan menjalin kerja sama dalam rangka *sister port* dengan Port of Townsville Ltd, Australia dan Shenzhen Port Authority. Dari sisi operasional, IPC telah melakukan banyak pemanfaatan dan pembaharuan di seluruh aspek fasilitas kepelabuhan eksisting seperti penerapan sistem OPUS dalam pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok, Panjang, Pontianak dan Palembang. Salah satu Prestasi lainnya yang diukir oleh IPC di tahun 2015 adalah diresmikannya IPC Corporate University oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. IPC Corporate University merupakan bagian dari program transformasi strategis dan visioner dalam rangka menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan *soft infrastructure*. Melalui IPC Corporate University, IPC berharap untuk dapat mencetak generasi gemilang yang berdaya saing tinggi dengan kompetensi teknis kepelabuhanan dan logistik, manajemen dan kepemimpinan yang dapat diandalkan.

In 2015, IPC successfully issued bonds in the international capital markets or the global bond amounted to USD1.6 billion. In addition, IPC also increasingly created some achievements in the world with a network port community and worked together as the sister port of the Port of Townsville Ltd, Australia and Shenzhen Port Authority. From the operational point of view, the Company did a lot of utilization and renewal in all aspects of port existing facilities such as the implementation of the OPUS system in the management of container terminal in Tanjung Priok, Panjang, Pontianak and Palembang. Another achievement made by IPC in 2015 was the launch of IPC Corporate University by the President of Republic of Indonesia Joko Widodo. IPC Corporate University is part of a strategic and visionary transformation program in order to prepare things related to soft infrastructure. Through IPC Corporate University, the Company expects to be able to produce a glorious generation of highly competitive with the technical competence of port and logistics, management and reliable leadership.

2015

Perusahaan memasuki fase pertama *Corporate Roadmap*, yaitu *Fit in Infrastructure* dengan fokus pada penataan tata kelola atau *governance* yang mencakup proses bisnis, SOP dan struktur; budaya perusahaan; restrukturisasi korporasi dan model bisnis; dan mendefinisikan kembali bisnis; yang disertai dengan penyesuaian (*fine-tuning*) dalam semua aspek. Salah satu pencapaian terbesar Perusahaan di tahun 2016 adalah peresmian pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok/ *New Priok Container Terminal 1 (NPCT1)* oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 September 2016. Selain itu Perusahaan juga berhasil mencapai skor GCG dengan nilai 93,316 dan skor KPKU dengan nilai 532,25.

2016

The Company began the first phase of the Corporate Roadmap, The Fit in Infrastructure phase with the focus to governance management that covers business process, SOP and structure; corporate culture, corporate and business model restructuring; and business redefinition; along with fine tuning in all aspects. One of the biggest achievements of the Company in 2016 was the inauguration of the Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok/PT New Priok Container Terminal 1 (PT NPCT1) by the President of the Republic of Indonesia Mr. Joko Widodo on September 13, 2016. In addition, the Company also managed to achieve 93.316 GCG score and 532.5 KPKU score.

Pada Fase *Enhancement*, IPC menutup tahun 2017 dengan membukukan capaian kinerja keuangan dan operasional yang luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena untuk yang pertama kalinya dalam sejarah IPC didirikan, IPC mampu meraih pencapaian tertinggi yaitu untuk tahun buku 2017 pendapatan usaha dicatatkan sebesar Rp10,91 triliun dan laba bersih Rp2,21 triliun EBITDA Rp4,03 triliun, BOPO 70,15%. Sementara pada aspek operasional, realisasi trafik arus peti kemas tercapai 6,93 juta TEUs, arus barang terealisasi 57,09 juta ton, kunjungan kapal pencapaiannya 34.662 unit serta arus penumpang sebanyak 612.680 orang.

2017

IPC memberikan jasa layanan yang diberi nama "*Java South East Asia Express Services/Java SEA Express Services*" atau disingkat "*JAX Services*", dengan rute pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA dan Oakland) Amerika Serikat. Rute ini dilayani melalui perusahaan pelayaran CMA-CGM atau *Compagnie Maritime d'Affrètement-Compagnie Générale Maritime* yang juga membuka akses langsung ke Eropa. Kehadiran kapal kontainer berkapasitas 10.000 TEUs di Pelabuhan Tanjung Priok itu merupakan kapal terbesar yang pernah sandar di pelabuhan tersebut.

In Enhancement Phase, IPC closed the year 2017 by posting outstanding financial and operational performance achievements. This is because for the first time in the history since IPC was established, IPC achieved the highest achievement for the fiscal year 2017. Revenue was recorded at Rp10.91 trillion and net profit was at Rp2.21 trillion, EBITDA was at Rp4.03 trillion, BOPO was at 70.15 percent. While operationally, the realization of container flow traffic reached 6.93 million TEUs, the flow of goods reached 57.09 million tons, ships visit reached 34,662 units and passengers were as much as 612,680 people.

IPC provides services under the Java South East Asia Express Services/Java SEA Express Services, or abbreviated as "JAX Services", connecting Tanjung Priok Port to US West Coast ports at LA and Oakland. This route is served through the CMA-CGM (Compagnie Maritime d'Affrètement-Compagnie Générale Maritime) shipping company, which also opens direct access to Europe. The presence of the first 10,000 TEUs container vessel at the Tanjung Priok Port Branch signals the milestone of the largest ship ever to dock at the port.

2018

Tahun 2018 merupakan tahun "*Establishment*" dengan fokus tahun ini adalah "*volume growth*", "*profitability growth*" dan "*holding establishment*", dengan rincian sebagai berikut:
2018 is the year of "Establishment" with the focus of "volume growth", "profitability growth" and "holding establishment".



Capaian IPC di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 12 cabang pelabuhan telah memiliki sistem operasi berbasis digital yang setara dengan tingkat kebutuhan masing-masing cabang pelabuhan.
- IPC memperkenalkan *Single Truck Identity Database* (TID) yang merupakan basis data truk yang hilir mudik di pelabuhan IPC. Tanjung Priok sebagai *pilot project* dan akan diimplementasikan secara penuh di cabang pelabuhan lainnya pada tahun 2020.
- IPC berhasil membangun kerja sama *sisterport* dengan 11 pelabuhan yaitu *Port of Ningbo-China, Port of Guangzhou - China, Port of Shenzhen-China, Port of Baku-Azerbaijan, Port of Townsville-Australia, Port of Lazaro Cardenas - Mexico, Port of Hamad-Qatar, Port of Djibouti - Afrika Timur, Port of Sabah-Malaysia dan Port of Los Angeles - Amerika.*
- Pertengahan tahun 2019, lembaga pemeringkat independen *Standard & Poor's* meningkatkan peringkat IPC menjadi BBB dari peringkat sebelumnya BBB- dengan *outlook stable (prospek stable)* yang menunjukkan bahwa tren kinerja positif perusahaan.
- Penilaian KPKU dan skor GCG menunjukkan tren peningkatan selama 4 tahun terakhir. Untuk *score* KPKU pada tahun 2019 IPC berhasil mencapai 616,75 dengan predikat *Emerging Industry Leader*. Sementara dari aspek GCG tahun 2019 kembali mencatat peningkatan signifikan dan mencapai skor 98,30 dengan kategori Sangat Baik.

IPC's achievements in 2019 are as follows:

- 12 Port Branches already have digital-based operating systems that are to the level of needs of each port branch.
- IPC introduced *Single Truck Identity Database* (TID), which is a database of trucks going back and forth at the ports of IPC. Tanjung Priok as a pilot project and will be fully implemented in other port branches in 2020.
- IPC succeeded in establishing sister port cooperation with 11 ports, namely *Port of Ningbo-China, Port of Guangzhou-China, Port of Shenzhen-China, Port of Baku - Azerbaijan, Port of Townsville - Australia, Port of Lazaro Cardenas - Mexico, Port of Hamad-Qatar, Port of Djibouti - East Africa, Port of Sabah-Malaysia and Port of Los Angeles - America.*
- In mid-2019, the independent rating agency *Standard & Poor's* upgraded IPC rating to BBB from the previous rating of BBB- with a stable outlook indicating a positive performance trend in the Company.
- KPKU assessment and GCG scores show an increasing trend over the past 4 years. For 2019 KPKU score, IPC reached 616.75 with the title of *Emerging Industry Leader*. While 2019 GCG aspect was recorded a significant increase once more and reached a score of 98.30 with the category of *Very Good*.

2019

2020

- Inisiatif Kerja Sama Awal (MoU) dengan 2 (dua) pelabuhan asing, yaitu *Port of Rotterdam dan Port of Constantza, Romania.*
- Akuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49 persen porsi kepemilikan saham PT ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000.
- Mendukung pembentukan *Holding Rumah Sakit BUMN* atau *Indonesia Health Corporation (IHC)* melalui kepemilikan saham IPC di PT Pertamina Bina Medika IHC sebesar 2 persen.
- Progress pekerjaan konstruksi pembangunan fisik Terminal Kijing Tahap I per 31 Desember 2020 sebesar 80,01 persen, serta sedang dilaksanakan pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I dan Menara Maritim Indonesia.
- Initial Cooperation Initiatives (MoU) with two overseas ports, the *Port of Rotterdam and Port of Constantza, Romania.*
- Acquisition of shares by PT Multimedia Nusantara in PT ILCS amounting to 4,900,00 shares, equivalent to 49 percent of shares of PT ILCS with a transfer value amounting to Rp49,200,000.
- Supported the establishment of State-Owned Enterprise Hospital Holding, the *Indonesia Health Corporation (IHC)* by acquiring 2 percent of PT Pertamina Bina Medika IHC shares by IPC.
- Progress of physical construction work of Kijing Terminal Phase I as of December 31, 2020 reached 80.01 percent. At the same time, the construction of Kalibaru Utara Terminal Phase I, and Indonesia Maritime Tower was in progress.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo.

On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) were merged into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with a name change to PT Pelabuhan Indonesia (Persero), abbreviated as Pelindo.

2021

PELINDO GROUP PASCA PENGGABUNGAN

PELINDO CORPORATE STRUCTURE AFTER THE MERGER

Penggabungan Badan Usaha Milik Negara dalam bidang Kepelabuhanan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021, telah dilanjutkan dengan berbagai langkah tindak lanjut sinergi dan konsolidasi pasca integrasi/penggabungan yang terus dijalankan.

01

1 Oktober 2021
October 1, 2021

- Legal Merger Day 1
- PP 101/2021 Penggabungan Pelindo
- RUPSLB Penggabungan
- Akta Penggabungan
- Legal Merger Day 1
- PP 101/2021 Penggabungan Pelindo
- RUPSLB Penggabungan
- Akta Penggabungan

02

14 Oktober 2021
October 14, 2021

Peresmian Penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Way Kelambu Pelabuhan Bajo oleh Presiden Republik Indonesia
Inauguration of the Merger of Pelindo and Multipurpose Way Kelambu Terminal at Pelabuhan Bajo Port by the President of the Republic of Indonesia

03

29 Oktober 2021
October 29, 2021

Penetapan Nilai Kekayaan Definitif Pelindo oleh Menteri Keuangan
Determination of Pelindo's Definitive Asset Value by the Minister of Finance

11

9 Agustus 2022
August 9, 2022

Peresmian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak oleh Presiden Republik Indonesia
Inauguration of the Pontianak Kijing Terminal Port by the President of the Republic of Indonesia

10

7 April 2022
April 7, 2022

Persetujuan Penggunaan Nilai Buku pada Transaksi Penggabungan oleh Ditjen Pajak
Approval of the Use of Book Value in Merger Transactions by the Directorate General of Taxes

12

24 Agustus 2022
August 24, 2022

Penandatanganan Kerja sama Investasi & Pengoperasian Belawan New Container Terminal dengan INA
Signing of Investment Cooperation & Operation of Belawan New Container Terminal with INA by the President of the Republic of Indonesia

13

20 September 2022
September 20, 2022

Peresmian Jalan Tol Cibitung Cilincing oleh Presiden Republik Indonesia
Inauguration of the Cibitung Cilincing Toll Road by the President of the Republic of Indonesia

14

7 April 2022
April 7, 2022

Peringatan Hari Pelindo Sport & Art League, Pelindo Forum, Voice of Customer, Annual Dinner
Pelindo Sport & Art League Day Commemoration, Pelindo Forum, Voice of Customer, Annual Dinner



The merger of State-Owned Enterprises in the port sector, namely PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which became effective on October 1, 2021, has been followed up with post-integration/merger synergy and consolidation that is ongoing.

04

Mei 2021-2025
May 2021-2025

Standardisasi Layanan Operasional pada Beberapa Pelabuhan (Sudah dimulai sejak Mei 2021 dan masih terus berlangsung hingga tahun 2025)
Standardization of Operational Services at Several Ports (Started in May 2021 and will continue until 2025)

05

1 Januari 2022
January 1, 2022

Serah Operasi Bisnis Tahap I (SPTP, SPMT, SPJM, & SPSL)
Handover of Phase I Business Operations (SPTP, SPMT, SPJM, & SPSL)

06

3 Januari 2022
January 3, 2022

Inbreg Saham *Subholding* SPTP, SPMT, dan SPJM
Inbreg SPTP, SPMT, and SPJM Subholding Shares

09

7 April 2022
April 7, 2022

Dukungan Penegasan Fasilitas BPHTB 0%
Confirmation BPHTB Facility Support 0%

08

4 April 2022
April 4, 2022

Penyampaian RJPP Pelindo Induk kepada Pemegang Saham
Submission of Pelindo Parent RJPP to Shareholders

07

1 Maret 2022
March 1, 2022

Inbreg Saham *Subholding* (SPSL)
Inbreg Subholding Shares (SPSL)



15

1 Oktober 2022
October 1, 2022

Puncak Peringatan Hari Pelindo
Peak of Pelindo Day Commemoration

16

September 2022
September 2022

Go-live Shared Service Center Pelindo (SDM & Pengadaan)
Go-live for Pelindo Shared Service Center (HR & Procurement)

04

April 2023
April 2023

- 1 April 2023 : Pengoperasian JTCC Seksi 4
- 4 April 2023 : Sandarnya Cruise Jumbo MSC Magnifica di Benoa
- April 1, 2023: Operation of JTCC Section 4
- April 4, 2023 : Jumbo MSC Magnifica Cruise docks in Benoa

03

Maret 2021
March 2021

- Pelaksanaan program TJSJ Pelindo Mengajar
- 27 Maret 2023 : *Kickoff* Pemurnian Bisnis
- Implementation of the Pelindo Mengajar SER program
- March 27, 2023 : Business Refinement Kickoff

05

Juni 2023
June 2023

- 23 Juni 2023 : Penandatanganan SHA BNCT
- June 23, 2023 : Signing of SHA BNCT



06

Juli 2023
July 2023

- 12 Juli 2023 : Kerja sama penerapan Single TID antara Pelindo dan Aprindo
- July 12, 2023: Cooperation in implementing Single TID between Pelindo and Aprindo

07

September 2023
September 2023

- 13 Agustus 2023 : Penandatanganan addendum 8 konsesi eksisting Pelido dengan Kemenhub
- 27 September 2023: Pelaksanaan Voice of Stakeholders dan Voice of Customers.
- 27 September 2023: *Launching* PTOS M Bersama Menteri Perhubungan
- August 13, 2023: Signing of addendum to 8 existing Pelido concessions with the Ministry of Transportation
- September 27, 2023: Implementation of Voice of Stakeholders and Voice of Customers.
- September 27, 2023: Launch of PTOS M with the Minister of Transportation





02

Februari February

- Pelindo menjadi tuan rumah BIMP-EAGA
- Pelindo hosts BIMP-EAGA

01

Januari January

- 1 Januari 2023 : Go Live ERP Seluruh Regional
- 19 Januari 2023 : *Launching tag line* Pelindo Indonesia Maritime Gateway Bersama Menteri BUMN
- 30 Januari 2023 : Inbreng Saham PMT ke SPTP
- January 1, 2023: All Regions Go Live for ERP
- January 19, 2023: Launching the Pelindo Indonesia Maritime Gateway tag line with the Minister of BUMN
- January 30, 2023: Inbreng PMT Shares to SPTP



08

Oktober 2023 October 2023

- 1 Oktober 2023 : Rangkaian Hari Pelindo Ke-2
- 30 Oktober : Sandarnya Cruise Terbesar Kedua di Benoa, Cruise Celebrity Solece
- October 1, 2023: 2nd Pelindo Day Series
- October 30, 2023: The second largest cruiser docks in Benoa, Cruise Celebrity Solece

09

November 2023 November 2023

- 1 Januari 2023 : Go Live ERP Seluruh Regional
- 19 Januari 2023 : *Launching tag line* Pelindo Indonesia Maritime Gateway Bersama Menteri BUMN
- 30 Januari 2023 : Inbreng Saham PMT ke SPTP
- January 1, 2023: All Regions Go Live for ERP
- January 19, 2023: Launching the Pelindo Indonesia Maritime Gateway tag line with the Minister of BUMN
- January 30, 2023: Inbreng PMT Shares to SPTP

10

Desember 2023 December 2023

- 12-13 Desember 2023 : Apresiasi Anti Korupsi oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
- 14 Desember 2023 : Perjanjian awal Kerja sama dengan Mitra Strategis di Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)
- Pelayanan operasional selama masa Natal & Tahun Baru
- December 12-13, 2023: Anti-Corruption Appreciation by the National Corruption Prevention Strategy (Stranas PK)
- December 14, 2023 : Initial Agreement of Collaboration with Strategic Partners at Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)
- Operational services during the Christmas & New Year period

PENCAPAIAN 2023 2023 ACHIEVEMENT

HO

- Pemurnian Bisnis**
 27 Aksi Korporasi telah selesai pada 2023 (1 aksi penggabungan/ pemekaran, 13 aksi transfer bisnis/operasi, 5 aksi pengambilalihan usaha, 4 aksi restrukturisasi keuangan/bisnis, 4 aksi penambahan/pelepasan kepemilikan saham)
- Ganti nama sertifikat**
 592 aset Pelindo Group
- PEO**
 Rollout di 62 entitas Pelindo Group
- Serah operasi**
 22 SO Etikemas, 20 SO Non-Petikemas, Serah Operasi SBPP dan Layanan Pemanduan di 4 regional, 11 perjanjian/BASU Logistik
- Konsesi**
 Telah ditandatangani 8 addendum konsesi paska penggabungan
- Business Refining**
 27 Corporate Actions completed in 2023 (1 action for merger/expansion, 13 actions for transfer of business/operations, 5 actions for business takeover, 4 actions for financial/business restructuring, 4 actions for addition/disposal of share ownership)
- Change the certificates**
 592 Pelindo Group assets
- PEO**
 Rollout in 62 Pelindo Group entities
- Hand over of operations**
 22 SO Etikemas, 20 SO Non-Container, Handover of SBPP Operations and Guidance Services in 4 regions, 11 agreements/BASU Logistics
- Concessions**
 8 post-merger concession addendums are signed

SPTP

- Standardisasi**
 Standardisasi layanan terminal petikemas di 10 terminal (TPK Nilam, TPK Jayapura, TP 1 Zona 3, TPK Tarakan, TPK Pantoloan, TPK Perawang, TP 2 Domestik, TPK Kupang, TPK Semarang, TPK Bitung)
- Digitalisasi**
 Digitalisasi layanan terminal petikemas di 6 terminal (TPK Ambon, IPC TPK Area Pontianak, T2 TPKNM (MNP), IPC TPK Area Palembang, T1 PT PMT (TPK Belawan Domestik), IPC TPK Area Panjang)
- Hub & spoke**
 Implementasi Hub & Spoke di 3 Pelabuhan: Kupang, Teluk Bayur, dan Sorong
- Transshipment**
 Implementasi elektrifikasi 4 alat bongkar muat sebagai bagian dari Upaya keberlanjutan di Pelabuhan (4 QCC Bitung)
- Elektrifikasi**
 Implementasi elektrifikasi 4 alat bongkar muat sebagai bagian dari Upaya keberlanjutan di Pelabuhan (4 QCC Bitung)
- TUKS**
 Kerja sama pengoperasian *handling* petikemas di 1 TUKS (PT RAPP Futong di Pelabuhan Perawang) IKPP
- KAM**
 Penambahan 21 rute baru Petikemas
- Standardization**
 Standardization of container terminal services at 10 terminals (TPK Nilam, TPK Jayapura, TP 1 Zone 3, TPK Tarakan, TPK Pantoloan, TPK Perawang, TP 2 Domestic, TPK Kupang, TPK Semarang, TPK Bitung)
- Digitalization**
 Digitalization of container terminal services at 6 terminals (TPK Ambon, IPC TPK Pontianak Area, T2 TPKNM (MNP), IPC TPK Palembang Area, T1 PT PMT (Domestic TPK Belawan), IPC TPK Panjang Area)
- Hub & spoke**
 Implementation of Hub & Spoke in 3 Ports: Kupang, Teluk Bayur, and Sorong
- Transshipment**
 Domestic to international transshipment at 1 port (Tanjung Priok Port)
- Electrification**
 Electrification of 4 loading and unloading equipment as part of sustainability efforts at the Port (4 QCC Bitung)
- KAM**
 Addition of 21 new container routes

SPMT

- Standardisasi**
 Standardisasi layanan terminal non-petikemas sekaligus sistemisasi layanan di 24 lokasi (Tanjung Perak, Tanjung Wangi, Bagendang, Makassar, Balikpapan, Dumia, Bumiharjo, Trisakti, Badas, Belawan, Gresik, Tanjung Priok, Cirebon, Bengkulu, Tanung Pandan, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Panjang, Jambu, Palembang, Pontianak, Kijing, Banten, Tanjung Emas)
- Digitalisasi**
 Standardisasi layanan terminal non-petikemas sekaligus sistemisasi layanan di 24 lokasi (Tanjung Perak, Tanjung Wangi, Bagendang, Makassar, Balikpapan, Dumia, Bumiharjo, Trisakti, Badas, Belawan, Gresik, Tanjung Priok, Cirebon, Bengkulu, Tanung Pandan, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Panjang, Jambu, Palembang, Pontianak, Kijing, Banten, Tanjung Emas)
- Terminalisasi**
 Terminalisasi pada 9 terminal non-petikemas yang tersebar di 6 Cabang Pelabuhan (TCC Ujung Baru Belawan, TCK Ujung Baru Belawan, TCK IKD 2 & 3, TCC Dermaga CPO I & II Bagendang, TCC Dermaga C Dumai, TCC Dermaga B Dumai, TCC Multipurpose 2 Tanjung Intan, TCC Jetty 1& 2 Bumiharjo, TCC Martapura Baru Trisakti)
- TUKS**
 Kerja sama pengoperasian di 4 Pelabuhan TUKS (PT Bukit Asam Teluk Bayur, TUKS BNJMP Talang Baru, TUKS KKT di IKN, IBT Mekar Putih)
- K/L**
 Kerja sama pengoperasian Pelabuhan milik Kementerian/Lembaga di 2 Pelabuhan (Pelabuhan Pare-Pare Garongkong dan Pelabuhan Badas)
- Layanan Non-Petikemas Tambahan**
 Kerja sama LNG Bena
- Optimalisasi Peralatan Pelabuhan**
 Relokasi/optimalisasi 11 aset peralatan non-petikemas (relokasi 2 Forklift dari Banjarmasin ke Trisakti dan dari Tanjung Priok ke Kijing, relokasi 2 GLC dari Tanjung Priok ke Banten, optimalisasi set 2 GLC ex MTI, relokasi Grab Hopper dari Belawan ke Makassar, relokasi Bucket dari Belawan ke Dumai, relokasi 2 Hopper dari Banten ke Kijing, relokasi Mobile Crane dari Belawan ke Kijing)
- Standardization**
 Standardization of non-container terminal services as well as systemization of services in 24 locations (Tanjung Perak, Tanjung Wangi, Bagendang, Makassar, Balikpapan, Dumia, Bumiharjo, Trisakti, Badas, Belawan, Gresik, Tanjung Priok, Cirebon, Bengkulu, Tanung Pandan, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Panjang, Jambu, Palembang, Pontianak, Kijing, Banten, Tanjung Emas)
- Digitalization**
 Standardization of non-container terminal services as well as systemization of services in 24 locations (Tanjung Perak, Tanjung Wangi, Bagendang, Makassar, Balikpapan, Dumia, Bumiharjo, Trisakti, Badas, Belawan, Gresik, Tanjung Priok, Cirebon, Bengkulu, Tanung Pandan, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Panjang, Jambu, Palembang, Pontianak, Kijing, Banten, Tanjung Emas)
- Terminalization**
 Terminalization at 9 non-container terminals in 6 port branches (TCC Ujung Baru Belawan, TCK Ujung Baru Belawan, TCK IKD 2 & 3, TCC CPO Pier I & II Bagendang, TCK Pier C Dumai, TCC Pier B Dumai, TCK Multipurpose 2 Tanjung Intan, TCC Jetty 1&2 Bumiharjo, TCC Martapura Baru Trisakti)
- TUKS**
 Operational cooperation at 4 TUKS Ports (PT Bukit Asam Teluk Bayur, TUKS BNJMP Talang Baru, TUKS KKT at IKN, IBT Mekar Putih)
- K/L**
 Operations Cooperation in ports owned by Ministries/Agencies in 2 ports (Pare-Pare Garongkong Port and Badas Port)
- Additional Non-Container Services**
 Bena LNG Cooperation
- Optimization of Port Equipment**
 Relocation/optimization of 11 non-container equipment assets (relocation of 2 Forklifts from Banjarmasin to Trisakti and from Tanjung Priok to Kijing, relocation of 2 GLCs from Tanjung Priok to Banten, optimization of 2 GLC ex MTI sets, relocation of Grab Hopper from Belawan to Makassar, relocation of Buckets from Belawan to Dumai, relocation of 2 Hoppers from Banten to Kijing, relocation of Mobile Crane from Belawan to Kijing)



SPSL

- ☑ **Standardisasi**
 Standardisasi layanan logistic di 3 lokasi (Lapangan CCDC 100 Makassar, Gudang CDC Banda Tanjung Priok, Lapangan Pasoso Tanjung Priok)
- ☑ **Digitalisasi**
 Digitalisasi layanan *logistic* di 2 lokasi (implementasi *Yard Operating System* (YOS) di Lapangan CCDC 100 Makassar, *improvement Behandle Operating System* (BOS) di *Common Area* Tanjung Priok)
- ☑ **Integrasi Kawasan dengan Pelabuhan**
 Integrasi 3 Kawasan Industri dengan 3 Pelabuhan (KI Jawa Timur (SIER) dengan Pelabuhan Tanjung Perak, KI Timur Jabodetabek dengan Pelabuhan Tanjung Priok, KI Kijing dengan Pelabuhan Kijing)
- ☑ **Kerja sama industri logistik**
 Kerja sama 5 jenis layanan *logistic* yaitu: *cold storage*, *contract logistics*, pengelolaan lapangan, *end-to-end services*, dan *custom clearance*
- ☑ **Optimalisasi aset**
 13 aset telah dioptimalisasikan untuk Kawasan Pendukung Terminal, Depo, CCDC, dan Lapangan Penumpukan (Depo Kuala Tanjung, Kawasan Pendukung Kijing, Lap 100 Makassar, Lap 005E Panjang, Lap Kuala Langsa, Lap Pelabuhan Perawang, Lap Zona A dan Zona B Pelabuhan Perawang, Lap PIL Belawan, Lap CY Perpanjangan Domestik II Tg Emas, Lap Fumigasi TG Emas, Gudang PLB Tg Emas, Lap CY Perpanjangan Domestik I Tg Emas, Lap PLB Tg Emas)
- ☑ **Standardization**
 Standardization of logistics services in 3 locations (CCDC Field 100 Makassar, CDC Banda Tanjung Priok Warehouse, Pasoso Field Tanjung Priok)
- ☑ **Digitalization**
 Digitalization of logistics services in 2 locations (implementation of Yard Operating System (YOS) at CCDC 100 Makassar Field, improvement of Behandle Operating System (BOS) in Tanjung Priok Common Area)
- ☑ **Regional integration with ports**
 Integration of 3 Industrial Areas with 3 Ports (KI East Java (SIER) with Tanjung Perak Port, KI East Jabodetabek with Tanjung Priok Port, KI Kijing with Kijing Port)
- ☑ **Logistics industry cooperation**
 Collaboration with 5 types of logistics services, namely: *cold storage*, *contract logistics*, *field management*, *end-to-end services*, and *custom clearance*
- ☑ **Optimization of assets**
 13 assets have been optimized for the Terminal Support Area, Depot, CCDC, and Stacking Field (Kuala Tanjung Depot, Kijing Support Area, 100 Makassar Field, 005E Panjang Field, Kuala Langsa Field, Perawang Port Field, Zone A and Zone B Field Perawang Port, Belawan PIL Field, CY Field Domestic Extension II Tanjung Emas, Tanjung Emas Fumigation Field, PLB Warehouse Tanjung Emas, CY Field Domestic Extension I Tanjung Emas, Tanjung Emas Field)

SPJM

- ☑ **Standardisasi**
 Standardisasi layanan *marine* di 16 lokasi (Balikpapan, Makassar, Samarinda, Dumai, Sorong, Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Benoa, Lembar, Tg Perak, Tg Priok, Belawan, Tenau Kupang, Batulicin, Banjarmasin)
- ☑ **Digitalisasi**
 Implementasi aplikasi Phinnisi di 34 Cabang Pelabuhan (Palembang, Pontianak, Dumai, Tanjung Wangi, Makassar, Tg Perak & Gresik, Bengkulu, Tg Emas, Cirebon, Tg Intan, Trisakti, Kendari, Benoa, Bitung, Pantoloan, Tenau Kupang, Ambon, Sorong, Merauke, Nunukan, Lembar, Pare-pare, Tarakan, Jambi, Tg Balai Asahan, Bengkalis, Tg Balai Karimun, Kuala Tanjung, Tanjung Pinang, Sei Pakning & Perawang, Sambu & Nipahm Lhoksuemawe, Malahayati)
- ☑ **Additional Marine**
 - *Waste Management* di 1 lokasi (Pelabuhan Tj. Perak)
 - Layanan *bunkering* di 2 Regional yaitu Regional 4 (PMS) dan Regional 2 (JA)
 - Layanan *Oil Response* di 6 lokasi (Pelabuhan Belawan, Dumai, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Bagendang, Bumiharjo)
 - Layanan *docking* di wilayah regional 1, 3, dan 4
 - Layanan *onshore power supply* di 1 lokasi (Pelabuhan Banyuwangi)
 - Layanan pengerukan di 1 lokasi (TPPI Tuban)
 - Layanan tambahan air bersih di 3 lokasi (Belawan; Teluk Lamong; dan Banjarmasin)
 - Layanan tambahan *port electricity* di 2 Regional yaitu di Belawan dan Tj. Perak)
- ☑ **TUKS**
 Kerja sama pelayanan *marine* di 5 lokasi (TUKS Kideco, TUKS Talimuta, TUKS Tarempa, TUKS Weda Bay, TUKS Sangatta)
- ☑ **Pelabuhan K/L**
 Kerja sama pelayanan *marine* di 5 lokasi (T Balai Karimun, Nipah, Samboja, Bunyu, Tanjung Pemancingan)
- ☑ **Standardization**
 Standardization of marine services in 16 locations (Balikpapan, Makassar, Samarinda, Dumai, Sorong, Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Benoa, Selamat, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Belawan, Tenau Kupang, Batulicin, Banjarmasin)
- ☑ **Digitalization**
 Implementation of the Phinnisi application in 34 Port Branches (Palembang, Pontianak, Dumai, Tanjung Wangi, Makassar, Tanjung Perak & Gresik, Bengkulu, Tanjung Emas, Cirebon, Tanjung Intan, Trisakti, Kendari, Benoa, Bitung, Pantoloan, Tenau Kupang, Ambon, Sorong, Merauke, Nunukan, Selamat, Pare-pare, Tarakan, Jambi, Tanjung Balai Asahan, Bengkalis, Tanjung Balai Karimun, Kuala Tanjung, Tanjung Pinang, Sei Pakning & Perawang, Sambu & Nipahm Lhoksuemawe, Malahayati)
- ☑ **Additional Marine**
 - *Waste Management* in 1 location (Tanjung Perak Port)
 - *Bunkering services* in 2 regionals, Regional 4 (PMS) and Regional 2 (JA)
 - *Oil Response Services* in 6 locations (Belawan Port, Dumai, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Bagendang, Bumiharjo)
 - *Docking services* in regional 1, 3, and 4 areas
 - *Onshore power supply service* in 1 location (Banyuwangi Port)
 - *Dredging services* at 1 location (TPPI Tuban)
 - *Additional clean water services* in 3 locations (Belawan; Teluk Lamong; and Banjarmasin)
 - *Additional port electricity services* in 2 regionals, in Belawan and Tanjung Perak)
- ☑ **TUKS**
 Marine service collaboration in 5 locations (TUKS Kideco, TUKS Talimuta, TUKS Tarempa, TUKS Weda Bay, TUKS Sangatta)
- ☑ **Pelabuhan K/L**
 Marine service collaboration in 5 locations (T Balai Karimun, Nipah, Samboja, Bunyu, Tanjung Pemancingan Marine service collaboration in 5 locations (T Balai Karimun, Nipah, Samboja, Bunyu, Tanjung Pemancingan)

Keterangan | Notes:

HO: Head Office

SPTP: PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP)

SPMT: PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)

SPSL: PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL)

SPJM: PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM)



An illustration of a port scene. On the left, a dark blue ship is docked at a pier, with several colorful shipping containers (red, blue, yellow, orange) stacked on its deck. A crane with a lattice boom is positioned on the pier, lifting a blue container. To the right, more shipping containers are stacked on a separate pier. The background shows a light blue sky with a few white clouds and a faint silhouette of a city skyline with arches. The water is a light blue color with white lines indicating movement or waves.

Kilas Kinerja 2023

2023 Performance Review

Pada tahun 2023, Pelindo menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan baik dari sisi operasional maupun keuangan. Kinerja Pelindo juga mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal dengan diterimanya berbagai penghargaan.



In 2023, Pelindo's performance growth was significant in both operational and financial terms. Pelindo's performance also received recognition from external parties by receiving various awards.

PENCAPAIAN KINERJA PENTING TAHUN 2023

IMPORTANT PERFORMANCE ACHIEVEMENTS IN 2023

1. Ekuitas tahun 2023 mencapai Rp46,84 triliun, meningkat 9% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp42,80 triliun.
1. Equity in 2023 reached Rp46.84 trillion, an increase of 9% compared to Rp42.80 trillion in 2022.
2. Pendapatan operasi tahun 2023 mencapai Rp31,02 triliun, meningkat 4,44% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp29,70 triliun.
2. Operating revenues in 2023 reached Rp31.02 trillion, an increase of 4.44% compared to Rp29.70 trillion in 2022.
3. Laba tahun berjalan sebesar Rp4,01 triliun, meningkat 2,66% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3,91 triliun.
3. Profit for the current year reached Rp4.01 trillion, an increase of 2.66% compared to Rp3.91 trillion in 2022.
4. Realisasi arus kapal dalam satuan unit tahun 2023 mencapai 303.221 *Call*, meningkat 4,21% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 290.970 *Call*.
4. Realized ship traffic in units in 2023 reached 303,221 calls, an increase of 4.21% compared to 290,970 calls in 2022.
5. Realisasi arus kapal dalam satuan GT tahun 2023 sebesar 1.286.040.750 GT, meningkat 7,01% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1.201.814.534 GT.
5. Realized ship traffic in GT units in 2023 reached 1,286,040,750 GT, an increase of 7.01% compared to 1,201,814,534 GT in 2022.
6. Realisasi arus petikemas dalam satuan TEUs tahun 2023 sebesar 13.573.959 TEUs, meningkat 2,23% dibandingkan tahun 2022 sebesar 13.292.102 TEUs.
6. Realized container traffic in TEUs units in 2023 reached 13,573,959 TEUs, an increase of 2.23% compared to 13,292,102 TEUs in 2022.
7. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Ton tahun 2023 mencapai 169.853.408 Ton, meningkat 6,34% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 159.727.836 Ton.
7. Realized non-container goods traffic in tons in 2023 reached 169,853,408 tons, an increase of 6.34% compared to 159,727,836 tons in 2022.
8. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan M³ tahun 2023 mencapai 6.575.384 M³, meningkat 17,32% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5.604.518 M³.
8. Realized non-container goods traffic in M³ units in 2023 reached 6,575,384 M³, an increase of 17.32% compared to 5,604,518 M³ in 2022.
9. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan unit tahun 2023 mencapai 2.648.979 Unit, meningkat 8,51% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 2.441.155 Unit.
9. Realized non-container goods traffic in units in 2023 reached 2,648,979 units, an increase of 8.51% compared to 2,441,155 units in 2022.
10. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan MMBTU tahun 2023 mencapai 13.188.848 MMBTU, meningkat 49,86% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 8.800.934 MMBTU.
10. Realized non-container goods traffic in MMBTU units in 2023 reached 13,188,848 MMBTU, an increase of 49.86% compared to 8,800,934 MMBTU in 2022.
11. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Ekor tahun 2023 mencapai 563.244 Ekor mengalami kenaikan 11,82% dibandingkan tahun 2022 mencapai 503.694 Ekor.
11. Realized non-container goods traffic in heads in 2023 reached 563,244 heads, an increase of 11.82% compared to 503,694 heads in 2022.
12. Realisasi arus penumpang pada tahun 2023 sebesar 18.050.932 Orang, meningkat 20,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15.028.884 Orang.
12. Realized passenger traffic in 2023 reached 18,050,932 people, an increase of 20.11% compared to 15,028,884 people the previous year.



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

IMPORTANT FINANCIAL DATA OVERVIEW

IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN FINANCIAL AND FINANCIAL RATIO OVERVIEW

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020*	2019*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION					
ASET ASSETS					
ASET LANCAR CURRENT ASSETS					
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	12.491.274.250	13.597.640.823	12.922.388.587	11.613.056.790	21.820.013.924
Investasi jangka pendek Short-term investments	3.769.584.376	3.943.051.999	5.718.525.973	11.094.379.218	2.624.641.107
Piutang Usaha - neto Trade receivables - net					
Pihak Ketiga Third parties	1.056.562.835	1.130.425.885	1.253.132.841	1.277.605.993	1.427.409.151
Pihak Berelasi Related parties	291.600.099	319.681.316	263.129.705	279.352.489	567.011.017
Piutang lain-lain - neto Other receivables, net					
Pihak Ketiga Third parties	44.613.085	54.645.010	126.988.519	103.528.199	238.179.011
Pihak Berelasi Related parties	170.985.810	392.181.781	1.153.378.016	1.316.074.276	1.432.457.049
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	208.543.807	225.480.260	258.677.724	192.477.003	254.756.941
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues					
Pihak Ketiga Third parties	572.269.934	543.670.248	297.585.161	435.894.846	437.277.939
Pihak Berelasi Related parties	152.492.130	107.559.957	33.383.321	67.889.867	123.414.505
Persediaan Inventories	270.428.290	276.990.511	217.674.563	187.041.439	201.270.798
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	1.190.287.684	972.176.643	1.080.535.298	1.161.817.240	1.662.075.285
Aset lancar lainnya Other current assets	100.458.674	56.662.961	55.194.659	154.078.392	117.794.047
Total Aset Lancar Total Current Assets	20.319.100.974	21.620.167.394	23.380.594.367	27.883.195.752	30.906.300.774

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020*	2019*
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS					
Investasi Jangka Panjang Long-term investments	4.708.437.323	4.118.791.190	3.751.638.877	3.518.317.017	3.635.325.634
Properti investasi – neto Investment properties - net	1.380.726.349	1.233.319.427	873.433.978	867.416.746	885.703.650
Aset tetap – neto Fixed assets - net	40.513.752.433	45.033.835.147	46.300.182.922	44.578.602.925	42.239.772.185
Aset kerja sama operasi – neto Joint operation assets - net	358.909.828	379.887.734	408.013.146	434.117.133	461.100.101
Aset hak-guna – neto Right-of-use assets - net	454.253.106	453.988.347	452.002.189	516.020.761	-
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	844.098.609	632.879.439	587.268.838	753.558.421	241.393.302
Aset takberwujud – neto Intangible assets - net	46.882.443.268	42.546.542.738	38.760.454.848	36.701.629.229	32.528.607.574
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	1.348.106.857	1.109.658.955	750.660.351	1.312.773.446	1.174.901.960
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	1.531.236.928	1.221.507.535	964.824.984	2.011.116.364	2.461.193.103
Total Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	98.021.964.701	96.730.410.512	92.848.480.133	90.693.552.042	83.627.997.509
TOTAL ASET TOTAL ASSETS	118.341.065.675	118.350.577.906	116.229.074.500	118.576.747.794	114.534.298.283
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS LIABILITIES					
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES					
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	3.330.172	105.361.831	5.196.855	4.000.000	34.193.914
Utang usaha Trade payables					
Pihak Ketiga Third parties	620.890.592	976.563.635	1.338.142.064	1.686.203.358	3.044.115.352
Pihak Berelasi Related parties	636.747.827	1.092.012.208	1.926.350.211	3.267.820.968	3.672.159.168
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	1.393.628.171	1.594.355.077	1.298.045.484	1.379.039.522	1.207.043.755
Utang pajak Taxes payable	885.558.244	1.025.273.741	578.540.987	647.527.154	827.210.649
Beban akrual Accrued expenses	5.419.485.908	5.273.585.288	3.699.192.020	3.664.488.679	3.838.675.350
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities					
Utang obligasi Bonds payable	7.574.312.147	8.637.804.928	-	499.768.052	-
Utang Bank Bank loans	445.526.921	152.606.159	2.365.898.747	504.471.670	388.678.828
Liabilitas Sewa Lease liabilities	70.113.816	49.907.726	76.345.578	75.354.511	-



Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan

Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020*	2019*
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities					
Pihak Ketiga Third parties	465.350.521	855.825.793	1.182.432.796	1.023.914.350	762.147.091
Pihak Berelasi Related parties	659.009.231	185.307.298	1.066.277.650	930.066.278	608.481.268
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	18.173.953.550	19.948.603.684	13.536.422.392	13.682.654.542	14.382.705.375
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES					
Liabilitas jangka Panjang- setelah dikurangi bagian lancar Long term liabilities – net of current portion					
Utang obligasi Bonds payable	25.549.740.350	34.116.829.197	40.176.176.480	39.699.180.499	39.615.134.308
Utang Bank Bank loans	13.901.255.263	7.678.666.058	6.656.343.511	11.128.996.490	8.613.919.696
Liabilitas Sewa Lease liabilities	417.609.648	385.228.086	257.540.134	319.371.402	-
Utang lembaga keuangan non-bank Loans from non-bank financial institutions	2.069.876.474	1.744.763.266	1.426.042.655	1.002.703.343	651.770.408
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	86.843.304	231.128.682	105.071.621	117.774.083	91.505.345
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Long-term unearned revenue	4.192.970.146	4.544.771.276	4.495.055.535	4.620.448.208	4.604.082.256
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya Other long-term liabilities	838.428.454	1.126.588.038	962.389.202	792.645.412	702.551.614
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	6.269.173.328	5.769.306.844	6.560.923.531	6.938.142.497	4.822.593.130
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	53.325.896.967	55.597.281.447	60.639.542.669	64.619.261.934	59.101.556.757
TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	71.499.850.517	75.545.885.131	74.175.965.061	78.301.916.476	73.484.262.132
EKUITAS EQUITY					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent entity					
Modal saham Share capital	40.575.584.000	40.575.584.000	8.475.067.000	1.444.029.000	1.444.029.000
Modal donasi Donated capital	26.825.982	26.825.982	26.825.982	26.825.982	26.825.982
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	(33.358.048.450)	(33.358.048.450)	(1.128.322.898)	(205.004.707)	(317.597.475)
Komponen ekuitas lainnya Other equity component	1.466.121	1.466.121	1.466.121	-	-
Selisih nilai transaksi dengan pihak non pengendali Difference in value of transactions with non-controlling interest	836.905.071	836.905.071	836.072.934	836.072.934	836.072.934
Ekuitas <i>merging entity</i> Merging entity equity	-	-	-	21.516.406.212	21.050.900.765

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020*	2019*
Saldo laba Retained earnings					
Ditentukan penggunaannya Appropriated	34.296.140.473	31.900.794.522	29.925.514.788	15.021.058.681	13.273.514.540
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	4.964.897.779	4.915.321.447	4.434.909.230	993.019.548	2.455.762.802
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	(2.373.018.577)	(3.774.159.697)	(2.062.503.591)	(1.119.546.220)	(105.008.860)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto Equity attributable to owners of the parent entity - net	44.970.752.399	41.124.688.996	40.509.029.566	38.512.861.430	38.664.499.688
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	1.870.462.759	1.680.003.779	1.544.079.873	1.761.969.888	2.385.536.463
EKUITAS NETO NET EQUITY	46.841.215.158	42.804.692.775	42.053.109.439	40.274.831.318	41.050.036.151
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	118.341.065.675	118.350.577.906	116.229.074.500	118.576.747.794	114.534.298.283
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME					
Pendapatan operasi Operating revenues	31.018.217.702	29.700.604.135	28.814.806.337	26.591.131.827	-
Pendapatan konstruksi Construction revenues	2.897.789.567	2.397.701.575	3.195.512.405	3.924.471.433	-
Beban operasi Operating expenses	(24.343.231.471)	(23.154.429.191)	(22.503.946.817)	(20.675.933.360)	-
Beban konstruksi Construction expenses	(2.897.789.567)	(2.397.701.575)	(3.195.512.405)	(3.924.471.433)	-
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto Other operating revenue (expense) - net	310.596.193	568.645.497	229.338.106	(196.538.108)	-
LABA USAHA INCOME FROM OPERATIONS	6.985.582.424	7.114.820.441	6.540.197.626	5.718.660.359	-
Pendapatan keuangan Finance income	627.295.432	380.490.270	407.775.884	699.581.748	-
Beban keuangan Finance costs	(2.860.119.853)	(2.571.042.968)	(2.540.082.866)	(2.544.366.171)	-
Bagian laba entitas asosiasi Equity in Income (loss) of Associates	370.377.560	302.615.692	255.107.588	(39.998.707)	-
LABA SEBELUM PAJAK DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	5.123.135.563	5.226.883.435	4.662.998.232	3.833.877.229	-
Beban pajak final Final tax expense	(515.481.368)	(488.229.302)	(487.671.869)	(436.180.278)	-



Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020*	2019*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	4.607.654.195	4.738.654.133	4.175.326.363	3.397.696.951	-
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)					
Kini Current	(999.545.702)	(958.337.498)	(847.733.176)	(745.867.105)	-
Tangguhan Deferred	404.472.770	128.153.222	(151.447.911)	307.112.625	-
LABA TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE CURRENT YEAR	4.012.581.263	3.908.469.857	3.176.145.276	2.958.942.471	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Items that will not be reclassified to profit or loss					
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans - net of tax	9.333.500	823.295.840	94.351.746	(1.643.196.940)	-
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income	108.703.163	87.470.875	(47.180.224)	108.347.081	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Items that will be reclassified to profit or loss					
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	(30.153.334)	198.045.650	13.379.913	(329.050.522)	-
Bagian Efektif dari Keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge	1.313.257.791	(2.820.468.471)			
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR	5.413.722.383	2.196.813.751	3.236.696.711	1.095.042.090	-
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: INCOME FOR THE CURRENT YEAR ATTRIBUTABLE TO:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	3.822.122.283	3.772.545.951	3.292.133.734	3.076.425.168	-
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	190.458.980	135.923.906	(115.988.458)	(117.482.697)	-
LABA TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE CURRENT YEAR	4.012.581.263	3.908.469.857	3.176.145.276	2.958.942.471	-
Penyesuaian atas laba <i>merging entity</i> : Adjustments to income from merging entity:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	-	-	(2.280.313.686)	(1.805.995.892)	-
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	-	-	130.572.397	88.960.075	-

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020*	2019*
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: INCOME FOR THE CURRENT YEAR BEFORE THE EFFECT OF MERGING ENTITY PROFIT ADJUSTMENTS ATTRIBUTABLE TO:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	3.822.122.283	3.772.545.951	1.011.820.048	1.270.429.276	-
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	190.458.980	135.923.906	14.583.939	(28.522.622)	-
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	4.012.581.263	3.908.469.857	1.026.403.987	1.241.906.654	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR ATTRIBUTABLE TO:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	5.223.263.403	2.060.889.845	3.351.776.051	1.212.324.495	-
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	190.458.980	135.923.906	(115.079.340)	(117.282.405)	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE CURRENT YEAR	5.413.722.383	2.196.813.751	3.236.696.711	1.095.042.090	-
Penyesuaian atas laba komprehensif lainnya <i>merging entity</i> : Adjustments to other comprehensive income from merging entity:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	-	-	(2.170.608.365)	(956.432.580)	-
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	-	-	129.586.062	88.563.419	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE CURRENT YEAR BEFORE THE EFFECT OF MERGING ENTITY PROFIT ADJUSTMENTS					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	4.650.656.518	2.060.889.845	1.181.167.686	255.891.915	-
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	229.775.845	135.923.906	14.506.722	(28.718.786)	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR BEFORE THE EFFECT OF MERGING ENTITY PROFIT ADJUSTMENTS	4.880.432.363	2.196.813.751	1.195.674.408	227.173.129	-
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)	94.198	92.976	1.028.217	2.130.446	-
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh) DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)	92.990	91.783	842.992	1.560.716	-
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS					
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES					
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	35.444.805.305	31.671.281.588	28.876.470.288	27.085.501.244	-



Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020*	2019*
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya Payment to contractors, suppliers and others	(15.326.373.675)	(14.592.877.976)	(14.481.551.070)	(14.473.317.581)	-
Pembayaran kepada karyawan Payment to employees	(6.373.858.615)	(5.662.070.239)	(5.661.556.853)	(5.472.976.164)	-
Pembayaran pajak penghasilan Payment for income taxes	(1.187.161.753)	(1.396.604.110)	(1.319.862.044)	(997.779.715)	-
Penghasilan bunga Interest income	147.125.596	132.629.570	1.336.818.218	1.196.017.199	-
Penerimaan Pajak Tax receipts	(179.477.232)	949.549.254	1.078.288.509	63.644.781	-
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	12.525.059.626	11.101.908.087	9.828.607.048	7.401.089.764	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES					
Penerimaan dividen Receipt of dividend	469.784.726	366.126.855	322.271.932	240.088.963	-
Laba (rugi) penjualan aset tetap Profit (loss) from sale of fixed assets	3.736.904	37.117.004	(1.969.868)	2.941.075	-
Perolehan aset tetap, properti investasi dan aset tak berwujud Acquisition of fixed assets, investment property and intangible assets	(7.371.717.546)	(6.511.011.701)	(6.908.699.330)	(9.290.836.817)	-
Pencairan investasi jangka pendek Disbursement of short term investments	653.637.459	2.245.190.808	5.742.520.260	(8.147.327.201)	-
Penyertaan saham Investment in shares	(40.970.691)	(395.591.435)	(2.674.308.254)	142.500.000	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(6.285.529.148)	(4.258.168.469)	(3.520.185.260)	(17.052.633.980)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES					
Setoran modal Capital Contribution	-	-	1.201.500.000	84.100.000	-
Pembayaran pinjaman bank dan utang obligasi Payment of bank loans and bonds payable	(11.074.117.654)	(4.221.618.857)	(4.345.416.914)	962.524.322	-
Penerimaan pinjaman Receipt of loans	8.513.257.386	1.983.144.166	1.611.983.309	3.431.790.723	-
Pembayaran bunga Interest payment	(2.854.269.807)	(2.512.723.161)	(2.752.569.073)	(3.537.254.879)	-
Pembayaran liabilitas sewa Payments of lease liabilities	(417.597.215)	(138.892.333)	(162.741.729)	(153.938.339)	-
Pembayaran dividen Payment of dividends	(1.453.964.849)	(1.316.854.000)	(560.000.000)	(1.377.043.949)	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	(7.286.692.139)	(6.206.944.185)	(5.007.244.407)	(589.822.122)	-

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020*	2019*
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	(1.047.161.661)	636.795.433	1.301.177.381	(10.241.366.338)	-
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(59.204.912)	38.456.803	8.154.416	34.409.204	-
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR	13.597.640.823	12.922.388.587	11.613.056.790	21.820.013.924	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR	12.491.274.250	13.597.640.823	12.922.388.587	11.613.056.790	-
RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS					
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset (%) Profit (Loss) to Total Assets Ratio	3,39	3,33	2,71	2,23	-
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%) Profit (Loss) to Equity Ratio	8,95	9,21	7,72	6,57	-
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan (%) Profit (Loss) to Revenue Ratio	12,94	13,16	11,02	11,13	-
Cash Ratio (kali)	0,89	0,88	1,38	1,66	2,91
Current Ratio (kali)	1,12	1,08	1,73	2,04	3,93
Quick Ratio (kali)	0,97	0,95	1,49	3,61	3,71
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (kali) Liabilities to Equity Ratio	1,53	1,76	1,76	2,02	1,87
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (kali) Liabilities to Total Assets Ratio	0,60	0,64	0,64	0,67	0,65
Operating Ratio (%)	78,48	77,96	78,23	79,13	-
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset (kali) Own Capital to Total Assets Ratio	2,64	2,76	2,85	2,95	2,99
Average payment period (app) (hari) Average payment period (app) (days)	33	51	74	166	-
Average collection period (acp) (hari) Average collection period (acp) (days)	16	18	19	24	-
Collection period (hari) Collection period (days)	16	18	19	21	-

*Disajikan kembali

Keterangan: Data Ikhtisar Keuangan mengikuti Laporan Keuangan Pasca Merger

Catatan untuk pembaca laporan: Tabel dan grafik pada laporan ini memaparkan data numerik dengan standar Bahasa Indonesia, sedangkan pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar Bahasa Inggris dan Indonesia sesuai dengan konteksnya.

*Restated

Note: Financial Overview Data follows the Post-Merger Financial Report

Note to report readers: The tables and graphs in this report present numerical data using standard Indonesian, while the numerical presentation in the text uses standard English and Indonesian according to the context.



IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL OVERVIEW

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020
OPERASI KEPELABUHAN PORT OPERATIONS					
Arus Kapal Ship Traffic					
Dermaga Umum General Wharves					
Internasional International	Unit	24.163	16.232	11.805	14.487
	GT	239.923.806	208.507.972	201.654.893	209.775.137
Domestik Domestic	Unit	126.274	120.335	121.331	114.372
	GT	374.782.831	338.489.677	365.275.148	357.052.914
Total Dermaga Umum Total General Wharves	Unit	150.437	136.567	133.136	128.859
	GT	614.706.637	546.997.649	566.930.041	566.828.051
Non Dermaga Umum Non-General Wharves					
Internasional International	Unit	15.799	16.700	16.383	12.695
	GT	200.654.730	218.902.310	283.355.015	244.159.765
Domestik Domestic	Unit	136.985	137.703	105.150	86.747
	GT	470.679.382	435.914.575	335.932.191	260.938.639
Total Non Dermaga Umum Total Non-General Wharves	Unit	152.784	154.403	121.533	99.442
	GT	671.334.112	654.816.885	619.287.206	505.098.403
Total Arus Kapal Total Ship Traffic	Unit	303.221	290.970	254.669	228.301
	GT	1.286.040.750	1.201.814.534	1.186.217.247	1.071.926.454
Arus Petikemas Container Traffic					
Internasional International	Box	5.367.984	5.250.679	5.230.284	4.876.321
	Teus	8.146.911	7.965.736	7.872.429	7.279.243
Domestik Domestic	Box	8.205.975	8.041.423	8.003.971	7.359.513
	Teus	9.510.416	9.254.576	9.184.205	8.393.040
Total Arus Petikemas Total Container Traffic	Box	13.573.959	13.292.102	13.234.255	12.235.834
	Teus	17.657.327	17.220.312	17.056.634	15.672.283
Arus Barang Non Petikemas Non-Container Traffic					
Barang Luar Negeri Overseas Goods	Ton	90.485.706	77.687.347	69.243.735	68.104.895
	M ³	1.466.349	1.068.187	911.088	722.654
	Unit	463.789	453.442	337.351	264.008
	MMBTU	-	-	-	-
	Ekor Animals	350.487	344.938	428.752	440.074

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020
Barang Dalam Negeri Domestic Goods	Ton	79.367.702	82.040.489	76.957.074	95.237.664
	M ³	5.109.035	4.536.330	3.604.549	3.959.725
	Unit	2.185.190	1.987.713	1.183.443	678.637
	MMBTU	13.188.848	8.800.934	7.820.960	11.520.303
	Ekor Animals	212.757	158.756	206.368	105.329
Total Arus Barang Non Petikemas Total Non-Container Traffic	Ton	169.853.408	159.727.836	146.200.809	163.342.560
	M³	6.575.384	5.604.518	4.515.637	4.682.378
	Unit	2.648.979	2.441.155	1.520.794	942.645
	MMBTU	13.188.848	8.800.934	7.820.960	11.520.303
	Ekor Animals	563.244	503.694	635.120	545.403
ARUS PENUMPANG PASSENGER TRAFFIC					
Luar Negeri Overseas					
Embarkasi Embarkation	Orang People	704.275	383.533	338	184.785
Debarkasi Debarcation	Orang People	599.919	304.151	1.538	198.668
Jumlah Luar Negeri Total Overseas	Orang People	1.304.194	687.684	1.876	383.453
Dalam Negeri Domestic					
Embarkasi Embarkation	Orang People	8.560.921	7.201.720	4.085.873	3.417.027
Debarkasi Debarcation	Orang People	8.185.817	7.139.480	3.969.156	3.430.142
Jumlah Dalam Negeri Total Domestic	Orang People	16.746.738	14.341.200	8.055.029	6.847.169
Jumlah Total	Orang People	18.050.932	15.028.884	8.056.905	7.230.622
JASA LAINNYA OTHER SERVICES					
Pengusahaan Properti Property Operations					
Pengusahaan Lahan Land Concession					
Sewa Rental	M ²	15.827.285	13.741.662	33.742.879	18.534.151
Throughput Fee/Kontribusi Throughput Fee/Contribution	Ton	10.885.631	5.224.184	9.178.471	3.474.643
Pengusahaan Bangunan Building Business	M²	159.690	122.679	877.833	146.490
Konsolidasi dan Distribusi Barang Consolidation and Goods Distribution	Paket Package	3.306.444	2.581.983	441.737	275.537



Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020
Pengusahaan Air/Listrik Water/Electricity Business					
Pengusahaan Air Water Business			-	3.639.497	13.188.280
Pengusahaan Air Kapal Ship Water Business					
Sumber yang diusahakan Sources Worked on	Ton	2.090.863	1.777.638	2.318.058	882.457
Sumber yang dikerjasamakan Sources Collaborated on	Ton	1.839.286	241.803	25.767	571.082
Pengusahaan Air Umum Public Water Business					
Sumber yang diusahakan Sources Worked on	Ton	676.805	404.422	571.421	313.498
Sumber yang dikerjasamakan Sources Collaborated on	Ton	475.462	218.498	213.065	216.443
Pengusahaan Listrik Electricity Business	KWh	41.943.130	41.982.517	43.806.538	45.400.979

INFORMASI SAHAM STOCK INFORMATION

Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebanyak 40.575.584.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp40.575.584.000.000.000.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo belum mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Sedangkan informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Issued and fully paid capital as of December 31, 2023 and 2022 was 40,575,584,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share, so the total issued and fully paid capital value was Rp40,575,584,000,000,000.

As of December 31, 2023, Pelindo has not listed its shares on the stock exchange. Therefore, there is no information to report on stock price, stock market capitalization, and stock trading volume. The share capital information for the last two years is presented as follows:

Tabel Harga Saham
Share Price

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022
Modal Saham Share Capital	40.575.584.000	40.575.584.000

AKSI KORPORASI

Pada tahun 2023, Pelindo tidak melakukan Aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

CORPORATE ACTIONS

In 2023, Pelindo did not carry out corporate actions related to activities that affected the number of outstanding shares, including stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares and changes in the nominal value of shares.

TEMPORARY SHARE TRADING SUSPENSION AND/OR DELISTING OF SHARE LISTING ACTIONS

Up until December 31, 2023, Pelindo was not subjected to sanctions for temporary suspension of share trading and/or delisting of shares.



INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN /ATAU OBLIGASI KONVERSI

BONDS, SUKUK AND/OR CONVERTIBLE BOND INFORMATION

INFORMASI OBLIGASI

BOND INFORMATION

Tabel Informasi Obligasi Pelindo
Pelindo Bonds Information

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date Issued	Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (miliar) Amount of Bonds (billion)	Harga Penawaran Offering Price	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
										2023	2022	
1.	Obligasi Domestik (PIGN C) Domestic Bond (PIGN C)	21 Juni 2016 June 21, 2016	7 Tahun 7 years	IDR	400.000	100%	21 Juni 2023 June 21, 2023	9,50%	Belum Lunas Not yet Paid	idAAA	idAAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
2.	Obligasi Domestik (PIGN D) Domestic Bond (PIGN D)	21 Juni 2016 June 21, 2016	10 Tahun 10 years	IDR	50.000	100%	21 Juni 2026 June 21, 2026	9,75%	Belum Lunas Not yet Paid	idAAA	idAAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
3.	Obligasi Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	10 Tahun 10 years	USD	1.100	98,99%	5 Mei 2025 May 5, 2025	4,25%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa2 (Stable outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3(Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	The Bank of New York Mellon
4.	Obligasi Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	30 Tahun 30 years	USD	500	98,17%	5 Mei 2025 May 5, 2025	5,38%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa2 (Stable outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3(Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	The Bank of New York Mellon
5.	Obligasi Global Bond	2 Mei 2018 May 2, 2018	5 Tahun 5 years	USD	500	98,90%	2 Mei 2023 May 2, 2023	4,50%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa2 (Stable outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3(Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	The Bank of New York Mellon
6.	Obligasi Global Bond	1 Oktober 2014 October 1, 2014	10 Tahun 10 years	USD	500	99,41%	1 Oktober 2024 October 1, 2024	4,88%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa2 (Stable outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3(Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	The Bank of New York Mellon
7.	Obligasi Domestik (PIKI A) Domestic Bond (PIKI A)	5 Juli 2018 July 5, 2018	5 Tahun 5 years	IDR	380.000	100%	5 Juli 2023 July 5, 2023	8,00%	Belum Lunas Not yet Paid	idAAA	idAAA	Bank Tabungan Negara (Persero)

Tabel Informasi Obligasi Pelindo
Pelindo Bonds Information

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date Issued	Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (miliar) Amount of Bonds (billion)	Harga Penawaran Offering Price	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
										2023	2022	
8.	Obligasi Domestik (PIKI B) Domestic Bond (PIKI B)	5 Juli 2018 July 5, 2018	7 Tahun 7 years	IDR	1.820.000	100%	5 Juli 2025 July 5, 2025	9,15%	Belum Lunas Not yet Paid	idAAA	idAAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
9.	Obligasi Domestik (PIKI C) Domestic Bond (PIKI C)	5 Juli 2018 July 5, 2018	10 Tahun 10 years	IDR	800.000	100%	5 Juli 2028 July 5, 2028	9,35%	Belum Lunas Not yet Paid	idAAA	idAAA	Bank Tabungan Negara (Persero)

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo belum menerbitkan sukuk.

SUKUK INFORMATION

As of December 31, 2023, Pelindo has not issued sukuk.

OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo belum menerbitkan obligasi konversi.

CONVERTIBLE BONDS

As of December 31, 2023, Pelindo has not issued convertible bonds.



INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ON OTHER FUNDING SOURCES

Per 31 Desember 2023, Pelindo tidak memiliki sumber pendanaan lainnya.

As of December 31, 2023, Pelindo has no other funding sources.

PERISTIWA PENTING IMPORTANT EVENTS



16 Januari 2023 | January 16, 2023



Perjanjian kerja sama antara Pelindo dengan Young Tai Berhard
Cooperation agreement between Pelindo and Young Tai Berhard



7 Maret 2023 | March 7, 2023



Kerja sama kapal penundaan Pelindo dan Pertamina INT Ship
Ship delay collaboration between Pelindo and Pertamina INT Ship



20 Januari 2023 | Januari 20, 2023



Welcoming Representative University of Qulu Finland



11 April 2023 | April 11, 2023



Kerja sama Pelindo dengan BNPT
Pelindo collaborates with BNPT



31 Januari 2023 | Januari 31, 2023



Pelindo mendukung efisiensi logistik dengan optimalisasi layanan integrasi multimoda
Pelindo supports logistics efficiency by optimizing multimodal integration services



17 April 2023 | April 17, 2023



Mudik bersama BUMN Pelindo
Mudik wuth BUMN Pelindo



11 Mei 2023 | May 11, 2023



Pelindo turut mendorong UMK mendunia melalui Pameran SME's Hub di KTT ASEAN 2023
Pelindo encourages MSEs to go global through the SME's Hub Exhibition at the 2023 ASEAN Summit



2 September 2023 | September 2, 2023



Pelindo gandeng Pertamina bangun Terminal Energi Terbarukan
Pelindo collaborates with Pertamina to build a Renewable Energy TerminalShip



12 Juli 2023 | July 12, 2023



Kerja sama Pelaksanaan dan Penerapan Sistem Data Identifikasi Truk Secara Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Wilayah Kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO)
Cooperation for the Implementation and Application of a Single Truck Identification Data System (*Single Truck Identification Data*) in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Work Area between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO)



1 Oktober 2023 | October 1, 2023



Hari Pelindo
Pelindo Day



3 Oktober 2023 | October 3, 2023



Pelindo menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN
Pelindo signs a cooperation agreement with the Ministry of ATR/BPN



16 Oktober 2023 | October 16, 2023



BMF Indonesia Belanda
Indonesia and the Netherlands BMF



10 November 2023 | November 10, 2023



Penandatanganan PKB
Signing of the PKB



30 Oktober 2023 | October 30, 2023



Pelindo Pelindo Regional 3 Benoa sukses sandarkan *Cruise*
jumbo berukuran 317 Meter yaitu *Cruise Celebrity Solstice*
Pelindo Regional 3 Benoa successfully anchors a jumbo cruise
measuring 317 meters, called Cruise Celebrity Solstice



14 November 2023 | November 14, 2023



APA Meeting di Bali
APA Meeting in Bali





10 Desember 2023 | December 10, 2023



Penghargaan Kemenkomarves untuk Pelabuhan Indonesia
Kemenkomarves Award for Indonesian Ports

18 Desember 2023 | December 18, 2023



Perjanjian kerja sama dengan Zhejiang Seaport
Cooperation agreement with Zhejiang Seaport

14 Desember 2023 | December 14, 2023



Perjanjian awal kerja sama dengan Mitra Strategis di Bali
Maritime Tourism Hub (BMTH)
Initial cooperation agreement with Strategic Partners at Bali
Maritime Tourism Hub (BMTH)


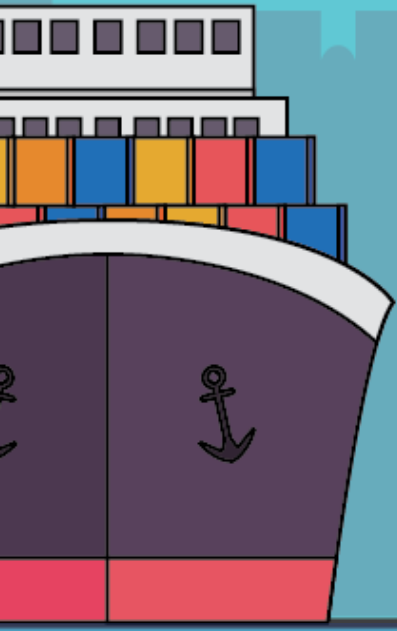






Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

Board of Directors Report and Board of Commissioners Report



Pada tahun 2023 Perseroan berhasil meningkatkan pendapatan operasi menjadi sebesar Rp31,02 triliun, meningkat 4,44% dibandingkan dengan tahun 2022. Seiring dengan peningkatan pendapatan operasi tersebut, laba tahun berjalan juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp4,01 triliun, meningkat 2,66% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3,91 triliun.

In 2023, the Company's operating income increased to Rp31.02 trillion, an increase of 4.44% compared to 2022. With the increase in operating income, the profit for the year also increased to Rp4.01 trillion, an increase of 2.66% compared to Rp3.91 trillion in 2022.



LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Dengan menerapkan strategi bisnis yang telah ditetapkan Perseroan, pada tahun 2023 Perseroan telah mampu bertahan di tengah kondisi perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih. Pencapaian tersebut terlihat dari terpenuhinya target pada tahun 2023.

By implementing this business strategy, in 2023, the Company survived despite the economic conditions that have not yet fully recovered by following the Company's pre-determined 2023 business strategies, and achieving the targets set.

ARIF SUHARTONO

Direktur Utama
President Director



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, Pelindo mampu melalui tantangan di tahun 2023 di tengah kondisi perekonomian masih mengalami ketidakpastian. Dengan menerapkan strategi *Business and Partnership*, di tahun 2023 Perseroan mampu mencatatkan kinerja yang baik dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan jalannya kepengurusan Perseroan untuk Tahun buku 2023 yang meliputi kinerja Perseroan, analisis prospek Perseroan, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

ANALISIS ATAS KINERJA PERSEROAN

Pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan dari tahun 2022 dengan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 3,1% (estimasi *International Monetary Fund*, Januari 2024). *Advanced economies* mengalami tekanan yang sangat besar dan tumbuh lebih rendah hanya sebesar 1,6% di tahun 2023 atau turun 1% dibandingkan pertumbuhan tahun 2022, sedangkan *Emerging Market and Developing Economies* (EMDE) masih dapat tumbuh sebesar 4,1%. Turunnya angka pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 terjadi disebabkan oleh ketidakpastian kondisi geopolitik yang masih berlangsung dan pengetatan kebijakan ekonomi untuk menekan inflasi. Namun pada Negara Berkembang Asia (*Emerging and Developing Asia*) ekonomi dapat tumbuh sebesar 5,4% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,5%. Angka ini lebih besar dari perkiraan sebelumnya (*Economic Outlook* Oktober 2023) yang sebesar 5,2%.

Dari sisi perekonomian nasional, ekonomi nasional tumbuh 5,05% pada tahun 2023, mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Namun angka pertumbuhan ini tetap menunjukkan ketangguhan ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh pada angka sekitar 5% di tahun 2024.

Dari sisi industri pelabuhan, terdapat perlambatan angka pertumbuhan arus perdagangan, bahkan pada sektor dengan pertumbuhan tinggi seperti petikemas. Menurut Drewry, arus

With praise and gratitude we pray to the presence of God Almighty, for the abundance of His grace upon all of us, which enabled Pelindo to overcome the challenges in 2022 and record a good performance even though the economy was still experiencing uncertainty. By implementing the Business and Partnership strategy, in 2023 the Company recorded a good performance and achieved the targets set.

On this occasion, please allow us to submit a report on the Company's management for the 2023 Fiscal year, which includes the Company's performance, analysis of the Company's prospects, developments in corporate governance implementation, performance assessments of the Committees under the Board of Directors, and changes in the Board of Directors' composition.

ANALYSIS OF THE COMPANY'S PERFORMANCE

Global economic growth saw a slowdown from 2022 with growth in 2023 of 3.1%. (International Monetary Fund estimate, January 2024). In 2023, advanced economies experienced enormous pressure and only grew by 1.6%, a decrease of 1% compared to 2022, while Emerging Market and Developing Economies (EMDE) grew by 4.1%. The decline in world economic growth figures in 2023 was due to the ongoing uncertainty in geopolitical conditions and tightening economic policies to suppress inflation. However, in Emerging and Developing Asia, the economy grew by 5.4%, higher than the previous year's 4.5%. This figure was greater than the previous estimate (*Economic Outlook* October 2023) of 5.2%.

The national economy grew by 5.05% in 2023, a slower growth compared in 2022 which experienced growth of 5.31%. This growth figure reflected the resilience of the national economy in facing global uncertainty, and the IMF projects that Indonesia's economy will continue to grow at around 5% in 2024.

From the port industry perspective, there was a slowdown in the growth rate of trade traffic, even in sectors with high growth such as containers. According to Drewry, Indonesia's

petikemas internasional Indonesia diproyeksikan akan tumbuh 3,2% secara *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) dari tahun 2021 sampai tahun 2035. Angka proyeksi pertumbuhan tersebut didasarkan dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan didorong oleh pertumbuhan dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Dalam menghadapi kondisi perekonomian dan industri pelabuhan tersebut, Perseroan telah menetapkan berbagai strategi usaha yang diperlukan. Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan, Direksi telah memimpin penyusunan strategi dan kebijakan strategis tersebut yang dituangkan dalam Strategi Jangka Panjang periode 2021-2025. Direksi memastikan implementasi strategi dengan melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan melalui evaluasi laporan-laporan yang dilakukan secara berkala, khususnya Laporan Manajemen Triwulanan. *Monitoring* implementasi strategi yang telah dilakukan oleh Direksi berhasil telah berhasil mendorong pencapaian target kinerja Perseroan.

Perseroan telah memformulasikan tema strategis yakni menjadi pilar-pilar utama bagi rumah strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk periode 2021-2025. Tema strategis juga menjadi acuan untuk mendefinisikan sub-tema strategis bagi Pelindo hingga tahun 2025 yang akan menjadi basis dalam mendefinisikan inisiatif strategis. Untuk mendukung ketercapaian pilar strategis utama, telah dirancang juga *key enablers* yang harus dipenuhi. *Key enablers* merupakan sekumpulan tindakan dan aktivitas utama yang akan mendorong kelancaran implementasi strategi dan memperkuat fondasi Pelindo dalam mencapai visinya sebagai pemimpin ekosistem maritim terintegrasi yang berkelas dunia. Visi, Misi, Pilar Strategi dan *Key Enablers* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang diwujudkan dalam bentuk rumah strategi perusahaan.

Untuk mendukung ketercapaian pilar strategis utama, telah dirancang juga *key enablers* yang harus dipenuhi. *Key enablers* merupakan sekumpulan tindakan dan aktivitas utama yang akan mendorong kelancaran implementasi strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan memperkuat fondasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mencapai visinya sebagai pemimpin ekosistem maritim Indonesia yang berkelas dunia.

Penjelasan dari masing-masing komponen rumah strategis adalah sebagai berikut:

1. Rumah strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki visi untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi dan berkelas dunia, dan misi untuk mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Transformasi Pelabuhan Kelas Dunia. Pilar strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai perusahaan penyedia jasa kepelabuhan kelas dunia.
3. Penguatan Ekosistem Logistik. Pilar strategi kedua dilakukan untuk membuat hubungan dengan pemain ekosistem logistik laut dan darat agar dapat mengoptimalkan biaya logistik nasional.

international container traffic is projected to grow 3.2% at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) from 2021 to 2035. The projected growth figure is based on Gross Domestic Product (GDP) growth and is driven by growth from Java and Sumatra.

In facing the economic and port industry conditions, the Company instigated the necessary business strategies. In formulating the Company's strategies and strategic policies, the Board of Directors was guided by the strategies and strategic policies outlined in the Long Term Strategy for the 2021-2025 period. To ensure the strategies effectiveness the Board of Directors periodically carries out evaluations through reports, including the Quarterly Management Report. The Board of Directors' monitoring of the strategies has succeeded in encouraging the achievement of the Company's performance targets.

The Company has formulated a strategic theme, which includes the main pillars for the PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s strategy house for the period 2021-2025. The strategic theme is also a reference for defining strategic sub-themes for Pelindo until 2025 that will become the basis for defining strategic initiatives. To support the achievement of the main strategic pillars, key enablers have also been designed that must be met. Key enablers are a set of main actions and activities to encourage smooth strategy implementation and strengthen Pelindo's foundation in achieving its vision as a world-class integrated maritime ecosystem leader. The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Vision, Mission, Strategy Pillars and Key Enablers are realized through the Corporate strategy house.

To support the achievement of the main strategic pillars, key enablers have also been designed that must be met. Key enablers are a set of main actions and activities to encourage the smooth strategy implementation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), and strengthen the foundation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in achieving its vision as a world-class leader of Indonesia's maritime ecosystem.

An explanation of each component of a strategic house is as follows:

1. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s strategy house vision is to become a leader in an integrated and world-class maritime ecosystem, and a mission to create a national maritime ecosystem network through increasing network connectivity and service integration to support Indonesia's economic growth.
2. World Class Port Transformation. This strategic pillar is carried out to increase PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s capabilities as a world-class port service provider company.
3. Strengthening the Logistics Ecosystem. This second strategic pillar is to create relationships with sea and land logistics ecosystem businesses to optimize national logistics costs.



4. Efisiensi *Supply Chain* Maritim. Pilar strategis ketiga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi *supply chain maritim* di Indonesia.
5. Peningkatan *Value* Perusahaan. Pilar strategis keempat dilakukan untuk meningkatkan *value* PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dengan cara memperkuat struktur keuangan perusahaan agar dapat terciptanya sistem keuangan yang *prudent* dan stabil, mengoptimalkan pengelolaan *asset*, dan memfokuskan perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara vertikal dan horizontal dengan memanfaatkan kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
6. *Enablers*. Seluruh pilar strategis didukung oleh adanya *enablers* yang harus direalisasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Untuk memastikan agar proses pencapaian sasaran sesuai dengan strategi dan visi yang telah ditetapkan untuk 2025, maka perlu disusun *roadmap* (peta jalan) yang berfungsi sebagai *guidance* (panduan) yang akan memberikan gambaran terkait proses, tahapan, dan capaian yang harus diprioritaskan untuk mencapai sasaran akhir atau visi perusahaan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menyusun *roadmap* hingga akhir periode RJPP dengan sasaran Perusahaan yang hendak diraih akan menjadi acuan dalam proses implementasi strategi pada setiap tahunnya. Adapun *roadmap* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. 2021 – 2022: *Business Alignment and Integration*. Setelah proses penggabungan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di tahun 2021, maka tahun 2021 hingga 2022 akan menjadi fase *business alignment and integration*. Fase ini akan berfokus pada penyesuaian bisnis paska integrasi melalui standarisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan, melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis, serta reorganisasi perusahaan dan pengembangan budaya terintegrasi.
2. 2023 – 2024: *Business Expansion and Partnership*. Pada tahun 2023 – 2024, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan mulai fokus untuk melakukan ekspansi dan menjalin kerja sama bisnis. Pada fase ini, Perseroan berfokus pada peningkatan pengembangan bisnis melalui *Strategic Partnership* (i.e. INA), kolaborasi dengan pelayaran domestik dan global untuk peningkatan konektivitas laut, serta pengembangan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan pelaku industri logistik darat.
3. 2025: *World Class Port Ecosystem Integrator*. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan fokus mewujudkan *World Class Port Ecosystem Integrator* melalui, persiapan rencana ekspansi regional dan internasional PT Pelabuhan Indonesia (Persero), peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis kepelabuhanan dan bisnis pendukungnya serta penguatan dukungan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan kawasan industri untuk peningkatan arus barang.

To ensure that the process of achieving targets is in accordance with the strategy and vision set for 2025, it was necessary to prepare a roadmap that functions as a guide to provide an overview of the processes, stages and achievements that must be prioritized to achieve the Company's final targets or vision. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has prepared a roadmap until the end of the RJPP period with the Company's targets to be achieved becoming a reference in the strategy implementation process each year. The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) roadmap in question is as follows:

1. 2021 – 2022: *Business Alignment and Integration*. Following the merger of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, and Pelindo IV to become PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2021, 2021 to 2022 will be the phase of business alignment and integration, which will focus on post-integration business alignment through standardization and operational commercial integration to improve service quality, make integrated investments for business development, as well as Company reorganization and development of an integrated culture.
2. 2023 – 2024: *Business Expansion and Partnership*. In 2023 – 2024, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will begin to focus on expanding and establishing business collaborations. In this phase, the Company will focus on improving business development through Strategic Partnerships (i.e. INA), collaboration with domestic and global shipping to increase maritime connectivity, as well as developing connectivity and logistics ecosystems through collaboration with land logistics industry players.
3. 2025: *World Class Port Ecosystem Integrator*. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) will focus on becoming a *World Class Port Ecosystem Integrator* through preparing regional and international expansion plans for PT Pelabuhan Indonesia (Persero), increasing the use of digital technology in the port business, and supporting businesses as well as strengthening connectivity support and logistics ecosystem through collaboration with industrial estates to increase goods traffic.

Berdasarkan *roadmap* tersebut, tahun 2023-2024 masuk dalam fase *business expansion and partnership* yang berfokus pada:

1. Peningkatan pengembangan bisnis melalui *strategic partnership*.
2. Kolaborasi dengan pelayaran domestik dan global untuk peningkatan konektivitas laut.
3. Pengembangan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan pelaku industri logistik darat.

Dengan menerapkan strategi bisnis tersebut, pada tahun 2023 Perseroan telah mampu bertahan di tengah kondisi perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih. Pencapaian tersebut terlihat dari terpenuhinya target pada tahun 2023. Dari sisi operasional, capaian arus kapal dalam satuan *Call* tahun 2023 mencapai 100,42% dari target RKAP. Sedangkan untuk satuan GT tercapai target RKAP yakni sebesar 100,42%. Arus barang non petikemas dalam satuan Ton tahun 2023 mencapai 105,20% di atas target RKAP. Arus barang non petikemas satuan M³ mencapai 125,46%, yang berada di atas target RKAP. Arus barang non petikemas dalam satuan Unit berhasil melampaui target RKAP yang mencapai 140,13%. Arus barang non petikemas satuan unit terealisasi 13.188.848 unit atau 183,61% dari anggaran tahun 2023 sebesar 8.760.000 unit. Arus hewan terealisasi 563.244 Ekor atau 105,63% bila dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar 533.205 Ekor. Arus penumpang terealisasi 18.050.932 Orang atau 134,04% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar 13.466.830 Orang.

Dari sisi keuangan, total aset terealisasi sebesar Rp118,34 triliun atau tercapai 105,59% dari RKAP tahun 2023. Hal ini didukung oleh capaian aset lancar sebesar 113,99% dan aset tidak lancar sebesar 104,00%. Meskipun pendapatan usaha berada sedikit di bawah target (97,48%), namun laba tahun berjalan berhasil melampaui target mencapai 105,05% dengan realisasi sebesar Rp4,01 triliun.

Based on the roadmap, in 2023-2024 we will enter the business expansion and partnership phase that focuses on:

1. Increasing business development through strategic partnerships.
2. Collaborating with domestic and global shipping to increase maritime connectivity.
3. Developing of connectivity and logistics ecosystem through collaboration with land logistics industry players.

By implementing this business strategy, in 2023 the Company survived despite the economic conditions that have not yet fully recovered. This achievement can be seen in the fulfillment of the targets in 2023. From the operational side, in 2023 ship traffic in Call units reached 100.42% of the RKAP target, and in GT units, the RKAP target was achieved, and reached 100.42%. Non-container goods traffic in tons in 2023 reached 105.20% above the RKAP target, and non-container goods traffic in M³ units reached 125.46%, above the RKAP target. The non-container goods traffic in units exceeded the RKAP target with 140.13%. The non-container goods traffic in Unit units reached 13,188,848 Unit, or 183.61% of the 2023 budget of 8,760,000 Unit. The animal traffic reached 563,244 heads, or 105.63% of the 2023 budget of 533,205 heads. The passenger traffic reached 18,050,932 people, or 134.04% of the 2023 budget of 13,466,830 people.

From the financial side, total assets stood at Rp118.34 trillion, or 105.59% of the 2023 RKAP. This was due to the achievement of current assets of 113.99% and non-current assets of 104.00%. Even though operating income was slightly below the target (97.48%), profit for the year exceeded the target by 105.05% with a realization of Rp4.01 trillion.



Pada tahun 2023, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja operasional yang baik. Dari sisi operasi kepelabuhan, realisasi arus kapal dalam satuan unit tahun 2023 mencapai 303.221 *Call*, meningkat 4,21% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 290.970 *Call*. Demikian pula dengan realisasi arus kapal dalam satuan GT tahun 2023 sebesar 1.286.040.750 GT, meningkat 7,01% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1.201.814.534 GT. Realisasi arus petikemas dalam satuan Box tahun 2023 sebesar 13.573.959 Box, meningkat 2,12% dibandingkan tahun 2022 sebesar 13.292.102 Box. Demikian pula dengan arus petikemas dalam satuan TEUs yang meningkat sebesar 2,54%, dari 17.220.312 TEUs di tahun 2022 menjadi 17.657.327 TEUs di tahun 2023. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Ton tahun 2023 mencapai 169.853.408 Ton, meningkat 6,34% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 159.727.836 Ton. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan M³ tahun 2023 mencapai 6.575.384 M³, meningkat 17,32% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5.604.518 M³. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan unit tahun 2023 mencapai 2.648.979 Unit, meningkat 8,51% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 2.441.155 Unit. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan MMBTU tahun 2023 mencapai 13.188.848 MMBTU, meningkat 49,86% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 8.800.934 MMBTU. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Ekor tahun 2023 mencapai 563.244 Ekor mengalami kenaikan 11,82% dibandingkan tahun 2022 mencapai 503.694 Ekor.

Dari sisi arus penumpang, realisasi arus penumpang pada tahun 2023 sebesar 18.050.932 Orang, meningkat 20,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15.028.884 Orang. Selain itu, pada jasa lainnya, realisasi produksi perusahaan properti untuk persewaan lahan di tahun 2023 dalam satuan M² mencapai 15.827.285 M², meningkat 15,18% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13.741.662 M². Realisasi produksi Perusahaan TBAL untuk perusahaan bangunan di tahun 2023 dalam satuan M² mencapai 159.690 M², meningkat 30,17% dibandingkan tahun 2022 sebesar 122.679 M². Realisasi produksi perusahaan air kapal untuk sumber yang diusahakan tahun 2023 dalam satuan Ton mencapai 2.090.863 Ton, meningkat 17,62% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mencapai 1.777.638 Ton. Demikian pula dengan perusahaan air umum dari sumber yang dikerjasamakan tahun 2023 dalam satuan Ton mencapai 475.462 Ton, meningkat 117,60% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar 218.498 Ton.

Dari sisi pelayanan jasa rupa-rupa, realisasi pas penumpang di tahun 2023 dalam satuan Lembar mencapai 8.879.946 lembar, meningkat 64,80% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 5.388.316 Lembar. Realisasi pas harian orang di tahun 2023 dalam satuan Lembar mencapai 2.315.709 Lembar, meningkat 8,45% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 2.135.350 Lembar. Realisasi produksi kerja sama alat di tahun 2023 dalam satuan Jam mencapai 78.598 Jam, meningkat 53,08% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 51.346 Jam.

In 2023, the Company recorded a good operational performance. In terms of port operations, the realization of ship traffic in units in 2023 reached 303,221 calls, an increase of 4.21% compared to 290,970 calls in 2022. Likewise, the realization of ship traffic in GT units in 2023 reached 1,286,040,750 GT, an increase of 7.01% compared to 1,201,814,534 GT in 2022. Realized container flows in Box units in 2023 reached 13,573,959 Boxes, an increase of 2.12% compared to 13,292,102 Boxes in 2022. Likewise, container traffic in TEUs increased by 2.54%, from 17,220,312 TEUs in 2022 to 17,657,327 TEUs in 2023. The non-container goods traffic in tons in 2023 reached 169,853,408 tons, an increase of 6.34% compared to 159,727,836 tons in 2022. The non-container goods traffic in M³ units in 2023 reached 6,575,384 M³, an increase of 17.32% compared to 5,604,518 M³ in 2022. Non-container goods traffic in units in 2023 reached 2,648,979 units, an increase of 8.51% compared to 2,441,155 units in 2022. Non-container goods traffic in MMBTU units in 2023 reached 13,188,848 MMBTU, an increase of 49.86% compared to 8,800,934 MMBTU in 2022. Non-container goods traffic in animal heads units in 2023 reached 563,244, an increase of 11.82% compared to 503,694 animal heads in 2022.

The passenger traffic in 2023 reached 18,050,932 people, an increase of 20.11% compared to the previous year's 15,028,884 people. In other services, the property business production for land rental in 2023 in M² units reached 15,827,285 M², an increase of 15.18% compared to 13,741,662 M² in 2022. TBAL Enterprises' production realization for building operations in 2023 in M² units reached 159,690 M², an increase of 30.17% compared to 122,679 M² in 2022. The realization of ship water production for commercial sources in 2023 in tons reached 2,090,863 tons, an increase of 17.62% compared to 1,777,638 ton in 2022. Likewise, the exploitation of public water from cooperative sources in 2023 in tons reached 475,462 tons, an increase of 117.60% compared to 218,498 tons in 2022.

In terms of other services, the realization of passenger passes in 2023 in units reached 8,879,946 passes, an increase of 64.80% compared to 5,388,316 passes in 2022. The realization of daily passes for people in 2023 in units reached 2,315,709 passes, an increase of 8.45% compared to 2,135,350 passes in 2022. The realization of equipment collaboration production in 2023 in hours reached 78,598 hours, an increase of 53.08% compared to 51,346 hours in 2022.

Selain kinerja operasional, Perseroan juga telah mencatatkan kinerja keuangan yang baik. Meskipun aset pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022, namun Perseroan berhasil meningkatkan kinerja keuangan pada sisi pendapatan operasi dan laba tahun berjalan. Pendapatan operasi tahun 2023 mencapai Rp31,02 triliun, meningkat 4,44% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp29,70 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan pendapatan operasi yang berasal dari pelayanan jasa kapal sebesar Rp888,47 miliar, pelayanan terminal petikemas sebesar Rp527,16 miliar serta pelayanan jasa terminal sebesar Rp344,43 miliar. Seiring dengan peningkatan pendapatan operasi tersebut, laba tahun berjalan juga mengalami peningkatan. Laba periode berjalan tahun 2023 sebesar Rp4,01 triliun, meningkat 2,66% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3,91 triliun. Dengan meningkatnya laba tahun berjalan, maka ekuitas Perseroan juga mengalami peningkatan. Ekuitas tahun 2023 mencapai Rp46,90 triliun, meningkat 9,56% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp42,80 triliun.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

Berbagai capaian positif yang diperoleh di tahun 2023 tidak lepas dari kemampuan Perseroan dalam menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain, *gap* pengembangan SDM dan organisasi yang terlihat dari kurang cepatnya unit kerja untuk beradaptasi dengan perubahan model bisnis baru dan kompetensi SDM belum merata untuk semua pelabuhan ketika integrasi dilakukan. Dalam menghadapi kendala tersebut, Perseroan telah melakukan pengembangan kapabilitas dan kualitas SDM. Perseroan memberikan program pembelajaran kepada seluruh pegawainya antara lain, program pendidikan, program pelatihan dan program magang. Di samping itu, Perseroan juga menghadapi *gap* teknologi yaitu masih terbatasnya penerapan teknologi yang terintegrasi untuk mendukung proses operasional. Dalam menghadapi kendala tersebut, Perseroan telah melakukan penguatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (termasuk pengembangan integrasi sistem perusahaan (Ops dan Non-Ops) serta integrasi dengan sistem *stakeholders*/eksternal).

Perseroan juga menghadapi *gap* kapabilitas bisnis yaitu belum berkembangnya kapabilitas dan kemampuan layanan di segmen logistik, *hinterland development*, *marine*, serta *port services* dengan baik. Untuk menghadapi kendala tersebut, Perseroan melakukan kerja sama dan juga potensi integrasi sistem atau layanan dengan pemain logistik laut dan darat sehingga biaya logistik dapat dioptimalkan, serta menjalin kerja sama dengan kawasan industri/logistik untuk mendorong peningkatan arus barang. Kerja sama dengan kawasan industri/logistik ini dilakukan untuk mendukung konektivitas dengan bagian *hinterland*, serta mempermudah pemberian layanan logistik *end-to-end* bagi pelaku industri. Adanya hubungan dengan pelaku kawasan industri yang berada di satu daerah dengan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berpotensi meningkatkan pelayanan bagi pelanggan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dari sisi kecepatan dan kemudahan.

Other than its operational performance, the Company also recorded a good financial performance. Even though assets in 2023 decreased from 2022, the Company improved its financial performance in terms of operating revenues and profit for the year. Operating revenues in 2023 reached Rp31.02 trillion, an increase of 4.44% compared to Rp29.70 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in operating revenues from ship services of Rp888.47 billion, container terminal services of Rp527.16 billion, and terminal services of Rp344.43 billion. With this increase in operating revenues, profit for the year also increased. Profit for the current period in 2023 was Rp4.01 trillion, an increase of 2.66% compared to Rp3.91 trillion in 2022. With the increase in profit for the current year, the Company's equity also increased, and in 2023 reached Rp46.90 trillion, an increase of 9.56% compared to Rp42.80 trillion in 2022.

OBSTACLES FACED BY THE COMPANY

The positive achievements in 2023 were thanks to the Company's ability to face various obstacles. These obstacles included gaps in HC and organizational development, as seen in the lack of speed the work units adapted to changes in new business models, and the fact that HC competencies were not evenly distributed across all ports when integration is carried out. To address this obstacle, the Company has developed its HC capabilities and quality by organizing learning programs for all its employees, which include education programs, training programs and internship programs. In addition, the Company also faced a technology gap, namely the limited application of integrated technology to support operational processes. To address this obstacle, the Company has strengthened the use of technology and information systems (including developing Company system integration (Ops and Non-Ops) as well as integration with stakeholders/external systems).

The Company also faced a business capability gap, namely underdeveloped capabilities and service capabilities in the logistics, hinterland development, marine and port services segments. To address this obstacle, the Company collaborates and also potentially integrates systems or services with sea and land logistic companies so that logistics costs can be optimized, and has established cooperation with industrial/logistics areas to encourage increased goods traffic. This collaboration with industrial/logistics areas is carried out to support connectivity with parts of the hinterland, as well as to facilitate the provision of end-to-end logistics services for industrial companies. The existence of relationships with industrial estate companies in the same area as the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ports has the potential to improve services for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) customers in terms of speed and convenience.



ANALISIS PROSPEK USAHA

Tahun 2024 akan diwarnai oleh tantangan global, proyeksi Internasional Monetary Fund (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,9%, dipicu oleh perang di Ukraina, inflasi tinggi, dan kenaikan suku bunga. IMF memperkirakan inflasi global akan tetap tinggi pada tahun 2024, sebesar 4,1%. Dari sisi arus petikemas global, *Container Trade Statistics* (CTS) memproyeksikan arus petikemas global sebesar 3,5% pada tahun 2024 dan 4,0% pada tahun 2025.

Selain tantangan global, Indonesia menghadapi tantangan domestik khusus pada tahun 2024, di antaranya pemilu presiden dan legislatif yang akan digelar pada tahun 2024 dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan ekonomi yang selanjutnya dapat memengaruhi keputusan investasi dan belanja konsumen, kenaikan harga pangan dan energi global dapat menyebabkan inflasi di Indonesia meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 yang disebabkan meningkatnya belanja pemerintah untuk persiapan pemilu dan pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan beban utang negara, serta Rupiah diperkirakan berpotensi melemah terhadap dolar AS pada tahun 2024 sehingga dapat menyebabkan harga barang-barang impor menjadi lebih mahal dan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diproyeksikan dalam kisaran 4,7%-5,5%

Namun demikian, terkait dengan perkembangan industri pelabuhan tahun 2024, arus petikemas global diperkirakan tumbuh antara 0 sampai 1% pada tahun 2023. Menurut *Container Trade Statistics* (CTS), arus petikemas global tumbuh sebesar 0,2% pada tahun 2023 secara yoy dengan total volume akhir sebesar 173,4 juta TEUs. Hal ini tentunya akan menjadi peluang bagi Pelindo untuk dapat meningkatkan pertumbuhan di masa yang akan datang.

Dalam menghadapi tahun 2024, Perseroan melakukan analisis secara internal untuk mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang dapat dicapai dengan berbekal keunggulan yang dimiliki. Pelindo memiliki beberapa kekuatan internal yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan bisnis pelabuhan di Indonesia, seperti portfolio yang terdiversifikasi, menguasai pasar petikemas di Indonesia, dan memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan *transshipment hub*. Namun, untuk dapat melakukan perencanaan strategi dan mencapai sasaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2021-2025, Perseroan tidak cukup mengandalkan kekuatan internalnya saja tetapi juga mengkalkulasi faktor eksternal yang menjadi ancaman sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan guna keberlangsungan Perseroan, sehingga perlu dilakukan Analisis Lingkungan Bisnis Perseroan dengan menggunakan *framework Strengths Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT).

BUSINESS PROSPECT ANALYSIS

2024 will be marked by global challenges, the International Monetary Fund (IMF) projections state that global economic growth will slow to 2.9%, due to the war in Ukraine, high inflation and rising interest rates. The IMF estimates that global inflation will remain high in 2024, at 4.1%. In terms of global container traffic, Container Trade Statistics (CTS) projects global container traffic to be 3.5% in 2024 and 4.0% in 2025.

Other than the global challenges, Indonesia faces special domestic challenges in 2024, including the presidential and legislative elections to be held in 2024, which can give rise to political and economic uncertainty and further influence investment decisions and consumer spending. Rising global food and energy prices can cause increases in inflation in Indonesia and reduces people's purchasing power and slows economic growth. The Government budget deficit is expected to increase in 2024 due to increased Government spending for election preparations and infrastructure development that could increase the country's debt burden, and the Rupiah is predicted to weaken against the US dollar in 2024, which will cause the price of imported goods to become more expensive, and increase production costs for the Company. Based on this, Indonesia's economic growth in 2024 is projected to be in the range of 4.7%-5.5%

However, related to the development of the port industry in 2024, global container traffic was estimated to grow between 0 and 1% in 2023. According to Container Trade Statistics (CTS), global container traffic grew by 0.2% in 2023 yoy with total volume final amount of 173.4 million TEUs. This will certainly be an opportunity for Pelindo to increase growth in the future.

To face 2024, the Company carried out internal analysis to identify business opportunities that can be achieved armed with the advantages it has. Pelindo has several internal strengths that can be used as a basis for developing the port business in Indonesia, such as a diversified portfolio, control of the container market in Indonesia, and being in a strategic location to become a transshipment hub. However, to carry out strategic planning and achieve the targets of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2021-2025, the Company cannot just rely on its internal strengths, but must also calculate external factors that are threats as well as opportunities that can be optimized for the Company's sustainability, so it was necessary to carry out an Environmental Analysis of the Company's business using a Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) framework.

Dengan melakukan analisis tersebut, Perseroan menilai bahwa kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) yang dimiliki oleh Perseroan melebihi kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Perseroan optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Perseroan memiliki prospek usaha yang baik yang juga didukung oleh kekuatan-kekuatan yang dimiliki Perseroan.

Pada tahun 2024, Perseroan memasuki fase *Business Expansion and Partnership* dengan mulai berfokus pada inisiatif pengembangan bisnis melalui *Strategic Partnership*, maupun kerja sama dan kolaborasi dengan pelaku logistik BUMN dan swasta. Salah satu prospek bisnis yang akan menjadi target Perseroan adalah potensi layanan petikemas internasional *transshipment hub* di selat Malaka. Total volume petikemas yang melalui Selat Malaka mencapai 64 juta TEUs dengan 78% nya merupakan kargo *transshipment* (berdasarkan data 2021, Roland Berger). Selaras dengan fase *Business Expansion and Partnership*, inisiatif strategis yang akan mulai dilakukan baik pada tahap perencanaan maupun tahap eksekusi pada tahun 2024 antara lain:

1. Inisiatif Strategis Tahap Perencanaan
 - a. Perencanaan ekspansi regional di bisnis pelabuhan.
 - b. Eksplorasi kerja sama untuk pengembangan *international transshipment hub*.
 - c. Pengembangan layanan operasi pelabuhan milik Kementerian/Lembaga.
 - d. Kerja sama dengan pelaku logistik BUMN dan swasta.
 - e. Eksplorasi pemanfaatan data *analytics* untuk pengembangan bisnis (*enabler*).
2. Inisiatif Strategis Tahap Pelaksanaan
 - a. Kerja sama dengan kawasan industri/logistik.
 - b. Pengembangan layanan operasi TUKS dengan bekerja sama dengan BUMN dan swasta.
 - c. Restrukturisasi organisasi dan tata kelola (*enabler*).
3. Inisiatif Strategis Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan
 - a. Digitalisasi dan sistemisasi operasi kepelabuhan.
 - b. Pengembangan infrastruktur dan peralatan pelabuhan.
 - c. Kerja sama antar pelabuhan untuk optimalisasi konsep *hub and spoke* dengan integrasi data
 - d. Sentralisasi *knowledge management* (*enabler*).
 - e. Internalisasi budaya Pelindo terintegrasi (*enabler*).

Hal tersebut sangat memberikan potensi peluang untuk mengembangkan bisnis Perseroan. Untuk kargo non petikemas, pasar arus barang domestik masih memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan pada saat ini Pelindo hanya memiliki pangsa pasar sebagian kecil dari pasar nasional. Pelindo dapat melakukan kerja sama dalam beberapa skema dengan pelabuhan non petikemas yang terdiri dari pelabuhan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan pelabuhan milik Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah.

By carrying out this analysis, the Company assessed that the Company's strengths and opportunities exceeded the existing weaknesses and threats. The Company is optimistic that it can continue to improve its performance both in the short and long term. In other words, the Company has good business prospects that are also supported by the Company's strengths.

In 2024, the Company will enter the Business Expansion and Partnership phase by starting to focus on business development initiatives through Strategic Partnerships, as well as cooperation and collaboration with state-owned and private logistics players. One of the business prospects that the Company will target is the potential for international transshipment hub container services in the Malacca Strait. The total volume of containers passing through the Malacca Strait reached 64 million TEUs, of which 78% was transshipment cargo (based on 2021 data, Roland Berger). In line with the Business Expansion and Partnership phase, strategic initiatives to be implemented at both the planning and execution stages in 2024 will include:

1. Strategic Initiatives Planning Stage
 - a. Regional expansion planning in the port business.
 - b. Exploration of cooperation for the development of an international transshipment hub.
 - c. Development of port operation services belonging to Ministries/Agencies.
 - d. Collaboration with state-owned and private logistics players.
 - e. Exploration of the use of data analytics for business development (*enabler*).
2. Strategic Initiatives Implementation Stage
 - a. Collaboration with industrial/logistics areas.
 - b. Development of TUKS operational services in collaboration with state-owned companies and the private sector.
 - c. Organizational restructuring and governance (*enabler*).
3. Strategic Initiatives Planning and Implementation Stage
 - a. Digitalization and systemization of port operations.
 - b. Development of port infrastructure and equipment.
 - c. Cooperation between ports to optimize the hub and spoke concept with data integration
 - d. Centralized knowledge management (*enabler*).
 - e. Internalization of integrated Pelindo culture (*enabler*).

This will provide potential opportunities to develop the Company's business. For non-container cargo, the domestic goods traffic market still has enormous potential as currently Pelindo only has a small market share of the national market. Pelindo can collaborate in several schemes with non-container ports including Special Terminal (Tersus)/Terminal for Own Use (TUKS) ports and ports belonging to Government Ministries/Agencies (K/L).



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja Perseroan. Dalam menjalankan bisnisnya, Pelindo senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan dan *ethical behavior* terimplementasi di lingkungan bisnis Perseroan. Pelindo memiliki komitmen terhadap penerapan GCG di seluruh lini Perseroan. Penerapan GCG juga dijalankan Perseroan untuk mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan. Organ Perseroan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan perusahaan dan Direksi sebagai pengelola Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Pelindo dan suatu wadah atau forum bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan RUPS di Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan Pelindo setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP). Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP 2023 pada tanggal 30 Januari 2023. Selain itu, Perseroan juga telah menyelenggarakan RUPS Tahunan tentang pengesahan Laporan Tahunan tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023.

Terkait dengan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris; serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta kebijaksanaan pemerintah, terutama di bidang-bidang yang berhubungan dengan tujuan dan lapangan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih Dewan Komisaris; dan/atau Permintaan tertulis dari Direksi. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 16 (enam

CORPORATE GOVERNANCE

Application of the good corporate governance (GCG) principles contributes to improving the Company's performance. In running its business, Pelindo always applies GCG principles in all its business activities. These principles include transparency, accountability, sustainability, and ethical behavior applied in the Company's business environment. Pelindo is committed to implementing GCG in all lines of the Company. The Company also implements GCG to encourage professional, efficient and effective management of the Company as well as to empower the functions and increase the independence of the Company's organs. The Company's organs consist of 3 (three) elements, Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest decision-making forum for Shareholders, the Board of Commissioners as supervisors of the Company management, and the Board of Directors as managers of the Company.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority holder in Pelindo and is a forum for Shareholders to make important decisions whose authority is not given to the Board of Directors and Board of Commissioners as determined in the Articles of Association and applicable laws and regulations. The GMS in the Company consists of an Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS is held by Pelindo every year, and includes the Annual GMS on the Annual Report and the Annual GMS on the Company's Work Plan and Budget (RUPS RKAP). An Extraordinary GMS can be held at any time based on the needs of the Company.

In 2023, the Company held an Annual GMS for Ratification of the 2023 RKAP on January 30, 2023. In addition, the Company also held an Annual GMS for Ratification of the 2022 Annual Report on June 19, 2023.

The Board of Commissioners carried out its duties, namely supervising the management of the Company by the Board of Directors, and also carries out tasks specifically assigned to the Board of Commissioners; as well as supervised the implementation of regulations and provisions as well as Government policies, especially in areas related to the Company's objectives and business fields.

The Board of Commissioners holds Board of Commissioners meetings and attends these meetings in accordance with statutory provisions. Board of Commissioners meetings can be held at any time, if deemed necessary by one or more of the Board of Commissioners; and/or written request from the Board of Directors. In 2023, the Board of Commissioners held 16 (sixteen) Board of Commissioners Meetings. The Board

belas) kali. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali.

Terkait dengan Direksi, Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin. Pada tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 20 (dua puluh) kali.

Perseroan senantiasa menerapkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan. Informasi Perseroan dapat diakses melalui situs resmi maupun laporan-laporan yang diterbitkan secara berkala, baik Laporan Tahunan, Siaran Pers, maupun laporan dari media komunikasi lainnya. Situs resmi Pelindo di www.pelindo.co.id tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perseroan juga senantiasa memutakhirkan Informasi yang disediakan dalam *website* Perseroan secara berkala.

Perseroan juga melaksanakan pengungkapan informasi penting melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan. Laporan tahunan Perseroan telah memuat antara lain, visi, misi, tujuan dan sasaran Perseroan, kinerja keuangan dan non keuangan, detail biografi dari semua Direksi dan Dewan Komisaris, rincian kehadiran masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam semua rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang diadakan sepanjang tahun, remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, transaksi pihak terkait, serta kantor.

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo, serta sebagai tindak lanjut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Pelindo membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berada di bawah organ Dewan Komisaris. Pelindo juga menerbitkan Laporan Tata Kelola Terintegrasi yang tercantum dalam Laporan Manajemen Perseroan.

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo, serta sebagai tindak lanjut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan

of Commissioners also held Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors 12 (twelve) times.

The Board of Directors is tasked with carrying out all actions related to the management of the Company for the interests of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company, as well as represents the Company both inside and outside the Court regarding all matters and all events with the limitations as regulated in the statutory laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions. The Board of Directors is obliged to hold a Board of Directors Meeting at least once every 1 (one) month, and at that meeting the Board of Directors may invite the Board of Commissioners. The Board of Directors meetings can be held outside the regular schedule. In 2023, the Board of Directors held 20 (twenty) Board of Directors Meetings.

The Company always discloses the required information for stakeholders, and the Company information can be accessed through the official website and reports published periodically, including Annual Reports, Press Releases, and reports using other communication media. Pelindo's official website at www.pelindo.co.id is available in Indonesian and English. The Company also continuously updates the information provided on the Company's website.

The Company also discloses important information through Annual Reports and Financial Reports. The annual report is presented in Indonesian and English side by side. The Company's annual report contains the Company's vision, mission, goals and objectives, financial and non-financial performance, biographical details of all Directors and Commissioners, details of the attendance of each Director and Commissioner in the Board of Directors and Board of Commissioners meetings held during the year, the remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners, related party transactions, and offices.

As a form of transparency in the implementation of Integrated Governance in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo Corporate Conglomeration, as well as as a follow-up to the provisions contained in the SOE Ministerial Regulation PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOE, Pelindo established an Integrated Governance Committee which is under the Board of Commissioners organ. Pelindo also publishes an Integrated Governance Report which is included in the Company's Management Report.

As a form of transparency for Integrated Governance implementation in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo Corporate Conglomerate, as well as a follow-up to the provisions contained in the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and



Korporasi Signifikan BUMN. Pelindo membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berada di bawah organ Dewan Komisaris.

Sebagai pengendali group perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki kapasitas untuk mengawasi dan melakukan koordinasi di segala lini bisnis Perusahaan. Sinergi positif antara Pelindo dengan Anak Perusahaan diharapkan dapat mendukung upaya terwujudnya Pelindo sebagai Indonesia *Maritime Gateway*.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan peran serta Pelindo untuk mengarahkan dan mengawasi Anak Perusahaan agar dalam pengelolaan setiap Anak Perusahaan agar sejalan dengan kebijakan strategis Pelindo guna mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada klasifikasi risiko Konglomerasi.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh 2 (dua) Komite di bawah Direksi, yang terdiri dari Komite Pelindo Bersih dan Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Direksi berdasarkan rapat dan pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama tahun buku.

Komite Pelindo Bersih merupakan komite yang membantu Direksi dalam Melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan serta menyelesaikan laporan WBS yang telah masuk. Selama tahun 2023, Komite Pelindo Bersih telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. 4 (empat) laporan WBS yang masuk telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Direktur Utama.

Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan merupakan komite yang membantu Direksi dalam mendukung peningkatan kinerja dan transformasi bisnis yang memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan terkait dengan pengelolaan investasi, kebijakan strategis operasional Perseroan dan pengendalian kegiatan strategis usaha grup Pelindo. Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan membahas finalisasi usulan investasi.

Sepanjang tahun 2023, Direksi menilai bahwa Komite di bawah Direksi tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Significant Corporate Activities of SOEs, Pelindo has established an Integrated Governance Committee under the Board of Commissioners.

As the controller of a group of companies, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has the capacity to supervise and coordinate all lines of the Company's business. It is hoped that the positive synergy between Pelindo and its subsidiaries will support efforts to realize Pelindo as the Indonesia *Maritime Gateway*.

To realize the above, Pelindo's participation is needed to direct and supervise Subsidiaries so that the management of each Subsidiary is in line with Pelindo's strategic policies to encourage good Corporate Governance implementation in the Conglomerate's risk classification.

ASSESSMENT OF THE COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

When carrying out its management duties, the Board of Directors is assisted by 2 (two) Committees, the Pelindo Bersih Committee and the Governance, Risk Management and Compliance Committee. The Board of Directors carries out the performance assessment procedures for Committees under the Board of Directors periodically with the criteria for evaluating the performance being based on meetings and implementation of duties carried out during the fiscal year.

The Pelindo Bersih Committee is a committee that assists the Board of Directors in supervising the effectiveness of the Company's WBS and the completion of WBS reports submitted. In 2023, the Pelindo Bersih Committee held 4 (four) meetings, and 4 (four) incoming WBS reports were followed up and reported to the President Director.

The Governance, Risk Management and Compliance Committee is a committee that assists the Board of Directors in supporting performance improvement and business transformation that takes into account the aspects of good corporate governance, risk management and compliance in the Company's decision-making process related to investment management, the Company's strategic operational policies and control of the Pelindo group's business strategies. During 2023, the Governance, Risk Management and Compliance Committee held 2 (two) meetings to discuss the finalization of investment proposals.

For 2023, the Board of Directors assessed that the Committees under the Board of Directors had carried out their duties and responsibilities well.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2023, tidak terjadi perubahan komposisi Direksi. Namun, berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK-205/MBU/07/2023 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia tanggal 24 Juli 2023 memutuskan mengubah nomenklatur Direksi Perseroan yang semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan. Sehingga komposisi Direksi pada tahun 2023 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur sebagai berikut:

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIP COMPOSITION

During 2023, there were no changes to the of the Board of Directors composition. However, based on the Minister of SOEs decision at the General Meeting of Shareholders of the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK-205/MBU/07/2023 concerning Changes in Position Nomenclature and Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on July 24 2023 decided to change the nomenclature of the Company's Directors from Finance and Risk Management Director to Finance Director. So the Board of Directors composition in 2023 totaled 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director and 5 (five) Directors as follows:

Arif Suhartono	:	Direktur Utama President Director
Hambra	:	Wakil Direktur Utama Vice President Director
Mega Satria	:	Direktur Keuangan Finance Director
Ihsanuddin Usman	:	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Capital and General Affairs Director
Prasetyo	:	Direktur Strategi Strategy Director
Boy Robyanto	:	Direktur Investasi Investments Director
Putut Sri Muljanto	:	Direktur Pengelola Managing Director



PENUTUP

Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada seluruh insan Pelindo yang telah bekerja keras di tengah tantangan kondisi perekonomian. Atas dedikasi dari seluruh insan Pelindo, Direksi mengucapkan terima kasih sehingga Pelindo mampu memperoleh kinerja yang baik di tahun 2023.

Atas arahan yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris yang sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan, Direksi memberikan mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ke depannya, Direksi dan seluruh jajaran manajemen akan berkomitmen untuk merealisasikan visi dan tujuan penggabungan usaha Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia.

CLOSING

The Board of Directors would like to express its highest appreciation for the trust, commitment and cooperation given by all stakeholders, especially all Pelindo employees who have worked during the challenging economic conditions. For the dedication of all Pelindo personnel, the Board of Directors would like express its gratitude for helping Pelindo achieve a good performance in 2023.

For the direction given by the Board of Commissioners that has greatly contributed to the Company's performance achievement, the Board of Directors would like to express its highest thanks and appreciation. Looking forward, the Board of Directors and all levels of management will be committed to realizing the vision and goals following the business merger to become a World Class, Integrated Maritime Ecosystem Leader.

Jakarta, 22 April 2024
Jakarta, April 22, 2024

Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors

Arif Suhartono

Direktur Utama
President director

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT



Di tengah kondisi perekonomian dan industri pelabuhan, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2023 baik dari sisi operasional maupun keuangan.

Despite the economic and the port industry conditions, the Board of Directors faced the challenges and opportunities that occurred by delivering a good performance in 2023 both from an operational and financial perspective.

AGUS SUHARTONO

Komisaris Utama

President Commissioner



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Pelindo dapat mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2023. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu memberikan kinerja yang baik di tengah kondisi perekonomian yang masih mengalami ketidakpastian.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2023. Dalam laporan ini akan kami sampaikan antara lain penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan tata kelola perusahaan, serta susunan dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Perseroan untuk tahun buku 2023.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, keputusan RKAP, ketentuan dan kepatuhan peraturan perusahaan terhadap Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Terkait dengan pengawasan dan pemberian nasihat dalam penyusunan strategi Perseroan dan pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, dilaksanakan dengan melakukan telaah atas RKAP Tahun 2023 yang telah disusun oleh Direksi. Sedangkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap implementasi strategi dilakukan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis secara berkala sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan utama, yaitu rapat internal Dewan Komisaris untuk pengambilan keputusan kolegiel. Bila diperlukan, dapat dilakukan melalui rapat internal Dewan Komisaris mengundang Direksi terkait untuk memberikan

With praise and gratitude we pray to the presence of Allah SWT, for His mercy and grace, which enabled Pelindo to record good performance in 2023. The Board of Commissioners would like to express its appreciation to the Board of Directors who delivered a good performance even though the economic conditions were still experiencing uncertainty.

On this occasion, the Board of Commissioners would like to submit its supervisory and advisory report to the Board of Directors for 2023. In this report we will present an performance assessment of the Board of Directors, our view on the business prospects prepared by the Board of Directors, and the implementation of corporate governance, as well as present the Board of Commissioners' membership composition and changes. We will also present submit the Board of Commissioners' supervisory and advisory report on the Company's management for the 2023 fiscal year.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT

When carrying out its supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners supervises the Company's management policies, the course of management in general both for the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and provides advice to the Board of Directors regarding the RJPP, RKAP, RKAP decisions, provisions and compliance with Company regulations regarding the Articles of Association and applicable laws and regulations, for the interests of the Company and in accordance with the Company's aims and objectives. The supervisory and advisory activities for preparing the Company's strategy, and monitoring the implementation of the Company's strategy, is carried out by reviewing the 2023 RKAP prepared by the Board of Directors. While the Board of Commissioners' supervision of strategy implementation is carried out by directing, monitoring and evaluating the implementation of strategic policies periodically, in line with the Board of Commissioners' supervisory duties.

Supervision and providing advice to the Board of Directors is carried out through several activities, including internal meetings of the Board of Commissioners for collegial decision-making. If necessary, this can be carried out through an internal meeting of the Board of Commissioners inviting the relevant Directors to

penjelasan atau tambahan data/informasi atas permasalahan atau usulan yang perlu mendapat rekomendasi persetujuan Dewan Komisaris. Selanjutnya rekomendasi dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan melalui surat kepada Direksi, di antaranya ditembuskan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara/Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II. Kegiatan pengawasan juga dilakukan kunjungan ke Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), sehingga Dewan Komisaris mendapatkan gambaran secara lebih jelas atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Cabang dalam memberikan jasa kepelabuhanan maupun masalah terkait lainnya. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 16 (enam belas) kali.

Di samping itu, dalam menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dilakukan dengan melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali.

Dalam memberikan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaiannya. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 3,11% (estimasi International Monetary Fund, Januari 2024). Turunnya angka pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 terjadi disebabkan oleh ketidakpastian kondisi geopolitik yang masih berlangsung dan pengetatan kebijakan ekonomi untuk menekan inflasi. Inflasi global tahun 2023 berhasil ditekan bersamaan dengan rendahnya harga minyak dunia dan rendahnya tekanan *supply chain*. Head Inflation Negara G20 sebesar 7,9% di tahun 2022 turun menjadi 6,3% di tahun 2023.

Di sisi perekonomian nasional, Ekonomi nasional tumbuh 5,05% pada tahun 2023. Angka pertumbuhan ini tetap menunjukkan ketangguhan ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding capaian tahun 2022. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Hal ini merupakan hal yang positif bagi Pelindo yang bergerak di bidang jasa logistik. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

Dari sisi industri pelabuhan, perdagangan global semakin matang dan hal ini mengakibatkan perlambatan angka pertumbuhan arus perdagangan, bahkan pada sektor dengan pertumbuhan tinggi seperti petikemas. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan arus petikemas Indonesia mengalami naik turun

provide explanations or additional data/information regarding problems or proposals that require recommendation for approval from the Board of Commissioners. The Board of Commissioners recommendations and opinions may also be conveyed through letters to the Board of Directors, with copies to the Minister of SOEs/Deputy Minister of SOEs II. Monitoring activities can also be carried out through visits to the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Port Branches, so that the Board of Commissioners got a gain a clearer picture of the problems faced by the Branch in providing port services and other related problems. During 2023, the Board of Commissioners held 16 (sixteen) Internal Meetings.

In addition, supervisory and advisory activities to the Board of Directors may also be carried out by holding Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors. During 2023, the Board of Commissioners held 12 (twelve) Joint Meetings with the Board of Directors.

In its Board of Directors' performance assessment, the Board of Commissioners considers several aspects as the basis for its assessment. These aspects include economic conditions, performance achievements, operational performance, financial performance, and the Company's health level. The of the Board of Directors performance assessment can be conveyed as follows.

Global economic growth in 2023 experienced a slowdown with growth of 3.11% (International Monetary Fund estimates, January 2024). The decline in world economic growth figures in 2023 was due to ongoing uncertainty in geopolitical conditions and tightening economic policies to suppress inflation. Global inflation in 2023 had been successfully reduced, together with low world oil prices and low supply chain pressure. G20 Head Inflation was 7.9% in 2022 and decreased to 6.3% in 2023.

The national economy grew by 5.05% in 2023. This shows the resilience of the national economy in facing global uncertainty even though it was experiencing a slowdown in growth compared to its achievements in 2022. On the production side, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing Business Field that reached 13.96%. This was a positive sign for Pelindo who operates in the logistics services sector. Meanwhile, for expenditure, the highest growth was in the Consumption Expenditure of Non-profit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) that reached 9.83%.

In the port industry, global trade was increasingly maturing and this resulted in a slowdown in the growth rate of trade traffic, even in sectors with high growth such as containers. Over the past 5 (five) year period, the growth of Indonesian container traffic has fluctuated, with global container traffic at around



mendekati arus petikemas global pada kisaran angka 3%. Arus petikemas global diperkirakan tumbuh antara 0 sampai 1% pada tahun 2023. Menurut *Container Trade Statistics* (CTS), arus petikemas global tumbuh sebesar 0,2% pada tahun 2023 secara yoy dengan total volume akhir sebesar 173,4 juta TEUs.

Di tengah kondisi perekonomian dan industri pelabuhan tersebut, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2023. Pada tahun 2023, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja operasional yang baik. Dari sisi operasi kepelabuhan, realisasi arus kapal pada satuan GT sebesar 1.286.040.750 GT, meningkat 7,01% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1.201.814.534 GT. Realisasi arus petikemas dalam TEUs yang meningkat sebesar 2,54%, dari 17.220.312 TEUs di tahun 2022 menjadi 17.657.327 TEUs di tahun 2023. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Ton tahun 2023 mencapai 169.853.408 Ton, meningkat 6,34% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 159.727.836 Ton. Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan MMBTU tahun 2023 mencapai 13.188.848 MMBTU, meningkat 49,86% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 8.800.934 MMBTU.

Dari sisi arus penumpang, realisasi arus penumpang pada tahun 2023 sebesar 18.050.932 orang, meningkat 20,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15.028.884 orang. Selain itu, pada jasa lainnya, realisasi produksi perusahaan properti untuk persewaan lahan di tahun 2023 dalam satuan M² mencapai 15.827.285 M², meningkat 15,18% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13.741.662 M². Realisasi produksi Perusahaan TBAL untuk perusahaan bangunan di tahun 2023 dalam satuan M² mencapai 159.690 M², meningkat 30,17% dibandingkan tahun 2022 sebesar 122.679 M². Realisasi produksi perusahaan air kapal untuk sumber yang diusahakan tahun 2023 dalam satuan Ton mencapai 2.090.863 Ton, meningkat 17,62% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mencapai 1.777.638 Ton. Demikian pula dengan perusahaan air umum dari sumber yang dikerjasamakan tahun 2023 dalam satuan Ton mencapai 475.462 Ton, meningkat 117,60% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar 218.498 Ton.

Selain kinerja operasional, Perseroan juga telah mencatatkan kinerja keuangan yang baik. Pendapatan operasi tahun 2023 mencapai Rp31,02 triliun, meningkat 4,44% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp29,70 triliun. Seiring dengan peningkatan pendapatan operasi tersebut, laba tahun berjalan juga mengalami peningkatan. Laba tahun berjalan tahun 2023 sebesar Rp4,01 triliun, meningkat 2,66% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3,91 triliun. Dengan meningkatnya laba tahun berjalan, maka ekuitas Perseroan juga mengalami peningkatan. Ekuitas tahun 2023 mencapai Rp46,90 triliun, meningkat 9,56% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp42,80 triliun.

3%. Global container traffic was expected to grow between 0 and 1% in 2023. According to *Container Trade Statistics* (CTS), global container traffic grew by 0.2% in 2023 yoy with a total final volume of 173.4 million TEUs.

Despite the economic and port industry conditions, the Board of Directors faced the challenges and opportunities and delivered a good performance in 2023. In 2023, the Company recorded good operational performance. For port operations, the ship traffic in GT units reached 1,286,040,750 GT, an increase of 7.01% compared to 1,201,814,534 GT in 2022. Container traffic in TEUs increased by 2.54%, from 17,220,312 TEUs in 2022 to 17,657,327 TEUs in 2023. Non-container goods traffic in tons in 2023 reached 169,853,408 tons, an increase of 6.34% compared to 159,727,836 tons in 2022. While non-container goods traffic in MMBTU units in 2023 reached 13,188,848 MMBTU, an increase of 49.86% compared to 8,800,934 MMBTU in 2022.

In terms of passenger traffic, in 2023 it reached 18,050,932 people, an increase of 20.11% compared to the previous year's 15,028,884 people. For other services, the realization of property business production for land rental in 2023 in M² units reached 15,827,285 M², an increase of 15.18% compared to 13,741,662 M² in 2022. TBAL Enterprises' production for building operations in 2023 in M² units reached 159,690 M², an increase of 30.17% compared to 122,679 M² in 2022. Ship water production for commercial sources in 2023 in ton reached 2,090,863 ton, an increase of 17.62% compared to 1,777,638 tons in 2022. While, the exploitation of public water from cooperative sources in 2023 in tons reached 475,462 tons, an increase of 117.60% compared to 218,498 tons in 2022.

As well as its operational performance, the Company also recorded a good financial performance. Operating revenues in 2023 reached Rp31.02 trillion, an increase of 4.44% compared to Rp29.70 trillion in 2022. As a result of the increase in operating revenues, the profit for the year also increased, and in 2023 reached Rp4.01 trillion, an increase of 2.66% compared to Rp3.91 trillion in 2022. With the increase in profit for the current year, the Company's equity also increased, and in 2023 reached Rp46.90 trillion, an increase of 9.56% compared to Rp42.80 trillion in 2022.

Selain kinerja operasional dan keuangan, tingkat kesehatan Perseroan juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Peringkat (*rating*) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia (Pefindo) yang ditandatangani pada tanggal 4 April 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating*): idAA+(sa)
2. Peringkat Akhir (*Final Rating*): idAAA/*Stable*

Dengan demikian, Tingkat Kesehatan untuk PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) pada Tahun Buku 2023 adalah Sangat Sehat (AAA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Internasional Monetary Fund (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 akan melambat menjadi 2,9%, dipicu oleh perang di Ukraina, inflasi tinggi, dan kenaikan suku bunga. IMF memperkirakan inflasi global akan tetap tinggi pada tahun 2024, sebesar 4,1%. Sedangkan pada perenoman nasional, Indonesia menghadapi tantangan domestik khusus di antaranya pemilu presiden dan legislatif yang akan digelar pada tahun 2024. Pemilu tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan ekonomi yang selanjutnya dapat memengaruhi keputusan investasi dan belanja konsumen, kenaikan harga pangan dan energi global dapat menyebabkan inflasi di Indonesia meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Namun, untuk industri kepelabuhan masih memiliki prospek yang baik. Arus petikemas global diperkirakan tumbuh antara 0 sampai 1% pada tahun 2023. Menurut *Container Trade Statistics* (CTS), arus petikemas global tumbuh sebesar 0,2% pada tahun 2023 secara YoY dengan total volume akhir sebesar 173,4 juta TEUs.

Berdasarkan prediksi kondisi perekonomian dan industri pelabuhan serta kekuatan internal Perseroan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada di antaranya adalah *Visi/Program Pemerintah* terkait pengembangan infrastruktur maritim dan intensifikasi program pemerintah di bidang maritim berpotensi mendukung rencana integrasi Pelindo. Potensi Pengembangan Layanan dan Rantai Nilai Kepelabuhan dapat mengembangkan penawaran jasa pelabuhan yang lebih terintegrasi dengan hadirnya layanan di segmen logistik, *hinterland development*, *marine*, serta *port services* pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Perseroan juga melakukan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi jasa layanan kepelabuhan. Selain itu, Perseroan juga melakukan peningkatan kerja sama usaha dengan mitra strategis dan strategi aliansi.

Apart from operational and financial performance, the Company's health level is also one of the considerations for the Board of Commissioners when assessing the Board of Directors' performance. The rating for assessing the health level was carried out by PT Pemingkat Efek Indonesia (Pefindo), and was signed on April 4, 2024 with the following results:

1. Stand Alone Rating: idAA+(sa)
2. Final Rating: idAAA/*Stable*

Thus, the PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) Health Level for the 2023 Fiscal Year was Very Healthy (AAA), as stipulated in the Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.

VIEW ON THE BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The International Monetary Fund (IMF) stated global economic growth in 2024 would slow to 2.9%, triggered by the war in Ukraine, high inflation and rising interest rates. The IMF estimates that global inflation will remain high in 2024, at 4.1%. Meanwhile, for the national economy, Indonesia is facing special domestic challenges, including the presidential and legislative elections that will be held in 2024. These elections can give rise to political and economic uncertainty that can further influence investment decisions and consumer spending, and rising global food and energy prices can cause inflation in Indonesia and increase and reduce the people's purchasing power and slow the economic growth.

However, the port industry still has good prospects. Global container traffic was expected to grow between 0 and 1% in 2023. Based on *Container Trade Statistics* (CTS), global container traffic grew by 0.2% in 2023 YoY with a total final volume of 173.4 million TEUs.

Based on economic conditions and the port industry predictions as well as the Company's internal strength, the Board of Commissioners is of the opinion that the business prospects prepared by the Board of Directors are appropriate. The Board of Commissioners believes that the Company will take advantage of the existing opportunities, including the Government's *Vision/Program* related to developing the maritime infrastructure and intensifying the Government programs in the maritime sector, which both have the potential to support Pelindo's integration plan. The potential for developing Port Services and Value Chains can develop a more integrated port service offering with services in the logistics, *hinterland development*, *marine* and port services segments at PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Company also utilizes technology and digitalization to increase the effectiveness and efficiency of port services. The Company has also increased its business collaboration with strategic partners and strategic alliances. This is seen as an opportunity



Hal tersebut merupakan peluang bagi Pelindo di dukung oleh peningkatan sinergi dengan BUMN lain di segmen transportasi pelayaran dan logistik.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pelindo senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aspek bisnisnya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelindo juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) setiap tahun secara berkesinambungan. Pelindo meyakini bahwa unsur keterbukaan di lingkungan kerja dan proses kerja yang sesuai dengan tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan akan membantu Perseroan bergerak maju. Oleh karena itu, implementasi GCG menjadi perhatian utama bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menerapkan GCG dengan efektif dan konsisten di 2023. Dalam menilai penerapan GCG di Pelindo, Dewan Komisaris memberikan penilaian terhadap sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat eksposur risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi dan menciptakan nilai perusahaan. Perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada ISO 31000:2018. Setiap perusahaan pasti menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Target Perusahaan mencakup berbagai aspek, nilai dari aspek strategis, operasional, finansial, pembentukan citra perusahaan keselarasan hukum dan kepatuhan, lingkungan serta keselamatan kerja.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi Manajemen Risiko dilakukan secara berjenjang, mulai dari Cabang Pelabuhan ke Fungsi Manajemen Risiko Regional kemudian diteruskan ke Group Manajemen Risiko Kantor Pusat, sedangkan untuk anak perusahaan ke Divisi Manajemen Risiko *Sub-holding* kemudian dilaporkan ke Group Manajemen Risiko Kantor Pusat dan untuk anak perusahaan di luar cluster bisnis, dilakukan evaluasi secara langsung oleh Group Manajemen Risiko Kantor Pusat. Evaluasi telah dilakukan dengan melihat data pada pengisian profil risiko pada kertas kerja *Risk Control Self Assessment*

for Pelindo, as it is supported by increased synergy with other SOEs in the shipping and logistics transportation segments.

VIEW ON CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

In carrying out its business activities, Pelindo always applies the principles of Good Corporate Governance in every aspect of its business by referring to the applicable laws and regulations. Pelindo is also committed to continuing to improve the Good Corporate Governance (GCG) implementation every year. Pelindo believes that the element of openness in the work environment and work processes are in accordance with established goals and mechanisms, and will help the Company move forward. Therefore, GCG implementation of is a major concern for the Board of Commissioners when carrying out its supervisory and advisory function to the Board of Directors.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has implemented GCG effectively and consistently in 2023. When assessing the GCG implementation at Pelindo, the Board of Commissioners assessed the risk management system, internal control system and whistleblowing system.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Risk management is an important element in running a company's business as the growing development of the corporate world and the increasing complexity of company activities has resulted in an increase in the level of risk exposure faced by the Company. The main purpose of risk management is to protect and create Company value, and the Company manages risk by balancing business strategy with risk management so that the Company obtains optimal results from its operations.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s risk management refers to ISO 31000:2018. All companies face risks that can affect the achievement of predetermined targets. The Company's targets cover several aspects, including strategic, operational, financial, corporate image formation, legal harmony and compliance, environment and work safety.

The mechanism for carrying out the Risk Management evaluation is in stages, starting from the Port Branches to the Regional Risk Management Function, and then forwarded to the Head Office Risk Management Group, while for subsidiaries to the Sub-holding Risk Management Division, and then reported to the Head Office Risk Management Group and for subsidiaries outside the business cluster, with evaluations carried out directly by the Head Office Risk Management Group. Evaluations have been carried out by looking at the data in the risk profile on the Risk Control Self Assessment (RCSA) working paper, with an

(RCSA) dengan pendekatan efektivitas tindakan mitigasi yang telah dilaksanakan oleh pemilik risiko (*Risk Owner*), kemudian divalidasi dan diverifikasi kembali dengan menunjukkan data-data kinerja operasional, keuangan, investasi dan data pendukung lainnya serta menggunakan data kejadian yang merugikan (*loss event*).

Hasil evaluasi disampaikan melalui Nota Dinas kepada Unit Kerja terkait ataupun dilakukan pembahasan secara langsung bersama dengan *risk owner* dengan mekanisme memberikan masukan, saran, dan *feed back* terkait pengisian RCSA. Rencana mitigasi yang sudah ada akan dilakukan *monitoring* dengan periode bulanan dan pelaporan dilakukan per triwulan. Selanjutnya, laporan *monitoring* profil risiko triwulan akan disusun dan disampaikan kepada *Group Anggaran* dan Pelaporan untuk dimuat dalam laporan manajemen triwulan korporat.

Dewan Komisaris Perusahaan memiliki organ pendukung yakni Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantau Manajemen Risiko yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. *Group* Manajemen Risiko Kantor Pusat secara periodik selalu melakukan pertemuan dengan Komite GCG dan PMR dalam rangka melakukan koordinasi terkait rencana dan *monitoring* proses implementasi Manajemen Risiko Perusahaan. Hasil koordinasi dituangkan dalam bentuk notulen rapat untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh *Group* Manajemen Risiko. Koordinasi yang secara rutin telah dilakukan dengan Komite GCG dan PMR di tahun 2023 adalah Koordinasi Bulanan dan Koordinasi Triwulan. Adapun topik yang dibahas dalam koordinasi tersebut di antaranya meliputi Usulan Profil Risiko RKAP, Hasil *Monitoring* Profil Risiko Triwulan dan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian Direksi dan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi berpandangan bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan GCG, karena dapat mendorong Perseroan menjadi lebih transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, adil, dan terpercaya. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan andal mampu memberikan keyakinan bagi para *stakeholder* bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif di Perseroan menjadi tanggung jawab dari Manajemen Perseroan. Guna mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan.

Tujuan dari penyelenggaraan sistem pengendalian internal di Perseroan adalah:

1. Efisiensi dan Efektivitas Operasional yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.
2. Keandalan Pelaporan yang dimaksudkan untuk menjamin

approach that the effectiveness of mitigation measures have been implemented by the risk owners, then validated and re-verified by providing data on operational, financial performance, investments and other supporting data as well as using loss event data.

The evaluation results are submitted through official papers to the relevant work units, or are discussed directly with the risk owners to provide input, suggestions and feedback regarding the filling of the RCSA. Existing mitigation plans will be monitored on a monthly basis, and reported on a quarterly basis. In addition, a quarterly risk profile monitoring report will be prepared and submitted to the Budget and Reporting Group to be included in the corporate quarterly management report.

The Company's Board of Commissioners has supporting organs, including the Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee which is tasked with monitoring and evaluating the implementation of the Risk Management work unit duties in order to provide recommendations to the Board of Commissioners. The Head Office Risk Management Group regularly holds meetings with the GCG and RMM Committee to coordinate plans and monitor the Company's Risk Management implementation process. The coordination results are presented in the form of meeting minutes to be followed up by the Risk Management Group. Coordination was routinely carried out with the GCG and RMM Committees in 2023 through Monthly Coordination and Quarterly Coordination. The topics discussed included the Proposed RKAP Risk Profile, Quarterly Risk Profile Monitoring Results and other matters of concern to the Board of Directors and Board of Commissioners. The Board of Commissioners and Board of Directors are of the view that the risk management system is adequate.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System is a very important aspect in GCG implementation, as it encourages the Company to become more transparent, accountable, responsible, independent, fair and trustworthy. An effective and reliable Internal Control System can provide confidence to stakeholders that all resources are managed properly so as to achieve the Company's goals. The implementation of a reliable and effective Internal Control System in the Company is the responsibility of the Company's Management. To support the development of the Internal Control System in the Company.

The objectives of instigating the Company's internal control system includes:

1. Operational Efficiency and Effectiveness that is intended to increase effectiveness and efficiency in managing the Company's resources to achieve the Company's objectives.
2. reliability of Reporting that is intended to guarantee



laporan yang akurat, wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan operasional lebih terjamin dengan adanya pengendalian intern yang efektif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh data yang diolah adalah transaksi yang sah dan telah mendapat otorisasi, serta seluruh transaksi telah dicatat pada tanggal terjadinya dengan nilai yang akurat.

3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah mengacu ke *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)* sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*);
5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta konsistensi implementasinya. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun 2021 telah dilakukan secara *self assessment* dengan hasil bahwa seluruh Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terbukti dapat berjalan cukup efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah mematuhi elemen-elemen pengendalian internal yang telah disusun.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan baik.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) atau yang disebut Pelindo Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik. Pelindo menyediakan aplikasi/sistem untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan Pelindo, cabang pelabuhan, dan grup perusahaan melalui sistem yang independen. Melalui sistem ini,

accurate, fair, timely and relevant reports, as a basis for appropriate and accountable decision making. The presentation and disclosure of information in financial and operational reports is more guaranteed with effective internal control. This is intended to provide assurance that all data processed are for valid transactions that have received authorization, and all transactions have been recorded on the date they occurred with accurate values.

3. Compliance with Legislative Regulations that is intended to ensure that all Company activities are carried out in accordance with applicable laws and regulations, including provisions issued by the Government or other authorities, as well as policies, provisions and procedures established by the Company.

The Company's Internal Control System refers to the Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control, and consists of 5 (five) components, namely:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring and Evaluation.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) routinely evaluates the effectiveness of the Internal Control System with the aim of assessing the reliability of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Internal Control System, and the consistency of its implementation. The evaluation of the internal control system implementation in 2021 was carried out through self-assessment, and the result showed that the entire PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Internal Control System was effective. This shows that PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has complied with the internal control elements prepared.

The Board of Commissioners is of the opinion that the internal control system is functioning properly.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing system (WBS) is called Pelindo Bersih and was introduced to strengthen its implementation and to provide opportunities for all Pelindo personnel and other stakeholders to submit reports regarding indications of violations of applicable ethical values, based on accountable evidence and in good faith. Pelindo provides an application/system for all stakeholders to report indications of fraud, corruption and extortion violations committed by Pelindo personnel, port branches and company groups through an independent system. With this system, Pelindo will become a better and competitive Company at both national and international levels. Pelindo personnel or stakeholders who report are given protection, in terms of

Pelindo dapat menjadi perseroan yang lebih baik dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional. Bagi insan Pelindo atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si telapor.

Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap di proses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan. Perseroan menjamin terhadap pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal antara lain, pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas dan catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya (*personal file record*).

Dewan Komisaris melalui Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko berperan dalam *me-review* pelaksanaan tanggung jawab Komite Pelindo Bersih. *Group Head* Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan selaku ketua Komite Pelindo Bersih memiliki tanggung jawab memonitor pengaduan yang masuk dalam saluran WBS, serta membuat laporan secara semester kepada Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan WBS di Perseroan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan arahan agar ke depannya penerapan WBS lebih ditingkatkan lagi efektivitasnya

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Sebagai salah satu emiten, Pelindo wajib menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan. Sesuai pedoman teknis peraturan, keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dalam arti luas, keuangan berkelanjutan bagi emiten dan perusahaan publik dapat dimaknai sebagai kegiatan berkelanjutan (*sustainable operation*), yaitu kegiatan operasi perusahaan yang dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Keselarasannya antara ketiga aspek patut mendapat perhatian karena fungsi suatu perusahaan, bukan hanya mencetak laba, tetapi juga dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup maupun isu-isu sosial. Perseroan

confidentiality of identity and from possible retaliation by the reported part.

The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity, unless its disclosure is necessary in connection with a report or investigation carried out by the authorities. Reports made anonymously will still be processed, however, the seriousness of the contents of the report, credibility and evidence submitted has to be considered first, as well as the possibility of confirming the report. The Company protects whistleblowers from all lawsuits, both criminal and civil, intimidation, punishment or unpleasant actions from any party for the evidence and/or report that will be, is being or has been given, unless the evidence and/or report has not been given in good faith. The Company provides protection to the whistleblowers against the possibility of unfair dismissal, demotion for reasons that are not clear, and detrimental information recorded in their personal file records.

The Board of Commissioners, through GCG and Risk Management Monitoring Committee, plays a role in reviewing the implementation of Pelindo Bersih Committee's responsibilities. The Group Head of Risk Management, Governance and Compliance as chairman of Pelindo Bersih Committee is responsible for monitoring complaints submitted to the WBS channel, as well as making semi-annual report to the Board of Commissioners and the Ministry of SOE as Shareholder.

The Board of Commissioners is of the view that the implementation of WBS in the Company has been running well. However, the Board of Commissioners provides direction so that in the future the effectiveness of WBS implementation can be further improved.

SUSTAINABILITY GOVERNANCE

As an issuer, Pelindo is obliged to implement the Sustainable Finance POJK. In accordance with regulatory technical guidelines, sustainable finance is the comprehensive support from the financial services sector to create sustainable economic growth by harmonizing economic, environmental and social interests. In a broader sense, sustainable finance for issuers and public companies can be interpreted as sustainable operations, namely the Company's operational activities that are carried out by paying attention to economic, environmental and social aspects.

Harmony between the three aspects requires attention as the function of a company is not only to make profits, but is also required to show concern for environmental sustainability and social issues. The Company fully supports sustainable



mendukung sepenuhnya kegiatan berkelanjutan seperti diatur dalam POJK Keuangan Berkelanjutan. Sebab, hal itu selaras dengan spirit Pelindo yaitu menjadi pelabuhan ramah lingkungan berkelas dunia. Dukungan lain terhadap kegiatan berkelanjutan dilakukan dengan memberikan pendanaan terhadap UMKM yang menyelenggarakan kegiatan sesuai kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan. Dukungan dilakukan melalui Pendanaan UMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN).

Perseroan melakukan sosialisasi kebijakan dan *roadmap* strategi kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal secara berkala. Sosialisasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan di Pelindo. Dengan komitmen Pelindo dalam mendukung keuangan keberlanjutan, pada tahun 2023 Pelindo berhasil mencatatkan kinerja positif. Perseroan juga membukukan berbagai keberhasilan dalam kinerja lingkungan dan sosial.

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo, serta sebagai tindak lanjut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Pelindo membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berada di bawah organ Dewan Komisaris. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Perusahaan Konglomerasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) harus senantiasa berlandaskan pada 6 (Enam) prinsip dasar tata kelola yang baik yaitu:

1. **Keterbukaan (*Transparency*)**
Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para Pemangku Kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para Pemangku Kepentingan sesuai dengan klasifikasi Informasi Perusahaan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Perseroan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis, dan budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* guna mencapai kinerja Perseroan secara berkesinambungan.

activities as regulated in the Sustainable Finance POJK. This is in line with Pelindo's spirit, namely to become a world-class environmentally friendly port. Other support for sustainable activities is achieved by providing funding to MSMEs that carry out activities according to the Sustainable Business Activities category. Support is provided through MSE funding as regulated in the Republic of Indonesia Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program for SOEs (SOE SER).

The Company regularly socializes its policies and strategy roadmap to internal and external stakeholders. This socialization is also part of Pelindo's efforts to build a culture of sustainability. With Pelindo's commitment to supporting sustainable finance, in 2023 Pelindo delivered a positive performance. The Company also recorded successes in environmental and social performance.

INTEGRATED GOVERNANCE

As a form of transparency in the implementation of Integrated Governance in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo Corporate Conglomerate, as well as a follow-up to the provisions contained in the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, Pelindo established an Integrated Governance Committee under the Board of Commissioners. Integrated Governance in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Conglomerate Company must always be based on 6 (six) basic good governance principles including:

1. **Transparency**
The Company guarantees openness and objectivity in its decision-making process when carrying out its business activities. The Company must provide material and relevant information on the Company in a way that is easily accessible and understood by Stakeholders. The Company must take the initiative to disclose not only the information required by the Articles of Association and applicable laws and regulations, but also matters that are important and may influence the decision making of Stakeholders in accordance with the classification of Company Information.
2. **Accountability**
The Company works with high accountability and is responsible for all its actions in a transparent and reasonable manner for the interests of the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, ethical business conduct and Company culture while still paying attention to the interests of Stakeholders to achieve sustainable Company performance.

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**
Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap Masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan.
4. **Kemandirian (*Independent*)**
Perseroan dikelola secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**
Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
6. **Terpercaya (*Trusted*)**
Perusahaan mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Prosedur penilaian terhadap kinerja Komite dilakukan secara periodik. Kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. Adapun kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Pelaksanaan Rapat Internal Komite dan Laporan Penugasan Komite.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi aspek-aspek operasional dan strategis Perseroan dengan baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2023, komposisi Dewan Komisaris telah terjadi beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan Pemegang Saham sebagaimana penjelasan berikut:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 1 JANUARI 2023 – 22 FEBRUARI 2023

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2023 sampai dengan 22 Februari 2023 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Komisaris Utama/Komisaris Independen,

3. **Responsibility**
The Company adheres to the prudential principle and ensures compliance with Company regulations, the Articles of Association and applicable laws and regulations, as well as carries out social responsibilities, including caring for the community and preserving the environment, especially around the Company, by making adequate planning and implementation to maintain the Company's business continuity.
4. **Independent**
The Company is managed professionally by avoiding conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and healthy corporate principles.
5. **Fairness**
In carrying out its activities, the Company always pays attention to interests based on the principles of fairness and equality.
6. **Trusted**
The Company has the full trust and support from all Stakeholders.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by committees under the Board of Commissioners including the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and the GCG and Risk Management Monitoring Committee, as well as the Integrated Governance Committee. The performance assessment procedures for the Committees are carried out periodically. The assessment criteria for the performance of Committees under the Board of Commissioners form part of the Board of Commissioners' KPI as approved by Shareholders. The performance assessment criteria includes the Implementation of Internal Committee Meetings and Committee Assignment Reports.

For 2023, the Board of Commissioners assessment is that these committees have carried out their duties and responsibilities in supervising the Company's operational and strategic aspects properly.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

During 2023, there were several changes to the Board of Commissioners composition based on the needs of Shareholders as explained below:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2023 – FEBRUARY 22, 2023

The Board of Commissioners composition for the period January 1, 2023 to February 22, 2023 consisted of 7 (seven) people including 1 (one) Acting President Commissioner/Independent



3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners as follows:

Marsetio	:	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) Independent Commissioner (Acting President Commissioner)
Didi Sumedi	:	Komisaris Commissioner
Sudung Situmorang	:	Komisaris Commissioner
Arif Toha Tjahjagama	:	Komisaris Commissioner
Antonius Rainier Haryanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Heru Sukanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Muchtar Luthfi Mutty	:	Komisaris Independen Independent Commissioner

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 22 FEBRUARI 2023 – 19 MEI 2023

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD FEBRUARY 22, 2023 - MAY 19, 2023

Pada tanggal 22 Februari 2023, Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan memberhentikan dengan hormat Marsetio sebagai Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) dan Antonius Rainier Haryanto sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Kemudian, Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga memutuskan untuk mengangkat Jodi Mahardi sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

On February 22, 2023, the Ministry of SOEs at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) decided to honorably dismiss Marsetio as Independent Commissioner (Acting President Commissioner) and Antonius Rainier Haryanto as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Then, the Ministry of SOEs at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) appointed Jodi Mahardi as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 22 Februari 2023 sampai dengan 19 Mei 2023 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Komisaris Utama/ Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

Thus, the composition of the Board of Commissioners for the period February 22 2023 to May 19, 2023 was 6 (six) people consisting of 1 (one) Acting President Commissioner/ Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners as follows:

Sudung Situmorang	:	Komisaris (Plt. Komisaris Utama) Commissioner (Acting President Commissioner)
Didi Sumedi	:	Komisaris Commissioner
Arif Toha Tjahjagama	:	Komisaris Commissioner
Jodi Mahardi	:	Komisaris Commissioner
Heru Sukanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Muchtar Luthfi Mutty	:	Komisaris Independen Independent Commissioner

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 19 MEI 2023 – 3 JANUARI 2024

Pada tanggal 19 Mei 2023, Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan untuk mengangkat Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 19 Mei 2023 sampai dengan 3 Januari 2024 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris sebagai berikut:

Agus Suhartono	:	Komisaris Utama President Commissioner
Sudung Situmorang	:	Komisaris Commissioner
Didi Sumedi	:	Komisaris Commissioner
Arif Toha Tjahjagama	:	Komisaris Commissioner
Jodi Mahardi	:	Komisaris Commissioner
Heru Sukanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Muchtar Luthfi Mutty	:	Komisaris Independen Independent Commissioner

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 3 JANUARI 2024 – SAAT INI

Pada tanggal 3 Januari 2024, Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Muchtar Luthfi Mutty sebagai Komisaris Independen Perseroan, mengangkat Andus Winarno sebagai Komisaris Perseroan, menetapkan Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama/Independen serta menetapkan Sudung Situmorang sebagai Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 3 Januari 2024 sampai dengan saat ini sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD MAY 19, 2023 - JANUARY 3, 2024

On May 19, 2023, the Ministry of SOEs at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) honorably dismissed Muchtar Luthfi Mutty as Independent Commissioner of the Company, and appointed Andus Winarno as Commissioner of the Company, Agus Suhartono as President/Independent Commissioner, and Sudung Situmorang as Independent Commissioner. Thus, the Board of Commissioners composition for the period May 19, 2023 until January 3, 2024 consisted of 7 (seven) people including 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Independent Commissioner and 5 (five) Commissioners as follows:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD JANUARY 3, 2024 – PRESENT

On January 3 2024, the Ministry of SOEs at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) honorably dismissed Muchtar Luthfi Mutty as Independent Commissioner of the Company, and appointed Andus Winarno as Commissioner of the Company, Agus Suhartono as President/Independent Commissioner, and Sudung Situmorang as Independent Commissioner. Thus, the Board of Commissioners composition for the period January 3, 2024 until now consisted of 7 (seven) people including 1 (one) President Commissioner/Independent Commissioner, 2 (two) Commissioners and 4 (four) Commissioners as follows:



Agus Suhartono	:	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner
Sudung Situmorang	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Didi Sumedi	:	Komisaris Commissioner
Arif Toha Tjahjagama	:	Komisaris Commissioner
Jodi Mahardi	:	Komisaris Commissioner
Heru Sukanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Andus Winarno	:	Komisaris Independen Independent Commissioner

PENUTUP

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja dan pelaksanaan usaha Perseroan di tahun 2023. Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen dan kerja keras Direksi, manajemen, dan seluruh Pekerja sehingga Pelindo telah mampu menghadapi tantangan dan telah menyajikan kinerja yang baik di tengah kondisi yang menantang di tahun 2023.

Kepada para pemangku kepentingan lainnya, Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Ke depannya, Dewan Komisaris sungguh berharap, seluruh jajaran Perseroan dapat terus memberikan yang terbaik bagi Perseroan di masa yang akan datang.

CLOSING

This concludes the report on the Board of Commissioners' supervisory duties of the performance and implementation of the Company's business in 2023. On this occasion, the Board of Commissioners would like to express its highest appreciation for the commitment and hard work of the Board of Directors, management and all employees that enabled Pelindo to face challenges, and to deliver a good performance during the challenging conditions in 2023.

To all other stakeholders, the Board of Commissioners would also like to express its gratitude for the trust they have been given. Moving forward, the Board of Commissioners hopes that all levels of the Company will continue to provide the best for the Company in the future.

Jakarta, 22 April 2024
Jakarta, April 22, 2024

Atas Nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners

Agus Suhartono

Komisaris Utama
President Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

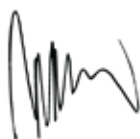
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 April 2024

Jakarta, April 22, 2024

Anggota Direksi,
Members of the Board of Directors,



ARIF SUHARTONO

Direktur Utama
President Director



HAMBRA

Wakil Direktur Utama
Vice President Director



MEGA SATRIA

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director



IHSANUDDIN USMAN

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs
Director



PRASETYO

Direktur Strategi
Strategy Director



BOY ROBYANTO

Direktur Investasi
Investment Director



PUTUT SRI MULJANTO

Direktur Pengelola
Managing Director



STATEMENT BY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS CONCERNING RESPONSIBILITY FOR THE 2023 ANNUAL REPORT OF PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

We, the undersigned testify that all information disclosed, in the 2023 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), is presented in its entirety. We are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual Report.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 22 April 2024
Jakarta, April 22, 2024

Anggota Komisaris,
Members of the Board of Commissioners

AGUS SUHARTONO
Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner

SUDUNG SITUMORANG
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DIDI SUMEDI
Komisaris
Commissioner

ARIF TOHA TJAHJAGAMA
Komisaris
Commissioner

JODI MAHARDI
Komisaris
Commissioner

HERU SUKANTO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

ANDUS WINARNO
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Profil Perusahaan

Company Profile



Pasca penggabungan per 31 Desember 2023, Pelindo memiliki 71 Pelabuhan yang berada di 4 regional, 32 Provinsi dan 4 Sub Holding.



Following the merger, as of December 31, 2023, Pelindo had 71 ports located in 4 regionals, 32 provinces and 4 sub-holdings.

IDENTITAS PERUSAHAAN COMPANY IDENTITY



Nama Perusahaan

Company Name

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)



Nama Panggilan

Short Name

Pelindo



Bidang Usaha

Line of Business

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhan
Organizing and Operating Port Services



Jumlah Pekerja

Number of Employees

6.988 orang per 31 Desember 2023*

*Pekerja Organik

6,988 people as of December 31, 2023*

*Organic Employees



Status Perusahaan

Company Status

Badan Usaha Milik Negara (Persero)
State-Owned Enterprise (Persero)



Data Jaringan Kantor

Office Network

- 1 Kantor Pusat | Head Office
- 12 Pelabuhan Regional I | Regional I
- 12 Pelabuhan Regional II | Regional II
- 25 Pelabuhan Regional III | Regional III
- 22 Pelabuhan Regional IV | Regional IV



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

5 Februari 1960
February 5, 1960



Akses Informasi

Access Information

Kantor Pusat | Head Office:

Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso No.9,
Jakarta Utara 14230, Indonesia

Telp : 021 4301080

Fax: -

Email : info@pelindo.co.id

Web : www.pelindo.co.id



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Desember 1992
Deed of Establishment dated No. 3 December 1, 1992



Kepemilikan

Ownership

100% Pemerintah Republik Indonesia
100% by the Government of the
Republic of Indonesia



Modal Dasar

Authorized Capital

Rp156.000.000.000.000



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Issued and Fully Paid-in Capital

Rp40.575.584.000.000

Sekretariat Perusahaan | Corporate Secretary:

Ardhy Wahyu Basuki

Email : corp_sec@pelindo.co.id

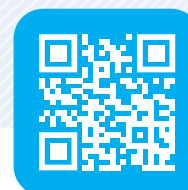
Media Sosial | Social Media:

Facebook : BUMN Pelabuhan Indonesia

X : @indonesiaport

Instagram: @pelindo

Youtube : Pelindo





NAMA DAN ALAMAT KANTOR WILAYAH DAN KANTOR CABANG

NAMES AND ADDRESSES OF REGIONAL OFFICES AND BRANCH OFFICES



REGIONAL I

Pelabuhan Dumai

Jl. Sultan Syarif Kasim No. 1 Dumai
Telp: (0765) 31469
Fax: -
Email: dumai@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Pinang

Jl. Sri Bayintan Kijang No. 1 Bintan 29151
Telp: (0771) 21153
Fax: -
Email: tanjungpinang@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pekanbaru

Jl. Saleh Abbas No. 3 Pekanbaru
Telp: (0761) 22826
Fax: -
Email: pekanbaru@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kuala Tanjung

Jl. Pelabuhan No. 1 Kuala Tanjung Kec. Sei Suka, Batubara 21257
Telp: (0622) 31002
Fax: -
Email: kualatanjung@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun

Jl. Teluk Air No. 12, Tanjung Balai Karimun 29661
Telp: (0777) 23570
Fax: -
Email: tbkarimun.care@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sibolga

Jl. Horas Pelabuhan Baru, Sibolga 22532
Telp: (0631) 327041
Fax: -
Email: sibolga@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Malahayati

Laksamana Malahayati KM. 32,5 Desa Lamreh Krueng Raya, Kec. Mesjid Raya Aceh Besar 23301
Telp: (0651) 21022
Fax: -
Email: malahayati@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Balai Asahan

Jl. Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan 21332
Telp: (0632) 92022
Fax: -
Email: tbasahan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Lhoukseumawe

Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh Lhoukseumawe, Aceh Utara 24354
Telp: (0645) 56816
Fax: -
Email: lhoukseumawe@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tembilahan

Jl. Jend. Sudirman No. 76 Tembilahan 29121
Telp: (0768) 21050
Fax: -
Email: tembilahan.care@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Gunung Sitoli

Jl. KL. Yos Sudarso Pelabuhan Angin Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22810
Telp: (0639) 21662
Fax: -
Email: gunungsitoli@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Belawan

Jl. Kapten R.Sulian No.1 Belawan, Sumatra Utara - 20411
Telp: (061) 6941919, 6941720
Email : belawan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id



REGIONAL II

Pelabuhan Tanjung Priok

Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14310
Telp: (021) 4301080
Fax: -
Email: priok@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Panjang

Jl. Yos Sudarso No. 337 Pidada, Panjang,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35241
Telp: 0813 6926 8413
Fax: -
Email: pelindo.regional2panjang@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Palembang

Jl. Belinyu No. 1, Boom Baru Palembang
30115
Telp: (0711) 710611
Fax: -
Email: palembang@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pontianak

Jl. Pak Kasih No. 11 Pontianak, Kalimantan
Barat
Telp: (0561) 732094
Fax: -
Email: pontianak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Banten

Jl. Raya Pelabuhan No. 1 Ciwandan, Banten,
42446
Telp: 08119827778
Fax: -
Email: banten@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Teluk Bayur

Jl. Semarang No. 3 Teluk Bayur, Sumatera
Barat 25217
Telp: (0751) 61646
Fax: -
Email: telukbayur@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bengkulu

Jl. Yos Sudarso No. 9 Pulau Bai, Bengkulu
38216
Telp: (0736) 51409
Fax: -
Email: bengkulu@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Jambi

Jl. Raya Pelabuhan KM. 9 Talang Duku, Jambi
36363
Telp: (0741) 35070
Fax: -
Email: cs.jambi@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Cirebon

Jl. Perniagaan No. 4 Cirebon, Jawa Barat
45112
Telp: (0231) 204109
Fax: -
Email: cirebon@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pangkal Balam

Jl. Yos Sudarso No. 1 Bangka
Telp: (0717) 424990
Fax: -
Email: pangkalanbalam@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Pandan

Jl. Pelabuhan Tanjungpandan No.1, Tj.
Pandan, Kec. Tj. Pandan, Kabupaten
Belitung, Kep. Bangka Belitung 33411
Telp: (0719) 21049
Fax: -
Email: tanjungpandan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sunda Kelapa

Jl. Maritim No. 8 Sunda Kelapa, Jakarta,
14430
Telp: (021) 6928888
Fax: -
Email: sundakelapa@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

REGIONAL III

Pelabuhan Tanjung Perak

Jl. Perak Timur No. 620 Surabaya
Telp: (031) 329 8631
Fax: -
Email: regional3@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Intan

Jl. Laut Jawa, Cilacap, Jawa Tengah 53213
Telp: (0282) 534651
Fax: -
Email: -
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Gresik

Jl. Yos Sudarso No. 1 Gresik
Telp: (031) 3981941/3974542
Fax: -
Email: gresik@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kalianget

Jl. Raya Pelabuhan No. 06 Kali Anget
Telp: (032) 8662447
Fax: -
Email: PTPelindoKalianget@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Tembaga

Jl. Tanjung Tembaga Timur No. 10
Probolinggo
Telp: (0335) 421385
Fax: -
Email: tanjungtembaga@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tegal

Jl. RE Martadinata No. 9 Tegal
Telp: (083) 351488
Fax: -
Email: Tegal@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Emas

Jl. Coaster No. 10 Semarang
Telp: (024) 3545721
Fax: -
Email: tanjungemas@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Wangi

Jl. Raya Situbondo, Ketapang, Banyuwangi,
Jawa Timur
Telp: (0333) 510636
Fax: -
Email: -
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Banjarmasin

Jl. Barito Hilir Trisakti No.6, Telaga Biru,
Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70119
Fax: -
Telp: (0511) 3353670
Email: banjarmasin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sampit

Jl. Usman Harun No. 2 Sampit, Kotawaringin
Timur Kalimantan Tengah
Telp: (0531) 21055
Fax: -
Email: sampit@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Batulicin

Jl. Pelabuhan Samudera No. 124 Tanah
Bumbu Kalimantan Selatan
Telp: (0518) 70305
Fax: -
Email: batulicin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kumai

Jl. Bendahara No. 248 Kumai Kotawaringin
Barat
Telp: (0532) 61468
Fax: -
Email: kumai@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kotabaru

Jl. Raya Stagen KM. 11 No. 9 Kotabaru,
Stagen, Kalimantan Selatan
Telp: (0518) 21214
Fax: -
Email: kotabaru@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pulang Pisang

Jl. Samudera No. 1 Kahayan Hilir, Pulang
Pisau, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telp: (0513) 61128
Fax: -
Email: banjarmasin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Badas

Jl. Labuhan Badas No. 11 Sumbawa, Nusa
Tenggara Timur
Telp: (0371) 2629120
Fax: -
Email: badas@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Benoa

Jl. Raya Pelabuhan Benoa Denpasar
Telp: (0361) 720560
Fax: -
Email: benoa@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bima

Jl. Martadinata No. 1 Kel. Tanjung Kec.
Rasane Barat Kota Bima
Telp: (0374) 43726
Fax: -
Email: bima@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Celukan Bawang

Jl. Pelabuhan Celukan Bawang No. 35
Buleleng Bali
Telp: (0362) 92333
Fax: -
Email: celukanbawang@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kalabahi

Jl. RE Martadinata No. 3 Kalabahi, Alor, Nusa
Tenggara Timur
Telp: (0386) 21023
Fax: -
Email: ende@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Labuan Bajo

Pelabuhan Multipurpose Manjarite Kel. Wae
Kelambu Kec. Komodo
Telp: 081237726018
Fax: -
Email: planner.bajo@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Lembar

Jl. Raya Pelabuhan No. 5 Lembar Lombok
Telp: (0370) 681260
Fax: -
Email: lembar@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Maumere

Jl. Kuneng No. 2 Maumere Nusa Tenggara
Timur
Telp: (0382) 21054
Fax: -
Email: maumere@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Waingapu

Jl. Nanga Mesi No. 16 Waingapu, Sumba
Timur Nusa Tenggara Timur
Telp: (0381) 21150
Fax: -
Email: waingapu@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tenau Kupang

Pelabuhan Tenau, Jl. M Praja, Alak, Kec. Alak,
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp: -
Fax: -
Email: -

Pelabuhan Ende - Ippi

Jl. Hatta No. 1 Ende, Flores, Nusa Tenggara
Timur
Telp: (0381) 21150
Fax: -
Email: ende@pelindo.co.id



REGIONAL IV

Jl. Soekarno No. 1
Makassar, Indonesia 90173
Telp: -
Fax: -
Email: regional4@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Parepare

Jl. Tarakan No. 1 Cappa Ujung Parepare
Telp: (0421) 21635
Fax: -
Email: parepare@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pantoloan

Jl. Bahari No. 23, Pantoloan
Telp: -
Fax: -
Email: pantoloan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kendari

Jl. Pelabuhan Kontainer No. 2 RT 01/RW 01,
Kel. Bungkutoko, Kec. Nambo Kota Kendari,
93234
Telp: (0401) 3121978
Fax: -
Email: kendari@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Gorontalo

Jl. Mayor Dullan No. 176 Gorontalo
Telp: (0435) 821216
Fax: (0435) 824808
Email: gorontalo@inaport4.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Samarinda

Jl. Niaga Timur No. 130, Pelabuhan
Samarinda Kota, Samarinda 75112
Telp: (0541) 741615
Fax: -
Email: samarindapelindo@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Balikpapan

Jl. Yos Sudarso No. 30 Balikpapan
Telp: (0542) 737457
Fax: -
Email: Balikpapan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ambon

Jl. Yos Sudarso No. 1 Kodya Ambon
Telp: -
Fax: -
Email: humas.regional4manado@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bitung

Jl. D.S. Sumolang No.1 Bitung
Telp: 0438) 3121978
Fax: -
Email: bitung@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Makassar

Jl. Soekarno No.1 Makassar.
Telp: (0411) 3616549
Email: makassar@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Nunukan

Jl. Pelabuhan Baru No. 10 Nunukan
Telp: (0556) 21495
Fax: -
Email: nunukan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tarakan

Jl. Yos Sudarso No. 9 Tarakan
Telp: -
Fax: -
Email: tarakan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ternate

Jl. A. Yani Kompleks Pelabuhan, Ternate
Telp: (0921) 3121574
Fax: -
Email: ternate@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sorong

Jl. A. Yani No. 13 Sorong
Telp: -
Fax: -
Email: sorong@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Jayapura

Jl. Koti II No. 21 Jayapura
Telp: -
Fax: -
Email: jayapura@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Merauke

Jl. Yos Sudarso No. 9 Merauke
Telp: -
Fax: -
Email: merauke@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Fakfak

Jl. Izak Telussa No. 5 Fakfak
Telp: 0956 2101508
Fax: -
Email: fakfak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Manokwari

Jl. Banjarmasin No. 3, Kel. Manokwari Timur,
Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari,
Papua Barat
Telp: (0986) 211334
Fax: -
Email: manokwari@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tolitoli

Jl. Sidoarjo No.394 Tolitoli
Telp: (0453) 21124
Fax: -
Email: toli-toli@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Redeb

Jl. ST M Aminuddin No 9 RT 10 Kel.
Sambaliung Kec. Sambaliung 77371
Telp: -
Fax: -
Email: tanjungredeb@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bontang

Jl. Ir. H. Juanda No. 43 Kota Bontang
Telp: (0548) 22786
Fax: -
Email: uptbtg@yahoo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Biak

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Biak
Telp: (0981) 21135, 21812, 24070
Fax: -
Email: biak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Manado

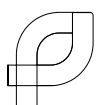
Jl. Pelabuhan III No. 1 Lingkungan VI Kel.
Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado
Telp: (0431) 852138, 86364
Fax: -
Email: humas.regional4manado@gmail.com

BRAND PERUSAHAAN COMPANY BRAND



Penerapan *branding* yang benar merupakan bagian terpenting dari proses mencapai cita-cita Pelindo menjadi Pemimpin ekosistem Maritim Terintegrasi dan berkelas dunia.

Applying the right branding is an important part of the process of achieving Pelindo's goal to be a world-class integrated leader in the maritime ecosystem.



Mengambil inspirasi dari bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat dan simpang siur, yang menggambarkan Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terintegrasi yang selalu aktif dan berperan besar dalam transportasi laut – sebagai urat nadi perekonomian nasional – sekaligus mendukung terwujudnya tol laut Indonesia.

Takes inspiration from the busy, congested and confusing shape, and describes Pelindo as a provider of integrated port and logistics services that is always active and plays a major role in sea transportation - as the lifeblood of the national economy - as well as supports the realization of the Indonesian sea highway.



Mengambil **huruf P** yang menjadi inisial dari Pelindo sekaligus berbentuk ikan, yang menjadi lambang habitat makhluk hidup laut penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim. Ini juga menjadi simbol dari komitmen Pelindo untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya.

The letter P is the first letter of Pelindo and takes the form of a fish, a symbol of important marine life for Indonesia, which is a maritime country. This is also a symbol of Pelindo's commitment to preserving Indonesia's natural wealth by continuing to contribute to supporting the preservation of marine ecosystems in its operational areas.



Warna biru adalah warna laut Indonesia, yang sangat dekat dengan Pelindo. Warna ini melambangkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme dan pengabdian. Warna ini juga melambangkan simbolisasi dari upaya Pelindo, sebagai bagian dari BUMN untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh *stakeholders*.

The blue color is the color of the Indonesian sea, which Pelindo is very close to. This color symbolizes stability, trust, integrity, professionalism and devotion. This color also symbolizes Pelindo's efforts, as a BUMN to always provide the best for all stakeholders.



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF THE COMPANY



Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" atau "Pelindo II") ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 *juncto* PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

The Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" or "Pelindo II") ("Company" or "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") was initially established as a Public Company ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation ("PP") No. 15 of 1983 in conjunction with PP No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II is a State-Owned Enterprise ("BUMN") under the guidance of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 07 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 1 Oktober 2021 mengenai persetujuan perubahan nama, anggaran dasar dan logo Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021.

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

Based on PP No. 57 of 1991, Perum Pelabuhan II underwent a change to become a Limited Liability Company (Persero). As a follow-up to this PP, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on a Notarial Deed No. 3 dated December 1, 1992 before Imas Fatimah, S.H. Notary. This deed of establishment was approved by the Republic of Indonesia Minister of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the formation of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) in 1998, the Company has been under the guidance of the Ministry of SOEs. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on a Company's General Meeting of Shareholders Resolution, which was notarized in Notarial Deed No. 07 before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. Notary dated October 1, 2021 concerning the approval of the change of name, articles of association and logo of the Company. The Articles of Association amendment was approved by the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights letter No. AHU-0053936.AH.01.02 October 1, 2021.

Based on Deed No. 09 dated August 21, 2019, the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Minister of SOEs, changed the type of shares, which were originally without series, to Series A and Series B shares Dwiwarna shares.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan. Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia. Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") melakukan penggabungan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II), dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai perusahaan hasil penggabungan.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan nama, Perubahan Anggaran dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo.

The Company's purpose and objective is to conduct business in the field of port service operations as well as optimizing the use of the Company's resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

In addition to the business scope mentioned above, the Company can also establish and run other businesses related to the port business. Currently, the Company and its subsidiaries (hereinafter referred to as the "Business Group") are engaged in several business fields including port services, logistics, information technology services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia. The parent and ultimate parent entity of the Company is the Government of the Republic of Indonesia.

On October 1, 2021, the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") merged into one Company (formerly Pelindo II), with the Company (formerly Pelindo II) as the resulting company.

EXPLANATION OF ANY NAME CHANGE

Based on the Republic of Indonesia Minister of SOEs Letter No. S-756/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Approval of Change of Name, Change of Articles of Association and Company Logo, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) changed its name to PT Pelabuhan Indonesia (Persero), abbreviated to Pelindo.





VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE



Visi Vision

Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia

To be a world-class integrated maritime ecosystem leader

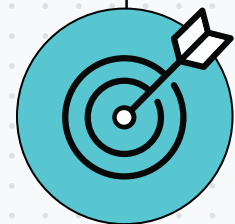
Visi tersebut merupakan pernyataan cita-cita Perusahaan menjadi pintu gerbang utama jaringan logistik global di Indonesia. Cita-cita ini muncul dilandasi dengan potensi geografis, peluang bisnis serta kebijakan nasional yang membuka peluang bagi perusahaan untuk merealisasikan visi dimaksud.

This vision is a statement of the Company's aspiration to become the main gateway to the global logistics network in Indonesia. This aspiration is based on geographical potential, business opportunities and national policies that open up opportunities for companies to realize the intended vision.

Misi Mission

Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara menyediakan jasa kepelabuhanan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Malaka.

To realize national maritime ecosystem network through the increment of network connectivity and service integration, to support Indonesian economic growth Providing reliable port and maritime services that are integrated with industrial areas to support the Indonesian and global logistics network by maximizing the economic benefits of the Malacca Strait.



REVIU VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian dan *review* terhadap visi dan misi Perseroan, dan menyatakan bahwa visi dan misi tersebut masih relevan untuk kondisi saat ini dan sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Perseroan ke depan. Visi dan Misi Perseroan telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada pembahasan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) tahun 2023.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah Perseroan, konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REVIEW OF THE VISION AND MISSION

The Board of Commissioners and Board of Directors conducted a study and reviewed the Company's vision and mission, and stated that the vision and mission were still relevant to the Company's current conditions and the challenges and opportunities it will face in the future. The Board of Commissioners and Board of Directors discussed and approved the Company's Vision and Mission during the discussion of the 2023 RKAP (Company Budget Work Plan).

The Board of Commissioners and Board of Directors confirms that the Company's mission, vision, goals, targets, strategies and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by making effective use of innovations and technology.

BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE

AKHLAK



Amanah Trustworthy

Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan

Uphold the trust given

- Memenuhi janji dan komitmen;
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- Keep promises and commitments;
- Responsible for the tasks, decisions and actions taken;
- Firmly uphold moral and ethical values.



Kompeten Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Continuing to learn and developing capabilities

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- Increase self-competence to answer ever-changing challenges;
- Help others learn;
- Complete tasks of the highest quality.



Harmonis Harmonious

Saling Peduli dan Menghargai perbedaan

Mutual care and respect for differences

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Respect everyone regardless of their background;
- Like to help others;
- Build a conducive work environment.



Loyal Loyal

Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara

Dedicated and prioritizing the interests of Nation and State

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara;
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
- Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOE and the State;
- Willing to sacrifice to achieve a greater goal;
- Obey the leadership as long as not violating the law and ethics.



Adaptif Adaptive

Terus Berinovasi dan Antusias dalam Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan

Continue to innovate and be enthusiastic in moving or facing changes capabilities

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
- Bertindak proaktif.
- Quickly adjust to be better;
- Continuously making improvements in accordance with technological developments;
- Be proactive.



Kolaboratif Collaborative

Membangun Kerja Sama yang Sinergis

Build synergistic cooperation

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- Give opportunities for various parties to contribute;
- Be open in collaborating to generate added value;
- Mobilize the use of various resources for common goal



KEGIATAN USAHA BUSINESS ACTIVITIES



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR DAN YANG DIJALANKAN

Maksud dan tujuan Perseroan menurut Anggaran Dasar Nomor: AHU-0014773.AH.01.02.TAHUN 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Utama

1. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, barang termasuk hewan (*general cargo*), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE CURRENT ARTICLES OF ASSOCIATION

The purposes and objectives of the Company according to the Articles of Association Number: AHU-0014773.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 1 2022 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Abbreviated as PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Company's purpose and objective based on the Company's Articles of Association is to conduct business in the field of port service operations as well as optimizing the use of the Company's resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company. To achieve these aims and objectives, the Company carries out the following business activities:

Main Activities

1. Provision and/or service of harbor pools and waters for traffic and ships' berths.
2. Provision and/or services of ship pilotage and towing.
3. Provision and/or service of wharves and other facilities for mooring, loading and unloading containers, liquid bulk, dry bulk, multi purpose, goods including animals (*general cargo*), and facilities for boarding and dropping off passengers and/or vehicles.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering (<i>general cargo</i>), dan kendaraan; 5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, <i>multi purpose</i>, penumpang, pelayanan rakyat, dan Ro-Ro; 6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; 7. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda; 8. Penyediaan dan/atau pelayanan penyediaan listrik, air minum dan instalasi limbah pembuangan sampah; 9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan; 10. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan; 11. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan; 12. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, <i>cleaning</i>, fumigasi serta pelayanan logistik; 13. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Provision and/or loading and unloading services, containers, liquid bulk, dry bulk (<i>general cargo</i>), and vehicles. 5. Provision and/or service of container terminal services, liquid bulk, dry bulk, multi purpose, passengers, public services, and Ro-Ro. 6. Provision and/or service of warehouses and stacking yards and places for storing goods, airport transportation, loading and unloading equipment, and port equipment. 7. Provision and/or land services of buildings and fields, industries and buildings related to the interests of running smooth multi-modal transportation. 8. Provision and/or service of electricity supplies, drinking water and waste disposal installations. 9. Provision and/or fueling services for ships and vehicles in the port environment. 10. Provision and/or service of consolidation and distribution of goods including animals. 11. Provision and/or consulting services, and education and training related to ports. 12. Operation and maintenance of container depots and repairs, cleaning, fumigation and logistics services. 13. Exploitation of customs area and temporary storage areas. |
|---|--|

Kegiatan Pendukung

1. Jasa angkutan;
2. Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas peralatan;
3. Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhan;
4. Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*ship to ship transfer*) termasuk jasa ikutan lainnya;
5. Properti di luar kegiatan utama kepelabuhan;
6. Kawasan industri;
7. Fasilitas pariwisata;
8. Perhotelan;
9. Jasa konsultan dan *surveyor* kepelabuhan;
10. Jasa komunikasi dan informasi;
11. Jasa konstruksi kepelabuhan;
12. Jasa *forwarding*/ekspedisi;
13. Jasa kesehatan;
14. Perbekalan dan *catering*;
15. Tempat tunggu kendaraan bermotor dan *shuttle bus*;
16. Jas penyelaman (*salvage*);
17. Jasa *tally*;
18. Jasa pas pelabuhan;
19. Jasa timbangan.
20. Jasa pengelolaan alur.

Support Activities

1. Transportation services;
2. Equipment rental and repair services;
3. Ship and equipment maintenance services in the port sector;
4. Ship-to-ship transfer services, including associated services;
5. Property outside the main port activities;
6. Industrial areas;
7. Tourism facilities;
8. Hospitality;
9. Port consultant and surveyor services;
10. Communication and information services;
11. Port construction services;
12. Forwarding services;
13. Health services;
14. Supplies and catering;
15. Waiting area for vehicles and shuttle buses;
16. Diving suits (*salvage*);
17. Tally services;
18. Port pass service;
19. Weighing services;
20. Channel management services.



Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar sudah dijalankan oleh Perseroan.

All business activities carried out by the Company are in accordance with the Articles of Association.

PRODUK DAN JASA

Pasca integrasi, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan perusahaan *holding* kepelabuhanan yang memiliki klaster bidang usaha sebagai berikut:

PRODUCTS AND SERVICES

Post-integration, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is a port holding company with the following business clusters:



Klaster Bidang Usaha Layanan Petikemas

Merupakan pelayanan bongkar muat barang petikemas mulai dari kapal hingga penyerahan kepada pemilik barang. PT Pelindo Terminal Petikemas merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari yang menjalankan bisnis operasi layanan terminal petikemas. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. **Stevedoring**, Kegiatan membongkar petikemas dari kapal ke dermaga/*trailer* atau memuat petikemas dari dermaga/*trailer* ke dalam kapal;
2. **Haulage**, Layanan pengangkutan petikemas dengan menggunakan *trailer/chassis* dalam daerah kerja pelabuhan dari lambung kapal ke lapangan penumpukan petikemas atau sebaliknya;
3. **Pelayanan Dermaga**, Pelayanan penanganan kapal di dermaga dengan mengatur kelancaran arus/barang di dermaga;

Container Service Business Cluster

A loading and unloading service for containerized goods from ships to delivery to the goods owners. PT Pelindo Terminal Petikemas is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding for a group of subsidiary companies that run the business of operating container terminal services. The scope of business includes:

1. **Stevedoring**, the activity of unloading containers from ships to the wharf/*trailer* or loading containers from the wharf/*trailer* into the ships;
2. **Haulage**, container transportation services using *trailer/chassis* in the port work areas from the ship's hull to the container stacking fields or vice versa;
3. **Wharf Services**, ship handling services at the wharf by regulating the smooth flow of goods at the wharf;

4. **Receiving/Delivery**, *Receiving* merupakan kegiatan menerima petikemas dari luar area Terminal sampai tersusun di lapangan penumpukan. *Delivery* adalah kegiatan memindahkan petikemas dari lapangan penumpukan dan menyerahkannya sampai tersusun di atas kendaraan;
5. **Jasa Penumpukan**, Jasa penumpukan petikemas di lapangan penumpukan sampai dengan dikeluarkan dari lapangan penumpukan untuk dimuat atau diserahkan kepada pemilik; dan
6. **Jasa Lainnya**, Merupakan jasa layanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan yang meliputi pemeriksaan karantina, pemeriksaan bea cukai, dan lain sebagainya.

Klaster Bidang Usaha Layanan Non-Petikemas

Merupakan pelayanan bongkar muat barang non-petikemas mulai dari kapal hingga penyerahan kepada pemilik barang. PT Pelindo Multi Terminal merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari yang menjalankan bisnis operasi layanan terminal non-petikemas. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. **Layanan Terminal Curah Cair**, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas curah cair;
2. **Layanan Terminal Curah kering**, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas curah kering;
3. **Layanan Terminal kendaraan**, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat kendaraan;
4. **Layanan Terminal Khusus**, kerja sama layanan operasional maupun terminal operator terminal khusus;
5. **Layanan Terminal Multipurpose**, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas cargo umum;
6. **Layanan TUKS**, kerja sama layanan operasional terminal untuk kepentingan sendiri.

Klaster Bidang Usaha Layanan Logistik & Hinterland

Merupakan layanan pendukung terkait logistik dalam jasa kepelabuhanan. PT Pelindo Solusi Logistik merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dengan lingkup bisnis operasi layanan logistik pendukung jasa kepelabuhanan. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. **Layanan Angkutan/Alat Transportasi Barang**, layanan pengangkutan barang umum untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri dan juga mencakup pengangkutan barang sewa khusus (*door-to-door*), pengangkutan barang melalui pelayaran rakyat dan pelayaran perintis dan lainnya;
2. **Layanan Ekspedisi**, layanan pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar baik yang diangkut melalui kereta/angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara;

4. **Receiving/Delivery**, picking up the containers from outside the Terminal area until they are arranged in the stacking field. Delivery is the activity of moving containers from the stacking field and handing them over until stacked on the vehicle;
5. **Stacking Service**, container stacking service in the stacking field until it is removed from the stacking field to be loaded or handed over to the owner; and
6. **Other services** are services that support activities at the port including quarantine inspections, customs inspections, and other services.

Non-Container Service Business Cluster

A loading and unloading service for non-container goods from ships to delivery to the goods owners. PT Pelindo Multi Terminal is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of operating non-container terminal services. The scope of business includes:

1. **Liquid Bulk Terminal Services**, a dedicated terminal service for loading and unloading liquid bulk commodities
2. **Dry Bulk Terminal Services**, dedicated terminal services for loading and unloading dry bulk commodities
3. **Vehicle Terminal Services**, dedicated terminal services for loading and unloading vehicles
4. **Special Terminal Services**, operational service cooperation and special terminal operator terminals
5. **Multipurpose Terminal Services**, dedicated terminal services for loading and unloading of general cargo commodities
6. **TUKS service**, cooperation in terminal operational services for own interest

Logistics Services & Hinterland Business Cluster

A support service related to logistics in port services. PT Pelindo Solusi Logistik is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of logistics support port services. The scope of business includes:

1. **Freight Services/Means of Transportation**, general goods transportation services for domestic and foreign destinations including the transportation of special rental goods (*door-to-door*), transportation of goods through public shipping and pioneer shipping and others.
2. **Expedition services**, delivery and packing services for large volumes of goods, whether transported by train/land transportation, sea transportation, or air transportation.



3. **Pergudangan dan Penyimpanan**, layanan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir termasuk layanan *cold storage*, pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang (G-SRG), dan layanan pergudangan dan penyimpanan lainnya;
 4. **Layanan Angkutan Multimoda**, layanan angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen;
 5. **Layanan Bounded Warehousing/Kawasan Berikat**, layanan pergudangan dalam wilayah Kawasan Berikat;
 6. **Layanan Container Distribution Centre (CDC)/Cargo Consolidation Centre (CCC)**, layanan kegiatan *stripping/stuffing* untuk selanjutnya diangkut dari dan ke kendaraan angkutan barang untuk selanjutnya didistribusikan dan layanan untuk menyimpan petikemas kosong *ex stripping/suffing*;
 7. **Layanan Keagenan Kapal**, layanan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan laut nasional selama berada di Indonesia;
 8. **Layanan Dermaga Marina (Marine Tourism)**, layanan usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan kegiatan lain yang terkait kelautan.
3. **Warehousing and Storage**, temporary goods storage services before the goods are sent to the final destination including cold storage services, Warehouse Receipt System (G-SRG) management, and other warehousing and storage services.
 4. **Multimodal Transportation Services**, goods transportation services using at least 2 (two) different modes of transportation under 1 (one) contract document.
 5. **Bounded Warehousing/Bonded Zone Services**, warehousing services within the Bonded Zone area.
 6. **Container Distribution Center (CDC)**, Cargo Consolidation Center (CCC) services, services for stripping/stuffing activities for further transportation from and to goods transport vehicles for further distribution and services for storing empty containers *ex stripping/stuffing*.
 7. **Ship Agency Services**, business services to manage the interests of foreign sea transportation company ships and/or national marine company ships while in Indonesia.
 8. **Marina Wharf Services (Marine Tourism)**, business services for providing and managing places for mooring or anchoring cruise/tourism ships and other marine-related activities.

Klaster Bidang Usaha Layanan Marine Dan Equipment

Merupakan pelayanan jasa operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. PT Pelindo Jasa Maritim merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari dengan lingkup bisnis operasi layanan kapal, layanan peralatan, dan layanan pendukung kepelabuhanan lainnya. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. **Layanan Jasa kapal**, merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar Pelabuhan, adapun produk atau Jasa Utama Perusahaan dalam Pelayanan Jasa Kapal meliputi:
 - a. **Jasa Tunda**, merupakan Produk atau Jasa Utama Perusahaan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal dan membantu kapal yang berolah-gerak dalam alur pelayaran, daerah labuh jangkar, maupun kolam untuk tambat atau untuk lepas dari dermaga. Proses Pelayanan Jasa Tunda Kapal wajib dilakukan terhadap seluruh kapal-kapal yang berada di wilayah perairan wajib Pandu dan Tunda dimana Perseroan mendapatkan wilayah pelimpahan wajib Pandu dan Tunda;
 - b. **Jasa Pandu**, merupakan Produk atau Jasa Utama Perseroan yang wajib diberikan untuk melayani kapal masuk menuju dan keluar dermaga melalui alur Pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan;

Marine and Equipment Services Business Cluster

A ship operational services starting from entering to exiting the port. PT Pelindo Jasa Maritim is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of operating ship services, equipment services, and other port support services. The scope of business includes:

1. **Ship service**, the ships' operational activities from entering to exiting the port, while the Company's main products or services in Ship Services includes:
 - a. **Tugboat Service**, the Company's Main Product or Service including pushing and pulling, tugging, escorting and assisting ships moving in shipping lanes, anchorage areas, or ponds for mooring or leaving the wharf. The Tugboat Service process must be carried out for all ships in the Pilot and Tugboat water areas that the Company has delegated as Pilot and Tugboat areas;
 - b. **Pilot Service**, is the Company's Main Product or Service to serve ships entering and leaving the wharf through the Port channel, so that shipping navigation can be carried out safely, orderly, and smoothly for the safety of the ships and the environment;

- c. **Layanan Jasa Pengangkutan Kapal**, merupakan kegiatan usaha perusahaan dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil produksi antar wilayah Pelabuhan;
 - d. **Layanan Jasa Pengelolaan Kapal**, merupakan kegiatan usaha perusahaan bekerja sama dengan Perusahaan *Holding* dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal motor Pandu yang digunakan untuk mobilisasi petugas pandu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemanduan kapal diseluruh wilayah perairan.
2. **Layanan Jasa Peralatan**, merupakan kegiatan usaha perusahaan dalam hal penyediaan suku cadang, perbaikan mesin/alat, serta perdagangan besar mesin dan peralatan.
 3. **Layanan Pendukung lainnya:**
 - a. **Layanan Pengerukan**, merupakan kegiatan usaha pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan dan lokasi lain yang memerlukan jasa keruk, reklamasi transportasi hasil keruk, pengadaan/pengembangan lahan dan bangunan serta jasa lain yang terkait;
 - b. **Layanan Penyediaan Utilitas dan Energi**, merupakan kegiatan usaha perusahaan dalam penyediaan air bersih, kelistrikan, serta jasa lainnya yang terkait.
- c. **Ship Transportation Services**, a Company business activity for transportation of materials or goods and production between Port areas;
 - d. **Ship Management Services**, a Company business activity in cooperation with the Holding Company for management and maintenance of Piloting motor boats used to mobilize pilot officers in carrying out ship piloting services in the territorial waters.
2. **Equipment Services**, a Company business activity for supplying spare parts, repairing machines/tools, as well as wholesale trading of machinery and equipment.
 3. **Other Support Services:**
 - a. **Dredging Services**, a business activity of dredging shipping lanes, port pools and other locations that require dredging services, reclamation of dredged transportation, procurement/development of land and buildings and other related services;
 - b. **Utilities and Energy Provision Services**, a Company business activity for providing clean water, electricity, and other related services.

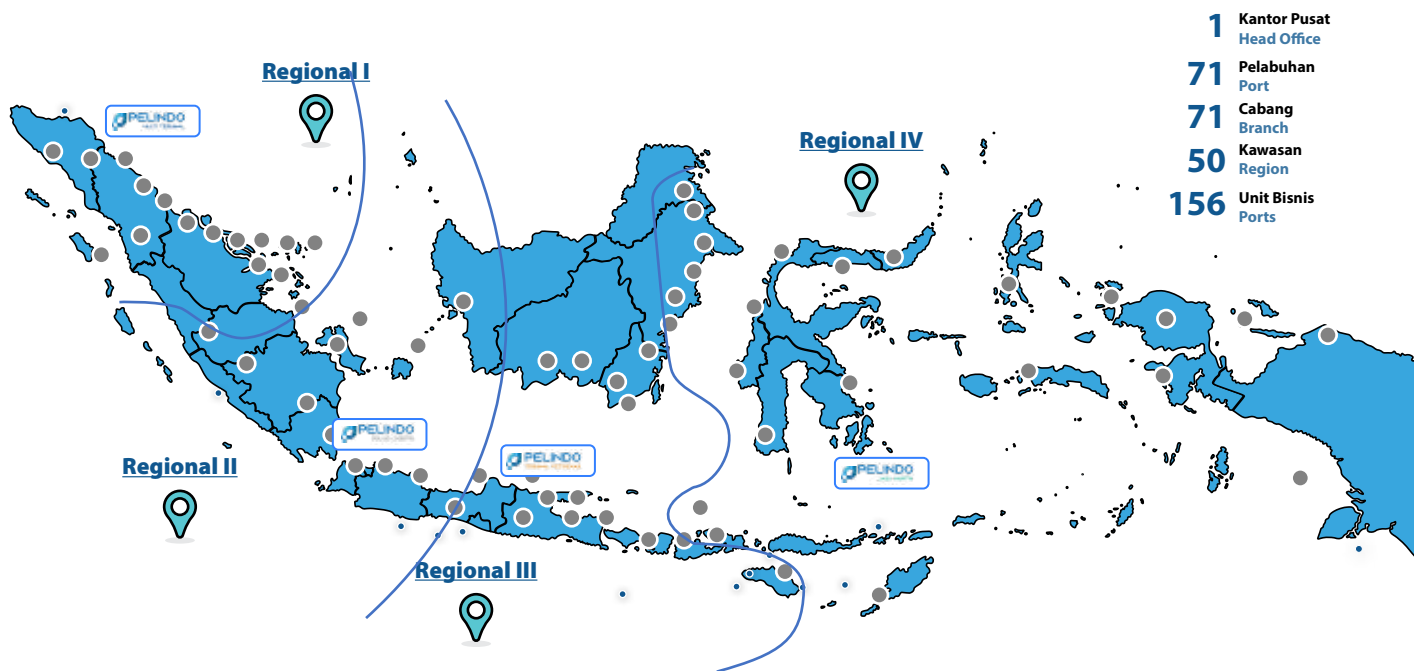




WILAYAH OPERASIONAL OPERATING AREAS

Per 31 Desember 2023, Pelindo memiliki 71 Pelabuhan yang berada di 4 regional, 32 Provinsi dan 4 Sub Holding.

As of December 31, 2023, Pelindo operates in 71 ports in 4 regions, 32 provinces and 4 subholdings.



Wilayah Region	Kantor Pusat Head Office	Cabang Pelabuhan Port Branch	Kawasan Region	Unit Bisnis Ports
Regional I Regional I	-	12	10	24
Regional II Regional II	1	12	19	38
Regional III Regional III	-	25	17	49
Regional IV Regional IV	-	22	4	45



DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI ASSOCIATION MEMBERSHIP

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan, Pelindo turut serta berperan aktif di dalam berbagai organisasi. Hingga akhir 2023, Pelindo tercatat sebagai anggota maupun kepengurusan dalam organisasi atau asosiasi sebagai berikut:

As a company operating in the port sector, Pelindo takes an active role in several organizations. At the end of 2023, Pelindo was registered as a member or management member of the following organizations or associations:

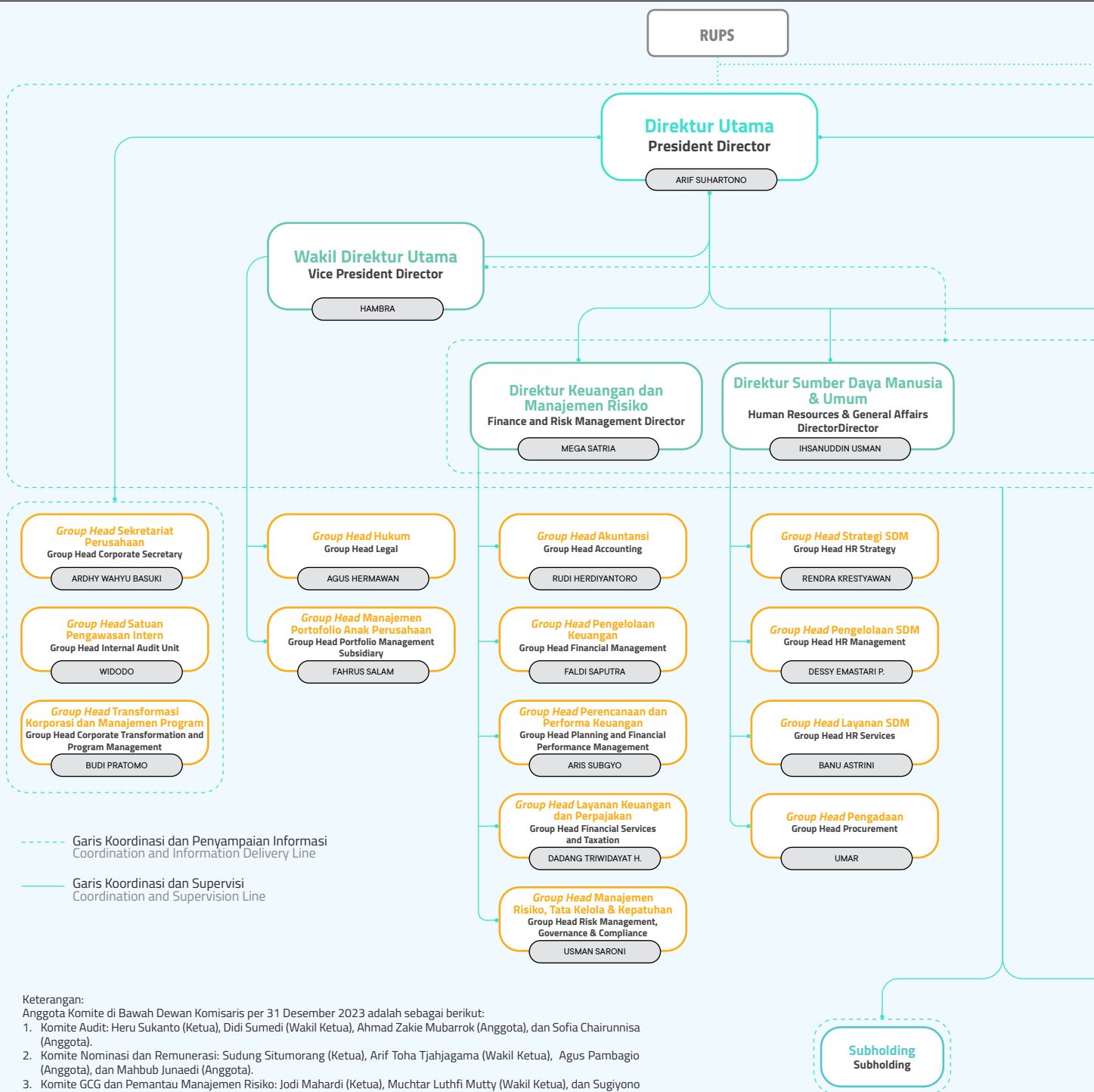
Organisasi Organization	Level	Peran/Dudukan Role/Seat	Manfaat Organisasi Organization Benefits	Annual Fee Annual Fee
<i>International Association of Port and Harbors (IAPH)</i>	Internasional International	<ul style="list-style-type: none"> IAPH adalah organisasi non pemerintah yang merupakan aliansi pelabuhan global yang berkedudukan di Jepang dan beranggotakan 177 pelabuhan serta 147 bisnis terkait pelabuhan di 84 negara. Pelindo adalah satu-satunya anggota IAPH dari Indonesia. IAPH is a non-governmental organization as a global port alliance based in Japan consisting of 177 ports and 147 port-related businesses in 84 countries. Pelindo is the only IAPH member from Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui perkembangan dan teknologi pelabuhan terkini. Mempromosikan perkembangan dan proyek-proyek Perseroan kepada dunia pelabuhan internasional. Berperan aktif dalam pembahasan kerja sama lingkup Asia <i>Oceania</i>. Partisipasi pada IAPH <i>World Port Conference</i> dan kegiatan-kegiatan turunan IAPH lainnya. Understanding the latest port developments and technology. Promoting the Company's developments and projects to the world of international ports. Taking an active role in the discussion on cooperation within Asia Oceania. Participating in the IAPH World Port Conference and other IAPH derivative activities. 	USD7.615
<i>ASEAN Ports Association (APA)</i>	Internasional International	<ul style="list-style-type: none"> APA adalah asosiasi pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara. Keanggotaan Indonesia dalam APA terdaftar atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). APA is an association of ports in Southeast Asia. Indonesia's membership in APA is registered under the name of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 	<ul style="list-style-type: none"> Membuka peluang kerja sama dengan pengusaha bisnis pelabuhan dalam lingkup ASEAN. Pertukaran informasi pelabuhan dengan pelabuhan ASEAN lainnya. Berpartisipasi pada acara-acara asosiasi, seperti seminar dan acara keolahragaan. Opening up opportunities for cooperation with port business entrepreneurs within ASEAN. Exchanging port information with other ASEAN ports. Participating in association events, such as seminars and sporting events. 	USD5.000



STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Pelindo telah disahkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/24/7/1/PSOG/UTMA/PLND-23 tanggal 24 Juli 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Struktur organisasi Pelindo per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.



Keterangan:

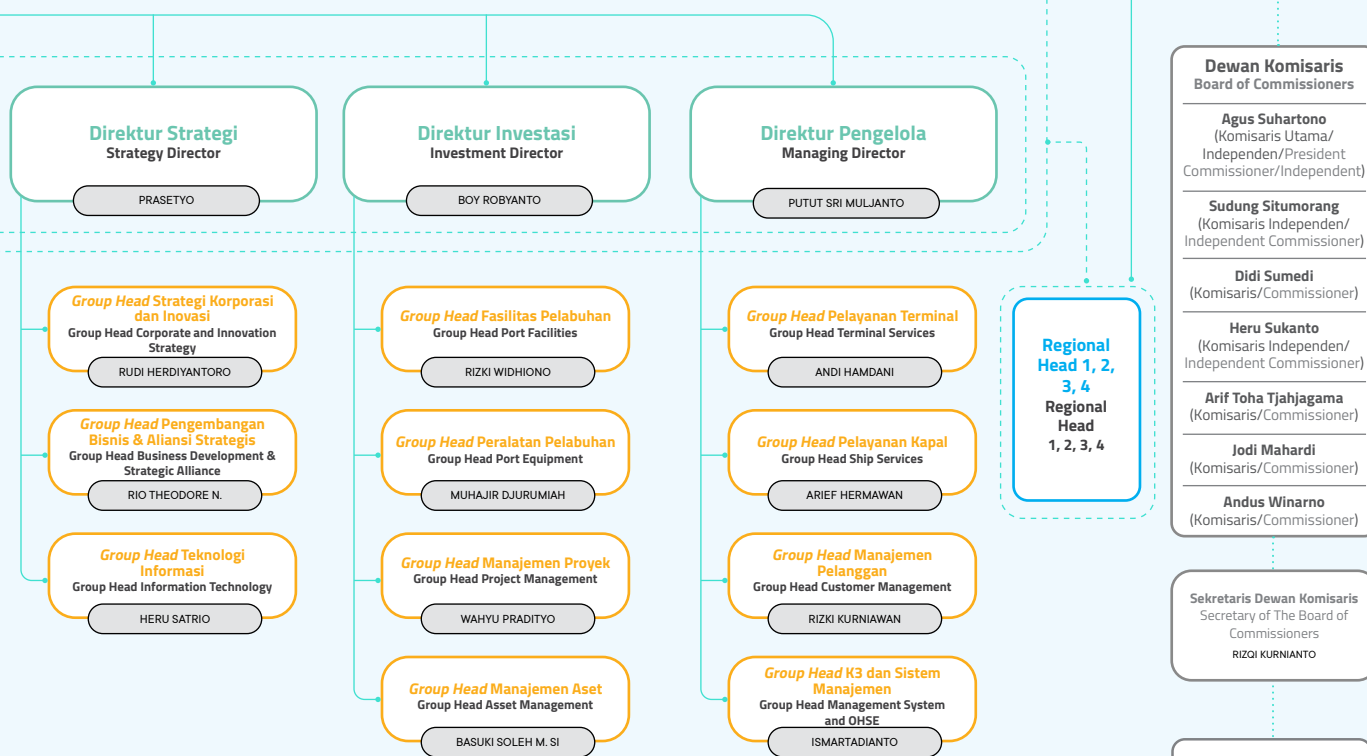
Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit: Heru Sukanto (Ketua), Didi Sumedi (Wakil Ketua), Ahmad Zakie Mubarrak (Anggota), dan Sofia Chairunnisa (Anggota).
2. Komite Nominasi dan Remunerasi: Sudung Situmorang (Ketua), Arif Toha Tjahjagama (Wakil Ketua), Agus Pambagio (Anggota), dan Mahbub Junaedi (Anggota).
3. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko: Jodi Mahardi (Ketua), Muchtar Luthfi Mutty (Wakil Ketua), dan Sugiyono (Anggota).
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi: Agus Suhartono (Ketua), Sudung Situmorang (Anggota), Heru Sukanto (Anggota), Muchtar Luthfi Mutty (Anggota), Moermahadi Soerja Djanegara (Anggota), Darwanto (Anggota), Otto Ardianto (Anggota), dan Fachry Ali (Anggota).

Informasi Komite di bawah Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.



Pelindo's organizational structure was ratified through PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors' Regulation No. HK.01/24/7/1/PSOG/UTMA/PLND-23 dated July 24, 2023 concerning Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelindo's organizational structure as of December 31, 2023 was as follows.



Anak Perusahaan/ Afiliasi Bisnis Lainnya
Other Subsidiaries/ Business Affiliates

Information:
Committee members under the Board of Commissioners as of December 31, 2023 are as follows:
 1. Audit Committee: Heru Sukanto (Chairman), Didi Sumedi (Vice Chairman), Ahmad Zakie Mubarrok (Member), and Sofia Chairunnisa (Member).
 2. Nomination and Remuneration Committee: Sudung Situmorang (Chairman), Arif Toha Tjahjagama (Vice Chairman), Agus Pambagio (Member), and Mahbub Junaedi (Member).
 3. GCG Committee and Risk Management Monitoring: Jodi Mahardi (Chairman), Muchtar Luthfi Mutty (Vice Chairman), and Sugiyono (Member).
 4. Integrated Governance Committee: Agus Suhartono (Chairman), Sudung Situmorang (Member), Heru Sukanto (Member), Muchtar Luthfi Mutty (Member), Moermahadi Soerja Djanegara (Member), Darwanto (Member), Otto Ardianto (Member), dan Fachry Ali (Member).
 Information on Committees under the Board of Directors can be seen in the Corporate Governance Chapter.

PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' PROFILES



ARIF SUHARTONO

Direktur Utama
President Director



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Banyumas, pada tahun 1970. Usia 53 tahun Per Desember 2023.
Born in Banyumas in 1970. 53 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S1 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1994).
- S2 bidang *Infrastructure Management* dari Yokohama National University Jepang (2001).
- S2 bidang *Business Administration* dari Nanyang Technological University Singapura (2017).
- Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994).
- Master's degree in Infrastructure Management from Yokohama National University, Japan (2001).
- Master's degree in Business Administration from Nanyang Technological University, Singapore (2017).

Sertifikasi Certification

-

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Direktur Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012).
- Direktur Komersial PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013).
- Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Indonesia (2013-2014).
- Pj. PMO Leader PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2014).
- Direktur Utama Rukindo PT Pengerukan Indonesia (2014-2015).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017).
- Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019).
- Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020 - 2021).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Sekarang).
- Operations Director at PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012).
- Commercial Director at PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013).
- President Director at PT Terminal Peti Kemas Indonesia (2013-2014).
- Acting PMO Leader at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2014).
- President Director at Rukindo PT Pengerukan Indonesia (2014-2015).
- President Director at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017).
- President Director at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019).
- Commercial Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020).
- President Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020 - 2021).
- President Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
Appointed for the first time as President Director of PT Pelabuhan Indonesia II Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Decree Number SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Periode Menjabat

Term of Office

Maret 2020 – 2025 (Periode Pertama).
March 2020 – 2025 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.
Does not hold any shares in the Company.



HAMBRA

Wakil Direktur Utama
Vice President Director



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Ketapang, pada tahun 1968. Usia 55 tahun Per Desember 2023.

Born in Ketapang in 1968. 55 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S1 bidang Ilmu Hukum dari Universitas Pattimura Ambon (1994).
- S2 bidang Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010).
- Bachelor's degree in Law from Universitas Pattimura Ambon (1994).
- Master's degree in Business Law from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010).

Sertifikasi

Certification

Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 19.
Risk Management Competence Test Level 19.

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Mutasi SDM KBUMN (2002-2006).
- Kepala Bagian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Perundang-Undangan KBUMN (2006-2010).
- Kepala Bagian Perundang-Undangan KBUMN (2010-2012).
- Kepala Biro Hukum KBUMN (2012-2015).
- Plt. Inspektur KBUMN (2014).
- Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial KBUMN (2015-2016).
- Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis KBUMN (2016-2019).
- Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021).
- Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Sekarang).
- Head of Public Relations and HR Transfer Sub-Division at KBUMN (2002-2006).
- Head of Corporate Governance and Legislation at KBUMN (2006-2010).
- Head of Legislation Section at KBUMN (2010-2012).
- Head of Legal Bureau at KBUMN (2012-2015).
- Acting Inspector at KBUMN (2014).
- Expert Staff for Strategic Communication and Industrial Relations at KBUMN (2015-2016).
- Deputy for Business Infrastructure at KBUMN (2016-2019).
- Vice President Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021).
- Vice President Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-272/MBU/11/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Appointed for the first time as Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree Number SK-272/MBU/11/2019 dated November 18, 2019 concerning the Appointment of the Vice President Director of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Periode Menjabat

Term of Office

November 2019 – 2024 (Periode Pertama).
November 2019 – 2024 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.
Does not hold any shares in the Company.



MEGA SATRIA

Direktur Keuangan
Finance Director



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Pekanbaru, pada tahun 1977. Usia 46 tahun Per Desember 2023.

Born in Pekanbaru in 1977. 46 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S1 bidang Administrasi Bisnis dari Wichita State University-USA (1998).
- S2 bidang Administrasi Bisnis dari Loyola University of Chicago-USA (1999).
- Bachelor's degree in Business Administration from Wichita State University-USA (1998).
- Master's degree in Business Administration from Loyola University of Chicago-USA (1999).

Sertifikasi

Certification

- *Certified Professional Management Accountant* (CPMA).
- *Certified Management Accountant* (CMA).
- *Certified Financial Manager* (CFM).

Pengalaman Kerja

Work Experience

- *Treasury Finance Head* HSBC Jakarta (1999-2000).
- *Assistance Vice Presiden Asset Product Manager* ABN-Bank Amro (2000-2004).
- Kepala Pengembangan Bisnis & Distribusi Penjualan Bank Danamon Syariah (2004-2006).
- *Head of Country Sales & Business Development* Deutsche Bank (2006-2008).
- *Executive Vice President Business Development & National Distribution* Sampoerna Strategic (2008-2012).
- *Corporate Treasurer* PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2012-2015).
- *Abacus Distribution System* Indonesia (Anak Perusahaan Garuda Indonesia) (2013-2015).
- *Chief Financial Officer* PT Citilink Indonesia (2015-2017).
- *Direktur Keuangan dan SDM* PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2018).
- *Direktur Keuangan* PT Bukit Asam Tbk (2018-2021).
- *Direktur Keuangan* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).

- *Direktur Keuangan & Manajemen Risiko* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2023).
- *Direktur Keuangan* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-sekarang).
- *Treasury Finance Head* HSBC Jakarta (1999-2000).
- *Assistance Vice President Asset Product Manager* ABN-Bank Amro (2000-2004).
- *Head of Business Development & Sales Distribution* at Bank Danamon Syariah (2004-2006).
- *Head of Country Sales & Business Development*, Deutsche Bank (2006-2008).
- *Executive Vice President Business Development & National Distribution*, Sampoerna Strategic (2008-2012).
- *Corporate Treasurer*, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2012-2015).
- *Abacus Distribution System* Indonesia (Garuda Indonesia Subsidiary) (2013-2015).
- *Chief Financial Officer*, PT Citilink Indonesia (2015-2017).
- *Director of Finance and HR*, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2018).
- *Director of Finance*, PT Bukit Asam Tbk (2018-2021).
- *Director of Finance*, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).
- *Finance and Risk Management Director*, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2023).
- *Director of Finance*, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-79/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan

Indonesia (Persero) Nomor SK-205/MBU/07/2023 tanggal 24 Juli 2023, terdapat perubahan nomenklatur dari Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan.

Appointed for the first time as Director of Finance and Risk Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree Number SK-79/MBU/03/2021 dated March 15, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Then, based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Decree Number SK-205/MBU/07/2023 dated July 24, 2023, there was a change in the nomenclature from Director of Finance and Risk Management to Director of Finance.

Periode Menjabat

Term of Office

2021 – 2026 (Periode Pertama).
2021 – 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.
Does not hold any shares in the Company.



IHSANUDDIN USMAN

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian

Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Jakarta, pada tahun 1969. Usia 54 tahun per Desember 2023.

Born in Jakarta in 1969. 54 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S1 bidang Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (1994).
- S2 bidang *Innovation & Technology Management* dari TSM Business School Twente University Belanda (2000).
- Bachelor's degree in Mining Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994).
- Master's degree in Innovation & Technology Management from TSM Business School, Twente University, The Netherlands (2000).

Sertifikasi

Certification

-

Pengalaman Kerja

Work Experience

- *Sales & Marketing Team Lead for Yale Forklift*, PT Jaya Trade Indonesia (1995-1997).
- *Industrial Engine Departement Head*, Philips Design (1997-1998).
- *Project Executive - HRMIS GE Plastics Europe - the Netherlands*, General Electric (1999-2001).
- *Executive Director Forum Inovasi*, Universitas Indonesia (2001-2004).
- *Direktur PT Prima Kompetensi* (2004-2008).
- *Recruitment Manager* PT Pertamina (Persero) (2008-2010).
- *Leadership & People Development Manager* PT Pertamina (Persero) (2010-2014).
- *VP Pertamina Corporate University* PT Pertamina (Persero) (2014-2017).
- *VP HR & GA* PT Pertamina Hulu Energi (2017).
- *SVP Human Capital Development* PT Pertamina (Persero) (2017-2018).

- *Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis* PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018-2020).
- *Direktur SDM dan Umum* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021).
- *Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Sekarang).
- *Sales & Marketing Team Lead for Yale Forklift*, PT Jaya Trade Indonesia (1995-1997).
- *Industrial Engine Department Head*, Philips Design (1997-1998).
- *Project Executive - HRMIS GE Plastics Europe the Netherlands*, General Electric (1999-2001).
- *Executive Director of the Innovation Forum*, Universitas Indonesia (2001-2004).
- *Director*, PT Prima Kompetensi (2004-2008).
- *Recruitment Manager*, PT Pertamina (Persero) (2008-2010).
- *Leadership & People Development Manager*, PT Pertamina (Persero) (2010-2014).
- *VP Pertamina Corporate University*, PT Pertamina (Persero) (2014-2017).
- *VP HR & GA*, PT Pertamina Hulu Energi (2017).
- *SVP Human Capital Development*, PT Pertamina (Persero) (2017-2018).
- *Director of Transformation and Business Development*, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2018-2020).
- *Director of HR and General Affairs*, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021).
- *Director of Human Resources and General Affairs*, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal

2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Appointed for the first time as Director of Human Resources and General Risk of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Decree Number SK-69/MBU/03/2020 March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Periode Menjabat

Term of Office

Maret 2020 - 2025 (Periode Pertama).
March 2020 - 2025 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.



PRASETYO

Direktur Strategi
Strategy Director



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Mojokerto, pada tahun 1970. Usia 53 tahun per Desember 2023.

Born in Mojokerto in 1970. 53 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S1 bidang Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).
- S2 bidang *Business Administration* dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2019).
- Bachelor's degree in Architectural Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).
- Master's degree in Business Administration from Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2019).

Sertifikasi

Certification

-

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Manager Teknik Cabang Gresik di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2009-2010).
- *Assistant Senior Manager* Perencanaan Usaha (2010-2011).
- *Assistant Senior Manager* Pemeliharaan Bangunan (2011).
- *Assistant* Kepala Biro Perencanaan (2011-2013).
- *General Manager* Pelabuhan Benoa (2013).
- *Senior Manager* Supervisi Teknik (2013-2014).
- Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia (2014-2017).
- Kepala Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Korporat (2017-2020).
- Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2021).
- Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Sekarang).

- Engineering Manager Gresik Branch, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2009-2010).
- Assistant Senior Manager for Business Planning (2010-2011).
- Assistant Senior Manager for Building Maintenance (2011).
- Assistant Head of Planning Bureau (2011-2013).
- General Manager of Benoa Port (2013).
- Senior Manager Technical Supervision (2013-2014).
- President Director of PT Pelindo Properti Indonesia (2014-2017).
- Head of the Strategic Planning and Corporate Performance Bureau (2017-2020).
- Director of Transformation and Business Development, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021).
- President Director, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2021).
- Director of Strategy, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Appointed for the first time as Director of Strategy at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree Number SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Periode Menjabat

Term of Office

Oktober 2021 – 2026 (Periode Pertama).
October 2021 – 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.
Does not hold any shares in the Company.



BOY ROBYANTO

Direktur Investasi
Investment Director



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Surabaya, pada tahun 1973. Usia 50 tahun per Desember 2023.

Born in Surabaya in 1973. 50 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- D3 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).
- S1 bidang Teknik Sipil dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2002).
- S2 bidang Manajemen dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (2019).
- S2 Program Profesi Insinyur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (2021).
- D3 Diploma in Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).
- Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2002).
- Master's degree in Management from Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (2019).
- Master of Professional Engineering Program, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, (2021).

Sertifikasi

Certification

- *Risk Management For Corporate Leaders*, Harvard Business School USA (2021).
- *Strategic Capital Investment Performance Measurement and Risk Management*, Glomacs e-Learning Solutions (2021).

Pengalaman Kerja

Work Experience

- ASM Rancang Bangun Kontruksi Sipil PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-2015).
- ASM Rancang Bangun PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-2015).
- ASM Perencanaan Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2015-2016).
- *General Manager* PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tenau Kupang (2016-2017).

- SVP *Port Facility* PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2017-2018).
- Komisaris PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2017-2020).
- CEO Regional Kalimantan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2020).
- Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2021).
- Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Sekarang).
- ASM Civil Construction Design, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-2015).
- ASM Design, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-2015).
- ASM Technical Planning, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2015-2016).
- General Manager, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tenau Kupang Branch (2016-2017).
- SVP *Port Facility* PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2017-2018).
- Commissioner, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2017-2020).
- CEO Regional Kalimantan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2020).
- Technical Director, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020).
- President Director, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2021).
- Investment Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Appointed for the first time as Director of Investment PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Decree Number SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Periode Menjabat

Term of Office

Oktober 2021 – 2026 (Periode Pertama).
October 2021 – 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.



PUTUT SRI MULJANTO

Direktur Pengelola
Managing Director



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Magetan, pada tahun 1969. Usia 54 tahun per Desember 2023.

Born in Magetan in 1969. 54 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S1 bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga Surabaya (1993).
- S2 bidang Manajemen dari Universitas Airlangga Surabaya (2012).
- Bachelor's degree in Economic Management from Universitas Airlangga Surabaya (1993).
- Master's degree in Management from Universitas Airlangga Surabaya (2012).

Sertifikasi

Certification

- Sertifikasi SDM Kepelabuhanan (2010).
- Certified Management Accountant (2014).
- Port HR Certification (2010).
- Certified Management Accountant (2014).

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Pjs. Senior Manajer Peningkatan Usaha Pelindo III (2009 - 2010).
- Senior Manager Peningkatan Usaha Pelindo III (2010 - 2011).
- Senior Manager Pemasaran Pelindo III (2011 - 2013).
- Komisaris PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2012 - 2013).
- Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2013 - 2018).
- Komisaris PT Berlian Manyar Sejahtera (2014 - 2017).
- Komisaris PT Berkah Industri Mesin Angkat (2017 - 2018).
- Direktur Utama PT Pelindo Marine Service (2018).
- SVP Marketing Pelindo III (2018).
- Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya (2018).
- Komisaris PT Pelindo Husada Citra (2018).
- ASM Perencanaan dan Kerja Sama Usaha Pelindo III (2018 - 2019).

- Komisaris Utama PT Pelindo Daya Sejahtera (2018-Sekarang).
- Komisaris Utama PT Berkah Multi Cargo (2018-Sekarang).
- Direktur Operasi dan Komersial PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2021).
- Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Sekarang).
- Acting Business Development Senior Manager at Pelindo III (2009 - 2010).
- Senior Business Development Manager at Pelindo III (2010 - 2011).
- Senior Marketing Manager at Pelindo III (2011 - 2013).
- Commissioner at PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2012 - 2013).
- President Director at PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2013 - 2018).
- Commissioner at PT Berlian Manyar Sejahtera (2014 - 2017).
- Commissioner at PT Berkah Industri Lifting Machinery (2017 - 2018).
- President Director at PT Pelindo Marine Service (2018).
- SVP Marketing at Pelindo III (2018).
- President Director at PT Terminal Petikemas Surabaya (2018).
- Commissioner at PT Pelindo Husada Citra (2018).
- ASM Business Planning and Cooperation at Pelindo III (2018 - 2019).
- President Commissioner at PT Pelindo Daya Sejahtera (2018-Present).
- President Commissioner at PT Berkah Multi Cargo (2018-Present).
- Director of Operations and Commercial at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2021).
- Managing Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-Present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-334/

MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Appointed for the first time as Managing Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree Number SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Periode Menjabat

Term of Office

Oktober 2021 – 2026 (Periode Pertama).
October 2021 – 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

- Komisaris Utama PT Pelindo Daya Sejahtera (2018 - Sekarang).
- Komisaris Utama PT Berkah Multi Cargo (2018 - Sekarang).
- President Commissioner at PT Pelindo Daya Sejahtera (2018 - Present).
- President Commissioner at PT Berkah Multi Cargo (2018 - Present).

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.



HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' AFFILIATED RELATIONSHIPS

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Board of Director's Affiliated Relationships

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi Board of Directors' Financial, Familial and Management Relationships																	
Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationships with						Hubungan Keluarga dengan Familial Relationships with						Hubungan Kepengurusan Management Relationships			
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder					
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No		
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director		√		√		√		√		√		√		√		√
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director		√		√		√		√		√		√		√		√
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director		√		√		√		√		√		√		√		√
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director		√		√		√		√		√		√		√		√
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director		√		√		√		√		√		√		√		√
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director		√		√		√		√		√		√		√		√
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director		√		√		√		√		√		√		√		√

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2023, tidak terjadi perubahan komposisi Direksi. Namun, berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK-205/MBU/07/2023 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia tanggal 24 Juli 2023 memutuskan mengubah nomenklatur Direksi Perseroan yang semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan. Sehingga komposisi Direksi pada tahun 2023 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS' MEMBERSHIP COMPOSITION

During 2023, there were no changes to the Board of Directors composition. However, based on the Minister of State-Owned Enterprises decision at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number SK-205/MBU/07/2023 concerning Changes in Position Nomenclature and Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia on July 24, 2023 decided to change the nomenclature of the Company's Directors from Director of Finance and Risk Management to Director of Finance. Therefore the Board of Directors composition in 2023 was 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director and 5 (five) Directors. The Board of Directors composition and basis for appointment can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Board of Directors Composition and Basis for Appointment Before Changes in Nomenclature

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/MBU/11/2019 Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/MBU/11/2019	18 November 2019 November 18, 2019
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-79/MBU/03/2021 Keputusan Menteri BUMN No. SK-79/MBU/03/2021	15 Maret 2021 March 15, 2021
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah Perubahan Nomenklatur

Board of Directors Composition and Basis for Appointment After Changes in Nomenclature

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/MBU/11/2019 Minister of SOEs Decree No. SK-272/MBU/11/2019	18 November 2019 November 18, 2019
Mega Satria	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-205/MBU/07/2023 Minister of SOEs Decree No. SK-205/MBU/07/2023	24 Juli 2023 July 24, 2023



Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah Perubahan Nomenklatur
Board of Directors Composition and Basis for Appointment After Changes in Nomenclature

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021



1

PRASETYO
Direktur Strategi
Strategy Director

2

BOY ROBYANTO
Direktur Investasi
Investment Director

3

ARIF SUHARTONO
Direktur Utama
President Director



4

HAMBRA

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

5

PUTUT SRI MULJANTO

Direktur Pengelola
Managing Director

6

MEGA SATRIA

Direktur Keuangan
Finance Director

7

IHSANUDDIN USMAN

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director

PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILES



AGUS SUHARTONO

Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/Independent Independent



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Blitar, pada tahun 1955. Usia 68 tahun per Desember 2023.

Born in Blitar in 1955. 68 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- Akademi Angkatan Laut (1978).
- S1 bidang Ekonomi dari Naval Academy (1978).
- Naval Academy (1978).
- Bachelor's degree in Economics from the Naval Academy (1978).

Sertifikasi Certification

-

Pengalaman Kerja

Work Experience

- *Patrol Ship, Corvet Ship, dan Destroyer Ship* TNI Angkatan Laut (1978-2002).
- Gugus Tempur Laut Armada Timur (2003-2005).
- *Vice President to the Chief Planning and Budgeting* TNI Angkatan Laut (2005-2006).
- *Commander of the Naval Education and Training* (KODIKAL) (2006-2007).
- Komandan Panglima Angkatan Darat (2007-2008).
- *Assistant of the Chief Planning and Budgeting* TNI Angkatan Laut (2008-2009).
- *Inspector of the Defence Ministry* TNI Angkatan Laut (2009-2010).
- *Commander in Chief* of the Indonesian Armed Forces (2010-2013).
- Komisaris Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2013-2023).
- Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-sekarang).
- Operations Director at PT Multi Terminal I-
Commander of the Naval Education and Training (KODIKAL) (2006-2007).
- Commander in Chief of the Army (2007-2008).
- Assistant of the Chief Planning and Budgeting of the Indonesian Navy (2008-2009).
- Inspector of the Defense Ministry of the Indonesian Navy (2009-2010).
- Commander in Chief of the Indonesian Armed Forces (2010-2013).
- President Commissioner of PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2013-2023).
- President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-101/MBU/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama/Independen berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-2/MBU/01/2024 tanggal 3 Januari 2024. Appointed for the first time as President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Decree Number: SK-101/MBU/05/2023 dated May 19, 2023 concerning Appointment Member of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Appointed as President Commissioner/Independent Commissioner based on the Ministry of SOEs Decree at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK-2/MBU/01/2024 dated January 3, 2024.

Periode Menjabat

Term of Office

19 Mei 2023 – 20 Mei 2028 (Periode Pertama).
May 19, 2023 – May 20, 2028 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Pelindo (2023-sekarang).
Chair of the Pelindo Integrated Governance Committee (2023-present).

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.
Does not hold any shares in the Company.



SUDUNG SITUMORANG

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian

Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Tapanuli Utara, pada tahun 1961. Usia 62 tahun per Desember 2023.

Born in Tapanuli Utara in 1961. 62 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S2 bidang Hukum dari Universitas Indonesia (2003).
- Master's degree in Law from Universitas Indonesia (2003).

Sertifikasi

Certification

-

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu NTT (2002-2004).
- Kepala Kejaksaan Negeri Blora (2004-2009).
- Kepala Kejaksaan Negeri Medan (2009-2015).
- Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tanjung Pinang (2015-2016).
- Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2016-2017).
- Staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Tindak Pidana Khusus (2017-2021)
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (11 Juni 2021-sekarang).
- Plt Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (22 Februari 2023-19 Mei 2023).
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2024-sekarang).
- Head State Attorney, Kefamenanu NTT (2002-2004).
- Head State Attorney, Blora (2004-2009).
- Head State Attorney, Medan (2009-2015).
- Chief Prosecutor, Riau islands, Tanjung Pinang (2015-2016).

- Chief Prosecutor, DKI Jakarta (2016-2017).
- Expert Staff for the Indonesian Attorney General for Special Crimes (2017-2021).
- Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021)
- Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (June 11, 2021-present).
- Acting President Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (February 22, 2023-May 19, 2023).
- Independent Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2024-present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-192/MBU/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Diangkat menjadi Plt Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-34/MBU/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Kemudian diangkat menjadi Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-2/MBU/01/2024 tanggal 3 Januari 2024. Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Decree

Number: SK-192/MBU/06/2021 dated June 11, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Appointed as Acting President Commissioner based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Decree Number: SK-34/MBU/02/2023 dated February 22, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Company's Board of Commissioners Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Appointed as an Independent Commissioner based on the Ministry of SOEs Decree at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK-2/MBU/01/2024 dated January 3, 2024.

Periode Menjabat

Term of Office

11 Juni 2021 – 10 Juni 2026 (Periode Pertama).
June 11, 2021 – June 10, 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo (2023-sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Pelindo (2023-sekarang).
- Chair of the Pelindo Nomination and Remuneration Committee (2023-present).
- Member of the Pelindo Integrated Governance Committee (2023-present).

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.



DIDI SUMEDI

Komisaris
Commissioner



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Bogor, pada tahun 1964. Usia 59 tahun per Desember 2023.

Born in Bogor in 1964. 59 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S1 bidang Sosial Politik Administrasi Negara dari Universitas Padjajaran Bandung (1988).
- S2 bidang *Master of Business Administration* dari Saint Marys University, Kanada (1996).
- Bachelor's degree in Socio-Political State Administration from Universitas Padjajaran Bandung (1988).
- Master's degree in Business Administration from Saint Mary's University, Canada (1996).

Sertifikasi Certification

-

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (2020-2021).
- Komisaris Utama PT Perdagangan Indonesia (Persero) (2020).
- Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (2021-sekarang).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (11 Juni 2021-sekarang).
- Director General of Foreign Trade, Ministry of Trade (2020-2021).
- President Commissioner, PT Perdagangan Indonesia (Persero)(2020).
- Director General for National Export Development (2021-present).
- Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021).
- Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (11 Juni 2021-present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-192/MBU/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Decree Number: SK-192/MBU/06/2021 dated June 11, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Periode Menjabat

Term of Office

11 Juni 2021 – 10 Juni 2026 (Periode Pertama).
June 11, 2021 – June 10, 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

- Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan (2021-sekarang).
- Wakil Ketua Komite Audit Pelindo (2021-sekarang).
- Director General for National Export Development (2021-present).
- Deputy Chairperson of the Pelindo Audit Committee (2021-present).

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.



HERU SUKANTO

Komisaris
Commissioner



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Surabaya, pada tahun 1957. Usia 66 tahun per Desember 2023.

Born in Surabaya in 1957. 66 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S1 bidang Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya (1982).
- S2 bidang Manajemen Pemasaran dari PPM Jakarta (2000).
- Bachelor's degree in Law from Universitas Airlangga Surabaya (1982).
- Master's degree in Marketing Management from PPM Jakarta (2000).

Sertifikasi

Certification

-

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Direktur Utama Bank Argo BRI Tbk, Jakarta (2012-2016).
- Direktur Utama Bank Banten Tbk, (2016-2017).
- Komisaris Bank Argo BRI Tbk, Jakarta (2017-2019).
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020-2021).
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang).
- President Director, Bank Argo BRI Tbk, Jakarta (2012-2016).
- President Director, Bank Banten Tbk, (2016-2017).
- Commissioner, Bank Argo BRI Tbk, Jakarta (2017-2019).
- Independent Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020-2021).
- Independent Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-335/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Decree Number: SK-335/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Periode Menjabat

Term of Office

1 Oktober 2021 – 30 September 2026 (Periode Pertama).
October 1, 2021 – September 30, 2026 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

- Ketua Komite Audit Pelindo (2021-sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Pelindo (2023-sekarang).
- Chair of the Pelindo Audit Committee (2021-present).
- Member of the Pelindo Integrated Governance Committee (2023-present).

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.



ARIF TOHA TJAHJAGAMA

Komisaris
Commissioner



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Sidoarjo, pada tahun 1967. Usia 56 tahun per Desember 2023.

Born in Sidoarjo in 1967. 56 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S1 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1991).
- S2 bidang Ekonomi Transportasi dari Universitas Lyon II Perancis (1996).
- Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1991).
- Master's degree in Transportation Economics from Lyon II University, France (1996).

Sertifikasi

Certification

-

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Kepala Seksi Penyusunan Rencana, Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak (2010-2012).
- Kepala Seksi Rencana dan Program Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak (2012-2014).
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor OP Utama Tanjung Perak (2014-2015).
- Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (2015-2016).
- Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (2016).
- Kepala Sub Direktorat Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan (2016-2017).
- Kepala Distrik Navigasi Kelas III Tarakan (2017-2018).

- Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (2018).
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (2018-sekarang).
- PLT Direktur Jenderal Perhubungan Laut (2021-Agustus 2022).
- Direktur Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2022-sekarang).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2022-sekarang).
- Head of Planning Section, Planning and Construction of Tanjung Perak Main Port Authority Office (2010-2012).
- Head of the Plans and Programs Section at the Tanjung Perak Main Port Authority Office (2012-2014).
- Head of Planning and Development at Tanjung Perak Main OP Office (2014-2015).
- Head of Sub-Directorate for Special and Supporting Sea Transportation at the Directorate of Traffic and Sea Transportation (2015-2016).
- Head of the Sub-Directorate for Special Sea Transportation and Related Service Businesses, at Traffic and Sea Transportation Directorate (2016).
- Head of Port Development Planning and Planning Sub-Directorate (2016-2017).
- Head of Tarakan Class III Navigation District (2017-2018).
- Head of Tanjung Priok Main Port Authority Office (2018).
- Secretary to the Directorate General of Sea Transportation (2018-present).
- Acting Director General of Sea Transportation (2021-August 2022).
- Director General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2022-present).
- Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2022-present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-206/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs Decree No. SK-206/MBU/09/2022 dated September 20, 2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Periode Menjabat

Term of Office

20 September 2022 – 19 September 2027

(Periode Pertama).

September 20, 2022 – September 19, 2027 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

- Direktur Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2022 – sekarang).
- Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo (2022-sekarang).
- Director General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2022 – present).
- Deputy Chair of Pelindo's Nomination and Remuneration Committee (2022-present).

Kepemilikan Saham

Share Ownership

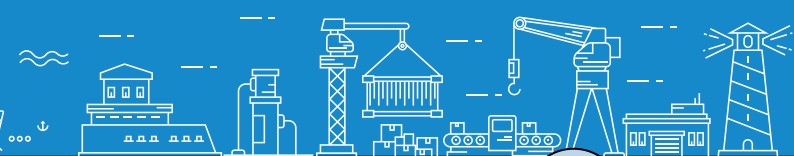
Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.



JODI MAHARDI

Komisaris
Commissioner



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
DKI Jakarta, Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Bandung, pada tahun 1977. Usia 46 tahun per Desember 2023.

Born in Bandung in 1977. 46 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S1 bidang Manajemen dari University of Massachusetts, Boston (2003).
- S2 bidang *International Affairs* dari University of St. Thomas, Houston (2011).
- Bachelor's degree in Management from the University of Massachusetts, Boston (2003).
- Master's degree in International Affairs from the University of St. Thomas, Houston (2011).

Sertifikasi

Certification

-

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2021-2022).
- Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2022-sekarang).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-sekarang).
- Deputy for Maritime Resources Coordination at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2021-2022).
- Deputy for Maritime Sovereignty and Energy Coordination at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2022-present).
- Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-34/MBU/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Decree Number: SK-34/MBU/02/2023 dated February 22, 2023 concerning Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Periode Menjabat

Term of Office

22 Februari 2023 – 21 Februari 2028 (Periode Pertama).
February 22, 2023 – February 21, 2028 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

- Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2022-Sekarang).
- Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo (2023-sekarang).
- Deputy for Maritime Sovereignty and Energy Coordination at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2022-present).
- Chairman of the GCG and Risk Management Monitoring Committee of Pelindo (2023-present).

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.



ANDUS WINARNO

Komisaris
Commissioner



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian



Domisili
Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Kebumen, pada tahun 1971. Usia 52 tahun per Desember 2023.

Born in Jakarta in 1971. 52 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- S1 bidang Ekonomi dari University Merdeka Malang (1994).
- S2 bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2012).
- Bachelor's degree in Economics from Merdeka University Malang (1994).
- Master's degree in Law from Universitas Indonesia (2012).

Sertifikasi

Certification

-

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Kepala Bidang usaha Infrastruktur dan Logistik IIb (2010-2013).
- Kepala Bidang Usaha Industri Primer IIIb (2013-2014).
- Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN RI (2014-2016).
- Kepala Bidang Kebijakan SDM Eksekutif BUMN (2014-2015).
- Kepala Bidang Kebijakan Sumber Daya Manusia Eksekutif BUMN (2015-2016).
- Asisten Deputi Data dan Teknologi Informasi (2016-2019).
- Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Eksekutif BUMN (2019-2020).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-sekarang).

- Head of Infrastructure and Logistics Business Division IIb (2010-2013).
- Head of Primary Industry Business Sector IIIb (2013-2014).
- Assistant Deputy for Human Resources Management, Ministry of BUMN RI (2014-2016).
- Head Executive HR Policy Division, BUMN (2014-2015).
- Head Executive Human Resources Policy Division, BUMN (2015-2016).
- Assistant Deputy for Data and Information Technology (2016-2019).
- Assistant Deputy for Executive Human Resources Management, BUMN (2019-2020).
- Commissioner, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-2/MBU/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Decree Number: SK-2/MBU/01/2024 dated January 3, 2024 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Determination of Independent Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Periode Menjabat

Term of Office

3 Januari 2024 – 2029 (Periode Pertama).
January 3, 2024 – 2029 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.
Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.
Does not hold any shares in the Company.



MUCHTAR LUTHFI MUTTY*

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Kewarganegaraan
Nationality
Indonesian

Domisili
Domicile
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia

Place and Date of Birth/Age

Lahir di Masamba, pada tahun 1956. Usia 67 tahun per Desember 2023.

Born in Masamba in 1956. 67 years old as at December 2023.

Riwayat Pendidikan

Education History

- Program Sarjana Muda APDN Makassar (1978).
- Program Sarjana Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta Tahun (1985).
- S2 bidang Kajian Ketahanan Nasional dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1994).
- S2 bidang Administrasi Negara dari STIA YAPPANN Jakarta (2012).
- APDN Baccalaureate Program, Makassar (1978).
- Institute of Government Sciences Undergraduate Program (IIP) Jakarta (1985).
- Master's degree in National Resilience Study from Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1994).
- Master's degree in State Administration from STIA YAPPANN Jakarta (2012).

Sertifikasi

Certification

-

Pengalaman Kerja

Work Experience

- Camat Wotu Kabupaten Luwu (1986-1989).
- Dosen Institute Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri (1989-1999).
- Bupati Luwu Utara (1999-2009).
- Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014).
- Komisaris PTPN XIV (2010-2014)
- Anggota DPR RI (2014-2019).
- Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI (2019-sekarang).
- Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Sulawesi Selatan (2020-2022).
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2024).
- Camat Wotu, Luwu Regency (1986-1989).
- Lecturer at the Institute of Government Science, Ministry of Home Affairs (1989-1999).
- North Luwu District Head (1999-2009).
- Special Staff to the Vice President of the Republic of Indonesia (2009-2014).
- Commissioner at PTPN XIV (2010-2014).
- DPR RI Member (2014-2019).
- Special Staff for the Deputy Chairperson at MPR RI (2019-present).
- Member of the Governor's Team for the Acceleration of Development (TGUPP) at South Sulawesi Province (2020-present).
- Independent Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present).

Dasar Hukum Pengangkatan

Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-396/MBU/12/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Appointed for the first time as Independent

Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Decree Number: SK-396/MBU/12/2021 dated December 9, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Periode Menjabat

Term of Office

9 Desember 2021 – 3 Januari 2024 (Periode Pertama).

November 2019 – 2024 (First Period).

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

- Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI (2019-sekarang).
- Wakil Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo (2022-2023).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Pelindo (2023).
- Special Staff to the Deputy Chairman of the MPR RI (2019-present).
- Deputy Chairperson of Pelindo GCG and Risk Management Monitoring Committee (2021-present).
- Member of the Pelindo Integrated Governance Committee (2023).

Kepemilikan Saham

Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

*Berhenti menjabat sejak 3 Januari 2024

*Resigned from office on January 3 2024



1

ARIF TOHA TJAHJAGAMA

Komisaris
Commissioner

2

AGUS SUHARTONO

Komisaris Utama
President Commissioner

3

HERU SUKANTO

Komisaris Independen
Independent Commissioner



4

SUDUNG SITUMORANG

Komisaris
Commissioner

5

DIDI SUMEDI

Komisaris
Commissioner

6

JODI MAHARDI

Komisaris
Commissioner

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' AFFILIATED RELATIONSHIPS

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Affiliated Relationships

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris Board of Commissioners' Financial, Familial and Management Relationships															
Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationships with						Hubungan Keluarga dengan Familial Relationships with						Hubungan Kepengurusan Management Relationships	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Agus Suhartono	Komisaris Utama President Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Andus Winarno	Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√		√

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Komposisi Dewan Komisaris telah terjadi beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan Pemegang Saham sebagaimana penjelasan berikut:

Komposisi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Periode 1 Januari 2023 – 22 Februari 2023

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari sampai dengan 22 Februari 2023 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Pelindo. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERSHIP COMPOSITION AND REASONS FOR THE CHANGES

There were several changes in the Board of Commissioners composition in accordance with the needs of Shareholders as shown below:

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Commissioners Composition for The Period January 1, 2023 – February 22, 2023

The Board of Commissioners composition for the period January 1, 2023 to February 22, 2023 consisted of 7 (seven) people, including 1 (one) Acting President Commissioner/Independent Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners. The Board of Commissioners composition and basis of appointment can be seen in the table below.



Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2023 – 22 Februari 2023

Board of Commissioners Composition and Basis of Appointment for the period January 1, 2022 – February 22, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Marsetio	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) Independent Commissioner (Acting President Commissioner)	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-206/MBU/09/2022 Minister of SOEs Decree No. SK-206/MBU/09/2022	20 September 2022 September 20, 2022
Antonius Rainier Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-396/MBU/12/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-396/MBU/12/2021	9 Desember 2021 December 9, 2021

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 22 FEBRUARI 2023 – 19 MEI 2023

Pada tanggal 22 Februari 2023 Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan memberhentikan dengan hormat Marsetio sebagai Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) dan Antonius Rainier Haryanto sebagai Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Kemudian, Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga memutuskan untuk mengangkat Jodi Mahardi sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 22 Februari 2023 sampai dengan 19 Mei 2023 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Komisaris Utama/Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD FEBRUARY 22, 2023 – MAY 19, 2023

On February 22, 2023, the Ministry of BUMN at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) decided to honorably dismiss Marsetio as Independent Commissioner (Acting Vice President Commissioner) and Antonius Rainier Haryanto as Independent Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Then, the Ministry of BUMN at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) appointed Jodi Mahardi as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Thus, the Board of Commissioners composition for the period February 22, 2023 to May 19, 2023 was 6 (six) people consisting of 1 (one) Acting President Commissioner/Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 3 (three) Commissioners. The Board of Commissioners composition and basis for appointment can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 22 Februari 2023 – 19 Mei 2023
Board of Commissioners Composition and Basis of Appointment for the period February 22, 2023 – May 19, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Sudung Situmorang	Komisaris (Pjt. Komisaris Utama) Commissioner (Acting President Commissioner)	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-206/MBU/09/2022 Minister of SOEs Decree No. SK-206/MBU/09/2022	20 September 2022 September 20, 2022
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-34/MBU/02/2023 Minister of SOEs Decree No. SK-34/MBU/02/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Muchtar Luthfi Muty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Minister of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-396/MBU/12/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-396/MBU/12/2021	9 Desember 2021 December 9, 2021

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 19 MEI 2023 – 3 JANUARI 2024

Pada tanggal 19 Mei 2023 Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan untuk mengangkat Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 19 Mei 2023 sampai dengan 3 Januari 2024 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD MAY 19, 2023 - JANUARY 3, 2024

On May 19, 2023, the Ministry of BUMN at the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) appointed Agus Suhartono as President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Thus, the Board of Commissioners composition for the period May 19, 2023 to January 3, 2024 was 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners and 4 (four) Commissioners. The Board of Commissioners composition and basis for appointment can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 19 Mei 2023 – 3 Januari 2024
Board of Commissioners Composition and Basis of Appointment for the period May 19, 2023 – January 3, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Agus Suhartono	Komisaris Utama President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-101/MBU/05/2023 Minister of SOEs Decree No. SK-101/MBU/05/2023	19 Mei 2023 May 19, 2023
Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021



Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 19 Mei 2023 – 3 Januari 2024

Board of Commissioners Composition and Basis of Appointment for the period May 19, 2023 – January 3, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-206/MBU/09/2022 Minister of SOEs Decree No. SK-206/MBU/09/2022	20 September 2022 September 20, 2022
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-34/MBU/02/2023 Minister of SOEs Decree No. SK-34/MBU/02/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Muchtar Luthfi Muty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-396/MBU/12/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-396/MBU/12/2021	9 Desember 2021 December 9, 2021

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 3 JANUARI 2024 – SAAT INI

Pada tanggal 3 Januari 2024 Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Muchtar Luthfi Mutty sebagai Komisaris Independen Perseroan, mengangkat Andus Winarno sebagai Komisaris Perseroan, menetapkan Agus Suhartono sebagai Komisaris Utama/Independen serta menetapkan Sudung Situmorang sebagai Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 3 Januari 2024 sampai dengan saat ini sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION FOR THE PERIOD JANUARY 3, 2024 - PRESENT

On January 3, 2024, the Ministry of SOEs at the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) General Meeting of Shareholders honorably dismissed Muchtar Luthfi Mutty as Independent Commissioner of the Company, and appointed Andus Winarno as Commissioner, Agus Suhartono as President Commissioner/Independent Commissioner, and Sudung Situmorang as Independent Commissioner. Thus, the Board of Commissioners composition for the period January 3, 2024 until now was 7 (seven) people consisting of 1 (one) President Commissioner/Independent Commissioner, 2 (two) Independent Commissioner and 4 (four) Commissioners. The Board of Commissioners composition and basis for appointment can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 3 Januari 2024 – Saat ini
Board of Commissioners Composition and Basis of Appointment for the period January 3, 2023 – Present

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Agus Suhartono	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-2/ MBU/01/2024 Ministry of SOEs Decree No. SK-2/ MBU/01/2024	3 Januari 2024 January 3, 2024
Sudung Situmorang	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-2/ MBU/01/2024 Ministry of SOEs Decree No. SK-2/ MBU/01/2024	3 Januari 2024 January 3, 2024
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK- 192/MBU/06/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-192/ MBU/06/2021	11 Juni 2021 June 11, 2021
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK- 206/MBU/09/2022 Minister of SOEs Decree No. SK-206/ MBU/09/2022	20 September 2022 September 20, 2022
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK- 34/MBU/02/2023 Minister of SOEs Decree No. SK-34/ MBU/02/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK- 335/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/ MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Andus Winarno	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-2/ MBU/01/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-2/ MBU/01/2024	3 Januari 2024 January 3, 2024



PROFIL PEKERJA

EMPLOYEE PROFILES

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON POSITION LEVEL

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin
Number of Employees Based on Gender

(dalam satuan orang)

(people)

Jenis Kelamin Gender	2023	2022
Pria Male	5.689	5.881
Wanita Female	1.299	1.325
Jumlah Total	6.988	7.206

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN LEVEL JABATAN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON RANK

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Jabatan
Number of Employees Based on Position Level

(dalam satuan orang)

(people)

Level Jabatan* Position Level*	2023	Level Jabatan Position Level	2022
23	56	1	9
22	96	2	42
21	245	3	67
20	177	4	117
19	385	5	131
18	255	6	275
17	591	7	356
16	926	8	415
15	278	9	553
14	591	10	1.103
13	423	11	1.091
12	629	12	1.068
11	732	13	795
10	704	14	415
9	258	15	158

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Jabatan
Number of Employees Based on Position Level

(dalam satuan orang)

(people)

Level Jabatan* Position Level*	2023	Level Jabatan Position Level	2022
8	185	16	156
7	162	17	117
6	293	18	127
Non KJ (calon pegawai) Non-KJ (prospective employees)	2	19	209
		20	2
Jumlah	6.988		7.206

*Level Jabatan menyesuaikan level jabatan terbaru pada tahun 2023
*Position Levels adjusted to the latest position levels in 2023

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN GOLONGAN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON AGE GROUP

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Golongan
Number of Employees Based on Rank

Level Jabatan Position Level	2023	2022
IA	331	549
IIA	139	252
IIB	567	469
IIC	498	603
IID	479	706
IIIA	647	927
IIIB	761	1.066
IIIC	970	884
IIID	511	592
IVA	309	390
IVB	195	259
IVC	143	244
IVD	47	183
IVE	22	80
Non Golongan Non-Group	1.369	-
Jumlah Total	6.988	7.204



JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN RENTANG USIA

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON AGE GROUP

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Rentang Usia
Number of Employees Based on Age Group

(dalam satuan orang)

(people)

Level Jabatan Age Group	2023	2022
Di atas 55 tahun above 55 years old	206	206
51 – 55 tahun years old	913	845
46 – 50 tahun years old	1.369	1.407
36 – 45 tahun years old	2.644	2.557
26 – 35 tahun years old	1843	2.168
Di bawah 26 tahun under 26 years old	13	23
Jumlah Total	6.988	7.206

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EMPLOYMENT STATUS

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Number of Employees Based on Education Level

(dalam satuan orang)

(people)

Level Jabatan Education Level	2023	2022
Pascasarjana Postgraduate	1.173	887
Sarjana Bachelor's degree	3.349	3.342
Sarjana Muda Baccalaureate	899	1.047
SLTA High School	1.566	1.926
SLTP Junior High School	1	4
Jumlah Total	6.988	7.206

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EMPLOYMENT STATUS

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian
Number of Employees Based on Employment Status

Status kepegawaian Employment status	2023	2022
Organik Organic	6.988	7.206
Non Organik Non-Organic	16.001	15.409
Jumlah Total	22.989	22.615



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Komposisi Pemegang Saham disajikan sebagai berikut:

The shareholder composition is as follows:

Tabel Komposisi Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Shareholder Composition

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Total Shares	Nominal (Rp) Nominal (Rp)	Kepemilikan Ownership
Negara Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	8.475.067	8.475.067.000.000	100%

Per 1 Januari 2023 dan 31 Desember 2023, tidak terdapat perubahan komposisi pemegang saham. Per 31 Desember 2023, tidak terdapat kepemilikan saham institusi lokal, kepemilikan institusi asing, kepemilikan individu lokal, dan kepemilikan individu asing.

As of January 1, 2023 and December 31, 2023, there were no changes in the shareholders composition. As of December 31, 2023, there were no local institutional ownership, foreign institutional ownership, local individual ownership, or foreign individual ownership.

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 (dua puluh) pemegang saham terbesar.

Composition of The 20 Largest Shareholders

As of December 31, 2023, Pelindo as a State-Owned Enterprise is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no information to report on the composition of the 20 (twenty) largest shareholders.

Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

Composition of The Shareholder Groups with 5% or More Share Ownership

As of December 31, 2023, Pelindo as a State-Owned Enterprise is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Information regarding the composition of shareholders of 5% or more of the Company has been explained in the description of the composition of shareholders.

Komposisi Kelompok Pemegang Saham Kurang dari 5%

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

Composition of The Shareholder Groups with Less Than 5% Share Ownership

As of December 31, 2023, Pelindo as a State-Owned Enterprise is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Information regarding the composition of shareholders of 5% or more of the Company has been explained in the description of the composition of shareholders.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Pelindo tidak mempunyai kepemilikan saham atas Pelindo. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%. Dengan demikian, Pelindo tidak menyajikan rincian anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung.

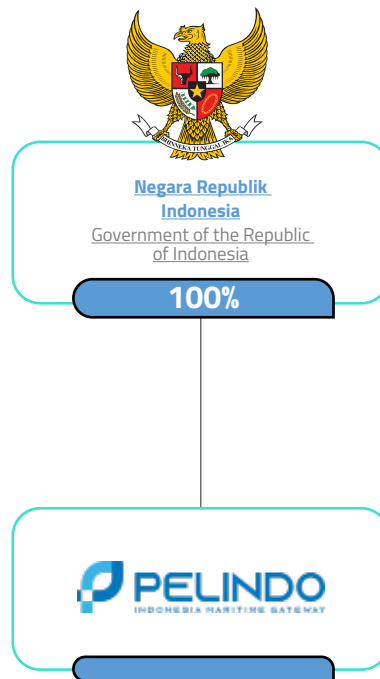
Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership

The Board of Commissioners and Board of Directors of Pelindo do not own any shares in Pelindo. 100% of the shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. So Pelindo does not report details of members of the Board of Directors or Board of Commissioners who own shares directly or indirectly.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI MAJORITY AND CONTROLLING SHAREHOLDER

Kepemilikan saham mayoritas Pelindo dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Pelindo adalah Negara Republik Indonesia sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

The majority share ownership of Pelindo is the Government of the Republic of Indonesia with 100% share ownership. Thus, the Majority and Controlling Shareholders of Pelindo is the Government of the Republic of Indonesia, and there is no indirect Majority and Controlling Shareholders, down to individual owners and there are no Shareholders acting on behalf of other shareholders.





DAFTAR ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

LIST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATE COMPANIES AND JOINT VENTURE COMPANIES

SUBHOLDING

SUBHOLDING

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
1.	PT Pelindo Terminal Petikemas	Bongkar Muat Petikemas Loading and Unloading Containers	Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya Jawa Timur 60165 Telp: (031) 3298631 – 37 Fax: - Email: info.tpk@pelindo.co.id Web: pelindotpk.co.id	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo (Persero) 99,997% ▪ PT ILCS 0,003% 	2021	Beroperasi Operational	18.713.691.972
2.	PT Pelindo Multi Terminal	Operator Terminal Multipurpose Multipurpose Terminal Operator	Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Belawan - Medan 20411 Telp: (061) 4100 0055 Fax: - Email: plmt@pelindomultiterminal.co.id Web: pelindomultiterminal.co.id	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo (Persero) 99,988% ▪ PT ILCS 0,012 % 	2021	Beroperasi Operational	5.845.836.809
3.	PT Pelindo Solusi Logistik	Logistik & Hinterland Development Logistics & Hinterland Development	Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara 14310 Telp: (021) 4301080 Fax: - Email: infosolusilogistik@pelindo.co.id Web: -	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo (Persero) 99,9878% ▪ PT ILCS 0,0036% ▪ PT PII 0,0086% 	2021	Beroperasi Operational	19.226.350.194
4.	PT Pelindo Jasa Maritim	Marine, Equipment dan Port Services (Pengerukan, Energi dan Utilitas) Marine, Equipment and Port Services (Dredging, Energy and Utilities)	Jl. Soekarno No. 1, Makassar 90173, Sulawesi Selatan Telp: - Fax: - Email: sekper.jasamaritim@pelindo.co.id Web: -	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo (Persero) 99,995% ▪ PT ILCS 0,005% 	2021	Beroperasi Operational	5.845.836.809

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
1	PT Prima Multi Terminal	Bongkar Muat Petikemas dan Nonpetikemas (Curah Cair, Curah Kering, General Cargo) Loading and Unloading of Containers and Non- Containers (Liquid Bulk, Dry Bulk, General Cargo)	Jl. Pelabuhan No. 1 Kuala Tanjung Kec. Sei Suka Kab. Batubara Sumatera Utara, 21657 Telp: (0622)-5341871 Fax: - Email: corp@ktmt.co.id Web: www.Primamultiterminal.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo (Persero): 97,73% PT PP (Persero) tbk: 1,26% PT Waskita Karya (Persero) tbk: 1,01% 	2019	Beroperasi Operational	3.840.359.090
2	PT Prima Husada Cipta Medan	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, dan Apotik Health Services for Hospitals, Clinics, and Pharmacies	Jl. Stasiun No. 92 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan, 20411 Telp: (061) 6941927 Fax: - Email: ptphcm@gmail.com Web: www.phcm.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo (Persero): 99,69% Koperasi Karyawan Kantor Pusat Pelindo I: 0,31% 	2016	Beroperasi Operational	57.449.938
3	PT Pelabuhan Indonesia Investama	Perusahaan Investasi Kepelabuhanan Port Investment Company	Pelindo Tower Lt. 11 Jl. Yos Sudarso No. 9, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, 14230 Telp: (021) 4301080 Fax: - Email: corsec@ipc-investco.com Web: www.ipc-investco.com	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo (Persero): 99,00% PT Multi Terminal Indonesia: 1,00% 	2017	Beroperasi Operational	1.136.182.103
4	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Teknologi Informasi Kepelabuhanan Port Information Technology	Pelindo Tower Lt. 11 Jl. Yos Sudarso No. 9, RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, 14230 Telp: (021) 80678250 Fax: - Email: customercare@ilcs.co.id Web: www.ilcs.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo (Persero): 99,00% PT Pengembang Pelabuhan Indonesia: 1,00% 	2012	Beroperasi Operational	312.341.922



ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
5	PT Electronic Data Interchange Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Konsultasi & Pengembangan Teknologi Informasi ▪ <i>Product & Project IT</i> sektor Government ▪ <i>Product & Project IT</i> sektor Private ▪ <i>Product & Project IT</i> sektor BUMN ▪ <i>Mass IT Product</i> ▪ Jasa Infrastruktur IT ▪ Information Technology Consulting & Development Services ▪ Government Product & Project IT sector ▪ Private IT Products & Projects Sector ▪ SOE IT Products & Projects Sector ▪ Mass IT Products ▪ IT Infrastructure Services 	<p>Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter, Jakarta Utara, 14360 Telp: (021) 650 5829 Fax: (021) 650 5987 Email: corporate@edi-indonesia. co.id Web: www.edi-indonesia.co.id</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo (Persero): 51,00% ▪ PT Sisindokom Teknologi: 49,00% 	1995	Beroperasi Operational	39.517.393
6	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Konsultasi & Pengembangan Teknologi Informasi ▪ <i>Product & Project IT</i> sektor Government ▪ <i>Product & Project IT</i> sektor Private ▪ <i>Product & Project IT</i> sektor BUMN ▪ <i>Mass IT Product</i> ▪ Jasa Infrastruktur IT ▪ Information Technology Consulting & Development Services ▪ Government Product & Project IT sector ▪ Private IT Products & Projects Sector ▪ SOE IT Products & Projects Sector ▪ Mass IT Products ▪ IT Infrastructure Services 	<p>Jl. Beringin I No. 1 Pandansari Gadog Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16720 Telp: (0251) 7555622/614 Marketing: 08111444601 Fax: - Email: marketing@pmli.co.id (Marketing), corpsec@pmli.co.id (Corporate Secretary) Web: www.pmli.co.id</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo (Persero): 99,00% ▪ PT Pelabuhan Indonesia Investama: 1,00% 	2013	Beroperasi Operational	130.534.953

ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
7	PT Pelindo Daya Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Jasa Tenaga Kerja (alih daya, pemborongan, harian lepas) ▪ Layanan Asesmen, Pelatihan dan Konsultasi (Asesmen, Psikotes, Rekrutmen, Sertifikasi, Pelatihan, e-learning) ▪ Layanan Pendukung Bisnis (Sistem Perparkiran, Jasa Kebersihan, Jasa Pertamanan) ▪ Manpower Services (Outsourcing, Chartering, Freelance Daily) ▪ Assessment, Training and Consulting Services Assessment, Psychological Test, Recruitment, Certification, Training, E-Learning ▪ Business Support Services Parking System, Cleaning Service, Landscaping Service 	Jl. Perak Timur 620, Surabaya Telp: 08113311711 Fax: - Email: tata.usaha@ptpds.co.id, marketing@ptpds.co.id Web: www.ptpds.co.id	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo (Persero): 90,00% ▪ Koperasi Pegawai Pelindo III: 10,00% 	2014	Beroperasi Operational	318.619.082



ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
8	PT Jakarta International Container Terminal	Pelayanan Jasa Terminal Bongkar Muat Barang dan Petikemas serta Kegiatan yang Berhubungan dengan Konsolidasi dan Distribusi Barang Terminal Services for Loading and Unloading Goods and Containers and Activities related to the Consolidation and Distribution of Goods	Jl. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung-Priok, Jakarta, 14310 Telp: (021) 80678100 Fax: (021) 80678111 Email: corsec@jict.co.id Web: www.jict.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo (Persero): 48,90% Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd.: 51,00% Koperasi Pegawai Maritim Tj. Priok: 0,10% 	1999	Beroperasi Operational	15.681.892.722

ENTITAS CUCU

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
1	PT IPC Terminal Petikemas	Terminal Peti Kemas dan Konvensional Container and Conventional Terminal	Jl. Raya Pelabuhan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 Telp: (021) 4301080, 4003899/77 Fax: - Email: - Website: www.iptpk.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,00% PT Pelabuhan Indonesia Investama: 1,00% 	2013	Beroperasi Operational	1.657.747.317
2	PT Prima Terminal Petikemas	Terminal Petikemas (Jasa Kepelabuhanan/ BUP) Container Terminal (Port Services/BUP)	Graha Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Telp: (061) 41000055 ext. 2216 Fax: - Email: prima@primatpk.com Web: www.primatpk.com	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,70% PT Integrasi Logistik Cipta Solusi: 0,30% 	2021	Beroperasi Operational	3.219.526.261
3	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	Terminal Petikemas (Jasa Kepelabuhanan/ BUP) Container Terminal (Port Services/BUP)	Jl. Perak Barat 379, Surabaya Telp: (031) 3291596 - 97 Fax: - Email: info@bjtiport.co.id Web: www.bjtiport.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Terminal Petikemas: 96,84% Koperasi Pegawai Pelindo III: 3,16% 	2002	Beroperasi Operational	5.090.674.893
4	PT Terminal Petikemas Surabaya	Terminal Petikemas Container Terminal	Jl. Tanjung Mutiara No. 1 Surabaya, 60177 Customer Service: (031) 3202020 Humas: 031-3283269 Email: cs@tps.co.id, humas@tps.co.id Web: www.tps.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,50% Koperasi Pegawai Pelindo III: 0,50% 	1999	Beroperasi Operational	2.533.702.957

ENTITAS CUCU

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
5	PT Terminal Teluk Lamong	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut Marine Port Service Activities	Jl. Raya Tambak Osowilangun KM. 12, Surabaya, 60191 Telp: (031) 99001500 Fax: (031) 99001490 Email: terminal@teluklamong.co.id Web: www.teluklamong.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,50% Koperasi Pegawai Pelindo III: 0,50% 	2014	Beroperasi Operational	784.217.141
6	PT Kaltim Kariangau Terminal	Pelayanan Jasa Terminal Bongkar Muat Barang dan Petikemas serta Kegiatan yang Berhubungan dengan Konsolidasi dan Distribusi Barang Terminal Services for Loading and Unloading Goods and Containers and Activities Related to the Consolidation and Distribution of Goods	Jl. Pulau Balang No. 1 KM. 13 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan Telp: 08115377044 Fax: - Email: callcenter@kariangauterminal.co.id Web: www.kariangauterminal.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Terminal Petikemas: 50,00% Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya: 50,00% 	2012	Beroperasi Operational	219.707.058
7	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Bongkar Muat Nonpetikemas (Curah Cair, Curah Kering, General Cargo) Non-Container Loading and Unloading (Liquid Bulk, Dry Bulk, General Cargo)	Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara Telp: (021) 4301080 Fax: - Email: ptpmultipurpose@ptp.co.id Web: www.ptp.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Multi Terminal: 99,00% PT Pelabuhan Indonesia Investama: 1,00% 	2013	Beroperasi Operational	1.071.871.432
8	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Bongkar Muat Khusus Kendaraan, Alat Berat, Sparepart Loading and Unloading Specifically for Vehicles, Heavy Equipment, Spare Parts	Jl. Sindang Laut No. 100 Cilincing, Jakarta Utara Telp: (021) 43932251 Fax: (021) 43932250 Email: indo@indonesiacarterminal.co.id Web: www.indonesiacarterminal.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Multi Terminal: 71,28% PT Pelabuhan Indonesia Investama: 5,54% PT Multi Terminal Indonesia: 0,72% Publik: 22,46% 	2012	Beroperasi Operational	1.788.314.387
9	PT Terminal Curah Semarang	Terminal dan Persewaan Tangki Curah Cair Liquid Bulk Tank Terminal and Rental	Jl. Deli No. 8 Pelabuhan, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, 50249 Telp: (024) 86578169 Fax: - Email: - Web: -	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Multi Terminal: 100% 	2016	Beroperasi Operational	7.558.425



ENTITAS CUCU

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
10	PT Prima Pengembang Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Real Estate ▪ Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis ▪ Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi ▪ Konstruksi ▪ Informasi dan Komunikasi ▪ Pengangkutan dan Pergudangan ▪ Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin ▪ Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor ▪ Real Estate ▪ Scientific and ▪ Technical Professional Activities Water Management, Waste Water Management, Waste Recycling Management and Remedial Activities ▪ Construction ▪ Information and Communication ▪ Transportation and Warehousing ▪ Procurement of Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air ▪ Wholesale and Retail Trade, Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles 	Graha Pelindo Satu Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan, 20411 Telp: (061) 6628088 Fax: Email: primakawasan@ ptppk.co.id Web: -	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo Solusi Logistik: 90,00% ▪ PT Prima Multi Terminal: 10,00% 	2015	Beroperasi Operational	901.110.844
12	PT Prima Indonesia Logistik	Pengusahaan Kegiatan Bisnis Logistik Logistics Business Activities	Jl. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI, Ujung Baru Belawan Telp: 081397512125 Fax: (061) 6940113 Email: andilesmana@ primaindonesialogistik. com, bisnislogistik@ primaindonesialogistik. com Web: www. primaindonesialogistik. com	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo Solusi Logistik: 99,67% ▪ Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha TPK Kotamadya Medan: 0,33% 	2015	Beroperasi Operational	351.398.270

ENTITAS CUCU

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
13	PT Multi Terminal Indonesia	Jasa Logistik Logistics Services	Jl. Pulau Payung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara Telp: (021) 29104000 Fax: - Email: customercare.ipclogistic.co.id Web: www.ipclogistic.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Solusi Logistik: 99,00% Koperasi Pegawai Maritim Tj. Priok: 1,00% 	2002	Beroperasi Operational	870.683.654
14	PT Nusantara Terminal Services	Perusahaan Bongkar Muat, Usaha Angkutan Multimoda, <i>Trucking</i> dan Transportasi Darat, <i>Project Cargo Marine Services</i> Loading and Unloading Company, Multimodal Transportation Business, <i>Trucking and Land Transportation, Project Cargo Marine Services</i>	Plasa Intan PT Pelindo (Persero) Lantai 1 Jl. H. I. A. Saleh Dg. Tompo No. 11, Makassar, 90112 Telp: (0411) 3624453 Fax: (0411) 3624453 Email: pt.nts_makassar@yahoo.co.id, ptnts.memberofp4@gmail.com Web: -	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Solusi Logistik: 99,16% Koperasi Karyawan PT Pelabuhan Indonesia IV: 0,84% 	2013	Beroperasi Operational	-
15	PT Akses Pelabuhan Indonesia	Pengembangan Jalan Tol Toll Road Development	Maritime Tower Lantai 12 Jl. Yos Sudarso No. 9 Kec. Koja, Jakarta Utara, 14230 Telp: (021) 6456310 Fax: - Email: adm.api@portaccess.co.id Web: www.portaccess.com/	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Solusi Logistik: 99,68% PT Pelabuhan Tanjung Priok: 0,32% 	2014	Beroperasi Operational	12.740.434.429
16	PT Menara Maritim Indonesia	Properti, <i>Real Estate</i> Property, Real Estate	Maritime Tower Lt 8, Jalan Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara Telp: (021) 22444557 Fax: - Email: corporate@menara-maritim.co.id Web: -	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Solusi Logistik: 99,97% PT Akses Pelabuhan Indonesia: 0,03% 	2018	Beroperasi Operational	975.950.321
17	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <i>Equipment Maintenance</i> <i>Engineering Project & Consultancy</i> <i>Equipment Provider</i> <i>Port Equipment Manufacture</i> <i>Marine Equipment Maintenance</i> <i>Spareparts & Fuel Supplies</i> 	Gedung Rukindo Lt. 4 Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta, 14430 Telp: (021) 2243 4285 Fax: - Email: corpsec@jppi.co.id Web: www.ipcportequipment.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Jasa Maritim: 99,00% PT Pelabuhan Indonesia Investama: 1,00% 	2012	Beroperasi Operational	256.166.225



ENTITAS CUCU

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
18	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Jasa Pandu ▪ Pelayanan Jasa Tunda ▪ Pelayanan Jasa Pengangkutan Kapal ▪ Pelayanan Jasa Pengelolaan Kapal ▪ Pilot Services ▪ Tug Services ▪ Services ▪ Ship Freight ▪ Ship Management Services 	<p>Gedung Rukindo Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta, 14430</p> <p>Gedung Citra Towers North Tower Lantai 21 Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta 10630 Telp: (021) 4306789 Email: corsec@ ipcmarine.co.id Web: www.ipcmarine. co.id</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo Jasa Maritim: 76,89% ▪ PT Multi Terminal Indonesia: 0,11% ▪ Publik: PT Pelabuhan Indonesia Investama: 11,05% ▪ Lain-lain: 11,80% ▪ Treasury Stock: 0,15% 	2012	Beroperasi Operational	1.522.134.613
19	PT Energi Pelabuhan Indonesia	<p>Pengelolaan Utilitas yang Meliputi Ketenagalistrikan, Kontraktor Ketenagalistrikan, Pelayanan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah</p> <p>Utilities Management Including Electricity, Electricity Contractors, Clean Water Services and Waste Management</p>	<p>Gedung PLN UP3 Tanjung Priok Jl. Yos Sudarso No. 30, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14320 Telp: (021) 4305047 Fax: (021) 4305052 Email: corsec@ ecopowerport.co.id Web: www. ecopowerport.co.id</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo Jasa Maritim: 55,00% ▪ PT Haleyora Power: 45,00% 	2013	Beroperasi Operational	202.038.387
20	PT Pengerukan Indonesia	<p>Pengerukan, Reklamasi, Galangan dan Perbengkelan Kapal</p> <p>Dredging, Reclamation, Shipbuilding and Workshop</p>	<p>Gedung PT Rukindo Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta, 14430 Telp: (021) 4301380 Fax: - Email: corsec@rukindo. co.id, admin@rukindo. co.id Web: www.rukindo.co.id</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo Jasa Maritim: 99,91% ▪ PT Pengembang Pelabuhan Indonesia: 0,09% 	1983	Beroperasi Operational	322.325.698
21	PT Pelindo Marine Service	<p><i>Integrated Marine Services dengan Menyediakan Ragam Layanan Maritim Terintegrasi Mulai dari Jasa Penundaan dan Pemanduan Kapal, Pengerukan dan Penyiapan Lahan, Manajemen Alur Pelayaran, Logistik dan Distribusi Energi, Hingga Jaringan Transportasi Multimoda dan Penanganan Project Cargo</i></p> <p>Integrated Marine Services Providing Integrated Maritime Services Ranging from Ship Towing and Pilotage Services, Dredging and Land Preparation, Shipping Channel Management, Logistics and Energy Distribution, to Multimodal Transportation Networks and Project Cargo handling.</p>	<p>Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, 60165 Telp: (031) 3282321, 3282278 Fax: - Email: info@ pelindomarines.com Web: -</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo Jasa Maritim: 98,23% ▪ Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,77% 	2011	Beroperasi Operational	2.554.757.145

ENTITAS CUCU

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
22	PT Equiport Inti Indonesia	Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Alat Berat Heavy Equipment Maintenance and Maintenance Services	Jl. H. I. A. Saleh Dg Tompo No. 11, Makassar, 90112 Telp: (0411) 8001649, 8002092 Fax: - Email: makassar.equiport@gmail.com Web: www.equiport.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Jasa Maritim: 99,29% Koperasi Karyawan PT Pelabuhan Indonesia IV: 0,71% 	2012	Beroperasi Operational	116.621.996

ENTITAS CICIT

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
1	PT New Priok Container Terminal 1	Pelayanan Jasa Terminal Bongkar Muat Barang dan Petikemas serta Kegiatan yang Berhubungan dengan Konsolidasi dan Distribusi Barang Terminal Services for Loading and Unloading Goods and Containers, and Activities Related to the Consolidation and Distribution of Goods	Jl. Terminal Kalibaru Raya Kav. B No. 1 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara Telp: (021) 29144888 Fax: (021) 29144888 Email: ccommercial@npct1.co.id Web: www.NPCT1.co.id	<ul style="list-style-type: none"> IPC TPK: 51% Sea Terminal Management Service PTE. LTD: 49% 	2016		3.614.560.817
2	PT Berlian Manyar Sejahtera	Terminal Nonpetikemas (Jasa Kepelabuhanan/BUP) Non Container Terminal (Port Services/BUP)	Office Gapura Surya Nusantara (GSN) Lt. 2 Jl. Perak Timur 620, Surabaya Telp: (031)-99097788 Fax: - Email: office@bms.jiipe.co.id Web: www.jiipe.com Port Pelabuhan JIPE Jl. Raya Manyar KM 11 Manyar, Gresik, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 60,00% Koperasi Pegawai Pelindo III: 40,00% 	2016	Beroperasi Operational	1.870.197.588.904



ENTITAS CICIT

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
3	PT Pelindo Properti Indonesia	Pelaksana konstruksi, Konstruksi Bangunan Komersial, Konstruksi Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa, Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, DAM dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara Construction, Commercial Building Construction, Hotel Construction, Restaurant and Similar Buildings, Construction of Waterways, Ports, Dams and Other Water Resources Infrastructure, Road Construction Except Flyovers, Roads, Railroads, and Airport Runways	Jl. Perak Barat No. 379 RT. 02 RW. 03 Kel. Perak utara Kec. Pabean Cantian, Surabaya Telp: (031) 3568050 Fax: - Email: sekper@pelindo properti.co.id Web: www.pelindo place.com	<ul style="list-style-type: none"> PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 99,93% Koperasi Pegawai Pelindo III: 0,07% 	2014	Beroperasi Operational	231.604.656
4	PT Berkah Industri Mesin Angkat	Port Equipment Services, Heavy Equipment Services, General Engineering, dan General Supplier Port Equipment Services, Heavy Equipment Services, General Engineering, and General Supplier	Jl. Perak Timur No. 428, Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, 60165 Telp: (031) 9909-3444 Fax: - Email: info@ptbima.id Web: www.ptbima.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 90,00% Koperasi Pegawai Pelindo III: 10,00% 	2015	Beroperasi Operational	320.603.667
5	PT Lamong Energi Indonesia	Kelistrikan dan Jasa Penunjang Lainnya (Pengelola Pembangkit Listrik, Penyedia Tenaga Listrik dan Fasilitas yang Berhubungan Dengan Kelistrikan serta Utilitas di Lingkungan Pelabuhan dan Kawasan Industri) Electricity and Other Supporting Services (Power Plant Managers, Providers of Electricity and Facilities related to Electricity and Utilities in Port and Industrial Areas)	Jl. Raya Tambak Osowilangon KM 12, Surabaya Telp: (031) 9900 1500 Fax: (031) 9900 1490 Email: info@lamongenergi.co.id Web: www.lamongenergi.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Terminal Teluk Lamong: 99% Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia: 1% 	2017	Beroperasi Operational	245.375.525

ENTITAS CICIT

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
6	PT Prima Multi Peralatan	Layanan Jasa Pemeliharaan Gedung, Alat Berat Bongkar Muat dan Kapal. Layanan <i>Engineering</i> Mekanikal dan Elektrikal. Building Maintenance Services, Loading and Unloading Heavy Equipment and Ships, Mechanical and Electrical Engineering Services	Jl. Beringin No. 88E Komplek Cemara Asri, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, 20371 Telp: 081262119880 Fax: - Email: info@p1-pmp.com Web: www.primamultiperalatan.com	<ul style="list-style-type: none"> PT Prima Indonesia Logistik: 99% PT Prima Multi Terminal: 1% 	2018	Beroperasi Operational	74.980.484
7	PT Pelindo 3 Terminal Petikemas	Layanan Bongkar Muat Pelabuhan Port Loading and Unloading Services	Jl. Raya Manyar KM.11, Surabaya Telp: - Fax: - Email: - Web: -	<ul style="list-style-type: none"> PT Terminal Petikemas Surabaya: 99,00% Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,00% 	2016	Beroperasi Operational	678.882
8	PT Intan Sejahtera Utama	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (TKAD) Manpower Provider Services (TKAD)	Jl. H. I. A. Saleh Dg. Tompo No. 11, Makassar, 90112 Telp: (0411) 8944074 Fax: - Email: intansejahterautam@gmail.com Web: -	<ul style="list-style-type: none"> PT Nusantara Terminal Services: 99,60% PT Equipport Inti Indonesia: 0,40% 	2019	Beroperasi Operational	48.518.824
9	PT Pelindo Energi Logistik	Jasa Logistik baik Bidang Gas, <i>Liquid</i> / Cair BBM dan Non-BBM, serta Pengelolaan Limbah Logistics Services for Gas, Liquid Fuel and Non-Fuel, as well as Waste Management	Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, 60165 Telp: (031) 328 4275 Fax: (031) 328 4456 Email: info@pel.co.id Web: www.pel.co.id	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Marine Service: 98,90% PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 1,10% 	2014	Beroperasi Operational	630.154.381
10	PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	Jasa Konstruksi Bangunan Pelabuhan dan Dermaga, Pengerukan dan Penyiapan Lahan Port and Wharf Construction Services, Dredging and Land Preparation	Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, 60165 Telp: (031) 3283971 Fax: (031) 3283972 Email: info@ptapbs.com Web: www.ptapbs.com	<ul style="list-style-type: none"> PT Pelindo Marine Service: 93,00% PT Gerbang Sarana Utama: 7,00% 	2014	Beroperasi Operational	592.244.676



ENTITAS CICIT

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
11	PT Berkah Multi Cargo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha Logistik Multimoda: ▪ Solusi Rantai Pasok Logistik ▪ Angkutan Multimoda ▪ Petikemas ▪ Pengelolaan Pergudangan ▪ Project Cargo Handling ▪ Kepabeanan Angkutan Multimoda ▪ Multimodal Logistics Business ▪ Supply Chain Logistics Solutions ▪ Multimodal Transport ▪ Containers ▪ Warehousing Management ▪ Project Cargo Handling ▪ Multimodal Transport Customs 	<p>Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, 60165 Telp: (031) 3282271 Fax: - Email: info@bmclogistic.co.id Web: www.pelindologistics.co.id</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo Marine Service: 99,80% ▪ Koperasi Pegawai Pelindo III: 0,20% 	2017	Beroperasi Operational	103.265.557
12	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Badan Usaha Jalan Tol Toll Road Business	<p>Legalitas Domisili: Waskita Rajawali Tower Lt.7 Jl. Mayor Jendral M.T. Haryono Kav. 12-13, Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 13330</p> <p>Alamat Korespondensi: Tamansari Hive Office Building Lt.6 Unit B Jl. Mayor Jenderal D. I. Panjaitan Kav. 2A, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 13310</p> <p>Telp: (021) 2286 4760 Fax: (021) 2286 4761 Email: ctptollways@gmail.com Web: www.ctptollways.co.id</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Akses Pelabuhan Indonesia: 99,998% ▪ PT Menara Maritim Indonesia: 0,002% 	2021	Beroperasi Operational	12.717.009.033
13.	PT Tanjung Emas Daya Sejahtera	Pengelolaan Jasa Tally Tally Management Services	Terminal Berlian Jl. Prapat Kurung Utara, Surabaya, 60165 Telp: 085331237838 Fax: - Email: tu@teds.co.id Web: www.teds.co.id	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo Daya Sejahtera: 99,00 ▪ Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,00% 	2014	Beroperasi Operational	27.476.852
14.	PT Belawan New Container Terminal Terminal	Terminal Peti Kemas (Jasa Kepelabuhanan/ BUP) Container Terminal (Port Services/ BUP)	Grha Pelindo Satu, Gedung B Lt. 5, Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Telp: 081252266475 Email: bnct-id.care@bnct.id.com Web: https://portal.bnct-id.com/ss0/	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Prima Terminal Petikemas: 51% ▪ PT INA DPWorld Investment: 49% 	2024	Beroperasi Operational	-

PERUSAHAAN ASOSIASI

ASSOCIATED COMPANIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
1	PT Pelabuhan Patimban Internasional	Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Pelabuhan Patimban ref Terminal Kendaraan dan Terminal Petikemas Port Business Entity, Patimban Port Manager, Vehicle Terminal and Container Terminal	Menara Bank Mega, Lantai 24 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta, 12790 Telp: (021) 79175533 Fax: (021) 79173300 Email: - Web: -	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Terminal Petikemas Surabaya: 10,00% ▪ PT CT Corp Infrastruktur Indonesia: 37,00% ▪ PT Indika Logistics and Support Services: 29,00% ▪ PT U Connectivity Services: 29,00% 	2021	Belum Beroperasi Not yet Operational	1.996.354.665.735
2	PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Kawasan Industri, Pengadaan Listrik, Pengelolaan Air dan Limbah, Informasi dan Komunikasi Kawasan Industrial Estates, Electricity Procurement, Water and Waste Management, Regional Information and Communication	Jl. Raya Manyar KM. 11, Manyar, Gresik Telp: (031) 98540999 Fax: (031) 98540998 Email: - Web: www.jiipe.com	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 40,00% ▪ PT Usaha Era Pratama Nusantara: 60,00% 	Mulai Operasi secara Komersial pada tahun 2015 Commence Commercial Operations in 2015	Beroperasi Operational	9.876.598.590
3	PT Terminal Nilam Utara	Terminal dan Persewaan Tangki Curah Cair Liquid Bulk Tank Terminal and Rental	Jl. Nilam Utara No. 1, Pabean Cantian, Surabaya Telp: (031) 9909 4737 Fax: - Email: - Web: www.tnu.co.id	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 40,00% ▪ PT Andahanesa Abadi: 60,00% 	2018	Beroperasi Operational	387.995.130
4	MKO Maspion Kendaraan Terminal Indonesia	Pelayanan Jasa Terminal Kendaraan Vehicle Terminal Services	Jl. Beta Kawasan Industri Maspion V, Manyarsidomukti, Manyar Sido Mukti, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, 61151 Telp: (031) 99006314, 39921490 Fax: - Email: info@maspioncarterminal.co.id, mko.mtki@gmail.com Facebook: Maspion Car Terminal Website: www.maspioncarterminal.co.id	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Indonesia Kendaraan Terminal: 45,00% ▪ PT Maspion: 55,00% 	2015	Beroperasi Operational	3.212.745



PERUSAHAAN ASOSIASI

ASSOCIATED COMPANIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
5	PT Prima Tangki Indonesia	Jasa Sewa Tangki Timbun Storage Tank Rental Services	Jl. Rencong No. 1B, Pahlawan Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, 20233 Jl. Pelabuhan No. 3 Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab. Batu bara, 21257 Telp: (061) 4201 1470 Fax: - Email: Commercial@ Primatangki.co.id Web: www. Primatangki.co.id	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Prima Indonesia Logistik: 20% ▪ Charleston Logistic Pte Ltd: 49% ▪ PT Tason Putra Mandiri: 22,80% ▪ Tuan Gaotama Setiawan: 8,20% 	2019	Beroperasi Operational	220.351.640
6	PT Jasamarga Bali Tol	Pengoperasian dan Pelayanan Jalan Tol Toll Road Operation and Service	Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 02, Pesanggaran Pedungan Denpasar Selatan, Bali, 80222 Telp: - Fax: - Email: - Web: -	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo (Persero): 13,86% ▪ PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 64,44% ▪ Pemerintah Provinsi Bali: 6,32% ▪ Pemerintah Kabupaten Badung: 6,32% ▪ PT Angkasa Pura I (Persero): 6,31% ▪ PT Adhi Karya (Persero) Tbk: 0,79% ▪ PT Utama Karya (Persero): 0,79% ▪ PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero): 0,79% ▪ PT Wijaya Karya (Persero): 0,40% 	2013	Beroperasi Operational	1.940.424.000
7	PT Ambang Barito Nusapersada	Pengelolaan Alur Ambang Sungai Barito Barito River Threshold Management	Jl. Yos Sudarso No. 6 RT. 034/RW. 002 Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Telp: (0511) 4423345 Fax: (0511) 4423346 Email: - Web: www. ambapers.com	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo (Persero): 40,00% ▪ PD Bangun Banua Kalimantan Selatan: 60,00% 	2009	Beroperasi Operational	190.932.072
8	PT Lamong Nusantara Gas	Bisnis Bidang Logistik Baik Bidang Gas Logistics Business, in the Gas Sector	Kantor PGN Area Surabaya Lt. 4B Jl. Pemuda No. 56-58, Surabaya, 60271 Telp: (031) 5490555 Fax: - Email: info@ptlng. co.id Web: www.ptlng. co.id	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo Energi Logistik: 49,00% ▪ PT PGN LNG Indonesia: 51,00% 	2019	Beroperasi Operational	150.358.107

PERUSAHAAN ASOSIASI

ASSOCIATED COMPANIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
9	PT Rumah Sakit Pelabuhan	Pelayanan Kesehatan Health Services	Jl. Kramat Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14260 Telp: (021) 4403026 Fax: - Email: - Web: www.rspelabuhan.com	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo (Persero): 32,88% ▪ Koperasi Pegawai Maritim Tj. Priok: 0,12% ▪ PT Pertamina Bina Medika – IHC: 67,00% 	1999	Beroperasi Operational	534.797.409
10	PT Pelindo Husada Citra	Pelayanan Kesehatan Health Services	Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Tanjung Perak, Surabaya Telp: (031) 329 4801-3 Fax: (031) 329 4808 Email: - Web: www.phc.co.id	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pelindo (Persero): 31,73% ▪ PT Pertamina Bina Medika: 67,00% ▪ Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,27% 	1999	Beroperasi Operational	459.313.800
11.	PT Prima Citra Nutrindo	Jasaboga Catering Services	Jl. Perak Barat No. 55, Surabaya Telp: (031) 99018755 Fax: Email: Web: www.pcn-food.com	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 30,00% ▪ PT Pelindo Husada Citra: 70,00% 	2016	Beroperasi Operational	7.217.153
12	PT Pertamina Bina Medika	Pelayanan Kesehatan Health Services	Jl. Kyaimaja No.43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120 Telp: (021) 7219001 / (021) 7219299 Fax: - Email: info.pbmihc@pertamedika.co.id Web: www.pertamedika.co.id	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pertamina (Persero): 81,12% ▪ PT Pelindo (Persero): 6,00% ▪ PT Perkebunan Nusantara X: 5,62% ▪ PT Perkebunan Nusantara XI: 1,94% ▪ PT Perkebunan Nusantara XII: 1,74% ▪ PT Timah Tbk: 1,78% 	2008	Beroperasi Operational	7.669.867.960



PERUSAHAAN ASOSIASI

ASSOCIATED COMPANIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
13	PT Energi Manyar Sejahtera	Kelistrikan dan Jasa Penunjang Lainnya (Pengelola Pembangkit Listrik, Penyedia Tenaga Listrik dan Fasilitas yang Berhubungan dengan Kelistrikan serta Konsultasi dan Jasa Pendukung Bidang Ketenagalistrikan) Electricity and Other Supporting Services (Power Plant Managers, Electricity Providers and Electricity-Related Facilities as well as Consultancy and Support Services in the Electricity Sector)	Perak Timur No. 246, Surabaya Telp: (031) 681169 Fax: - Email: - Web: www.pcn-food.com	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 30,00% ▪ PT Usaha Era Pratama Nusantara: 45,00% ▪ PT Santiniluwansa Lestari: 15,00% ▪ PT Amanah Indo Invest: 10% 	2015	Beroperasi Operational	1.101.762

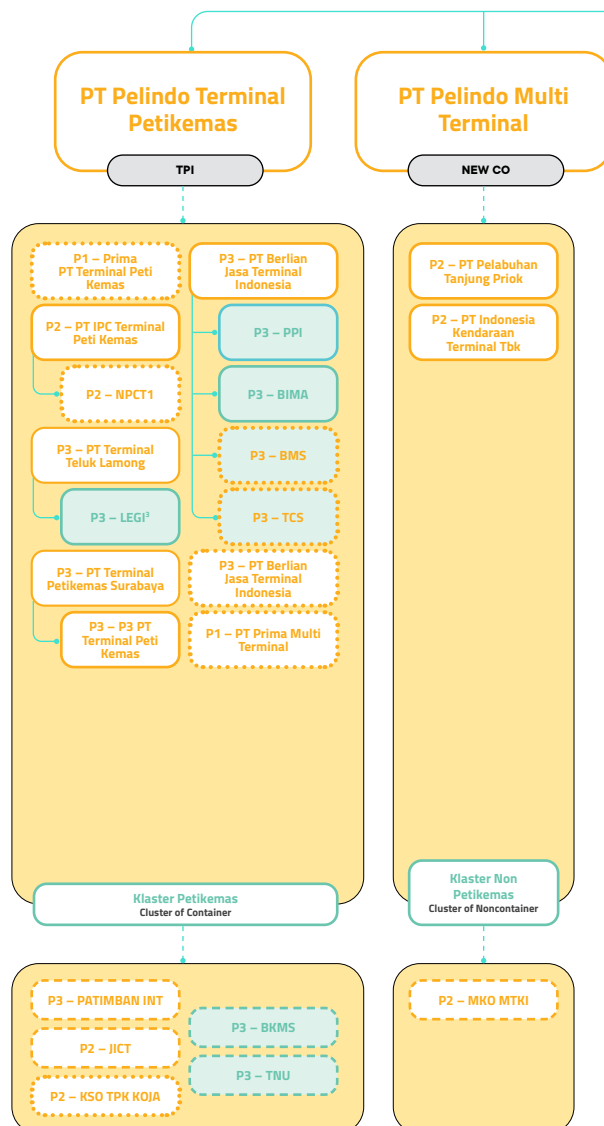
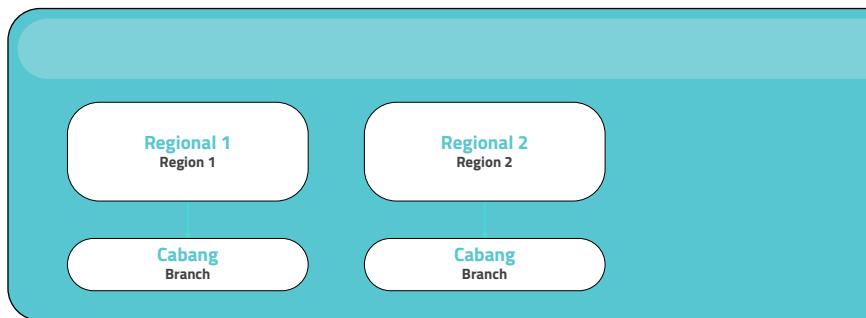
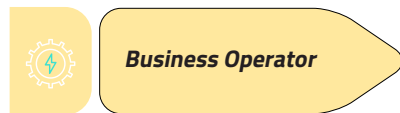
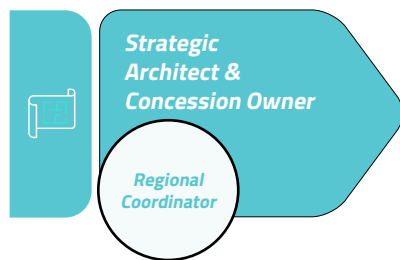
PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

JOINT VENTURE COMPANIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Beroperasi Year of Operations	Status Status	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)
1	KSO Terminal Petikemas Koj	Layanan Bongkar Muat dan Penumpukan Petikemas Loading and Unloading Services and Container Stacking	Jl. Digul No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14210 Telp: (021) 4374142 Fax: (021) 437-4150 Email: - Web: www.tpkkoja.co.id	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero): 54,91% PT Hutchison Port Indonesia: 45,09%	1998	Beroperasi Operational	6.686.387.583

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

COMPANY GROUP STRUCTURE



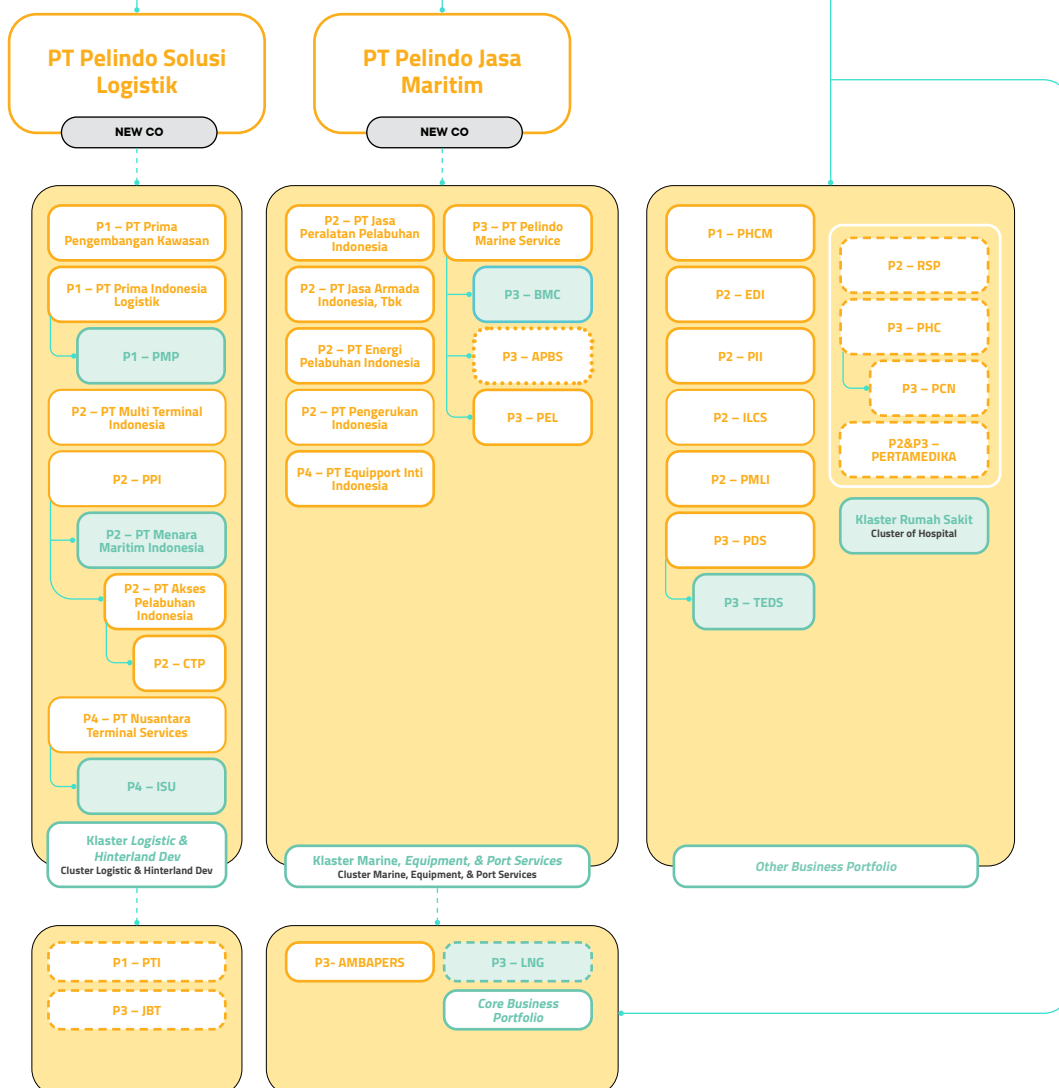
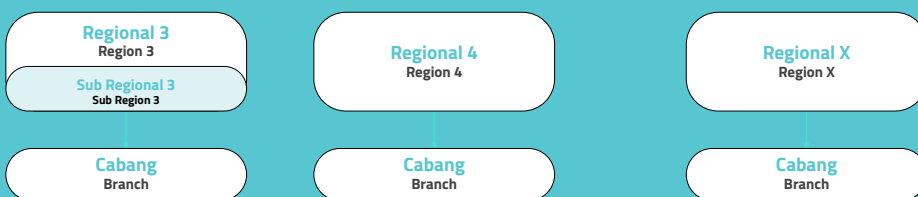
Legend:

- Anak Perusahaan Subsidiaries
- JV Majority
- JV Minority
- Berdasarkan hasil kajian lebih lanjut Results based on further review
- as-is/re purpose/opsi lain sesuai hasil kajian as-is/re purpose/other options according to the review results
- Oversight
- Arahan Strategis & Kontrol Control & Strategic Direction

Per 31 Desember 2023, Pelindo tidak memiliki *Special Purpose Vehicle* (SPV).
As of December 31, 2023, Pelindo does not have a *Special Purpose Vehicle* (SPV).



**Negara Republik
Indonesia**
Republic of Indonesia



KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

SHARE ISSUANCE CHRONOLOGY

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) per 31 Desember 2023 belum mencatatkan saham di Bursa Efek. Dengan demikian tidak terdapat informasi tentang kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek di mana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatikan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal.

Kronologis pendirian dan penerbitan saham Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

As of December 31, 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) had not yet listed its shares on the Stock Exchange. Therefore there is no information to report on the share listing chronology, number of shares, nominal value and offering price from the beginning of the listing to the end of the fiscal year, as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, share dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, convertible securities, and additions and reductions in capital.

The Company's shares issuance chronology can be explained as follows:

No	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/ Deed No. and Date	Notaris Notary	Pengesahan Endorsement	Keterangan Description
1	PP No. 57 Tahun 1991 PP No. 57 Year 1991	-	-	Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perum Pelabuhan II changed its status to become a Limited Liability Company (Persero).
2	Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Desember 1992 Deed of Establishment No. 3 dated December 1, 1992	Imas Fatimah, S.H	Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Republic of Indonesia Minister of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993.	Pendirian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Establishment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
3	Akta No. 4 tanggal 5 Mei 1998 Deed No. 4 dated May 5, 1998	Imas Fatimah, S.H	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C2-17612.HT.01.04.TH.98 tanggal 6 Oktober 1998. Minister of Law and Human Rights No. C2-17612. HT.01.04.TH.98 dated October 6, 1998.	Perubahan Anggaran Dasar. Amendments to the Articles of Association.
4	Akta No. 2 tanggal 15 Agustus 2008 Deed No. 2 dated August 15, 2008	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-80894. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008. Minister of Law and Human Rights No. AHU-80894. AH.01.02.Year 2008 dated November 3, 2008.	Perubahan Anggaran Dasar. Telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 Desember 2008. Amendments to the Articles of Association Announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated December 12, 2008.
5	Akta No. 3 tanggal 30 Juli 2009 Deed No. 3 dated July 30, 2009	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-04026 tanggal 16 Februari 2010. Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.10-04026 dated February 16, 2010.	Perubahan Anggaran Dasar. Amendments to the Articles of Association.



No	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/ Deed No. and Date	Notaris Notary	Pengesahan Endorsement	Keterangan Description
6	Akta No. 12 tanggal 21 September 2012 Deed No. 12 dated September 21, 2012	Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Pua, S.H., M.Kn.,	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-35061 tanggal 27 September 2012. Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.10-35061 dated September 27, 2012.	Perubahan Anggaran Dasar terakhir. Last amendments to the Articles of Association.
7	Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Deed No. 03 dated August 02, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,		Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013. The addition to the Company's issued and fully paid up capital was notified to the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights through Letter of Acceptance of Notification No. AHU- AH.01.10-38219 September 12, 2013.
8	Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Deed No. 03 dated August 02, 2013	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000.000. ▪ Dengan adanya penambahan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan/disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.017.611.000.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.000. ▪ The Government of the Republic of Indonesia, which in this case was represented by the Minister of State-Owned Enterprises, increased its capital participation in the Company to Rp426,418,000,000. ▪ With the additional capital from the Government of the Republic of Indonesia, the issued/paid-up capital of the Company increased from Rp1,017,611,000,000 to Rp1,444,029,000,000.
9	Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019 Deed No. 09 dated August 21, 2019	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	-	Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar. Changes in Type of Shares and Changes in the Articles of Association.
10	Akta No. 06 tanggal 1 Oktober 2021 Deed No. 06 dated October 1, 2021	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053926.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021. Minister of Law and Human Rights No. AHU-0053926. AH.01.0 dated October 1, 2021.	Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Modal yang semula sebesar Rp1.444.029.000.000 menjadi Rp8.475.067.000.000. Amendment to the Articles of Association, and Capital Increase from Rp1,444,029,000,000 to Rp8,475,067,000,000.

No	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/ Deed No. and Date	Notaris Notary	Pengesahan Endorsement	Keterangan Description
11	Akta No. 07 tanggal 1 Oktober 2021 Deed No. 07 dated October 1, 2021	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021. Minister of Law and Human Rights No. AHU-0053936.AH.01.02 dated October 1, 2021.	Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan. Change of Name, Change of Articles of Association and Company Logo.
12	Akta No. 02 tanggal 9 Februari 2022 Deed No. 02 dated February 9, 2022	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	Keputusan Menteri BUMN Negara No. S-38/MBU/01/2022. Minister of State-Owned Enterprises Decree No. S-38/MBU/01/2022.	Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Modal yang semula sebesar Rp8.475.067.000.000 menjadi Rp40.575.584.000.000. Amendment to the Articles of Association, and Capital Increase from Rp8,475,067,000,000 to Rp40,575,584,000,000.

KRONOLOGI PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

CHRONOLOGY OF BONDS, SUKUK AND/OR CONVERTIBLE BONDS ISSUANCE

INFORMASI OBLIGASI

INFORMATION ON BONDS

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi
Bonds Issuance Chronology

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date Issued	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (miliar) Amount of Bonds (billion)	Harga Penawaran Offering Price
1	Obligasi Domestik (PIGN A) Domestic Bond (PIGN A)	21 Juni 2016 June 21, 2016	3 Tahun 3 years	IDR	50.000	100%
2	Obligasi Domestik (PIGN B) Domestic Bond (PIGN B)	21 Juni 2016 June 21, 2016	5 Tahun 5 years	IDR	500.000	100%
3	Obligasi Domestik (PIGN C) Domestic Bond (PIGN C) Obligasi Global	21 Juni 2016 June 21, 2016	7 Tahun 7 years	IDR	400.000	100%
4	Obligasi Domestik (PIGN C) Domestic Bond (PIGN C) Obligasi Global	21 Juni 2016 June 21, 2016	10 Tahun 10 years	IDR	50.000	100%
5	Global Bond Obligasi Global	5 Mei 2015 May 5, 2015	10 Tahun 10 years	USD	1.100	98,99%
6	Global Bond Obligasi Global	5 Mei 2015 May 5, 2015	30 Tahun 30 years	USD	500	98,17%



Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
			2023	2022	
21 Juni 2019 June 21, 2019	8,25%	Lunas Paid	-	-	Bank Tabungan Negara (Persero)
21 Juni 2021 June 21, 2021	9%	Lunas Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
21 Juni 2023 June 21, 2023	9,50%	Lunas Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
21 Juni 2026 June 21, 2026	9,75%	Belum Lunas Not yet Paid	idAAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
5 Mei 2025 May 5, 2025	4,25%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa2 (Stable outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3 (Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	The Bank of New York Mellon
5 Mei 2025 May 5, 2025	5,38%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa2 (Stable outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3 (Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	The Bank of New York Mellon

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi
Bonds Issuance Chronology

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date Issued	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (miliar) Amount of Bonds (billion)	Harga Penawaran Offering Price
7	Global Bond Obligasi Global	2 Mei 2018 May 2, 2018	5 Tahun 5 years	USD	500	98,90%
8	Global Bond Obligasi Global	1 Oktober 2014 October 1, 2014	10 Tahun 10 years	USD	500	99,41%
9	Obligasi Domestik (PIKI A) Domestic Bond (PIKI A)	5 Juli 2018 July 5, 2018	5 Tahun 5 years	IDR	380.000	100%
10	Obligasi Domestik (PIKI B) Domestic Bond (PIKI B)	5 Juli 2018 July 5, 2018	7 Tahun 7 years	IDR	1.820.000	100%
11	Obligasi Domestik (PIKI C) Domestic Bond (PIKI C)	5 Juli 2018 July 5, 2018	10 Tahun 10 years	IDR	800.000	100%

Seluruh obligasi Domestik Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan Obligasi Global Perseroan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange (SGX).

All of the Company's Domestic Bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange, and the Company's Global Bonds are listed on the Singapore Stock Exchange (SGX).

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo belum menerbitkan sukuk.

INFORMATION ON SUKUK

As of December 31, 2023, Pelindo has not issued sukuk.

OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo belum menerbitkan obligasi konversi.

CONVERTIBLE BONDS

As of December 31, 2023, Pelindo has not issued convertible bonds.

**KRONOLOGI PENERBITAN
DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA
ISSUANCE AND/OR OTHER SECURITIES LISTING CHRONOLOGY**

Per 31 Desember 2023, Pelindo tidak memiliki sumber pendanaan lainnya.

As of December 31, 2023, Pelindo has no other sources of funding.



Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
			2023	2022	
2 Mei 2023 May 2, 2023	4,50%	Lunas Paid	Moody's: Baa2 (Stable outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3 (Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	The Bank of New york Mellon
1 Oktober 2024 October 1, 2024	4,88%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa2 (Stable outlook) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3 (Positive outlook) Fitch: BBB (Stable)	The Bank of New york Mellon
5 Juli 2023 July 5, 2023	8,00%	Lunas Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
5 Juli 2025 July 5, 2025	9,15%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)
5 Juli 2028 July 5, 2028	9,35%	Belum Lunas Not yet Paid	idAA	idAA	Bank Tabungan Negara (Persero)

INFORMASI PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PUBLIC ACCOUNTANTS (AP) AND PUBLIC ACCOUNTING FIRMS (KAP) SERVICES

Nama KAP KAP Name	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP EY)
Jaringan Asosiasi Association Network	Ernst & Young
Alamat KAP KAP Address	CEO SUITE Indonesia Stock Exchange Jl. Jenderal Sudirman No.5, RW. 3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Nama AP AP Name	Mochamad Dadang Syachruna
Periode Penugasan KAP KAP Assignment Period	Periode ke-10 10 th Period
Periode Penugasan AP AP Assignment Period	Periode ke-4 4 th Period
Jasa Audit Audit Services	Audit Laporan Keuangan Financial Report Audit
Fee Audit Audit Fee	Rp11.795.000.000
Jasa Non Audit Non-Audit Services	Tidak terdapat jasa non audit There were no non-audit services
Fee Non Audit Non-Audit Fee	Tidak terdapat fee non audit There were no non-audit fees

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND/OR PROFESSIONALS

Pemeringkat Efek Securities Ratings	Fitch Ratings Singapore Pte Ltd. One Raffles Quay South Tower #22-11 Singapore 048583 <i>Web:</i> www.fitchratings.com
	Moody's Investors Service Singapore Pte. Ltd. 50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623 <i>Web:</i> http://www.moody.com
	PEFINDO Equity Tower 30th floor Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia <i>Web:</i> www.pefindo.com
Kustodian Custodian	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building - Tower I, 5th Floor Jakarta 12190 -Indonesia <i>Web:</i> www.ksei.co.id
Wali Amanat Trustee	BNY Mellon One Temasek Avenue #04-01 Millenia Tower, Singapore 039192 <i>Web:</i> www.bnymellon.com
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Pusat Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130 Indonesia <i>Web:</i> www.btn.co.id
Notaris Notary	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Royal Palace Blok C/16 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A Jakarta Selatan Telp: (021) 8313356, 8313383 Fax: (021) 8313408 <i>Email:</i> nanda.fauz@gmail.com <i>Web:</i> -



Konsultan Hukum Legal Consultant	Kiagus Ahmad & Associates Menara Rajawali, Lt.8 Mega Kuningan Jakarta Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 51, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12950 Telp: (021) 5762722
	KSR & Partners Graha Naysila, Jl. Pal Putih Nomor 194, Kramat, Senen, Jakarta Pusat Telp: 0813 6796 0170
	Redho Junaidi & Rekan Jl. Sukabangun II KM. 6,5 No. 1475A Wisma STIHPADA Sukabangun Sukarami Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30154 Telp: 0821 75714180
	Akmalsyah & Co. The Abisatya Lantai 2, Jl. Kalibata Utara II No. 25, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp: 0816 1164066
	Saleh & Partners Soho Pancoran, Tower Splendor Lt. 23 Unit 2305-2306 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan Telp: 0813 85472474
	Prestise Lawfirm Gedung Grand Slipi Tower LT 37 Unit K, Jl. Letjen S Parman Kav 22-24 RT 001 RW 004 Palmerah Jakarta Barat DKI Jakarta
	ART Cooperation Jl. Ampasit No. 15 C, Cideng, Gambir Jakarta Pusat, DKI Jakarta
	Arakata Law Firm Wijaya Grand Centre, Blok H-32, Jl. Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 Telp: (021) 7210203
	Ginting & Reksodiputro The Energy Building 15th Floor SCBD Lot 11A Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp: (021) 29951700
	Assegaf Hamzah & Partners Capital Palace Level 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710 Telp: (021) 25557800
Hadiputranto, Hadinoto & Partners The Indonesia Stock Exchange Buiding, Tower II, 21st Floor, Sudirman Central Business District, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Telp: (021) 29608889	

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATION



PENGHARGAAN AWARD



20 Juli 2023 | July 20, 2023



Nama Penghargaan : Very Good Category: HR Digitization & People Analytics
Award Name

Acara : HR Excellence Award 2023
Event

Penyelenggara : SWA
Organizer



20 Juli 2023 | July 20, 2023



Nama Penghargaan : Very Good Category: Reward Management & Talent Retention Strategy
Award Name

Acara : HR Excellence Award 2023
Event

Penyelenggara : SWA
Organizer



20 Juli 2023 | July 20, 2023



Nama Penghargaan : Learning & Development (L&D) and Knowledge Management
Award Name

Acara : HR Excellence Award 2023
Event

Penyelenggara : SWA
Organizer



21 September 2023 | 21 September 2023



Nama Penghargaan : Pemenang 106 Perusahaan dan Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi
Award Name Winner of 106 Influential Companies and Agencies in the Field of Communication

Acara : Sewindu PR Indonesia
Event

Penyelenggara : PR Indonesia
Organizer



1 Oktober 2023 | October 1, 2023



Nama Penghargaan : Donor Darah di Pelabuhan Terbanyak
Award Name : Blood Donation at Most Ports
Acara : Rekor Muri
Event
Penyelenggara : Muri
Organizer



29 November 2023 | November 29, 2023



Nama Penghargaan : *The Winner of Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2023*
Award Name
Acara : *Indonesia Best Company in Creating Leaders from Within 2023*
Event
Penyelenggara : SWA
Organizer



30 November 2023 | November 30, 2023



Nama Penghargaan : *Mega Satria as The Best CFO: Excellent in Enterprise Risk Management*
Award Name
Acara : TOP BUMN Awards 2023
Event
Penyelenggara : Bisnis Indonesia
Organizer



30 November 2023 | November 30, 2023



Nama Penghargaan : *The Best State Owned Enterprises*
Award Name
Acara : TOP BUMN Awards 2023
Event
Penyelenggara : Bisnis Indonesia
Organizer



13 Desember 2023 | December 13, 2023



Nama Penghargaan : Green and Smart Port

Award Name

Acara : Penghargaan dari Kemenkomarves
Event : Award from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries

Penyelenggara : Kemenkomarves
Organizer



14 Desember 2023 | December 14, 2023



Nama Penghargaan : BUMN yang Berkomitmen dan Berkontribusi Nyata dalam Pelaksanaan Aksi Pemberantasan Korupsi
Award Name : BUMN that is Committed and Makes a Real Contribution to Implementing Corruption Eradication

Acara : Penghargaan dari Stranas PK
Event : Award from Stranas PK

Penyelenggara : Stranas PK
Organizer



19 Desember 2023 | December 19, 2023



Nama Penghargaan : BUMN Informatif

Award Name

Acara : Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Event : Award for Public Information Openness (KIP) 2023

Penyelenggara : Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
Organizer : Republic of Indonesia Central Information Commission



20 Desember 2023 | December 20, 2023



Nama Penghargaan : Ranking 3 Transaksi Tertinggi untuk BUMN Kelas B
Award Name : Ranking 3rd Highest Transactions for Class B BUMN

Acara : Business Matching PaDi UMKM
Event

Penyelenggara : PaDi UMKM
Organizer



20 Desember 2023 | December 20, 2023



Nama Penghargaan : Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Award Name

Acara : Good Corporate Governance Award 2023
Event

Penyelenggara : SWA
Organizer



SERTIFIKASI

CERTIFICATION

Area	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Kantor Regional 1 Regional 1 Branches	1	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Batam	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Belawan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Dumai	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Gunung Sitoli	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Kuala Tanjung	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Lhokseumawe	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Malahayati	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Pekanbaru	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Sibolga	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Sungai Pakning	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tanjung Balai Asahan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tanjung Balai Karimun	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tanjungpinang SKK	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tembilahan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
TPK Belawan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches	1	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Banten	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Bengkulu	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Cirebon	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Jambi	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Palembang	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023

Area	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Pangkal Balam	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Panjang	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Pontianak	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Sunda Kelapa	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Tanjung Pandan	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Tanjung Priok	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Teluk Bayur	1a	Sucofindo	28 Desember 2020 December 28, 2020	27 Desember 2023 December 27, 2023
Kantor Regional 3 Regional 3 Branches	1	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Sub Regional Jawa	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Terminal Kalimas dan GSN	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Gresik	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Tanjung Tembaga	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Kalianget	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Tanjung Emas	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Sub Regional Kalimantan	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Banjarmasin	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Kotabaru	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Sampit	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Kumai	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Batulicin	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Sub Regional Bali Nusra	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Benoa	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Kupang	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025



Area	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Lembar	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Bima	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Maumere	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Celukan Bawang	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	9 Februari 2025 February 9, 2025
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	2	Sucofindo	09 Januari 2020 January 09, 2020	08 Januari 2023 January 08, 2023
Balikpapan	2	URS	06 Oktober 2021 October 06, 2021	05 Oktober 2024 October 05, 2024
Biak	2	URS	14 Januari 2023 January 14, 2023	13 Januari 2026 January 13, 2026
Bitung	2	URS	30 Agustus 2020 August 30, 2020	29 Agustus 2023 August 29, 2023
Fakfak	2	URS	01 September 2020 September 01, 2020	30 Agustus 2023 August 30, 2023
Gorontalo	2	URS	25 Januari 2023 January 25, 2023	24 Januari 2026 January 24, 2026
Kendari	2	URS	11 Desember 2022 December 11, 2022	10 Desember 2025 December 10, 2025
Makassar	2	URS	29 Desember 2021 December 29, 2021	28 Desember 2024 December 28, 2024
Manokwari	2	URS	13 Januari 2020 January 13, 2020	12 Januari 2023 January 12, 2023
Merauke	2	URS	10 Januari 2022 January 10, 2022	09 Januari 2025 January 09, 2025
Nunukan	2	URS	25 September 2020 September 25, 2020	24 September 2023 September 24, 2023
Pantoloan	2	URS	06 Juni 2021 June 06, 2021	05 Juni 2024 June 05, 2024
Parepare	2	URS	08 November 2022 November 08, 2022	07 November 2025 November 07, 2025
Sorong	2	URS	16 Januari 2023 January 16, 2023	15 Januari 2026 January 15, 2026
Tarakan	2	URS	27 Februari 2020 February 27, 2020	26 Februari 2023 February 26, 2023
Ternate	2	URS	30 Desember 2022 December 30, 2022	29 Desember 2025 December 29, 2025

Area	ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Kantor Regional 1 Regional 1 Branches	1	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Belawan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Dumai	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Lhokseumawe	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Malahayati	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Pekanbaru	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Sibolga	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tanjung Balai Karimun	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Tanjungpinang SKK	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
TPK Belawan	1a	TUV Nord Indonesia	18 Januari 2021 January 18, 2021	17 Januari 2024 January 17, 2024
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches	2	CBQA GLOBAL	27 September 2022 September 27, 2022	26 September 2025 September 26, 2025
Tanjung Priok	2	TUV Nord Indonesia	29 Desember 2021 December 29, 2021	28 Desember 2024 December 28, 2024
Kantor Regional 3 Regional 3 Branches	1	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Sub Regional Jawa	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Terminal Kalimas dan GSN	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Gresik	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Tanjung Emas	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Sub Regional Kalimantan	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Banjarmasin	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Kotabaru	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Sub Regional Bali Nusra	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Benoa	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025
Kupang	1a	TUV Rheinland	10 Februari 2022 February 10, 2022	09 Februari 2025 February 09, 2025



Area	ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	2	Sucofindo	09 Januari 2020 January 09, 2020	08 Januari 2023 January 08, 2023
Balikpapan	2	URS	04 Oktober 2021 October 04, 2021	03 Oktober 2024 October 03, 2024
Bitung	2	URS	29 Januari 2021 January 29, 2021	28 Januari 2024 January 28, 2024
Jayapura	2	URS	15 Desember 2020 December 15, 2020	14 Desember 2023 December 14, 2023
Makassar	2	URS	20 Desember 2021 December 20, 2021	19 Desember 2024 December 19, 2024
Sorong	2	URS	30 Januari 2022 January 30, 2022	29 Januari 2025 January 29, 2025
Ternate	2	URS	12 Maret 2020 March 12, 2020	11 Maret 2023 March 11, 2023

Area	ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 OHS Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Kantor Regional 1 Regional 1 Branches				
Batam	2	TUV Nord Indonesia	30 November 2020 November 30, 2020	29 November 2023 November 29, 2023
Dumai	2	TUV Nord Indonesia	21 Desember 2020 December 21, 2020	20 Desember 2023 December 20, 2023
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches				
Jambi	2	SUCOFINDO	07 Januari 2021 January 07, 2021	06 Januari 2024 January 06, 2024
Tanjung Priok	2	TUV Nord Indonesia	29 Desember 2021 December 29, 2021	28 Desember 2024 December 28, 2024
Teluk Bayur	2	SCK Certifications Pvt. Ltd	15 Agustus 2021 August 15, 2021	15 Agustus 2024 August 15, 2024
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	2	Sucofindo	09 Januari 2020 January 09, 2020	08 Januari 2023 January 08, 2023
Balikpapan	2	URS	24 Desember 2022 December 24, 2022	23 Desember 2025 December 23, 2025
Bitung	2	URS	07 Januari 2021 January 07, 2021	06 Januari 2024 January 06, 2024
Jayapura	2	URS	03 Desember 2020 December 03, 2020	02 Desember 2023 December 02, 2023
Ternate	2	URS	12 Maret 2020 March 12, 2020	11 Maret 2023 March 11, 2023

Area	ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Kantor Regional 1 Regional 1 Branches	2	TUV Nord Indonesia	30 November 2020 November 30, 2020	29 November 2023 November 29, 2023
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches	2	BSI	26 November 2020 November 26, 2020	25 November 2023 November 25, 2023
Kantor Regional 3 Regional 3 Branches	2	BSI	04 Agustus 2020 August 04, 2020	03 Agustus 2023 August 03, 2023
Sub Regional Jawa	2	BSI	02 Maret 2022 March 02, 2022	01 Maret 2025 March 01, 2025
Sub Regional Kalimantan	2	BSI	02 Maret 2022 March 02, 2022	01 Maret 2025 March 01, 2025
Sub Regional Bali Nusra	2	BSI	02 Maret 2022 March 02, 2022	01 Maret 2025 March 01, 2025
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	2	Mutu Hijau Indonesia	13 Agustus 2020 August 13, 2020	12 Agustus 2023 August 12, 2023

Area Sertifikat Certification Area	ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001 Information Security Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Kantor Regional 3 Regional 3 Branches	1	Sucofindo	10 Agustus 2021 August 10, 2021	9 Agustus 2024 August 9, 2024

Keterangan | Note:

1. Area tersebut sebagai induk sertifikat
- 1a. Area tersebut sebagai yang diintegrasikan ke induk sertifikat
2. Area tersebut sebagai single sertifikat
1. The area is the parent of the certificate
- 1a. The area as integrated into the parent certificate
2. The area as a single certificate

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 1				
Batam	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Dumai	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Gunung Sitoli	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Kuala Tanjung	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Sei Pakning	SMK3 PP NO 50 2013	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024



Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Sibolga	SMK3 PP NO 50 2014	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Tanjung Balai Asahan	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Tanjung Balai Karimun	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Tembilahan	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
TPK Belawan	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 2				
Banten	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	22 April 2024 April 21, 2024
Cirebon	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2023 September 17, 2023
Jambi	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2022 April 22, 2022	21 April 2025 April 21, 2025
Palembang	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 Desember 2020 December 17, 2020	16 Desember 2023 December 16, 2023
Panjang	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2020 December 17, 2020	17 September 2023 December 16, 2023
Pontianak	SMK3 PP NO 50 2012	PT Sucofindo	17 September 2020 December 17, 2020	17 September 2023 December 16, 2023
Tanjung Priok	SMK3 PP NO 50 2012	Biro Klasifikasi Indonesia	17 September 2020 December 17, 2020	17 September 2023 December 16, 2023
Teluk Bayur	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	13 Maret 2022 March 13, 2022	13 Maret 2025 March 13, 2025

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 3				
Bima	SMK3	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Celukan Bawang	SMK3	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Gresik	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	13 Mei 2022 May 13, 2022	12 Mei 2025 May 12, 2025
Kotabaru	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Kumai	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Maumere	SMK3	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Tanjung Tembaga	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Trisakti	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 4				
Ambon	SMK3 PP No. 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024
Balikpapan	SMK3 PP No. 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Bitung	SMK3 PP No. 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023
Makassar	SMK3 PP No. 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2023

Area	Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF)	
	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 1		
Belawan	23 Maret 2018 March 23, 2018	11 Maret 2023 March 11, 2023
Dumai	18 Maret 2021 March 18, 2021	18 Januari 2026 January 18, 2026
Lhokseumawe	21 Oktober 2021 October 21, 2021	05 September 2026 September 05, 2026
Malahayati	06 Oktober 2021 October 06, 2021	06 September 2026 September 06, 2026
Pekanbaru (TPK Perawang)	06 Oktober 2021 October 06, 2021	07 September 2026 September 07, 2026



Area	Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF)	
	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Tanjung Balai Asahan	16 Maret 2021 March 16, 2021	16 Desember 2024 December 16, 2024
Tanjung Balai Karimun	20 September 2021 September 20, 2021	25 Agustus 2026 August 25, 2026
Tanjung Pinang 1	08 Oktober 2020 October 08, 2020	23 Mei 2024 May 23, 2024
Tanjung Pinang 2	23 Mei 2018 May 23, 2018	08 Mei 2023 May 08, 2023
TPK Belawan	18 Januari 2021 January 18, 2021	22 Desember 2025 December 22, 2025
PT Prima Multi Terminal	15 Mei 2019 May 15, 2019	13 Mei 2024 May 13, 2024
PT Prima Terminal Petikemas	18 Januari 2021 January 18, 2021	22 Desember 2025 December 22, 2025
Regional 2		
Banten	16 Desember 2019 December 16, 2019	02 November 2024 November 02, 2024
Bengkulu	08 Oktober 2019 October 08, 2019	13 Oktober 2024 October 13, 2024
Cirebon	14 Oktober 2019 October 14, 2019	01 Oktober 2024 October 01, 2024
Jambi	16 September 2019 September 16, 2019	19 Agustus 2024 August 19, 2024
Palembang	29 Desember 2019 December 29, 2019	20 Oktober 2024 October 20, 2024
Pangkalbalam	30 November 2020 November 30, 2020	08 Juli 2025 July 08, 2025
Tanjung Pandan	05 September 2019 September 05, 2019	28 Agustus 2024 August 28, 2024
Pontianak	21 Agustus 2019 August 21, 2019	14 September 2024 September 14, 2024
Panjang	23 April 2019 April 23, 2019	13 Agustus 2024 August 13, 2024
Tanjung Priok	31 Desember 2018 December 31, 2018	19 Desember 2023 December 19, 2023
Teluk Bayur	17 Februari 2020 February 17, 2020	05 April 2025 April 05, 2025
PT Indonesia Kendaraan Terminal	23 April 2019 April 23, 2019	13 Agustus 2024 August 13, 2024
Terminal Kijing (Pontianak)	23 Maret 2022 March 23, 2022	21 Oktober 2026 October 21, 2026
Regional 3		
Begadneg	19 November 2018 November 19, 2018	15 November 2023 November 15, 2023
Benoa	24 Maret 2020 March 24, 2020	21 Oktober 2024 October 21, 2024

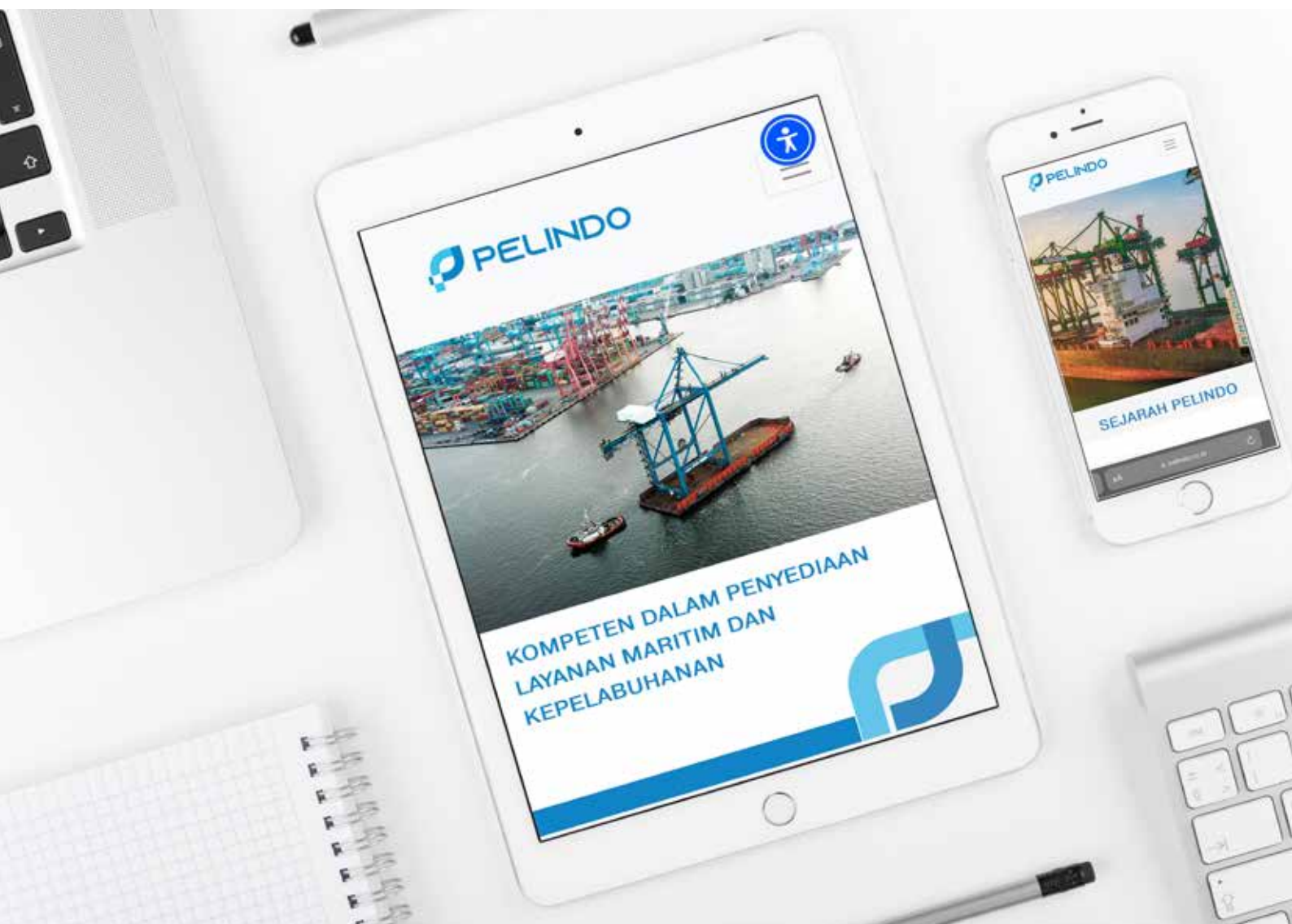
Area	Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF)	
	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Celukan Bawang	02 Mei 2018 May 02, 2018	25 April 2023 April 25, 2023
Gersik	10 Desember 2018 December 10, 2018	03 Februari 2024 February 03, 2024
Kota Baru	27 Januari 2021 January 27, 2021	28 Desember 2025 December 28, 2025
Lembar	27 Maret 2018 March 27, 2018	07 Maret 2023 March 07, 2023
Tanjung Mas	17 September 2021 September 17, 2021	23 Agustus 2026 August 23, 2026
Tanjung Intan	19 November 2021 November 19, 2021	11 Agustus 2026 August 11, 2026
Tanjung Perak	25 November 2019 November 25, 2019	24 November 2024 November 24, 2024
Tanjung Wangi	16 Maret 2018 March 16, 2018	20 Maret 2023 March 20, 2023
Tenau	07 Oktober 2019 October 07, 2019	22 Agustus 2024 August 22, 2024
Trisakti	16 Januari 2020 January 16, 2020	31 Desember 2024 December 31, 2024
BJTI	11 Juli 2015 July 11, 2015	06 November 2024 November 06, 2024
Jamrud	13 November 2019 November 13, 2019	27 November 2024 November 27, 2024
TKP Banjarmasin	28 Januari 2019 January 28, 2019	23 Februari 2024 February 23, 2024
TPK Semarang	25 November 2019 November 25, 2019	17 Agustus 2024 August 17, 2024
Terminal Teluk Lamong	21 September 2018 September 21, 2018	01 September 2025 September 01, 2025
TPK Surabaya	24 Oktober 2019 October 24, 2019	09 Oktober 2024 09 October 2024
Regional 4		
Biak	05 April 2019 April 05, 2019	01 Oktober 2023 October 01, 2023
Bitung	27 Oktober 2021 October 27, 2021	28 Juni 2026 June 28, 2026
Fakfak	06 Februari 2019 February 06, 2019	07 Mei 2023 May 07, 2023
Gorontalo	13 Juli 2015 July 13, 2015	24 Juni 2025 June 24, 2025



Area	Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF)	
	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Makassar	06 Juli 2015 July 06, 2015	15 April 2025 April 15, 2025
Makassar New Port	16 Maret 2020 March 16, 2020	16 Februari 2025 February 16, 2025
Manokwari	19 Agustus 2019 August 19, 2019	14 Juli 2024 July 14, 2024
Nunukan	02 Oktober 2018 October 02, 2018	14 Mei 2023 May 14, 2023
Parepare	15 Agustus 2022 August 15, 2022	31 Januari 2027 January 31, 2027
KKT	29 Mei 2019 May 29, 2019	04 Maret 2024 March 04, 2024
Samarinda	11 September 2019 September 11, 2019	08 Agustus 2024 August 08, 2024
Tarakan	20 April 2022 April 20, 2022	14 Februari 2027 February 14, 2027
Ternate	05 Desember 2022 December 05, 2022	10 Juli 2027 July 10, 2027
TPK Makassar	15 Juni 2015 June 15, 2015	02 Juni 2025 June 02, 2025
TPK Bitung	27 Oktober 2021 October 27, 2021	21 Juni 2026 June 21, 2026

INFORMASI YANG TERSEDIA DI WEBSITE

INFORMATION AVAILABLE ON THE WEBSITE



Ketersediaan informasi pada *website* mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Pelindo telah melengkapi *website* Perseroan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi dengan alamat www.pelindo.co.id. Informasi pada *website* Pelindo terdiri dari:

1. *Home*, berisi informasi terkait Berita Pelindo, Grup Pelindo, Wilayah Operasional Pelindo, alamat Perseroan, serta informasi media sosial Perseroan.

The information available on the website refers to OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies. Pelindo has established the Company's website at www.pelindo.co.id containing the following Information:

1. Home: information related to Pelindo News, Pelindo Group, Pelindo Operational Areas, Company addresses, and Company social media information.



- a. Profil, berisi informasi terkait tentang Pelindo; Visi, Misi dan nilai-nilai Perusahaan; Entitas Bisnis dan Grup Usaha; Manajemen yang berisi profil Dewan Komisaris dan Direksi; Sejarah Pelindo; Struktur Organisasi Pelindo; Organ Perusahaan; serta profil Komite-Komite.
 - b. GCG, berisi informasi terkait Pedoman GCG; Organ GCG yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Hak Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal; Kode Etik Bisnis; serta *Whistleblowing System*.
 - c. Layanan, berisi informasi terkait Wilayah Kerja dan Kegiatan Utama Perseroan.
 - d. Hubungan Investor, berisi informasi terkait Laporan Tahunan selama 5 (lima) tahun yang dapat diunduh, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan, Investor Memo, Laporan RUPS, Obligasi, Peringkat Utang dan *Outlook*.
 - e. Media & Publikasi, berisi informasi terkait Kabar Terbaru dan Siaran Pers.
 - f. TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan).
- a. Profile: information related to Pelindo; Company Vision, Mission and Values; Business Entities and Business Groups; Management with the Board of Commissioners and Board of Directors profiles; History of Pelindo; Pelindo Organizational Structure; Company Organs; and profiles of the Committees.
 - b. GCG: information related to GCG Guidelines; The GCG organs including the General Meeting of Shareholders (GMS), Shareholders' Rights, Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit; Code of Business Ethics; and Whistleblowing System.
 - c. Services: information related to the Company's Work Areas and Main Activities.
 - d. Investor Relations: information related to the Annual Reports for the past 5 (five) years that can be downloaded, Sustainability Reports, Financial Reports, Investor Memo, GMS Reports, Bonds, Debt Ratings and Outlook.
 - e. Media and Publications: information related to Latest News and Press Releases.
 - f. SER (Social Environmental Responsibility).



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan

Management Analysis and Discussion on The Company's Performance



Kinerja operasional dan finansial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group mencatatkan pertumbuhan yang baik di tengah dinamika tantangan eksternal global dan domestik. Arus Kapal tahun 2023 mencapai 1,29 Miliar GT, Arus Petikemas mencapai 17,66 Juta TEUs, Arus Barang Non Petikemas mencapai 169,85 Juta Ton dan Arus Penumpang mencapai 18,05 Juta Orang. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan Laba Periode Berjalan yang tumbuh 2,66% menjadi Rp4,01 triliun pada tahun 2023.



The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group operational and financial performance recorded good growth despite the dynamics of global and domestic external challenges. Ship traffic in 2023 reached 1.29 billion GT, container traffic reached 17.66 million TEUs, non-container traffic reached 169.85 million tons and passenger traffic reached 18.05 million people. These increases were in line with the growth in Profit for the Current Period that grew by 2.66% to reach Rp4.01 trillion in 2023.

TINJAUAN PEREKONOMIAN ECONOMIC REVIEW

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan dari tahun 2022 dengan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 3,1% (estimasi *International Monetary Fund*, Januari 2024). *Advanced economies* mengalami tekanan yang sangat besar dan tumbuh lebih rendah hanya sebesar 1,6% di tahun 2023 atau turun 1% dibandingkan pertumbuhan tahun 2022, sedangkan *Emerging Market and Developing Economies* (EMDE) masih dapat tumbuh sebesar 4,1%. Turunnya angka pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 terjadi disebabkan oleh ketidakpastian kondisi geopolitik yang masih berlangsung dan pengetatan kebijakan ekonomi untuk menekan inflasi. Namun pada Negara Berkembang Asia (*Emerging And Developing Asia*) ekonomi dapat tumbuh sebesar 5,4% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,5%. Angka ini lebih besar dari perkiraan sebelumnya (*Economic Outlook* Oktober 2023) yang sebesar 5,2%.

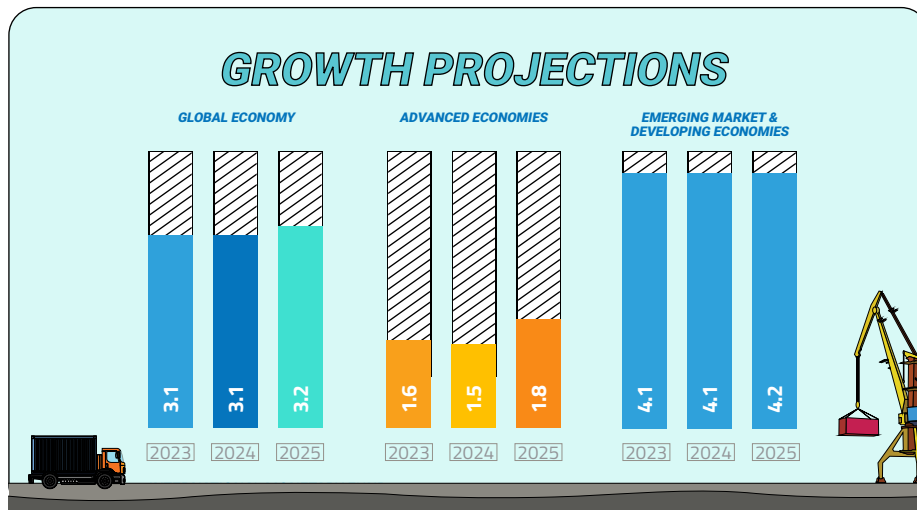
GLOBAL ECONOMIC ANALYSIS

Global economic growth experienced a slowdown from 2022 with growth in 2023 reaching 3.1% (International Monetary Fund estimates, January 2024). Advanced economies experienced enormous pressure and grew at a lower rate of only 1.6% in 2023, or down 1% compared to growth in 2022, while Emerging Market and Developing Economies (EMDE) still grew by 4.1%. The decline in world economic growth figures in 2023 occurred due to ongoing uncertainty in geopolitical conditions and tightening economic policies to suppress inflation. However, in Emerging and Developing Asia, the economy could grow by 5.4%, higher than the previous year's 4.5%. This figure was higher than the previous estimate (*Economic Outlook* October 2023) of 5.2%.

Grafik Proyeksi Ekonomi Global
Global Economic Projections Chart

(dalam %)

(in %)



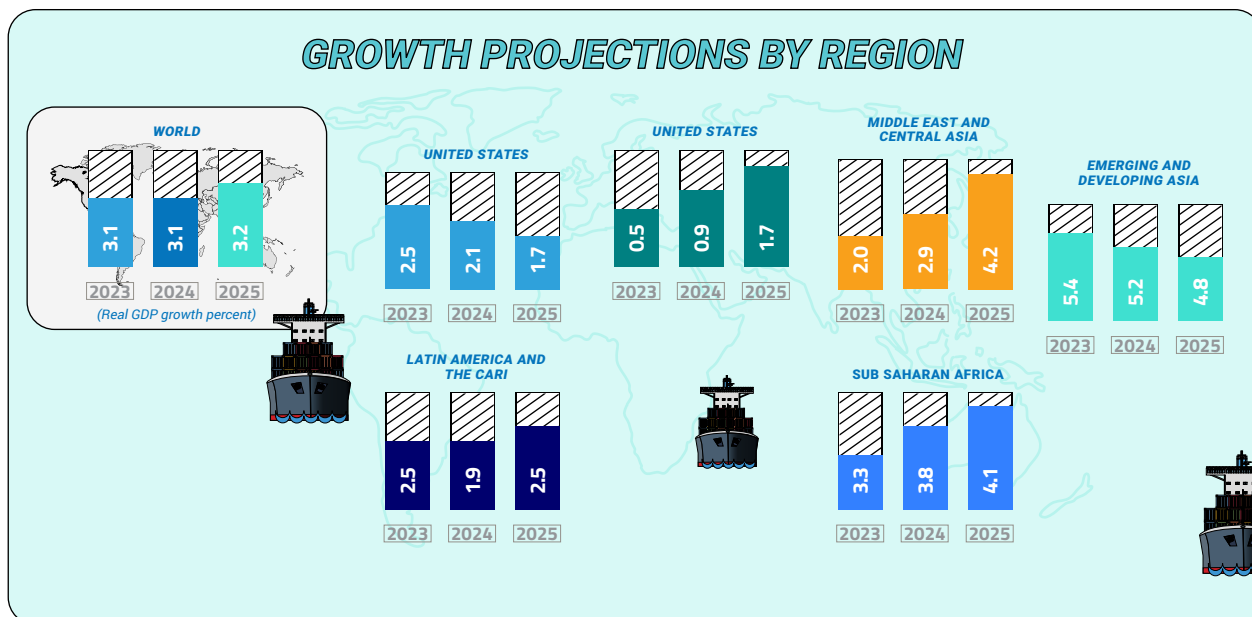
Sumber: World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF), Januari 2024
Source: World Economic Prospects, International Monetary Fund (IMF), Januari 2024



Grafik Proyeksi Ekonomi Global Global Economic Projections Chart

(dalam %)

(in %)



Sumber: World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF), Januari 2024
Source: World Economic Prospects, International Monetary Fund (IMF), January 2024

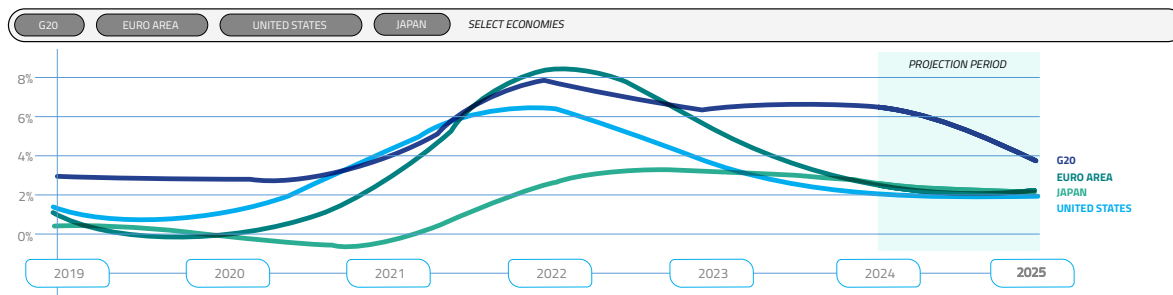
Inflasi global tahun 2023 berhasil ditekan bersamaan dengan rendahnya harga minyak dunia dan redanya tekanan *supply chain*. *Head Inflation* Negara G20 sebesar 7,9% di tahun 2022 turun menjadi 6,3% di tahun 2023.

Global inflation in 2023 fell due to lower world oil prices and easing supply chain pressure. G20 Head Inflation of 7.9% in 2022 decreased to 6.3% in 2023.

Grafik Inflasi G20, Euro Area, Jepang dan Amerika Serikat Inflation Charts of G20, Euro Area, Japan and US

(dalam %)

(in %)



Sumber: OECD Economic Outlook, Interim Report Februari 2024
Source: OECD Economic Outlook, Interim Report February 2024

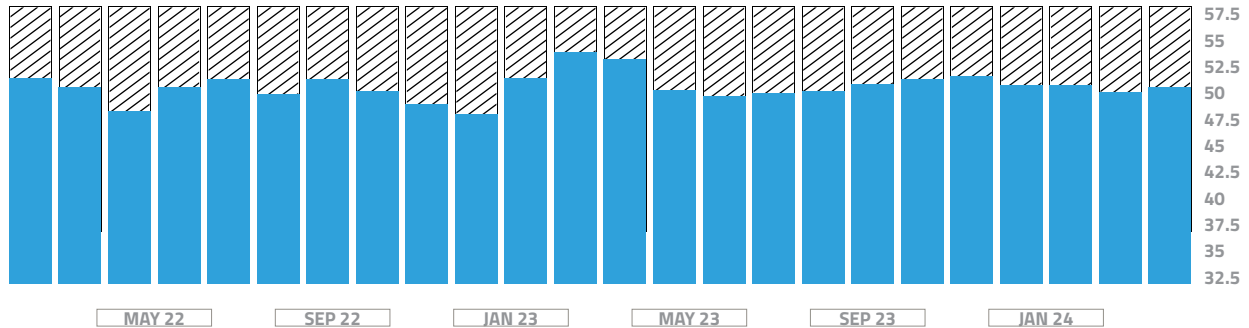
Pada tahun 2023, *Purchasing Managers' Index* (PMI) China sebagai eksportir terbesar dunia cenderung berada pada daerah kontraksi (berada pada area ekspansif hanya terjadi pada Triwulan I), yang dapat diartikan bahwa industri manufaktur mengalami penurunan aktivitas baik dari sisi investasi maupun sisi produksi.

In 2023, China's *Purchasing Managers' Index* (PMI), as the world's largest exporter, contracted (while expansion only occurred in Q1), meaning that the manufacturing industry experienced a decline in activity both from the investment and production sides.

Grafik Purchasing Managers' Index (PMI) China China Purchasing Managers' Index (PMI) Chart

(dalam %)

(in %)



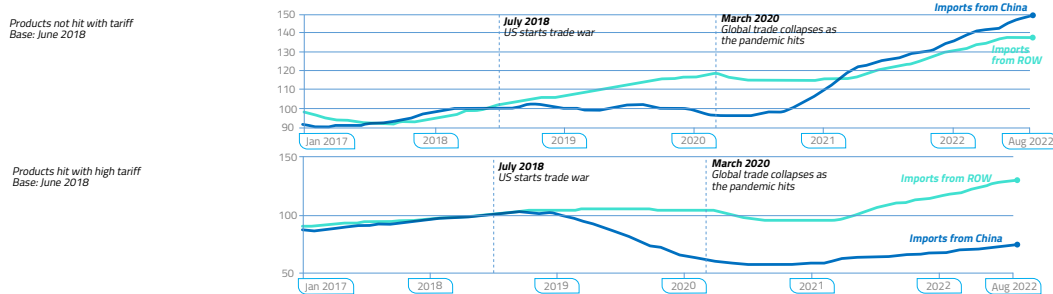
Sumber: China Logistics Information Center Presented in investing.com, 2023.
Source: China Logistics Information Centre Presented in investing.com, 2023.

Impor barang-barang dari China ke AS yg terkena kebijakan perang tarif turun drastis dan digantikan dengan oleh negara eksportir lainnya. Perang dagang AS-China telah menciptakan pergeseran ekspor-impor global. Salah satu yang mendapatkan dampak positif adalah Vietnam yang mengalami peningkatan volume ekspor.

Imports of goods from China to the US that were affected by the tariff war policy fell drastically and were replaced by other exporting countries. The US-China trade war has created a global export-import shift. One country where there was a positive impact was Vietnam, which saw an increase in export volume.

US Import from China

US imports from China of products not hit with any trade war tariffs have increased since 2018 by nearly 50%. On the other hand, US imports from China of products hit with high trade war tariffs have declined significantly, though on an upward trend since post-pandemic days.

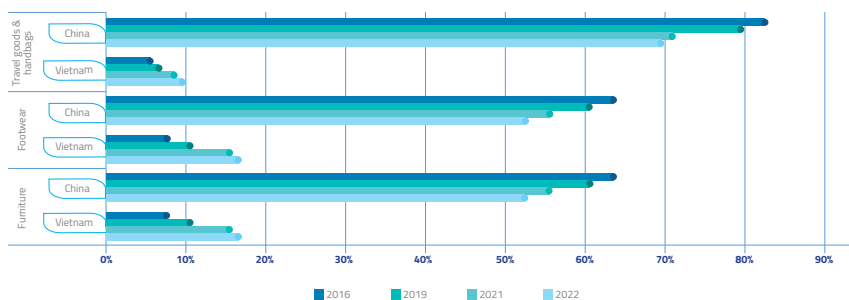


Sumber: Peterson Institute for International Economics, diolah oleh Drewry Shipping Consultants November 2023
Source: Peterson Institute for International Economics, processed by Drewry Shipping Consultants November 2023

US-China trade war: Vietnam gaining market share

The US-China trade war coupled with the pandemic has had wide ramifications Non-traditional currencies have played a larger role in global foreign exchange reserves. Led to a proliferation in transpacific volume.

China's vs Vietnam's share of global exports on key consumer goods



Sumber: Megatrends in Container Shipping and Ports Industry, Drewry Shipping Consultants November 2023
Source: Megatrends in Container Shipping and Ports Industry, Drewry Shipping Consultants November 2023



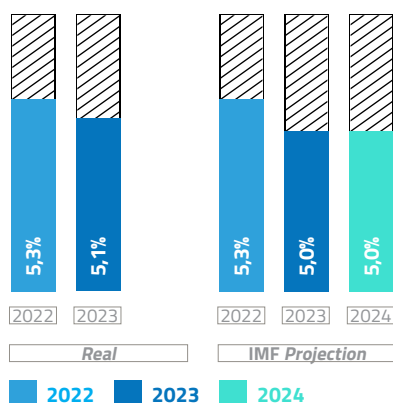
ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Ekonomi nasional tumbuh 5,05% pada tahun 2023, mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Namun angka pertumbuhan ini tetap menunjukkan ketangguhan ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh pada angka sekitar 5% di tahun 2024.

NATIONAL ECONOMIC ANALYSIS

The national economy grew by 5.05% in 2023, a slower growth compared to the achievement in 2022 of 5.31%. However, this growth still shows the resilience of the national economy in facing global uncertainty. The IMF projects that Indonesia's economy will continue to grow at around 5% in 2024.

Grafik Pertumbuhan PDB Indonesia
Indonesian GDP Growth Graph



Sumber: Sekretariat Kabinet RI, Februari 2024; World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF), Januari 2024
Source: Indonesian Cabinet Secretariat, February 2024; World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF), January 2024

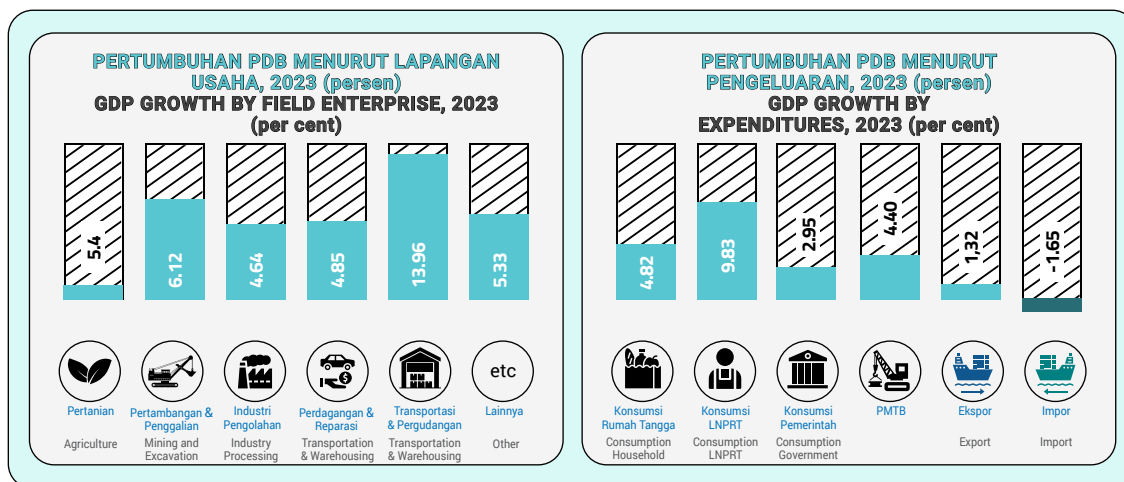
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Hal ini merupakan hal yang positif bagi Pelindo yang bergerak di bidang jasa logistik. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

In terms of production, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing Business Field at 13.96%. This is a positive thing for Pelindo that operates in the logistics services sector. Meanwhile, in terms of expenditure, the highest growth was in the Consumption Expenditure of Non-profit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) at 9.83%.

Grafik Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran
GDP Growth Graph According to Business Fields and Expenditures

(dalam %)

(in %)



Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, Februari 2024
Source: Official Statistical News, Central Bureau of Statistics, February 2024

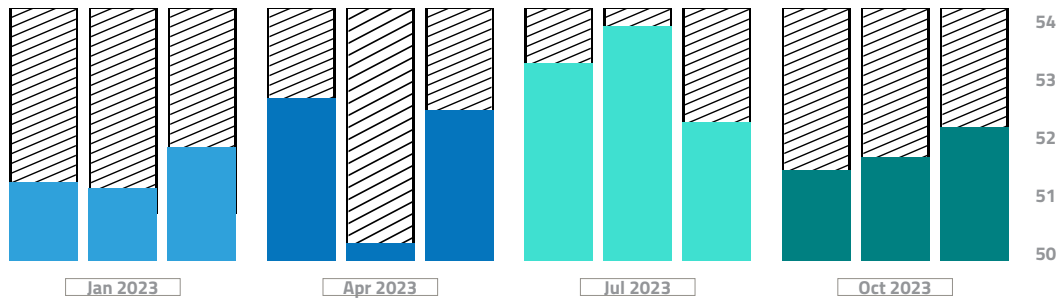
Kinerja *Manufacturing PMI* Indonesia berdasarkan data S&P Global sepanjang tahun 2023 berada pada area ekspansif (>50 poin) dengan nilai terendah terjadi pada Bulan Mei, tertinggi pada bulan Agustus dan rata-rata setahun pada angka 52,2 poin. Kinerja *Manufacturing PMI* ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi pada tahun 2023.

Indonesia's *Manufacturing PMI* performance based on S&P Global data throughout 2023 was in the expansive area (>50 points) with the lowest value occurring in May, the highest in August and the yearly average at 52.2 points. *PMI Manufacturing* performance was in line with economic growth that was still high in 2023.

Grafik Purchasing Managers' Index
Chart of Purchasing Managers' Index

(dalam %)

(in %)

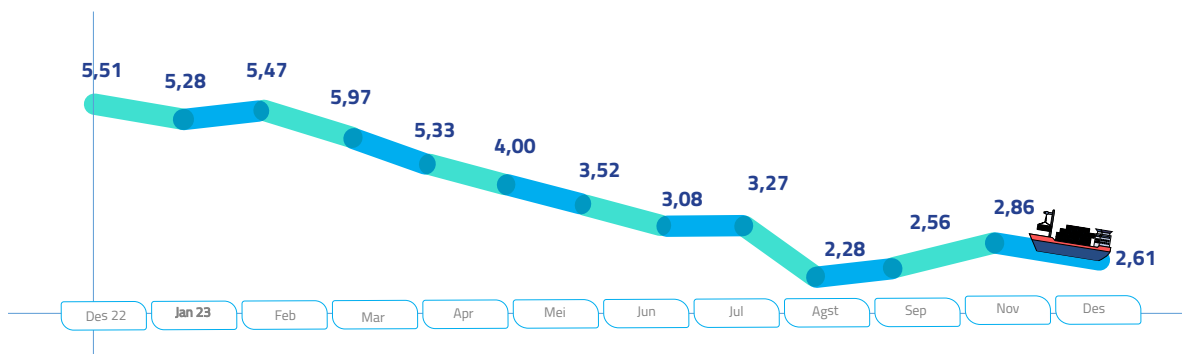


Sumber: Data S&P Global via www.tradingeconomics.com/indonesia/manufacturing-pmi
Source: S&P Global Data via www.tradingeconomics.com/indonesia/manufacturing-pmi

Inflasi Indonesia tahun 2023 berhasil terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran $3\% \pm 1$. Inflasi tahun 2023 tercatat sebesar 2,61% (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 5,51% (yoy). Realisasi inflasi tahun 2023 tersebut merupakan yang terendah sejak tahun 2000.

Indonesia's inflation in 2023 was stable and under control within a target range of $3\% \pm 1$. Inflation in 2023 was recorded at 2.61% (yoy), a decrease compared to the realization in 2022 of 5.51% (yoy). Realized inflation in 2023 was the lowest since 2000.

Grafik Tingkat Inflasi Year on Year (yoy) Gabungan 90 Kota (2018=100), Desember 2022-Desember 2023
Graph of Inflation Rate Year on Year (yoy) Combined 90 Cities (2018=100), December 2022-December 2023



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 0101/Th. XXVII, BPS 2 Januari 2024
Source: Official Statistics News No. 0101/Th. XXVII, BPS 2 January 2024

ANALISIS INDUSTRI PELABUHAN

PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN PETIKEMAS

Perdagangan global semakin matang dan hal ini mengakibatkan perlambatan angka pertumbuhan arus perdagangan, bahkan pada sektor dengan pertumbuhan tinggi seperti petikemas. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan arus petikemas Indonesia mengalami naik turun mendekati arus petikemas global pada kisaran angka 3%.

PORT INDUSTRY ANALYSIS

GROWTH IN CONTAINER TRADE VOLUMES

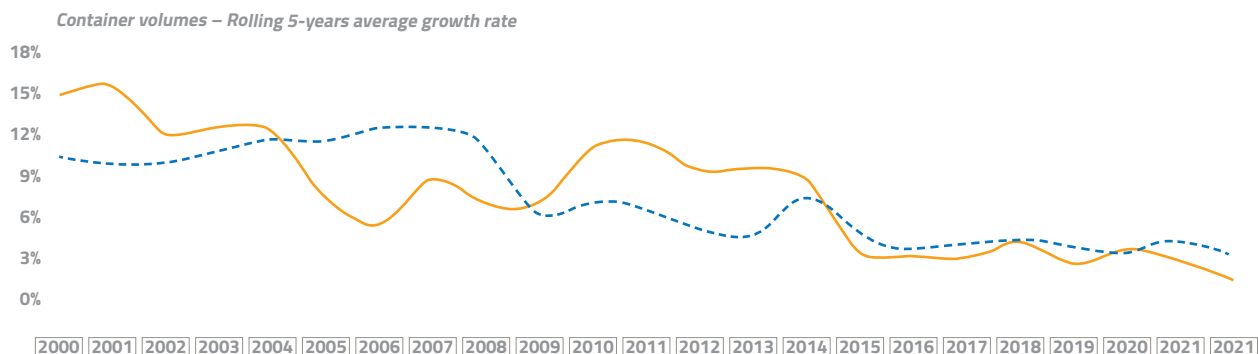
Global trade is increasingly maturing and this has resulted in a slowdown in the growth of trade traffic, even in sectors with high growth such as containers. Over the last 5 (five) year period, the growth of Indonesian container traffic has fluctuated, approaching global container traffic at around 3%.



Grafik Pertumbuhan Volume Perdagangan Petikemas Container Trade Volume Growth Chart

(dalam %)

(in %)



Sumber: Megatrends in Container Shipping and Ports Industry, Drewry Shipping Consultants November 2023
Source: Megatrends in Container Shipping and Ports Industry, Drewry Shipping Consultants November 2023

PERTUMBUHAN PETIKEMAS 2023

Arus petikemas global diperkirakan tumbuh antara 0 sampai 1% pada tahun 2023. Menurut *Container Trade Statistics* (CTS), arus petikemas global tumbuh sebesar 0,2% pada tahun 2023 secara yoy dengan total volume akhir sebesar 173,4 juta TEUs.

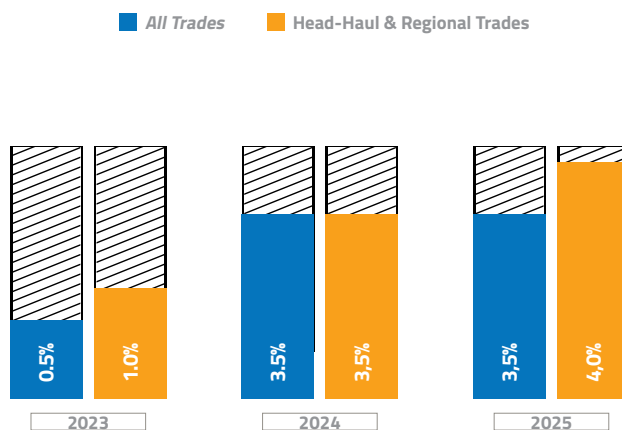
CONTAINER GROWTH 2023

Global container traffic was expected to grow between 0 and 1% in 2023. According to Container Trade Statistics (CTS), global container traffic grew by 0.2% in 2023 yoy with a total final volume of 173.4 million TEUs.

Grafik Proyeksi Pertumbuhan Petikemas Container Growth Projection Chart

(dalam %)

(in %)



Sumber: Container Shipping Market Overview and Outlook Q4 2023 - Bimco
Source: Container Shipping Market Overview and Outlook Q4 2023 - Bimco

ARUS PETIKEMAS INTERNASIONAL INDONESIA

Sejalan dengan data Drewry di atas, arus petikemas internasional Indonesia diproyeksikan akan tumbuh 3,2% secara *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) dari tahun 2021 sampai tahun 2035. Angka proyeksi pertumbuhan tersebut didasarkan dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan didorong oleh pertumbuhan dari Pulau Jawa dan Sumatera.

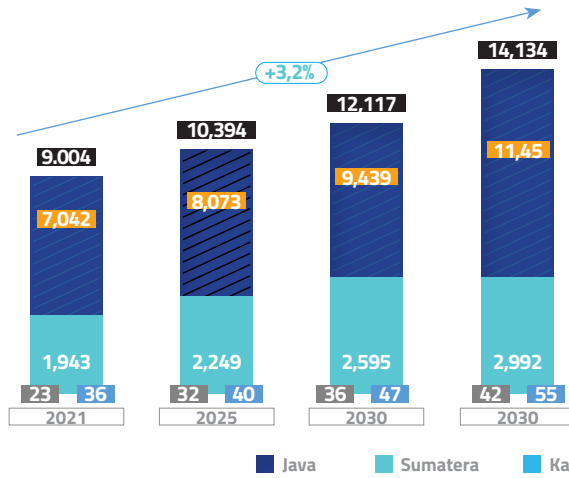
INDONESIAN INTERNATIONAL CONTAINER TRAFFIC

In line with the Drewry data above, Indonesia's international container traffic is projected to grow 3.2% at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) from 2021 to 2035. The projected growth figure is based on Gross Domestic Product (GDP) growth and is driven by growth in Java and Sumatra.

Grafik Proyeksi Arus Petikemas Internasional Indonesia 2021-2025
Indonesia International Container Flow Projection Chart 2021-2025

(dalam % dan ribu TEUs)

(in % and million TEUs)



Key Highlight

- The project growth in the international throughput is driven by growth of international throughput from java followed by sumatera
- These growth are based on the projected GDP for the Country
- In Sumatera there are significant proportion of throughput from private jetties directly to transshipment hub

Sumber: Transshipment Hub Around The Strait Malacca Study, Roland Berger, 2023
Source: Transshipment Hub Around The Strait Malacca Study, Roland Berger, 2023

ANALISIS POSISI PELINDO DALAM INDUSTRI

Merger Pelindo menempatkan *throughput* petikemas Pelindo pada peringkat ke-2 Asia Tenggara di 2023. Dari aspek komersial terdapat peningkatan jumlah *throughput* petikemas dari 17,2 juta TEUs pada tahun 2022 menjadi 17,7 juta TEUs pada tahun 2023. Peningkatan skala Pelindo ini diharapkan akan meningkatkan *brand awareness* pelabuhan di Indonesia yang berdampak secara positif terhadap peningkatan trafik dimasa datang. Sesuai dengan tema tahun 2023 yang merupakan fase *business expansion and partnership*, Pelindo berupaya untuk meningkatkan pengembangan bisnis untuk peningkatan *throughput* Pelindo ke depannya.

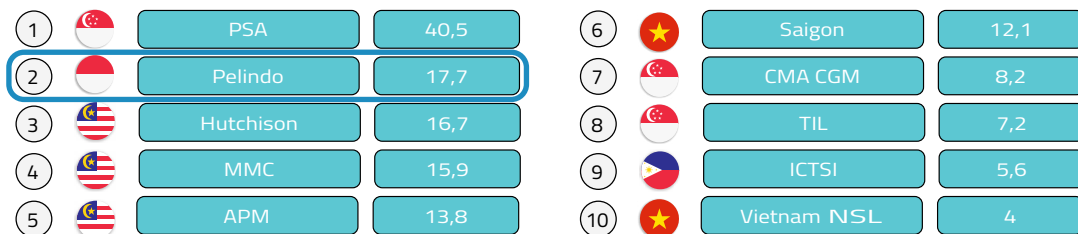
ANALYSIS OF PELINDO'S POSITION IN THE INDUSTRY

Pelindo merger positions Pelindo's throughput of containers ranking 2nd in Southeast Asia in 2023. From a commercial aspect, there was an increase in the number of container throughputs from 17.2 million TEUs in 2022 to 17.7 million TEUs in 2023. This increase in Pelindo's scale is expected to increase brand awareness of ports in Indonesia, and will have a positive impact on increasing traffic in the future. In accordance with the theme for 2023, which is in the business expansion and partnership phase, Pelindo is trying to increase its business development to increase Pelindo's future throughput.

Gambar Regional Benchmark Comparison
Regional Benchmark Comparison Image

(dalam juta TEUs)

(in million TEUs)



Sumber: Data Drewry, Data throughput Pelindo
Source: Drewry data, Pelindo throughput data

Catatan : *Throughput* dari peringkat pelabuhan yang tercantum di atas adalah *throughput* pada pelabuhan-pelabuhan operator terkait pada region Asia Tenggara.
Jumlah : *Throughput* yang tercatat adalah angka dari seluruh pelabuhan yang dimiliki oleh operator (termasuk *minority share*) sehingga ada potensi *double counting*.

Notes : The throughput of the ranked ports listed above is the throughput at the ports of the relevant operators in the Southeast Asia region.
Total : Throughput recorded is the figure for all ports owned by the operator (including minority share) so there is potential for double counting.



TINJAUAN OPERASIONAL

OPERATIONAL REVIEW

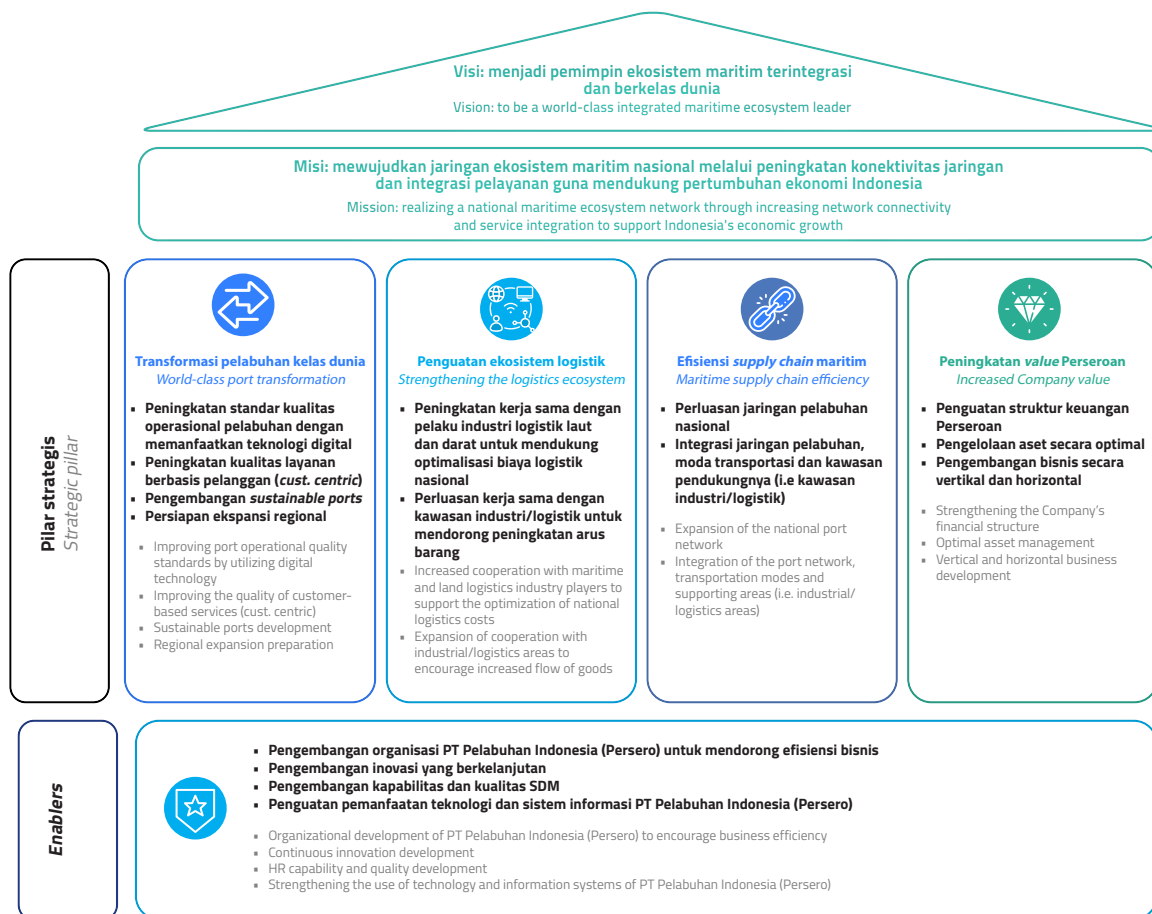
STRATEGI PERSEROAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Perseroan telah memformulasikan tema strategis yakni menjadi pilar-pilar utama bagi rumah strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk periode 2021- 2025. Tema strategis juga menjadi acuan untuk mendefinisikan sub-tema strategis bagi Pelindo hingga tahun 2025 yang akan menjadi basis dalam mendefinisikan inisiatif strategis. Untuk mendukung ketercapaian pilar strategis utama, telah dirancang juga *key enablers* yang harus dipenuhi. *Key enablers* merupakan sekumpulan tindakan dan aktivitas utama yang akan mendorong kelancaran implementasi strategi dan memperkuat fondasi Pelindo dalam mencapai visinya sebagai pemimpin ekosistem maritim terintegrasi yang berkelas dunia. Visi, Misi, Pilar Strategi dan *Key Enablers* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang diwujudkan dalam bentuk rumah strategi Perseroan.

CORPORATE STRATEGY

To realize its vision and mission, the Company has formulated a strategic theme, which includes the main pillars for the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) strategic house for the period 2021-2025. The strategic theme is also a reference for defining strategic sub-themes for Pelindo until 2025 that will be the basis for defining strategic initiatives. To support the achievement of the main strategic pillars, key enablers have also been designed that must be met. Key enablers are a set of main actions and activities to encourage smooth strategy implementation and strengthen Pelindo's foundation in achieving its vision as a world-class integrated maritime ecosystem leader. The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Vision, Mission, Strategy Pillars and Key Enablers are realized through the Corporate strategy house.

Gambar Rumah Strategi Perseroan
Corporate Strategy House



Pilar I: Transformasi Pelabuhan Kelas Dunia

Pilar strategi pertama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas Pelindo sebagai perusahaan penyedia jasa kepelabuhan kelas dunia. Fokus pilar strategi ini adalah peningkatan performa operasi dan pelayanan pelabuhan, melalui peningkatan standar kualitas operasional pelabuhan dengan cara memanfaatkan teknologi digital, sedangkan peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan dilakukan melalui pemberian jasa layanan yang bersifat *customer centric* (berbasis pelanggan). Selain itu, peningkatan performa juga dilakukan dengan dimulainya pengembangan *sustainable ports* bagi pelabuhan Pelindo. Fokus terakhir dari pilar ini adalah mempersiapkan Pelindo untuk berekspansi secara regional di Kawasan Asia Tenggara.

Pilar II: Penguatan Ekosistem Logistik

Pilar strategi kedua dilakukan untuk membuat hubungan dengan pemain ekosistem logistik laut dan darat agar dapat mengoptimalkan biaya logistik nasional. Fokus dari pilar strategi ini adalah menjalin kerja sama dan juga potensi integrasi sistem atau layanan dengan pemain logistik laut dan darat sehingga biaya logistik dapat dioptimalkan, serta menjalin kerja sama dengan kawasan industri/logistik untuk mendorong peningkatan arus barang.

Kerja sama dengan kawasan industri/logistik dibutuhkan untuk mendukung konektivitas dengan bagian *hinterland*, serta mempermudah pemberian layanan logistik *end-to-end* bagi pelaku industri. Adanya hubungan dengan pelaku kawasan industri yang berada di satu daerah dengan pelabuhan Pelindo berpotensi meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Pelindo dari sisi kecepatan dan kemudahan.

Kerja sama dengan pelaku logistik darat juga sangat penting karena peran transportasi darat dalam membawa barang keluar dari pelabuhan dan menuju ke *end-user* dari barang tersebut. Adanya kerja sama dengan pelaku logistik darat akan meningkatkan performa operasi pelabuhan karena berpotensi meningkatkan *flow throughput*. Logistik darat yang dimaksud juga tidak terbatas pada truk saja, tapi juga mencakup angkutan kereta-api sebagai solusi logistik darat keluar dari pelabuhan.

Pillar I: World Class Port Transformation

This first strategic pillar is carried out to increase Pelindo's capabilities as a world-class port service provider company. The focus of this strategy pillar is improving the port operations and services performance, increasing port operational quality standards by utilizing digital technology, while improving the quality of port services is carried out by providing customer-based services. In addition, performance improvement is also being carried out by starting the development of sustainable Pelindo ports. The final focus of this pillar is to prepare Pelindo to expand regionally in the Southeast Asia Region.

Pillar II: Strengthening the Logistics Ecosystem

The second strategic pillar is to create relationships with sea and land logistics ecosystem businesses to optimize national logistics costs. The focus of this strategic pillar is to establish cooperation and potential system or service integration with sea and land logistics businesses so that logistics costs can be optimized, as well as to establish cooperation with industrial/logistics areas to encourage increased goods traffic.

Collaboration with industrial/logistics areas is needed to support connectivity with parts of the hinterland, as well as to facilitate the provision of end-to-end logistics services for industrial businesses. The existence of relationships with industrial businesses who are in the same area as Pelindo ports has the potential to improve services for Pelindo customers in terms of speed and convenience.

Collaboration with land logistics businesses is also very important as of the role of land transportation in bringing goods out of the port and to the end-user of the goods. Collaboration with land logistics businesses will improve the performance of port operations as it has the potential to increase traffic throughput. The land logistics in question are not limited to trucks only, but also include rail transportation as a land logistics solution out of the ports.



Pilar III: Efisiensi Supply Chain Maritim

Pilar strategis ketiga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi *supply chain* maritim di Indonesia. Fokus dari pilar strategi ini adalah memperluas jaringan pelabuhan nasional. Walaupun Pelindo merupakan pemain utama dan tulang punggung kepelabuhanan di Indonesia, Pelindo hanya memiliki sebagian kecil pelabuhan yang ada di Indonesia. Pelabuhan lain dimiliki pihak swasta dan juga yang masih dioperasikan Pemerintah merupakan potensi besar untuk menjadi target pengembangan konektivitas bagi Pelindo. Selain itu, integrasi antar jaringan pelabuhan, moda transportasi dan kawasan pendukung (yakni kawasan industri/logistik) juga menjadi fokus pilar.

Pilar IV: Peningkatan Value Perseroan

Pilar strategis keempat dilakukan untuk meningkatkan *value* Pelindo, dengan cara memperkuat struktur keuangan Perseroan agar dapat terciptanya sistem keuangan yang *prudent* dan stabil, mengoptimalkan pengelolaan aset, dan memfokuskan Perseroan untuk mengembangkan bisnis secara vertikal dan horizontal dengan memanfaatkan kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh Pelindo.

Enablers

Seluruh pilar strategis didukung oleh adanya *enablers* yang harus direalisasikan oleh Pelindo. Sub-pilar strategis *enablers* mencakup bidang-bidang pendukung keberjalanan bisnis utama, yaitu pengembangan organisasi untuk mendorong efisiensi bisnis, pengembangan inovasi yang berkelanjutan, pengembangan kapabilitas dan kualitas SDM, serta penguatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (termasuk pengembangan integrasi sistem Perseroan (Operasional dan Non-Operasional) serta integrasi dengan sistem *stakeholders/* eksternal yakni *National Logistics Ecosystem/NLE*).

Pillar III: Maritime Supply Chain Efficiency

The third strategic pillar aims to increase maritime supply chain efficiency in Indonesia. The focus of this strategy pillar is expanding the national port network. Even though Pelindo is the main company and backbone of ports in Indonesia, Pelindo only owns a small number of ports in Indonesia. Other ports owned by private parties and also those still operated by the Government have great potential to become targets for connectivity development for Pelindo. Apart from that, integration between port networks, transportation modes and supporting areas (namely industrial/logistics areas) is also the focus of the pillar.

Pillar IV: Increasing Company Value

The fourth strategic pillar is carried out to increase Pelindo's value, by strengthening the Company's financial structure so that it can create a prudent and stable financial system, optimize asset management, and focus the Company on developing its business vertically and horizontally by utilizing Pelindo's capabilities and competencies.

Enablers

All strategic pillars are supported by enablers that must be realized by Pelindo. The enablers strategic sub-pillar includes areas supporting main business continuity, namely organizational development to encourage business efficiency, development of sustainable innovation, development of HR capabilities and quality, as well as strengthening the use of technology and information systems (including development of company system integration (Operational and Non-Operational), as well as integration with stakeholder/external systems, namely the National Logistics Ecosystem/NLE).

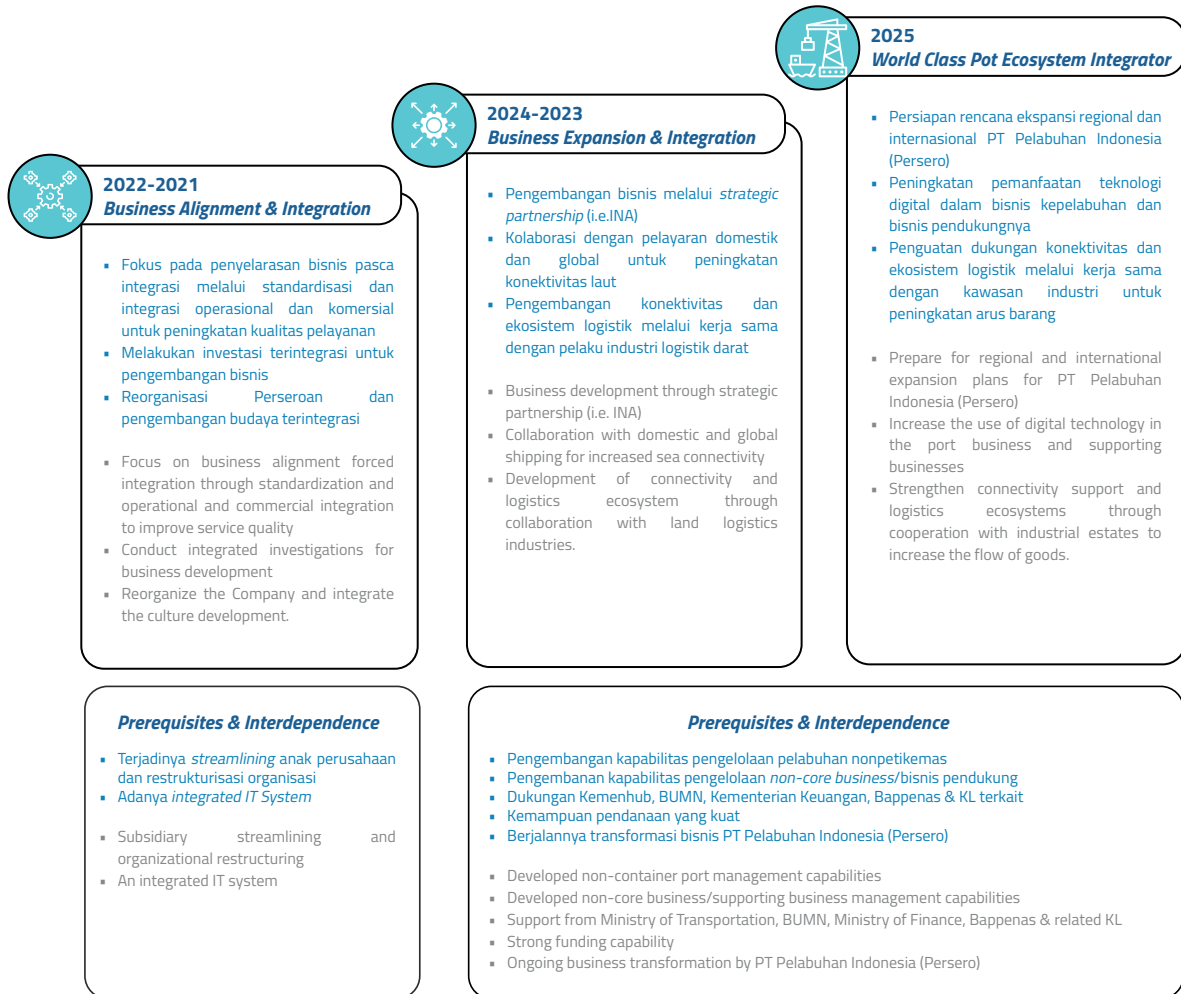
ROADMAP PERSEROAN

Untuk memastikan agar arah Perseroan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, telah disusun *roadmap* yang berfungsi sebagai panduan yang akan memberikan gambaran terkait proses, tahapan, dan capaian yang harus diprioritaskan. Adapun *roadmap* Perseroan dari tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

COMPANY ROADMAP

To ensure that the Company's direction is in line with its vision and mission, a roadmap has been prepared as a guide to provide an overview of the processes, stages and achievements that must be prioritized. The Company's roadmap from 2021-2025 is as follows:

Gambar Roadmap Perseroan
Company Roadmap



Berdasarkan *roadmap* tersebut, tahun 2023-2024 masuk dalam fase *business expansion and partnership* yang berfokus pada:

1. Peningkatan pengembangan bisnis melalui *strategic partnership*.
2. Kolaborasi dengan pelayaran domestik dan global untuk peningkatan konektivitas laut.
3. Pengembangan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan pelaku industri logistik darat.

Based on the roadmap, 2023-2024 will enter the business expansion and partnership phase that focuses on:

1. Increasing business development through strategic partnerships.
2. Collaborating with domestic and global shipping to increase maritime connectivity.
3. Developing connectivity and logistics ecosystem through collaboration with land/logistics industry players.



PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) ATAU PENUGASAN LAIN

Berdasarkan Daftar Investasi Strategis Perseroan di bawah ini, sebagian ada yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sedangkan sebagian yang lain masuk kategori Investasi Strategis Perseroan.

NATIONAL STRATEGIC PROJECTS (PSN) OR OTHER ASSIGNMENTS

Based on the Company's Strategic Investment List below, the National Strategic Projects (PSN) were stated in the Republic of Indonesia Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2023 concerning Amendments to the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2021 concerning Amendments to the List of Strategic Projects National, while some others fall into the Company's strategic investment category.

Tabel Daftar Investasi Strategis Perseroan
List of the Company's Strategic Investments

No	Nama Aktiva Name of Asset	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 Realization up to QIV 2023	Capaian (%) Achievement (%)	Keterangan Description
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	
1	Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Construction of North Kalibaru Terminal Phase I	1.250.000	826.143	66,09	PS
2	Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalbar Phase I Construction of Kijing Port, West Kalimantan Phase I	397.000	47.312	11,92	PSN
3	Pembangunan Jalan Akses Timur Terminal Kalibaru Construction of the Kalibaru Terminal East Access Road	500.000	4.720	0,944	PSN
4	Pengembangan Pelabuhan Benoa Development of Benoa Port	590.000	316.023	53,56	PSN
5	Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan 1C Makassar New Port Development Work Phase 1B and 1C	400.271	283.758	70,89	PSN
6	Pembangunan Jalan Tol Cilincing Cibitung Construction of Cilincing Cibitung Toll Road	462.000	365.631	79,14	PSN
7	Pembangunan Terminal Multipurposes Labuan Bajo Construction of Labuan Bajo Multipurposes Terminal	-	-	-	PSN
8	Pembangunan Fly Over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong Construction of Fly Over to and from Teluk Lamong Terminal	-	-	-	PSN
9	Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Dredging Benoa Harbor Channels and Pools	686.995	190.630	27,75	PMN
10	Pengembangan Pelabuhan Kupang Development of Kupang Port	-	-	-	PSN
11	Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting-Arar Development of Sorong Eksisting-Arar Port	14.500	284	1,96	PSN
12	Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Construction of Kuala Tanjung Port	-	-	-	PSN
13	Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung Development of Kuala Tanjung Industrial Area	45.211	1.075	2,38	PSN
JUMLAH TOTAL		4.345.977	2.035.573	46,84	

Keterangan | Notes:

PS : Proyek Strategis Perseroan | Company Strategic Projects

PSN : Proyek Strategis Nasional | National Strategic Projects

PMN : Penyertaan Modal Negara | State Capital Participation

Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I

Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp826,143 miliar atau terserap 66,09% dari nilai RKAP Tahun 2023 sebesar Rp1,250 triliun.

Penjelasan progres pekerjaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Progres fisik konstruksi Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) VII Nomor PD.01/18/8/1/PBT/UT/PI.II-20 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk telah mencapai progres pekerjaan sebesar 100% pada tahun 2022 dan telah selesai masa pemeliharaannya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kedua Nomor: PD.05.01/14/8/1/PMO1/INVS/PLND-23 tanggal 14 Agustus 2023.
2. Pekerjaan Konsultan Supervisi Penyelesaian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap IA Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Haskoning Indonesia sesuai Surat Perjanjian Nomor: PD.01/16/10/1/PBT/TEK/PI.II-20 tanggal 16 Oktober 2020 telah selesai 100% untuk supervisi selama masa pelaksanaan konstruksi fisik dan telah selesai pengawasan untuk masa pemeliharaan, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: PD.05.01/10/8/1/PMO1/INVS/PLND-23 tanggal 10 Agustus 2023.
3. Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok telah selesai 100% dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: PD.05.01/6/1/1/PMO1/INVS/PLND-23 tanggal 6 Januari 2023.
4. Pelaksanaan Kerja Sama Khusus Manajemen Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Periode 2022-2023 oleh PT Pelindo Solusi Logistik sebagai *Owner Representative*/Manajemen Proyek sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: PD.05.01/3/11/1/PMO1/INVS/PLND-22 dan PD.05.01/3/11/1/KPKB/DIUT/PLSL-22 tanggal 3 November 2022, telah selesai 100% dengan Berita Acara Penutupan PKS dan Pengalihan Manajemen Proyek Nomor: PD.05.01/2/10/1/PMO1/INVS/PLND-23 tanggal 2-3 Januari 2023.
5. Pelaksanaan Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sedang berjalan dengan progres sebagai berikut:
 - a. Telah diterbitkan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/18/11/1/ADPG/UTMA/PLND-22 pada tanggal 18 November 2022.
 - b. Telah diterbitkan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) Nomor: PD.05.01/22/11/3/PMO1/INVS/PLND-22 tanggal 22 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Lahan (BASTL) Nomor: PD.05.01/22/11/1/PMO1/INVS/PLND-22 tanggal 22 November 2022.

Construction Of North Kalibaru Terminal Phase I

Construction costs for the North Kalibaru Terminal Phase I in QIV 2023 amounted to Rp826.143 billion, or 66.09% of the 2023 RKAP of Rp1.250 trillion.

Explanation of work progress up to QIV 2023 is as follows:

1. Physical progress of the Kalibaru Terminal Construction Phase I construction was carried out based on Additional Agreement Letter (Addendum) VII No. PD.01/18/8/1/PBT/UT/PI.II-20 dated August 18, 2020 concerning North Kalibaru Container Terminal Construction Work Phase I at Tanjung Priok Port with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk achieved work progress of 100% in 2022, and the maintenance period was completed in accordance with the Minutes of Second Handover No. PD.05.01/14/8/1/PMO1/INVS/PLND-23 dated August 14, 2023.
2. The work of the Supervision Consultant for the Completion of the Construction of the North Kalibaru Container Terminal Phase IA of Tanjung Priok Port by PT Haskoning Indonesia in accordance with the Letter of Agreement No. PD.01/16/10/1/PBT/TEK/PI.II-20 dated October 16, 2020 has been completed 100% for supervision during the physical construction period and supervision for the maintenance period has been completed, in accordance with the Minutes of Handover of Work Results No. PD.05.01/10/8/1/No. INVS/PLND-23 dated August 10, 2023.
3. The Kalibaru Terminal Channel and Pools Dredging Work Phase 1B of Tanjung Priok Port has been 100% completed with Minutes of Handover No. PD.05.01/6/1/1/PMO1/INVS/PLND-23 dated January 6, 2023.
4. Implementation of Special Cooperation for Management of the North Kalibaru Terminal Development Project Phase I for the 2022-2023 Period by PT Pelindo Solusi Logistik as Owner Representative/Project Management in accordance with Letter of Agreement No. PD.05.01/3/11/1/PMO1/INVS/PLND-22 and PD.05.01/3/11/1/KPKB/DIUT/PLSL-22 dated November 3, 2022, has been 100% completed with Minutes of PKS Closing and Project Management Transfer No. PD.05.01/2/10/1/PMO1/INVS/PLND-23 dated January 2-3, 2023.
5. The Kalibaru Terminal Design and Construction Work Phase 1B of Tanjung Priok Port is currently underway with the following progress:
 - a. Letter of Agreement No. PD.01/18/11/1/ADPG/UTMA/PLND-22 dated November 18, 2022.
 - b. Work Commencement Minutes (BAMK) No. PD.05.01/22/11/3/PMO1/INVS/PLND-22 dated November 22, 2022 and Land Handover Minutes (BASTL) No. PD.05.01/22/11/1/PMO1/INVS/PLND-22 dated November 22, 2022.



- c. Progres Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar 21,256% dari rencana 42,655% (deviasi -21,399). Kegiatan yang sedang berlangsung adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan pengembangan desain (DED), pekerjaan perbaikan dan pematangan tanah di antaranya pekerjaan pemasangan PVD tahap 2 dan pekerjaan *Vacuum Consolidation* tahap 2, pekerjaan pengadaan dan penghamparan pasir serta pekerjaan Dermaga berupa pengadaan dan pemancangan tiang SPSP. Adapun penyebab keterlambatan progres fisik diakibatkan oleh terhambatnya 2 (dua) pekerjaan utama yaitu tertundanya produksi tiang SPSP akibat peristiwa kebakaran pada unit produksi utama pabrik penyuplai material *Hot Strip Mill* SPSP sehingga diperlukan waktu untuk pemenuhan produksi dari tempat lain serta penundaan penimbunan pasir akibat adanya regulasi baru berupa tambahan perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kedua pekerjaan tersebut sudah berjalan dan saat ini tengah diupayakan percepatan pelaksanaan proyek untuk mengejar progres fisik sehingga proses penyelesaian proyek ditargetkan masih sesuai dengan kontrak.
6. Pekerjaan Jasa Konsultansi *Review* DED dan Supervisi Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Haskoning Indonesia sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/23/9/1/ADP/TEK/PI.II-21 tanggal 29 September 2021 saat ini masih berjalan dengan nilai serapan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar Rp14,43 miliar.
- c. Kalibaru Terminal Design and Build Work Progress Phase 1B Tanjung Priok Port to December 31, 2023 is 21.256% of the planned 42.655% (deviation -21.399). Ongoing activities include preparatory work, design development work (DED), repair work and soil preparation including PVD installation work stage 2 and Vacuum Consolidation work stage 2, sand procurement and spreading work as well as dock work in the form of procuring and erecting SPSP poles. The cause of the delay in physical progress was caused by obstructions in 2 (two) key jobs, namely a delay in production of SPSP poles due to a fire at the main production unit of the SPSP Hot Strip Mill material supply factory so that time was needed to fulfill production in other places, and delays in stockpiling sand due to new regulations, such as additional permits from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP). Both works are already underway and currently efforts are being made to accelerate project catch up with physical progress so that the project completion will still be in accordance with the contract.
6. Work on DED Review Consultancy Services and Design and Build Supervision of Kalibaru Terminal Phase 1B Tanjung Priok Port by PT Haskoning Indonesia in accordance with Letter of Agreement No. PD.01/23/9/1/ADP/TEK/PI.II-21 dated September 29, 2021 is currently still ongoing with the absorption value up to QIV 2023 amounting to Rp14.43 billion.

Berikut ini dokumentasi Pengembangan Pelabuhan Kalibaru

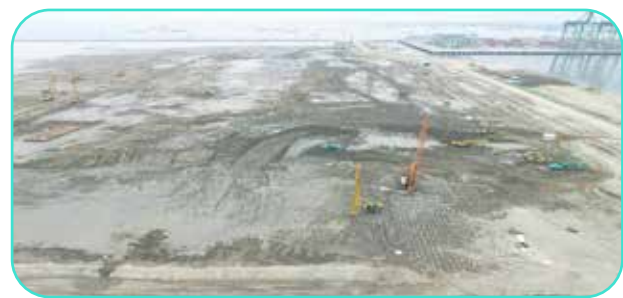
The following documentation shows the Kalibaru Port Development



Gambar Progres Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B
Picture of Kalibaru Terminal Phase 1B Design Work Progress



Gambar Pekerjaan PVD Tahap 2
Phase 2 PVD Work Drawing



Gambar Pekerjaan Vacuum Preloading Tahap 2
Picture of Vacuum Preloading Work Stage 2



Gambar Pekerjaan Pengadaan dan Penghamparan Pasir
Procurement and Sand Laying



Gambar Pekerjaan Konstruksi Dermaga
Drawing of Pier Construction Work





Pembangunan Terminal Kijing Phase I

Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat Phase 1 Triwulan IV tahun 2023 terealisasi sebesar Rp47,310 miliar, terserap 11,92% dari nilai RKAP Tahun 2023 sebesar Rp397 miliar. Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 di antaranya adalah untuk pembangunan fisik Terminal Kijing tahap inisial di mana telah mencapai progres 100% pada 17 Juni 2022, realisasi pekerjaan pembangunan pagar pengaman, menara pengawas dan *container office* serta pekerjaan *land clearing* di lahan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Kalimantan Barat telah mencapai progres 100% pada 10 Juni 2022, serta realisasi pekerjaan Relokasi Jalan Nasional ruas Sei Duri-Mempawah dengan progres fisik 32,85% per akhir Desember 2023.

Kijing Terminal Construction Phase I

The construction of Kijing Port, West Kalimantan Phase 1 up to QIV 2023 realized Rp47,310 billion, or 11.92% of the 2023 RKAP of Rp397 billion. Realization up to the QIV 2023 included the physical construction of the initial stage of the Kijing Terminal, which reached 100% progress on June 17, 2022, the realization of work on the construction of security fences, control towers and container offices, as well as the development of the West Kalimantan Kijing Terminal that reached 100% progress on June 10, 2022, as well as the realization of the National Road Relocation work for the Sei Duri-Mempawah section with physical progress of 32.85% as of the end of December 2023.

Gambar Progres Pekerjaan Tahun 2023

Picture of Work Progress in 2023

	Pemerintah Pusat Central Government		Pemerintah Daerah Local Government	
Dasar Pelaksanaan. (Legal Standing)	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden No. 43 tahun 2017 Percepatan Pembangunan dan Pegoperasian Terminal Kijing Kepmen Perhubungan No. KP 787 tahun 2016 Rencana Induk Pelabuhan Pontianak Kepmen LHK No. SK.621/Menlhk/Setjen/PLA.4.11.2017 Izin Lingkungan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Presidential Regulation Number 43 of 2017 Accelerating the Development and Operation of the Kijing Terminal Minister of Transportation Decree No. KP 787 of 2016 Pontianak Port Master Plan Minister of Environment and Forestry Decree No. SK.621/Menlhk/Setjen/PLA.4.11.2017 Environmental Permit for Development and Operation of Kijing Terminal 		<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Konsesi No. PP.008/1/3/KSOP.PTK.2018 Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Keputusan Gubernur Kalbar No. 511/PEM/2017 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Kijing Surat KSOP No. PP 008/2/7/KSOPPTK-18 Pemberian Lisensi Pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak kepada BUPPT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Concession Agreement No. PP.008/1/3/KSOP.PTK.2018 Development and Business of Kijing Terminal Port Services Governor of West Kalimantan Decree No. 511/PEM/2017 Determination of Soil Procurement Locations for the Development of Kijing Terminal KSOP Letter No. PP 008/2/7/KSOPPTK-18 Granting a license for the construction of Pontianak Port Kijing Terminal to BUPPT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 	
Overall Project	Tanah Land		Konstruksi Terminal Terminal Construction	Operasional Operational
	Pengadaan Tanah Land Procurement	Relokasi Aset Asset Relocation		
	ha Lahan/Land 198			
On-Going Project	Makam TiangHoa 3.1 ha Relokasi Aset BMN, BMD, Desa & Wakaf 5.8 ha Land Clearing & Pemagaran Chinese Tombs 3.1 ha Relocation of BMN, BMD, Village & Waqf Assets 5.8 ha Land Clearing & Fencing		Pembangunan Terminal Kijing Tahap Inisial Initial Development of Kijing Terminal	
		Relokasi Tahap 1 Phase 1 Relocation Relokasi Tahap 2 Phase 2 Relocation Relokasi Tahap 3 Phase 3 Relocation		
	Relokasi Jalan Nasional National Road Relocation			
Next Project	Struktur Penahan Abrasi Abrasion Resistance Structure	Relokasi Jalan dan Gang Desa Relocation of Village Roads and Alleys	Dermaga Pandu Tunda Struktur Proteksi dan Wave Attenuator Tambah untuk Mitigasi Insiden Kijing Pembangunan Terminal Tahap I (Curah Cair & Curah Kering) Pilot and Tugboat wharf Additional Protection Structures and Wave Attenuators for Mitigation of Kijing Incidents Terminal Development Phase I (Liquid & Dry Bulk)	Fasilitas ISPS CODE, Furniture ISPS CODE facilities, Furniture

Adapun penjelasan progres pekerjaan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan fisik Terminal Kijing dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat antara Perseroan dan PT Wijaya Karya (Persero) Nomor: PD.01/17/5/1/ADP/UT/PI.II-18 tanggal 17 Mei 2018 beserta *Addendum*-nya telah selesai progres fisik 100% berdasarkan Berita Acara Nomor: PD.05.01/17/6/3/PMO2/INVS/PLND-22 tanggal 17 Juni 2022 tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat (BAST I) serta telah dilakukan masa pemeliharaan yang dituangkan pada Berita Acara Nomor: PD.05.01/16/6/1/PMO2/INVS/PLND-23 tanggal 16 Juni 2023 tentang Serah Terima Kedua Pekerjaan Pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat (BAST II).
2. Terhadap relokasi aset BMN, aset Pemkab Mempawah, aset milik desa dan wakaf yang telah tervalidasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap di mana kedua tahap tersebut progres fisiknya telah selesai 100% dengan penjelasan detail sebagaimana berikut:
 - a. Berita Acara Nomor: PD.05.01/26/11/1/MNPK/MNPK/PLND-21 tanggal 26 November 2021 tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengganti Milik Pemerintah Daerah, Desa dan Wakaf yang Terkena Dampak Pembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Tahap I (BAST I) serta telah dilakukan masa pemeliharaan yang dituangkan pada Berita Acara Nomor: PD.05.01/28/3/2/PMO2/PGPK/PLND-23 tanggal 28 Maret 2023 tentang Serah Terima Kedua Pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengganti Milik Pemerintah Daerah, Desa dan Wakaf yang Terkena Dampak Pembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat Tahap I (BAST II);
 - b. Berita Acara Nomor: PD.05.01/4/4/5/MNPK/MNPK/PLND-22 tanggal 4 April 2022 tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengganti Kantor Desa Sungai Bundung Laut, Masjid Jami'atul Khair, dan Kantor BPTP (Balai Proteksi Tanaman Perkebunan) yang Terkena Dampak Pembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat (BAST I) serta telah dilakukan masa pemeliharaan yang dituangkan pada Berita Acara Nomor: PD.05.01/28/3/1/PMO2/PGPK/PLND-23 tanggal 28 Maret 2023 tentang Serah Terima Kedua Pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengganti Kantor Desa Sungai Bundung Laut, Masjid Jami'atul Khair dan Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) yang Terkena Dampak Pembangunan Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat (BAST II).
3. Progres pengadaan lahan di Desa Sungai Kunyit Laut dan Sungai Bundung Laut Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat telah selesai adalah seluas 191,99 Ha atau sebesar Rp861 miliar dari luasan tanah 198,58 Ha. Pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti terhadap pengadaan tanah 198,5 Ha adalah sebagai berikut:

An explanation of work progress up to QIV 2023 is as follows:

1. The physical construction of the Kijing Terminal was carried out based on the Work Agreement Letter for the Construction of the Kijing Terminal, Mempawah, West Kalimantan between the Company and PT Wijaya Karya (Persero) No. PD.01/17/5/1/ADP/UT/PI.II-18 dated May 17, 2018, then with the Addendum, and 100% physical progress has been completed based on Minutes No. PD.05.01/17/6/3/PMO2/INVS/PLND-22 dated June 17, 2022 concerning the First Handover of Construction Work for the Kijing Terminal, Mempawah, West Kalimantan (BAST I), and a maintenance period was carried out as stated in Minutes No. PD.05.01/16/6/1/PMO2/INVS/PLND-23 dated June 16, 2023 concerning the Second Handover of Construction Work for the Kijing Terminal, Mempawah, West Kalimantan (BAST II).
2. The relocation of BMN assets, Mempawah Regency Government assets, village-owned assets and validated waqfs was carried out in 2 (two) stages where the physical progress of both stages was 100% completed as follows:
 - a. Minutes No. PD.05.01/26/11/1/MNPK/MNPK/PLND-21 dated November 26, 2021 concerning the First Handover of Construction Work for Replacement Buildings Owned by Regional Governments, Villages and Waqfs Affected by the Construction of the Kijing Terminal, Mempawah Regency, West Kalimantan Phase I (BAST I) and a maintenance period has been carried out as outlined in the Minutes No. PD.05.01/28/3/2/PMO2/PGPK/PLND-23 dated March 28, 2023 concerning the Second Handover of Construction of Replacement Owned Buildings Regional Governments, Villages and Waqfs Affected by the Construction of the Kijing Terminal, Mempawah Regency, West Kalimantan Phase I (BAST II);
 - b. Minutes No. PD.05.01/4/4/5/MNPK/MNPK/PLND-22 dated April 4, 2022 concerning the First Handover of Construction Work for Replacement Buildings for the Sungai Bundung Laut Village Office, Jami'atul Khair Mosque, and BPTP Office (Balai Protection of Plantation Crops) Affected by the Construction of the Kijing Terminal, Mempawah Regency, West Kalimantan (BAST I), and a maintenance period has been carried out as outlined in Minutes No. PD.05.01/28/3/1/PMO2/PGPK/PLND-23 dated March 28, 2023 concerning the Second Handover of Construction Work for Replacement Buildings for the Sungai Bundung Laut Village Office, the Jami'atul Khair Mosque and the BPTP (Plantation Plant Protection Center) Office which were Affected by the Construction of the Kijing Terminal, Mempawah Regency, West Kalimantan (BAST II).
3. The progress of land acquisition in the Sungai Kunyit Laut and Sungai Bundung Laut villages, Mempawah Regency, West Kalimantan has been completed, covering an area of 191.99 Ha, or Rp861 billion for a land area of 198.58 Ha. Work that needs to be followed up on land acquisition of 198.5 Ha is as follows:

Gambar Progres Pekerjaan Relokasi Jalan Nasional
 National Road Relocation Work Progress



Gambar Progres Relokasi Aset BMN, Aset Desa, Pemkab Mempawah dan Wakaf
 Progress of Relocation of BMN Assets, Village Assets, Mempawah Regency Government and Waqf





Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru

Pembangunan Jalan Akses Timur Pelabuhan Kalibaru Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4,720 miliar, terserap 0,94% dari nilai RKAP Tahun 2023 sebesar Rp500 miliar. Saat ini Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru masih dalam tahap perencanaan fisik dan proses pengadaan tanah. Progres pekerjaan saat ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hasil Kajian Komersial dan Konsep Umum Perencanaan Jalan Akses Timur Kalibaru/*North Priok Eastern Access* (NPEA) selesai disusun dan dilaporkan kepada Direksi.
2. Penyelesaian Jasa Pendampingan dan Konsultasi Penyusunan Review Kajian Bisnis dan Studi Kelayakan Proyek *New Priok Eastern Access* di mana hasil studi telah disampaikan kepada Direksi.
3. Pengurusan Perizinan dengan Instansi terkait (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan) untuk memenuhi persyaratan dokumen Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru/*New Priok Eastern Access* (NPEA). Adapun progres pengurusan perizinan antara lain:
 - a. Pengajuan Trase NPEA pada revisi Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok menunggu penetapan Dokumen Revisi RIP Tanjung Priok.
 - b. Penerbitan Persetujuan Dokumen Basic Design dan *Right of Way Plan* Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/*New Priok Eastern Access* (NPEA) oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 19 Oktober 2022.
 - c. Terkait Izin AMDAL, Telah diterbitkan Dokumen Persetujuan Lingkungan pada tanggal 12 Oktober 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - d. Terkait Dokumen *Basic Design*, sedang dilakukan penyesuaian struktur akibat potensi singgungan dengan Tanggul PTPIN Kementerian PUPR dan akibat adanya permintaan penyesuaian *clearance* pada area Tenant PT KBN.
 - e. Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) oleh Kementerian ATR/BPN pada Tanggal 23 Mei 2022.
 - f. Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 18 Mei 2022.
 - g. Penerbitan Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi, Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Jalan Tol *New Priok Eastern Access* (NPEA) di Jalan Akses Marunda Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - h. Telah terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 375/SK-31.72.AT.02.04/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana

Construction Of Kalibaru Eastern Access Road

Construction of the Kalibaru Port Eastern Access Road up to QIV 2023 was realized at Rp4,720 billion, or 0.94% of the 2023 RKAP of Rp500 billion. Currently, the construction of the Kalibaru Eastern Access Road is still in the physical planning and land acquisition stages. The current work progress is as follows:

1. The results of the Commercial Study and General Concept of Planning for the East Kalibaru/*North Priok Eastern Access Road* (NPEA) has been completed and reported to the Board of Directors.
2. Completion of Assistance and Consultancy Services Preparation of Business Study Review and Feasibility Study for the *New Priok Eastern Access* Project where the results of the study have been submitted to the Board of Directors.
3. Processing permits with related agencies (DKI Jakarta Provincial Government, Ministry of PUPR, Ministry of ATR/BPN, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Ministry of Environment, and Ministry of Transportation) to fulfill the document requirements for the Construction of the Kalibaru East Access Road/*New Priok Eastern Access* (NPEA). The licensing processing progress includes:
 - a. The submission of the NPEA Trace on the revision of the Tanjung Priok Port Master Plan Document awaits the determination of the Tanjung Priok RIP Revision Document.
 - b. Issuance of Approval of the Basic Design Document and *Right of Way Plan* for New East Tanjung Priok Port Access/*New Priok Eastern Access* (NPEA) by the Director of Freeway, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing on October 19, 2022.
 - c. For the AMDAL Permit, an Environmental Approval Document was issued on October 12, 2023 by the Ministry of Environment and Forestry.
 - d. For the Basic Design Document, structural adjustments are being prepared due to potential contact with the PUPR Ministry's PTPIN Embankment and due to requests for clearance adjustments in the PT KBN Tenant area.
 - e. Issuance of Recommendations for Suitability of Space Utilization Activities (RKKPR) by the Ministry of ATR/BPN on May 23, 2022.
 - f. Issuance of Approval for Conformity of Marine Spatial Utilization Activities (PKKPRL) by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries on May 18, 2022.
 - g. Issuance of the Approval Document for the Traffic Impact Analysis Results with High Traffic Generation, Traffic Impact Analysis for the Construction of the *New Priok Eastern Access* (NPEA) Toll Road on the Marunda Cilincing Access Road, North Jakarta City, DKI Jakarta on December 29, 2022 by the DKI Jakarta Provincial Government.
 - h. The Head of the North Jakarta Administrative City Land Office Decree No. 375/SK-31.72.AT.02.04/XI/2023 dated November 14, 2023 concerning the Establishment of a Task Force for Land Acquisition

Pengadaan Tanah Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara. Saat ini sedang dilakukan proses Identifikasi dan Inventarisasi Bidang Tanah Pembangunan NPEA oleh Tim Satgas A dan B Kantor Pertanahan Jakarta Utara.

4. Terkait Perjanjian Pemanfaatan Lahan KBN, bahwa Pemanfaatan Lahan PT KBN untuk Pembangunan NPEA dilakukan melalui mekanisme UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Saat ini telah ditunjuk konsultan untuk melakukan Kajian Kelayakan Pengembangan *Port Integrated Logistic Center* pada Lahan KBN dan akan dilakukan finalisasi laporan *draft* final pada pertengahan bulan Januari 2024.
5. Terkait Pemilihan Mitra NPEA, bahwa diputuskan Pembangunan NPEA akan dibangun sendiri dengan biaya PT Pelindo.

Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)

Pembangunan Pelabuhan Benoa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi Rp316,02 miliar atau terserap 53,56% dari RKAP Tahun 2023 sebesar Rp590,00 miliar. Pekerjaan yang masih dilanjutkan di Triwulan I Tahun 2024 yaitu Pekerjaan Infrastruktur Dasar Area Pengembangan I. Adapun Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Timur 160m, Pembangunan Taman Segara Kerthi pada Area Pengembangan 1, Pelaksanaan Kerja Sama Khusus Pembangunan BMTH serta Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining Wall Dumping 2* dan Dermaga Curah Cair Pelabuhan Benoa telah selesai di tahun 2023.

Adapun penjelasan progres Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Progres Fisik Pekerjaan Perpanjangan Dermaga Timur 160 m yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: SP2.367/HK.0502/P.III-2021 Tanggal 30 September 2021 dan Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor: PD.01/20/1/1/ADPG/MNPK/PLND-23 tanggal 20 Januari 2023 dengan Kontraktor Pelaksana PT Istana Putra Agung, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp82,94 miliar dengan progres fisik telah selesai 100% pada 21 Januari 2023 di mana saat ini masih dalam masa pemeliharaan.
2. Progres Fisik Pekerjaan Pembangunan Taman Segara Kerthi Area Pengembangan I yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/13/5/1/ADPG /INVS/PLND-22 tanggal 13 Mei 2022 dengan Kontraktor Pelaksana PT Brantas Abipraya (Persero), sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp57,52 miliar dengan progres fisik mencapai 100% pada 24 Mei 2023.
3. Progres fisik konstruksi Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining Wall Dumping 2* (dua) dan Dermaga Curah Cair di Pelabuhan Benoa yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pemborongan Nomor: SP2.92/HK.0502/P.III-2021 Tanggal 30 April 2021, Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor: PD.01/27/10/1/ADPG/INVS/PLND-22 tanggal 27 Oktober 2022, Perjanjian Tambahan (Addendum) II

for the Construction of Tanjung Priok Timur Baru Port Access in Cilincing Subdistrict and Marunda Subdistrict, has been issued. Cilincing District, North Jakarta Administrative City. Currently, the NPEA Development Land Plot Identification and Inventory process is being carried out by the North Jakarta Land Office Task Force Team A and B.

4. For the KBN Land Utilization Agreement, PT KBN Land Utilization for NPEA Development was carried out through the mechanism of Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest. Currently a consultant has been appointed to carry out a Feasibility Study on the Development of a Port Integrated Logistic Center on KBN Land and the final draft report will be finalized in mid-January 2024.
5. For the selection of NPEA partners, it was decided that the NPEA development would be built independently at the expense of PT Pelindo.

Development Of Benoa Port (Bali Maritime Tourism Hub)

The construction of Benoa Port up to QIV 2023 realized Rp316.02 billion, or 53.56% of the 2023 RKAP of Rp590.00 billion. The work will continue in QI 2024 on the basic infrastructure work in Development Area I. The 160m East Pier extension work, the construction of Segara Kerthi Park in Development Area 1, the special cooperation for the construction of BMTH as well as the work on revetment and retaining wall dumping 2 and liquid bulk pier Benoa Harbor will be completed in 2023.

An explanation of the progress up to QIV 2023 is as follows:

1. Physical Progress of the 160 m East Pier Extension Work was carried out based on Contracting Agreement Letter No. SP2.367/HK.0502/P.III-2021 Dated September 30, 2021 and Additional Agreement (Addendum) No. PD.01/20/1/1/ADPG/MNPK/PLND-23 dated January 20, 2023 with the Implementing Contractor PT Istana Putra Agung, up to QIV 2023 realization amounted to Rp82.94 billion with physical progress being 100% completed on January 21, 2023 which is currently still under maintenance.
2. Physical progress of construction work on Taman Segara Kerthi Development Area I which was carried out based on Letter of Agreement No. PD.01/13/5/1/ADPG /INVS/PLND-22 dated May 13, 2022 with the Implementing Contractor PT Brantas Abipraya (Persero), up to QIV 2023, and Rp57.52 billion was realized with physical progress reaching 100% on May 24, 2023.
3. Physical progress of the construction of the Revetment and Retaining Wall Dumping 2 (two) works and the Liquid Bulk Pier at Benoa Harbor was carried out based on Contracting Agreement No SP2.92/HK.0502/P.III-2021 Dated April 30, 2021, Additional Agreement (Addendum) No.: PD.01/27/10/1/ADPG/INVS/PLND-22 dated October 27, 2022, Additional Agreement (Addendum) II



Nomor: PD.01/24/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 tanggal 24 Maret 2023, Perjanjian Tambahan (*Addendum*) III Nomor: PD.01/27/6/1/SPGD/PMO5/PLND-23 tanggal 27 Juni 2023 dan Perjanjian Tambahan (*Addendum*) IV Nomor: PD.01/27/9/1/SPGD/BMTH/PLND-23 tanggal 27 September 2023 dengan Kontraktor Pelaksana PT Waskita Karya (Persero), sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp383.206 miliar dengan progres fisik telah selesai 100%. Dalam mendukung pelaksanaan fisik dimaksud terdapat Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yaitu PT Virama Karya (Persero) berdasarkan Perjanjian Pemborongan Nomor: SP2.332.1/HK.0502/P.III-2020 Tanggal 01 Desember 2020, Perjanjian Tambahan (*Addendum*) Nomor: PD.05.01/2/6/1/PGPF/PMO5/PLND-22, Perjanjian Tambahan (*Addendum*) II Nomor: PD.01/21/11/1/ADPG/MNPK/PLND-22 tanggal 21 November 2022, Perjanjian Tambahan (*Addendum*) III Nomor: PD.01/3/4/1/SPGD/PGPK/PLND-23 tanggal 03 April 2023, Perjanjian Tambahan *Addendum* IV Nomor: PD.02/3/7/1/SPGD/BMTH/PLND-23 tanggal 03 Juli 2023, Perjanjian Tambahan *Addendum* V Nomor: PD.02/3/10/2/SPGD/BMTH/PLND-23 Tanggal 03 Oktober 2023 dan Perjanjian Tambahan *Addendum* VI Nomor: PD.02/6/11/2/SPGD/BMTH/PLND-23 Tanggal 06 November 2023 tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Paket Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining Wall Dumping* 1 (satu) dan *Dumping* 2 (dua) Serta Dermaga Curah Cair di Pelabuhan Benoa.

4. Progress Fisik Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Dasar Area Pengembangan I yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/8/11/1/ADPG/INVS/PLND-22 tanggal 8 November 2022 dan Perjanjian Tambahan (*Addendum*) nomor: PD.01/18/9/1/PECN/BMTH/PLND-23 tanggal 18 September 2023 dengan Kontraktor Pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp141,16 miliar dengan progres fisik mencapai 60,85%.

No. PD.01/24/3/1/SPGD/INVS/PLND- 23 dated March 24, 2023, Additional Agreement (*Addendum*) III No. PD.01/27/6/1/SPGD/PMO5/PLND-23 dated June 27, 2023 and Additional Agreement (*Addendum*) IV No.: PD.01/27/9/1/SPGD/BMTH/PLND-23 dated September 27, 2023 with the Implementing Contractor PT Waskita Karya (Persero), with up to QIV 2023 realization of Rp383,206 billion, and physical progress has been completed 100%. To support the physical implementation there is a Construction Management Consultant (MK), PT Virama Karya (Persero) based on Contracting Agreement No. SP2.332.1/HK.0502/P.III-2020 Dated December 01, 2020, Additional Agreement (*Addendum*) No. PD.05.01/2/6 /1/PGPF/PMO5/PLND-22, Additional Agreement (*Addendum*) II No. PD.01/21/11/1/ADPG/MNPK/PLND-22 dated November 21, 2022, Additional Agreement (*Addendum*) III No. PD .01/3/4/1/SPGD/PGPK/PLND-23 dated April 03, 2023, Additional Agreement *Addendum* IV No. PD.02/3/7/1/SPGD/BMTH/PLND-23 dated July 03, 2023, Agreement Additional *Addendum* V No. PD.02/3/10/2/SPGD/BMTH/PLND-23 Date October 03, 2023 and Additional Agreement *Addendum* VI No. PD.02/6/11/2/SPGD/BMTH/PLND-23 November 6, 2023 regarding Construction Management Consultant Services Work Packages for *Revetment* and *Retaining Wall Dumping* 1 (one) and *Dumping* 2 (two) and Liquid Bulk Piers at Benoa Harbor.

4. Physical Progress of Basic Infrastructure Development Work in Development Area I was carried out based on Letter of Agreement No. PD.01/8/11/1/ADPG/INVS/PLND-22 dated November 8, 2022 and Additional Agreement (*Addendum*) No. PD.01 /18/9/1/PECN/BMTH/PLND-23 dated September 18, 2023 with the Implementing Contractor PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, and until QIV 2023, Rp141.16 billion was realized with physical progress reaching 60.85%.

Berikut ini dokumentasi progres pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Bena.

The following shows the progress of the Bena Harbor Development work implementation.

Gambar Dokumentasi Pekerjaan *Revetment* dan *Retaining Wall Dumping 2* dan Dermaga Curah Cair
Revetment Work Documentation and Retaining Wall Dumping 2 and Liquid Bulk Jetty



Gambar Dokumentasi Pekerjaan Perpanjangan Dermaga *Cruise Sisi Timur 160 m*
160 m East Side Cruise Wharf Extension Works Documentation





Gambar Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Taman Segara Kerthi Area Pengembangan I
Segara Kerthi Park Construction Work Development Area I Documentation



Gambar Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Dasar Area Pengembangan I
Basic Infrastructure Construction Work of Development Area I Documentation



Pembangunan Makassar New Port Tahap 1b dan 1c

Makassar New Port merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan Makassar New Port Tahap IB dan Tahap IC Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp283,76 miliar atau terserap 70,89% dari nilai RKAP Tahun 2023 sebesar Rp400,27 miliar.

Penjelasan progres pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap IB dan Tahap IC dilaksanakan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019 tentang Perjanjian Pembedaan antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C, *Addendum* Perjanjian Pembedaan antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap IB dan Tahap IC Nomor: 3/HK.301/6/PI.IV-2021 dan Nomor: 140.1/EXT/PP/INFRA2/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan *Addendum* II Perjanjian Pembedaan antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk tentang Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C Nomor: PD.01/19/6/1/SPGD/INVS/PLND-23 tanggal 19 Juni 2023, di mana Triwulan IV Tahun 2023 telah selesai pekerjaan fisik 100%. Saat ini dilaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas/masa retensi.
2. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (PK3R) telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan pada tanggal 28 Januari 2022 untuk Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi di Makassar New Port (untuk kedalaman -16 mLWS, *volume* pengerukan $\pm 5,300,550.09 \text{ m}^3$, dan luasan reklamasi $\pm 100,51 \text{ Ha}$).

Makassar New Port Development Work Phase 1b and 1c

Makassar New Port is a National Strategic Project (PSN) as stated in the Republic of Indonesia (Perpres RI) Presidential Regulation No. 109 of 2020 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation No. 3 of 2016 concerning the Acceleration of National Strategic Projects. The construction of Makassar New Port Phase IB and Phase IC up to QIV 2023 was realized at Rp283.76 billion, or 70.89% of the 2023 RKAP of Rp400.27 billion.

An explanation of the work progress is as follows:

1. Makassar New Port Phase IB and Phase IC Development Work was carried out based on Deed No.01 dated February 1, 2019 concerning Contracting Agreement between PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk regarding Makassar New Port Development Work Phase 1B and Stage 1C, *Addendum* to Contracting Agreement between PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. regarding Makassar New Port Development Work Phase IB and Phase IC No. 3/HK.301/6/PI.IV-2021 and No. 140.1/EXT/PP/INFRA2/VI/2021 dated June 21, 2021 and *Addendum* II to Contract Agreement between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk regarding Makassar New Port Development Work Phase 1B and Phase 1C No. PD.01/19/6/1/SPGD/INVS/PLND-23 dated June 19, 2023, where by QIV 2023 has completed 100% of the physical work. Currently, with facility maintenance/retention period activities being carried out.
2. Approval for Dredging and Reclamation Work Activities (PK3R) was issued by the Ministry of Transportation on January 28, 2022 for Dredging and Reclamation Work at Makassar New Port (for depth -16 mLWS, dredging volume $\pm 5,300,550.09 \text{ m}^3$, and reclamation area $\pm 100.51 \text{ Ha}$).



Berikut ini dokumentasi Pembangunan Makassar New Port Tahap IB dan Tahap IC.

The following documentation the development of the Makassar New Port Phase IB and Phase IC.

Gambar Dokumentasi Progres Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan 1C
Progress Construction of Makassar New Port Phase 1B and 1C Documentation



Gambar Dokumentasi Progres Pembangunan Dermaga Angkatan Laut Makassar
Progress Construction of the Makassar Navy Pier Documentation



Pembangunan Jalan Tol Cilincing – Cibitung (JTCC)

Jalan Tol Cilincing Cibitung dibangun dengan tujuan utama untuk peningkatan konektivitas pelabuhan dan hinterland dimana JTCC akan terhubung dengan Jalan Akses Timur Kalibaru (NPEA), serta untuk mengurangi risiko kongesti di jalan eksisting. Pada Triwulan IV Tahun 2023, terealisasi sebesar Rp365,63 miliar, terserap 79,14% dari nilai RKAP Tahun 2023 sebesar Rp462,00 miliar. Progres pembebasan lahan dan progres fisik konstruksi Triwulan IV Tahun 2023 telah mencapai 100% dan telah beroperasi untuk pekerjaan sebagai berikut:

1. Seksi I - IC Cibitung sampai dengan IC Telaga Asih – Progres Fisik 100%
2. Seksi II - IC Telaga Asih sampai dengan IC Tambelang – Progres Fisik 100%
3. Seksi III - IC Tambelang sampai dengan IC Tarumajaya – Progres Fisik 100%
4. Seksi IV - IC Tarumajaya sampai dengan IC Cilincing – Progres Fisik 100%

Construction Of Cilincing – Cibitung (Jtcc) Toll Road

The Cilincing Cibitung Toll Road was constructed with the main aim of increasing port and hinterland connectivity where JTCC will be connected to the East Kalibaru Access Road (NPEA), as well as to reduce the risk of congestion on the existing roads. Up to QIV 2023, Rp365.63 billion was realized, or 79.14% of the 2023 RKAP of Rp462.00 billion. The physical progress of land acquisition and construction in QIV 2023 reached 100%, and it has been operational for the following work:

1. Section I - IC Cibitung to IC Telaga Asih – Physical Progress 100%
2. Section II - IC Telaga Asih to IC Tambelang – Physical Progress 100%
3. Section III - IC Tambelang to IC Tarumajaya – Physical Progress 100%
4. Section IV - IC Tarumajaya to IC Cilincing – Physical Progress 100%

Gambar Dokumentasi Seksi I Jalan Tol Cibitung Cilincing

Section I of the Cibitung-Cilincing Toll Road Documentation



Gambar Dokumentasi Seksi II Jalan Tol Cibitung Cilincing

Section II of the Cibitung-Cilincing Toll Road Documentation



Gambar Dokumentasi Seksi III Jalan Tol Cibitung Cilincing
Section III of the Cibitung-Cilincing Toll Road Documentation



Gambar Dokumentasi Peresmian Seksi 2 dan 3
Inauguration of Sections 2 and 3 Documentation



Dokumentasi Seksi IV Jalan Tol Cibitung Cilincing
Section IV of the Cibitung-Cilincing Toll Road Documentation



Pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo – Investasi Selesai

Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo diinisiasi oleh adanya kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia pada 10 Juli 2019, dimana sesuai arahan Presiden, Pelabuhan Labuan Bajo eksisting akan difokuskan sebagai Pelabuhan Pariwisata (penumpang, phinisi, *yacht* dan *cruise*), sehingga perlu dilakukan pemindahan/relokasi kegiatan pelayanan barang ke lokasi baru

Construction of Labuan Bajo Multipurpose Terminal– Investment Completed

The development of Labuan Bajo Port was initiated at the working visit of the President of the Republic of Indonesia on July 10, 2019, where based on the President’s directive, the existing Labuan Bajo Port will be focused as a Tourism Port (passenger, phinisi, *yacht* and *cruise*), so it is necessary to transfer/ relocate goods service activities to a new location through the

melalui pembangunan Terminal *Multipurpose* di Wae Kelambu (sesuai dengan penetapan lokasi Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan No: KM 31/2020 tanggal 6 Februari 2020).

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Laut dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dengan kontraktor PT Brantas Abipraya, sementara Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Darat dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan kontraktor PT Wijaya Karya. Fase Pengembangan Awal Terminal *Multipurpose* telah selesai 100% dan telah diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2021.

Sehubungan dengan selesainya pekerjaan fisik, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menyampaikan Surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PD.05.01/7/6/1/PGPF/UTMA/PLND-22 tanggal 7 Juni 2022 perihal Penyampaian Penyelesaian Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengusulkan proyek tersebut dapat dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional para Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

construction of a Multipurpose Terminal in Wae Kelambu (in accordance with the location of the Wae Kelambu Multipurpose Terminal determined by the Ministry of Transportation No: KM 31/2020 dated February 6, 2020).

The construction of seaside facilities was carried out by the Ministry of Transportation with the contractor PT Brantas Abipraya, while the work for the construction of landside facilities was carried out by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the contractor PT Wijaya Karya. The Initial Development Phase of the Multipurpose Terminal has been 100% completed and was inaugurated on October 14, 2021.

In connection with the completion of physical work, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) submitted a letter to the Coordinating Minister for Economic Affairs No. PD.05.01/7/6/1/PGPF/UTMA/PLND-22 dated June 7, 2022 concerning Submission of Completion of National Strategic Project by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), so that the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) project can be excluded from the list of National Strategic Projects based on the Republic of Indonesia Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2021.

Gambar Dokumentasi Pembangunan Terminal *Multipurpose* Labuan Bajo
Construction of the Labuan Bajo Multipurpose Terminal Documentation





Pembangunan *Fly Over* dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong – Investasi Selesai

Pekerjaan fisik pembangunan *fly over* dari dan menuju Terminal Teluk Lamong telah selesai 100% pada bulan April Tahun 2021. Sehubungan dengan selesainya pekerjaan fisik *fly over* di Tahun 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menyampaikan Surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PD.05.01/7/6/1/PGPF/UTMA/PLND-22 tanggal 7 Juni 2022 perihal Penyampaian Penyelesaian Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengusulkan proyek tersebut dapat dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Sedangkan untuk fisik akses persimpangan (*interchange*) dari dan menuju *flyover* Terminal Teluk Lamong telah selesai di bangun oleh Pemerintah Kota Surabaya di bulan September Tahun 2022. Saat ini, *flyover* dari dan menuju Terminal Teluk Lamong dalam tahap proses pelaksanaan Uji Layak Fungsi (ULF) dan Uji Layak Operasi (ULO) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/81/KPTS/013/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Tim Uji Layak Fungsi Jalan *Flyover* Teluk Lamong di Kota Surabaya. Saat ini, proses tahap pelaksanaan Uji Layak Fungsi (ULF) dan Uji Layak Operasi (ULO) telah mencapai proses penandatanganan Berita Acara Evaluasi Laik Fungsi *flyover* Terminal Teluk Lamong dan pembuatan laporan usulan *Draft* Sertifikat Uji Layak Fungsi *flyover* Terminal Teluk Lamong kepada Walikota Surabaya yang kemudian akan diusulkan ke Gubernur Jawa Timur.

Construction of *Fly Over* to and From Teluk Lamong Terminal – Investment Complete

The physical construction of the fly over to and from the Teluk Lamong Terminal was 100% completed in April 2021. In connection with the completion of the physical work on the fly over in 2021, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) submitted a letter to the Coordinating Minister for Economic Affairs No. PD. 05.01/7/6/1/PGPF/UTMA/PLND-22 dated June 7, 2022 regarding Submission of Completion of the National Strategic Project implemented by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), stating that PT Pelabuhan Indonesia (Persero) proposes the project be excluded from the National Strategic Project list in the Republic of Indonesia Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2021.

Meanwhile, the physical access on the interchange from and to the Teluk Lamong Terminal flyover was completed by the Surabaya City Government in September 2022. Currently, the flyover to and from the Teluk Lamong Terminal is in the process of implementing a Functional Feasibility Test (ULF) and an Operational Feasibility Test (ULO) by the Surabaya City Government in accordance with the Governor of East Java Decree No. 188/81/KPTS/013/2023 dated February 27, 2023 concerning the Functional Worthiness Test Team for the Teluk Lamong Flyover Road in Surabaya City. Currently, the process of implementing the Functional Feasibility Test (ULF) and Operational Feasibility Test (ULO) has reached the process of signing the Minutes of Evaluation of the Functional Worthiness of the Teluk Lamong Terminal flyover, and the preparation of a report on the proposed Draft Certificate of Functional Worthiness Test for the Teluk Lamong Terminal flyover to the Mayor of Surabaya to be proposed to the Governor of East Java.

Gambar Dokumentasi Pembangunan Flyover dari dan menuju Terminal Teluk Lamong
Construction of Fly Over from and to Teluk Lamong Terminal Documentation



Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Bena

Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Bena sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi Rp190,63 miliar atau terserap 27,75% dari RKAP Tahun 2023 sebesar Rp686,99 miliar.

Pekerjaan ini menggunakan dana PMN, di mana total nilai investasi yang telah terkontrak dalam kegiatan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Bena sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp1,05 triliun. Realisasi pekerjaan pengerukan masih di bawah dari target rencana RKAP tahun 2023, hal ini dikarenakan izin Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (PKKK) untuk volume sesuai lingkup Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Bena Tahun 2023 efektif dapat digunakan setelah dokumen Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Pelabuhan Bena terbit. Adapun RIP Bena Tahun 2023 telah terbit pada tanggal 31 Maret 2023, dan RIP tersebut menjadi dokumen pendukung untuk perizinan *Addendum* AMDAL/ SKKLHK, Progres Perijinan saat ini yaitu dalam proses menunggu Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Pelabuhan Bena diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Adapun rincian pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Bena yaitu sebagai berikut:

1. Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Bena Paket A sebesar Rp493.366.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: SP2.378/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 September 2021, jo. *Addendum* Nomor: PD.01/21/11/2/ADPG/INVS/PLND-22 tanggal 21 November 2022, jo. *Addendum* II Nomor: PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 tanggal 20 Maret

Dredging Bena Port Channels and Pools

Bena Port Channels and Pools Dredging Work up to QIV 2023 realized Rp190.63 billion, or 27.75% of the 2023 RKAP of Rp686.99 billion.

This work used PMN funds, where the total investment contracted for the Bena Port Channels and Pools Dredging activities to date being Rp1.05 trillion. The realization of dredging work is still below the 2023 RKAP target, this is because the Dredging Work Activity Approval (PKKK) permit for volumes within the scope of the 2023 Bena Port Master Plan (RIP) can be effectively used after the Bena Port Environmental Feasibility Decree (SKKLH) document has been issued. The 2023 Bena RIP was published on March 31, 2023, with the RIP a supporting document for the AMDAL/SKKLHK Addendum licensing. The current licensing progress is in the process of waiting for the Bena Port Environmental Feasibility Decree (SKKLH) to be issued by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). Details of the Bena Harbor Channel and Pool Dredging work are as follows:

1. Design and Build Work for Dredging Channels and Pools at Bena Port Package A amounted to Rp493,366,500,000 (four hundred ninety-three billion three hundred sixty-six million five hundred thousand rupiah) including 10% VAT, in accordance with Letter of Agreement No. SP2.378/HK.0502/P.III-2021 dated September 30, 2021, jo. Addendum No. PD.01/21/11/2/ADPG/INVS/PLND-22 dated November 21, 2022, jo. Addendum II No. PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 dated March 20,



2023, *jo. Addendum III* Nomor: PD.01/4/12/4/SPGD/BMTH/PLND-23 tanggal 04 Desember 2023 dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dengan durasi 960 Hari Kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan. Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp108,78 miliar dengan progres fisik sebesar 52,28%.

2. Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B sebesar Rp641.025.000.000,- (enam ratus empat puluh satu miliar dua puluh lima juta rupiah) termasuk PPN 10%, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: SP2.373/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 September 2021, *jo. Addendum* Nomor: PD.01/1/2/1/ADPG/INVS/PLND-23 tanggal 1 Februari 2023, *jo. Addendum II* Nomor: PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 tanggal 20 Maret 2023, *jo. Addendum III* Nomor: PD.01/4/12/3/SPGD/BMTH/PLND-23 tanggal 04 Desember 2023 dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) dengan durasi 864 Hari Kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan Lingkup Pengerukan. Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 mencapai Rp81,85 miliar dengan capaian progres fisik sebesar 58,81%.

2023, *jo. Addendum III* No. PD.01/4/12/4/SPGD/BMTH/PLND-23 dated December 04, 2023 implemented by PT Wijaya Karya (Persero) with a duration of 960 Calendar Days starting from the date of the Work Commencement Minutes. Realization up to QIV 2023 was Rp108.78 billion with physical progress of 52.28%.

2. *Design and Build* Work for Dredging the Channels and Pools at Benoa Port Package B amounted to Rp641,025,000,000 (six hundred forty one billion twenty five million rupiah) including 10% VAT, in accordance with Letter of Agreement No. SP2.373/ HK.0502/P.III-2021 dated September 30, 2021, *jo. Addendum* No. PD.01/1/2/1/ADPG/INVS/PLND-23 dated February 1, 2023, *jo. Addendum II* Number: PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 dated March 20, 2023, *jo. Addendum III* No. PD.01/4/12/3/SPGD/BMTH/PLND-23 dated December 04, 2023 implemented by PT Pembangunan Perumahan (Persero) with a duration of 864 Calendar Days starting from the date of the Minutes of Commencement of Dredging Scope of Work. Realization up to QIV 2023 reached Rp81.85 billion with physical progress achieved at 58.81%.

Gambar Dokumentasi Pengerukan Alur dan Kolam Paket A
Dredging of Grooves and Ponds Package A Documentation



Gambar Dokumentasi Pengerukan Alur dan Kolam Paket B
Dredging the Groove and Pond of Package B Documentation



Pengembangan Pelabuhan Kupang

Pekerjaan pengembangan Pelabuhan Kupang merupakan Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 14 pekerjaan telah selesai seluruhnya pada tahun 2022. Adapun pekerjaan-pekerjaan dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Perbaikan Dermaga Lokal dan Nusantara di Pelabuhan Tenau Kupang
2. Perkuatan Dermaga Ippi
3. Perkuatan Dermaga di Waingapu
4. Perkuatan Dermaga di Kalabahi
5. Pembangunan Lapangan Penumpukan 1 Ha di Pelabuhan Ippi
6. Perkerasan CY CCC-CDC di Pelabuhan Tenau Kupang
7. Perkerasan Lapangan 5500 m² di Pelabuhan Ende
8. Perkuatan Dermaga Lama 100 x 14,25 dan Penambahan Lampu di Dermaga Eks. APBN di Ende
9. Pembangunan Terminal Penumpang di Ende
10. Pembangunan Terminal Penumpang di Ippi
11. Pembangunan Jalan Akses Alternatif ± 200 di Ippi
12. Pembangunan Gate dan Penerangan Jalan di Waingapu
13. Pembangunan Terminal Penumpang di Waingapu
14. Rehabilitasi Terminal Penumpang di Kupang

Kupang Port Development

The Kupang Port development work is a National Strategic Project consisting of 14 works to be completed in 2022. The works referred to include:

1. Repairing Local & Indonesian Piers at Tenau Port, Kupang
2. Strengthening Ippi Pier
3. Strengthening the Pier in Waingapu
4. Strengthening the Pier in Kalabahi
5. Construction of a 1 Ha Stacking Field at Ippi Harbor
6. CY CCC-CDC Pavement at Tenau Kupang Port
7. 5500 m² Field Pavement at Ende Harbor
8. Strengthening the Old Pier 100 x 14.25 and Adding Lights to the Ex Pier. APBN in Ende
9. Construction of a Passenger Terminal in Ende
10. Construction of the Passenger Terminal at Ippi
11. Construction of Alternative Access Road ± 200 in Ippi
12. Construction of gates and street lighting in Waingapu
13. Construction of a Passenger Terminal in Waingapu
14. Rehabilitation of Passenger Terminal in Kupang



Gambar Dokumentasi Pengembangan Pelabuhan Kupang
Kupang Port Development Documentation



Pengembangan Pelabuhan Sorong

Pengembangan Pelabuhan Sorong tahun 2023 yaitu terdapat pekerjaan pembangunan CY PMN di Pelabuhan Sorong. Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi Rp284 juta atau terserap 1,96% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp14,5 miliar. Realisasi penyerapan tersebut atas penyelesaian DED *Relayout* CY, adapun untuk pelaksanaan fisik telah dilakukan pengadaan kontraktor yang mana kontrak ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2023. Sebelumnya pembangunan fisik CY telah dimulai namun dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan finansial akibat COVID-19, di mana dilakukan pemutusan kontrak tanggal 22 Juni 2021 dengan progres terakhir 14,02%. Sesuai dengan rencana rencana pengembangan, telah dilakukan koordinasi dengan *Subholding* Pelindo (SPTP) terkait perubahan *layout* dan spesifikasi teknis. Pekerjaan akan direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2024.

Development Of Sorong Port

The development of Sorong Port in 2023 means there will be CY PMN construction work at Sorong Port. In QIV 2023, Rp284 million was realized, or 1.96% of the 2023 RKAP of Rp14.5 billion. This realization included the completion of the DED *Relayout* CY, and for the physical implementation, a contractor was procured and the contract was signed on December 20, 2023. Previously, the physical construction of the CY had begun but the implementation experienced financial difficulties due to Covid 19, and the contract was terminated on June 22, 2021 with final progress of 14.02%. In accordance with the development plan, coordination is carried out with *Subholding* Pelindo (SPTP) regarding changes to the layout and technical specifications. Work is planned to begin in early 2024.

Gambar Dokumentasi Pekerjaan Pelabuhan Sorong dan Arar
Sorong and Arar Harbour Works Documentation



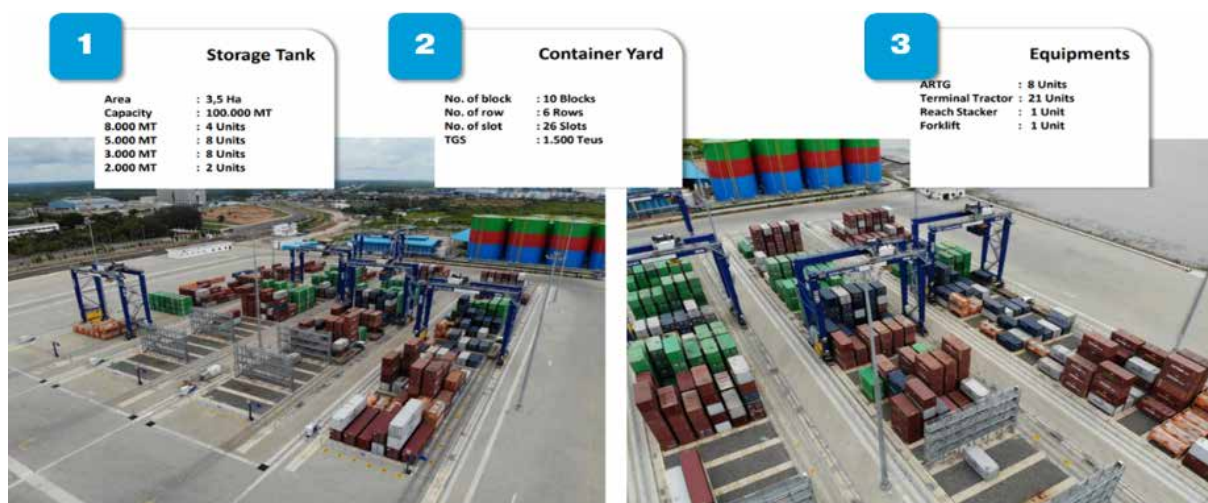
PENGEMBANGAN PELABUHAN KUALA TANJUNG – INVESTASI SELESAI

Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Telah Selesai

DEVELOPMENT OF KUALA TANJUNG PORT – INVESTMENT COMPLETE

The development of Kuala Tanjung Port has been completed

Gambar Dokumentasi Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung
Kuala Tanjung Port Development Documentation



Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung

Tahun 2023 Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung terealisasi Rp1,07 miliar atau terserap 2,38% dari RKAP Tahun 2023 sebesar Rp45,21 miliar. Pengembangan Kawasan Industri masih dalam proses pembebasan lahan dan proses perencanaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Industri.

Adapun penjelasan investasi hingga Triwulan IV Tahun 2023 antara lain:

1. Pengadaan Tanah 57,99 Ha, adapun progresnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penunjukkan KJPP telah selesai pada tanggal 8 April 2022 dengan Surat Perjanjian Nomor: HK.45/2/15/PPK-22.

DEVELOPMENT OF KUALA TANJUNG INDUSTRIAL AREA

In 2023, the Kuala Tanjung Industrial Area development realized Rp1.07 billion, or 2.38% of the 2023 RKAP of Rp45.21 billion. The Industrial Area development is still in the process of land acquisition, and the Basic Infrastructure planning process in the Industrial Area.

The investment up to QIV 2023 included:

1. Land Acquisition 57.99 Ha, with progress as follows:
 - a. The appointment of KJPP was completed on April 8, 2022 through Letter of Agreement No. HK.45/2/15/PPK-22.



- b. Telah diterbitkan SK tentang Penetapan Penilai pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Nomor: 022/SK-12-09-AT-01-02-IV/22 Tanggal 11 April 2022 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan.
 - c. Telah selesai dilaksanakan Musyawarah Bentuk ganti Rugi Kerugian pada 21-24 Juni 2022;
 - d. Rapat upaya percepatan pengadaan tanah dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan pimpinan rapat Sekda Batubara.
 - e. Validasi oleh BPN Asahan sebanyak 342 Persil pada tanggal 25, 26, 27 Oktober 2022, 16, 23 dan 30 November 2022, 08 dan 28 Desember 2022.
 - f. Telah dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dengan total sebanyak 341 Persil dengan luasan mencapai 40, 71 Ha. Yang dilaksanakan pada tanggal 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16 dan 30 Desember 2022 serta 27 Januari 2023 dimana keseluruhan pembayaran tersebut telah diakui seluruhnya pada tahun 2022 dimana keseluruhan pembayaran tersebut sebesar Rp269,21 miliar telah diakui seluruhnya pada tahun 2022.
 - g. Telah dilakukan pendaftaran Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kabupaten Asahan pada tanggal 19 Januari 2023, dengan total 13 Persil, seluas 2,78 Ha, dengan nilai Rp16,43 miliar.
 - h. Telah keluar putusan dari PN Kisaran pada tanggal 02 Februari 2023.
 - i. Telah dikeluarkan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh BPN Asahan terkait dengan putusan hasil konsinyasi pada tanggal 22 dan 24 Februari 2023.
 - j. Sampai bulan April dan Mei, Pemilik Tanah yang telah menerima ganti rugi melakukan pengosongan rumah secara sukarela hingga bulan April dan Mei 2023;
 - k. Untuk pelaksanaan eksekusi lahan, PT PPK telah menunjuk Konsultan Hukum yang akan mewakili PT Pelindo dalam pengurusan eksekusi tanah.
 - l. PN Kisaran telah memanggil pemilik lahan untuk melakukan pengosongan, yang hadir pada saat itu adalah satu orang saja. Sehingga dilakukan pemberitahuan kedua.
 - m. Pelaksanaan eksekusi lahan dilaksanakan terhadap 8 persil tanah, yang berasal dari 13 persil tanah konsinyasi, dimana 4 persil tanah sudah mengambil uang ganti rugi ke PN Kisaran secara sukarela dan 1 persil tanah sedang dalam gugatan hukum.
 - n. Pelaksanaan eksekusi tanah pada tanggal 12, 13 Desember 2023 ditunda pelaksanaannya karena situasi keamanan. Kemudian dilaksanakan pada tanggal 19, 20 Desember 2023. Pelaksanaan eksekusi pada tanggal 19 Desember 2023 tidak bisa dilaksanakan karena pemilik tanah masih bersikeras untuk tidak menerima dan Polres Batubara menyatakan pelaksanaannya ditunda. Kemudian pelaksanaan eksekusi tanah pada tanggal 20 Desember 2023 berhasil dilakukan terhadap 3 persil tanah, sehingga tersisa 5 persil yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 9 Januari 2024.
- b. A Decree was issued regarding the Determination of an Appraiser for the Land Acquisition for the Construction of an International Hub Port and Supporting Facilities at the Kuala Tanjung Port in Batu Bara Regency, North Sumatra Province No. 022/SK-12-09-AT-01-02-IV/22 April 11, 2022 by the Asahan Regency Land Office.
 - c. Deliberations on Compensation for Losses was completed on June 21-24, 2022.
 - d. A meeting to accelerate land acquisition was held on October 19, 2022 with the chairman of the meeting being the Batubara Regional Secretary.
 - e. Validation by BPN Asahan of 342 plots on October 25, 26, 27, 2022, November 16, 23 and 30, 2022, 08 and December 28, 2022.
 - f. Land compensation payments were made for a total of 341 parcels of land covering an area of 40.71 hectares. This was carried out on December 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16 and 30, 2022 and January 27, 2023 where the entire payment was fully recognized in 2022, and the total payment of Rp269.21 billion was recognized in 2022.
 - g. Consignment registration was carried out at the Asahan Regency District Court on January 19, 2023, for a total of 13 parcels of land, covering an area of 2.78 hectares, with a value of Rp16.43 billion.
 - h. A decision from the Kisaran District Court was issued on February 2, 2023.
 - i. A Termination of Legal Relations (PHH) was issued by BPN Asahan regarding the decision on the consignment results on February 22 and 24, 2023.
 - j. Until April and May, Landowners who have received compensation can voluntarily vacate their houses until April and May 2023;
 - k. To carry out the land execution, PT PPK appointed a Legal Consultant to represent PT Pelindo in managing the land execution.
 - l. The Kisaran District Court summoned the land owners to vacate, but only one person was present at that time. So a second notification was made.
 - m. The land execution was carried out on 8 land parcels of land from 13 consignment land parcels, of which 4 land parcels had received compensation from the Kisaran District Court voluntarily and 1 land parcel was currently under legal action.
 - n. The land execution on December 12, 13, 2023 was postponed due to a security situation. It was carried out on December 19, 20, 2023. The execution on December 19, 2023 could not be carried out as the land owner still insisted on not accepting it and the Batubara Police stated that the implementation was postponed. Then the land execution was successfully carried out on December 20, 2023 on 3 parcels of land, leaving 5 parcels remaining which are planned to be carried out on January 9, 2024.

- o. Penyerahan hasil pengadaan tanah telah dilaksanakan pada Juni 2023 seluas 30,74 ha oleh BPN Asahan kepada PT Pelindo, sisanya masih diproses di BPN.
 2. Tahun 2023 direncanakan akan dibangun infrastruktur dasar untuk tahap I. Saat ini telah dilakukan pelelangan untuk pekerjaan pematokan lahan dan pemagarangan sebagai bentuk penguasaan lahan dan awal pelaksanaan infrastruktur dasar.
 3. Pengembangan Pelabuhan Hub tahap selanjutnya akan dilaksanakan setelah Terminal *Multipurpose* Kuala Tanjung akan mencapai kapasitas maksimumnya, dan atau terdapat permintaan kebutuhan dari Kawasan Industri Kuala Tanjung.
- o. The handover of land acquisitions was carried out in June 2023 covering an area of 30.74 ha by BPN Asahan to PT Pelindo, the remainder is still being processed at BPN.
 2. In 2023, it was planned to build basic infrastructure for phase I. Currently, tenders have been sent for land clearing and fencing work as a form of land control and the start of implementation of the basic infrastructure.
 3. The next stage of Hub Port development will start after the Kuala Tanjung Multipurpose Terminal reaches its maximum capacity, and/or there is demand from the Kuala Tanjung Industrial Area.

Gambar Dokumentasi Musyawarah Ganti Rugi Lahan
Land Compensation Consultation Documentation



Gambar Dokumentasi Pembayaran Ganti Rugi Lahan
Land Compensation Payment Documentation





LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Tambahan Penyertaan Modal Negara (PNM) adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas dan dikelola secara korporasi. Sesuai ketentuan pada Pasal 110 PER-2/MBU/03/2023:

1. Tambahan PMN dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. Memperbaiki struktur permodalan BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
 - b. Meningkatkan kapasitas usaha BUMN atau Perseroan Terbatas.
2. Tambahan PMN kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka:
 - a. Melaksanakan penugasan Pemerintah kepada BUMN;
 - b. Melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN; dan/atau
 - c. Melakukan pengembangan usaha BUMN

Berikut informasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Pelindo.

Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa

Tambahan dana PMN yang diterima Pelindo direncanakan digunakan untuk melanjutkan pekerjaan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa dalam rangka pengembangan *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH). Alokasi tambahan PMN untuk pekerjaan lanjutan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa adalah sebesar Rp1,20 triliun dan akan dilaksanakan secara *multiyear* sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini.

REPORT ON ADDITIONAL USE OF STATE EQUITY PARTICIPATION (PMN)

Based on the Republic of Indonesia Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, Additional State Equity Participation (PNM) is the separation of state assets from the state revenue and expenditure budget, which are used as capital for SOEs and/or Limited Liability Companies and are managed corporately. In accordance with the provisions in Article 110 PER-2/MBU/03/2023:

1. Additional PMN is carried out with the aim of:
 - a. Improving the capital structure of SOEs or Limited Liability Company; and/or
 - b. Increasing the business capacity of SOEs or Limited Liability Companies.
2. Additional PMN for SOEs as intended in paragraph (1) is to be used in the context of:
 - a. Carrying out Government assignments to SOEs;
 - b. Carrying out restructuring and/or rescue of SOEs; and/or
 - c. Carrying out SOEs business development

The following shows Pelindo's Additional Use of State Equity Participation (PMN).

Work to Dredge The Benoa Port Channels and Pools

The additional PMN funds received by Pelindo are planned to be used to continue work on dredging the Benoa Port channels and pools to develop a Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). The additional PMN allocation for continued work on dredging the Benoa Port channels and pools amounts to Rp1.20 trillion and will be carried out on a multi-year basis from 2021.

Tabel Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Penerima Tambahan PMN Triwulan IV Tahun 2023

Report on the Realization of the Use of Additional State Equity Participation (PMN) for State-Owned Enterprises and Companies Receiving Additional PMN for QIV 2023

No.	Kegiatan Description	Tanggal Pencairan Date Disbursed	Nilai PMN (Rp Juta) Total PMN (Rp million)
1	2	3	4
1	Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Dredging Benoa Harbor Channels and Pools Work	23 September 2021	1.200.000
a.	Pekerjaan <i>Design and Build</i> Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A Benoa Harbor Channels and Pools Dredging Design and Build Work, Package A		
b.	Pekerjaan <i>Design and Build</i> Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B Benoa Harbor Channels and Pools Dredging Design and Build Work, Package B		
c.	Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Payments		
Jumlah Total			1.200.000

Tabel Laporan Realisasi Capaian Kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Penerima Tambahan PMN Triwulan IV Tahun 2023

Report on the Realization of Performance Achievements of State Equity Participation (PMN) for State-Owned Enterprises and Companies Receiving Additional PMN for QIV 2023

No	KPI KPI	Formula Formula	Target Tahun 2023 2023 Target	Realisasi Progres Realization Progress
A OUTPUT				
1	Akumulasi Progres Proyek Pengerukan Accumulated Dredging Project Progress	(Realisasi progres pekerjaan pengerukan/ Rencana progres pekerjaan Pengerukan) X 100% (Realization of dredging work progress/ Dredging work progress plan)	100,00%	57,81%
2	Akumulasi Penyerapan Dana PMN Accumulated Absorption of PMN Funds	(Realisasi Penyerapan PMN/Kontrak Pekerjaan PMN) X 100% (Realization of PMN Absorption/PMN Job Contract)	100,00%	39,25%
B OUTCOME/MANFAAT OUTCOMES/BENEFITS				
1	Jumlah Kunjungan Kapal <i>Cruise</i> Number of Cruise Ship Visits	Jumlah kunjungan kapal Number of ship visits	48 Kapal Ships	48 Kapal
2	Penyerapan Mitra UMKM Absorption of MSME Partners	Jumlah Unit Stand Mitra UMKM Number of UKMM MSME Stand Units	50 Unit <i>Stand</i> Stand Units	50 Unit <i>Stand</i>
3	Kontribusi Pendapatan BMTH BMTH Revenue Contribution	Pendapatan BMTH BMTH Revenue	Rp90,33 Miliar	Rp156,193 Miliar
4	Jumlah Wisatawan Luar Negeri Number of Overseas Tourists	Jumlah Wisatawan Number of Tourists	56.000 Orang People	78.241 Orang People



Realisasi Keuangan Penggunaan Tambahan PNM Tahun 2023 (Rp juta) Financial Realization of Additional Use of PNM in 2023 (Rp million)				Realisasi Fisik Penggunaan Tambahan PNM Physical Realization of Additional Use of PNM			
Sampai dengan TW I Up to QI	Sampai dengan TW II Up to QII	Sampai dengan TW III Up to QIII	Sampai dengan TW IV Up to QIV	Sampai dengan TW I Up to QI	Sampai dengan TW II Up to QII	Sampai dengan TW III Up to QIII	Sampai dengan TW IV Up to QIV
5	6	7	8	9	10	11	12
91.702	91.702	91.702	203.133	40,25%	48,49%	51,50%	52,32%
118,577	118,577	118,577	262.314	53,54%	58,12%	58,99%	62,04%
5.599	5.599	5.599	5.599				
215.878	215.878	215.878	471.047	-	-	-	-

Foto Progres Pelaksanaan per Kegiatan/Proyek di Lapangan

Photos of Implementation Progress Per Activity/Project in the Field

DOKUMENTASI PEKERJAAN Pengerukan PAKET A

Progres pelaksanaan Pengerukan Paket A di lapangan: Kegiatan Pengerukan dan Konstruksi *Retaining Wall* (Dokumentasi diambil pada tahun 2023).

DREDGING WORK PACKAGE A DOCUMENTATION

Progress of Package A Dredging in the field: Dredging Activities and Retaining Wall Construction (Documentation taken in 2023)

Gambar Pengerjaan Pengerukan Paket A

Picture of Dredging Work in Package A



Gambar Pekerjaan Penguatan Kolam Dermaga Timur
Drawing of the East Pier Pond Reinforcement Work



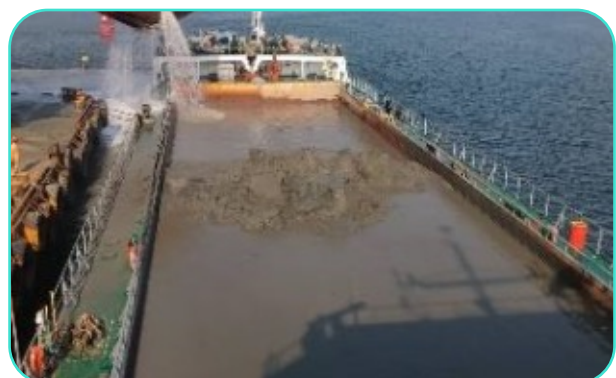
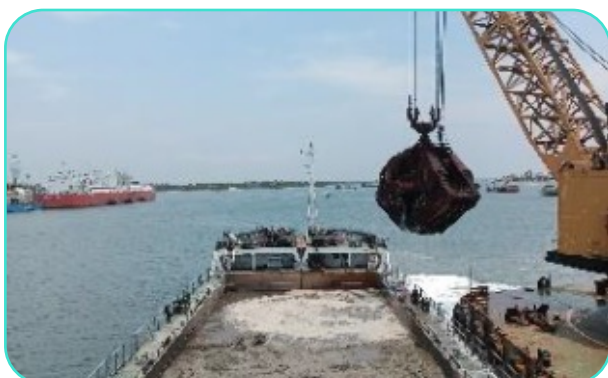
DOKUMENTASI PEKERJAAN Pengerukan Paket B

Progres pelaksanaan Pengerukan Paket B di lapangan: Kegiatan Pengerukan (Dokumentasi diambil tahun 2023).

DREDGING WORK PACKAGE B DOCUMENTATION

Progress of Package B Dredging in the field: Dredging Activities (Documentation taken in 2023).

Gambar Pekerjaan Pengerukan Paket B
Drawing of Dredging Work Package B





Progres Pekerjaan Pengerukan alur dan Kolam Pelabuhan Benoa

Kegiatan Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa

1. Total Investasi yang diperlukan

Total nilai investasi yang telah terkontrak dalam kegiatan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp1.134.391.500.000,- (satu triliun seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%, yang terdiri dari:

- a. Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A sebesar Rp493.366.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: SP2.378/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 September 2021, jo. *Addendum I* Nomor: PD.01/21/11/2/ADPG/INVS/PLND-22 tanggal 21 November 2022, jo. *Addendum II* Nomor: PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 tanggal 20 Maret 2023, jo. *Addendum III* Nomor: PD.01/10/11/4/SPGD/BMTH/PLND-23 tanggal 10 November 2023, jo. *Addendum IV* Nomor: PD.01/4/12/4/SPGD/BMTH/PLND-23 tanggal 04 Desember 2023 dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dengan durasi 960 Hari Kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan.
- b. Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B sebesar Rp641.025.000.000,- (enam ratus empat puluh satu miliar dua puluh lima juta rupiah) termasuk PPN 10%, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SP2.373/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 September 2021, jo. *Addendum I* Nomor: PD.01/1/2/1/ADPG/INVS/PLND-23 tanggal 1 Februari 2023, jo. *Addendum II* Nomor: PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 tanggal 20 Maret 2023, jo. *Addendum III* Nomor: PD.01/6/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23 tanggal 06 Desember 2023 dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) dengan durasi 864 Hari Kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan Lingkup Pengerukan.

2. Total Tambahan PMN yang Dialokasikan

Total tambahan PMN yang dialokasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah).

3. Penjelasan Progres Pekerjaan PMN

Progres Fisik pada kegiatan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa adalah sebagai berikut:

- a. Progres Fisik untuk Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A tahun 2023 (berdasarkan Laporan Progress Mingguan ke- 109 oleh Kontraktor Pelaksana dan

Progress of Benoa Port Channels and Pools Dredging Work

Benoa Port Channels and Pools Dredging Work Activities

1. Total investment required

The total investment value that has been contracted for the Benoa Port Channels and Pools Dredging activities to date is Rp1,134,391,500,000 (one trillion one hundred thirty-four billion three hundred ninety-one million five hundred thousand rupiah) including 10% VAT, and consists of:

- a. Benoa Port Channels and Pools Dredging Design and Build Work Package A amounting to Rp493,366,500,000 (four hundred ninety three billion three hundred sixty six million five hundred thousand rupiah) including 10% VAT, in accordance with Letter of Agreement No. SP2.378/HK.0502/P.III-2021 dated September 30, 2021, jo. *Addendum I* No. PD.01/21/11/2/ADPG/INVS/PLND-22 dated November 21, 2022, jo. *Addendum II* No. PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 dated March 20, 2023, jo. *Addendum III* No. PD.01/10/11/4/SPGD/BMTH/PLND-23 dated November 10, 2023, jo. *Addendum IV* No. PD.01/4/12/4/SPGD/BMTH/PLND-23 dated December 04, 2023 implemented by PT Wijaya Karya (Persero) with a duration of 960 Calendar Days starting from the date of the Work Commencement Minutes.
- b. Benoa Port Channels and Pools Dredging Design and Build Work Package B amounting to Rp641,025,000,000 (six hundred forty one billion twenty five million rupiah) including 10% VAT, in accordance with Letter of Agreement No. P2.373/HK.0502/P.III-2021 dated September 30, 2021, jo. *Addendum I* No. PD.01/1/2/1/ADPG/INVS/PLND-23 dated February 1, 2023, jo. *Addendum II* No. PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 dated March 20, 2023, jo. *Addendum III* No. PD.01/6/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23 dated December 06, 2023 implemented by PT Pembangunan Perumahan (Persero) with a duration of 864 Calendar Days starting from the date of the Minutes of Commencement of Dredging Scope of Work.

2. Total additional PMN allocated

The total additional PMN allocated based on Government Regulation No. 92 of 2021 concerning Addition of State Capital of the Republic of Indonesia to the Share Capital of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Article 2 paragraph (1) was Rp1,200,000,000,000 (one trillion two hundred billion rupiah).

3. Explanation of PMN Work Progress

The physical progress of the Benoa Port Channels and Pools Dredging activities is as follows:

- a. Physical Progress for the Design and Build Work for Dredging the Channels and Ponds in Benoa Port Package A in 2023 (based on the 109th Weekly Progress Report by the Implementing Contractor

Konsultan Manajemen Konstruksi, periode 24 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023) mencapai 52,32% dari target KPI akumulasi progress proyek pengerukan sebesar 100,00%.

- b. Progres Fisik untuk Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B tahun 2023 (berdasarkan Laporan Progress Mingguan ke- 116 oleh Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Manajemen Konstruksi, periode 24 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023) mencapai 62,04% dari target KPI akumulasi progress proyek pengerukan sebesar 100,00%.
- c. Terdapat penugasan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk memindahkan/menyinkingirkan Kapal-kapal Ikan Eks. Asing yang rusak berat di Pelabuhan Benoa sebanyak 35 Kapal sesuai dengan Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa Nomor UM.001/1/20/ KSO.BNA-2022 tanggal 7 Februari 2022, dan Surat Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia Nomor 010/D3.00/MARVES/III/2022 tanggal 17 Maret 2022.

Selain penugasan pemindahan 35 kapal tersebut di atas, terdapat 6 kapal tambahan yang perlu dilakukan pemindahan/penyingkiran berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia Nomor: 129/D3/MARVES/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022. Terkait penugasan untuk memindahkan/menyinkingirkan 35+6 bangkai kapal tersebut, telah selesai dilaksanakan pada Agustus 2022. Adapun terkait pembiayaan atas penugasan tersebut, sesuai dengan Rapat bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Inspektorat Jenderal) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada tanggal 8 Desember 2022 diputuskan bahwa pembiayaan terhadap pembayaran pemindahan kapal akan menggunakan dana internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan tidak menggunakan sisa anggaran PMN. Saat ini pelaksanaan pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan dengan menggunakan dana internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Secara kumulatif, tahun 2023, total progres fisik Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa mencapai 57,81% dari target KPI akumulasi progress proyek pengerukan sebesar 100,00%. Adapun target KPI Tahun 2023 (*unaudited*) diambil berdasarkan Kontrak Manajemen Tahunan yang Memuat KPI Direksi secara Kolegial antara Kuasa Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023.

and Construction Management Consultant, for the period December 24, 2023 to December 30, 2023), this reached 52.32% of the KPI target for accumulated dredging project progress of 100.00%.

- b. Physical Progress for the Design and Build Work for Dredging the Channels and Ponds of Benoa Port Package B in 2023 (based on the 116th Weekly Progress Report by the Implementing Contractor and Construction Management Consultant, for the period December 24, 2023 to December 30, 2023), this reached 62.04% of the KPI target for accumulated dredging project progress of 100.00%.
- c. There was an assignment to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to remove former fishing vessels. There were 35 foreign ships that were seriously damaged at Benoa Port in accordance with the Letter from the Head of the Benoa Class II Harbormaster and Port Authority Office No. M.001/1/20/ KSO.BNA-2022 dated February 7, 2022, and the Republic Indonesia Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment Letter No. 010/D3.00/MARVES/III/2022 dated March 17, 2022.

Apart from the assignment to remove the 35 ships mentioned above, there are 6 additional ships that need to be moved/removed based on the Republic of Indonesia Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment Letter No. 129/D3/MARVES/VII/2022 dated July 5, 2022. Regarding the assignment to move/remove the 35+6 shipwrecks, this was completed in August 2022. For the financing of this assignment, in accordance with the joint meeting between the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, the Ministry of SOEs, the Ministry of Finance (Directorate General of State Assets and the Inspectorate General) and PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on December 8, 2022, decided that the financing for the payment to transfer the ships would use PT Pelabuhan Indonesia (Persero) internal funds and would not use the remaining PMN budget. Currently the work has been completed and has been paid for by using internal funds from PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Cumulatively, in 2023, the total physical progress of the Benoa Port Channel and Pool Dredging Work reached 57.81% of the KPI target for accumulated dredging project progress of 100.00%. The KPI targets for 2023 (*unaudited*) were based on the Annual Management Contract that contains the Board of Directors collegial KPIs in a manner between the Proxy as the GMS of the Company PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2023 dated January 30, 2023.



KENDALA DAN RISIKO YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa ini, terdapat kendala yakni terlambatnya penerbitan dokumen *Addendum* AMDAL Pelabuhan Benoa. Secara administrasi dalam rangka pemenuhan dokumen AMDAL, bahwasanya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah terpenuhi serta terkirim pada April 2023 sesuai dengan surat CEO Regional 3 nomor: KL.04/17/4/1D4.3/CEO/RBNT-23 tanggal 17 April 2023. Secara rencana target kerja, dokumen *Addendum* AMDAL dapat disahkan dan dikeluarkan pada Bulan Juni dan atau Juli 2023. Namun, sampai dengan saat ini dokumen dimaksud belum dikeluarkan atau disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

RENCANA TIDAK LANJUT

Rencana dan tindak lanjut Kegiatan Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa yaitu:

1. Terkait revisi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Benoa, saat ini telah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 31 Maret 2023 Nomor KM 27 Tahun 2023.
2. Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) area Pembuangan/Pengaliran Limbah Material Keruk telah terbit sesuai nomor 09112310515100008 tanggal 9 November 2023, Sesuai dengan penjelasan sebelumnya pada Triwulan III, bahwa dokumen PKKPRL ini sebagai salah satu persyaratan administrasi penerbitan *Addendum* AMDAL Pelabuhan Benoa.
3. Telah dikeluarkan Persetujuan Kerja Keruk (PK3) Tahap II oleh Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan pengerukan terhadap sisa volume pekerjaan. Dalam pelaksanaannya berlaku efektif setelah dokumen Izin Lingkungan (*Addendum* AMDAL) telah terbit.

ASPEK PEMASARAN

Uraian aspek pemasaran meliputi strategi pemasaran serta pangsa pasar atas produk dan jasa Pelindo.

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang tepat akan mendorong peningkatan pangsa produk dan jasa Pelindo. Berikut adalah uraian mengenai strategi pemasaran Pelindo yang dilakukan masing-masing regional Pelindo di tahun 2023.

REGIONAL 1

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Regional 1 berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan dan memperluas pangsa pasar yang meliputi beberapa aspek terkait yaitu:

1. Aspek Produk dan Layanan

Dalam memberikan layanan jasa kepelabuhanan, Regional 1 telah memberikan layanan jasa sesuai dengan target kinerja operasional dan diharapkan dapat juga memenuhi harapan pelanggan. Layanan jasa yang diberikan berfokus pada sisi waktu yaitu kecepatan layanan (pelayanan pemanduan, penundaan dan juga bongkar muat barang) dan kualitas layanan (ketepatan dan keselamatan kerja).

CONSTRAINTS AND RISKS FACED

In the Benoa Port Channels and Pools Dredging Work, there was an obstacle, namely a delay in publishing the Benoa Harbor AMDAL Addendum document. Administratively, in order to fulfill the AMDAL document, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has fulfilled this and sent it in April 2023 in accordance with the letter from Regional 3 CEO No. KL.04/17/4/1D4.3/CEO/RBNT-23 dated April 17, 2023. According to the work target plan, the AMDAL Addendum document could be ratified and issued in June and/or July 2023. However, up to now the document in question has not been issued or ratified by the Ministry of Environment and Forestry.

DISCONTINUED PLANS

Plans and follow-up activities for the dredging of Benoa Port Channels and Pools include:

1. A revision of the Benoa Port Master Plan (RIP) was signed by the Minister of Transportation on March 31, 2023 No. KM 27 of 2023.
2. The Approval Document for Conformity of Marine Space Utilization Activities (PKKPRL) for the Dredged Material Waste Disposal/Flow area was issued through No. 09112310515100008 dated November 9, 2023. In accordance with the previous explanation in QIII, this PKKPRL document is one of the administrative requirements for the issuance of the Benoa Port AMDAL Addendum.
3. Dredging Work Approval (PK3) Phase II has been issued by the Ministry of Transportation to carry out dredging of the remaining work. It will become effective after the Environmental Permit document (Addendum AMDAL) has been issued.

MARKETING ASPECTS

Description of marketing aspects includes marketing strategies and market share for Pelindo products and services.

Marketing Strategy

The right marketing strategy will encourage an increase in the share of Pelindo's products and services. The following describes Pelindo's marketing strategy carried out by each Pelindo region in 2023.

REGIONAL 1

The marketing strategy carried out by Regional 1 focuses on improving the quality of service to customers and expanding market share and includes the following related aspects:

1. Product and Service Aspect

For providing port services, Regional 1 provides services in accordance with operational performance targets and is expected to also meet customer expectations. The services provided focus on time, namely speed of service (pilotage services, delays and also loading and unloading of goods) and quality of service (accuracy and work safety).

- a. Terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan, cabang-cabang Pelabuhan di lingkungan Regional 1 telah menerapkan pola operasional 24/7 yaitu Cabang Belawan, Dumai, Pekanbaru, Lhokseumawe, Gunung Sitoli, Malahayati, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjungpinang, dan Tembilahan.
 - b. Terhadap pengelolaan terminal penumpang, telah diterapkan pola pembayaran *cashless* yaitu di Cabang Belawan, Dumai, Tanjung Balai Asahan, dan Tanjungpinang.
 - c. Realisasi *market share* PBM Non Petikemas di Regional 1 Tahun 2023 adalah sebesar 60,48% dimana terjadi peningkatan dari realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 46% (Peningkatan sebesar 14,48%). Regional 1 tetap berupaya untuk meningkatkan *market share* PBM Non Petikemas di Tahun 2024 dengan menetapkan target sebesar 71 %.
 - d. Realisasi Pemanduan di TUKS Regional 1 tahun 2023 adalah sebesar 32.213 Gerakan dan 194.679.129 GT Gerakan dengan RKAP tahun 2024 adalah sebesar 32.999,52 gerakan dan 222.137.072,816 GT Gerakan. Realisasi Penundaan di TUKS Regional 1 tahun 2023 adalah sebesar 40.925,17 Jam dan 315.838.147,85 GT Jam dengan RKAP tahun 2024 adalah sebesar 52.349,3 Jam dan 398.664.236,43 GT Jam.
 - e. Realisasi optimalisasi aset properti selama tahun 2023 kontribusi pendapatan dari optimalisasi aset di lingkungan Regional 1 sebesar Rp170.144.968.786, mengalami peningkatan 17% dari tahun 2022.
- 2. Aspek Tarif**
- Regional 1 menerapkan kebijakan yang dapat diberikan kepada pelanggan khususnya pada segmen pelayanan jasa kapal sesuai kondisi di lapangan antara lain:
- a. Penawaran tarif diferensiasi dengan mekanisme kerjasama *Business to Business* (B to B).
 - b. Memberikan kelonggaran jangka waktu pembayaran (*term of payment*) untuk perusahaan pengguna jasa, misalnya pemberian Top 20 hari kepada PT Meratus Lines dan kepada Pengguna Jasa khususnya yang berkegiatan di TUKS/Tersus dan di cabang Pelabuhan yang memiliki BUP Pesaing.
 - c. Mitra Kerjasama pemanfaatan tarif properti diberikan opsi untuk memanfaatkan aset dengan beberapa pola kerjasama diluar Tarif Tetap dan Tarif Variabel yaitu dengan metode pengenaan minimum *throughput*.
 - d. Sistem pembayaran Kerjasama pemanfaatan *asset property* jangka panjang dapat diberikan kelonggaran yaitu dengan sistem termin (angsuran).
- 3. Aspek Hubungan Pelanggan dan Stakeholder**
- Salah satu faktor penting dalam strategi pemasaran adalah menjaga hubungan baik dan harmonis dengan para *stakeholder*. Regional 1 telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan *engagement* dengan pelanggan dan *stakeholder*. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. For port services, Port branches in Regional 1 have implemented a 24/7 operational pattern at the Belawan, Dumai, Pekanbaru, Lhokseumawe, Gunung Sitoli, Malahayati, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjungpinang and Tembilahan branches.
 - b. For the management of passenger terminals, a cashless payment pattern has been implemented at the Belawan, Dumai, Tanjung Balai Asahan and Tanjungpinang branches.
 - c. The realization of the Non-Container PBM market share in Region 1 in 2023 was 60.48%, an increase of 14.48% from 46% in 2022. Regional 1 continues to strive to increase its market share of Non-Container PBMs in 2024 by setting a target of 71%.
 - d. The realization of TUKS Pilotage in Regional 1 in 2023 was 32,213 Movements and 194,679,129 GT Movements, with the 2024 RKAP being 32,999.52 Movements and 222,137,072,816 GT Movements. Realization of delays in TUKS Regional 1 in 2023 was 40,925.17 hours and 315,838,147.85 GT hours, with the 2024 RKAP being 52,349.3 hours and 398,664,236.43 GT hours.
 - e. The realization of property asset optimization during 2023 contributed revenue from asset optimization in Regional 1 environment of Rp170,144,968,786, an increase of 17% from 2022.
- 2. Tariff Aspect**
- Regional 1 implements policies for customers, especially in the ship services segment according to conditions in the field, include:
- a. Offering differentiated tariffs with a Business to Business (B to B) cooperation mechanism.
 - b. Providing concessions on terms of payment for service user companies, for example giving Top 20 days to PT Meratus Lines and to Service Users, especially those carrying out activities at TUKS/Tersus and at Port branches that have Competitor BUP.
 - c. Collaboration Partners using property rates are given the option to use assets with several cooperation patterns other than Fixed Rates and Variable Rates, by imposing a minimum throughput method.
 - d. Payment system: Collaboration in the use of long-term property assets can be given concessions, namely through an installment system.
- 3. Customer and Stakeholder Relations Aspect**
- One important factor in the marketing strategy is maintaining good and harmonious relationships with stakeholders. Regional 1 has carried out several activities aimed at increasing engagement with customers and stakeholders. The activities carried out are as follows:



a. Kegiatan *Customer Visit* (berdasarkan data kunjungan pelanggan)

Dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis dengan para *customer* serta sebagai wadah untuk aspirasi dari *customer* untuk pengembangan kualitas layanan, telah dilakukan kegiatan kunjungan pelanggan ataupun temu pelanggan di lingkungan Regional 1 antara lain sebagai berikut:

- Cabang Belawan: PT Perusahaan Gas Negara, PT Musim Mas, Asosiasi ALFI/ILFA Sumut, Asosiasi DPC INSA Medan Belawan
- Cabang Pekanbaru: PT Biomassa Energy Sanskrit Trading Indonesia, Asosiasi DPC INSA Pekanbaru, PT Sufie Bahtera Lines Pekanbaru
- Cabang Tanjungpinang: PT Solid Pelayaran Indonesia, PT CIMC Wetrans Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Tanjungpinang Makmur Bersama
- Cabang Tanjung Balai Karimun: Silaturahmi pengguna jasa terminal penumpang ke kantor Pelindo
- Cabang Tembilahan: CV Korallindo
- Cabang Dumai: PT Pelita Agung Agrindustri
- Cabang Tanjung Balai Asahan: PT PLN (Persero) UP3 Rantauprapat, PT Malindo Bahari, PT Bank Mandiri Region I Sumatera I
- Cabang Sibolga: PT Trans Continent, PT Tanto Intim Line, PT Meratus Line
- Cabang Gunung Sitoli: PT Bank Negara Indonesia, PT Wira Jaya Logitama Lines

b. Kegiatan *Customer Gathering*

Dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis dengan para *customer* serta menampung aspirasi dari *customer* untuk pengembangan kualitas layanan telah dilakukan kegiatan *customer gathering* di cabang-cabang Pelabuhan wilayah Regional 1 yang telah terealisasi pada 4 (empat) cabang Pelabuhan yaitu Cabang Belawan, Cabang Tanjungpinang, Cabang Tanjung Balai Asahan, Cabang Gunung Sitoli.

c. Kegiatan *Coffee Morning*

Kegiatan *coffee morning* di cabang-cabang Pelabuhan wilayah Regional 1 yang telah terealisasi pada 2 (dua) cabang Pelabuhan yaitu Cabang Belawan dan Cabang Tanjung Balai Asahan.

d. Kegiatan *Sosialisasi*

Kegiatan sosialisasi di cabang-cabang Pelabuhan wilayah Regional 1 yang telah terealisasi pada 1 (satu) cabang Pelabuhan yaitu Cabang Belawan.

a. Customer Visit Activities (based on customer visit data)

To establish harmonious relationships with customers and as a forum for customer aspirations for developing service quality, customer visits or meetings have been carried out in the Regional 1 environment, including the following:

- Belawan Branch: PT Perusahaan Gas Negara, PT Musim Mas, Asosiasi ALFI/ILFA Sumut, Asosiasi DPC INSA Medan Belawan
- Pekanbaru Branch: PT Biomassa Energy Sanskrit Trading Indonesia, DPC INSA Pekanbaru Association, PT Sufie Bahtera Lines Pekanbaru
- Tanjungpinang Branch: PT Solid Pelayaran Indonesia, PT CIMC Wetrans Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Tanjungpinang
- Tanjung Balai Karimun Branch: Gathering of passenger terminal service users to the Pelindo office
- Tembilahan Branch: CV Korallindo
- Dumai Branch: PT Pelita Agung Agrindustri
- Tanjung Balai Asahan Branch: PT PLN (Persero) UP3 Rantauprapat, PT Malindo Bahari, PT Bank Mandiri Region I Sumatera I
- Sibolga Branch: PT Trans Continent, PT Tanto Intim Line, PT Meratus Line
- Gunung Sitoli Branch: PT Bank Negara Indonesia, PT Wira Jaya Logitama Lines

b. Customer Gathering Activities

To establish harmonious relationships with customers and accommodate customer aspirations for developing service quality, customer gatherings have been carried out at Port branches in Regional 1 in 4 (four) Port branches, Belawan Branch, Tanjungpinang Branch, Tanjung Branch Asahan Hall, Gunung Sitoli Branch.

c. Coffee Morning Activities

Coffee morning activities at Regional 1 Port branches have taken place at 2 (two) Port branches, the Belawan Branch and the Tanjung Balai Asahan Branch.

d. Socialization

Socialization activities at Regional 1 Port branches have taken place at 1 (one) Port branch, the Belawan Branch.

REGIONAL 2

Strategi Pemasaran Regional 2 berfokus kepada *revenue creativity and sustainable growth* sesuai dengan *Strategic Objective* Regional 2. Regional 2 terus mengembangkan strategi pemasaran melalui upaya-upaya yang terdiri dari beberapa aspek antara lain:

1. Aspek Pengembangan Bisnis

Pengembangan bisnis yang dilakukan melalui pengembangan jasa layanan baru, ekspansi pasar dan pengembangan kapasitas.

- a. Pengembangan jasa layanan baru
Jasa Layanan *Hico-Scan* Tanjung Priok, Jasa Layanan *Oil Boom* Teluk Bayur, Jasa Kawasan Pendukung Terminal Kijing, Gudang Curah Kering Banten, Jembatan Timbang Banten, Pelayanan Jasa Angkutan Laut Tongkang Batubara Bengkulu dan Pengembangan area *food station* Cirebon.
- b. Ekspansi Pasar
Pelayanan Pandu-Tunda di TUKS cabang Panjang, Jambi, dan Tanjung Pandan.
- c. Pengembangan Kapasitas
Pengembangan Depo di cabang Panjang, Pengembangan Lapangan *Stockpile* Teluk Bayur, Pengembangan Gudang Curah Kering Teluk Bayur, Pembangunan Dermaga *Multipurpose* Sungai Lais Palembang, Pengembangan Dermaga *Multipurpose* Pelabuhan Belinyu Pangkal Balam, dan Pengoperasian Dermaga BOT TBS.
- d. Pengembangan bisnis yang dilakukan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan.
Pada tahun 2023 proses studi/*review* Rencana Induk Pelabuhan di Regional 2 dilakukan pada RIP cabang Teluk Bayur, Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Panjang.

2. Aspek Optimalisasi Aset Lahan

Dalam rangka mendukung tercapainya *Business Plan* 2021-2025, dilakukan kegiatan optimalisasi pendayagunaan aset melalui kerja sama pemanfaatan lahan dengan *strategic partner*, baik mitra Swasta, BUMN, maupun Instansi Pemerintahan di seluruh wilayah Cabang di Regional 2, yang terdiri dari kerjasama pemanfaatan lahan *idle* (kerja sama baru) dan keberlanjutan kerja sama pemanfaatan lahan (perpanjangan kerja sama). Nilai kerja sama pemanfaatan lahan melalui kerja sama baru maupun perpanjangan kerjasama ini disepakati melalui hasil negosiasi yang saling menguntungkan dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Direksi, dan dengan mereferensikan nilai dan tarif kerja sama dari mitra sekitar yang relevan.

3. Aspek Penanganan Permasalahan Aset Lahan

Dalam rangka memaksimalkan potensi tercapainya optimalisasi lahan, diperlukan adanya usaha-usaha dalam penanganan permasalahan lahan, sehingga dapat diperoleh lahan dan aset yang *clean and clear* dan sudah siap untuk di kerjasamakan. Salah satu langkah awal dalam melakukan kegiatan penanganan permasalahan ini, Regional 2 akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada mitra potensial (Anak Perusahaan, Swasta, BUMN),

REGIONAL 2

Regional 2 Marketing Strategy focuses on revenue creativity and sustainable growth in accordance with Regional 2 Strategic Objectives. Regional 2 continues to develop marketing strategies through efforts including the following aspects:

1. Business Development Aspect

Business development is carried out through the development of new services, market expansion and capacity development.

- a. Development of new services
Tanjung Priok *Hico-Scan* Services, Teluk Bayur Oil Boom Services, Kijing Terminal Support Area Services, Banten Dry Bulk Warehouse, Banten Weigh Bridge, Bengkulu Coal Barge Sea Transport Services and Development of the Cirebon food station area.
- b. Market Expansion
Pilot-Delay Service at TUKS Panjang, Jambi and Tanjung Pandan branches.
- c. Capacity Development
Development of a Depot at Panjang branch, Development of the Teluk Bayur Stockpile Field, Development of the Teluk Bayur Dry Bulk Warehouse, Construction of the Palembang River Lais Multipurpose Pier, Development of the Multipurpose Pier at Belinyu Pangkal Balam Port, and Operation of the TBS BOT Pier.
- d. Business development carried out refers to the Port Master Plan.
In 2023, a study/*review* process for the Port Master Plan in Regional 2 was carried out at the RIP branches in Teluk Bayur, Tanjung Priok, Sunda Kelapa and Panjang.

2. Land Asset Optimization Aspect

To support the achievement of the 2021-2025 Business Plan, activities are carried out to optimize asset utilization through land utilization collaboration with strategic partners, including private partners, SOEs, Subsidiaries and Government Agencies in all Branch areas in Regional 2, and consists of collaboration on idle land utilization (new cooperation) and continuation of land use cooperation (extension of cooperation). The value of land use cooperation through new cooperation or extension of cooperation is agreed upon through mutually beneficial negotiation results while still being guided by the Board of Directors Regulations, and by referencing the value and rates of cooperation from relevant local partners.

3. Handling Land Asset Problems Aspect

To maximize the potential for achieving land optimization, efforts are needed to handle land problems, so that land and assets that are clean and clear and ready for cooperation can be obtained. One of the first steps in carrying out activities to handle this problem, Regional 2 collaborated and coordinated with the authorities, including but not limited to potential partners (Subsidiaries, Private Companies, SOEs), related Government Agencies (Harbourmaster and Port Authorities/KSOP, National Land



Instansi Pemerintah terkait (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP, Badan Pertanahan Nasional/BPN, dan lain-lain), serta Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia/TNI).

4. Aspek Produk dan Layanan

Dalam mendukung *strategic objective operational excellence*, Regional 2 terus melakukan peningkatan berkelanjutan untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada pelanggan, upaya yang dilakukan adalah standarisasi operasi di lingkungan Regional yang antara lain meliputi:

- Digitalisasi di Cabang Pelabuhan Regional 2 (implementasi *Phinisi*, *STID* dan *Simon TKBM*, *PTOS-M*, *PTOS RoRo*, *New Autogate Pass System Tanjung Priok*, Implementasi *Autocollection*, dan Implementasi Infrastruktur *SD-WAN*).
- Transformasi dan Digitalisasi Sunda Kelapa.
- Standarisasi Pelayanan Terminal Penumpang.
- Standarisasi HSSE pada Cabang Pelabuhan Regional 2.
- Pengembangan fasilitas penunjang kegiatan operasional.

5. Aspek Customer Relationship

Kegiatan pemasaran tidak lepas dengan hubungan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang baik dengan pelanggan maka segala hal kebutuhan pelanggan yang dapat menjadi potensi penambahan pendapatan perusahaan. Selain itu untuk menjaga retensi pelanggan dan menarik minat pelanggan baru terhadap layanan yang diberikan oleh Regional 2, telah dilakukan beberapa kegiatan pemasaran berupa *customer visit* kepada pelanggan eksisting maupun calon pelanggan potensial serta kegiatan lain untuk meningkatkan *engagement* ke pelanggan. Selain dilakukan *customer visit*, dilakukan kegiatan lainnya seperti *coffee morning/sharing session* pelanggan, sosialisasi kepada pelanggan, dan *customer countersy*. Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, telah dilakukan Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2023 dengan hasil skor indeks kepuasan pelanggan 4,71 dengan kategori Sangat Memuaskan, hal ini sejalan dengan komitmen Pelindo Regional 2 untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

6. Aspek Tarif

Terkait aspek tarif yang berlaku di lingkungan Regional 2 juga telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku dengan besaran tarif yang kompetitif dan sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Hal lain yang diterapkan dalam rangka menjaga eksistensi dan daya saing perusahaan diantaranya:

- Kemudahan dalam proses pembayaran dengan berbagai kanal pembayaran serta sistem *cashless*.
- Penawaran tarif diferensiasi dengan mekanisme kerjasama *Business to Business* (B to B).
- Pemberian *reward* atas capaian kontribusi pelanggan kepada Perseroan.
- Pemberian Insentif berupa kompensasi atau kemudahan yang diberikan dalam rangka menjaga retensi pelanggan.

Agency/BPN, etc.), as well as Law Enforcement Officials (Police and Indonesian National Army/TNI).

4. Product and Service Aspect

To support the strategic objective of operational excellence, Regional 2 continues to make continuous improvements to provide the best quality service to customers. The efforts made includes standardization of operations in the Regional including the following:

- Digitalization at Regional Port Branch 2 (implementation of *Phinisi*, *STID* and *Simon TKBM*, *PTOS-M*, *PTOS RoRo*, *New Autogate Pass System Tanjung Priok*, Implementation of *Autocollection*, and Implementation of *SD-WAN Infrastructure*).
- Transformation and Digitalization of Sunda Kelapa.
- Standardization of Passenger Terminal Services.
- HSSE standardization at Regional 2 Port Branches.
- Development of facilities to support operational activities.

5. Customer Relationship Aspect

Marketing activities are important for customer relationships. By having a good relationship with customers, everything the customer needs can be a potential addition to the Company's revenue. Also, to maintain customer retention and attract new customers' interest in the services provided by Regional 2, marketing activities have been carried out through customer visits to existing and potential customers, as well as other activities to increase customer engagement. These other activities include coffee mornings/customer sharing sessions, socialization to customers, and customer counters. To measure the level of customer satisfaction, a 2023 Customer Satisfaction Survey was conducted that scored 4.71 in the Very Satisfactory category, this is in line with Pelindo Regional 2's commitment to always improve the quality of service to customers.

6. Tariff Aspect

For the tariff aspect in Regional 2, these have been determined in accordance with applicable regulations with tariff rates that are competitive and in accordance with the services provided to customers. Other areas to maintain the Company's existence and competitiveness include:

- Ease of payment process through payment channels and a cashless system.
- Offering differentiated tariffs using a *Business to Business* (B to B) cooperation mechanism.
- Providing rewards for customer contributions to the Company.
- Providing incentives in the form of compensation or convenience provided to maintain customer retention

- e. Pemberian potongan tarif (diskon) sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Pemberian relaksasi jangka waktu pembayaran nota tagihan dalam kondisi tertentu (*term of payment*).

REGIONAL 3

Dalam persaingan bisnis kepelabuhanan yang semakin kompetitif, strategi pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Strategi Pemasaran Pelindo Regional 3 terbagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Produk/Layanan (*Product/Service*)

Saat ini fokus Pelindo Regional 3 dalam transformasi layanan jasa kepelabuhan mengarah pada 2 hal yaitu sebagai *gateway port development* dan *tourism port development*, hal ini sejalan dengan Program RPJMN 2020-2024, RJPP Pelindo, *Business Plan* Regional 3. Beberapa transformasi layanan yang dilakukan antara lain:

a. *Gateway Port Development* Bidang Operasional

- Peningkatan status *dedicated* curah pada 7 Terminal meliputi Tanjung Emas, Tanjung Intan, Kotabaru, Bagendang, Bumiharjo, Trisakti dan Lembar.
- Penetapan Izin Operasi 24/7 pada 16 Terminal antara lain Benoa, Celukan Bawang, Bima, Badas, Maumere, Waingapu, Labuan Bajo, Ende, Kalabahi, Kotabaru, Batulicin, Pulang Pisau, Trisakti, Tegal, Kalianget dan Tanjung Tembaga.
- Standarisasi layanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Bima dan Badas.

b. *Gateway Port Development* Bidang Komersial

- Penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan.
- Optimalisasi lahan *idle*.
- Kerjasama pengelolaan TUKS milik BUMN/Swasta.

c. *Tourism Port Development* Pengembangan Bisnis Layanan Terminal Penumpang

- Pengembangan bisnis *advertising* di Pelabuhan Benoa.
- Pengembangan kerjasama dengan *travel agent* terkait optimalisasi ruang tunggu kendaraan di pelabuhan Benoa.
- Optimalisasi layanan *handling luggage cruise* di Pelabuhan Benoa dan Tanjung Perak.
- Penerapan *gate system* penumpang di Pelabuhan Kupang dan Kumai.
- Optimalisasi fasilitas dermaga dan peralatan pendukung untuk peningkatan kunjungan kapal *cruise* dengan kapasitas yang lebih besar.

2. Aspek Hubungan Pelanggan (*Customer Relationship*)

Hubungan baik dengan pelanggan merupakan salah satu *key succes factor* dalam bisnis di Perusahaan. Pelindo Regional 3 telah melakukan beberapa program terkait kegiatan pengelolaan pelanggan seperti pelaksanaan *customer visit* untuk *potential customer* dan *existing customer*, pelaksanaan kegiatan *coffee morning* bersama

- e. Providing tariff reductions (discounts) according to applicable regulations.
- f. Providing relaxation of the billing payment period under certain conditions (*term of payment*)

REGIONAL 3

In the increasingly competitive port business, a marketing strategy plays a very important role in determining the Company's success in achieving the targets set. Pelindo Regional 3 Marketing Strategy is divided into the following aspects:

1. Product/Service Aspect

Currently, Pelindo Regional 3's focus is on transforming port services aimed at 2 areas, namely gateway port development and tourism port development, which is in line with the 2020-2024 RPJMN Program, Pelindo's RJPP, Regional 3 Business Plan. Some of the service transformations carried out include:

a. Gateway Port Development Operational Sector

- Increased bulk dedicated status at 7 terminals including Tanjung Emas, Tanjung Intan, Kotabaru, Bagendang, Bumiharjo, Trisakti and Lembar.
- Determination of 24/7 Operation Permits at 16 Terminals including Benoa, Celukan Bawang, Bima, Badas, Maumere, Waingapu, Labuan Bajo, Ende, Kalabahi, Kotabaru, Batulicin, Pulang Pisau, Trisakti, Tegal, Kalianget and Tanjung Tembaga.
- Standardization of port services at Bima and Badas Ports.

b. Gateway Port Development for the Commercial Sector

- Adjustment of tariffs for port services and port-related services.
- Optimization of idle land.
- Cooperation in managing SOEs/Private TUKS.

c. Tourism Port Development Passenger Terminal Service Business Development

- Development of advertising business at Benoa Port.
- Developing cooperation with travel agents for optimizing vehicle waiting areas at Benoa Port.
- Optimizing cruise luggage handling services at Benoa and Tanjung Perak Ports.
- Implementing a passenger gate system at Kupang and Kumai Ports.
- Optimizing dock facilities and supporting equipment to increase cruise ship visits with larger capacity.

2. Customer Relationship Aspect

Good relationships with customers is one of the key success factors in business at the Company. Pelindo Regional 3 has carried out several programs related to customer management activities such as conducting customer visits to potential and existing customers, holding coffee morning activities with customers and/or stakeholders, as well as



pelanggan dan/atau para pemangku kepentingan, serta pelaksanaan *customer gathering* berkolaborasi dengan Kantor Pusat untuk mendengarkan *needs* dan *wants* dari pelanggan.

3. Aspek Pentarifan (*Price*)

Pelindo Regional 3 senantiasa memberikan pelayanan jasa dengan tarif yang kompetitif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menarik pelanggan, Regional 3 menerapkan beberapa strategi pentarifan antara lain:

- a. Pemberian stimulus/diskon untuk pelanggan.
- b. Pemberian *return commission*.
- c. Kebijakan jangka waktu pembayaran (*term of payment*).

REGIONAL 4

Sesuai dengan arah pengembangan Pelindo yang antara lain yaitu memperkuat kemampuan pengelolaan pada lini bisnis utama dan terintegrasi dengan ekosistem logistik, ekstensifikasi bisnis di luar area wilayah kerja, mengupayakan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan non komersial, dan pengembangan produk dan layanan pada lini bisnis utama, serta komersialisasi aset-aset yang kurang optimal, Regional 4 berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Produk dan Layanan

- a. Bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan pelayanan diantaranya dengan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) dimana yang telah terealisasi adalah KSP dengan Pelabuhan Garongkong dan kerja sama baik dengan sistem sewa maupun kerja sama pengoperasian terhadap aset pemerintah berupa dermaga yang berbatasan langsung dengan aset milik PT Pelindo (Persero).
- b. Program *Centralized Ticketing Terminal* adalah program standarisasi dan digitalisasi pelayanan terminal penumpang yang dapat menyajikan laporan embarkasi penumpang secara *realtime* dan lebih akurat pada tahun 2023 mendapat dukungan dari PT ILCS untuk penerapan pada 3 (tiga) cabang di Regional 4. Hal ini merupakan strategi untuk memaksimalkan potensi Pelindo Group dan tentunya untuk lebih meningkatkan *level of service* pelayanan terminal penumpang.
- c. Kerjasama pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), salah satu yang telah terealisasi pada tahun 2023 adalah kerjasama pelayanan jasa kapal di PT Berau Coal Tanjung Redeb, dengan pendapatan sebulan kurang lebih sebesar Rp2,5 miliar.
- d. Salah satu strategi meningkatkan pendapatan perusahaan adalah dengan optimalisasi *asset idle* yang pada tahun 2023 diantaranya adalah kerjasama dengan PT Permata Sawit Mas pada Pelabuhan Manokwari dengan nilai kerjasama sebesar Rp1.132.952.704,- untuk jangka waktu selama 10 tahun.

holding customer gatherings in collaboration with the Head Office to listen to customers' needs and wants.

3. Tariff Aspect (*Price*)

Pelindo Regional 3 provides services at competitive rates by referring to the provisions of applicable laws and regulations. To attract customers, Regional 3 has several pricing strategies, including:

- a. Providing stimulus/discounts for customers.
- b. Providing return commission.
- c. Term of payment policy.

REGIONAL 4

In accordance with Pelindo's development direction that includes strengthening management capabilities in the main business line, and integrating it with the logistics ecosystem, extensifying business outside the work area, seeking to manage non-commercial ports, and developing products and services in the main business line, as well as commercialization of assets that are less than optimal, Regional 4 has taken the following strategic steps in several aspects:

1. Product and Service Aspect

- a. Collaborating with Ministries/Institutions to improve the quality and development of services, including Cooperation in the Relocation of State Property Assets (KSP BMN), which has been realized is the KSP at the Garongkong Port, and cooperation with a rental system and joint operation of government assets in docks directly adjacent to the assets owned by PT Pelindo (Persero).
- b. The Centralized Ticketing Terminal Program is a standardization and digitization program for passenger terminal services that provides real-time and more accurate passenger embarkation reports in 2023 with support from PT ILCS for implementation in 3 (three) branches in Regional 4. This strategy maximizes the potential of the Pelindo Group and further improves the level of service of passenger terminal services.
- c. Collaboration on Port Services at Terminals for Own Use (TUKS), one of which was realized in 2023 is collaboration on ship services at PT Berau Coal Tanjung Redeb, with a monthly income of approximately Rp2.5 billion.
- d. One strategy to increase Company revenue is to optimize idle assets, and in 2023 included collaboration with PT Permata Sawit Mas at Manokwari Port with a collaboration value of Rp1,132,952,704 for a period of 10 years.

2. Aspek Promosi

Berbicara tentang pemasaran, kegiatan promosi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan elemen yang sangat penting. Untuk itu, Regional 4 dalam kegiatan promosi melakukan beberapa strategi diantaranya:

- Peningkatan *brand image* melalui saluran promosi diantaranya adalah media sosial, media cetak dan periklanan.
- Menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* diantaranya dengan melakukan *customer visit* dan *coffee morning* yang dilakukan pada tingkat Regional dan diturunkan pada hamper seluruh cabang wilayah kerja Regional 4.

3. Aspek Tarif

Pendekatan tarif yang dilakukan oleh Regional 4 untuk tetap bersaing adalah dengan memberikan diskon diantaranya yang telah dilaksanakan adalah diskon pada pelayanan petikemas dan kapal pada kegiatan *direct call* SITC.

2. Promotional Aspect

Talking about marketing, promotional activities are an inseparable part and a very important element. For this reason, Regional 4 promotional activities includes the following strategies:

- Increasing brand image through promotional channels including social media, print media and advertising.
- Maintaining good relations with stakeholders includes conducting customer visits and coffee mornings at the regional level and at almost all branches in the Regional 4 work area.

3. Tariff Aspect

The tariff approach used by Regional 4 is to remain competitive by providing discounts, including discounts on container and ship services during SITC direct call activities.

Pangsa Pasar

Pangsa pasar petikemas domestik yang dikelola oleh Perseroan tahun 2023 mencapai 98%, sedangkan pangsa pasar non petikemas tahun 2023 yang dikelola oleh Perseroan sebesar 65%.

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2021–2025, pertumbuhan pasar petikemas domestik tahun 2019 sampai dengan 2025 diproyeksikan sebesar 5% per tahun, dengan proyeksi volume tahun pada tahun 2025 adalah sebesar 20 juta TEUs. Untuk proyeksi pertumbuhan non petikemas domestik tahun 2019 sampai dengan 2025 adalah sebesar 5,2% atau diperkirakan akan mencapai volume 2,4 miliar Ton pada tahun 2025.

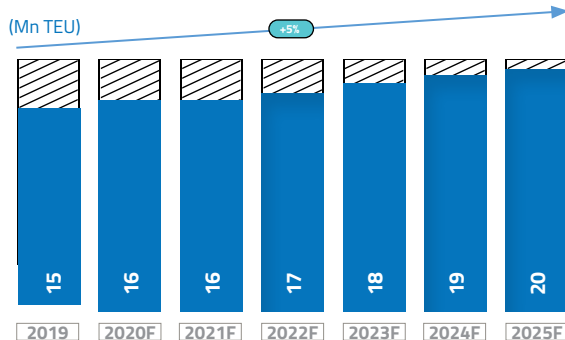
Market Share

In 2023, the Company's domestic container market share was 98%, while the Company's non-container market share was 65%.

Based on the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2021–2025, the projected growth in the domestic container market for 2019 to 2025 was 5% per year, with a projected annual volume of 20 million TEUs in 2025. The projected growth in non-domestic containers for 2019 to 2025 was 5.2%, with an estimated volume of 2.4 billion tons in 2025.

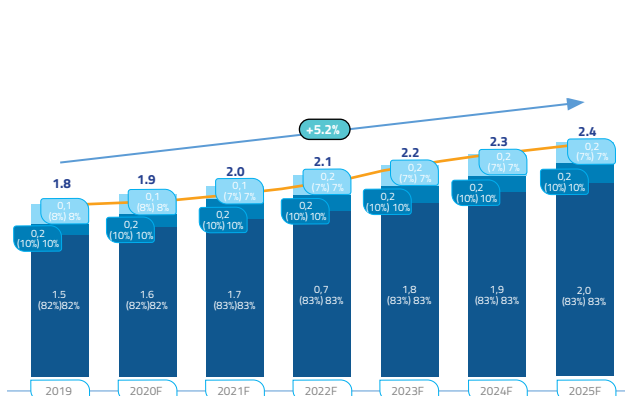
Gambar Proyeksi Petikemas
Container Projection Image

Ukuran Pasar Petikemas di Indonesia Container Market in Indonesia



Sumber: Analisis BCG untuk Masterplan Pelindo 2021–2025
Source: BCG Analysis for the Pelindo Master Plan 2021–2025

Gambar Proyeksi Non Petikemas
Non-container Projection Image



Sumber: GTA Forecasting, ISH Market, Ekspose RKAP Pelindo 2023
Source: GTA Forecasting, ISH Market, Pelindo 2023 RKAP Ekspose



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha) yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya. Segmen usaha Pelindo dikelompokkan ke dalam segmen usaha Operasi Kepelabuhan dan Jasa Lainnya. Segmen Kepelabuhan meliputi arus kapal, arus petikemas, arus barang non petikemas dan arus penumpang. Segmen Jasa Lainnya meliputi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL) dan Fasilitas Rupa-Rupa.

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Usaha

OPERASI KEPELABUHAN

Operasi kepelabuhan meliputi arus kapal, arus petikemas, arus barang non petikemas dan arus penumpang.

ARUS KAPAL

Arus kapal merupakan jumlah kapal yang mendapatkan pelayanan jasa kapal dari perusahaan dan dibuktikan dengan dikeluarkannya nota jasa pelabuhan. Pencatatan trafik kapal ini dalam satuan unit kapal dan *gross tonnage* kapal serta dibedakan berdasarkan jenis lokasi pelayanan, jenis pelayaran dan jenis kapal.

REVIEW OF OPERATIONS PER BUSINESS SEGMENT

A segment is a distinguishable part of a Business Group that is engaged in providing certain products or services (business segment), which have different risks and rewards from those in other segments. Pelindo's business segments are grouped into the Port Operations and Other Services business segments. The Port segment includes ship traffic, container traffic, non-container goods traffic and passenger traffic. The Other Services segment includes Land, Buildings, Water and Electricity (TBAL) and Miscellaneous Facilities.

Explanation and Productivity of Business Segments

PORT OPERATIONS

Port operations include ship traffic, container traffic, non-container goods traffic and passenger traffic.

SHIP TRAFFIC

Ship traffic is the number of ships that receive ship services from the Company, as evidenced by the issuance of a port service notes. The ship traffic is recorded in units of ships and gross tonnage of ships, and is differentiated based on the type of service location, type of shipping and type of ship.

Tabel Arus Kapal
Ship Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
				(Nominal)	(%)
Dermaga Umum General Wharves					
Internasional International	Call	24.163	16.232	7.931	48,86%
	GT	239.923.806	208.507.972	31.415.834	14,74%
Domestik Domestic	Call	126.274	120.335	5.939	4,94%
	GT	374.782.831	338.489.677	36.239.154	10,72%
Total Dermaga Umum Total General Wharves	Call	150.437	136.567	13.870	10,16%
	GT	614.706.637	546.997.649	67.708.988	12,38%
Non Dermaga Umum Non-General Wharves					
Internasional International	Call	15.799	16.700	(901)	(5,40%)
	GT	200.654.730	218.902.310	(18.247.580)	(8,34%)
Domestik Domestic	Call	136.985	137.703	(718)	(0,52%)
	GT	470.679.382	435.914.575	34.764.807	7,98%
Total Non Dermaga Umum Total Non-General Wharves	Call	152.784	154.403	(1.619)	(1,05%)
	GT	671.334.112	654.816.885	16.517.227	2,52%
Total Arus Kapal Total Ship Traffic	Call	303.221	290.970	12.251	4,21%
	GT	1.286.040.750	1.201.814.534	84.226.215	7,01%

Realisasi arus kapal dalam satuan unit tahun 2023 mencapai 303.221 *Call*, meningkat 4,21% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 290.970 *Call*. Demikian pula dengan realisasi arus kapal dalam satuan GT tahun 2023 sebesar 1.286.040.750 GT, meningkat 7,01% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1.201.814.534 GT. Kenaikan trafik kapal tersebut dikarenakan meningkatnya kegiatan kapal pengangkut batubara di Samarinda, Banjarmasin dan Balikpapan, kapal pengangkut BBM di Kotabaru, kapal penumpang di seluruh pelabuhan, kapal pesiar di Benoa serta kapal petikemas di Jakarta dan Surabaya.

ARUS PETIKEMAS

Arus petikemas adalah jumlah petikemas yang dibongkar/muat di pelabuhan dalam satuan *box* dan TEUs. Petikemas ini dibedakan berdasarkan jenis kegiatan, jenis perdagangan, ukuran dan jenis kemasan petikemas.

Realized ship traffic in units in 2023 reached 303,221 calls, an increase of 4.21% compared to 290,970 calls in 2022. Realized ship traffic in GT units in 2023 reached 1,286,040,750 GT, an increase of 7.01% compared to 1,201,814,534 GT in 2022. The increase in ship traffic was due to increased activity of coal-carrying ships in Samarinda, Banjarmasin and Balikpapan, fuel-carrying ships in Kotabaru, passenger ships in all ports, cruise ships in Benoa and container ships in Jakarta and Surabaya.

CONTAINER TRAFFIC

Container traffic reflects the number of containers unloaded/loaded at the ports in units of boxes and TEUs. These containers are differentiated based on type of activity, type of trade, size and type of container packaging.

Tabel Arus Petikemas
Container Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
				(Nominal)	(%)
Pelayanan Luar Negeri Overseas Services	Box	5.367.984	5.250.679	117.305	2,23%
	TEUs	8.146.911	7.965.736	181.175	2,27%
Pelayanan Dalam Negeri Domestic Services	Box	8.205.975	8.041.423	164.552	2,05%
	TEUs	9.510.416	9.254.576	255.840	2,76%
Total Arus Petikemas Total Container Traffic	Box	13.573.959	13.292.102	281.857	2,12%
	TEUs	17.657.327	17.220.312	437.015	2,54%

Realisasi arus petikemas dalam satuan Box tahun 2023 sebesar 13.573.959 Box, meningkat 2,23% dibandingkan tahun 2022 sebesar 13.292.102 Box. Demikian pula dengan arus petikemas dalam satuan TEUs yang meningkat sebesar 2,54%, dari 17.220.312 TEUs di tahun 2022 menjadi 17.657.327 TEUs di tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh adanya beberapa pabrik di China kembali berekspansi sehingga mempengaruhi kegiatan ekspor impor di Cabang Tanjung Perak, Tanjung Priok, Belawan, Semarang dan Makassar serta meningkatnya kegiatan bongkar untuk barang proyek IKN melalui kemasan petikemas di Cabang Samarinda dan Balikpapan.

Realized container traffic in Box units in 2023 was 13,573,959 Boxes, an increase of 2.23% compared to 13,292,102 Boxes in 2022. Realized container traffic in TEUs increased by 2.54%, from 17,220,312 TEUs in 2022 to 17,657,327 TEUs in 2023. This was due to several factories in China expanding again, thus affecting import-export activities in Tanjung Perak, Tanjung Priok, Belawan, Semarang and Makassar branches, as well as increased unloading activities for IKN project goods through container packaging at the Samarinda and Balikpapan Branches.

ARUS BARANG NON PETIKEMAS

Arus barang nonpetikemas adalah jumlah barang yang dibongkar/muat di pelabuhan dalam satuan ton, meter kubik, MMBTU, Unit dan ekor. Barang non petikemas dibedakan berdasarkan lokasi kegiatan, jenis kegiatan, jenis perdagangan dan jenis kemasan.

NON-CONTAINER GOODS TRAFFIC

Non-container goods traffic reflects the number of goods unloaded/loaded at the port in tons, cubic meters, MMBTU, units and heads. Non-container goods are differentiated based on location of activity, type of activity, type of trade and type of packaging.



Tabel Arus Barang Non Petikemas
Non-Container Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
				(Nominal)	(%)
Barang Luar Negeri Overseas Goods	Ton	90.485.706	77.687.347	12.798.359	16,47%
	M ³	1.466.349	1.068.187	398.162	37,27%
	Unit	463.789	453.442	10.347	2,28%
	MMBTU	-	-	-	-
	Ekor	350.487	344.938	5.549	1,61%
Barang Dalam Negeri Domestic Goods	Ton	79.367.702	82.040.489	(2.672.787)	(3,26%)
	M ³	5.109.035	4.536.330	572.705	12,62%
	Unit	2.185.190	1.987.713	197.477	9,93%
	MMBTU	13.188.848	8.800.934	4.387.914	49,86%
	Ekor	212.757	158.756	54.001	34,02%
Total	Ton	169.853.408	159.727.836	10.125.572	6,34%
	M³	6.575.384	5.604.518	970.866	17,32%
	Unit	2.648.979	2.441.155	207.824	8,51%
	MMBTU	13.188.848	8.800.934	4.387.914	49,86%
	Ekor	563.244	503.694	59.550	11,82%

Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Ton tahun 2023 mencapai 169.853.408 Ton, meningkat 6,34% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 159.727.836 Ton. Hal ini dipengaruhi meningkatnya komoditas batubara di Balikpapan, meningkatnya produksi minyak sawit dan turunannya di Pontianak serta pertumbuhan kegiatan impor beras di Cabang Panjang.

Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan M3 tahun 2023 mencapai 6.575.384 M3, meningkat 17,32% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5.604.518 M3. Hal ini dipengaruhi adanya peningkatan kegiatan bongkar atas barang material konstruksi di Terminal Kijing (Pontianak), kegiatan bongkar muat dengan komoditi besi konstruksi di Sunda Kelapa serta meningkatnya kegiatan bongkar dengan komoditi kayu log pada Cabang Gresik.

Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan unit tahun 2023 mencapai 2.648.979 Unit, meningkat 8,51% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 2.441.155 Unit. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan bongkar muat kendaraan di IKT pada Cabang Tanjung Priok dan Makassar serta kenaikan kegiatan bongkar muat kendaraan melalui kapal RoRo di Cabang Panjang, Tanjung Perak dan Banjarmasin.

Realized Non-container goods traffic in tons in 2023 reached 169,853,408 tons, an increase of 6.34% compared to 159,727,836 tons in 2022. This was due to the increase in coal commodities in Balikpapan, increased production of palm oil and its derivatives in Pontianak and growth in rice import activities in Panjang Branch.

Realized Non-container goods traffic in M3 units in 2023 reached 6,575,384 M3, an increase of 17.32% compared to 5,604,518 M3 in 2022. This was due to the increase in unloading activities for construction materials at the Kijing Terminal (Pontianak), loading and unloading activities for construction iron commodities in Sunda Kelapa and increased unloading activities for wood log commodities at the Gresik Branch.

Realized Non-container goods traffic in units in 2023 reached 2,648,979 units, an increase of 8.51% compared to 2,441,155 units in 2022. This was due to the increase in vehicle loading and unloading activities at IKT in the Tanjung Priok and Makassar Branches as well as the increase in vehicle loading and unloading activities via RoRo vessels in Panjang, Tanjung Perak and Banjarmasin Branches.

Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan MMBTU tahun 2023 mencapai 13.188.848 MMBTU, meningkat 49,86% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 8.800.934 MMBTU. Hal ini dipengaruhi meningkatnya permintaan LNG terutama pelanggan dari PT PLN Indonesia Power di Bena seiring dengan meningkatnya pariwisata pulau Bali.

Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Ekor tahun 2023 mencapai 563.244 Ekor mengalami kenaikan 11,82% dibandingkan tahun 2022 mencapai 503.694 Ekor. Hal ini dipengaruhi meningkatnya kegiatan muat hewan babi di Cabang Celukan Bawang untuk dikirimkan ke Palangkaraya dan kegiatan muat hewan besar di Badas, Kupang dan Waingapu dampak Hari Raya Idul Adha.

ARUS PENUMPANG

Arus penumpang adalah jumlah penumpang yang melakukan aktivitas di pelabuhan yang dicatatkan dalam satuan orang. Pencatatan arus penumpang ini dibagi berdasarkan jenis kegiatan dan jenis rute pelayaran. Jenis kegiatan terdiri dari kegiatan penumpang naik ke atas kapal dan penumpang turun dari kapal. Sedangkan rute pelayaran adalah jenis rute kapal yang dibagi dalam rute pelayaran dalam negeri dan rute pelayaran luar negeri.

Realized Non-container goods traffic in MMBTU units in 2023 reached 13,188,848 MMBTU, an increase of 49.86% compared to 8,800,934 MMBTU in 2022. This was due to the increasing demand for LNG, especially customers from PT PLN Indonesia Power in Bena along with increasing tourism on the island of Bali.

Realized Non-container goods traffic in heads in 2023 reached 563,244 heads, an increase of 11.82% compared to 503,694 heads in 2022. This was due to the increase in pig loading activities at the Celukan Bawang Branch to be sent to Palangkaraya, and large animal loading activities in Badas, Kupang and Waingapu due to the Eid al-Adha holiday.

PASSENGER TRAFFIC

Passenger traffic reflects the number of passengers activities carried out at the ports, and is recorded in person units. Recording passenger traffic is divided based on the type of activity and type of shipping route. The types of activities consist of passengers boarding the ship and passengers disembarking from the ship. While the shipping routes are divided into domestic shipping routes and foreign shipping routes.

Tabel Arus Penumpang
Passenger Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
				(Nominal)	(%)
Luar Negeri Overseas					
Embarkasi Embarkation	Orang	704.275	383.533	320.742	83,63%
Debarkasi Debarkation	Orang	599.919	304.151	295.768	97,24%
Jumlah Luar Negeri Total Overseas	Orang	1.304.194	687.684	616.510	89,65%
Dalam Negeri Domestic					
Embarkasi Embarkation	Orang	8.560.921	7.201.720	1.359.201	18,87%
Debarkasi Debarkation	Orang	8.185.817	7.139.480	1.046.337	14,66%
Jumlah Dalam Negeri Total Domestic	Orang	16.746.738	14.341.200	2.405.538	16,77%
Jumlah Total	Orang	18.050.932	15.028.884	3.022.048	20,11%

Realisasi arus penumpang pada tahun 2023 sebesar 18.050.932 Orang, meningkat 20,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15.028.884 Orang. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang baik dan kondusif sehingga banyak orang yang melakukan penyeberangan antar pulau. Selain itu, arus penumpang khususnya melalui kapal pesiar atau *cruise* meningkat yang dipengaruhi pelonggaran aturan oleh pemerintah atas kunjungan wisatawan asing.

Realized passenger traffic in 2023 reached 18,050,932 people, an increase of 20.11% compared to the previous year's 15,028,884 people. This was due to the good and conducive weather conditions so that many people made crossings between islands. While the flow of passengers, especially via cruise ships, has increased, influenced by the government's relaxation of regulations regarding visits by foreign tourists.



JASA LAINNYA

Segmen Jasa Lainnya merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan meliputi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL) dan Fasilitas Rupa-Rupa.

PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK (TBAL)

TBAL merupakan jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih serta energi listrik.

OTHER SERVICES

The Other Services segment includes services that support activities at the port including Land, Building, Water and Electricity (TBAL) and Miscellaneous Facilities.

LAND, BUILDING, WATER AND ELECTRICITY CONTROL (TBAL)

TBAL is a rental service for land, buildings, clean water and electrical energy.

Tabel Produksi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL)
Land, Building, Water and Electricity Concession (TBAL) Production

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
				(Nominal)	(%)
Pengusahaan Properti Property Operations					
Pengusahaan Lahan Land Concession					
Sewa Rental	M ²	15.827.285	13.741.662	2.085.623	15,18%
Throughput Fee/Kontribusi Throughput Fee/Contribution	Ton	10.885.631	5.224.184	5.661.447	108,37%
Pengusahaan Bangunan Building Business	M²	159.690	122.679	37.011	30,17%
Konsolidasi dan Distribusi Barang Consolidation and Goods Distribution	Paket Packages	3.306.444	2.581.983	724.461	28,06%
Pengusahaan Air/Listrik Water/Electricity Business					
Pengusahaan Air Water Business					
Pengusahaan Air Kapal Ship Water Business					
Sumber yang diusahakan Sources Worked on	Ton	2.090.863	1.777.638	313.225	17,62%
Sumber yang dikerjasamakan Sources Collaborated on	Ton	1.839.286	241.803	1.597.483	660,65%
Pengusahaan Air Umum Public Water Business					
Sumber yang diusahakan Sources Worked on	Ton	676.805	404.422	272.383	67,35%
Sumber yang dikerjasamakan Sources Collaborated on	Ton	475.462	218.498	256.964	117,60%
Pengusahaan Listrik Electricity Business	KWH	41.943.130	41.982.517	(39.387)	(0,09%)

Pengusahaan Properti

Realisasi produksi pengusahaan properti untuk persewaan lahan di tahun 2023 dalam satuan M² mencapai 15.827.285 M², meningkat 15,18% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13.741.662 M². Realisasi produksi Pengusahaan TBAL untuk pengusahaan bangunan di tahun 2023 dalam satuan M²

Property Business

Realized property business production for land rental in 2023 in M2 reached 15,827,285 M2, an increase of 15.18% compared to 13,741,662 M2 in 2022. Realized TBAL production for building operations in 2023 in M2 reached 159,690 M2, an increase of 30.17% compared to 122,679 M2 in 2022. Property business

mencapai 159.690 M², meningkat 30,17% dibandingkan tahun 2022 sebesar 122.679 M². Pengusahaan properti mengalami peningkatan secara *year on year* dikarenakan tingginya pemakaian sewa lahan oleh pihak ketiga.

Pengusahaan Air

Realisasi produksi pengusahaan air kapal untuk sumber yang diusahakan tahun 2023 dalam satuan Ton mencapai 2.090.863 Ton, meningkat 17,62% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mencapai 1.777.638 Ton. Demikian pula dengan pengusahaan air umum dari sumber yang dikerjasamakan tahun 2023 dalam satuan Ton mencapai 475.462 Ton, meningkat 117,60% dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar 218.498 Ton. Peningkatan tersebut dipengaruhi peningkatan pengisian air kapal khususnya untuk kapal luar negeri yang sejalan dengan adanya peningkatan kunjungan kapal di dermaga umum.

Pengusahaan Listrik

Realisasi produksi pengusahaan listrik di tahun 2023 dalam satuan KWH mencapai 41.943.130 KWH, menurun 0,09% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 41.982.517 KWH. Hal ini disebabkan oleh belum selesai perpanjangan kerja samanya di Cabang Tanjung Pinang dan Dumai serta belum adanya penambahan sewa lahan di Cabang Malahayati sejak tahun 2022 dan menurun permintaan listrik di Cabang Dumai.

PELAYANAN JASA RUPA-RUPA

Jasa rupa-rupa antara lain meliputi pas terminal penumpang, pas pelabuhan dan produksi kerjasama.

has increased year on year due to the high use of land rentals by third parties.

Water Business

Realized ship water production for commercial sources in 2023 in tons reached 2,090,863 tons, an increase of 17.62% compared to 1,777,638 tons in 2022. While the exploitation of public water from cooperative sources in 2023 in tons reached 475,462 tons, an increase of 117.60% compared to 218,498 tons in 2022. This increase was due to the increase in ship water filling, especially for foreign ships, in line with an increase in ship visits at public docks.

Electricity Business

Realized electricity production in 2023 in KWH units reached 41,943,130 KWH, a decrease of 0.09% compared to 41,982,517 KWH in 2022. This was due to the unfinished extension of the collaboration in the Tanjung Pinang and Dumai Branches as well as the absence of additional land rentals in the Malahayati Branch since 2022 and decreasing demand for electricity in the Dumai Branch.

MISCELLANEOUS SERVICES

Miscellaneous services include passenger terminal passes, port passes and production cooperation.

Tabel Produksi Pelayanan Jasa Rupa-Rupa
Miscellaneous Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
				(Nominal)	(%)
Pas Terminal Penumpang Passenger Terminal Pass					
Pas Penumpang Passenger Pass	Lembar Sheet	8.879.946	5.388.316	3.491.630	64,80%
Pas Pelabuhan (Orang) Harbor Pass (People)					
Pas Harian Orang Daily Pass People	Lembar Sheet	2.315.709	2.135.350	180.359	8,45%
Pas Berlangganan Orang Subscription Pass Vehicles	Lembar Sheet	79.020	89.512	(10.492)	(11,72%)
Pas Pelabuhan (Kendaraan) Production Cooperation					
Pas Harian Kendaraan Daily Pass Vehicles	Lembar Sheet	14.448.678	16.957.536	(2.508.858)	(14,79%)
Pas Berlangganan Kendaraan Subscription Pass Vehicles	Lembar Sheet	679.269	642.918	36.351	5,65%
Produksi Kerjasama Production Cooperation					
Kerjasama Alat Equipment Cooperation	Jam	78.598	51.346	27.252	53,08%



Tabel Produksi Pelayanan Jasa Rupa-Rupa
Miscellaneous Services Production

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
				(Nominal)	(%)
Kerjasama Pelabuhan Port Cooperation	Jam	14.857	29.893	(15.036)	(50,30%)
Kerjasama Bunker BBM Fuel Bunker Cooperation	Ton	53.162.567	54.960.353	(1.797.786)	(3,27%)

Pas Terminal Penumpang

Realisasi pas penumpang di tahun 2023 dalam satuan Lembar mencapai 8.879.946 lembar, meningkat 64,80% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 5.388.316 Lembar. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan kapal penumpang baik internasional (*cruise*) dan domestik serta kegiatan kapal RoRo.

Passenger Terminal Pass

Realized passenger passes in 2023 in units reached 8,879,946 pieces, an increase of 64.80% compared to 5,388,316 pieces in 2022. This increase was due to the increase in passenger ship activities, both international (cruise) and domestic, as well as RoRo ship activities.

Pas Pelabuhan

Realisasi pas harian orang di tahun 2023 dalam satuan Lembar mencapai 2.315.709 Lembar, meningkat 8,45% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 2.135.350 Lembar. Namun pas harian kendaraan dalam satuan Lembar menurun 14,79% dari 16.957.536 Lembar di tahun 2022 menjadi 14.448.678 Lembar di tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya penggabungan tarif pas pelabuhan dengan pelayanan bongkar muat pada perjanjian kerjasama.

Port Pass

Realized daily passes for people in 2023 in units reached 2,315,709, an increase of 8.45% compared to 2,135,350 in 2022. However, daily vehicle passes in units decreased by 14.79% from 16,957,536 Sheet in 2022 to 14,448,678 Sheet in 2023. This was due to a combination of port pass rates with loading and unloading services in the cooperation agreement.

Produksi Kerjasama

Realisasi produksi kerjasama alat di tahun 2023 dalam satuan Jam mencapai 78.598 Jam, meningkat 53,08% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 51.346 Jam. Sedangkan Realisasi produksi kerjasama pelabuhan di tahun 2023 dalam satuan Jam mencapai 14.857 Jam, menurun 50,30% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 29.893 Jam. Demikian pula dengan realisasi produksi kerjasama bunker BBM di tahun 2023 dalam satuan Ton mencapai 53.162.567 Ton, menurun 3,27% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 54.960.353 Ton. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya penyesuaian pencatatan yang sebelumnya menggunakan satuan Ton diubah menjadi Liter.

Collaborative Production

Realized equipment collaboration production in 2023 in hours reached 78,598 hours, an increase of 53.08% compared to 51,346 hours in 2022. While the realized port cooperation production in 2023 in hours reached 14,857 hours, a decrease of 50.30% compared to 29,893 hours in 2022. While the realized cooperation production of fuel bunkers in 2023 in tons reached 53,162,567 tons, a decrease of 3.27% compared to 54,960,353 tons in 2022. This was due to adjustments in recording, from previously used units of tons, changed to liters.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT USAHA

Pendapatan operasi segmen tahun 2023 mencapai Rp31,02 triliun, meningkat 4,44% atau sebesar Rp1,32 triliun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp29,70 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan operasi eksternal dari operasi kepelabuhan. Peningkatan pendapatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalan yang mencapai 2,66% atau sebesar Rp104,11 miliar dari Rp3,91 triliun di tahun 2022 menjadi Rp4,02 triliun di tahun 2023.

REVENUES AND PROFITABILITY BY BUSINESS SEGMENT

Segment operating revenues in 2023 reached Rp31.02 trillion, an increase of 4.44% or Rp1.32 trillion compared to Rp29.70 trillion in 2022. This increase was mainly due to the growth in external operating revenues from port operations. This increase in revenue to Rp4.02 trillion in 2023 was in line with the increase in profit for the year that reached 2.66%, or Rp104.11 billion, compared to Rp3.91 trillion in 2022.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi
Operating Segment Revenue and Profitability

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenues					
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	29.451.930.330	1.566.287.372	31.018.217.702	-	31.018.217.702
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	9.246.559.197	4.210.107.472	13.456.666.669	(13.456.666.669)	-
Total pendapatan operasi segmen Total segment operating revenues	38.698.489.527	5.776.394.844	44.474.884.371	(13.456.666.669)	31.018.217.702
Beban operasi Operating expenses	(32.928.997.190)	(4.438.766.463)	(37.367.763.653)	13.024.532.182	(24.343.231.471)
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating revenues - net	898.965.716	36.410.459	935.376.175	(624.779.982)	310.596.193
Laba usaha Operating revenues	6.668.458.053	1.374.038.840	8.042.496.893	(1.056.914.469)	6.985.582.424
Pendapatan keuangan Finance income	958.854.788	45.257.489	1.004.112.277	(376.816.845)	627.295.432
Beban keuangan Finance expenses	(2.658.904.342)	(999.659.646)	(3.658.563.988)	798.444.135	(2.860.119.853)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto Share of profits of associates and joint control entities - net	3.624.842.044	11.741.432	3.636.583.476	(3.266.205.916)	370.377.560
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax	8.593.250.543	431.378.115	9.024.628.658	(3.901.493.095)	5.123.135.563
Beban pajak final Final tax expense	(379.564.883)	(137.688.334)	(517.253.217)	1.771.849	(515.481.368)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax	8.213.685.660	293.689.781	8.507.375.441	(3.899.721.246)	4.607.654.195
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense					
Kini Current	(917.092.565)	(83.817.991)	(1.000.910.556)	1.364.854	(999.545.702)
Tangguhan Deferred	302.756.394	101.716.376	404.472.770	-	404.472.770
Laba tahun berjalan Income for the year	7.599.349.489	311.588.166	7.910.937.655	(3.898.356.392)	4.012.581.263



Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi
Operating Segment Revenue and Profitability

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
Posisi Keuangan Financial position					
Aset segmen Segment Assets	136.898.730.984	22.076.667.455	158.975.398.439	(40.634.332.764)	118.341.065.675
Liabilitas segmen Segment liabilities	70.581.813.990	18.596.255.902	89.178.069.892	(17.678.219.375)	71.499.850.517
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	(3.841.177.585)	(300.275.350)	(4.141.452.935)	467.616.743	(3.673.836.192)
Uraian Description	2022				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenues					
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	26.781.758.791	2.918.845.344	29.700.604.135	-	29.700.604.135
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	8.981.833.109	2.018.437.644	11.000.270.753	(11.000.270.753)	-
Total pendapatan operasi segmen Total segment operating revenues					29.700.604.135
Beban operasi Operating expenses	(29.756.772.868)	(4.038.359.251)	(33.795.132.119)	10.640.702.928	(23.154.429.191)
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating revenues - net	372.153.179	193.379.261	565.532.440	3.113.057	568.645.497
Laba usaha Operating revenues					7.114.820.441
Pendapatan keuangan Finance income	759.759.720	42.360.298	802.120.018	(421.629.748)	380.490.270
Beban keuangan Finance expenses	(2.723.614.361)	(685.118.179)	(3.408.732.540)	837.689.572	(2.571.042.968)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto Share of profits of associates and joint control entities - net	3.194.119.075	(256.639.058)	2.937.480.017	(2.634.864.325)	302.615.692
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax					5.226.883.435
Beban pajak final Final tax expense	(375.850.289)	(112.379.013)	(488.229.302)	-	(488.229.302)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax					4.738.654.133
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense					
Kini Current	(898.369.096)	(59.968.402)	(958.337.498)	-	(958.337.498)

Uraian Description	2022				
	Operasi Kepelabuhan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
Tanggungan Deferred	43.164.362	84.988.860	128.153.222	-	128.153.222
Laba tahun berjalan Income for the year					3.908.469.857
Posisi keuangan Financial position					
Aset segmen Segment Assets	134.500.471.592	25.724.382.172	160.224.853.764	(41.874.275.858)	118.350.577.906
Liabilitas segmen Segment liabilities	71.737.725.596	21.366.079.896	93.103.805.492	(17.557.920.361)	75.545.885.131
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	3.701.971.300	335.928.632	4.037.899.932	(470.037.799)	3.567.862.133
Uraian Description	Pertumbuhan 2022-2023 (dalam nilai Rupiah) 2022-2023 Growth (in Rupiah)				
	Operasi Kepelabuhan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
Pendapatan operasi segmen Segment operating revenues					
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	2.670.171.539	(1.352.557.972)	1.317.613.567	-	1.317.613.567
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	264.726.088	2.191.669.828	2.456.395.916	(2.456.395.916)	-
Total pendapatan operasi segmen Total segment operating revenues					1.317.613.567
Beban operasi Operating expenses	(3.172.224.322)	(400.407.212)	(3.572.631.534)	2.383.829.254	(1.188.802.280)
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating revenues - net	526.812.537	(156.968.802)	369.843.735	(627.893.039)	(258.049.304)
Laba usaha Operating revenues					(129.238.017)
Pendapatan keuangan Finance revenues	199.095.068	2.897.191	201.992.259	44.812.903	246.805.162
Beban keuangan Finance expenses	64.710.019	(314.541.467)	(249.831.448)	(39.245.437)	(289.076.885)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto Share of profits of associates and joint control entities - net	430.722.969	268.380.490	699.103.459	(631.341.591)	67.761.868
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax					(103.747.872)
Beban pajak final Final tax expense	(3.714.594)	(25.309.321)	(29.023.915)	-	(27.252.066)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax					(130.999.938)



Uraian Description	Pertumbuhan 2022-2023 (dalam nilai Rupiah) 2022-2023 Growth (in Rupiah)				
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services	Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense					
Kini Current	(18.723.469)	(23.849.589)	(42.573.058)	-	(41.208.204)
Tangguhan Deferred	259.592.032	16.727.516	276.319.548	-	276.319.548
Laba tahun berjalan Income for the year					104.111.406
Posisi keuangan Financial position					
Aset segmen Segment Assets	2.398.259.392	(3.647.714.717)	(1.249.455.325)	1.239.943.094	(9.512.231)
Liabilitas segmen Segment liabilities	(1.155.911.606)	(2.769.823.994)	(3.925.735.600)	(120.299.014)	(4.046.034.614)
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	(7.543.148.885)	-	(8.179.352.867)	937.654.542	(7.241.698.325)

KINERJA ENTITAS ANAK PELINDO

Uraian kinerja entitas anak Pelindo disajikan sebagai berikut.

PT Pelindo Terminal Petikemas

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Terminal Petikemas (dalam jutaan Rupiah)
PT Pelindo Terminal Petikemas Financial performance

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan usaha Operating revenues	12.470.146	11.189.964	1.280.182	11,44%
Beban usaha Operating expenses	(10.048.560)	(8.821.274)	(1.227.286)	13,91%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	2.421.586	2.368.690	52.896	2,23%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	2.110.049	1.771.423	338.626	19,12%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai sebesar Rp12,47 triliun, meningkat 11,44% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp11,19 triliun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan tingginya realisasi pendapatan jasa giro dan bunga deposito dari optimalisasi pengelolaan kas, pendapatan kontrak sewa dermaga di PT IPC TPK, pendapatan administrasi nota di PT TPS dan pendapatan denda klaim di PT BJTI.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2023 mencapai sebesar Rp2,11 triliun, 19,12% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp1,77 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja entitas anak PT PTP sehingga berdampak pada peningkatan laba entitas asosiasi tahun 2023.

PT Pelindo Multi Terminal

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Multi Terminal (dalam jutaan Rupiah)
PT Pelindo Multi Terminal Financial performance

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan usaha Operating revenues	5.015.750	4.062.735	953.015	23,46%
Beban usaha Operating expenses	(4.244.696)	(3.445.732)	(798.964)	23,19%

PERFORMANCE OF PELINDO'S SUBSIDIARIES

The Pelindo subsidiaries' performance is presented as follows.

PT Pelindo Terminal Petikemas

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2023 reached Rp12.47 trillion, an increase of 11.44% compared to Rp11.19 trillion in 2022. This increase was partly due to the high realization of current account service revenue and deposit interest from optimizing cash management, dock rental contract revenue at PT IPC TPK, note administration revenue at PT TPS and claims fine revenue at PT BJTI.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2023 reached Rp2.11 trillion, 19.12% compared to Rp1.77 trillion in 2022. This was due to the increase in the performance of the subsidiary PT PTP that increased the profits in the associated entity in 2023.

PT Pelindo Multi Terminal



Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Multi Terminal (dalam jutaan Rupiah)
PT Pelindo Multi Terminal Financial performance

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	771.054	617.003	154.051	24,97%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	587.240	461.353	125.887	27,29%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai sebesar Rp5,02 triliun, meningkat 23,46% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp4,06 triliun. Peningkatan pendapatan usaha ini disebabkan peningkatan petikemas internasional di Cabang Dumai dan peningkatan kegiatan penumpukkan petikemas di lapangan di Cabang Jamrud, Nilam dan Mirah, ketercapaian dan peningkatan pendapatan rupa-rupa usaha karena kenaikan kegiatan bunker BBM di Cabang Tanjung Intan, peningkatan pendapatan Kerjasama usaha di Cabang Jamrud, Nilam dan Mirah, peningkatan penggunaan *sharing* alat dan *crane* yang berkegiatan di Cabang Trisakti dan adanya jasa *bundling pass* atas kegiatan BM Amonium Nitrat dan Bungkil yang dilakukan oleh PBM Pelindo pada *branch* Trisakti Mekar Putih realisasi kerjasama jasa penumpukkan dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu penggunaan fasilitas gudang, dan lahan lini I dan lini II untuk menunjang pelaksanaan kegiatan *Integrated Banyuwangi Shorebase For Drilling* MDA-MBH-MAC Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) dan Pemanfaatan lapangan penumpukkan di area lini II oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok menunjang proyek *offshore* Kangean Energy Indonesia (KEI) di *branch* Tanjung Wangi.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2023 mencapai sebesar Rp587,24 miliar, meningkat 27,29% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp461,35 miliar. Peningkatan laba bersih tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan usaha.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2023 reached Rp5.02 trillion, an increase of 23.46% compared to Rp4.06 trillion in 2022. This increase was due to an increase in international containers at the Dumai Branch and an increase in container stacking activities in the Jamrud, Nilam and Mirah Branches, the achievement and increase in business revenues was due to an increase in fuel bunkering activities at the Tanjung Intan Branch, an increase in business cooperation revenues at the Jamrud, Nilam and Mirah Branches, increased use of sharing tools and cranes operating at the Trisakti Branch, and bundling pass services for BM Ammonium Nitrate and Oil Cake activities carried out by PBM Pelindo at the Trisakti Mekar Putih branch, realization of stacking service collaboration with PT Tanjung Priok Port, namely the use of warehouse facilities, and line I and line II land to support the implementation of the Integrated Banyuwangi Shorebase For Drilling MDA-MBH-MAC Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) activities, and the use of the piling yard in the line II area by PT Tanjung Priok Port to support the Kangean offshore project Energy Indonesia (KEI) at the Tanjung Wangi branch.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2023 reached Rp587.24 billion, an increase of 27.29% compared to Rp461.35 billion in 2022. This increase in net profit was in line with the growth in operating revenues.

PT Pelindo Solusi Logistik

PT Pelindo Solusi Logistik

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Solusi Logistik Financial performance

(dalam ribuan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha Operating revenues	2.438.452	2.179.777	258.675	11,87%
Beban usaha Operating expenses	(1.691.572)	(1.501.513)	(190.059)	12,66%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	746.880	678.264	68.616	10,12%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	(175.991)	118.633	(294.624)	(248,35%)

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai sebesar Rp2,44 triliun, meningkat 11,87% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp2,18 triliun. Peningkatan pendapatan usaha antara lain disebabkan peningkatan pendapatan properti, dan pendapatan pelayanan *forwarding*.

OPERATING REVENUES

Business revenues in 2023 reached Rp2.44 trillion, an increase of 11.87% compared to Rp2.18 trillion in 2022. The increase in operating revenues was partly due to an increase in property revenues and forwarding service revenues.

LABA (RUGI) BERSIH

Pada tahun 2023 PT Pelindo Solusi Logistik mencatatkan rugi bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp175,99 miliar, menurun 248,35% dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan laba bersih mencapai sebesar Rp118,63 miliar. Hal ini antara lain dipengaruhi peningkatan beban usaha yang disebabkan kenaikan beban BBM, serta peningkatan kebutuhan *spareparts* dan perlengkapan operasional, peningkatan beban penyusutan yang disebabkan telah selesainya proyek JTCC di PT API dan peningkatan beban tenaga kerja *outsourcing* atas adanya kontrak jasa pengamanan di PT ISMA di Pelindo Group.

NET PROFIT (LOSS)

In 2023 PT Pelindo Solusi Logistik recorded a net loss of Rp175.99 billion, a decrease of 248.35% compared to a net profit of Rp118.63 billion in 2022. This was due to the increase in operating expenses due to the increase in fuel costs, as well as the increase in the need for spare parts and operational equipment, the increase in depreciation expenses due to the completion of the JTCC project at PT API, and the increase in outsourced labor expenses due to the security services contract at PT ISMA in Pelindo Group.



PT PELINDO JASA MARITIM

PT PELINDO JASA MARITIM

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Jasa Maritim Financial performance

(dalam ribuan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	6.375.294	5.041.190	1.334.104	26,46%
Beban usaha Operating expenses	(5.597.390)	(4.403.361)	(1.194.029)	27,12%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	777.904	637.829	140.075	21,96%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	584.596	480.369	104.227	21,70%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai sebesar Rp6,38 triliun, meningkat 26,46% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp5,04 triliun. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan *sharing revenue* sejalan dengan meningkatnya arus kapal di beberapa regional serta peningkatan pendapatan *fuel surcharge* di tahun 2023.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2023 reached Rp6.38 trillion, an increase of 26.46% compared to Rp5.04 trillion in 2022. This was due to an increase in sharing revenue in line with increasing ship traffic in several regions as well as an increase in fuel surcharge revenues in 2023.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2023 mencapai sebesar Rp584,60 miliar, meningkat 21,70% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp480,37 miliar. Peningkatan laba bersih ini sejalan dengan kenaikan pendapatan *pilotage marine* dan pendapatan *tug-boat marine*.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2023 reached Rp584.60 billion, an increase of 21.70% compared to Rp480.37 billion in 2022. This increase was in line with the increase in pilotage marine revenues and tug-boat marine revenues.

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Jasa Maritim
PT Pelabuhan Indonesia Investama Financial performance

(dalam ribuan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha Operating revenues	84.140	87.647	(3.507)	(4,00%)
Beban usaha Operating expenses	(101.519)	(78.427)	(23.092)	29,44%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	(17.379)	9.220	(26.599)	(288,49%)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	(26.150)	10.765	(36.915)	(342,92%)

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai sebesar Rp84,14 miliar, turun 4,00% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp87,65 miliar. Hal ini disebabkan turunnya penjualan portofolio di tahun 2023.

LABA (RUGI) BERSIH

Pada tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia Investama mencatatkan rugi bersih tahun 2023 mencapai Rp26,15 miliar, menurun 342,92% dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan laba sebesar Rp10,77 miliar. Hal ini antara lain disebabkan menurunnya suku bunga *Shareholder's Loan* (SHL) serta penjualan portofolio di tahun 2023.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2023 reached Rp84.14 billion, a decrease of 4.00% compared to Rp87.65 billion in 2022. This was due to a decline in portfolio sales in 2023.

NET PROFIT (LOSS)

In 2023 PT Pelabuhan Indonesia Investama recorded a net loss in 2023 of Rp26.15 billion, a decrease of 342.92% compared to the profit of Rp10.77 billion in 2022. This was partly due to a decline in Shareholder's Loan (SHL) interest rates and portfolio sales in 2023.

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI LOGISTIK

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI LOGISTIK

Tabel Kinerja Keuangan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Logistik
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Logistik Financial performance

(dalam ribuan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha Operating revenues	513.271	303.830	209.441	68,93%
Beban usaha Operating expenses	(483.137)	(276.678)	(206.459)	74,62%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	30.135	27.152	2.983	10,99%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	21.408	19.724	1.684	8,54%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai sebesar Rp513,27 miliar, meningkat 68,93% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp303,83 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan ICT *Implementor*, *IT Manage Service* dan *Digital Seaport*.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2023 mencapai sebesar Rp21,41 miliar, meningkat 8,54% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp19,72 miliar. Peningkatan laba bersih ini sejalan dengan kenaikan pendapatan di tahun 2023.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2023 reached Rp513.27 billion, an increase of 68.93% compared to Rp303.83 billion in 2022. This was due to an increase in ICT *Implementor*, *IT Manage Service* and *Digital Seaport* revenues.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2023 reached Rp21.41 billion, an increase of 8.54% compared to Rp19.72 billion in 2022. This was due to an increase in revenues in 2023.



PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Daya Sejahtera Financial performance

(dalam ribuan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	1.303.868	941.161	362.707	38,54%
Beban usaha Operating expenses	(1.237.904)	(888.325)	(349.579)	39,35%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	65.964	52.835	13.129	24,85%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	44.852	40.360	4.492	11,13%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai sebesar Rp1,31 triliun, meningkat 38,54% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp941,16 miliar. Peningkatan pendapatan antara lain disebabkan kenaikan pendapatan yang dikarenakan tambahan *project* pekerjaan pada Kantor Pusat Pelindo, Regional 1, Regional 2, *Subholding* dan entitas anak di area Regional 1,2 dan 4.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2023 reached Rp1.31 trillion, an increase of 38.54% compared to Rp941.16 billion in 2022. This was partly due to an increase in revenues due to additional work projects at Pelindo Head Office, Regional 1, Regional 2, Subholding and subsidiaries in the Regional 1, 2 and 4 areas.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2023 mencapai sebesar Rp44,85 miliar, meningkat 11,13% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp40,36 miliar. Peningkatan laba sejalan dengan peningkatan pendapatan di tahun 2023.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2023 reached Rp44.85 billion, an increase of 11.13% compared to Rp40.36 billion in 2022. This was in line with the increase in revenues in 2023.

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA

Tabel Kinerja Keuangan KSO Terminal Petikemas Koja
KSO Terminal Petikemas Koja Financial performance

(dalam ribuan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	1.622.335	1.548.351	73.984	4,78%
Beban usaha Operating expenses	(1.093.422)	(1.053.174)	(40.248)	3,82%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	528.913	495.177	33.736	6,81%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	183.224	151.961	31.263	20,57%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai sebesar Rp1,62 triliun, meningkat 4,78% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp1,55 triliun. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan *throughput* petikemas.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2023 mencapai Rp183,22 miliar, meningkat 20,57% dibandingkan tahun 2022 mencapai Rp151,96 miliar. Peningkatan laba antara lain disebabkan oleh upaya pengendalian biaya serta pertumbuhan pendapatan di tahun 2023.

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2023 reached Rp1.62 trillion, an increase of 4.78% compared to Rp1.55 trillion in 2022. This was partly due to an increase in container throughput.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2023 reached Rp183.22 billion, an increase of 20.57% compared to Rp151.96 billion in 2022. This was partly due to efforts to control expenses and revenues growth in 2023.

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

Tabel Kinerja Keuangan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Financial performance

(dalam ribuan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	203.573	202.174	1.399	0,69%
Beban usaha Operating expenses	(188.102)	(183.998)	(4.104)	2,23%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	15.471	18.176	(2.705)	(14,88%)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	12.707	12.706	1	0,01%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai sebesar Rp203,57 miliar, meningkat 0,69% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp202,17 miliar. Peningkatan pendapatan ini antara lain dipengaruhi oleh *platform learning wallet* yang digantikan dengan *platform portaverse*.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2022 mencapai sebesar Rp12,71 miliar, meningkat 0,01% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp12,70 miliar. Peningkatan laba sejalan dengan kenaikan pendapatan sebesar 0,69%.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2023 reached Rp203.57 billion, an increase of 0.69% compared to Rp202.17 billion in 2022. This was partly due to replacing the learning wallet platform with the portaverse platform, as well as an increases in training, learning and MICE activities.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2023 reached Rp12.71 billion, an increase of 0.01% compared to Rp12.70 billion in 2022. This was in line with an increase in revenues of 0.69%.



Tabel Kinerja Keuangan PT Electronic Data Interchange Indonesia
PT Electronic Data Interchange Indonesia Financial performance

(dalam ribuan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	79.539	66.972	12.567	18,76%
Beban usaha Operating expenses	(76.653)	72.527	(149.180)	(205,69%)
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	2.886	(5.556)	8.442	(151,94%)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	2.088	(5.608)	7.696	(137,23%)

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai sebesar Rp79,54 miliar, menurun 18,76% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp66,97 miliar. Peningkatan ini antara lain disebabkan terealisasinya pendapatan AHU Online, pembangunan *command center* yang merupakan proyek baru di tahun 2023.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2023 reached Rp79.54 billion, an increase of 18.76% compared to Rp66.97 billion in 2022. This was partly due to the realization of AHU Online revenues, and the construction of a command center, a new project in 2023.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2023 mencapai sebesar Rp2,09 miliar, meningkat 137,23% dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan rugi sebesar Rp5,61 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh efisiensi beban usaha sebagai upaya menjaga *operating ratio* di tahun 2023.

NET PROFIT (LOSS)

Net profit in 2023 reached Rp2.09 billion, an increase of 137.23% compared to a loss of Rp5.61 billion in 2022. This was due to the efficiency of operating expenses in an effort to maintain the operating ratio in 2023.

PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN

PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Husada Cipta Medan (dalam jutaan Rupiah)
PT Pelindo Husada Cipta Medan Financial performance

(dalam ribuan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	48.444	40.773	7.671	18,81%
Beban usaha Operating expenses	(43.875)	(35.102)	(8.773)	24,99%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	4.569	5.672	(1.103)	(19,45%)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	4.423	3.870	553	14,29%

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha tahun 2023 mencapai sebesar Rp48,44miliar, meningkat 18,81% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp40,77 miliar. Peningkatan ini antara lain disebabkan kenaikan pendapatan usaha dari penerimaan bunga deposito atas optimalisasi penggunaan kas Perusahaan.

OPERATING REVENUES

Operating revenues in 2023 reached Rp48.44 billion, an increase of 18.81% compared to Rp40.77 billion in 2022. This was partly due to an increase in business revenues from deposit interest receipts due to optimizing the use of the Company's cash.

LABA (RUGI) BERSIH

Laba bersih tahun 2023 mencapai sebesar Rp4,42 miliar, meningkat 14,29% dibandingkan tahun 2022 mencapai sebesar Rp3,87 miliar. Peningkatan laba sejalan dengan kenaikan pendapatan usaha di tahun 2023.

NET PROFIT (LOSS).

Net profit in 2023 reached Rp4.42 billion, an increase of 14.29% compared to Rp3.87 billion in 2022. This was in line with the increase in operating revenues in 2023.



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan mendapat opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan Perseroan terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

The financial review described below refers to the Financial Report for the year ending December 31, 2023, which is attached to this Annual Report. The Financial Statements were audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm and received an opinion of fair in all material respects for the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") as at December 31, 2023 and the consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance consists of the Consolidated Statement of Financial Position, Statement of Profit and Loss and Comprehensive Income, and Consolidated Statement of Cash Flows that are presented as follows.

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Financial Position

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASET ASSETS				
ASET LANCAR CURRENT ASSETS				
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	12.491.274.250	13.597.640.823	(1.106.366.573)	(8,14%)
Investasi jangka pendek Short-term investments	3.769.584.376	3.943.051.999	(173.467.623)	(4,40%)
Piutang usaha – neto Trade receivables - net				
Pihak ketiga Third parties	1.056.562.835	1.130.425.885	(73.863.050)	(6,53%)
Pihak berelasi Related parties	291.600.099	319.681.316	(28.081.217)	(8,78%)
Piutang lain-lain – neto Other receivables, net				

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Financial Position

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pihak ketiga Third parties	44.613.085	54.645.010	(10.031.925)	(18,36%)
Pihak berelasi Related parties	170.985.810	392.181.781	(221.195.971)	(56,40%)
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	208.543.807	225.480.260	(16.936.453)	(7,51%)
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues				
Pihak ketiga Third parties	572.269.934	543.670.248	28.599.686	5,26%
Pihak berelasi Related parties	152.492.130	107.559.957	44.932.173	41,77%
Persediaan Inventories	270.428.290	276.990.511	(6.562.221)	(2,37%)
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	1.190.287.684	972.176.643	218.111.041	22,44%
Aset lancar lainnya Other current assets	100.458.674	56.662.961	43.795.713	77,29%
Total Aset Lancar Total Current Assets	20.319.100.974	21.620.167.394	(1.301.066.420)	(6,02%)
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS				
Investasi jangka panjang Long-term investments	4.708.437.323	4.118.791.190	589.646.133	14,32%
Properti investasi – neto Investment properties - net	1.380.726.349	1.233.319.427	147.406.922	11,95%
Aset tetap – neto Fixed assets - net	40.513.752.433	45.033.835.147	(4.520.082.714)	(10,04%)
Aset kerjasama operasi – neto Joint operation assets - net	358.909.828	379.887.734	(20.977.906)	(5,52%)
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	454.253.106	453.988.347	264.759	0,06%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	844.098.609	632.879.439	211.219.170	33,37%
Aset tak berwujud – neto Intangible assets - net	46.882.443.268	42.546.542.738	4.335.900.530	10,19%
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	1.348.106.857	1.109.658.955	238.447.902	21,49%
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	1.531.236.928	1.221.507.535	309.729.393	25,36%
Total Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	98.021.964.701	96.730.410.512	1.291.554.189	1,34%
TOTAL ASET TOTAL ASSETS	118.341.065.675	118.350.577.906	(9.512.231)	(0,01%)



Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY				
LIABILITAS LIABILITIES				
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES				
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	3.330.172	105.361.831	(102.031.659)	(96,84%)
Utang usaha Trade payables				
Pihak ketiga Third parties	620.890.592	976.563.635	(355.673.043)	(36,42%)
Pihak berelasi Related parties	636.747.827	1.092.012.208	(455.264.381)	(41,69%)
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	1.393.628.171	1.594.355.077	(200.726.906)	(12,59%)
Utang pajak Taxes payable	885.558.244	1.025.273.741	(139.715.497)	(13,63%)
Beban akrual Accrued expenses	5.419.485.908	5.273.585.288	145.900.620	2,77%
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities				
Utang obligasi Bonds payable	7.574.312.147	8.637.804.928	(1.063.492.781)	(12,31%)
Utang bank Bank loans	445.526.921	152.606.159	292.920.762	191,95%
Liabilitas sewa Lease liabilities	70.113.816	49.907.726	20.206.090	40,49%
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities				
Pihak ketiga Third parties	465.350.521	855.825.793	(390.475.272)	(45,63%)
Pihak berelasi Related parties	659.009.231	185.307.298	473.701.933	255,63%
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	18.173.953.550	19.948.603.684	(1.774.650.134)	(8,90%)
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES				
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar Long term liabilities – net of current portion				
Utang obligasi Bonds payable	25.549.740.350	34.116.829.197	(8.567.088.847)	(25,11%)

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Financial Position

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Utang bank Bank loans	13.901.255.263	7.678.666.058	6.222.589.205	81,04%
Liabilitas sewa Lease liabilities	417.609.648	385.228.086	32.381.562	8,41%
Utang lembaga keuangan non bank Loans from non-bank financial institutions				
Pihak ketiga Third parties	697.862.861	584.328.133	113.534.728	19,43%
Pihak berelasi Related parties	1.372.013.613	1.160.435.133	211.578.480	18,23%
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	86.843.304	231.128.682	(144.285.378)	(62,43%)
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Long-term unearned revenue	4.192.970.146	4.544.771.276	(351.801.130)	(7,74%)
Liabilitas jangka panjang lainnya Other long-term liabilities	838.428.454	1.126.588.038	(288.159.584)	(25,58%)
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	6.269.173.328	5.769.306.844	499.866.484	8,66%
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	53.325.896.967	55.597.281.447	(2.271.384.480)	(4,09%)
TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	71.499.850.516	75.545.885.131	(4.046.034.615)	(5,36%)
EQUITAS EQUITY				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent entity				
Modal saham Share capital	40.575.584.000	40.575.584.000	-	0,00%
Modal donasi Donated capital	26.825.982	26.825.982	-	0,00%
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	(33.358.048.450)	(33.358.048.450)	-	0,00%
Komponen Ekuitas Lainnya Other equity component	1.466.121	1.466.121	-	0,00%
Selisih nilai transaksi dengan pihak non pengendali Difference in value of transactions with non-controlling interest	836.905.071	836.905.071	-	0,00%
Saldo Laba Retained earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	34.296.140.473	31.900.794.522	2.395.345.951	7,51%
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	4.964.897.779	4.915.321.447	49.576.332	1,01%



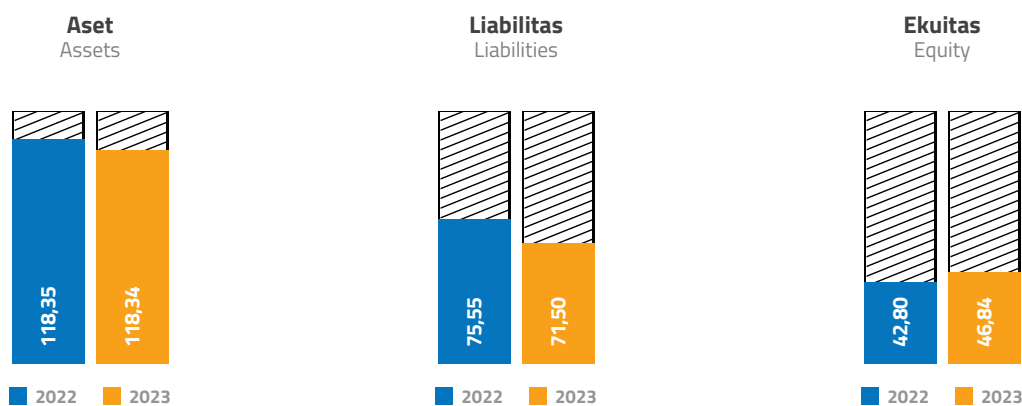
Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Financial Position

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penghasilan Komprehensif Lain Other comprehensive income	(2.373.018.577)	(3.774.159.697)	1.401.141.120	(37,12%)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk – Neto Equity attributable to owners of the parent entity – net	44.970.752.399	41.124.688.996	3.846.063.403	9,35%
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interests	1.870.462.759	1.680.003.779	190.458.980	11,34%
TOTAL EKUITAS TOTAL EQUITY	46.841.215.158	42.804.692.775	4.036.522.383	9,43%
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	118.341.065.675	118.350.577.906	(9.512.231)	(0,01%)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam triliun Rupiah)

(in trillion Rupiah)



ASET

Aset tahun 2023 mencapai Rp118,34 triliun, menurun sebesar 0,01% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp118,35 triliun. Penurunan tersebut disebabkan turunnya aset lancar sebesar Rp1,30 triliun.

ASSETS

Assets in 2023 reached Rp118.34 trillion, a decrease of 0.01% compared to Rp118.35 trillion in 2022. This decrease was due to a decrease in current assets of Rp1.30 trillion.

Tabel Aset
Assets

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset lancar Current assets	20.319.100.974	21.620.167.394	(1.301.066.420)	(6,02%)
Aset tidak lancar Non-current assets	98.021.964.701	96.730.410.512	1.291.554.189	1,34%
Total aset Total assets	118.341.065.675	118.350.577.906	(9.512.231)	(0,01%)

ASET LANCAR

Aset lancar tahun 2023 mencapai Rp20,39 triliun, menurun 6,02% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp21,62 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya kas dan setara kas sebesar Rp1,11 triliun.

CURRENT ASSETS

Current assets in 2023 reached Rp20.39 trillion, a decrease of 6.02% compared to Rp21.62 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in cash and cash equivalents of Rp1.11 trillion.

Tabel Aset Lancar
Current Assets

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	12.491.274.250	13.597.640.823	(1.106.366.573)	(8,14%)
Investasi jangka pendek Short-term investments	3.769.584.376	3.943.051.999	(173.467.623)	(4,40%)
Piutang usaha – neto Trade receivables, net				
Pihak ketiga Third parties	1.056.562.835	1.130.425.885	(73.863.050)	(6,53%)
Pihak berelasi Related parties	291.600.099	319.681.316	(28.081.217)	(8,78%)
Piutang lain-lain – neto Other receivables, net				
Pihak ketiga Third parties	44.613.085	54.645.010	(10.031.925)	(18,36%)
Pihak berelasi Related parties	170.985.810	392.181.781	(221.195.971)	(56,40%)
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	208.543.807	225.480.260	(16.936.453)	(7,51%)
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues				
Pihak ketiga Third parties	572.269.934	543.670.248	28.599.686	5,26%
Pihak berelasi Related parties	152.492.130	107.559.957	44.932.173	41,77%



Tabel Aset Lancar
Current Assets

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Persediaan Inventories	270.428.290	276.990.511	(6.562.221)	(2,37%)
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	1.190.287.684	972.176.643	218.111.041	22,44%
Aset lancar lainnya Other current assets	100.458.674	56.662.961	43.795.713	77,29%
Total Aset Lancar Total current assets	20.319.100.974	21.620.167.394	(1.301.066.420)	(6,02%)

KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas tahun 2023 mencapai Rp12,49 triliun, menurun 8,14% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp13,60 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya kas yang berasal dari bank sebesar Rp2,21 triliun.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents in 2023 reached Rp12.49 trillion, a decrease of 8.14% compared to Rp13.60 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in cash from banks of Rp2.21 trillion.

Tabel Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas Cash	5.950.787	39.387.247	(33.436.460)	(84,89%)
Bank	4.113.239.062	6.321.179.839	(2.207.940.777)	(34,93%)
Deposito berjangka Time deposits	8.372.084.401	7.237.073.737	1.135.010.664	15,68%
Total Kas dan Setara Kas Total cash and cash equivalents	12.491.274.250	13.597.640.823	(1.106.366.573)	(8,14%)

INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek tahun 2023 mencapai Rp3,77 triliun, menurun 4,40% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp3,94 triliun. Penurunan tersebut disebabkan pencairan dari penempatan deposito yang digunakan untuk kebutuhan operasional.

SHORT TERM INVESTMENTS

Short-term investment in 2023 reached Rp3.77 trillion, a decrease of 4.40% compared to Rp3.94 trillion in 2022. This decrease was due to disbursement of deposits used for operational needs.

Tabel Investasi Jangka Pendek
Short Term Investments

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total deposito berjangka Total time deposits	3.769.582.414	3.943.050.108	(173.467.694)	(4,40%)
Efek yang diperdagangkan Marketable securities	1.962	1.891	71	3,75%
Total investasi jangka pendek Total short-term investments	3.769.584.376	3.943.051.999	(173.467.623)	(4,40%)

PIUTANG USAHA – NETO

Piutang usaha neto tahun 2023 mencapai Rp1,35 triliun, menurun 7,03% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,45 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp73,86 miliar

TRADE RECEIVABLES – NET

Trade receivables - net in 2023 reached Rp1.35 trillion, a decrease of 7.03% compared to Rp1.45 trillion in 2022. This decrease was due to a decrease in trade receivables from third parties of Rp73.86 billion.

Tabel Piutang Usaha - Neto
Trade Receivables-Net

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga - neto Third parties - net	1.056.562.835	1.130.425.885	(73.863.050)	(6,53%)
Pihak berelasi - neto Related parties -net	291.600.099	319.681.316	(28.081.217)	(8,78%)
Piutang usaha - neto Trade receivables - net	1.348.162.934	1.450.107.201	(101.944.267)	(7,03%)

PIUTANG LAIN-LAIN – NETO

Piutang lain-lain neto tahun 2023 mencapai Rp215,60 miliar, menurun 51,75% dibandingkan dengan tahun 2022 mencapai Rp446,83 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp221,20 miliar.

OTHER RECEIVABLES – NET

Other receivables - net in 2023 reached Rp215.60 billion, a decrease of 51.75% compared to Rp446.83 billion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in other receivables from related parties of Rp221.20 billion.



Tabel Piutang Lain-Lain - Neto
Other Receivables - Net

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga - neto Third parties - net	44.613.085	54.645.010	(10.031.925)	(18,36%)
Pihak berelasi - neto Related parties -net	170.985.810	392.181.781	(221.195.971)	(56,40%)
Piutang lain-lain - neto Trade receivables - net	215.598.895	446.826.791	(231.227.896)	(51,75%)

UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Uang muka dan beban dibayar di muka tahun 2023 mencapai Rp208,54 miliar, menurun 7,51% dibandingkan dengan tahun 2022 mencapai Rp225,48 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya beban dibayar di muka sebesar Rp33,58 miliar.

ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Advances and prepaid expenses in 2023 reached Rp208.54 billion, a decrease of 7.51% compared to Rp225.48 billion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in prepaid expenses of Rp33.58 billion.

Tabel Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka
Advances And Prepaid Expenses

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Uang muka Advances				
Operasional Operational	98.158.135	101.992.679	(3.834.544)	(3,76%)
Lain-lain Others	36.482.420	16.008.986	20.473.434	127,89%
Subtotal	134.640.555	118.001.665	16.638.890	14,10%
Beban dibayar di muka Prepaid expenses				
Kerja sama mitra usaha Collaboration with business partners	19.334.188	3.208.355	16.125.833	502,62%
Asuransi Insurance	11.707.441	29.205.098	(17.497.657)	(59,91%)
Pegawai Employees	10.113.663	24.814.892	(14.701.229)	(59,24%)
Umum General	6.940.539	7.765.609	(825.070)	(10,62%)
Sewa Leases	4.652.231	22.346.127	(17.693.896)	(79,18%)
Pemeliharaan Maintenance	1.263.330	974.611	288.719	29,62%
Lain-lain Others	19.891.860	19.163.903	727.957	3,80%

Tabel Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka
Advances And Prepaid Expenses

(dalam ribuan Rupiah)		(in thousand Rupiah)		
Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Subtotal	73.903.252	107.478.595	(33.575.343)	(31,24%)
Jumlah Total	208.543.807	225.480.260	(16.936.453)	(7,51%)

PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan masih akan diterima tahun 2023 mencapai Rp724,76 miliar, meningkat 11,29% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp651,23 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang masih akan diterima dari pihak berelasi sebesar Rp44,93 miliar.

ACCRUED REVENUES

Accrued revenues in 2023 reached Rp724.76 billion, an increase of 11.29% compared to Rp651.23 billion in 2022. This increase was mainly due to the increase in accrued revenues from related parties of Rp44.93 billion.

Tabel Pendapatan yang Masih Akan Diterima
Accrued Revenues

(dalam ribuan Rupiah)		(in thousand Rupiah)		
Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga - neto Third parties - net	572.269.934	543.670.248	28.599.686	5,26%
Pihak berelasi - neto Related parties -net	152.492.130	107.559.957	44.932.173	41,77%
Jumlah Total	724.762.064	651.230.205	73.531.859	11,29%

PERSEDIAAN

Persediaan tahun 2023 mencapai Rp270,43 miliar, menurun 2,37% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp276,99 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya persediaan suku cadang sebesar Rp3,16 miliar dan bahan bakar sebesar Rp3,11 miliar.

INVENTORIES

Inventories in 2023 reached Rp270.43 billion, a decrease of 2.37% compared to Rp276.99 billion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in spare parts inventories of Rp 3.16 billion and fuel of Rp3.11 billion.

Tabel Persediaan
Inventories

(dalam ribuan Rupiah)		(in thousand Rupiah)		
Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Alat tulis dan barang cetakan Stationery and printing	341.076	188.794	152.282	80,66%
Obat, bahan, dan alat medis Medicines, materials, and equipment	455.367	288.194	167.173	58,01%



Tabel Persediaan
Inventories

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) Others (each below Rp1 billion)	7.461.249	4.467.560	2.993.689	67,01%
Total	281.422.721	284.374.487	(2.951.766)	(1,04%)
Dikurangi: Penyisihan persediaan usang Less: Allowance for inventory obsolescence	(10.994.431)	(7.383.976)	(3.610.455)	48,90%
Neto Net	270.428.290	276.990.511	(6.562.221)	(2,37%)

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Pajak dibayar di muka tahun 2023 mencapai Rp1,19 triliun, meningkat 22,44% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp972,17 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pajak penghasilan lainnya dari entitas anak sebesar Rp213,23 miliar.

PREPAID TAXES

Prepaid taxes in 2023 reached Rp1.19 trillion, an increase of 22.44% compared to Rp972.17 billion in 2022. This increase was mainly due to an increase in other income taxes from subsidiaries of Rp213.23 billion.

Tabel Pajak Dibayar di Muka
Prepaid Taxes

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company				
Pajak pertambahan nilai Value Added Tax	224.505.044	154.235.105	70.269.939	45,56%
Pajak penghasilan Income Tax	149.933.546	159.117.505	(9.183.959)	(5,77%)
Subtotal	374.438.590	313.352.610	61.085.980	19,49%
Entitas anak Subsidiaries				
Pajak pertambahan nilai Value Added Tax	468.322.807	524.525.927	(56.203.120)	(10,72%)
Pajak penghasilan lainnya Other Income Tax	347.526.287	134.298.106	213.228.181	158,77%
Subtotal	815.849.094	658.824.033	157.025.061	23,83%
Total	1.190.287.684	972.176.643	218.111.041	22,44%

ASET LANCAR LAINNYA

Aset lancar lainnya tahun 2023 mencapai Rp100,46 miliar, meningkat 77,29% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp56,66 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan pencatatan giro bank untuk tantiem Direksi yang ditangguhkan.

OTHER CURRENT ASSETS

Other current assets in 2023 reached Rp100.46 billion, an increase of 77.29% compared to Rp56.66 billion in 2022. This increase was due to the postponement of bank demand deposits for Directors' bonuses.

Tabel Aset Lancar Lainnya
Other Current Assets

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset lancar lainnya Other current assets	100.458.674	56.662.961	43.795.713	77,29%

ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar tahun 2023 mencapai Rp98,02 triliun, meningkat 1,34% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp96,73 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tak berwujud-neto sebesar Rp4,34 triliun.

NON-CURRENT ASSETS

Non-current assets in 2023 reached Rp98.02 trillion, an increase of 1.34% compared to Rp96.73 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in net intangible assets of Rp4.34 trillion.

Tabel Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Investasi jangka panjang Long term investments	4.763.566.779	4.118.791.190	644.775.589	15,65%
Properti investasi – neto Investment properties - net	1.380.726.349	1.233.319.427	147.406.922	11,95%
Aset tetap – neto Fixed assets - net	40.513.752.433	45.033.835.147	(4.520.082.714)	(10,04%)
Aset kerjasama operasi – neto Joint operation assets - net	358.909.828	379.887.734	(20.977.906)	(5,52%)
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	454.253.106	453.988.347	264.759	0,06%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	844.098.609	632.879.439	211.219.170	33,37%
Aset tak berwujud – neto Intangible assets - net	46.882.443.268	42.546.542.738	4.335.900.530	10,19%
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	1.348.106.857	1.109.658.955	238.447.902	21,49%
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	1.531.236.928	1.221.507.535	309.729.393	25,36%
Total Aset Tidak Lancar Total non-current assets	98.021.964.701	96.730.410.512	1.291.554.189	1,34%



INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang tahun 2023 mencapai Rp4,71 triliun, meningkat 14,32% dibandingkan dengan tahun 2022 mencapai Rp4,12 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi jangka panjang pada entitas asosiasi Pelindo selama tahun 2023 yang dicatat menggunakan *equity method*.

LONG TERM INVESTMENTS

Long-term investments in 2023 reached Rp4.71 trillion, an increase of 14.32% compared to Rp4.12 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in long-term investment in Pelindo associated entities during 2023 using the equity method.

Tabel Investasi Jangka Panjang
Long-Term Investments

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Investasi pada entitas asosiasi Investments in associated entities	3.981.210.179	3.483.541.212	497.668.967	14,29%
Investasi pada penyertaan saham Investment in share of stock	34.840.893	35.239.244	(398.351)	(1,13%)
Investasi pada surat utang Investment in bonds	692.386.251	600.010.734	92.375.517	15,40%
Total	4.708.437.323	4.118.791.190	589.646.133	14,32%

PROPERTI INVESTASI – NETO

Properti investasi tahun 2023 mencapai Rp1,38 triliun, meningkat 11,59% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,23 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga perolehan jalan dan bangunan sebesar Rp93,34 miliar.

INVESTMENT IN PROPERTY – NET

Investment in property in 2023 reached Rp1.38 trillion, an increase of 11.59% compared to Rp1.23 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in the acquisition price of roads and buildings of Rp93.34 billion.

Tabel Properti Investasi
Investment in Property

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Harga perolehan Acquisition cost				
Tanah Land	863.566.844	824.489.045	39.077.799	4,74%
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	739.347.438	702.192.357	37.155.081	5,29%
Jalan dan Bangunan Roads and buildings	271.611.099	176.269.950	95.341.149	54,09%
Total	1.874.525.381	1.702.951.352	171.574.029	10,08%
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation				
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	(461.946.561)	(437.731.763)	(24.214.798)	5,53%
Jalan dan Bangunan Roads and buildings	(30.325.661)	(30.373.352)	47.691	-0,16%

Tabel Properti Investasi
Investment in Property

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total	(492.272.222)	(468.105.115)	(24.167.107)	5,16%
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Less: Allowance for impairment	(1.526.810)	(1.526.810)	-	0,00%
Nilai buku neto Net book value	1.380.726.349	1.233.319.427	147.406.922	11,95%

ASET TETAP – NETO

Aset tetap neto tahun 2023 mencapai Rp40,51 triliun, menurun 10,04% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp45,03 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya aset tetap pada harga perolehan aset dalam penyelesaian sebesar Rp3,64 triliun.

FIXED ASSETS – NET

Fixed assets - net in 2023 reached Rp40.51 trillion, a decrease of 10.04% compared to Rp45.03 trillion in 2022. This decrease was due to a decrease in fixed assets at the acquisition price of assets in progress of Rp3.64 trillion.

Tabel Aset Tetap
Fixed Assets

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition cost				
Tanah Land	3.502.233.055	3.743.932.670	(241.699.615)	(6,46%)
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	22.271.572.329	20.767.002.876	1.504.569.453	7,25%
Kapal Vessels	5.968.195.726	5.758.866.093	209.329.633	3,63%
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	17.523.534.151	16.649.210.544	874.323.607	5,25%
Instalasi fasilitas pelabuhan Port installation	3.702.807.793	3.676.364.496	26.443.297	0,72%
Jalan dan bangunan Roads and buildings	6.568.012.917	6.266.749.811	301.263.106	4,81%
Peralatan Equipment	1.640.438.078	1.535.155.304	105.282.774	6,86%
Kendaraan Vehicles	191.504.119	177.809.769	13.694.350	7,70%
Emplasemen Emplacement	697.783.812	654.521.177	43.262.635	6,61%
Subtotal	62.066.081.980	59.229.612.740	2.836.469.240	4,79%



Tabel Aset Tetap
Fixed Assets

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset dalam penyelesaian Construction in progress	3.042.787.729	6.679.813.380	(3.637.025.651)	(54,45%)
Total	65.108.869.709	65.909.426.120	(800.556.411)	(1,21%)
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	(24.557.755.971)	(20.841.774.273)	(3.715.981.698)	17,83%
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for impairment	(37.361.305)	(33.816.700)	(3.544.605)	10,48%
Nilai buku neto Net book value	40.513.752.433	45.033.835.147	(4.520.082.714)	(10,04%)

ASET KERJA SAMA OPERASI – NETO

Aset kerja sama operasi – neto tahun 2023 mencapai Rp358,91 miliar, menurun 5,52% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp379,89 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya aset kerjasama operasi pada akumulasi penyusutan sebesar Rp27,37 miliar.

JOINT OPERATION ASSETS – NET

Joint operation assets - net in 2023 reached Rp358.91 billion, a decrease of 5.52% compared to Rp379.89 billion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in joint operating assets with accumulated depreciation of Rp27.37 billion.

Tabel Aset Kerja sama Operasi
Joint Operation Assets

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition Costs				
Tanah Land	4.960.306	-	4.960.306	100,00%
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	772.669.489	772.669.489	-	0,00%
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	86.424.759	86.424.759	-	0,00%
Instalasi fasilitas pelabuhan Port installation	10.504.447	10.504.447	-	0,00%
Jalan dan bangunan Roads and buildings	2.515.554	1.082.111	1.433.443	132,47%
Peralatan Equipment	1.535.821	1.535.821	-	0,00%
Emplasemen Emplacement	4.530.520	4.530.520	-	0,00%
Total	883.140.896	876.747.147	6.393.749	0,73%
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	(524.170.601)	(496.798.946)	(27.371.655)	5,51%

Tabel Aset Kerja sama Operasi
Joint Operation Assets

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for impairment	(60.467)	(60.467)	-	0,00%
Nilai buku neto Net book value	358.909.828	379.887.734	(20.977.906)	(5,52%)

ASET HAK GUNA

Aset hak guna neto tahun 2023 mencapai Rp454,25 miliar, meningkat 0,06% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp453,99 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset hak guna dari hak perolehan kendaraan sebesar Rp22,86 miliar.

RIGHT OF USE ASSETS

Net right of use assets in 2023 reached Rp454.25 billion, an increase of 0.06% compared to Rp453.99 billion in 2022. This increase was due to an increase in right-of-use assets from vehicle acquisition rights of Rp22.86 billion.

Tabel Aset Hak Guna
Right-of-Use Assets

(dalam ribuan Rupiah)

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Hak Perolehan Acquisition Costs				
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	257.523.367	283.428.093	(25.904.726)	(9,14%)
Kapal Vessels	167.568.556	148.030.137	19.538.419	13,20%
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	5.154.195	1.754.274	3.399.921	193,81%
Peralatan Equipment	6.142.286	3.038.404	3.103.882	102,16%
Tanah Land	156.855.775	188.946.426	(32.090.651)	(16,98%)
Kendaraan Vehicles	99.773.246	76.915.310	22.857.936	29,72%
Subtotal	693.017.425	702.112.644	(9.095.219)	(1,30%)
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	(238.764.319)	(248.124.297)	9.359.978	(3,77%)
Nilai buku bersih Net book value	454.253.106	453.988.347	264.759	0,06%



ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset pajak tangguhan tahun 2023 mencapai Rp844,10 miliar, meningkat 33,37% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp632,88 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset pajak tangguhan pada entitas anak sebesar Rp251,14 miliar.

DEFERRED TAX ASSETS

Deferred tax assets in 2023 reached Rp844.10 billion, an increase of 33.37% compared to Rp632.88 billion in 2022. This increase was due to an increase in deferred tax assets in subsidiaries of Rp251.14 billion.

Tabel Aset Pajak Tangguhan
Deferred Tax Assets

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perusahaan Company	213.968.729	253.885.629	(39.916.900)	(15,72%)
Entitas anak Subsidiaries	630.129.880	378.993.810	251.136.070	66,26%
Aset Pajak Tangguhan Deferred tax assets	844.098.609	632.879.439	211.219.170	33,37%

ASET TAKBERWUJUD – NETO

Aset takberwujud tahun 2023 mencapai Rp46,88 triliun, meningkat 10,19% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp42,55 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset takberwujud yang berasal dari aset hak konsesi sebesar Rp2,51 triliun.

INTANGIBLE ASSETS – NET

Intangible assets in 2023 reached Rp46.88 trillion, an increase of 10.19% compared to Rp42.55 trillion in 2022. This increase was mainly due to the increase in intangible assets originating from concession rights assets of Rp2.51 trillion.

Tabel Aset TakBerwujud
Intangible Assets

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aset hak konsesi Concession rights assets	44.839.160.393	42.332.482.771	2.506.677.622	5,92%
Piranti lunak Software application	1.446.934.743	1.386.093.582	60.841.161	4,39%
Lisensi Licenses	93.271.515	93.784.038	(512.523)	-0,55%
Aset takberwujud lainnya Other intangible assets	222.898.942	104.379.824	118.519.118	113,55%
Aset dalam penyelesaian Construction in progress	3.612.121.799	1.649.219.115	1.962.902.684	119,02%
Subtotal	50.214.387.392	45.565.959.330	4.648.428.062	10,20%
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(3.331.944.124)	(3.019.416.592)	(312.527.532)	10,35%
Neto	46.882.443.268	42.546.542.738	4.335.900.530	10,19%

TAKSIRAN TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

Taksiran tagihan restitusi pajak tahun 2023 mencapai Rp1,34 triliun, meningkat 21,49% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,11 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan taksiran tagihan restitusi pajak di Perusahaan sebesar Rp342,73 miliar.

ESTIMATED CLAIMS FOR TAX REFUNDS

Estimated claims for tax refunds in 2023 reached Rp1.34 trillion, an increase of 21.49% compared to Rp1.11 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in the Company's estimated claims for tax refunds of Rp342.73 billion.

Tabel Taksiran Tagihan Restitusi Pajak
Estimated Claims for Tax Refund

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company	1.120.296.351	777.567.550	342.728.801	44,08%
Entitas anak Subsidiaries	227.810.506	332.091.405	(104.280.899)	(31,40%)
Total	1.348.106.857	1.109.658.955	238.447.902	21,49%

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya tahun 2023 mencapai Rp1,53 triliun, meningkat 25,36% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,22 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp500,78 miliar.

OTHER NON-CURRENT ASSETS

Other non-current assets in 2023 reached Rp1.53 trillion, an increase of 25.36% compared to Rp1.22 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in finance lease receivables of Rp500.78 billion.

Tabel Aset Tidak Lancar Lainnya
Other Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Piutang sewa pembiayaan Finance lease receivables	504.781.807	-	504.781.807	100,00%
Piutang pemulihan investasi Investment recovery receivables	278.418.557	80.303.277	198.115.280	246,71%
Uang muka pembelian aset tetap Advances for purchase of fixed assets	277.204.540	535.957.148	(258.752.608)	(48,28%)
Piutang perluasan kawasan industri Industrial area expansion receivables	118.495.097	124.811.321	(6.316.224)	(5,06%)
Pajak final dibayar di muka Prepaid final tax	108.318.331	113.836.681	(5.518.350)	(4,85%)
Uang jaminan Guarantees	48.007.618	34.422.211	13.585.407	39,47%



Tabel Aset Tidak Lancar Lainnya
Other Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Jaminan pelaksanaan Performance guarantee	37.000.000	37.000.000	-	0,00%
Goodwill Goodwill	32.550.784	42.266.304	(9.715.520)	(22,99%)
Biaya transaksi pinjaman sindikasi Syndicated loan transaction costs	-	29.506.875	(29.506.875)	(100,00%)
Piutang pajak Tax receivables	-	28.361.374	(28.361.374)	(100,00%)
Aset tetap tidak produktif Non-productive fixed assets	-	9.922.943	(9.922.943)	(100,00%)
Aset lain-lain Other assets	380.628.973	557.351.735	(176.722.762)	(31,71%)
Dikurangi: Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai Less: Accumulated impairment	(254.168.779)	(372.232.334)	118.063.555	(31,72%)
Total	1.531.236.928	1.221.507.535	309.729.393	25,36%

Liabilitas

Liabilitas tahun 2023 mencapai Rp71,50 triliun, menurun 5,36% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp75,55 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang sebesar Rp2,28 triliun.

Liabilities

Liabilities in 2023 reached Rp71.50 trillion, a decrease of 5.36% compared to Rp75.55 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in long-term liabilities of Rp2.28 trillion.

Tabel Liabilitas
Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas jangka pendek Current Liabilities	18.173.953.550	19.948.603.684	(1.774.650.134)	(8,90%)
Liabilitas jangka panjang Non-Current liabilities	53.325.896.967	55.597.281.447	(2.271.384.480)	(4,09%)
Total liabilitas Total Liabilities	71.499.850.516	75.545.885.131	(4.046.034.615)	(5,36%)

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek tahun 2023 mencapai Rp18,18 triliun, menurun 8,90% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp19,95 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya bagian lancar atas liabilitas jangka panjang dari utang obligasi yang sebesar Rp1,06 triliun.

CURRENT LIABILITIES

Current liabilities in 2023 reached Rp18.18 trillion, a decrease of 8.90% compared to Rp19.95 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in the current portion of long-term liabilities from bonds payable of Rp1.06 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	3.330.172	105.361.831	(102.031.659)	(96,84%)
Utang usaha Trade payables				
Pihak ketiga Third parties	620.890.592	976.563.635	(355.673.043)	(36,42%)
Pihak berelasi Related parties	636.747.827	1.092.012.208	(455.264.381)	-41,69%
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	1.393.628.171	1.594.355.077	(200.726.906)	(12,59%)
Utang pajak Taxes payable	885.558.244	1.025.273.741	(139.715.497)	(13,63%)
Beban akrual Accrued expenses	5.419.485.908	5.273.585.288	145.900.620	2,77%
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long-term liabilities				
Utang obligasi Bonds payable	7.574.312.147	8.637.804.928	(1.063.492.781)	(12,31%)
Utang bank Bank loans	445.526.921	152.606.159	292.920.762	191,95%
Liabilitas sewa Lease liabilities	70.113.816	49.907.726	20.206.090	40,49%
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities				
Pihak ketiga Third parties	465.350.521	855.825.793	(390.475.272)	(45,63%)
Pihak berelasi Related parties	659.009.231	185.307.298	473.701.933	255,63%
Total Liabilitas Jangka Pendek Total current liabilities	18.173.953.550	19.948.603.684	(1.774.650.134)	(8,90%)

PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek tahun 2023 mencapai Rp3,33 miliar, menurun 96,84% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp105,36 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya pinjaman bank jangka pendek pada pihak berelasi sebesar Rp103,11 miliar.

SHORT TERM BANK LOANS

Short-term bank loans in 2023 reached Rp3.33 billion, a decrease of 96.84% compared to Rp105.36 billion in 2022. This decrease was due to a decrease in short-term bank loans to related parties of Rp103.11 billion.



Tabel Pinjaman Bank Jangka Pendek
Short-term Bank Loans

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	3.330.172	2.255.302	1.074.870	47,66%
Pihak berelasi Related parties	-	103.106.529	(103.106.529)	(100,00%)
Total pinjaman bank jangka pendek Total short-term bank loans	3.330.172	105.361.831	(102.031.659)	(96,84%)

UTANG USAHA

Utang usaha tahun 2023 mencapai Rp1,26 triliun, menurun 39,20% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp2,07 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp471,12 miliar.

TRADE PAYABLES

Trade payables in 2023 reached Rp1.26 trillion, a decrease of 39.20% compared to Rp2.07 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in trade payables to related parties of Rp471.12 billion.

Tabel Utang Usaha
Trade Payables

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	620.890.592	976.563.635	(355.673.043)	(36,42%)
Pihak berelasi Related parties	620.890.592	1.092.012.208	(471.121.616)	(43,14%)
Total utang usaha Total trade payables	1.257.638.419	2.068.575.843	(810.937.424)	(39,20%)

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK

Pendapatan diterima di muka jangka pendek tahun 2023 mencapai Rp1,39 triliun, menurun 12,59% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,59 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang sebesar Rp98,87 miliar serta turunnya pendapatan diterima di muka jangka pendek dari pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik sebesar Rp77,56 miliar.

SHORT TERM UNEARNED REVENUES

Short-term unearned revenues in 2023 reached Rp1.39 trillion, a decrease of 12.59% compared to Rp1.59 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in the current portion of long-term unearned revenues of Rp98.87 billion, and a decrease in short-term unearned revenues from land, building, water and electricity concession services of Rp77.56 billion.

Tabel Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Pendek
Short-term Unearned Revenues

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sewa kuartalan Quarterly rent	680.459.940	683.682.059	(3.222.119)	(0,47%)
Pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Land, building, water and electricity business services	324.642.525	402.204.627	(77.562.102)	(19,28%)
Uang untuk diperhitungkan Advances from customers				
Pihak ketiga Third parties	245.192.878	292.643.156	(47.450.278)	(16,21%)
Pihak berelasi Related parties	25.275.606	8.286.359	16.989.247	205,03%
Pendapatan diterima di muka jangka pendek - lainnya Other short-term unearned revenues	45.794.794	36.400.194	9.394.600	25,81%
Subtotal	1.321.365.743	1.423.216.395	(101.850.652)	(7,16%)
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang	72.262.428	171.138.682	(98.876.254)	(57,78%)
Total	1.393.628.171	1.594.355.077	(200.726.906)	(12,59%)

UTANG PAJAK

Utang pajak tahun 2023 mencapai Rp885,56 miliar, menurun 13,63% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,03 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya utang pajak pada entitas anak sebesar Rp142,88 miliar.

TAXES PAYABLES

Taxes payables in 2023 reached Rp885.56 billion, a decrease of 13.63% compared to Rp1.03 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in taxes payables for subsidiaries of Rp142.88 billion.

Tabel Utang Pajak
Taxes Payable

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Induk perusahaan Company	375.201.817	372.032.518	3.169.299	0,85%
Entitas anak Subsidiaries	510.356.427	653.241.223	(142.884.796)	(21,87%)
Utang pajak Taxes payable	885.558.244	1.025.273.741	(139.715.497)	(13,63%)



BEBAN AKRUAL

Beban akrual tahun 2023 mencapai Rp5,42 triliun, meningkat 2,77% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp5,27 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban akrual dari pegawai sebesar Rp226,37 miliar.

ACCRUED EXPENSES

Accrued expenses in 2023 reached Rp5.42 trillion, an increase of 2.77% compared to Rp5.27 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in accrued expenses for employees of Rp226.37 billion.

Tabel Beban Akrual

Accrued Expenses

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pegawai Employees	1.769.464.584	1.543.094.665	226.369.919	14,67%
Kerjasama mitra usaha Partnerships	1.012.776.488	1.023.263.751	(10.487.263)	(1,02%)
Umum General	689.845.064	662.233.036	27.612.028	4,17%
Bunga Interest	372.120.797	379.603.334	(7.482.537)	(1,97%)
Bahan Fuel	351.465.388	239.342.300	112.123.088	46,85%
Pemeliharaan Maintenance	326.517.786	449.258.262	(122.740.476)	(27,32%)
Asuransi Insurance	30.102.165	30.272.043	(169.878)	(0,56%)
Biaya konsesi Concession fees	21.221.922	40.227.983	(19.006.061)	(47,25%)
Lain-lain Others	845.971.714	906.239.914	(60.268.200)	(6,65%)
Total	5.419.485.908	5.273.585.288	145.900.620	2,77%

BAGIAN LANCAR ATAS LIABILITAS JANGKA PANJANG

Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang tahun 2023 mencapai Rp8,09 triliun, menurun 8,49% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp8,84 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya bagian lancar atas liabilitas jangka panjang pada utang obligasi sebesar Rp1,06 triliun.

CURRENT MATURITIES OF LONG TERM LIABILITIES

The current maturities of long-term liabilities in 2023 reached Rp8.09 trillion, a decrease of 8.49% compared to Rp8.84 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in the current portion of long-term liabilities for bonds payable of Rp1.06 trillion.

Tabel Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang

Maturities of Long-Term Liabilities

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Utang obligasi Bonds payable	7.574.312.147	8.637.804.928	(1.063.492.781)	(12,31%)
Utang bank Bank loans	445.526.921	152.606.159	292.920.762	191,95%

Tabel Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang
Maturities of Long-Term Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas sewa Lease liabilities	70.113.816	49.907.726	20.206.090	40,49%
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Total Current Maturities of Long-Term Liabilities	8.089.952.884	8.840.318.813	(750.365.929)	(8,49%)

LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

Liabilitas jangka pendek lainnya tahun 2023 mencapai Rp1,12 triliun, meningkat 7,99% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,04 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek lainnya pada pihak berelasi sebesar Rp473,70 miliar.

OTHER CURRENT LIABILITIES

Other current liabilities in 2023 reached Rp1.12 trillion, an increase of 7.99% compared to Rp1.04 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in other current liabilities with related parties of Rp473.70 billion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
Other Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	465.350.521	855.825.793	(390.475.272)	(45,63%)
Pihak berelasi Related parties	659.009.231	185.307.298	473.701.933	255,63%
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities	1.124.359.752	1.041.133.091	83.226.661	7,99%

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang tahun 2023 mencapai Rp53,33 triliun, menurun 4,09% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp55,60 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar pada utang obligasi sebesar Rp8,57 triliun.

NON CURRENT LIABILITIES

Non-current liabilities in 2023 reached Rp53.33 trillion, a decrease of 4.09% compared to Rp55.60 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in long-term liabilities after deducting the current portion of bonds payable of Rp8.57 trillion.



Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar Long term liabilities – net of current portion				
Utang obligasi Bonds payable	25.549.740.350	34.116.829.197	(8.567.088.847)	(25,11%)
Utang bank Bank loans	13.901.255.263	7.678.666.058	6.222.589.205	81,04%
Liabilitas sewa Lease liabilities	417.609.648	385.228.086	32.381.562	8,41%
Utang lembaga keuangan non bank Loans from non-bank financial institution				
Pihak ketiga Third parties	697.862.861	584.328.133	113.534.728	19,43%
Pihak berelasi Related parties	1.372.013.613	1.160.435.133	211.578.480	18,23%
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	86.843.304	231.128.682	(144.285.378)	(62,43%)
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Long-term unearned revenue	4.192.970.146	4.544.771.276	(351.801.130)	(7,74%)
Liabilitas jangka panjang lainnya Other Non-current liabilities	838.428.454	1.126.588.038	(288.159.584)	(25,58%)
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	6.269.173.328	5.769.306.844	499.866.484	8,66%
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	53.325.896.967	55.597.281.447	(2.271.384.480)	(4,09%)

LIABILITAS JANGKA PANJANG – SETELAH DIKURANGI BAGIAN LANCAR

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar tahun 2023 mencapai Rp39,87 triliun, menurun 5,48% dibandingkan dengan 2022 mencapai Rp42,18 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang pada utang obligasi sebesar Rp8,57 triliun.

LONG TERM LIABILITIES – AFTER DEDUCTING CURRENT PORTION

Long-term liabilities after deducting the current portion in 2023 reached Rp39.87 trillion, a decrease of 5.48% compared to Rp42.18 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in long-term liabilities for bonds payable of Rp8.57 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang-Setelah Dikurangi Bagian Lancar
Long-Term Liabilities - Current Portion

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Utang obligasi Bonds payable	25.549.740.350	34.116.829.197	(8.567.088.847)	(25,11%)
Utang bank Bank loans	13.901.255.263	7.678.666.058	6.222.589.205	81,04%
Liabilitas sewa Lease liabilities	417.609.648	385.228.086	32.381.562	8,41%
Total liabilitas jangka panjang -setelah di bagian jangka panjang Total long-term liabilities -after the long-term portion	39.868.605.261	42.180.723.341	(2.312.118.080)	(5,48%)

UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Utang lembaga keuangan non bank tahun 2023 mencapai Rp2,07 triliun, meningkat 18,63% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,74 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lembaga keuangan non bank pada pihak berelasi sebesar Rp211,58 miliar.

LOANS FROM NON BANK FINANCIAL INSTITUTIONS

Loans from non-bank financial institutions in 2023 reached Rp2.07 trillion, an increase of 18.63% compared to Rp1.74 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in loans from non-bank financial institutions to related parties of Rp211.58 billion.

Tabel Utang Lembaga Keuangan Non Bank
Loans from Non-Bank Financial Institutions

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	697.862.861	584.328.133	113.534.728	19,43%
Pihak berelasi Related parties	1.372.013.613	1.160.435.133	211.578.480	18,23%
Total utang lembaga keuangan non bank Total loans from non-bank financial institutions	2.069.876.474	1.744.763.266	325.113.208	18,63%

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas pajak tangguhan tahun 2023 mencapai Rp86,85 miliar, menurun 62,43% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp231,13 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas pajak tangguhan dari entitas anak.

DEFERRED TAX LIABILITIES

Deferred tax liabilities in 2023 reached Rp86.85 billion, a decrease of 62.43% compared to Rp231.13 billion in 2022. This increase was mainly due to a decrease in deferred tax liabilities in subsidiaries.



Tabel Liabilitas Pajak Tangguhan
Deferred Tax Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Entitas anak Subsidiaries	86.843.304	231.128.682	(144.285.378)	(62,43%)

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

Pendapatan diterima di muka jangka panjang tahun 2023 mencapai Rp4,19 triliun, menurun 7,74% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp4,54 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan diterima di muka jangka panjang dari sewa tanah dan/atau bangunan sebesar Rp247,04 miliar.

LONG TERM UNEARNED REVENUE

Long-term unearned revenue in 2023 reached Rp4.19 trillion, a decrease of 7.74% compared to Rp4.54 trillion in 2022. This decrease was mainly due to an increase in long-term unearned revenue from land and/or building rentals of Rp247.04 billion.

Tabel Pendapatan Diterima di muka Jangka Panjang
Long-Term Unearned Revenue

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Premium JICT JICT Premium	1.729.303.229	1.968.510.521	(239.207.292)	(12,15%)
Sewa diterima di muka - NPCT 1 Advance rental fee - NPCT 1	1.121.591.603	1.170.100.949	(48.509.346)	(4,15%)
Sewa tanah dan/atau bangunan Land and/or building rental	900.357.563	1.147.399.530	(247.041.967)	(21,53%)
Premium TPK Koja TPK Koja Premium	402.163.542	429.898.958	(27.735.416)	(6,45%)
Additional Premium JICT Additional JICT Premium	110.349.400	119.945.000	(9.595.600)	(8,00%)
Tanki Penyimpanan Storage Tank	1.467.237	-	1.467.237	100,00%
Subtotal	4.265.232.574	4.715.909.958	(450.677.384)	(9,56%)
Bagian lancar Current portion	(72.262.428)	(171.138.682)	98.876.254	(57,78%)
Total bagian jangka panjang Total long-term portion	4.192.970.146	4.544.771.276	(351.801.130)	(7,74%)

LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

Liabilitas jangka panjang lainnya tahun 2023 mencapai Rp838,43 miliar, menurun 25,58% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,13 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka panjang lainnya dari pihak berelasi sebesar Rp464,43 miliar.

OTHER LONG TERM LIABILITIES

Other long-term liabilities in 2023 reached Rp838.43 billion, a decrease of 25.58% compared to Rp1.13 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in other long-term liabilities from related parties of Rp464.43 billion.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Lainnya
Other Long-Term Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	833.506.683	657.240.525	176.266.158	26,82%
Pihak berelasi Related parties	4.921.770	469.347.513	(464.425.743)	(98,95%)
Liabilitas jangka panjang lainnya Other long-term liabilities	838.428.454	1.126.588.038	(288.159.584)	(25,58%)

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja tahun 2023 mencapai Rp6,27 triliun, meningkat 8,66% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp5,77 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan program penghargaan masa bakti sebesar Rp230,15 miliar.

EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Employee benefits liabilities in 2023 reached Rp6.27 trillion, an increase of 8.66% compared to Rp5.77 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in the service award program of Rp230.15 billion.

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja
Employee Benefits Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company				
Program pensiun Pension program	712.369.101	630.783.130	81.585.971	12,93%
Program penghargaan masa bakti Gratuity and compensation benefits	1.204.600.114	974.454.474	230.145.640	23,62%
Program kesehatan pensiunan Pension healthcare program	3.415.466.823	3.318.712.560	96.754.263	2,92%
Imbalan kerja jangka panjang lainnya Other long-term employee benefits	400.632.551	383.941.290	16.691.261	4,35%
Subtotal	5.733.068.589	5.307.891.454	425.177.135	8,01%
Entitas anak Subsidiaries				
Program pensiun, penghargaan masa bakti dan imbalan pasca-kerja lainnya Pension program, gratuity and compensation benefits and other post- benefits program	536.104.739	461.415.390	74.689.349	16,19%
Total	6.269.173.328	5.769.306.844	499.866.484	8,66%



EKUITAS

Ekuitas tahun 2023 mencapai Rp46,90 triliun, meningkat 9,56% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp42,80 triliun. Peningkatan tersebut karena pertumbuhan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp2,40 triliun.

EQUITY

Equity in 2023 reached Rp46.90 trillion, an increase of 9.56% compared to Rp42.80 trillion in 2022. This increase was due to growth in appropriated retained earnings of Rp2.40 trillion.

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent entity				
Modal saham Share capital	40.575.584.000	40.575.584.000	-	0,00%
Modal donasi Donation capital	26.825.982	26.825.982	-	0,00%
Tambahan modal disetor Additional paid- in capital	(33.358.048.450)	(33.358.048.450)	-	0,00%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Component	1.466.121	1.466.121	-	0,00%
Selisih nilai transaksi dengan pihak non pengendali Difference in value of transactions with non-controlling interest	836.905.071	836.905.071	-	0,00%
Saldo Laba Retained Earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	34.296.140.473	31.900.794.522	2.395.345.951	7,51%
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	4.964.897.779	4.915.321.447	49.576.332	1,01%
Penghasilan Komprehensif Lain Other comprehensive income	(2.373.018.577)	(3.774.159.697)	1.401.141.120	(37,12%)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk – Neto Equity Attributable to Owners of the Parent Entity - Net	44.970.752.399	41.124.688.996	3.846.063.403	9,35%
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interests	1.870.462.759	1.680.003.779	190.458.980	11,34%
TOTAL EKUITAS TOTAL EQUITY	46.841.215.158	42.804.692.775	4.036.522.383	9,43%

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan operasi Operating revenues	31.018.217.702	29.700.604.135	1.317.613.567	4,44%
Pendapatan konstruksi Construction revenues	2.897.789.567	2.397.701.575	500.087.992	20,86%
Beban operasi Operating expenses	(24.343.231.471)	(23.154.429.191)	(1.188.802.280)	5,13%
Beban konstruksi Construction expenses	(2.897.789.567)	(2.397.701.575)	(500.087.992)	20,86%
Pendapatan operasi lainnya - neto Other operating revenue (expense) - net	310.596.193	568.645.497	(258.049.304)	(45,38%)
LABA USAHA INCOME FROM OPERATIONS	6.985.582.424	7.114.820.441	(129.238.017)	(1,82%)
Pendapatan keuangan Finance income	627.295.432	380.490.270	246.805.162	64,87%
Beban keuangan Finance costs	(2.860.119.853)	(2.571.042.968)	(289.076.885)	11,24%
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi Equity in Income (loss) of Associates	370.377.560	302.615.692	67.761.868	22,39%
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	5.123.135.563	5.226.883.435	(103.747.872)	(1,98%)
Beban pajak final Final tax expense	(515.481.368)	(488.229.302)	(27.252.066)	5,58%
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	4.607.654.195	4.738.654.133	(130.999.938)	(2,76%)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)				
Kini Current	(999.545.702)	(958.337.498)	(41.208.204)	4,30%
Tangguhan Deferred	404.472.770	128.153.222	276.319.548	215,62%
LABA PERIODE BERJALAN INCOME FOR THE PERIOD	4.012.581.263	3.908.469.857	104.111.406	2,66%



Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans - net off tax	9.333.500	823.295.840	(813.961.127)	(98,87%)
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income	108.703.163	87.470.875	21.232.288	24,27%
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will be reclassified to profit or loss				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	(30.153.334)	198.045.650	(173.070.740)	(87,39%)
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge	1.313.257.791	(2.820.468.471)	4.133.726.262	(146,56%)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD	5.413.722.383	2.196.813.751	3.272.038.089	148,94%
Laba Periode Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit for the Period Attributable to:				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	3.822.122.283	3.772.545.951	49.576.332	1,31%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	190.458.980	135.923.906	54.535.074	40,12%
LABA PERIODE BERJALAN INCOME FOR THE PERIOD	4.012.581.263	3.908.469.857	104.111.406	2,66%
Laba Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Comprehensive Profit for the Period Attributable to:				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	5.223.263.403	2.060.889.845	3.217.503.015	156,12%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	190.458.980	135.923.906	54.535.074	40,12%

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah)

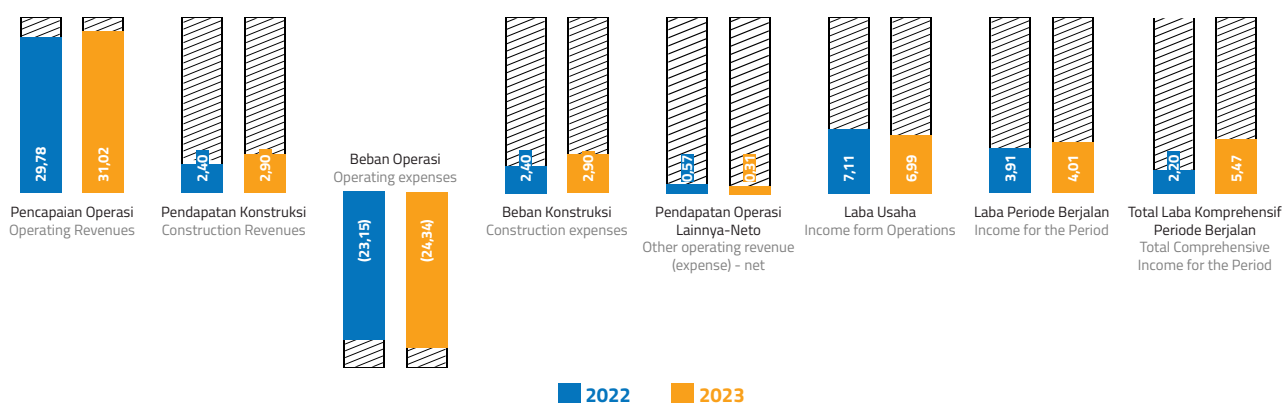
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE CURRENT PERIOD	5.413.722.383	2.196.813.751	3.272.038.089	148,94%
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)	94.198	92.976	1.222	1,31%
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh) DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)	92.990	91.783	1.207	1,32%

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam triliun Rupiah)

(in trillion Rupiah)



Pendapatan Operasi

Pendapatan operasi tahun 2023 mencapai Rp31,02 triliun, meningkat 4,44% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp29,70 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan pendapatan operasi yang berasal dari pelayanan jasa kapal sebesar Rp888,47 miliar, pelayanan terminal petikemas sebesar Rp527,16 miliar serta pelayanan jasa terminal sebesar Rp344,43 miliar.

Operating Revenues

Operating revenues in 2023 reached Rp31.02 trillion, an increase of 4.44% compared to Rp29.70 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in operating revenues originating from ship services of Rp888.47 billion, container terminal services of Rp527.16 billion and terminal services of Rp344.43 billion.



Tabel Pendapatan Operasi
Operating Revenues

(dalam triliun Rupiah)

(in trillion Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pelayanan jasa terminal Terminal services	4.843.880.284	4.499.450.059	344.430.225	7,65%
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Land, building, water and electricity services	3.869.774.935	3.787.257.944	82.516.991	2,18%
Kerjasama dan <i>fee for services</i> Terminal services	986.715.808	1.233.329.761	(246.613.953)	(20,00%)
Pelayanan jasa barang Partnership and fee for services	439.614.764	515.398.786	(75.784.022)	(14,70%)
Pendapatan pas pelabuhan dan terminal Port and terminal entry fee	414.078.774	441.126.796	(27.048.022)	(6,13%)
Jasa maritim dan pengerukan Maritime and Dredging services	264.941.242	405.778.070	(140.836.828)	(34,71%)
Pengusahaan peralatan Equipment Manufacturing	356.232.673	370.796.897	(14.564.224)	(3,93%)
Jasa logistik Logistic services	180.968.551	159.334.977	21.633.574	13,58%
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi Network services and consultant information system	119.849.121	155.363.848	(35.514.727)	(22,86%)
Pelayanan kesehatan Medical services	24.198.978	16.448.305	7.750.673	47,12%
Lain-lain Others	84.651.876	98.645.350	(13.993.474)	(14,19%)
Total	31.018.217.702	29.700.604.135	1.317.613.567	4,44%

Pendapatan Konstruksi

Pendapatan konstruksi tahun 2023 mencapai Rp2,90 triliun, meningkat 20,86% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp2,40 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh capaian *progress* fisik pekerjaan pembangunan aset (investasi) di tahun berjalan. Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perseroan dalam pembangunan terminal Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Fase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya dan Jalan Tol Cibitung - Cilincing. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Construction Revenues

Construction revenues in 2023 reached Rp2.90 trillion, an increase of 20.86% compared to Rp2.40 trillion in 2022. This increase was due to the physical progress achieved in asset development (investment) work in the current year. Construction revenues represents compensation services recognized by the Company for the construction of the Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Phase II terminals, Makassar New Port, Surabaya West Shipping Line and the Cibitung - Cilincing Toll Road. Construction revenues are assessed using the cost method where all costs can be directly attributed to the acquisition value of the asset.

Tabel Pendapatan Konstruksi

(dalam ribuan Rupiah) (in trillion Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan konstruksi Construction revenues	2.897.789.567	2.397.701.575	500.087.992	20,86%

Beban Operasi

Beban operasi tahun 2023 mencapai Rp24,34 triliun, meningkat 5,13% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp23,15 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bahan bakar dan bahan habis pakai sebesar Rp1,00 triliun.

Operating Expenses

Operating expenses in 2023 reached Rp24.34 trillion, an increase of 5.13% compared to Rp23.15 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in fuel and consumables costs of Rp1.00 trillion.

Tabel Beban Operasi

Operating Expenses

(dalam ribuan Rupiah) (in trillion Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kerja sama mitra usaha Partnership	5.801.056.215	6.550.559.411	(749.503.196)	(11,44%)
Pegawai Employees	5.397.062.045	5.801.903.082	(404.841.037)	(6,98%)
Penyusutan dan amortisasi Depreciation and amortization	3.673.836.192	3.567.862.133	105.974.059	2,97%
Umum General	3.733.733.087	3.309.282.651	424.450.436	12,83%
Bahan bakar dan bahan habis pakai Fuels and supplies	3.372.092.843	2.367.251.451	1.004.841.392	42,45%
Pemeliharaan Maintenance	1.801.592.392	1.030.572.335	771.020.057	74,81%
Asuransi Insurance	447.830.815	433.675.572	14.155.243	3,26%
Administrasi kantor Office administration	116.027.882	93.322.556	22.705.326	24,33%
Total	24.343.231.471	23.154.429.191	1.188.802.280	5,13%



Beban Konstruksi

Beban konstruksi tahun 2023 mencapai Rp2,90 triliun, meningkat 20,86% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp2,40 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh capaian *progress* fisik pekerjaan pembangunan aset (investasi) di tahun berjalan.

Construction Expenses

Construction expenses in 2023 reached Rp2.90 trillion, an increase of 20.86% compared to Rp2.40 trillion in 2022. This increase was due to the physical progress achieved in asset development (investment) work in the current year.

Tabel Beban Konstruksi

Construction Expenses

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban konstruksi Construction expenses	2.897.789.567	2.397.701.575	500.087.992	20,86%

Pendapatan Operasi Lainnya - Neto

Pendapatan operasi lainnya-neto tahun 2023 sebesar Rp310,60 miliar, turun 45,38% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp568,65 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan dari lain-lain sebesar Rp199,95 miliar.

Other Operating Income - Net

Other operating income-net in 2023 reached Rp310.60 billion, a decrease of 45.38% compared to Rp568.65 billion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in income from others of Rp199.95 billion.

Tabel Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya

Other Operating Income (Expense)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Amortisasi <i>premium</i> Amortization of premium	154.194.408	161.033.845	(6.839.437)	(4,25%)
Pendapatan denda Income from penalties	42.869.047	92.212.745	(49.343.698)	(53,51%)
Penerimaan aset <i>build, operate, transfer</i> Receipt of build, operate, transfer assets	38.842.587	26.537.083	12.305.504	46,37%
Laba (rugi) selisih kurs - neto Profit (loss) from foreign exchange differences - net	59.054.235	(182.036.994)	241.091.229	(132,44%)
Keuntungan dari transaksi peningkatan kepemilikan saham pada entitas asosiasi Gains from transactions to increase share ownership in associated entities	2.093.130	141.671.533	(139.578.403)	(98,52%)
Rugi penghapusan aset tetap - neto Loss on write-off of fixed assets - net	146.538	(748.245)	894.783	(119,58%)
Beban denda Expenses from penalties	(68.567.655)	(34.792.709)	(33.774.946)	97,07%
Efek penyesuaian IFRC 19 Effect of IFRC 19 adjustments	-	82.855.722	(82.855.722)	(100,00%)
Lain-lain - neto Others - net	81.963.903	281.912.517	(199.948.614)	(70,93%)
Total	310.596.193	568.645.497	(258.049.304)	(45,38%)

Lab a Usaha

Lab a usaha tahun 2023 sebesar Rp6,99 triliun, turun 1,82% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp7,11 triliun. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban operasi dan beban konstruksi.

Operating Profit

Operating profit in 2023 reached Rp6.99 trillion, a decrease of 1.82% compared to Rp7.11 trillion in 2022. This was mainly due to the increase in operating expenses and construction expenses.

Tabel Lab a Usaha
Income From Operations

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan operasi Operating revenues	31.018.217.702	29.700.604.135	1.317.613.567	4,44%
Pendapatan konstruksi Construction revenues	2.897.789.567	2.397.701.575	500.087.992	20,86%
Beban operasi Operating expenses	(24.343.231.471)	(23.154.429.191)	(1.188.802.280)	5,13%
Beban konstruksi Construction expenses	(2.897.789.567)	(2.397.701.575)	(500.087.992)	20,86%
Pendapatan operasi lainnya – neto Other operating income – net	310.596.193	568.645.497	(258.049.304)	(45,38%)
Lab a usaha Income From Operations	6.985.582.424	7.114.820.441	(129.238.017)	(1,82%)

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan tahun 2023 sebesar Rp627,30 miliar, meningkat 64,87% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp380,49 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga deposito sebesar Rp232,31 miliar.

Finance Income

Finance income in 2023 reached Rp627.30 billion, an increase of 64.87% compared to Rp380.49 billion in 2022. This increase was mainly due to an increase in deposit interest income of Rp232.31 billion.

Tabel Pendapatan Keuangan
Finance Income

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga deposito Interest income from deposits	480.169.836	247.860.700	232.309.136	93,73%
Pendapatan jasa giro Interest income on current accounts	127.747.368	104.501.094	23.246.274	22,25%
Pendapatan bunga pinjaman Interest income from loans	19.378.228	28.128.476	(8.750.248)	(31,11%)
Total	627.295.432	380.490.270	246.805.162	64,87%



Beban Keuangan

Beban keuangan tahun 2023 sebesar Rp2,86 triliun, meningkat 11,24% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2,57 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban keuangan yang berasal dari beban bunga pinjaman bank sebesar Rp519,55 miliar.

Finance Costs

Finance costs in 2023 reached Rp2.86 trillion, an increase of 11.24% compared to Rp2.57 trillion in 2022. This increase was mainly due to an increase in finance costs originating from bank loan interest expenses of Rp519.55 billion.

Tabel Beban Keuangan
Finance Costs

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban bunga, amortisasi diskonto dan biaya transaksi Interest expense, discount amortization and transaction costs	1.780.775.179	2.036.128.007	(255.352.828)	(12,54%)
Beban bunga pinjaman bank Interest expense from bank loans	910.572.589	391.025.313	519.547.276	132,87%
Beban bunga provisi konsesi Interest expense from concession provisions	117.504.090	96.208.028	21.296.062	22,14%
Beban bunga sewa Lease interest expenses	34.441.109	30.313.025	4.128.084	13,62%
Beban lain-lain Other expenses	16.826.886	17.368.595	(541.709)	(3,12%)
Total	2.860.119.853	2.571.042.968	289.076.885	11,24%

Bagian Laba Entitas Asosiasi

Bagian laba entitas asosiasi tahun 2023 sebesar Rp370,38 miliar, meningkat 22,39% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp302,62 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan bagian laba entitas asosiasi yang berasal dari BKMS sebesar Rp191,41 miliar.

Share of Associated Entities Profits

The share of associated entities profits in 2023 reached Rp370.38 billion, an increase of 22.39% compared to Rp302.62 billion in 2022. This increase was mainly due to an increase in the share of profits of associated entities originating from BKMS of Rp191.41 billion.

Tabel Bagian Laba Entitas Asosiasi
Share of Associated Entities Profits

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
BKMS	355.909.536	164.502.001	191.407.535	116,36%
Ambapers	13.921.206	3.040.547	10.880.659	357,85%
PTI	11.741.432	2.951.271	8.790.161	297,84%
RSP	11.740.049	10.210.479	1.529.570	14,98%
PHC	8.156.012	(24.198.315)	32.354.327	(133,70%)
JICT	7.917.201	62.413.034	(54.495.833)	(87,31%)
TNU	2.349.252	(7.601.852)	9.951.104	(130,90%)
LNG	535.730	380.592	155.138	40,76%

Tabel Bagian Laba Entitas Asosiasi
Share of Associated Entities Profits

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
BNCT	(736.124)	-	(736.124)	(100,00%)
PCN	(1.927.628)	102.185	(2.029.813)	(1.986,41%)
JBT	(10.258.202)	(14.278.018)	4.019.816	(28,15%)
NPCT1	(28.970.904)	105.093.768	(134.064.672)	(127,57%)
Total	370.377.560	302.615.692	67.761.868	22,39%

Lab a Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan

Lab a sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan tahun 2023 sebesar Rp5,12 triliun, turun 1,98% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp5,23 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya lab a usaha sebesar Rp129,24 miliar.

Profit Before Final Tax and Corporate Income Tax

Profit before final tax and corporate income tax in 2023 was Rp5.12 trillion, a decrease of 1.98% compared to Rp5.23 trillion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in operating profit of Rp129.24 billion.

Tabel Lab a Sebelum Pajak Penghasilan Badan
Profit Before Corporate Income Tax

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Lab a usaha Income From Operations	6.985.582.424	7.114.820.441	(129.238.017)	(1,82%)
Pendapatan keuangan Finance income	627.295.432	380.490.270	246.805.162	64,87%
Beban keuangan Finance costs	(2.860.119.853)	(2.571.042.968)	(289.076.885)	11,24%
Bagian lab a (rugi) entitas asosiasi Share of profit (loss) of associates	370.377.560	302.615.692	67.761.868	22,39%
Lab a sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	5.123.135.563	5.226.883.435	(103.747.872)	(1,98%)

Beban Pajak Final

Beban pajak final tahun 2023 sebesar Rp515,48 miliar, meningkat 5,58% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp488,23 miliar. Peningkatan tersebut kenaikan beban pajak final dari entitas anak sebesar Rp20,18 miliar.

Final Tax Expense

Final tax expense in 2023 was Rp515.48 billion, an increase of 5.58% compared to Rp488.23 billion in 2022. This increase was due to the increased final tax expense from subsidiaries of Rp20.18 billion.



Tabel Beban Pajak Final
Final Tax Expense

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company	340.249.585	333.173.903	7.075.682	2,12%
Entitas anak Subsidiaries	175.231.783	155.055.399	20.176.384	13,01%
Beban pajak final Final Tax Expense	515.481.368	488.229.302	27.252.066	5,58%

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan

Laba sebelum pajak penghasilan badan tahun 2023 sebesar Rp4,61 triliun, turun 2,76% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp4,74 triliun. Penurunan tersebut sejalan dengan turunnya laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan sebesar Rp103,75 miliar.

Profit Before Corporate Income Tax

Profit before corporate income tax in 2023 was Rp4.61 trillion, a decrease of 2.76% compared to Rp4.74 trillion in 2022. This decrease was in line with the decrease in profit before final tax and corporate income tax of Rp103.75 billion.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan
Income Before Corporate Income Tax

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	5.123.135.563	5.226.883.435	(103.747.872)	(1,98%)
Beban pajak final Final Tax Expense	(515.481.368)	(488.229.302)	(27.252.066)	5,58%
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income Before Corporate Income Tax	4.607.654.195	4.738.654.133	(130.999.938)	(2,76%)

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan

Beban pajak penghasilan badan tahun 2023 sebesar Rp595,08 miliar, turun 28,32% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp830,18 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya beban pajak kini.

Corporate Income Tax Benefits (Expenses).

Corporate income tax expenses in 2023 was Rp595.08 billion, a decrease of 28.32% compared to Rp830.18 billion in 2022. This was due to the decrease in the current tax expenses.

Tabel Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan
Corporate Income Tax Benefits (Expenses)

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kini Current	(999.545.702)	(958.337.498)	(41.208.204)	4,30%
Tangguhan Deferred	404.472.770	128.153.222	276.319.548	215,62%
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan Corporate Income Tax Benefit (Expense)	(595.072.932)	(830.184.276)	235.111.344	(28,32%)

Laba Periode Berjalan

Laba periode berjalan tahun 2023 sebesar Rp4,01 triliun, meningkat 2,66% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3,91 triliun. Peningkatan laba sejalan dengan kenaikan pendapatan operasi, pendapatan konstruksi serta pendapatan keuangan.

Profit For The Current Period

Profit for the current period in 2023 reached Rp4.01 trillion, an increase of 2.66% compared to Rp3.91 trillion in 2022. This increase was in line with the increase in operating revenues, construction revenues and finance income.

Tabel Laba Periode Berjalan
Income for the Current Period

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax	4.607.654.195	4.738.654.133	(130.999.938)	(2,76%)
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan Corporate income tax benefit (expense)				
Kini Current	(999.545.702)	(958.337.498)	(41.208.204)	4,30%
Tangguhan Deferred	404.472.770	128.153.222	276.319.548	215,62%
Laba Periode Berjalan Income for the Current Period	4.012.581.263	3.908.469.857	104.111.406	2,66%

Adapun laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2023 mencapai Rp3,82 triliun, meningkat 1,31% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp3,77 triliun. Sedangkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali pada tahun 2023 mencapai Rp190,45 miliar, meningkat 40,12% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp135,92 miliar.

Profit for the current period attributable to owners of the parent entity in 2023 reached Rp3.82 trillion, an increase of 1.31% compared to Rp3.77 trillion in 2022. Profit for the current period attributable to non-controlling interests in 2023 reached Rp190.45 billion, an increase of 40.12% compared to Rp135.92 billion in 2022.



Tabel Periode Berjalan yang dapat Diatribusikan
Attributable in the Current Period

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	3.822.122.283	3.772.545.951	49.576.332	1,31%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	190.458.980	135.923.906	54.535.074	40,12%
Laba Periode Berjalan Profit for the Current Period	4.012.581.263	3.908.469.857	104.111.406	2,66%

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain tahun 2023 mencapai Rp1,41 triliun, meningkat 181,86% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai (Rp1,71) triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dari bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Other comprehensive income in 2023 reached Rp1.41 trillion, an increase of 181.86% compared to (Rp1.71) trillion in 2022. The increase was mainly due to items that would be reclassified to profit or loss from the effective portion of profits, and losses on hedging instruments for cash flow hedging.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain
Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans - net after tax	9.333.500	823.295.840	(813.962.340)	(98,87%)
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Changes in the fair value of financial assets to fair value through other comprehensive income	108.703.163	87.470.875	21.232.288	24,27%
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will be reclassified to profit or loss				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	(30.153.334)	198.045.650	(228.198.984)	(115,23%)
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Effective portion of hedging instrument gains and losses in a cash flow hedge	1.313.257.791	(2.820.468.471)	4.133.726.262	(146,56%)
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	1.401.141.120	(1.711.656.106)	3.112.797.226	(181,86%)

TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

Laba komprehensif periode berjalan tahun 2023 sebesar Rp5,41 triliun, meningkat 146,44% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2,20 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan penghasilan komprehensif lain.

COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE CURRENT PERIOD

Comprehensive profit for the current period in 2023 reached Rp5.41 trillion, an increase of 146.44% compared to Rp2.20 trillion in 2022. This increase was in line with the increase in other comprehensive income.

Tabel Laba Komprehensif Periode Berjalan

Comprehensive Income for the Current Period

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laba periode berjalan Income for the year	4.012.581.263	3.908.469.857	104.111.406	2,66%
Penghasilan komprehensif Lain Other comprehensive income	1.401.141.120	(1.711.656.106)	3.112.797.226	(181,86%)
Total laba komprehensif periode berjalan Comprehensive Income for the Year	5.413.722.383	2.196.813.751	3.216.908.632	146,44%

Adapun laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2023 mencapai Rp5,22 triliun, meningkat 153,45% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp2,06 triliun. Sedangkan laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali pada tahun 2023 mencapai Rp190,46 miliar, meningkat 40,12% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp135,92 miliar.

Comprehensive profit for the current period attributable to owners of the parent entity in 2023 was Rp5.22 trillion, an increase of 153.45% compared to Rp2.06 trillion in 2022. Comprehensive profit for the current period attributable to non-controlling interests in 2023 was Rp190,46 billion, an increase of 40.12% compared to Rp135.92 billion in 2022.

Tabel Laba Komprehensif Periode Berjalan yang dapat Diatribusikan

Attributable Comprehensive Income for the Current Period

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	5.223.263.403	2.060.889.845	3.162.373.558	153,45%
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	190.458.980	135.923.906	54.535.074	40,12%
Laba Komprehensif Periode Berjalan Comprehensive income (Loss) for the year	5.413.722.383	2.196.813.751	3.216.908.632	146,44%

LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar tahun 2023 sebesar Rp94.198, meningkat 1,31% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp92.976. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba periode berjalan. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share in 2023 was Rp94,198, an increase of 1.31% compared to Rp92,976 in 2022. This increase was in line with the increase in profit for the current period. Basic earnings per share is calculated by dividing the current year's profit attributable to the owners of the parent entity by the total weighted average shares outstanding in the year concerned.



Tabel Laba Per Saham Dasar
Attributable Comprehensive Income for the Period

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Labanya per saham dasar (nilai penuh)	94.198	92.976	1.222	1,31%

LABA PER SAHAM DILUSIAN

Labanya per saham dilusian tahun 2023 sebesar Rp92.990, meningkat 1,32% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp91.783. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan labanya periode berjalan. Labanya per saham dilusian dihitung dengan membagi labanya tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun pelaporan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.

DILUTED EARNINGS PER SHARE

Diluted earnings per share in 2023 was Rp92,990, an increase of 1.32% compared to Rp91,783 in 2022. This increase was in line with the increase in profit for the current period. Diluted earnings per share are calculated by dividing the current year's profit attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding in the reporting year, adjusted to assume conversion of dilutive potential ordinary shares.

Tabel Laba Per Saham Dilusian
Diluted Earnings Per Share

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Labanya per saham dilusian (nilai penuh) Diluted earning per share (full value)	92.990	91.783	1.207	1,32%

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
			(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	35.444.805.305	31.671.281.588	3.773.523.717	11,91%
Penerimaan pendapatan bunga Receipt of interest income	147.125.596	132.629.570	14.496.026	10,93%

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya Payment to contractors, suppliers and others	(15.326.373.675)	(14.592.877.976)	(733.495.699)	5,03%
Pembayaran kepada karyawan Payment to employees	(6.373.858.615)	(5.662.070.239)	(711.788.376)	12,57%
Pembayaran pajak penghasilan Payment for income taxes	(1.187.161.753)	(1.396.604.110)	209.442.357	(15,00%)
Penerimaan (pembayaran) pajak Tax receipts (payments).	(179.477.232)	949.549.254	(1.129.026.486)	(118,90%)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	12.525.059.626	11.101.908.087	1.423.151.539	12,82%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
Pencairan investasi jangka pendek Disbursement of short term investments	653.637.459	2.245.190.808	(1.591.553.349)	(70,89%)
Penerimaan dividen Receipt of dividend	469.784.726	366.126.855	103.657.871	28,31%
Hasil penjualan aset tetap Proceeds from sale of fixed assets	3.736.904	37.117.004	(33.380.100)	(89,93%)
Perolehan aset tetap, properti investasi dan aset takberwujud Acquisition of fixed assets, investment property and intangible assets	(7.371.717.546)	(6.511.011.701)	(860.705.845)	13,22%
Penyertaan saham Investment in shares	(40.970.691)	(395.591.435)	354.620.744	(89,64%)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(6.285.529.148)	(4.258.168.469)	(2.027.360.679)	47,61%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
Penerimaan pinjaman Receipt of loans	8.513.257.386	1.983.144.166	6.530.113.220	329,28%
Pembayaran pinjaman bank dan utang obligasi Payment of bank loans and bonds payable	(11.074.117.654)	(4.221.618.857)	(6.852.498.797)	162,32%
Pembayaran bunga Interest payment	(2.854.269.807)	(2.512.723.161)	(341.546.646)	13,59%
Pembayaran dividen Payment of dividends	(1.453.964.849)	(1.316.854.000)	(137.110.849)	10,41%
Pembayaran liabilitas sewa Payments of lease liabilities	(417.597.215)	(138.892.333)	(278.704.882)	200,66%
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	(7.286.692.139)	(6.206.944.185)	(1.079.747.954)	17,40%



Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

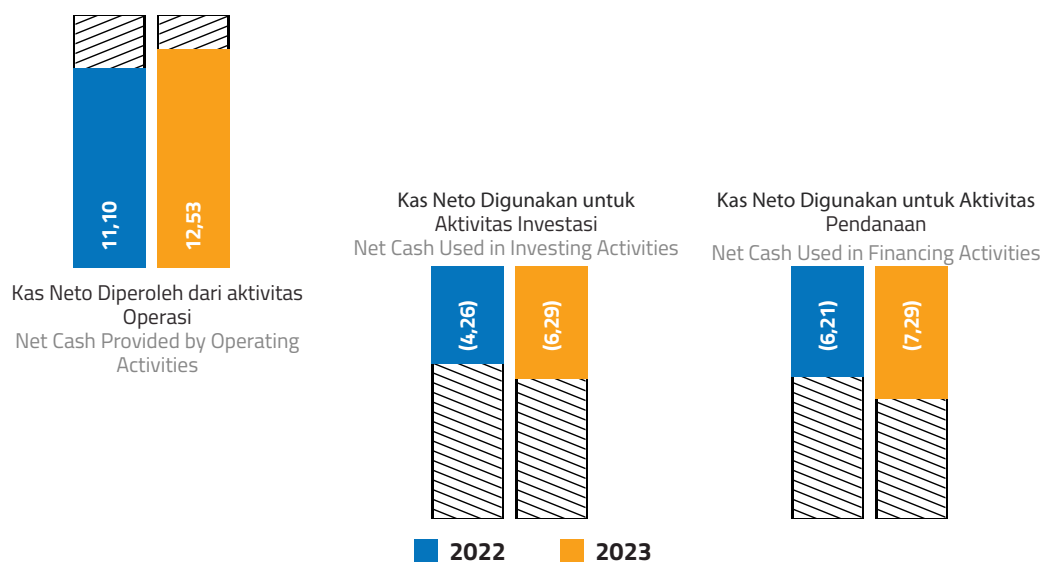
Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	(1.047.161.661)	636.795.433	(1.683.957.094)	(264,44%)
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(59.204.912)	38.456.803	(97.661.715)	(253,95%)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR	13.597.640.823	12.922.388.587	675.252.236	5,23%
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR	12.491.274.250	13.597.640.823	(1.106.366.573)	(8,14%)

Grafik Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam triliun Rupiah)

(in trillion of Rupiah)



Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2023 mencapai Rp12,53 triliun, meningkat 12,82% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp11,10 triliun. Hal tersebut antara lain dipengaruhi peningkatan pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan pembayaran kepada karyawan yang sejalan dengan peningkatan kegiatan operasional Perseroan seperti peningkatan harga BBM, peningkatan kebutuhan perlengkapan operasional serta peningkatan pembayaran kepada karyawan terkait dengan harmonisasi.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2023 mencapai Rp6,29 triliun, meningkat 47,61% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp4,26 triliun. Hal tersebut antara lain dipengaruhi perolehan aset tetap, properti investasi dan aset tak berwujud.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2023 mencapai Rp7,29 triliun, meningkat 17,40% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp6,21 triliun. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran pinjaman bank yakni pelunasan utang sindikasi Bank Mandiri, transaksi *buyback Global Bond* dan pembayaran pokok obligasi dalam negeri serta peningkatan pembayaran dividen dibanding realisasi tahun lalu.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perseroan memiliki kebijakan perlindungan kreditor yang tertuang dalam Pedoman *Good Corporate Governance* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor:HK. 01/13/12/4/TKPT/UTMA/PLND-23 Tanggal 13 Desember 2023. Perseroan menjunjung hak-hak para Kreditor dengan menghormati kewajiban sesuai kontrak dan menyampaikan informasi yang diperlukan yang harus diungkapkan berdasarkan undang-undang, peraturan lain yang berlaku serta *best practice*. Kebijakan umum terkait dengan Perlindungan Kreditor diantaranya:

1. Perseroan mengakui hak-hak para Kreditor yang ditetapkan berdasarkan aturan hukum atau melalui persetujuan bersama dan harus mendorong terjadinya kerjasama yang aktif dalam menciptakan keberlangsungan badan usaha yang sehat secara finansial.
2. Apabila terdapat praktik-praktik tidak sah atau tidak etis, Kreditor dapat menyampaikan perhatiannya langsung kepada Direksi dan tindakan ini tidak merusak hak-hak mereka yang dilindungi undang-undang dan peraturan.

Cash Flows from Operating Activities

Net cash from operating activities in 2023 reached Rp12.53 trillion, an increase of 12.82% compared to Rp11.10 trillion in 2022. This was mainly due to increased payments to contractors, suppliers and payments to employees, in line with the increases in the Company's operational activities, and included increases in fuel prices, increased need for operational equipment and increased payments to employees related to harmonization.

Cash Flows from Investment Activities

Net cash from investment activities in 2023 reached Rp6.29 trillion, an increase of 47.61% compared to Rp4.26 trillion in 2022. This was mainly due to the acquisition of fixed assets, investment property and intangible assets.

Cash Flows From Funding Activities

Net cash from funding activities in 2023 reached Rp7.29 trillion, an increase of 17.40% compared to Rp6.21 trillion in 2022. This was mainly due to an increase in bank loan payments, repayment of Bank Mandiri's syndicated debt, Global Bond buyback transactions and principal payments on domestic bonds, as well as an increase in dividend payments compared to last year's realization.

ABILITY TO PAY DEBT AND COLLECTIBILITY OF RECEIVABLES

ABILITY TO PAY DEBT

The Company has a creditor protection policy as stated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Good Corporate Governance Guidelines No. HK. 01/13/12/4/TKPT/UTMA/PLND-23 Dated December 13, 2023. The Company upholds the rights of Creditors by respecting its obligations according to the contract and conveying the necessary information that must be disclosed based on the law, other applicable regulations and best practices. General policies related to Creditor Protection include:

1. The Company recognizes the rights of Creditors that are determined based on legal regulations or through mutual agreement and encourages active cooperation in creating the sustainability of a financially healthy business entity.
2. If there are illegal or unethical practices, Creditors can report this directly to the Board of Directors and this action will not damage their rights protected by laws and regulations.



Kemampuan Pelindo dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat dari sejumlah indikator, misalnya kondisi keuangan jangka pendek dan kondisi keuangan jangka panjang. Kemampuan membayar hutang jangka pendek tercermin dari rasio likuiditas sedangkan kemampuan membayar hutang jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagai berikut.

Pelindo's ability to fulfill its obligations can be seen from a number of indicators, for example short-term financial conditions and long-term financial conditions. The ability to pay short-term debt is reflected in the liquidity ratio, while the ability to pay long-term debt is reflected in the solvency ratio. Liquidity ratios and solvency ratios are presented as follows.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK (LIKUIDITAS)

Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan rasio kas (*cash ratio*) dan rasio lancar (*current ratio*). Rasio kas diperoleh dari penambahan nilai kas, deposito, dan surat berharga jangka pendek, lalu dibagi dengan nilai liabilitas jangka pendek. Sedangkan rasio lancar diperoleh dari pembagian nilai aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.

ABILITY TO PAY SHORT TERM DEBT (LIQUIDITY)

Liquidity ratios are measured using the cash ratio and current ratio. The cash ratio is obtained from adding the value of cash, deposits and short-term securities, then dividing it by the value of short-term liabilities. Meanwhile, the current ratio is obtained from dividing the value of current assets by short-term liabilities.

Tabel Likuiditas
Liquidity

(dalam %)	(in %)		
Likuiditas Liquidity	2023	2022	Kenaikan/(Penurunan) Increase/Decrease
Rasio Kas Cash Ratio	89,47%	68,00%	21,38%
Rasio Lancar Current Ratio	111,80%	108,00%	4,12%

Rasio kas tahun 2023 mencapai 89,38%, meningkat 21,38% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 68,00%. Demikian pula dengan rasio lancar tahun 2023 mencapai 112,12%, turun 4,12% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 108%. Penurunan rasio kas dan rasio lancar karena penggunaan kas internal Perseroan untuk pelunasan pinjaman Bank.

The cash ratio in 2023 was 89.38%, an increase of 21.38% compared to 68.00% in 2022. While the current ratio in 2023 was 112.12%, an increase of 4.12% compared to 108% in 2022. The increases in the cash ratio and current ratio were due to growth in the Company's financial performance.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS)

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban-kewajibannya khususnya kewajiban jangka panjang. Uraian mengenai rasio solvabilitas dijabarkan sebagai berikut.

ABILITY TO PAY LONG TERM DEBT (SOLVENCY)

The Solvency ratio indicates the Company's ability to pay its obligations, especially long-term obligations. A description of the solvency ratio is as follows.

Tabel Solvabilitas
Solvency

(dalam %)	(in %)		
Solvabilitas Solvency	2023	2022	Kenaikan/(Penurunan) Increase/Decrease
Return on Assets (ROA)	3,39%	3,33%	0,06%
Return on Equity (ROE)	8,95%	9,21%	(0,26%)
Return on Investment (ROI)	6,95	6,95	6,95%
Debt to Equity (DER)	1,06	1,76	(0,70%)

ROA tahun 2023 mencapai 3,39%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 3,33%. ROE tahun 2023 sedikit mengalami penurunan menjadi 8,95%, sedangkan ROI meningkat menjadi 6,95%. DER tahun 2023 mencapai 1,06%, turun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 1,76%. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan laba usaha Perseroan, sedangkan persentase peningkatan laba lebih besar dibanding dengan peningkatan aset.

ROA in 2023 was 3.39%, an increase compared to reached 3.33% in 2022, The ROE in 2023 decreased slightly to 8.95%, while ROI increased to 6.95%. DER in 2023 stood at 1.06%, down compared to 1.76% in 2022, due to the increase in the Company's operating profits, while the percentage increase in profits was greater than the increase in assets.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DARI EFEK YANG DITERBITKAN

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat obligasi, obligasi secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan obligasi yang diterbitkan. Obligasi ini tercatat di Bursa Efek Singapura dan telah meraih peringkat internasional dari berbagai lembaga pemeringkat yaitu *Standard and Poor's* (S&P), *Moody's* dan *Fitch* serta *Pefindo*.

ABILITY TO PAY DEBT FROM ISSUED SECURITIES

The ability to repay debt can also be reflected based on bond ratings, bonds are routinely assessed by rating agencies to support the suitability of the bonds issued. These bonds are listed on the Singapore Stock Exchange and have received international ratings from rating agencies, including *Standard and Poor's* (S&P), *Moody's* and *Fitch* and *Pefindo*.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Obligasi Global

Ability to Pay Global Bonds

Uraian Description	Peringkat Rating	
	2023	2022
Obligasi Global dan Domestik Global and Domestic Bonds	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moody's : Baa2 (<i>Stable</i>) ▪ Fitch : BBB (<i>Stable</i>) ▪ Pefindo : AAA (<i>Stable</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moody's : Baa3 (<i>Positive</i>) ▪ Fitch : BBB (<i>Stable</i>) ▪ Pefindo : AAA (<i>Stable</i>)

Adapun definisi dari setiap peringkat obligasi yang diberikan adalah sebagai berikut.

The definition of each bond rating given is as follows.

Tabel Definisi Peringkat Obligasi Global

Global Bond Rating Definition

Pemeringkat Rating		
Moody's	Baa2	Obligasi dengan risiko moderat dan oleh karenanya memiliki karakteristik spekulatif, peringkat lebih tinggi dibandingkan Baa3. Bonds with moderate risk and therefore speculative characteristics are rated higher than Baa3.
	Baa3	Obligasi dengan risiko moderat dan oleh karenanya memiliki karakteristik spekulatif. Bonds with moderate risk and therefore have speculative characteristics.
Fitch	BBB	Termasuk kedalam kategori peringkat investasi kualitas menengah - risiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan. Included in the investment category of medium quality - medium risk and currently in a satisfactory condition.
Pefindo	AAA	Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya. The obligor's ability to meet its long-term financial commitments, relative to other Indonesian obligors.
	AA	Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. The obligor's ability to meet its long-term financial commitments for these debt securities, compared to other obligors in Indonesia, is very strong.



Tabel Definisi Peringkat Obligasi Global
Global Bond Rating Definition

Pemeringkat Rating	
Outlook	
<i>Stable</i>	Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil peringkat akan stabil. A stable prospect so the rating results are stable.
<i>Positive</i>	Prospek yang berpotensi untuk menaikkan peringkat. Prospects with the potential to raise their rating.
Outlook	
Tanda tambah (+) Plus sign (+)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif kuat dalam masing-masing kategori peringkat. A rating that indicates the ranking is relatively strong in each rating category.
Tanda minus (-) Minus sign (-)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif lemah dalam masing-masing kategori peringkat. A rating that indicates the ranking is relatively weak in each rating category.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Average Collection Period (ACP) merupakan suatu rasio yang menjadi referensi yang menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan oleh Perseroan untuk menerima pembayaran dari pengguna jasa dalam rangka pelunasan piutang usaha. Semakin kecil nilai ACP menggambarkan Perseroan mampu menerima pembayaran pelunasan piutang lebih cepat.

Rasio perputaran piutang tahun 2023 mencapai 16 hari, lebih baik dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 18 hari. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan saldo rata-rata piutang usaha tahun 2023 sebesar Rp84 miliar dibandingkan rata-rata piutang usaha tahun 2022.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The *Average Collection Period (ACP)* is a ratio that shows how long it takes for the Company to receive payments from service users in order to pay off trade receivables. The lower the ACP value is indicates that the Company is able to receive receivables payments more quickly.

The receivables turnover ratio in 2023 was 16 days, an improvement on 18 days in 2022. This was due to a decrease in the average balance of trade receivables in 2023 that reached Rp84 billion compared to the average trade receivables in 2022.

Tabel Kolektibilitas Piutang
Receivable Collectibility

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	Kenaikan/(Penurunan) Increase/Decrease
<i>Average Collection Period (ACP)</i>	Hari Days	16	18	(2)

Kolektibilitas piutang berdasarkan analisis umur piutang usaha masih dalam kategori baik, sehingga dapat mendukung kegiatan Perseroan.

Receivables Collectability based on trade receivables aging analysis is still in the good category, so it can support the Company's activities.

Tabel Analisis Umur Piutang Usaha
Trade Receivables Age Analysis

Analisis Umur Piutang Usaha Account Receivables Age Analysis	2023	2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Belum jatuh tempo Not yet due	462.294.078	263.711.508	198.582.570	75,30%
Lewat jatuh tempo Past due				
1-90 hari 1-90 days	707.857.139	949.936.337	(242.079.198)	(25,48%)
91-180 hari 91-180 days	130.920.890	217.120.498	(86.199.608)	(39,70%)
Lebih dari 180 hari More than 180 days	1.192.880.822	1.155.304.793	37.576.029	3,25%
Subtotal	2.493.952.929	2.586.073.136	(92.120.207)	(3,56%)
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Less: Allowance for impairment	(1.145.789.995)	(1.135.965.935)	(9.824.060)	0,86%
Neto	1.348.162.934	1.450.107.201	(101.944.267)	(7,03%)

Risiko piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai untuk mengalami penurunan nilai adalah kecil karena pelanggan yang diberi kredit memiliki sejarah dan jejak kredit yang baik dengan Pelindo. Penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tak tertagih menurut penilaian Pelindo.

The risk of trade receivables that have not yet matured, and are not impaired in value is small as customers given credit have a good credit history and track record with Pelindo. Special provisions may be made if receivables are deemed uncollectible in Pelindo's assessment.

STRUKTUR MODAL

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2023 yang dimiliki oleh Pelindo adalah 60,39% berasal dari liabilitas, dan 39,61% berasal dari ekuitas. Komposisi ini sedikit mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2022, komposisi struktur modal yang berasal dari liabilitas sebesar 63,83% dan ekuitas sebesar 36,17%.

CAPITAL STRUCTURE

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

The Pelindo capital structure composition in 2023 was made up of 60.39% from liabilities, and 39.61% from equity. This composition changed slightly compared to 2022, when the capital structure composition from liabilities was 63.83% and from equity was 36.17%.



Tabel Rincian Struktur Modal
Capital Structure Details

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2023		2022		Pertumbuhan Growth	
	(Rp)	Komposisi (%)	(Rp)	Komposisi (%) Composition (%)	(Rp)	(%)
Liabilitas jangka pendek Current Liabilities	18.173.953.549	15,35%	19.948.603.684	16,86%	(1.774.650.135)	(8,90%)
Liabilitas jangka panjang (utang berbasis bunga) Long-Term Liabilities (interest-based debt)	53.325.896.967	45,04%	55.597.281.447	46,98%	(2.271.384.480)	(4,09%)
Total liabilitas Total liabilities	71.499.850.516	60,39%	75.545.885.131	63,83%	(4.046.034.615)	(5,36%)
Total ekuitas Total equity	46.896.344.615	39,61%	42.804.692.775	36,17%	4.091.651.840	9,56%
Total liabilitas dan ekuitas Total liabilities and equity	118.396.195.131	100,00%	118.350.577.906	100,00%	45.617.225	0,04%

Struktur modal terkait dengan struktur modal kerja jangka pendek (likuiditas) telah disajikan pada bagian kemampuan membayar hutang dalam Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Dalam mengelola permodalannya, Pelindo senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko. Untuk itu, Perseroan menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Pelindo secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan struktur modal dengan tujuan strategis Perseroan beserta selera risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Pelindo mengelola struktur modal dan hasil pengembalian kepada pemegang saham yang optimal dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan profitabilitas baik masa sekarang maupun yang akan datang, perkiraan arus kas operasi, estimasi belanja modal, dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Capital structure related to short-term working capital structure (liquidity) can be found in the debt repayment capacity section of this Annual Report.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

When managing its capital, Pelindo always considers business continuity and maximizes benefits for shareholders and other stakeholders, and provides adequate returns to shareholders by determining product and service prices commensurate with the level of risk. For this reason, the Company has determined a number of capital ratios in proportion to risk. Pelindo actively and routinely reviews and manages its capital to ensure capital structure and optimal returns for shareholders, by considering the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure, as well as by considering future capital needs. The Board of Commissioners and Board of Directors evaluate the suitability of the capital structure policy with the Company's strategic objectives along with the established risk appetite.

BASIS FOR THE CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT POLICY

Pelindo manages its capital structure and optimal returns to shareholders while taking into account future capital needs and current and future profitability, estimated operating cash flows, estimated capital expenditure, and projected strategic investment opportunities.

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Pelindo melakukan ikatan material untuk investasi barang modal yang disajikan sebagai berikut.

MATERIAL CAPITAL GOODS INVESTMENT COMMITMENTS

Pelindo has commitments for material capital goods investments, which are presented as follows.

Tabel Ikatan Material Investasi Barang Modal
Material Capital Goods Investment Commitments

No.	Jenis Ikatan Type of Commitment	Nama Pihak (<i>Vendor</i>) Pelaksana Program Name of the Party (<i>Vendor</i>) Executing the Program	Mata Uang yang menjadi Denominasi Denominated Currency
1	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Kijing Terminal Port Development	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Atria Swascipta ReKayasa PT Istaka Karya (Persero) PT Yodya Karya (Persero)	Rupiah
2	Makassar New Port	PT PP (Persero) Tbk PT Yodya Karya (Persero) PT Lamong Energi Indonesia PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Rupiah
3	Pengembangan Pelabuhan Benoa (<i>Bali Maritime Tourism Hub</i>) Benoa Harbor (Bali Maritime Tourism Hub) Development	PT PP (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Istaka Karya (Persero) PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Brantas Abipraya (Persero) PT Istana Putra Agung PT Virama Karya (Persero) PT Bina Karya (Persero) PT Citra Diecona PT Yodya Karya (Persero) PT Lapi Ganeshatama Consulting	Rupiah
4	Kawasan Industri Kuala Tanjung Kuala Tanjung Industrial Area	PT PP (Persero) Tbk PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Rupiah
5	Jalan Tol Cibitung - Cilincing Cibitung - Cilincing Toll Ways	PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Waskita Beton Precast PT Virama Karya (Persero) PT Jasa Marga Toll Maintenance PT Jasa Marga Toll Operator	Rupiah
6	Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Construction of North Kalibaru Terminal Phase I	PT PP (Persero) Tbk PT Haskoning Indonesia PT Pengerukan Indonesia PT Prosys Bangun Persada PT Atria Swascipta ReKayasa	Rupiah

TUJUAN IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2023, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan ikatan material sebagai komitmen untuk jaminan keamanan pembayaran dalam rangka peningkatan kapasitas, produktivitas, dan pelayanan untuk membangun dermaga, lapangan penumpukan, serta melengkapi alat bongkar/muat, dan pengerukan.

SUMBER DANA

Sumber pendanaan atas ikatan material investasi barang modal berasal dari dana internal Pelindo dan *commercial loan*/obligasi.

PURPOSE OF MATERIAL CAPITAL GOODS INVESTMENT BONDS

In 2023, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) undertook a material commitment to guarantee payment security to increase capacity, productivity and services to build docks, stacking yards, complete with loading/unloading and dredging equipment.

SOURCE OF FUNDS

Sources of funds for material commitments for capital goods investments come from Pelindo's internal funds and commercial loans/bonds.



LANGKAH PERLINDUNGAN RISIKO MATA UANG

Dalam ikatan yang terjadi pada tahun 2023, tidak terdapat ikatan dalam mata uang asing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CURRENCY RISK PROTECTION MEASURES

For bonds in 2023, there are no bonds in foreign currency in accordance with Bank Indonesia Regulations regarding the obligation to use Rupiah in all transactions within the territory of the Republic of Indonesia.

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi berupa barang modal (*capital expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

INVESTMENTS IN CAPITAL GOODS

Investment in capital goods (*capital expenditure*) is the activity of using funds to purchase a fixed assets or to increase the value of fixed assets that are expected to provide beneficial value in the future.

JENIS DAN NILAI INVESTASI

Investasi barang modal yang terealisasi pada tahun 2023 sebesar Rp4,27 triliun, menurun 34,57% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp6,53 triliun. Adapun rincian per jenis terkait nilai investasi barang modal diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TYPE AND VALUE OF INVESTMENT

Realized capital goods investments in 2023 amounted to Rp4.27 trillion, a decrease of 34.57% compared to Rp6.53 trillion in 2022. The investment type and value of capital goods are shown in the following table:

Tabel Jenis dan Nilai Investasi
Investment Type and Value

(dalam ribuan Rupiah)		(in thousand Rupiah)			
No.	Jenis	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2022	Pertumbuhan	
				Rp	%
1	Bangunan Fasilitas, Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana, Kapitalisasi Bunga Port Building Facilities, Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure, Interest Capitalization	2.750.375	3.084.831	(334.456)	(10,84%)
2	Alat-Alat Fasilitas, Instalasi Fasilitas, Peralatan dan Perlengkapan, Kapal dan Kendaraan Equipment Facilities, Installation Facilities, Equipment and Supplies, Vessels and Vehicles	101.309	271.180	(169.871)	(62,64%)
3	Tanah dan Hak atas Tanah, dan Emplasemen Land and Land Rights, and Emplacements	117.864	82.340	35.524	43,14%
4	Investasi Non Fisik Non Physical Investment	124.484	57.999	66.485	114,63%
Total Investasi Perusahaan Induk Total Parent Company Investment		3.094.132	3.496.350	(402.218)	(11,50%)
5	Investasi Entitas Anak Subsidiary Investment	1.177.421	3.031.849	(1.854.428)	(61,16%)
Total Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investment		4.271.553	6.528.199	(2.256.646)	(34,57%)

BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN, JALAN, BANGUNAN, SARANA DAN PRASARANA, KAPITALISASI BUNGA

Bangunan fasilitas, jalan, bangunan, sarana dan prasarana, kapitalisasi bunga tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2,75triliun, menurun sebesar 10,84% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp3,08 triliun. Hal ini disebabkan belum optimalnya investasi yang terserap dari:

1. Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat Phase 1.
2. Pekerjaan Lanjutan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa.
3. Perkuatan dan pendalaman Dermaga ex. JICT 2.
4. Perbaikan berat dan perkuatan Dermaga TPK Koja.
5. Pembangunan Jalan Akses Timur Pelabuhan Kalibaru, Pekerjaan perkuatan Dermaga Barat JICT.

ALAT-ALAT FASILITAS, INSTALASI FASILITAS, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN, KAPAL DAN KENDARAAN

Alat-alat fasilitas, instalasi fasilitas, peralatan dan perlengkapan, kapal dan kendaraan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp101,31 miliar, menurun sebesar 62,64% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp271,18 miliar. Hal ini disebabkan belum optimalnya investasi yang terserap dari:

1. Pekerjaan penggantian QCC 1,2,3 panamax ke QCC super post panamax, pengadaan 4 Unit RTGC, pengadaan 1 unit *reach stacker*, pengadaan 6 unit terminal *tractor* dan pengadaan 6 unit *chassis*.
2. Pekerjaan *general overhaul engine genset* dan alat bongkar muat milik cabang Pelabuhan Bengkulu (Regional 2).
3. Pengadaan dan pemasangan *power quality equipment* untuk CC 06 dan CC 07 (Regional 4).

TANAH DAN HAK ATAS TANAH, DAN EMPLASEMEN

Tanah dan hak atas tanah, dan emplasemen tahun 2023 terealisasi sebesar Rp117,86 miliar, meningkat sebesar 43,14% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp82,34 miliar.

INVESTASI NON FISIK

Investasi non fisik tahun 2023 terealisasi sebesar Rp124,48 miliar, meningkat sebesar 114,63% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp58,00 miliar. Hal ini disebabkan optimalnya investasi yang terserap dari:

1. Pengembangan program strategis *single ERP*.
2. Infrastruktur dan lisensi untuk pendukung Kantor Pusat dan Regional.
3. Pengembangan aplikasi layanan bisnis (*front end*) – *multiyears*.
4. Pengembangan dan Implementasi SID pada Regional 3.
5. Pengembangan aplikasi layanan internal (*back end*).
6. Pembangunan sistem *front end* dan *back end* PT PHCM.

BUILDING PORT FACILITIES, ROADS, BUILDINGS, FACILITIES AND INFRASTRUCTURE, INTEREST CAPITALIZATION

For building facilities, roads, buildings, facilities and infrastructure, the interest capitalization in 2023 was Rp2.75 trillion, a decrease of 10.84% compared to the realization in Rp3.08 trillion in 2022. This was due to a lack of optimal investment absorbed from:

1. Construction of Kijing Port, West Kalimantan Phase 1.
2. Continued work on dredging the channels and pools of Benoa Harbor.
3. Strengthening and deepening the ex. JICT 2 pier.
4. Heavy repairs and strengthening of TPK Koja Pier.
5. Construction of the East Access Road to Kalibaru Port, JICT West Pier strengthening work.

EQUIPMENT FACILITIES, INSTALLATION FACILITIES, EQUIPMENT AND SUPPLIES, VESSELS AND VEHICLES

Equipment facilities, installation facilities equipment and supplies, vessels and vehicles in 2023 realized Rp101.31 billion, a decrease of 62.64% compared to Rp271.18 billion in 2022. This was due to the lack of optimal investment absorbed from:

1. Work to replace QCC 1,2,3 panamax to QCC super post panamax, procurement of 4 RTGC units, procurement of 1 reach stacker unit, procurement of 6 terminal tractor units and procurement of 6 chassis units.
2. General overhaul work on generator engines and loading and unloading equipment belonging to the Bengkulu Port branch (Regional 2).
3. Procurement and installation of power quality equipment for CC 06 and CC 07 (Regional 4).

LAND AND LAND RIGHTS, AND EMPLACEMENTS

Land and land rights, and emplacements in 2023 realized Rp117.86 billion, an increase of 43.14% compared to Rp82.34 billion in 2022.

NON-PHYSICAL INVESTMENTS

Non-physical investments in 2023 realized at Rp124.48 billion, an increase of 114.63% compared to Rp58.00 billion in 2022. This is due to optimal investment absorbed from:

1. Development of a single ERP strategic program.
2. Infrastructure and licenses for Head Office and Regional Office support.
3. Development of business service applications (front end) – *multiyear*.
4. Development and Implementation of SID in Regional 3.
5. Development of internal service applications (back end).
6. Development of PT PHCM front end and back end systems.



INVESTASI ENTITAS ANAK

Investasi entitas anak tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1,18 triliun, menurun 61,16% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp3,03 triliun. Hal ini disebabkan belum optimalnya investasi yang terserap dari:

1. Pembangunan 1 (satu) set *conveyor belt system* kebutuhan bongkar muat batubara di PTP Cabang Jambi.
2. Pengadaan 1 (satu) unit *new container crane* kebutuhan terminal petikemas Area Panjang termasuk SID dan Supervisi.
3. Pekerjaan terminal curah cair area kereta api di Pelabuhan Kuala Tanjung (KTMT) PT Prima Multi Terminal.
4. Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 tidak terealisasi dari RKAP Tahun 2023.
5. Pengadaan alat pemindai di lingkungan terminal petikemas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 tidak terealisasi dari RKAP Tahun 2023.
6. Pengadaan fasilitas distribusi BBM Tahap II di PT PEL (Jamrud dan Berlian).
7. *Docking* kapal tunda yang dioperasikan oleh PT JAI.
8. Pengadaan 3 (tiga) Unit Kapal Tunda dengan Daya 2 X 2200 HP.

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Dari arahan strategis dan juga inisiatif strategis yang telah disusun untuk tahun 2023, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) harus melakukan kegiatan investasi guna menutup kesenjangan kapasitas dan kapabilitas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) antara kondisi eksisting dengan aspirasi yang ingin dicapai PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Besaran investasi yang dibutuhkan terdiri dari tiga macam investasi yaitu investasi terkait inisiatif strategis, investasi rutin (*business as usual*), dan investasi proyek strategis Perseroan. Investasi rutin bertujuan memenuhi *minimal requirement*, meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja, serta mendukung tujuan administratif. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan terus melanjutkan program investasi yang sudah berjalan, seperti pembangunan terminal. Investasi yang ada juga akan diprioritaskan pada pembangunan Proyek Strategis Perseroan.

SUBSIDIARY INVESTMENTS

Subsidiary investments in 2023 realized Rp1.18 trillion, a decrease of 61.16% compared to Rp3.03 trillion in 2022. This is due to the lack of optimal investment absorbed from:

1. Construction of 1 (one) set of conveyor belt system for coal loading and unloading requirements at PTP Jambi Branch.
2. Procurement of 1 (one) unit of new container crane for the Panjang Area container terminal needs including SID and Supervision.
3. Work on the liquid bulk terminal in the railway area at Kuala Tanjung Port (KTMT) PT Prima Multi Terminal.
4. Development of the Kuala Tanjung Industrial Area up to QIV 2023 was not realized in the 2023 RKAP.
5. Procurement of scanning equipment in the container terminal up to QIV 2023 was not realized in the 2023 RKAP.
6. Procurement of Phase II fuel distribution facilities at PT PEL (Jamrud and Berlian).
7. Docking of tugboats operated by PT JAI.
8. Procurement of 3 (three) Tugboat Units with 2 X 2200 HP Power.

PURPOSE OF CAPITAL GOODS INVESTMENTS

From the strategic directives and initiatives prepared for 2023, Pelindo must carry out investment activities to close the gap in Pelindo's capacity and capability between its existing condition and the aspirations that Pelindo wants to achieve. The amount of investment required consists of three types, namely investments related to strategic initiatives, routine investments (*business as usual*), and investments in the Company's strategic projects. Routine investments are required to meet minimum requirements, improve work safety and security, and support administrative goals. Pelindo will continue with ongoing investment programs, such as terminal construction. Existing investments will also be prioritized for the development of the Company's Strategic Projects.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

RINCIAN MASALAH YANG TIMBUL SELAMA TAHUN BUKU YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA

Sampai dengan Tahun 2023, kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group dapat bertahan di tengah dinamika tantangan eksternal dan domestik. Sejumlah tantangan eksternal dan domestik yang mempengaruhi kinerja operasional dan finansial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selama Tahun 2023 antara lain:

1. Permasalahan Lahan dan Penyelesaian Ganti Nama dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pasca Penggabungan

Hingga akhir Tahun 2023, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah berhasil memperoleh sebanyak 427 Surat Keterangan Bebas (SKB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target sejumlah 429 SKB BPHTB di seluruh Regional. Sedangkan untuk proses ganti nama, terdapat total lebih kurang 599 sertifikat yang akan diproses dimana progres sampai dengan saat ini yaitu telah terbit 597 sertifikat atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses ganti nama yakni adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana Pelindo telah mengajukan Permohonan Pembebasan PNBP. Atas permohonan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah memberikan Surat Tanggapan terkait Permohonan Pembebasan PNBP atas Pengurusan Ganti Nama Sertifikat Tanah yang terdaftar atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dalam tanggapannya, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tidak diberikan pembebasan pengenaan PNBP. Namun, permohonan keringanan PNBP yang diajukan oleh PT Pelindo (Persero) disarankan untuk diberikan penundaan atau pengangsuran dengan pertimbangan *going concern*, namun tetap harus membayarkan PNBP.

Atas keputusan ini, Pelindo akan melakukan proses pembayaran PNBP yang kemudian dilanjutkan dengan proses ganti nama yang diharapkan dapat selesai sebelum 1 Oktober 2023, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi yang intensif dengan Kementerian ATR/BPN. Tindak lanjutnya, telah dilaksanakan penandatanganan MoU dengan Kementerian ATR/BPN dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan aset tanah milik Pelindo.

2. Penyelesaian Amandemen atas Perizinan dan Konsesi

Sebagai bagian dari penyelesaian administrasi Pasca Penggabungan, Pelindo telah diamanahkan untuk menyelesaikan amandemen ataupun novasi atas beberapa perizinan dan konsesi Perusahaan diantaranya

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

Up until the the Annual Report was completed, no important events after the date of the accountant's report occurred, so there is no information to report on their impact on future business performance and risks.

DETAILS OF PROBLEMS ARISING DURING THE FISCAL YEAR THAT AFFECTED BUSINESS ACTIVITIES

In 2023, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group's performance survived despite the dynamics of external and domestic challenges. The external and domestic challenges that affected the operational and financial performance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) during 2023 included:

1. Land Issues and Settlement of Name Changes and Fees for Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) Post-Merger

Until the end of 2023, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) had obtained 427 Free Certificates (SKB) for Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) from a target of 429 BPHTB SKBs throughout the regionals. For the name change process, there were approximately 599 certificates to be processed, where to date 597 certificates have been issued in the name of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

One of the problems that arose in the name change process was the obligation to make payments for Non-Tax State Revenue (PNBP) where Pelindo submitted an Application for PNBP Exemption. Based on this request, the Ministry of ATR/BPN provided a Response Letter regarding the Request for PNBP Exemption for the Process of Changing the Name of Land Certificates registered in the name of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). In this response, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) was not granted exemption from PNBP imposition. However, it was recommended that the request for PNBP relief submitted by PT Pelindo (Persero) be given a postponement or installments with *going concern* considerations, but they still have to be paid by PNBP.

Based on this decision, Pelindo carried out the PNBP payment process, and continued with the name change process for completion before October 1, 2023, so intensive coordination was needed with the ATR/BPN Ministry. As a follow-up, an MoU was signed with the Ministry of ATR/BPN to accelerate the resolution of Pelindo's land asset problems.

2. Completion of Amendments to Permits and Concessions

As part of the Post-Merger administrative settlement, Pelindo has been mandated to complete amendments or innovations to several Company permits and concessions including Environmental Permits and Port Concession



Perizinan Lingkungan serta Perjanjian Konsesi Pelabuhan. Pada tanggal 13 September 2023, telah dilakukan Penandatanganan 8 (delapan) Addendum Perjanjian Konsesi Pada Pelabuhan Eksisting antara Pelindo dengan 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak. Saat ini sedang dilakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut untuk penyesuaian 3 (tiga) perjanjian, yakni Perjanjian Konsesi Kuala Tanjung, Kalibaru, dan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Sedangkan untuk amandemen Perizinan Lingkungan, amandemen ini direncanakan untuk dilakukan dalam beberapa *batch*, dimana untuk *batch* 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dengan total 96 lokasi telah selesai proses pembahasan dan penyusunan *final draft* antara Pelindo dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selanjutnya akan dilakukan penandatanganan amandemen, dimana 22 dokumen sudah dalam tahap final proses dan validasi PTSP Kementerian KLHK, 3 dokumen sudah diajukan ke Kementerian KLHK namun belum memiliki persetujuan Teknis (Pertek) Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dan 71 cabang masih dalam proses melengkapi dokumen persetujuan teknis (Pertek) Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

3. Penurunan Arus Petikemas Internasional

Penurunan *throughput* petikemas sudah terjadi sejak akhir tahun lalu disebabkan karena berkurangnya permintaan petikemas secara global. Hal ini berdampak pada penurunan *throughput* petikemas internasional Pelindo baik ekspor maupun impor bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini didasari oleh pelemahan ekonomi global serta penurunan daya beli masyarakat khususnya di China dan Uni Eropa. Penurunan arus petikemas internasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama terjadi khususnya di area Tanjung Priok dan Semarang. Di sisi lain, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, terdapat peningkatan arus petikemas domestik yang menunjukkan tren positif pada periode saat ini bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sehingga secara total, *throughput* petikemas Pelindo Tahun 2023 tercapai 17,66 juta TEUs atau tercapai 99,96% dari RKAP.

4. Harga Bahan Bakar Minyak

Pada Tahun 2023 tercatat rata-rata harga solar industri sampai dengan bulan Desember 2023 mencapai rentang antara Rp21.150 hingga Rp24.650 dan secara rata-rata harga BBM sepanjang tahun 2023 sebesar Rp22.745 meningkat dibanding rata-rata harga BBM 2022 sebesar Rp20.478. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ini kembali mempengaruhi biaya operasional sehingga meningkatkan beban operasional Perusahaan. Dalam memitigasi hal

Agreements. On September 13, 2023, 8 (eight) Addendum to Concession Agreements for Existing Ports were signed between Pelindo and 5 (five) Technical Implementation Units (UPT) within the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation. These included the Belawan Main Port Authority Office, the Port Authority Office Tanjung Priok Main, Tanjung Perak Main Port Authority Office, Makassar Main Port Authority Office, and Pontianak Class II Harbormaster and Port Authority Office. Currently, further studies and discussions are being carried out to adjust 3 (three) agreements, namely the Kuala Tanjung, Kalibaru Concession Agreement, and the West Surabaya Shipping Route (APBS).

Meanwhile, for the Environmental Licensing amendment, this amendment is planned to be carried out in several batches, where for batches 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 covering a total of 96 locations, the discussion process and preparation of the final draft between Pelindo and the Ministry of Environment and Forestry has signed the amendment, with 22 documents in the final stages of processing and validation by PTSP Ministry of Environment and Forestry, 3 documents have been submitted to the Ministry of Environment and Forestry but do not yet have Technical (Pertek) approval for Waste Water Quality Standards (BMAL) and 71 branches are still in the technical approval documents (Pertek) process for Waste Water Quality Standards (BMAL) and Approval of Conformity for Marine Spatial Utilization Activities (PKKPRL).

3. Decline in International Container Traffic

A decline in container throughput has occurred since the end of last year due to reduced demand for containers globally. This has impacted Pelindo's international container throughput, both for exports and imports, when compared to the previous year. This is mainly due to the weakening global economy and the decline in people's purchasing power, especially in China and the European Union. The decline in international container traffic compared to the previous year in the same period occurred especially in the Tanjung Priok and Semarang areas. On the other hand, in line with national economic growth, there was an increase in domestic container traffic, which shows a positive trend in the current period when compared to the same period the previous year. So in total, Pelindo's container throughput in 2023 reached 17.66 million TEUs or 99.96% of the RKAP.

4. Fuel Prices

In 2023, the average industrial diesel price until December 2023 was in a range of between Rp21,150 to Rp24,650 and the average fuel price throughout 2023 was Rp22,745, an increase compared to Rp20,478 in 2022. This increase in fuel prices again impacted operational costs, by increasing the Company's operational expenses. To mitigate this, Pelindo has taken strategic steps to implement fuel surcharges, especially for marine services, in coordination

tersebut, Pelindo telah mengambil langkah strategis untuk menerapkan *fuel surcharge* khususnya untuk layanan *marine* dengan berkoordinasi dan telah disepakati bersama dengan Asosiasi dan Pelanggan. Penerapan ini dilakukan dengan mengikuti harga bahan bakar industri yang telah ditetapkan Pemerintah.

PROSPEK USAHA

Tahun 2024 akan diwarnai oleh tantangan global, proyeksi Internasional Monetary Fund (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,9%, dipicu oleh perang di Ukraina, inflasi tinggi, dan kenaikan suku bunga. IMF memperkirakan inflasi global akan tetap tinggi pada tahun 2024, sebesar 4,1%. Dari sisi arus petikemas global, *Container Trade Statistics* (CTS) memproyeksikan arus petikemas global sebesar 3,5% pada tahun 2024 dan 4,0% pada tahun 2025.

Selain tantangan global, Indonesia menghadapi tantangan domestik khusus pada tahun 2024, di antaranya pemilu presiden dan legislatif yang akan digelar pada tahun 2024 dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan ekonomi yang selanjutnya dapat memengaruhi keputusan investasi dan belanja konsumen, kenaikan harga pangan dan energi global dapat menyebabkan inflasi di Indonesia meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 yang disebabkan meningkatnya belanja pemerintah untuk persiapan pemilu dan pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan beban utang negara, serta Rupiah diperkirakan berpotensi melemah terhadap dolar AS pada tahun 2024 sehingga dapat menyebabkan harga barang-barang impor menjadi lebih mahal dan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diproyeksikan dalam kisaran 4,7%-5,5%

Untuk kargo non petikemas, pasar arus barang domestik masih memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan pada saat ini Pelindo hanya memiliki pangsa pasar sebagian kecil dari pasar nasional. Pelindo dapat melakukan kerjasama dalam beberapa skema dengan pelabuhan non petikemas yang terdiri dari pelabuhan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan pelabuhan milik Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah.

Sumber:

1. *World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund*, Januari 2024
2. *Container Shipping Market Overview and Outlook Q4 2023 - Bimco*
3. *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Februari 2024
4. *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2023*, Bank Indonesia, Januari 2024

and mutual agreement with the Association and Customers. This was carried out by following the industrial fuel prices set by the Government.

BUSINESS PROSPECTS

2024 will be marked by many global challenges, and the International Monetary Fund (IMF) projects that global economic growth will slow to 2.9%, triggered by the war in Ukraine, high inflation and rising interest rates. The IMF estimates that global inflation will remain high in 2024, at 4.1%. In terms of global container traffic, *Container Trade Statistics* (CTS) projects global container traffic will be 3.5% in 2024 and 4.0% in 2025.

As well as the global challenges, Indonesia also faces special domestic challenges in 2024, including the presidential and legislative elections which will be held in 2024, which can give rise to political and economic uncertainty and can further influence investment decisions and consumer spending, rising global food and energy prices can cause inflation in Indonesia, increased and reduced people's purchasing power, and slower economic growth, the government budget deficit is expected to increase in 2024 due to increased spending for election preparations and infrastructure development that will increase the state debt burden, and the Rupiah is predicted to weaken against the US dollar in 2024, which could cause the price of imported goods to become more expensive and increase production costs for companies. Based on this, Indonesia's economic growth in 2024 is projected to be in the range of 4.7%-5.5%

For non-container cargo, the domestic goods traffic market still has enormous potential as currently Pelindo only has a small market share of the national market. Pelindo can collaborate in several schemes with non-container ports, including the Special Terminal (Tersus)/Self Use Terminal (TUKS) ports and ports belonging to Government Ministries/Agencies (K/L).

Source:

1. *World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund*, January 2024
2. *Container Shipping Market Overview and Outlook Q4 2023 - Bimco*
3. *Dynamics of Indonesia's Economic Growth in 2023 and Projected Challenges in 2024*, Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, February 2024
4. *QIV 2023 Monetary Policy Report*, Bank Indonesia, January 2024



Dalam menghadapi tahun 2024, Pelindo melakukan analisis secara internal untuk mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang dapat dicapai dengan berbekal keunggulan yang dimiliki. Pelindo memiliki beberapa kekuatan internal yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan bisnis pelabuhan di Indonesia, seperti portfolio yang terdiversifikasi, menguasai pasar petikemas di Indonesia, dan memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan *transshipment hub*. Namun, untuk dapat melakukan perencanaan strategi dan mencapai sasaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2021-2025, Perseroan tidak cukup mengandalkan kekuatan internalnya saja tetapi juga mengkalkulasi faktor eksternal yang menjadi ancaman sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan guna keberlangsungan Perseroan, sehingga perlu dilakukan Analisis Lingkungan Bisnis Perseroan dengan menggunakan *framework Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT)*. Analisis SWOT adalah bagian integral setiap proses perencanaan strategis dalam menangkap potensi dan memetakan hambatan yang ada. Analisis mencakup lingkungan internal Perseroan yang akan menghasilkan *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), sedangkan analisis eksternal akan menghasilkan *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman).

To face 2024, Pelindo conducted an internal analysis to identify business opportunities that can be achieved armed with the advantages it has. Pelindo has several internal strengths that can be used as a basis for developing the port business in Indonesia, such as a diversified portfolio, control of the container market in Indonesia, and having a strategic location to become a *transshipment hub*. However, to carry out the strategic planning and achieve the targets of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2021-2025, the Company cannot just rely on its internal strengths but also calculates external factors, such as threats and opportunities that can be optimized for the Company's sustainability, so to carry out an Environmental Analysis the Company uses the *Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT)* framework. The SWOT analysis is an integral part of the strategic planning process in capturing potential and mapping existing obstacles. The internal analysis will produce strengths and weaknesses, while the external analysis will produce opportunities and threats.

Tabel Analisis SWOT PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2021-2025
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) SWOT Analysis for 2021-2025

Strengths	Weaknesses
<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas dan Kendali Jaringan, Serta Pangsa Pasar Petikemas <ol style="list-style-type: none"> a. Jangkauan jaringan pelabuhan yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. b. Kendali strategis lebih baik secara nasional melalui adanya perencanaan keseluruhan untuk jaringan dan investasi aset. c. Menguasai pasar petikemas Indonesia secara dominan. 2. Kelengkapan Jasa Kepelabuhan dan Portofolio Terdiversifikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Rantai jasa usaha yang lengkap di bisnis kepelabuhan, memiliki 4 (empat) klaster yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Petikemas ▪ Non Petikemas ▪ <i>Logistik and Hinterland Development</i> ▪ <i>Marine, Equipment and Port Services</i> b. Memiliki portfolio yang terdiversifikasi di luar bisnis kepelabuhan. 3. Strategic Port <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan <i>transshipment hub</i>. 4. Stakeholder Relation <ol style="list-style-type: none"> a. Dukungan aspek legalitas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan. 5. Business Experience Pengalaman dan rekam jejak dalam pelaksanaan aktivitas pelabuhan (<i>port know-how</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gap pengembangan SDM dan Organisasi <ol style="list-style-type: none"> a. Kecepatan unit kerja untuk beradaptasi dengan perubahan model bisnis baru yang masih lambat. b. Kompetensi SDM belum merata untuk semua pelabuhan ketika integrasi dilakukan. 2. Gap Teknologi Penerapan teknologi yang terintegrasi untuk mendukung proses operasional masih terbatas. 3. Pangsa Pasar Non Petikemas (NPK) Penguasaan pangsa pasar muatan non petikemas yang masih rendah. 4. Gap Operasi <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat beberapa terminal yang belum termanfaatkan secara optimal. b. Terdapat kesenjangan dalam standarisasi proses bisnis antar pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 5. Gap Kapabilitas Bisnis Kapabilitas dan kemampuan layanan di segmen logistik, <i>hinterland development</i>, <i>marine</i>, serta <i>port services</i> belum memiliki perkembangan yang baik.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Network Area and Control, and Container Market Share <ol style="list-style-type: none"> a. The wide reach of the port network throughout Indonesia; b. Better strategic control nationally through overall planning for network and asset investments; and c. Dominates the Indonesian container market. 2. Completeness of Port Services and a Diversified Portfolio <ol style="list-style-type: none"> a. A complete business service chain in the port business with 4 (four) clusters: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Containers ▪ Non Containers ▪ Logistics and Hinterland Development Marine, Equipment and Port Services b. Memiliki portfolio yang terdiversifikasi di luar bisnis kepelabuhan. 3. Strategic Port
A portfolio outside the port business. 4. Stakeholder Relation
Support for high legality aspects in every business activity carried out. 5. Business Experience
Experience and track record in carrying out port activities (port know-how). | <ol style="list-style-type: none"> 1. HC and Organizational development Gap <ol style="list-style-type: none"> a. The speed of work units must adapt to changes in new business models is still slow. b. HC competencies are not evenly distributed accross all ports when integration was carried out. 2. Technology Gap
The application of integrated technology to support operational processes is still limited. 3. Non-container market share (NPK)
non petikemas yang masih rendah. 4. Operation Gap <ol style="list-style-type: none"> a. There are several terminals not being used optimally. b. There is a gap in the standardization of business processes between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ports. 5. Business Capability Gap
Service capabilities and abilities in the logistics, hinterland development, marine and port services segments have not been developed well. |
|--|--|

Opportunities

Threats

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi/Program Pemerintah
Untuk pengembangan infrastruktur maritim dan intensifikasi program pemerintah di bidang maritim berpotensi mendukung rencana integrasi Pelindo. 2. Potensi Pengembangan Layanan dan Rantai Nilai Kepelabuhan <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan penawaran jasa pelabuhan yang lebih terintegrasi dengan hadirnya layanan di segmen logistik, <i>hinterland development</i>, <i>marine</i>, serta <i>port services</i> pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero). b. Peningkatan sinergi dengan BUMN lain di segmen transportasi pelayaran dan logistik. 3. Pemanfaatan Teknologi
Potensi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi jasa layanan kepelabuhan. 4. Strategic Partnership
Peningkatan kerjasama usaha dengan mitra strategis dan strategi aliansi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. Ketidakpastian ekonomi global dan nasional. b. Makro ekonomi Indonesia terdampak oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. c. Volatilitas nilai Rupiah. 2. Entry Barriers yang Semakin Rendah
Pemilik barang, pelaku industri dan Pemerintah Daerah yang membuka dan melakukan operasi pelabuhan sendiri, serta dapat ber-<i>partner</i> dengan operator pelabuhan dari luar negeri. 3. Konektivitas Maritim
Tingkat konektivitas maritim nasional yang masih rendah, sehingga belum terwujudnya <i>network</i> maritim yang terintegrasi. 4. Integrasi Multimoda dan Integrasi Hinterland yang Masih Rendah
Integrasi multimoda dan integrasi <i>hinterland</i> yang masih rendah dan lebih banyak bergantung pada transportasi jalur darat. |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Government Vision/Program
The development of maritime infrastructure and the intensification of government programs in the maritime sector have the potential to support Pelindo's integration plans. 2. Potential for Port Services and Value Chain Development <ol style="list-style-type: none"> a. Developing a more integrated port service offering with the presence of services in the logistics, hinterland development, marine and port services segments at PT Pelabuhan Indonesia (Persero). b. Increased synergy with other SOEs in the shipping transportation and logistics segments. 3. Use of Technology
Potential use of technology and digitalization to increase the effectiveness and efficiency of port services. 4. Strategic Partnerships
Increased business collaboration with strategic partners and alliance strategies. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Economic Recovery <ol style="list-style-type: none"> a. Global and national economic uncertainty. b. Indonesia's macroeconomy is affected by slowing world economic growth. c. Volatility of the Rupiah. 2. Entry Barriers Are Getting Lower
Goods owners, industry businesses and regional governments can open and carry out their own port operations, and can partner with port operators from overseas. 3. Maritime Connectivity
The level of national maritime connectivity is still low, and an integrated maritime network has not yet been realized. 4. Low Multimodal Integration and Hinterland Integration
Multimodal integration and hinterland integration are still low and depend more on land transportation. |

Sumber: Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025, Analisis BCG
Source: Company Long-Term Plan (RJPP) 2021-2025, BCG Analysis

Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan menilai bahwa kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*) yang dimiliki oleh Perseroan melebihi kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Perseroan optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Perseroan memiliki prospek usaha yang baik yang juga didukung oleh kekuatan-kekuatan yang dimiliki Perseroan.

Based on the above, the Company assessed that the Company's strengths and opportunities outweighed the existing weaknesses and threats. The Company is optimistic that it can continue to improve its performance both in the short and long term. In other words, the Company has good business prospects which are also supported by the Company's strengths.



Pada tahun 2024, Perseroan memasuki fase *Business Expansion and Partnership* dengan mulai berfokus pada inisiatif pengembangan bisnis melalui *Strategic Partnership*, maupun kerjasama dan kolaborasi dengan pelaku logistik BUMN dan swasta. Salah satu prospek bisnis yang akan menjadi target Perseroan adalah potensi layanan petikemas *international transshipment* hub di selat Malaka. Total volume petikemas yang melalui Selat Malaka mencapai 64 juta TEUs dengan 78% nya merupakan kargo *transshipment* (berdasarkan data 2021, Roland Berger). Selaras dengan fase *Business Expansion and Partnership*, inisiatif strategis yang akan mulai dilakukan baik pada tahap perencanaan maupun tahap eksekusi pada tahun 2024 antara lain:

- 1. Inisiatif Strategis Tahap Perencanaan**
 - a. Perencanaan ekspansi regional di bisnis pelabuhan.
 - b. Eksplorasi kerja sama untuk pengembangan *international transshipment hub*.
 - c. Pengembangan layanan operasi pelabuhan milik Kementerian/Lembaga.
 - d. Kerja sama dengan pelaku logistik BUMN dan swasta (contohnya *cold storage*/multimoda kereta api).
 - e. Eksplorasi pemanfaatan *data analytics* untuk pengembangan bisnis (*enabler*).
- 2. Inisiatif Strategis Tahap Pelaksanaan**
 - a. Kerjasama dengan kawasan industri/logistik.
 - b. Pengembangan layanan operasi TUKS dengan bekerja sama dengan BUMN dan swasta.
 - c. Restrukturisasi organisasi dan tata kelola (*enabler*).
- 3. Inisiatif Strategis Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan**
 - a. Digitalisasi dan sistemisasi operasi kepelabuhan.
 - b. Pengembangan infrastruktur dan peralatan pelabuhan.
 - c. Kerjasama antar pelabuhan untuk optimalisasi konsep *hub and spoke* dengan integrasi data.
 - d. Sentralisasi *knowledge management* (*enabler*).
 - e. Internalisasi budaya Pelindo terintegrasi (*enabler*).

In 2024, the Company will enter the Business Expansion and Partnership phase by starting to focus on business development initiatives through Strategic Partnerships, as well as cooperation and collaboration with state-owned and private logistics players. One of the business prospects that the Company will target is the potential for international transshipment hub container services in the Malacca Strait. The total volume of containers passing through the Malacca Strait has reached 64 million TEUs, of which 78% were for transshipment cargo (based on 2021 data, Roland Berger). In line with the Business Expansion and Partnership phase, strategic initiatives that will begin to be implemented in both the planning and execution stages in 2024 include:

- 1. Strategic Initiatives Planning Stage**
 - a. Regional expansion planning in the port business.
 - b. Exploration of cooperation for the development of an international transshipment hub.
 - c. Development of port operation services belonging to Ministries/Agencies.
 - d. Collaboration with state-owned and private logistics players (for example cold storage/multimodal trains).
 - e. Exploration of the use of data analytics for business development (*enabler*).
- 2. Strategic Initiatives Implementation Stage**
 - a. Collaboration with industrial/logistics areas.
 - b. Development of TUKS operational services in collaboration with state-owned companies and the private sector.
 - c. Organizational restructuring and governance (*enabler*).
- 3. Strategic Initiatives Planning and Implementation Stage**
 - a. Digitalization and systemization of port operations.
 - b. Development of port infrastructure and equipment.
 - c. Cooperation between ports to optimize the hub and spoke concept with data integration
 - d. Centralized knowledge management (*enabler*).
 - e. Internalization of integrated Pelindo culture (*enabler*).

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

PENCAPAIAN TARGET

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI

Uraian atas perbandingan target dan realisasi produksi arus trafik operasi kepelabuhan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

ACHIEVEMENT OF TARGETS AND FUTURE TARGETS

TARGET ACHIEVEMENT

COMPARISON OF PRODUCTION TARGETS AND REALIZATION

A comparison of the targets and actual production of port operations traffic in 2023 is as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Arus Trafik
Comparison of Ship Traffic Target and Realization

Jenis Kegiatan Type of Activity	Satuan Unit	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
Arus Kapal Ship Traffic	Call	301.941	303.221	100,42%
	GT	1.248.499.373	1.286.040.750	103,01%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Arus Trafik
Comparison of Ship Traffic Target and Realization

Jenis Kegiatan Type of Activity	Satuan Unit	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
Arus Petikemas Container Traffic	Box	13.730.728	13.573.959	98,86%
	TEUs	17.664.908	17.657.327	99,96%
Arus Barang Non Petikemas Non-Container Traffic	Ton	161.463.719	169.853.408	105,20%
	M ³	5.240.976	6.575.384	125,46%
	Unit	2.305.341	2.648.979	140,13%
	MMBTU	8.760.000	13.188.848	183,61%
	Ekor	533.205	563.244	105,63%
Arus Penumpang Passenger Traffic	Orang	13.466.830	18.050.932	134,04%

Capaian arus kapal dalam satuan *Call* tahun 2023 mencapai 100,42% dari target RKAP. Sedangkan untuk satuan GT tercapai target RKAP yakni sebesar 103,01%. Hal ini disebabkan tercapainya trafik kapal dalam di tahun 2023 tersebut dikarenakan meningkatnya kegiatan kapal pengangkut batu bara jenis tongkang di Balikpapan, Banjarmasin dan Samarinda, kapal penumpang di seluruh pelabuhan serta kapal pesiar di Benoa.

Arus petikemas dalam satuan Box tahun 2023 berada sedikit di bawah target RKAP sebesar 98,86% sedangkan dalam satuan TEUs tercapai 99,96%. Ketidaktercapaian trafik petikemas tahun 2023 dipengaruhi oleh tidak tercapainya arus petikemas internasional yang disebabkan perlambatan arus petikemas internasional pada semester I 2023. Adapun penyebab perlambatan tersebut diantaranya masih terdapatnya ketegangan geopolitik dampak dari perang Rusia-Ukraina serta pertumbuhan perekonomian China yang belum sesuai ekspektasi pasca dibukanya *locking down* sehingga berpengaruh terhadap volume petikemas internasional di Cabang Tanjung Priok, Tanjung Perak, Semarang dan Belawan.

Arus barang non petikemas dalam satuan Ton tahun 2023 mencapai 105,20% di atas target RKAP. Hal ini dipengaruhi tercapainya kegiatan bongkar muat komoditas batu bara di Balikpapan dan Parepare, tercapainya produksi minyak sawit dan turunannya di Belawan, Teluk Bayur dan Semarang serta tercapainya bongkar muat *general cargo* untuk komoditi semen dan pupuk *in bag* di Cabang Makassar.

Arus barang non petikemas satuan M³ mencapai 125,46%, yang berada di atas target RKAP. Hal ini dipengaruhi oleh tercapainya kegiatan bongkar atas barang material konstruksi di Terminal Kijing (Pontianak), kegiatan bongkar muat dengan komoditi besi

Achievements of ship traffic in *Call* units in 2023 reached 100.42% of the RKAP target. Meanwhile, for the GT unit, the RKAP target of 103.01% was achieved. This was due to the achievement of internal ship traffic in 2023 due to the increased activity of barge-type coal transport ships in Balikpapan, Banjarmasin and Samarinda, passenger ships in all ports and cruise ships in Benoa.

Container traffic in Box units in 2023 was slightly below the RKAP target with 98.86%, while for TEU units it achieved 99.96%. The failure to achieve container traffic in 2023 was influenced by the failure to achieve international container traffic due to the slowdown in international container traffic in the first semester of 2023. The causes of this slowdown included the geopolitical tensions as a result of the Russia-Ukraine war and China's economic growth that had not met expectations after the opening of the lockdown, thus affecting the volume of international containers at the Tanjung Priok, Tanjung Perak, Semarang and Belawan Branches.

The non-container goods traffic in tons in 2023 was 105.20% above the RKAP target. This was due to the achievement of loading and unloading activities for coal commodities in Balikpapan and Parepare, the achievement of palm oil production and its derivatives in Belawan, Teluk Bayur and Semarang, and the achievement of general cargo loading and unloading for cement and fertilizer in bag commodities at the Makassar Branch.

The non-container goods traffic in M³ units reached 125.46%, above the RKAP target. This was due to the achievement of unloading activities for construction materials at the Kijing Terminal (Pontianak), loading and unloading activities with construction iron



konstruksi di Sunda Kelapa serta tercapainya kegiatan bongkar dengan komoditi kayu log pada Cabang Gresik.

Arus barang non petikemas dalam satuan Unit berhasil melampaui target RKAP yang mencapai 140,13%. Ketercapaian ini disebabkan oleh tercapainya kegiatan bongkar muat kendaraan di IKT pada Cabang Tanjung Priok dan Makassar serta terealisasinya kegiatan bongkar muat kendaraan melalui kapal RoRo di Cabang Panjang, Tanjung Perak dan Banjarmasin.

Arus barang non petikemas satuan MMBTU terealisasi 13.188.848 MMBTU atau 183,61% dari anggaran tahun 2023 sebesar 8.760.000 MMBTU dikarenakan terealisasinya permintaan LNG terutama pelanggan dari PT PLN Indonesia Power di Benoa seiring dengan meningkatnya pariwisata pulau Bali.

Arus hewan terealisasi 563.244 Ekor atau 105,63% bila dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar 533.205 Ekor. Ketercapaian ini dipengaruhi oleh adanya realisasi kegiatan muat hewan babi di Cabang Celukan Bawang untuk dikirimkan ke Palangkaraya dan ketercapaian arus hewan atas kegiatan muat hewan besar di Badas, Kupang dan Waingapu dampak Hari Raya Idul Adha.

Arus penumpang terealisasi 18.050.932 Orang atau 134,04% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar 13.466.830 Orang. Ketercapaian dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang baik dan kondusif sehingga banyak orang yang melakukan penyeberangan antar pulau. Selain itu, arus penumpang khususnya melalui kapal pesiar atau *cruise* meningkat yang dipengaruhi pelonggaran aturan oleh pemerintah atas kunjungan wisatawan asing.

commodities in Sunda Kelapa, and the achievement of unloading activities for wood log commodities at the Gresik Branch.

The non-container goods traffic in units exceeded the RKAP target by 140.13%. This achievement was due to the achievement of vehicle loading and unloading activities at IKT in the Tanjung Priok and Makassar Branches, as well as the realization of vehicle loading and unloading activities via RoRo ships in Panjang, Tanjung Perak and Banjarmasin Branches.

The non-container goods traffic in MMBTU units realized 13,188,848 MMBTU or 183.61% of the 2023 budget of 8,760,000 MMBTU due to the demand for LNG, especially customers from PT PLN Indonesia Power in Benoa in line with the increase in tourism on the island of Bali.

The animal traffic was 563,244 heads, or 105.63% compared to the 2023 budget of 533,205 heads. This achievement was due to the realization of pig loading activities at the Celukan Bawang Branch to be sent to Palangkaraya, and the achievement of animal traffic for large animal loading activities in Badas, Kupang and Waingapu as a result of Eid al-Adha.

The passenger traffic was 18,050,932 people or 134.04% compared to the 2023 budget of 13,466,830 people. This achievement was due to good and conducive weather conditions so that many people made crossings between islands. Also, the passenger traffic, especially via cruise ships, had increased due to the government's relaxation of regulations regarding visits by foreign tourists.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KEUANGAN

Uraian atas realisasi perbandingan target dan realisasi laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2023 adalah sebagai berikut.

COMPARISON OF FINANCIAL TARGETS AND REALIZATION

A comparison of targets and the realization of the 2023 consolidated financial position report is as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Comparison of the Consolidated Statement of Financial Position Targets and Realization

(dalam jutaan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
ASET ASSETS			
Aset lancar Current Assets	17.824.922	20.319.101	113,99%
Aset tidak lancar Non-Current Assets	94.251.639	98.021.965	104,00%
Total aset Total Assets	112.076.560	118.341.066	105,59%
LIABILITAS LIABILITIES			
Liabilitas jangka pendek Short-Term Liabilities	17.355.068	18.173.954	104,72%
Liabilitas jangka panjang Non-Current Liabilities	47.431.003	53.325.897	112,43%
Total liabilitas Total Liabilities	64.786.071	71.499.851	110,36%
EKUITAS EQUITY			
Ekuitas Equity	47.290.488	46.841.215	99,05%

Total aset terealisasi sebesar Rp118,34 triliun atau tercapai 105,59% dari RKAP tahun 2023. Hal ini didukung oleh capaian aset lancar sebesar 113,99% dan aset tidak lancar sebesar 104,00%.

Aset lancar terealisasi sebesar Rp98,02 triliun atau tercapai 113,99% dari RKAP tahun 2023. Hal ini antara lain dipengaruhi tercapainya kas dan setara kas serta pendapatan yang masih akan diterima pada tahun 2023.

Aset tidak lancar terealisasi sebesar Rp98,00 triliun atau tercapai 104,00% dari RKAP tahun 2023. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

1. Properti investasi terealisasi di atas RKAP tahun 2023 disebabkan oleh perbedaan pencatatan aset gedung Pelindo Tower yang pada RKAP tahun 2023 dicatat sebagai aset tetap – neto.
2. Aset tak berwujud neto terealisasi di atas RKAP Tahun 2023 dikarenakan aset tak berwujud jalan tol milik PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) yang diasumsikan telah terjual namun dalam realisasinya masih tercatat sebagai aset Perseroan sampai dengan tahun 2023.

Realized total assets amounted to Rp118.34 trillion, or 105.59% of the 2023 RKAP. This was supported by the achievement of current assets of 113.99% and non-current assets of 104.00%.

Realized current assets amounted to Rp98.02 trillion, or 113.99% of the 2023 RKAP. This was influenced by the achievement of cash and cash equivalents and revenues still be received in 2023.

Realized non-current assets amounted to Rp98.00 trillion, or 104.00% of the 2023 RKAP. This was influenced by:

1. Realized investment properties were above the 2023 RKAP due to differences in the recording of Pelindo Tower building assets which in the 2023 RKAP were recorded as fixed assets - net.
2. Realized net intangible assets were above the 2023 RKAP due to toll road intangible assets belonging to PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) which were assumed to have been sold but in realization were still recorded as Company assets in 2023.



3. Aset kerja sama operasi neto terealisasi di atas RKAP Tahun 2023 disebabkan penyusutan aset KSO TPK Koja lebih kecil dari yang dianggarkan.
4. Aset pajak tangguhan terealisasi di atas RKAP tahun 2023 disebabkan adanya perbedaan pencatatan beban penyusutan komersial dan beban penyusutan fiskal dimana umur masa manfaat fiskal lebih pendek dari pada komersial.
5. Anggaran tagihan restitusi pajak dicatat pada pajak dibayar dimuka aset lancar.
6. Aset tidak lancar lainnya terealisasi di atas RKAP tahun 2023 dikarenakan terdapat realisasi piutang non usaha pada *Subholding* yang tidak diasumsikan pada RKAP tahun 2023.

Total liabilitas terealisasi sebesar Rp71,50 triliun atau tercapai 110,36% dari RKAP tahun 2023. Hal ini didukung oleh capaian liabilitas jangka pendek sebesar 104,72% dan liabilitas jangka panjang sebesar 112,43%.

Liabilitas jangka pendek terealisasi sebesar Rp18,17 triliun atau tercapai 104,72% dari RKAP tahun 2023. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

1. Pendapatan diterima di muka jangka pendek terealisasi di atas RKAP tahun 2023 terutama disebabkan meningkatnya pendapatan diterima di muka dengan pihak ketiga sehingga dampak kurs yang terealisasi di atas RKAP tahun 2023.
2. Utang pajak terealisasi di atas RKAP tahun 2023. Peningkatan utang pajak diantaranya adalah PPh Pasal 21 pada entitas induk disebabkan adanya realisasi pembayaran tambahan penghasilan dampak kebijakan harmonisasi remunerasi pegawai serta peningkatan utang PPh Pasal 29 pada entitas SPJM dan PPN keluaran pada entitas SPMT.
3. Beban akrual terealisasi di atas RKAP tahun 2023 terutama disebabkan kenaikan beban akrual kerjasama mitra usaha kegiatan pelayanan bongkar muat sejalan dengan kenaikan aktivitas operasional serta kenaikan beban akrual atas pelaksanaan proyek.
4. Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang terealisasi di atas RKAP tahun 2023 disebabkan meningkatnya pinjaman sindikasi pinjaman bank yang digunakan untuk *refinancing Global Bond*.

Liabilitas jangka panjang terealisasi sebesar Rp53,33 triliun atau tercapai 112,43%. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh:

1. Utang Obligasi terealisasi di atas RKAP tahun 2023 disebabkan nilai kurs melemah dibandingkan dengan asumsi kurs RKAP Tahun 2023.
2. Utang Bank terealisasi di atas RKAP tahun 2023 disebabkan adanya aksi korporasi *refinancing* melalui sindikasi pinjaman bank untuk pelunasan *Global Bond PBLIJ 2023* sebesar USD500.000.000
3. Liabilitas sewa jangka panjang terealisasi di atas RKAP tahun 2023 disebabkan adanya kontrak sewa baru sepanjang tahun 2023.
4. Liabilitas jangka panjang lainnya terealisasi di atas RKAP tahun 2023 yang terdiri dari provisi jangka panjang dan liabilitas jangka panjang lainnya pihak.

3. Realized net operating cooperation assets were above the 2023 RKAP due to depreciation of TPK Koja KSO assets being lower than budgeted.
4. Realized deferred tax assets were above the 2023 RKAP due to differences in recording commercial depreciation expenses and fiscal depreciation expenses where the fiscal useful life is shorter than commercial.
5. The tax refund bill budget was recorded in prepaid taxes on current assets.
6. Other non-current assets were realized above the 2023 RKAP due to the realization of non-business receivables from Subholding that were not assumed in the 2023 RKAP.

Realized total liabilities amounted to Rp71.50 trillion, or 110.36% of the 2023 RKAP. This was supported by the achievement of short-term liabilities of 104.72% and long-term liabilities of 112.43%.

Realized short-term liabilities amounted to Rp18.17 trillion, or 104.72% of the 2023 RKAP. This was influenced by:

1. Realized short-term unearned income was above the 2023 RKAP mainly due to the increase in unearned income with third parties so the realized exchange rate impact was above the 2023 RKAP.
2. Realized tax debt was above the 2023 RKAP. The increase in tax debt includes PPh Article 21 on the parent entity due to the realization of additional income payments as a result of the employee remuneration harmonization policy as well as an increase in PPh Article 29 debt on the SPJM entity and output VAT on the SPMT entity.
3. Realized accrued expenses was above the 2023 RKAP mainly due to an increase in accrued expenses in collaboration with business partners for loading and unloading service activities in line with the increase in operational activities, as well as an increase in accrued expenses for project implementation.
4. Realized current portion of long-term liabilities was above the 2023 RKAP due to an increase in syndicated bank loans used for Global Bond refinancing.

Realized long-term liabilities amounted to Rp53.33 trillion, or 112.43%. This was influenced by:

1. Realized bonds payable were above the 2023 RKAP due to the weakening exchange rate compared to the 2023 RKAP exchange rate assumption.
2. Realized bank debt was above the 2023 RKAP due to corporate refinancing actions through bank loan syndication for the repayment of the 2023 PBLIJ Global Bond amounting to USD 500,000,000
3. Realized long-term rental liabilities was above the 2023 RKAP due to new rental contracts throughout 2023.
4. Realized other long-term liabilities was above the 2023 RKAP consisted of long-term provisions and other long-term liabilities of parties.

Total ekuitas terealisasi sebesar Rp46,84 triliun atau tercapai 99,05% dari RKAP tahun 2023. Hal ini disebabkan pada RKAP tahun 2023 diasumsikan divestasi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) namun sepanjang tahun 2023 belum terealisasi.

Adapun perbandingan target dan realisasi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan sebagai berikut:

Realized total equity amounted to Rp46.84 trillion, or 99.05% of the 2023 RKAP. This was because in the 2023 RKAP it was assumed there would be a divestment of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) but in 2023 this was not realized.

The comparison of targets and realization of profit and loss statements and other comprehensive income is presented as follows:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Comparison of Targets and Realization of Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Pendapatan Usaha Operating revenues	31.819.126	31.018.218	97,48%
Pendapatan Konstruksi Construction revenues	3.198.009	2.897.790	90,61%
Beban Usaha Operating expenses	(25.435.571)	(24.343.231)	95,71%
Beban Konstruksi Construction expenses	(3.198.009)	(2.897.790)	90,61%
Laba Usaha Income From Operations	6.383.555	6.985.582	109,43%
Pendapatan Keuangan Finance Income	233.277	627.295	268,91%
Beban Keuangan Finance Costs	(2.037.475)	(2.860.120)	140,38%
Bagian Laba Entitas Asosiasi Share of Income of Associated Entities	338.596	370.378	109,39%
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	4.966.260	5.123.136	103,16%
Beban Pajak Final Final tax expense	(382.663)	(515.481)	134,71%
Laba Tahun Berjalan Income for the Current Year	3.819.509	4.012.581	105,05%
Laba Komprehensif Periode Berjalan Comprehensive Income for the Current Year	3.831.022	5.413.722	141,31%

Berdasarkan rincian data pada tabel di atas, pendapatan usaha berada di bawah target yang mencapai 97,48% dengan realisasi sebesar Rp31,02 triliun. Hal tersebut antara lain dipengaruhi:

1. Pendapatan pelayanan kapal dan lainnya terealisasi di bawah RKAP tahun 2023 disebabkan ketidaktercapaian trafik kapal di non derum dikarenakan berpindahnya pelayanan kapal TUKS ke BUP lain sehingga *market share* TUKS Perseroan tidak tercapai.
2. Pendapatan barang non petikemas terealisasi di bawah RKAP tahun 2023 disebabkan ketidaktercapaian pendapatan *stevedoring* pada pelayanan bongkar muat *general cargo*, curah kering, curah cair dan bongkar muat kendaraan.
3. Pendapatan perusahaan properti, air, dan listrik terealisasi di bawah RKAP tahun 2023 yang disebabkan pada RKAP 2023 diasumsikan adanya penerimaan pendapatan properti

Based on the detailed data in the table above, operating revenues were below the target, only reaching 97.48% with a realization of Rp31.02 trillion. This was due to:

1. Vessel and other service revenues were realized under the 2023 RKAP due to non-derum ship traffic not being achieved due to the transfer of TUKS ship services to other BUPs so that the Company's TUKS market share was not achieved.
2. Non-container goods revenue was realized below the 2023 RKAP due to the failure to achieve *stevedoring* revenue for general cargo, dry bulk, liquid bulk and vehicle loading and unloading services.
3. Property, water and electricity business income was realized below the 2023 RKAP because in the 2023 RKAP it was assumed that there was property income received



atas kerja sama pengoperasian BNCT yang dicatat sebagai pendapatan sewa lahan secara triwulanan (QSR) namun kerjasama tersebut belum berjalan.

from the BNCT operational collaboration, which was recorded as quarterly land rental income (QSR) but this collaboration has not yet been implemented.

Meskipun demikian, pencapaian laba tahun berjalan berhasil melampaui target mencapai 105,05% dengan realisasi sebesar Rp4,01 triliun. Laba tahun berjalan tercapai di atas RKAP antara lain dipengaruhi adanya kenaikan dan ketercapaian kunjungan kapal atas kegiatan di dermaga umum yaitu kapal jenis petikemas di Tanjung Perak dan Tanjung Priok serta kapal *cruise* dan penumpang di Cabang Benoa, Labuan Bajo dan Tanjung Balai Karimun. Sedangkan di TUKS mengalami peningkatan akibat meningkatnya kapal batu bara di Samarinda, Kotabaru, Balikpapan dan Tanjung Redeb.

Nevertheless, the profit achievement for the current year exceeded the target by 105.05% with a realization of Rp4.01 trillion. Profit for the year was above the RKAP was mainly due to the increase and achievement of ship visits for activities at public docks, including container ships in Tanjung Perak and Tanjung Priok as well as cruise and passenger ships in the Benoa, Labuan Bajo and Tanjung Balai Karimun branches. Meanwhile, the TUKS increase was due to the increase in coal ships in Samarinda, Kotabaru, Balikpapan and Tanjung Redeb.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2023 yang dimiliki oleh Pelindo adalah 60,39% berasal dari liabilitas, dan 39,61% berasal dari ekuitas. Adapun uraian perbandingan target dan realisasi struktur modal tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION OF CAPITAL STRUCTURE

Pelindo's capital structure composition in 2023 was 60.39% coming from liabilities, and 39.61% coming from equity. A description of the comparison of capital structure targets and realization in 2023 is presented as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal
Comparison of Targets and Realization of Capital Structure

(dalam ribuan Rupiah)	(in million Rupiah)		
Uraian Description	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Liabilitas jangka pendek Current liabilities	17.355.068	18.173.954	104,72%
Liabilitas jangka panjang Non-Current liabilities	47.431.003	53.325.897	112,43%
Total liabilitas Total liabilities	64.786.071	71.499.851	110,36%
Total ekuitas Total equity	47.290.488	46.841.215	99,05%
Total liabilitas dan ekuitas Total liabilities and equity	112.076.560	118.341.066	105,59%

Realisasi total liabilitas dan ekuitas tahun 2023 mencapai Rp118,34 triliun dengan capaian 105,59% berada di atas target RKAP tahun 2023. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

1. Meningkatnya pendapatan diterima di muka dengan pihak ketiga sehingga dampak kurs yang terealisasi di atas RKAP tahun 2023.
2. Peningkatan utang pajak diantaranya adalah PPh Pasal 21 pada entitas induk disebabkan adanya realisasi pembayaran tambahan penghasilan dampak kebijakan harmonisasi remunerasi pegawai serta peningkatan utang PPh Pasal 29 pada entitas SPJM dan PPN keluaran pada entitas SPMT.
3. Kenaikan beban akrual kerjasama mitra usaha kegiatan pelayanan bongkar muat sejalan dengan kenaikan aktivitas operasional serta kenaikan beban akrual atas pelaksanaan proyek.

Realized total liabilities and equity in 2023 reached Rp118.34 trillion, or 105.59% above the 2023 RKAP target. This was due to:

1. Increased unearned revenue with third parties so that the realized exchange rate impact was above the 2023 RKAP.
2. The increase in tax debt includes PPh Article 21 on the parent entity due to the additional income payments as a result of the employee remuneration harmonization policy, as well as an increase in PPh Article 29 debt on the SPJM entity and output VAT on the SPMT entity.
3. The increase in accrued expenses for collaboration with business partners for loading and unloading service activities is in line with the increase in operational activities as well as the increase in accrued expenses for project implementation.

- | | |
|---|--|
| <p>4. Meningkatnya pinjaman sindikasi pinjaman bank yang digunakan untuk <i>refinancing Global Bond</i>.</p> <p>5. Nilai kurs melemah dibandingkan dengan asumsi kurs RKAP tahun 2023.</p> <p>6. Adanya aksi korporasi <i>refinancing</i> melalui sindikasi pinjaman bank untuk pelunasan <i>Global Bond PBLI</i> 2023 sebesar USD500.000.000.</p> <p>7. Adanya kontrak sewa baru sepanjang tahun 2023.</p> | <p>4. Increase in syndicated bank loans used for Global Bond refinancing</p> <p>5. The exchange rate weakened compared to the 2023 RKAP exchange rate assumption.</p> <p>6. There was a corporate refinancing action through a bank loan syndication for the repayment of the 2023 PBLI Global Bond amounting to USD 500,000,000.</p> <p>7. There were new rental contracts throughout 2023.</p> |
|---|--|

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMASARAN

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut.

COMPARISON OF MARKETING TARGETS AND REALIZATION

A comparison of marketing targets and realization is presented as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Comparison of Marketing Target and Realization

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2023 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
REGIONAL 1				
BOPO	%	90,17	86,7	104%
Pendapatan Konsolidasi Area Consolidated Area Revenues	Currency	3.351.169.456.141	3.260.483.822.965	97,29%
<i>Market Share</i> Bongkar Muat Curah Bulk Loading and Unloading Market Share	%	46	60,48	131,48%
Pelaksanaan kegiatan Temu Mitra Implementation of Partner Meeting activities	#	3	7	233,33%
% Penyusunan Laporan Proses RIP di Regional 1 % Preparation of RIP Process Reports in Region 1	%	80	90	112,50%
Optimalisasi Aset <i>Idle</i> (Lahan) Optimization of Idle Assets (Land)	#	2	3	150%
Jumlah kerja sama terkait pengusahaan lahan dan/atau bangunan Number of collaborations related to land and/or building exploitation	#	8	10	125%
REGIONAL 2				
Optimalisasi Lahan <i>Idle</i> (kerjasama baru) Idle Land Optimization (new collaboration)	jumlah Total	6	11	183%
<i>Market share</i> Bongkar Muat Curah Bulk Loading and Unloading Market share	%	47	55	117%
Pengembangan Layanan Operasi TUKS TUKS Operational Services Development	jumlah Total	3	4	133%
Kegiatan Pemasaran ke Pelanggan Potensial di Lingkungan Regional 2 Marketing Activities for Potential Customers in Regional 2	jumlah Total	3	6	200%
REGIONAL 3				
<i>Customer Visit</i>	Freq	621	629	101%
Kerjasama Bongkar muat Curah Cair di PHE WMO Gresik Collaboration in Loading and Unloading Liquid Bulk at PHE WMO Gresik	Rp juta	150	158	105%



Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Comparison of Marketing Target and Realization

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2023 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
Kerjasama pemanfaatan fasilitas gudang untuk <i>bag cargo</i> dengan CV Artha Niaga Gemilang dan PT Anugrah Nuansa Kasih di Pelabuhan Labuan Bajo. Collaboration in utilizing warehouse facilities for <i>bag cargo</i> with CV Artha Niaga Gemilang and PT Anugrah Nuansa Kasih at Labuan Bajo Port	Rp juta	480,8	480,8	100%
Kerjasama pemanfaatan fasilitas gudang untuk PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) di Pelabuhan Bima. Cooperation in utilizing warehouse facilities for PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) at Bima Port.	Rp juta	300	300	100%
Kerjasama pemanfaatan fasilitas bangunan dengan PT Multi Rasa Bogatama di Pelabuhan Benoa. Collaboration in utilizing building facilities with PT Multi Rasa Bogatama at Benoa Harbor.	Rp juta	442,6	442,6	100%
Kerjasama Pelayanan Jasa Kapal di Tersus PT General Energy Bali – Celukan Bawang. Collaboration in Ship Services at PT General Energy Bali - Celukan Bawang	Rp juta	700	717	102%
Kerjasama baru pemanfaatan lahan <i>idle</i> New collaboration on idle land use	Kerjasama Cooperation	2	4	200%
REGIONAL 4				
Pelaksanaan media komunikasi melalui <i>coffee morning</i> dengan pengguna jasa dan <i>stakeholder</i> setiap triwulanan. Communication media through <i>coffee mornings</i> with service users and stakeholders every quarter.	Cabang Branch	14	14	100%
<i>Implementasi Key Account Management</i> Terintegrasi di Regional 4. Implementation of Integrated Key Account Management in Regional 4.	Kegiatan Activity	1	1	100%
<i>Optimalisasi asset idle.</i> <i>Optimization of idle assets.</i>	Kerjasama	1	1	100%
Evaluasi atas tarif jasa kepelabuhanan. Evaluation of port service rates.	Tarif Rates	3	3	100%

REGIONAL 1

Sebagai bagian dari kegiatan pemasaran juga telah dilaksanakan *customer visit* untuk menangkap kebutuhan pelanggan serta meningkatkan kualitas layanan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 22 (dua puluh dua) *visit* ke pelanggan di cabang-cabang Pelabuhan wilayah Regional 1 secara *offline* dengan capaian 733% dari yang ditargetkan, antara lain sebagai berikut:

1. Cabang Belawan
 - a. PT Perusahaan Gas Negara
 - b. PT Musim Mas
 - c. Asosiasi ALFI/ILFA Sumut
 - d. Asosiasi DPC INSA Medan Belawan

REGIONAL 1

As part of the marketing activities, customer visits were carried out to capture customer needs and improve service quality to maintain customer satisfaction. During 2023, 22 (twenty-two) visits to customers at Regional Port 1 branch branches were carried out offline with an achievement of 733% of the target, and included the following:

1. Belawan Branch
 - a. PT Perusahaan Gas Negara
 - b. PT Musim Mas
 - c. North Sumatra ALFI/ILFA Association
 - d. INSA Medan Belawan DPC Association

2. Cabang Pekanbaru
 - a. PT Biomassa Energy Sanskrit Trading Indonesia
 - b. Asosiasi DPC INSA Pekanbaru
 - c. PT Sufie Bahtera Lines Pekanbaru
3. Cabang Tanjungpinang
 - a. PT Solid Pelayaran Indonesia
 - b. PT CIMC Wetrans Indonesia
 - c. PT Bank Negara Indonesia
 - d. PT Tanjungpinang Makmur Bersama
4. Cabang Tanjung Balai Karimun
 - a. Silaturahmi pengguna jasa terminal penumpang ke kantor Pelindo
5. Cabang Tembilahan
 - a. CV Korallindo
6. Cabang Tanjung Balai Asahan
 - a. PT PLN (Persero) UP3 Rantauprapat
 - b. PT Malindo Bahari
 - c. PT Bank Mandiri Region I Sumatera I
7. Cabang Sibolga
 - a. PT Trans Continent
 - b. PT Tanto Intim Line
 - c. PT Meratus Line
8. Cabang Gunung Sitoli
 - a. PT Bank Negara Indonesia
 - b. PT Wira Jaya Logitama Lines

Telah dilakukan kegiatan *customer gathering* di cabang-cabang Pelabuhan wilayah Regional 1 yang telah terealisasi pada 4 (empat) cabang Pelabuhan secara *offline* dengan capaian 267% dari yang ditargetkan, dengan data cabang sebagai berikut:

1. Cabang Belawan
2. Cabang Tanjungpinang
3. Cabang Tanjung Balai Asahan
4. Cabang Gunung Sitoli

REGIONAL 2

Dalam menerapkan kegiatan pemasaran di lingkungan Regional 2, rencana kegiatan keseluruhan yang telah dibuat terealisasi di atas target. Untuk Optimalisasi Lahan terealisasi 183%, *market share* Bongkar Muat Curah terealisasi 117%, Pengembangan Layanan Operasi TUKS terealisasi 133% dan Kegiatan Pemasaran ke Pelanggan Potensial di Lingkungan Regional 2 terealisasi 200%.

Sebagai bagian dari kegiatan pemasaran juga telah dilaksanakan *customer visit* untuk menangkap informasi peluang bisnis dan kebutuhan pasar serta meningkatkan kualitas layanan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 204 *visit* ke pelanggan eksisting maupun potensial di 12 cabang pelabuhan Regional 2 secara *online* maupun *offline*.

REGIONAL 3

Pada tahun 2023, Pelindo Regional 3 telah melaksanakan aktivitas komersial dalam rangka peningkatan pendapatan Perseroan, pangsa pasar serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan jasa kepelabuhanan yang prima. Salah satu aktivitas yang dilaksanakan adalah kegiatan

2. Pekanbaru Branch
 - a. PT Biomass Energy Sanskrit Trading Indonesia
 - b. INSA Pekanbaru DPC Association
 - c. PT Sufie Bahtera Lines Pekanbaru
3. Tanjungpinang Branch
 - a. PT Solid Shipping Indonesia
 - b. PT CIMC Wetrans Indonesia
 - c. PT Bank Negara Indonesia
 - d. PT Tanjungpinang Makmur Bersama
4. Tanjung Balai Karimun Branch
 - a. Passenger terminal service users gathering at the Pelindo office
5. Tembilahan Branch
 - a. CV Korallindo
6. Tanjung Balai Asahan Branch
 - a. PT PLN (Persero) UP3 Rantauprapat
 - b. PT Malindo Bahari
 - c. PT Bank Mandiri Region I Sumatera I
7. Sibolga Branch
 - a. PT Trans Continent
 - b. PT Tanto Intim Line
 - c. PT Meratus Line
8. Gunung Sitoli Branch
 - a. PT Bank Negara Indonesia
 - b. PT Wira Jaya Logitama Lines

Customer gathering activities carried out at Port branches in Regional 1 included 4 (four) Port branches offline, an achievement of 267% of the target, with branch data as follows:

1. Belawan Branch
2. Tanjungpinang Branch
3. Tanjung Balai Asahan Branch
4. Gunung Sitoli Branch

REGIONAL 2

For marketing activities in Regional 2, the overall activity plan was realized above the target. For Land Optimization, 183% was realized, Bulk Loading and Unloading market share 117% was realized, TUKS Operational Service Development 133% was realized and Marketing Activities to Potential Customers in Regional 2 200% was realized.

As part of marketing activities, customer visits were carried out to capture information on business opportunities and market needs and improve service quality to maintain customer satisfaction. During 2023, 204 online and offline visits were carried out to existing and potential customers at 12 Regional 2 port branches.

REGIONAL 3

In 2023, Pelindo Regional 3 carried out commercial activities to increase the Company's revenue, market share and increase customer satisfaction through excellent port services. One of the activities carried out was Customer Visits. Customer visits are a means of providing services to customers as well as an



Customer Visit. *Customer visit* menjadi salah satu sarana untuk memberikan penawaran pelayanan jasa kepada pelanggan serta sebagai upaya untuk membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan. Melalui *Marketing Sales Officer*, Pelindo Regional 3 pada tahun 2023 telah melakukan 629 kegiatan *Customer Visit*, baik untuk *potential customer* maupun *existing customer* yang berpotensi untuk dilakukan kerjasama bisnis. Adapun beberapa kerjasama yang telah dilakukan pada tahun 2023 di lingkungan Pelindo Regional 3 antara lain:

1. Kerja sama dengan TUKS PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) untuk penyediaan layanan bongkar muat komoditi Curah Cair Kondensat dengan nilai pendapatan sebesar +Rp158 juta.
2. Kerja sama pelayanan jasa kapal (pemanduan dan penundaan) di Tersus PT General Energy Bali Pelabuhan Celukan Bawang dengan pendapatan sebesar +Rp717 juta.
3. Kerja sama pemanfaatan gudang pelabuhan dengan CV Artha Niaga Gemilang dan PT Anugerah Nuansa Kasih di Pelabuhan Bajo untuk mendukung kegiatan bongkar muat *general cargo* dengan realisasi pendapatan sebesar +Rp480 juta.
4. Kerja sama pemanfaatan gudang pelabuhan dengan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) di Pelabuhan Bima untuk mendukung kegiatan bongkar muat curah kering dengan realisasi pendapatan sebesar +Rp300 juta.
5. Kerja sama pemanfaatan fasilitas bangunan PT Multi Rasa Bogatama di Pelabuhan Benoa dengan pendapatan sebesar +Rp442 juta.
6. Optimalisasi lahan *idle* pada 4 lokasi pelabuhan yaitu kerja sama penggunaan lahan HPL seluas 528 m2 dengan PT Pelindo Husada Citra di Tanjung Perak, kerja sama penggunaan lahan HPL oleh Konsorsium Midstream LNG Bali di Pelabuhan Benoa, kerjasama penggunaan lahan HPL seluas 5.030 m2 dengan PT Sarana Mbay Utama di Pelabuhan Waingapu, dan telah dilakukan MoU dengan PT Centra Bangunan Jaya terkait rencana kerja sama pemanfaatan lahan Martapura Lama di Banjarmasin.

REGIONAL 4

Kegiatan promosi yang dilakukan di Regional 4 berfokus pada menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan *stakeholder* lainnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pelaksanaan *coffee morning* yang dilakukan baik pada tingkat Regional maupun di hampir seluruh cabang pada wilayah kerja Regional 4, yaitu pada cabang Merauke, Ternate, Kendari, Nunukan, Pantoloan, Parepare, Tanjung Redeb, Balikpapan, Tolitoli, Tarakan, Manokwari, Samarinda, Bitung dan Makassar. Selain itu, bersama kantor pusat dan seluruh Regional telah diadakan *gathering* dengan mengundang pelanggan kunci pada tanggal 27 September 2023 serta pemberian penghargaan untuk *top customer*. Sesuai arahan Direksi dimana tarif dan aset *idle* merupakan salah satu fokus Regional, untuk itu kedua isu tersebut telah dimasukkan ke dalam rencana kerja dengan realisasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi aset *idle* pada Pelabuhan Manokwari yaitu dengan melakukan kerjasama PT Permata Sawit Mas dengan nilai kerjasama sebesar Rp1.132.952.704 untuk jangka waktu selama 10 tahun.

effort to build closer relationships with customers. Through the Marketing Sales Officer, Pelindo Regional 3 in 2023 conducted 629 Customer Visit activities, both for potential customers and existing customers who have the potential for business collaboration. Several collaborations were carried out in 2023 within Pelindo Regional 3 including:

1. Collaboration with TUKS PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) to provide loading and unloading services for Bulk Liquid Condensate commodities with a revenue value of +Rp158 million.
2. Collaboration in ship services (guiding and towing) at PT General Energy Bali Tersus Celukan Bawang Port with a revenue value of +Rp717 million.
3. Collaboration in the use of port warehouses with CV Artha Niaga Gemilang and PT Anugerah Nuansa Kasih at Bajo Harbor to support general cargo loading and unloading activities with a revenue value of +Rp480 million.
4. Cooperation in the use of port warehouses with PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) at Bima Port to support dry bulk loading and unloading activities with a revenue value of +Rp300 million.
5. Collaboration in the use of PT Multi Rasa Bogatama building facilities at Benoa Harbor with a revenue value of +Rp442 million.
6. Optimization of idle land at 4 port locations, through cooperation on the use of 528 m2 HPL land with PT Pelindo Husada Citra in Tanjung Perak, cooperation on the use of HPL land by the Midstream LNG Bali Consortium at Benoa Harbor, cooperation on the use of 5,030 m2 HPL land with PT Sarana Mbay Utama at Waingapu Port, and an MoU entered into with PT Centra Gedung Jaya regarding the cooperation plan for the use of the Old Martapura land in Banjarmasin.

REGIONAL 4

Promotional activities carried out in Regional 4 focused on maintaining good relationships with customers and other stakeholders. The activities carried out included coffee mornings at the Regional level and in almost all branches in the Regional 4 work area, including at the Merauke, Ternate, Kendari, Nunukan, Pantoloan, Parepare, Tanjung Redeb, Balikpapan, Tolitoli, Tarakan, Manokwari, Samarinda, Bitung and Makassar branches. Apart from that, together with the head office and all regionals, a gathering was held inviting key customers on September 27, 2023 and awards were presented to top customers. In accordance with the directive from the Board of Directors, tariffs and idle assets became one of the regional focuses, for this reason these two issues were included in the work plan with the following realization:

1. Optimizing idle assets at Manokwari Port by collaborating with PT Permata Sawit Mas with a collaboration value of Rp1,132,952,704 for a period of 10 years.

2. Evaluasi tarif kepelabuhanan telah dilakukan pemetaan terhadap tarif yang penerapannya lebih dari dua tahun dan telah ada persetujuan dari Kementerian Perhubungan untuk penyesuaian tarif Cabang Samarinda, Biak dan Nunukan.

2. Evaluating port tariffs were carried out by mapping tariffs that have been implemented for more than two years, and there has been approval from the Ministry of Transportation for tariff adjustments for the Samarinda, Biak and Nunukan Branches.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Realisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pelindo untuk induk perusahaan, *subholding* dan entitas anak pada tahun 2023 mencapai 25.495 orang atau 95,94% dari RKAP 2023. Hal ini antara lain dipengaruhi adanya pekerja yang pensiun, mutasi internal ke *subholding*, anak/cucu perusahaan dan serah terima operasi.

COMPARISON OF TARGETS AND REALIZATION OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Pelindo's Human Capital (HC) realization for the parent company, subholdings and subsidiaries in 2023 reached 25,495 people or 95.94% of the 2023 RKAP. This was influenced by workers retiring, internal transfers to subholdings, the Company's subsidiaries/sub-subsidiaries and handover of operations.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sumber Daya Manusia
Comparison of Human Capital and Realization

(dalam satuan Orang)	(in People)		
Uraian Description	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	
Posisi Organik Organic Position			
Induk Perusahaan (a) Parent Company (a)	3.297	2.479	75,19%
Penugasan ke <i>Subholding</i> (b) On assignment to <i>Subholding</i> (b)	3.632	4.414	121,53%
Penugasan ke Entitas Anak Lainnya (c) On assignment to Other Subsidiaries (c)	120	95	79,17%
Sub Total Organik Induk Perusahaan (a+b+c) Parent Company Organic Sub Total (a+b+c)	7.049	6.988	99,13%
Organik Entitas Anak pada <i>Subholding</i> (d) Organic Subsidiaries in <i>Subholding</i> (d)	1.947	2.006	103,03%
Organik Entitas Anak Lainnya (e) Other Organic Subsidiaries (e)	660	500	75,76%
Total Pegawai Organik (a+b+c+d+e) Total Organic Employees (a+b+c+d+e)	9.656	9.494	98,32%
Posisi Non Organik, Organik Pemegang Saham Lainnya dan BOD Non Pelindo Non-Organic, Other Organic Shareholders and Non-Pelindo BOD Position			
Induk Perusahaan (f) Parent Company (f)	3.313	2.400	72,44%
Subholding (g)	12.063	12.338	102,28%
▪ PKWT (g1)	12.034	12.308	102,28%
▪ TAD (g2)			
▪ Organik Pemegang Saham Lainnya (g3) Other Organic Shareholders (g3)	1	1	100,00%
▪ BOD Non Pelindo (g4)	28	29	103,57%
Entitas Anak Lainnya (h) Other Subsidiaries (h)	1.542	1.263	81,91%
▪ PKWT (h1)	1.531	1.256	82,04%
▪ TAD (g2)			



Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sumber Daya Manusia
Comparison of Human Capital and Realization

(dalam satuan Orang)

(in People)

Uraian Description	RKAP 2023 2023 RKAP	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	
▪ Organik Pemegang Saham Lainnya (h3) Other Organic Shareholders (h3)	7	2	28,57%
▪ BOD Non Pelindo (h4)	4	5	125,00%
Total Pegawai Non Organik (f+g+h) Total Non-Organic Employees (f+g+h)	16.918	16.001	94,58%
Jumlah Induk Perusahaan (a + f) Total Parent Company (a + f)	6.610	4.879	73,81%
Jumlah Subholding (b) + (d) + (g) Total Subholding (b) + (d) + (g)	17.642	18.758	106,33%
Jumlah Entitas Anak (c + e + h) Total Subsidiaries (c + e + h)	2.322	1.858	80,02%
Total	26.574	25.495	95,94%

PROYEKSI/TARGET KE DEPAN

ASUMSI DALAM MENYUSUN PROYEKSI

Dalam penyusunan proyeksi tahun 2024, Pelindo menggunakan beberapa asumsi dasar makro antara lain sebagai berikut:

FUTURE PROJECTIONS/TARGETS

ASSUMPTIONS WHEN MAKING PROJECTIONS

In preparing projections for 2024, Pelindo used several basic macro assumptions, including the following:

Tabel Asumsi Dasar Makro
Basic Macro Assumptions

Indikator Indicator	Asumsi Makro Ekonomi 2024 Macroeconomic Assumptions for 2024
Pertumbuhan ekonomi Economic growth	5,2%
Tingkat inflasi Inflation rate	2,8%
Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun 10 Year Government Securities (SBN)	6,7%
Kurs Rupiah (per USD) Indonesian Rupiah to USD exchange rate	Rp15.000
Harga minyak mentah (per Barel) Crude oil price (per barrel)	USD80 per barel

Sumber : RAPBN 2024 dan Nota Keuangan yang disampaikan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2023 serta Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 pada tanggal 29 September 2023 Nomor S-491/MBU/09/2023

Source : RAPBN 2024 and Financial Note submitted by the Government at the DPR RI Plenary Meeting on August 16, 2023 as well as Shareholder Aspirations for Preparing the Company's Work Plan and Budget for 2024 on September 29, 2023 No. S-491/MBU/09/2023

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, Pelindo menyusun proyeksi untuk tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Based on the above assumptions, Pelindo has prepared the following projections for 2024.

PROYEKSI PRODUKSI

Proyeksi produksi merupakan proyeksi arus trafik operasi kepelabuhan Pelindo yaitu sebagai berikut:

PRODUCTION PROJECTIONS

The production projections for the traffic flow in Pelindo's port operations is as follows:

Tabel Proyeksi Arus Trafik
Ship Traffic Projection

Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024 2024 RKAP
Arus Kapal Ship Traffic	Call	310.881
	GT	1.382.150.789
Arus Barang Non Petikemas Non-Container Goods Traffic	Ton	174.921.067
	M ³	6.127.296
	Unit	2.812.954
	MMBTU	12.760.000
	Ekor	721.430
Arus Petikemas Container Traffic	Box	13.676.893
	TEUs	17.778.740
Arus Penumpang Passenger Traffic	Orang	18.053.458



PROYEKSI KEUANGAN

Uraian proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

FINANCIAL PROJECTIONS

The projections for the 2024 Consolidated Financial Position Report are as follows.

Tabel Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statement of Financial Position Projectiona

(dalam miliar Rupiah)

(in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2024 2024 Projection
POSISI KEUANGAN FINANCIAL POSITION	
Aset lancar Current assets	20.145
Aset tidak lancar Non-current assets	92.836
Total aset Total assets	112.981
Liabilitas jangka pendek Short-term liabilities	24.907
Liabilitas jangka panjang Long-term liabilities	38.010
Total liabilitas Total liabilities	62.917
Ekuitas Equity	50.064
LABA RUGI PROFIT AND LOSS	
Pendapatan Usaha Operating revenues	32.294
Pendapatan Konstruksi Construction Revenues	2.345
Laba Usaha Income from operations	7.069
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	4.799
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Income Tax	4.347
Laba Periode Berjalan Income for the Period	3.500
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan Total Comprehensive Income for the Period	5.548
RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS	
EBITDA Margin	32,93%
BOPO	79,19%
Return on Asset (ROA)	3,03%
Return on Equity (ROE)	7,29%
Return on Invesmeted Capital (ROIC)	6,67%
Rasio Kas Cash Ratio	0,55
Rasio Lancar Current Ratio	0,81

PROYEKSI STRUKTUR MODAL

Uraian proyeksi struktur modal tahun 2024 disajikan sebagai berikut

CAPITAL STRUCTURE PROJECTIONS

A projections for capital structure for 2024 are as follows:

Tabel Proyeksi Struktur Modal
Capital Structure Projections

(dalam miliar Rupiah)	(in million Rupiah)
Uraian Description	RKAP 2024 2024 Projection
Liabilitas Jangka Pendek Current liabilities	24.907
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current liabilities	38.010
Total Liabilitas Total Liabilities	62.917
Total Ekuitas Total Equity	50.064
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	112.981

PROYEKSI KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen didasarkan pada pemenuhan kepentingan Pemegang Saham serta rencana pengembangan usaha. Keputusan penentuan besaran dividen dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Pada tahun 2024, Pelindo berencana membagikan dividen atas laba tahun buku 2023 sebesar Rp1,00 triliun. Besarnya pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024, penentuan nilai dividen dilakukan saat pembahasan Pra RUPS.

DIVIDEND POLICY PROJECTIONS

The dividend policy is based on fulfilling the interests of Shareholders and business development plans. The decision to determine the amount of dividends is made at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). In 2024, Pelindo plans to distribute dividends on profits for the 2023 fiscal year of Rp1.00 trillion. The amount of cash dividend payments will be made through approval at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), with the dividend value to be determined during a Pre-GMS discussion.

PROYEKSI PEMASARAN

Uraian proyeksi pemasaran tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

MARKETING PROJECTIONS

A description of marketing projections for 2024 is presented as follows.

REGIONAL 1

Proyeksi pemasaran Regional 1 di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Khusus PT IBP di Lubuk Gaung Dumai.
2. *Addendum* Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Khusus PT Energi Unggul Persada di Lubuk Gaung Dumai.
4. Perjanjian Kerjasama Jasa Kepelabuhanan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Pupuk Iskandar Muda Lhokseumawe.
5. Implementasi *Autogate* Pas Pelabuhan di Regional 1.

REGIONAL 1

Regional 1 marketing projections in 2024 are as follows:

1. Extension of the Port Services Cooperation Agreement at the PT IBP Special Terminal in Lubuk Gaung Dumai.
2. Addendum to the Operational Cooperation Agreement with the Batam Free Trade Zone and Free Port Management Agency.
3. Extension of the Port Services Cooperation Agreement at the PT Energi Unggul Persada Special Terminal in Lubuk Gaung Dumai.
4. Port Services Cooperation Agreement at the Terminal for Own Benefits (TUKS) PT Pupuk Iskandar Muda Lhokseumawe.
5. Implementation of Port Pass *Autogate* in Regional 1.

Proyeksi pengelolaan properti Regional 1 di tahun 2024 adalah melakukan MOU/perjanjian kerja sama baru dan perpanjangan kerjasama yang diuraikan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan sebagian ruangan di Graha Pelindo dengan BNCT.

The projection for Regional 1 property management in 2024 is to carry out new MOUs/cooperation agreements and extensions of cooperations, as follows:

1. Cooperation Agreement on the Use of part of the space at Graha Pelindo with BNCT.



2. Kerja sama Pemanfaatan Lahan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Meranti.
3. Perpanjangan Kerja sama Pengoperasian Terminal Roro dan Kendaraan dengan IKT.

REGIONAL 2

Untuk proyeksi pemasaran Regional 2 di tahun 2024 terdapat beberapa rencana pengembangan dan kegiatan pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi tarif jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan pada cabang Pelabuhan Regional 2.
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelanggan untuk *existing customer* dan *potential customer*.
3. Rencana Pengembangan Bisnis di lingkungan Regional 2.
 - a. Pengembangan Bisnis untuk Jasa Layanan Baru antara lain:
 - Jasa layanan *hico-scan* (lanjutan) di Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Optimalisasi *videotron* di Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Jasa *oil spill response* di Pelabuhan Pontianak.
 - Jasa jembatan timbang di Pelabuhan Cirebon dan Sunda Kelapa.
 - Pelayanan jasa angkutan laut tongkang batu bara di Pelabuhan Jambi.
 - *Buffer area*/jembatan timbang di Pelabuhan Bengkulu.
 - Jasa penggunaan alur Bengkulu.
 - *Stripping stuffing* petikemas di Pelabuhan Tanjung Pandan.
 - b. Rencana Pengembangan Bisnis dalam rangka Ekspansi Pasar antara lain:
 - Pemanfaatan lahan kawasan pendukung Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.
 - Kerjasama pemanfaatan lahan dengan Unionindo di Pelabuhan Banten.
 - Pengembangan layanan CFS Muara Sabak di Pelabuhan Jambi.
 - Jasa angkutan laut batu bara di Pelabuhan Bengkulu.
 - Perluasan wilayah pelimpahan perairan wajib pandu tunda ke arah Sungai Lematang di Pelabuhan Palembang.
 - c. Rencana Pengembangan Bisnis dalam rangka Pengembangan Kapasitas antara lain:
 - Pengembangan lahan Ex Adhiguna di Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Pengembangan Eks JICT 2 di Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Pengembangan dermaga curah cair di Pelabuhan Teluk Bayur.
 - Pemanfaatan lahan sungai lais di Pelabuhan Palembang.
 - Penambahan dermaga curah cair Kijing di Pelabuhan Pontianak.
 - Pengembangan lapangan dan dermaga di Pelabuhan Jambi.
 - Pengembangan terminal curah cair di Pelabuhan Bengkulu.

2. Land Utilization Cooperation with the Meranti Islands Industry and Trade Service.
3. Extension of Cooperation in Operation of Roro Terminal and Vehicles with IKT.

REGIONAL 2

For Regional 2 marketing projections in 2024, there are several development plans and marketing activities as follows:

1. Evaluation of tariffs for port services and port-related services at Regional 2 Port branches.
2. Implementation of customer management activities for existing customers and potential customers.
3. Business Development Plan in Regional 2.
 - a. Business Development for New Services includes:
 - Hico-scan services (advanced) at Tanjung Priok Port.
 - Optimization of videotron at Tanjung Priok Port.
 - Oil spill response services at Pontianak Harbor.
 - Weighbridge services at Cirebon and Sunda Kelapa Ports.
 - Coal barge sea transportation services at Jambi Port.
 - Buffer area/weighbridge at Bengkulu Port
 - Services for using the Bengkulu route.
 - Stripping stuffing of containers at Tanjung Pandan Port.
 - b. Business Development Plans for Market Expansion include:
 - Use of land in the supporting area of the Kijing Terminal, Pontianak Port.
 - Collaboration on land use with Unionindo at Banten Port.
 - Development of Muara Sabak CFS services at Jambi Port.
 - Coal sea transportation services at Bengkulu Port.
 - Expansion of the water overflow area, which requires tugboats towards the Lematang River at Palembang Harbor.
 - c. Business Development Plans for Capacity Development including:
 - Development of Ex Adhiguna land at Tanjung Priok Port.
 - Development of Ex JICT 2 at Tanjung Priok Port.
 - Development of a liquid bulk dock at Teluk Bayur Port.
 - Utilization of Lais River land at Palembang Harbor.
 - Additional Kijing liquid bulk dock at Pontianak Port.
 - Development of fields and docks at Jambi Port.
 - Development of liquid bulk terminal at Bengkulu Port.

- Sentralisasi layanan petikemas dengan IPC TPK di Pelabuhan Pangkal Balam.
 - Optimalisasi lahan aset PT Timah di tengah Pelabuhan Pangkal Balam.
 - Pengembangan air kapal melalui pipa di Pelabuhan Tanjung Pandan.
 - Pengembangan layanan penumpukan petikemas di Pelabuhan Tanjung Pandan.
- d. Rencana Kerja sama Pemanfaatan Lahan *Idle*
- Kerja sama dengan PT Laban Raya Samodra di Pelabuhan Muara Sabak, Jambi.
 - Kerja sama dengan PT Jambi Resources di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.
 - Kerja sama dengan PT Calang Sejati Indah di Pelabuhan Sungai Lais, Palembang.
 - Kerja sama dengan PT Unionindo di Pelabuhan Banten, Banten.
 - Kerja sama dengan PT Jawa Lumbang Mas di Pelabuhan Panjang, Lampung.
- e. Rencana Penanganan Permasalahan Lahan
- Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Banten.
 - Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Bengkulu.
 - Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Palembang.
 - Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Pangkalbalam.
 - Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Sunda Kelapa.
 - Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Teluk Bayur.
- Centralization of container services with IPC TPK at Pangkal Balam Port.
 - Optimization of PT Timah's asset land in the middle of Pangkal Balam Port.
 - Development of ship water through pipes at Tanjung Pandan Port.
 - Development of container stacking services at Tanjung Pandan Port.
- d. Idle Land Utilization Cooperation Plans
- Collaboration with PT Laban Raya Samodra at Muara Sabak Port, Jambi.
 - Collaboration with PT Jambi Resources at Pulau Baai Port, Bengkulu.
 - Collaboration with PT Calang Sejati Indah at Sungai Lais Port, Palembang.
 - Collaboration with PT Unionindo at Banten Port, Banten.
 - Collaboration with PT Jawa Lumbang Mas at Panjang Port, Lampung.
- e. Handling Land Problems Plans
- Handling land problems at Banten Port.
 - Handling land problems at Bengkulu Port.
 - Handling land problems at Palembang Port.
 - Handling land problems at Pangkalbalam Port.
 - Handling land problems at Sunda Kelapa Port.
 - Handling Land Problems at Tanjung Priok Port.
 - Handling land problems at Teluk Bayur Port.

REGIONAL 3

Proyeksi aktivitas pemasaran pada tahun 2024 di Pelindo Regional 3 adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Pelayanan Jasa dengan Mitra BUMN/Swasta:
 - a. Kerjasama dengan TUKS PT PUSRI di Pelabuhan Tanjung Wangi untuk kegiatan bongkar muat curah kering.
 - b. Kerjasama *handling* beras milik Perum Bulog di Pelabuhan Benoa.
 - c. Kerjasama *handling* semen dan pemanfaatan gudang dengan PT Saka Agung di Pelabuhan Bima.
 - d. Kerjasama pengoperasian jembatan timbang di Pelabuhan Bima.
 - e. Kerjasama *handling* curah kering dan pemanfaatan lahan dengan PT Cahaya Aulia di Pelabuhan Stagen Kotabaru.
 - f. Perpanjangan kerjasama *handling* semen dengan PT Air Mas Logistik di Pelabuhan Pulang Pisau.
 - g. Perpanjangan kerjasama pemanfaatan dermaga untuk kegiatan bongkar muat aspal curah dengan PT Aspal Bangun Sarana di Pelabuhan Batulicin.
 - h. Perpanjangan kerjasama *handling* batu bara dengan PT Semesta Borneo Abadi di Pelabuhan Stagen Kotabaru.

REGIONAL 3

Projections for marketing activities in 2024 at Pelindo Regional 3 include the following:

1. Service Collaboration with SOEs/Private Partners:
 - a. Collaboration with TUKS PT PUSRI at Tanjung Wangi Port for dry bulk loading and unloading activities.
 - b. Collaboration in handling rice belonging to Perum Bulog at Benoa Port.
 - c. Collaboration in handling cement and warehouse utilization with PT Saka Agung at Bima Port.
 - d. Cooperation in operating the weighbridge at Bima Port.
 - e. Cooperation in dry bulk handling and land use with PT Cahaya Aulia at Stagen Port, Kotabaru.
 - f. Extension of cement handling cooperation with PT Air Mas Logistik at Pulang Pisau Port.
 - g. Extension of cooperation for utilizing the pier for loading and unloading bulk asphalt activities with PT Aspal Bangun Sarana at Batulicin Port.
 - h. Extension of coal handling cooperation with PT Semesta Borneo Abadi at Stagen Port, Kotabaru.



2. Kerja sama Pemanfaatan Lahan:
 - a. Perpanjangan kerja sama penggunaan lahan TUKS PT PUSRI di Pelabuhan Tanjung Intan.
 - b. Perpanjangan kerja sama penggunaan lahan PT Dharmapala Usaha Sukses di Tanjung Intan.
 - c. Optimalisasi lahan *idle* di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak, Gresik, Tegal, Banjarmasin, dan Waingapu.
3. Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Terkait Kepelabuhanan pada 21 Pelabuhan.
4. Implementasi *Autogate System* (Pas Pelabuhan) pada 19 Pelabuhan.
5. Pelaksanaan kegiatan program bina pelanggan untuk *potential customer* dan *existing customer*.
6. Implementasi aplikasi *Customer Relationship Management (CRM) Connect* untuk mendukung kegiatan pelayanan pelanggan.

REGIONAL 4

Proyeksi pemasaran Regional 4 di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama digitalisasi layanan diantaranya adalah penerapan *Centralized Ticketing Terminal (CTT) system* bekerja sama dengan ILCS serta penerapan *autogate system* untuk pelayanan pas pelabuhan bekerja sama PT Centre Park, dengan target masing-masing 3 (tiga) cabang untuk tahun 2024.
2. Optimalisasi pendapatan atas perpanjangan dan penyesuaian perjanjian kerja sama dengan PT EPFM untuk pemanfaatan aset pada cabang Makassar.
3. Kerja sama dengan PT SITC untuk *direct call* pada cabang Bitung dan Tarakan.
4. Kerja sama dengan PT Atosim Lampung Pelayaran untuk penambahan trayek baru di Pelabuhan Pantoloan.
5. Ekspansi pasar PBM ke wilayah TUKS, diantaranya TUKS PT MNS di Bitung.
6. Menjaga pasar *market share* PBM curah cair dan curah kering, dengan target untuk tahun 2024 sebesar 55% untuk curah cair dan 80% untuk curah kering.

PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM

Uraian proyeksi pengembangan SDM tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

2. Land Use Cooperation:
 - a. Extension of PT PUSRI TUKS land use cooperation at Tanjung Intan Port.
 - b. Extension of land use cooperation with PT Dharmapala Usaha Sukses in Tanjung Intan.
 - c. Optimization of idle land in the Tanjung Perak, Gresik, Tegal, Banjarmasin and Waingapu Ports.
3. Adjustment of Tariffs for Port Services and Port-Related Services at 21 Ports.
4. Implementation of the Autogate System (Port Pass) at 19 Ports.
5. Implementation of customer development program activities for potential and existing customers.
6. Implementation of the Customer Relationship Management (CRM) Connect application to support customer service activities.

REGIONAL 4

Regional 4 marketing projections in 2024 include the following:

1. Collaboration on digitizing services including the implementation of a Centralized Ticketing Terminal (CTT) system in collaboration with ILCS as well as the implementation of an autogate system for port pass services in collaboration with PT Center Park, with a target of 3 (three) branches each by 2024.
2. Optimization of revenue from the extension and adjustment of the cooperation agreement with PT EPFM for the use of assets at the Makassar branch.
3. Collaboration with PT SITC for direct calls at Bitung and Tarakan branches.
4. Collaboration with PT Atosim Lampung Pelayaran to add new routes at Pantoloan Port.
5. Expansion of the PBM market to the TUKS area, including TUKS PT MNS in Bitung.
6. Maintaining the liquid bulk and dry bulk PBM market share, with a target for 2024 of 55% for liquid bulk and 80% for dry bulk.

HC DEVELOPMENT PROJECTIONS

The projected HC development for 2024 is presented as follows.

Tabel Proyeksi Sumber Daya Manusia
Capital Structure Projections

(dalam satuan Orang)

(dalam satuan Orang)

Uraian Description	RKAP 2024 2024 Projection
(1)	(2)
Posisi Organik Organic Positions	
Induk Perusahaan (a) Parent Company (a)	2.337

Tabel Proyeksi Sumber Daya Manusia
Capital Structure Projections

(dalam satuan Orang)

(dalam satuan Orang)

Uraian Description	RKAP 2024 2024 Projection
(1)	(2)
Penugasan ke <i>Subholding</i> (b) On assignment to Subholding (b)	4.390
Penugasan ke Anak Perusahaan Lainnya (c) On assignment to Other Subsidiaries (c)	101
Sub Total Organik Induk Perusahaan (a+b+c) Parent Company Organic Sub Total (a+b+c)	6.828
Organik Anak Perusahaan pada <i>Subholding</i> (d) Organic Subsidiaries in Subholding (d)	2.026
Organik Anak Perusahaan Lainnya (e) Other Organic Subsidiaries (e)	463
Total Pegawai Organik (a+b+c+d+e) Total Organic Employees (a+b+c+d+e)	9.317
Posisi Non Organik, Organik Pemegang Saham Lainnya dan BOD Non Pelindo Non-Organic, Other Organic Shareholders and Non-Pelindo BOD Position	
Induk Perusahaan (f) Parent Company (f)	2.376
▪ PKWT (f.1)	44
▪ Tenaga Alih Daya (f.2)	2.332
Subholding (g)	12.457
▪ PKWT (g.1)	1.395
▪ TAD (g.2)	11.037
▪ Pekerja Pemegang Saham Lainnya (g.3) Other Organic Shareholders (g.3)	1
▪ BOD Non Pelindo (g.4)	24
Anak Perusahaan Lainnya (h) Other Subsidiaries (h)	1.337
▪ PKWT (h.1)	456
▪ TAD (h.2)	875
▪ Pekerja Pemegang Saham Lainnya (h.3) Other Shareholder Employees (p.3)	2
▪ BOD Non Pelindo (h.4)	4
Total Pegawai Non Organik (f) + (g) + (h) Total Non-Organic Employees (f) + (g) + (h)	16.170
Jumlah Induk Perusahaan (a) + (f) Total Parent Company (a) + (f)	4.713
Jumlah Subholding (b) + (d) + (g) Total Subholding (b) + (d) + (g)	18.873
Jumlah Anak Perusahaan (c) + (e) + (h) Total Subsidiaries (c) + (e) + (h)	1.901
Total	25.487



EVALUASI RENCANA JANGKA PANJANG (RJP)

Pelindo memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2021-2025, Pelindo senantiasa melakukan evaluasi terhadap RJPP 2021-2025. Evaluasi rencana jangka panjang dilakukan untuk melihat kesesuaian rencana dalam upaya mencapai *World Class Port Ecosystem Integrator* pada tahun 2025. Hasil evaluasi rencana jangka panjang ini menjadi pedoman dan pertimbangan dalam menyusun RKAP selanjutnya.

EVALUASI ASUMSI MAKRO DAN MIKRO RJP

Informasi evaluasi asumsi makro dan Mikro RJP disajikan sebagai berikut:

Tabel Asumsi Makro/Eksternal
Macro/External Assumptions

Pada RJP RJP	Realisasi Realization	Keterangan/Dampak Description/Impact
Nilai Tukar Rupiah 14.065 Rp/USD (RJP SPTP: 14.065 Rp/USD) Rupiah Exchange Rate 14,065 Rp/USD (RJP SPTP: 14,065 Rp/USD)	> Rp15.000/USD (Triwulan IV 2022 sampai dengan 2023) > Rp15,000/USD (QIV 2022 to 2023)	Fluktuasi nilai dollar berpengaruh pada pendapatan terutama terminal yang memiliki bisnis petikemas internasional. Peningkatan nilai dollar akan menambah beban selisih kurs pada beban bunga. Fluctuations in the value of the dollar affects income, especially in terminals that have an international container business. An increase in the dollar's value will increase the cost of foreign exchange differences on interest expenses.
Pertumbuh Ekonomi 5,17% Economic Growth 5.17%	5,3%	Pertumbuhan ekonomi domestik pada RJP masih sesuai namun ekonomi global masih dalam tekanan. Domestic economic growth in the RJP is still appropriate but the global economy is still under pressure.
Inflasi 3,09% Inflation 3.09%	3,6%	Peningkatan biaya operasional secara umum. Increased general operating costs.
Harga BBM Non Subsidi Rp13.000/liter Non-subsidized fuel price Rp13,000/liter	Rp20.388/liter	Peningkatan biaya bahan (BBM) yang cukup signifikan. Increased material (fuel) costs is quite significant.

Tabel Asumsi Mikro/Internal
Micro/External Assumptions

Pada RJP RJP	Realisasi Realization	Keterangan/Dampak Description/Impact
Divestasi Saham PT CTP Divestment of PT CTP Shares	Belum terealisasi Not yet realized	Tidak tercapainya target kinerja keuangan. Failure to achieve financial performance targets.
Imbreg Aset kepada <i>Subholding</i> Imbreg Assets to Subholding	Belum terealisasi Not yet realized	<i>Imbreg</i> diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi aset, namun perlu dilakukan kajian komprehensif pada dampak kinerja keuangan terhadap <i>Subholding</i> . Imbreg is expected to increase asset optimization, but a comprehensive study needs to be carried out on the impact on the Subholding financial performance.
<i>Strategic Partneship</i> pada BNCT, CT2, Makassar <i>New Port</i> , dan Kuala Tanjung Strategic Partnership at BNCT, CT2, Makassar New Port, and Kuala Tanjung	Terealisasi: BNCT Belum terealisasi: CT2, MNP, Kuala Tanjung Realized: BNCT Not yet realized: CT2, MNP, Kuala Tanjung	Risiko tidak tercapainya proyeksi pertumbuhan anorganik pada tahun 2023 dan 2024. Risk of not achieving inorganic growth projections in 2023 and 2024.

EVALUATION OF LONG TERM PLANS (RJP)

Pelindo has a Long Term Company Plan for 2021-2025, and Pelindo is always evaluating the 2021-2025 RJPP. A long-term plan evaluation was carried out to see the suitability of the plan to achieve *World Class Port Ecosystem Integrator* status by 2025. The results of this long-term plan evaluation serves as guidelines and considerations when preparing the next RKAP

EVALUATION OF RJP'S MACRO AND MICRO ASSUMPTIONS

Information on evaluating RJP's macro and micro assumptions are presented as follows:

Tabel Asumsi Mikro/Internal
Micro/External Assumptions

Pada RJP RJP	Realisasi Realization	Keterangan/Dampak Description/Impact
<p><i>Throughput growth</i> dari Pengembangan Pelabuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Kuala Tanjung • Terminal Kijing • NPEA • New Palembang/Tanjung Carat • Pelabuhan Ambon Baru • Terminal Penumpang Kupang-Waingapu • Pelabuhan Benoa <p><i>Throughput growth</i> from Port Development:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuala Tanjung Port • Kijing Terminal • NPEA • New Palembang/Tanjung Carat • New Ambon Port • Kupang-Waingapu Passenger Terminal • Benoa Port 	<p>Batalnya rencana pengembangan Pelabuhan Ambon Baru dan Pelabuhan Tanjung Carat.</p> <p>Canceled plans to develop Ambon Baru Port and Tanjung Carat Port.</p>	<p>Target <i>throughput growth</i> perlu ditinjau kembali.</p> <p>Throughput growth targets needs to be reviewed.</p>

EVALUASI KINERJA OPERASIONAL DAN KEUANGAN RJP

Informasi evaluasi kinerja operasional dan keuangan disajikan sebagai berikut:

EVALUATION OF RJP'S OPERATIONAL AND FINANCIAL PERFORMANCE

Operational and financial performance evaluation information is presented as follows:

Tabel Evaluasi Kinerja Operasional RJP
Evaluation of RJP Operational Performance

Uraian Uraian	Realisasi Realization	Realisasi Realization	RJP	RKAP	Realisasi Realization	RJP	RJP	Realisasi dibandingkan RJP 2023 Realization compared to 2023 RJP
	Tahun 2021 Audited 2021 Audited	Tahun 2022 Audited 2022 Audited	Tahun 2023 2023	Tahun 2023 2023	Tahun 2023 Audited 2023 Audited	Tahun 2024 2024	Tahun 2025 2025	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[f : d]
Arus Kapal (juta GT) Ship Traffic (million GT)	1.186	1.202	1.341	1.248	1.286	1.431	1.500	95,7%
Arus Petikemas (juta TEUs) Container Traffic (million TEUs)	17,06	17,22	17,81	17,7	17,66	18,60	19,53	99,2%
Arus Barang (juta ton) Goods Traffic (million tons)	146,20	159,73	159,11	161,50	169,85	172,10	186,07	106,8%

Capaian kinerja operasional secara umum sesuai dengan proyeksi target RJP tahun 2023 dengan rata-rata deviasi <5%. Deviasi negatif terbesar terjadi pada arus kapal yaitu sebesar -4,1%. Berikut rincian dari kinerja operasional terhadap RJP:

1. Target kinerja arus kapal pada RKAP 2023 adalah 1.248 juta GT atau sebesar 93,1% dari proyeksi target pada RJP. Realisasi arus kapal tahun 2023 adalah 1.286 juta GT atau tercapai 103,0% dari RKAP dan 95,9% dari target RJP tahun 2023.
2. Target kinerja arus petikemas pada RKAP 2023 adalah 17,70 juta TEUs atau sebesar 99,4% dari proyeksi target pada RJP. Realisasi arus petikemas tahun 2023 adalah 17,66 juta TEUs atau tercapai 99,8% dari RKAP dan 99,2% dari target RJP tahun 2023.

Operational performance achievements were generally in line with the RJP target projection for 2023 with an average deviation of <5%. The largest negative deviation occurred in ship traffic, namely -4.1%. The following shows details of the operational performance against RJP:

1. The ship traffic performance target in the 2023 RKAP was 1,248 million GT, or 93.1% of the projected target in the RJP. The realization of ship traffic in 2023 was 1,286 million GT, or 103.0% of the RKAP and 95.9% of the RJP target for 2023.
2. The container traffic performance target in the 2023 RKAP was 17.70 million TEUs, or 99.4% of the projected target in the RJP. The realization of container traffic in 2023 was 17.66 million TEUs, or 99.8% of the RKAP and 99.2% of the RJP target for 2023.



3. Target kinerja arus barang pada RKAP 2023 adalah 161,50 juta Ton atau sebesar 101,3% dari proyeksi target pada RJP. Realisasi arus barang tahun 2023 adalah sebesar 169,85 juta Ton atau tercapai 105,2% dari RKAP dan 106,8% dari target RJP tahun 2023.

3. The goods traffic performance target in the 2023 RKAP was 161.50 million tons, or 101.3% of the projected target in the RJP. The realization of goods traffic in 2023 was 169.85 million tons, or 105.2% of the RKAP and 106.8% of the RJP target for 2023.

Tabel Evaluasi Kinerja Keuangan RJP
RJP Financial Performance Evaluation

(dalam miliar Rupiah)

(in billion Rupiah)

Uraian Uraian	Realisasi Realization	Realisasi Realization	RJP	RKAP	Realisasi Realization	RJP	RJP	Realisasi dibandingkan RJP 2023 Realization compared to 2023 RJP
	Tahun 2021 Audited 2021 Audited	Tahun 2022 Audited 2022 Audited	Tahun 2023 2023	Tahun 2023 2023	Tahun 2023 Audited 2023 Audited	Tahun 2024 2024	Tahun 2025 2025	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[f : d]
Labas Rugi Profit and Loss								
Pendapatan Usaha Operating Income	28.815	29.701	32.189	31.819	31.018	35.384	38.175	96,0%
EBITDA	9.453	10.235	11.691	10.299	10.778	13.392	14.540	95,2%
EBITDA Margin	32,8%	34,8%	36,3%	32,4%	34,7%	37,8%	38,1%	
Laba Bersih Net Profit	3.176	3.908	4.052	3.820	4.013	5.257	6.127	96,5%
Net Profit Margin	11,0%	12,8%	12,6%	12,0%	12,0%	14,9%	16,1%	
Posisi Keuangan Financial Position								
Jumlah Aset Total Assets	116.229	118.351	117.879	112.077	118.341	122.973	122.149	100,6%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	74.176	75.546	67.337	64.786	71.500	69.000	64.161	108,2%
Jumlah Ekuitas Total Equity	42.053	42.805	50.543	47.290	46.841	53.973	57.988	90,6%

Capaian kinerja keuangan secara umum sesuai dengan proyeksi target RJP tahun 2023 dengan rata-rata deviasi <5%. Deviasi negatif terbesar terjadi pada EBITDA yaitu sebesar -7,8%. Berikut rincian kinerja keuangan terhadap RJP:

1. Target pendapatan pada RKAP tahun 2023 adalah Rp31,82 triliun atau sebesar 98,9% dari proyeksi target pada RJP. Realisasi pendapatan tahun 2023 adalah Rp31,02 triliun atau tercapai 97,5% dari RKAP dan 96,4% dari target RJP tahun 2023.
2. Target EBITDA pada RKAP tahun 2023 adalah Rp10,29 triliun atau sebesar 88,1% dari proyeksi target pada RJP. Realisasi EBITDA tahun 2023 adalah Rp10,78 triliun atau tercapai 104,7% dari RKAP dan 92,2% dari target RJP tahun 2023.
3. Target laba bersih pada RKAP tahun 2023 adalah Rp3,82 triliun atau sebesar 94,3% dari proyeksi target pada RJP. Realisasi laba bersih tahun 2023 adalah Rp4,01 triliun atau tercapai 105,1% dari RKAP dan 99,0% dari target RJP tahun 2023.

Financial performance achievements were generally in line with the 2023 RJP target projections with an average deviation of <5%. The largest negative deviation occurred in EBITDA with -7.8%. The following shows details of the financial performance of RJP:

1. The income target in the 2023 RKAP was Rp31.82 trillion, or 98.9% of the projected target in the RJP. Realized income in 2023 was Rp31.02 trillion, or 97.5% of the RKAP and 96.4% of the RJP target for 2023.
2. The EBITDA target in the 2023 RKAP was Rp10.29 trillion, or 88.1% of the projected target in the RJP. Realized EBITDA in 2023 was Rp10.78 trillion, or 104.7% of the RKAP and 92.2% of the RJP target for 2023.
3. The net profit target in the 2023 RKAP was Rp3.82 trillion, or 94.3% of the projected target in the RJP. Realized net profit in 2023 was Rp4.01 trillion, or 105.1% of the RKAP and 99.0% of the RJP target for 2023.

4. Target jumlah aset pada RKAP tahun 2023 adalah Rp112,08 triliun atau sebesar 95,1% dari proyeksi target pada RJP. Realisasi jumlah aset tahun 2023 adalah Rp118,341 triliun atau tercapai 105,6% dari RKAP dan 100,4% dari target RJP tahun 2023.

4. The assets target in the 2023 RKAP was Rp112.08 trillion, or 95.1% of the projected target in the RJP. Realized total assets in 2023 was Rp118.341 trillion, or 105.6% of the RKAP and 100.4% of the RJP target for 2023.

CAPAIAN INISIATIF STRATEGIS DAN PROGRAM KERJA

Pencapaian pelaksanaan Inisiatif Strategis dan Program Kerja tahun 2023 Pelindo Group adalah sebagai berikut:

ACHIEVEMENTS OF STRATEGIC INITIATIVES AND WORK PROGRAMS

Pelindo Group's 2023 Strategic Initiative and Work Program implementation achievements were as follows:

Tabel Capaian Inisiatif Strategis dan Program Kerja
Strategic Initiatives and Work Programs Achievements

No	Inisiatif Strategis/Proram Kerja Strategic Initiatives/Work Programs	Penjelasan Explanation
Holding		
1.	Pemurnian Bisnis Business Purification	27 Aksi Korporasi telah selesai pada 2023 (1 aksi penggabungan/pemekaran, 13 aksi <i>transfer</i> bisnis/ operasi, 5 aksi pengambilalihan usaha, 4 aksi restrukturisasi keuangan/bisnis, 4 aksi penambahan/ pelepasan kepemilikan saham) 27 Corporate Actions were completed in 2023 (1 action for merger/expansion, 13 actions for transfer of business/operations, 5 actions for business takeover, 4 actions for financial/business restructuring, 4 actions for addition/disposal of share ownership)
2.	Ganti nama sertifikat Change of certificate name	592 aset pelindo group. 592 Pelindo Group assets.
3.	Pelindo E-Office (PEO) Pelindo E-Office (PEO)	<i>Rollout</i> di 62 entitas pelindo group. <i>Rollout</i> in 62 Pelindo group entities.
4.	Serah Terima Handover	22 SO Petikemas, 20 SO Non-Petikemas, Serah Operasi SBPP dan Layanan Pemanduan di 4 regional, 11 perjanjian/BASU logistik. 22 SO Containers, 20 SO Containers, Handover of SBPP Operations and Guidance Services in 4 regions, 11 logistics agreements/BASU.
5.	Konsesi Concession	Telah ditandatangani 8 <i>addendum</i> konsesi paska penggabungan. 8 post-merger concession addendums were signed.
PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP)		
1.	Standardisasi Standardization	Standardisasi layanan terminal petikemas di 10 terminal (TPK Nilam, TPK Jayapura, TP 1 Zona 3, TPK Tarakan, TPK Pantoloan, TPK Perawang, TP 2 Domestik, TPK Kupang, TPK Semarang, TPK Bitung). Standardization of container terminal services at 10 terminals (TPK Nilam, TPK Jayapura, TP 1 Zone 3, TPK Tarakan, TPK Pantoloan, TPK Perawang, TP 2 Domestik, TPK Kupang, TPK Semarang, TPK Bitung).
2.	Digitalisasi Digitalization	Digitalisasi layanan terminal petikemas di 6 terminal (TPK Ambon, IPC TPK Area Pontianak, T2 TPKNM (MNP), IPC TPK Area Palembang, T1 PT PMT (TPK Belawan Domestik), IPC TPK Area Panjang). Digitalization of container terminal services at 6 terminals (TPK Ambon, IPC TPK Pontianak Area, T2 TPKNM (MNP), IPC TPK Palembang Area, T1 PT PMT (TPK Belawan Domestik), IPC TPK Panjang Area).
3.	<i>Hub and Spoke</i> Hub and Spoke	Implementasi <i>Hub and Spoke</i> di 3 Pelabuhan: Kupang, Teluk Bayur, dan Sorong. Implementation of <i>Hub and Spoke</i> in 3 Ports: Kupang, Teluk Bayur, and Sorong.
4.	<i>Transshipment</i> Transshipment	<i>Domestic to international transshipment</i> di 1 Pelabuhan (Pelabuhan Tanjung Priok). <i>Domestic to international transshipment</i> at 1 port (Tanjung Priok Port).



Tabel Capaian Inisiatif Strategis dan Program Kerja
Strategic Initiatives and Work Programs Achievements

No	Inisiatif Strategis/Proram Kerja Strategic Initiatives/Work Programs	Penjelasan Explanation
5.	Elektrifikasi Electrification	Implementasi elektrifikasi 4 alat bongkar muat sebagai bagian dari upaya keberlanjutan di pelabuhan (4 QCC Bitung). Implementation of electrification for 4 loading and unloading equipment as part of sustainability efforts at the port (4 QCC Bitung).
6.	Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Terminal for Own Use (TUKS)	Kerjasama pengoperasian <i>handling</i> petikemas di 1 TUKS (PT RAPP Futong di Pelabuhan Perawang) IKPP. Cooperation in container handling operations at 1 TUKS (PT RAPP Futong at Perawang Port) IKPP.
7.	Key Account Management Key Account Management	Penambahan 21 rute baru petikemas. Addition of 21 new container routes.
PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)		
1.	Standardisasi Standardization	Standardisasi layanan terminal non-petikemas sekaligus sistemisasi layanan di 24 lokasi (Tanjung Perak, Tanjung Wangi, Bagendang, Makassar, Balikpapan, Dumai, Bumiharjo, Trisakti, Badas, Belawan, Gresik, Tanjung Priok, Cirebon, Bengkulu, Tanjung Pandan, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Panjang, Jambi, Palembang, Pontianak, Kijing, Banten, Tanjung Emas). Standardisasi layanan terminal non-petikemas sekaligus sistemisasi layanan di 24 lokasi (Tanjung Perak, Tanjung Wangi, Bagendang, Makassar, Balikpapan, Dumai, Bumiharjo, Trisakti, Badas, Belawan, Gresik, Tanjung Priok, Cirebon, Bengkulu, Tanjung Pandan, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Panjang, Jambi, Palembang, Pontianak, Kijing, Banten, Tanjung Emas). Standardization of non-container terminal services and systemization of services in 24 locations (Tanjung Perak, Tanjung Wangi, Bagendang, Makassar, Balikpapan, Dumai, Bumiharjo, Trisakti, Badas, Belawan, Gresik, Tanjung Priok, Cirebon, Bengkulu, Tanjung Pandan, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Panjang, Jambi, Palembang, Pontianak, Kijing, Banten, Tanjung Emas).
2.	Digitalisasi Digitalization	Digitalisasi layanan terminal non-petikemas sekaligus sistemisasi layanan di 24 lokasi (Tanjung Perak, Tanjung Wangi, Bagendang, Makassar, Balikpapan, Dumai, Bumiharjo, Trisakti, Badas, Belawan, Gresik, Tanjung Priok, Cirebon, Bengkulu, Tanjung Pandan, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Panjang, Jambi, Palembang, Pontianak, Kijing, Banten, Tanjung Emas). Digitalization of non-container terminal services as well as systemization of services in 24 locations (Tanjung Perak, Tanjung Wangi, Bagendang, Makassar, Balikpapan, Dumai, Bumiharjo, Trisakti, Badas, Belawan, Gresik, Tanjung Priok, Cirebon, Bengkulu, Tanjung Pandan, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Panjang, Jambi, Palembang, Pontianak, Kijing, Banten, Tanjung Emas).
3.	Terminalisasi Terminalization	Terminalisasi pada 9 terminal non-petikemas yang tersebar di 6 Cabang Pelabuhan (TCC Ujung Baru Belawan, TCK Ujung Baru Belawan, TCK IKD 2 & 3 Belawan, TCC Dermaga CPO I & II Bagendang, TCK Dermaga C Dumai, TCC Dermaga B Dumai, TCK Multipurpose 2 Tanjung Intan, TCC Jetty 1 dan 2 Bumiharjo, TCC Martapura Baru Trisakti). Terminalization at 9 non-container terminals in 6 port branches (TCC Ujung Baru Belawan, TCK Ujung Baru Belawan, TCK IKD 2 & 3 Belawan, TCC CPO Pier I & II Bagendang, TCK Pier C Dumai, TCC Pier B Dumai, TCK Multipurpose 2 Tanjung Intan, TCC Jetty 1 and 2 Bumiharjo, TCC Martapura Baru Trisakti).
4.	Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Terminal for Own Use (TUKS)	Kerjasama pengoperasian di 4 pelabuhan TUKS (PT Bukit Asam Teluk Bayur, TUKS BNJMP Talang Baru, TUKS KKT di IKN, IBT Mekar Putih). Operational cooperation at 4 TUKS ports (PT Bukit Asam Teluk Bayur, TUKS BNJMP Talang Baru, TUKS KKT at IKN, IBT Mekar Putih).
5.	Kerjasama Kementerian/Lembaga (K/L) Ministry/Agency Collaboration (K/L)	Kerjasama pengoperasian Pelabuhan milik Kementerian/Lembaga di 2 Pelabuhan (Pelabuhan Pare-Pare Garongkong dan Pelabuhan Badas). Cooperation in the operation of ports belonging to ministries/agencies at 2 ports (Pare-Pare Garongkong Port and Badas Port).
6.	Layanan Non-Petikemas Tambahan Additional Non-Container Services	Kerjasama LNG Benoa. Benoa LNG Cooperation.
7.	Optimalisasi Peralatan Pelabuhan Port Equipment Optimization	Relokasi/optimalisasi 11 aset peralatan non-petikemas (relokasi 2 <i>forklift</i> dari Banjarmasin ke Trisakti dan dari Tanjung Priok ke Kijing, relokasi 2 GLC dari Tanjung Priok ke Banten, optimalisasi aset 2 GLC ex MTI, relokasi <i>grab hopper</i> dari Belawan ke Makassar, relokasi <i>bucket</i> dari Belawan ke Dumai, relokasi 2 Hopper dari Banten ke Kijing, relokasi <i>mobile crane</i> dari Belawan ke Kijing). Relocation/optimization of 11 non-container equipment assets (relocation of 2 forklifts from Banjarmasin to Trisakti and from Tanjung Priok to Kijing, relocation of 2 GLCs from Tanjung Priok to Banten, optimization of assets of 2 GLCs ex MTI, relocation of grab hoppers from Belawan to Makassar, relocation of buckets from Belawan to Dumai, relocation of 2 Hoppers from Banten to Kijing, relocation of mobile crane from Belawan to Kijing).

Tabel Capaian Inisiatif Strategis dan Program Kerja
Strategic Initiatives and Work Programs Achievements

No	Inisiatif Strategis/Proram Kerja Strategic Initiatives/Work Programs	Penjelasan Explanation
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL)		
1.	Standardisasi Standardization	Standardisasi layanan logistik di 3 lokasi (Lapangan CCDC 100 Makassar, Gudang CDC Banda Tanjung Priok, Lapangan Pasoso Tanjung Priok). Standardization of logistics services in 3 locations (CCDC 100 Makassar Field, CDC Banda Tanjung Priok Warehouse, Pasoso Tanjung Priok Field).
2.	Digitalisasi Digitalization	Digitalisasi layanan logistik di 2 lokasi (implementasi <i>Yard Operating System</i> (YOS) di Lapangan CCDC 100 Makassar, <i>improvement Behandle Operating System</i> (BOS) di <i>Common Area</i> Tanjung Priok). Digitalization of logistics services in 2 locations (implementation of Yard Operating System (YOS) at CCDC 100 Makassar Field, improvement of Behandle Operating System (BOS) in Tanjung Priok Common Area).
3.	Integrasi Kawasan dengan Pelabuhan Regional Integration with Ports	Integrasi 3 Kawasan Industri dengan 3 Pelabuhan (KI Jawa Timur (SIER) dengan Pelb Tanjung Perak, KI Timur Jabodetabek dengan Pelabuhan Tanjung Priok, KI Kijing dengan Pelabuhan Kijing). Integration of 3 Industrial Areas in 3 Ports (KI East Java (SIER) with Tanjung Perak Port, KI East Jabodetabek with Tanjung Priok Port, KI Kijing with Kijing Port).
4.	Kerjasama industri logistik Logistics industry cooperation	Kerjasama 5 jenis layanan logistik yaitu: <i>cold storage</i> , <i>contract logistics</i> , pengelolaan lapangan, <i>end-to-end services</i> , dan <i>custom clearance</i> . Collaboration with 5 types of logistics services, namely: cold storage, contract logistics, field management, end-to-end services, and custom clearance
5.	Optimalisasi aset Asset optimization	13 aset telah dioptimalisasikan untuk Kawasan Pendukung Terminal, Depo, CCDC, dan Lapangan Penumpukan (Depo Kuala Tanjung, Kawasan Pendukung Kijing, Lap 100 Makassar, Lap 005E Panjang, Lap Kuala Langsa, Lap Pelabuhan Perawang, Lap Zona A dan Zona B Pelabuhan Perawang, Lap PIL Belawan, Lap CY Perpanjangan Domestik II Tanjung Emas, Lap Fumigasi Tanjung Emas, Gudang PLB Tanjung Emas, Lap CY Perpanjangan Domestik I Tanjung Emas, Lap PLB Tanjung Emas). 13 assets have been optimized for the Terminal Support Area, Depot, CCDC, and Stacking Field (Kuala Tanjung Depot, Kijing Support Area, Makassar 100 Field, Panjang 005E Field, Kuala Langsa Field, Perawang Port Field, Zone A and Zone B Perawang Port Field, Belawan PIL Field, Domestic Extension CY Field II Tanjung Emas, Tanjung Emas Fumigation Field, Tanjung Emas PLB Warehouse, Domestic Extension I CY Field Tanjung Emas, PLB Tanjung Emas Field)
PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM)		
1.	Standardisasi Standardization	Standardisasi layanan <i>marine</i> di 16 lokasi (Balikpapan, Makassar, Samarinda, Dumai, Sorong, Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Benoa, Lembar, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Belawan, Tenau Kupang, Batulicin, Banjarmasin). Standardization of marine services in 16 locations (Balikpapan, Makassar, Samarinda, Dumai, Sorong, Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Benoa, Selamat, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Belawan, Tenau Kupang, Batulicin, Banjarmasin).
2.	Digitalisasi Digitalization	Implementasi aplikasi Phinnisi di 34 Cabang Pelabuhan (Palembang, Pontianak, Dumai, Tanjung Wangi, Makassar, Tanjung Perak dan Gresik, Bengkulu, Tanjung Emas, Cirebon, Tanjung Intan, Trisakti, Kendari, Benoa, Bitung, Pantoloan, Tenau Kupang, Ambon, Sorong, Merauke, Nunukan, Lembar, Pare-Pare, Tarakan, Jambi, Tanjung Balai Asahan, Bengkulu, Tanjung Balai Karimun, Kuala Tanjung, Tanjung Pinang, Sei Pakning dan Perawang, Sambu dan Nipah, Lhoksuemawe, Malahayati). Implementation of the Phinnisi application in 34 Port Branches (Palembang, Pontianak, Dumai, Tanjung Wangi, Makassar, Tanjung Perak and Gresik, Bengkulu, Tanjung Emas, Cirebon, Tanjung Intan, Trisakti, Kendari, Benoa, Bitung, Pantoloan, Tenau Kupang, Ambon, Sorong, Merauke, Nunukan, Selamat, Pare-Pare, Tarakan, Jambi, Tanjung Balai Asahan, Bengkulu, Tanjung Balai Karimun, Kuala Tanjung, Tanjung Pinang, Sei Pakning and Perawang, Sambu and Nipah, Lhoksuemawe, Malahayati).
3.	<i>Additional Marine</i>	<ul style="list-style-type: none"> Waste management di 1 lokasi (pelabuhan Tanjung Perak) Layanan <i>bunkering</i> di 2 Regional yaitu Regional 4 (PMS) dan Regional 2 (JAI). Layanan <i>oil spill response</i> di 6 lokasi (Pelabuhan Belawan, Dumai, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Bagendang, Bumiharjo). Layanan <i>docking</i> di wilayah regional 1, 3, dan 4. Layanan <i>onshore power supply</i> di 1 lokasi (Pelabuhan Banyuwangi). Layanan pengerukan di 1 lokasi (TPPI Tuban). Layanan tambahan air bersih di 3 lokasi (Belawan; Teluk Lamong; dan Banjarmasin). Layanan tambahan <i>port electricity</i> di 2 Regional yaitu di Belawan dan Tanjung Perak. Waste management in 1 location (Tanjung Perak port) Bunkering services in 2 regions, Regional 4 (PMS) and Regional 2 (JAI). Oil spill response services in 6 locations (Belawan, Dumai, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Bagendang, Bumiharjo Ports). Docking services in regional areas 1, 3, and 4. Onshore power supply service at 1 location (Banyuwangi Port). Dredging services at 1 location (TPPI Tuban). Additional clean water services in 3 locations (Belawan; Teluk Lamong; and Banjarmasin). Additional port electricity services in regional 2, namely in Belawan and Tanjung Perak.



Tabel Capaian Inisiatif Strategis dan Program Kerja
Strategic Initiatives and Work Programs Achievements

No	Inisiatif Strategis/Proram Kerja Strategic Initiatives/Work Programs	Penjelasan Explanation
4.	Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Terminal for Own Use (TUKS)	Kerjasama pelayanan <i>marine</i> di 5 lokasi (TUKS Kideco, TUKS Tilamuta, TUKS Tarempa, TUKS Weda Bay, TUKS Sangatta). Marine service collaboration in 5 locations (TUKS Kideco, TUKS Tilamuta, TUKS Tarempa, TUKS Weda Bay, TUKS Sangatta).
5.	Pelabuhan K/L K/L Port	Kerjasama pelayanan <i>marine</i> di 5 lokasi (Tanjung Balai Karimun, Nipah, Samboja, Bunyu, Tanjung Pemancingan). Marine service collaboration in 5 locations (Tanjung Balai Karimun, Nipah, Samboja, Bunyu, Tanjung Pemancingan).

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Perseroan membagikan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kompetensi inti di bidang jasa pelayanan kepelabuhanan, Pelindo senantiasa berkomitmen untuk memberikan dividen kepada Pemegang Saham serta berupaya memperlancar integrasi logistik dalam upaya mendukung pembangunan dalam lingkup makro ekonomi. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perusahaan, laba bersih dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Sesuai dengan PMK No. 05/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dividen, pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dividen ditetapkan oleh Pemegang Saham. Jumlah dividen yang ditetapkan adalah sebesar persentase tertentu dari laba bersih (setelah pajak) yang diatribusikan kepada Pemegang Saham. Kebijakan dividen yang didasarkan pada pemenuhan kepentingan didasarkan pada kepentingan Pelindo dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan, serta rencana investasi atau pengembangan usaha.

POLICIES, ANNOUNCEMENTS AND PAYMENT OF DIVIDENDS

The Company distributes dividends to the Government of the Republic of Indonesia as a Shareholder based on a resolution at a General Meeting of Shareholders (GMS). As a State-Owned Enterprise (SOE) with core competencies in the field of port services, Pelindo is committed to paying dividends to Shareholders, and facilitating logistics integration in an effort to support the macroeconomic development. In accordance with applicable laws and regulations in Indonesia and the Company's Articles of Association, net profits can be distributed to Shareholders as dividends after setting aside mandatory reserve funds as required by law. Dividends are determined by Shareholders at the GMS. In accordance with PMK No. 05/PMK.02/2013 concerning Procedures for Depositing Non-Tax State Revenue from dividends, dividend payments are made no later than 1 (one) month after the dividend is determined by the Shareholders. The dividend amount determined is a certain percentage of net profit (after tax) attributable to the Shareholders. The dividend policy is based on fulfilling interests based on Pelindo's interests after considering factors such as business continuity, strategies that will be and are currently being implemented, as well as investment or business development plans.

Uraian pengumuman dan pembayaran dividen disajikan sebagai berikut.

The dividend announcement and payment is presented as follows.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2021-2022
Announcement and Payment of Dividends for 2021-2022

Uraian Description	Tahun Buku 2022 Fiscal Year 2022	Tahun Buku 2021 Fiscal Year 2021
Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk (Rp ribu) Net Profit Attributable to Owner of Parent Entity (Rp thousand)	3.772.545.951	3.292.133.734
Dividen Kas (Rp ribu) *) Cash Dividend (Rp Thousand)	1.377.200.000	1.316.854.000
Dividen Non Kas **) Non-Cash Dividend	-	-
Dividen Kas Per Saham (Rp penuh) Cash Dividend Per Share (Rp full amount)	40.575.584	8.475.067
Dividen Non Kas Per Saham **) Non-Cash Dividend Per Share	33,94	155,38
Dividend Pay Out Ratio (%)	36,51%	40,00%
Tanggal Pengumuman Announcement Date	19 Juni 2023 June 19, 2023	18 Mei 2022 May 18, 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Kas Payment Date Cash Dividend	14 Juli 2023 15 September 2023 15 November 2023 July 14, 2023 September 15, 2023 November 15, 2023	16 Juni 2022 June 16, 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas **) Payment Date Non- Cash Dividend	-	-

*) Seluruh dividen telah dibayarkan

**) Pelindo tidak memiliki dividen non kas

*) All dividends have been paid

**) Pelindo does not have non-cash dividends

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2023, tidak dalam periode pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Sehingga Pelindo tidak menyajikan informasi yang meliputi total perolehan dana; rencana penggunaan dana; rincian penggunaan dana; saldo dana; dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

INVESTASI

Uraian investasi jangka pendek dan jangka panjang Pelindo disajikan sebagai berikut.

REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

In 2023, but not in the reporting period, the use of the public offering proceeds will be realized. Pelindo does not need to report any information including total fund acquisition; funds use plan; details of use of funds; fund balance; and the date of approval by the GMS/RUPO for changes in the use of funds.

MATERIAL INFORMATION CONCERNING INVESTMENTS, EXPANSIONS, BUSINESS MERGERS/CONSOLIDATIONS, DIVESTMENTS, ACQUISITIONS, AND DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

INVESTMENTS

A description of Pelindo's short-term and long-term investments is as follows.



Tabel Investasi
Investments

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENTS				
Total deposito berjangka Total time deposits	3.769.582.414	3.943.050.108	(173.467.694)	(4,40%)
Efek yang diperdagangkan Marketable securities	1.962	1.891	71	3,75%
Total	3.769.584.376	3.943.051.999	(173.467.623)	(4,40%)
INVESTASI JANGKA PANJANG LONG TERM INVESTMENTS				
Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates	3.981.210.179	3.483.541.212	497.668.967	14,29%
Investasi pada penyertaan saham Investment in share of stocks	34.840.893	35.239.244	(398.351)	(1,13%)
Investasi pada surat utang Investment in bonds	692.386.251	600.010.734	92.375.517	15,40%
Total	4.708.437.323	4.118.791.190	589.646.133	14,32%

Realisasi Investasi jangka pendek tahun 2023 sebesar Rp3,76 triliun atau mengalami penurunan dari realisasi tahun 2022 sebesar 4,40% disebabkan pencairan dari penempatan deposito yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Realisasi investasi jangka panjang 2023 sebesar Rp4,71 triliun mengalami peningkatan sebesar 14,32% dari capaian investasi jangka panjang tahun 2022 disebabkan peningkatan laba di entitas asosiasi Pelindo selama tahun 2023 yang dicatat menggunakan *equity method* dan adanya penyesuaian nilai investasi atas PT Pertamina Bina Medika - Indonesia Healthcare Corporation (PBM-IHC).

Adapun penyertaan pada entitas asosisasi selama 2023 yaitu tambahan atas Belawan New Container Terminal (BNCT) sebesar 51% dengan nilai perolehan Rp5.100.000.000. Pada tanggal 23 Juni 2023, PT Prima Terminal Petikemas (PTP1) dan PT INADPWorld Investment (SPS) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham, PTP1 dan SPS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebanyak 10.000 lembar saham yang terbagi menjadi 5.100 lembar saham seri A yang dimiliki PTP1 dan 4.900 saham seri B yang dimiliki SPS. Perusahaan tersebut didirikan dalam rangka pembangunan, pembiayaan, operasi dan pemeliharaan proyek Pelabuhan Belawan sesuai dengan Perjanjian Konstruksi dan Operasi yang telah disepakati. Kepemilikan saham PTP1 pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian, oleh karena itu laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan PTP1. Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian di atas bernama PT Belawan New Container Terminal (BNCT) yang didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 September 2023.

Realized short-term investments in 2023 reached Rp3.76 trillion, decrease of 4.40% from the realization in 2022 due to disbursement from deposit placements used for operational needs. The realized long-term investments in 2023 reached Rp4.71 trillion, an increase of 14.32% from the realization in 2022 due to an increase in profits in Pelindo's associated entities during 2023 that were recorded using the equity method. There was an adjustment to the investment value of PT Pertamina Bina Medika - Indonesia Healthcare Corporation (PBM-IHC).

The associated entities investments during 2023 saw an additional 51% investment in the Belawan New Container Terminal (BNCT) for an acquisition cost of Rp5,100,000,000. On June 23, 2023, PT Prima Terminal Petikemas (PTP1) and PT INADPWorld Investment (SPS) signed a Shareholders Agreement, PTP1 and SPS established a Company with a total of 10,000 shares, divided into 5,100 series A shares owned by PTP1 and 4,900 series B shares owned by SPS. The Company was established for developing, financing, operating and maintenance of the Belawan Port project in accordance with an agreed Construction and Operation Agreement. PTP1's share ownership in the established Company was not as a controlling interest, therefore the Company's financial statements were not consolidated into PTP1's financial statements. Based on the above agreement PT Belawan New Container Terminal (BNCT) was established based on Deed No. 2 dated September 1, 2023.

EKSPANSI

Dalam rangka menciptakan nilai tambah (*value creation*), Pelindo telah menjalankan beberapa inisiatif strategis yang telah ditetapkan, diantaranya melakukan perjanjian pendahuluan dengan calon mitra berupa Nota Kesepahaman/ Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*), Perjanjian Dasar (*Head of Agreement/HoA*), maupun Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement/NDA*) yang kemudian ditindaklanjuti melalui kajian bersama maupun pelaksanaan kerja sama. Adapun terkait inisiasi pengembangan bisnis ada beberapa diantaranya studi/kajian pengembangan bisnis dalam rangka mendukung proyek-proyek strategis.

EXPANSIONS

To create added value, Pelindo instigated several strategic initiatives, including entering into preliminary agreements with potential partners in the form of a Memorandum of Understanding (MoU), Basic Agreement (Heads of Agreement/HoA), as well as a Non-Disclosure Agreements (NDA), which will be followed up through joint studies and implementation of cooperation. Regarding the initiation of business development, several business development studies/reviews took place to support strategic projects.

Tabel Daftar Inisiasi Kerja Sama
List of Cooperation Initiatives

No.	Deskripsi Description	Calon Mitra Potential Partners	Tanggal Date
1	Perjanjian Induk tentang Rencana Penyertaan Modal Dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Master Agreement concerning Capital Inclusion and Development Plans for the Arun Lhokseumawe Special Economic Zone (KEK).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pertamina (Persero) ▪ PT Pupuk Iskandar Muda ▪ PT Pembangunan Aceh 	10 Februari 2023 February 10, 2023
2	Kesepakatan Bersama Rencana Kegiatan Pelayanan <i>Ship to Ship</i> (STS) di Perairan Pelabuhan Sumatera Selatan. Joint Agreement on Ship to Ship (STS) Service Activity Plans in South Sumatra Port Waters.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Samudera Indo Sukses (SIS) 	23 Februari 2023 February 23, 2023
3	Nota Kesepahaman Rencana Kerjasama Pemanfaatan Gas Alam Sebagai Bahan Bakar Transportasi di Kawasan Pelabuhan Pelindo. Memorandum of Understanding on the Cooperation Plan for the Use of Natural Gas as a Transportation Fuel in the Pelindo Port Area.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Perusahaan Gas Negara TBK 	23 Februari 2023 February 23, 2023
4	Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Pembangunan Jetty di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Memorandum of Understanding on the Jetty Development Cooperation Plan in the Batang Integrated Industrial Area (KIT).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Danareksa (Persero) 	30 Maret 2023 March 30, 2023
5	Nota Kesepahaman tentang Kerja sama Pengembangan Pelabuhan Biak di Papua Barat. Memorandum of Understanding on the Cooperation in the Development of Biak Port in West Papua.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT China Harbour Indonesia 	30 Maret 2023 March 30, 2023
6	Perjanjian Kerahasiaan (NDA) Rencana Kerja Sama Dalam Mengakuisisi Saham <i>Oiltanking</i> GMBH. Non-Disclosure Agreement (NDA) for Cooperation Plans in Acquiring GMBH Oiltanking Shares.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ▪ Oiltanking GMBH 	25 Mei 2023 May 25, 2023
7	Nota Kesepahaman tentang Penyusunan Kajian Studi Pengembangan Pelabuhan. Memorandum of Understanding on the Preparation of Port Development Studies.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APM Terminals (Bagian dari A.P. Moller – Mersk) 	6 Juli 2023 July 6, 2023
8	Nota Kesepahaman Rencana Kerjasama Pemanfaatan Rencana Lahan Reklamasi Dan Fasilitas Pelabuhan Curah Pelindo di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Memorandum of Understanding on the Cooperation Plan for the Use of Reclamation Land Plans and Pelindo Bulk Port Facilities in the Batang Integrated Industrial Area (KIT).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Opsico Trada Nusantara 	14 Agustus 2023 August 14, 2023
9	Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Rencana Kerja Sama Jakarta <i>Integrated Green Terminal</i> di lokasi antara Pertamina International Shipping Group dan Pelindo Group. Joint Agreement on the Synergy of the Jakarta Integrated Green Terminal Cooperation Plan at locations between Pertamina International Shipping Group and Pelindo Group.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pertamina International Shipping 	1 September 2023 September 1, 2023
10	Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Strategis Dalam Rangka Pengembangan Proyek Pelabuhan dan Kawasan Industri. Joint Agreement on the Strategic Cooperation for Port and Industrial Area Project Development.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Indonesia Asahan Aluminium 	14 September 2023 September 14, 2023



Tabel Daftar Inisiasi Kerja Sama
List of Cooperation Initiatives

No.	Deskripsi Description	Calon Mitra Potential Partners	Tanggal Date
11	<i>Head of Agreement (HoA)</i> tentang Sinergi Kerja Sama Bisnis di Pelabuhan Benoa antara PT Pelindo dan PT Pertamina Patra Niaga. Head of Agreement (HoA) for the Business Cooperation Synergy at Benoa Port between PT Pelindo and PT Pertamina Patra Niaga.	<ul style="list-style-type: none"> PT Pertamina Patra Niaga 	15 Desember 2023 December 15, 2023
12	Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan di Area Pengembangan I Bali Maritim Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa Bali. Memorandum of Understanding on the Land Use Cooperation Plans in the Bali Maritim Tourism Hub (BMTH) Development Area I at Benoa Port, Bali.	<ul style="list-style-type: none"> PT Kharisma Jawara Abadi (KAJA Group) 	15 Desember 2023 December 15, 2023
13	Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Area Bali Tanten dan lahan Ex.Akame di Pelabuhan Benoa Bali. Memorandum of Understanding (MoU) on the Cooperation in Land Use in the Bali Tanten Area and Ex.Akame land in Benoa Port, Bali.	<ul style="list-style-type: none"> PT Cipta Prakasita Nusaraya (Binus Group) 	15 Desember 2023 December 15, 2023
14	Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung. Memorandum of Understanding (MoU) on the Cooperation in the Development of the Kuala Tanjung Port and Industrial Area.	<ul style="list-style-type: none"> Zhejiang Provincial Seaport Investment dan Operation Group Co.,Ltd 	18 Desember 2023 December 18, 2023

Sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi kerjasama sebagai berikut:

- Telah ditandatangani perjanjian Pemegang Saham/*Shareholders Agreement (SHA)* antara PT Prima Terminal Petikemas (Anak/Cucu Perusahaan Pelindo) dan PT INA DP *World Investment (INA DP World)*, Konsorsium Indonesia *Investment Authority (INA)* dan DP *World FZE (DP World)* tanggal 23 Juni 2023.
- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan dan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pendukung Terminal Kijing untuk jangka waktu 59 bulan antara Pelindo dengan PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) dan KRC serta antara Pelindo dengan SPSL dan PBI pada tanggal 17 Juli 2023.

Until the end of 2023, the following collaborations have been realized:

- A Shareholders Agreement (SHA) was signed between PT Prima Terminal Petikemas (subsidiary/sub subsidiary of Pelindo Company) and PT INA DP *World Investment (INA DP World)*, the Indonesian Investment Authority Consortium (INA) and DP *World FZE (DP World)* on June 23, 2023.
- A Cooperation Agreement was signed on Land Use and Basic Infrastructure in the Kijing Terminal Support Area for a period of 59 months between Pelindo and PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) and KRC as well as between Pelindo and SPSL and PBI on July 17, 2023.

PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA

Selama tahun 2023, Pelindo tidak melakukan kegiatan penggabungan/peleburan usaha.

DIVESTASI

Selama tahun 2023, Pelindo tidak melakukan kegiatan divestasi.

AKUISISI

Selama tahun 2023, Pelindo tidak melakukan kegiatan akuisisi.

RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Selama tahun 2023, Pelindo tidak melakukan kegiatan restrukturisasi hutang dan modal.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen)

BUSINESS MERGERS/CONSOLIDATIONS

During 2023, Pelindo did not carry out any business mergers/consolidations activities.

DIVESTMENTS

During 2023, Pelindo did not carry out divestment activities.

ACQUISITIONS

During 2023, Pelindo did not carry out acquisition activities.

DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

During 2023, Pelindo did not carry out debt and capital restructuring activities.

MATERIAL INFORMATION ON TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Material Transactions are any transactions carried out by a public company or controlled company that meets a transaction value limit equal to 20% (twenty percent) or more of the Public

atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

Lingkup Transaksi:

Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material dalam:

- 1 (satu) kali transaksi; atau
- Suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020.

Batasan Nilai:

- Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
- Transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal:
 - Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
 - Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
 - Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
 - Pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).
- Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan.

TRANSAKSI AFILIASI

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

Company's equity (Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities).

Transaction Scope:

Where Public Companies carry out Material Transactions in:

- 1 (one) transaction; or
- A series of transactions for a specific purpose or activity, must comply with the provisions as regulated in POJK No.17/POJK.04/2020.

Value Limit:

- A transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the Public Company's equity.
- Transactions in the form of acquisitions and disposal of companies or operating segments are categorized as Material Transactions in the event that:
 - The transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the Public Company's equity;
 - The total assets that are the object of the transaction divided by the total assets of the Public Company are equal to or more than 20% (twenty percent);
 - The net profit of the transaction object divided by the net profit of the Public Company is equal to or more than 20% (twenty percent); or
 - The business income of the transaction object divided by the business income of the Public Company is equal to or more than 20% (twenty percent).
- In the event that the transactions referred to in (1) and (2) are carried out by a Public Company that has negative equity, the transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 10% (ten percent) or more of the Public Company's total assets.

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

In accordance with the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, a Conflict of Interest is the difference between the economic interests of a public company and the personal economic interests of members of the board of directors, members of the board of commissioners, majority shareholders, or controllers that may be detrimental to the listed company in question.

In 2023 there were no transactions that met any of the categories of conflict of interest transactions.

AFFILIATED TRANSACTIONS

Based on the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, Affiliated means:

- Familial relationships due to marriage and descent up to the second degree, both horizontally and vertically;
- Relationships between the party and the party's employees, directors or commissioners;



3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi pihak afiliasi.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Perseroan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 44 dalam Laporan Keuangan. Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

3. Relationships between 2 (two) companies where there are 1 (one) or more members on both board of directors or board of commissioners;
4. Relationships between the company and parties that directly or indirectly control; or are controlled by the company;
5. Relationships between 2 (two) companies controlled, directly or indirectly, by the same party; or
6. Relationships between the company and the majority shareholders.

Affiliated transactions relate to any activity and/or transaction carried out by a public company or controlled company with an Affiliate of a public company or an Affiliate of a Member of the Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, Majority or Controlling Shareholder, including any activity and/or transaction carried out by the Public Company or Controlled Company for the benefit of Affiliates of the Public Company or Affiliates of members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, Majority or Controlling Shareholder.

In 2023 there will be no transactions that met the category of affiliated party transactions.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Company and its subsidiaries carry out related party transactions in accordance with the definition outlined in PSAK 7. These transactions are carried out based on terms agreed by both parties, which may not be the same as other transactions carried out with unrelated parties. Material transactions and balances with related parties are disclosed in Note 44 to the Financial Statements. Unless specifically disclosed as related parties, other parties mentioned in the notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

Tabel Transaksi Pihak Berelasi

Related Party Transaction Table

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
Pemegang Saham Shareholder	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi Concession services

Tabel Transaksi Pihak Berelasi
Related Party Transaction Table

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah Entities related to the Government	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman Banking and loan services
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman Banking and loan services
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Mandiri Taspen	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Wika Haka Joint Operation	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Jasa Pensiun Pension services
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Penjualan jasa Sales services
	Direktorat Jenderal Pajak	Perpajakan Taxation
	Badan Layanan Umum Sekretariat, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Pinjaman Loans
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan Development Services
PT BNI Danareksa Sekuritas	Jasa perbankan dan pinjaman Banking and loan services	
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Jasa Klasifikasi dan Registrasi Kapal Ship Classification and Registration Services	
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan Development Services	
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa Sales services	



Tabel Transaksi Pihak Berelasi
Related Party Transaction Table

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
	PT Semen Padang (Persero)	Penjualan jasa Sales services
	PT Yodya Karya (Persero)	Konsultan Consultant
	PT Indonesia Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pinjaman Loans
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa Sales Services
	PT Adhi Guna Putera	Jasa dan operasional Services and operations
	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	Jasa dan operasional Services and operations
	PT Belawan New Container Terminal	Jasa dan operasional Services and operations
	Indonesia National Single Window	Jasa dan operasional Services and operations
	Konsorsium PP – Waskita	Jasa Pembangunan Development Services
	Perum DAMRI	Pinjaman Loans
	PT Bank Mandiri Taspen	Jasa Perbankan Banking services
	PT Telekomunikasi Selular	Jasa dan operasional Services and operations
	PT Jawa Satu Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities services
	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa Sales services
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa Sales services
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa Sales services
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa Sales services
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa Sales services
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa Sales services
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa Sales services
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa Sales services
	PT Semen Tonasa	Penjualan jasa Sales services

Tabel Transaksi Pihak Berelasi
 Related Party Transaction Table

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	Penjualan jasa Sales services
	Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3")	Jasa Pensiun Pension Services
	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan jasa Sales services
	PT Petrokimia Gresik	Penjualan jasa Sales services
	PT Prima Citra Nutrindo	Jasa Boga Catering Services
	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan jasa Sales services
	PT PP Presisi Tbk	Jasa pembangunan Development Services
	PT Bukit Prima Bahari	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	PT Sarana Bandar Nasional	Jasa dan operasional Services and operations
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Jasa dan operasional Services and operations
	PT Portek Indonesia	Jasa dan operasional Services and operations
	PT Pengembangan Listrik Nasional Energi Gas	Jasa dan operasional Services and operations
	PT Taspen (Persero)	Penjualan jasa Sales Services



Tabel Transaksi Pihak Berelasi
Related Party Transaction Table

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Related Party Name	Jenis Transaksi Type of Transaction
	BPJS Ketenagakerjaan	Penjualan jasa Sales Services
	PT Daya Radar Utama	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan jasa Sales Services
	PT Pembangunan Jawa Bali (PJB)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	Lembaga Manajemen Aset Negara	Piutang pembebasan lahan Land Acquisition Receivables
	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Penjualan Sales
	PT Asuransi Kredit Indonesia	Jasa asuransi Insurance Services
	PT Asuransi Jiwasraya	Jasa asuransi Insurance Services
	PT Pertamina Hulu Energi	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	PT Waskita Beton Precast Tbk	Jasa Pembangunan Development Services
	PT Asuransi Jasa Indonesia	Jasa Asuransi Insurance Services
	PT Berdikari (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
	PT Terminal Nilam Utara	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and Operational Activities Services
Entitas asosiasi Associated entity	JICT	Sewa dan royalti Rent and Royalties
	NPCT1	Investasi Investment
	RSP	Jasa Kesehatan Health Services
	PHC	Jasa Kesehatan Health Services
	KSO TPK KOJA	Penjualan Sales
	BKMS	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional Sales and Operational Activities Services
	Ambapers	Penjualan jasa Sales Services

KEWAJARAN TRANSAKSI

Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan (*Arm's Length Principle*). Transaksi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilaksanakan atas dasar alasan kebutuhan usaha Pelindo serta ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pelindo.

TRANSACTION FAIRNESS

Transactions with related parties have been carried out fairly in accordance with the Company's interests (*Arm's Length Principle*). Transactions have been carried out in accordance with statutory regulations and are free from conflicts of interest.

REASON FOR THE TRANSACTIONS

All transactions with related parties are carried out based on Pelindo's business needs and are aimed at improving Pelindo's performance.

REALISASI (NILAI) TRANSAKSI

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut.

REALIZATION OF TRANSACTIONS (VALUE)

Details of significant accounts with related parties (government, government entity or otherwise) are as follows.

Tabel Realisasi (Nilai) Transaksi Pihak Berelasi
Realization (Value) of Related Party Transactions

(dalam ribuan Rupiah)

(in thousand Rupiah)

Uraian Description	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
	Total Total	Persentase (%) Percentage (%)	Total Total	Persentase (%) Percentage (%)
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents				
Bank				
Rupiah	3.310.531.140	2,65	4.394.220.513	3,72
Dolar AS	466.610.114	0,37	1.495.195.477	1,27
Deposito berjangka Time deposits				
Rupiah	6.304.411.208	5,04	6.377.884.801	5,38
Dolar AS	170.461.309	0,13	168.988.936	0,15
Investasi jangka pendek Short term investments				
Deposito berjangka Time deposits	3.769.582.414	3,10	3.923.050.108	3,32
Piutang usaha Trade receivables	291.600.099	0,23	319.681.316	0,26
Piutang Lain-lain Other receivables	170.985.810	0,15	392.181.781	0,33
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues	152.492.130	0,11	107.559.957	0,09
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	-	-	103.106.529	0,14
Utang usaha Trade payables	636.747.827	0,88	1.092.012.208	1,43
Uang untuk diperhitungkan Advances from customers	25.275.606	0,04	8.286.359	0,01
Uang titipan pelanggan Deposits from customers	58.921.643	0,08	75.209.277	0,10
Liabilitas jangka pendek lainnya Other Current Liabilities	600.087.588	0,84	110.098.021	0,14
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Non-Bank Financial Institution payables	1.372.013.613	1,92	1.160.435.133	1,54
Liabilitas jangka panjang lainnya Other Non-current Liabilities	4.921.771	0,00	469.347.513	0,62



Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan No. 44 yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

KEBIJAKAN MEKANISME REVIEW TRANSAKSI

Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus melalui mekanisme *review* sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Direksi menyatakan bahwa transaksi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi secara umum dilakukan sebagaimana dengan pihak ketiga yang di *review* oleh Komite Audit serta wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika transaksi dengan pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham maka persetujuan dilakukan oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan dengan transaksi tersebut. Pada tahun 2023 tidak terdapat transaksi pihak berelasi yang membutuhkan persetujuan RUPS. Terkait transaksi pihak berelasi berupa pinjaman kepada Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak memberikan pinjaman pada Dewan Komisaris dan Direksi.

PEMENUHAN PERATURAN TERKAIT

Selama tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

Informasi perubahan peraturan perundang-undangan disajikan sebagai berikut:

Details of the names of parties related to the realization (value) of related party transactions are presented in Note No. 44 in the Financial Statements attached to this Annual Report. These related transactions are business activities carried out to generate business income and are carried out routinely, repeatedly and/or continuously.

TRANSACTION REVIEW MECHANISM POLICY

All transactions with related parties must go through a review mechanism in accordance with what has been determined by the Company. The Board of Directors declares that transactions have passed through adequate procedures to ensure the transactions are in accordance with generally accepted business practices, and comply with the arm's length principle. Transactions with related parties are carried out based on terms agreed by both parties. The terms and conditions of transactions with related parties are generally carried out as with third parties, and are reviewed by the Audit Committee and must obtain approval from the Board of Commissioners. If transactions with related parties require shareholder approval, shareholders who have no interest in the transactions will carry out the approval. In 2023 there were no related party transactions require GMS approval. For related party transactions in the form of loans to the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company has a policy not to provide loans to the Board of Commissioners and Board of Directors.

COMPLIANCE WITH RELATED REGULATIONS

During 2023, there will be no violations of laws and regulations related to transactions with related parties.

CHANGES TO LEGISLATION AND THE IMPACT

Information on changes in laws and regulations is presented as follows:

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023
Changes to Laws and Regulations in 2023

No	Peraturan Perundang-Undangan Laws and Regulations	Pokok Pengaturan Basic Settings	Informasi Penyesuaian yang Dilakukan Perusahaan Information on Changes Made by the Company	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Impact on Company Financial Reports
1	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 of 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises	Terkait dengan Penugasan Khusus dan Tanggung Jawab Lingkungan Related to Special Assignments and Environmental Responsibilities	Peraturan Direksi tentang Penugasan khusus dan Peraturan Direksi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sebelumnya pemberian penugasan khusus dilakukan oleh Kementerian teknis kepada BUMN tanpa melalui kajian kelayakan sehingga terdapat <i>project</i> yang secara <i>financial</i> kurang <i>fisibel</i> hal ini dapat menyebabkan kerugian pada BUMN tersebut. Dengan adanya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 yang mengatur tentang penugasan khusus, yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila terdapat penugasan khusus yang secara keuangan kurang <i>fisibel</i> , maka pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi terhadap BUMN tersebut.	Perubahan peraturan tersebut tidak memiliki dampak kuantitatif signifikan terhadap laporan keuangan Pelindo. These regulatory changes did not have a significant quantitative impact on Pelindo's financial statements.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023
Changes to Laws and Regulations in 2023

No	Peraturan Perundang-Undangan Laws and Regulations	Pokok Pengaturan Basic Settings	Informasi Penyesuaian yang Dilakukan Perusahaan Information on Changes Made by the Company	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Impact on Company Financial Reports
			<p>Board of Directors' Regulations on Special Assignments and Directors' Regulations on Social and Environmental Responsibility (SER).</p> <p>Previously, the technical ministry gave special assignments to SOEs without going through a feasibility study so there were projects that were financially less feasible, which could cause losses to the SOE.</p> <p>The Minister of SOEs Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 of 2023 regulates special assignments, and essentially states that if there is a special assignment that is financially unfeasible, then the government is obliged to provide compensation to the SOEs.</p>	
2	<p>Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara</p> <p>Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises</p>	<p>Prinsip Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan</p> <p>Governance Principles and Significant Corporate Activities</p>	<p>Peraturan Direksi Tentang Manajemen Risiko. Terdapat kewajiban bagi BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang masuk kategori klasifikasi sistemik A dan berkategori BUMN konglomerasi/Anak Perusahaan BUMN konglomerasi wajib memiliki seluruh organ pengelola Risiko, sehingga diperlukan anggaran untuk penambahan struktur baru dan pemenuhan SDM yang mendukung struktur tersebut.</p> <p>Board of Directors' Regulations Concerning Risk Management.</p> <p>There is an obligation for SOEs and SOE subsidiaries that are in the systemic classification category A and in the category of Conglomerate SOEs / Conglomerate SOEs Subsidiaries to have all risk management organs, so a budget is needed to add new structures and fulfill HR to support these structures.</p>	<p>Perubahan peraturan tersebut tidak memiliki dampak kuantitatif signifikan terhadap laporan keuangan Pelindo.</p> <p>These regulatory changes did not have a significant quantitative impact on Pelindo's financial statements.</p>
3	<p>Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises</p>	<p>Organ dan Sumber Daya Manusia</p> <p>Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises</p>	<p>Peraturan Direksi tentang penghasilan direksi dan komisaris.</p> <p>Sebelumnya Direksi BUMN yang merangkap sebagai Komisaris Utama dan Komisaris di anak Perusahaan mendapatkan honorarium. Dengan adanya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023, sehingga Direksi tidak mendapatkan Honorarium apabila merangkap sebagai Komisaris.</p> <p>Board of Directors' regulations regarding the income of directors and commissioners.</p> <p>Previously, SOE Directors who also served as President Commissioners and Commissioners in subsidiaries received honorariums. With the Minister of SOEs Regulation No PER-3/MBU/03/2023 of 2023, Directors will not receive an Honorarium if they also serve as Commissioners.</p>	<p>Perubahan peraturan tersebut tidak memiliki dampak kuantitatif signifikan terhadap laporan keuangan Pelindo.</p> <p>These regulatory changes did not have a significant quantitative impact on Pelindo's financial statements.</p>

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan standar akuntansi keuangan dilakukan untuk mematuhi Amandemen Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku dalam tahun berjalan. PT Pelabuhan Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The application of financial accounting standards is carried out to comply with the Amendment to the Statement of Accounting Standards (PSAK) that came into effect in the current year. PT Pelabuhan Indonesia ("Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") implemented all new and/or revised standards that became effective for the period beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that impacted the Group's consolidated financial statements.



Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi Tahun 2023

Changes in Accounting Policies in 2023

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	Paparan Konsekuensi dan Penyesuaian Yang Dilakukan Exposure to Consequences and Adjustments Made	Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Impact of Accounting Policies Changes on Financial Reports
<p>Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Amendment to PSAK 1: Presentation of financial statements - Disclosure of Accounting Policies</p>	<p>Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi. This amendment provides guidance to help entities apply materiality considerations in accounting policy disclosures. The amendment aims to help entities provide more useful accounting policy disclosures by replacing requirements for disclosing an entity's significant accounting policies with requirements for disclosing an entity's 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.</p>	<p>Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Grup, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian <i>item</i> apa pun dalam laporan keuangan Grup. The amendment impacted the disclosure of the Group's accounting policies, but did not impact the measurement, recognition or presentation of any item in the Group's financial statements.</p>
<p>Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors related to the Definition of Accounting Estimates</p>	<p>Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan <i>input</i> untuk mengembangkan estimasi akuntansi. Amendment to PSAK 25 clarified the differences between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and error corrections. The amendments also clarified how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.</p>	<p>Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. This amendment had no impact on the Group's consolidated financial statements.</p>
<p>Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul Dari Transaksi Tunggal</p>	<p>Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.</p>	<p>Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Grup beroperasi. Oleh karena itu, Grup masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.</p>
<p>Amendment to PSAK 46: Income Tax - Deferred Tax Related to Assets and Liabilities Arising From a Single Transaction</p>	<p>Amendments to PSAK 46 Income Tax narrowed the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to deductible temporary differences of the same amount and taxable temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.</p>	<p>This amendment had no impact on the Group's consolidated financial statements. As of December 31, 2023, the legislation relating to Pillar Two income tax has not yet been implemented or has not been substantively implemented in Indonesia where the Group operates. Therefore, the Group is still in the process of assessing the potential income tax exposure of Pillar Two. Potential Pillar Two income tax exposure, if any, is not currently known, or can be reasonably estimated.</p>

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi Tahun 2023

Changes in Accounting Policies in 2023

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	Paparan Konsekuensi dan Penyesuaian Yang Dilakukan Exposure to Consequences and Adjustments Made	Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Impact of Accounting Policies Changes on Financial Reports
<p>Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua Amendment to PSAK 46: Income Tax - International Tax Reform - Pillar Two Model Provisions</p>	<p>Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau <i>Organization for Economic Co-operation and Development</i> (OECD), dan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tanpuguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan 2. Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut. <p>Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.</p> <p>This amendment to PSAK 46 was introduced in response to the Pillar Two Model regulations issued by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Exceptions to the recognition and disclosure of information regarding deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income tax; and 2. Disclosure requirements for affected entities to help users of financial statements better understand the entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from the law, particularly prior to the effective date of the law. <p>These exceptions - the use of which must be disclosed - are effective immediately upon publication of these amendments. Other disclosure requirements apply to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for interim periods ending on or before December 31, 2023.</p>	<p>Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. Karena secara transaksi, pengenaan pajak akan bergantung pada Perjanjian Pengenaan Pajak Berganda (P3B) dengan negara lawan transaksi.</p> <p>This amendment had no impact on the Group's consolidated financial statements. Because in transactions, tax imposition will depend on the Double Taxation Agreement (P3B) with the transaction counterparty country.</p>



TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Peringkat (*rating*) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yang ditandatangani pada tanggal 4 April 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating*): idAA+(sa)
2. Peringkat Akhir (*Final Rating*): idAAA/ Stable

Dengan demikian, Tingkat Kesehatan untuk PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) pada Tahun Buku 2023 adalah Sangat Sehat (AAA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikasikan Badan Usaha Milik Negara.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Sampai dengan Tahun 2023, kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) Group dapat bertahan di tengah dinamika tantangan eksternal dan domestik. Sejumlah tantangan eksternal dan domestik yang mempengaruhi kinerja operasional dan finansial PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) selama Tahun 2023 antara lain:

1. **Permasalahan Lahan dan Penyelesaian Ganti Nama dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pasca Penggabungan**

Hingga akhir Tahun 2023, PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) telah berhasil memperoleh sebanyak 427 Surat Keterangan Bebas (SKB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target sejumlah 429 SKB BPHTB di seluruh Regional. Sedangkan untuk proses ganti nama, terdapat total lebih kurang 599 sertifikat yang akan diproses di mana progres sampai dengan saat ini yaitu telah terbit 597 sertifikat atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Pesero).

Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses ganti nama yakni adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana Pelindo telah mengajukan Permohonan Pembebasan PNBP. Atas permohonan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah memberikan Surat Tanggapan terkait Permohonan Pembebasan PNBP atas Pengurusan Ganti Nama Sertifikat Tanah yang terdaftar atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Pesero). Dalam tanggapannya, PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) tidak diberikan pembebasan pengenaan PNBP. Namun, permohonan keringanan PNBP yang diajukan oleh PT Pelindo (Pesero) disarankan untuk diberikan penundaan atau pengangsuran dengan pertimbangan *going concern*, namun tetap harus membayarkan PNBP.

COMPANY HEALTH LEVEL

The rating submitted in the context of assessing the health level is a rating carried out by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), which was signed on April 4, 2024 with the following results:

1. Stand Alone Rating: idAA+(sa)
2. Final Rating: idAAA/Stable

Thus, the Health Level for PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) in the 2023 Fiscal Year was Very Healthy (AAA) as determined in the Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

MATTERS THAT COULD POTENTIALLY INFLUENCE BUSINESS CONTINUITY

Until 2023, the PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) Group could survive despite the dynamics of external and domestic challenges. A number of external and domestic challenges that could affect PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) operational and financial performance during 2023 included:

1. **Land Issues and Settlement of Name Changes and Fees for Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) Post-Merger**

By the end of 2023, PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) obtained 427 Free Certificates (SKB) for Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) from a target of 429 BPHTB SKBs throughout the regionals. For the name change process, approximately 599 certificates were processed, with 597 certificates issued in the name of PT Pelabuhan Indonesia (Pesero).

One of the problems that arose in the name change process was the obligation to make payments for Non-Tax State Revenue (PNBP) where Pelindo submitted an Application for PNBP Exemption. Based on this request, the Ministry of ATR/BPN provided a Response Letter regarding the Request for PNBP Exemption for the Process of Changing the Name of Land Certificates registered in the name of PT Pelabuhan Indonesia (Pesero). In this response, PT Pelabuhan Indonesia (Pesero) was not granted exemption from PNBP imposition. However, it was recommended that the request for PNBP relief submitted by PT Pelindo (Pesero) be given a postponement or installments with *going concern* considerations, but they still have to be paid by PNBP.

Atas keputusan ini, Pelindo akan melakukan proses pembayaran PNBPN yang kemudian dilanjutkan dengan proses ganti nama yang diharapkan dapat selesai sebelum 1 Oktober 2023, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi yang intensif dengan Kementerian ATR/BPN. Tindak lanjutnya, telah dilaksanakan penandatanganan MoU dengan Kementerian ATR/BPN dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan aset tanah milik Pelindo.

2. Penyelesaian Amandemen atas Perizinan dan Konsesi

Sebagai bagian dari penyelesaian administrasi Pasca Penggabungan, Pelindo telah diamanahkan untuk menyelesaikan amandemen ataupun inovasi atas beberapa perizinan dan konsesi Perusahaan diantaranya Perizinan Lingkungan serta Perjanjian Konsesi Pelabuhan. Pada tanggal 13 September 2023, telah dilakukan Penandatanganan 8 (delapan) *Addendum* Perjanjian Konsesi Pada Pelabuhan Eksisting antara Pelindo dengan 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak. Saat ini sedang dilakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut untuk penyesuaian 3 (tiga) perjanjian, yakni Perjanjian Konsesi Kuala Tanjung, Kalibaru, dan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Sedangkan untuk amandemen Perizinan Lingkungan, amandemen ini direncanakan untuk dilakukan dalam beberapa *batch*, dimana untuk *batch* 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dengan total 96 lokasi telah selesai proses pembahasan dan penyusunan *final draft* antara Pelindo dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selanjutnya akan dilakukan penandatanganan amandemen, dimana 22 dokumen sudah dalam tahap final proses dan validasi PTSP Kementerian KLHK, 3 dokumen sudah diajukan ke Kementerian KLHK namun belum memiliki persetujuan Teknis (Pertek) Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dan 71 cabang masih dalam proses melengkapi dokumen persetujuan teknis (Pertek) Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

3. Penurunan Arus Petikemas Internasional

Penurunan *throughput* petikemas sudah terjadi sejak akhir tahun lalu disebabkan karena berkurangnya permintaan petikemas secara global. Hal ini berdampak pada penurunan *throughput* petikemas internasional Pelindo baik ekspor maupun impor bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini didasari oleh pelemahan ekonomi global serta penurunan daya beli masyarakat khususnya di China dan Uni Eropa. Penurunan arus petikemas internasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama terjadi khususnya di area Tanjung Priok dan Semarang. Di sisi lain, sejalan dengan pertumbuhan

Based on this decision, Pelindo carried out the PNBPN payment process, and continued with the name change process for completion before October 1, 2023, so intensive coordination was needed with the ATR/BPN Ministry. As a follow-up, an MoU was signed with the Ministry of ATR/BPN to accelerate the resolution of Pelindo's land asset problems.

2. Completion of Amendments to Permits and Concessions

As part of the Post-Merger administrative settlement, Pelindo has been mandated to complete amendments or innovations to several Company permits and concessions including Environmental Permits and Port Concession Agreements. On September 13, 2023, 8 (eight) *Addendum* to Concession Agreements for Existing Ports were signed between Pelindo and 5 (five) Technical Implementation Units (UPT) within the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation. These included the Belawan Main Port Authority Office, the Port Authority Office Tanjung Priok Main, Tanjung Perak Main Port Authority Office, Makassar Main Port Authority Office, and Pontianak Class II Harbormaster and Port Authority Office. Currently, further studies and discussions are being carried out to adjust 3 (three) agreements, namely the Kuala Tanjung, Kalibaru Concession Agreement, and the West Surabaya Shipping Route (APBS).

Meanwhile, for the Environmental Licensing amendment, this amendment is planned to be carried out in several batches, where for batches 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 covering a total of 96 locations, the discussion process and preparation of the final draft between Pelindo and the Ministry of Environment and Forestry has signed the amendment, with 22 documents in the final stages of processing and validation by PTSP Ministry of Environment and Forestry, 3 documents have been submitted to the Ministry of Environment and Forestry but do not yet have Technical (Pertek) approval for Waste Water Quality Standards (BMAL) and 71 branches are still in the technical approval documents (Pertek) process for Waste Water Quality Standards (BMAL) and Approval of Conformity for Marine Spatial Utilization Activities (PKKPRL).

3. Decline in International Container Traffic

A decline in container throughput has occurred since the end of last year due to reduced demand for containers globally. This has impacted Pelindo's international container throughput, both for exports and imports, when compared to the previous year. This is mainly due to the weakening global economy and the decline in people's purchasing power, especially in China and the European Union. The decline in international container traffic compared to the previous year in the same period occurred especially in the Tanjung Priok and Semarang areas. On the other hand, in line with national economic growth, there was



ekonomi nasional, terdapat peningkatan arus petikemas domestik yang menunjukkan tren positif pada periode saat ini bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sehingga secara total, *throughput* petikemas Pelindo Tahun 2023 tercapai 17,66 juta TEUs atau tercapai 99,96% dari RKAP.

4. Harga Bahan Bakar Minyak

Pada Tahun 2023 tercatat rata-rata harga solar industri sampai dengan bulan Desember 2023 mencapai rentang antara Rp21.150 hingga Rp24.650 dan secara rata-rata harga BBM sepanjang tahun 2023 sebesar Rp22.745 meningkat dibanding rata-rata harga BBM 2022 sebesar Rp20.478. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ini kembali mempengaruhi biaya operasional sehingga meningkatkan beban operasional Perseroan. Dalam memitigasi hal tersebut, Pelindo telah mengambil langkah strategis untuk menerapkan *fuel surcharge* khususnya untuk layanan *marine* dengan berkoordinasi dan telah disepakati bersama dengan Asosiasi dan Pelanggan. Penerapan ini dilakukan dengan mengikuti harga bahan bakar industri yang telah ditetapkan Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal yang dijabarkan di atas Manajemen menganalisis bahwa meskipun terdapat tantangan yang tengah dihadapi oleh Pelindo, hal tersebut masih dapat diakomodir dengan menggunakan inisiatif strategis yang tepat dan dengan utilisasi sumber daya yang optimal, sehingga kelangsungan usaha Pelindo dapat terjaga dengan baik

ASESMEN MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen Perseroan melakukan asesmen atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya, asesmen dilakukan dengan berdasarkan berbagai faktor seperti analisis kekuatan kondisi keuangan maupun non-keuangan. Berdasarkan hasil asesmen, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, Manajemen Pelindo tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN UNTUK MELAKUKAN ASESMEN

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan sumber daya Pelindo yang unggul untuk berkompetisi dalam industri pelabuhan.
2. Posisi Pelindo dalam industri yang baik dalam kancah regional, yang dapat memberikan kontribusi besar dalam perekonomian negara.
3. Kondisi keuangan yang baik dengan profitabilitas pencapaian laba periode berjalan tahun 2023 sebesar Rp4,01 triliun.
4. Tingkat kesehatan Perseroan dengan kualifikasi AA yang berada dalam kategori Sehat.

an increase in domestic container traffic, which shows a positive trend in the current period when compared to the same period the previous year. So in total, Pelindo's container throughput in 2023 reached 17.66 million TEUs or 99.96% of the RKAP.

4. Fuel Prices

In 2023, the average industrial diesel price until December 2023 was in a range of between Rp21,150 to Rp24,650 and the average fuel price throughout 2023 was Rp22,745, an increase compared to Rp20,478 in 2022. This increase in fuel prices again impacted operational costs, by increasing the Company's operational expenses. To mitigate this, Pelindo has taken strategic steps to implement fuel surcharges, especially for marine services, in coordination and mutual agreement with the Association and Customers. This was carried out by following the industrial fuel prices set by the Government.

Based on the matters described above, Management's analysis shows that even though there are challenges being faced by Pelindo, these can still be accommodated by using appropriate strategic initiatives and optimal resource utilization, so that Pelindo's business continuity can be well maintained.

MANAGEMENT ASSESSMENT OF MATTERS THAT COULD POTENTIALLY INFLUENCE BUSINESS CONTINUITY

The Company's management conducts assessments on the Company's business continuity, with the assessments carried out based on various factors such as analysis of the strength of financial and non-financial conditions. Based on the assessment results, the Company believes that the Company has the resources to continue its business in the future, and does not see any material uncertainties that could give rise to any significant doubt about the Company's business continuity.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT TO CONDUCT THE ASSESSMENT

Several factors that management considers when conducting an assessment of business continuity include the following:

1. Pelindo's superior resource capabilities to compete in the port industry.
2. Pelindo's position in industry is good in the regional arena, and can make a major contribution to the country's economy.
3. Good financial condition by achieving profit for the current period in 2023 of Rp4.01 trillion.
4. The Company's health level with AA qualification in the Healthy category.

KERANGKA GOVERNANSI, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ASPEK PERPAJAKAN

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan melalui ketaatan dalam pembayaran pajak. Selama tahun 2023, Perseroan telah mematuhi semua peraturan dan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Perseroan tidak menerima peringatan apapun atau sanksi signifikan terkait dengan perpajakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Pengelolaan pajak di Pelindo dilakukan oleh *Group Layanan Keuangan dan Perpajakan*, di bawah Direktur Keuangan, yang sekaligus merupakan badan tata kelola tertinggi yang secara resmi meninjau dan menyetujui strategi pajak Perseroan. Sebagai wajib pajak, Perseroan berkomitmen untuk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku guna menghindari timbulnya sanksi dan/atau denda perpajakan.

Sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, pada tahun 2023 *Group Layanan Keuangan dan Perpajakan* menyelenggarakan pelatihan brevet pajak untuk seluruh pegawai yang bertugas baik dibidang keuangan maupun non-keuangan dan secara rutin melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Pelatihan brevet pajak dan sosialisasi dilakukan secara daring kepada seluruh pekerja, serta melalui *website* dan media komunikasi Pelindo.

Pelindo dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diuraikan sebagai berikut:

GOVERNANCE FRAMEWORK, MANAGEMENT AND CONTROL OF TAXATION ASPECTS

As part of a State-Owned Enterprise (SOE), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is committed to contributing to development by complying with tax payments. In 2023, the Company complied with all regulations and fulfilled its tax obligations in accordance with applicable laws and regulations. As a result, the Company did not receive any warnings or significant sanctions related to taxation up to December 31, 2023.

Tax management at Pelindo is carried out by the *Financial Services and Taxation Group*, under the Finance Director, who is also the highest governance body that officially reviews and approves the Company's tax strategy. As a taxpayer, the Company is committed to complying with the provisions of applicable tax laws to avoid incurring tax sanctions and/or fines.

As a form of increasing tax compliance, in 2023 the *Financial Services and Taxation Group* organized tax brevet training for all employees working in both financial and non-financial fields, and regularly socializes the latest tax regulations. Tax brevet training and socialization is carried out online for all employees, as well as through Pelindo's website and communication media.

Pelindo in its operational activities has implemented Good Corporate Governance in a transparent and accountable manner, especially for managing its tax rights and obligations, and its tax rights and obligations are carried out in accordance with applicable regulations. Tax payments and non-tax state revenues (PNBP) are described as follows:

Tabel Pembayaran Pajak dan PNBP
Tax Payments and PNBP

(dalam miliar Rupiah)		(in billion Rupiah)	
No.	Jenis Kontribusi Pada Pemerintah Types of Contributions to the Government	2023	2022
1	Dividen Dividends	1.377,20	1.316,85
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non-Tax State Revenue (PNBP)	214,16	209,03
3	Konsesi Concessions	623,94	535,65
4	PPh Pasal 21 PPh Article 21	911,27	861,78



Tabel Pembayaran Pajak dan PNBP
Tax Payments and PNBP

(dalam miliar Rupiah)

(in billion Rupiah)

No.	Jenis Kontribusi Pada Pemerintah Types of Contributions to the Government	2023	2022
5	PPh Pasal 22 PPh Article 22	4,70	6,40
6	PPh Pasal 23 PPh Article 23	358,70	300,97
7	PPh Pasal 4 Ayat 2 PPh Article 4, Paragraph 2	175,40	157,23
8	PPh Pasal 15 PPh Article 15	2,20	6,16
9	PPh Pasal 26 Ph Article 26	180,78	206,34
10	PPh Pasal 25/29 PPh Article 25/29	1.070,86	877,13
11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Land & Building Tax (PBB)	191,70	190,84
12	Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Compulsory Value Added Tax	832,00	674,25
13	Kurang Bayar/Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Underpayment/Overpayment of Value Added Tax	1.313,69	987,48
TOTAL		7.256,59	6.330,11





Sumber Daya Manusia

Human Resource

Pada tahun 2023 Perseroan telah mengelola sumber daya manusia pada *single system Cloud ERP SAP RISE* modul *Human Capital Management (SAP HCM)* dan mengintegrasikan proses secara *end-to-end*. Perseroan juga mengintegrasikan SAP HCM dengan sistem lain yang berperan untuk mempermudah antar muka proses-proses bagi seluruh pekerja yang dapat diakses oleh pekerja dimanapun dan kapanpun.



In 2023, the Company has managed its human capital on a single Cloud ERP system, SAP RISE, Human Capital Management (SAP HCM) module and integrated processes end-to-end. The Company also integrates SAP HCM with other systems, which play a role in simplifying the interface of processes for all employees and can be accessed by employees anywhere and at any time.

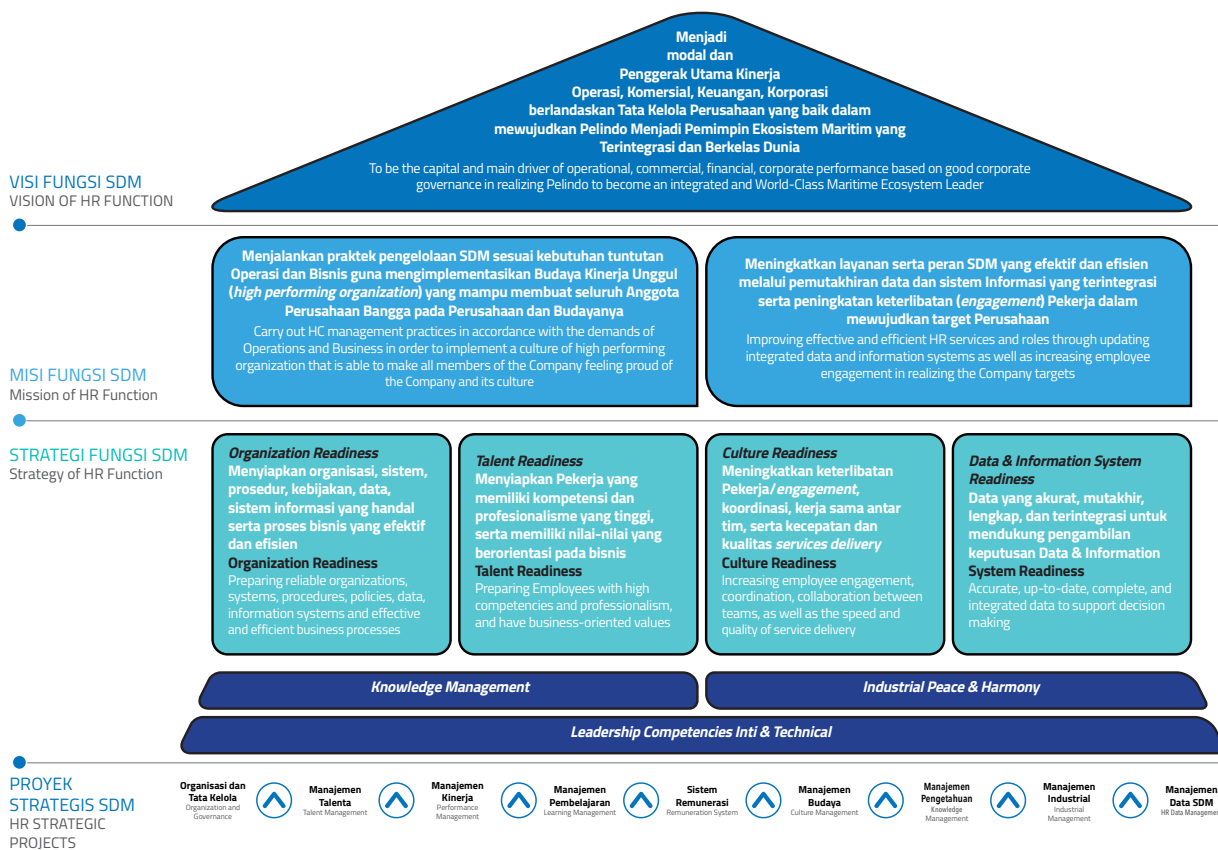
STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY



Visi, Misi, dan Strategi Fungsi SDM Pelindo untuk Menjawab
Kebutuhan Transformasi Bisnis Perseroan

Vision, Mission and Strategy of Pelindo's Human Resources Function
to respond to the needs of the Company's Business Transformation





Roadmap Implementasi Program Strategis Fungsi SDM dalam Mendukung Visi Misi Periode 2022-2025

Roadmap of HR Function Strategic Program Implementation in Supporting 2022-2025 Vision and Mission

PROJECT INITIATIVES

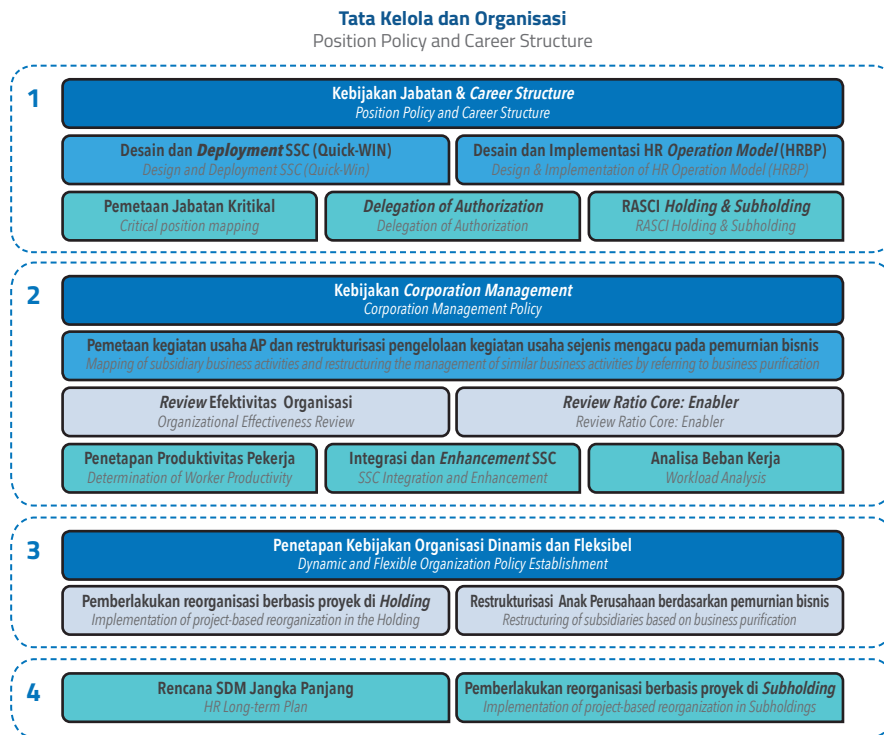
GOVERNANCE AND ORGANIZATION

Komponen Component	Tahun 2022 (Integrasi dan Penyelarasan) Alignment & Integration (Alignment & Integration)	Tahun 2023 (Efisiensi HC Operation) (HC Operation Efficiency)	Tahun 2024 (Kapabilitas Data Analytics Analitik) (Analytics Data Capability)	Tahun 2025 (Ekspansi Global) (Global Expansion)
<i>Definition</i>	Fokus pada integrasi kebijakan pengelolaan SDM beserta sistem pendukungnya Focus on management policy integration HR and its support system	Fokus pada kecepatan dan kualitas layanan SDM serta pemberdayaan SDM secara optimal Focus on speed and quality of HR services and optimal empowerment of Human Resource	Fokus pada analisa data SDM untuk mendukung pengembangan usaha Focus on HR data analysis for Supporting Business Development	Fokus pada pengembangan talenta dengan kompetensi standar global Focus on talent development with global standard competence
<i>Programs</i>	<ul style="list-style-type: none"> Standardisasi nomenklatur, <i>grading system</i> dan prosedur Kebijakan manajemen talenta Kebijakan manajemen kinerja Kebijakan manajemen remunerasi Kebijakan pengelolaan hubungan industrial Pembangunan <i>single ERP</i> Standardization of nomenclature, grading systems and procedures Talent Management Policy Performance Management Policy Remuneration Management Policy Industrial Relations Management Policy ERP Single Development 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi nomenklatur dan <i>grading</i> baru Implementasi seluruh kebijakan pengelolaan SDM Automasi & sentralisasi layanan SDM melalui <i>share services</i> <i>Culture & Change Management</i> <i>Data cleansing & completing</i> Pemetaan dan penyiapan alih profesi untuk penguatan SDM operasi Pemetaan kegiatan usaha seluruh Anak Perusahaan AP dan restrukturisasi pengelolaan kegiatan usaha sejenis Implementation of new nomenclature and grading Implementation of all HR management policies Automation & centralization of HR services through shared service control Culture & change management Data cleansing & completing Mapping and preparing for professional transfers to strengthen operational human resources Mapping the business activities of all AP Subsidiaries and restructuring the management of similar business activities 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Online competency management</i> <i>Organization health index</i> <i>Logistic business academies program</i> <i>Flexible benefit program</i> <i>Employee self services apps</i> <i>Integrated talent management system</i> <i>HC dashboard & analytics</i> <i>Employee satisfaction index</i> <i>HR Scorecard</i> <i>Best employer/ employee choice/HR excellence awards</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Global competency mindset</i> <i>International competency standard</i> <i>Global leadership program</i> <i>International job swapping</i> <i>Shared services center 2.0</i> <i>HR automation (artificial intelligence & gamification)</i> ISO 30405, 30408, 30409: HRM recruitment, workforce planning & recruitment
HC Capability	<i>Alignment & integration</i>	<i>HC service provider (service center)</i>	<i>Functional expert (center of excellence)</i>	<i>Strategic business partner</i>

Rincian tiap-tiap proyek strategis SDM dijelaskan sebagai berikut.

TATA KELOLA DAN ORGANISASI

GOVERNANCE AND ORGANIZATION



Proyek strategis SDM yang pertama adalah tata kelola dan organisasi yang meliputi *initiatives* kebijakan jabatan dan *career structure* yang dilaksanakan di tahun 2022 dan dilanjutkan dengan *initiatives* SSC terkait dengan desain dan *deployment* sebagai *Quick Win* dari *initiatives* tersebut. Desain dan implementasi *New HC Operation Model (HRBP)* dan pemetaan jabatan kritis merupakan salah satu dari *initiatives* yang segera dilaksanakan di semester dua tahun 2022. *Delegation of Authorization* Otorisasi serta *Responsibility, Accountable, Supportive, Consulted, dan Informed (RASCI) Holding dan Subholding* merupakan salah satu dari *highlight* untuk dilaksanakan tahun 2022.

Pada tahun 2023 ada 7 (tujuh) program *initiatives* yakni pemetaan kegiatan usaha Anak Perusahaan dan restrukturisasi pengelolaan kegiatan usaha sejenis mengacu pada pemurnian bisnis, *review* efektivitas organisasi, *review ratio core: enabler*, penetapan produktivitas pekerja, integrasi dan *enhancement* SSC, *work load analysis* atau analisa beban kerja, kebijakan *corporation management*. Pada tahun 2024 akan melaksanakan 3 (tiga) program *initiatives* yaitu pemberlakuan reorganisasi berbasis proyek di *Holding*, restrukturisasi Anak Perusahaan berdasarkan pemurnian bisnis, dan penetapan kebijakan organisasi dinamis dan fleksibel. Kemudian pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) program yang akan dilaksanakan yaitu rencana SDM jangka panjang dan pemberlakuan reorganisasi berbasis proyek di *Subholding*.

The first HR strategic project is governance and organization that includes position policy and career structure initiatives which was implemented in 2022 and continued by SSC initiatives related to design and deployment as Quick Win of these initiatives. Design and implementation of New HR Operation Model (HRBP) and mapping of critical positions is one of the initiatives to be implemented in the second half of 2022. Delegation of Authorization as well as Responsibility, Accountable, Supportive, Consultative, and Informative (RASCI) Holding and Subholding is one of the highlights to be implemented in 2022.

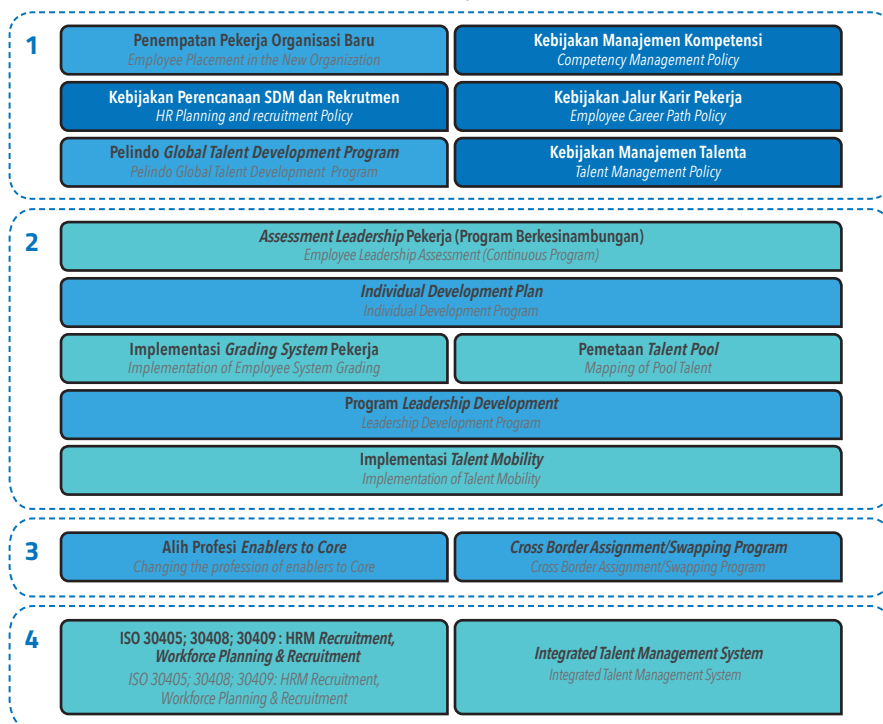
In 2023, there are 7 (seven) program initiatives, namely mapping business activities of Subsidiaries and restructuring management of similar business activities with reference to business purification, reviewing organizational effectiveness, reviewing ratio core: enabler, determining employee productivity, SSC integration and enhancement, work load analysis, workload analysis, corporate management policy. In 2024, 3 (three) program initiatives will be conducted, namely implementation of project- based reorganization in Holding, restructuring of Subsidiaries based on business purification, and setting dynamic and flexible organizational policies. Then in 2025, there are 2 (two) programs that will be conducted, namely the long-term HR plan and implementation of project-based reorganization in Subholdings.



MANAJEMEN TALENTA

TALENT MANAGEMENT

Manajemen Talenta Talent Management



Proyek Strategis SDM bidang manajemen talenta memiliki 6 (enam) program *initiatives* yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Program tersebut seperti penempatan pekerja organisasi baru, penyusunan kebijakan manajemen kompetensi, penyusunan kebijakan perencanaan SDM dan rekrutmen, penyusunan kebijakan jalur karir pekerja, Pelindo *Global Talent Development* program, dan yang terakhir penyusunan kebijakan manajemen talenta.

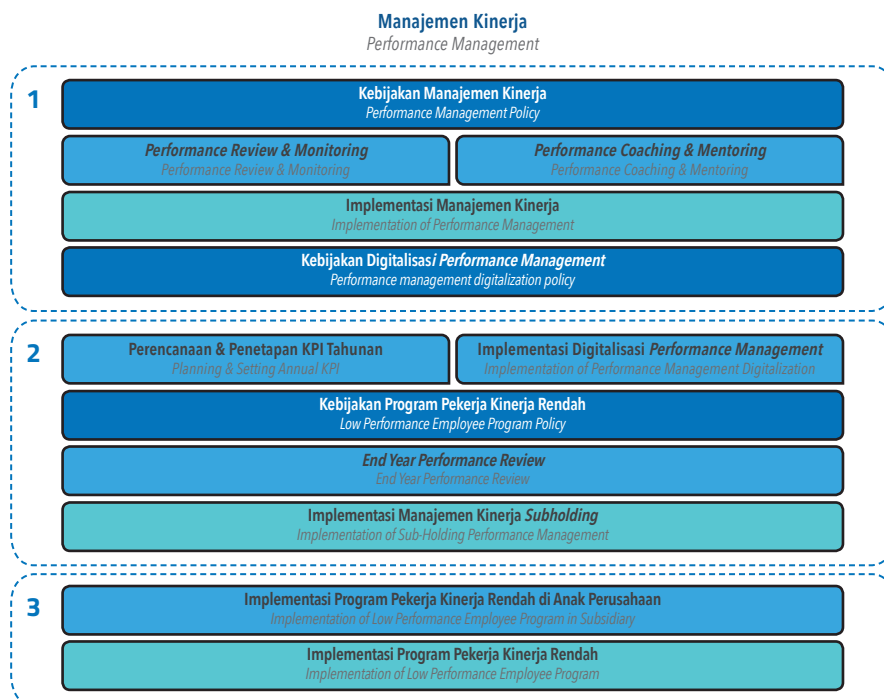
Pada tahun 2023 terdapat 6 (enam) program *initiatives* yakni *assessment leadership* pekerja yang merupakan program berkesinambungan untuk dilaksanakan, *individual development plan*, implementasi *grading system* pekerja, pemetaan *talent pool*, *program leadership development*, dan implementasi *talent mobility*. Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) program yang akan dijalankan yaitu alih profesi *enablers to core* dan *cross border assignment* atau *swapping program*. Di tahun 2025 juga terdapat 2 (dua) program yang akan dijalankan yaitu ISO 30405, 30408, 30409: HRM Recruitment, Workforce Planning & Recruitment, dan *Integrated Talent Management System*.

HR Strategic Project in talent management has 6 (six) initiatives programs that has been carried out in 2022. The programs were placement of employees in the new organization, preparation of competency management policy, preparation of HR planning and recruitment policy, Pelindo Global Talent Development program, and preparation of talent management policy.

In 2023, there are 6 (six) initiatives programs namely employee leadership assessment which is a continuous program to be implemented, individual development plan, implementation of employee grading systems, talent pool mapping, leadership development programs, and implementation of talent mobility. In 2024, there are 2 (two) programs that will be carried out, namely changing the profession of enablers to core and cross border assignments or swapping programs. In 2025, there are also 2 (two) programs that will be carried out, namely ISO 30405, 30408, 30409: HRM Recruitment, Workforce Planning & Recruitment, and Integrated Talent Management System.

MANAJEMEN KINERJA

PERFORMANCE MANAGEMENT



Bidang manajemen kinerja memiliki 12 (dua belas) program *initiatives* yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian Visi, Misi dan fungsi SDM. Kegiatan ini dilakukan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan kebijakan manajemen kerja, implementasi program *performance review monitoring*, implementasi program *performance coaching dan mentoring*, implementasi program manajemen kinerja dan penyusunan kebijakan digitalisasi *performance management* dilakukan pada tahun 2022.

Kemudian tahun berikutnya yaitu pada tahun 2023 akan melakukan kegiatan perencanaan & penetapan KPI Tahunan, implementasi digitalisasi *performance management*, penyusunan kebijakan pekerja kinerja rendah, implementasi program *end year performance review*, dan yang terakhir implementasi manajemen kinerja *Sub Holding*. Kegiatan di tahun 2024 hanya ada 2 (dua) program *initiatives* yaitu implementasi program pekerja kinerja rendah di Anak Perusahaan dan implementasi program Pekerja kinerja rendah.

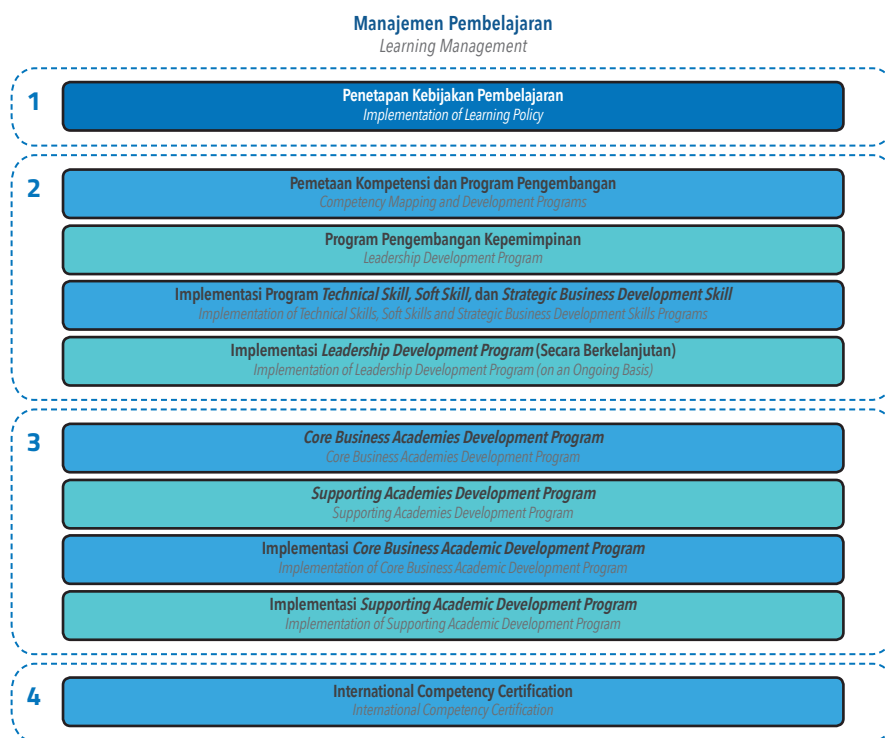
Performance management has 12 (twelve) initiatives program that will be implemented to realize the achievement of HR Vision, Mission and functions, starting from 2022 to 2024. The preparation of work management policies, implementation of performance review monitoring programs, implementation of performance coaching and mentoring programs, implementation of performance management programs and preparation of performance management digitalization policies are carried out in 2022.

Next year, in 2023, planning & establishment of annual KPI, implementing digitalization of performance management, compiling low-performance worker policies, implementation of end-year performance review programs, and implementation of Subholding performance management will be carried out. There are only 2 (two) initiatives program in 2024, namely implementation of low performance employee program in Subsidiaries and implementation of low performance employee program.



MANAJEMEN PEMBELAJARAN

LEARNING MANAGEMENT



Proyek strategis SDM bidang manajemen pembelajaran diawali dengan penyusunan penetapan kebijakan pembelajaran di tahun 2022. Kegiatan selanjutnya penyusunan kebijakan pemetaan kompetensi dan program pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Kegiatan selanjutnya penyusunan kebijakan program pengembangan kepemimpinan yang akan dilakukan 2023.

Selanjutnya implementasi program *technical skill, soft skill* dan *strategic business development skill* yang awal pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya kegiatan implementasi *Leadership Development Program* yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2025. Selanjutnya penyusunan kebijakan terkait dengan *Core Business Academies Development Program* yang dilakukan pada tahun 2023. Kegiatan ini meliputi pengembangan program pembelajaran berbasis *blended learning*.

Penyusunan kebijakan *Supporting Academies Development Program* dilaksanakan pada tahun 2023. Implementasi program *Core Business Academic Development Program* dilaksanakan pada tahun 2023 secara berkelanjutan dilaksanakan sepanjang tahun berikutnya. Implementasi *Supporting Academic Development Program* dilaksanakan pada tahun 2023 secara berkelanjutan dijalankan setiap tahunnya yang dilanjutkan dengan implementasi program *International Competency Certification* yang akan dilaksanakan di tahun 2025.

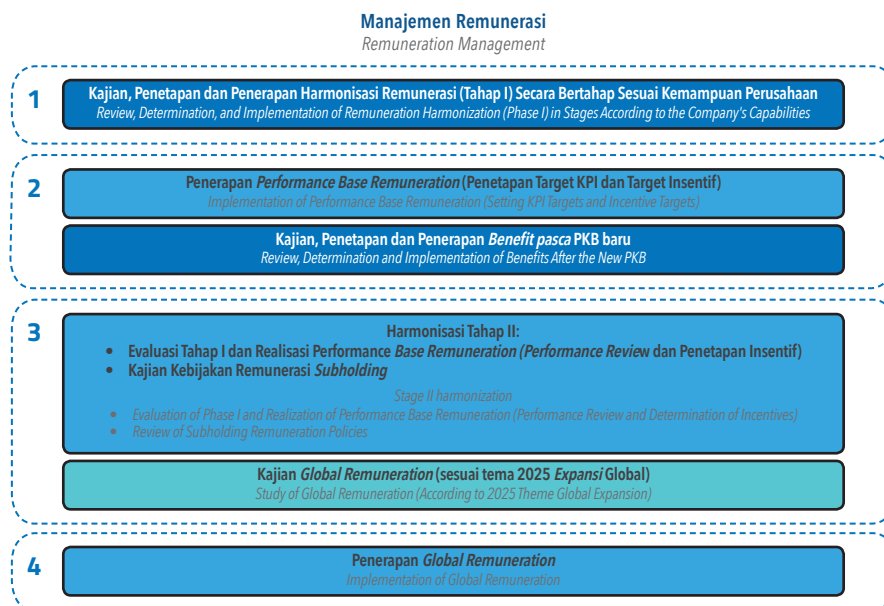
HR strategic project in learning management began with the preparation of learning policy in 2022. The next activity is preparation of competency mapping policies and development programs to be carried out in 2023. Afterward, the next activity is to formulate leadership development program policies to be carried out in 2023.

Furthermore, implementation of technical skills, soft skills and strategic business development skills programs will be carried out from 2023 to 2024. Next, implementation of Leadership Development Program will be carried out in 2023 until the end of 2025. Then, preparation of policies related to Core Business Academies Development Program will be carried out in 2023. This activity includes the development of blended learning-based learning programs.

The formulation of Supporting Academies Development Program policy will be conducted in 2023. Implementation of Core Business Academic Development Program and implementation of Supporting Academic Development Program will be conducted in 2023 on an ongoing basis throughout the following year followed by implementation of International Competency Certification program which will be carried out in 2025.

MANAJEMEN REMUNERASI

REMUNERATION MANAGEMENT



Proyek Strategis SDM bidang manajemen remunerasi diawali dengan kajian, penetapan dan penerapan harmonisasi remunerasi (Tahap I) yang dilaksanakan pada semester dua tahun 2022. Pada tahun 2023 ada dua kegiatan yang akan dijalani seperti Harmonisasi tahap II – Penerapan *Performance Base Remuneration* atau penetapan target KPI dan target insentif, lalu kegiatan selanjutnya kajian, penetapan dan penerapan *benefit* pasca PKB Baru. Dilanjut dengan kegiatan harmonisasi tahap II di tahun 2024 yang meliputi evaluasi remunerasi tahap I dan realisasi *performance base remuneration* (*performance review* dan penetapan insentif) dan pada waktu yang bersamaan juga melaksanakan kajian kebijakan remunerasi di *Subholding*.

Dalam mempersiapkan implementasi program *Global Remuneration* di 2025 (*Ekspansi Global*) maka Kajian *Global Remuneration* dilaksanakan di tahun 2024 sebagai satu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan.

HR Strategic Project in remuneration management began with review, determination and implementation of remuneration harmonization (Phase I), which was carried out in second half of 2022. In 2023, there are two activities that will be carried out, namely Phase II Harmonization - Implementation of Performance Base Remuneration or setting KPI targets and incentive targets, then the next activity is reviewing, determining and implementing benefits after the New CLA. Followed by phase II harmonization activities in 2024 which includes evaluation of phase I remuneration and realization of performance base remuneration (performance review and determination of incentives) and at the same time also reviewing remuneration policies in Sub Holdings.

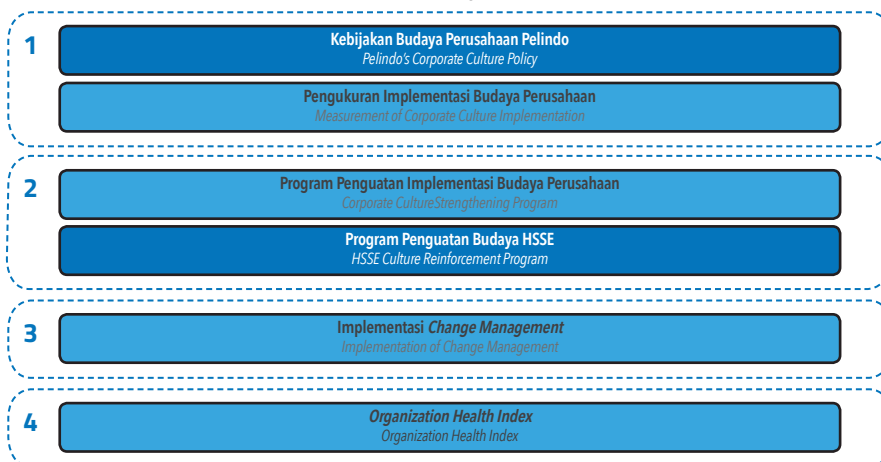
In preparing for the implementation of Global Remuneration program in 2025 (Global Expansion), Global Remuneration Study will be carried out in 2024 as a series of continuous activities.



MANAJEMEN BUDAYA

TALENT MANAGEMENT

Manajemen Budaya *Culture Management*



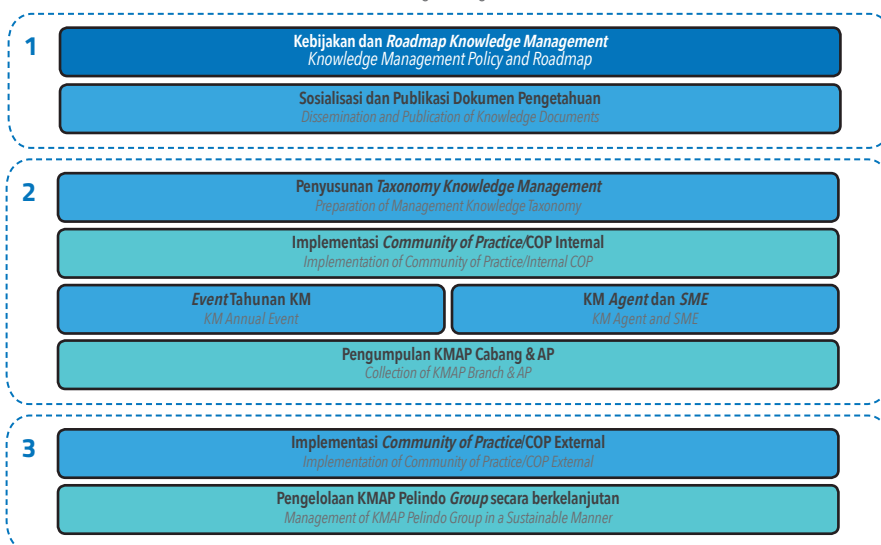
Initiatives proyek strategis SDM bidang Manajemen Budaya pada tahun 2022 semester dua yaitu melakukan penyusunan Kebijakan Budaya Perseroan Pelindo dan Pengukuran Implementasi Budaya Perseroan setelah *merger*. Kegiatan berikutnya program penguatan implementasi Budaya Perseroan, program penguatan budaya HSSE sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam setiap aktivitas PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta implementasi *change Management* yang dilakukan di tahun 2023. Kegiatan berikutnya dilakukan di tahun 2025 yakni *Organization Health Index* yaitu sebagai program pengukuran transformasi budaya kerja untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi.

HR Strategic project initiatives in Culture Management in second semester of 2022 are preparing Pelindo's Corporate Culture Policy and measuring implementation of corporate culture after merger. The next activity is a program to strengthen Corporate Culture implementation, a program to strengthen HSSE culture as an integral part of every PT Pelabuhan Indonesia (Persero) activity, as well as implementation of change management to be carried out in 2023. The next activity that will be carried out in 2025 is the Organization Health Index, as work culture transformation measurement program to determine the soundness of organizational culture.

MANAJEMEN PENGETAHUAN

KNOWLEDGE MANAGEMENT

Manajemen Pengetahuan *Knowledge Management*

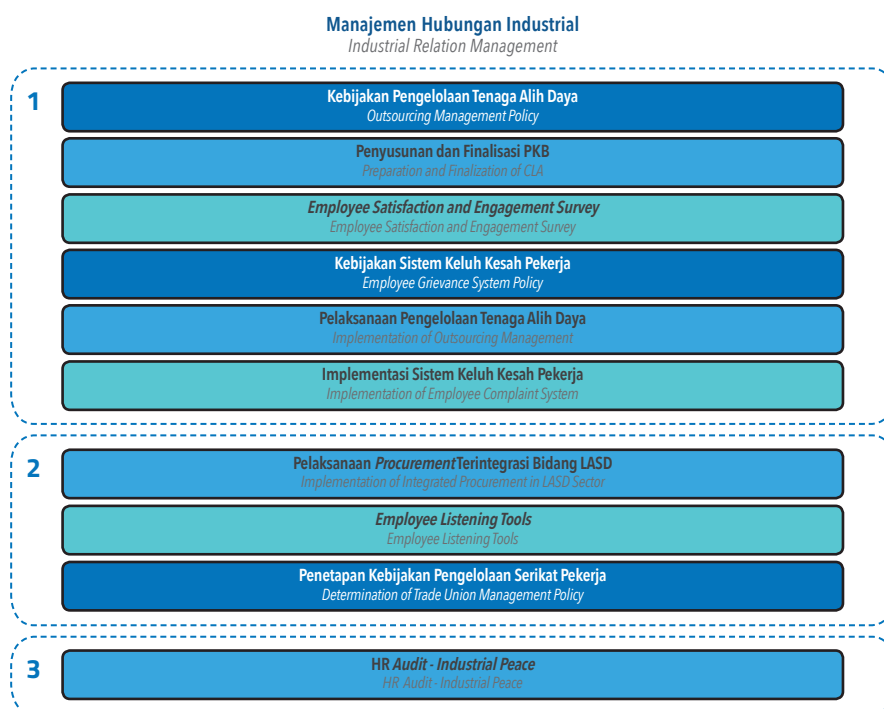


Initiatives proyek strategis SDM bidang Manajemen Pengetahuan pada tahun 2022 semester dua adalah Penyusunan Kebijakan dan Roadmap Knowledge Management serta Sosialisasi dan publikasi dokumen pengetahuan. Penyusunan *taxonomy knowledge management*, implementasi *community of practice/COP Internal*, *Event Tahunan KM*, *KM Agent* dan *SME*, Pengumpulan KMAP Cabang & AP akan dilakukan di tahun 2023. Kegiatan pada tahun 2024 adalah *Implementasi community of practice (COP) External* dan Pengelolaan KMAP Pelindo Grup secara berkelanjutan.

HR Strategic project initiatives in Knowledge Management in the second semester of 2022 were Policy Development and Knowledge Management Roadmap as well as Dissemination and publication of knowledge documents. Preparation of taxonomy knowledge management, implementation of community of practice/Internal COP, KM Annual Event, KM Agent and SME, Collection of KMAP Branches & AP will be carried out in 2023. Activities in 2024 are Implementation of External community of practice (COP) and Management of Pelindo KMAP Group on an ongoing basis.

MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL

INDUSTRIAL RELATION MANAGEMENT



Proyek strategis SDM bidang manajemen hubungan industrial diawali dengan kegiatan yang pada tahun 2022 dimana ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan seperti Kebijakan Pengelolaan Tenaga Alih Daya, penyusunan dan finalisasi PKB, *employee satisfaction and engagement survey*, Kebijakan Sistem Keluh Kesah Pekerja, Pelaksanaan Pengelolaan Tenaga Alih Daya, Implementasi Sistem Keluh Kesah Pekerja. Dilanjut di tahun berikutnya yaitu tahun 2023 dengan kegiatan Pelaksanaan *Procurement* terintegrasi bidang LASD, *Employee Listening Tools*, Penetapan Kebijakan Pengelolaan Serikat Pekerja. Lalu ditutup dengan satu kegiatan di tahun 2024 yaitu HC Audit – *Industrial Peace*.

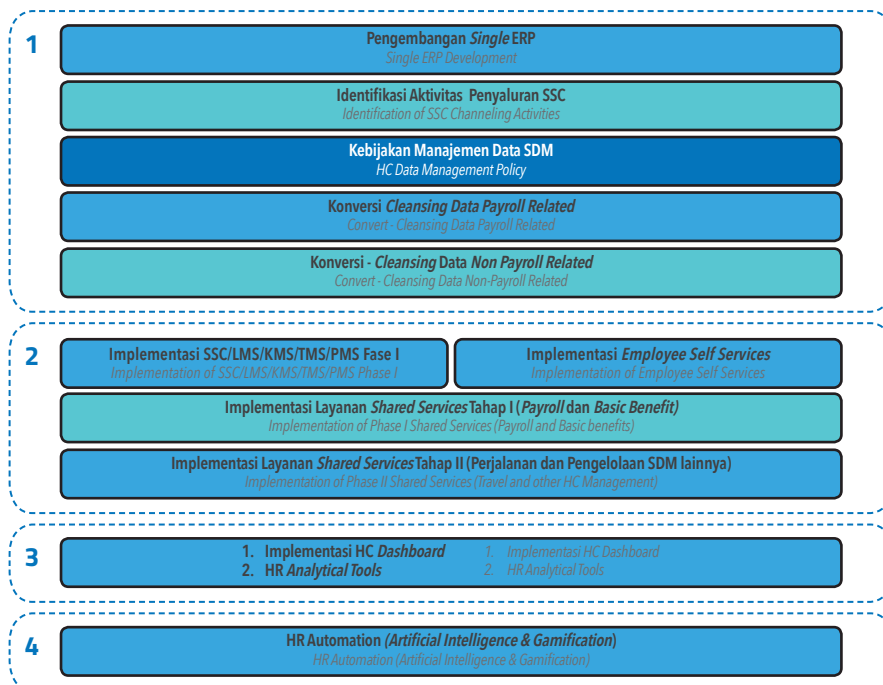
HR strategic project in industrial relations management began with a series of activities in 2022, namely Outsourcing Management Policy, preparation and finalization of CLA, employee satisfaction and engagement survey, Employee Grievance System Policy, Implementation of Outsourcing Management, and Implementation of Employee’s Complaint System. In the following year of 2023, will be continued with integrated Procurement Implementation activities in LASD sector, Employee Listening Tools, Determination of Trade Union Management Policies. Then closed with one activity in 2024, namely HR Audit – Industrial Peace.



MANAJEMEN DATA, SISTEM DAN TEKNOLOGI

DATA, SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT

Manajemen Data, Sistem dan Teknologi Data, Systems and Technology Management



Proyek strategis SDM terakhir untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pelindo adalah Manajemen Data, Sistem dan Teknologi. Kegiatan di tahun 2022 diawali dengan Pengembangan *Single ERP*, Identifikasi Aktivitas Penyaluran SSC, Kebijakan Manajemen Data SDM, Konversi – *cleansing Data Payroll Related* dan Konversi – *cleansing Data Non Payroll Related*. Di tahun 2023 melakukan kegiatan Implementasi SSC/LMS/KMS/ TMS/PMS Fase I, Implementasi *Employee Self Service*, Implementasi Layanan *Shared Services* Tahap I (*Payroll dan Basic Benefit*), serta Implementasi Layanan *Shared Services* Tahap II (*Perjalanan dan Pengelolaan SDM lainnya*). Kemudian di tahun 2024 ada satu kegiatan yang terbagi menjadi dua yaitu: implementasi *HC Dashboard* dan *HR Analytical Tools*. Program *HR Automation (Artificial Intelligence & gamification)* akan di implementasi di 2025 semester I.

The last HR strategic project to realize the achievement of Pelindo's Vision and Mission is Data, Systems and Technology Management. Activities in 2022 began with *Single ERP* Development, Identification of SSC Distribution Activities, HR Data Management Policy, Conversion – *cleansing Data Payroll Related* and Conversion – *cleansing Data Non-Payroll Related*. In 2023, SSC/LMS/KMS/ TMS/PMS Phase I Implementation, *Employee Self Service* Implementation, *Shared Services* Phase I Implementation (*Payroll and Basic Benefits*), and *Shared Services* Phase II Implementation (*Travel and other HR Management*) will be carried out. Then in 2024, there will be one activity that is divided into two, namely: implementation of *HR Dashboard* and *HR Analytical Tools*. *HR Automation (Artificial Intelligence & gamification)* program will be carried out in the first semester of 2025.

INTER KONEKTIVITAS PROJECT STRATEGIS

STRATEGIC PROJECT INTER CONNECTIVITY

Inter konektivitas *project* strategis akan membantu menentukan prioritas dan kedekatan korelasi *project* saat implementasi. Dalam proses *merger* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan banyak sekali dibutuhkan pedoman dan kebijakan, maka sangat disarankan untuk dibuatkan satu pedoman kebijakan pengelolaan SDM yang terintegrasi satu dengan yang lainnya yang mencakup keseluruhan pedoman dan kebijakan yang dapat menjadi *handbook* dan menjadi *Standard Operating Procedure* dari HC dalam mengintegrasikan sistem di *Holding, Subholding, Regional* dan seluruh entitas di bawahnya.

Strategic project interconnectivity will help determine the priority and proximity of project correlations during implementation. In *Merger* process of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), numerous guidelines and policies will be needed, hence it is highly recommended to make one HR Management Policy guideline that is integrated with one another and covers all guidelines and policies, which become HR's handbook and *Standard Operating Procedure* in integrating the systems in *Holding, Subholding, Regional* and all entities.

Berikut adalah pedoman-pedoman yang telah teridentifikasi dibutuhkan dalam pengelolaan SDM di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) saat ini:

1. Kebijakan Penyusunan Jabatan, *Grading System & Career Structure*
2. Kebijakan *Corporation Management*
3. Kebijakan Manajemen Talenta
4. Kebijakan Manajemen Kompetensi
5. Kebijakan Manajemen Kinerja
6. Kebijakan Manajemen Pembelajaran
7. Kebijakan Remunerasi dan *Benefit*
8. Kebijakan Manajemen Data SDM
9. Kebijakan Manajemen Pengetahuan
10. Kebijakan Pengelolaan Serikat Pekerja

Dari hasil observasi dan evaluasi, keseluruhan kebijakan di atas saat ini telah dimiliki oleh masing-masing ex. PT Pelabuhan Indonesia I-IV hanya saja kebijakan tersebut belum tersentral dan perlu sedikit penyesuaian dalam pengimplementasiannya untuk kemudian digabungkan menjadi satu *handbook/SOP* terkait Kebijakan Integrasi Pengelolaan SDM PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mencakup keseluruhan proses.

The following are required guidelines that have been identified in Human Resource management at PT Pelabuhan Indonesia (Persero):

1. Job Arrangement, Grading System & Career Structure Policy;
2. Corporation Management Policy;
3. Talent Management Policy;
4. Competency Management Policy;
5. Performance Management Policy;
6. Learning Management Policy;
7. Remuneration and Benefit Policy;
8. HR Data Management Policy;
9. Knowledge Management Policy;
10. Trade Union Management Policy.

Through observation and evaluation carried out, all of the above policies are currently owned by each ex-PT Pelabuhan Indonesia I-IV, but these policies are not yet centralized and need adjustment in its implementation and then combined into one handbook/SOP related to HR Management Integration Policy of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that covers the entire processes.

PEDOMAN & KEBIJAKAN UTAMA MAIN GUIDELINES & POLICIES



Pedoman & Kebijakan Utama

Setelah Integrasi *Post Merger* akan dilakukan suatu kegiatan berupa Desain Organisasi atau bentuk organisasi yang meliputi struktur organisasi, *job description*, *job specification* dan hasil evaluasi jabatan. *Job Grading* dan *Career Structure* juga akan

Main Guidelines & Policies

After *Post Merger* Integration, an activity will be carried out, namely Organizational Design that includes organizational structure, job descriptions, job specifications and job evaluation results. *Job Grading* and *Career Structure* will also be carried

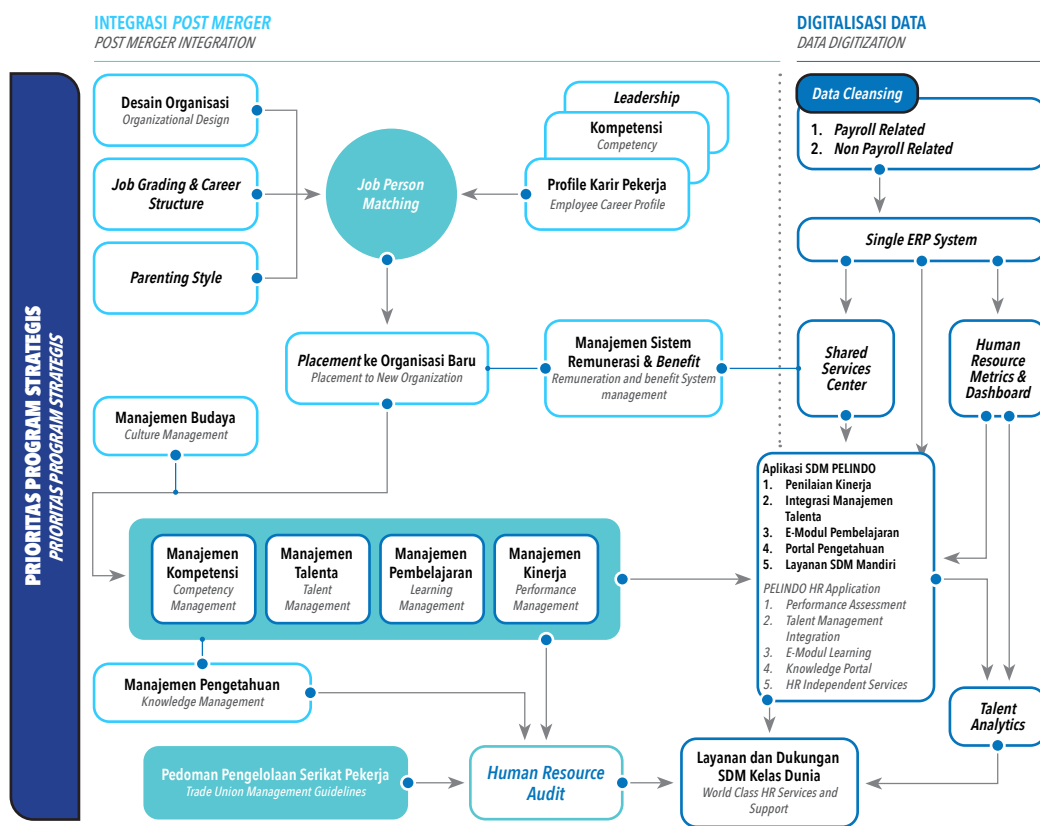


dilakukan setelah integrasi *post merger*, seperti yang kita tahu *job grading* adalah membuat ukuran parameter untuk dapat dihitung bobot dan besaran bisnis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menggambarkan besaran *magnitude* untuk kemudian menjadi dasar dalam menghitung *accountability* dalam *Hay Points*.

Kegiatan terakhir setelah integrasi *post merger* adalah *parenting style*, yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola bisnis Anak Perusahaan. Ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dunia usaha dan industri. Pemahaman juga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *Leadership*, *Kompetensi*, dan *Profil Karir Pekerja*.

out after post-merger integration. Job grading is defined as creating parameter sizes to calculate the weight and size of business which can be taken into consideration in describing the magnitude then become the basis for calculating accountability in Hay Points.

The last activity after post-merger integration is parenting style, which is used as a reference in managing the Subsidiary's business. These three activities are carried out to enhance the comprehension regarding business world and industry. Such comprehension is also influenced by three factors, namely Leadership, Competence, and Employee Career Profile.



Integrasi Post Merger

Tahap lanjutan dari *Job Person Matching* adalah *Placement* ke Organisasi Baru dan memiliki korelasi dengan *Manajemen Sistem Remunerasi & Benefit*. Dalam tahap *Placement* ke Organisasi Baru ini juga tidak lepas dari pengaruh *Manajemen Budaya* dan *Manajemen Pengetahuan* yang mana kedua *Manajemen* tersebut terdiri dari *Manajemen Kompetensi*, *Manajemen Talenta*, *Manajemen Pembelajaran*, dan *Manajemen Kinerja*. *Human Capital Audit* merupakan proses sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti evaluasi secara objektif dalam menentukan sejauh mana kriteria pengelolaan SDM terpenuhi. Beberapa macam *Manajemen* di atas masuk dalam kriteria proses sistematis yang dilakukan *Human Capital* dan juga tetap mengacu pada *Pedoman Pengelolaan Serikat Pekerja*.

The next stage of *Job Person Matching* is *Placement* to New Organization and has a correlation with *Remuneration & Benefit System Management*. The *Placement* in New Organization stage cannot be separated from the influence of *Culture Management* and *Knowledge Management*, both of which consist of *Competency Management*, *Talent Management*, *Learning Management* and *Performance Management*. *Human Resource Audit* is a systematic, independent and documented process to obtain objective evaluation evidence in determining the extent to which HC management criteria are met. Several types of *Management* above are included in the criteria of systematic process conducted by *Human Resource* and remained to be guided by the *Guidelines for Management of Trade Union*.

Digitalisasi data dilakukan *Data Cleansing* yang terdiri dari *Payroll Related* dan *Non Payroll Related*. Dari *data cleansing* tersebut akan menghasilkan *Single ERP System* yang berperan untuk menjalankan keseluruhan kegiatan transaksional seperti memenuhi semua kebutuhan pekerja secara personal dan menyediakan layanan transaksional (data dan informasi) bersamaan dengan *Human Capital Metrics & Dashboard*, juga manajemen budaya dan pengetahuan merumuskan Aplikasi SDM Pelindo termasuk di dalamnya Penilaian Kinerja, Integrasi Manajemen Talenta, E-Modul Pembelajaran, Portal Pengetahuan dan yang terakhir Layanan SDM Mandiri. Dari aplikasi SDM yang dirumuskan akan membentuk *Talent Analytics* yang akan berpengaruh pada Layanan dan Dukungan SDM Kelas Dunia.

Data digitization is carried out by Data Cleansing which consists of Payroll Related and Non-Payroll Related. The data cleansing will produce Single ERP System whose role is to carry out all transactional activities such as fulfilling all employee needs personally and providing transactional services (data and information) together with Human Resource Matrix & Dashboard, as well as cultural and knowledge management formulating Pelindo HC Application including Performance Assessment, Talent Management Integration, E-Learning Modules, Knowledge Portals and the last is Independent HC Services. The formulated HC application will form Talent Analytics which will affect World Class HC Services and Support.



KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

REKRUTMEN

Kebijakan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM Perseroan guna mendukung pencapaian kinerja yang optimal, maka diselenggarakan proses Rekrutmen secara transparan dan terbuka. Rekrutmen dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan pekerja sesuai formasi kebutuhan oleh Divisi Strategi SDM Perseroan. Setiap orang, baik pria maupun wanita dengan tidak memandang latar belakang yang dimiliki calon pekerja, seperti suku, agama, ras, hingga kondisi fisik diberikan kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti rekrutmen pekerja sepanjang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Perseroan kemudian mengangkat calon pekerja dengan mengacu pada hasil seleksi, hasil evaluasi masa percobaan, serta pencapaian orientasi pekerja.

Tahapan pelaksanaan rekrutmen adalah:

1. Pengumuman Pembukaan secara Terbuka;
2. Registrasi melalui *Website*;
3. Seleksi Administrasi;
4. Tes Berenang (untuk Jabatan Pandu);
5. Tes Seleksi Tahapan Pertama (Tes Potensi Akademik);
6. Tes Seleksi Tahapan Kedua (Psikotes dan Bahasa Inggris);
7. *Interview User*;
8. Tes Kesehatan; dan
9. *Interview Direksi*.

Pelaksanaan Rekrutmen

Pada Tahun 2023, Perseroan mengikuti program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) yang diselenggarakan oleh Forum *Human Capital Indonesia* (FHCI) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN). Pada program RBB tersebut Pelindo membuka lowongan untuk posisi Pandu, Operator Forklift, Operator *Truck Tronton*, *Yard Operation Assisstant*, dan *Gate Inspector*. Informasi terkait rekrutmen disampaikan secara luas baik melalui *website* bersama FHCI KBUMN maupun *website* dan media sosial Perseroan, mulai dari pembukaan lowongan, seleksi, hingga hasil dari setiap tahapan seleksi. Melalui Rekrutmen Bersama BUMN, Perseroan mendapatkan 2 (dua) orang peserta yang lolos seleksi untuk menjadi pekerja dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Perseroan untuk tenaga Pandu. Namun, belum didapatkan kandidat yang memenuhi persyaratan untuk posisi lainnya.

RECRUITMENT

POLICY

In order to meet the Company's HR needs to support the achievement of optimal performance, a transparent and open recruitment process is carried out. Recruitment is carried out based on an analysis of employee needs according to the formation of needs from the Company's HR Strategy Division. Everyone, both men and women, regardless of their background, such as ethnicity, religion, race and physical condition, are given the same opportunity to participate in employee recruitment as long as they meet the required criteria. The Company appoints prospective employees by referring to the selection results, trial period evaluation results, and employee orientation achievements.

The general stages of recruitment are as follows:

1. Public Opening Announcement;
2. Registration via the Website;
3. Administrative Selection;
4. Swimming Test (for Scout Position);
5. First Stage Selection Test (Academic Potential Test);
6. Second Stage Selection Test (Psychotest)
7. User Interviews;
8. Health Test; And
9. Interview with Directors.

Recruitment Implementation

In 2023, the Company participated in the SOE Joint Recruitment (RBB) program organized by the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) of the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN). In the RBB program, Pelindo opened vacancies for the positions of Scout, Forklift Operator, Tow Truck Operator, Yard Operation Assistant, and Gate Inspector. Information related to recruitment is conveyed widely both through the joint FHCI KBUMN website and the Company's website and social media, starting from vacancy openings, selection, to the results of each selection stage. Through Joint Recruitment with SOEs, the Company acquired 2 (two) participants who passed the selection to become employees with the Company's PKWT (Specific Time Work Agreement) status for Scout staff. However, we have not yet found candidates who meet the requirements for other positions.

Selain melalui Rekrutmen Bersama BUMN, Perseroan juga melakukan Rekrutmen secara mandiri dan didapatkan 30 (tiga puluh) orang pekerja untuk status PKWT, yang terdiri dari 5 (lima) orang untuk bergabung dalam Proyek BMTH (Bali Maritime Tourism Hub), 11 (sebelas) orang untuk bergabung dalam Proyek Kijing, 12 (dua belas) orang untuk bergabung dalam Proyek Terminal Kalibaru, dan 2 (dua) orang bergabung dalam tim *Shared Service Centre* Kantor Pusat.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Kebijakan

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pekerja tertuang di dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 18 Februari 2022 No. HK.01/18/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22 Tentang Pembelajaran Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Program Pembelajaran Pekerja pada Perseroan terdiri dari:

1. Program Pendidikan adalah program peningkatan kompetensi akademis melalui institusi pendidikan formal pada tingkat Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana, dan *Doctoral*.
2. Program Pelatihan adalah program peningkatan kompetensi non-akademis melalui sertifikasi, pelatihan atau kursus, yang dapat disampaikan melalui metode antara lain namun tidak terbatas pada metode konvensional maupun eksperimental, kelas tatap muka, seminar/webinar, *E-learning*, *Coaching*, *Mentoring*, *On-Job-Training (Job Assignment dan/atau Job Rotation)* *Self-Learning*, dan *Blended Learning*, yang disampaikan secara tatap muka (*luring*), elektronik (*on line/daring*) ataupun keduanya.
3. Program Magang adalah program peningkatan keterampilan dan keahlian secara langsung di industri terkait dalam waktu tertentu.

Pelindo senantiasa mengedepankan pembelajaran berkesinambungan kepada semua pekerja karena Perseroan percaya bahwa pengembangan kompetensi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis Perseroan. Pelindo memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan Perseroan. Sejalan dengan prinsip tersebut, Perseroan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi pekerja secara intensif dan berkesinambungan.

Apart from joint recruitment with SOEs, the Company also carried out independent recruitment and obtained 30 (thirty) employees for PKWT status, consisting of 5 (five) people to join the BMTH (Bali Maritime Tourism Hub) Project, 11 (eleven) people to join the Kijing Project, 12 (twelve) people to join the Kalibaru Terminal Project, and 2 (two) people to join the Head Office Shared Service Center team

COMPETENCY DEVELOPMENT

Policy

Employee Competency Development Policy is contained in the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dated February 18, 2022 No. HK.01/18/2/1/PSBL/UTMA/ PLND-22 Concerning Employee Learning in the Environment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Company's Employee Learning Program consists of:

1. Education Program, academic competency development program through formal educational institutions at Diploma, Undergraduate, Postgraduate, and Doctoral levels.
2. Training Program, non-academic competency development programs through certification, training or courses, which can be delivered through methods including but not limited to conventional or experimental methods, face-to-face classes, seminars/webinar, E-learning, Coaching, Mentoring, On-Job-Training (Job Assignment and/or Job Rotation) Self-Learning, and Blended Learning, delivered face-to-face (offline), electronically (online/online) or both.
3. Internship Program, program to increase skills and expertise directly in a related industry for a certain time.

Pelindo prioritizes continuous learning for all employees because the Company believes that competency development will have a positive impact on its business growth. Pelindo gives equal opportunities for all employees to be able to take part in the competency development program held by the Company. In line with these principles, the Company organizes intensive and sustainable employee competency development program.



Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Competency Development Implementation

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2023
Competency Development Based on Job Level in 2023

No.	Level Jabatan Competency Development Based on Job Level in 2023	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Pegawai Total Employees	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan Number of Employees Attended Training	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan Percentage of Those Who Attended Training for Each Job Level	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan Percentage of Those Who Attended Training for Each Type of Training
1	BOD-1	Training, Seminar dan Sertifikat Training, Seminar, and Certificate	Mengembangkan kompetensi kepemimpinan dan mengembangkan kemampuan strategis untuk mengembangkan suatu usaha Develop leadership competencies and develop strategic abilities to develop a business	228	234	103%	103%
2	BOD -2	Training, Seminar dan Sertifikat Training, Seminar, and Certificate		741	748	101%	101%
3	BOD-3	Training, Seminar dan Sertifikat Training, Seminar, and Certificate		3.047	2.918	96%	96%
4	BOD-4	Training, Seminar dan Sertifikat Training, Seminar, and Certificate		2.516	2.262	90%	90%
5	BOD-5	Training, Seminar dan Sertifikat Training, Seminar, and Certificate		456	411	90%	90%
JUMLAH TOTAL				6.988	6.573	94%	

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka mengukur dan mendukung pengembangan efektivitas Program Pembelajaran, maka dilaksanakan proses evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi Program Pendidikan:
 - a. Evaluasi Penyelenggara meliputi pengajar dan fasilitas;
 - b. Evaluasi Peserta dilakukan dengan:
 - Penyerahan laporan *progress* secara berkala, hasil tugas akhir akademis, transkrip, dan Ijazah Asli kepada Pengelola SDM masing-masing unit kerja dan dilaporkan kepada *Group Head* Pengelolaan SDM Kantor Pusat;
 - Melakukan *sharing knowledge* atas tugas akhir akademik dan pengetahuan lain yang diperoleh pada saat pendidikan.
2. Evaluasi Program Pelatihan:
 - a. Evaluasi Penyelenggaraan Pembelajaran (Level 1), yaitu evaluasi terhadap penyelenggaraan suatu pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan program pembelajaran yang diukur melalui metode survei;

Competency Development Based on Job Level in 2023

Competency Development Implementation Evaluation
In order to measure and support the Learning Program effectiveness, the evaluation process is carried out as follows:

1. Education Program Evaluation:
 - a. Evaluation of Organizer, includes instructors and facilities;
 - b. Evaluation of Participants is carried out by:
 - Periodic submission of progress reports, academic final assignment results, transcripts, and original diplomas to HR Manager of each work unit and reported to Head Office HR Management Group Head;
 - Sharing knowledge on academic final assignments and other knowledge obtained during education.
2. Training Evaluation Program:
 - a. Evaluation of Learning Implementation (Level 1), namely evaluation of training implementation that aimed at improving learning program services as measured by the survey method;

- b. Evaluasi Pengetahuan Peserta Pembelajaran (Level 2), yaitu evaluasi terhadap pekerja pada akhir suatu pelatihan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penyerapan pembelajaran dan menyatakan kelulusan pekerja dalam pelatihan tersebut yang diukur melalui metode-metode yang ditetapkan oleh pengajar;
 - c. Evaluasi Perilaku Peserta Pembelajaran (Level 3), yaitu evaluasi terhadap pekerja yang telah kembali ke unit kerjanya yang bertujuan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pemanfaatan hasil pelatihan di unit kerja yang diukur melalui hasil observasi atasan selama 3 (tiga) – 6 (enam) bulan;
 - d. Evaluasi Dampak Pembelajaran (Level 4), yaitu evaluasi dampak atau manfaat pelatihan terhadap kinerja individu pekerja, atau kinerja unit dimana pekerja bekerja, atau kinerja Perseroan secara keseluruhan.
3. Evaluasi Program Magang
 - a. Evaluasi Penyelenggara meliputi materi magang, proses magang, fasilitas yang diberikan oleh instansi yang menyediakan program magang;
 - b. Evaluasi Peserta dilakukan dengan:
 - Menyusun laporan pelaksanaan magang;
 - Melalui *sharing knowledge* hasil magang pada waktu yang ditentukan oleh Pengelola SDM di masing-masing unit kerja dan dilaporkan kepada *Group Head* Pengelolaan SDM Kantor Pusat.
- b. Evaluation of Learning Participants' Knowledge (Level 2), namely an evaluation of employees at the end of a training which aims to determine the level of learning absorption and certify employee's graduation in training which is measured through the methods set by the instructor;
 - c. Evaluation of Learning Participants' Behavior (Level 3), namely an evaluation of employee who have returned to their work unit which aims to determine changes in behavior and the utilization of training results in work units as measured through the results of supervisor's observations for 3 (three) - 6 (six) months;
 - d. Learning Impact Evaluation (Level 4), namely evaluating the impact or benefits of training on performance of individual employee, or performance of employee's unit work, or performance of the Company as a whole.
3. Apprentice Program Evaluation:
 - a. Evaluation of the Organizer, includes apprenticeship material and process, as well as facilities provided by agencies providing apprenticeship programs.
 - b. Participant Evaluation is carried out by:
 - Prepare a report on apprenticeship implementation;
 - Through sharing knowledge of apprenticeship results at the time determined by HR Manager in each work unit and reported to Head Office HR Management Group Head.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2023, Pelindo telah melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai dengan biaya sebesar Rp93.89 miliar mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang sebesar Rp39,81 miliar. Berikut rincian dari biaya pengembangan kompetensi selama tahun 2 (dua) tahun:

Competency Development Cost

In 2023, Pelindo has carried out employee competency development at a cost of Rp93.89 billion, an increase from 2022, which amounted to Rp39.81 billion. The following are details of competency development costs for 2 (two) years:

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Tahun 2022-2023
Competency Development Costs for 2022-2023

Keterangan Description	2023	2022
Total Biaya (Rp)	Rp93.892.002.018	Rp39.805.000.000

PENGEMBANGAN KARIR

Kebijakan

Pada tahun 2023 telah diterbitkan Peraturan Direksi tentang Manajemen Talenta dan Suksesi. Peraturan Direksi ini mengatur tentang pengelolaan *talent* Perseroan di Kantor Pusat, Regional, maupun Grup Bisnis mulai dari proses penjangkaran, penilaian, pengembangan, perputaran, hingga hak dan kewajiban talenta Perseroan. Selain itu, Peraturan Direksi ini juga mengatur tentang mekanisme suksesi baik itu yang didapatkan dari hasil *talent pool* Perseroan, proses lelang jabatan, maupun pengisian dari sumber eksternal.

CAREER DEVELOPMENT

Policy

In 2023, Board of Directors' Regulations on Talent Management and Succession was issued. This Board of Directors Regulation regulates the management of the Company's talent at the Head Office, Regional Offices and Business Groups, starting from the process of recruiting, assessing, developing, rotating, to the rights and obligations of the Company's talent. Apart from that, this Board of Directors Regulation also regulates succession mechanisms, whether obtained from the results of the Company's talent pool, the job bidding process, or from external sources.



Selain itu, sedang disusun Peraturan Direksi mengenai Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris pada *Group Bisnis* Perseroan yang mengatur mengenai tata cara serta persyaratan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris pada *Group Bisnis* di lingkungan Perseroan. Peraturan Direksi ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN.

Dalam rangka pengembangan karir, tentunya Perseroan melaksanakan Alih Tugas ke berbagai posisi sesuai kebutuhan Perseroan kepada Pekerja yang memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi tersebut, baik melalui pelaksanaan mutasi atau *Job Assignment* dan *Job Sharing*. Alih tugas ini dilakukan baik untuk pemenuhan posisi jabatan lowong, penataan SDM dalam serah terima operasi, *replacement* dari perubahan struktur organisasi *Subholding*, Regional, ataupun unit lainnya di bawah *Holding*, maupun hasil dari pelaksanaan *Job Bidding* (Lelang Jabatan).

Pelaksanaan Pengembangan Karir

Pada Tahun 2023, Perseroan melaksanakan *Job Bidding* (Lelang Jabatan) untuk posisi-posisi tertentu di lingkungan Perseroan. *Job Bidding* pada tahun 2023 diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di Bulan Maret untuk sebanyak 13 Posisi dan di Bulan September 2023 untuk sebanyak 4 (empat) posisi. Dari *Job Bidding* yang dilaksanakan, secara total Perseroan mendapatkan 15 pekerja untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Mekanisme *Job Bidding* dilakukan mulai dari pembukaan lowongan, seleksi administrasi, asesmen *career success factor*, *fit and proper test* dengan user dan bagian Pengelolaan SDM Perseroan, penentuan pemenang, dan pengumuman hasil *job bidding* hingga pembuatan Surat Keputusan Direksi Alih Tugas kepada Pekerja yang terpilih dari *Job Bidding*.

Pada tahun ini, Perseroan juga telah menetapkan *career structure* dan *Job Grading* baru untuk seluruh jabatan yang ada di Kantor Pusat dan Regional serta unit di bawahnya, serta telah menyelesaikan *Job Person Matching* (JPM), yaitu proses untuk memberikan kelas jabatan individu baru kepada seluruh pekerja Perseroan berdasarkan hasil *job grading* yang baru.

PENILAIAN KINERJA

Kebijakan

Kebijakan terkait pengelolaan kinerja berdasarkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/8/1/KPIU/UTMA/PLND-22 tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelindo secara berkala melakukan *review* dan penilaian terhadap pencapaian kinerja individu Pekerja berdasarkan target dan realisasi pada ukuran kinerja individu yang ditetapkan melalui *cascading* dari *key performance* individu (KPI) Korporat. Penilaian kinerja individu dilakukan kepada seluruh (100%) pekerja Perseroan sesuai dengan ukuran kinerja masing-masing yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penilaian kinerja tersebut menjadi salah satu dasar dalam pemberian apresiasi kepada Pekerja atas kinerja yang dihasilkan selama tahun berjalan.

In addition, a Board of Directors Regulation is being drafted regarding the Appointment of Directors and Board of Commissioners in the Company's Business Group, which regulates the procedures and requirements for the Appointment of Directors and Board of Commissioners in Business Groups within the Company. This Board of Directors Regulation is made based on the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises regarding the Appointment of Directors and Board of Commissioners in SOE Subsidiaries.

In the context of career development, the Company certainly conducts job transfers to various positions according to the Company's needs for employees who meet the requirements to occupy these positions, either through transfers or Job Assignment and Job Sharing. This transfer of duties is carried out either to fulfill vacant positions, organize human resources in the handover of operations, replacement from changes in the organizational structure of Subholding, Regional, or other units under the Holding, as well as the results of Job Bidding.

Career Development Implementation

In 2023, the Company conducted Job Bidding for certain positions within the Company. Job Bidding in 2023 was held 2 (two) times, namely in March for 13 positions and in September 2023 for 4 (four) positions. From the Job Bidding, in total the Company received 15 employees to fill these positions. The Job Bidding mechanism is starting from opening vacancies, administrative selection, career success factor assessment, fit and proper test with users and the Company's HR Management department, determining winners, and announcing job bidding results to making a Board of Director's Decree on Transfer of Duties to Employees selected from the Job Bidding.

This year, the Company has also determined a new career structure and Job Grading for all positions in the Head Office and Regional Offices and lower units, and has completed Job Person Matching (JPM), which is the process of assigning new individual job classes to all employees of the Company based on the results of the new job grading.

PERFORMANCE ASSESSMENT

Policy

Policies related to performance management are based on the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HK.01/15/8/1/KPIU/UTMA/PLND-22 dated August 15, 2022 concerning Guidelines for Individual Performance Management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelindo periodically reviews and assesses individual employee performance achievements based on targets and realization of individual performance measures determined through cascading of corporate key individual performance (KPI). Individual performance assessments are carried out on all (100%) of the Company's employees in accordance with their respective performance measures that have been previously determined. The results of performance assessment become one of the bases for giving appreciation to employees for the performance produced during the current year.

Selain itu, hasil penilaian kinerja individu akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan perjalanan karir pekerja seperti mutasi/rotasi, promosi, dan juga demosi. Penilaian kinerja individu terus diupayakan untuk dilakukan secara objektif tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, pandangan politik, dan sebagainya. Melalui proses penilaian kinerja individu yang adil, objektif, dan transparan, Perseroan optimis akan tercipta lingkungan kerja yang sehat, menumbuhkan kepuasan Pekerja, serta mendorong motivasi Pekerja untuk terus meningkatkan kinerja individu dan kinerja Perseroan.

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan implementasi standarisasi pengelolaan kinerja individu di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada seluruh pekerja yang berada pada unit kerja Kantor Pusat, Regional, Cabang, *Subholding* dan Anak Perusahaan *Subholding*. Implementasi dimaksud dilakukan dengan harapan agar pekerja dapat memahami dengan baik terkait pedoman pengelolaan kinerja individu yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

REMUNERASI

Kebijakan

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Visi menjadi “Pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia”, berkomitmen untuk secara konsisten memberikan kesejahteraan bagi para Pekerja. Pemberian remunerasi, fasilitas dan kesejahteraan pekerja pasca kerja oleh Perseroan pasca penggabungan masih mengikuti kebijakan di masing-masing Perseroan sebelum penggabungan sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, *Benefit*, dan Kesejahteraan Paska Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pelaksanaan Remunerasi

Pelaksanaan remunerasi pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada prinsipnya berlandaskan pada tiga aspek dasar yaitu: *Pay for Person*, *Pay for Position* dan *Pay for Performance* dengan memperhatikan kompetensi serta kinerja dari masing-masing Pekerja. Selain itu, kebijakan manajemen mengenai kesejahteraan pegawai disusun dengan mempertimbangkan aspek kenaikan biaya hidup dan kemampuan keuangan Perseroan. Hal tersebut menggambarkan bahwa Perseroan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai dengan tetap memperhatikan pada asas keberlanjutan (*sustainability*). Remunerasi yang diberikan oleh Perseroan tidak hanya dalam bentuk bulanan, Perseroan memberikan tunjangan lain dalam rangka meningkatkan motivasi pegawai untuk mencapai produktivitas optimal.

Apart from that, the results of individual performance assessments will be one of the basics in determining employee’s career paths such as transfers/rotations, promotions and also demotions. Efforts continue to be made to assess individual performance objectively without distinguishing between ethnicity, religion, gender, political views, and so on. Through a fair, objective and transparent individual performance assessment process, the Company is optimistic that it will create a healthy work environment, foster employee satisfaction, and encourage employee motivation to continue to improve individual performance and Company performance.

Performance Assessment Implementation

In 2023, the standardization of individual performance management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) was implemented for all employees in the Head Office, Regional, Branch, Subholding and Subholding Subsidiary work units. The implementation is carried out with the hope that employees can have better understanding about individual performance management guidelines that apply within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

REMUNERATION

Policy

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the Vision of becoming “Leader of an integrated and world-class maritime ecosystem”, is committed to consistently providing welfare for its employees. Provision of remuneration, facilities and post-employment welfare for employees after the merger, still follows the policies of each company prior to the merger as stipulated in the Regulation the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 dated October 01, 2021 Concerning Temporary Enactment of the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 dated October 15, 2021 concerning Use of Remuneration Policies, Facilities, Benefits and Post-Employment Welfare of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) by PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Implementation Of Remuneration

The implementation of remuneration at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is fundamentally based on three basic aspects: Pay for Person, Pay for Position and Pay for Performance, taking into account the competency and performance of each employee. In addition, the management policies regarding employee welfare are prepared by considering the aspects of cost of living increase and the Company’s financial capabilities. This illustrates that the Company is concerned about employee welfare while still adhering to the principles of sustainability. Remuneration provided by the Company is not only in the form of monthly payments, the Company also provides other allowances to enhance employee motivation to achieve optimal productivity.



Sejalan dengan komitmen untuk memberikan kesejahteraan kepada Pekerja, maka Perseroan memberikan upah kepada Pekerja organik golongan terendah sesuai dengan upah yang berlaku di setiap provinsi, sebagaimana tabel berikut:

In line with its commitment to provide welfare to its employees, the Company provides wages to the lowest category of organic employees in accordance with the prevailing wages in each province, as in the following table:

Tabel Remunerasi Pekerja Organik Tingkat Terendah dengan UMR Tahun 2023

Remuneration for Lowest Level Organic Employees with UMR in 2023

No.	Lokasi/Wilayah Kerja Location/ Work Area	Provinsi/ Daerah Province/Region	Upah Minimum Provinsi Provincial Minimum Wages	Remunerasi Karyawan Organik Tingkat Terendah Lowest Level of Organic Employee Remuneration	Persentase Percentage
1	Kantor Pusat Head Office	DKI Jakarta	Rp4.901.798	Rp6.207.000	127%
2	Regional 1	Sumatera Utara North Sumatera	Rp2.710.493	Rp3.977.000	147%
3	Regional 2	DKI Jakarta	Rp4.901.798	Rp6.207.000	127%
4	Regional 3	Jawa Timur North Sumatera	Rp2.040.244	Rp5.390.000	264%
5	Regional 4	Sulawesi Selatan South Sulawesi	Rp3.385.145	Rp3.576.000	106%

PROGRAM PENSIUN

Kebijakan

Dalam alur sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, terdapat tahapan di mana pegawai akan memasuki masa pensiun atau pengakhiran hubungan kerja. Pemberian remunerasi, fasilitas dan kesejahteraan pegawai pasca kerja oleh Perseroan pasca penggabungan masih mengikuti kebijakan di masing-masing Perseroan sebelum penggabungan sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, Benefit, dan Kesejahteraan Paska Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dalam kebijakan masing-masing Perseroan sebelum penggabungan, mengatur ketentuan terkait:

1. Pegawai yang diberhentikan atau pensiun jika mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, akibat pelanggaran disiplin, permintaan sendiri, mengikuti program *Golden Handshake* dan lain sebagainya;
2. Kesejahteraan pegawai saat memasuki masa pensiun dengan program pensiun baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.

Komponen program Pensiun pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero), antara lain:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja;
2. Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
3. Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;

PENSION PROGRAM

Policy

In the Human Resource management system, there are stages where employee will enter retirement or termination of employment relationship. Provision of post-employment remuneration, facilities and welfare after the merger still follows the policies of each company prior to the merger as stipulated in the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 concerning Temporary Enactment of the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 dated October 15, 2021 concerning the Use of Remuneration Policies, Facilities, Benefits, and Post-Employment Welfare of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) by PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The policies of each Company before the merger regulate the followings:

1. Employees who are terminated or retire if they reach the retirement age limit, passed away, as a result of disciplinary violations, at their own request, following the Golden Handshake program and so on;
2. Employee welfare when entering retirement age with a pension program, both short term and long term benefits.

The components of Pension program at PT Pelabuhan Indonesia (Persero), include:

1. Defined Benefit Pension Program at Employer Pension Fund;
2. Defined Contribution Pension Program in Employer Pension Funds and Financial Institution Pension Funds;
3. Old Age Allowance Insurance Program;

4. Program Pemberian Pesangon dan lainnya;
5. Program Jaminan sosial Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
6. Program Asuransi Jiwa.

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-049/MK.13/1989 tanggal 13 Januari 1989. Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan program pensiun yang dikelola oleh Yayasan Bersama Dana Pensiun Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III, IV dan Perusahaan Umum Pengerukan (YP4) yang telah didirikan sebelumnya. PPMP berlaku bagi pegawai tetap Perseroan yang diangkat sebelum tahun 2002.

Sehubungan dengan status merger per 1 Oktober 2021, maka Pendiri Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Mitra Pendiri yaitu PT Pengerukan Indonesia (Rukindo). Adapun besaran iuran dan Manfaat Pensiun pada Program ini berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang disusun oleh Pendiri dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai manfaat pensiun. Pegawai yang tidak didaftarkan pada PPMP, didaftarkan pada PPIP Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), disamping terdapat Pekerja yang menjadi peserta PPMP dan PPIP.

PELAKSANAAN PROGRAM PENSIUN

Program Pensiun Manfaat Pasti yang berjalan saat ini, terdaftar pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) dengan jumlah kepesertaan di akhir tahun 2023 yaitu pekerja aktif yang berdasarkan kebijakan perusahaan termasuk dalam daftar kepesertaan sebanyak 1.585 orang dan 10.789 orang pekerja pensiun yang menerima Program Pensiun Manfaat Pasti. Selama pekerja masih berstatus aktif diwajibkan untuk membayarkan iuran yang diperhitungkan dengan nilai prosentase tertentu dari penghasilan dasarnya.

Program Pensiun Iuran Pasti yang berjalan saat ini terdiri dari beberapa program yang didaftarkan pada beberapa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang iurannya terdapat dibiayai oleh Perseroan dan dipotong dari penghasilan Pekerja.

4. Severance Provision Program and others;
5. Workforce social security program by the Employment Social Security Administration Agency (BPJS);
6. Life Insurance Program.

Defined Benefit Pension Plan (PPMP)

Defined Benefit Pension Plan ("PPMP") is a pension program whose benefits are stipulated in the Pension Fund regulations. This program is managed by the Port and Dredging Company Pension Fund (DP4), whose establishment has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S-049/MK.13/1989 dated January 13, 1989. This pension fund is a continuation of the pension program managed by Joint Foundation for Pension Funds of Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III, IV and Public Dredging Company (YP4) which had been previously established. PPMP applies to permanent employees of the Company who were appointed before 2002.

In connection with the merger status as of October 1, 2021, the Founder of Port and Dredging Company Pension Fund (DP4) became PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Founding Partner, namely PT Pengerukan Indonesia (Rukindo). The amount of Pension Contributions and Benefits in this Program is based on the Pension Fund Regulations drawn up by the Founder and stipulated by the Financial Services Authority.

Defined Contribution Pension Plan (PPIP)

Defined Contribution Pension Plan ("PPIP") is a pension program whose contributions are stipulated in the Pension Fund Regulations and all contributions and the results of their development are recorded in each Participant's account as pension benefits. Employees who are not registered with the PPMP are registered with Pelindo Purnakarya Pension Fund PPIP (DP3) or Financial Institution Pension Fund (DPLK), besides there are employees who are PPMP and PPIP participants.

IMPLEMENTATION OF PENSION PROGRAM

The current Defined Benefit Pension Program is registered with the Port and Dredging Company Pension Fund (DP4) with the number of participants at the end of 2023, namely active workers who, based on company policy, are included in the membership list of 1,585 people and 10,789 retired workers who receive the Pension Program Definite Benefits. As long as workers are still active, they are required to pay contributions calculated at a certain percentage of their basic income.

The current Defined Contribution Pension Program consists of several programs registered with several Financial Institution Pension Funds (DPLK) whose contributions are funded by the Company and deducted from the Worker's income.



SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEMS

Pada tahun 2023 Perseroan telah secara bertahap mengelola sumber daya manusia pada *single system Cloud ERP SAP RISE* modul *Human Capital Management (SAP HCM)* dan mengintegrasikan proses secara *end-to-end*. Solusi SAP HCM digunakan Perseroan untuk mengelola proses-proses inti SDM seperti:

1. Pengelolaan organisasi
2. Pengelolaan data pekerja
3. Pengelolaan data penempatan pekerja
4. Pengelolaan jadwal kerja dan kehadiran
5. Pengelolaan *payroll* dan *benefit*
6. Pengelolaan kedisiplinan pekerja
7. Pengelolaan perjalanan dinas
8. Pengelolaan perencanaan biaya pekerja

SAP HCM diimplementasikan untuk memastikan data secara efektif dan efisien dikelola di satu sumber yang sama dan terstandar dengan tetap memperhatikan kebijakan yang berlaku baik yang sudah diharmonisasi maupun kebijakan masing-masing eks Regional. Perseroan juga mengintegrasikan SAP HCM dengan sistem lain yang berperan untuk mempermudah antar muka proses-proses tersebut bagi seluruh pekerja yang dapat diakses oleh pekerja dimanapun dan kapanpun, meliputi:

1. MyPelindo - Pelindo Travel (P-Travel)

Portal pengelolaan perjalanan dinas yang meliputi proses administrasi pengajuan, verifikasi biaya serta pertanggungjawaban perjalanan dinas pekerja. P-Travel juga menjadi portal bagi pihak ketiga penyedia jasa pemesanan tiket transportasi dan akomodasi dalam melayani kebutuhan perjalanan dinas perusahaan. P-Travel terintegrasi dengan sistem keuangan yang memungkinkan kontrol terhadap anggaran dan biaya perjalanan dinas.

2. MyPelindo - Pelindo Clock In/Clock Out (P-CICO)

Mobile apps yang memiliki kapabilitas *face recognition* serta *geofencing* untuk memastikan perekaman kehadiran secara lebih fleksibel di area kerja namun tetap memperhatikan kontrol atas kebenaran data dan lokasi penempatan pekerja.

3. MyPelindo - Pelindo E-Office (PEO)

Merupakan sistem pengelolaan korespondensi serta naskah dinas perusahaan baik secara internal maupun eksternal. PEO mendukung *Good Corporate Governance (GCG)* dengan memungkinkan koordinasi kedinasan yang *traceable*, efisien serta pengarsipan naskah dinas secara lebih terstruktur.

4. MyPelindo - Pelindo Eats (P-Eats)

Merupakan sistem pengelolaan fasilitas makan siang pekerja dalam bentuk *e-voucher* yang dapat digunakan oleh pekerja dengan berbelanja di *tenant-tenant* yang F&B yang bekerja sama dengan PT Menara Maritim Indonesia. Pemberian *e-voucher* didasarkan pada presensi 2 (dua) bulan kehadiran Pekerja.

In 2023, the Company has managed human resources on a single Cloud ERP system, SAP RISE, Human Capital Management (SAP HCM) module and integrated processes end-to-end. The Company uses the SAP HCM solution to manage core HR processes such as:

1. Organizational management
2. Management of employee data
3. Management of employee placement data
4. Management of work schedules and attendance
5. Payroll and benefits management
6. Management of employee discipline
7. Management of official travel
8. Management of employee cost planning

SAP HCM is implemented to ensure data is effectively and efficiently managed in the same and standardized source while still paying attention to applicable policies, both those that have been harmonized and the policies of each ex-region. The Company also integrates SAP HCM with other systems whose role is to simplify the interface of these processes for all employees and can be accessed by employee anywhere and at any time, including:

1. MyPelindo - Pelindo Travel (P-Travel)

Official travel management portal which includes the application administration process, cost verification and official travel accountability of employee. P-Travel is also a portal for third party providers of transportation ticket and accommodation booking services to serve the Company's official travel needs. P-Travel is integrated with a financial system that allows control of the budget and business travel costs.

2. MyPelindo - Pelindo Clock In/Clock Out (P-CICO)

Mobile apps that have facial recognition and geofencing capabilities to ensure more flexible attendance recording in the work area but still pay attention to control over the correctness of data and employee placement locations.

3. MyPelindo - Pelindo E-Office (PEO)

A system for managing company correspondence and official documents both internally and externally. PEO supports Good Corporate Governance (GCG) by enabling traceable, efficient official coordination and more structured archiving of official documents.

4. MyPelindo - Pelindo Eats (P-Eats)

A system for managing employee lunch facilities in the form of *e-vouchers*, which can be used by employee when shopping at F&B tenants in collaboration with PT Menara Maritim Indonesia. E-vouchers is given based on 2 (two) months of employee attendance.

5. Pelindo Employee Self Service (P-ESS)

Portal *employee self-service* bagi pekerja untuk secara mandiri melakukan pengelolaan data personal pekerja, jadwal kerja, kehadiran, cuti, lembur, *benefit*, *payslip*. P-ESS memungkinkan seluruh administrasi pekerja dilakukan dengan lebih mudah dengan tetap menerapkan kontrol melalui *workflow approval* untuk setiap proses sesuai dengan ketentuan perusahaan. Dengan adanya P-ESS, pekerja lebih memiliki tanggung jawab/*ownership* terhadap data masing-masing, sehingga fungsi SDM tidak hanya administratif, melainkan melakukan kontrol dan analisis.

6. Portaverse

Portaverse merupakan aplikasi Pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan konsep sosial media yang menggabungkan 3 (tiga) modul sistem, di antaranya *Knowledge Management System (KMS)*, *Learning Management System (LMS)*, dan *Talent & Performance System (T/PMS)*. *Portaverse Knowledge* mendukung pencapaian tujuan Perseroan melalui sistem pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan yang lengkap dan terintegrasi. *Portaverse Learning* mengoptimalkan sistem pembelajaran untuk meningkatkan kapabilitas pekerja sesuai perkembangan bisnis perusahaan. *Portaverse Talent & Performance* meningkatkan proses *talent life-cycle* Perseroan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan *talent* secara *online* dan terintegrasi.

7. HC Dashboard

Sistem yang memungkinkan manajemen mendapatkan *overview* data secara interaktif dan visual terkait kondisi sumber daya manusia terkini di Perseroan. *HC Dashboard* diharapkan dapat menjadi *decision support system* bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan sumber daya manusia di Perseroan.

8. Implementasi ERP

Beserta *surrounding system* terkait pengelolaan SDM disertai dengan pelaksanaan *change management*, baik pada proses yang berjalan secara *end-to-end* maupun kepada setiap *stakeholder* terkait, mulai dari manajemen, pekerja hingga pihak-pihak eksternal. Perseroan selanjutnya akan melaksanakan standarisasi dan tata kelola serta mengembangkan kapabilitas integrasi sistem antar entitas grup terkait data-data SDM untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi serta talenta yang dimiliki.

5. Pelindo Employee Self Service (P-ESS)

Employee self-service portal for employee to independently manage their personal data, work schedules, attendance, leave, overtime, benefits, payslips. P-ESS allows all employee administration to be carried out more easily while still implementing control through workflow approval for each process in accordance with company regulations. With P-ESS, employee have more responsibility/ownership for their respective data, so that the HR function is not only administrative, but also carries out control and analysis.

6. Portaverse

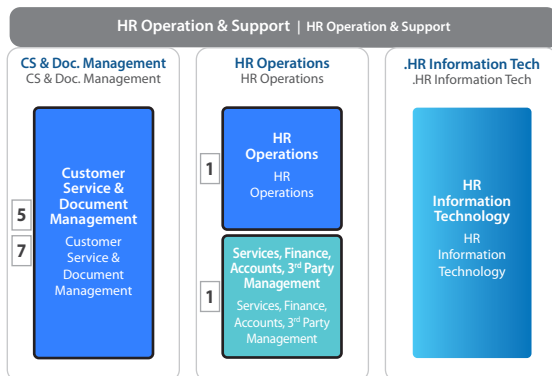
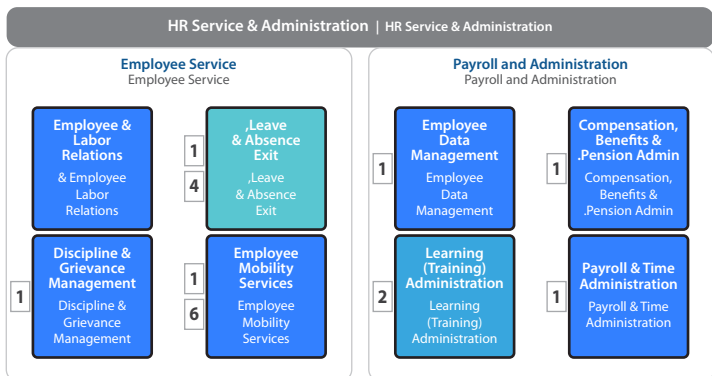
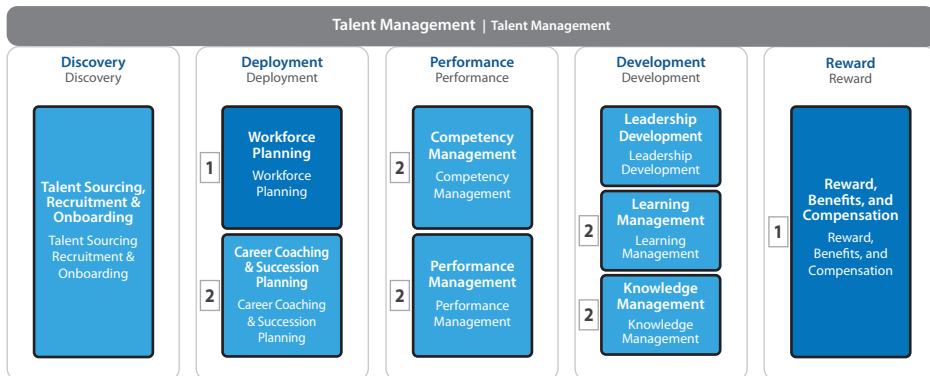
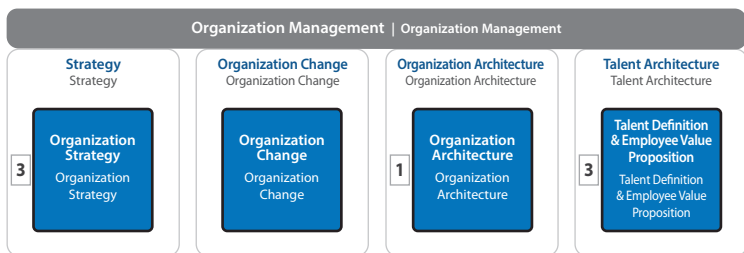
Portaverse is an HR management application that is integrated with the social media concept which combines 3 (three) system modules, including Knowledge Management System (KMS), Learning Management System (LMS), and Talent & Performance System (T/PMS). Portaverse Knowledge supports the achievement of Company goals through a complete and integrated knowledge management and utilization system. Portaverse Learning optimizes the learning system to improve employee capabilities according to Company business developments. Portaverse Talent & Performance improves the Company's talent life-cycle process which includes online and integrated talent planning, implementation, measurement and reporting activities

7. HC Dashboard

A system that allows management to get an interactive and visual overview of data regarding the current condition of human resources in the Company. It is hoped that the HC Dashboard can become a decision support system for management in making more appropriate decisions regarding human resources in the Company.

8. Implementation of ERP

And surrounding systems related to HR management accompanied by the implementation of change management, both in processes that run end-to-end and for every related stakeholder, from management, workers to external parties. The Company will further implement standardization and governance as well as develop system integration capabilities between group entities regarding HR data to optimize administration and talent management.



- | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------|
| Strategi SDM
HR Strategy | Pengelolaan SDM
HR Management | Layanan SDM
HR Services | All Group
All Group | 1 SAP HCM | 3 DW & Dashboard | 5 Pelindo E-Office | 7 Service Now |
| | | | | 2 Potaverse | 4 Pelindo CICO | 6 Pelindo Travel | |

INTERNALISASI BUDAYA INTERNALIZATION OF CULTURE

Sebagai bentuk keberlanjutan dan internalisasi AKHLAK yang berpegang pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-115/MBU/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pedoman Implementasi Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (AKHLAK *Culture Journey*), Perseoran melakukan inisiatif sebagai berikut:

Tahap Awal

Pada Tahap ini, fokus utama kegiatan pengelolaan budaya adalah membangun kesadaran dan pemahaman pekerja akan budaya AKHLAK. Tahap ini dimulai dengan komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan Nilai-Nilai Utama kepada seluruh pekerja, di antaranya melalui kegiatan berikut:

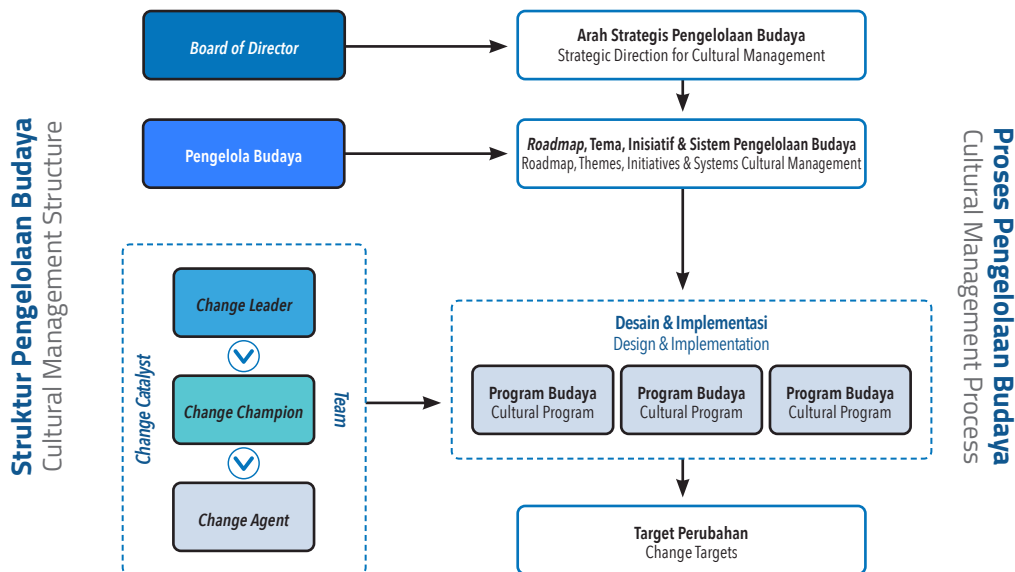
1. Komunikasi oleh Para Pemimpin dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan peraturan Direksi terkait:
 - AKHLAK Culture Journey
 - *Respectful Workplace Policy*
 - b. Pelaksanaan Pelindo Forum, sebagai sarana komunikasi TOP *Management* Pelindo untuk menyampaikan Visi-Misi, tujuan dan arah Perseroan. Pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu bulan Januari 2023 di PMLI Ciawi dan Oktober 2023 di JW Medan.
2. Pembentukan *Change Agent*
Pada tahun 2023 dilakukan pendataan ulang *Change Agent*, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Restrukturisasi Fungsi *Change Agent* Manajemen melakukan redefinisi Struktur *Change Agent* menjadi *Change Catalyst Team*.

As a form of sustainability and internalization of AKHLAK which adheres to the Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-115/MBU/05/2022 dated May 10, 2022 concerning Guidelines for Implementing the Core Values of Human Capital of State-Owned Enterprises (AKHLAK *Culture Journey*), the Company is carrying out the following initiatives:

Early stage

At this stage, the main focus of cultural management activities is to build employees' awareness and understanding of AKHLAK culture. This stage begins with communication which aims to introduce the Core Values to all employees, through the following activities:

1. Communication by Leaders, carried out through:
 - a. Preparation of relevant Board of Directors regulations:
 - AKHLAK Culture Journey
 - *Respectful Workplace Policy*
 - b. Implementation of Pelindo Forum, as a means of communication for Pelindo's TOP Management to convey the Company's Vision-Mission, goals and direction. In 2023 was held 2 (two) times, namely January 2023 at PMLI Ciawi and October 2023 at JW Medan.
2. Establishment of *Change Agent*
In 2023 *Change Agent* data was re-registered, with the following stages:
 - a. Restructuring the *Change Agent* Function Management carried out a redefinition of the *Change Structure Agent* becomes *Change Catalyst Team*.





- b. **Penunjukan Ulang *Change Agent***
Dilakukan penunjukan ulang *Change Leader, Change Champion* dan *Change Agent* sehingga di setiap unit terdapat perwakilan *Change Catalyst Team* yang dapat merencanakan dan melaksanakan implementasi budaya Perseroan.
- c. ***Change Agent on Boarding (CAOB)***
Sebagai Tahap Awal, pada tahun 2023 telah dilaksanakan 4 (empat) *batch Change Agent on Boarding Workshop* dari total 20 *batch* yang direncanakan hingga tahun 2024.

- b. **Reappointment of *Change Agent***
The *Change Leader, Change Champion* and *Change Agent* were re-appointed so that in each unit there is a *Change Catalyst Team* representative who can plan and carry out the implementation of the Company culture.
- c. ***Change Agent on Boarding (CAOB)***
As an initial stage, in 2023 4 (four) *batches of Change Agent on Boarding Workshops* was held out of a total of 20 *batches* planned until 2024.

Batch Batch	Waktu Date	Peserta Participants	Lokasi Location
Batch 1	30 Oktober - 1 November 2023 October 30 – November 1, 2023	37	Ciawi
Batch 2	22 - 24 November 2023 November 22 – 24, 2023	43	Makassar
Batch 3	29 November – 1 Desember 2023 November 29 – December 1, 2023	44	Medan
Batch 4	5 - 7 Desember 2023 December 5 – 7, 2023	50	Surabaya

- 3. **Penyelenggaraan Kegiatan Pengenalan Budaya** dilakukan pada tahun 2023 dilakukan dengan:
 - a. Penuansaan AKHLAK melalui berbagai artefak seperti *virtual background zoom* dengan tema AKHLAK, *standing banner*, kaos, gelas, tumbler dan lain lain.
 - b. *Culture Forum*, yang dilakukan dalam bentuk *workshop* untuk melakukan *alignment* perencanaan, implementasi dan pengukuran AKHLAK antar Kantor Pusat, Regional dan *Sub Holding* Pelindo.
 - c. Perayaan HUT AKHLAK sebagai bentuk Sinergi Implementasi AKHLAK di lingkungan BUMN, yang dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:
 - *Townhall Meeting/CEO Talk/Fire Brief* dari Direktur Utama BUMN.
 - Testimoni Implementasi AKHLAK *Culture Journey*.
 - *Campaign* AKHLAK *Culture Festival* BUMN 2023.
 - Relawan Bakti BUMN.
 - Video TikTok dengan tema Penerapan AKHLAK di Keluarga Insan BUMN.
 - Design Kemeja AKHLAK.
 - Koreografi *Jingle* BUMN untuk Indonesia.
 - Unit Kerja Paling *Massive* dalam Penuansaan AKHLAK.

- 3. **Organizing the Culture Introduction Activities** in 2023, carried out by:
 - a. The nuances of AKHLAK through various artifacts such as *virtual background zoom* with the theme AKHLAK, *standing banners*, t-shirts, glasses, tumblers and others.
 - b. *Culture Forum*, which is carried out in the form of *workshop* to align planning, implementation and measurement of AKHLAK between the Head Office, Regional and Pelindo Sub-Holdings.
 - c. The AKHLAK Anniversary Celebration is a form of Synergy for the Implementation of AKHLAK within SOEs, which is carried out through several activities, namely:
 - *Townhall Meeting/CEO Talk/Fire Brief* from the President Director of SOE.
 - Testimonial on the Implementation of AKHLAK *Culture Journey*.
 - 2023 SOE AKHLAK *Culture Festival* Campaign.
 - SOE Community Service Volunteers.
 - TikTok video with the theme Implementing AKHLAK in the Family of SOE People.
 - AKHLAK Shirt Design.
 - Choreography of the SOE *Jingle* for Indonesia.
 - The Most Massive Work Unit in AKHLAK Nuances.

Tahap Intervensi (*Intervention*)

Tahap ini merupakan tahap mengupayakan perubahan secara terencana agar pekerja berperilaku selaras dengan Nilai-Nilai Utama. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Komitmen Pemimpin (*Leadership*)
Komitmen pemimpin dicerminkan melalui beberapa kegiatan yang melibatkan Direksi dan juga Pimpinan di berbagai tingkat manajemen, yaitu:
 - a. BERLABUH (Bincang Bersama Pelabuhan Indonesia) merupakan acara *Sharing Session* mengenai budaya perusahaan.
 - b. Pelindo E- Talks atau disebut juga Pelindo *Empower Talk*, merupakan sarana komunikasi Pimpinan kepada pegawai untuk menyampaikan nilai-nilai, budaya maupun strategi dan tujuan Perseroan saat ini.
 - c. Pelaksanaan *Leader as a Coach Workshop* sebanyak lima *batch* dengan total peserta 135 pegawai yang terdiri dari para Struktural dari BOD-1, BOD-2 dan BOD-3. Ada pun tujuan *workshop* tersebut adalah untuk:
 - Membangun gaya kepemimpinan berbasis pembinaan untuk mengembangkan orang dan kinerja efektif.
 - Menerapkan metode terstruktur untuk meningkatkan produktivitas tim dalam mencapai tujuan organisasi.
 - Mempromosikan cara kerja baru dan menanamkan benih budaya pembinaan korporat dalam organisasi.
 - d. Kegiatan *Breakfast with CEO* yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antara sesama *Group Head* dan *Departemen Head*, maupun dengan CEO dan BOD lainnya. Membangun suasana harmonis serta meningkatkan motivasi serta semangat dalam bekerja.
2. Sistem
Dalam rangka implementasi budaya Pelindo telah mengembangkan sebuah sistem bernama Portaverse yang terdiri dari:
 - a. *Portaverse Knowledge*
Mendukung pencapaian tujuan Perseroan melalui sistem pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan yang lengkap dan terintegrasi.
 - b. *Portaverse Learning*
Mengoptimalkan *system* pembelajaran *online* untuk meningkatkan kapabilitas karyawan sesuai perkembangan bisnis Perseroan.
 - c. *Portaverse Talent & Management*
Meningkatkan proses *talent life-cycle* Perseroan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan talent secara *online* dan terintegrasi.
3. Simbol dan Atribut
Simbol (*Symbol*) dicerminkan melalui terciptanya atribut dan lingkungan yang mendukung program implementasi budaya Perseroan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung hal ini tercermin pada beberapa kegiatan, di antaranya:

Intervention Stage

This stage is the stage of seeking planned changes, so that employees behave in line with the Core Values. In this stage, the activities carried out are:

1. Leader Commitment (*Leadership*)
The leader's commitment is reflected through several activities involving the Board of Directors and Leadership at various levels of management, namely:
 - a. BERLABUH (Small talk with Pelabuhan Indonesia) is a *Sharing Session* event regarding the corporate culture.
 - b. Pelindo E-Talk or also known as Pelindo *Empower Talk*, is a communication tool for leaders to employees to convey the Company's current values, culture and strategies and goals.
 - c. The *Leader as a Coach Workshop* was held in five batches with a total of 135 employees participating, consisting of structural members from BOD-1, BOD-2 and BOD-3. The objectives of the workshop are:
 - To develop a coaching-based leadership style to develop people and effective performance.
 - To implement structured methods to increase team productivity in achieving organizational goals.
 - To promote new ways of working and plant the seeds of a corporate coaching culture in the organization.
 - d. The *Breakfast with CEO* activity aims to improve coordination, communication and collaboration between fellow *Group Heads* and *Department Heads*, as well as with other CEOs and BOD. Build a harmonious atmosphere and increase motivation and enthusiasm at work.
2. System
In order to implement the culture, Pelindo has developed a system called Portaverse, which consists of:
 - a. *Portaverse Knowledge*
Supporting the achievement of Company goals through a complete and integrated knowledge management and utilization system.
 - b. *Portaverse Learning*
Optimizing the online learning system to improve employee capabilities according to Company business developments.
 - c. *Portaverse Talent & Management*
Improving the Company's *talent life-cycle* process which includes online and integrated talent planning, implementation, measurement and reporting activities.
3. Symbols and Attributes
Symbols are reflected through the creation of attributes and environments that support corporate culture implementation programs. Activities carried out to support this are reflected in several activities, including:



- | | |
|---|--|
| <p>a. #BTS (<i>Break The Silo</i>) terdapat pada tiga level yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Level Group Head</i>, dengan kegiatan Ngariung Bareng.
Setiap <i>Group Head</i> diharapkan untuk mengumpulkan bawahannya, dan melakukan komunikasi internal <i>Group</i> dengan suasana santai, baik untuk membahas pekerjaan ataupun sekedar <i>sharing</i> dan bercanda tawa. ▪ <i>Level Department Head</i>, dengan kegiatan <i>Coffee Connect</i>
Masing-masing <i>Department Head</i> dikelompokan dalam group terdiri dari 3 (tiga) orang dan diberikan jangka waktu tertentu untuk bertemu dan ngopi bareng, serta melakukan aktivitas (<i>games</i> dan video testimoni) yang telah ditetapkan panitia. ▪ <i>Level Manager/Staf</i>, dengan Kegiatan <i>Swap My Role</i>
Setiap peserta diberikan pasangan untuk bertukar peran. Setiap pasangan diwajibkan untuk menjalankan peran baru, sebagai staf di tempat baru selama jangka waktu 2 (dua) minggu. <p>b. BERLABUH, merupakan kegiatan <i>sharing session</i> dengan konsep <i>podcast</i> ataupun <i>talkshow</i> dengan mengundang narasumber internal maupun eksternal dengan membahas tema yang disinergikan dengan <i>core values</i> AKHLAK.</p> <p>c. BUMN Muda Pelindo, wadah organisasi ini ditujukan bagi pekerja millenials untuk bekerja, bersosialisasi, berkarya dan menuangkan ide dan kreatifitas dengan tetap mendukung kinerja bagi para anggotanya.</p> <p>d. Mutiara Pelindo, organisasi ini lahir dengan semangat pemberdayaan pekerja perempuan dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung wanita untuk dapat berkarya.</p> | <p>a. #BTS (<i>Break The Silo</i>), found at three levels, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Group Head level</i>, with Ngariung Bareng activities.

Each <i>Group Head</i> is expected to gather his/her subordinates and hold internal <i>Group</i> communications in a relaxed atmosphere, whether to discuss work or just share and laugh. ▪ <i>Department Head level</i>, with <i>Coffee Connect</i> activities
Each <i>Department Head</i> is grouped into a group consisting of 3 (three) people and given a certain period of time to meet and have coffee together, as well as carry out activities (<i>games</i> and video testimonials) that have been determined by the committee. ▪ <i>Manager/Staff Level</i>, with <i>Swap My Role</i> activity
Each participant is given a partner to exchange roles. Each partner is required to carry out a new role, as staff in a new place for a period of 2 (two) weeks. <p>b. BERLABUH, is a sharing session activity with a podcast or talk show concept by inviting internal and external speakers to discuss themes that are synergized with the AKHLAK core values.</p> <p>c. BUMN Muda Pelindo (Young SOE Pelindo), this organizational platform is aimed at millennial employees to work, socialize, create and express ideas and creativity while still supporting the performance of its members.</p> <p>d. Mutiara Pelindo (Pelindo Pearls), this organization was born with the spirit of empowering female employees by creating a work environment that supports women to be able to work.</p> |
|---|--|

Tahap Penerimaan

Pada Tahap ini pekerja telah menerima dan mendukung Nilai-Nilai Utama yang tercermin di 3 (tiga) area yaitu, Pemahaman, Penerimaan, dan Penerapan *core values* AKHLAK dalam kehidupan sehari-hari serta mengajak orang lain untuk menerapkannya. Pada tahap ini Pelindo melaksanakan program *Safety Culture* yaitu membentuk sebuah *road map* baru yang dapat membangun *Safety Culture* di seluruh lingkungan Pelindo, yang memiliki tujuan akhir bahwa setiap unit di lingkungan Pelindo akan memiliki *Safety Culture Maturity* dengan *level* yang sama baiknya. Kegiatan yang dilakukan berupa:

1. *Workshop* terkait *Safety Culture Transformation* yang diberikan kepada seluruh BOD Pelindo, BOD *Subholding* Pelindo, BOD Anak Perusahaan Pelindo serta para *Site Leader*.
2. Melakukan pengukuran *Safety Culture Maturity* sehingga dapat melakukan *mapping* terhadap kondisi *existing* Pelindo *Group* saat ini serta menetapkan prioritas perbaikan ke depan.

Acceptance Stage

At this stage, employees have accepted and supported the Core Values, which are reflected in 3 (three) areas, namely, Understanding, Acceptance and Application of the AKHLAK core values in daily life and inviting others to apply them. At this stage, Pelindo is implementing the *Safety Culture* program, namely forming a new road map that can build *Safety Culture* throughout Pelindo's environment, which has the ultimate goal that every unit in Pelindo's environment will have *Safety Culture Maturity* at the same good level. Activities carried out include:

1. *Workshop* related to *Safety Culture Transformation* given to all Pelindo BODs, Pelindo Sub-Holding BODs, Pelindo Subsidiary BODs and Site Leaders.
2. Measure *Safety Culture Maturity*, which is mapping the current condition of the existing Pelindo *Group* and determine priorities for future improvements.

3. Penyusunan *Safety Culture Roadmap*, yang menjadi dasar dalam standarisasi *safety program* di seluruh lingkungan Pelindo Group.
 - a. Implementasi *Effective Meeting* di lingkungan Pelindo. Program ini sebagai bentuk transformasi budaya dalam menerapkan perilaku *collaborative workplace* yang mendukung nilai-nilai AKHLAK dalam perilaku kerja.
 - b. Pengelolaan Inovasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pelindo dalam memastikan bahwa program Inovasi dapat berjalan secara *sustainable* dan terus menerus di lingkungan kerja. Serta memberikan wadah bagi pegawai untuk dapat memberikan saran dan usulan perbaikan yang terus menerus bagi Perseroan.

3. Preparation of a *Safety Culture Roadmap*, that serves as the basis for standardizing *safety programs* throughout the Pelindo group.
 - a. Implementation of *Effective Meetings* in Pelindo environment. This program is a form of cultural transformation in implementing *collaborative workplace behavior* that supports AKHLAK values in work behavior.
 - b. *Innovation Management*, namely the activities carried out by Pelindo to ensure that the *Innovation program* can run *sustainably* and continuously in the work environment. As well as providing a platform for employees to provide suggestions and suggestions for continuous improvement for the Company.

Tahap Perubahan Perilaku

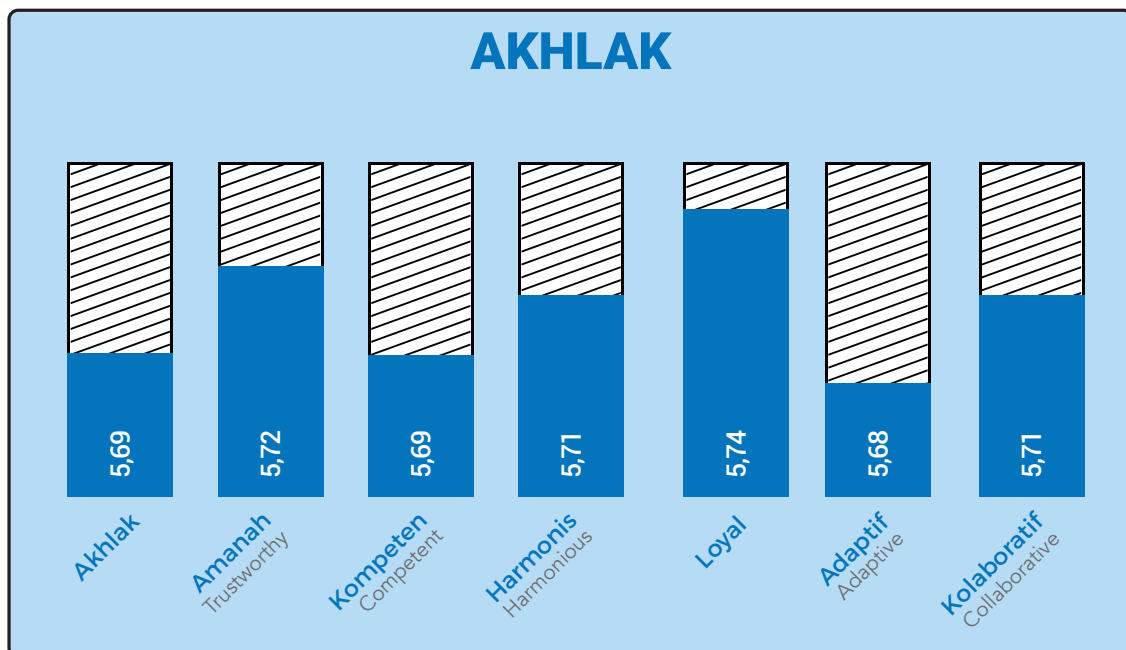
Pada Tahap ini seluruh pekerja telah menerapkan *core values* AKHLAK dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini tercermin dari pengukuran Perilaku AKHLAK pada pekerja di lingkungan pelindo. Adapun pelaksanaan Pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggal Pelaksanaan : Januari 2024
 2. Periode Penilaian : Januari – Desember 2023
 3. Responden : Pegawai Organik Pelindo penempatan Kantor Pusat, Regional, *Subholding*, dan Anper
 4. Total Responden : 6448 dari 6977 pegawai
 5. Skala yang digunakan : 1 (Tidak pernah) – 6 (Selalu)
- Dengan Hasil Pengukuran :

Behavior Change Stage

At this stage, all employees have implemented the AKHLAK core values in their daily activities. This is reflected in the measurement of AKHLAK behavior among employees in Pelindo environment. The implementation of these measurements is as follows:

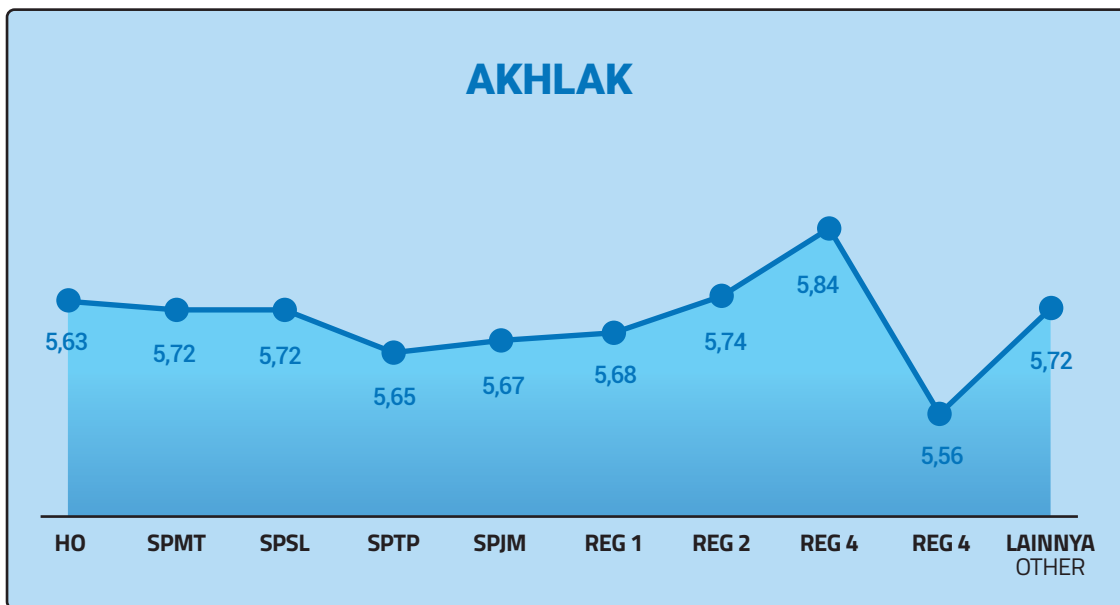
1. Implementation Date : January 2024
 2. Assessment Period : January – December 2023
 3. Respondents : Pelindo Organic Employees assigned to Head Office, Regional, Sub – Holding, and Subsidiary Total
 4. Respondents : 6448 out of 6977 employees
 5. Scale used : 1 (Never) – 6 (Always)
- With Measurement Results :





- 6. Nilai Indeks AKHLAK Pelindo Tahun 2023 adalah 5.69
- 7. Dengan Indeks tertinggi ada pada Nilai Prilaku Loyal dengan Skor 5.74 dan terendah berada pada Skor Adaptif dengan nilai 5.68
- 8. Seluruh Indeks AKHLAK Pelindo *Group* sudah berada diatas Skor yang ditargetkan.

- 6. The 2023 Pelindo AKHLAK Index value is 5.69
- 7. The highest index is the Loyal Behavior Score with a score of 5.74 and the lowest is the Adaptive Score with a score of 5.68
- 8. All Pelindo Group AKHLAK Index are above the target score.



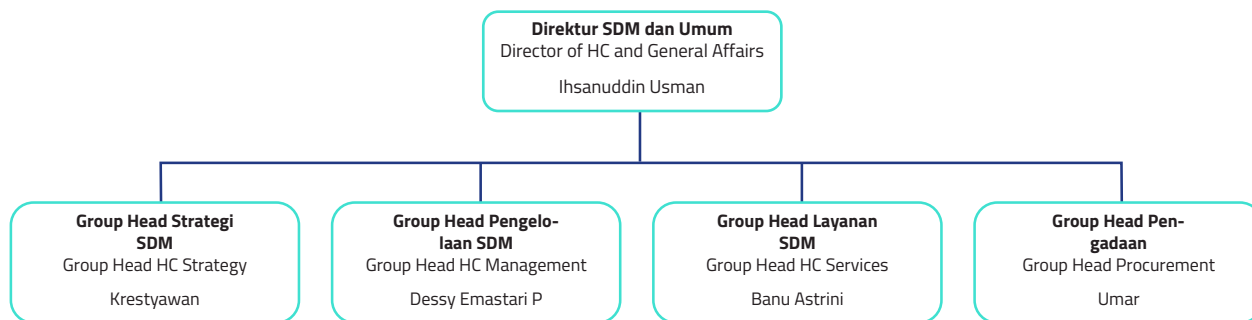
- 9. Seluruh Unit Kerja telah mencapai Indeks AKHLAK sebagaimana yang ditargetkan.
- 10. Skor Indeks Implementasi AKHLAK tertinggi berada pada unit Reg 3 dan terendah pada unit Reg 4.

- 9. All Work Units have achieved the AKHLAK Index as targeted.
- 10. The highest AKHLAK Implementation Index score is in the Reg 3 unit and the lowest is in the Reg 4 unit.

STRUKTUR PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRUCTURE

Berikut adalah Struktur pengelola *Human Capital* di Pelindo:

The following is the structure of Human Capital management at Pelindo:



Tugas Direktorat Sumber Daya Manusia sebagai pengelolaan strategi bidang SDM meliputi:

1. Strategi perencanaan SDM, organisasi dan budaya Perusahaan;
2. Kebijakan dan pengelolaan remunerasi dan *benefit*;
3. Kebijakan dan pengelolaan manajemen talenta dan kinerja SDM;
4. Strategi rekrutmen dan pengembangan SDM;
5. Kebijakan pengelolaan sistem dan infrastruktur bidang SDM;
6. Kebijakan dan strategi yang meliputi Layanan Umum;
7. Strategi pengelolaan hubungan industrial, kebijakan masa persiapan pensiun, dan *exit plan*;
8. Kebijakan dan pengelolaan arsip;
9. Kebijakan dan pedoman pengadaan.

The duties of the Directorate of Human Resource as strategic management in the field of HR include:

1. HR planning strategy, organization and corporate culture;
2. Policy and management of remuneration and benefits;
3. Policy and management of talent management and HR performance;
4. HR recruitment and development strategy;
5. System and infrastructure management policies in the HR sector;
6. Policies and strategies in General Services;
7. Industrial relations management strategy, retirement preparation period policies, and exit plans;
8. Policy and archive management;
9. Procurement policies and guidelines.



RENCANA KERJA SUMBER DAYA MANUSIA 2024

HUMAN RESOURCES WORK PLAN FOR 2024

Dalam rangka penataan bidang Sumber Daya Manusia, untuk tahun 2024 Perseroan telah menyusun program-program strategis sumber daya manusia yang meliputi:

1. Restrukturisasi Organisasi.
2. Implementasi Kebijakan SDM Sebagai Dampak Dari Aksi Korporasi Dalam Pemurnian Bisnis.
3. Penyusunan Kajian *Lean* Organisasi pada *Subholding* dan Anak Perusahaan.
4. Penyusunan Pedoman Pemetaan dan Penyiapan Alih Profesi SDM Sejalan Dengan Implementasi Pemurnian Bisnis.
5. Pengembangan *Organization Analytic*.
6. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja.
7. Penyusunan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Pekerja.
8. Pemetaan Jabatan Kritis.
9. Implementasi dan Pengembangan Modul *Talent Management System* pada Aplikasi Portaverse.
10. Pelaksanaan *Event Talent Management*.
11. Implementasi *Supporting Academies Development Program* (secara berkelanjutan).
12. Penyusunan Konten Katalog Pelatihan Tahun 2024 (program *technical skill*, *soft skill* dan *strategis business development skill*).
13. Implementasi *Core Business Academies Development Program* (secara berkelanjutan).
14. *Critical Knowledge Map*.
15. Kolaborasi *Knowledge Harvesting*.
16. Penyusunan *Knowledge Taxonomy*.
17. Pengembangan SME dan COP.
18. Pengelolaan *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan.
19. Penerapan budaya pemberian *feedback* atas hasil penilaian kinerja pekerja.
20. Implementasi dan *Monitoring Performance Management System*.
21. Penyusunan *Culture Management System*.
22. Aktivasi dan *Monitoring Change Catalyst Team*.
23. Internalisasi *Core Values* AKHLAK.
24. *Accelerated Leadership Program* for Pelabuhan Indonesia (ALPI).
25. Penataan arsip inaktif.
26. Penyusutan Arsip.
27. Implementasi PKB dan PB.
28. Pengadaan Bersama Tenaga Alih Daya (TAD) dan Tenaga Pengamanan, PDH, Kendaraan Dinas, dan pakaian olahraga.
29. Pengembangan Fungsi *Shared Services*.
30. Penerapan Standardisasi Layanan SSC pada HO, Regional, *Subholding* dan Anak Perusahaan.
31. HC *Data Warehouse* tahap II.

In the context of Human Resource restructuring, the Company has developed the following strategic Human Resource programs for 2024:


1. Organizational Restructuring.
2. Implementation of HR Policies as an Impact of Corporate Actions in Business Refinement.
3. Preparation of Organizational Lean Studies for Subholdings and Subsidiaries.
4. Preparing Guidelines for Mapping and Preparing for HR Professional Transfers in Line with the Implementation of Business Refinement.
5. Development of Organization Analytics.
6. Mapping Manpower Needs.
7. Preparation of Employee Remuneration and Benefit Policies.
8. Mapping Critical Positions.
9. Implementation and Development of the Talent Management System Module in Portaverse Application.
10. 10. Implementation of Event Talent Management.
11. Implementation of Supporting Academies Development Program (on an ongoing basis).
12. Preparation of 2024 Training Catalog Content (technical skills, soft skills and strategic business development skills programs).
13. Implementation of Core Business Academies Development Program (on an ongoing basis).
14. Critical Knowledge Map.
15. Collaboration of Knowledge Harvesting.
16. Preparation of Knowledge Taxonomy.
17. Development of SME and COP.
18. Management of Corporate Key Performance Indicators (KPI).
19. Implementation of a culture of providing feedback on employee performance assessment results.
20. Implementation and Monitoring of Performance Management System.
21. Preparation of Culture Management System.
22. Activation and Monitoring Change Catalyst Team.
23. Internalization of Core Values AKHLAK.
24. Accelerated Leadership Program for Indonesian Ports (ALPI).
25. Inactive archive setup.
26. Archive Depreciation.
27. Implementation of PKB and PB.
28. Joint procurement of outsourced personnel (TAD) and security personnel, PDH, official vehicles and sports clothing.
29. Development of Shared Services Function.
30. Implementation of SSC Service Standardization in HO, Regional, Subholding and Subsidiary Companies.
31. HC Data Warehouse phase II.





Teknologi Informasi

Information Technology



Pada tahun 2023, Pelindo telah melakukan berbagai pengembangan dan implementasi IT guna mendukung dan meningkatkan nilai tambah yang mengedepankan pengalaman baru bagi pelanggan. Pelindo juga melakukan peningkatan kualitas infrastruktur dan meningkatkan keamanan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang kebutuhan Layanan Teknologi Informasi.



In 2023, Pelindo has carried out various IT developments and implementations to support and increase added value that prioritizes new experiences for customers. Pelindo is also improving the quality of infrastructure and Information Technology security in order to support the need for Information Technology Services.

TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY



Teknologi informasi (TI) telah menjadi hal penting bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mewujudkan visi misi menjadi pelabuhan kelas dunia serta memberikan pengalaman baru bagi pelanggan dalam mendapatkan pelayanan Perseroan. Melalui teknologi informasi Perseroan menemukan cara baru dalam melaksanakan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan implementasi solusi *information technology* (IT) diseluruh proses bisnis Perseroan. Mulai dari implementasi aplikasi portal pelayanan pelanggan, pelayanan kapal, pelayanan terminal, implementasi sistem untuk proses keuangan dan proses *back office* lainnya.

Secara umum, implementasi teknologi informasi berfokus kepada tiga tujuan yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang ada di Perseroan melalui integrasi aplikasi dan implementasi *single* aplikasi untuk menghilangkan proses serupa dan berulang.
2. Peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya melalui *real-time transaction* menggunakan aplikasi yang bersifat *online*;
3. Pengendalian yang lebih baik terhadap kinerja Perseroan dan kemudahan dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan *executive summary dashboard system*.

Information technology (IT) has become important for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in realizing its vision and mission of becoming a world-class port and providing new experiences for customers in obtaining Company services. Through information technology Companies find new ways of carrying out more effective and efficient activities. This is evidenced by the implementation of information technology (IT) solutions throughout the Company's business processes. Starting from the implementation of customer service portal applications, ship services, terminal services, system implementation for financial processes and other back office processes.

In general, the information technology focuses on 3 (three) objectives:

1. Increasing the effectiveness and efficiency of existing business processes in the Company through application integration to eliminate similar and repetitive processes;
2. Increasing revenue and reducing costs through real-time transactions using online application; and
3. Better control over Company performance and ease of decision making by utilizing the executive summary dashboard system.



MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sesuai arahan dari Kementerian BUMN, maka pada tahun 2023 telah disusun IT *Master Plan* PT Pelabuhan Indonesia periode 2022 – 2026 yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perseroan 2021 – 2025. Dalam IT *Master Plan* (ITMP) visi IT Pelindo yaitu sebagai *enabler* bagi bisnis untuk integrasi ekosistem dan menuju *world class port*. Untuk mencapai visi tersebut maka dijabarkan inisiatif yang tercantum dalam IT *Roadmap* yang terdapat 12 inisiatif utama antara lain, *Journey to Cloud*, *enhancement Single Enterprise Resource Planning (ERP)*, *Enterprise Datawarehouse*, konsolidasi dan *enhancement TOS*, dan lainnya.

Selain itu, di dalam ITMP juga dijabarkan IT *Operation Model* (ITOM) yang berfungsi untuk menunjukkan model operasi bagian IT dalam berhubungan dengan *stakeholder* terkait untuk mencapai visi IT Pelindo. Beberapa hal yang dijabarkan dalam ITOM antara lain IT *Forum* dan IT *Steering Committee*. IT Forum adalah wadah bagi tim IT di Pelindo Grup untuk berdiskusi dan melakukan *monitoring progres* yang diselenggarakan secara rutin. Sedangkan IT *Steering Committee* adalah wadah yang terdiri dari Direksi dan manajemen di *holding* yang berfungsi untuk memberi arahan dan mengambil keputusan terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Selain hal-hal tersebut, IT *Master Plan* juga berisikan mengenai IT *enterprise architecture*, tren teknologi informasi, dan lainnya. Dengan demikian, Perseoran dapat berjalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dengan dukungan teknologi dan meminimalkan distrupsi teknologi di era 4.0.

Pada Tahun 2023, Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengusung tema "*Infrastructure Consolidation*" atau konsolidasi infrastruktur IT yang berfokus pada standarisasi aplikasi dan infrastruktur. Beberapa program yang dijalankan pada tahun 2023 adalah:

1. Standardisasi Layanan Aplikasi *Terminal Operating System* di Pelindo *Group*, antara lain:
 - a. Implementasi dan Standardisasi Aplikasi Layanan Kapal;
 - b. Implementasi dan Standardisasi Aplikasi Layanan Petikemas;
 - c. Implementasi dan Standardisasi Aplikasi Layanan Non Petikemas;
 - d. Implementasi dan Standardisasi Aplikasi Layanan *Roll In Roll Out*.
2. Pengembangan *One Time Password (OTP)* untuk Aplikasi Pelindo *E-Office*;
3. Pengembangan aplikasi Alih Media Arsip Tahap 1;
4. Pengembangan aplikasi Pelindo *E-Procurement*;
5. Pengembangan aplikasi *Procure To Pay*;
6. Pengembangan aplikasi Pelindo Travel;

INFORMATION TECHNOLOGY MASTER PLAN AND STRATEGY

In accordance with the directives from the Ministry of SEs, in 2022, PT Pelabuhan Indonesia's IT Master Plan for the period 2022 – 2026 was prepared aligned with the Company's Long Term Plan for 2021 – 2025. In the IT Master Plan (ITMP) Pelindo's IT vision is to become an enabler for businesses for ecosystem integration and towards a world class port. To achieve this vision, the initiatives listed in the IT Roadmap consist of 12 main initiatives including Journey to Cloud, Single ERP enhancement, Enterprise Datawarehouse, TOS consolidation and enhancement, and others.

In addition, the ITMP describes the IT Operation Model (ITOM) that functions to show the operating model of the IT section in dealing with relevant stakeholders to achieve Pelindo's IT vision. Some of the matters described in the ITOM include the IT Forum and the IT Steering Committee. The IT Forum is a forum for the IT team at Pelindo Group to regularly discuss and monitor progress. While the IT Steering Committee is a forum consisting of the Board of Directors and management at the holding whose function is to provide direction and make decisions on strategic matters. In addition to these matters, the IT Master Plan also contains IT enterprise architecture, information technology trends, and others. Thus, the Company can run by applying the principles of Good Corporate Governance with the support of technology and minimize technological disruption in the 4.0 era.

In 2023, PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s Information Technology carried the theme "*Infrastructure Consolidation*" or IT infrastructure consolidation, focused on application and infrastructure standardization. Some of the programs carried out in 2023 are:

1. Standardization of Terminal Operating System Application Services in Pelindo Group, including:
 - a. Implementation and Standardization of Ship Service Applications;
 - b. Implementation and Standardization of Container Service Applications;
 - c. Implementation and Standardization of Non-Container Service Applications;
 - d. Implementation and Standardization of Roll In Roll Out Service Applications;
2. Development of One Time Password (OTP) for Pelindo E-Office Application;
3. Development of Archive Media Transfer application Phase 1;
4. Development of Pelindo E-Procurement application;
5. Development of Procure To Pay application;
6. Development of Pelindo Travel application;

7. Pengembangan aplikasi Manajemen Investasi;
8. Pengembangan aplikasi *Key Performance Indicator (Corporate)*;
9. Pengembangan aplikasi Rencana Kerja Manajemen;
10. Pengembangan *dashboard executive* yang mencakup *dashboard* investasi, *finance shared service*, kinerja arus, *monitoring* HSSE, *monitoring* peralatan, dan *human resource*;
11. Penerapan *single master data management* di Pelindo Group;
12. Penyiapan *single data warehouse* untuk Pelindo Group;
13. Implementasi data *governance framework*;
14. Eksplorasi data *analytics*;
15. Implementasi Infrastruktur *cloud* pada beberapa aplikasi.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pada tahun 2023, Pelindo telah melakukan berbagai pengembangan dan implementasi IT guna mendukung dan meningkatkan nilai tambah yang mengedepankan pengalaman baru bagi pelanggan. Adapun pengembangan dan implementasi yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi

Back End:

- a. Pengembangan *One Time Password (OTP)* untuk Aplikasi Pelindo *E-Office*.
- b. Pengembangan aplikasi Alih Media Arsip Tahap 1.
- c. Pengembangan aplikasi Pelindo *E-Procurement*.
- d. Pengembangan aplikasi *Procure To Pay*.
- e. Pengembangan aplikasi Pelindo *Travel*.
- f. Pengembangan aplikasi Manajemen Investasi.
- g. Pengembangan aplikasi *Key Performance Indicator (Corporate)*.
- h. Pengembangan aplikasi Rencana Kerja Manajemen.
- i. Pengembangan aplikasi BIOS untuk kas Operasional.
- j. Pengembangan *dashboard executive* yang mencakup *dashboard* investasi, *finance shared service*, kinerja arus, *monitoring* HSSE, *monitoring* peralatan, dan *human resource*.
- k. Penerapan *single master data management* di Pelindo Group.
- l. Penyiapan *single data warehouse* untuk Pelindo Group.
- m. Implementasi data *governance framework*.
- n. Eksplorasi data *analytics*.
- o. Implementasi Infrastruktur *cloud* pada beberapa aplikasi.

Front End:

- a. Standardisasi Layanan Aplikasi Terminal *Operating System* di Pelindo Group, antara lain:
 - Implementasi dan Standardisasi Aplikasi Layanan Kapal.
 - Implementasi dan Standardisasi Aplikasi Layanan Petikemas.
 - Implementasi dan Standardisasi Aplikasi Layanan Non Petikemas.

7. Development of Investment Management application;
8. Development of Key Performance Indicator application (Corporate);
9. Development of Management Work Plan application;
10. Development of executive dashboards which include investment dashboards, finance shared services, flow performance, HSSE monitoring, equipment monitoring and human resources;
11. Implementation of single master data management in Pelindo Group;
12. Preparation of a single data warehouse for Pelindo Group;
13. Implementation of data governance framework;
14. Exploration of analytics data;
15. Implementation of cloud infrastructure in several applications.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

In 2023, Pelindo has carried out a number of IT developments and implementations to support and increase added value that prioritizes new experiences for customers. The development and implementation carried out in 2023 are as follows:

1. Development and Implementation of Application

Back End:

- a. Development of One Time Password (OTP) for Pelindo E-Office Application.
- b. Development of Archive Media Transfer application Phase 1.
- c. Development of Pelindo E-Procurement application.
- d. Development of Procure To Pay application.
- e. Development of Pelindo Travel application.
- f. Development of Investment Management application.
- g. Development of Key Performance Indicator application (Corporate).
- h. Development of Management Work Plan application.
- i. Development of BIOS applications for Operational cash.
- j. Development of executive dashboards which include investment dashboards, finance shared services, flow performance, HSSE monitoring, equipment monitoring and human resources.
- k. Implementation of single master data management in Pelindo Group.
- l. Preparing a single data warehouse for Pelindo Group.
- m. Implementation of data governance framework.
- n. Exploration of data analytics.
- o. Implementation of cloud infrastructure in several applications.

Front End:

- a. Standardization of Terminal Operating System Application Services in Pelindo Group, including:
 - Implementation and Standardization of Ship Service Applications.
 - Implementation and Standardization of Container Service Applications.
 - Implementation and Standardization of Non-Container Service Applications.



- Implementasi dan Standardisasi Aplikasi Layanan *Roll in Roll Out*.
- *Enhancement* dan Implementasi Aplikasi P-Cico untuk Pandu (Integrasi dengan aplikasi SIMPANDA).

2. Peningkatan Infrastruktur TI

- a. Penerapan IT *Service Management* meliputi sentralisasi *Call center* IT dan standarisasi *tools* IT *Service Management*.
- b. Penyusunan arsitektur infrastruktur *Head Office* dan regional.
- c. Standardisasi *Email Server* Pelindo.
- d. Peningkatan *Data Center* Regional.

3. Penyusunan IT *Strategic Management and Governance*

- a. IT *Master Plan* 2022 – 2026 telah disahkan oleh Direksi;
- b. Telah dilakukan penyusunan Kebijakan Tata Kelola Data sebagai acuan dan pedoman pengelolaan data di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- c. Proses *assessment* INDI 4.0 telah dilaksanakan dengan skor yang diperoleh untuk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) senilai 2,37;
- d. Novasi telah selesai dilakukan pada perangkat berikut:
 - Lisensi perangkat lunak Pentana Audit (E-Audit);
 - Lisensi perangkat lunak VMWare;
 - Lisensi Trendmicro;
 - Lisensi Microsoft;
 - Lisensi Oracle;
 - Lisensi ServiceNow (Sebagai *tools* IT *Service Management*).

- Implementation and Standardization of Roll in Roll Out Service Applications.
- Enhancement and Implementation of P-Cico Application for Pandu (Integration with SIMPANDA application).

2. Improvement of IT Infrastructure

- a. Implementation of IT Service Management includes centralization of IT Call Center and standardization of IT Service Management tools.
- b. Preparation of Head Office and regional infrastructure architecture.
- c. Standardization of Pelindo Email Server.
- d. Improvement of Regional Data Center.

3. Preparation of IT Strategic Management and Governance

- a. IT Master Plan 2022 – 2026 has been approved by the Board of Directors;
- b. Data Management Policy has been prepared as a reference and guideline for data management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- c. The INDI 4.0 assessment process has been conducted with a score obtained for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) of 2.37;
- d. Novation has been completed on the following devices:
 - Pentana Audit (E-Audit) software license;
 - VMWare software license;
 - Trendmicro License;
 - Microsoft License;
 - Oracle License;
 - ServiceNow License (As an IT Service Management tool).

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka menunjang kebutuhan Layanan Teknologi Informasi, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur dan meningkatkan keamanan Teknologi Informasi. Pada Tahun 2023 telah dilakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:

1. Penyediaan Layanan Infrastruktur Kantor *Head Office* Pelindo di Pelindo Tower.
2. Standardisasi arsitektur *data center*.
3. Standardisasi arsitektur jaringan.
4. Standardisasi arsitektur keamanan Infrastruktur IT.
5. Standardisasi arsitektur CCTV.
6. Efisiensi biaya pengelolaan *data center*.
7. Penyediaan infrastruktur pendukung PTOS-M (*Multipurpose Terminal System*) di area Sunda Kelapa, Tanjung Pinang, Bengkulu, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Jambil, Inggom, Dumai, Jamrud, Nilam, Mirah, Tanjung Wangi, Trisakti, Badas, Bitung, Bumi Harjo.
8. Penyediaan perangkat pendukung aplikasi PTOS-R di Tanjung Priok, Belawan, Makasar, Balik Papan, Sorong.
9. Penyediaan infrastruktur pendukung aplikasi PTOS-PK (Petikemas Terminal Sistem) di Gorontalo dan Tanjung Pinang.
10. Sentralisasi *procurement software* lisensi.
11. *Enhancement cyber security*.

INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

In order to support the need for Information Technology Services, improving the quality of infrastructure and and increasing the security of Information Technology is a necessity. In 2023, several initiatives carried out are as follows:

1. Provision of Pelindo Head Office Infrastructure Services at Pelindo Tower.
2. Standardization of data center architecture.
3. Standardization of network architecture.
4. Standardization of IT Infrastructure security architecture.
5. Standardization of CCTV architecture.
6. Data center management cost efficiency.
7. Provision of PTOS-M (*Multipurpose Terminal System*) supporting infrastructure in the areas of Sunda Kelapa, Tanjung Pinang, Bengkulu, Teluk Bayur, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Jambil, Inggom, Dumai, Jamrud, Nilam, Mirah, Tanjung Wangi, Trisakti, Badas, Bitung, Bumi Harjo.
8. Provision of PTOS-R application support equipment in Tanjung Priok, Belawan, Makasar, Balik Papan, Sorong.
9. Providing infrastructure to support the PTOS-PK (Container Terminal System) application in Gorontalo and Tanjung Pinang.
10. Centralize procurement of software licenses.
11. Cyber security enhancement.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Direksi dan Dewan Komisaris membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) Perseroan yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis Perseroan, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi Perseroan.

Agar pemanfaatan teknologi informasi lebih terarah, sesuai kebutuhan dan selaras dengan visi, misi, nilai dan budaya Perseroan maka PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menerapkan tata kelola IT (IT Governance). Tata Kelola TI menjabarkan prinsip-prinsip terkait manajemen dan organisasi, prinsip data dan informasi, prinsip aplikasi dan prinsip teknologi. Selain itu juga menjabarkan peranan Teknologi Informasi, organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta proses-proses yang memastikan sistem TI dapat mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

Tata Kelola IT disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN terkait panduan penyusunan pengelolaan TI BUMN, serta berpedoman pada *framework* pengelolaan TI seperti *Control Objective for Information Technologies (COBIT)*, *Information Technology Infrastructure Library (ITIL)*, *The Open Group Architecture Framework (TOGAF)*, dan lainnya. Pedoman dan kebijakan tata kelola teknologi informasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Strategis
 - a. Penetapan Peran TIK Perseroan;
 - b. Perencanaan TIK;
 - c. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TIK;
 - d. Pengelolaan Investasi TIK;
 - e. Pengelolaan Sumber Daya TIK;
 - f. Pengelolaan Risiko TIK;
 - g. Pengelolaan Proyek (*Project Management*);
 - h. Penanganan Kebutuhan dan Identifikasi Solusi (*Identify Automated Solution*).
2. Kebijakan Operasional
 - a. Pengelolaan Operasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Pengelolaan Layanan TIK;
 - c. Pengelolaan Keamanan TIK;
 - d. Pengembangan Sistem Informasi;
 - e. Serah Terima Layanan TIK (*Handover*);
 - f. *Post Implementation Review*;
 - g. Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga;
 - h. Pengelolaan Mutu;
 - i. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja TIK;
 - j. Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal;
 - k. Pengelolaan *Compliance External Regulation*.

Pengelolaan *cyber security* adalah sebuah agenda penting dalam era digital yang terus berkembang. Ancaman siber semakin kompleks dan merugikan, menuntut respons yang cepat dan efektif. Pada Tahun 2023 dilakukan beberapa *enhancement cyber security* di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

The Board of Directors and Board of Commissioners has developed a framework for the Company's information technology (IT) governance that is aligned with the Company's business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the Company's goals and strategies.

To make the utilization of information technology more directed, based on the needs and aligned with the vision, mission, values and corporate culture, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) applies IT governance. IT Governance outlines the principles related to management and organization, data and information principles, application principles and technology principles. It also describes the role of Information, the Information and Communication Technology (ICT) organization and processes that are needed to ensure the IT systems support the achievement of the Company goals.

IT Governance is prepared based on the Regulation of Minister of SOE regarding guidelines for preparing SOE IT management, and is guided by IT management frameworks such as Control Objective for Information Technologies (COBIT), Information Technology Infrastructure Library (ITIL), The Open Group Architecture Framework (TOGAF), and others. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s information technology governance guidelines and policies include the following:

1. Strategic Policy
 - a. Determining the Role of Company ICT;
 - b. ICT planning;
 - c. ICT Process and Organizational Framework;
 - d. ICT Investment Management;
 - e. ICT Resource Management;
 - f. ICT Risk Management;
 - g. Project Management;
 - h. Handling Needs and Identify Automated Solution.
2. Operational Policy
 - a. Management of Information and Communication Technology Operations;
 - b. ICT Service Management;
 - c. ICT Security Management;
 - d. Information Systems Development;
 - e. Handover of ICT Services;
 - f. Post Implementation Review;
 - g. Management of Third Party Services;
 - h. Quality Management;
 - i. ICT Performance Monitoring and Evaluation;
 - j. Monitor and Evaluate Internal Control;
 - k. Management of Compliance External Regulations.

Cyber security management is an important agenda in the ever-growing digital era. Cyber threats are increasingly complex and detrimental, demanding rapid and effective responses. In 2023, several cyber security enhancements carried out within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are as follows:



1. *Penetration Test* dilakukan untuk identifikasi seluruh celah keamanan informasi dan risiko keamanan di aplikasi dan infrastruktur.
2. *Patching* dilakukan perbaikan terhadap setiap celah keamanan yang diidentifikasi.
3. Pembentukan *Security Operation Center* untuk memantau, mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman keamanan siber secara *real-time*.
4. Implementasi *Managed Detect & Response (MDR)* untuk menyediakan layanan terkelola yang secara proaktif mendeteksi, menanggapi, dan mengatasi ancaman keamanan siber untuk meningkatkan perlindungan data dan sistem informasi.
5. *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* untuk memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap insiden keamanan siber untuk melindungi data dan infrastruktur organisasi dari ancaman.
6. Instalasi *end-point security* untuk melindungi perangkat individu atau terminal dalam jaringan komputer dari serangan malware, ancaman siber, dan kebocoran data.
7. Instalasi *workload security server* untuk melindungi *server* dan beban kerja yang berjalan di dalamnya dari ancaman siber, serta memastikan keamanan dan kepatuhan sistem secara keseluruhan.

Dewan Komisaris dan Direksi menekankan efektivitas penerapan *cyber security*. Direksi senantiasa memastikan bahwa risiko terkait *cyber security*, *disruption* dan *disaster recovery* dapat dikelola dengan baik.

STRUKTUR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Organisasi TIK terdiri dari 2 (dua) bagian sebagai berikut:

1. Komite Pengawas TI
Komite pengawas TI merupakan komite yang melakukan fungsi pengawasan atas implementasi IT pada Perseroan. Komite Pengawas TI diketuai oleh Direktur bidang yang membawahi IT. Adapun susunan Komite pengawas TI dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	Nama Jabatan Name of Position	Jabatan dalam Tim Position in The Team
1	Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Pengarah Director
2	Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Pengarah Director
3	Direktur Keuangan Finance Director	Penasehat Advisor
4	Direktur Pengelola Managing Director	Penasehat Advisor
5	Direktur SDM & Umum HC & General Affairs Director	Penasehat Advisor
6	Direktur Investasi Investment Director	Penasehat Advisor
7	Direktur Strategi Strategy Director	Ketua Chairman

1. Penetration tests were conducted to identify all information security gaps and security risks in applications and infrastructure.
2. Patching was conducted to repair any identified security gaps.
3. Establishment of a Security Operation Center to monitor, detect, analyze and respond to cyber security threats in real-time.
4. Implement Managed Detect & Response (MDR) to provide managed services that proactively detect, respond to, and resolve cyber security threats to improve data and information system protection.
5. Computer Security Incident Response Team (CSIRT) to provide a fast and effective response to cyber security incidents to protect the organization's data and infrastructure from threats.
6. Installation of end-point security to protect individual devices or terminals in a computer network from malware attacks, cyber threats and data leaks.
7. Installation of workload security servers to protect servers and workloads running on them from cyber threats, as well as ensuring overall system security and compliance.

Board of Commissioners and Board of Directors emphasize the effectiveness of implementing *cyber security*. Board of Directors always ensures that risks related to *cyber security*, *disruption* and *disaster recovery* can be managed properly.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY MANAGEMENT STRUCTURE

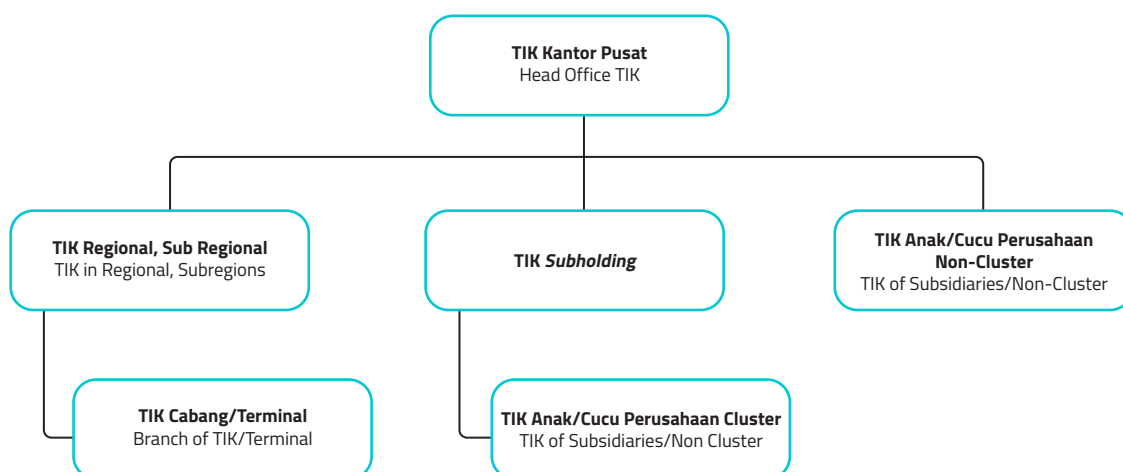
The ICT organization consists of 2 (two) sections as follows:

1. IT Steering Committee
The IT steering committee is a committee that carries out supervisory functions over IT implementation in the Company. The IT Steering Committee is chaired by the Director in charge of IT sector. The composition of IT steering committee is as follows:

NO	Nama Jabatan Name of Position	Jabatan dalam Tim Position in The Team
8	<i>Group Head</i> Teknologi Informasi Group Head of Information Technology	Sekretaris Secretary
9	<i>Group Head</i> Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan Group Head of Risk Management, Governance and Compliance	Anggota Member
10	<i>Group Head</i> Perencanaan dan Performa Keuangan Group Head of Financial Planning and Performance	Anggota Member
11	<i>Group Head</i> Akuntansi Group Head of Accounting	Anggota Member
12	<i>Group Head</i> Transformasi Korporasi dan Manajemen Perubahan Group Head of Corporate Transformation and Change Management	Anggota Member
13	<i>Group Head</i> Strategi SDM Group Head of HC Strategy	Anggota Member

2. Manajemen Pengelola TIK
Struktur Manajemen Pengelola Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dapat digambarkan sebagai berikut:

2. ICT Management
The structure of Information Technology Management of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is as follows:





RENCANA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI 2024

Rencana pengembangan IT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Standardisasi aplikasi layanan operasional:
 - a. Implementasi aplikasi Layanan Kapal di 30 site kerja Pelindo Group.
 - b. Implementasi aplikasi layanan petikemas di 2 site kerja Pelindo Group.
 - c. Implementasi aplikasi Layanan Non Operasional di 7 site kerja Pelindo Group.
 - d. Implementasi aplikasi Layanan Roro di 5 site kerja Pelindo Group.
2. Standardisasi aplikasi *back office*
 - a. Integrasi dan *Monitoring* Transaksi *Intercompany* Pelindo dengan *Subholding*.
 - b. *Enhancement* aplikasi Sistem Informasi Hukum.
 - c. *Enhancement* aplikasi TAD *Operating System*.
 - d. *Enhancement* aplikasi pinjaman Perseroan.
 - e. Pengembangan aplikasi inventarisasi aset tetap berbasis GIS.
 - f. Pengembangan aplikasi komersialisasi pengadaan tanah.
 - g. Pengembangan aplikasi Pelindo *E-Procurement*.
 - h. *Enhancement* dan *roll out* aplikasi Pelindo *Connect*.
 - i. *Enhancement* dan *roll out* aplikasi IMS.
 - j. *Enhancement* aplikasi *smart learning*.
3. *Assessment IT Maturity Level*.
4. Pengembangan *dashboard executive* yang mencakup *dashboard* investasi, *finance shared service*, kinerja arus, *monitoring* HSSE, *monitoring* peralatan, dan *human resource*.
5. Pertukaran data melalui Pelindo Hub.
6. Penyusunan Desain *Enterprise Architecture*.
7. Penerapan *single master data management* di Pelindo Group.
8. Penyiapan *single data warehouse* untuk Pelindo Group.
9. Implementasi data *governance framework*.
10. Eksplorasi data *analytics*.
11. Implementasi Infrastruktur *cloud* pada beberapa aplikasi.
12. Implementasi *Single ERP* di Pelindo Grup.
13. Penyusunan *IT Service Catalog*.
14. *Monitoring* dan evaluasi sistem keamanan informasi.

INFORMATION TECHNOLOGY 2024 WORK PLAN

The IT development plan in 2024 is as follows:

1. Standardization of operational service applications:
 - a. Implementation of Ship Service application at 30 Pelindo group work sites.
 - b. Implementation of container service application at 2 Pelindo Group work sites.
 - c. Implementation of Non-Operational Service application at 7 Pelindo Group work sites.
 - d. Implementation of Roro Service application at 5 Pelindo Group work sites.
2. Standardization of back office applications
 - a. Integration and Monitoring of Pelindo Intercompany Transactions with Subholding.
 - b. Enhancement of Legal Information System application.
 - c. Enhancement of TAD Operating System application.
 - d. Enhancement of company loan applications.
 - e. Development of GIS-based fixed asset inventory application.
 - f. Development of land acquisition commercialization application.
 - g. Development of Pelindo E-Procurement application.
 - h. Enhancement and roll out of Pelindo Connect application.
 - i. Enhancement and roll out of IMS application.
 - j. Enhancement of smart learning application.
3. IT Maturity Level Assessment.
4. Development of an executive dashboard which includes investment dashboards, finance shared services, current performance, HSSE monitoring, equipment monitoring and human resources.
5. Data exchange via Pelindo Hub.
6. Preparation of Enterprise Architecture Design.
7. Implementation of single master data management in Pelindo Group.
8. Preparation of a single data warehouse for Pelindo Group.
9. Implementation of data governance framework.
10. Exploration of data analytics.
11. Implementation of cloud infrastructure in several applications.
12. Implementation of Single ERP in Pelindo Group.
13. Preparation of IT Service Catalog.
14. Monitoring and evaluating information security systems.





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Pelindo senantiasa menempatkan aspek-aspek *Good Corporate Governance* sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi sebagai perusahaan kepelabuhanan terdepan. Pelaksanaan GCG yang konsisten dapat meningkatkan pertumbuhan dan rekam jejak (*track record*) yang baik serta berkesinambungan untuk jangka panjang Perseroan.



Pelindo constantly places the Good Corporate Governance aspect as an integral part and foundation in strengthening its position as a leading port company. Consistent implementation of GCG can increase growth as well as good and sustainable track record for the Company in the long term.

PENCAPAIAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ACHIEVEMENTS IN CORPORATE GOVERNANCE



1



Ikut menjuarai evaluasi keterbukaan Informasi Publik 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan meraih kategori Informatif.

As one of the winner in 2022 Public Information Disclosure Evaluation held by the Central Information Commission and won the Informative category.

2



100% seluruh pegawai Pelindo telah melakukan pengisian *survey* GCG dan Penandatanganan Pakta Integritas melalui sistem P-Good.

All Pelindo personnel (100%) have filled out the GCG survey and signed the Integrity Pact through P-Good system.

3



Penghargaan anti korupsi oleh Stranas PK.

Anti-corruption award by Stranas PK.

4



Pelindo meraih penghargaan dalam Agenda *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) - *Indonesia Trusted Companies Award 2023*, kategori *Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* dengan score 84,05.

Pelindo won an award in the Agenda Corporate Governance Perception Index (CGPI) - Indonesia Trusted Companies Award 2023, Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) category with a score of 84.05.

5



Apreasi dari KPK Perihal Penyampaian Hasil Monitor dan Evaluasi Pembangunan WBS TPK Terintegrasi.

Appreciation from KPK Regarding Submission of Monitor and Evaluation Results of Integrated WBS TPK Development.

6



Kantor Pusat Pelindo dan Regional 1,2,3 dan 4 mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 oleh *assessor* PT British Standard Institute (BSI) Group Indonesia.

Pelindo Head Office and Regional 1,2,3 and 4 received ISO 37001:2016 certification by assessor PT British Standard Institute (BSI) Group Indonesia.

7



Pelaksanaan Forum Konsolidasi "Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi" dengan *keynote speak* Bapak Mahfud MD.

The implementation of Consolidation Forum "Joint Commitment of The Port Community Against Corruption" with keynote speaker Mr. Mahfud MD.

8



Melaksanakan program GCG Award 2023 untuk Pelindo Group.

The holding of 2023 GCG Award program for Pelindo Group.





DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BASIS OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Dalam menerapkan praktik GCG, Pelindo mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 30 April 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 21 April 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke Dalam Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik.

In implementing GCG practices, Pelindo refers to a number of laws and regulations, as follows:

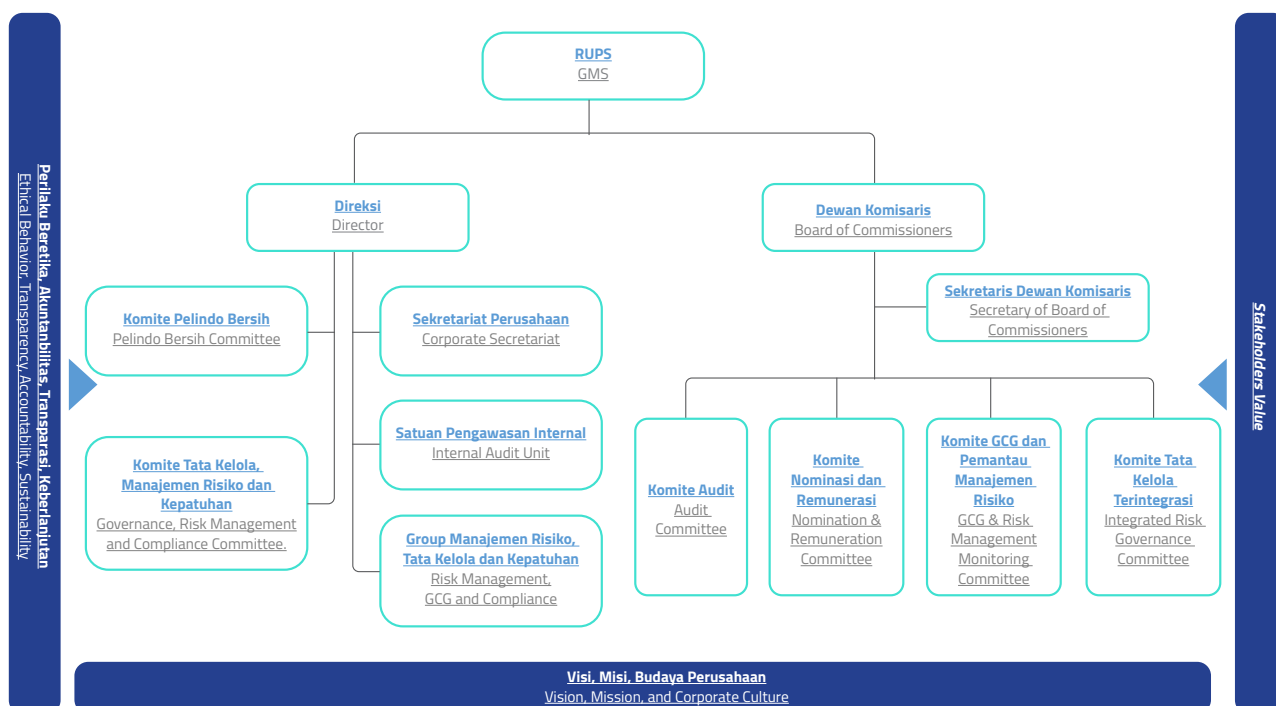
1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT).
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs).
3. Law No. 14 of 2008 dated April 30, 2008 concerning Public Information Disclosure.
4. Law No. 19 of 2016 dated November 25, 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 dated April 21, 2008 on Electronic Information and Transactions.
5. Government Regulation Number 45 of 2005 Dated October 25, 2005 Concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises.
6. Government Regulation Number 101 of 2021 Dated October 1, 2021 concerning the Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III and Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV into the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023 dated March 03, 2023 Regarding Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.
8. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 Dated March 03, 2023 Regarding Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 Dated March 20, 2023 Regarding Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUCTURE AND MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE

STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN

STRUCTURE OF CORPORATE ORGANS



GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Dalam melaksanakan kegiatan Perseroan, Pelindo memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan *governance soft structure*. *Governance soft structure* yang dimiliki Pelindo antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar;
2. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi;
3. *Charter* Komite Audit;
4. *Charter* Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko;
5. *Charter* Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. *Charter* Komite Tata Kelola Terintegrasi;
7. Pedoman Kode Etik Bisnis;
8. Pedoman Pelaksanaan GCG Perusahaan;
9. Pedoman *Whistleblowing System*;
10. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
11. Pedoman Penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
12. Pedoman Anti *Fraud*;
13. Pedoman Benturan Kepentingan;
14. Pedoman Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

In carrying out the Company's activities, Pelindo has various policies/guidelines for executing its functions and duties, which are called the governance soft structure. Pelindo's governance soft structure includes:

1. Articles of Association;
2. Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors;
3. Audit Committee Charter;
4. GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter;
5. Nomination and Remuneration Committee Charter;
6. Charter of Integrated Governance Committee;
7. Code of Conduct;
8. GCG Code;
9. Whistleblowing System Guidelines;
10. Gratification Control Guidelines;
11. Integrated Governance Guidelines;
12. Anti-Fraud Guidelines;
13. Conflict of Interest Guidelines;
14. Anti-Bribery Management System Governance Guidelines.



MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

PEMEGANG SAHAM

Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Perseroan melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham/pemilik modal yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham/pemilik modal, baik Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, yang diantaranya:

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
3. Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
5. Hak untuk mengambil keputusan tertinggi pada Perseroan, khusus bagi pemilik modal Perseroan;
6. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepat waktu, terukur dan teratur;
7. Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan BUMN yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
8. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas;
9. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Pelindo dan suatu wadah atau forum bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak diterbitkannya pengumuman dan surat pemanggilan pelaksanaan rapat tersebut, seluruh bahan yang

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

SHAREHOLDERS

The Company's shares are shares on behalf of and issued on behalf of their owners which are registered in the Shareholders Register consisting of Series A Dwiwarna Shares that can only be owned by the Republic of Indonesia and Series B Shares that can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public.

Shareholder Rights

The Company protects and facilitates the implementation of the rights of shareholders/capital owners whose names are recorded in the register of shareholders/capital owners of both Series A Dwiwarna Shares and Series B Shares, which include:

1. The right to request the holding of GMS;
2. The right to request information about the GMS agenda;
3. The right to submit proposals to be discussed in the GMS agenda;
4. The right to attend and vote in a GMS, specifically for shareholders of Persero, provided that 1 (one) share entitles the holder to cast one vote;
5. The right to make the highest decision in the Company, specifically for the owner of the Company's capital;
6. The right to obtain material information regarding the Company, in a timely, measured and regular manner;
7. The right to receive a share of the SOE's profits allocated to shareholders/capital owners in the form of dividends, and the remaining assets from liquidation, in proportion to the number of shares/capital owned;
8. The right to fair treatment of shareholders, including minority shareholders;
9. Other rights based on the articles of association and provisions of laws and regulations.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in Pelindo and is a forum where shareholders gather to make important decisions where the authority is not given to Boards of Directors and Board of Commissioners as stipulated in Pelindo's Articles of Association and all applicable laws.

GMS is held through a process of GMS announcement and summons in accordance with applicable regulations. After the announcement and invitation letter for the meeting, all materials to be discussed at the GMS are available at Pelindo's office, so

akan dibahas dalam RUPS telah tersedia di kantor Pelindo. Dengan demikian, para Pemangku Kepentingan yang menjadi peserta rapat dapat mengambil bahan tersebut.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan. Pemanggilan RUPS mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Pada saat pemanggilan RUPS telah disampaikan penjelasan untuk tiap-tiap agenda yang akan mendapat persetujuan Pemegang Saham. Sebelum pelaksanaan RUPS Perseroan menjelaskan tata cara pemungutan suara.

Keputusan RUPS sah jika semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan bulat. Setelah RUPS selesai maka risalah RUPS mencatat pertanyaan atau tanggapan Pemegang Saham.

Penyelenggaraan RUPS di Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan Pelindo setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP). Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pelaksanaan RUPS Tahunan tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 dan Realisasinya

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Januari 2023

Waktu : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Hotel Borobudur Jakarta

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RKAP TAHUN 2023

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1.	Marsetio	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/Acting President Commissioner	Hadir Present
2.	Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
3.	Antonius Rainer Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
4.	Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
5.	Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Hadir Present

that the Stakeholders who will be participants in the meeting can take the material.

Summons for GMS are made no later than 14 (fourteen) days before the date of GMS holding, excluding the date of the summons and the date of the GMS. The GMS summon includes the date, time, place and agenda accompanied by notification that the material to be discussed at the GMS is available at the Company's office from the date of GMS summons is made until the date of GMS. At the GMS summons, an explanation has been conveyed for each agenda that will be approved by the Shareholders. Prior to the GMS holding, the Company explained the voting procedures.

A GMS resolution is valid if all shareholders with valid voting rights are present or represented at the GMS and the resolution is unanimously approved. After the GMS is completed, the minutes of GMS record the Shareholders' questions or responses.

GMS in the Company consists of Annual GMS and Extraordinary GMS. Annual GMS is held by Pelindo every year, which includes Annual GMS on Annual Report of and Annual GMS on the Company's Work Plan and Budget. While Extraordinary GMS can be held at any time based on the needs and for the benefits of the Company.

Annual GMS on the Approval of 2023 Corporate Work Plan and Budget and the Realization

The GMS was held on:

Day/Date : Monday, January 30, 2023

Time : 08.00 WIB - finished

Place : Borobudur Hotel Jakarta

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT THE GMS ON 2023 RKAP APPROVAL



No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
6.	Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Hadir Present
7.	Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Hadir Present
8.	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
9.	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
10.	Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum HC and General Director	Hadir Present
11.	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Hadir Present
12.	Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Hadir Present
13.	Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Hadir Present

PIHAK INDEPENDEN

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sehingga belum memerlukan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara dalam pelaksanaan RUPS. Pelindo telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

INDEPENDENT PARTY

Until December 31, 2023, Pelindo has not listed its shares on the Stock Exchange and, therefore, does not require an independent party to count the votes in the GMS. Pelindo has appointed an independent party, Notary Nanda Fauz Iwan, to prepare the deed of GMS results.

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RKAP TAHUN 2023

RESOLUTION AND REALIZATION OF THE GMS ON 2023 RKAP

Agenda Pertama First Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk didalamnya penetapan klasifikasi risiko BUMN serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023.

Approval of 2023 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) including the determination of SOE risk classification and Board of Commissioners 2023 Work Plan and Budget.

Keputusan:

- Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk didalamnya penetapan Klasifikasi risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada kuadran Sistemik A serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut;
- Pokok-pokok Laporan Keuangan (Rp).

Resolution:

- Approved the 2023 (two thousand twenty-three) Corporate Work Plan and Budget (RKAP) including the determination of risk classification of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in the Systemic A quadrant and the 2023 (two thousand twenty-three) Board of Commissioners Work Plan and Budget of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), with the following points;
- Key Financial Statements (Rp).

Uraian Description	RKAP 2023 2023 RKAP
Pendapatan 2023 RKAP	31.819.126.058.312,00
Laba Usaha Operating Profit	6.383.555.192.817,00
EBITDA	10.298.947.308.431,00
Laba Bersih Net Profit	3.819.508.573.868,00
Laba Bersih (Atribusi Induk) Net Profit (Parent Attribution)	3.813.542.854.108,00
Total Aset Total Assets	112.076.560.242.422,00
Ekuitas Equity	47.290.488.260.554,00
<i>Interest Bearing Debt</i>	41.611.451.619.780,00
<i>Net Operating Cash Flow</i>	9.432.476.267.650,00
CAPEX	10.699.844.148.391,00

Agenda Kedua Second Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023.

Approval of the 2023 Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL).

Keputusan:

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Total Program Pendanaan Non-PUMK sebesar Rp132.761.922.320,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan Dana PUMK sebesar Rp23.880.295.155,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Resolution:

Approved PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2023 (two thousand twenty-three) Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) with Total Non-PUMK Funding Program amounted to Rp132,761,922,320.00 (one hundred thirty-two billion seven hundred sixty-one million nine hundred twenty-two thousand three hundred twenty rupiah) and PUMK Fund amounted to Rp23,880,295,155.00 (twenty-three billion eight hundred eighty million two hundred ninety-five thousand one hundred fifty-five rupiah).

Agenda Ketiga Third Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial Tahun 2023.

Determination of the 2023 Annual Management Contract, which contains collegial Key Performance Indicators of Board of Directors.

Keputusan:

Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara Kolegial Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Resolution:

Determined the 2023 (two thousand twenty-three) Annual Management Contract, which contains collegial Key Performance Indicators of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), as attached and is an integral part of this resolution.



No	KPI	ESG	PS 88	Satuan Unit	Bobot Weight		Polaritas Polarity	Target 2023 Target
					Sub	Total		
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia					44			
1	<i>Profitable Ratio</i>							
	a. EBITDA	C	-	Rupiah (Miliar) (Billion)	5	10	Maximize	10,299
	b. ROIG > WAGG	C	-	%	5		Maximize	1,12
2	<i>Rasio Interest Bearing Debt</i> Interest Bearing Debt Ratio							
	a. <i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i>	G	-	Kali Times	4	8	Minimize	4,04
	b. <i>Interest Bearing Debt to Invested Capital</i>	G	-	%	4		Minimize	47,20
3	<i>Throughput</i>							
	a. <i>Container Throughput</i>	C	-	Juta TEUs Million TEUs	6	12	Maximize	17,7
	b. <i>Non Container Throughput</i>	C	-	Juta Ton Million Ton	6		Maximize	161,5
4	<i>B/S/H (Gross)</i>	C	-	B/S/H		7	Maximize	39
5	Implementasi <i>Green Technology</i> di Pelabuhan Implementation of Green Technology at the Ports	Green E, S	-	%		7	Maximize	100
B. Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation					10			
6	Efisiensi melalui Pengadaan Terpusat Efisiensi melalui Pengadaan Terpusat	C	-	Rupiah (Miliar) (Billion)	4	Maximize	122	
7	<i>Additional Marine Service</i>	C	-	Jumlah Total	6	Maximize	4	

No	KPI	ESG	PS 88	Satuan Unit	Bobot Weight		Polaritas Polarity	Target 2023 2023 Target
					Sub	Total		
C. Kepimpinan Teknologi Technology Leadership					12			
8	Standardisasi dan Digital Layanan Petikemas & Non Petikemas Standardization and Digitalization of Container & Non-Package Services	C	-	%	6		Maximize	100
9	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Marine Standardization and Digitalization of Marine Services	C	-	%	6		Maximize	100
D. Peningkatan Investasi Investment Increase					16			
10	Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	C	-	%	6		Maximize	100
11	Pencapaian Skor KPI PMN BMTH PMN BMTH KPI Score Achievement	C	√	%	4		Maximize	100
12	Pengembangan Pelabuhan melalui Kerja Sama dengan Mitra Strategis e.g INA Port Potential Development through Collaboration with Strategic Partners (e.g INA)	C	-	%	6		Maximize	100



No	KPI	ESG	PS 88	Satuan Unit	Bobot Weight		Polaritas Polarity	Target 2023 Target
					Sub	Total		
E. Pengembangan Talenta Talent Development					18			
13	<i>Talent management & Development</i>							
	▪ Rasio Perempuan dalam <i>nominated talent</i> Female ratio in nominated talent	S	-	%	3	6	Maximize	14
	▪ Rasio <i>top talent</i> muda (<=42 tahun) dalam <i>nominated talent</i> Young top talent ratio (<=42 years old) in nominated talent	S	-	%	3		Maximize	14
14	Rasio Pemenuhan Klasifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi) Risk Management Organ Classification Fulfillment Ratio (Qualification Ratio)	G	-	%	6		Maximize	80
15	Penyelesaian <i>Roadmap</i> Penyehatan Dana Pensiun Completion of Pension Fund Restructuring Roadmap	G	-	%	6		Maximize	100
Jumlah Total					100			

Key Performance Indicators PMN

No	KPI	Satuan Unit	Target RKAP RKAP Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight
Output					
1	Akumulasi <i>Progress</i> Proyek Pengerukan Dredging Project Progress Accumulation	%	100	Maximize	15
2	Akumulasi Penyerapan Dana PMN PMN Fund Absorption Accumulation	%	100	Maximize	15
Output Manfaat Benefits Output					
3	Jumlah Kunjungan Kapal Cruise Total Cruise Ship Visit	Call	48	Maximize	20
4	Penyerapan Mitra UMKM MSME Partner Absorption	Unit Stand	50	Maximize	20
5	Kontribusi Pendapatan BMTH BMTH Revenue Contribution	Rp Miliar Rp Billion	90,33	Maximize	15
6	Jumlah Wisatawan Luar Negeri Total Overseas Travelers	Orang People	56.000	Maximize	15

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris Tahun 2023.

Determination of the 2023 Management Contract (*Key Performance Indicators*) between Board of Commissioners and Shareholders.

Keputusan:

Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Resolution:

Determined the 2023 (two thousand twenty-three) Management Contract (*Key Performance Indicators*) of Board of Commissioners, as attached and is an integral part of this resolution.

Key Performance Indicator

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan Contribution to the Company's performance achievements		10	
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to the realization of Board of Directors' KPI achievements	Poin Points	10	100
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris Timeliness of submission of Opinions and Suggestions that are the obligations of Board of Commissioners		20	
a.	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2032, Laporan Triwulanan 2023, dan Laporan Tahunan 2022 Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on RKAP 2023, Quarterly Report 2023, and Annual Report 2022	Hari Kerja Working days	5	30
b.	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri Responses to Board of Directors' actions that must be approved by the GMS/Minister	Hari Kerja Working days	5	14
c.	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Responses to Board of Directors' actions that must be approved by Board of Commissioners	Hari Kerja Working days	5	14
d.	Laporan Dewan Komisaris Triwulanan dan Tahunan Quarterly and Annual Board of Commissioners Report	Hari Kerja Working days	5	30
3.	Kontribusi terhadap penerapan GCG Contribution to the implementation of GCG		10	
a.	Kontribusi kualitas penerapan GCG Contribution to the quality of GCG implementation	Poin Points	5	31,50
b.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> GCG Aspek Dewan Komisaris Follow-up to the Recommendations on the Results of GCG Assessment of Board of Commissioners aspect	%	5	100
4.	Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Meetings and Working Visits of Board of Commissioners		18	
a.	Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Internal Meetings of Board of Commissioners	Jumlah Amount	6	12
b.	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Number of Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Amount	6	12
a.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Working Visit of Board of Commissioners to the Branch	Jumlah Amount	6	7



No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target
5.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perusahaan Supervision and Guidance to Board	Jumlah Amount	14	7
6.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners		26	
	a. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency Improvement			
	Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency Development	Pelaksanaan Implementation	8	4
	b. Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs			
	Komite Audit Audit Committee			
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Amount	3	12
	Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee			
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of PMR Committee Internal Meetings	Jumlah Amount	3	12
	Laporan Penugasan Komite PMR PMR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee			
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Implementation of NR Committee Internal Meetings	Jumlah Amount	3	12
	Laporan Penugasan Komite NR NR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
7.	Pengawasan dan Arahan atas Rencana dan Pelaksanaan Program TJSL Supervision and Guidance on SER Program Plan and Implementation	Jumlah Amount	2	2
	Jumlah Total		100	

Agenda Kelima
Fifth Agenda

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2023.

Stipulation of Operational Aspect indicators for the Measurement of the Company's 2023 Soundness Level.

Keputusan:

Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2023, sebagai berikut:

Resolution:

Stipulated the Operational Aspect Indicators for the Measurement of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2023 Soundness Level, as follows:

No.	Indikator Indicator	Bobot Weight
Aspek Operasional Operational Aspect		35.00
1.	Waiting Time For Pilot	9.0
2.	Tingkat Efektivitas Tambahan Petikemas Additional Container Effectiveness Level	9.0
3.	Produktivitas B/M Petikemas -Gross Productivity of Container B/M -Gross	8.0
4.	Produktivitas B/M – Curah Productivity of B/M - Bulk	9.0

Agenda Keenam
Sixth Agenda

Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.

Approval of delegation of authority to the Board of Commissioners to approve if there are actions that result in changes to investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as does.

Keputusan:

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak merubah total nilai investasi.

Resolution:

Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to give approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as does not change the investment program/item and does not exceed the investment total value.

Keterangan:

Karena seluruh saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia maka tidak terdapat hasil *polling* setuju, tidak setuju dan abstain.

Remarks:

Because all shares are owned by the Republic of Indonesia, there are no pooling results of agree, disagree or abstain.

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS RKAP TAHUN 2023

FOLLOW-UP ON GMS SHAREHOLDERS' DIRECTION FOR 2023 RKAP

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
1.	<p>RKAP yang disahkan merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan perusahaan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). RKAP tersebut termasuk di dalamnya program Manajemen Risiko agar dirinci menjadi program dan target bulanan dan triwulanan untuk memudahkan <i>monitoring</i> dan evaluasi pencapaiannya, serta dilakukan <i>cascading</i> ke seluruh jajaran Perseroan.</p> <p>The approved RKAP is a guideline for Board of Directors in carrying out business activities and a guideline for Board of Commissioners in carrying out supervisory duties in 2023 (two thousand twenty-three). The RKAP includes the Risk Management program to be broken down into monthly and quarterly programs and targets to facilitate monitoring and evaluation of achievements, as well as cascading to all levels of the Company.</p>	<p>Penyusunan RKAP yang disahkan oleh Direksi telah menggunakan <i>Risk Based Budgeting</i> dan Dokumen RKAP telah dilengkapi dengan rencana target program Manajemen Risiko untuk memudahkan pencapaiannya.</p> <p>The preparation of RKAP approved by Board of Directors has used Risk Based Budgeting and RKAP Document has been equipped with Risk Management program target plan to facilitate its achievement.</p>



No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
2.	<p>Berkomitmen untuk mencapai target-target RKAP 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan tetap melaksanakan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCGI).</p> <p>Committed to achieving the 2023 (two thousand twenty-three) RKAP and Key Performance Indicators (KPI) targets while continuing to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG).</p>	<p>Telah dilakukan pengesahan Kontrak Manajemen atas KPI Direksi secara Kolegial, KPI Direksi secara Individual, KPI <i>Group</i>, Regional dan KPI <i>Subholding</i> Tahun 2023 yang memuat target-target sesuai dengan acuan RKAP 2023.</p> <p>The Management Contract has been ratified for the Board of Directors Collegial KPIs, Board of Directors Individual KPIs, Group KPIs, Regional s and Subholding KPIs for 2023 which contain targets in accordance with the 2023 RKAP reference.</p>
3.	<p>Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan lainnya agar diajukan secara tersendiri dengan dilengkapi sekurang-kurangnya tanggapan Dewan Komisaris, Pakta Integritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi, dan kajian risiko.</p> <p>The Board of Directors' actions that require approval from the GMS in accordance with the Articles of Association and Other Regulations must be submitted separately accompanied by at least the Board of Commissioners' responses, the Board of Directors' Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies and risk studies.</p>	<p>Dalam permintaan persetujuan RUPS atas keputusan strategis Direksi telah dilengkapi dengan tanggapan Dewan Komisaris, Pakta Integritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi, dan kajian risiko.</p> <p>The Board of Directors' actions that require approval from the GMS in accordance with the Articles of Association and Other Regulations must be submitted separately accompanied by at least the Board of Commissioners' responses, the Board of Directors' Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies and risk studies.</p>
4.	<p>Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, serta saran dan rekomendasi auditor, baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) maupun tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham.</p> <p>Board of Directors should follow up and complete the findings, as well as suggestions and recommendations from the auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) in 2022 (two thousand twenty-two) and in previous years. Follow-up on the completion of auditor's findings/suggestions should be comprehensively discussed with Board of Commissioners and reported in writing to Shareholders</p>	<p>Telah dilaksanakan <i>monitoring</i> tindak lanjut LHP BPK dan disampaikan pemenuhan dokumen sesuai dengan rekomendasi temuan BPK dengan <i>progress</i> 83,25% pada Semester II Tahun 2022, 66,67% untuk temuan KAP dan 61% untuk <i>monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA SPI pada Semester I Tahun 2023.</p> <p>Koordinasi dengan Unit kerja terkait dalam rangka pemenuhan dokumen rekomendasi BPK, KAP dan LHA SPI yang masih Belum Koordinasi dengan BPK Sesuai untuk dan kegiatan <i>monitoring</i> Tahun 2023 serta <i>monitoring</i> tindak lanjut LHA SPI secara berkala.</p> <p>Follow-up monitoring of LHP BPK has been carried out and the fulfillment of documents in accordance with the recommendations of BPK findings with a progress of 83.25% in the second semester of 2022, 66.67% for KAP findings and 61% for monitoring Follow-up of LHA SPI recommendations in the first semester of 2023.</p> <p>Coordination with related work units in order to fulfill the documents of BPK, KAP and LHA SPI recommendations that are still not fulfilled, coordination with BPK for monitoring activities in 2023 as well as monitoring the follow-up of LHA SPI periodically.</p>
5.	<p>Memastikan pemenuhan ketentuan terkait manajemen risiko pada perusahaan dan anak perusahaan dengan mengacu pada ketentuan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, termasuk melakukan peningkatan tingkat kematangan manajemen risiko/RMI secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada Kementerian BUMN. Untuk hasil penilaian tingkat risiko/RMI tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) agar disampaikan paling lambat pertengahan Triwulan III tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).</p> <p>Ensure the fulfillment of provisions related to risk management in companies and subsidiaries by referring to the SOE Ministerial Regulation Number PER-5/MBU/09/2022 concerning Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises, including periodically increasing the level of maturity of risk management/RMI and the results reported to the SOE Ministry. For the assessment results of risk level/RMI in 2022 (two thousand twenty-two) to be submitted no later than the middle of the third quarter of 2023 (two thousand twenty-three).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan paparan pada Rakodir 24 Oktober 2022 sehubungan dengan Pembahasan tindak lanjut PER-5 BUMN 2022 dan disusun Berita Acara Kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Telah disampaikan surat Hasil Pelaksanaan <i>Self Assessment</i> atas Kondisi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terhadap Ketentuan-Ketentuan dalam PER-5/MBU/09/2022 kepada Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN melalui Surat Direktur Utama Nomor PW.05.01/4/11/1/MRIO/UTMA/PLND-22. 3. Telah dilakukan penyusunan Hasil Pemetaan Pemenuhan Pedoman Manajemen Risiko sebagaimana PER-5/MBU/09/2022. <ol style="list-style-type: none"> 1. A presentation was made at the Board meeting on October 24, 2022 in connection with the discussion of the follow-up to PER-5 BUMN 2022 and the Minutes of Agreement between Board of Directors and Board of Commissioners were prepared. 2. A letter on the Self Assessment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Conditions against the Provisions in PER-5/MBU/09/2022 has been submitted to the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs through the President Director's Letter Number PW.05.01/4/11/1/MRIO/UTMA/PLND-22. 3. The preparation of Mapping Results of Fulfillment of Risk Management Guidelines as PER-5/MBU/09/2022 has been carried out.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
6.	<p>Menyampaikan laporan manajemen risiko, tata kelola, dan audit internal yang menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala triwulanan dan tahunan. Submitting risk management, governance, and internal audit reports that become an integral part of quarterly and annual reports.</p>	<p>Telah dilaksanakan penyampaian laporan manajemen risiko, tata kelola, dan audit internal secara berkala yang menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan tahunan. Risk management, governance, and internal audit reports have been submitted periodically as an integral part of the quarterly and annual reports.</p>
7.	<p>Melakukan langkah-langkah efisiensi di segala bidang dengan tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan sehingga tingkat realisasi biaya tidak lebih tinggi dari tingkat realisasi pendapatan. Conduct efficiency measures in all fields while maintaining productivity and service quality so that the level of cost realization is not higher than the level of revenue realization.</p>	<p>Telah dilakukan proses anggaran sesuai dengan pengendalian No HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 dan setiap bulan dilakukan evaluasi pencapaian kinerja keuangan Regional dan <i>Subholding</i> untuk memastikan tercapainya target sesuai RKAP Tahun 2023. The budget process has been carried out in accordance with control No. HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 and every month an evaluation of the achievement of Regional and Subholding financial performance is carried out to ensure the achievement of targets according to the 2023 RKAP.</p>
8.	<p>Pelaksanaan Investasi agar memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan perusahaan dan berpedoman pada rencananya (<i>cost & schedule</i>) serta dijaga supaya tidak terjadi <i>cost overrun</i>, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan targetnya. Investment should pay attention to the priority scale, the Company's financial capability and be guided by the plan (<i>cost & schedule</i>) and be maintained in order to avoid cost overrun and can be completed according to the target.</p>	<p>Telah disampaikan kepada <i>Group</i>, Regional, <i>Subholding</i> dan Anak Perusahaan untuk merencanakan pelaksanaan pekerjaan investasi lebih matang setelah melakukan optimalisasi aset yang ada. Has been conveyed to Group, Regional, Subholding and Subsidiaries to plan the implementation of investment work more carefully after optimizing existing assets.</p>
9.	<p>Direksi agar melaporkan realisasi program <i>blueprint</i> amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 (dua ribu enam belas) tentang Penyandang Disabilitas untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta menyusun dan melaksanakan strategi implementasinya pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Apabila <i>blueprint</i> dimaksud belum disusun, Direksi diminta untuk memenuhinya pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dimana dapat dilakukan melalui kolaborasi/<i>benchmarking</i> dengan BUMN lain, sekaligus mengakselerasi implementasinya pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Board of Directors is required to report the realization of blueprint program mandated by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities for 2023 (two thousand twenty-three), as well as prepared and carry out the implementation strategy in 2023 (two thousand twenty-three). If the said blueprint has not been prepared, Board of Directors is asked to fulfill it in 2023 (two thousand twenty-three), which can be done through collaboration/<i>benchmarking</i> with other SOEs, as well as accelerating its implementation in 2023 (two thousand twenty-three).</p>	<p>Telah dilakukan rekrutmen untuk disabilitas di masing-masing Pelindo sebelum dilakukan <i>merger</i> dan saat ini setelah merger terdapat kebijakan minus <i>growth</i> untuk pertumbuhan pegawai sehingga tidak dilakukan rekrutmen pegawai lagi. Recruitment has been carried out for persons with disability in each Pelindo before the merger and after the merger there was a minus growth policy for employee growth so that no more employee recruitment was carried out.</p>
10.	<p>Direksi agar melengkapi Data Pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN pada portal <i>Human Capital</i> BUMN. Board of Directors is required to complete data on SOE Management, SOE Subsidiaries, and SOE Consolidated Affiliated Companies and Talents on the SOE Human Capital portal.</p>	<p>Telah dilakukan <i>updating</i> data pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi secara berkala di portal <i>Human Capital</i> BUMN The data on SOE management, SOE Subsidiaries, and Affiliated Companies data has been periodically updated on the SOE Human Capital portal.</p>
11.	<p>Direksi agar meningkatkan pembinaan anak perusahaan sehingga kinerjanya diharapkan senantiasa tumbuh dengan baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan Induk. Board of Directors should improve the development of subsidiaries, so that their performance can continue to grow well and make a positive contribution to the parent Company.</p>	<p>Telah dilaksanakan pembinaan anak perusahaan salah satunya melalui program <i>Business Performance Review</i> secara berkala oleh <i>Group Manajemen Portfolio</i> Anak Perusahaan untuk memastikan kinerja anak perusahaan senantiasa tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan Induk. Subsidiary management has been carried out, one of which is through the Business Performance Review program periodically by the Subsidiary Portfolio Management Group to ensure that the subsidiary's performance continues to grow and make a positive contribution to the Parent Company.</p>



No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
12.	<p>Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya minggu ke-1 April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan melakukan <i>Audit Upon Procedure</i> (AUP) atas paket informasi laporan audit dan selanjutnya menyampaikan beserta laporan audit paling lambat minggu ke-2 April 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Submitting the Company's Annual Report including the Financial Statements for 2022 (two thousand twenty two) Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm no later than the 1st week of April 2023 (two thousand twenty three) and conducting Audit Upon Procedure (AUP) on the audit report information package and then submitting it along with the audit report no later than the 2nd week of April 2023 (two thousand twenty three).</p>	<p>Telah disampaikan kepada Pemegang Saham atas Laporan Audit Tahunan beserta Laporan <i>Audit Upon Procedure</i> (AUP) sebelum jatuh tempo melalui <i>upload</i> di sistem BUMN dan melalui <i>Email</i>. The Annual Audit Report and Audit Upon Procedure (AUP) Report have been submitted to the Shareholders before the due date through uploading in the SOE system and via Email.</p>
13.	<p>Mengimplementasikan hal-hal terkait aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), antara lain: Implementing matters related to Social and Environmental Responsibility (SER) aspects, among others:</p> <p>a. Menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran TJSL dengan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: RIS-22/DSI.MBU.B/12/2022; Menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran TJSL dengan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: RIS-22/DSI.MBU.B/12/2022;</p> <p>b. Memastikan bahwa TJSL telah menjadi <i>tools</i> bagi Direksi untuk memitigasi dampak risiko usaha perusahaan dan menjamin <i>sustainability</i> perusahaan; Ensure that SERT has become a tool for Board of Directors to mitigate the impact of the Company's business risks and ensure the Company's sustainability;</p> <p>c. Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta memberikan pembinaan terhadap UMK; Optimizing the implementation of Micro and Small Enterprise (MSE) Funding program billing and providing guidance to MSEs;</p> <p>d. Menyusun program TJSL yang lebih kreatif dan berdampak lebih besar untuk selanjutnya diukur kemanfaatannya melalui <i>social return on investment</i>; Develop more creative SER programs that have greater impact, and then measure the benefits through social return on investment;</p>	<p>Rekomendasi Asdep TJSL Tahun 2022 telah dilaksanakan. The Deputy Assistant SER Recommendations for 2022 have been implemented.</p> <p>Perusahaan telah membuat program-program untuk mitigasi dampak antara lain yang berkaitan dengan proyek pembangunan Pelabuhan di MNP, Benoa dan Kijing serta untuk mengurangi emisi <i>carbon</i> dengan Rehabilitasi dan Comdev <i>Mangrove</i> yang dilakukan berdasarkan PKS dengan Kemenko Marves, KLHK, dan KKP. The Company has made programs to mitigate impacts, among others, related to port development projects in MNP, Benoa and Kijing and to reduce carbon emissions with Mangrove Rehabilitation and Comdev carried out based on PKS with the Coordinating Ministry for Marves, KLHK, and KKP.</p> <p>Pelaksanaan penagihan telah diupayakan secara optimal dengan memprioritaskan tindak lanjut penagihan kepada UMK yang memiliki piutang agar berdampak maksimal, sementara pembinaan terhadap UMK dilakukan melalui 3 program yaitu Pelatihan dan Sertifikasi Usaha UMK, Keikutsertaan Pameran UMK dan Bantuan Peningkatan Kapasitas Usaha. Kerja sama pembinaan UMK juga dilakukan dengan Kolaborasi BUMN (Sarinah). The implementation of billing has been pursued optimally by prioritizing follow-up billing to MSEs that have receivables for maximum impact, while coaching for MSEs is carried out through 3 programs, namely MSE Business Training and Certification, MSE Exhibition Participation and Business Capacity Building Assistance. Cooperation in fostering MSEs is also carried out with SOE Collaboration (Sarinah).</p> <p>Program TJSL telah disusun untuk memberikan dampak bagi masyarakat dan diukur kemanfaatannya melalui SROI, sampai dengan Semester 1 sudah terdapat 3 Program yang diukur SROI yaitu Program TJSL Kampung Warna Warni di Surabaya, Program Usaha <i>Laundry</i> di Sungai Bundung Laut dan Program Usaha Jajanan Pasar di Sungai Limau. SER programs have been prepared to have an impact on the community and their benefits are measured through SROI, up to the first semester there have been 3 programs measured by SROI, namely the SER Program Kampung Warna Warni in Surabaya, Laundry Business Program in Bundung Laut river and Market Snack Business Program in Limau river.</p>

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
	<p>e. Memprioritaskan program-program <i>creating shared values</i> sebagai program prioritas.</p> <p>Prioritize creating shared values as a priority program.</p>	<p>Telah terdapat 4 Program TJSL yang menekankan CSV di Tahun 2023 yaitu Program Rehabilitasi dan Comdev <i>Mangrove</i>, Program Pelatihan K3 Komunitas Pelabuhan, Program Rehabilitasi Konservasi Kawasan Pesisir dan program TJSL Pada Proyek Strategis Pelabuhan.</p> <p>There were 4 SER programs that emphasize CSV in 2023, namely Mangrove Rehabilitation and Comdev Program, Port Community OHS Training Program, Coastal Area Conservation Rehabilitation Program and SER program on Port Strategic Projects.</p>
<p>14.</p>	<p>Direksi agar menyusun dan menerapkan <i>Master Plan</i> Teknologi Informasi, melakukan <i>Asesmen IT Maturity Level</i>, <i>Asesmen Transformasi Digital</i>, dan berpartisipasi dalam Program <i>Digital Talent</i> BUMN dan melaporkan dalam laporan berkala triwulanan dan tahunan.</p> <p>Board of Directors should prepare and implement an Information Technology Master Plan, conduct an IT Maturity Level Assessment, Digital Transformation Assessment, and participate in the SOE Digital Talent Program and report in quarterly and annual periodic reports.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Dokumen IT <i>Master plan</i> yang telah disahkan dan disosialisasikan pada tanggal 29 Desember 2022, ILCS telah masuk ke dalam anggota IT Forum dan Direksi yang terlibat dalam Implementasi IT telah terlibat dalam <i>steering committee</i>. 2. Prioritisasi investasi IT telah tertuang dalam <i>Master Plan</i> 2022 2026. 3. Telah terdapat aplikasi yang digunakan untuk memonitor kinerja sistem IT dan kinerja operasional di lingkungan PT Pelindo yaitu aplikasi OPMAN. <ol style="list-style-type: none"> 1. In the IT Master plan document that was approved and socialized on December 29, 2022, ILCS has been included in the IT Forum members and Board of Directors involved in IT Implementation have been included in the steering committee. 2. IT investment prioritization has been stated in the 2022 2026 IT Master Plan. 3. There is an application used to monitor the performance of IT systems and operational performance within PT Pelindo, namely the OPMAN application.
<p>15.</p>	<p>Melakukan upaya pengamanan aset untuk mencegah terjadinya penelantaran aset yang berimplikasi pada timbulnya sengketa hukum di masa mendatang, serta mengedepankan proses mediasi penyelesaian masalah hukum antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi, sebelum permasalahan tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan.</p> <p>Conducting asset safeguarding efforts to prevent asset abandonment with implications for future legal disputes, as well as prioritizing the mediation process for resolving legal issues between/relating to SOEs/SOE subsidiaries/affiliated companies, before the issue is resolved through the judiciary.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan pembahasan dengan PT PLN terkait dengan pembahasan beberapa permasalahan hukum pada tanggal 7 Juli 2023. 2. Telah dilakukan pembahasan dengan PT ASDP terkait dengan pembahasan permasalahan di Bitung pada tanggal 16 Juni 2023. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion has been held with PT PLN related to several legal issues on July 7, 2023. 2. Discussion has been held with PT ASDP related to issues in Bitung on June 16, 2023.
<p>16.</p>	<p>Direksi agar menyusun <i>roadmap</i> penggunaan produk dalam Negeri (P3DN) dan membentuk Tim P3DN serta SPI BUMN melakukan <i>monitoring/reviu</i> atas pelaksanaan program tersebut dan melaporkannya dalam laporan berkala triwulanan dan tahunan.</p> <p>Board of Directors should prepare a roadmap for the use of domestic products (P3DN) and form a P3DN Team and SOE SPI should monitor/review the program implementation and report it in quarterly and annual periodic reports.</p>	<p>Tim P3DN PT Pelindo telah dibentuk melalui SK Tim P3DN nomor PD.01/27/4/1/EKTG/SDMA/PLND-22 tanggal 27 April 2022. Adapun <i>draft roadmap</i> dan kebijakan implementasi penggunaan produk dalam negeri juga telah selesai dibuat dan per tanggal 30 Juni 2023 masih dalam tahapan sirkuler Verbal di level BOD. SPI telah melakukan <i>reviu</i> realisasi P3DN dalam proyek-proyek yang sedang dilaksanakan oleh Perusahaan.</p> <p>PT Pelindo's P3DN Team has been formed through the P3DN Team Decree number PD.01/27/4/1/EKTG/SDMA/PLND-22 dated April 27, 2022. The draft roadmap and implementation policy for the use of domestic products have also been completed and as of June 30, 2023 are still in the circular stage. Verbal at the BOD level. SPI has reviewed the realization of P3DN in projects being implemented by the Company.</p>



No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
17.	<p>Direksi agar melakukan evaluasi atas pengelolaan DPPK termasuk pengelolaan aset likuid dan non likuid DPPK serta menyusun <i>roadmap</i>/rencana inisiatif perbaikan/penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun bagi BUMN.</p> <p>Board of Directors should evaluate the management of DPPK including the management of liquid and non-liquid assets of DPPK and prepare a roadmap/plan for improvement/ completion initiatives in accordance with the laws and regulations in pension funds for SOE.</p>	<p>Sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko yang efektif, serta dalam rangka upaya perbaikan tingkat kesehatan dan optimalisasi pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja ("DPPK") dengan program manfaat pasti di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Direksi telah menunjuk konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan Uji Tuntas Evaluasi Tingkat Kesehatan dan Pengelolaan Dana Pensiun. Selanjutnya, tindak lanjut atas Laporan Uji Tuntas Tingkat Kesehatan tersebut dituangkan ke dalam penyusunan <i>Roadmap</i> Penyehatan Dana Pensiun.</p> <p>As part of the implementation of good governance, the implementation of effective risk management, as well as to improve the health level and optimize the management of the Employer Pension Fund ("DPPK") with a defined benefit program within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Board of Directors has appointed a consultant in the implementation of Due Diligence Evaluation of Health Level and Pension Fund Management. Furthermore, the follow-up to the Health Level Due Diligence Report is outlined in the preparation of Pension Fund Restructuring Roadmap.</p>
18.	<p>Melaksanakan <i>monitoring</i> atas risiko dari kurs mata uang asing dan upaya mitigasi dalam bentuk <i>hedging</i> atau opsi lain agar tetap terkendali serta merencanakan alternatif strategi mitigasi risiko yang terbaik serta menyiapkan kajian <i>stress test</i> untuk mengantisipasi dampak selisih kurs terhadap pencapaian kinerja Perseroan.</p> <p>Carry out monitoring of foreign exchange risks and mitigation efforts in the form of hedging or other options to keep it under control and plan the best alternative risk mitigation strategies and prepare stress test studies to anticipate the impact of foreign exchange differences on the achievement of the Company's performance.</p>	<p>Tim Akuntansi Pelindo telah melakukan <i>assessment</i> dampak selisih kurs setiap bulannya dengan memperhitungkan selisih kurs di periode berjalan serta realisasi <i>hedge</i> Konsultan juga ditunjuk untuk <i>mensupport</i> perhitungan <i>hedge accounting</i> di periode Triwulan III dan IV tahun 2023.</p> <p>Pelindo Accounting Team has conducted an assessment of the impact of foreign exchange every month by taking into account the difference in exchange rates in the current period and the realization of hedge Consultant was also appointed to support the calculation of hedge accounting in the third and fourth quarter of 2023.</p>
19.	<p>Berperan aktif dalam implementasi <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) dan melaksanakan Pembinaan tata kelola pelabuhan sebagai bagian dari Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan dan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam memberikan peningkatan kualitas layanan dan efektivitas waktu serta efisiensi biaya di Kawasan Pelabuhan.</p> <p>Playing an active role in the implementation of National Logistic Ecosystem (NLE) and carrying out reforms to port governance as part of the Action to Reduce Bureaucracy and Service Improvement in Port Area and the Action on National Strategy for Corruption Prevention (Stranas PK) in impacting time effectiveness and cost efficiency in Port Area.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilaksanakan <i>Alignment Meeting</i> di Surabaya tanggal 24-25 Maret 2023 bersama <i>Subholding</i> dan Regional. ▪ Telah dilaksanakan Pembahasan <i>timeline</i> dan <i>balancing resource</i> IT pada tanggal 10-11 April 2023. ▪ Telah dilaksanakan <i>Kick Off Meeting</i> yang dihadiri oleh Cabang-cabang untuk pengarah awal Stranas PK Tahun 2023. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alignment Meeting has been held in Surabaya on March 24-25, 2023 with Subholding and Regional. ▪ Discussion on timeline and balancing of IT resources was held on April 10-11, 2023. ▪ Kick Off Meeting attended by Branches for the initial briefing of Stranas PK 2023.
20.	<p>KPI PMN Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah disusun agar dapat dipenuhi melalui penyelesaian target PMN TA 2021 (dua ribu dua puluh satu) sesuai dengan perencanaan yang telah disusun baik dari sisi <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Manfaat. PMN KPIs for 2023 (two thousand twenty-three) that have been prepared should be fulfilled through the completion of PMN targets for FY 2021 (two thousand twenty-one) in accordance with the plans that have been prepared both in terms of Output and Outcome Benefits.</p>	<p>KPI PMN telah tertuang pada KPI Direksi secara Kolegial dengan indikator "Pencapaian. Skor KPI PMN BMTH" yang di-<i>cascade</i> ke KPI Direksi secara Individual, KPI <i>Group</i> Pengendalian Proyek, dan KPI Regional 3 serta <i>dimonitoring</i> capaiannya secara periodik. PMN KPIs have been contained in the KPIs of Board of Directors Collegially with the indicator "Achievement of BMTH PMN KPI Score" which is cascaded to Individual Board of Directors KPIs, Project Control Group KPIs, and Regional 3 KPIs and monitored periodically for achievements.</p>
21.	<p>Menyusun langkah-langkah untuk peningkatan kinerja operasional terutama pada cabang, anak dan cucu perusahaan yang kinerjanya masih belum optimal.</p> <p>Develop measures to improve operational performance, especially in branches, subsidiaries and sub- subsidiaries whose performance is still not optimal.</p>	<p>Telah disusun langkah-langkah peningkatan kinerja operasional pada cabang, anak, dan cucu perusahaan yang kinerjanya belum optimal dan dilakukan evaluasi secara berkala dalam <i>Business Performance Review</i>.</p> <p>Measures have been developed to improve operational performance at branches, subsidiaries, and sub- subsidiaries whose performance is not yet optimal and are evaluated regularly in the Business Performance Review.</p>

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
22.	<p>Untuk setiap kerja sama investasi dan pengoperasian Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang akan dilaksanakan diminta agar dapat meningkatkan pelayanan bisnis bertaraf internasional dan mampu mewujudkan <i>service excellence</i> di rantai logistik, mewujudkan komersialisasi jasa untuk meningkatkan penciptaan nilai, mendorong terwujudnya kinerja operasional, serta mendukung program Pemerintah dalam rangka penurunan biaya logistik nasional.</p> <p>For each investment cooperation and operation of the Port of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), is requested to improve international standard business services and be able to realize service excellence in the logistics chain, realize commercialization of services to increase value creation, encourage the realization of operational performance, and support Government programs in order to reduce national logistics costs.</p>	<p>Akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian (<i>Construction & Operation Agreement "CoA"</i>) Terminal Petikemas Belawan <i>New Container Terminal</i> (BNCT) oleh Pelindo Group dengan NewCo (perusahaan patungan antara Pelindo Group dengan PT INA DPWorld Investment), estimasi <i>signing</i> pada minggu ke-4 Juli 2023.</p> <p>The Construction & Operation Agreement (CoA) for Belawan New Container Terminal (BNCT) will be signed by Pelindo Group with NewCo (a joint venture between Pelindo Group and PT INA DPWorld Investment), estimated signing in the 4th week of July 2023.</p>
23.	<p>Dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berfokus pada penurunan emisi karbon atas pengelolaan Pelabuhan, Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris agar melaksanakan inisiatif strategis terkait Implementasi <i>Green Port</i> secara konsisten dan memperluas penerapan <i>Green Port</i> pada Pelabuhan lainnya.</p> <p>In order to support the Sustainable Development Objectives that focus on reducing carbon emissions from Port management, Board of Directors under the Board of Commissioners' supervision to consistently implement strategic initiatives related to Green Port and expand Green Port implementation to other Ports.</p>	<p>Proses Penyusunan Perdir dan Kebijakan Berkelanjutan Pelindo dan berkonsolidasi dengan <i>Subholding</i> untuk penyusunan program-program berkelanjutan disampaikan penyusunan <i>Roadmap</i> Rekarbonisasi oleh IDSurvey.</p> <p>The drafting process of Perdir and Pelindo's Sustainable Policies and consolidation with Subholding for the preparation of sustainable programs was submitted to the preparation of Recarbonization Roadmap by IDSurvey.</p>

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Pelindo Tower, Jl Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta Utara

ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2022 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

The GMS was held on:

Day/Date : Monday, June 19, 2023
Time : 14.00 WIB - finished
Place : Pelindo Tower, Jl Yos Sudarso No. 9, Koja, North Jakarta

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 DAN REALISASINYA

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT THE ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2022 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1.	Agus Suhartono	Komisaris Utama President Commissioner	Hadir Present
2.	Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Hadir Present
3.	Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Hadir Present
4.	Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Hadir Present
5.	Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
6.	Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present



No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
7.	Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Tidak Hadir Absent
8.	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
9.	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
10.	Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Hadir Present
11.	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Hadir Present
12.	Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Hadir Present
13.	Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Hadir Present
16.	Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum Human Capital and General Affairs Director	Hadir Present

PIHAK INDEPENDEN

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sehingga belum memerlukan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara dalam pelaksanaan RUPS. Pelindo telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

INDEPENDENT PARTY

Until December 31, 2023, Pelindo has not listed its shares on the Stock Exchange and, therefore, does not require an independent party to count the votes in the GMS. Pelindo has appointed an independent party, Notary Nanda Fauz Iwan, to prepare the deed of GMS results.

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

RESOLUTION AND REALIZATION OF THE GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2022 ANNUAL REPORT

Agenda Pertama First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report and the Social and Environmental Responsibility Implementation Report for Fiscal Year 2022 (two thousand twenty-two), and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2022 (two thousand twenty-two).

Keputusan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas- Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sesuai laporannya Nomor: 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 tanggal- 30-04-2023 (tiga puluh April dua ribu dua puluh tiga) dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 - Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal- 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) ditutup dengan:
 - Total Aset sebesar Rp 118.350.577.906.358,00 (seratus delapan belas triliun tiga ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

Resolution:

- To approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Social and Environmental Responsibility Implementation Report for Fiscal Year 2022 (two thousand twenty-two), and to approve the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2022 (two thousand twenty-two) ending on 12-31-2022 (December thirty-one, two thousand twenty-two), which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) in accordance with its report Number: 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 dated 04-30-2023 (April thirty-two thousand twenty-three) with "unqualified" opinion, with the following main points:
 - Consolidated Statement of Financial Position PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the year ended 12-31-2022 (December thirty-one, two thousand twenty-two) closed with:
 - Total Assets of Rp118,350,577,906,358.00 (one hundred eighteen trillion three hundred fifty billion five hundred seventy seven million nine hundred six thousand three hundred fifty eight rupiah);

- Total Liabilitas sebesar Rp75.545.885.132.218,00 (tujuh puluh lima triliun lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah); dan
- Ekuitas Rp42.804.692.774.140,00 (empat puluh dua triliun delapan ratus empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah)

b. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian
Laba Setelah Pajak Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp3.908.469.857.392,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

- Total Liabilities of Rp75,545,885,132,218.00 (seventy-five trillion five hundred forty-five billion eight hundred eighty-five million one hundred thirty-two thousand two hundred eighteen rupiah); and
- Equity of Rp42,804,692,774,140.00 (forty-two trillion eight hundred four billion six hundred ninety-two million seven hundred seventy-four thousand one hundred forty rupiahs).

b. Consolidated Statement of Profit (Loss)
Consolidated Profit After Tax of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the year ended 12/31-2022 (thirty one December two thousand twenty two) amounting to Rp3,908,469,857,392.00 (three trillion nine hundred eight billion four hundred sixty nine million eight hundred fifty seven thousand three hundred ninety two rupiah).

2. To grant full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of Board of Directors for the management of the Company and Board of Commissioners for the supervision of the Company during the fiscal year ended on 12/31-2022 (thirty-one December two thousand twenty-two), to the extent that such actions are not criminal offenses and have been reflected in the aforementioned reports.

Agenda Kedua Second Agenda

Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.

Ratification of Financial Report of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2022.

Keputusan:

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sesuai laporannya Nomor: 01295/2.1032/AU.2/06/0697-3/1/IV/2023 tanggal 30-04-2023 (tiga puluh April dua ribu dua puluh tiga) dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 - a. Posisi Keuangan
Posisi Keuangan Program PUMK per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) ditutup dengan jumlah Aset serta Kewajiban dan Aset Bersih sebesar Rp135.085.467.847,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)
 - b. Efektivitas Penyaluran Dana Program PUMK
Realisasi dana Program PUMK per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) ditutup dengan jumlah Dana Tersedia sebesar Rp113.482.426.709,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan jumlah Dana Disalurkan sebesar Rp79.837.062.832,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Resolution:

1. To ratify the Financial Report of PUMK Program for Fiscal Year 2022 (two thousand twenty-two) ending on 12-31-2022 (thirty-one December two thousand twenty-two) which forms part of the Social and Environmental Responsibility Report audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) in accordance with its report Number: 01295/2.1032/AU.2 /06/0697-3/1/IV/2023 dated 04-30-2023 (thirty April two thousand twenty-three) with "unqualified" opinion, with the following points:
 - a. Financial Position
Financial Position of PUMK Program as of 12-31-2022 (thirty-one December two thousand twenty-two) closed with total Assets and Liabilities and Net Assets of Rp135,085,467,847.00 (one hundred thirty-five billion eighty-five million four hundred sixty-seven thousand eight hundred forty-seven rupiah).
 - b. Effectiveness of PUMK Program Fund Disbursement
The realization of PUMK Program funds as of 12-31-2022 (thirty-one December two thousand twenty-two) was closed with total Available Funds of Rp113,482,426,709.00 (one hundred thirteen billion four hundred eighty-two million four hundred twenty-six thousand seven hundred nine rupiah) and total Disbursed Funds of Rp79,837,062,832.00 (seventy-nine billion eight hundred thirty-seven million sixty-two thousand eight hundred thirty-two rupiah).
2. To grant full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all Members of Board of Directors for the management of the Company and Board of Commissioners for the supervision of the Company in the Micro and Small Business Funding Program that has been carried out in the Fiscal Year 2022 (two thousand twenty two) to the extent that such actions are not criminal offenses and have been reflected in the aforementioned reports.



Agenda Ketiga

Third Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2022.

Keputusan:

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp3.772.545.951.392,00 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.377.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) atau sebesar 36,51% (tiga puluh enam koma lima satu persen) dari laba bersih ditetapkan sebagai dividen tunai;
2. Sebesar Rp2.395.345.951.392,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 63,49% (enam puluh tiga koma empat persen) dari laba bersih ditetapkan sebagai cadangan.

Resolution:

Determining the use of Net Income Attribution of Owners of the Company's Parent Entity for Fiscal Year 2022 (two thousand twenty-two) in the amount of Rp3,772,545,951,392.00 (three trillion seven hundred seventy-two billion five hundred forty-five million nine hundred fifty-one thousand three hundred ninety-two rupiah) as follows:

1. Rp1,377,200,000,000.00 (one trillion three hundred seventy-seven billion two hundred million rupiah) or 36.51% (thirty-six point five one percent) of the net profit is designated as cash dividend;
2. Rp2,395,345,951,392.00 (two trillion three hundred ninety-five billion three hundred forty-five million nine hundred fifty-one thousand three hundred ninety-two rupiah) or 63.49% (sixty-three point four nine percent) of the net profit is designated as reserves.

Agenda Keempat

Fouth Agenda

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2023, dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for Fiscal Year 2023, and Tantiem for Fiscal Year 2022 for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Keputusan:

Besaran Tantiem Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan ditetapkan secara tersendiri.

Resolution:

The amount of Tantiem for Fiscal Year 2022 (two thousand twenty-two), Salary for the Board of Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with Facilities and Other Benefits for Fiscal Year 2023 (two thousand twenty-three) will be determined separately.

Agenda Kelima

Fifth Agenda

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023. Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements and Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2023.

Keputusan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Resolution:

1. To appoint Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 (two thousand twenty-three) and Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and Non PUMK for Fiscal Year 2023 (two thousand twenty-three).
2. To authorize Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for other periods in Fiscal Year 2023 (two thousand twenty-three) for the purpose and interest of the Company.
3. To delegate authority to Board of Commissioners to determine the amount of audit fees, additional scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm, as well as to determine a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) for any reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements as well as the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and other reports for Fiscal Year 2023 (two thousand twenty-three), including determining the audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.

Agenda Keenam
Sixth Agenda

Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara. Report on the Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds.

Keputusan:

Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk periode Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan ketentuan semua kegiatan dan penggunaan telah sesuai dengan Kajian Bersama PMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang tidak ditemukan adanya penyimpangan di kemudian hari

Resolution:

To accept the Report on the Realization of Additional Use of State Equity Capital Funds (PMN) originating from the State Budget for Fiscal Year 2021 (two thousand twenty-one) for the period of Fiscal Year 2022 (two thousand twenty-two) provided that all activities and uses are in accordance with the Joint Study of PMN and the Minister of SOEs Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, provided that no deviations are found in the future.

Keterangan:

Karena seluruh saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia maka tidak terdapat hasil *pooling* setuju, tidak setuju dan abstain.

Remarks:

Because all shares are owned by the Republic of Indonesia, there are no pooling results of agree, disagree or abstain.

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

FOLLOW-UP ON GMS SHAREHOLDERS' DIRECTION FOR RATIFICATION OF ANNUAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2022

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
1.	Mengupayakan peningkatan pendapatan usaha dari seluruh segmen usaha terutama untuk segmen Pendapatan Usaha yang capaiannya berada di bawah RKAP Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu Pelayanan Petikemas dan Pelayanan Kapal & Lainnya, serta melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi terhadap tren penurunan arus petikemas internasional. Strive to increase business income from all business segments, especially for the Business Income segment whose achievements are below the 2022 (two thousand twenty-two) RKAP, namely Container Services and Ship & Other Services, and take steps to anticipate and mitigate the downward trend in international container flows.	<ol style="list-style-type: none"> Sudah terealisasinya atas rute pelayaran baru. Dilakukan penyesuaian tarif pada sejumlah area pada Terminal Petikemas. <ol style="list-style-type: none"> New shipping routes have been realized. Tariff adjustments have been made to several areas in the Container Terminal.
2.	Melakukan langkah-langkah efisiensi di segala bidang (terutama beban KSMU) dengan tetap menjaga produktivitas termasuk kualitas pelayanan, serta menjaga rasio biaya operasional dan EBITDA margin agar tetap terkendali. Conduct efficiency measures in all fields (especially KSMU expenses) while maintaining productivity including service quality, as well as maintaining operational cost ratios and EBITDA margins to remain under control.	<p>Telah dilakukan evaluasi setiap bulannya terhadap semua beban usaha terutama beban KSMU dengan tetap menjaga rasio biaya operasional dan EBITDA Margin.</p> <p>Monthly evaluations have been carried out on all operating expenses, especially KSMU expenses, while maintaining the operating cost ratio and EBITDA Margin.</p>
3.	Meningkatkan pembinaan kepada Regional, <i>Subholding</i> , dan Anak Perusahaan bagi yang saat ini telah memberikan Laba agar kinerjanya semakin baik dan tumbuh, di samping itu bagi Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan yang masih mengalami kerugian agar disusun program dan inisiatif strategis sehingga kinerjanya dapat optimal dan memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi Perusahaan. Increase guidance to the Regional, Subholding, and Subsidiaries for those that are currently profitable so that their performance will improve and grow, while for Subsidiaries and Sub-Subsidiaries that are still experiencing losses, programs and strategic initiatives should be prepared so that their performance can be optimal and make a profitable contribution to the Company.	<p>Telah dilakukan evaluasi rutin <i>performance review</i> bulanan terhadap kinerja Regional, <i>Subholding</i>, dan Anak Perusahaan lainnya, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai Regional, <i>subholding</i>, dan Anak Perusahaan lainnya yang masih mengalami kerugian atau belum dapat mencapai target.</p> <p>There has been a routine monthly performance review evaluation of the performance of Regional, Subholding, and Subsidiaries, including discussions regarding Regional, Subholding, and Subsidiaries that are still experiencing losses or have not been able to achieve targets.</p>



No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
4.	<p>Dalam rangka menjaga likuiditas Perusahaan diminta untuk mengupayakan percepatan penagihan piutang usaha sehingga arus kas dari aktivitas operasi menjadi lebih baik.</p> <p>In order to maintain liquidity, the Company is requested to accelerate the collection of trade receivables for better cash flow from operating activities.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa sehubungan dengan upaya percepatan penagihan piutang usaha dan mitigasi risiko piutang usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero), maka akan diimplementasikan <i>locking system</i> kepada Pengguna Jasa yang memiliki piutang usaha yang telah jatuh tempo. 2. <i>Locking system</i> akan diterapkan untuk nota yang terbit mulai tanggal 1 Agustus 2023 secara lintas Regional dan <i>Subholding</i> di Lingkungan <i>Group</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan secara bertahap dikembangkan pada lingkup Anak/Cucu Perusahaan. <ol style="list-style-type: none"> 1. In connection with efforts to accelerate the collection of trade receivables and mitigate the risk of trade receivables of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), a locking system will be implemented for Service Users who have overdue trade receivables. 2. The locking system will be applied to notes issued starting August 1, 2023 across Regions and Subholdings within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group and gradually developed within the scope of Subsidiaries/Sub-Subsidiaries of the Company.
5.	<p>Menyusun kebijakan dan prosedur lindung nilai (<i>hedging</i>) serta melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dimaksud termasuk pula dalam penyesuaian standar akuntansi yang berkaitan dengan <i>hedging</i>.</p> <p>Develop hedging policies and procedures and conduct regular monitoring and evaluation of these policies, including adjustments to accounting standards related to hedging.</p>	<p><i>Update</i> kebijakan dan prosedur lindung nilai (<i>hedging</i>) dilakukan di tahun 2023 dengan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan aturan Akuntansi terkini dan menunjuk konsultan yang ahli di bidangnya untuk membantu menyusun kebijakan akuntansi ini.</p> <p>Update the hedging policies and procedures in 2023 by adjusting the policy in accordance with the latest Accounting rules and appointing consultants who are experts in their fields to help develop this accounting policy.</p>
6.	<p>Mengupayakan standarisasi proses bisnis dan standarisasi sistem terhadap layanan di cabang-cabang sehingga pengguna jasa dapat menerima pelayanan yang semakin baik dan memuaskan, serta standarisasi sistem keuangan dalam rangka peningkatan efektivitas transaksi <i>intercompany</i>.</p> <p>Pursuing business process and system standardisation for services at branches so that service users can receive better and more satisfactory services, as well as standardisation of financial systems in order to increase the effectiveness of interCompany transactions.</p>	<p>Telah tersedia beberapa kebijakan untuk standarisasi proses bisnis baik terkait pelayanan serta terkait keuangan seperti standarisasi COA pada laporan keuangan, Standarisasi sistem <i>back office</i> diseluruh dan Pusat.</p> <p>There are several policies in place to standardise business processes both service-related and financial-related such as COA standardisation on financial statements, standardisation of back office systems across all branches and centres.</p>
7.	<p>Melakukan inventarisasi atas kerja sama dengan pihak ketiga yang akan habis masa waktu kerja samanya sehingga pengajuannya tidak melampaui masa akhir jangka waktu kerja sama, serta memperhatikan kemanfaatan yang paling optimal bagi Perusahaan terhadap kerja sama yang akan diinisiasi.</p> <p>Conduct an inventory of cooperation with third parties that will expire so that the submission does not exceed the end of the cooperation period, and pay attention to the most optimal benefits for the Company for the cooperation that will be initiated.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan proses pemetaan atas seluruh kerja sama pada seluruh Regional. 2. Telah dilakukan sosialisasi terkait proses evaluasi dan usulan perpanjangan kerja sama dengan memperhatikan nilai bisnis dan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Direksi. <ol style="list-style-type: none"> 1. A mapping process of all corporations in all Regions has been conducted. 2. Socialisation has been carried out regarding the evaluation process and proposals for renewal of cooperation by taking into account business value and applicable provisions in the Board of Directors' Regulations.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
8.	<p>Mengingat nilai <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) pada Aspek Peningkatan Investasi yang belum mencapai target pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), diminta untuk melakukan percepatan realisasi investasi khususnya pada program investasi yang pencapaiannya masih rendah dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan berpedoman pada rencananya (<i>cost & schedule</i>), terutama untuk investasi yang merupakan proyek strategis dan proyek PMN, sehingga mampu berkontribusi positif secara langsung bagi kinerja keuangan dan operasional perusahaan serta memitigasi terjadinya <i>cost overrun</i>.</p> <p>Considering the value of Key Performance Indicators (KPI) in the Investment Improvement Aspect that has not reached the target in 2022 (two thousand twenty-two), it is requested to accelerate investment realisation, especially in investment programs whose achievements are still low while still paying attention to the priority scale and guided by the plan (<i>cost & schedule</i>), especially for investments that are strategic projects and PMN projects, so as to be able to contribute positively directly to the Company's financial and operational performance and mitigate cost overruns.</p>	<p>Telah dilakukan evaluasi atas hal-hal menyebabkan kinerja investasi belum mencapai target, kedepan akan dilakukan perencanaan yang lebih matang untuk pelaksanaan pekerjaan investasi, agar target penyelesaian dapat tercapai seperti kendala perizinan dan operasional.</p> <p>An evaluation has been carried out on matters causing investment performance to not reach the target, in the future more careful planning will be carried out for the implementation of investment work, so that completion targets can be achieved such as licensing and operational constraints.</p>
9.	<p>Memperkuat peran dan fungsi manajemen risiko melalui peningkatan efektivitas terhadap kapabilitas, organisasi, tata Kelola, proses dan kontrol untuk mengendalikan pencapaian kinerja keuangan.</p> <p>Strengthen the role and function of risk management by improving the effectiveness of capabilities, organisation, governance, processes and controls to drive the financial performance achievement.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Telah disusun Aspirasi Pemegang Saham terkait Perencanaan MR bagian <i>Sub Holding Gab holding Subholding Subholding</i> untuk tahun Buku 2023. Telah dilakukan <i>Benchmark</i> Penerapan MR kepada BRI. Telah dilakukan <i>Kick Off Risk Award</i> Tahun 2023 pada 29 Mei 2023 yang diikuti oleh seluruh Pelindo Group. Telah disusun klasifikasi dan kompetensi untuk kebutuhan FMR pada setiap level dan telah disampaikan ke Direktur SDM sebagai usulan sertifikasi tahun 2023: Telah dilakukan <i>mapping</i> oksisting kapabilitas <i>manpower</i> IMR pada Pelindo. Telah dilakukan <i>review</i> dan pemberian <i>feedback</i> atas Laporan Manajemen. Risiko Triwulan 1 Tahun 2023 dari <i>Regional Subholding</i> dan Anak Perusahaan <i>Non-Cluster</i>. Telah dilaksanakan program sertifikasi <i>Qualified Chief Rusk Officer</i> (QCRO) untuk level BOD-1: <ul style="list-style-type: none"> <i>Batch 1</i> pada 6-10 Maret 2023 <i>Batch 2</i> pada 13-18 Juni 2023 Telah dilaksanakan program sertifikasi QRMP bagi FMR Kantor Pusat pada 13-16 Juni 2023. <ol style="list-style-type: none"> Shareholders' Aspirations related to MR Planning of Sub Holding Gab section for 2023 Fiscal year have been compiled. MR Implementation Benchmark has been conducted to BRI. Kick Off 2023 Risk Award has been carried out on May 29, 2023 which was attended by the entire Pelindo Group. Classifications and competencies have been prepared for FMR needs at each level and have been submitted to the HC Director as a proposal for certification in 2023: Existing mapping of IMR manpower capability in Pelindo has been conducted. Review and feedback on the Risk Management Report for first quarter of 2023 from Regional Subholding and Non-Cluster Subsidiaries. Qualified Chief Rusk Officer (QCRO) certification program for BOD-1 level has been implemented: <ul style="list-style-type: none"> Batch 1 on March 6-10, 2023 Batch 2 on June 13-18, 2023 QRMP certification program for Head Office FMR has been conducted on June 13-16, 2023.
10.	<p>Mengkomunikasikan pelaksanaan Program TJSL BUMN kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program yang telah dilaksanakan BUMN, dan memperbaiki sistem pengelolaan piutang Program Pendanaan UMK sehingga angsuran tidak teridentifikasi tidak terjadi lagi.</p> <p>Communicating the implementation of SOE SER Programs to the community as a form of accountability for the programs that have been implemented by SOEs, and improving the receivables management system for the MSE Funding Program so that unidentified installments do not occur again.</p>	<p>Telah dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk Komunikasi dan Publikasi kegiatan TJSL tahun 2023 kepada masyarakat. Kegiatan TJSL juga sudah dilaporkan setiap tahunnya dalam <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i> yang dipublikasikan secara berkala di Web Perseroan.</p> <p>Collaboration with a third party has been carried out to communicate and publicise SER activities in 2023 to the community. SER activities have also been reported annually in the Annual Report and Sustainability Report which are published regularly on the Company's website.</p>



No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-up
11.	<p>Direksi dan Dewan Komisaris perlu memastikan agar setiap pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Board of Directors and Board of Commissioners need to ensure that every implementation of the Company's business activities is carried out with due regard to the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and sustainably by referring to the prevailing rules and regulations.</p>	<p>Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan <i>monitoring Area of Improvement</i> (Aoi) dengan capaian progres rata-rata 88%. <i>Monitoring</i> dilakukan sebagai salah bentuk persiapan pelaksanaan <i>assessment</i> GCG tahun selanjutnya agar perusahaan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap pedoman dan ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p>Board of Directors and Board of Commissioners have monitored Area of Improvement (Aoi) with an average progress of 88%. Monitoring is carried out as a form of preparation for the next year's GCG assessment to ensure the Company's compliance with applicable guidelines and regulations.</p>
12.	<p>Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap setiap temuan, catatan serta saran/rekomendasi baik dari auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI/BPK-RI termasuk instansi pengawasan berwenang lainnya) maupun auditor internal Perseroan yang belum dinyatakan selesai ditindaklanjuti. Progres tindak lanjut penyelesaian temuan-temuan dimaksud agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan disampaikan tertulis secara berkala kepada Pemegang Saham.</p> <p>Follow up and complete any findings, notes and suggestions/ recommendations from both external auditors (Public Accounting Firm/KAP, Financial and Development Supervisory Agency/BPKP, and Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia/BPK-RI including other authorised supervisory agencies) and internal auditors of the Company that have not been declared completed. Follow-up progress on the settlement of these findings should be discussed comprehensively with the Board of Commissioners and submitted in writing periodically to the Shareholders.</p>	<p>Telah dilaksanakan <i>monitoring</i> tindak lanjut LHP BPK dan disampaikan pemenuhan dokumen sesuai dengan rekomendasi temuan BPK dengan <i>progress</i> 83,25% pada Semester II Tahun 2022, 66,67% untuk temuan KAP dan 61% untuk <i>monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA SPI pada Semester I Tahun 2023.</p> <p>Koordinasi dengan Unit kerja terkait dalam rangka pemenuhan dokumen rekomendasi BPK, KAP dan LHA SPI yang masih Belum Sesuai dan Koordinasi dengan BPK untuk kegiatan <i>monitoring</i> Tahun 2023 serta <i>monitoring</i> tindak lanjut LHA SPI secara berkala.</p> <p>Laporan atas tindak lanjut hasil audit disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara periodik (triwulanan).</p> <p>Follow-up monitoring of BPK's LHP has been carried out and the fulfilment of documents in accordance with the recommendations of BPK findings with a progress of 83.25% in the second semester of 2022, 66.67% for KAP findings and 61% for monitoring Follow-up of SPI LHA Recommendations in the first semester of 2023.</p> <p>Coordination with related work units in order to fulfil BPK, KAP and LHA SPI recommendation documents that are still not in compliance and coordination with BPK for monitoring activities in 2023 as well as monitoring the follow-up of LHA SPI periodically.</p> <p>Report on the follow-up of audit results submitted to Board of Directors and Board of Commissioners periodically (quarterly).</p>
13.	<p>Menjaga konsistensi dalam melakukan <i>monitoring</i> dan <i>updating</i> data pada Portal BUMN, yakni Portal Silaba, Portal <i>Human Capital</i> (HC), Portal TJSL, dan Portal Publik. Progres pemutakhiran data dalam portal tersebut agar dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan.</p> <p>Maintain consistency in monitoring and updating data on the SOE Portal, namely Silaba Portal, Human Capital (HC) Portal, CSR Portal, and Public Portal. Progress on updating data in these portals should be reported in quarterly management reports and annual reports.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan <i>monitoring</i> dan konsistensi penyampaian laporan di portal Silaba. ▪ Progres pemutakhiran data dalam masing-masing portal telah dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan Tahunan serta menjadi bagian dari indikator penilaian KPI dan tingkat kesehatan perusahaan. ▪ Monitoring and consistency in the submission of reports in Silaba portal has been carried out. ▪ The progress of updating data in each portal has been reported in quarterly management reports and Annual reports and is part of the KPI assessment indicators and the Company's health level.
14.	<p>Dewan Komisaris agar meningkatkan pengawasan untuk membantu Langkah-Langkah Perusahaan agar <i>going concern</i> dapat tetap terjaga dan mampu untuk <i>survive</i> pada setiap kondisi dan secara konsisten melakukan peningkatan pelayanan kepada pelanggan.</p> <p>Board of Commissioners should increase supervision to assist the Company's actions so that the going concern can be maintained and be able to survive in every condition and consistently improve services to customers.</p>	<p>Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sesuai surat yang disampaikan Nomor: 66/DK/PI/V-2023 tanggal 24 Mei 2023.</p> <p>Follow-up has been carried out on recommendations from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in accordance with the letter submitted Number: 66/DK/PI/V-2023 dated May 24, 2023.</p>

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2022 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022

Waktu : 15.49 WIB – 16.45 WIB

Tempat : Rapat *online zoom meeting*

ANNUAL GMS ON THE APPROVAL OF 2022 CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET AND THE REALIZATION

The GMS was held on:

Day/Date : Thursday, January 27, 2022

Time : 15.49 WIB - 16.45 WIB

Place : Online zoom meeting

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RKAP TAHUN 2022

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT THE GMS ON 2022 RKAP APPROVAL

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1.	Marsetio	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner/Acting President Commissioner	Hadir Present
2.	Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
3.	Antonius Rainer Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
4.	Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
5.	Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Hadir Present
6.	Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Hadir Present
7.	Raden Agus Haryoto Purnomo	Komisaris Commissioner	Hadir Present
8.	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
9.	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
10.	Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum Human Capital and General Affairs Director	Hadir Present
11.	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Hadir Present
12.	Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Hadir Present
13.	Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Hadir Present
14.	Putut Sri Mulyanto	Direktur Pengelola Managing Director	Hadir Present

PIHAK INDEPENDEN

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sehingga belum memerlukan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara dalam pelaksanaan RUPS. Pelindo telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

INDEPENDENT PARTY

Until December 31, 2023, Pelindo has not listed its shares on the Stock Exchange and, therefore, does not require an independent party to count the votes in the GMS. Pelindo has appointed an independent party, Notary Nanda Fauz Iwan, to prepare the deed of GMS results.



KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RKAP TAHUN 2022

RESOLUTION AND REALIZATION OF THE GMS ON 2022 RKAP

Agenda Pertama First Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022.

Approval of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) including Board of Commissioners 2022 Work Plan and Budget.

Keputusan

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Resolution

Approved PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) including Board of Commissioners 2022 Work Plan and Budget, with the following points:

- a. Asumsi Penyusunan RKAP 2022
Assumptions for Compiling RKAP 2022

Uraian Description	RKAP 2022 2022 RKAP
Nilai Tukar Rupiah/USD Rupiah/USD Exchange Rate	14.350
Tingkat Inflasi (%) Inflation Rate (%)	3.00
Pertumbuhan Ekonomi (%) Economic Growth (%)	5,0 – 5,5
ICP (USD/Barrel) ICP (USD/Barrel)	63.00
SBM 10 Tahun (10%) SBM 10 Years (10%)	6.82

- b. Pokok-pokok Laporan Keuangan (Rp Miliar)
Principal Financial Statements (Rp Billion)

Uraian Description	RKAP 2022 2022 RKAP
Pendapatan Revenues	30,382.6
Laba Usaha Operating Profit	6,934.3
EBITDA	10,588.1
Laba Bersih Net Profit	3,900.6
Laba Bersih (Atribusi Induk) Net Profit (Attributable to Parent)	3,944.9
Total Aset Total Assets	112,525.9
Ekuitas Equity	45,633.9
Interest Bearing Debt	43,386.3
Net Operating Cash Flow	9,278.6

c. Investasi/CAPEX (Rp Miliar)
Investment/CAPEX (Rp Billion)

Uraian Description	RKAP 2022 2022 RKAP
Bangunan Fasilitas, Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana, Kapitalisasi Bunga Building Facilities, Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure, Capitalization of Interest	6,964.6
Alat-alat Fasilitas, Instalasi Fasilitas, Peralatan dan Perlengkapan, Kapan dan Kendaraan Facility Tools, Facility Installation, Equipment and Supplies, Ships and Vehicles	923.8
Tanah dan Hak atas Tanah dan Emplasemen Land and Land Rights and Emplacements	320.4
Investasi Non Fisik Non-Physical Investment	204.1
Total Investasi Perusahaan Induk Total Parent Entity's Investment	8,412.8
Investasi Entitas Anak Equity Capital	4,743.8
Total Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investment	13,156.6
Penyertaan Modal Equity Capital	1,622.6
Total Investasi + Penyertaan Modal Total Investment + Equity Capital	14,779.2

Agenda Kedua
Second Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2022.	Approval of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2022 Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL).
Keputusan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2021 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).	Resolution Approved PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2021 Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL).

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target <i>Key Performance Indicators</i> Direksi secara Kolegial Tahun 2022.	Determination of the 2022 Annual Management Contract containing collegial Key Performance Indicators targets of Board of Directors.
Keputusan Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara Kolegial tahun 2022, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.	Resolution Determined the 2022 Annual Management Contract, which contains collegial Key Performance Indicators of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), as attached and is an integral part of this resolution.

No.	KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
					Sub	Total
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia						44.00
Finansial Financial						16.00
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	10,588.06	Maximize	5.00	
2.	ROIG \geq WAGG	%	0,96	Maximize	5.00	
3	a. Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali	4.10	Minimize	3.00	
3	b. Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	48.74	Minimize	3.00	



No.	KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
					Sub	Total
Operasional Operational						21.00
4	Container Throughput	Juta TEUs Million TEUs	17.25	Maximize	7.00	
5	Non Container Throughput	Juta Ton Million	144.33	Maximize	7.00	
6.	B/S/H Gross	B/S/H	38.00	Maximize	7.00	
Sosial Social						7.00
7.	Manfaat kesejahteraan masyarakat di sekitar Pelabuhan Benefits for the welfare of community around the Port	%	100,00	Maximize	7.00	
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation						16.00
8.	Efisiensi biaya melalui Pengadaan Terpusat Cost efficiency through Centralized Procurement	Rp Miliar Rp Billion	115.40	Maximize	7.00	
9.	Pembentukan dan Pengembangan Sub Holding Formation and Development of Sub Holding	%	100,00	Maximize	7.00	
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership						14.00
10.	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Pelabuhan Standardization and Digitization of Port services	%	100,00	Maximize	7.00	
11.	Implementasi Green Technology di Pelabuhan Implementation of Green Technology at the Port	%	100,00	Maximize	7.00	
Peningkatan Investasi Investment Increase						14.00
12.	Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	%	100,00	Maximize	7.00	
13.	Pengembangan Potensi Pelabuhan melalui Kerja Sama dengan Strategic Partner (e.g INA) Port Potential Development through Collaboration with Strategic Partners (e.g. INA)	%	100,00	Maximize	7.00	

No.	KPI	Satuan Unit	Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
					Sub	Total
Pengembangan Talenta Talent Development						14.00
14.	a. Perempuan dalam <i>nominated talent</i> <i>Female in Nominated Talent</i>	%	11.00	<i>Maximize</i>	6.00	
	b. Millennial (≤ 42 tahun) dalam <i>nominated talent</i> <i>Millennials (≤ 42 years old) in nominated talent</i>	%	11.00	<i>Maximize</i>	6.00	
15.	Penyusunan kajian program <i>talent development</i> dan <i>Career Path System</i> di lingkup klaster Compilation of studies on talent development programs and Career Path System within the cluster	%	50.00	<i>Maximize</i>	2.00	
Total						100.00

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris dengan Pemegang Tahun 2022.

Determination of 2022 Management Contract (*Key Performance Indicators*) between Board of Commissioners and Shareholders.

Realisasi

Menetapkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Dewan Komisaris Tahun 2022, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Key Performance Indicator.

Realization

Determined the 2022 Management Contract (*Key Performance Indicators*) between Board of Commissioners and Shareholders, as attached and is an integral part of this resolution.

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan Contribution to the Company's performance achievements		10	
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to the realization of Board of Directors' KPI achievements	Poin Point	10	100
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris Timeliness of submission of Opinions and Suggestions that are the obligations of Board of Commissioners		20	
a.	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2022, Laporan Triwulanan 2022, dan Laporan Tahunan 2021 Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on RKAP 2022, Quarterly Report 2021, and Annual Report 2021	Hari Kerja Working Days	5	30
b.	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri Responses to Board of Directors' actions that must be approved by the GMS/Minister	Hari Kerja Working Days	5	14
c.	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Responses to Board of Directors' actions that must be approved by Board of Commissioners	Hari Kerja Working Days	5	14
d.	Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan Quarterly and Annual Board of Commissioners Report dan Tahunan	Hari Kerja Working Days	5	30



No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target
3.	Kontribusi terhadap penerapan GCG Contribution to the implementation of GCG		10	
a.	Kontribusi kualitas penerapan GCG Contribution to the quality of GCG implementation	Poin Point	5	31,50
b.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> GCG Aspek Dewan Komisaris Follow-up to the Recommendations on the Results of GCG Assessment of Board of Commissioners aspect	%	5	100
4.	Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Meetings and Working Visits of Board of Commissioners		18	
a.	Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Internal Meetings of Board of Commissioners	Jumlah Amount	6	12
b.	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Number of Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Amount	6	12
c.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Working Visit of Board of Commissioners to the Branch	Jumlah Amount	6	7
5.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan perusahaan Supervision and Guidance to Board	Jumlah Amount	14	7
6.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners		28	
a.	Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency Improvement			
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency development	Pelaksanaan Implementation	3	14
b.	Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs			
	Komite Audit Audit Committee			
▪	Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Amount	3	12
▪	Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee			
▪	Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of PMR Committee Internal Meetings	Jumlah Amount	3	12
▪	Laporan Penugasan Komite PMR PMR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee			
▪	Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Implementation of NR Committee Internal Meetings	Jumlah Amount	3	12
▪	Laporan Penugasan Komite NR NR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
Jumlah Total			100	

Agenda Kelima
Fifth Agenda

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2022.

Stipulation of Operational Aspect indicators for the Measurement of the Company's 2022 Soundness Level.

Keputusan

Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2022, sebagai berikut:

Resolution

Stipulated the Operational Aspect Indicators for the Measurement of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)'s 2022 Soundness Level, as follows:

No.	Indikator Indicator	Bobot Weight
Aspek Operasional Operational Aspect		35.00
1.	Waiting Time For Pilot	9.0
2.	Tingkat Efektivitas Tambahan Petikemas Additional Container Effectiveness Level	9.0
3.	Yard Occupancy Ratio Petikemas Container Yard Occupancy Ratio	9.0
4.	Produktivitas B/M Petikemas -Gross Productivity of Container B/M -Gross	8.0

Agenda Keenam
Sixth Agenda

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program/item investasi sepanjang tidak merubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.

Approval of delegation of authority to the Board of Commissioners to approve if there are actions that result in changes to investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as does not change the investment program/item and does not exceed the investment total value.

Keputusan

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program/item investasi sepanjang tidak merubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.

Resolution

Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to give approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as does not change the investment program/item and does not exceed the investment total value.

Keterangan:

Karena seluruh saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia maka tidak terdapat hasil *polling* setuju, tidak setuju dan abstain.

Remarks:

Because all shares are owned by the Republic of Indonesia, there are no pooling results of agree, disagree or abstain.

REALISASI ARAHAN RUPS

REALIZATION OF GMS DIRECTIONS

No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
1.	<p>RKAP yang disahkan merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan perusahaan tahun 2022. RKAP tersebut termasuk di dalamnya program Manajemen Risiko agar dirinci menjadi program dan target bulanan dan triwulanan untuk memudahkan <i>monitoring</i> dan evaluasi pencapaiannya, serta dilakukan <i>cascading</i> ke seluruh jajaran perusahaan.</p> <p>The approved RKAP is a guideline for Board of Directors in carrying out business activities and a guideline for Board of Commissioners in carrying out supervisory duties in 2022. The RKAP includes the Risk Management program to be broken down into monthly and quarterly programs and targets to facilitate monitoring and evaluation of achievements, as well as cascading to all levels of the Company.</p>	<p>Penyusunan RKAP yang disahkan oleh Direksi telah menggunakan <i>Risk Based Budgeting</i> dan Dokumen RKAP telah dilengkapi dengan rencana target program Manajemen Risiko untuk memudahkan evaluasi serta pencapaiannya.</p> <p>The preparation of RKAP approved by Board of Directors has used Risk Based Budgeting and RKAP Document has been equipped with Risk Management program target plan to facilitate evaluation and achievement.</p>



No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
2.	<p>Berkomitmen untuk mencapai target-target RKAP 2022 dan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) tahun 2022 dengan tetap melaksanakan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p> <p>Committed to achieving the 2022 RKAP and 2022 Key Performance Indicators (KPI) targets while continuing to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG).</p>	<p>Penyusunan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) tahun 2022 dalam Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat KPI Direksi secara Kolegial antara RUPS Pelindo dan Direksi Pelindo untuk selanjutnya dilakukan <i>monitoring</i> dan pengukuran setiap triwulan atas capaian target KPI 2022 yang disampaikan dalam Laporan Manajemen.</p> <p>The preparation of Key Performance Indicators (KPI) for 2022 in the Annual Management Contract includes KPIs for Directors collegially between Pelindo GMS and Pelindo Directors, and achievement of 2022 KPI targets are further monitored and measured every quarter, and presented in the Management Report.</p>
3.	<p>Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Lainnya agar diajukan secara tersendiri dengan dilengkapi sekurang-kurangnya tanggapan Dewan Komisaris, Pakta Integritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi dan kajian risiko.</p> <p>The Board of Directors' actions that require approval from the GMS in accordance with the Articles of Association and Other Regulations must be submitted separately accompanied by at least the Board of Commissioners' responses, the Board of Directors' Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies and risk studies.</p>	<p>Dalam permintaan persetujuan RUPS atas keputusan strategis Direksi telah dilengkapi dengan tanggapan Dewan Komisaris, Pakta Integritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi, dan kajian risiko.</p> <p>The request for approval from the GMS on the Board of Directors' strategic decisions has been completed with the Board of Commissioners' responses, the Board of Directors' Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies, and risk studies.</p>
4.	<p>Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, serta saran dan rekomendasi auditor, baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham.</p> <p>Board of Directors should follow up and complete the findings, as well as suggestions and recommendations from the auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) in 2021 and in previous years. Follow-up on the completion of auditor's findings/suggestions to be comprehensively discussed with Board of Commissioners and reported in writing to Shareholders.</p>	<p>Telah dilaksanakan <i>monitoring</i> tindak lanjut LHP BPK dan disampaikan pemenuhan dokumen sesuai dengan rekomendasi temuan BPK dengan progress 71,92% pada Semester I Tahun 2022 dan 38,16% untuk <i>monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA SPI.</p> <p>The monitoring of follow-up of BPK's LHP has been carried out and submitted the fulfillment of documents in accordance with recommendations from BPK's findings with progress of 71.92% in Semester I of 2022 and 38.16% for monitoring of Follow-Up of LHA SPI Recommendations.</p>
5.	<p>Melakukan langkah-langkah efisiensi di segala bidang dengan tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan.</p> <p>Perform efficiency measures in all areas while maintaining productivity and service quality.</p>	<p>Telah dilakukan proses pengendalian anggaran sesuai dengan Perdir No HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 dan setiap bulan dilakukan evaluasi pencapaian kinerja keuangan Regional dan <i>Subholding</i>. Untuk realisasi beban usaha tahun 2022 (<i>unaudited</i>) tercapai 100% dari RKAP Tahun 2022.</p> <p>Budget control process has been carried out in accordance with Perdir No. HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 and an evaluation of the achievement of Regional and Subholding financial performance is carried out every month. For the realization of operating expenses in 2022 (unaudited), reached 100% of the 2022 RKAP.</p>
6.	<p>Melakukan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko/RMI secara berkala dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku, serta melaporkan hasilnya kepada Kementerian BUMN. Untuk penilaian tingkat kematangan risiko/RMI tahun 2021, hasil penilaiannya agar disampaikan paling lambat pertengahan Triwulan II tahun 2022.</p> <p>Conduct periodic risk management/RMI maturity level assessments with reference to applicable provisions and guidelines, and report the results to the Ministry of SOEs. For the assessment of risk maturity level/RMI in 2021, the assessment results should be submitted no later than the middle of the second quarter of 2022.</p>	<p>Penilaian RMI tahun 2021 telah dilakukan secara <i>self assessment</i> dengan menggunakan <i>framework</i> dari PwC dan hasil penilaian telah disampaikan kepada Tim Manajemen Risiko dan Kepatuhan KBUMN pada 7 September 2022.</p> <p>The 2021 RMI assessment has been carried out as a selfassessment using the framework from PwC and the assessment results have been submitted to the KBUMN Risk Management and Compliance Team on September 7, 2022.</p>

No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
7.	<p>Pelaksanaan Investasi agar memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan perusahaan dan berpedoman pada rencananya (<i>cost & schedule</i>) serta dijaga supaya tidak terjadi <i>cost overrun</i>, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan targetnya.</p> <p>Investment should pay attention to the priority scale, the Company's financial capability and be guided by the plan (<i>cost & schedule</i>) and be maintained in order to avoid cost overrun and can be completed according to the target.</p>	<p>Dalam penyusunan usulan investasi kita telah memisahkan berdasarkan kategori urgensi yakni <i>must have</i> dan <i>nice to have</i> yang diselaraskan dengan kemampuan perusahaan serta adanya struktur organisasi baru yang melakukan <i>monitoring</i> secara rutin.</p> <p>In preparing investment proposals, we have separated them based on the urgency category, namely <i>must have</i> and <i>nice to have</i>, which are aligned with the Company's capabilities as well as the existence of a new organizational structure that carries out regular monitoring.</p>
8.	<p>Direksi agar melaporkan realisasi program <i>blueprint</i> amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk Tahun 2021, serta menyusun dan melaksanakan strategi implementasinya pada tahun 2022. Apabila <i>blueprint</i> dimaksud belum disusun, Direksi diminta untuk memenuhinya pada tahun 2022 dimana dapat dilakukan melalui kolaborasi/<i>benchmarking</i> dengan BUMN lain, sekaligus mengakselerasi implementasinya pada Tahun 2022.</p> <p>Board of Directors is required to report the realization of blueprint program mandated by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities for 2021, as well as prepared and carry out the implementation strategy in 2022. If the said blueprint has not been prepared, Board of Directors is asked to fulfill it in 2022, which can be done through collaboration/<i>benchmarking</i> with other SOEs, as well as accelerating its implementation in 2022.</p>	<p>Pemenuhan amanat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2-16 tentang Penyandang Disabilitas telah dilakukan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang merupakan kelanjutan dari program pada tahun sebelumnya, meliputi penempatan, pengembangan karier, kesejahteraan, aksesibilitas, serta program kesehatan dan keselamatan kerja di masing-masing fungsi terkait baik di <i>holding</i> maupun <i>subholding</i>.</p> <p>Fulfillment of the mandate of Law Number 8 Year 2-16 concerning Persons with Disabilities has been carried out at PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which is a continuation of the previous year's program, covering placement, career development, welfare, accessibility, as well as occupational health and safety programs in each related function, both in holding and subholding.</p>
9.	<p>Direksi agar melengkapi Data Pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN serta Talent pada portal <i>Human Capital</i> BUMN.</p> <p>Board of Directors is required to complete data on SOE Management, SOE Subsidiaries, and SOE Consolidated Affiliated Companies and Talents on the SOE Human Capital portal.</p>	<p>Telah dilakukan <i>updating</i> data pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi secara berkala di portal <i>Human Capital</i> BUMN.</p> <p>The data on SOE management, SOE Subsidiaries, and Affiliated Companies data has been periodically updated on the SOE Human Capital portal.</p>
10.	<p>Direksi agar meningkatkan pembinaan anak perusahaan sehingga kinerjanya diharapkan senantiasa tumbuh dengan baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan Induk.</p> <p>Board of Directors should improve the development of subsidiary companies so that their performance can continue to grow well and make a positive contribution to the parent Company.</p>	<p>Telah dilaksanakan pembinaan anak perusahaan salah satunya melalui program <i>Business Performance Review</i> secara berkala oleh <i>Group</i> Manajemen <i>Portfolio</i> Anak Perusahaan untuk memastikan kinerja anak perusahaan senantiasa tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan Induk.</p> <p>Subsidiary management has been carried out, one of which is through the Business Performance Review program periodically by the Subsidiary Portfolio Management Group to ensure that the subsidiary's performance continues to grow and make a positive contribution to the Parent Company.</p>
11.	<p>Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya akhir Februari 2022.</p> <p>Submitting the Company's Annual Report including the 2021 Financial Statements, which have been audited by the Public Accounting Firm no later than the end of February 2022.</p>	<p>Penyusunan Laporan Audit Tahun buku 2021 telah selesai dibuat.</p> <p>Compilation of the Audit Report for 2021 fiscal year has been completed.</p>
12.	<p>Menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran TJSJ dengan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: RIS-09/DSI.MBU.B/12/2021.</p> <p>Follow up and implement the recommendations from the discussion on CSR Work Plan and Budget with Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility as stated in the Minutes of Meeting Number: RIS-09/DSI.MBU.B/12/2021.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Program TJSJ Tahun 2022 CID Non PUMK telah ditetapkan sebesar Rp120.500 M dalam RKA TJSJ Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp112.521 M; 2. Pelaksanaan Program PUMK Tahun 2022 telah dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank BRI (Persero) sebesar Rp79.782.062.832 pada tanggal 30 Desember 2022. <ol style="list-style-type: none"> 1. 2022 CID Non-PUMK CSR Program Budget has been stipulated at Rp120,500 billion in 2022 CSR RKA with a realization of Rp112,521 billion; 2. 2022 PUMK Program has been carried out in collaboration with PT Bank BRI (Persero) in the amount of Rp79,782,062,832 on December 30, 2022.



No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
13.	<p>Melakukan evaluasi kinerja Perusahaan dan ketercapaian <i>progress</i> program kerja pasca penggabungan dan <i>Value Realization</i>.</p> <p>Evaluating the Company's performance and the achievement of post-merger work program progress and Value Realization.</p>	<p>Telah dilaksanakan evaluasi kinerja Perusahaan dan ketercapaian <i>progress</i> program kerja pasca penggabungan dan <i>Value Realization</i> secara berkala melalui Forum Integrasi.</p> <p>Periodic evaluation of the Company's performance and achievement of work program progress post-merger and Value Realization has been carried out through the Integration Forum.</p>
14.	<p>Berperan aktif dalam implementasi <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) dan melaksanakan Pembinaan tata kelola pelabuhan sebagai bagian dari Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan dan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam memberikan dampak terhadap efektivitas waktu dan efisiensi biaya di Kawasan Pelabuhan.</p> <p>Playing an active role in the implementation of National Logistic Ecosystem (NLE) and carrying out reforms to port governance as part of the Action to Reduce Bureaucracy and Service Improvement in Port Area and the Action on National Strategy for Corruption Prevention (Stranas PK) in impacting time effectiveness and cost efficiency in Port Area.</p>	<p>Pelindo berperan aktif dalam implementasi <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) dan melaksanakan pembinaan tatakelola pelabuhan sebagai bagian dari Aksi Pemangkasan Birokrasi melalui Standardisasi dan Digitalisasi Pelayanan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Go Live</i> Aplikasi Phinisi 2. <i>Single Truck Identification</i> (STID) 3. Simon TKBM 4. <i>Gate System</i> 5. SSm QC 6. SSm Pengangkut 7. DO <i>Online</i> 8. SP2 <i>Online</i> <p>Pelindo plays an active role in the implementation of National Logistic Ecosystem (NLE) and carries out port governance improvements as part of the Bureaucratic Reduction Action through Standardization and Digitalization of Services, such as:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Go Live Phinisi App 2. Single Truck Identification (STID) 3. Simon TKBM 4. Gate System 5. SSm QC 6. SSm Carrier 7. DO Online 8. SP2 Online
15.	<p>Melakukan pemenuhan target KPI PMN TA 2021 sesuai dengan perencanaan yang telah diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p> <p>Fulfilling PMN FY 2021 KPI targets in accordance with the plan that has been submitted by PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p>	<p>Terkait KPI <i>Output</i> pada Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa yang menggunakan anggaran PMN, pada tahun 2022 tidak memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan kendala perizinan dan lainnya. Telah dilakukan penyusunan KPI terkait Pekerjaan PMN ini untuk Tahun 2023.</p> <p>Regarding the Output KPI for Benoa Port Channel and Pond Dredging Work that used the PMN budget did not meet the targets set due to licensing constraints etc. in 2022, KPIs related to PMN Work have been prepared for 2023.</p>
16.	<p>Menyusun langkah-langkah untuk peningkatan kinerja operasional terutama pada cabang-cabang yang masih merugi dari sisi finansial.</p> <p>Formulate steps to improve operational performance, especially for branches that are still losing financially.</p>	<p>Mengimplementasikan program Optimalisasi Lahan <i>Idle</i> untuk peningkatan kinerja operasional dan pendapatan bagi perusahaan.</p> <p>Implementing the Idle Land Optimization program to increase operational performance and revenue for the Company.</p>

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Mei 2022
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai
 Tempat : *Virtual Meeting* melalui *Link Video Conference via Zoom Meeting*

ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2021 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

The GMS was held on:

Day/Date : Wednesday, May 18, 2022
 Time : 09.00 WIB - finish
 Venue : *Virtual Meeting* via *Link Video Conference via Zoom Meeting*

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT THE GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2021 ANNUAL REPORT

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1.	Marsetio	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Hadir Present
2.	Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
3.	Antonius Rainer Haryanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
4.	Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
5.	Sudung Situmorang	Komisaris Commissioner	Hadir Present
6.	Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Hadir Present
7.	Raden Agus Haryoto Purnomo	Komisaris Commissioner	Tidak Hadir Absent
8.	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
9.	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
10.	Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum Human Capital and General Affairs Director	Hadir Present
11.	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Hadir Present
12.	Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Hadir Present
13.	Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Hadir Present
14.	Putut Sri Mulyanto	Direktur Pengelola Managing Director	Hadir Present

PIHAK INDEPENDEN

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pelindo belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sehingga belum memerlukan pihak independen untuk melakukan perhitungan suara dalam pelaksanaan RUPS. Pelindo telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

INDEPENDENT PARTY

Until December 31, 2023, Pelindo has not listed its shares on the Stock Exchange and, therefore, does not require an independent party to count the votes in the GMS. Pelindo has appointed an independent party, Notary Nanda Fauz Iwan, to prepare the deed of GMS results.

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

RESOLUTION AND REALIZATION OF THE GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2022 ANNUAL REPORT

Agenda Pertama First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021.

Approval of the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2021, including the Restatement of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020 and the Board of Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2021.



Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk mengesahkan penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 tanggal 29-03-2022 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Resolution

Approve the Annual Report for Fiscal Year 2021 (two thousands and twenty one) including the Supervisory Report of Board of Commissioners and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2021 (two thousands and twenty one) which have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro and Surja (EY) according to their report No. 00352/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 dated 29-03-2022 (twenty-ninth of March two thousand and twenty-two) with "unqualified" opinion, and providing full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions that have been carried out in the Fiscal Year ending 31-12-2021 (thirty first December two thousand and twenty one), as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Company's report books.

Agenda Kedua

Second Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun 2021.

Approval of the 2021 Social and Environmental Responsibility Program (CSR) Annual Report and Ratification of the 2021 Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Report.

Keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan TJSL Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan mengesahkan Laporan Keuangan Program PUMK Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00375/2.1032/AU.2/06/0697- 2/1/III/2022 tanggal 30-03-2022 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan TJSL Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Resolution

Approve the SER Annual Report for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty one) and ratified the PUMK Program Financial Report for 2021 (two thousand and twenty one) which has been audited by KAP Purwanto, Sungkoro & Surja as contained in its report Number: 00375/2.1032 /AU.2/06/0697- 2/1/III/2022 dated 30-03-2022 (thirtieth of March two thousand and twenty-two) with the opinion "unqualified", and providing release and discharge of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision of SER for Fiscal Year 2021 (two thousand twenty one), as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the report.

Agenda Ketiga

Third Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2021.

Keputusan

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp3.292.133.733.732,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari laba bersih atau sebesar Rp1.316.854.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai.
2. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari laba bersih atau sebesar Rp1.975.279.733.732,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.

Resolution

Determine the use of Net Profit Attributable to the Owners of Parent Entity for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty one) in the amount of Rp3,292,133,733,732.00 (three trillion two hundred ninety two billion one hundred thirty three million seven hundred thirty three thousand seven hundred three twenty two rupiah) as follows:

1. 40% (forty percent) of the net profit or Rp1,316,854,000,000.00 (one trillion three hundred sixteen billion eight hundred and fifty four million rupiah) is designated as cash dividends.
2. 60% (sixty percent) of net profit or Rp1,975,279.733.732.00 (one trillion nine hundred seventy five billion two hundred seventy nine million seven hundred thirty three thousand seven hundred thirty two rupiah) is designated as reserves.

Agenda Keempat Fourth Agenda

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022. Determination of Tantiem for Fiscal Year 2021, Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Other Facilities and Allowances for 2022.

Keputusan

Besaran Tantiem Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan ditetapkan secara tersendiri.

Resolution

Determination of Tantiem for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty one), Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with Facilities and Other Allowances for 2022 (two thousand and twenty two) will be determined separately.

Agenda Kelima Fifth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 Serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022. Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2022 as well as the Financial Statements and Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2022.

Keputusan

1. Menetapkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Resolution

1. Appoint KAP Purwantono, Sungkoro & Surja to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2022 (two thousand and twenty two) and the Financial Statements for the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2022 (two thousand and two twenty two).
2. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, adding the required scope of work and other reasonable requirements for the KAP.

Agenda Keenam Sixth Agenda

Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara. Ratification of Report on the Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds.

Keputusan

Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk periode Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Resolution

Ratify Report on the Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds (PMN) originating from the 2021 (two thousand twenty one) State Budget for the period of Fiscal Year 2021 (two thousand twenty one).

Keterangan:

Karena seluruh saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia maka tidak terdapat hasil *polling* setuju, tidak setuju dan abstain.

Remarks:

Because all shares are owned by the Republic of Indonesia, there are no pooling results of agree, disagree or abstain.

REALISASI ARAHAN RUPS

REALIZATION OF GMS DIRECTIONS

No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
1.	Direksi perlu meningkatkan efisiensi di segala bidang (terutama beban kerja sama mitra usaha), termasuk efisiensi dengan telah terintegrasinya PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan. Board of Directors needs to improve efficiency in all fields (especially the expenses for cooperation with business partners), including efficiency due to the integration of PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia (Persero) while maintaining productivity and service quality.	Telah dilakukan proses pengendalian anggaran sesuai dengan Perdir No HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 dan setiap bulan dilakukan evaluasi pencapaian kinerja keuangan Regional dan <i>Subholding</i> . Untuk realisasi beban usaha tahun 2022 (<i>unaudited</i>) tercapai 100% dari RKAP Tahun 2022. Budget control process has been carried out in accordance with Perdir No. HK.01/11/3/1/PKPN/UTMA/PLND-22 and the achievement of Regional and Subholding financial performance is evaluated every month. For the realization of operating expenses in 2022 (unaudited), reached 100% of the 2022 RKAP.



No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
2.	<p>Direksi perlu segera melakukan upaya standarisasi dan perbaikan fasilitas serta layanan di cabang-cabang PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sehingga pengguna jasa dapat menerima pelayanan yang lebih baik dan memuaskan.</p> <p>Board of Directors needs to immediately standardize and improve facilities and services at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) branches, hence service users can receive better and more satisfying services.</p>	<p>Telah disusun Kajian Buku Putih yang didalamnya terdapat <i>mapping</i> untuk rencana penataan transformasi terminal petikemas pada Cabang-Cabang PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan <i>profiling</i> terminal yang akan diserahkan-operasikan ke <i>Subholding</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p> <p>White Paper Study has been prepared, which includes mapping for the plan for transforming container terminals at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Branches and terminal profiling which will be handed over to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Subholding.</p>
3.	<p>Direksi agar menyelesaikan realisasi dana PMN Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu) untuk pengembangan Proyek BMTM sesuai target KPI yang menjadi bagian dalam kajian PMN serta melaporkan realisasinya secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/03/2021.</p> <p>Board of Directors should complete the realization of PMN funds for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty one) for the development of BMTM Project according to the KPI targets that are part of the PMN study and report their realization periodically in accordance with the Minister of SOE Regulation Number: PER-01/MBU/03/2021.</p>	<p>Terkait target KPI pada Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa yang menggunakan anggaran PMN pada tahun 2021 tidak memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan kendala perizinan dan lainnya, sedangkan penyusunan dan penyampaian laporan realisasi PMN telah dilakukan secara berkala (per Triwulan) sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Regarding the KPI targets for the Dredging Work of Benoa Port Channels and Ponds which use the PMN budget in 2021, did not meet the targets due to licensing and other constraints, while PMN realization reports have been prepared and submitted periodically (quarterly) in accordance with applicable regulations.</p>
4.	<p>Direksi agar secara intensif mengawal <i>progress Asset Recycling</i> dan kerja sama strategis dengan INA sehingga dapat terealisasi tepat waktu serta memastikan prosesnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Board of Directors should intensively oversee the progress of Asset Recycling and strategic cooperation with INA, so that it can be realized on time and ensure that the process is carried out in accordance with applicable rules and regulations.</p>	<p>Telah dilakukan finalisasi atas kajian aset <i>recycling</i> dan penunjukan konsultan pendamping transaksi.</p> <p>The finalization of recycling assets review and the appointment of transaction assistant consultant has been carried out.</p>
5.	<p>Direksi perlu melakukan percepatan penyelesaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) bagi masing-masing <i>subholding</i> yang sekaligus terintegrasi dan sejalan dengan RJPP Induk.</p> <p>Board of Directors needs to accelerate the completion of the Company's Long Term Plan (RJPP) for each subholding, which is simultaneously integrated and in line with the main RJPP.</p>	<p>RJPP <i>Subholding</i> yang telah diselaraskan dengan RJPP Induk/Terintegrasi telah diselesaikan dan disahkan melalui RUPS tgl 30 September 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS Pengesahan RJPP SPSL No. SK.03/30/9/1/PBAP/UTMA/PLNS-22 2. RUPS Pengesahan RJPP SPTP No. SK.03/30/9/2/PBAP/UTMA/PLNS-22 3. RUPS Pengesahan RJPP SPMT No. SK.03/30/9/3/PBAP/UTMA/PLNS-22 4. RUPS Pengesahan RJPP SPJM No. SK.03/30/9/4/PBAP/UTMA/PLNS-22 <p>The Subholding RJPP which has been aligned with the Main/Integrated RJPP has been finalized and ratified through the GMS on September 30, 2022 as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GMS Ratification of RJPP SPSL No. SK.03/30/9/1/PBAP/UTMA/PLNS-22 2. GMS Ratification of RJPP SPTP No. SK.03/30/9/2/PBAP/UTMA/PLNS-22 3. GMS Ratification of RJPP GMS No. SK.03/30/9/3/PBAP/UTMA/PLNS-22 4. GMS Ratification of RJPP SPJM No. SK.03/30/9/4/PBAP/UTMA/PLNS-22
6.	<p>Direksi agar melakukan upaya peningkatan nilai <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) khususnya terhadap indikator yang belum mencapai target pada tahun 2021 yaitu Inovasi Model Bisnis pada Standarisasi Performansi Pelabuhan dan Peningkatan Investasi pada Optimalisasi Aset.</p>	<p>Penyusunan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Standarisasi Performansi Pelabuhan dan Optimalisasi Aset (Lahan dan Alat B/M) dalam Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat KPI Direksi secara Kolegial antara RUPS Pelindo dan Direksi Pelindo Tahun 2021 untuk selanjutnya dilakukan <i>monitoring</i> dan pengukuran setiap triwulan atas capaian target KPI 2021 yang disampaikan dalam Laporan Manajemen. Adapun Standarisasi Performansi Pelabuhan meliputi Terminal Petikemas Belawan, Terminal Petikemas Domestik Tanjung Priok TP1 & TP2, Terminal Petikemas Nilam, dan Makassar New Port & Terminal Petikemas Makassar. Sedangkan Optimalisasi Aset (Lahan dan Alat B/M) meliputi Program Pemanfaatan Gd Eks Kantor Pusat Pelindo 1, Kerja Sama dengan PT FKS di Jawa Tengah, dan Kerja Sama Pemanfaatan CY antara cabang Makassar dengan TPM dan Persewaan lahan cabang Kendari CY Pelabuhan Nusantara.</p>

No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
	<p>Board of Directors should make efforts to increase the score of Key Performance Indicators (KPI), especially for indicators that have not reached the target in 2021, namely Business Model Innovation in Port Performance Standardization and Increased Investment in Asset Optimization.</p>	<p>Preparation of Key Performance Indicators (KPI) Standardization of Port Performance and Asset Optimization (Land and B/M Equipment) in the Annual Management Contract which contains collegial KPIs for Board of Directors between Pelindo GMS and Pelindo Directors in 2021, in which the target achievements of 2021 KPIs are further monitored and measured every quarter, and presented in the Management Report. The Port Performance Standardization includes Belawan Container Terminal, Tanjung Priok Domestic Container Terminal TP1 & TP2, Nilam Container Terminal, and Makassar New Port & Makassar Container Terminal. Meanwhile, Asset Optimization (Land and B/M Equipment) includes the Utilization Program of ExPelindo 1 Head Office Building, Collaboration with PT FKS in Central Java, and CY Utilization Collaboration between Makassar branch and TPM, and land lease of Kendari branch CY Nusantara Port.</p>
7.	<p>Direksi dan Dewan Komisaris perlu memastikan agar setiap pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Board of Directors and Board of Commissioners need to ensure that every business activities of the Company is carried out with due regard to the principles of Good Corporate Governance (GCG) in a consistent and sustainable manner, guided by the applicable rules and regulations.</p>	<p>Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan setiap pelaksanaan kegiatan perusahaan telah dilakukan berdasarkan prinsip GCG. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan penilaian GCG yang telah dilakukan oleh Pelindo dengan capaian skor sebesar 90,473 dengan predikat Sangat Baik. Pelaksanaan penilaian GCG pelindo dilakukan oleh <i>assessor</i> BPKP.</p> <p>Board of Directors and Board of Commissioners have ensured that every Company activities have been carried out based on GCG principles. This is in line with Pelindo's GCG assessment with a score of 90.473 and Very Good predicate. Pelindo's GCG assessment was carried out by BPKP assessor.</p>
8.	<p>Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap setiap temuan, catatan serta saran/rekomendasi baik dari auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan RI/BPK-RI termasuk instansi pengawasan berwenang lainnya) maupun auditor internal Perseroan yang belum dinyatakan selesai ditindaklanjuti. Progres tindak lanjut penyelesaian temuan-temuan dimaksud agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan disampaikan tertulis secara berkala kepada Pemegang Saham.</p> <p>Board of Directors should follow up and complete thoroughly on every finding, note and suggestion/recommendation from both external auditors (Public Accountant Office/KAP, Financial and Development Supervisory Agency/BPKP and Indonesian Supreme Audit Agency/BPK-RI including other authorized supervisory agencies) as well as the Company's internal auditors, which the follow-up has not been completed. The follow-up progress of the said findings should be comprehensively discussed with Board of Commissioners and submitted in writing periodically to Shareholders.</p>	<p>Telah dilaksanakan <i>monitoring</i> tindak lanjut LHP BPK dan disampaikan pemenuhan dokumen sesuai dengan rekomendasi temuan BPK dengan progress 83,25% pada Semester II Tahun 2022 dan 68% untuk <i>monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi LHA SPI.</p> <p><i>Next Step</i> : Koordinasi dengan Unit kerja terkait dalam rangka pemenuhan dokumen rekomendasi BPK yang masih Belum Sesuai dan Koordinasi dengan BPK untuk kegiatan <i>monitoring</i> Tahun 2023 serta <i>monitoring</i> tindak lanjut LHA SPI secara berkala.</p> <p>BPK LHP follow-up has been monitored and the fulfillment of documents has been submitted in accordance with recommendations from BPK's findings with progress of 83.25% in Semester II of 2022 and 68% for monitoring of Follow-Up of SPI LHA Recommendations.</p> <p>Next Step: Coordination with related work units to fulfill BPK recommendation documents that is still not in compliance and coordination with BPK for monitoring activities in 2023 and regular monitoring of SPI LHA follow-up.</p>
9.	<p>Direksi agar senantiasa menjaga konsistensi dalam melakukan <i>monitoring</i> dan <i>updating</i> data pada Portal BUMN, yakni Portal Silaba, Portal <i>Human Capital</i> (HC), Portal TJSL, dan Portal Publik. Progres pemutakhiran data dalam portal tersebut agar dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan.</p> <p>Board of Directors should always maintain consistency in monitoring and updating data on SOE Portals, namely Silaba Portal, Human Capital (HC) Portal, CSR Portal, and Public Portal. Progress of updating data in the portal to be reported in quarterly management reports and annual reports.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan <i>monitoring</i> dan konsistensi penyampaian laporan di portal Silaba. ▪ Progres pemutakhiran data dalam masing-masing portal telah dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan Tahunan serta menjadi bagian dari indikator penilaian KPI dan tingkat kesehatan perusahaan. ▪ Monitoring and consistency in reporting has been carried out on the Silaba portal. ▪ The progress of updating data in each portal has been reported in quarterly management reports and annual reports as well as being part of KPI assessment indicators and Company soundness level.



No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
10.	<p>Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sesuai surat yang disampaikan Nomor: 28/DKIPI/IV-2022 tanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh dua) perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun 2021 <i>Audited</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p> <p>Board of Directors should follow up on matters that become recommendations of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) according to the letter Number: 28/DKIPI/IV-2022 dated 18-04-2022 (eighteenth April two thousand and twenty two) regarding the Board of Commissioners' Response for 2021 Audited Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p>	<p>Rekomendasi Dewan Komisaris pada tanggapan Laporan Manajemen Tahun 2021 telah dituangkan menjadi Rencana Kerja Manajemen serta KPI Direktorat terkait yang <i>dimonitoring</i> secara rutin setiap triwulanan pada Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners' recommendations in response to the 2021 Management Report have been outlined in the Management Work Plan and KPI of the relevant Directorates which are monitored regularly every quarter at the Joint Meetings of Commissioners and Directors.</p>

KEPUTUSAN RUPS PADA TAHUN BUKU DAN 1 (SATU) TAHUN SEBELUM TAHUN BUKU YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2023 telah terealisasi pada tahun 2023 dan RUPS Tahun Buku 2022 telah terealisasi pada tahun 2022. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun 2022 dan Keputusan RUPS yang belum direalisasikan pada tahun 2023.

DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Direksi juga bertugas untuk:

1. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;

RESOLUTIONS OF THE GMS IN THE FISCAL YEAR AND 1 (ONE) YEAR BEFORE THE FISCAL YEAR THAT WERE REALIZED IN THE FISCAL YEAR

All resolutions of the GMS of 2023 Fiscal Year have been realized in 2023, and resolutions of the GMS of 2022 Fiscal Year have been realized in 2022. Therefore, there are no resolutions from the 2022 GMS or resolutions from the GMS that have not been realized in 2023.

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is a corporate organ that is authorized and responsible for managing the Company for the benefit of the Company, both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND AUTHORITIES

Board of Directors Duties

Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives, and representing the Company both inside and outside the Court on all matters and all events with limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association and/or GMS Resolutions.

Each member of Board of Directors must carry out their duties in good faith and with full responsibility for the interests and business of the Company. Board of Directors is fully responsible for carrying out their duties for the benefit of the Company in achieving its purposes and objectives. The Board of Directors shall be accountable for the implementation of its duties to the GMS.

In performing their duties, Board of Directors must comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and must apply the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness. Board of Directors is also responsible to:

1. Make a Register of Shareholders, a Special Register, minutes of GMS and minutes of Board of Directors meetings;

2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
3. Memelihara seluruh Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan serta Dokumen Perseroan lainnya.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan dan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk dalam penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
5. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; serta
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, Direksi harus segera melaporkan kepada Pemegang Saham dengan tembusan Dewan Komisaris, dengan disertai usulan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham melalui RUPS setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.

2. Make annual reports and financial documents of the Company;
3. Maintain the entire Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings, Annual Report and Corporate Financial Documents as well as other Corporate Documents.

Board of Directors Authorities

In carrying out its duties, Board of Directors is authorized to:

1. Determine the Company's management policies;
2. Regulate the Board of Directors' power of attorney to one or several members of Board of Directors to make decisions and on behalf of Board of Directors or represent the Company inside and outside the court;
3. Regulate the Board of Directors' power of attorney to one or several Company employees, either individually or jointly or to other people, to represent the Company inside and outside the Court;
4. Regulate the provisions regarding the Company's employment including in the determination of salary, pension or old age benefits and other income for employees based on applicable laws and regulations, with provisions for determining salary, pension or old age benefits and other income for Employees that exceed obligations stipulated by laws and regulations, must obtain prior approval from the GMS;
5. Appoint and dismiss Company Employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;
6. Appoint and dismiss the Corporate Secretary; and
7. Perform all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company in and out of court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.

BOARD OF DIRECTORS RESPONSIBILITIES

1. In carrying out their duties, Board of Directors is responsible to the GMS;
2. In the event that the Company shows signs of significant decline, Board of Directors must immediately report to the Shareholders with a copy to the Board of Commissioners, accompanied by suggestions regarding corrective measures to be taken;
3. Provide opinions and suggestions to Shareholders through the GMS on any issues deemed important for the management of the Company.



TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING DIREKSI

Tugas pokok dan wewenang masing-masing Direksi telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor HK.01/24/7/1/PSOG/UTMA/PLND-23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Adapun rincian tugas pokok dan wewenang masing-masing Direksi adalah sebagai berikut.

Direktur Utama

Tugas pokok Direktur Utama adalah menyelenggarakan pengurusan Perseroan dengan memimpin Perseroan, serta mengendalikan langsung sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan internal, serta Transformasi Korporasi dan Manajemen Program.

Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi untuk menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan melaksanakan kegiatan usaha Perseroan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Manajemen (RKM);
2. Mengarahkan dan mengendalikan implementasi kebijakan, visi, misi, dan strategi Perseroan yang telah ditetapkan dalam RJPP;
3. Mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi atas pencapaian RJPP, RKAP, RKM, kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan budaya korporasi, citra positif Perseroan, dan tata kelola Perseroan (*good corporate governance*) dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan visi misi Perseroan;
4. Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, RKM dalam kegiatan Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, serta Transformasi Korporasi dan Manajemen Program;
5. Menandatangani seluruh Peraturan/Keputusan Direksi yang diputuskan di dalam rapat Direksi maupun di luar rapat Direksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, kecuali atas kewenangan yang telah didelegasikan berdasarkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait;
6. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan;
7. Memimpin Rapat Direksi dan rapat korporasi lainnya serta mengoordinasikan Direksi untuk pelaksanaan rapat Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Memberikan informasi terkait segala sesuatu tentang Perseroan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*);
9. Bertindak sebagai pembina atau pengarah proses Integrasi Paska Penggabungan Perseroan;
10. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, RKM dalam kegiatan Sekretariat

DUTIES AND AUTHORITIES OF EACH DIRECTOR

The main duties and authorities of each Director are regulated in the Board of Directors Regulation Number HK.01/24/7/1/PSOG/UTMA/PLND-23 concerning the Organisation and Governance Structure of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Details of the main duties and authorities of each Director are as follows:

President Director

The President Director's main duty is to carry out the management of the Company by leading the Company, as well as directly controlling part of the Company's management duties in Corporate Secretariat, Internal Audit Unit, as well as Corporate Transformation and Program Management.

In performing his/her duties, President Director is authorised to perform the following functions:

1. Act as the leader of members of Board of Directors to prepare the Company's Long Term Plan (RJPP) and implement the Company's business activities that have been determined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Management Work Plan (RKM);
2. Directing and controlling the implementation of the Company's policies, vision, mission, and strategies set out in the RJPP;
3. Directing and controlling all activities of the Company including but not limited to planning, implementing, controlling, evaluating the achievement of RJPP, RKAP, RKM, activities in order to improve corporate culture, positive image of the Company, and good corporate governance in order to achieve the Company's goals and objectives in accordance with the Company's vision and mission;
4. Leading and coordinating the preparation of strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, RKM in the activities of Corporate Secretariat, Internal Audit Unit, as well as Corporate Transformation and Program Management;
5. Signing all Regulations/Decisions of Board of Directors decided in the Board of Directors meeting or outside the Board of Directors meeting carried out in accordance with the provisions in the articles of association of the Company, except for the authority that has been delegated based on related policies and Standard Operating Procedures (SPO);
6. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company in accordance with the authority stipulated in the Company's articles of association;
7. Preside over the Board of Directors Meeting and other corporate meetings and coordinate the Board of Directors for the implementation of Board of Commissioners/General Meeting of Shareholders meetings;
8. Provide information related to everything about the Company to stakeholders;
9. Acting as a supervisor or director of the Post-Merger Integration process of the Company;
10. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, RKM in the activities of Corporate Secretariat,

Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, serta Transformasi Korporasi dan Manajemen Program;

11. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Perusahaan (*corporate secretary*);
12. Menetapkan, mengarahkan, dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern (internal audit) berupa audit operasional dan audit/reviu dengan tujuan tertentu dilakukan secara efektif, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit/reviu untuk membantu Direksi menilai efektivitas penyelenggaraan pengawasan internal, manajemen risiko dan tata kelola Perseroan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan;
13. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan transformasi korporasi dan manajemen program;
14. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan Sekretariat Perusahaan, Pengawasan Intern serta Transformasi Korporasi dan Manajemen Program;
15. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di seluruh korporasi sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia.

Wakil Direktur Utama

Tugas pokok Wakil Direktur Utama adalah menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang Hukum, Manajemen Portofolio Anak Perusahaan dan Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan serta membantu Direktur Utama dalam memimpin Perseroan.

Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga. Wakil Direktur Utama berwenang memimpin rapat Direksi apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan.

Wakil Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam kegiatan hukum, manajemen portofolio anak perusahaan dan manajemen risiko, tata kelola dan kepatuhan serta mengawasi/mengevaluasi strategi yang telah ditetapkan;
2. Menetapkan, mengarahkan serta mengawasi/mengevaluasi strategi, pelaksanaan kegiatan hukum, manajemen portofolio Anak Perusahaan, dan manajemen risiko, tata kelola dan kepatuhan;
3. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja Anak Perusahaan, dan *Subholding* dalam mengimplementasikan RJPP dan RKAP, baik secara triwulan, semester dan tahunan atau sewaktu-waktu (jika dianggap perlu), serta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan RUPS Anak Perusahaan, *Subholding* Perusahaan Afiliasi, dan Perusahaan Terafiliasi baik luar biasa atau tahunan.

Internal Audit Unit, as well as Corporate Transformation and Program Management;

11. Establish, direct and supervise/evaluate the strategy and implementation of the Corporate Secretariat activities;
12. Establishing, directing, and supervising/evaluating the strategy and implementation of internal audit activities in the form of operational audits and audits/reviews with specific objectives carried out effectively, as well as monitoring follow-up on recommendations from audits/reviews to help the Board of Directors assess the effectiveness of internal control, risk management and good corporate governance in order to achieve the Company's objectives;
13. Establish, direct and supervise/evaluate the strategy and implementation of corporate transformation activities and programme management;
14. Coordinating and evaluating the preparation and implementation of Policies and Standard Operating Procedures (SPO) related to the activities of Corporate Secretariat, Internal Audit and Corporate Transformation and Program Management;
15. Ensuring the implementation of Employee development throughout the corporation in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital.

Vice President Director

The Vice President Director's main duty is to carry out part of the Company's management duties in the fields of Law, Subsidiary Portfolio Management and Risk Management, Governance and Compliance and to assist the President Director in leading the Company.

Vice President Director is authorised to act for and on behalf of Board of Directors and to perform the President Director's duties in the absence or inability of President Director for any reason whatsoever, which need not be proven to a third party. Vice President Director is authorised to chair the Board of Directors meeting if the President Director is not present or absent.

In performing his/her duties, Vice President Director is authorised to perform the following functions:

1. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, and RKM in legal activities, subsidiary portfolio management and risk management, governance and compliance as well as overseeing/evaluating the strategies that have been set;
2. Establish, direct and supervise/evaluate strategies, implementation of legal activities, portfolio management of subsidiaries, and risk management, governance and compliance;
3. Coordinating, controlling and evaluating the performance of Subsidiaries, and Subholding in implementing the RJPP and RKAP, either on a quarterly, semester and annual basis or at any time (if deemed necessary), as well as being responsible for coordinating the GMS of Subsidiaries, Subholding Affiliated Companies, and Affiliated Companies either extraordinary or annual.



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Menjalankan tugas <i>monitoring</i> kinerja pada Perseroan, Anak Perusahaan, <i>Subholding</i> Perusahaan Afiliasi, dan Perusahaan Terafiliasi; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan dukungan dalam aspek hukum, baik berupa pemberian pendapat hukum, reviu penyusunan dokumen hukum dan reviu penyusunan peraturan internal Perseroan, pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan internal Perseroan, pendampingan dan penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perseroan; 6. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Wakil Direktur Utama sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia; 7. Merupakan Koordinator Internal yang bertindak sebagai penanggung jawab koordinasi antar Direktorat dalam rangka pengelolaan ketercapaian performansi seluruh Direktorat secara kolektif serta bertanggung jawab atas pelaporan kinerja seluruh Direktorat kepada Direktur Utama; 8. Mengoordinasikan dan mengendalikan implementasi kebijakan, visi, misi, dan strategi Perseroan yang telah ditetapkan dalam RJPP, serta seluruh kegiatan Perseroan; 9. Melaporkan kinerja seluruh Direktorat secara kolektif kepada Direktur Utama serta memberikan konsultasi kepada Direktur Utama dalam pengambilan keputusan; 10. Bertindak sebagai pengawas proses Integrasi Paska Penggabungan Perseroan; 11. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu; 12. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang-bidang di bawah Wakil Direktur Utama atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Perform performance monitoring duties on the Company, Subsidiaries, Affiliated Subholding Companies, and Affiliated Companies; 5. Coordinating, controlling and evaluating support activities in legal aspects, both in the form of providing legal opinions, reviewing the preparation of legal documents and reviewing the preparation of the Company's internal regulations, checking compliance with the Company's internal regulations, assistance and handling legal issues in the context of implementing the Company's activities; 6. Ensure the implementation of Employee development under the Vice President Director's leadership in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital; 7. Act as Internal Coordinator in charge of coordination between Directorates in order to manage the performance achievement of all Directorates collectively and is responsible for reporting the performance of all Directorates to the President Director; 8. Coordinating and controlling the implementation of the Company's policies, vision, mission, and strategies set out in the RJPP, as well as all the Company's activities; 9. Reporting the performance of all Directorates collectively to the President Director and providing consultancy to the President Director in decision making; 10. Act as the supervisor of post-merger integration process; 11. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company based on authorisation from President Director on behalf of Board of Directors for certain matters; 12. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, particularly in areas under Vice President Director or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SPO. |
|--|--|

Direktur Keuangan

Tugas pokok Direktur Keuangan adalah menyelenggarakan tugas pengurusan Perseroan di bidang Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan dan Performa Keuangan, Layanan Keuangan dan Perpajakan. Direktur Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam Perseroan di bidang akuntansi, perbendaharaan, keuangan dan investasi;
2. Bertanggung jawab dalam penyusunan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian RKAP berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis Perseroan;
3. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan triwulan, semester, dan tahunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara tepat waktu;
4. Melaksanakan pemenuhan aspek perpajakan terkait dengan kegiatan Perseroan;

Finance Director

The Finance Director's main duty is to organise the management of the Company in the field of Accounting, Financial Management, Financial Planning and Performance, Financial Services and Taxation. Finance Director in carrying out his duties is authorised to carry out the following functions:

1. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, and RKM in the Company in the fields of accounting, treasury, finance and investment;
2. Responsible for preparing, coordinating, controlling and evaluating the achievement of RKAP based on the needs and strategic plans of the Company;
3. Coordinating, controlling and evaluating the activities of recording financial transactions and preparing quarterly, semester, and annual reports in accordance with applicable accounting standards in a timely manner;
4. Carrying out the fulfilment of taxation aspects related to the Company's activities;

5. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan optimalisasi dana Perseroan secara akuntabel dan memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui kegiatan penempatan dana pada bank dan/atau instrumen pasar uang lainnya termasuk kegiatan pengadministrasian untuk menjamin ketersediaan dana guna membiayai kegiatan operasional Perseroan;
6. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan atau upaya-upaya untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga guna membiayai kegiatan Perseroan sehingga dapat bertumbuh dan mencapai tujuan/strategi yang ditetapkan;
7. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penggunaan anggaran Perseroan serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembayaran dan penagihan ke pihak lain terkait kegiatan Perseroan;
8. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengembangan di bidang akuntansi, perbendaharaan dan keuangan sesuai dengan RKAP, RJPP dan/atau rencana bisnis Perseroan;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administrasi, dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perseroan terkait dengan bidang akuntansi;
10. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan keuangan;
11. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan, khususnya dalam bidang tugas keuangan atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;
12. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
13. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Direktur Keuangan sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia;
14. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan di bidang Keuangan yang dijalankan baik di Perseroan, Anak Perusahaan, *Subholding*, Perusahaan Afiliasi, dan Perusahaan Terafiliasi.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Tugas pokok Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum adalah menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang Strategi SDM, Pengelolaan SDM, Layanan SDM, serta Pengadaan. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam Perusahaan di bidang Strategi SDM, Pengelolaan SDM, Layanan SDM serta Pengadaan;
2. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penyusunan *Human Capital Roadmap*;

Human Capital and General Affairs Director

The Human Capital and General Affairs Director's main duty is to carry out part of the Company's management duties in the field of HC Strategy, HC Management, HC Services, and Procurement. In carrying out his duties, Human Capital and General Affairs Director is authorised to carry out the following functions:

1. Leading and determining strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, and RKM in the Company in the fields of HC Strategy, HC Management, HC Services and Procurement;
2. Coordinating, controlling and evaluating the preparation of the Human Capital Roadmap;



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi desain dan penyalarsan struktur organisasi serta perencanaan SDM; 4. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan Sumber Daya Manusia bidang pengelolaan SDM Anak Perusahaan agar sejalan dengan tujuan Perseroan; 5. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan strategi kebijakan serta implementasi <i>secondment agreement</i> antar Induk dan Anak Perusahaan; 6. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pengelolaan pelayanan bidang SDM yang terdiri dari pelayanan Pekerja, <i>payroll</i> dan Administrasi serta pengelola alih daya; 7. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi integrasi <i>Human Capital System</i> terdiri dari revidu dan penyalarsan kebijakan SDM serta pengembangan sistem informasi <i>human capital</i>; 8. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan desain remunerasi, harmonisasi remunerasi, desain strategi program <i>exit plan</i> serta desain <i>reward</i> dan <i>punishment</i>; 9. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pengembangan karir Pekerja; 10. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan bidang hubungan Pekerja termasuk <i>survey</i> kepuasan dan keterikatan Pekerja; 11. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengembangan kebijakan Sumber Daya Manusia yang meliputi perencanaan strategi Sumber Daya Manusia, Pengelolaan SDM, dan Layanan SDM dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya yang selaras dengan Rencana Jangka Pendek dan Jangka Panjang Perusahaan; 12. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan rekrutmen, pengembangan Sumber Daya Manusia; 13. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan dan pengelolaan kinerja individu; 14. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi program bagi SDM yang telah mencapai masa pensiun termasuk program persiapan pensiun; 15. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pemenuhan sarana/prasarana kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Perseroan termasuk memelihara dan mengadministrasikan aset-aset Perseroan yang dipergunakan untuk operasional rutin Perseroan secara akuntabel; 16. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengarsipan atas dokumen-dokumen Perseroan; 17. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Sumber Daya Manusia dalam rangka memberikan dukungan yang optimal pada kegiatan Perseroan; 18. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan strategi Sumber Daya Manusia, pembelajaran, layanan SDM serta pengadaan; 19. Memberikan persetujuan atau keputusan atas pelaksanaan kegiatan di bidang strategi Sumber Daya Manusia, | <ol style="list-style-type: none"> 3. Coordinating, controlling and evaluating the design and alignment of organisational structure and HC planning; 4. Coordinating, controlling and evaluating Human Capital policies in the field of HC management of Subsidiaries to be in line with the Company's objectives; 5. Coordinating, controlling and evaluating the preparation of policy strategies and implementation of <i>secondment agreements</i> between the Parent and Subsidiaries; 6. Coordinating, controlling and evaluating the management of HC services consisting of Worker services, payroll and Administration and outsourcing management; 7. Coordinating, controlling and evaluating the integration of Human Capital System consisting of reviewing and aligning HC policies and developing human capital information systems, 8. Coordinating, controlling and evaluating the preparation of remuneration design, remuneration harmonisation, exit plan strategy design and reward and punishment design, 9. Coordinating, controlling, and evaluating Employee career development; 10. Coordinating, controlling, and evaluating the management of Employee relations activities including Employee satisfaction and engagement surveys; 11. Coordinating, controlling and evaluating Human Resources policy development activities which include Human Capital strategy planning, Human Capital Management, and Human Capital Services in order to improve the competence and productivity of resources in line with the Company's Short Term and Long Term Plans; 12. Coordinating, controlling and evaluating recruitment activities, Human Capital development; 13. Coordinating, controlling and evaluating policies and individual performance management; 14. Coordinating, controlling and evaluating programmes for HC who have reached retirement age including retirement preparation programmes; 15. Coordinating, controlling and evaluating activities to fulfil work facilities/infrastructure in order to support the Company's activities, including maintaining and administering the Company's assets used for the Company's routine operations in an accountable manner; 16. Coordinating, controlling and evaluating archiving activities for Company documents; 17. Coordinating, controlling and evaluating Human Capital activities in order to provide optimal support to the Company's activities; 18. Coordinate and evaluate the preparation and implementation of Policies and Standard Operating Procedures (SPO) related to Human Capital strategy activities, learning, HC services and procurement; 19. Provide approval or decision on activities implementation in Human Capital strategy, HC management, HC services, |
|--|--|

- pengelolaan SDM, layanan SDM, serta pengadaan sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi;
20. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 21. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan, khususnya dalam bidang-bidang di bawah Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;
 22. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
 23. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia.

Direktur Strategi

Tugas pokok Direktur Strategi adalah menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan dibidang Strategi Korporasi dan Inovasi, Pengembangan Bisnis dan Aliansi Strategis, Teknologi Informasi dan Manajemen Investasi. Direktur Strategis dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam kegiatan perencanaan strategis, pengembangan bisnis dan aliansi strategis, teknologi informasi dan manajemen investasi, serta mengawasi/mengevaluasi strategi yang telah ditetapkan;
2. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan strategi korporasi dan inovasi, pengembangan bisnis dan aliansi strategis, teknologi informasi dan manajemen investasi;
3. Bertanggung jawab atas penetapan visi, misi, dan nilai Perseroan;
4. Bertanggung jawab atas penetapan strategi Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan visi misi Perseroan;
5. Mengarahkan dan mengendalikan implementasi kebijakan, visi, misi, dan strategi Perseroan yang telah ditetapkan dalam RJPP;
6. Bertanggung jawab atas penetapan strategi pengembangan bisnis Perseroan guna memberikan dukungan yang optimal pada kegiatan Perseroan;
7. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan, khususnya dalam bidang-bidang di bawah Direktur Strategi atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait,
8. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;

- and procurement in accordance with the delegation of authority from the Board of Directors;
20. Coordinating, controlling and evaluating the procurement of goods and services in accordance with applicable regulations;
 21. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, particularly in the areas under the Human Capital and General Affairs Director or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SPO;
 22. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company based on authorisation from President Director on behalf of Board of Directors for certain matters;
 23. Ensuring the implementation of Employee development under the Human Capital and General Affairs Director in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital.

Strategy Director

The Strategy Director's main duty is to carry out part of the Company's management duties in the field of Corporate Strategy and Innovation, Business Development and Strategic Alliances, Information Technology and Investment Management. In carrying out his/her duties, Strategy Director is authorised to carry out the following functions:

1. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, and RKM in strategic planning activities, business development and strategic alliances, information technology and investment management, as well as overseeing/evaluating the strategies that have been set;
2. Determining, directing and supervising/evaluating the strategy and implementation of corporate strategy and innovation activities, business development and strategic alliances, information technology and investment management;
3. Responsible for establishment of the Company's vision, mission and values;
4. Responsible for establishment of the Company's strategy in order to achieve the Company's goals and objectives in accordance with the Company's vision and mission;
5. Directing and controlling the implementation of the Company's policies, vision, mission, and strategies that have been set out in the RJPP;
6. Responsible for determining the Company's business development strategy in order to provide optimal support to the Company's activities;
7. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, particularly in areas under the Strategy Director or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SPO,
8. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company based on authorisation from President Director on behalf of Board of Directors for certain matters;



9. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Direktur Strategi sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia.

Direktur Investasi

Tugas pokok Direktur Investasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perseroan di bidang fasilitas pelabuhan, peralatan pelabuhan, manajemen proyek dan manajemen aset. Direktur Investasi dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, suprastruktur, pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan, manajemen proyek serta manajemen aset;
2. Melakukan kajian investasi serta menetapkan prioritas investasi baik fasilitas maupun peralatan pelabuhan sebagai usulan kepada komite investasi untuk dituangkan ke dalam RKAP;
3. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, suprastruktur dan alat apung pelabuhan, pengembangan serta pemeliharaan fasilitas pelabuhan, manajemen proyek;
4. Memberikan persetujuan atau keputusan bisnis di bidang teknik sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi;
5. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan investasi;
6. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan, khususnya dalam bidang tugas teknik atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;
7. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
8. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang di bawah Direktur Investasi yang dijalankan baik di Perseroan, Anak Perusahaan, *Subholding*, Perusahaan Afiliasi, dan Perseroan Terafiliasi;
9. Memimpin dan menetapkan strategi *sustainable development* dan *Green Port* dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan visi misi Perusahaan;
10. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, portofolio aset serta penyelesaian aset bermasalah yang belum dikomersialisasi;
11. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Direktur Investasi sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia.

Direktur Pengelola

Tugas pokok Direktur Pengelola adalah menyelenggarakan tugas pengurusan Perseroan di bidang Pelayanan Terminal, Pelayanan Kapal, Pelayanan Pelanggan, serta K3 dan Sistem Manajemen. Direktur Pengelola dalam melaksanakan tugasnya, berwenang

9. Ensuring the implementation of Employee development under the Strategy Director's leadership in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital.

Investment Director

The Investment Director's main duty is to carry out part of the Company's management duties in the field of port facilities, port equipment, project management and asset management. In carrying out his duties, Investment Director is authorised to carry out the following functions:

1. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, and RKM in infrastructure development activities, superstructure, maintenance of port facilities and equipment, project management and asset management;
2. Conduct investment studies and determine investment prioritisation in both port facilities and equipment as a proposal to the investment committee to be included in the RKAP;
3. Coordinating, controlling and evaluating the implementation of infrastructure development activities, superstructure and port floating equipment, development and maintenance of port facilities, project management;
4. Providing approval or business decisions in the field of engineering in accordance with delegation of authority from the Board of Directors;
5. Coordinating and evaluating the preparation and implementation of Policies and Standard Operating Procedures (SPO) related to investment activities;
6. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, particularly in the field of engineering duties or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SPO;
7. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company based on authorisation from President Director on behalf of Board of Directors for certain matters;
8. Coordinating and evaluating policies and activities in the fields under the Investment Director that are carried out both in the Company, Subsidiaries, Subholding, Affiliated Companies, and Affiliated Companies;
9. Leading and establishing sustainable development and Green Port strategies in order to achieve the Company's goals and objectives in accordance with the Company's vision and mission;
10. Coordinating, controlling and evaluating the implementation of land acquisition activities, asset portfolios and settlement of problematic assets that have not been commercialised;
11. Ensuring the implementation of Employee development under the Investment Director's leadership in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital.

Managing Director

The Managing Director's main duty is to organise the management of the Company in the field of Terminal Services, Ship Services, Customer Services, as well as OHS and Management Systems. In carrying out his duties, Managing

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam Perseroan di bidang pelayanan terminal, pelayanan kapal, Pelayanan Pelanggan serta Sistem K3 dan Manajemen Mutu yang telah ditetapkan, serta potensi pendapatan lainnya dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan bagi Perseroan;
2. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kapal, pelayanan terminal, pelayanan pelanggan serta K3 dan Sistem Manajemen dari strategi yang telah ditetapkan;
3. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan untuk pemenuhan optimalisasi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan pelanggan baik dalam rangka implementasi strategi Perseroan, melaksanakan tugas dari Pemerintah maupun dari *stakeholders*,
4. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi implementasi kegiatan strategi kegiatan pemberian jasa pelabuhan antara lain dalam rangka kegiatan pengelolaan layanan pandu dan tunda, pengelolaan bongkar muat barang, pengelolaan terminal penumpang, dan manajemen sistem informasi yang terintegrasi dengan *stakeholders*,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan,
6. Administrasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perseroan terkait dengan bidang pengelola secara baik, akurat, aman, dan tepat waktu baik untuk keperluan internal maupun eksternal Perseroan;
7. Memberikan persetujuan atau keputusan bisnis di bidang pengelola sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi;
8. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan pengelola;
9. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan, khususnya dalam bidang tugas pengelola atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;
10. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perseroan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
11. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Direktur Pengelola sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia;
12. Melaporkan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas kepada Direktur Utama;
13. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan pada setiap bidang di bawah Direktur Pengelola.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan RUPS belum

Director is authorised to carry out the following functions:

1. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP and RKM in the Company in the field of terminal services, ship services, Customer Services and OHS and Quality Management Systems that have been determined, as well as other potential revenues with the aim of optimising revenue for the Company;
2. Coordinating, controlling and evaluating the implementation of ship services, terminal services, customer services and OHS and Management Systems from the strategies that have been set;
3. Coordinating, controlling and evaluating activities to fulfil the optimisation of port services, customer services both in the context of implementing the Company's strategy, carrying out tasks from the Government and from stakeholders,
4. Coordinating, controlling and evaluating the implementation of strategic activities of port service provision activities, among others, in the framework of guide and tug service management activities, management of loading and unloading of goods, management of passenger terminals, and management of information systems integrated with stakeholders,
5. Coordinating the implementation, evaluating and approving recording activities,
6. Administration and documentation as well as the preparation of Company management reports related to the field of management in a good, accurate, safe and timely manner both for internal and external purposes of the Company;
7. Providing approval or business decisions in the field of management in accordance with the delegation of authority from the Board of Directors;
8. Coordinating and evaluating the preparation and implementation of policies and Standard Operating Procedures (SPO) related to management activities;
9. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, especially in the field of management duties or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SPO;
10. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company based on authorisation from President Director on behalf of Board of Directors for certain matters;
11. Ensuring the implementation of Employee development under the Managing Director's leadership in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital;
12. Reporting the duties as mentioned above to the President Director;
13. Coordinating and evaluating policies and activities in each field under the Managing Director.

BOARD OF DIRECTORS' TENURE

The tenure of a member of Board of Directors is set at 5 (five) years, and may be reappointed for 1 (one) tenure. In the event that the tenure of a member of Board of Directors expires and the GMS has



dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya;
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

PERSYARATAN DIREKSI

1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi seseorang harus memenuhi persyaratan Materil, yaitu:
 - a. Keahlian;
 - b. Integritas;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pengalaman;
 - e. Jujur;
 - f. Perilaku yang baik;
 - g. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
2. Selain memenuhi kriteria huruf a di atas, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan harus memenuhi syarat formal, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.

3. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, selain memenuhi syarat materil dan syarat formal sebagaimana point a dan b di atas, maka seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
 - a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
 - c. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;

not been able to determine his/her successor, duties of the vacant member of Board of Directors shall be carried out in accordance with the provisions for filling vacant positions of members of Board of Directors. The Board of Directors member's tenure ends if:

1. He/she passed away;
2. His/her tenure ends, including resigning from his/her position;
3. Dismissed based on the GMS resolution;
4. No longer fulfils the requirements as a member of Board of Directors based on the provisions of the Company's Articles of Association and laws and regulations including prohibited concurrent positions.

BOARD OF DIRECTORS CRITERIA

1. To be appointed as a member of Board of Directors, a person must fulfil the material requirements, namely:
 - a. Expertise;
 - b. Integrity;
 - c. Leadership;
 - d. Experience;
 - e. Honesty;
 - f. Good behaviour;
 - g. High dedication to advance and develop the Company.
2. In addition to fulfilling the criteria in letter a above, to be appointed as a member of Board of Directors of the Company must fulfil the formal requirements, namely an individual who is capable of performing legal acts, unless within 5 (five) years prior to his/her appointment has been:
 - a. Declared bankrupt;
 - b. Be a member of Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing an SOE, Subsidiary and/or other business entity to be declared bankrupt; or
 - c. Convicted of a criminal offence that is detrimental to State finances, SOEs, subsidiaries and/or other business entities and/or related to the financial sector.

Fulfilment of these requirements is evidenced by a statement letter signed by the prospective member of Board of Directors and the letter is kept by the Company.

3. To be appointed as a member of Board of Directors, in addition to fulfilling the material and formal requirements as point a and b above, a person must also fulfil other requirements as follows:
 - a. Not a political party administrator, legislative candidate and/or legislative member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial Regional Representative Council, and Regency/City Regional Representative Council;
 - b. Not a candidate for head/deputy head of the region and/or head/deputy head of the region, including the acting head/deputy head of the region;
 - c. Not serving as a member of Board of Directors at the relevant SOE or Subsidiary for 2 (two) periods;

- d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
 - e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
 - f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
 - g. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;
 - h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
4. Persyaratan lainnya
Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Direksi juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BOARD MANUAL - DIREKSI

Secara lebih rinci, pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam tentang Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) antara lain berisi tentang petunjuk Tata Laksana kerja Direksi menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan adanya *Board Manual*, diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) telah disahkan berdasarkan Nomor HK.01/27/11/2/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 27 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo telah diperbaharui sesuai dengan aturan terbaru Kementerian BUMN yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Pedoman tata tertib kerja Direksi dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dijelaskan secara khusus dalam Bab II, yang mencakup:

- a. Fungsi Direksi;
- b. Keanggotaan Direksi;

- d. Not currently serving as an official at a ministry/ agency, member of Board of Commissioners/ Supervisory Board at another SOE, member of Board of Directors at another SOE, member of Board of Directors at a Subsidiary and/or other business entity;
 - e. Not currently holding a position that based on laws and regulations is prohibited to be concurrent with the position of member of Board of Directors;
 - f. Have dedication and provide full time to perform their duties, which is stated in a statement letter from the person concerned;
 - g. Physically and mentally healthy, i.e. not suffering from an illness that may hinder the performance of duties as a member of Board of Directors, as evidenced by a medical certificate from a hospital;
 - h. Have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have performed the obligation to pay taxes for the last 2 (two) years.
4. Other requirements
In addition to fulfilling the general requirements, the appointment of members of Board of Directors is also carried out with due observance of the requirements stipulated in the prevailing laws and regulations.

BOARD MANUAL - BOARD OF DIRECTORS

In more detail, the guidelines and work procedures for Board of Directors are regulated in the Board of Directors and Board of Commissioners Work Procedures (Board Manual), among others, contains instructions for the Board of Directors work procedures explaining the stages of activity in a structured, systematic, easy to understand and can be carried out consistently, and can be a reference for Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the vision and mission of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). With the Board Manual, it is expected that high standards of work will be achieved in line with GCG principles. The Board of Commissioners and Board of Directors' Work Relationship Guidelines (Board Manual) have been approved based on Decree No. HK.01/27/11/2/TKPT/UTMA/PLND-23 dated November 27, 2023, regarding the Board of Commissioners and Board of Directors' Work Relationship Guidelines (Board Manual) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelindo's Board Manual has been updated in accordance with the latest rules of the Ministry of SOEs, namely Regulation of the Minister of SOEs Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

The guidelines and work procedures of Board of Directors in the Board Manual of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are specifically described in Chapter II, which includes:

- a. Functions of Board of Directors;
- b. Membership of Board of Directors;



- c. Independensi (Kemandirian) Direksi;
- d. Etika Jabatan Anggota Direksi;
- e. Tugas dan Wewenang Direksi;
- f. Kewajiban Direksi;
- g. Tanggung Jawab Direksi;
- h. Hak Direksi;
- i. Prinsip-prinsip Pengambilan Keputusan Direksi;
- j. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
- k. Organ Pendukung Direksi;
- l. Penilaian Kinerja Direksi;
- m. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi;
- n. Hubungan Perusahaan dengan *Sub Holding* dan/atau Anak Perusahaan.

- c. Independence of Board of Directors;
- d. Job Ethics of Members of Board of Directors;
- e. Duties and Authorities of Board of Directors;
- f. Obligations of Board of Directors;
- g. Responsibilities of Board of Directors;
- h. Rights of Board of Directors;
- i. Principles of Board of Directors Decision Making;
- j. Induction and Capabilities Improvement Program;
- k. Supporting Organs of Board of Directors;
- l. Board of Directors Performance Appraisal;
- m. Board of Directors Performance Evaluation Criteria;
- n. Company Relationship with Subholding and/or Subsidiaries.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,
5. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
7. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada badan usaha lain, kecuali:

1. Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan, selain sebagai komisaris utama; dan
2. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/ memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri.

Masa jabatan anggota Direksi BUMN yang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi Perseroan berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut. Berakhirnya jabatan Direksi dikukuhkan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri/RUPS.

POLICY OF BOARD OF DIRECTORS' CONCURRENT POSITIONS

Members of Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as mentioned below, namely:

1. Member of Board of Directors at State-Owned Enterprises (SOEs), Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises;
2. Member of Board of Commissioners/Supervisory Board in SOEs;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions in the laws and regulations,
5. Political party administrators and/or legislative candidates/ members and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head;
6. Other positions that may give rise to a conflict of interest; and/or
7. Legislative candidates or candidates for regional head/ deputy regional head.

In addition to concurrent positions as referred to, members of Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as members of Board of Commissioners at other business bureaus, except:

1. Board of Commissioners of subsidiaries/affiliated companies of the SOE concerned, other than as the president commissioner; and
2. Board of Commissioners in other business entities to represent/provide for the SOE's interests to the extent that they obtain permission from the Minister.

The tenure of a member of Board of Directors of an SOE who holds a concurrent position as a member of Board of Directors of the Company ends as of the occurrence of concurrent position. The end of tenure of Board of Directors is confirmed by the Ministerial Decree/GMS.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi
Board of Directors Concurrent Position

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position at Other Companies/ Institutions	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of Other Companies/ Institutions
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Vice Commissioner	PT Jakarta International Container Terminal
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	-	-
Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum Human Capital and General Affairs Director	Komisaris Commissioner	PT Pelindo Marine Service
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	-	-
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	-	-
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Komisaris Commissioner	PT Terminal Teluk Lamong
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	-	-

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Setiap anggota Direksi harus mematuhi etika terkait benturan kepentingan, sebagai berikut:

- Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
 - Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud Poin a di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

MANAGEMENT OF BOARD OF DIRECTORS CONFLICT OF INTEREST

Each member of Board of Directors must comply with ethics related to conflicts of interest, as follows:

- Must fill out a Special Register containing information on ownership of the shares and/or their families in other companies, including if they do not have share ownership, and periodically update at the end of each year and must notify the Company if there are changes to the data in accordance with the prevailing laws and regulations;
- Members of Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
 - There is a case before the Court between the Company and the concerned member of Board of Directors;
 - Concerned member of Board of Directors has a conflict of interest with the Company;
 - In the event of a situation as referred to in Point a above, those who are entitled to represent the Company are:
 - Other members of Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
 - Board of Commissioners in the event that all members of Board of Directors have a conflict of interest with the Company;
 - Other parties appointed by the GMS in the event that all members of Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.



- d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional perusahaan, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.
3. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau mengurangi keuntungan perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

- d. In the event of a conflict of interest, members of Board of Directors and Officers who report directly to the Board of Directors or have significant influence on Company policies and/or operations, are prohibited from taking actions that could harm the Company or reduce Company profits and are required to disclose conflicts of interest in every decision.
3. Make disclosures in the event of a conflict of interest and the member of Board of Directors concerned must not involve themselves in the Company's decision-making process relating to this matter. It is prohibited to take actions that could harm the Company or reduce Company profits and is required to disclose conflicts of interest in every decision.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Seluruh Direksi telah melaporkan kepada Perseroan terkait kepemilikan saham yang dimiliki baik di Pelindo maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham masing-masing Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

The entire Board of Directors has submitted a report to the Company regarding the ownership of shares both in Pelindo and in other companies. The share ownership of each Board of Directors can be seen in the table below:

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Board of Directors Share Ownership

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		Pelindo	Perusahaan Lain Other Companies
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum Human Capital and General Affairs Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Nihil Nil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Rejeki Sehat Sejahtera (550 lembar/shares) ▪ PT Rejeki Sehat Sejahtera (450 lembar/shares) ▪ PT Barokah Tani Sejahtera (399 lembar/shares)
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Nihil Nil	PGAS (2.523.000 lembar/shares)
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Nihil Nil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Aneka Kimia Raya (125.000 lembar/shares) ▪ PT Adaro Mineral (7.500 lembar/shares) ▪ PT Surya Eka Perkasa (23.500 lembar/shares)

RAPAT DIREKSI

KEBIJAKAN RAPAT

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan rapat Direksi, sepanjang keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Hal-Hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat Direksi sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar.
2. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.
3. Tindakan strategis lainnya.

Jadwal Rapat

Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi.

Penyelenggaraan Rapat Melalui Sarana Elektronik

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Panggilan Rapat

Panggilan rapat dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta menyertakan agenda dan materi rapat tersebut. Panggilan rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik

Agenda Rapat

Hanya anggota Direksi yang berhak mengajukan usulan agenda rapat. Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Perusahaan untuk diverifikasi kecukupan syarat-syarat untuk diajukan sebagai agenda rapat. Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka harus disetujui oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut.

Pimpinan Rapat

Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir maka telah diatur dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

MEETING POLICY

Board of Directors meeting is a meeting held by the Board of Directors. Binding decisions can also be made without holding a meeting, as long as the decision is approved in writing and signed by all members of Board of Directors.

Matters Requiring Decision-Making through a Board of Directors Meeting

Board of Directors determines matters that require decision-making through Board of Directors meeting as follows:

1. Actions related to the exercise of authority in accordance with provisions of Articles of Association.
2. Actions related to the procurement of goods and services in accordance with applicable provisions in the Company.
3. Other strategic actions.

Meeting Schedule

Board of Directors meetings shall be held periodically at least once in 1 (one) month, and in such meetings the Board of Directors may invite the Board of Commissioners. Board of Directors meetings may be held outside the regular schedule.

Meeting Place

Board of Directors meetings may be held at the Company's domicile or at the Company's place of business or at any other place in the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.

Meeting Holding Through Electronic Media

Board of Directors meetings may be held through teleconferencing media, video conferencing or other electronic media that allow all participants of Board of Directors meetings to see and hear each other directly and participate in the meeting.

Meeting Summons

Summons to a meeting shall be made in writing by a member of Board of Directors and delivered within a period of at least 3 (three) working days before the meeting is held. The Board of Directors meeting summons must include the event, date, time and place of the meeting and include the agenda and materials of the meeting. The summons for the Board of Directors meeting may be made through electronic media.

Meeting Agenda

Only members of Board of Directors are entitled to propose the meeting agenda. The proposed meeting agenda is collected by Corporate Secretary to verify the adequacy of requirements to be submitted as a meeting agenda. In the event that there is a proposal to add to the meeting agenda when the meeting is about to take place, it must be approved by all members of Board of Directors present at the meeting.

Meeting Chairman

All meetings of Board of Directors are chaired by the President Director, in the absence of President Director, it has been regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.



Kuorum Rapat

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Dalam hal anggota Direksi tidak hadir dalam rapat rutin, maka anggota Direksi tersebut dapat mewakilkan kepada anggota Direksi lainnya dengan memberikan Surat Kuasa kehadiran dengan mencantumkan pernyataan persetujuan atau penolakan atas agenda rapat, dengan alasan-alasannya.

Kehadiran Dalam Rapat Direksi yang Dilakukan Melalui Sarana Elektronik

Anggota Direksi dapat turut serta dalam rapat Direksi yang diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan tersebut menyatakan kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Direksi tersebut.

Etika Rapat

Setiap peserta rapat harus mendukung pelaksanaan rapat Direksi agar berjalan secara efektif. Tata tertib Rapat Direksi lebih lanjut diatur dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

1. Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan Direksi wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Untuk itu, Anggota Direksi yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.
2. Pengambilan Keputusan Keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak, dengan mekanisme yang telah diatur dalam dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Risalah Rapat. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Meeting Quorum

Board of Directors meetings are legal and entitled to make binding decisions, if attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of members of Board of Directors or their representatives. A member of BOD may be represented in the meeting only by another member of BOD based on a written authorisation given specifically for that purpose. A member of BOD may only represent one other member of BOD.

In the event that a member of Board of Directors is absent from a regular meeting, the member of Board of Directors may represent another member of Board of Directors by providing a Power of Attorney to attend by including a statement of approval or rejection of the meeting agenda, with the reasons.

Board of Directors Meeting Attendance Through Electronic Media

A member of Board of Directors may participate in the Board of Directors meeting held through teleconference, video conference, or other electronic means that allow all participants of the Board of Directors meeting to see and hear each other directly and participate in the meeting, and such participation certifies the presence of person concerned in the Board of Directors meeting.

Meeting Ethics

Each meeting participant must support the Board of Directors meeting to run effectively. The rules of Board of Directors Meeting are further regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Decision-Making in Meetings

1. Involvement in the Decision-Making Process Board of Directors must be involved in every decision-making process in the meeting. For this reason, members of Board of Directors who are not present at the time of decision-making must be contacted to immediately return to the meeting process. If they cannot be contacted, then the meeting participants are deemed to approve the meeting decisions taken.
2. Decision Making The Board of Directors meeting decision is determined by deliberation for consensus, if no agreement is reached, the decision is determined by a majority vote, with the mechanism regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Dissenting Opinion

Dissenting opinions that occur must be included in the Minutes of Meeting. Dissenting opinion does not mean giving the relevant member of Board of Directors the right not to implement the meeting's decision. Actions taken by members of Board of Directors outside those decided by the Board of Directors meeting are the personal responsibility of the person concerned until the action is approved by the Board of Directors meeting.

Risalah Rapat

Setiap rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Direksi disampaikan kepada seluruh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Setiap anggota Direksi berhak mendapatkan salinan risalah rapat.

Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

Dalam rangka memastikan tindak lanjut rapat sebelumnya, maka Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat Direksi

Anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang dibicarakan atas undangan dari Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris.

Pengambilan Keputusan Secara Sirkuler

Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Ketentuan keputusan yang diambil dalam bentuk Rapat Sirkuler telah diatur dalam dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

RENCANA RAPAT DIREKSI

Adapun rencana rapat Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Minutes of Meeting

Minutes of each Board of Directors meeting must be taken. The minutes of meeting are signed by the chairman of meeting and all members of Board of Directors present and administered by the Corporate Secretary. Minutes of the Board of Directors meeting shall be submitted to all Board of Directors no later than 7 (seven) business days. Each member of Board of Directors is entitled to obtain a copy of the minutes of meeting.

Evaluation of Follow-up of Previous Meetings

In order to ensure the follow-up of the previous meeting, Board of Directors must evaluate the matters that need to be followed up.

Board of Commissioners Attendance in Board of Directors Meeting

Members of Board of Commissioners may attend the Board of Directors meeting and provide views of Board of Commissioners on matters discussed at the invitation of Board of Directors or at the Board of Commissioners' request.

Circular Decision-Making

Decisions can also be made outside the Board of Directors meeting as long as all members of Board of Directors agree on the method and material to be decided. Provisions for decisions taken in the form of Circular Meetings have been regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

BOARD OF DIRECTORS MEETING PLAN

The Board of Directors meeting plan during 2023 is as follows:

1	Rencana Rapat Direksi Januari	Board of Directors Meeting Plan in January
1.1	Minggu ke-1	1 st week
	<i>CEO Direction</i>	CEO Direction
	Arah Pengembangan <i>Sub Holding</i> dan Anak Perusahaan Tahun 2024	Directions for Development of Sub-Holdings and Subsidiaries in 2024
	Tindak Lanjut Optimalisasi Pelabuhan Cabang	Follow-up on Branch Port Optimization
	<i>Progress</i> Penyelesaian Kontrak Kerja Sama yang Jatuh Tempo Tahun 2024	Progress on Completion of Cooperation Contracts Due in 2024
	Finalisasi Pemurnian Bisnis	Finalization of Business Refinement
	<i>Update</i> RKAP 2024 dan Usulan Investasi (Capex) 2024	Update on 2024 RKAP and 2024 Investment Proposal (Capex).
	<i>Update</i> NPEA	NPEA updates
	<i>Update</i> Progress DP4	DP4 Progress Update
	Lain-lain	Others



1.2	Minggu ke-3	3 rd week
	<i>CEO Direction</i>	CEO Direction
	Pembahasan RJPP	RJPP discussion
	Optimalisasi Lahan PT Pelindo	PT Pelindo Land Optimization
	<i>Revenue Sharing Subholding</i>	Revenue Sharing of Subholding
	Realisasi Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) s.d Desember 2023	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Performance Realization until December 2023
	Pembahasan Materi Rakomdir Januari 2024	Discussion of Material of BOD-BOC Meeting January 2024
	<i>Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT</i>	Update and progress of IT system evaluation and security
	<i>Update Temuan BPK</i>	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others
2	Rencana Rapat Direksi Februari	Board of Directors Meeting Plan in February
2.1	Minggu ke-1	1 st week
	<i>CEO Direction</i>	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Januari 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for the period January 2024
	<i>Update Pengerukan di Seluruh Wilayah Kerja Pelindo</i>	Dredging Updates in All Pelindo Work Areas
	Rencana Relokasi Alat dan Pengadaan Peralatan Pelabuhan	Equipment Relocation Plan and Port Equipment Procurement
	Rencana Investasi Baru dari Regional	New Regional Investment Plan
	<i>Update Temuan Audit</i>	Update on Audit Findings
	<i>Update Progress DP4</i>	DP4 Progress Update
	Lain-lain	Others
2.2	Minggu ke-3	3 rd week
	<i>CEO Direction</i>	CEO Direction
	Kerja Sama Lahan dengan Instansi Pemerintah	Land Collaboration with Government Agencies
	<i>Progress Proyek Strategis dan Isu Strategis Bidang Teknik di Regional</i>	Progress of Strategic Projects and Strategic Issues in the Regional Engineering Sector
	<i>Update Kerja Sama Usaha dengan Mitra Strategis di Pelindo</i>	Update on Business Collaboration with Strategic Partners at Pelindo
	Pembahasan Materi Rakomdir Februari 2024	Discussion of Material of BOD-BOC Meeting February 2024
	<i>Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT</i>	Update and progress of IT system evaluation and security
	<i>Update Temuan BPK</i>	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others

3	Rencana Rapat Direksi Maret	Board of Directors Meeting Plan in March
3.1	Minggu ke-1	1 st week
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Februari 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for the period February 2024
	Finalisasi Audit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia Tahun 2023	Finalization of PT Pelabuhan Indonesia Financial Report Audit for 2023
	Percepatan Kerja Sama Usaha	Acceleration of Business Cooperation
	Penyusunan Peraturan Direksi tentang Kerja Sama Usaha di Lingkungan Pelindo	Preparation of Board of Directors Regulations regarding Business Cooperation within Pelindo
	Update Progress DP4	DP4 Progress Update
	Lain-lain	Others
3.2	Minggu ke-3	3 rd week
	CEO Direction	CEO Direction
	Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan	Development of Port Infrastructure and Equipment
	Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and progress of IT system evaluation and security
	Pembahasan Materi Rakomdir Maret 2024	Discussion of Materials for BOD-BOC Meeting March 2024
	Update Temuan BPK	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others
4	Rencana Rapat Direksi April	Board of Directors Meeting Plan in April
4.1	Minggu ke-1	1 st week
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Maret 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for the period March 2024
	Pengembangan Kawasan Industri dan/atau Logistik	Development of Industrial and/or Logistics Areas
	Pengembangan Layanan Operasi Pelabuhan di luar Area Kerja Perusahaan	Development of Port Operation Services outside the Company's Work Area
	Penyusunan dan Standarisasi Master Data Operasional	Preparation and Standardization of Operational Master Data
	Lain-lain	Others
4.2	Minggu ke-3	3 rd week
	CEO Direction	CEO Direction
	Progress Proyek Strategis dan Isu Strategis Bidang Teknik di Regional	Progress of Strategic Projects and Strategic Issues in the Regional Engineering Sector
	Realisasi Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Triwulan I 2024	Performance Realization of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) First Quarter 2024
	Progress Penyusunan Pedoman Manajemen Proyek	Progress of Preparing Project Management Guidelines
	Pembahasan Materi Rakomdir April 2024	Discussion of Materials for BOD-BOC Meeting April 2024
	Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and progress of IT system evaluation and security
	Update Temuan BPK	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others



5 Rencana Rapat Direksi Mei		Board of Directors Meeting Plan in May
5.1	Minggu ke-1	1 st week
	CEO <i>Direction</i>	CEO <i>Direction</i>
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode April 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for the period April 2024
	Update Kerja Sama Usaha dengan Mitra Strategis di Pelindo	Update on Business Collaboration with Strategic Partners at Pelindo
	Konsolidasi Data Aset dan Program Kerja TIK seluruh Regional	Consolidation of Asset Data and ICT Work Programs throughout the Region
	Lain-lain	Others
5.2	Minggu ke-3	3 rd week
	CEO <i>Direction</i>	CEO <i>Direction</i>
	<i>Progress</i> Desain dan Implementasi <i>Dashboard Executive Summary</i>	Progress of Design and Implementation of Dashboard Executive Summary
	Pembahasan Materi Rakomdir bulan Mei 2024	Discussion of Materials for BOD-BOC Meeting May 2024
	Update dan <i>progress</i> evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and progress of IT system evaluation and security
	Update Temuan BPK	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others
6 Rencana Rapat Direksi Juni		Others Board of Directors Meeting Plan in June
6.1	Minggu ke-1	1 st week
	CEO <i>Direction</i>	CEO <i>Direction</i>
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Mei 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for the period May 2024
	Rencana Pelimpahan Terminal Non Petikemas yang dikelola oleh Cabang Pelabuhan kepada <i>Sub Holding</i>	Plan for Handover of Non-Container Terminals managed by the Port Branch to Sub Holding
	Lain-lain	Others
6.2	Minggu ke-3	3 rd week
	CEO <i>Direction</i>	CEO <i>Direction</i>
	<i>Progress</i> Proyek Strategis dan Isu Strategis Bidang Teknik di Regional	Progress of Strategic Projects and Strategic Issues in the Regional Engineering Sector
	Pembahasan Materi Rakomdir Juni 2024	Discussion of Materials for BOD-BOC Meeting June 2024
	Update dan <i>progress</i> evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and progress of IT system evaluation and security
	Update Temuan BPK	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others

7	Rencana Rapat Direksi Juli	Board of Directors Meeting Plan in July
7.1	Minggu ke-1	1 st week
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Juni 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for the period June 2024
	Update Progress Dashboarding Pelaporan Peralatan Pelabuhan	Port Equipment Reporting Dashboarding Progress Update
	Realisasi Kinerja Semester I 2024	Realization of Performance in Semester I 2024
	Lain-lain	Others
7.2	Minggu ke-3	3 rd week
	CEO Direction	CEO Direction
	Progress Optimalisasi Peralatan	Equipment Optimization Progress
	Realisasi Investasi Semester I 2024	Investment Realization Semester I 2024
	Realisasi KPI dan RKM Semester I 2024	Realization of KPI and RKM Semester I 2024
	Pembahasan Materi Rakomdir Juli 2024	Discussion of Materials for BOD-BOC Meeting July 2024
	Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and progress of IT system evaluation and security
	Update Temuan BPK	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others
8	Rencana Rapat Direksi Agustus	Board of Directors Meeting Plan in August
8.1	Minggu ke-1	1 st week
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Juli 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for the period July 2024
	Progress Standardisasi Teknis Peralatan	Progress of Technical Standardization of Equipment
	Progress Pengembangan Kawasan Industri dan/atau Logistik	Progress of Industrial and/or Logistics Area Development
	Standarisasi Sistem Manajemen Mutu	Quality Management System Standardization
	Lain-lain	E Others tc
8.2	Minggu ke-3	3 rd week
	CEO Direction	CEO Direction
	Progress Dashboard Monitoring Availability dan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan	Progress Dashboard Monitoring Availability and Maintenance of Port Facilities
	Progress Penyusunan Database Sertifikasi Health, Safety, Security, Environment (HSSE) Management System	Progress in Preparing the Health, Safety, Security, Environment (HSSE) Management System Certification Database
	Pembahasan Materi Rakomdir Agustus 2024	Discussion of Materials for BOD-BOC Meeting August 2024
	Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and progress of IT system evaluation and security
	Update Temuan BPK	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others



9 Rencana Rapat Direksi September		Board of Directors Meeting Plan in September
9.1	Minggu ke-1	1 st week
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Agustus 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for the period August 2024
	Progress Pengembangan Aplikasi TCS	TCS Application Development Progress
	Update Progress Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan	Update on Port Infrastructure and Equipment Development Progress
	Lain-lain	Others
9.2	Minggu ke-3	3 rd week
	CEO Direction	CEO Direction
	Progress Peningkatan Pelayanan melalui Key Account Management Terintegrasi	Progress in Service Improvement through Integrated Key Account Management
	Tantiem BOD BOC Subholding	Bonus for BOD BOC Subholding
	Pembahasan Materi Rakomdir September 2024	Discussion of Materials for BOD-BOC Meeting September 2024
	Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and progress of IT system evaluation and security
	Update Temuan BPK	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others
10 Rencana Rapat Direksi Oktober		Board of Directors Meeting Plan in October
10.1	Minggu ke-1	1 st week
	CEO Direction	CEO Direction
	Penyampaian Laporan Usulan Investasi 2024	Submission of the 2024 Investment Proposal Report
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode September 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for the period September 2024
	Lain-lain	Others
10.2	Minggu ke-3	3 rd week
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Kinerja Triwulan III 2024	Third Quarter 2024 Performance Report
	Usulan Percepatan Penyerapan Investasi 2024	Proposal to Accelerate Investment Absorption in 2024
	Progress Mapping Aset Lahan berdasarkan Alas Hak	Progress Mapping of Land Assets based on Rights Base
	Laporan Realisasi Investasi Triwulan III 2024	Third Quarter 2024 Investment Realization Report
	Pembahasan Materi Rakomdir bulan Oktober 2024	Discussion of Materials for BOD-BOC Meeting October 2024
	Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and progress of IT system evaluation and security
	Update Temuan BPK	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others

11 Rencana Rapat Direksi November		Board of Directors Meeting Plan in November
11.1	Minggu ke-1	1 st week
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Oktober 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for the period October 2024
	Update Usulan RKAP 2025 dan Usulan Investasi (Capex) 2025	Update on Proposed RKAP 2025 and Proposed Investment (Capex) 2025
	Usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2025	Proposed 2025 Company Budget Work Plan
	Review Pelaksanaan Ketentuan Tambahan Tarif atas Pelayanan Jasa Kapal	Review of the Implementation of Additional Tariff Provisions for Ship Services
	Update Temuan Audit	Update Audit Findings
	Lain-lain	Others
11.2	Minggu ke-3	3 rd week
	CEO Direction	CEO Direction
	Progress Database Kerja Sama Lahan	Progress of Land Cooperation Database
	Pembahasan Materi Rakomdir bulan November 2024	Discussion of Materials for BOD-BOC Meeting November 2024
	Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and progress of IT system evaluation and security
	Update Temuan BPK	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others
12 Rencana Rapat Direksi Desember		Board of Directors Meeting Plan in December
12.1	Minggu ke-1	1 st week
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode November 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for the period November 2024
	Usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2025	Proposed 2025 Company Budget Work Plan
	Update Persiapan Nataru	Nataru Preparation Update
	Lain-lain	Others
12.2	Minggu ke-3	3 rd week
	CEO Direction	CEO Direction
	Update Progress Standardisasi Teknis Peralatan	Update on Equipment Technical Standardization Progress
	Laporan RKM Strategis Kantor Pusat	Head Office Strategic RKM Report
	Pembahasan Materi Rakomdir Desember 2024	Discussion of Materials for BOD-BOC Meeting December 2024
	Realisasi KPI dan RKM Akhir Tahun 2024	Realization of KPI and RKM at the end of 2024
	Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and progress of IT system evaluation and security
	Update Temuan BPK	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Others



AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

AGENDA, DATE AND PARTICIPANTS OF BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Throughout 2023, the agenda, dates and participants of Board of Directors Meetings are as follows.

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1.	Selasa, 3 Januari 2023 Tuesday, January 3, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. Pemaparan <i>Progress Job Person Matching (JPM)</i> di Kantor Pusat (<i>confidential</i>) 3. Usulan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat (<i>Confidential</i>) 4. <i>Update Shared Service Center</i> Bidang Keuangan 5. <i>Proper PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</i> 6. <i>Update Progress BNCT</i> 7. Pengembangan Kawasan Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe 8. <i>Local Crane Manufacture SPJM</i> 9. Tindak Lanjut Kerja Sama Sewa Peralatan Bongkar Muat RTG Dengan PT Barata Indonesia (Persero) 10. Rencana Desain <i>Convention Hall</i> di PETO 11. <i>Progress Pelaksanaan Pekerjaan BMTH yang menggunakan Anggaran PMN</i> 12. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. Presentation of Job Person Matching (JPM) Progress at Head Office (<i>confidential</i>) 3. Proposed Changes to Head Office Organisation Structure (<i>Confidential</i>) 4. Finance Shared Service Centre Update 5. <i>Proper PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</i> 6. BNCT Progress Update 7. Arun Lhokseumawe Special Area (SEZ) Development 8. Local Crane Manufacture SPJM 9. Follow-up Cooperation of RTG Loading and Unloading Equipment Lease with PT Barata Indonesia (Persero) 10. Convention Hall Design Plan at PETO 11. Progress of BMTH Work Implementation that uses the PMN Budget 12. Others 	Arif Suhartono Hambra Ihsanuddin Usman Putut Sri Muljanto Mega Satria Boy Robyanto Prasetyo	Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
2	Rabu, 24 Januari 2023 Wednesday, January 24, 2023	1. CEO <i>Direction</i>	Arif Suhartono	Hadir Present	
		2. FS Terminal Multipurpose Batang	Hambra	Hadir Present	
		3. Reviu FS dan RIP Kuala Tanjung (<i>Re-master planning</i> Kuala Tanjung)	Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
		4. Tindak Lanjut Status Pengawasan DP4	Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
		5. Laporan Kinerja <i>Unaudited</i> Tahun 2022	Mega Satria	Hadir Present	
		6. Usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2023	Boy Robyanto	Hadir Present	
		7. Lanjutan Aksi Korporasi- <i>Buyback Global Bonds</i> pada Tahun 2023	Prasetyo	Hadir Present	
		8. Penyelesaian Permasalahan Aset Lahan di Kelurahan Lumpur Gresik			
		9. Lain-lain			
3.	Senin, 13 Februari 2023 Monday, February 13, 2023	1. CEO <i>Direction</i>	Arif Suhartono	Hadir Present	
		2. Rapat Tinjauan Manajemen Puncak Sistem Manajemen Anti Penyipuan ISO 37001:2016	Hambra	Hadir Present	
		3. Laporan Insiden <i>Fatality</i> Januari 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
		4. Pemaparan Struktur Organisasi <i>Subholding</i> dan Regional dalam Kajian Penyusunan <i>Business Process Architecture</i>	Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
		5. Pembahasan Mekanisme Transformasi PT Rukindo	Mega Satria	Hadir Present	
		6. Rencana Pengelolaan Lahan Pendukung di Pelabuhan Kijing	Boy Robyanto	Tidak Hadir Absent	Cuti Leave
		7. Rencana Pemanfaatan BMN di Pelabuhan Arar, Sorong	Prasetyo	Hadir Present	
		8. Lain-lain			
		9. Others			



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
4.	Senin, 6 Maret 2023 Monday, March 6, 2023	1. CEO <i>Direction</i>	Arif Suhartono	Hadir Present	
		2. Rencana Divestasi Anak Perusahaan Rumah Sakit Pelindo <i>Group</i>			
		3. Laporan <i>Job Person Matching (Confidential)</i>	Hambra	Hadir Present	
		4. Fasilitas Perjalanan Dinas Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) <i>(Confidential)</i>			
		5. Lain-lain	Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
		1. CEO <i>Direction</i>			
5.	Selasa, 4 April 2023 Tuesday, April 4, 2023	2. Pelindo <i>Group Hospital Subsidiary Divestment Plan</i>	Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
		3. <i>Job Person Matching Report (Confidential)</i>			
		4. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) <i>Employee Service Travel Facility (Confidential)</i>	Mega Satria	Hadir Present	
		5. Others			
			Boy Robyanto	Hadir Present	
			Prasetyo	Hadir Present	
5.	Selasa, 4 April 2023 Tuesday, April 4, 2023	1. CEO <i>Direction</i>	Arif Suhartono	Hadir Present	
		2. Bantuan Uang Sembako bagi Pensiunan tahun 2023 <i>(confidential)</i>			
		3. Rencana Bisnis DP3 dan DP4	Hambra	Hadir Present	
		4. Progres sengketa pajak Tahun Pajak 2019 serta Pemeriksaan Pajak Tahun 2021			
		5. Progres Audit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022	Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
		6. <i>Update Progres Pemilihan Mitra New Priok Eastern Access (NPEA)</i>	Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
		7. <i>Update Progres Pelabuhan di IKN</i>			
		8. <i>Update Progres Terminal Multipurpose Batan</i>	Mega Satria	Hadir Present	
		9. Pengerukan Kali Perak			
		10. Strategi Kerja Sama dengan PT Pelabuhan Indonesia Maspion	Boy Robyanto	Hadir Present	
		11. Lain-lain			
	1. CEO <i>Direction</i>				
	2. Basic food allowance for 2023 retirees <i>(confidential)</i>	Prasetyo	Hadir Present		
	3. DP3 and DP4 Business Plan				
	4. Tax dispute progress for Fiscal Year 2019 and Tax Audit for 2021				
	5. Audit Progress of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Financial Statements for Fiscal Year 2022				
	6. Update on the Progress of Partner Selection for New Priok Eastern Access (NPEA)				
	7. Update on Port Progress in IKN				
	8. Update on Batan Multipurpose Terminal Progress				
	9. Dredging of Perak River				
	10. Cooperation Strategy with PT Pelabuhan Indonesia Maspion				
	11. Others				

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
6.	Rabu, 10 Mei 2023 Wednesday, May 10, 2023	1. CEO <i>Direction</i>	Arif Suhartono	Hadir Present	
		2. Progres Rencana Kerja Sama dan Penyelesaian Permasalahan Aset Lahan dengan PT DKB (Di Regional 2 Cabang Tanjung Priok dan Cirebon)	Hambra	Hadir Present	
		3. <i>Update</i> Progres Terminal Multipurpose Batang	Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
		4. Perubahan Desain dan <i>Layout</i> Area Pengembangan I BMTH	Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
		5. <i>Update Progress</i> Pemilihan Mitra NPEA	Mega Satria	Hadir Present	
		6. Laporan <i>Progress</i> Pengadaan Tanah Kijing	Boy Robyanto	Hadir Present	
		7. Pengerukan Kali Perak	Prasetyo	Hadir Present	
		8. Strategi Kerja Sama dengan PT Pelabuhan Indonesia Maspion			
		9. Pengerukan Kali Perak			
		10. Lain-lain			
7.	Selasa, 23 Mei 2023 Tuesday, May 23, 2023	1. CEO <i>Direction</i>	Arif Suhartono	Hadir Present	
		2. <i>Update Job Person Matching (Confidential)</i>	Hambra	Hadir Present	
		3. Pembahasan Persetujuan Valuasi Aktuaris DP4 Tahun 2022	Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
		4. Evaluasi Pendataan SDM tahun 2022 & 2023	Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
		5. Laporan Kinerja Perusahaan s/d April 2023	Mega Satria	Hadir Present	
		6. Rencana Pengembangan Sunda Kelapa <i>Heritage Port</i>	Boy Robyanto	Hadir Present	
		7. Agenda RUPS Tahun Buku 2022	Prasetyo	Hadir Present	
		8. <i>Update</i> dan inisiatif strategis yang dilakukan dalam rangka penurunan biaya logistik nasional mengacu pada laporan <i>Logistic Performance Index World Bank 2023</i>			
		9. Lain-lain			
		10. CEO <i>Direction</i>			
		2. Update of Job Person Matching (Confidential)			
		3. Discussion on Approval of Actuary Valuation for 2022 DP4			
		4. Evaluation of HC Data Collection in 2022 & 2023			
		5. Company Performance Report up to April 2023			
		6. Sunda Kelapa Heritage Port Development Plan			
		7. Agenda of the GMS for Fiscal Year 2022			
		8. Update and strategic initiatives undertaken in order to reduce national logistics costs referring to the 2023 World Bank Logistic Performance Index report.			
		9. Others			



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
8.	Selasa, 13 Juni 2023 Tuesday, June 13, 2023	1. CEO <i>Direction</i>	Arif Suhartono	Hadir Present	
		2. Bonus Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2022 - <i>Confidential</i>			
		3. <i>Re-Assessment</i> Klasifikasi Risiko <i>Subholding</i> dan Anak Perusahaan.	Hambra	Hadir Present	
		4. Perhitungan Penggunaan Saldo Laba <i>Subholding</i> /Anak Perusahaan Tahun Buku 2022	Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
		5. <i>Progress</i> Laporan Kajian ERP			
		6. <i>Update Progress</i> Evaluasi dan Keamanan Sistem IT	Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
		7. Rencana Pemindahan Kapal Ro-Ro ASDP, Kapal Pelra dan Kapal Negara Ke Wae Kelambu	Mega Satria	Hadir Present	
		8. Tindak lanjut hasil studi penataan PAI BMTH			
		9. Lain-lain	Boy Robyanto	Hadir Present	
		1. CEO <i>Direction</i>			
2. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Employee Bonus 2022 - <i>Confidential</i>					
3. <i>Re-Assessment</i> of <i>Subholding</i> and Subsidiary Risk Classification.	Prasetyo	Hadir Present			
4. Calculation of the Use of Profit Balance of <i>Subholding</i> /Subsidiaries for Fiscal Year 2022					
5. <i>Progress</i> of ERP Study Report					
6. Update on IT System Evaluation and Security Progress					
7. Plan to Move ASDP Ro-Ro Ships, Pelra Ships and State Ships to Wae Kelambu					
8. Follow-up on the results of BMTH PAI arrangement study					
9. Others					
9.	Selasa, 20 Juni 2023 Tuesday, June 20, 2023	1. CEO <i>Direction</i>	Arif Suhartono	Hadir Present	
		2. Distribusi Bonus Tahun 2022 (<i>Confidential</i>)			
		3. <i>Executive Remuneration</i> (<i>Confidential</i>)			
		4. <i>Update</i> Rencana Pengembangan Bandaraya Melayu Pekanbaru	Hambra	Hadir Present	
		5. Rencana Pemindahan Kapal Ro-Ro ASDP, Kapal Pelra dan Kapal Negara Ke Wae Kelambu	Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
		6. Tindak lanjut hasil studi penataan PAI BMTH			
		7. Progres Pembangunan dan Usulan design tahap 1 Terminal Multipurpose Batang	Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
		8. Pemaparan Kinerja s.d Mei 23			
		9. <i>Kick off</i> RKAP 2024	Mega Satria	Hadir Present	
		10. Lain-lain			
1. CEO <i>Direction</i>					
2. 2022 Bonus Distribution (<i>Confidential</i>)					
3. <i>Executive Remuneration</i> (<i>Confidential</i>)					
4. Update on Development Plan of Bandaraya Melayu Pekanbaru	Boy Robyanto	Hadir Present			
5. Plan to Move ASDP Ro-Ro Ship, Pelra Ship and State Ship to Wae Kelambu					
6. Follow-up on the results of BMTH PAI arrangement study					
7. Development progress and proposed design of phase 1 of Batang Multipurpose Terminal					
8. Performance Exposure up to May 23					
9. RKAP 2024 Kick off					
10. Others	Prasetyo	Hadir Present			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
10.	Selasa, 11 Juli 2023 Tuesday, July 11, 2023	<ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> Lanjutan Aksi Korporasi - Tindak Lanjut Penyelesaian Pinjaman Pemegang Saham PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI) Kinerja Perusahaan periode Juni 2023 Usulan Penyelesaian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan PT Pelindo dengan PT PELNI Lain-lain 	Arif Suhartono	Hadir Present	
			Hambra	Hadir Present	
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
			Mega Satria	Hadir Present	
			Boy Robyanto	Hadir Present	
11	Senin, 17 Juli 2023 Monday, July 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> <i>Progress</i> Pemurnian Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Grup Lain-lain 	Arif Suhartono	Hadir Present	
			Hambra	Hadir Present	
			Ihsanuddin Usman	Tidak Hadir Absent	Menghadiri undangan KBUMN Attended KBUMN invitation
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
			Mega Satria	Hadir Present	
			Boy Robyanto	Hadir Present	
Prasetyo	Hadir Present				



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
12	Senin, 31 Juli 2023 Monday, July 31, 2023	1. CEO <i>Direction</i>	Arif Suhartono	Hadir Present	
		2. Remunerasi Eksekutif 4 (Empat) <i>Subholding</i> dan 8 (Delapan) Anak Perusahaan di Lingkungan Pelindo Group (<i>Confidential</i>)	Hambra	Hadir Present	
		3. Pembahasan Pengesahan Laporan Keuangan <i>Audited</i> 2022 pada Dana Pensiun dan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Dewan Pengawas	Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
		4. <i>Update</i> Temuan BPK	Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
		5. <i>Progress Update</i> Pemilihan Mitra Proyek NPEA	Mega Satria	Hadir Present	
		6. <i>Update Progress</i> Evaluasi dan Keamanan Sistem IT	Boy Robyanto	Hadir Present	
		7. Usulan Revisi RKAP Investasi Tahun 2023 Pelindo Group	Prasetyo	Hadir Present	
		8. Usulan <i>Dismantling Level Luffing Crane</i> Pelabuhan Ambon			
		9. Rencana Pembangunan Terminal Multipurpose Batang Tahap 1			
		10. Lain-lain			
13	Selasa, 08 Agustus 2023 Tuesday, August 8, 2023	1. CEO <i>Direction</i>	Arif Suhartono	Hadir Present	
		2. Remunerasi Eksekutif Direksi Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (<i>Confidential</i>)	Hambra	Hadir Present	
		3. Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan di Area Kawasan Industri Pelabuhan Kuala Tanjung dengan Indonesia Battery Corporation Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama dengan PT Inalum	Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
		4. Lain-lain	Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
		1. CEO <i>Direction</i>	Mega Satria	Hadir Present	
		2. Executive Remuneration of Board of Directors of Subsidiaries and Sub-Subsidiaries (<i>Confidential</i>)	Boy Robyanto	Hadir Present	
		3. Cooperation Plan for Land Utilisation in Kuala Tanjung Port Industrial Estate Area with Indonesia Battery Corporation and Cooperation Plan with PT Inalum	Prasetyo	Hadir Present	
		4. Others			

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
14	Jumat, 18 Agustus 2023 Friday, August 18, 2023	1. Implementasi Harmonisasi Grading (Confidential) 2. Update Persiapan Hari Pelindo 2023 1. Implementasi Harmonisasi Grading (Confidential) 2. Update Persiapan Hari Pelindo 2023	Arif Suhartono	Hadir Present	
			Hambra	Hadir Present	
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
			Mega Satria	Hadir Present	
			Boy Robyanto	Hadir Present	
			Prasetyo	Hadir Present	
15	Selasa, 29 Agustus 2023 Tuesday, August 29, 2023	1. CEO Direction 2. Executive Remuneration (Confidential) 3. Implementasi Kalibrasi Hasil Penilaian Kinerja Individu 4. Update tindak lanjut PMN Pengerukan Pelabuhan Benoa 5. Tindak lanjut klaim atas PT WIKA di Kijing 6. Tindak Lanjut Kerja Sama Pemanfaatan Aset Lahan HPL Pelabuhan Regional 2 Tanjung Priok Dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) 7. Lain-lain 1. CEO Direction 2. Executive Remuneration (Confidential) 3. Implementation of Calibration of Individual Performance Assessment Results 4. Update on the follow-up of PMN Benoa Harbour Dredging 5. Follow-up on claims to PT WIKA in Kijing 6. Follow-up of Cooperation on Utilisation of HPL Land Assets of Regional Port 2 Tanjung Priok with PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) 7. Others	Arif Suhartono	Hadir Present	
			Hambra	Hadir Present	
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
			Mega Satria	Hadir Present	
			Boy Robyanto	Hadir Present	
			Prasetyo	Hadir Present	
16	Selasa, 12 September 2023 Tuesday, September 12, 2023	1. CEO Direction 2. Laporan Penanganan Hukum dan Isu-isu Strategis Bidang Hukum 3. Progres Balik Nama Sertifikat 4. Laporan Aksi Korporasi Divestasi Saham Rumah Sakit Pelindo Grup dengan IHC 5. Sertifikasi Lahan di Lingkungan PT Pelindo 6. Lain-lain 1. CEO Direction 2. Legal Handling Report and Strategic Legal Issues 3. Certificate Title Transfer Progress 4. Report on Corporate Action of Divestment of Pelindo Group Hospital Shares with IHC 5. Land Certification in PT Pelindo's Neighbourhood 6. Others	Arif Suhartono	Hadir Present	
			Hambra	Hadir Present	
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
			Mega Satria	Hadir Present	
			Boy Robyanto	Hadir Present	
			Prasetyo	Hadir Present	



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
17	Sabtu, 30 September 2023 Saturday, September 30, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. <i>Update</i> Revisi RKAP 2023 3. <i>Update</i> RKAP 2024 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 4. Remunerasi Eksekutif Direksi Anak dan Cucu Perusahaan (<i>Confidential</i>) 5. Lain-lain 	Arif Suhartono	Hadir Present	
			Hambra	Hadir Present	
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
			Mega Satria	Hadir Present	
			Boy Robyanto	Hadir Present	
			Prasetyo	Hadir Present	
18.	Selasa, 14 November 2023 Tuesday, November 14, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. Laporan Manajemen Periode sampai dengan Oktober 2023 3. <i>Update</i> Progres Penghapusan Aset Tetap 4. <i>Update</i> Progres NPEA 5. Permintaan PT KBN Pembayaran Sebagian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah NPEA di Tahun 2023 6. <i>Update</i> Progres Terminal Batang <i>Access</i> (NPEA) 7. Rencana Pengembangan Tanking Terminal 8. Progres Tindak Lanjut Kerja Sama dengan PT PTI di Pelabuhan Kuala Tanjung 9. Pengalihan Tanah Eks. Otoritas Asahan dan Rencana Investasi PT Inalum di Kawasan Industri Kuala Tanjung 10. Persetujuan Kerja Sama SPTP dengan Mitra di Tanjung Priok 11. Pembahasan Penanganan Permasalahan Hukum di Wilayah Regional 1 (PT Metito dan Gugatan Klaim) 12. Laporan Penyelesaian Balik Nama Sertifikat serta <i>Updating</i> Perdir Penyesuaian Per 1-3 tahun 2023 KBUMN 13. Laporan Progres Eksekusi Putusan Pengadilan atas Lahan (Bengkulu, President Bar, Surabaya) 14. Pemanfaatan Ruang Laut di Area PT Pelabuhan Indonesia 15. Lain-lain 	Arif Suhartono	Hadir Present	
			Hambra	Hadir Present	
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present	
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present	
			Mega Satria	Hadir Present	
			Boy Robyanto	Hadir Present	
			Prasetyo	Hadir Present	

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
		<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Management Report for Period up to October 2023 3. Fixed Asset Write-off Progress Update 4. NPEA Progress Update 5. PT KBN's Request for Partial Payment of Loss Compensation for NPEA Land Acquisition in 2023 6. Batang Terminal Access (NPEA) Progress Update 7. Tanking Terminal Development Plan 8. Follow-up on Cooperation Progress with PT PTI at Kuala Tanjung Port 9. Transfer of Ex. Asahan Authority and PT Inalum's Investment Plan in Kuala Tanjung Industrial Estate 10. Approval of SPTP Cooperation with Partners in Tanjung Priok 11. Discussion on Legal Issues in Regional 1 (PT Metito and Claims Lawsuit) 12. Report on the Completion of Certificate Title Transfer and Update on Board of Directors Regulation Adjustment as of 1 - 3 of 2023 KBUMN 13. Progress Report on the Execution of Court Decisions on Land (Bengkulu, President Bar, Surabaya) 14. Utilisation of Marine Space in PT Pelabuhan Indonesia Area 15. Others 			
19	Senin, 18 Desember 2023 Monday, December 18, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 3. <i>Update</i> Temuan SPI TW III 2023 serta progres temuan SPI tahun sebelumnya 4. Penyelesaian Permasalahan Jual Beli Rumah Dinas dan Pertapakannya di Regional 1 Cabang Dumai 5. Tindak Lanjut Kerja Sama dengan PT PBM Olah Jasa Andal 6. Penyampaian Laporan Akhir Studi <i>Indonesia's Blueprint Marine Tourism</i> 7. Program <i>Unlock Value</i> IHC untuk Pelindo 8. Lain-lain 	<p>Arif Suhartono</p> <hr/> <p>Hambra</p> <hr/> <p>Ihsanuddin Usman</p> <hr/> <p>Putut Sri Muljanto</p> <hr/> <p>Mega Satria</p> <hr/> <p>Boy Robyanto</p> <hr/> <p>Prasetyo</p>	<p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction 2. Proposal for Company Work Plan and Budget (RKAP) 2024 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 3. Update on SPI Findings in the third quarter of 2023 and progress on SPI findings in the previous year 4. Settlement of Problems with the Sale and Purchase of Official Housing and its Hermitage in Regional 1 Dumai Branch 5. Follow-up on Cooperation with PT PBM Olah Jasa Andal 6. Submission of the Final Report of Study of Indonesia's Blueprint Marine Tourism 7. IHC Unlock Value Programme for Pelindo 8. Others 			



Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
20.	Selasa, 20 Desember 2023 Tuesday, December 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. Tindak Lanjut rekomendasi BPK atas piutang PUMK 3. Penetapan Strategi Risiko Pelindo dan <i>Update</i> Pemenuhan Per 123 4. Skema Transaksi (Bisnis dan <i>Change Parent</i> PT PEL dibawah SPJM ke SPMT) 5. Skema Tindak Lanjut Integrasi JICT-KOJA 6. Penyesuaian Batasan Kewenangan Nilai dan Jangka Waktu Kerja Sama di Pelindo 7. Pengesahan Rencana Bisnis DP3 dan DP4 Tahun 2024 8. Pengesahan <i>Roadmap</i> Penyehatan DP4 9. Penyesuaian Biaya Investasi NPEA 10. Lain-lain 	<p>Arif Suhartono</p> <hr/> <p>Hambra</p> <hr/> <p>Ihsanuddin Usman</p> <hr/> <p>Putut Sri Muljanto</p> <hr/> <p>Mega Satria</p> <hr/> <p>Boy Robyanto</p> <hr/> <p>Prasetyo</p>	<p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO <i>Direction</i> 2. Follow-up of BPK recommendations on PUMK receivables 3. Establishment of Pelindo Risk Strategy and Fulfilment Update Per 123 4. Transaction Scheme (Business and Change Parent PT PEL under SPJM to SPMT) 5. JICT-KOJA Integration Follow-up Scheme 6. Adjustment of Value Authority Limitation and Cooperation Period at Pelindo 7. Ratification of DP3 and DP4 Business Plan of 2024 8. Ratification of DP4 Restructuring Roadmap 9. Adjustment of NPEA Investment Cost 10. Others 			

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The agenda and participants for joint meeting of Board of Commissioners and Board of Directors have been presented in the Board of Commissioners Meeting section of Corporate Governance Chapter of this annual report.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Meeting Frequency and Attendance of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meetings		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	20	20	100%
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	20	20	100%
Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum HC and General Affairs Director	20	19	95%
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	20	20	100%
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	20	20	100%
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	20	19	95%
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	20	20	100%

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan. Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
3. Setiap tahun masing-masing anggota Direksi wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, kegiatan korporasi signifikan BUMN dan/atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing Direksi;
4. Dalam satu tahun Direksi wajib mengikuti pelatihan paling sedikit berjumlah 40 (empat puluh) jam pelatihan;
5. Pelatihan yang diikuti merupakan program pelatihan berkelanjutan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN;

Capability improvement is deemed important to enable Board of Directors to update their knowledge on the latest developments of the Company's core business, to anticipate problems that arise in the future for the Company's sustainability and progress. The provisions regarding Board of Directors capability improvement program are as follows:

1. The capability improvement program is carried out to improve the work effectiveness of Board of Directors;
2. The capability improvement program plan must be included in the RKAP;
3. Each year, each member of Board of Directors is required to attend one training on the topic of risk management, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, accounting, auditing, significant corporate activities of SOEs and/or in accordance with the field of duties of each Board of Directors;
4. In one year, Board of Directors must attend at least 40 (forty) hours of training;
5. The training attended is a PPL continuous training programme organised by professional institutions, regulators, training institutions accredited by accreditation institutions and/or training institutions owned or controlled by SOEs;



Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners Joint Meetings			RUPS GMS		
Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
12	10	83%	2	2	100%
12	11	92%	2	2	100%
12	11	92%	2	2	100%
12	12	100%	2	2	100%
12	12	100%	2	2	100%
12	12	100%	2	2	100%
12	11	92%	2	2	100%

6. Direksi wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/ atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing Direksi;
7. Sertifikasi diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/ organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/ atau internasional, sertifikasi memiliki standar profesi dan etika, sertifikasi diwajibkan selama masa jabatan;
8. Anggota Direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, selambat nya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut;
9. Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan dan Direktur yang membidangi pengelolaan risiko memiliki kualifikasi dan sertifikasi tersendiri sesuai dengan Petunjuk teknis komposisi dan kualifikasi organ pengelolaan risiko di lingkungan BUMN.

Adapun pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2023, yaitu:

6. Board of Directors must follow at least 1 (one) certification, among others, in the fields of business, corporate business activities, law, risk management, compliance, finance, accounting, and/or in accordance with the field of duties of each Board of Directors;
7. Certification is issued by a certification board/regulator/ relevant professional organisation that is accredited nationally and/or internationally, certification has professional and ethical standards, certification is required during the tenure;
8. The member of Board of Directors concerned shall be responsible for making a report on the implementation of capability development program. The report shall be submitted to the Board of Directors, no later than 30 (thirty) days after the date of program implementation;
9. Director in charge of financial management and Director in charge of risk management have their own qualifications and certifications in accordance with the technical guidelines for the composition and qualifications of risk management organs within SOEs.

The trainings that have been attended by Board of Directors during 2023 are:

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	<i>Executive Global Growth Immersion Workshop</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group	27 Februari – 3 Maret 2023 February 27 - March 3, 2023	Deloitte & PT PMLI
		<i>Workshop Safety Culture</i>	14 – 20 Juni 2023 June 14 - 20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		<i>Boardroom Safety Champion: Shaping a Safety Culture Based on Strategic Leadership</i>	20 Juni 2023 June 20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		<i>Hedge Accounting Training</i>	27 – 28 Juli 2023 July 27 - 28, 2023	PWC
		Pelatihan <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i> Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training	9 – 11 Agustus 2023 August 9 - 11, 2023	CRMS
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	<i>Executive Global Growth Immersion Workshop</i> Pelabuhan Indonesia (Persero) Group	8 – 14 Maret 2023 March 8 - 14, 2023	Deloitte & PT PMLI
		<i>Workshop Safety Culture</i>	14 – 20 Juni 2023 June 14 - 20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		<i>Boardroom safety champion: shaping a safety culture based on strategic leadership</i>	20 Juni 2023 June 20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		Pelatihan <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i> Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training	9 – 11 Agustus 2023 August 9 - 11, 2023	CRMS
Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum HC and General Affairs Director	<i>Executive Global Growth Immersion Workshop</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group	11 – 18 Maret 2023 March 11 - 18, 2023	Deloitte & PT PMLI
		<i>Workshop Safety Culture</i>	14 – 20 Juni 2023 June 14 - 20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		<i>Boardroom Safety Champion: Shaping a Safety Culture Based on Strategic Leadership</i>	20 Juni 2023 June 20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		<i>The Oxford Executive Development Masterclass: Monitoring the Eight Key Leadership Roles</i>	3 – 7 Juli 2023 July 3 - 7, 2023	Glomacs
		Pelatihan <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i> Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training	9 – 11 Agustus 2023 August 9 - 11, 2023	CRMS
		Program CHRO School	13-14 Oktober 2023 (modul 1) 17-19 November 2023 (modul 2) October 13-14, 2023 (module 1) November 17-19, 2023 (module 2)	FHCI



Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	<i>Executive Immersion</i> <i>Global Growth Workshop</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group	27 Februari – 3 Maret 2023 February 27 - March 3, 2023	Deloitte & PT PMLI
		<i>Workshop Safety Culture</i>	14 – 20 Juni 2023 June 14-20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		<i>Boardroom Safety Champion: Shaping a Safety Culture Based on Strategic Leadership</i>	20 Juni 2023 June 20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		Pelatihan <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i> Pelatihan <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	9 – 11 Agustus 2023 August 9 - 11, 2023	CRMS
Mega Satria	Direktur Keuangan Finance Director	<i>Executive Immersion</i> <i>Global Growth Workshop</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group	8 – 14 Maret 2023 March 8 - 14, 2023	Deloitte & PT PMLI
		<i>Workshop Safety Culture</i>	14 – 20 Juni 2023 June 14 - 20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		<i>Boardroom Safety Champion: Shaping a Safety Culture Based on Strategic Leadership</i>	20 Juni 2023 June 20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		<i>Hedge Accounting Training</i>	27 – 28 Juli 2023 July 27 - 28, 2023	PWC
		Pemeringkatan dan Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) Rating and Issuance of Debt & Sukuk Securities (EBUS)	8 Agustus 2023 August 8, 2023	BUMN School of Excellence
		Pelatihan <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i> <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training</i>	9 – 11 Agustus 2023 August 9 - 11, 2023	CRMS
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	<i>Executive Immersion</i> <i>Global Growth Workshop</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group	11 – 18 Maret 2023 March 11 - 18, 2023	Deloitte & PT PMLI
		<i>The Professional Negotiator</i>	12 – 16 Juni 2023 June 12 - 16, 2023	Aztech
		<i>Workshop Safety Culture</i>	14 – 20 Juni 2023 June 14 - 20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		<i>Boardroom Safety Champion: Shaping a Safety Culture Based on Strategic Leadership</i>	20 Juni 2023 June 20, 2023	Diondra PT PMLI Athaya &
		Pelatihan <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i> Pelatihan <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	9 – 11 Agustus 2023 August 9 - 11, 2023	CRMS

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	<i>Executive Global Growth Immersion Workshop</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group	27 Februari – 3 Maret 2023 February 27 - March 3, 2023	Deloitte & PT PMLI
		<i>Workshop Safety Culture</i>	14 – 20 Juni 2023 June 14 - 20, 2023	Diondra Athaya & PT PMLI
		<i>Boardroom Safety Champion: Shaping a Safety Culture Based on Strategic Leadership</i>	20 Juni 2023 June 20, 2023	Diondra Athaya & PT PMLI
		<i>Pelatihan Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i> Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training	9 – 11 Agustus 2023 August 9 - 11, 2023	CRMS
		<i>Stewardship and Portfolio Management Training</i>	7-9 November 2023 November 7-9, 2023	FHCI

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan.
5. Program pengenalan Perseroan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

Selama tahun 2023 tidak terdapat Direksi baru, sehingga tidak terdapat informasi terkait pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

The provisions regarding the orientation program for members of Board of Directors are as follows:

1. Members of Board of Directors who are appointed for the first time must be given an orientation program regarding the Company.
2. The responsibility for conducting the orientation program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as the Corporate Secretary.
3. The orientation program includes:
 - a. Implementation of GCG principles by the Company;
 - b. An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
 - c. Information related to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee; and
 - d. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as other prohibited matters.
4. The Company's orientation program can be in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company.
5. The Company's orientation program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of Board of Directors.

During 2023, there were no new Directors, hence no orientation program for new Directors was held.



KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Selama tahun 2023, Direksi telah mengeluarkan 258 Keputusan untuk menunjang kegiatan Perseroan. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2023 Direksi telah menjalankan tugasnya untuk pengurusan Perseroan. Adapun tugas yang telah dilakukan oleh Direksi antara lain:

1. Menyusun Laporan Tahunan 2023;
2. Menggelar rapat Direksi yang pada tahun 2023;
3. Menyusun RKAP termasuk strategi Perseroan dan RKM Perseroan Tahun 2023;
4. Menyusun Laporan Manajemen triwulanan dan tahunan termasuk pelaksanaan strategi Perseroan
5. Membuat Pakta Integritas dalam rangka penerapan GCG, Kepatuhan Kode Etik Bisnis, Surat Pernyataan Benturan Kepentingan, Daftar Khusus Kepemilikan Saham;
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi;
7. Melakukan kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan;
8. Melakukan Pelindo Forum yang dihadiri oleh seluruh BOD BOC *Subholding*, Jajaran Fungsional Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
9. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terkait Pengesahan RKAP 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan;
10. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis, operasional dan *support*;
11. Memastikan Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha;
12. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan lainnya;
13. Melaksanakan kegiatan CSR, selama tahun 2023 telah tersalur dana CSR untuk kegiatan sosial kemasyarakatan maupun lingkungan;
14. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan;
15. Menetapkan kebijakan lainnya untuk Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh 2 (dua) Komite di bawah Direksi, yang terdiri dari Komite Pelindo Bersih dan Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Direksi berdasarkan rapat dan pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama tahun buku.

BOARD OF DIRECTORS' DECISIONS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES

During 2023, Board of Directors has issued 258 Decisions to support the Company's activities. In accordance with its duties and responsibilities, during 2023 the Board of Directors has carried out its duties in managing the Company as follow:

1. Preparing the 2023 Annual Report;
2. Hold Board of Directors meeting in 2023;
3. Prepare the RKAP including the Company's strategy and the Company's RKM for 2023;
4. Prepare quarterly and annual Management Reports including implementation of the Company's strategy
5. Make Integrity Pact in the framework of GCG implementation, Compliance with the Code of Conduct, Conflict of Interest Statement, Special Register of Share Ownership;
6. Attending Board of Commissioners meeting inviting Board of Directors;
7. Conducted working visits to Port Branches and Subsidiaries;
8. Conducting Pelindo Forum attended by all Subholding BOD BOC, Functional Ranks of Subsidiaries, Sub-Subsidiaries and Affiliated Companies;
9. Hold General Meeting of Shareholders on 2023 RKAP ratification and Annual Report General Meeting of Shareholders;
10. Cooperating with third parties in various fields including business, operations and support;
11. Ensuring the implementation of Good Corporate Governance in every business activity;
12. Regulate the Company's employment provisions including salaries, pensions, promotions, training, old age insurance, health insurance, and others;
13. Carrying out CSR activities, during 2023 CSR funds have been channeled for social and environmental activities;
14. Implementation of other duties related to the management of the Company;
15. Established other policies for the Company in accordance with statutory provisions;

PERFORMANCE APPRAISAL OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS AND THE BASIS OF APPRAISAL

In carrying out its management duties, Board of Directors is assisted by 2 (two) Committees under Board of Directors, consisting of Pelindo Bersih Committee and Governance, Risk Management and Compliance Committee. The performance evaluation of Committees under Board of Directors is carried out by Board of Directors periodically with the criteria based on meetings and implementation of duties during the fiscal year.

Komite Pelindo Bersih merupakan komite yang membantu Direksi dalam Melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan serta menyelesaikan laporan WBS yang telah masuk. Selama tahun 2023, Komite Pelindo Bersih telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. 4 (empat) laporan WBS yang masuk telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Direktur Utama.

Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan merupakan komite yang membantu Direksi dalam mendukung peningkatan kinerja dan transformasi bisnis yang memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Perseroan terkait dengan pengelolaan investasi, kebijakan strategis operasional Perseroan dan pengendalian kegiatan strategis usaha grup Pelindo.

Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan membahas finalisasi usulan investasi.

Sepanjang tahun 2023, Direksi menilai bahwa Komite di bawah Direksi tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengunduran Diri Anggota Direksi

1. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri;
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
3. Pengunduran diri anggota Direksi dapat kurang dari 30 (tiga puluh) hari, apabila secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan rangkap jabatan.

Pemberhentian Anggota Direksi

1. RUPS dapat pemberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
2. RUPS melakukan evaluasi sebelum melakukan pemberhentian anggota Direksi;

Pelindo Bersih Committee is a committee that assists the Board of Directors in supervising the effectiveness of the Company's WBS and completing WBS reports that have been submitted. During 2023, Pelindo Bersih Committee has held 4 (four) meetings. 4 (four) incoming WBS reports have been followed up and reported to the President Director.

Governance, Risk Management and Compliance Committee is a committee that assists the Board of Directors in supporting performance improvement and business transformation that takes into account the aspects of good corporate governance, risk management and compliance in the Company's decision-making process related to investment management, the Company's strategic operational policies and activity control Pelindo group business strategy.

During 2023, the Governance, Risk Management and Compliance Committee held 2 (two) meetings to discuss corporate action plans for restructuring subsidiaries and finalizing investment proposals.

Throughout 2023, Board of Directors considered that the Committees under Board of Directors had carried out their duties and responsibilities well.

BOARD OF DIRECTORS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

Member of Board of Directors Resignation

1. A Member of Board of Directors is entitled to resign from his/her position by notifying in writing of his/her intention to the Company with a copy to the Shareholders, Board of Commissioners and other members of Board of Directors at the latest 30 (thirty) days before the date of his/her resignation. If the resignation letter states an effective date of less than 30 (thirty) days from the date of letter received, it shall be deemed not to mention the effective date of resignation;
2. If until the date requested by the member of Board of Directors concerned or within 30 (thirty) days from the date of request for resignation letter in the event that the effective date of resignation is not stated, there is no resolution from the GMS, then member of Board of Directors shall cease to exist on the date requested above or with the lapse of 30 (thirty) days from the date the request for resignation letter is received without requiring the GMS approval;
3. The resignation of a member of Board of Directors may be less than 30 (thirty) days, if the laws and regulations do not allow the person concerned to hold concurrent positions.

Board of Directors Member Dismissal

1. The GMS may dismiss the members of Board of Directors at any time by stating the reasons;
2. The GMS shall conduct an evaluation before dismissing a member of Board of Directors;



3. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Poin a di atas, dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen tahunan Direksi;
 - b. Adanya perubahan strategi bisnis pada perusahaan;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. Tidak melaksanakan dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - f. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN;
 - g. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau keuangan Negara;
 - h. Melakukan tindakan yang melanggar kode etik Direksi BUMN;
 - i. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Berhalangan tetap, termasuk sakit keras/sakit, berkepanjangan
 - k. Mengundurkan diri.
 4. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada bagian 1) sampai dengan 11) di atas, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;
 5. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi dimaksud pada bagian 10 sampai dengan 11 dan poin c di atas, pemberhentian Direksi memperhatikan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan;
 6. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Poin b bagian dan Poin c di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
3. The reason for the dismissal of a member of Board of Directors as referred to in Point a above, is carried out if based on reality, the member of Board of Directors concerned, among others:
 - a. Unable to fulfil his/her obligations that have been agreed upon in the annual Management Contract of Board of Directors;
 - b. There is a change in business strategy in the Company;
 - c. Unable to perform his/her duties properly;
 - d. Not implementing and/or violating the provisions of laws and regulations and/or Articles of Association;
 - e. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
 - f. Conducting actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of Board of Directors of SOEs;
 - g. Has been named as a suspect or defendant by the competent authority in an action that is detrimental to the Company and/or State finances;
 - h. Has committed an act that violates the code of conduct of SOE Board of Directors;
 - i. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
 - j. Permanently unable to perform his/her duties, including prolonged illness.
 - k. Resignation.
 4. In addition to the reasons for dismissal of members of Board of Directors as referred to in sections 1) to 11) above, Board of Directors may be dismissed by GMS based on other reasons deemed appropriate by GMS for the interests and objectives of the Company;
 5. In addition to the dismissal reasons for members of Board of Directors referred to in section 10 to 11 and point c above, the dismissal of Board of Directors shall pay attention to the reasons for dismissal as stipulated in the Company's articles of association;
 6. The dismissal decision as referred to in Point b section and Point c above is taken after the person concerned is given the opportunity to defend himself.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP,

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is a corporate organ whose task is to supervise and provide advice to the Board of Directors in carrying out the Company's management activities.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND AUTHORITIES

Board of Commissioners Duties

Board of Commissioners is tasked with supervising the Company's management policies, the general management of both the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors, including supervising the implementation of RJPP,

RKAP, keputusan RKAP, ketentuan dan kepatuhan peraturan Perseroan terhadap Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko, pelaksanaan fungsi pengawasan intern serta Tata Kelola Terintegrasi.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen Perseroan, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, memeriksa surat berharga serta kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
3. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana poin 2 di atas, dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu;

RKAP and Articles of Association and GMS resolutions, as well as prevailing laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company. Board of Commissioners supervises the implementation of risk management, internal control function and Integrated Governance.

Board of Commissioners Authorities

In carrying out its supervisory duties, Board of Commissioners has the authority to:

1. Look at the Company's books, letters and documents, examine cash for verification purposes and others, examine the Company's securities and assets;
2. Entering the grounds, buildings and offices used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company;
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Requesting the Board of Directors and/or other officials under the Directors, under their consent, to attend the Board of Commissioners meetings;
6. Appoint and dismiss the Secretary of Board of Commissioners, if deemed necessary;
7. Temporarily dismiss members of Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
8. Temporarily dismiss members of Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
9. Using experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;
10. Carry out management actions of the Company under certain conditions for a certain period of time in accordance with the Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed;
12. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

BOARD OF COMMISSIONERS RESPONSIBILITIES

1. In carrying out its duties, Board of Commissioners is accountable to the GMS;
2. Board of Commissioners supervises management policies, general management of both the Company and the Company's business, and provides advice to the Board of Directors;
3. Supervision and provision of advice as point 2 above, is carried out for the benefit of the Company and is not intended for the benefit of certain parties or groups;



4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional perusahaan kecuali ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengambilan keputusan kegiatan operasional perusahaan oleh Dewan Komisaris pada poin 4 di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan;
 6. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
 7. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas;
 8. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 4 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
4. In carrying out supervision, Board of Commissioners is prohibited from participating in decision making of the Company's operational activities unless stipulated in the Articles of Association or provisions of laws and regulations;
 5. Decision making of the Company's operational activities by the Board of Commissioners in point 4 above is part of supervisory duties by the Board of Commissioners so as not to negate the responsibility of Board of Directors for the implementation of the Company's management;
 6. Each member of Board of Commissioners shall exercise good faith, prudence, and responsibility in carrying out supervisory and advisory duties to the Board of Directors;
 7. Each member of Board of Commissioners shall be personally liable for the Company's losses if he/she is guilty or negligent in performing his/her duties as referred to in Number 3 above;
 8. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of Board of Commissioners, the responsibility as referred to in point 4 shall apply jointly and severally to each member of Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

1. Bertanggung jawab sebagai Koordinator umum Dewan Komisaris;
2. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
3. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Perbuatan-perbuatan Direksi yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris yaitu:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan RUPS;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dalam kondisi tertentu (hilang, musnah, rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (*total lost*), biaya pemindahtanganan lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan, dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi aktiva tetap yang

President Commissioner's Duties and Responsibilities

1. Responsible as general coordinator of the Board of Commissioners;
2. Calls for Board of Commissioners' meetings in writing to all members of Board of Commissioners;
3. Coordinates and ensures the Board of Commissioners' duties and meetings are implemented in accordance with applicable regulations.

DECISIONS REQUIRING BOARD OF COMMISSIONERS' APPROVAL

The Board of Directors' actions that must first obtain approval from Board of Commissioners are:

1. Collateralize fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. Establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operations (JO), Build Operate Transfers (BOT), Build Own Transfers (BOWT), Build Transfer Operate (BTO) and other collaborations with a certain value or period of time determined by the GMS;
3. Receive or provide medium/long term loans, except for loans (payables or receivables) arising from business transactions, and loans granted to Subsidiaries with the condition that loans to Subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
4. Eliminating bad debts and dead goods inventory from the books;
5. Releasing and writing off movable fixed assets under certain conditions (lost, destroyed, damaged which cannot be transferred (*total lost*), the cost of transferring is greater than the economic value obtained from the transfer, dismantled to be rebuilt or built into other fixed assets, whose budget has been determined by the GMS/

lain, yang anggarannya telah ditetapkan oleh RUPS/Menteri melalui pengesahan RKAP, dan dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang telah direncanakan RKAP;

6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern;
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatan berakhir, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, seseorang harus memenuhi syarat materil yaitu:
 - a. Integritas;
 - b. Dedikasi;
 - c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
 - e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Selain memenuhi kriteria huruf a di atas, untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat formal yaitu Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan, anak Perusahaan dan/atau Badan Usaha dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, perusahaan, anak perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Minister through the RKAP approval, and dismantled not to be rebuilt in connection with other programs that have been planned by the RKAP;

6. Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
7. Appoint and dismiss the Head of Internal Audit Unit;
8. Appoint and dismiss the Corporate Secretary.

BOARD OF COMMISSIONERS TENURE

Members of Board of Commissioners are appointed for a period of 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) tenure. Members of Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the GMS Resolution by stating the reasons. Member of Board of Commissioners tenure ends if:

1. Passes away;
2. The tenure ends, including resignation from his/her position;
3. Dismissed based on the GMS; and/or
4. No longer fulfils the requirements as a member of Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations.

CRITERIA FOR BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

1. To be appointed as a member of Board of Commissioners, a person must fulfil the material requirements, namely:
 - a. Integrity;
 - b. Dedication;
 - c. Understanding of Company management issues relating to one of the management functions;
 - d. Have sufficient knowledge in the business field in which he/she is nominated; and
 - e. Can provide sufficient time to carry out his/her duties.
2. In addition to fulfilling the criteria in letter a above, to be appointed as a member of Board of Commissioners must fulfil the formal requirements, i.e. a person who can be appointed as a member of Board of Commissioners is an individual who is capable of performing legal acts, unless within 5 (five) years prior to his/her appointment has:
 - a. Declared bankrupt;
 - b. Being a member of Board of Directors or a member of Board of Commissioners or a member of Supervisory Board found guilty of causing a Company, subsidiary and/or business entity to be declared bankrupt; or
 - c. Convicted of a criminal offence that is detrimental to State finances, companies, subsidiaries, other business entities and/or related to the financial sector.



Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

3. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, selain memenuhi syarat meteril dan syarat formal sebagaimana *point* a dan b di atas, maka seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
 - a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
 - c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/ Anak Perusahaan yang bersangkutan;
 - d. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
 - e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
 - f. Sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
 - g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
4. Persyaratan lainnya
Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mantan anggota Direksi dapat menjadi anggota Dewan Komisaris, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan perusahaan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang melarangnya.

BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor HK.01/27/11/2/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 27 November 2023. Ruang lingkup Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Pelindo mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik, profesional, transparan, efektif

Fulfilment of these requirements is evidenced by a statement letter signed by the prospective member of Board of Commissioners and the letter is kept by the Company.

3. To be appointed as a member of Board of Commissioners, in addition to fulfilling the material and formal requirements as point a and b above, a person must also fulfil other requirements as follows:
 - a. Not a political party administrator, legislative candidate, and/or legislative member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial Representative Council, and Regency/City Regional Representative Council;
 - b. Not a candidate for head/deputy head of the region and/or head/deputy head of the region, including acting head/deputy head of the region;
 - c. Not currently holding a position that has the potential to cause a conflict of interest with the SOE/Subsidiary concerned;
 - d. Not serving as a member of Board of Commissioners/ Supervisory Board at SOE or Board of Commissioners at the relevant Subsidiary for 2 (two) periods;
 - e. Not currently holding a position that is prohibited by law to be concurrently held by a member of Board of Commissioners;
 - f. Physically and mentally healthy, who is not currently suffering from an illness that may hinder the performance of duties as a member of Board of Commissioners/Supervisory Board, as evidenced by a medical certificate from a hospital; and
 - g. Have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have fulfilled the obligation to pay taxes for the last 2 (two) years.
4. Other requirements
In addition to fulfilling the general requirements, the appointment of members of Board of Commissioners is also carried out with due observance of the requirements stipulated in the prevailing laws and regulations.

Former members of Board of Directors may become members of Board of Commissioners, after not serving as members of Board of Directors for at least 1 (one) year, except with certain considerations decided by the Minister in order to maintain the continuity of the Company's restructuring program, as long as there are no other provisions of laws and regulations that prohibit it.

BOARD MANUAL OF BOARD OF COMMISSIONERS

Guidelines for Working Procedures of the Relations of Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) has been approved based on Board of Directors Regulation No. HK.01/27/11/2/TKPT/UTMA/PLND-23 dated November 27, 2023. The scope of Pelindo's Board Manual regulates and explains the standardised working relationship pattern between Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their respective duties and responsibilities, in order to create good, professional, transparent, effective and

dan efisien. Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo telah diperbaharui sesuai dengan aturan terbaru Kementerian BUMN yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Adapun isi dari Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dijelaskan secara khusus dalam Bab III, yang mencakup:

1. Fungsi Dewan Komisaris;
2. Keanggotaan Dewan Komisaris;
3. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
4. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
5. Kewajiban Dewan Komisaris;
6. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
7. Hak Dewan Komisaris;
8. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris;
9. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris;
11. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris;
12. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pembidangan tugas Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KEP-DK/PI/VI-2023 tanggal 13 Juni 2023. Adapun pembagian tugas anggota Dewan Komisaris Pelindo adalah sebagai berikut.

efficient corporate governance. Pelindo's Board Manual has been updated in accordance with the latest regulations of the Ministry of SOEs, namely Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/03/2023 on Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

The contents of Board Manual of Board of Commissioners are described specifically in Chapter III, which includes:

1. Functions of Board of Commissioners;
2. Membership of Board of Commissioners;
3. Ethics of Board of Commissioners;
4. Duties and Authorities of Board of Commissioners;
5. Obligations of Board of Commissioners;
6. Responsibilities of Board of Commissioners;
7. Rights of Board of Commissioners;
8. Principles of Board of Commissioners Decision Making of;
9. Induction and Capability Improvement Program;
10. Supporting Organs of Board of Commissioners;
11. Performance Appraisal of Board of Commissioners;
12. Criteria of Performance Evaluation of Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS DIVISION OF DUTIES

The division of duties of Board of Commissioners is based on the Decree of Board of Commissioners No. 07/KEP-DK/PI/VI-2023 dated June 13, 2023. The division of duties for members of Board of Commissioners of Pelindo is as follows.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Division of Duties

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Agus Suhartono*	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Koordinator Umum dan Bidang Tata Kelola Terintegrasi General Coordinator and Integrated Governance
Marsetio**	Plt. Komisaris Utama/Independen Acting President Commissioner/ Independent Commissioner	Koordinator Umum, Bidang Remunerasi, dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi General Coordinator, Remuneration Sector, and as Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Sudung Situmorang***	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Remunerasi, Sumber Daya Manusia, Hukum, dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Remuneration, Human Capital, Legal, and as Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Bidang Pengadaan Barang/Jasa, Operasional, dan Sistem Informasi, dan sebagai Wakil Ketua Komite Audit Procurement, Operations, Information Systems, and as Vice Chairman of Audit Committee
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Audit, Keuangan, dan sebagai Ketua Komite Audit Audit, Finance, and as Chairman of Audit Committee



Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Board of Commissioners Division of Duties

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Muchtart Luthfi Mutty****	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Sosial, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, CSR, dan Kemasyarakatan, dan sebagai Wakil Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Social, Social and Environmental Responsibility, CSR, and Community, and as Vice Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee
Antonius Rainier H**	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Teknik, Komersial, Manajemen Risiko dan sebagai Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Engineering, Commercial, Risk Management and as Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Bidang Transformasi dan Pengembangan Bisnis dan sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Business Transformation and Development and as Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Jodi Mahardi*****	Komisaris Commissioner	Bidang Teknik, Komersial, Manajemen Risiko, dan sebagai Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Engineering, Commercial, Risk Management, and as Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee

*Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama tanggal 19 Mei 2023 Kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama/Independen tanggal 3 Januari 2024.

**Berhenti menjabat tanggal 8 Februari 2023

***Diangkat menjadi Komisaris Independen tanggal 3 Januari 2024.

****Berhenti menjabat sejak tanggal 3 Januari 2024

*****Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

*Started serving as President Commissioner on May 19, 2023. Then appointed as President/Independent Commissioner on January 3, 2024.

**No longer serving since February 8, 2023

***Appointed as Independent Commissioner on January 3, 2024.

****No longer service as of January 3, 2024

*****Started serving on February 22, 2023

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral;
2. Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada point a di atas harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris perusahaan selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan;
3. Anggota Dewan Komisaris Perseroan dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri;
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris BUMN, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan, serta menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN;

POLICY OF BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITION

1. Board of Commissioners may concurrently serve as the Board of Commissioners of other business entities, subject to the provisions of sectoral laws and regulations;
2. Board of Commissioners who concurrently serves as the Board of Commissioners of other business entities as referred to in point a above must meet the percentage of attendance at the Company's Board of Commissioners meetings for 1 (one) year of at least 75% (seventy five per cent) attendance, as a requirement for obtaining Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the person concerned;
3. Members of the Company's Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of Board of Commissioners of SOEs, except based on special assignment from the Minister;
4. Members of Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of Board of Directors in SOEs, other business entities or holding positions that based on laws and regulations are prohibited to be concurrent with the position of member of Board of Commissioners of SOEs, or positions that may cause conflict of interest with the Company, and sign a statement letter willing to resign from the position if elected as a member of Board of Commissioners of SOEs;

5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas, berakhir karena hukum sejak anggota Dewan Komisaris bersangkutan lainnya atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkap jabatan sebagaimana dimaksud;
 6. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BUMN, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkap jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian;
 7. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan oleh anggota Dewan Komisaris setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada poin c di atas adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris;
 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin e di atas tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
 9. Apabila anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
5. The tenure of a member of Board of Commissioners holding a concurrent position as referred to in points a and b above, shall expire by operation of law from the time the other members of Board of Commissioners or members of Board of Directors or GMS/Minister are aware of such concurrent position;
 6. Within a period of no later than 7 (seven) days from the time the member of Board of Commissioners or member of Board of Directors of SOE becomes aware of the concurrent position as referred to in point a and b above, member of Board of Commissioners or member of Board of Directors of SOE, must submit notification to GMS/Minister regarding the concurrent position, for further process of determination of dismissal;
 7. Legal actions carried out for and on behalf of the Company by members of Board of Commissioners after the expiration of the law as referred to in point c above are invalid and become the member of Board of Commissioners' personal responsibility;
 8. The provisions referred to in point e above do not reduce the member of the Board of Commissioners concerned's responsibility for the Company's losses caused by the error or negligence of the member of Board of Commissioners in carrying out his/her duties;
 9. If the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of Board of Commissioners, the responsibility as referred to shall apply jointly and severally to each member of Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE.



Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Concurrent Positions

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Companies/Institutions	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Companies/ Institutions
Agus Suhartono*	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	-	-
Marsetio**	Plt. Komisaris Utama/ Independen Acting President Commissioner/Independent Commissioner	-	-
Sudung Situmorang***	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Director General of Development National Export Development	Kementerian Perdagangan Ministry of Trade
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Muchtar Luthfi Mutty****	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Antonius Rainier H**	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Inspektur Jenderal Inspector General	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
Jodi Mahardi*****	Komisaris Commissioner	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Deputy for Coordination of Maritime Sovereignty and Energy	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment

*Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama tanggal 19 Mei 2023 Kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama/Independen tanggal 3 Januari 2024.

**Berhenti menjabat tanggal 8 Februari 2023

***Diangkat menjadi Komisaris Independen tanggal 3 Januari 2024.

****Berhenti menjabat sejak tanggal 3 Januari 2024

*****Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

*Started serving as President Commissioner on May 19, 2023. Then appointed as President/Independent Commissioner on January 3, 2024.

**No longer serving since February 8, 2023

***Appointed as Independent Commissioner on January 3, 2024.

****No longer service as of January 3, 2024

*****Started serving on February 22, 2023

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:

1. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;
2. Wajib Mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaruan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung

MANAGEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS CONFLICTS OF INTEREST

Board of Commissioners should always avoid conflicts of interest, among others by:

1. Avoid any activity that can affect his/her independence in carrying out his duties;
2. Fill out a Special Register containing information on ownership of shares and/or their families in other companies, including if they do not have share ownership, and periodically update each year at the end of the year and are obliged to notify the Company if there are changes to the data in accordance with the applicable laws and regulations;
3. Not responding to requests from any party and for any reason, whether direct requests from certain parties

dari pihak-pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan instansi pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaasumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perseroan sepanjang hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan;

4. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
5. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

including but not limited to officials/employees within government agencies and political parties relating to requests for donations, including those relating to the procurement of goods and services in the Company and can affect the decision making;

4. Firm in not taking advantage of his/her position for personal interests or for the interests of other people or related parties that are contrary to the interests of the Company;
5. Disclose if a conflict of interest occur and the concerned member of Board of Commissioners shall not be involved in the Company's decision-making process related to this matter. Prohibited to take actions that could harm the Company or reduce the Company's profits and must disclose conflicts of interest in every decision.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Board of Commissioners Share Ownership

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		Pelindo	Perusahaan Lain Other Companies
Agus Suhartono*	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Marsetio**	Plt. Komisaris Utama/Independen Commissioner/Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Sudung Situmorang***	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Muchtar Luthfi Mutty****	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Antonius Rainier H**	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Jodi Mahardi*****	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil

*Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama tanggal 19 Mei 2023 Kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama/Independen tanggal 3 Januari 2024.

**Berhenti menjabat tanggal 8 Februari 2023

***Diangkat menjadi Komisaris Independen tanggal 3 Januari 2024.

****Berhenti menjabat sejak tanggal 3 Januari 2024

*****Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

*Started serving as President Commissioner on May 19, 2023. Then appointed as President/Independent Commissioner on January 3, 2024.

**No longer serving since February 8, 2023

***Appointed as Independent Commissioner on January 3, 2024.

****No longer service as of January 3, 2024

*****Started serving on February 22, 2023



KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2023, anggota Dewan Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang atau 28,57% dari total anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu minimal 20 persen dari total anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Kriteria dan Pernyataan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Independent Commissioner Criteria	Heru Sukanto	Muchtar Luthfi Mutty
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period.	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Does not own shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or major shareholder of the Issuer or Public Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Does not have business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.	√	√

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Jadwal Rapat

Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, dan dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu. Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan/atau strategis.

INDEPENDENT COMMISSIONER

As of December 31, 2023, the number of Independent Commissioners on the Board was 2 (two) people, which constitutes 28.57% of the total number of Board members, amounting to 7 (seven) people. Thus, it has fulfilled the required criteria, which is a minimum of 20 percent of total Board of Commissioners of the Company.

Independent Commissioner Criteria and Statement

Kriteria Komisaris Independen Independent Commissioner Criteria	Heru Sukanto	Muchtar Luthfi Mutty
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period.	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Does not own shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or major shareholder of the Issuer or Public Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Does not have business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.	√	√

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Meeting Policy

Board of Commissioners decisions are taken at the Board of Commissioners Meeting. Decisions can also be taken outside the Board of Commissioners meeting as long as all members of Board of Commissioners agree on the method and material to be decided.

Meeting Schedule

Board of Commissioners meetings are held at least once in 1 (one) month, and may invite Directors. Board of Commissioners meetings may be held at any time, if deemed necessary. This Board of Commissioners meeting is an immediate and/or strategic meeting.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Rapat Melalui Sarana Elektronik

Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Panggilan Rapat

Panggilan rapat dilakukan secara tertulis oleh anggota Dewan Komisaris dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta menyertakan agenda dan materi rapat tersebut. Panggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui sarana elektronik.

Agenda Rapat

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengajukan usulan agenda Rapat. Usulan agenda rapat disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka harus disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris berhak mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan maka telah diatur dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Etika Rapat

Setiap peserta rapat harus mendukung pelaksanaan rapat Dewan Komisaris agar berjalan secara efektif. Tata tertib Rapat Dewan Komisaris lebih lanjut diatur dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Kuorum Rapat

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Keterwakilan anggota Dewan Komisaris dalam rapat hanya dapat dilakukan dengan mewakilkan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya secara tertulis yang diberikan khusus untuk

Meeting Place

Board of Commissioners meetings may be held at the Company's domicile or place of business or at any other place within the territory of the Republic of Indonesia.

Meeting Holding Through Electronic Media

Board of Commissioners meetings may be held through teleconference, video conference or other electronic media that allow all participants of the Board of Commissioners meeting to see and hear each other directly and participate in the meeting.

Meeting Summons

Meeting summons shall be made in writing by a member of Board of Commissioners and delivered within a period of at least 3 (three) business days before the meeting is held. Summons to the Board of Commissioners meeting must include the event, date, time and place and include the agenda and materials of the meeting. Summons to the Board of Commissioners meeting may be made through electronic media.

Meeting Agenda

Each member of Board of Commissioners has the right to propose the Meeting agenda. The proposed meeting agenda is submitted to Secretary of Board of Commissioners. In the event that there is a proposal to add to the meeting agenda when the meeting is about to take place, it must be approved by all members of Board of Commissioners present at the meeting. In other agenda items, Board of Commissioners meetings are entitled to make decisions with due observance of the provisions of Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Meeting Chairman

Board of Commissioners meetings are chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or absent, the meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner does not make an appointment, it has been regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Meeting Ethics

Each meeting participant must support the implementation of Board of Commissioners meetings to run effectively. The Board of Commissioners Meeting rules are further regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Meeting Quorum

Board of Commissioners meetings are valid and entitled to make binding decisions if attended or represented by more than 1/2 (one-half) of the total number of members of Board of Commissioners.

Representation of members of Board of Commissioners in the meeting can only be done by delegating to other members of Board of Commissioners in writing given specifically for



keperluan tersebut dan dengan ketentuan bahwa satu orang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu orang anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Setiap peserta rapat Dewan Komisaris wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Ketentuan lain terkait pengambilan keputusan dalam rapat telah diatur dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Risalah Rapat dan anggota Dewan Komisaris Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

Risalah Rapat

Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Rapat selesai dilaksanakan. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan risalah rapat. Informasi lain terkait risalah rapat dewan komisaris telah diatur dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

Dalam rangka memastikan tindak lanjut rapat sebelumnya, maka Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

Kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris

Kehadiran Direksi dalam rapat Dewan Komisaris dimungkinkan apabila Direksi atau salah satu anggota Direksi diundang oleh Dewan Komisaris untuk menjelaskan, memberikan masukan atau melakukan diskusi.

that purpose and provided that one member of Board of Commissioners can only represent one other member of Board of Commissioners.

Decision-Making in the Meeting

Every participant of Board of Commissioners meeting shall be involved in every decision-making process in the meeting. Each member of Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote and plus 1 (one) vote for the member of Board of Commissioners he/she represents. If the number of votes for and against is equal, then the meeting decision is the same as the meeting chairman's opinion, with due regard to the provisions regarding accountability as stipulated in the Company's Articles of Association. Other provisions related to decision making in meetings are regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Dissenting Opinion

Dissenting opinions that occur must be included in the Meeting Minutes and members of Board of Commissioners dissenting opinion does not mean giving the relevant member of Board of Commissioners the right not to implement the meeting's decision. Board of Commissioners is jointly and severally personally liable if proven guilty or negligent in carrying out their duties for the interests and business of the Company.

Minutes of Meeting

Minutes of each Board of Commissioners meeting shall be prepared. The meeting minutes shall be signed by the Chairman of Meeting and by all members of Board of Commissioners present at the meeting. The meeting minutes shall be prepared and administered by Secretary of Board of Commissioners or other officer appointed by Board of Commissioners.

The minutes of meeting must be completed and circulated to all members of Board of Commissioners/Supervisory Board at the latest 7 (seven) working days after the Meeting is completed. Each member of Board of Commissioners is entitled to obtain a copy of the meeting minutes. Other information related to the minutes of board of commissioners meetings has been regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Evaluation on Follow-up of Previous Meetings

In order to ensure the follow-up of the previous meeting, the Board of Commissioners must evaluate matters that need to be followed up.

Board of Directors Attendance in Board of Commissioners Meeting

Board of Directors attendance at Board of Commissioners meetings is possible if the Board of Directors or a member of Board of Directors is invited by the Board of Commissioners to explain, provide input or conduct discussions.

Rencana Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting Plan

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING PLAN

No	Minggu Week	Agenda Agenda
1	Minggu #01 Januari 2023 Week #01 January 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun 2022; Pembahasan realisasi KPI individu Dewan Komisaris Tahun 2022; Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Tahun 2022; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results; Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; Discussion on the realisation of Board of Commissioners KPIs in 2022; Discussion on the realisation of individual Board of Commissioners KPIs in 2022; Discussion on the realisation of work plans and activity reports of Board of Commissioners Committee in 2022; Others.
2	Minggu #02 Januari 2023 Week #02 January 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan Perseroan; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results; Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; Discussion of the concept of evaluation and direction of the Board of Commissioners on Company management policies; Others.
3	Minggu #03 Januari 2023 Week #03 January 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Persiapan Rakomdir; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results; Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; Preparation for BoC & BoD Meeting; Others.
4	Minggu #01 Februari 2023 Week #01 February 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan progres audit tahun buku 2022; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results; Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; Discussion of audit progress for fiscal year 2022; Others.
5	Minggu #02 Februari 2023 Week #02 February 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan Perseroan; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results; Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners on the Company's management policy; Others.
6	Minggu #03 Februari 2023 Week #03 February 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan atas hasil audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022; Persiapan Rakomdir; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results; Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; Discussion on the audit results of Financial Statements for Fiscal Year 2022; Preparation of BoC & BoD Meeting; Others.



No	Minggu Week	Agenda Agenda
7	Minggu #01 Maret 2023 Week #01 March 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan Laporan Tahunan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan Laporan Tahunan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022; 4. Lain-lain.
8	Minggu #02 Maret 2023 Week #02 March 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan Perseroan; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners on the Company's management policy; 4. Others.
9	Minggu #03 Maret 2023 Week #03 March 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan bahan Radirkom; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Preparation of BoC & BoD Meeting Materials; 4. Others.
10	Minggu #01 April 2023 Week #01 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan Perseroan; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners on the Company's management policy; 4. Others.
11	Minggu #02 April 2023 Week #02 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan KPI Dewan Komisaris Triwulan I/2023; 4. Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Triwulan I/2023; 5. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the Board of Commissioners' KPI for the first quarter of 2023; 4. Discussion on the realisation of work plans and activity reports of Board of Commissioners Committee for the first quarter of 2023; 5. Others.
12	Minggu #03 April 2023 Week #03 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan kinerja perusahaan Triwulan I/2023; 4. Pembahasan bahan Radirkom; 5. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the Company's performance in the first quarter of 2023; 4. Preparation of BoC & BoD Meeting Materials; 5. Others.
13	Minggu #01 Mei 2023 Week #01 May 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I/2023; 3. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of responses to the Management Report for the first quarter of 2023; 3. Discussion on matters that need approval/response from Board of Commissioners; 4. Others.

No	Minggu Week	Agenda Agenda
14	Minggu #02 Mei 2023 Week #02 May 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners on the Company's management policy; 4. Others.
15	Minggu #03 Mei 2023 Week #03 May 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Persiapan Rakomdir; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Preparation of BoC & BoD Meeting; 4. Others.
16	Minggu #01 Juni 2023 Week #01 June 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan Perseroan; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners on the Company's management policy; 4. Others.
17	Minggu #02 Juni 2023 Week #02 June 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Others.
18	Minggu #03 Juni 2023 Week #03 June 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan bahan Radirkom; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Preparation of BoC & BoD Meeting Materials; 4. Others.
19	Minggu #01 Juli 2023 Week #01 July 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan Perseroan; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners on the Company's management policy; 4. Others.
20	Minggu #02 Juli 2023 Week #02 July 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Semester I/2023; 4. Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Semester I/2023; 5. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the concept of Board of Commissioners' Supervisory Report and KPIs for the first semester of 2023; 4. Discussion of the realisation of work plans and activity reports of Board of Commissioners Committee for the first semester of 2023; 5. Others.



No	Minggu Week	Agenda Agenda
21	Minggu #03 Juli 2023 Week #03 July 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan kinerja perusahaan Semester II/2023; 4. Persiapan Rakomdir; 5. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the Company's performance in the second semester of 2023; 4. Preparation of BoC & BoD Meeting; 5. Others.
22	Minggu #01 Agustus 2023 Week #01 August 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Semester I/2023; 4. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan Perseroan; 5. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion on responses to Management Report for the first semester of 2023; 4. Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners on the Company's management policy; 5. Others.
23	Minggu #02 Agustus 2023 Week #02 August 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Others.
24	Minggu #03 Agustus 2023 Week #03 August 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan bahan Radirkom; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Preparation of BoC & BoD Meeting Materials; 4. Others.
25	Minggu #01 2023 Week #September 1, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan Perseroan; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners on the Company's management policy; 4. Others.
26	Minggu #02 2023 Week #September 2, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan persiapan audit laporan keuangan tahun buku 2023; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion on the preparation for financial statement audit for fiscal year 2023; 4. Others.
27	Minggu #03 2023 Week #September 3, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan bahan Radirkom; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Preparation of BoC & BoD Meeting Materials; 4. Others.

No	Minggu Week	Agenda Agenda
28	Minggu #01 Oktober 2023 Week #01 October 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan Perseroan; 4. Pembahasan Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Triwulan III/2023; 5. Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Triwulan III/2023; 6. Pembahasan RKA Dewan Komisaris Tahun Buku 2023; 7. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners on the Company's management policy; 4. Discussion on the Board of Commissioners' Supervisory Report and KPIs for the third quarter of 2023; 5. Discussion on the realisation of work plans and Board of Commissioners Committee activity reports for the third quarter of 2020; 6. Discussion of the Board of Commissioners RKA for Fiscal Year 2023; 7. Others.
29	Minggu #02 Oktober 2023 Week #02 October 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan usulan RKAP 2023; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of proposal for 2023 RKAP; 4. Others.
30	Minggu #03 Oktober 2023 Week #03 October 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan kinerja perusahaan Triwulan III/2023; 4. Persiapan Rakomdir; 5. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion of the Company's performance in the third quarter of 2023; 4. Preparation of BoC & BoD Meeting; 5. Others.
31	Minggu #01 November 2023 Week #November 1, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III/2023; 4. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan Perseroan; 5. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Discussion on responses to the Management Report for the third quarter of 2023; 4. Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners on the Company's management policy; 5. Others.
32	Minggu #02 November 2023 Week #November 2, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Others.
33	Minggu #03 November 2023 Week #November 3, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; 3. Persiapan Rakomdir; 4. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; 3. Preparation of BoC & BoD Meeting; 4. Others.



No	Minggu Week	Agenda Agenda
34	Minggu #01 Desember 2023 Week #01 December 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan Perseroan; Pembahasan atas konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RKAP Tahun 2023; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results; Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners on the Company's management policy; Discussion on the Board of Commissioners' draft response to the proposal for 2023 RKAP; Others.
35	Minggu #02 Desember 2023 Week #02 December 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results; Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; Others.
36	Minggu #03 Desember 2023 Week #03 December 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris; Persiapan Rakomdir; Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of previous meeting results; Discussion of matters that require approval/response from Board of Commissioners; Preparation of BoC & BoD Meeting; Others.

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Realization Of Board Of Commissioners Internal Meeting

Throughout 2023, the agenda, date and participants of Board of Commissioners Meetings are as follows.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting participants	Kehadiran Attendance
1.	Kamis, 5 Januari 2023 Thursday, January 5, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Usulan Batasan Nilai untuk Pekerjaan yang Bersifat Substansial dan Penunjukan Langsung; Pemetaan Struktur Organisasi Fungsi Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022; Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Proposal for Value Limitation for Substantial Work and Direct Appointment; Mapping of the Organisational Structure of Risk Management Functions based on Regulation of the Minister of SOEs No. PER-5/MBU/09/2022; Other strategic matters. 	Marsetio	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Antonius Rainier H	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting participants	Kehadiran Attendance
2	Selasa, 24 Januari 2023 Tuesday, January 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Update RKAP Tahun 2023; Laporan Manajemen <i>Unaudited</i> Tahun Buku 2022; Lanjutan Rencana Kerja Sama Investasi dan Pengoperasian Terminal Belawan New Container Terminal (BNCT); Pengelolaan Dana Pensiun PT Pelindo (Persero); Wawancara Wakil Perseroan sebagai Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan (dihadiri oleh Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan peserta wawancara); Hal-hal strategis lainnya. 	Marsetio	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Tidak Hadir Absent
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Antonius Rainier H	Hadir Present
3	Kamis, 23 Februari 2023 Thursday, February 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Usulan <i>Selected Talent</i> PT Pelindo (Persero) Tahun 2023; Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan <i>Blue Print</i> Organisasi Pasca Penggabungan; Laporan Manajemen Bulan Januari 2023; Hal-hal strategis Lainnya. 	Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Tidak Hadir Absent
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Tidak Hadir Absent
4	Selasa, 21 Maret 2023 Tuesday, March 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Manajemen Bulan Februari 2023; Hasil Audit Laporan Keuangan PT Pelindo (Persero) Tahun Buku 2022; Hal-hal strategis Lainnya. 	Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Tidak Hadir Absent
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting participants	Kehadiran Attendance
5.	Selasa, 21 Maret 2023 Tuesday, March 21, 2023	1. Hasil Audit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja; 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. Audit Results of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Financial Statements for Fiscal Year 2022 by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja; 2. Other strategic matters.	Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Tidak Hadir Absent
			Jodi Mahardi	Hadir Present
6.	Jumat, 28 April 2023 Friday, April 28, 2023	1. Laporan Manajemen Bulan Maret 2023; 2. Hal-hal strategis lainnya. 1. March 2023 Management Report; 2. Other strategic matters.	Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
7.	Selasa, 2 Mei 2023 Tuesday, May 2, 2023	Hasil Audit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young). Audit Results of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Financial Statements for Fiscal Year 2022 by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young).	Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
8.	Kamis, 11 Mei 2023 Thursday, May 11, 2023	Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023. Proposal for Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration for 2023.	Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Tidak Hadir Absent
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting participants	Kehadiran Attendance
9.	Rabu, 24 Mei 2023 Wednesday, May 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Manajemen Bulan April 2023; Update Progress Inisiatif Strategis Subholding posisi s.d. April 2023; Inisiatif Strategis Optimalisasi PSN dan proyek strategis lainnya dalam rangka peningkatan pangsa pasar, pendapatan, dan laba Perseroan. 	Agus Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Tidak Hadir Absent
10.	Rabu, 21 Juni 2023 Wednesday, June 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Manajemen Bulan Mei 2023; Pembahasan Tindak Lanjut Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Komposisi & Kualifikasi Organ Pengelola Risiko; Tindak Lanjut Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi; Hal-hal strategis lainnya. 	Agus Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present
11.	Minggu, 16 Juli 2023 Sunday, July 16, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Juni 2023; Pembahasan Dokumen Pengajuan Nilai Buku Inbreng Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT Prima Multi Terminal; Kebijakan Manajemen Risiko Pelindo pasca Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Petunjuk Teknis SK-3/DKU.MBU/05/2023; Hal-hal strategis lainnya. 	Agus Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Tidak Hadir Absent



Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting participants	Kehadiran Attendance
12.	Senin, 21 Agustus Monday, August 21	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Juli 2023; <i>Update</i> Pemetaan Penyesuaian Pedoman Internal Aspek Dewan Komisaris terhadap PER-2/MBU/03/2023; Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Discussion on July 2023 Management Report; Update on the Internal Guidelines Adjustment Mapping of Board of Commissioners Aspects to PER-2/MBU/03/2023; Other strategic matters. 	Agus Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Tidak Hadir Absent
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Tidak Hadir Absent
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present
13.	Selasa, 26 September 2023 Tuesday, September 26, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Agustus 2023; Pembahasan Tidak Lanjut surat menyurat sebelumnya; <ol style="list-style-type: none"> Reviu Proses Bisnis Penyusunan RKAP Tahun 2024; <i>Update</i> Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2023; <i>Update</i> Insiden <i>Cyber Attack</i> (<i>overview, business impact analysis</i> dan langkah mitigasi); <i>Update</i> Pemetaan Penyesuaian Pedoman Internal Aspek Dewan Komisaris terhadap PER-1/MBU/03/2023, PER-2/MBU/03/2023, PER-3/MBU/03/2023. Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Discussion on August 2023 Management Report; Discussion of Previous Correspondence; <ol style="list-style-type: none"> Review of Business Process for the Preparation of RKAP 2024; Update on the Procurement of Public Accountant Office (KAP) for the Audit of Financial Statements 2023; Update on Cyber Attack Incident (<i>overview, business impact analysis</i> and mitigation steps); Update on the Internal Guideline Adjustment Mapping of Board of Commissioners Aspects against PER-1/MBU/03/2023, PER-2/MBU/03/2023, PER-3/MBU/03/2023. Other strategic matters. 	Agus Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Tidak Hadir Absent
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present
14.	Selasa, 24 Oktober 2023 Tuesday, September 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan September 2023; Pembahasan Tindak Lanjut surat menyurat sebelumnya; <ol style="list-style-type: none"> <i>Update Design Roadmap</i>, Strategi, dan Profil Risiko pada Draft RKAP 2024; <i>Update Draft</i> Rencana Kerja Anggaran (RKA) KTKT untuk Tahun 2023 & 2024; Pembahasan <i>Draft</i> RKAP Tahun 2024; Hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Discussion on September 2023 Management Report; Discussion on Follow-up of previous correspondence <ol style="list-style-type: none"> Update on Roadmap Design, Strategy, and Risk Profile in the RKAP 2024 Draft; Update on KTKT Draft Budget Work Plan (RKA) for 2023 & 2024; Discussion on RKAP 2024 Draft; Other strategic matters. 	Agus Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Tidak Hadir Absent
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting participants	Kehadiran Attendance
15.	Kamis, 23 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Oktober 2023; Permohonan Rekomendasi Penyertaan Hak atas Tanah di Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo; Update Laporan Realisasi Program TJSL 2023; Hal-hal strategis lainnya. 	Agus Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present
16.	Jum'at 15 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan November 2023; Pembahasan Prognosa 2023 dan Usulan RKAP Tahun 2024; Update Permohonan Tanggapan Tertulis terhadap Rencana Kerjasama SPTP atas Dermaga di Tanjung Priok; Hal-hal strategis lainnya. 	Agus Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present

RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETINGS

Rencana Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi

Board Of Commissioners And Board Of Directors Joint Meeting Plan

No.	Bulan Month	Agenda Agenda
1.	Januari 2023 January 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan hasil rapat terdahulu; Pembahasan kinerja <i>unaudited</i> tahun 2022; Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; Pembahasan Rencana Implementasi RKAP 2023; Pembahasan hal-hal strategis lainnya.



No.	Bulan Month	Agenda Agenda
2.	Februari 2023 February 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan Januari 2023; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2022; 5. Pembahasan Hasil Asesmen GCG Tahun Buku 2022; 6. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of January 2023 performance; 3. Performance progress report of each Directorate; 4. Discussion of Audit Results for Fiscal Year 2022; 5. Discussion of GCG Assessment Results for Fiscal Year 2022; 6. Discussion of other strategic matters.
3.	Maret 2023 March 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan Februari 2023; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan hasil temuan audit dan tindak lanjutnya; 5. Pembahasan Rencana Penunjukan Auditor Eksternal (KAP) Tahun Buku 2023; 6. Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2022; 7. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of February 2023 performance; 3. Performance progress report of each Directorate; 4. Discussion of audit findings and follow-up; 5. Discussion of the Plan for Appointment of External Auditor (KAP) for Fiscal Year 2023; 6. Discussion on Preparation for the GMS Ratification of 2022 Annual Report; 7. Discussion of other strategic matters.
4.	April 2023 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 3. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I/2023; 4. Pembahasan hasil RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2022; 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Performance progress report of each Directorate; 3. Discussion of Management Report for the first quarter of 2023; 4. Discussion of the GMS resolution on the 2022 Annual Report Ratification; 5. Discussion of other strategic matters.
5.	Mei 2023 May 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan April 2023; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of April 2023 performance; 3. Performance progress report of each Directorate; 4. Discussion of other strategic matters.
6.	Juni 2023 June 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan Mei 2023; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of May 2023 performance; 3. Performance progress report of each Directorate; 4. Discussion of other strategic matters.
7.	Juli 2023 July 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan Laporan Manajemen Semester I/2023; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Telaah atas pelaksanaan RKAP 2023; 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of Management Report for the first semester of 2023; 3. Performance progress report of each Directorate; 4. Review of the implementation of RKAP 2023; 5. Discussion of other strategic matters.

No.	Bulan Month	Agenda Agenda
8.	Agustus 2023 August 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan Juli 2023; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of July 2023 performance; 3. Performance progress report of each Directorate; 4. Discussion of other strategic matters.
9.	September 2023 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan Agustus 2023; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan Usulan RKAP 2024; 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of August 2023 performance; 3. Performance progress report of each Directorate; 4. Discussion of 2024 RKAP Proposal 5. Discussion of other strategic matters.
10.	Oktober 2023 October 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III/2023; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan Usulan RKAP 2024; 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of Management Report for the third quarter of 2023; 3. Performance progress report of each Directorate; 4. Discussion of 2024 RKAP Proposal 5. Discussion of other strategic matters.
11.	November 2023 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan Oktober 2023; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Persiapan RUPS Pengesahan RKAP 2024; 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of October 2023 performance; 3. Performance progress report of each Directorate; 4. Preparation for the GMS Approval of 2024 RKAP 5. Discussion of other strategic matters.
12.	Desember 2023 December 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu; 2. Pembahasan kinerja bulan November 2023; 3. Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat; 4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of previous meeting results; 2. Discussion of November 2023 performance; 3. Performance progress report of each Directorate; 4. Discussion of other strategic matters.

REALISASI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta rapat Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

REALIZATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Throughout 2023, the agenda, date and participants of Board of Commissioners Meetings with Board of Directors are as follows.



Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
1	Rabu, 25 Januari 2023 Wednesday, January 25, 2023	<p>1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat dan korespondensi surat menyurat sebelumnya;</p> <p>a. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Koordinasi tanggal 22 Desember 2022, mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status PSN proyek Kuala Tanjung terkait dengan rencana pengembangan sebagai pelabuhan hub dan pembangunan kawasan, serta penjelasan <i>dispute</i> dengan PT Prima Tangki Indonesia. ▪ <i>Time schedule</i> atas penyelesaian kajian dan kepastian pembagian kerja (tupoksi dan kewenangan) antara Regional, Cabang, dan Subholding, serta fungsi koordinasi pihak-pihak tersebut ▪ <i>Progress</i> dan <i>timeline</i> indikatif berkenaan dengan rencana divestasi PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP). <p>b. Pembahasan <i>Update</i> RKAP Tahun 2023;</p> <p>c. Pembahasan Lanjutan Rencana Kerjasama Investasi dan Pengoperasian Terminal Belawan <i>New Container Terminal</i> (BNCT);</p> <p>d. Pembahasan Pengelolaan Dana Pensiun PT Pelindo (Persero);</p> <p>2. Pembahasan Laporan Manajemen <i>Unaudited</i> Tahun Buku 2022;</p> <p>3. Hal-hal strategis lainnya.</p> <p>1. Discussion of Follow-up Meeting and previous correspondence:</p> <p>a. Discussion of Follow-up of Coordination Meeting on December 22, 2022, regarding:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status of PSN Kuala Tanjung project related to the development plan as a hub port and area development, as well as explanation of dispute with PT Prima Tangki Indonesia. ▪ Time schedule for the completion of the study and certainty of the division of tasks (main duties and functions as well as authority) between Regional, Branch, and Subholding, as well as the coordination function of these parties. ▪ Progress and indicative timeline regarding the divestment plan of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP). <p>b. Discussion of 2023 RKAP Update;</p> <p>c. Continued Discussion of Investment Cooperation Plan and Operation of Belawan New Container Terminal (BNCT);</p> <p>d. Discussion of Pension Fund Management of PT Pelindo (Persero);</p> <p>2. Discussion of Unaudited Management Report for Fiscal Year 2022;</p> <p>3. Other strategic matters.</p>	<p>Marsetio</p> <p>Sudung Situmorang</p> <p>Heru Sukanto</p> <p>Muchtar Luthfi Mutty</p> <p>Arif Toha Tjajagama</p> <p>Didi Sumedi</p> <p>Antonius Rainier H</p>	<p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Tidak Hadir Absent</p> <p>Hadir Present</p>	<p>Arif Suhartono</p> <p>Hambra</p> <p>Mega Satria</p> <p>Ihsanuddin Usman</p> <p>Prasetyo</p> <p>Boy Robyanto</p> <p>Putut Sri Muljanto</p>	<p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p> <p>Hadir Present</p>

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
2	Selasa, 28 Februari 2023 Tuesday, February 28, 2023	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat dan korespondensi surat menyurat sebelumnya; a. Pembahasan Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan <i>Blue Print</i> Organisasi Pasca Penggabungan; 2. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Januari 2023; 3. Hal-hal strategis lainnya. 1. Discussion of Follow-up Meeting and previous correspondence; a. Discussion of Proposals for Changes in Organizational Structure and Post-Merger Organizational Blue Print; 2. Discussion of January 2023 Management Report; 3. Other strategic matters.	Sudung Situmorang	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Didi Sumedi	Tidak Hadir	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
					Putut Sri Muljanto	Hadir Present
3	Selasa, 28 Maret 2023 Tuesday, March 28, 2023	1. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Februari 2023; 2. Pembahasan Hasil Audit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022; 3. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat dan korespondensi surat menyurat sebelumnya: a) Kinerja Pasca Restrukturisasi PT Prima Multi Terminal (PMT); b) Permasalahan Lahan Bojonegara; c) <i>Update</i> Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH); d) Operasi Pelabuhan Kijing; e) Divestasi Jalan Tol Cibitung Cilincing (JTCC); 4. <i>Going Concern</i> Anak/Cucu Perusahaan: a) PT Prima Multi Terminal (PMT); b) PT Prima Terminal Petikemas (PTP); c) PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII); d) PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII); e) PT Pengerukan Indonesia (Rukindo). 1. Discussion of February 2023 Management Report; 2. Discussion of Audit Results of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Financial Statements for Fiscal Year 2022; 3. Discussion of Follow-up Meetings and previous correspondence: a) Post Restructuring Performance of PT Prima Multi Terminal (PMT); b) Bojonegara Land Issues; c) Update on the Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) Project; d) Kijing Port Operation; e) Divestment of Cibitung Cilincing Toll Road (JTCC); 4. <i>Going Concern</i> to Subsidiaries: a) PT Prima Multi Terminal (PMT); b) PT Prima Terminal Petikemas (PTP); c) PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII); d) PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII); e) PT Pengerukan Indonesia (Rukindo).	Sudung Situmorang	Hadir Present	Arif Suhartono	Tidak Hadir Absent
			Arif Toha Tjahjagama	Tidak Hadir Absent	Hambra	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
					Putut Sri Muljanto	Hadir Present



Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
4	Jumat, 28 April 2023 Friday, April 28, 2023	1. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Maret 2023; 2. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat dan korespondensi surat menyurat sebelumnya: a. <i>Update Fatality Accident</i> s.d Triwulan I Tahun 2023. 1. Discussion of March 2023 Management Report; 2. Discussion of Follow-up Meeting and previous correspondence: a. <i>Update Fatality Accident</i> s.d Triwulan I Tahun 2023.	Sudung Situmorang	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Hambra	Tidak Hadir Absent
			Heru Sukanto	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
				Putut Sri Muljanto	Hadir Present	

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
5	Rabu, 24 Mei 2023 Wednesday, May 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Manajemen Bulan April 2023; 2. Tindak Lanjut Rapat dan korespondensi surat menyurat sebelumnya: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Update Progress</i> Inisiatif Strategis <i>Subholding</i> posisi s.d. April 2023. b. <i>Roadmap</i> Teknologi Informasi dan pencegahan risiko <i>cyber security</i>. c. Inisiatif Strategis Optimalisasi PSN dan proyek strategis lainnya dalam rangka peningkatan pangsa pasar, pendapatan, dan laba Perseroan. d. <i>Update</i> dan inisiatif strategis yg dilakukan dalam rangka penurunan biaya logistik nasional mengacu pada laporan <i>Logistic Performance Index World Bank 2023</i>. e. <i>Update Progress</i> Rencana Aksi Korporasi 2023. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Divestasi CTP; ▪ Rencana Kerjasama BNCT dengan INA; ▪ Rencana Pemurnian Bisnis; ▪ Penggabungan JICT & Koja. 3. Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. April 2023 Management Report; 2. Follow-up Meeting and previous correspondence: <ol style="list-style-type: none"> a. Update on Subholding Strategic Initiative Progress position up to April 2023. b. Information Technology Roadmap and cyber security risk prevention. c. Strategic Initiatives Optimization of PSN and other strategic projects in order to increase market share, revenue, and profit of the Company. d. Update and strategic initiatives carried out in order to reduce national logistics costs referring to the 2023 World Bank Logistics Performance Index report. e. Update on the progress of 2023 Corporate Action Plan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ CTP Divestment Plan; ▪ BNCT Cooperation Plan with INA; ▪ Business Refining Plan; ▪ JICT & Koja Merger; 3. Other Strategic Matters. 	<p>Agus Suhartono</p> <hr/> <p>Sudung Situmorang</p> <hr/> <p>Arif Toha Tjahjagama</p> <hr/> <p>Heru Sukanto</p> <hr/> <p>Didi Sumedi</p> <hr/> <p>Jodi Mahardi</p> <hr/> <p>Muchtar Luthfi Mutty</p>	<p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Tidak Hadir Absent</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p>	<p>Arif Suhartono</p> <hr/> <p>Hambra</p> <hr/> <p>Mega Satria</p> <hr/> <p>Ihsanuddin Usman</p> <hr/> <p>Prasetyo</p> <hr/> <p>Boy Robyanto</p> <hr/> <p>Putut Sri Muljanto</p>	<p>Tidak Hadir Absent</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p> <hr/> <p>Hadir Present</p>



Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
6	Rabu, 21 Juni 2023 Wednesday, June 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Manajemen Bulan Mei 2023; Tindak Lanjut Rapat & korespondensi surat menyurat sebelumnya: <i>Update</i> dan inisiatif strategis yang dilakukan Pelindo dalam rangka penurunan biaya logistik nasional mengacu pada laporan <i>Logistic Performance Index World Bank 2023</i>. Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> May 2023 Management Report; Follow-up Meeting & previous correspondence: Update and strategic initiatives undertaken by Pelindo in order to reduce national logistics costs referring to the 2023 World Bank Logistics Performance Index report. Hal-hal Strategis Lainnya. Other Strategic Matters. 	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Tidak Hadir Absent	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
7	Minggu, 16 Juli 2023 Sunday, July 16, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Juni 2023; Pembahasan Tindak Lanjut Rapat dan korespondensi surat menyurat sebelumnya: <ol style="list-style-type: none"> <i>Progress</i> divestasi CTP; Progres permasalahan BMTH berkaitan dengan PT PLN; Capaian inisiatif strategis s.d. Semester 1 2023; <i>Update Fatality Accident</i> s.d. Semester 1 2023; Kebijakan Manajemen Risiko Pelindo pasca Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan Petunjuk Teknis SK-3/DKU.MBU/05/2023. Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of June 2023 Management Report; Discussion of Follow-up Meeting and previous correspondence: <ol style="list-style-type: none"> Progress of CTP divestment; Progress of BMTH issues related to PT PLN; Achievement of strategic initiatives up to Semester 1 2023; Update on Fatality Accident up to 1st Semester of 2023; Pelindo's Risk Management Policy after SOE Minister Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 and Technical Guidelines SK-3/DKU.MBU/05/2023. Other Strategic Matters. 	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Tidak Hadir	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
8	Selasa, 22 Agustus 2023 Tuesday, August 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Juli 2023; Pembahasan Tindak Lanjut Rapat dan korespondensi surat menyurat sebelumnya: <ol style="list-style-type: none"> Update Isu Strategis SDM terkait Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu (SPPI) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasca penggabungan. Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of July 2023 Management Report; Discussion of Follow-up Meeting and previous correspondence: <ol style="list-style-type: none"> Update on HC Strategic Issues related to the United Indonesian Port Workers Union (SPPI) and Post-merger Collective Labor Agreement (CLA). Other Strategic Matters. 	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Tidak Hadir Absent	Boy Robyanto	Hadir Present
Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present			
9	Selasa, 26 September 2023 Tuesday, September 26, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Agustus 2023; Pembahasan Tindak Lanjut Rapat dan korespondensi surat menyurat sebelumnya: <ol style="list-style-type: none"> Update Insiden Cyber Attack (overview, business impact analysis & langkah mitigasi). Update Perkembangan JTCC, BMTH, BNCT, Kuala Tanjung, Bojonegara, dan Kalibaru. Update Perkembangan kasus-kasus hukum dan upaya penanganan/penyelesaiannya, khususnya sengketa di bidang pertanahan, kerjasama dengan pihak ketiga, piutang, dan lainnya. Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of August 2023 Management Report; Discussion of Follow-up Meeting and previous correspondence: <ol style="list-style-type: none"> Update on Cyber Attack Incident (overview, business impact analysis & mitigation steps). Update on the development of JTCC, BMTH, BNCT, Kuala Tanjung, Bojonegara, and Kalibaru. Update on the development of legal cases and efforts to handle/resolve them, especially disputes in the field of land, cooperation with third parties, receivables, and others. Other Strategic Matters. 	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Tidak Hadir Absent
			Didi Sumedi	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
Muchtar Luthfi Mutty	Tidak Hadir Absent	Putut Sri Muljanto	Hadir Present			



Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Meeting Participants - Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Meeting Participants - Board of Directors	Kehadiran Attendance
10	Selasa, 24 Oktober 2023 Tuesday, October 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan September 2023; Pembahasan Tindak Lanjut Rapat dan korespondensi surat menyurat sebelumnya; Pembahasan <i>Draft</i> awal RKAP Tahun 2024; Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of September 2023 Management Report; Discussion of Follow-up Meeting and previous correspondence; Discussion of the initial draft of 2024 RKAP; Other Strategic Matters. 	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Prasetyo	Tidak Hadir Absent
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
11	Kamis, 23 November 2023 Thursday, November 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Oktober 2023; Pembahasan Tindak Lanjut Rapat dan korespondensi surat menyurat sebelumnya: <ol style="list-style-type: none"> <i>Update Progress</i> Transaksi Divestasi Jalan Tol Cibitung Cilincing (JTCC); Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of October 2023 Management Report; Discussion of Follow-up Meeting and previous correspondence: <ol style="list-style-type: none"> Update on Progress of Divestment Transaction of Cibitung Cilincing Toll Road (JTCC); Other Strategic Matters. 	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
12	Jumat, 15 Desember 2023 Friday, December 15, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Manajemen Bulan November 2023; Pembahasan Tindak Lanjut Rapat dan korespondensi surat menyurat sebelumnya: <ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Prognosa 2023 dan Usulan RKAP Tahun 2024; Penyelesaian Permasalahan Hukum atas Aset Tanah di beberapa daerah; Hal-hal Strategis Lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Discussion of November 2023 Management Report; Discussion of Follow-up Meeting and previous correspondence: <ol style="list-style-type: none"> Discussion of 2023 Prognosis and 2024 RKAP Proposal; Settlement of Legal Issues on Land Assets in several regions; Other Strategic Matters. 	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Sudung Situmorang	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Arif Toha Tjahjagama	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Didi Sumedi	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Muchtar Luthfi Mutty	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS' MEETINGS

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Meeting Frequency and Attendance of Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Agus Suhartono*	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	8	8	100%
Marsetio**	Plt. Komisaris Utama/Independen Acting President Commissioner/Independent Commissioner	2	2	100%
Sudung Situmorang***	Komisaris Independen Independent Commissioner	16	16	100%
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	16	12	75%
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	16	16	100%
Muchtar Luthfi Mutty****	Komisaris Independen Independent Commissioner	16	13	81%
Antonius Rainier H**	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	2	100%
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	16	11	69%
Jodi Mahardi*****	Komisaris Commissioner	14	12	86%

*Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama tanggal 19 Mei 2023 Kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama/Independen tanggal 3 Januari 2024.

**Berhenti menjabat tanggal 8 Februari 2023

***Diangkat menjadi Komisaris Independen tanggal 3 Januari 2024.

****Berhenti menjabat sejak tanggal 3 Januari 2024

*****Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

*Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama tanggal 19 Mei 2023 Kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama/Independen tanggal 3 Januari 2024.

**Berhenti menjabat tanggal 8 Februari 2023

***Diangkat menjadi Komisaris Independen tanggal 3 Januari 2024.

****Berhenti menjabat sejak tanggal 3 Januari 2024

*****Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbarui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan terkait program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
3. Setiap tahun masing-masing anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi dan/atau audit;

Capability improvement is deemed important to enable the Board of Commissioners to update their knowledge on the latest developments of the Company's core business, to anticipate problems that arise in the future for the sustainability and progress of the Company. The provisions regarding Board of Commissioners capability improvement program are as follows:

1. The capability improvement program is carried out to improve the work effectiveness of Board of Commissioners.
2. The capability improvement program should be included in the Board of Commissioners' Work Plan and Budget;
3. Each year, each member of Board of Commissioners is required to attend one of the trainings on the topics of risk management, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, accounting and/or audit;



Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings			RUPS GMS		
Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
8	8	100%	1	1	100%
1	1	100%	1	1	100%
12	12	100%	2	2	100%
12	11	92%	2	2	100%
12	11	92%	2	2	100%
12	11	92%	2	2	100%
1	1	100%	1	1	100%
12	9	75%	2	2	100%
11	9	82%	-	-	-

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengikuti pelatihan paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan dalam satu tahun; 5. Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan lembaga profesi, akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan milik atau dikendalikan oleh BUMN; 6. Dewan Komisaris wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, akuntansi; 7. Sertifikasi diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/ organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/ atau internasional; 8. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggungjawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris, selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Participate in training at least totaling 20 (twenty) hours of training in one year; 5. The training attended is PPL organized by professional institutions, accreditation, and/or training institutions owned or controlled by SOEs; 6. The Board of Commissioners must follow at least 1 (one) certification, including in the fields of business, corporate business activities, law, risk management, compliance, finance, accounting; 7. Certification is issued by a certification board/regulator/ relevant professional organization that is recognized nationally and/or internationally; 8. The member of Board of Commissioners concerned is responsible for making a report on the implementation of capability improvement program. The report shall be submitted to the Board of Commissioners, no later than 30 (thirty) days after the date of program implementation. |
|---|---|

Realisasi program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 dijabarkan dalam tabel berikut ini:

The realization of capability improvement programs attended by the Board of Commissioners throughout 2023 is described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Development Materials Competency/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place	Penyelenggara Organizer
Agus Suhartono*	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	<i>Training on hedge Accounting under IFRS 9</i>	27-28 Juli 2023 di Sydney Australia July 27-28, 2023 in Sydney Australia	PWC
		Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	9-11 Agustus 2023 August 9-11, 2023	Qualified Risk Governance Profesional (QRGP)
Marsetio**	Plt. Komisaris Utama/ Independen Acting. President Commissioner/Independent	-	-	-
Sudung Situmorang***	Komisaris Independen Independent Commissioner	<i>Training on hedge Accounting under IFRS 9</i>	27-28 Juli 2023 di Sydney Australia July 27-28, 2023 in Sydney Australia	PWC
		Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	9-11 Agustus 2023 August 9-11, 2023	Qualified Risk Governance Profesional (QRGP)
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	<i>Training on hedge Accounting under IFRS 9</i>	27-28 Juli 2023 di Sydney Australia July 27-28, 2023 in Sydney Australia	PWC
		Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	9-11 Agustus 2023 August 9-11, 2023	Qualified Risk Governance Profesional (QRGP)
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Audit Teknologi Informasi Information Technology Audit	Online 27 Juni 2023 Online June 27, 2023	Kementerian BUMN
		<i>ESG for Auditor</i>	Online 13 Juli 2023 Online July 13, 2023	Kementerian BUMN
		<i>Training on hedge Accounting under IFRS 9</i>	27-28 Juli 2023 di Sydney Australia July 27-28, 2023 in Sydney Australia	PWC
		Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	9-11 Agustus 2023 August 9-11, 2023	Qualified Risk Governance Profesional (QRGP)
		<i>Pre IPO dan Post IPO dan Pemeringkat & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) Pre IPO and Post IPO and Rating & Issuance of Debt Securities & Sukuk (EBUS)</i>	Online 10 Agustus 2023 On line August 10, 2023	Kementerian BUMN



Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Development Materials Competency/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place	Penyelenggara Organizer
Muchtart Luthfi Mutty****	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	9-11 Agustus 2023 August 9-11, 2023	Qualified Risk Governance Profesional (QRGP)
		<i>Sustainability - Remap and Reshape GRC Implementation Tahun 2023</i> Sustainability - Remapping and Reshaping 2023 GRC Implementation	15 – 23 September 2023 di 3 Kota (Negara), yaitu Budapest (Hongaria), Wina (Austria), Praha (Rep.Ceko) September 15-23, 2023 in 3 cities (countries), namely Budapest (Hungary), Vienna (Austria), Prague (Czech Republic)	<i>Executive Program: Governance Risk Compliance (GRC)</i>
Antonius Rainier H**	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	9-11 Agustus 2023 August 9-11, 2023	Qualified Risk Governance Profesional (QRGP)
Jodi Mahardi*****	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	9-11 Agustus 2023 August 9-11, 2023	Qualified Risk Governance Profesional (QRGP)

*Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama tanggal 19 Mei 2023 Kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama/Independen tanggal 3 Januari 2024.

**Berhenti menjabat tanggal 8 Februari 2023

***Diangkat menjadi Komisaris Independen tanggal 3 Januari 2024.

****Berhenti menjabat sejak tanggal 3 Januari 2024

*****Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

*Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama tanggal 19 Mei 2023 Kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama/Independen tanggal 3 Januari 2024.

**Berhenti menjabat tanggal 8 Februari 2023

***Diangkat menjadi Komisaris Independen tanggal 3 Januari 2024.

****Berhenti menjabat sejak tanggal 3 Januari 2024

*****Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Perseroan;
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF COMMISSIONERS

The provisions regarding the orientation program for members of Board of Commissioners are as follows:

1. Members of Board of Commissioners who are appointed for the first time must be given an induction program regarding the Company.
2. The responsibility for conducting the orientation program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as the Corporate Secretary.
3. The orientation program includes:
 - a. Implementation of GCG principles by the Company;
 - b. An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
 - c. Information related to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee; and
 - d. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as other prohibited matters.

4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan.
5. Program pengenalan Perseroan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.

Program orientasi bagi Dewan Komisaris baru pada tahun 2023 telah dilaksanakan sebagai berikut:

4. The Company's orientation program can be in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company.
5. The Company's orientation program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of Board of Commissioners.

The orientation program for new Board of Commissioners in 2023 was held as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Kamis, 23 Februari 2023 Thursday, February 23, 2023
Agus Suhartono	Komisaris Utama President Commissioner	Rabu, 24 Mei 2023 dan Selasa, 30 Mei 2023 Wednesday, May 24, 2023 and Tuesday, May 30, 2023

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris baik individu maupun kolegal berdasarkan realisasi kinerja pada tahun 2023, antara lain:

1. Melaksanakan rapat-rapat, yaitu:
 - a. Rapat internal Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh seluruh Anggota Komisaris.
 - b. Rapat internal Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisaris dan seluruh Anggota Komite.
 - c. Rapat Internal Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi.
 - d. Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
 - e. Rapat Umum Pemegang Saham (RKAP 2023 dan Laporan Tahunan 2022).
 - f. Pelindo Forum.
2. Memberikan Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan atas:
 - a. Usulan RKAP 2023 termasuk strategi Perseroan.
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKAP Tahun 2023 termasuk strategi Perseroan dan membuat tanggapan Dewan Komisaris tentang Realisasi Triwulan I, II dan III disampaikan ke Pemegang Saham.
 - c. Penjelasan Keterlambatan Laporan Keuangan (*Audited*) Tahun Buku 2022.
 - d. Pengawasan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
 - e. Evaluasi Kinerja Direksi.
 - f. Tanggapan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - g. Pengawasan Kepatuhan Direksi terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES IMPLEMENTATION

The implementation of Board of Commissioners' duties based on performance realization in 2023 includes:

1. Held meetings:
 - a. Internal Board of Commissioners meetings attended only by all Commissioners.
 - b. Internal Board of Commissioners meetings attended by all Commissioners and all Committee Members.
 - c. Internal Board of Commissioners meetings that invited Directors.
 - d. Coordination meetings between Board of Commissioners and Board of Directors.
 - e. Annual General Meeting of Shareholders (2023 RKAP and 2022 Annual Report).
 - f. Pelindo Forum.
2. Provided Evaluation/Guidance/Responses/Approvals on:
 - a. Proposed 2023 RKAP includes the Company's strategy.
 - b. Evaluation of 2023 RKAP includes the Company's strategy implementation and provide the Board of Commissioners' responses regarding the Realization in Quarter I, II, and III to the Shareholders.
 - c. Explanation of Delay in Audited Financial Reports for 2022 Fiscal Year.
 - d. Supervision of the Implementation of Good Corporate Governance Principles.
 - e. Evaluation of Board of Directors' Performance.
 - f. Responses regarding remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors.
 - g. Oversight of the Board of Directors' Compliance with Laws and Regulations.
 - h. Monitoring follow-up actions from internal auditor inspections.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> i. Pengawasan pelaksanaan audit eksternal dan mengajukan usulan auditor eksternal. j. Memberikan arahan perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan. k. Evaluasi dan menyampaikan arahan tentang Penguatan Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir Pekerja, Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai PSAK, Pengadaan dan Pelaksanaan, dan Kebijakan Mutu Pelayanan dan Pelaksanaan Perseroan. l. Evaluasi usulan/rekomendasi kepada RUPS tentang calon Anggota Direksi, serta Direksi dan Komisaris Anak Perseroan. m. Memberikan Tanggapan terhadap Hal-hal terkait dengan Tupoksi Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perseroan. <p>3. Melakukan kunjungan kerja.
Selama Tahun 2023, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris telah melaksanakan kunjungan kerja ke Regional, Cabang-Cabang dan Anak Perusahaan baik khusus mengenai kinerja, maupun kunjungan dalam rangka kegiatan tertentu seperti pengecekan fisik aset yang akan dihapusbukkan dan dipindahtangankan.</p> <p>4. Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Dewan Komisaris melalui menghadiri Seminar, <i>Workshop</i>, dan Sosialisasi di Dalam Negeri dan Luar Negeri.</p> <p>5. Menyusun Laporan Dewan Komisaris dan menyampaikan kepada Pemegang Saham.</p> <p>6. Kegiatan Komite dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan dibantu oleh organ Komite Audit, Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> i. Supervision of external audit implementation and proposing external auditors. j. Providing guidance on changes in the business environment expected to have significant impact on the Company's operations and performance. k. Evaluating and providing guidance on Strengthening Internal Control Systems, Risk Management, Information Technology, Employee Career Development Policy Implementation, Accounting Policies and Financial Report Preparation according to PSAK, Procurement and Implementation, and the Company Quality Service and Implementation Policy. l. Evaluating proposals/recommendations to the GMS regarding Director candidates, as well as Subsidiary Directors and Commissioners. m. Providing Responses to Matters related to the Board of Commissioners' Duties in Company Management. <p>3. Conducting work visits.
During 2023, the Board of Commissioners and its Supporting Organs have conducted work visits to Regions, Branches, and Subsidiaries specifically regarding performance, as well as visits for specific activities such as physical asset verification for disposal and transfer.</p> <p>4. Participating in the Professionalism Enhancement of Board of Commissioners by attending Seminars, Workshops, and Socialization both domestically and internationally.</p> <p>5. Compiling the Board of Commissioners' Report and presenting it to the Shareholders.</p> <p>6. Committee Activities to support Supervision and Advisory Functions of the Board of Commissioners.
During 2023, the Board of Commissioners carried out supervisory and advisory duties to the Board of Directors, assisted by Audit Committee, GCG & Risk Management Monitoring Committee, and Nomination & Remuneration Committee.</p> |
|--|---|

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris baik individu maupun kolegal secara detail akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang akan dievaluasi secara periodik yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris menetapkan indikator Pencapaian Kinerja yang disahkan RUPS setiap tahun;
3. Dewan Komisaris atau organ Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris, menuangkan hasilnya dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris serta mencantumkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris;

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE APPRAISAL

Procedure of Board of Commissioners Performance Appraisal

The performance assessment of Board of Commissioners both individually and collegially in detail will be determined based on the Decision of Board of Commissioners which will be evaluated periodically with the following provisions:

1. Board of Commissioners has a policy on the measurement and assessment of the Board of Commissioners' performance;
2. Board of Commissioners sets Performance Achievement indicators that are approved by the GMS every year;
3. Board of Commissioners or an organ of Board of Commissioners conducts an assessment of the Board of Commissioners' performance, states the results in the Board of Commissioners' Meeting Minutes and includes it in the Board of Commissioners' Duties Implementation Report;

4. Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, Komite dan setiap individu Komisaris.
5. Evaluasi tahunan pada poin 4 di atas di dasarkan pada tolak ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan;
6. Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

KRITERIA KPI KOLEGIAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki KPI Dewan Komisaris yang merupakan kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris. KPI Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yaitu:

1. Kontribusi terhadap capaian kinerja Perseroan;
2. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris;
3. Kontribusi terhadap penerapan GCG;
4. Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris;
5. Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perseroan;
6. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris;
7. Pengawasan dan arahan atas rencana dan pelaksanaan program TJSL.

KRITERIA KPI INDIVIDU DEWAN KOMISARIS

KPI Individual Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 06/KEP-DK/PI/V-2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan *Key Performance Indicators* Individual Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Tahun 2022.

Kategori pencapaian KPI per masing-masing Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. "Sangat Baik" apabila pencapaian KPI 100%-120%
2. "Baik" apabila pencapaian KPI 85%-99%
3. "Kurang Baik" apabila pencapaian KPI 60%-84%
4. "Tidak Baik" apabila pencapaian KPI kurang dari 60%

Adapun indikator penilaian KPI individu Dewan Komisaris yaitu:

1. KPI Umum
 - a. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris.
 - c. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris.

4. Board of Commissioners conducts an objective annual evaluation to determine the effectiveness of Board, Committee and each individual Commissioner.
5. The annual evaluation in point 4 above is based on benchmarks or assessment criteria that are specific, measurable, achievable and relevant;
6. The annual evaluation as referred to is submitted by the Board of Commissioners to the GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

BOARD OF COMMISSIONERS COLLEGIAL KPI CRITERIA

The Board of Commissioners has Board of Commissioners KPIs which are the criteria for assessing the Board of Commissioners' performance. The Board of Commissioners' KPIs are proposed by the Board of Commissioners and determined in the GMS, namely:

1. Contribution to the Company's performance achievement;
2. Timely submission of opinions and suggestions that are the obligation of Board of Commissioners;
3. Contribution to the GCG implementation;
4. Meetings and Working Visit of Board of Commissioners;
5. Supervision and direction to the Board of Directors on the Company's plans and policies;
6. Effectiveness of supporting activities of Board of Commissioners;
7. Supervision and direction on the plan and implementation of CSR program.

BOARD OF COMMISSIONERS INDIVIDUAL KPI CRITERIA

The Board of Commissioners Individual KPIs are determined based on the Decree of Board of Commissioners No. 06/KEP-DK/PI/V-2023 dated May 29, 2023 concerning the Determination of Individual Key Performance Indicators for Members of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2022.

Categories of KPI achievement per each Board of Commissioners are as follows:

1. "Very Good" if the KPI achievement is 100%-120%
2. "Good" if the KPI achievement is 85%-99%
3. "Poor" if the KPI achievement is 60%-84%
4. "Very Poor" if the KPI achievement is less than 60%

The indicators of individual KPI assessment of Board of Commissioners are:

1. General KPI
 - a. Attendance rate at the Board of Commissioners Meeting.
 - b. Participation in the Board of Commissioners competency development program.
 - c. Board of Commissioners Work Visit



1. KPI Khusus

1. Specific KPI

Nama Name	Jabatan Position	KPI Khusus Specific KPI
Agus Suhartono	Komisaris Utama/Independen President Commissioner /Independent	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi atas persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi. 2. Evaluasi dan validasi atas daftar Talenta BoD-1 yang disampaikan oleh Direksi. 3. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordination on Board of Commissioners' approval/recommendation over the Board of Directors' proposal. 2. Evaluation and validation on the BoD-1 Talent list submitted by the Board of Directors. 3. Board of Commissioners' advice and recommendation on the proposed remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners.
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha. 2. Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas pelaksanaan pembinaan dan restrukturisasi anak perusahaan. 3. Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Commissioners' supervision and direction on the implementation of business development activities. 2. Board of Commissioners' supervision and direction on the implementation of guidance and restructuring of subsidiaries. 3. Board of Commissioners' supervision and direction on procurement policies and their implementation.
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan operasional, kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya. 2. Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas penerapan dan pengembangan IT. 3. Persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan penghapusbukuan aset tetap. <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Commissioners' supervision and direction on operational policies, quality and service policies and their implementation. 2. Board of Commissioners' supervision and direction on IT implementation and development. 3. Board of Commissioners' approval/recommendation on the proposed write-off of fixed assets.
Sudung Situmorang	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan SDM. 2. Persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan. 3. Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas permasalahan Hukum. <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Commissioners' supervision and direction on HC policies. 2. Board of Commissioners' approval/recommendation on the proposed appointment of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries. 3. Board of Commissioners' supervision and direction on Legal matters.
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Manajemen Risiko dan/atau Bidang Teknik dan Komersial. 2. Persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan Kerjasama Usaha. 3. Evaluasi pencapaian GCG aspek Dewan Komisaris sesuai dengan target. <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Commissioners' supervision and direction on Risk Management and/or Technical and Commercial Affairs. 2. Board of Commissioners' approval/recommendation on proposed Business Cooperation. 3. Evaluation of the achievement of GCG aspect of Board of Commissioners in accordance with the target.

Nama Name	Jabatan Position	KPI Khusus Specific KPI
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas Sistem Pengendalian Internal serta Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan penghapusbukuan piutang. Saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris atas laporan berkala Direksi, RJPP, dan RKAP. <ol style="list-style-type: none"> Board of Commissioners' supervision and direction on the Internal Control System, accounting policies and preparation of financial statements. Board of Commissioners' approval/recommendation on the proposed write-off of receivables. Board of Commissioners' suggestions and recommendations on periodic reports of Board of Directors, RJPP, and RKAP.
Muchtar Luthfi Muty	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas permasalahan sosial dan masyarakat. Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas permasalahan hubungan industrial. Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas rencana dan realisasi penyaluran TJSL/CSR <ol style="list-style-type: none"> Board of Commissioners' supervision and direction on social and community issues. Board of Commissioners' supervision and direction on industrial relations issues. Board of Commissioners' supervision and direction on the plan and realization of SER/CSR distribution.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun individu dilaksanakan dengan sistem *self assessment* dan disampaikan kepada Pemegang Saham.

ASSESSOR

Board of Commissioners' performance assessment both collegially and individually is carried out by self-assessment system and submitted to the Shareholders.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS

PENCAPAIAN KPI KOLEGIAL DEWAN KOMISARIS

THE BOARD OF COMMISSIONERS COLLEGIAL KPI ACHIEVEMENT

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement indicator	Satuan Unit	Bobot Weigh	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja Perseroan Contribution to achieving the Company performance		10,00				10,46
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to realizing the Board of Directors KPI achievements	Poin Point	10,00	100	104,46	105%	10,46



No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement indicator	Satuan Unit	Bobot Weigh	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris Timeliness of Opinion submission and Advice that is the obligation of Board of Commissioners		20,00				24,00
1.	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2023, Laporan Triwulanan 2023, dan Laporan Tahunan 2022 Board of Commissioners' Opinions and Advice on the 2023 RKAP, 2023 Quarterly Report, and 2022 Annual Report	Hari Kerja Working Day	5,00	30	11	120%	6,00
2.	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri Responses to the Board of Directors actions that must be approved by the GMS/Minister	Hari Kerja Working Day	5,00	14	13	120%	6,00
3.	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Responses to the Board of Directors actions that must be approved by the GMS/Minister	Hari Kerja Working Day	5,00	14	7	120%	6,00
4.	Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan Board of Commissioners Quarterly and Annual Report	Hari Kerja Working Day	5,00	30	10,5	120%	6,00
3.	Kontribusi terhadap penerapan GCG Kontribusi terhadap penerapan GCG		10,00				10,13
1.	Kontribusi kualitas penerapan GCG Contribution to the quality of GCG implementation	Poin Point	5,00	31,5	32,34	103%	5,13
2.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> GCG Aspek Dewan Komisaris Follow-up on the Board of Commissioners GCG Assessment Results Aspect Recommendations	%	5,00	100	0	100%	5,00

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement indicator	Satuan Unit	Bobot Weigh	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
4.	Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings and Working Visits		18,00				20,40
	1. Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Board of Commissioners Internal Meetings	Jumlah Amount	6,00	12	16	120%	7,20
	2. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Number of Board of Commissioners and Board of Directors meetings	Jumlah Amount	6,00	12	12	100%	6,00
	3. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Board of Commissioners Working Visits to Branches	Jumlah Amount	6,00	7	29	120%	7,20
5.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perseroan Board of Directors Supervision and directives on Company plans and policies	Jumlah Amount	14,00	7	55	120%	16,80
6.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Activity Effectiveness Council Support Board of Commissioner	Jumlah Amount	26,00				31,20
	1. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency Enhancement				12	120%	9,60
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners competency development	Pelaksanaan Implemented	8,00	4			
	2. Efektivitas Organ Pendukung Supporting Organs Effectiveness						
	Komite Audit Audit Committee						
	▪ Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Amount	3,00	12	19	120%	3,60
	▪ Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Reports	Laporan Report	3,00	4	25	120%	3,60
	Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko GCG & Risk Management Monitoring Committee						



No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement indicator	Satuan Unit	Bobot Weigh	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of PMR Committee Internal Meetings 	Jumlah Amount	3,00	12	15	120%	3,60
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite PMR PMR Committee Assignment Reports 	Laporan Report	3,00	4	17	120%	3,60
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee						
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Implementation of NR Committee Internal Meetings 	Jumlah Amount	3,00	12	24	120%	3,60
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite NR NR Committee Assignment Reports 	Laporan Report	3,00	4	32	120%	3,60
7.	Pengawasan dan arahan atas rencana dan pelaksanaan program TJSL Supervision and direction of the plan and implementation of CSR programs.	Jumlah Amount	2,00	2	3	120%	2,40
	Jumlah Total		100				115,39

PENCAPAIAN KPI INDIVIDU DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS INDIVIDUAL KPI ACHIEVEMENT

Nama Name	Jabatan Position	Pencapaian KPI KPI Achievement
Agus Suhartono	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/ Independent	Sangat Baik Very Good
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Sangat Baik Very Good
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Sangat Baik Very Good
Sudung Situmorang	Komisaris Independen Commissioner Independent	Sangat Baik Very Good
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Sangat Baik Very Good
Heru Sukanto	Komisaris Independen Commissioner Independent	Sangat Baik Very Good
Muchtar Luthfi Mutty	Komisaris Independen Commissioner Independent	Sangat Baik Very Good

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA DIREKSI

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA KOLEGIAL

Pengelolaan KPI Direksi secara Kolegial diawali dengan penetapan KPI Direksi secara kolegial yang mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku, aspirasi pemegang saham, RJPP dan capaian KPI Perseroan tahun sebelumnya. Hasil penetapan Direksi secara kolegial selanjutnya dituangkan dalam Kontrak Manajemen Tahunan Direksi secara Kolegial yang ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris beserta perwakilan dari Pemegang Saham.

Penilaian KPI Direksi secara Kolegial diawali dengan pemetaan sumber data dan unit pemilik data (*data producer*), untuk kemudian mengisi data realisasi KPI pada kertas kerja pengukuran KPI. Jika tidak tercapai, maka pemilik data harus menyampaikan justifikasi ketidaktercapaian KPI beserta dokumen pendukung lainnya kepada *Group* Perencanaan Strategis.

Pencapaian KPI Direksi secara Kolegial dilaporkan secara berkala yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Manajemen. Laporan Capaian KPI Direksi secara Kolegial yang menjadi kesatuan dalam Laporan Manajemen akan dievaluasi oleh Komite Audit dan kemudian disampaikan tanggapan dari Dewan Komisaris kepada Direksi atas capaian KPI tersebut. Penilaian KPI Direksi secara Kolegial dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun yang bersangkutan dengan ketentuan realisasi akhir masing-masing variabel KPI maksimal 110% (seratus sepuluh persen).

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA INDIVIDU

Penetapan KPI Direksi secara Individual dituangkan dalam Kontrak Manajemen KPI Direksi secara Individual yang ditandatangani oleh Direksi terkait, Komisaris Utama dan Direktur Utama, Penilaian KPI Direksi secara Individual diawali dengan pemetaan sumber data dan unit pemilik data (*data producer*), untuk kemudian mengisi data realisasi KPI pada kertas kerja pengukuran KPI, Jika tidak tercapai, maka pemilik data harus menyampaikan justifikasi ketidaktercapaian KPI beserta dokumen pendukung lainnya kepada *Group* Strategi Korporasi dan Inovasi.

Pencapaian KPI Direksi secara Individual beserta penjelasan capaiannya disampaikan kepada Komisaris melalui Surat Dinas, Penilaian KPI Direksi secara Individual dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan realisasi akhir masing-masing variabel KPI maksimal 110% (seratus sepuluh persen),

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

PROCEDURE FOR PERFORMANCE APPRAISAL OF BOARD OF DIRECTORS

PROCEDURE FOR COLLEGIAL PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

Collegial management of the Board of Directors' KPIs begins with a collegial determination of the Board of Directors' KPIs that refers to applicable government regulations, shareholder aspirations, RJPP and the Company's KPI achievements in the previous year. The results of collegial determination of Board of Directors are then set forth in the Annual Management Contract of Board of Directors, which is collegially signed by Board of Directors and Board of Commissioners along with representatives of the Shareholders.

The Board of Directors' KPI assessment begins with the mapping of data sources and data producer units, to then fill in the KPI Realization data on KPI measurement working paper. If not achieved, the data owner must submit justification for KPI nonachievement along with other supporting documents to the Strategic Planning Group.

The Board of Directors' collegial KPI achievement on is reported periodically and becomes an integral part of the Management Report. The Board of Directors Collegial KPI Achievement Report, which is an integral part of the Management Report, will be evaluated by Audit Committee and a response from Board of Commissioners to Board of Directors on the KPI achievement will be submitted. The assessment of the Board of Directors' KPIs Collegially is carried out with reference to the measurement results carried out by the External Auditor who audited the Company's Financial Statements for the year in question with the provision that the final Realization of each KPI variable is a maximum of 110% (one hundred and ten percent).

PROCEDURE FOR INDIVIDUAL PERFORMANCE ASSESSMENT OF DIRECTORS

The determination of Individual Directors' KPIs is set forth in the Individual Directors' KPI Management Contract signed by the relevant Directors, President Commissioner and President Director, Individual Board of Directors KPI Assessment begins with the mapping of data sources and data producer units, to then fill in KPI realization data on KPI measurement work papers, If not achieved, the data owner must submit justification for KPI non-achievement along with other supporting documents to the Corporate Strategy and Innovation Group.

The achievement of individual Directors' KPIs along with explanations of their attainment is communicated to the Board of Commissioners through official correspondence. The assessment of individual Directors' KPIs is conducted based on the measurement results carried out by the External Auditor auditing the Financial Statements of the respective Company, with the provision that the final realization of each KPI variable is a maximum of 110%.



KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi secara Kolegial

Adapun KPI Direksi secara kolegial Tahun 2023 terdiri atas berikut ini:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
 - a. Finansial
 - EBITDA
 - ROIC > WACC
 - *Interest Bearing Debt to EBITDA*
 - *Interest Bearing Debt to Invested Capital*
 - b. Operasional
 - *Container Throughput*
 - *Non Container Throughput*
 - *B/S/H Gross*
 - c. Sosial
 - Implementasi *Green Technology* di Pelabuhan
2. Inovasi Model Bisnis
 - a. Efisiensi biaya melalui Pengadaan Terpusat
 - b. *Additional Marine Service*
3. Kepemimpinan Teknologi
 - a. Standardisasi dan Digitalisasi layanan petikemas & non petikemas
 - b. Standardisasi dan Digitalisasi layanan *marine*
4. Peningkatan Investasi
 - a. Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan
 - b. Pencapaian Skor KPI PMN BMTH
 - c. Pengembangan Pelabuhan melalui Kerjasama dengan mitra strategis e.g. INA
5. Pengembangan Talenta
 - a. Rasio Perempuan dalam *nominated talent*
 - b. Rasio *top talent* muda (<=42 tahun) dalam *nominated talent*
 - c. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi)
 - d. Penyelesaian *Roadmap* Penyehatan Dana Pensiun

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi secara Individu

Pengelolaan KPI Direksi secara Individual mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku, RJPP, RKAP, KPI Direksi Kolegial dan inisiatif strategis/RKM pada direktorat tersebut, KPI Direksi Individual merupakan KPI Direktur Utama yang diturunkan kepada masing-masing anggota Direksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab anggota Direksi tersebut dalam lingkup direktorat yang dipimpinnya, KPI Direksi secara individual terdiri dari:

- KPI Bersama: merupakan variabel KPI dalam KPI Direksi Kolegial yang disepakati menjadi tanggung jawab secara kolegial/bersama, Pembobotan atas KPI Bersama yaitu sebesar 40%.
- KPI Direktorat: merupakan variabel KPI yang mencerminkan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat yang memberikan kontribusi/dukungan secara langsung kepada KPI Direksi Kolegial, Pembobotan atas KPI Direktorat yaitu sebesar 60%.

CRITERIA OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

Criteria for Collegial Performance Assessment of Board of Directors

The Board of Directors' collegial KPIs for 2023 consist of the following:

1. Economic and Social Value for Indonesia
 - a. Financial
 - EBITDA
 - ROIC > WACC
 - Interest Bearing Debt to EBITDA
 - Interest Bearing Debt to Invested Capital
 - b. Operations
 - Container Throughput
 - Non Container Throughput
 - B/S/H Gross
 - c. Social
 - Implementation of Green Technology at the Port
2. Business Model Innovation
 - a. Cost efficiency through Centralized Procurement
 - b. Additional Marine Service
3. Technology Leadership
 - a. Standardization and Digitalization of container & non container services
 - b. Standardization and Digitalization of marine services
4. Increased Investment
 - a. Port Infrastructure and Equipment Development
 - b. Achievement of PMN BMTH KPI Score
 - c. Port Development through Cooperation with strategic partners e.g. INA
5. Talent Development
 - a. Ratio of Women in nominated talent
 - b. Ratio of young top talent (<=42 years old) in nominated talent
 - c. Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio (Qualification Ratio)
 - d. Completion of Pension Fund Restructuring Roadmap

Criteria for Individual Performance Assessment of Board of Directors

The management of Individual Directors' KPIs refers to applicable government regulations, RJPP, RKAP, Collegial Directors' KPIs and strategic initiatives/RKM in the directorate. Individual Directors' KPIs is the President Director's KPI that is cascaded to each member of Board of Directors in accordance with their duties, functions and The responsibilities of Board of Directors members within the scope of the directorate they lead, the individual Directors' KPIs consists of:

- Joint KPI: is a KPI variable in the Collegial Directors' KPI which is agreed to be a collegial/joint responsibility. The weighting of Joint KPI is 40%.
- Directorate KPI: is a KPI variable that reflects the duties, functions and responsibilities of the Directorate which provides direct contribution/support to the Collegial Directors' KPI. The weighting of Directorate KPI is 60%.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegal maupun individu yaitu Dewan Komisaris dan disampaikan ke Pemegang Saham/RUPS.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pencapaian KPI Direksi secara kolegal Tahun 2023 *audited* adalah sebagai berikut:

ASSESSOR

The party that assesses the performance of Board of Directors collegially and individually is the Board of Commissioners and is submitted to the Shareholders/RUPS.

RESULTS OF BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE APPRAISAL

The 2023 audited Board of Directors' collegial KPI achievement is as follows:

KPI Unit	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Unaudited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia					44,00		45,17
Finansial Financial				18			17,7
EBITDA	Rupiah (juta) Rupiah (million)	10.299	Maximize	5	10.778	104,65%	5,23
ROIC > WACC	%	1,12	Maximize	5	1,39	110,00%	5,50
Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	4,04	Minimize	4	4,73	85,41%	3,42
Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	47,20	Minimize	4	53,22	88,69%	3,55
Operasional Operational				19			19,76
Container throughput	Juta Teus Million Teus	17,7	Maximize	6	17,66	99,77%	5,99
Non Container throughput	Juta Ton Million Ton	161,50	Maximize	6	169,85	105,17%	6,31
B/S/H (Gross)	B/S/H	39,00	Maximize	7	41,61	106,69%	7,47
Sosial Social				7			7,70
Implementasi <i>Green Technology</i> di Pelabuhan Implementation of Green Technology at the Port	%	100,00	Maximize	7	259,46	110,00%	7,70
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation				10			10,40
Efisiensi Biaya melalui pengadaan terpusat Cost Efficiency through centralized procurement	Rupiah (miliar) Rupiah (billion)	122,00	Maximize	4	170,61	110,00%	4,40
Additional Marine Service	Jumlah	4,00	Maximize	6	4,00	100,00%	6,00
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership				12			13,20
Standarisasi dan Digitalisasi layanan petikemas & non petikemas Standardization and Digitalization of container & non container services	%	100,00	Maximize	6	110,00	110,00	6,60
Standarisasi dan Digitalisasi layanan marine Standardization and Digitalization of marine services	%	100,00	Maximize	6	110,00	110,00	6,60
Peningkatan Investasi Investment Increase				16			16,60



KPI Unit	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Unaudited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Port Infrastructure and Equipment Development	%	100,00	Maximize	6	120,30	110,00%	6,60
Pencapaian Skor KPI PMN BMTH Achievement of PMN BMTH KPI Score	%	100,00	Maximize	4	101,45	101,45%	4,06
Pengembangan Pelabuhan melalui Kerjasama dengan mitra strategis e.g, INA Port Development through Cooperation with strategic partners e.g, INA	%	100,00	Maximize	6	99,00	99,00%	5,94
Pengembangan Talenta Talent Development				18			19,20
Rasio Perempuan dalam <i>nominated talent</i> Ratio of women in nominated talent	%	14,00	Maximize	3	16,67	110,00%	3,30
Rasio <i>top talent</i> muda (<=42 tahun) dalam <i>nominated talent</i> Ratio of young top talent (<=42 years old) in nominated talent	%	14,00	Maximize	3	16,67	110,00%	3,30
Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi) Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio (Qualification Ratio)	%	80,00	Maximize	6	88,00	110,00%	6,60
Penyelesaian <i>Roadmap</i> Penyehatan Dana Pensiun Completion of Pension Fund Restructuring Roadmap	%	100,00	Maximize	6	100,00	100,00%	6,00
Jumlah Total							104,57

Adapun pencapaian KPI Direksi secara individual adalah sebagai berikut.

The Board of Directors' KPI individually achievement is as follows.

Pencapaian KPI Direktur Utama

President Director's KPI achievements

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Audited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40,00			39,05
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	10,299	Maksimum Maximize	9	10,778	104,65%	9,42
ROIC > WACC	%	1,12	Maksimum Maximize	9	1,39	110,00%	9,90
<i>Interest Bearing Debt to Ebitda</i>	Kali Times	4,04	Minimum Minimize	9	4,73	85,41%	7,69
<i>Interest Bearing Debt to Invested Capital</i>	%	47,20	Minimum Minimize	9	53,22	88,69%	7,98
Pencapaian Skor KPI PMN BMTH Achievement of PMN BMTH KPI Score	%	100,00	Maksimum Maximize	4	101,45	101,45%	4,06
KPI Direktorat Directorate KPI				60,00			63,76

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Audited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Container throughput	Juta Teus Million Teus	17,7	Maksimum Maximize	4	17,66	99,77%	3,99
Non Container throughput	Ton	161,50	Maksimum Maximize	4	169,85	105,17%	4,21
B/S/H (Gross)	B/S/H	39,00	Maksimum Maximize	4	41,61	106,69%	4,27
Implementasi Green Technology di Pelabuhan Implementation of Green Technology in Ports	%	100,00	Maksimum Maximize	3	259,46	110,00%	3,30
Efisiensi biaya melalui Pengadaan Terpusat Cost efficiency through Centralized Procurement	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	122,00	Maksimum Maximize	3	170,61	110,00%	3,30
Additional Marine Service	Jumlah Amount	4,00	Maksimum Maximize	4	4,00	100,00%	4,00
Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Petikemas & Non Petikemas Standardization and Digitalization of Container & Non-Container Services	%	100,00	Maksimum Maximize	3	110,00	110,00%	3,30
Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Marine Standardization and Digitalization of Marine Services	%	100,00	Maksimum Maximize	3	110,00	110,00%	3,30
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	%	100,00	Maksimum Maximize	4	120,30	110,00%	4,40
Pengembangan Pelabuhan melalui Kerjasama dengan mitra strategis e.g INA Port Development through Collaboration with strategic partners e.g INA	%	100,00	Maksimum Maximize	4	99,00	99,00%	3,96
Rasio Perempuan dalam <i>nominated talent</i> Female ratio in nominated talent	%	14,00	Maksimum Maximize	3	16,67	110,00%	3,30
Rasio top talent muda (<=42 tahun) dalam <i>nominated talent</i> Young top talent (<=42 years) ratio in nominated talent	%	14,00	Maksimum Maximize	3	16,67	110,00%	3,30
Rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko Risk management organ qualification fulfillment ratio	%	80,00	Maksimum Maximize	3	88,00	110,00%	3,30
Penyelesaian Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Completion of the Roadmap for Restructuring Pension Funds	%	100,00	Maksimum Maximize	3	100,00	100,00%	3,00
Pencapaian KPI Program TJSL Achievement of SER Program KPIs	%	89,20	Maksimum Maximize	4	106,67	110,00%	4,40
Pencapaian Pelaksanaan Inisiatif Strategis Achievement of Implementation of Strategic Initiatives	%	90,00	Maksimum Maximize	4	96,68	105,09%	4,20



KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Audited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Tingkat <i>Compliance</i> Perseroan Company Compliance Level	%	100,00	Maksimum Maximize	4	105,84	105,84%	4,23
Total				100,00			102,81

Pencapaian KPI Wakil Direktur Utama

President Director's KPI achievements

KPI Unit	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Unaudited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40,00			39,05
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	10,299	Maksimum Maximize	9	10.778	104,65%	9,42
ROIC > WACC	%	1,12	Maksimum Maximize	9	1,39	110,00%	9,90
<i>Interest Bearing Debt</i> to EBITDA	Kali Times	4,04	Minimum Minimize	9	4,73	85,41%	7,69
<i>Interest Bearing Debt</i> to Invested Capital	%	47,20	Minimum Minimize	9	53,22	88,69%	7,98
Pencapaian Skor KPI PMN BMTH Achievement of PMN BMTH KPI Score	%	100,00	Maksimum Maximize	4	101,45	101,45%	4,06
KPI Direktorat Directorate KPI				60,00			63,17
<i>Container throughput</i>	Juta Teus Million Teus	17,7	Maksimum Maximize	4	17,66	99,77%	3,99
<i>Non Container throughput</i>	Ton	161,50	Maksimum Maximize	4	169,85	105,17%	4,21
B/S/H (Gross)	B/S/H	39,00	Maksimum Maximize	3	41,61	106,69%	3,20
Implementasi <i>Green Technology</i> di Pelabuhan Implementation of Green Technology in Ports	%	100,00	Maksimum Maximize	3	259,46	110,00%	3,30
Efisiensi biaya melalui Pengadaan Terpusat Cost efficiency through Centralized Procurement	Rupiah (Miliar) Rupiah (Bilion)	122,00	Maksimum Maximize	3	170,61	110,00%	3,30
<i>Additional Marine Service</i>	Jumlah Amount	4,00	Maksimum Maximize	3	4,00	100,00%	3,00
Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Petikemas & Non Petikemas Standardization and Digitalization of Container & Non-Container Services	%	100,00	Maksimum Maximize	3	110,00	110,00%	3,30
Standarisasi dan Digitalisasi Layanan <i>Marine</i> Standardization and Digitalization of Marine Services	%	100,00	Maksimum Maximize	3	110,00	110,00%	3,30

Pencapaian KPI Wakil Direktur Utama

President Director's KPI achievements

KPI Unit	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Unaudited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	%	100,00	Maksimum Maximize	3	120,30	110,00%	3,30
Pengembangan Pelabuhan melalui Kerjasama dengan mitra strategis e.g INA Port Development through Collaboration with strategic partners e.g INA	%	100,00	Maksimum Maximize	3	99,00	99,00%	2,97
Rasio Perempuan dalam <i>nominated talent</i> Female ratio in nominated talent	%	14,00	Maksimum Maximize	3	16,67	110,00%	3,30
Rasio top talent muda (<=42 tahun) dalam <i>nominated talent</i> Young top talent (<=42 years) ratio in nominated talent	%	14,00	Maksimum Maximize	3	16,67	110,00%	3,30
Rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko Risk management organ qualification fulfillment ratio	%	80,00	Maksimum Maximize	3	88,00	110,00%	3,30
Penyelesaian <i>Roadmap</i> Penyehatan Dana Pensiun Completion of the Roadmap for Restructuring Pension Funds	%	100,00	Maksimum Maximize	3	100,00	100,00%	3,00
Peralihan status tanah HPL dan HGB Transfer of HPL and HGB land status	%	100,00	Maksimum Maximize	4	100,00	100,00%	4,00
Implementasi Tata Kelola Aksi Korporasi Pemurnian Fokus Bisnis Pelindo Group Implementation of Governance of Corporate Action on Refining Pelindo Group's Business Focus	%	100,00	Maksimum Maximize	4	100,00	100,00%	4,00
Tingkat <i>Compliance</i> Perseroan Company Compliance Level	%	100,00	Maksimum Maximize	4	100,00	100,00%	4,00
Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Implementation Maturity Level	Skala Likert Likert Scale	3,10	Maksimum Maximize	4	3,68	110,00%	4,40
Total				100,00			102,22

Pencapaian KPI Direktur Keuangan

Finance Director's KPI Achievements

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Audited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40,00			39,05
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	10,299	Maksimum Maximize	9	10.778	104,65%	9,42



Pencapaian KPI Direktur Keuangan

Finance Director's KPI Achievements

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Audited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
ROIC > WACC	%	1,12	Maksimum Maximize	9	1,39	110,00%	9,90
<i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i>	Kali	4,04	Minimum Minimize	9	4,73	85,41%	7,69
<i>Interest Bearing Debt to Invested Capital</i>	%	47,20	Minimum Minimize	9	53,22	88,69%	7,98
Pencapaian Skor KPI PMN BMTH Achievement of PMN BMTH KPI Score	%	100,00	Maksimum Maximize	4	101,45	101,45%	4,06
KPI Direktorat Directorate KPI				60,00			62,00
Optimalisasi Kas dan Pendanaan Cash and Funding Optimization	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	503,00	Maksimum Maximize	10	732,46	110,00%	11,00
Implementasi <i>Single ERP</i> Keuangan di Pelindo Group Implementation of Single ERP Finance in Pelindo Group	%	100,00	Maksimum Maximize	10	100,00	100,00%	10,00
<i>Sentralisasi Shared Services</i> Keuangan Pelindo Group Centralization of Pelindo Group Financial Shared Services	%	100,00	Maksimum Maximize	10	140,00	110,00%	11,00
Integrasi Data Perpajakan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tax Data Integration	%	100,00	Maksimum Maximize	10	100,00	100,00%	10,00
Realisasi Program Penyusunan <i>Dashboard</i> Keuangan untuk Laporan Manajemen Realization of the Financial Dashboard for Management Reports Preparation Program	%	100,00	Maksimum Maximize	10	100,00	100,00%	10,00
Penyelesaian <i>Roadmap</i> Penyehatan Dana Pensiun Completion of the Roadmap for	%	100,00	Maksimum Maximize	10	100,00	100,00%	10,00
Total				100,00			101,05

Pencapaian KPI Direktur SDM dan Umum

HC and General Affairs Director's KPI Achievements

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Audited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40,00			39,05
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	10,299	Maksimum Maximize	9	10.778	104,65%	9,42
ROIC > WACC	%	1,12	Maksimum Maximize	9	1,39	110,00%	9,90
<i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i>	Kali Times	4,04	Minimum Minimize	9	4,73	85,41%	7,69

Pencapaian KPI Direktur SDM dan Umum

HC and General Affairs Director's KPI Achievements

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Audited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
<i>Interest Bearing Debt to Invested Capital</i>	%	47,20	Minimum Minimize	9	53,22	88,69%	7,98
Pencapaian Skor KPI PMN BMTH Achievement of PMN BMTH KPI Score	%	100,00	Maksimum Maximize	4	101,45	101,45%	4,06
KPI Direktorat Directorate KPI				60,00			63,20
Efisiensi biaya melalui Pengadaan Terpusat Cost efficiency through Centralized Procurement	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	122,00	Maksimum Maximize	8	170,61	110,00%	8,80
Rasio Perempuan dalam <i>nominated talent</i> Female ratio in nominated talent	%	14,00	Maksimum Maximize	6	16,67	110,00%	6,60
Rasio top talent muda (<=42 tahun) dalam <i>nominated talent</i> Young top talent (<=42 years) ratio in nominated talent	%	14,00	Maksimum Maximize	6	16,67	110,00%	6,60
Pencapaian KPI Program TJSL Achievement of SER Program KPIs	%	89,20	Maksimum Maximize	6	106,67	110,00%	6,60
Pengembangan Fungsi <i>Shared Services</i> (SDM) dan Pengadaan (HR) dan Procurement Functions	%	100,00	Maksimum Maximize	10	100,00	100,00%	10,00
Implementasi PKB dan PB Implementation of PKB and PB	%	100,00	Maksimum Maximize	10	100,00	100,00%	10,00
Rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko Risk management organ qualification fulfillment ratio	%	80,00	Maksimum Maximize	6	88,00	110,00%	6,60
Penyelesaian <i>Roadmap</i> Penyehatan Dana Pensiun Completion of the Roadmap for Restructuring Pension Funds	%	100,00	Maksimum Maximize	8	100,00	100,00%	8,00
Total				100,00			102,25

Pencapaian KPI Direktur Strategi

Strategy Director's KPI Achievements

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Audited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40,00			39,05
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	10,299	Maksimum Maximize	9	10.778	104,65%	9,42



Pencapaian KPI Direktur Strategi

Strategy Director's KPI Achievements

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Audited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
ROIC > WACC	%	1,12	Maksimum Maximize	9	1,39	110,00%	9,90
<i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i> Interest Bearing Debt to Invested Capital	Kali Times	4,04	Minimum Minimize	9	4,73	85,41%	7,69
<i>Interest Bearing Debt to Invested Capital</i>	%	47,20	Minimum Minimize	9	53,22	88,69%	7,98
Pencapaian Skor KPI PMN BMTH Achievement of PMN BMTH KPI Score	%	100,00	Maksimum Maximize	4	101,45	101,45%	4,06
KPI Direktorat Directorate KPI				60,00			62,04
Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Petikemas & Non Petikemas Standardization and Digitalization of Container & Non-Container Services	%	100,00	Maksimum Maximize	6	110,00	110,00%	6,60
Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Marine Standardization and Digitalization of Marine Services	%	100,00	Maksimum Maximize	6	110,00	110,00%	6,60
<i>Additional Marine Service</i>	Jumlah Amount	4,00	Maksimum Maximize	8	4,00	100,00%	8,00
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Preparation of Port Master Plan	%	100,00	Maksimum Maximize	8	98,33	98,33%	7,87
Strategi Pengembangan Bisnis Pelabuhan Port Business Development Strategy	%	100,00	Maksimum Maximize	8	103,33	103,33%	8,27
Implementasi <i>Single ERP</i> Keuangan di Pelindo Group Implementation of Single ERP Finance in Pelindo Group	%	100,00	Maksimum Maximize	6	100,00	100,00%	6,00
Pengembangan Pelabuhan melalui Kerjasama dengan mitra strategis e.g INA Port Development through Collaboration with strategic partners e.g INA	%	100,00	Maksimum Maximize	10	99,00	99,00%	9,90
Alokasi Modal Terintegrasi Integrated Capital Allocation	%	237,00	Maksimum Maximize	8	1,491,00	110,00%	8,80
Total				100,00			101,09

Pencapaian KPI Direktur Investasi

Investment Director's KPI Achievements

KPI Unit	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Unaudited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40,00			39,05

Pencapaian KPI Direktur Investasi

Investment Director's KPI Achievements

KPI Unit	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Unaudited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
EBITDA	Rupiah (Miliar)	10,299	Maksimum Maximize	9	10,778	104,65%	9,42
ROIC > WACC	%	1,12	Maksimum Maximize	9	1,39	110,00%	9,90
Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali	4,04	Minimum Minimize	9	4,73	85,41%	7,69
Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	47,20	Minimum Minimize	9	53,22	88,69%	7,98
Pencapaian Skor KPI PMN BMTH Achievement of PMN BMTH KPI Score	%	100,00	Maksimum Maximize	4	101,45	101,45%	4,06
KPI Direktorat Directorate KPI				60,00			63,14
Implementasi <i>Green Technology</i> di Pelabuhan Implementation of Green Technology in Portsx	%	100,00	Maksimum Maximize	8	259,46	110,00%	8,80
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Availability of Port Facilities	%	100,00	Maksimum Maximize	10	120,30	110,00%	11,00
<i>Availability</i> Fasilitas Pelabuhan Availability of Port Facilities	%	80,00	Maksimum Maximize	6	96,90	110,00%	6,60
<i>Availability</i> Peralatan Pelabuhan Availability of Port Equipment	%	90,00	Maksimum Maximize	6	95,81	106,46%	6,39
Optimalisasi Peralatan Pelabuhan Port Equipment Optimization	%	100,00	Maksimum Maximize	10	220,00	110,00%	11,00
Tingkat Penyelesaian Permasalahan Aset Perseroan Level of Resolution of Company Asset Problems	%	100,00	Maksimum Maximize	8	98,00	98,00%	7,84
Pencapaian Program Capex Capex Program Achievements	%	75,00	Maksimum Maximize	6	68,91	91,88%	5,51
Pemenuhan Peringkat PROPER Fulfillment of PROPER Rating	Jumlah	8,00	Maksimum Maximize	6	8,00	100,00%	6,00
Total				100,00			102,19

Pencapaian KPI Direktur Pengelola

Managing Director's KPI achievements

KPI Unit	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Unaudited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama				40,00			39,05



Pencapaian KPI Direktur Pengelola

Managing Director's KPI achievements

KPI Unit	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2023 Audited Unaudited December 31, 2023		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
EBITDA	Rupiah (Miliar)	10,299	Maksimum Maximize	9	10.778	104,65%	9,42
ROIC > WACC	%	1,12	Maksimum Maximize	9	1,39	110,00%	9,90
<i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i>	Kali	4,04	Minimum Minimize	9	4,73	85,41%	7,69
<i>Interest Bearing Debt to Invested Capital</i>	%	47,20	Minimum Minimize	9	53,22	88,69%	7,98
Pencapaian Skor KPI PMN BMTH	%	100,00	Maksimum Maximize	4	101,45	101,45%	4,06
KPI Direktorat				60,00			63,16
<i>Container throughput</i>	Juta Teus	17,7	Maksimum Maximize	10	17,66	99,77%	9,98
<i>Non Container throughput</i>	Ton	161,50	Maksimum Maximize	10	169,85	105,17%	10,52
B/S/H (Gross)	B/S/H	39,00	Maksimum Maximize	10	41,61	106,69%	10,67
Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Petikemas & Non Petikemas	%	100,00	Maksimum Maximize	10	110,00	110,00%	11,00
Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Marine	%	100,00	Maksimum Maximize	10	110,00	110,00%	11,00
Implementasi HSSE	%	100,00	Maksimum Maximize	10	100,00	100,00%	10,00
Total				100,00			102,22

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Prosedur penilaian terhadap kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara periodik. Kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. Adapun kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Pelaksanaan Rapat Internal Komite dan Laporan Penugasan Komite.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi aspek-aspek operasional dan strategis Perseroan dengan baik.

MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, dengan memberitahukan rencana pemberhentian tersebut kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemegang Saham. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagaimana anggota Dewan Komisaris BUMN;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri;
7. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
8. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau keuangan Negara; atau
9. Berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS AND BASIS OF ASSESSMENT

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by committees under the Board of Commissioners including Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, GCG and Risk Management Monitoring Committee and Integrated Governance Committee. The procedure for assessing the performance of Committees under Board of Commissioners is carried out by the Board of Commissioners periodically. The criteria for assessing the performance of Committees under Board of Commissioners is one of the Board of Commissioners' KPI as approved by the Shareholders. The performance assessment criteria includes the Implementation of Committee Internal Meetings and Committee Assignment Reports.

For 2023, the Board of Commissioners evaluates that these committees have effectively fulfilled their duties and responsibilities in overseeing the operational and strategic aspects of the Company.

BOARD OF COMMISSIONERS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

Members of Board of Commissioners can be dismissed at any time based on a GMS resolution by stating the reasons, by notifying the planned dismissal to the member of Board of Commissioners concerned, both orally and in writing by the Shareholders. The dismissal of Board of Commissioners member is carried out if based on the facts, the member concerned, among others:

1. Unable to carry out his/her duties properly;
2. Fail to comply with statutory provisions and/or provisions of the Articles of Association;
3. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
4. Performing actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as members of Board of Commissioners of SOEs;
5. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
6. Resigned;
7. Having family relations up to the third degree, both in a straight line and sideways, including relationships arising from marriages between members of Board of Directors and members of Board of Commissioners;
8. Has been designated as a suspect or defendant by the competent authority for actions detrimental to the Company and/or state finances; or
9. Based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company.



Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri;
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
3. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat kurang dari 30 (tiga puluh) hari, apabila secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan;
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak mengundurkan diri dan secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan RUPS hanya menetapkan atau meratifikasi pengunduran diri tersebut telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pelindo senantiasa menjaga keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, optimal, serta berdampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Dengan adanya keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, diharapkan Perseroan dapat memperkaya sudut pandang dalam pengambilan keputusan, baik dalam jajaran Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam kegiatan operasional dan manajemen Perseroan, termasuk dalam hal penerapan tata kelola Perseroan.

Board Manual telah mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan pengetahuan dan keahlian. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki keberagaman pengetahuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan. Perseroan belum mengembangkan kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara khusus, Keberagaman usia dan gender belum diatur karena Perseroan masih menekankan pada keberagaman keahlian tanpa memandang usia dan *gender*.

Members of Board of Commissioners have the right to resign under the following conditions:

1. Notify in writing regarding his/her intention to the Shareholders, other members of Board of Commissioners and Board of Directors no later than 30 (thirty) days prior to the date of his/her resignation. If the resignation letter states that the effective date is less than 30 (thirty) days from the receipt date of the letter, then it is deemed not to mention the effective date of resignation;
2. If until the date requested by the member of Board of Commissioners concerned or within 30 (thirty) days from the date the letter of resignation is received in the event that the effective date of resignation is not stated, then the member of Board of Commissioners resigns automatically on the date requested mentioned above or with the passing of 30 (thirty) days from the date the letter of resignation is received without requiring the GMS approval;
3. The resignation of a member of Board of Commissioners can be less than 30 (thirty) days, if the laws and regulations do not allow the person concerned to have concurrent positions;
4. In the event that a member of Board of Commissioners does not resign and the laws and regulations do not allow the person concerned to hold concurrent positions, then the member of Board of Commissioners is considered to have resigned and the GMS only determines or ratifies the resignation as effective based on laws and regulations.

POLICY OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS DIVERSITY

Pelindo always maintains diversity in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors to encourage more objective, comprehensive, optimal decision making, and have positive impacts on the supervision and management of the Company. With the diversity in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors, the Company is expected to enrich the point of view in decision making, both within Board of Commissioners and Board of Directors, so as to provide added value in the Company's operational and management activities, including in terms of implementing corporate governance.

The Board Manual stipulates that members of Board of Commissioners and Board of Directors must fulfil the knowledge and expertise requirements. This indicates that Board of Commissioners and Board of Directors must have a diversity of knowledge and expertise in accordance with the Company's operational needs. The Company has not developed a specific policy on the diversity in composition of Board of Commissioners and Board of Directors. Age and gender diversity have not been regulated because the Company still emphasises on diversity of expertise regardless of age and gender.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Diversity in Board of Directors Composition

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Working Experience	Keahlian Expertise
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	53 tahun 53 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Teknik Sipil S2 bidang Infrastructure Management S2 bidang Business Administration Bachelor in Civil Engineering Master in Infrastructure Management Master in Business Administration 	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan logistik Has work experience in port and logistics services sector	Teknis Sipil Business Administration Civil Engineering Business Administration
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	55 tahun 55 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Ilmu Hukum S2 bidang Hukum Bisnis Bachelor's in Legal Master's in Business Laws 	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan jasa kepelabuhan dan logistik Has work experience in legal, port and logistics services sector	Hukum Bisnis Law Business
Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum HC and General Affairs Director	54 tahun 54 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Teknik Pertambangan S2 bidang Innovation & Technology Management Bachelor's in Mining Engineering Master's in Innovation & Technology Management 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pertambangan dan jasa kepelabuhan dan logistik Has work experience in mining, port and logistics services sector	Teknik Pertambangan Teknologi Mining Engineering Technology
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	54 tahun 54 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Ekonomi Manajemen S2 bidang Manajemen Bachelor's in Economic Management Master's in Management 	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan logistik Has work experience in port and logistics services sector	Manajemen Management
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	46 tahun 46 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Administrasi Bisnis S2 bidang Administrasi Bisnis Bachelor's in Business Administration Master's in Business Administration 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan penerbangan Has work experience in banking and aviation	Administrasi Bisnis Business Administration
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	50 tahun 50 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> D3 bidang Teknik Sipil S1 bidang Teknik Sipil S2 bidang Manajemen S2 Program Profesi Insinyur Diploma in Civil Engineering Bachelor in Civil Engineering Master in Management Master of Professional Programmes Engineer 	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan logistik Has work experience in port and logistics services sector	Teknik Sipi Manajemen Civil Engineering Management



Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Diversity in Board of Directors Composition

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Working Experience	Keahlian Expertise
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	53 tahun 53 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Teknik Arsitektur S2 bidang <i>Business Administration</i> Bachelor in Architectural Engineering Master in Business Administration 	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhanan dan logistik Has work experience in port and logistics services sector	Teknik Arsitektur Administrasi Bisnis Architectural Engineering Business Administration

Tabel Keberagaman Dewan Komisaris
Diversity in Board of Commissioners Composition

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Working Experience	Keahlian Expertise
Agus Suhartono*	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	68 tahun 68 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> Akademi Angkatan Laut S1 bidang Ekonomi dari Naval Academy Naval Academy Bachelor in Economics from Naval Academy 	Memiliki pengalaman kerja di TNI Angkatan Laut Has work experience in the Navy	Ekonomi Manajemen Economics
Marsetio**	Plt. Komisaris Utama/ Independen Acting President/ Independent Commissioner	66 tahun 66 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Fisip/ADNE S2 bidang <i>Management</i> Bachelor of Social and Political Science/ ADNE Master in Management 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan pemerintahan Has work experience in education and government	Fisip dan Manajemen Social Sciences and Management
Sudung Situmorang***	Komisaris Independen Independent Commissioner	62 tahun 62 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S2 bidang Hukum Master in Law 	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum Has work experience in Law sector	Hukum Law
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	59 tahun 59 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Sosial Politik Administrasi Negara Bachelor in Social and Political Administration 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perdagangan Has work experience in Trade sector	Sosial Politik Administrasi Negara Social and Political Administration
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	66 tahun 66 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Hukum S2 bidang Manajemen Bachelor in Law Masters in Management 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Has work experience in banking sector	Hukum Manajemen Law Management
Muchtar Luthfi Mutty****	Komisaris Independen Independent Commissioner	66 tahun 66 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> Program Sarjana Muda APDN S1 Ilmu Pemerintahan S2 bidang Kajian Ketahanan Nasional S2 bidang Administrasi Negara APDN Baccalaureate Program Bachelor of Government Science Master of National Resilience Studies Master of State Administration 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector	Ilmu Pemerintahan Administrasi Negara Government Science Public Administration

Tabel Keberagaman Dewan Komisaris
Diversity in Board of Commissioners Composition

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Working Experience	Keahlian Expertise
Antonius Rainier H**	Komisaris Independen Independent Commissioner	64 tahun 64 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Teknik Sipil S2 bidang Teknik Manajemen Lingkungan S3 bidang <i>Build Environment</i> Bachelor in Civil Engineering Master in Environmental Management Engineering Doctorate in Build Environment 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector	Teknik Sipil Manajemen Lingkungan C i v i l Engineering and Management Environmental
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	56 tahun 56 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Teknik Sipil S2 bidang Ekonomi Transportasi Bachelor in Civil Engineering Master in Transportation Economics 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector	Teknik Sipil E k o n o m i Transportasi Civil Engineering Transportation Economics
Jodi Mahardi*****	Komisaris Commissioner	46 tahun 46 years old	Pria Male	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Manajemen S2 bidang <i>International Affairs</i> Bachelor in Management Master in International Affairs 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector	Manajemen H u b u n g a n Internasional Management International Relations

*Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama tanggal 19 Mei 2023 Kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama/Independen tanggal 3 Januari 2024.

**Berhenti menjabat tanggal 8 Februari 2023

***Diangkat menjadi Komisaris Independen tanggal 3 Januari 2024.

****Berhenti menjabat sejak tanggal 3 Januari 2024

*****Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

*Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama tanggal 19 Mei 2023 Kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama/Independen tanggal 3 Januari 2024.

**Berhenti menjabat tanggal 8 Februari 2023

***Diangkat menjadi Komisaris Independen tanggal 3 Januari 2024.

****Berhenti menjabat sejak tanggal 3 Januari 2024

*****Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Bakal calon Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan melalui Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah seorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain serta lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Penetapan Direksi dan Dewan dilakukan melalui Keputusan RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS NOMINATION AND REMUNERATION

POLICY AND PROCEDURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS NOMINATION

In the nomination process of Board of Commissioners and Board of Directors, the Company refers to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. Per-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Candidates for Board of Commissioners and Board of Directors are proposed through Board of Commissioners, assisted by Remuneration and Nomination Committee. The candidate who will be determined as a candidate for Board of Commissioners and Board of Directors is a person who has been declared to have fulfilled the formal requirements, material requirements and other requirements and passed the Fit and Proper Test (UKK). Board of Directors and Board of Commissioners are appointed through a GMS Resolution

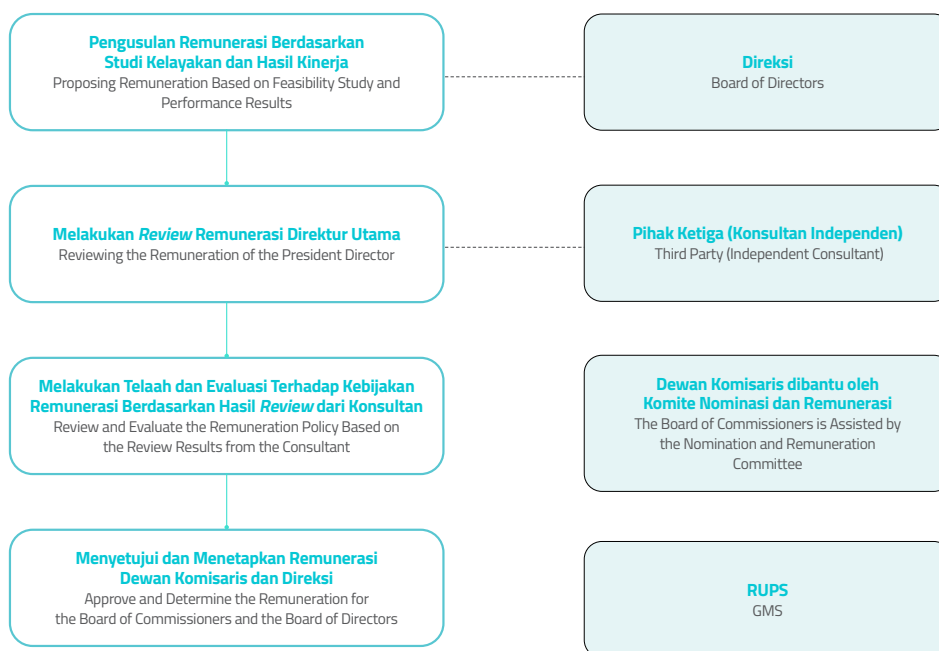


KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Dasar Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023. Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berawal dari tahap pengusulan yang diajukan oleh pihak Direksi. Direksi meminta pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan *review* remunerasi Direktur Utama. Hasil *review* dari konsultan tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan rekomendasi. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

POLICY AND PROCEDURE IN DETERMINING REMUNERATION

The basis for determining remuneration for members of Board of Commissioners and Board of Directors is the authority of Shareholders and is determined in the GMS, the formulation of which refers to Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises and Decree of the Minister of SOEs Number SK-181/MBU/07/2023 dated July 4, 2023 concerning Determination of Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises in 2023. The remuneration determination procedure for Board of Commissioners and Board of Directors starts from the proposal stage submitted by Board of Directors. Board of Directors requests a third party (consultant) to review the remuneration of President Director. The review result from the consultant is submitted to Board of Commissioners for recommendation. Board of Commissioners, assisted by Nomination and Remuneration Committee, reviews and evaluates the remuneration policy. Board of Commissioners' recommendations are then submitted to the Shareholders for approval at the GMS.



INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI

Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

INDICATORS OF REMUNERATION DETERMINATION

Income in the form of fixed Salary or Honorarium, Allowances and Facilities is determined by considering business scale factor, business complexity factor, inflation rate, conditions and financial capabilities of the Company, and other relevant factors, and must not conflict with statutory regulations.

STRUKTUR DAN JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

STRUCTURE AND AMOUNT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

The remuneration structure of Board of Commissioners and Board of Directors is as follows.

Jenis Penghasilan Income Type	Keputusan Decision	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Honorarium/Gaji Honorarium/Salary	Honorarium Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama. Honorarium of President Commissioner: 45% of President Director Members of Board of Commissioners: 90% of President Commissioner.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gaji Direktur Utama : 100% ▪ Wakil Direktur Utama: 90% dari gaji Direktur Utama. ▪ Anggota Direksi lainnya 85% dari gaji Direktur Utama. ▪ President Director Salary: 100% ▪ Vice President Director: 90% of President Director's salary ▪ Other members of Board of Directors 85% of President Director's salary.
Tunjangan Allowances		
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali honorarium 1 (one) time honorarium	1 (satu) kali gaji 1 (one) time salary
Asuransi Purna Jabatan Post-Service Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perseroan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun Premium borne by the Company is 25% of salary in 1 year	Premi yang ditanggung oleh Perseroan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun Premium borne by the Company is 25% of salary in 1 year
Tunjangan perumahan Housing Allowance	-	Rp25.000.000 per bulan Rp25,000,000 per month
Tunjangan Transportasi Transport Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of honorarium per month	-
Fasilitas Facility		
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	-	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. 1 (one) unit along with maintenance and operational costs, taking into account the Company's financial condition.
Fasilitas Kesehatan Medical Facility	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>) Health insurance or reimbursement of medical expenses (<i>at cost</i>)	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>) Health insurance or reimbursement of medical expenses (<i>at cost</i>)
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facility	Sebesar pemakaian (<i>at cost</i>) At cost	Sebesar pemakaian (<i>at cost</i>) At cost
Tantiem/Insentif Kinerja	Pemberian Tantiem/IK diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahun yang bersangkutan. The granting of Tantiem/IK is given proportionally based on performance achievements in the year concerned and considering the achievement of dividend contributions to the State or other indicators determined by the GMS/ Minister in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year concerned.	Pemberian Tantiem/IK diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahun yang bersangkutan. The granting of Tantiem/IK is given proportionally based on performance achievements in the year concerned and considering the achievement of dividend contributions to the State or other indicators determined by the GMS/Minister in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year concerned.



Nominal remunerasi masing-masing Dewan Komisaris pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

The nominal remuneration for each Board of Commissioners in 2023 is as follows.

Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Nama Name	Jabatan Position	Uraian Description	Besaran (Rp) Amount (Rp)	Ket Remarks
Agus Suhartono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Honorarium Dewan Komisaris** Board of Commissioners Honorarium**	1.301.806.452	
		Tunjangan Dewan Komisaris : Board of Commissioners Allowances:		
		Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	171.000.000	
		Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	410.400.000	
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	325.451.613	
		Tantiem Dewan Komisaris * Board of Commissioners Tantiem *	-	Periode Mulai Menjabat : 19 Mei 2023 Starting Period: May 19, 2023
Sudung Situmorang	Komisaris Independen Independent Commissioner	Honorarium Dewan Komisaris** Board of Commissioners Honorarium**	1.846.800.000	
		Tunjangan Dewan Komisaris : Board of Commissioners Allowances:		
		Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	153.900.000	
		Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	369.360.000	
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	461.700.000	
		Tantiem Dewan Komisaris * Board of Commissioners Tantiem *	3.958.303.444	
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Honorarium Dewan Komisaris** Board of Commissioners Honorarium**	1.846.800.000	
		Tunjangan Dewan Komisaris : Board of Commissioners Allowances:		
		Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	153.900.000	
		Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	369.360.000	
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	461.700.000	
		Tantiem Dewan Komisaris * Board of Commissioners Tantiem *	3.958.303.444	

Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Nama Name	Jabatan Position	Uraian Description	Besaran (Rp) Amount (Rp)	Ket Remarks
Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Honorarium Dewan Komisaris** Board of Commissioners Honorarium**	1.846.800.000	
		Tunjangan Dewan Komisaris : Board of Commissioners Allowances:		
		Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	153.900.000	
		Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	369.360.000	
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	461.700.000	
		Tantiem Dewan Komisaris * Board of Commissioners Tantiem *	1.163.140.673	Periode Mulai Menjabat : 20 September 2022 Starting Period: September 20, 2023
Muchtart Luthfi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Honorarium Dewan Komisaris** Board of Commissioners Honorarium**	1.846.800.000	
		Tunjangan Dewan Komisaris : Board of Commissioners Allowances:		
		Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	153.900.000	
		Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	369.360.000	
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	461.700.000	
		Tantiem Dewan Komisaris * Board of Commissioners Tantiem *	3.958.591.444	
Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Honorarium Dewan Komisaris** Board of Commissioners Honorarium**	1.846.800.000	
		Tunjangan Dewan Komisaris : Board of Commissioners Allowances:		
		Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	153.900.000	
		Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	369.360.000	
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	461.700.000	
		Tantiem Dewan Komisaris * Board of Commissioners Tantiem *	3.958.447.444	
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Honorarium Dewan Komisaris** Board of Commissioners Honorarium**	1.577.475.000	
		Tunjangan Dewan Komisaris : Board of Commissioners Allowances:		
		Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	153.900.000	
		Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	346.275.000	
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	394.368.750	
		Tantiem Dewan Komisaris * Board of Commissioners Tantiem *	-	Periode Mulai Menjabat : 22 Februari 2023 Starting Period: February 22, 2023

*Merupakan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Besaran Tantiem Tersebut Setelah Potongan PPh 21

**Besaran Honorarium belum dipotong PPh21

*Is tantiem for 2022 fiscal year and the amount of tantiem is after PPh 21 deduction

**The amount of Honorarium has not been deducted from PPh21



Nominal remunerasi masing-masing Direksi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

The nominal remuneration for each Director in 2023 is as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Uraian Description	Besaran (Rp) Amount (Rp)
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Gaji Direksi** Director's Salary**	4.560.000.000
		Tunjangan Direksi : Director's Allowances:	
		Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	380.000.000
		Tunjangan Perumahan Housing Benefit	330.000.000
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	1.140.000.000
		Tantiem Direksi * Director's Tantiem *	9.450.356.149
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Gaji Direksi** Director's Salary**	4.104.000.000
		Tunjangan Direksi : Director's Allowances:	
		Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	342.000.000
		Tunjangan Perumahan Housing Benefit	330.000.000
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	1.026.000.000
		Tantiem Direksi * Director's Tantiem *	8.507.020.012
Mega Satria	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management Director	Gaji Direksi** Director's Salary**	3.876.000.000
		Tunjangan Direksi : Director's Allowances:	
		Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	323.000.000
		Tunjangan Perumahan Housing Benefit	330.000.000
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	969.000.000
		Tantiem Direksi * Director's Tantiem *	8.047.299.364
Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum HC and General Affairs Director	Gaji Direksi** Director's Salary**	3.876.000.000
		Tunjangan Direksi : Director's Allowances:	
		Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	323.000.000
		Tunjangan Perumahan Housing Benefit	330.000.000
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	969.000.000
		Tantiem Direksi * Director's Tantiem *	8.047.299.364

Nama Name	Jabatan Position	Uraian Description	Besaran (Rp) Amount (Rp)
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Gaji Direksi** Director's Salary**	3.876.000.000
		Tunjangan Direksi : Director's Allowances:	
		Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	323.000.000
		Tunjangan Perumahan Housing Benefit	330.000.000
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	969.000.000
		Tantiem Direksi * Director's Tantiem *	8.047.299.364
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Gaji Direksi** Director's Salary**	3.876.000.000
		Tunjangan Direksi : Director's Allowances:	
		Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	323.000.000
		Tunjangan Perumahan Housing Benefit	330.000.000
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	969.000.000
		Tantiem Direksi * Director's Tantiem *	8.047.299.364
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Gaji Direksi** Director's Salary**	3.876.000.000
		Tunjangan Direksi : Director's Allowances:	
		Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	323.000.000
		Tunjangan Perumahan Housing Benefit	330.000.000
		Tunjangan Purna Jabatan Retirement Benefits	969.000.000
		Tantiem Direksi * Director's Tantiem *	8.047.299.364

*Merupakan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Besaran Tantiem Tersebut Setelah Potongan PPh 21

**Besaran gaji belum dipotong PPh21

*Is tantiem for 2022 fiscal year and the amount of tantiem is after PPh 21 deduction

**The amount of Honorarium has not been deducted from PPh21



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk membentuk organ-organ pendukung dalam rangka mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, khususnya di bidang kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.

Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is authorised to establish supporting organs in order to encourage the effectiveness of its supervisory and advisory functions to the Board of Directors. In carrying out its duties, Board of Commissioners is assisted by Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and GCG and Risk Management Monitoring Committee.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

Secretary of Board of Commissioners is appointed to assist the smooth running of Board of Commissioners' duties, particularly in the field of secretarial and liaison between Board of Commissioners and other parties, including the Board of Directors.

Secretary of Board of Commissioners Duties and Responsibilities

Secretary of Board of Commissioners carries out the following duties:

1. Prepare the meetings, including the Board of Commissioners' briefing sheet;
2. Prepare the minutes of Board of Commissioners meeting in accordance with the provisions;
3. Administering the Board of Commissioners' documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare the Board of Commissioners Work Plan and Budget;
5. Drafting the Board of Commissioners Reports. Carry out other duties from the Board of Commissioners.

Secretary of Board of Commissioners also carries out other duties in the form of:

1. Ensuring that Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies GCG principles;
2. Provide information needed by Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested;
3. Coordinating Committee members, if necessary in order to expedite the duties of Board of Commissioners;
4. Act as a liaison officer for Board of Commissioners with other parties.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of Board of Commissioners Profile



RIZKI KURNIANTO

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 22 Maret 1985/38 tahun	Jakarta, March 22, 1985/38 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Program Diploma III Akuntansi (2006); ▪ S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2009); ▪ S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2014). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ State College of Accountancy, Diploma in Accounting Program (2006); ▪ Bachelor in Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia (2009); ▪ Master in Management, Faculty of Economics, University of Indonesia (2014).
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Staf Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2008-2009); ▪ Staf Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) (2009-2013); ▪ Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX (2011-2016); ▪ Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016-2019); ▪ Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Staff of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2008-2009); ▪ Staff of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) (2009-2013); ▪ Secretary of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IX (2011-2016); ▪ Secretary of Board of Commissioners of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016-2019); ▪ Secretary of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 7/KEP-DK/PI/X-2021.	Board of Commissioners Decision Number 7/KEPDK/PI/X-2021.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Subkoordinator Bidang Industri Mineral dan Batubara 1B1, Kementerian BUMN (2020-sekarang).	Subcoordinator for Mineral and Coal Industry 1B1, Ministry of SOEs (2020-present).



Program Peningkatan Kompetensi Sekretariat Perusahaan

Secretary of Board of Commissioners Competency Development Program

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Type of Training and Development Materials Competency/Training	Waktu Pelaksanaan Dat	Penyelenggara Organizer
Sustainability - Remap and Reshape GRC Implementation Tahun 2023 Sustainability - Remap and Reshape GRC Implementation in 2023	15 – 23 September 2023 di 3 Kota (Negara), yaitu Budapest (Hongaria), Wina (Austria), Praha (Rep.Ceko) September 15 - 23, 2023 in 3 Cities (Countries), i.e. Budapest (Hungary), Vienna (Austria), Prague (Czech Rep.)	Executive Program: Governance Risk Compliance (GRC)

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN No PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
6. Anggaran Dasar Perseroan.

Secretary of Board of Commissioners' Duties Implementation

During 2023, Secretary of Board of Commissioners has carried out the following duties:

1. Prepare meetings, including the Board of Commissioners' briefing sheet;
2. Prepare the minutes of Board of Commissioners meetings.
3. Administering the Board of Commissioners' documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents.
4. Prepare the Board of Commissioners Work Plan and Budget.
5. Draft the Board of Commissioners Reports.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is a supporting organ under Board of Commissioners, which is formed to assist Board of Commissioners in supervising the Company's management in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Audit Committee is formed by Board of Commissioners with reference to:

1. Law No. 19 of 2003 dated October 4, 2003 concerning State Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Regulation of the Minister of SOE No PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
5. Secretary of Ministry of SOEs Decree No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
6. The Company's Articles of Association.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas-tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
4. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP.
5. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan pengendalian intern serta pelaksanaannya.
6. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
7. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
8. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbai jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut.
9. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon Kepala SPI.
10. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
 - a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
 - Nama yang diberi tugas;
 - Sifat penugasan;
 - Lingkup pekerjaan;
 - Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - Jangka waktu penugasan.
 - b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:
 - Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris jika dianggap perlu.
 - Melakukan audit investigasi dapat bekerjasama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
 - d. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee Duties and Responsibilities

The duties of Audit Committee are as follows:

1. Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist Board of Commissioners.
2. Audit Committee is independent both in carrying out its duties and in reports and being responsible to Board of Commissioners.
3. Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal control system and the effectiveness of duties of auditors of Public Accounting Firm (KAP) and Internal Audit Unit (SPI).
4. Audit Committee assesses the implementation of activities and the results of audits carried out by SPI and KAP auditors.
5. Audit Committee provides recommendations regarding the improvement of internal control and its implementation.
6. Audit Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for all information issued by the Company.
7. Audit Committee identifies matters that require Board of Commissioners' attention as well as other tasks assigned by Board of Commissioners.
8. Audit Committee proposes to Board of Commissioners a candidate for KAP to audit the Annual Financial Statements along with the reasons for nomination and proposed honorium/fee for KAP auditor.
9. Audit Committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates for Head of SPI.
10. Special Assignment from Board of Commissioners:
 - a. Special tasks assigned to Audit Committee by Board of Commissioners is carried out with a written order containing:
 - Name of assignee;
 - Nature of assignment;
 - Scope of work;
 - Goals and objectives of the work;
 - Duration of assignment.
 - b. The scope of work for special tasks of Audit Committee is fully determined by Board of Commissioners as long as does not against applicable laws and regulations.
 - c. In carrying out special tasks, Audit Committee may:
 - Reviewing all necessary records, documents and other information including the minutes of Board of Directors meeting and Board of Commissioners meeting if deemed necessary.
 - Conducting an investigative audit by cooperating with SPI or ask for assistance from experts or consultants to assist Audit Committee.
 - d. Audit Committee submits a report on the implementation of special tasks to Board of Commissioners.



Tanggungjawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
3. Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan.

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KEP-DK/PI/VII-2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pengembangan Profesional Lanjutan;
13. Penggunaan Tenaga Ahli;
14. Penilaian Kinerja;
15. Hubungan Kelembagaan;
16. Lain-Lain;
17. Penutup.

The responsibilities of Audit Committee are as follows:

1. Audit Committee is responsible to Board of Commissioners.
2. The accountability of Audit Committee to Board of Commissioners is presented in the following report:
 - a. Annual report on the implementation of Audit Committee duties;
 - b. Quarterly Report on the implementation of Audit Committee duties;
 - c. Reports for each implementation of special tasks of Audit Committee.
3. Audit Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.

Audit Committee Authorities

In carrying out its duties, Audit Committee is authorized to:

1. Examine books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other securities and examine the Company's assets;
2. Entering yards, buildings and offices used by the Company;
3. Requesting an explanation from Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company;
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be implemented by the Company.

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the latest Audit Committee Charter established by the Board of Commissioners through the Decree of Board of Commissioners No. 06/KEP-DK/PI/VII-2022 dated July 19, 2022 concerning Determination of the Charter of Audit Committee, GCG and Risk Management Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. The Charter contains provisions that must be complied with in the establishment and implementation of Audit Committee activities so that they can work independently, objectively, independently, transparently, and can be accounted for. The Charter is organized in the following sections:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duties;
4. Authority;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Report;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;
11. Member's Income;
12. Advanced Professional Development;
13. Use of Experts;
14. Performance Assessment;
15. Institutional Relationship;
16. Other;
17. Closing.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Audit Committee Tenure

The tenure for members of Audit Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Structure, Membership and Expertise of Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Heru Sukanto	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hukum, Manajemen Law, Management	SK Pengangkatan No.02/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021 Appointment Decree No.02/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Sosial Politik Administrasi Negara Socio-Political State Administration	SK Pengangkatan No.02/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021 Appointment Decree No.02/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit Accounting, Audit	SK Pengangkatan No.05/KEP-DK/PI.III/III-2021 tanggal 1 Maret 2021 Appointment Decree No.05/KEP-DK/PI.III/III-2021 dated March 1, 2021
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit Accounting, Audit	SK Pengangkatan No.04/KEP-DK/PI/X-2021 tgl 15 Oktober 2021 Appointment Decree No.04/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Audit Committee Profile

The profile of Audit Committee as of December 31, 2023 is as follow.



HERU SUKANTO

Ketua Komite Audit/Komisaris

[Chairman of Audit Committee/Commissioner](#)

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report

Periode dan Masa Jabatan: Periode dan Masa Jabatan Komite Audit sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.

Period and Term of Office: The period and term of office of Nomination and Remuneration Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.



DIDI SUMEDI

Anggota Komite Audit/Komisaris
Member of Audit Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
 Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report

Periode dan Masa Jabatan: Periode dan Masa Jabatan Komite Audit sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.

Period and Term of Office: The period and term of office of Nomination and Remuneration Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.



AHMAD ZAKIE MUBARROK

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Member of Audit Committee/Independent Party

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Bandung	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Wonosobo, 16 Februari 1985/38 tahun	Wonosobo, February 16, 1985/38 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran (2007); Magister Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik Universitas Gadjah Mada (2012). 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Economics in Accounting, Padjadjaran University (2007); Master of Accounting, Public Sector Accounting, Gadjah Mada University (2012).
Sertifikasi Certification	<ul style="list-style-type: none"> Certified in Audit Committee Practices (CACP); Certified Public Accountant (CPA). 	<ul style="list-style-type: none"> Certified in Audit Committee Practices (CACP); Certified Public Accountant (CPA).
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Dosen Tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (2012 – sekarang); Associate Partner KAP Jojo Sunarjo dan Rekan Cabang Bandung (2014 – sekarang); Komite Audit PT Perkebunan Nusantara VIII (2014 – 2017); Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara VIII (2017-2019); Komite Audit PT Pupuk Kujang (2019 – 2021); Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021 – sekarang). 	<ul style="list-style-type: none"> Permanent Lecturer in the Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Padjajaran University (2012 - present); Associate Partner of KAP Jojo Sunarjo and Partners Bandung Branch (2014 - present); Audit Committee of PT Perkebunan Nusantara VIII (2014 - 2017); Risk Management Monitoring Committee of PT Perkebunan Nusantara VIII (2017-2019); Audit Committee of PT Pupuk Kujang (2019 - 2021); Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021 - present).

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KEP-DK/PI.II/III-2021 tanggal 1 Maret 2021.	Board of Commissioners Decree No. 05/KEP-DK/PI.II/III-2021 dated March 1, 2021.
Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode Pertama : 1 Maret 2021 – 29 Februari 2024.	First Period: March 1, 2021 – February 29, 2024.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Dosen Tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (2012 – sekarang).	Permanent Lecturer in the Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Padjajaran University (2012 – present).



SOFIA CHAIRUNNISA

Anggota Komite Audit/Pihak Independen

Member of Audit Committee/Independent Party

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 5 Agustus 1986/37 tahun	Jakarta, August 5, 1986/37 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia (2009).	Bachelor of Economics in Accounting, University of Indonesia (2009).
Sertifikasi Certification	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Certified Auditor under The Audit Board of the Republic of Indonesia</i> (BPK RI); ▪ <i>Certified Professional Auditor of Indonesia</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certified Auditor under The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI); ▪ Certified Professional Auditor of Indonesia.
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Audit Manager</i> KAP Bing Santrio & Eny (Deloitte Indonesia) (2009 – 2018); ▪ <i>Financial, Accounting and Tax Manager</i> PT Steadfast Marine Tbk. (2018); ▪ <i>Business Analyst Manager</i> PT Maxima Integra Investama (2019); ▪ <i>Accounting & Tax Manager</i> PT Sumber Hidup Sehat (2019 – 2020); ▪ <i>Audit Manager</i> KAP Gani Sigiرو Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – sekarang). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit Manager of KAP Bing Santrio & Eny (Deloitte Indonesia) (2009 – 2018); ▪ Financial, Accounting and Tax Manager of PT Steadfast Marine Tbk (2018); ▪ Business Analyst Manager of PT Maxima Integra Investama (2019); ▪ Accounting & Tax Manager of PT Sumber Hidup Sehat (2019 – 2020); ▪ Audit Manager of KAP Gani Sigiرو Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 4/KEP-DK/PI/X-2-21 tanggal 15 Oktober 2021.	Board of Commissioners Decree No. 4/KEP-DK/PI/X-2-21 dated October 15, 2021.
Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode I : 15 Oktober 2021 – 31 Oktober 2024.	First Period: October 15, 2021 - October 31, 2024.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	<i>Audit Manager</i> KAP Gani Sigiرو Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – sekarang).	Audit Manager of KAP Gani Sigiرو Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – present).



Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Audit Committee Educational Qualifications and Work Experience

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit
Educational Qualifications and Work Experience of Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Heru Sukanto	Ketua Chairman	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Hukum Magister Manajemen Bachelor of Law Master of Management 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Has work experience in banking sector
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	Sarjana Sosial Politik Administrasi Negara Bachelor in Social and Political Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perdagangan Has work experience in accounting and auditing
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi Bachelor of Economics Master of Accounting 	Memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi dan <i>auditing</i> Has work experience in accounting and auditing
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Bachelor of Economics in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, akuntansi dan <i>auditing</i> Has work experience in finance, accounting and auditing

Independensi Komite Audit

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Audit Committee Independence

Audit Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations. In accordance with the Audit Committee Charter, the independence qualifications of members of Audit Committee must meet the following criteria:

Tabel Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Heru Sukanto	Didi Sumedi	Ahmad Zakie Mubarrok	Sofia Chairunnisa
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak Perseroan, maupun Perseroan, maupun Perseroan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Does not have share ownership relationship in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	√	√	√	√

Tabel Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Heru Sukanto	Didi Sumedi	Ahmad Zakie Mubarrok	Sofia Chairunnisa
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	√	√	√	√

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit Pada Tahun 2023

Audit Committee Training and/or Competency Development In 2023

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Subject of Training/ Competency Development	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Heru Sukanto	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Training and/or Competency Development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section.		
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Training and/or Competency Development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section.		
A h m a d Mubarrok	Z a k i e Anggota Member	Sertifikasi <i>Certified Information System Auditor (CISA)</i> Certified Information System Auditor (CISA) Certification	<i>Online</i> Tahun 2023	ISACA
		<i>Training on hedge Accounting under IFRS 9</i>	27-28 Juli 2023 di Sydney Australia July 27-28, 2023 at Sydney Australia	PWC
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	Ujian Sertifikasi <i>Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i> Training on hedge Accounting under IFRS 9	Jakarta, ▪ 6-8 Juni 2023 (Pelatihan) ▪ 12 Juni 2023 (Ujian)	Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI)
		<i>Training on hedge Accounting under IFRS 9</i>	Jakarta, ▪ June 6-8, 2023 (Training) ▪ June 12, 2023 (Exam)	
		<i>Masterclass Program Series XXII "Risk Capacity, The Fundamental Missing Puzzle in Risk Management Practice"</i>	31 Agustus - 1 September 2023 August 31 - September 1, 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
		Mengawal keberlanjutan Pertumbuhan Perseroan melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko Guarding the sustainability of the Company's Growth through Risk Monitoring and Control	Jakarta, 19 Oktober 2023 Jakarta, October 19, 2023	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)



Rapat Komite Audit

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Audit Committee Meeting

AUDIT COMMITTEE MEETING POLICY

Audit Committee holds meetings at least equal to the minimum Board of Commissioners meetings as stipulated in the Company's Articles of Association. Audit Committee meeting is chaired by the Chairman of Audit Committee or the most senior member of Audit Committee, if the Chairman of Audit Committee is unable to attend. If deemed necessary, Audit Committee may invite Management parties related to the meeting material to attend Audit Committee meeting. Each Audit Committee meeting is set forth in the minutes of meeting signed by all members of Audit Committee present. Audit Committee holds a coordination meeting with SPI at least once every 3 (three) months.



Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Audit Committee Meeting Agenda

Throughout 2023, the date, meeting agenda and participants of Audit Committee meetings are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	Jum'at, 24 Januari 2023 Friday, January 24, 2023	Tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2023. Response to the Proposed 2023 RKAP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
2	Jum'at, 24 Januari 2023 Friday, January 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Penggunaan PMN Triwulan IV Tahun 2022. 2. Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2022. <ol style="list-style-type: none"> 1. Report on the Realization of PMN for the Fourth Quarter of 2022 2. Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the Year 2022 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
3	Jum'at, 17 Maret 2023 Friday, March 17, 2023	Rencana Strategis Pengembangan Digitalisasi Pelabuhan. Strategic Plan for the Development of Port Digitalization	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
4	Selasa, 4 April 2023 Tuesday, April 4, 2023	Persetujuan Penambahan Ruang Lingkup Audit Laporan Keuangan Tahun 2022. Approval of the Addition of Scope of Audit for the Financial Statement of 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
5	Senin, 10 April 2023 Monday, April 10, 2023	Tindak Lanjut atas Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi. Follow-Up on Coordination Meeting between Board of Commissioners and Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
6	Kamis, 13 April 2023 Thursday, April 13, 2023	Laporan <i>Monitoring</i> atas Penyelesaian Audit Laporan Keuangan PT Pelindo (Persero) Tahun Buku 2022. Monitoring Report on the Completion of Audit on Financial Statements of PT Pelindo (Persero) for Fiscal Year 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
7	Jum'at, 5 Mei 2023 Friday, May 5, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 2. Penyampaian Kuesioner Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2022. <ol style="list-style-type: none"> 1. Response to the Management Report for the First Quarter of 2023 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 2. Submission of Public Accounting Firm (KAP) Evaluation Questionnaire for 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
8	Senin, 22 Mei 2023 Monday, May 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Penetapan dan Persetujuan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2023. 2. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun 2022 (<i>Audited</i>) PT Pelabuhan Indonesia (Persero). <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal for the Appointment and Approval of Public Accounting Firm (KAP) for 2023. 2. Board of Commissioners' Response to the (Audited) 2022 Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
9	Senin, 5 Juni 2023 Monday, June 5, 2023	Penyampaian Informasi Pelaksanaan Pekerjaan KAP Tahun 2022. Delivery of Information on the Implementation of KAP Work for 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
10	Selasa, 13 Juni 2023 Tuesday, June 13, 2023	Penunjukan Lembaga Pemeringkat Tingkat Kesehatan Perseroan. Appointment of a Company Health Rating Institution.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
11	Rabu, 21 Juni 2023 Wednesday, June 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Evaluasi Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2022. 2. Rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2023. <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation Report of Public Accounting Firm for 2022 Fiscal Year. 2. Recommendations of Public Accounting Firm (KAP) for 2023 Fiscal Year. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa



Tabel Agenda Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
12	Rabu, 12 Juli 2023 Wednesday, July 12, 2023	Permohonan Persetujuan atas Dokumen Pengajuan Nilai Buku Inbreng Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT Prima Multi Terminal dalam rangka Pengambilalihan Usaha Anak Perusahaan yang dialihkan kepada PT Pelindo Terminal Petikemas. Request for Approval of Document Submission for the Book Value of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Share Contribution to PT Prima Multi Terminal in the context of Subsidiary Business Acquisition which transferred to PT Pelindo Terminal Petikemas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
13	Selasa, 8 Agustus 2023 Tuesday, August 8, 2023	Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Response to the Management Report for the Second Quarter of 2023 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
14	Kamis, 24 Agustus 2023 Thursday, August 24, 2023	Penjelasan Keterlambatan Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Tahun Buku 2022. Explanation of Delay in Audited Financial Report for 2022 Fiscal Year.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
15	Kamis, 26 Oktober 2023 Thursday, October 26, 2023	Penetapan Imbalan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pekerjaan General Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023. Compensation Determination for the Audit Services of Public Accounting Firm (KAP) for the General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the Period of January 1, 2023, to December 31, 2023.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
16	Senin, 6 November 2023 Monday, November 6, 2023	Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Serah Terima Operasi Bisnis dan Pelayanan Petikemas di Dermaga 300, Dermaga 210U-213, dan Dermaga 303-305 Pelabuhan Tanjung Priok. Request for Approval of Collaboration Plan in the Transfer of Business Operations and Container Services at Berth 300, Berth 210U-213, and Berth 303-305 at Tanjung Priok Port.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
17	Rabu, 8 November 2023 Wednesday, November 8, 2023	Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Response to the Management Report for the Third Quarter of 2023 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
18	Kamis, 23 November 2023 Thursday, November 23, 2023	Tanggapan Tertulis Permohonan Rekomendasi Penyerahan Hak atas Tanah di Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo dalam Rangka Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN) dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Kementerian Perhubungan. Written Response to the Recommendation Request for Transfer of Land Rights at Multipurpose Terminal of Labuan Bajo Port under the State-Owned Property Utilization Cooperation (KSP-BMN) from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Ministry of Transportation.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa
19	Senin, 4 Desember 2023 Monday, December 4, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Permata Sawit Mas di Regional 4 Manokwari. 2. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Pemindahan Hak Atas Saham Milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT Pelindo Daya Sejahtera ke dalam PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Melalui Penerbitan Saham Baru/Inbreng Saham. <ol style="list-style-type: none"> 1. Request for Approval of the Cooperation Plan for the Use of HPL Port Land with PT Permata Sawit Mas in Regional 4 Manokwari. 2. Request for Written Response regarding the Transfer of Ownership Rights of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Shares in PT Pelindo Daya Sejahtera to PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia through the Issuance of New Shares/Share Contribution. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heru Sukanto ▪ Didi Sumedi ▪ Ahmad Zakie Mubarrok ▪ Sofia Chairunnisa

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEETINGS FREQUENCY AND ATTENDANCE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit
Attendance Level of Audit Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Heru Sukanto	Ketua Chairman	19	19	100%
Didi Sumedi	Wakil Ketua Vice Chairman	19	19	100%
Ahmad Zakie Mubarrak	Anggota Member	19	19	100%
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	19	19	100%

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2023

Beberapa kegiatan utama Komite Audit pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2023;
2. Analisa Laporan Realisasi Penggunaan PMN Triwulan IV Tahun 2022;
3. Analisa Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2022;
4. Rencana Strategis Pengembangan Digitalisasi Pelabuhan;
5. Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Terkait Batasan Nilai Untuk Pekerjaan yang Bersifat Substansial dan Penunjukan Langsung;
6. Persetujuan Penambahan Ruang Lingkup Audit Laporan Keuangan Tahun 2022;
7. Tindak Lanjut atas Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi;
8. Laporan *Monitoring* atas Penyelesaian Audit Laporan Keuangan PT Pelindo (Persero) Tahun Buku 2022;
9. Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
10. Penyampaian Kuesioner Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2022;
11. Usulan Penetapan dan Persetujuan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2023;
12. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Tahun 2022 (*Audited*) PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
13. Penyampaian Informasi Pelaksanaan Pekerjaan KAP Tahun 2022;
14. Penunjukan Lembaga Pemeringkat Tingkat Kesehatan Perseroan;
15. Laporan Evaluasi Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2022;
16. Rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2023;

AUDIT COMMITTEE WORK PROGRAMS AND DUTIES IMPLEMENTATION IN 2023

Audit Committee's main activities in 2023 are the followings:

1. Responses to the Proposed 2023 RKAP;
2. Analysis of the Realization Report of PMN Utilization for the Fourth Quarter of 2022;
3. Analysis of Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2022;
4. Strategic Plan for Development of Port Digitalization.
5. Request for Board of Commissioners' Approval Regarding Value Limits for Substantial Work and Direct Appointments;
6. Approval for the Addition of Audit Scope for the Financial Statements of 2022;
7. Follow-Up on the Coordination Meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors;
8. Monitoring Report on the Audit Completion of Financial Statements of PT Pelindo (Persero) for Fiscal Year 2022.
9. Response to the Management Report for the First Quarter of 2023 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
10. Submission of the Questionnaire for Evaluating the Public Accounting Firm (KAP) for 2022;
11. Proposal for the Appointment and Approval of Public Accounting Firm (KAP) for 2023;
12. Board of Commissioners' Response to the 2022 (Audited) Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
13. Delivery of Information on the Implementation of KAP Work for 2022;
14. Appointment of a Company Health Rating Agency;
15. Evaluation Report of Public Accounting Firm for 2022 Fiscal Year;
16. Recommendations of Public Accounting Firm (KAP) for 2023 Fiscal Year.



17. Permohonan Persetujuan atas Dokumen Pengajuan Nilai Buku *Inbreng* Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT Prima Multi Terminal dalam rangka Pengambilalihan Usaha Anak Perusahaan yang dialihkan kepada PT Pelindo Terminal Petikemas;
 18. Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
 19. Penjelasan Keterlambatan Laporan Keuangan (*Audited*) Tahun Buku 2022;
 20. Penetapan Imbalan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pekerjaan General Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023;
 21. Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Serah Terima Operasi Bisnis dan Pelayanan Petikemas di Dermaga 300, Dermaga 210U-213, dan Dermaga 303-305 Pelabuhan Tanjung Priok;
 22. Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
 23. Tanggapan Tertulis Permohonan Rekomendasi Penyerahan Hak atas Tanah di Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo dalam Rangka Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN) dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Kementerian Perhubungan;
 24. Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Permata Sawit Mas di Regional 4 Manokwari;
 25. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Pemindahan Hak Atas Saham Milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT Pelindo Daya Sejahtera ke dalam PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Melalui Penerbitan Saham Baru/ *Inbreng* Saham.
17. Request for Approval of Document Submission for the Book Value of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Share Contribution to PT Prima Multi Terminal in the context of Subsidiary Business Acquisition, which was transferred to PT Pelindo Terminal Petikemas.
 18. Response to the Management Report for the Second Quarter of 2023 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
 19. Explanation of Delay in Audited Financial Statements for 2022 Fiscal Year
 20. Determination of Fee for the Audit Services of Public Accounting Firm (KAP) for the General Audit of Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the Period of January 1, 2023, to December 31, 2023.
 21. Request for Approval of Collaboration Plan in the Transfer of Business Operations and Container Services at Berth 300, Berth 210U-213, and Berth 303-305 at Tanjung Priok Port.
 22. Response to the Management Report for the Third Quarter of 2023 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
 23. Written Response to the Recommendation Request for Transfer of Land Rights at Multipurpose Terminal of Labuan Bajo Port under the State-Owned Property Utilization Cooperation (KSP-BMN) from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Ministry of Transportation.
 24. Request for Approval of the Cooperation Plan for the Use of HPL Port Land with PT Permata Sawit Mas in Regional 4 Manokwari.
 25. Request for Written Response regarding the Transfer of Ownership Rights of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Shares in PT Pelindo Daya Sejahtera to PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia through the Issuance of New Shares/Share Contribution.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas kebijakan dan pelaksanaan nominasi dan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perseroan telah melaksanakan proses nominasi dan remunerasi secara baik memadai.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi

Tugas Pokok

1. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) Perseroan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*).
4. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
5. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi.
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perseroan.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

Tanggung jawab

1. Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
3. Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration Committee is a Committee formed by the Board of Commissioners with the aim of assisting the Board in carrying out its obligations to monitor, supervise and assess policies and implementation of nomination and remuneration. Nomination and Remuneration Committee was formed with the aim of providing input to the Board of Commissioners that the Company has implemented the nomination and remuneration process properly and adequately.

Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities

Main Duties

1. Conduct periodic reviews of the Company's Talent Management System as well as monitor and evaluate its implementation.
2. Evaluate the system and procedures for Talent Classification carried out by the Board of Directors.
3. Validate and calibrate the Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talent), to generate a list of Talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Minister (Nominated Talent).
4. Evaluate the prospective Company Representative which will be proposed as a member of Board of Directors or Board of Commissioners of subsidiary, before submission to the GMS/Minister.
5. Evaluate the propose individual Key Performance Indicators of Board of Directors.
6. Prepare proposals for the individual performance evaluation system of Board of Directors and/or Board of Commissioners members.
7. Prepare proposals for development programs for members of Board of Directors and/or Board of Commissioners.
8. Evaluate the remuneration policy for employees requiring approval/response from the Board of Commissioners.
9. Evaluate proposals from Board of Directors regarding the Company's organizational structure.
10. Perform other tasks as requested by the Board of Commissioners.

Responsibilities

1. Nomination and Remuneration Committee carrying out its duties and reporting independently, and directly responsible to the Board of Commissioners.
2. Nomination and Remuneration Committee works collectively in performing its duties to assist the Board of Commissioners.
3. The accountability of Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners is presented in the following report:
 - a. Annual report of Nomination and Remuneration Committee's duties implementation;
 - b. Quarterly report of Nomination and Remuneration Committee's duties implementation;



- c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang:

1. Mereview, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM), laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait.
3. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo mengacu pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KEP-DK/PI /VII-2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas Pokok;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pengembangan/Peningkatan kapasitas;
13. Penggunaan Tenaga Ahli;
14. Penilaian Kinerja;
15. Hubungan Kelembagaan;
16. Lain-lain.

MASA JABATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- c. Report of Nomination and Remuneration Committee special tasks.
4. Nomination and Remuneration Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.

Nomination and Remuneration Committee Authorities

In carrying out its duties, Nomination and Remuneration Committee is authorised to:

1. Review, examine, analyse and provide opinions and recommendations within the scope of its duties;
2. Seek and obtain relevant information (unlimited access) from the Management Information System (SIM), reports, as well as from each member of Board of Directors, employees or related individuals or sources;
3. Invite management to attend committee meetings.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, Nomination and Remuneration Committee refers to the Nomination and Remuneration Committee Charter last established through Board of Commissioners' Decision No. 06/KEP-DK/PI /VII-2022 dated July 19, 2022, regarding Establishment of Charter for Audit Committee, GCG and Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee of the State-Owned Company PT Pelabuhan Indonesia. The Charter contains provisions that must be adhered to in the formation and implementation of Nomination and Remuneration Committee activities in order to work independently, objectively, independently, transparently and accountably. The Charter is organised in the following sections:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duties;
4. Authorities;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Report;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;
11. Member's Income;
12. Development/Capacity Building;
13. Use of Experts
14. Performance Assessment;
15. Institutional Relationship
16. Other;

TENURE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tenure of nomination and remuneration committee members who are not members of Board of Commissioners is maximum is 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Structure, Membership and Expertise of Nomination and Remuneration Committee

PERIODE 1 JANUARI – 22 FEBRUARI 2023

PERIOD OF JANUARY 1 – FEBRUARY 22, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Marsetio	Ketua Chairman	Komisaris Independen (Plt. Komisaris Utama) Independent Commissioner (Acting President Commissioner)	Fisip, Manajemen Social Sciences, Management
Arif Toha Tjahjagama	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Teknik Mesin, Manajemen Mechanical Engineering, Management
Sudung Situmorang	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Hukum Law
Agus Pambagio	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Teknologi Kimia Tekstil Teknik Textile Chemical Technology Engineering
Mahbub Junaedi	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Hukum Accounting, Law

PERIODE 22 FEBRUARI – 31 DESEMBER 2023

PERIOD OF FEBRUARY 22 - DECEMBER 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Sudung Situmorang	Ketua	Komisaris Commissioner	Hukum Law
Arif Toha Tjahjagama	Wakil Ketua	Komisaris Commissioner	Teknik Mesin, Manajemen Mechanical Engineering, Management
Agus Pambagio	Anggota	Pihak Independen Independent Party	Teknologi Kimia Tekstil Teknik Textile Chemical Technology Engineering
Mahbub Junaedi	Anggota	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Hukum Accounting, Law

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Profile



SUDUNG SITUMORANG

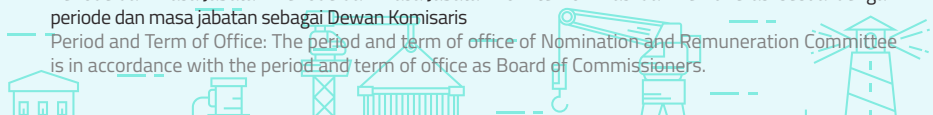
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris

Chairman of Nomination and Remuneration Committee/Commissioners

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan: Periode dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris

Period and Term of Office: The period and term of office of Nomination and Remuneration Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.





ARIF TOHA TJAHJAGAMA

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris

Member of Nomination and Remuneration Committee/Commissioners

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan: Periode dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris
Period and Term of Office: The period and term of office of Nomination and Remuneration Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.



AGUS PAMBAGIO

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Pihak Independen

Member of Nomination and Remuneration Committee/Independent Party

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Semarang, 19 Agustus 1959/64 tahun	Semarang, August 19, 1959/64 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> S1 Teknologi Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung (1984); S2 <i>Engineering Management</i> dari School of Engineering & Applied Science The George Washington University, Washington, DC, USA (1990). 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Textile Chemical Technology from Bandung Textile Technology Institute (1984); Master of Engineering Management from School of Engineering & Applied Science The George Washington University, Washington, DC, USA (1990).
Sertifikasi Certification	<ul style="list-style-type: none"> <i>Certified Professional Negotiator</i> dari Paska Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, (2008); <i>Certified Professional US Lobbyist</i>, from American Lobby League, Washington, DC (2008); <i>Certified Mastering Lobbyist</i>, from European Training Institute, Brussels, Belgium (2010); <i>Certified Public Service Policy Development</i>, SNCF France (2013). 	<ul style="list-style-type: none"> Certified Professional Negotiator dari Paska Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, (2008); Certified Professional US Lobbyist, from American Lobby League, Washington, DC (2008); Certified Mastering Lobbyist, from European Training Institute, Brussels, Belgium (2010); Certified Public Service Policy Development, SNCF France (2013).
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Tim Pakar Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (2021 – sekarang); Anggota Dewan Pengawas Penanganan Tailing PT Freeport Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019 – sekarang); Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Pelindo 3 (Persero) (2019 – 2021); Anggota Dewan Pertimbangan Proper Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019 – sekarang); Anggota Team Ahli Siber Pungli, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan RI (2017 -2018). 	<ul style="list-style-type: none"> Member of Population Administration Expert Team, Ministry of Home Affairs (2021 – present); Member of PT Freeport Indonesia's Tailings Handling Supervisory Board, Ministry of Environment and Forestry (2019 – present); Nomination and Remuneration Committee for Board of Commissioners of PT Pelindo 3 (Persero) (2019 – 2021); Member of National Proper Advisory Council, Ministry of Environment and Forestry (2019 – present); Member of Cyber Extortion Expert Team, Coordinating Ministry for Political and Security Affairs of the Republic of Indonesia (2017 – 2018).

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 6/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021.	Board of Commissioners Decree No. 6/KEP-DK/PI/X2021 dated October 15, 2021.
Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode Pertama : 15 Oktober 2021 - 31 Oktober 2024.	First Period: October 15, 2021 - October 31, 2024.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> Penasehat Senior, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Kebijakan (2015-sekarang); Anggota Dewan Pengawas Penanganan Tailing PT Freeport Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-sekarang); Anggota Dewan Pertimbangan Proper Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-sekarang). 	<ul style="list-style-type: none"> Senior Advisor, Ministry of Environment and Forestry Policy Sector (2015 – present); Member of PT Freeport Indonesia’s Tailings Handling Supervisory Board, Ministry of Environment and Forestry (2015 – present); Member of National Proper Advisory Council, Ministry of Environment and Forestry (2015 – present).



MAHBUB JUNAEDI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Pihak Independen

Member of Nomination and Remuneration Committee/Independent Commissioner

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 30 Desember 1972/51 tahun	Jakarta, December 30, 1972/51 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1998); DIV Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (2000); S1 Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011); S2 Jurusan Hukum Perdagangan Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012). 	<ul style="list-style-type: none"> S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1998); DIV Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (2000); S1 Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011); S2 Jurusan Hukum Perdagangan Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012).
Sertifikasi Certification	<ul style="list-style-type: none"> WMI (Wakil Manager Investasi); Manajemen Risiko Level 1 Sektor Perbankan; CGP (Certified Governance Professional); CRP (Certified Risk Professional). 	<ul style="list-style-type: none"> WMI (Vice Manager Representative); Level 1 Risk Management Banking Sector; CGP (Certified Governance Professional); CRP (Certified Risk Professional).
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Partner – International Trade Division JMTHouse – Konsultan Pajak dan Keuangan, (2008-2011); Partner JMTHouse – Konsultan Hukum, (2011-2014); Pengurus Management Building Adhi Graha (PPKPAG Surveyor Indonesia), (2012-2014); Anggota Tim Legal Drafting Produk Hukum Dewan Pengawas BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan (2014-2018); Komite Audit dan Sekretaris Dewan Pengawas BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), (2018-2021). 	<ul style="list-style-type: none"> Partner – International Trade Division JMTHouse – Konsultan Pajak dan Keuangan, (2008-2011); Partner JMTHouse – Konsultan Hukum, (2011-2014); Pengurus Management Building Adhi Graha (PPKPAG Surveyor Indonesia), (2012-2014); Anggota Tim Legal Drafting Produk Hukum Dewan Pengawas BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan (2014-2018); Komite Audit dan Sekretaris Dewan Pengawas BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), (2018-2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 4/KEP-DK/PI/X-2021.	Board of Commissioners Decree No. 4/KEP-DK/PI/X-2021.
Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode Pertama : 15 Oktober 2021 – 4 Mei 2024.	First Period: October 15, 2021 - May 4, 2024.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-	-



Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Educational Qualifications and Work Experience

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Educational Qualifications and Work Experience

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Sudung Situmorang	Ketua Chairman	S2 bidang Hukum Master of Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum Has work experience in government
Arif Toha Tjahjagama	Wakil Ketua Vice Chairman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1 bidang Teknik Sipil ▪ S2 bidang Transportasi Ekonomi ▪ Bachelor in Civil Engineering ▪ Master in Economic Transportation 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government
Agus Pambagio	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1 Teknologi Kimia Tekstil ▪ S2 Engineering Management ▪ Bachelor of Textile Chemical Technology ▪ Master of Engineering Management 	Memiliki pengalaman kerja di bidang lingkungan Has work experience in environment
Mahbub Junaedi	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1 Jurusan Akuntansi ▪ DIV Jurusan Akuntansi) ▪ S1 Jurusan Hukum Bisnis ▪ S2 Jurusan Hukum Perdagangan Internasional ▪ Bachelor of Accounting ▪ Diploma of Accounting ▪ Bachelor of Business Law ▪ Master of International Trade Law 	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum Has work experience in law

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Independence

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Marsetio*	Arif Toha Tjahjagama	Sudung Situmorang	Agus Pambagio	Mahbub Junaedi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak Perseroan, maupun Perseroan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Does not have share ownership relationship in the Company	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√	√

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Marsetio*	Arif Toha Tjahjagama	Sudung Situmorang	Agus Pambagio	Mahbub Junaedi
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrator of political parties, official and government	√	√	√	√	√

*Berhenti menjabat sejak 22 Februari 2023
*Has no longer served since February 22, 2023

Program Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Competency Development Program

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Subject of Training/ Competency	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Marsetio*	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Training and/or Competency Development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section.		
Sudung Situmorang**	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Training and/or Competency Development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or .		
Arif Toha Tjahjagama	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Training and/or Competency Development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section.		
Agus Pambagio	Anggota Vice Chairman	<i>Masterclass Program Series XXII "Risk Capacity, The Fundamental Missing Puzzle in Risk Management Practice"</i>	31 Agustus – 1 September 2023 August 31 - September 1, 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
Mahbub Junaedi	Anggota Member	<i>Capacity Building – IT Audit yang diselenggarakan</i>	Cirebon, 28 Agustus 2023 Cirebon, August 28, 2023	<i>Information Systems Audit and Control Association (ISACA)</i>

*Berhenti menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023 / *Has no longer served since February 22, 2023

**Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 22 Februari 2023 / **Started Serving as Chairman of Nomination and Remuneration Committee since February 22, 2023

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meeting

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING POLICY

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang paling senior, apabila Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Nominasi dan

Nomination and Remuneration Committee holds meetings at least equal to the minimum Board of Commissioners meetings as stipulated in the Company's Articles of Association. Nomination and Remuneration Committee meetings are chaired by the Chairman of Nomination and Remuneration Committee or the most senior member, if the Chairman of Nomination and Remuneration Committee is unable to attend. If deemed necessary, Nomination and Remuneration Committee may invite Management parties related to the meeting material to attend the Nomination and Remuneration Committee meeting.



Remunerasi. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural SDM sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Each meeting of Nomination and Remuneration Committee is set out in the minutes of meeting signed by all members of Nomination and Remuneration Committee present. Nomination and Remuneration Committee holds a coordination meeting with Structural HC at least once every 3 (three) months.

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Keterangan Description
1	Senin, 9 Januari 2023 Monday, January 9, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Tanggapan dan Persetujuan atas Pemetaan Struktur Organisasi Fungsi Manajemen Risiko atas Penerapan Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2022. Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Terkait Batasan Nilai Untuk Pekerjaan yang Bersifat Substansial dan Penunjukan Langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> Marsetio Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
2	Selasa, 24 Januari 2023 Tuesday, January 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Tanggapan atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direktur Utama PT ILCS (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)). Tanggapan atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Komisaris PT Prima Multi Terminal (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)). Hasil Wawancara atas Calon Wakil Perseroan yang akan ditempatkan sebagai Komisaris PT PMT dan Calon Direktur Utama PT ILCS. 	<ul style="list-style-type: none"> Marsetio Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
3	Kamis, 26 Januari 2023 Thursday, January 26, 2023	Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Semarang. Results of Board of Commissioners' field visit to Semarang Branch.	<ul style="list-style-type: none"> Marsetio Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
4	Rabu, 22 Februari 2023 Wednesday, February 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Usulan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat. Penyampaian <i>Nominated Talent</i> PT Pelabuhan Indonesia Tahun 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Marsetio Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
5	Kamis, 23 Februari 2023 Thursday, February 23, 2023	Laporan Usulan Penataan Direksi dan Dewan Komisaris pada <i>Subholding</i> . Report on the Proposed Restructuring of Board of Directors and Board of Commissioners in the Subsidiary Holding Company.	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Keterangan Description
6	Senin, 27 Februari 2023 Monday, February 27, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Hasil Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Direksi Eksisting PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Usulan Nama Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
7	Rabu, 1 Maret 2023 Wednesday, March 1, 2023	<p>Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Sibolga Regional I.</p> <p>Results of Board of Commissioners' field visit to Sibolga Branch in Regional I.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
8	Selasa, 7 Maret 2023 Tuesday, March 7, 2023	<p>Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direktur Utama PT PDS (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)).</p> <p>Written Response to the Propose Plan of Appointing Company Representative as President Director of PT PDS (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
9	Kamis, 9 Maret 2023 Thursday, March 9, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian Hasil Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Direksi Eksisting PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi PT JICT dan PT PII. 	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
10	Senin, 20 Maret 2023 Monday, March 20, 2023	<p>Laporan Usulan Penataan Dewan Komisaris PT Pelindo Solusi Logistik.</p> <p>Report on the Proposed Restructuring of Board of Commissioners of PT Pelindo Solusi Logistik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
11	Senin, 10 April 2023 Monday, April 10, 2023	<p>Penyampaian Kontrak Manajemen Direksi secara Individual Tahun 2023.</p> <p>Delivery of Individually Board of Directors' Management Contract for 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Remunerasi Remuneration
12	Rabu, 10 Mei 2023 Wednesday, May 10, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian Usulan Penetapan Perhitungan Tantiem Tahun 2022 dan Gaji/Honorarium Tahun 2023 serta <i>Long Term Incentive</i> bagi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pelindo. Penyampaian Informasi Konsultan Remunerasi Eksekutif PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Remunerasi Remuneration
13	Senin, 15 Mei 2023 Monday, May 15, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi dan Komisaris PT PDS dan PT PMLI (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)). Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination



Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Keterangan Description
14	Selasa, 16 Mei 2023 Tuesday, May 16, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian Usulan Konsultan LTI (<i>Long Term Incentive</i>) PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Penyampaian Usulan Pemberian LTI kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pelindo. 	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Remunerasi Remuneration
15	Senin, 29 Mei 2023 Monday, May 29, 2023	<p>Permohonan Persetujuan Pembentukan Organisasi Manajemen Proyek Terminal Kalibaru.</p> <p>Request for Approval for the Establishment of Project Management Organization of Terminal Kalibaru</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
16	Kamis, 6 Juli 2023 Thursday, July 6, 2023	<p>Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi PT PMLI (Anak Perusahaan PT Pelindo (Persero)).</p> <p>Request for a Written Response to the Proposal Plan for Appointing Company Representative as Director of PT PMLI (Subsidiary of PT Pelindo (Persero))</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
17	Kamis, 3 Agustus 2023 Thursday, August 3, 2023	<p>Pembahasan Pembahasan Tantiem 20% PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang tangguhkan.</p> <p>Discussion of 20% Bonus (Tantiem) Suspension PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Remunerasi Remuneration
18	Kamis, 7 September 2023 Thursday, September 7, 2023	<p>Pembahasan Tindak Lanjut Insiden <i>cyber attack</i> (<i>overview, business impact analysis, & langkah mitigasi</i>).</p> <p>Discussion on the Follow-Up of Cyber Attack Incident (<i>overview, business impact analysis, & mitigation steps</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	-
19	Rabu, 18 Oktober 2023 Wednesday, October 18, 2023	<p>Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Dewan Komisaris PT JICT (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)).</p> <p>Written Response to the Proposal Plan for Appointing Company Representative as Commissioner of PT JICT (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
20	Rabu, 8 November 2023 Wednesday, November 8, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengangkatan Dewan Komisaris PT ILCS (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)). Tanggapan atas Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Pelindo Terminal Peti Kemas, PT Pelindo Multi Terminal, dan PT Pelindo Jasa Maritim (<i>Sub Holding</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero)). 	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
21	Selasa, 12 Desember 2023 Tuesday, December 12, 2023	<p>Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Penggantian Direksi PT Ambang Barito Nusapersada (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)).</p> <p>Request for a Written Response to the Proposed Replacement of Director at PT Ambang Barito Nusapersada (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
22	Rabu, 13 Desember 2023 Wednesday, December 13, 2023	<p>Usulan Perubahan Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Terminal Petikemas (<i>Sub Holding</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero)).</p> <p>Proposal for Changes in the Board of Commissioners of PT Pelindo Terminal Petikemas (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)) Sub Holding.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Keterangan Description
23	Kamis, 14 Desember 2023 Thursday, December 14, 2023	Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengangkatan Direksi PT PMLI (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)). Request for a Written Response to the Proposal Plan of Director Appointment at PT PMLI (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)).	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Nominasi Nomination
24	Rabu, 27 Desember 2023 Wednesday, December 27, 2023	Usulan Penyesuaian Kontrak Manajemen Direksi Secara Individual Tahun 2023. Proposal for Adjustments to Directors' Individual Management Contracts for the Year 2023.	<ul style="list-style-type: none"> Sudung Situmorang Arif Toha Tjahjagama Agus Pambagio Mahbub Junaedi 	Remunerasi Remuneration

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

AUDIT COMMITTEE MEETINGS FREQUENCY AND ATTENDANCE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Marsetio*	Ketua Chairman	4	4	100%
Sudung Situmorang**	Ketua Chairman	24	24	100%
Arif Toha Tjahjagama	Wakil Ketua Vice Chairman	24	24	100%
Agus Pambagio	Anggota Member	24	24	100%
Mahbub Junaedi	Anggota Member	24	24	100%

*Berhenti menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

**Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 22 Februari 2023

*Has no longer served since February 22, 2023

**Started Serving as Chairman of Nomination and Remuneration Committee since February 22, 2023

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2023

Beberapa kegiatan utama Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- Tanggapan dan Persetujuan atas Pemetaan Struktur Organisasi Fungsi Manajemen Risiko atas Penerapan Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2022;
- Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Terkait Batasan Nilai Untuk Pekerjaan yang Bersifat Substansial dan Penunjukan Langsung;
- Tanggapan atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direktur Utama PT ILCS (Anak Perusahaan PT Pelindo (Persero));
- Tanggapan atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Komisaris PT Prima Multi Terminal (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero));

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE WORK PROGRAM AND DUTIES IMPLEMENTATION IN 2023

Nomination and Remuneration Committee's main activities in 2023 are the followings:

- Response and Approval of the Organizational Structure Mapping for Risk Management Function regarding the Implementation of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 5 of 2022;
- Request for Approval from Board of Commissioners Regarding Value Limits for Substantial Work and Direct Appointments;
- Response to the Proposal Plan for Appointing Company Representative as President Director of PT ILCS (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero));
- Response to the Proposal Plan for Appointing Company Representative as Commissioner of PT Prima Multi Terminal (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero));



5. Hasil Wawancara atas Calon Wakil Perseroan yang akan ditempatkan sebagai Komisaris PT PMT dan Calon Direktur Utama PT ILCS;
6. Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Semarang;
7. Usulan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat;
8. Penyampaian *Nominated Talent* PT Pelabuhan Indonesia Tahun 2023;
9. Laporan Usulan Penataan Direksi dan Dewan Komisaris pada Subholding;
10. Hasil Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Direksi Eksisting PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
11. Usulan Nama Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
12. Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Sibolga Regional I;
13. Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direktur Utama PT PDS (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero));
14. Penyampaian Hasil Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Direksi Eksisting PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
15. Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi PT JICT dan PT PII;
16. Laporan Usulan Penataan Dewan Komisaris PT Pelindo Solusi Logistik;
17. Penyampaian Kontrak Manajemen Direksi secara Individual Tahun 2023;
18. Penyampaian Usulan Penetapan Perhitungan Tantiem Tahun 2022 dan Gaji/Honorarium Tahun 2023 serta *Long Term Incentive* bagi Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pelindo;
19. Penyampaian Informasi Konsultan Remunerasi Eksekutif PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
20. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi dan Komisaris PT PDS dan PT PMLI (Anak Perusahaan PT Pelindo (Persero));
21. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelindo (Persero);
22. Penyampaian Usulan Konsultan LTI (*Long Term Incentive*) PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
23. Penyampaian Usulan Pemberian LTI kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pelindo;
24. Permohonan Persetujuan Pembentukan Organisasi Manajemen Proyek Terminal Kalibaru;
25. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi PT PMLI (Anak Perusahaan PT Pelindo (Persero));
26. Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Dewan Komisaris PT JICT (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero));
27. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengangkatan Dewan Komisaris PT ILCS (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero));
5. Interview Results for the Company Representative Candidate who will be placed as Commissioner of PT PMT and Candidate for President Director of PT ILCS;
6. Results of Board of Commissioners' field visit to Semarang Branch;
7. Proposal for Changes of Head Office's Organizational Structure;
8. Presentation of PT Pelabuhan Indonesia 2023 Nominated Talent;
9. Report on the Proposed Restructuring of Board of Directors and Board of Commissioners in the Subsidiary Holding Company;
10. Board of Commissioners' Evaluation Results of the Existing Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
11. Candidates members of Integrated Governance Committee (KTKT) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
12. Results of Board of Commissioners' field visit to Sibolga Branch in Regional I;
13. Written Response to the Propose Plan of Appointing Company Representative as President Director of PT PDS (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero));
14. Presentation of Board of Commissioners' Evaluation Results of the Existing Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
15. Written Response to the Proposal Plan for Appointing Company Representative as Director of PT JICT and PT PII.
16. Report on the Proposed Restructuring of Board of Commissioners of PT Pelindo Solusi Logistik;
17. Delivery of Individually Board of Directors' Management Contract for 2023;
18. Proposal Submission for Determination of Bonus Calculation of 2022 and Salary/Honorarium of 2023, as well as Long-Term Incentive for Board of Directors and Board of Commissioners of Pelindo;
19. Submission of Information on Executive Remuneration Consultant for PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
20. Request for Written Response to the Proposal Plan for Appointing Company Representative as Director and Commissioner of PT PDS and PT PMLI (Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero));
21. Request for Written Response to the Proposal Plan for Appointing Company Representative as Commissioner of Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
22. Submission of Proposal for LTI (Long Term Incentive) Consultant for PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
23. Submission of Proposal for Granting LTI to Board of Directors and Board of Commissioners of Pelindo;
24. Request for Approval for the Establishment of Project Management Organization of Terminal Kalibaru;
25. Request for a Written Response to the Proposal Plan for Appointing Company Representative as Director of PT PMLI (Subsidiary of PT Pelindo (Persero));
26. Written Response to the Proposal Plan for Appointing Company Representative as Commissioner of PT JICT (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero));
27. Request for a Written Response to the Proposal Plan for Board of Commissioners Appointment of PT ILCS (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero));

28. Tanggapan atas Pemberhentian dan Pengangkatan Anggotaanggota Direksi PT Pelindo Terminal Peti Kemas, PT Pelindo Multi Terminal, dan PT Pelindo Jasa Maritim (*Sub Holding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero));
29. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Penggantian Direksi PT Ambang Barito Nusapersada (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero));
30. Usulan Perubahan Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Terminal Petikemas (*Sub Holding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero));
31. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengangkatan Direksi PT PMLI (Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero));
32. Usulan Penyesuaian Kontrak Manajemen Direksi Secara Individual Tahun 2023.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Pada tahun 2023 telah diterbitkan Peraturan Direksi tentang Manajemen Talenta dan Suksesi. Peraturan Direksi ini mengatur tentang pengelolaan *talent* Perseroan di Kantor Pusat, Regional, maupun Grup Bisnis mulai dari proses penjangkaran, penilaian, pengembangan, perputaran, hingga hak dan kewajiban talenta Perseroan. Selain itu, Peraturan Direksi ini juga mengatur tentang mekanisme suksesi baik itu yang didapatkan dari hasil *talent pool* Perseroan, proses lelang jabatan, maupun pengisian dari sumber eksternal.

Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan penilaian atas calon Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria untuk diajukan atau diangkat menjadi Direktur dan Dewan Komisaris. Atas dasar Saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan usulan calon kepada Pemegang Saham.

KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG & PMR adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas kebijakan dan pelaksanaan Pemantau Manajemen Risiko. Komite GCG & PMR dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perseroan telah melaksanakan proses Risiko secara baik memadai.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Tugas-tugas Komite GCG & PMR adalah sebagai berikut:

1. Komite GCG & PMR membantu pengawasan Dewan Komisaris terhadap aspek sebagai berikut:
 - a. Kebijakan manajemen risiko termasuk evaluasi terhadap proses penerapan manajemen risiko Perseroan.

28. Response to the Termination and Appointment of Directors at PT Pelindo Terminal Peti Kemas, PT Pelindo Multi Terminal, and PT Pelindo Jasa Maritim (Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)) Sub Holding;
29. Request for a Written Response to the Proposed Replacement of Director at PT Ambang Barito Nusapersada (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)).
30. Proposal for Changes in the Board of Commissioners of PT Pelindo Terminal Petikemas (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)) Sub Holding.
31. Request for a Written Response to the Proposal Plan of Director Appointment at PT PMLI (Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)).
32. Proposal for Adjustments to Directors' Individual Management Contract for 2023.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

In 2023, the Board of Directors Regulation on Talent Management and Succession was issued. This BOD Regulation regulates the management of the Company's talents at the Head Office, Regions, and Business Groups starting from the process of recruitment, assessment, development, turnover, to the rights and obligations of the Company's talents. In addition, this BOD Regulation also regulates the succession mechanism whether obtained from the results of the Company's talent pool, job auction process, or filling from external sources.

The Remuneration and Nomination Committee assesses candidates for Board of Directors and Board of Commissioners who meet the criteria to be proposed or appointed as Director and Commissioner. Based on the advice from the Remuneration and Nomination Committee, the Board of Directors and Board of Commissioners then submit the proposed candidates to Shareholders.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING (RMM) COMMITTEE

GCG & RMM Committee is a Committee formed by Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the aim of assisting Board of Commissioners in carrying out their obligations to monitor, supervise and assess the policies and implementation of Risk Management. GCG & RMM Committee is formed to provide input to Board of Commissioners that the Company has carried out the Risk process properly and adequately.

GCG and Risk Management Monitoring Committee Duties and Responsibilities

The duties of GCG & RMM Committee are as follows:

1. GCG & RMM Committee assists Board of Commissioners in overseeing the following aspects:
 - a. Risk management policies, including evaluating the Company's risk management implementation process.



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan dan memantau terhadap kepatuhan Direksi dalam menjalankan Peraturan perundangan yang berlaku termasuk perjanjian dengan pihak ke tiga. c. Kebijakan dalam memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris. d. Potensi terhadap benturan kepentingan. e. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik. 2. Komite GCG & PMR bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. 3. Komite GCG & PMR bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 4. Komite GCG & PMR memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko serta pelaksanaannya. 5. Komite GCG & PMR memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan. 6. Komite GCG & PMR melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris. 7. Tugas khusus dari Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian tugas khusus kepada Komite GCG & PMR oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama yang diberi tugas; ▪ Sifat penugasan; ▪ Lingkup pekerjaan; ▪ Tujuan dan sasaran pekerjaan; ▪ Jangka waktu penugasan. b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite GCG & PMR sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite GCG & PMR dapat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan <i>review</i> terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris jika dianggap perlu. ▪ Melakukan analisis dan evaluasi, bekerjasama dengan Struktural Manajemen Risiko, dan atau Struktural unit kerja terkait atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite GCG & PMR dengan beban Perseroan. d. Komite GCG & PMR menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris. | <ul style="list-style-type: none"> b. Monitoring and ensuring Board of Directors compliance with applicable laws and regulations, including agreements with third parties. c. Approval Policies on transactions or actions within the Board of Commissioners' authority. d. Potential conflicts of interest. e. Monitoring the implementation of good corporate governance principles. 2. GCG & RMM Committee works collectively in carrying out their duties to assist Board of Commissioners. 3. GCG & RMM Committee is independent both in carrying out its duties and in reports and is responsible to Board of Commissioners. 4. GCG & RMM Committee provides recommendations regarding the improvement of Risk Management system and its implementation 5. GCG & RMM Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for all information issued by the Company. 6. GCG & RMM Committee identifies matters that require Board of Commissioners' attention as well as other tasks assigned by Board of Commissioners. 7. Special Duties from Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> a. Board of Commissioners assigns special tasks to GCG & RMM Committee with a written order containing: <ul style="list-style-type: none"> ▪ The name of assignee; ▪ The nature of assignment; ▪ Scope of work; ▪ The goals and objectives of the work; ▪ The duration of assignment b. The scope of work for special duties for GCG & RMM Committee is fully determined by Board of Commissioners as long as it does not conflict with applicable laws and regulations. c. In carrying out the special duties, GCG & RMM Committee may: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reviewing all necessary records, documents and other information including the minutes of Board of Directors meeting and Board of Commissioners meeting; if deemed necessary. ▪ Conduct analysis and evaluation, cooperate with Structural Risk Management, and/or Structural related work units or request assistance from experts or consultants to assist GCG & RMM Committee at the expense of the Company. d. GCG & RMM Committee submits a report on the implementation of special tasks to Board of Commissioners |
|---|--|

Tanggung jawab Komite GCG & PMR adalah sebagai berikut:

1. Komite GCG & PMR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite GCG & PMR bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
3. Pertanggungjawaban Komite GCG & PMR kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:

The responsibilities of GCG & RMM Committee are as follows:

1. GCG & RMM Committee is responsible the Board of Commissioners.
2. GCG & RMM Committee works collectively in carrying out their duties to assist Board of Commissioners.
3. The accountability of GCG & RMM Committee to Board of Commissioners is presented in the following report:

- a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite GCG & PMR.
 - b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite GCG & PMR.
 - c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite GCG & PMR.
4. Komite GCG & PMR bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko berwenang:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang aset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, Gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
2. Berhak mendapat dan meminta setiap hasil kajian risiko yang dilakukan baik oleh para *risk owner*, para pejabat struktural terkait, *risk champion*, Satuan Pengawasan Intern maupun Direksi Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerja sama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini para *risk owner*, pejabat struktural terkait kendali mutu dan manajemen risiko serta Satuan Pengawasan Internal Perseroan.

Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo mengacu pada Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KEP-DK/PI/VII-2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;

- a. Annual report on the implementation of GCG & RMM Committee duties.
 - b. Quarterly Report on the implementation of GCG & RMM Committee duties.
 - c. Reports for each implementation of special duties of GCG & RMM Committee.
4. GCG & RMM Committee is responsible for maintaining the confidentiality of Company documents, data and information.

GCG and Risk Management Monitoring Committee Authorities

In carrying out its duties, GCG and Risk Management Monitoring Committee is authorised to:

1. Access records or information about assets and other resources and enter the grounds, buildings, and offices used by the Company;
2. Have the right to obtain and request any results of risk assessments conducted either by risk owners, relevant structural officials, risk champions, Internal Audit Unit or Board of Directors of the Company;
3. Request explanations from Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
4. In exercising its authority, the Committee cooperates with relevant work units, in this case the risk owners, structural officials related to quality control and risk management as well as the Company's Internal Audit Unit.

GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, Pelindo's GCG and Risk Management Monitoring Committee refers to the latest Audit Committee Charter established by the Board of Commissioners through the Decree of Board of Commissioners No. 06/KEP-DK/PI/VII-2022 dated July 19, 2022 concerning Determination of the Charter of Audit Committee, GCG and Risk Management Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. The Charter contains provisions that must be adhered to in the formation and implementation of GCG and Risk Management Monitoring Committee activities in order to work independently, objectively, independently, transparently and accountably. The charter is organised in the following sections:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duties;
4. Authority;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Report;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;



11. Penghasilan Anggota;
12. Pengembangan Profesional Lanjutan;
13. Penggunaan Tenaga Ahli
14. Penilaian Kinerja;
15. Hubungan Kelembagaan;
16. Lain-lain;
17. Penutup.

11. Member's Income;
12. Advanced Professional Development;
13. Use of Experts;
14. Performance Assessment;
15. Institutional Relationship;
16. Other;
17. Closing.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Structure, Membership and Expertise of GCG and Risk Management Monitoring Committee

PERIODE 1 JANUARI – 31 JANUARI 2023

PERIOD OF JANUARY 1 – JANUARY 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Teknik Sipil, Manajemen Lingkungan Civil Engineering, Environmental Management
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara Government and State Administration
Aries Fikiran	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Keuangan Finance
Sugiyono	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Manajemen Accountancy, Management

PERIODE 31 JANUARI – 22 FEBRUARI 2023

PERIOD OF JANUARY 31 – FEBRUARY 22, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Antonius Rainier Haryanto	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Teknik Sipil, Manajemen Lingkungan Civil Engineering, Environmental Management
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara Government and State Administration
Sugiyono	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Manajemen Accountancy, Management
Tubagus Arief Fahmi	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Matematika, Manajemen Mathematics, Management

PERIODE 22 FEBRUARI – 31 OKTOBER 2023

PERIOD OF FEBRUARY 22 – OCTOBER 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Jodi Mahardi	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Manajemen Hubungan Internasional
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara Government and State Administration
Sugiyono	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Manajemen Accountancy, Management
Tubagus Arief Fahmi	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Matematika, Manajemen Mathematics, Management

PERIODE 31 OKTOBER – 31 DESEMBER 2023

PERIOD OF OCTOBER 31 – DECEMBER 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Jodi Mahardi	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Manajemen Hubungan Internasional Management International Affairs
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara Government and State Administration
Sugiyono	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Manajemen Accountancy, Management

Profil Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

GCG and Risk Management Monitoring Committee Profile

Profil Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

The profile of GCG and Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2023 is as follows.



JODI MAHARDI

Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko/Komisaris
Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of GCG and Risk Management Monitoring Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.



MUCHTAR LUTHFI MUTTY

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko/Komisaris Independen
Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee/Independent Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profile can be seen in the Profile of Board of Commissioners section in this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Period and Term of Office: The period and term of office of GCG and Risk Management Monitoring Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.



SUGIYONO

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko/Pihak Independen
Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee/Independent Party



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	29 Mei 1985/38 tahun	May 29, 1985/38 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> DIII Akuntansi Universitas Indonesia (2007); Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (2009); Magister Manajemen PPM School of Management (2022). 	<ul style="list-style-type: none"> Diploma in Accounting of University of Indonesia; Bachelor of Accounting, University of Indonesia ; Master of Management, PPM School of Management.
Sertifikasi Certification	<i>Certified Risk Governance Professional.</i>	Certified Risk Governance Professional.
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Sales Operation Audit Manager PT Astra International,Tbk (2010 –2019); Risk Management Manager PT Astra International,Tbk (Januari – Juli 2020); Risk Management Committee PT Askrindo (2020 – sekarang). 	<ul style="list-style-type: none"> Sales Operation Audit Manager of PT Astra International,Tbk (2010 –2019); Risk Management Manager of PT Astra International,Tbk (January – July 2020); Risk Management Committee of PT Askrindo (2020 – 2021).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP-DK/PI/III-2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite <i>Good Corporate Governance</i> dan Pemantau Manajemen Risiko Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.	Board of Commissioners Decree No. 04/KEP-DK/PI/III-2022 concerning Dismissal and Appointment of Members of Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.
Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode Pertama : 7 Maret 2022 – 6 Maret 2025.	First Period: March 7, 2022 - March 6, 2025.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	<i>Risk Management Committee</i> PT Askrindo (2020 - sekarang).	Risk Management Committee PT Askrindo (2020 - present).

Masa Jabatan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

GCG and Risk Management Monitoring Committee Tenure

The tenure for members of GCG and Risk Management Monitoring Committee who are not members of Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

GCG and Risk Management Monitoring Committee Educational Qualifications and Work Experience

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Table of GCG and Risk Management Monitoring Committee Educational Qualifications and Work Experience

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Jodi Mahardi	Ketua Chairman	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Manajemen S2 bidang <i>International Affairs</i> Bachelor of Management Master of International Affairs 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	<ul style="list-style-type: none"> Program Sarjana Muda APDN S1 Ilmu Pemerintahan S2 bidang Kajian Ketahanan Nasional S2 bidang Administrasi Negara APDN Bachelor Program Bachelor of Government Science Master of National Resilience Studies Master of Public Administration 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector
Sugiyono	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> DIII Akuntansi S1 Akuntansi S2 Manajemen DIII Akuntansi S1 Akuntansi S2 Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko Has work experience in risk management sector

Independensi Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

GCG and Risk Management Monitoring Committee Independence

Tabel Independensi Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Table of GCG and Risk Management Monitoring Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Antonius Rainier Haryanto*	Jodi Mahardi**	Muchtar Luthfi Mutty	Aries Fikirman***	Sugiyono	Tubagus Arief Fahmi****
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak Perseroan, maupun Perseroan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Does not have share ownership relationship in the Company	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrator of political parties, official and government	√	√	√	√	√	√

*Berhenti menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023 / *Has no longer served since February 22, 2023

**Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023 / **Started Serving since February 22, 2023

***Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Januari 2023 / ***Has no longer served since January 31, 2023

****Mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari 2023 dan mengundurkan diri pada tanggal 31 Oktober 2023 / **** Started Serving since January 31, 2023 and resigned on October 31, 2023



Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko pada Tahun 2023

GCG and Risk Management Monitoring Committee Training and/or Competency Development in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Subject of Training/ Competency	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Antonius Rainier Haryanto*	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Training and/or Competency Development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section.		
Jodi Mahardi**	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Training and/or Competency Development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section.		
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Member	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Training and/or Competency Development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section.		
Aries Fikiran***	Anggota Member	-	-	-
Sugiyono	Anggota Member	<i>Masterclass Program Series XXII "Risk Capacity, The Fundamental Missing Puzzle in Risk Management Practice".</i>	31 Agustus – 1 September 2023 August 31 - September 1, 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Executive Program: Governance Risk Compliance (GRC)
		<i>Sustainability - Remap and Reshape GRC Implementation Tahun 2023.</i> Sustainability - Remapping and Reshaping GRC Implementation in 2023.	15 – 23 September 2023 di 3 Kota (Negara), yaitu Budapest (Hongaria), Wina (Austria), Praha (Rep.Ceko) September 15 - 23, 2023 in 3 Cities (Countries), i.e. Budapest (Hungary), Vienna (Austria), Prague (Czech Rep)	<i>Executive Program: Governance Risk Compliance (GRC)</i>
		Mengawal keberlanjutan Pertumbuhan Perseroan melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko. Guarding the sustainability of the Company's Growth through Risk Monitoring and Control.	Jakarta, 19 Oktober 2023 Jakarta, October 19, 2023	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI).
Tubagus Arief Fahmi****	Anggota Member	<i>How to Develop an Effective Risk Leadership in Your Organization.</i>	Online, 30 – 31 Mei 2023 Online, May 30 - 31, 2023	<i>Certified Risk Management Professional (CRGP)</i>
		<i>Masterclass Program Series XXII "Risk Capacity, The Fundamental Missing Puzzle in Risk Management Practice".</i>	31 Agustus – 1 September 2023 August 31 - September 1, 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
		<i>Sustainability - Remap and Reshape GRC Implementation Tahun 2023</i> Sustainability - Remapping and Reshaping GRC Implementation in 2023	15 – 23 September 2023 di 3 Kota (Negara), yaitu Budapest (Hongaria), Wina (Austria), Praha (Rep.Ceko) September 15 - 23, 2023 in 3 Cities (Countries), i.e. Budapest (Hungary), Vienna (Austria), Prague (Czech Rep.)	<i>Executive Program: Governance Risk Compliance (GRC)</i>

*Berhenti menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023 / *Has no longer served since February 22, 2023

**Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023 / **Started Serving since February 22, 2023

***Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Januari 2023 / ***Has no longer served since January 31, 2023

****Mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari 2023 dan mengundurkan diri pada tanggal 31 Oktober 2023 / **** Started Serving since January 31, 2023 and resigned on October 31, 2023

Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko atau anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang paling senior, apabila Ketua GCG dan Komite Pemantau Manajemen Risiko berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Setiap rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang hadir. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural Manajemen Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat diselenggarakan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota.

AGENDA RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, sebagai berikut.

GCG and Risk Management Monitoring Committee Meetings

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETING POLICY

GCG and Risk Management Monitoring Committee conducts meetings at least equal to the minimum Board of Commissioners meetings as stipulated in the Company's Articles of Association. GCG and Risk Management Monitoring Committee meetings are chaired by the Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee or the most senior member, if the Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee is unable to attend. If deemed necessary, GCG and Risk Management Monitoring Committee may invite the Management related to the meeting material to attend GCG and Risk Management Monitoring Committee meeting. Each meeting of GCG and Risk Management Monitoring Committee is set forth in the minutes of meeting signed by all members of GCG and Risk Management Monitoring Committee present. GCG and Risk Management Monitoring Committee holds coordination meetings with Structural Risk Management at least once every 3 (three) months. A meeting can be held if attended by more than half of the members.

MEETING AGENDA GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING

Throughout 2023, the date, meeting agenda and participants of GCG and Risk Management Monitoring Committee meetings are as follows.



Tabel Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Table of GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	Selasa, 21 Februari 2023 Tuesday, February 21, 2023	Persetujuan Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL). Approval of Social & Environmental Responsibility Program (SER) Implementation Guidelines	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antonius Rainier Haryanto ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi
2	Senin, 27 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Tanggapan Tertulis Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Asahimas Chemical di Regional 2 Banten. 2. Permohonan Tanggapan Tertulis Rencana Kerjasama Pemanfaatan Bagian Tanah/Lahan dan Gudang Kalimas 95 dengan PT Industri Nabati Lestari di Reg 3 Tanjung Perak. 3. Permohonan Tanggapan Tertulis Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan dengan PT Nagamas Palmoil Lestari (PT NPO) di Regional 1 Dumai. <ol style="list-style-type: none"> 1. Request for Written Response to the Cooperation Plan of Port HPL Land Part Utilization with PT Asahimas Chemical in Regional 2 Banten. 2. Request for Written Response to the Cooperation Plan of Part of Land/Land and Warehouse Utilization of Kalimas 95 with PT Industri Nabati Lestari in Reg 3 Tanjung Perak 3. Request for Written Response to the Cooperation Plan of Land Utilization with PT Nagamas Palmoil Lestari (PT NPO) in Regional 1 Dumai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi
3	Senin, 13 Maret 2023 Monday, March 13, 2023	<i>Draft Peraturan Direksi Tentang Penerapan Manajemen Risiko.</i> Board of Directors Regulation Draft on the Risk Management Implementation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi
4	Senin, 10 April 2023 Monday, April 10, 2023	Saran dan tanggapan Hasil <i>Assessment</i> GCG PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2022. Suggestions and responses to the 2022 PT Pelindo (Persero) GCG Assessment Results.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi
5	Kamis, 27 April 2023 Thursday, April 27, 2023	Strategi Manajemen Risiko (<i>Risk Management Strategy</i>) atas Penerapan Akuntansi Lindung Nilai (<i>Hedge Accounting</i>). Risk Management Strategy on the Implementation of Hedge Accounting	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi
6	Selasa, 23 Mei 2023 Tuesday, May 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan. 2. Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Pertamina Trans Kontinental di Regional 3 Tanjung Emas. 3. Permohonan Tanggapan Tertulis Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Manunggal Perkasa di Regional 3 Tanjung Intan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Request for Approval of Cooperation Plan for HPL Part Port Land Utilization with. 2. Request for Approval of Cooperation Plan for HPL Part Port Land Utilization with PT Pertamina Trans Continental in Regional 3 Tanjung Emas. 3. Request for Written Response to the Cooperation Plan for HPL Part Port Land Utilization with PT Manunggal Perkasa in Regional 3 Tanjung Intan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi
7	Senin, 29 Mei 2023 Monday, May 29, 2023	Permohonan Persetujuan Penyesuaian Perjanjian Penggunaan Tanah Milik Pelindo sesuai Sertifikat HGB No. 694 di Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara dengan PT Menara Maritim Indonesia. Request for Approval of the Adjustment of Pelindo's Land Utilization Agreement according to HGB Certificate No. 694 on Jalan Yos Sudarso North Jakarta with PT Menara Maritim Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi
8	Jum'at, 21 Juli 2023 Friday, July 21, 2023	Pembahasan Pedoman Perangkat GCG PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Discussion on Guidelines for GCG Framework of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi

Tabel Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Table of GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
9	Rabu, 16 Agustus 2023 Wednesday, August 16, 2023	Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Pemanfaatan Aset Tanah & Bangunan dengan PT Adhya Sejahtera Boga Perkasa. Request for Approval of Cooperation Plan for Land & Building Assets Utilization with PT Adhya Sejahtera Boga Perkasa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi
10	Jumat, 18 Agustus 2023 Friday, August 18, 2023	Permohonan Tanggapan Tertulis Rencana Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Lahan dengan PT Pacific Medan Industri di Pelabuhan Belawan. Request for Written Response to Extending Plan of Land Utilization Cooperation with PT Pacific Medan Industri at Belawan Port	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi
11	Senin, 11 September 2023 Monday, September 11, 2023	Tindak lanjut Insiden <i>Cyber Attack</i> di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Follow-up on Cyber Attack Incident at PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi
12	Kamis, 12 Oktober 2023 Thursday, October 12, 2023	Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko Pelindo, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi. Risk Category and Classification Determination of Pelindo, Subsidiaries and Affiliated Companies.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono ▪ Tubagus Arief Fahmi
13	Senin, 6 November 2023 Monday, November 6, 2023	Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Serah Terima Operasi Bisnis dan Pelayanan Petikemas di Dermaga 300, Dermaga 210U-213, dan Dermaga 303-305 Pelabuhan Tanjung Priok. Request for Approval of Cooperation Plan for Handover of Business Operations and Container Services at Pier 300, Pier 210U-213, and Pier 303-305 of Tanjung Priok Port	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono
14	Senin, 27 November 2023 Monday, November 27, 2023	Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Permata Sawit Mas di Regional 4 Manokwari. Request for Approval of Cooperation Plan for HPL Port Land Utilization with PT Permata Sawit Mas in Regional 4 Manokwari.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono
15	Senin, 4 Desember 2023 Monday, December 4, 2023	Permohonan Tanggapan Tertulis atas Pemindahan Hak Atas Saham Milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT Pelindo Daya Sejahtera ke dalam PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Melalui Penerbitan Saham Baru/Inbreng Saham. Request for Written Response to the Transfer of Rights to Shares Owned by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in PT Pelindo Daya Sejahtera into PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia through the Issuance of New Shares/Inbreng Shares.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jodi Mahardi ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Sugiyono

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Table of Attendance at GCG and Risk Management Monitoring Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Antonius Rainier Haryanto*	Ketua Chairman	1	1	100%
Jodi Mahardi**	Ketua Chairman	14	14	100%
Muchtar Luthfi Mutty	Wakil Ketua Vice Chairman	15	15	100%



Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko

Table of Attendance at GCG and Risk Management Monitoring Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Aries Fikiran***	Anggota Member	-	-	-
Sugiyono	Anggota Member	15	15	100%
Tubagus Arief Fahmi****	Anggota Member	12	12	100%

*Berhenti menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023 /*Has no longer served since February 22, 2023

Mulai menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023 /Started Serving since February 22, 2023

Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Januari 2023 /Has no longer served since January 31, 2023

****Mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari 2023 dan mengundurkan diri pada tanggal 31 Oktober 2023 /**** Started Serving since January 31, 2023 and resigned on October 31, 2023

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Beberapa kegiatan utama Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL);
2. Permohonan Tanggapan Tertulis Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Asahimas Chemical di Regional 2 Banten;
3. Permohonan Tanggapan Tertulis Rencana Kerjasama Pemanfaatan Bagian Tanah/Lahan dan Gudang Kalimas 95 dengan PT Industri Nabati Lestari di Reg 3 Tanjung Perak;
4. Permohonan Tanggapan Tertulis Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan dengan PT Nagamas Palmoil Lestari (PT NPO) di Regional 1 Dumai;
5. *Draft* Peraturan Direksi Tentang Penerapan Manajemen Risiko;
6. Saran dan tanggapan Hasil *Assessment* GCG PT Pelindo (Persero) Tahun 2022;
7. Strategi Manajemen Risiko (*Risk Management Strategy*) atas Penerapan Akuntansi Lindung Nilai (*Hedge Accounting*);
8. Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Pertamina Lubricants di Regional 2 Tanjung Priok;
9. Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Pertamina Trans Kontinental di Regional 3 Tanjung Emas;
10. Permohonan Tanggapan Tertulis Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Manunggal Perkasa di Regional 3 Tanjung Intan;
11. Permohonan Persetujuan Penyesuaian Perjanjian Penggunaan Tanah Milik Pelindo sesuai Sertifikat HGB No. 694 di Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara dengan PT Menara Maritim Indonesia;
12. Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Pemanfaatan Aset Tanah & Bangunan dengan PT Adhya Sejahtera Boga Perkasa;

WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF DUTIES GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE DUTIES IN 2023

GCG and Risk Management Monitoring Committee's main activities in 2023 are the followings:

1. Approval of Social & Environmental Responsibility Program (SER) Implementation Guidelines;
2. Request for Written Response to the Cooperation Plan of Port HPL Land Part Utilization with PT Asahimas Chemical in Regional 2 Banten;
3. Request for Written Response to the Cooperation Plan of Part of Land/Land and Warehouse Utilization of Kalimas 95 with PT Industri Nabati Lestari in Reg 3 Tanjung Perak;
4. Request for Written Response to the Cooperation Plan of Land Utilization with PT Nagamas Palmoil Lestari (PT NPO) in Regional 1 Dumai;
5. Board of Directors Regulation Draft on the Risk Management Implementation;
6. Suggestions and responses to the 2022 PT Pelindo (Persero) GCG Assessment Results;
7. Risk Management Strategy on the Implementation of Hedge Accounting;
8. Request for Approval of Cooperation Plan for HPL Part Port Land Utilization with PT Pertamina Lubricants in Regional 2 Tanjung Priok;
9. Request for Approval of Cooperation Plan for HPL Part Port Land Utilization with PT Pertamina Trans Continental in Regional 3 Tanjung Emas;
10. Request for Written Response to the Cooperation Plan for HPL Part Port Land Utilization with PT Manunggal Perkasa in Regional 3 Tanjung Intan;
11. Request for Approval of the Adjustment of Pelindo's Land Utilization Agreement according to HGB Certificate No. 694 on Jalan Yos Sudarso North Jakarta with PT Menara Maritim Indonesia;
12. Request for Approval of Cooperation Plan for Land & Building Assets Utilization with PT Adhya Sejahtera Boga Perkasa;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 13. Permohonan Tanggapan Tertulis Rencana Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Lahan dengan PT Pacific Medan Industri di Pelabuhan Belawan; 14. Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko Pelindo, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi; 15. Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Serah Terima Operasi Bisnis dan Pelayanan Petikemas di Dermaga 300, Dermaga 210U-213, dan Dermaga 303-305 Pelabuhan Tanjung Priok; 16. Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Permata Sawit Mas di Regional 4 Manokwari; 17. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Pemindahan Hak Atas Saham Milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT Pelindo Daya Sejahtera ke dalam PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Melalui Penerbitan Saham Baru/ Inbreng Saham. | <ol style="list-style-type: none"> 13. Request for Written Response to Extending Plan of Land Utilization Cooperation with PT Pacific Medan Industri at Belawan Port 14. Risk Category and Classification Determination of Pelindo, Subsidiaries and Affiliated Companies 15. Request for Approval of Cooperation Plan for Handover of Business Operations and Container Services at Pier 300, Pier 210U-213, and Pier 303-305 of Tanjung Priok Port 16. Request for Approval of Cooperation Plan for HPL Port Land Utilization with PT Permata Sawit Mas in Regional 4 Manokwari 17. Request for Written Response to the Transfer of Rights to Shares Owned by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in PT Pelindo Daya Sejahtera into PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia through the Issuance of New Shares/ Inbreng Shares |
|---|---|

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi membantu pengawasan Dewan Komisaris Induk Perusahaan dengan wewenang, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi BUMN Induk atau Anak Perusahaan BUMN;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Induk Perusahaan untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
5. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri;
7. Mengakses catatan atau informasi tentang asset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
8. Meminta penjelasan dari organ pengelola risiko dan/ atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
9. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Integrated Governance Committee assists Holding Company's Board of Commissioners in overseeing with authority, tasks, and functions as follows:

1. Conducting evaluations of Integrated Governance policies;
2. Monitoring and evaluating the compliance of Integrated Governance policies of SOE's Holding Company or Subsidiaries;
3. Evaluating the Integrated Governance implementation, at least through assessing the adequacy of internal controls and integrated compliance functions;
4. Providing recommendations to the Holding Company's Board of Commissioners for the enhancement of Integrated Governance policies;
5. Communicating with work units such as Internal Audit, Legal and Compliance, Finance and Risk Management, Human Resources, and operational business aspects as necessary, to obtain information, clarifications, and request integrated reports;
6. Monitoring and evaluating the implementation of other Integrated Governance functions in accordance with legal regulations, articles of association, and/or resolutions of GMS/Minister;
7. Accessing records or information about assets and other resources and entering premises, buildings, and offices used by the Company;
8. Requesting explanations from risk management organs and/or other officials regarding any matters related to Company's management;
9. Carrying out other authorities, tasks, and responsibilities related to its functions.



PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI/VII-2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Tata Kelola Kelola Terintegrasi (KTKT) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Adapun isi Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yaitu:

1. Landasan Hukum;
2. Pengertian;
3. Komposisi dan Struktur;
4. Wewenang, Tugas dan Fungsi;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Rapat;
7. Akses Kerahasiaan Informasi;
8. Laporan;
9. Penghasilan Anggota;
10. Program Pelatihan Berkelanjutan;
11. Penggunaan Tenaga Ahli;
12. Penilaian Kinerja;
13. Hubungan Kelembagaan;
14. Lain-lain;
15. Penutup.

MASA JABATAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise
Agus Suhartono	Ketua Chairman	Komisaris Utama <i>Holding</i> Holding's President Commissioner	Ekonomi Manajemen Economics Management
Sudung Situmorang	Anggota Member	Komisaris <i>Holding</i> Holding's Commissioner	Hukum Law
Heru Sukanto	Anggota Member	Komisaris <i>Holding</i> Holding's Commissioner	Hukum, Manajemen Law, Management
Muchtar Luthfi Mutty	Anggota Member	Komisaris <i>Holding</i> Holding's Commissioner	Ilmu Pemerintahan Administrasi Negara Government Science Public Administration
Moermahadi Soerja Djanegara	Anggota Member	Komisaris Utama PT PTP PT PTP's President Commissioner	Akuntansi Accounting
Darwanto	Anggota Member	Komisaris Utama PT PMT President Commissioner PT PMT	Administrasi Publik Public Administration
Otto Ardianto	Anggota Member	Komisaris Utama PT PJM President Commissioner PT PJM	Teknik Industri, Administrasi Bisnis Industrial Engineering, Business Administration
Fachry Ali	Anggota Member	Komisaris Utama PT PSL President Commissioner PT PSL	Sejarah History

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, the Integrated Governance Committee refers to its Charter that has been established based on Board of Commissioners' Decree No.09/KEP-DK/PI/VII-2023 dated July 3, 2023, regarding the Establishment of the Integrated Governance Committee Charter of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Company. The Integrated Governance Committee Charter's contents are as followings:

1. Legal Basis;
2. Definition
3. Composition and Structure
4. Authority, Duties and Functions
5. Membership Requirements;
6. Meetings;
7. Access to Confidential Information;
8. Reports
9. Member's Income;
10. Continuous Training Program;
11. Use of Experts;
12. Performance Assessment;
13. Institutional Relationship;
14. Other;
15. Closing.

TENURE OF INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The tenure of Integrated Governance Committee members shall not be longer than the tenure of Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected only for the next 1 (one) period.

STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE OF INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Integrated Governance Committee Profile

Profile of Integrated Governance Committee as of December 31, 2023 is as follows.



AGUS SUHARTONO

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama

Chairman of Integrated Governance Committee / President Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profiles can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.

Period and Term of Office: The period and term of office of Integrated Governance Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.



SUDUNG SITUMORANG

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris

Member of Integrated Governance Committee / Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profiles can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.

Period and Term of Office: The period and term of office of Integrated Governance Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.



HERU SUKANTO

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris

Member of Integrated Governance Committee / Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profiles can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.

Period and Term of Office: The period and term of office of Integrated Governance Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.



MUCHTAR LUTHFI MUTTY

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris

Member of Integrated Governance Committee / Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Profiles can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan : Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.

Period and Term of Office: The period and term of office of Integrated Governance Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.



MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Member of Integrated Governance

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Bandung, 31 Mei 1955/Usia 68 tahun	Bandung, May 31, 1955/68 years
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung (1981), Akuntan Register Negara S2 STIE IPWI S3 Bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung (2005) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Degree in Accounting, Faculty of Economics, Padjadjaran University, Bandung (1981), State Register Accountant Master Degree from STIE IPWI Doctoral Degree in Accounting Economics, Padjadjaran University, Bandung (2005)
Sertifikasi Certification	<ul style="list-style-type: none"> Asean Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) Certified State Finance Auditor (CSFA) Register Akuntan Neagara Charter Accountant (CA) Certified Public Accountant of Indonesia (CPA) 	<ul style="list-style-type: none"> Asean Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) Certified State Finance Auditor (CSFA) Register Akuntan Neagara Charter Accountant (CA) Certified Public Accountant of Indonesia (CPA)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Ketua BPK RI (2017-2019) Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021) Komisaris Independen PT Bayan Resources Tbk (2021-sekarang) Komisaris Utama PT Terminal Petikemas Indonesia (2021-sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> Chairman of BPK RI (2017-2019) President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021) Independent Commissioner of PT Bayan Resources Tbk (2021-present) President Commissioner of PT Terminal Petikemas Indonesia (2021-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Terminal Petikemas Indonesia Nomor: KP.03/1/10/2/MTAK/UTMA/PLND-21	Circular Resolution of Shareholders in ieu of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Terminal Petikemas Indonesia No: KP.03/1/10/2/MTAK/UTMA/PLND-21

Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode I : 2021 - sekarang	1 st Period: 2021 – present
Jabatan Rangkap Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen PT Bayan Resources Tbk (2021-sekarang) Komisaris Utama PT Terminal Petikemas Indonesia (2021-sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> Independent Commissioner of PT Bayan Resources Tbk (2021-present) President Commissioner of PT Terminal Petikemas Indonesia (2021-present)



DARWANTO

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of Integrated Governance Committee

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Rangkasbitung, 13 September 1961/Usia 62 tahun	Rangkasbitung, September 13, 1961/62 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Magister Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> Master of Public Administration, Hang Tuah University Surabaya
Sertifikasi Certification	<i>Certified Risk Governance Professional</i>	Certified Risk Governance Professional
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Panglima Armada Kawasan Timur (2015-2018) Staf Khusus Kasal (2018 – 2020) Kepala Bidang Perencanaan KKIP (2020) Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021) Komisaris Utama PT Pelindo Multi Terminal (2021 – sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> Eastern Regional Fleet Commander (2015-2018) Special Kasal Staff (2018 – 2020) Head of KKIP Planning Division (2020) Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021) President Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal (2021 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Terminal Petikemas Indonesia Nomor: KP.03/1/10/2/MTAK/UTMA/PLND-21	Circular Shareholder Resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Terminal Petikemas Indonesia No: KP.03/1/10/2/MTAK/UTMA/PLND-21
Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode I : 2021 - sekarang	1 st Period: 2021 – present
Jabatan Rangkap Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Pelindo Multi Terminal (2021 – sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> President Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal (2021 – present)



OTTO ARDIANTO

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
 Member of Integrated Governance Committee



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 08 Oktober 1974/Usia 49 tahun per Desember 2023	Jakarta, October 08, 1974/49 years old as of December 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarjana Teknik Industri Universitas Indonesia (1997) ▪ Magister Administrasi Bisnis University of Toronto (2006) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bachelor of Industrial Engineering, University of Indonesia (1997) ▪ Master of Business Administration University of Toronto (2006)
Sertifikasi Certification	<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>President Director of Mulia Multi Mandiri and Financial Director of PT Bintang Sidoraya (2007-2012)</i> ▪ <i>Commercial VP and Head of Government Relation (2013-2017)</i> ▪ <i>Staf Khusus Menteri Bidang Keuangan dan Investasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2017 – sekarang)</i> ▪ <i>Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen PT Pelindo Solusi Logistik (2021 – sekarang)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>President Director of Mulia Multi Mandiri and Financial Director of PT Bintang Sidoraya (2007-2012)</i> ▪ <i>Commercial VP and Head of Government Relations (2013-2017)</i> ▪ <i>Special Staff to the Minister for Finance and Investment, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (2017 – present)</i> ▪ <i>President Commissioner concurrently Independent Commissioner of PT Pelindo Solusi Logistik (2021 – present)</i>
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Nomor KP.03/24/215/RKTK/UTMA/PLND-23 dan Nomor SK.03/24/2/5/HKP/DRU/PSD-23 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim	Circular Resolution of Shareholders in lieu of GMS between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi No. KP.03/24/215/RKTK/UTMA/PLND-23 and Number SK.03/24/2/5/HKP/DRU/PSD-23 concerning Dismissal and Appointment of te Board of Commissioners of PT Pelindo Jasa Maritim
Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode I : 2023 - sekarang	1 st Period: 2023 - present
Jabatan Rangkap Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Staf Khusus Menteri Bidang Keuangan dan Investasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2017 – sekarang)</i> ▪ <i>Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen PT Pelindo Solusi Logistik (2021 – sekarang)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Special Staff to the Minister for Finance and Investment, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (2017 – present)</i> ▪ <i>President Commissioner concurrently Independent Commissioner of PT Pelindo Solusi Logistik (2021 – present)</i>



FACHRY ALI

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of Integrated Governance Committee



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Aceh Barat Daya, 23 November 1954 / Usia 70 tahun per Desember 2024	... / 63 years old as of December 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Sejarah dan Peradaban Islam Institut Agama Islam Negeri Ciputat Master of Arts dalam Sejarah Asia Tenggara dari Monash University (1994) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Master of Arts in Southeast Asian History from Monash University (1994)
Sertifikasi Certification	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) (2014-2016) Komisaris Utama (PT Timah Tbk) (2015-2020) Penasehat Ahli Kapolri Bidang Politik Kepolisian Negara RI (1998-Sekarang) Penasehat Ahli Kapolri Bidang Politik Kepolisian Negara RI (1998-Sekarang) Komisaris Utama PT Pelindo Solusi Logistik (2023 – sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> Commissioner of PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) (2014-2016) President Commissioner (PT Timah Tbk) (2015-2020) Expert Advisor to the National Police Chief for Political Affairs of the Indonesian National Police (1998-Present) President Commissioner of PT Pelindo Solusi Logistik (2023 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor : KP.03/24/2/7/RKTK/UTMA/PLND-23 Nomor : SK-004/PPI-SK.DIR/II/2023 Nomor : SK.03/24/2/7/HKP/DRU/PSD-23	Circular Resolution of Shareholders No. : KP.03/24/2/7/RKTK/UTMA/PLND-23 No. : SK-004/PPI-SK.DIR/II/2023 No. : SK.03/24/2/7/HKP/DRU/PSD-23
Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode I : 2023 - sekarang	Period I: 2023 - present
Jabatan Rangkap Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> Penasehat Ahli Kapolri Bidang Politik Kepolisian Negara RI (1998-Sekarang) Penasihat Menteri Badan Perencanaan Nasional (2021 – Sekarang) Komisaris Utama PT Pelindo Solusi Logistik (2023 – sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> Expert Advisor to the National Police Chief for Political Affairs of the Indonesian National Police (1998-Present) President Commissioner of PT Pelindo Solusi Logistik (2023 – present)



KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Education Qualification and Work Experience

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Agus Suhartono	Ketua Chairman	<ul style="list-style-type: none"> Akademi Angkatan Laut S1 bidang Ekonomi dari Naval Academy Naval Academy Bachelor in Economics from Naval Academy 	Memiliki pengalaman kerja di TNI Angkatan Laut Has work experience in the Navy
Sudung Situmorang	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> S2 bidang Hukum Master in Law 	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum Has work experience in Law sector
Heru Sukanto	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> S1 bidang Hukum S2 bidang Manajemen Bachelor in Law Masters in Management 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Has work experience in banking sector
Muchtar Luthfi Mutty	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> Program Sarjana Muda APDN S1 Ilmu Pemerintahan S2 bidang Kajian Ketahanan Nasional S2 bidang Administrasi Negara APDN Baccalaureate Program Bachelor of Government Science Master of National Resilience Studies Master of State Administration 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector
Moermahadi Soerja Djanegara	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> S1 Akuntansi S2 Manajemen S3 Ilmu Ekonomi Akuntansi Bachelor in Accounting Master of Management Doctoral of Accounting Economics 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector
Darwanto	Anggota Member	S2 Administrasi Publik Master of Public Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector
Otto Ardianto	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Industri S2 Administrasi Bisnis Bachelor of Industrial Engineering Master of Business Administration 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector
Fachry Ali	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> S1 Sejarah dan Peradaban Islam S2 Arts dalam Sejarah Asia Tenggara Bachelor of Master of Arts in Southeast Asian History 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector

INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE INDEPENDENCE

The Integrated Corporate Governance Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations. In accordance with the Audit Committee Charter, independence qualifications of Audit Committee members must meet the following criteria:

Tabel Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Corporate Governance Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Agus Suhartono	Sudung Situmorang	Muchtar Luthfi Muty	Moermahadi Soerja Djanegara	Moermahadi Soerja Djanegara	Darwanto	Otto Ardianto	Fachry Ali
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Does not have share ownership relationship in the Company	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrator of political parties, official and government	√	√	√	√	√	√	√	√

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PADA TAHUN 2023

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT IN 2023

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Development Materials Competency/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Agus Suhartono	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Training and/or Competency Improvement can be seen in the Training and/or Competency Improvement section of Board of Commissioners.		
Sudung Situmorang	Anggota Member	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Training and/or Competency Improvement can be seen in the Training and/or Competency Improvement section of Board of Commissioners.		



Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pembangunan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Development Materials Competency/Training	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Heru Sukanto	Anggota Member	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Training and/or Competency Improvement can be seen in the Training and/or Competency Improvement section of Board of Commissioners.		
Muchtar Luthfi Mutty	Anggota Member	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Training and/or Competency Improvement can be seen in the Training and/or Competency Improvement section of Board of Commissioners.		
Moermahadi Soerja Djanegara	Anggota Member	<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP), ERMA Masterclass series</i>	6 Desember 2023 December 6, 2023	LSP MKS
Darwanto	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> BSE GRC Masterclass – Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN BSE GRC Masterclass – Socialization of SOE & SOE Subsidiary Ratings 	14 September 2023 September, 14 2023 <i>Online</i>	BUMN School of Excellence
		<ul style="list-style-type: none"> <i>BSE GRC Masterclass - Risk Management Effectiveness Evaluation</i> 	7 September 2023 September, 7 2023 <i>Online</i>	
		<ul style="list-style-type: none"> BSE GRC Masterclass - Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) BSE GRC Masterclass - Securities Rating & Issuance Debt & Sharia Bonds (EBUS) 	10 Agustus 2023 August, 10 2023 <i>Online</i>	
		<ul style="list-style-type: none"> BSE GRC Masterclass - Pre IPO dan Post IPO BSE GRC Masterclass - Pre IPO and Post IPO 	10 Agustus 2023 August, 10 2023 <i>Online</i>	
		<ul style="list-style-type: none"> <i>Certified Risk Governance Professional (CRGP)</i> 	9-10 Oktober 2023 October, 9-10n2023 <i>Online</i>	
Otto Ardianto	Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> GRC Masterclass Program 2023 “Pre IPO dan Post IPO” dan “Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS)” yang dilaksanakan secara online GRC Masterclass Program 2023 “Pre IPO and Post IPO” and “Rating & Issuance of Debt Securities & Sharia Bonds (EBUS)”, held online 	10 Agustus 2023 August 10, 2023	BUMN School of Excellence
		<ul style="list-style-type: none"> GRC Masterclass Program 2023 “Introduction to ESG & IFC Performance Standards” yang dilaksanakan secara <i>online</i> GRC Masterclass Program 2023 “Introduction to ESG & IFC Performance Standards”, held online 	16 Agustus 2023 August 16, 2023	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan “Qualified Risk Governance Professional (QRGP)” yang dilaksanakan di secara <i>online</i> “Qualified Risk Governance Professional (QRGP)” training, held online 	Desember 2023 December, 2023	
Fachry Ali	Anggota Member	Profesional Tata Kelola Risiko Berkualitas, Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Jakarta, 16 Agustus 2023 Jakarta, August 16, 2023	BNSP

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. KTKT mengadakan rapat yang pesertanya diikuti anggota dari Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat KTKT dipimpin oleh Ketua atau anggota KTKT dari Induk Perusahaan yang paling senior, apabila Ketua berhalangan hadir;
3. Jika dipandang perlu, KTKT dapat mengundang pihak Direksi dan/atau Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat KTKT;
4. Setiap rapat KTKT dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua KTKT dilampiri daftar hadir peserta rapat;
5. KTKT dapat secara langsung ataupun meminta Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Induk untuk membuat dan menyampaikan panggilan rapat kepada seluruh peserta secara tertulis.

AGENDA RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan Peserta rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut.

Integrated Governance Committee Meeting

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETING POLICY

1. KTKT holds meetings whose participants are members of the Parent Company and Subsidiaries at least 1 (one) time in 3 (three) months;
2. KTKT meeting is chaired by the Chairman or the most senior member of KTKT from the Parent Company, if the Chairman is unable to attend;
3. If deemed necessary, KTKT may invite the Board of Directors and/or Management related to the meeting material to attend KTKT meeting;
4. Each KTKT meeting is outlined in the minutes of meeting signed by the Chairman of KTKT accompanied by a list of meeting participants present;
5. KTKT can directly or ask the Secretary of Board of Commissioners of the Parent Company to make and convey a meeting summons to all participants in writing.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETING AGENDA

Throughout 2023, the meeting dates, agenda and participants of Integrated Governance Committee are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1.	Kamis, 26 Oktober 2023 Thursday, October 26, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan <i>Charter</i> KTKT: <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur dan Komposisi KTKT; b. Tugas, Wewenang, dan Fungsi KTKT. 2. Pembahasan Manajemen Risiko Terintegrasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Strategi Risiko Terintegrasi 2024; b. Profil Risiko Terintegrasi 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agus Suhartono ▪ Sudung Situmorang ▪ Heru Sukanto ▪ Muchtar Luthfi Mutty ▪ Moermahadi Soerja Djanegara ▪ Darwanto ▪ Otto Ardianto ▪ Fachry Ali

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETINGS

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Attendance Level of Integrated Governance Committee Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Agus Suhartono	Ketua Chairman	1	1	100%
Sudung Situmorang	Anggota Member	1	1	100%
Heru Sukanto	Anggota Member	1	1	100%



Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
Attendance Level of Integrated Governance Committee Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Muchtar Luthfi Mutty	Anggota Member	1	1	100%
Moermahadi Soerja Djanegara	Anggota Member	1	1	100%
Darwanto	Anggota Member	1	1	100%
Otto Ardianto	Anggota Member	1	1	100%
Fachry Ali	Anggota Member	1	1	100%

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan pembahasan atas *charter* Komite Tata Kelola Terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF DUTIES IN 2023

During 2023, the Integrated Governance Committee has discussed the Charter of Integrated Governance and integrated risk management Committee.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARIAT

Sekretariat Perseroan merupakan organ tata kelola perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai *Compliance Officer* yang membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG. *General Head President* Sekretariat Perseroan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perseroan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholders*.

Corporate Secretariat is a corporate governance organ that plays a significant role as a Compliance Officer who assists Board of Directors in implementing GCG principles and complying with the provisions of GCG practices. General Head President of Corporate Secretariat of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) reports directly to President Director and is tasked with carrying out the mission to support the creation of a consistent and sustainable good corporate image through effective communication programs to all stakeholders.

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIAT PERUSAHAAN

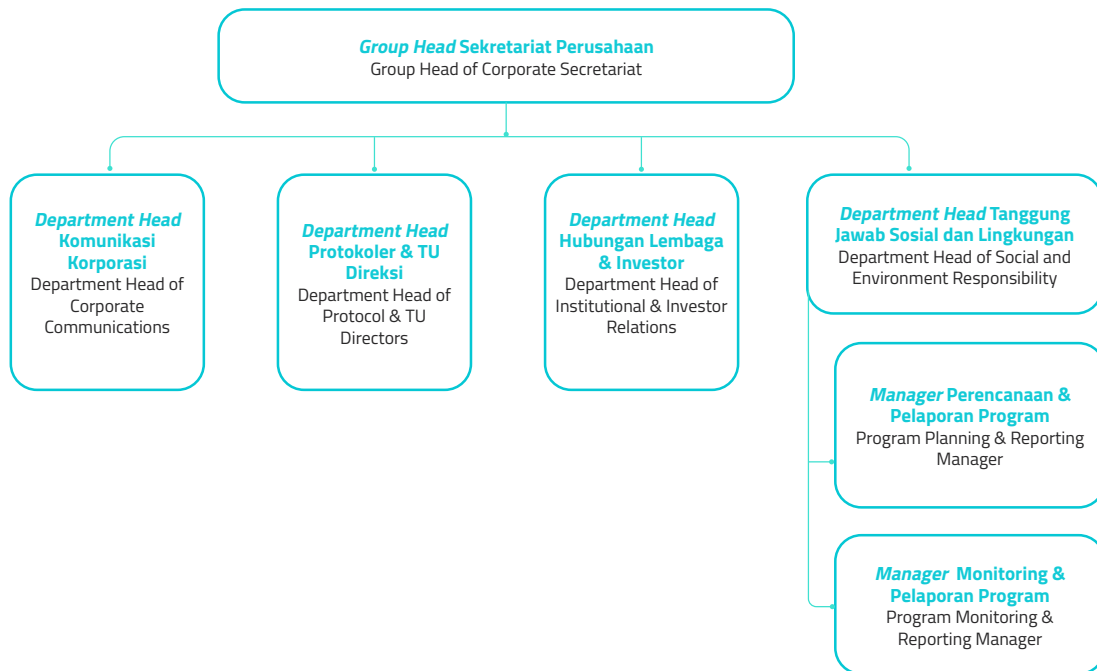
CORPORATE SECRETARIAT APPOINTMENT BASIS

Sekretariat Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Manajemen telah membuat Berita Acara Kesepakatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Pekerjaan Pada Jabatan Sekretariat Perseroan dan Satuan Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Corporate Secretariat is appointed and dismissed by President Director based on the Company's internal mechanism under the approval of Board of Commissioners/Supervisory Board. The management has made Minutes of Agreement of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 regarding Approval of Appointment at Corporate Secretariat and Internal Audit Unit PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

STRUKTUR SEKRETARIAT PERSEROAN

CORPORATE SECRETARIAT STRUCTURE



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Perseroan

FUNGSI

Bertanggung jawab untuk memastikan dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang pengelolaan kegiatan komunikasi korporasi, tanggung jawab sosial, protokoler dan Tata Usaha Direksi, hubungan lembaga, penerapan tata kelola korporasi, serta kegiatan hubungan investor, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk memastikan tersedianya informasi yang dibutuhkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, tersedianya laporan manajemen triwulan dan tahunan, Sebagai penghubung (*liaison officer*) untuk membina Hubungan dengan Lembaga/Instansi Pemerintah dan/atau non Pemerintah pada skala Nasional, serta penyelenggaraan rapat Direksi, pengadaan bahan rapat Direksi dan penyusunan risalah rapat Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Mengelola, memutuskan dan mereview rencana dan implementasi program kerja dan anggaran terkait bidang pengelolaan kegiatan komunikasi korporasi, tanggung jawab sosial, protokoler dan tata usaha Direksi, hubungan lembaga, penerapan tata kelola korporasi, serta kegiatan hubungan investor di lingkungan Perseroan;
2. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap:
 - a. Usulan rencana kegiatan terkait dengan penyebaran informasi kepada pihak internal ataupun eksternal serta peningkatan *corporate identity*;
 - b. Laporan Manajemen Triwulanan, Tahunan untuk dapat disampaikan ke Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

Corporate Secretary Functions, Duties and Responsibilities

FUNCTIONS

Responsible for ensuring and coordinating work plans and programs in the field of corporate communication activities management, social responsibility, protocol and administration of Board of Directors, institutional relations, implementation of corporate governance, as well as investor relations activities, are carried out in accordance with applicable regulations, to ensure the availability of information needed by Board of Directors and Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested, the availability of quarterly and annual management report, as a liaison officer to foster Relations with Government Institutions/Agencies and/or non-Government on a National scale, as well as holding meetings of Board of Directors, preparation of briefing sheets for Board of Directors meetings and making minutes of Board of Directors meetings.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Manage, decide and review the plans and implementation of work programs and budgets related to the corporate communication activities management, social responsibility, protocol and administration of Board of Directors, institutional relations, implementation of corporate governance, and investor relations activities within the Company;
2. Conduct review and evaluation of:
 - a. Proposed activity plans related to the dissemination of information to internal or external parties as well as improving corporate identity;
 - b. Quarterly, Annual Management Report to be submitted to Board of Commissioners/Supervisory Board;



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Usulan kebijakan peraturan Perseroan terkait dengan GCG beserta kebijakan turunan yang lainnya seperti <i>Board Manual</i> (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), Kode Etik Perseroan, Pedoman Gratifikasi dan <i>Whistleblowing System</i> (WBS); d. Usulan <i>framework</i>/metode pengendalian GCG, <i>Board Manual</i> (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), Kode Etik Perseroan, Pedoman Gratifikasi dan <i>Whistleblowing System</i> (WBS); e. Tindak lanjut hasil penilaian/pemeriksaan penerapan GCG, <i>Board Manual</i> (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris, Kode Etik Perseroan, Pedoman Gratifikasi dan <i>Whistleblowing System</i> (WBS); f. Usulan rencana kegiatan program pelayanan masyarakat meliputi Kemitraan, Bina Lingkungan dan CSR; g. Hasil evaluasi terhadap proposal atau usulan kegiatan pelayanan masyarakat, Bina Lingkungan dan CSR yang berasal dari pihak eksternal; h. Hasil evaluasi penerapan program kemitraan, bina lingkungan dan CSR; i. Usulan rencana pelaksanaan Rapat Direksi yang dilaksanakan secara rutin ataupun insidental; j. Pengelolaan kegiatan protokol Direksi Perseroan; k. Usulan pengelolaan dan penggunaan anggaran biaya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; l. Mengelola tata usaha serta menyimpan dokumen Perseroan termasuk daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi/rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS; m. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam <i>website</i> Perseroan maupun media cetak atau media resmi Perseroan untuk dikelola ketika ada pembaharuan; n. Pengelolaan kegiatan hubungan kelembagaan baik dengan Instansi terkait baik Pemerintah dan/atau non Pemerintah, Nasional, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan calon mitra/investor; <p>3. Merekomendasikan usulan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada pegawai Perseroan dan/atau pihak eksternal; b. Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan <i>corporate identity</i>; c. Kebijakan <i>corporate identity</i> Perseroan; d. Jenis kegiatan Program Pelayanan masyarakat, Bina Lingkungan dan CSR yang akan dilaksanakan; e. Kebijakan Perseroan terkait dengan GCG dan peraturan turunannya seperti <i>Board Manual</i> (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), dan Kode Etik Perseroan, Pedoman Gratifikasi dan <i>Whistleblowing System</i> (WBS); f. Tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan atas Pedoman Gratifikasi dan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) oleh Pegawai di lingkungan Perseroan; | <ul style="list-style-type: none"> c. Proposed corporate regulatory policies related to GCG along with other derivative policies such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS); d. Proposed GCG framework/control method, Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS); e. Follow-up on the results of GCG assessment/ inspection, Board Manual, the Company's Code of Conduct, Guidelines for Gratification and Whistleblowing System (WBS); f. Proposed plans for community service programs include Partnership, Community Development and CSR; g. Evaluate the proposals for community service activities, Community Development and CSR from external parties; h. Evaluate the implementation results of partnership program, community development and CSR; i. Propose plan for Board of Directors Meeting which is held routinely or incidentally; j. Management of the Company's Board of Directors protocol activities; k. Proposed management and use of the budget for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; l. Manage administration and store Company documents including shareholder register, special register and minutes of Board of Directors/Board of Commissioners/Supervisory Board meetings and GMS meetings; m. Updating the information material presented on the Company website as well as print media or official Company media to be managed when there is an update; n. Manage the institutional relations activities with related agencies, both Government and/or non-Government, National, including facilitating communication with potential partners/investors; <p>3. Recommend proposals related to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Media used to disseminate information to Company employees and/or external parties; b. Activities to be carried out to improve corporate identity; c. Company's corporate identity policy; d. Types of Community Service Program, Community Development and CSR activities to be carried out; e. Company policies related to GCG and its derivative regulations such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Guidelines for Gratification and Whistleblowing System (WBS); f. Follow up on non-compliance with Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS) by Employees of the Company; |
|---|--|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> g. Agenda dan jadwal pelaksanaan rapat Direksi; h. Rencana anggaran biaya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; i. Jenis informasi yang dapat/tidak dapat disebarikan kepada pegawai internal Perseroan; j. Kebijakan keterbukaan informasi publik Perseroan. <p>4. Melakukan pengendalian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Realisasi program kerja dan kesesuaian pengelolaan anggaran terkait komunikasi Perseroan, penerapan GCG dan peraturan turunannya, Protokoler dan Tata Usaha Direksi, serta pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya; b. Implementasi strategi dan/atau peraturan Perseroan terkait komunikasi Perseroan, penerapan GCG dan peraturan turunannya, Protokoler dan Tata Usaha Direksi, serta pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan; c. Informasi untuk pegawai internal Perseroan dan pihak eksternal Perseroan; d. Keberhasilan program Pelayanan Masyarakat, Bina Lingkungan, dan CSR yang dilakukan oleh Perseroan; e. Hasil evaluasi penerapan GCG dan peraturan turunannya seperti <i>Board Manual</i> (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), dan Kode Etik Perseroan, Pedoman Gratifikasi dan <i>Whistleblowing System</i> (WBS); f. Keberjalanan Rapat Direksi secara rutin ataupun insidental. | <ul style="list-style-type: none"> g. Agenda and schedule for Board of Directors meeting; h. Budget plan for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; i. Types of information that can/cannot be disseminated to internal Company employees; j. Company's public information disclosure policy. <p>4. Exercise control on:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Realization of work programs and suitability of budget management related to corporate communications, implementation of GCG and its derivative regulations, Protocol and Administration of Board of Directors, as well as implementation of partnership and community development programs with a predetermined budget; b. Implementation of corporate strategy and/or regulations related to corporate communication, implementation of GCG and its derivative regulations, Protocol and Administration of the Board of Directors, as well as implementation of partnership and community development programs; c. Information for the Company's internal employees and external parties; d. The success of the Community Service, Community Development, and CSR programs carried out by the Company; e. The evaluation results of the implementation of GCG and its derivative regulations such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS); f. Routine or incidental Board of Directors Meetings. |
|--|---|



Profil Sekretariat Perusahaan

Corporate Secretariat Profile



ALI MULYONO*

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



Kewarganegaraan Nationality	Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Jejara, 15 Agustus 1969/54 tahun per 31 Desember 2023.	Jejara, August 15, 1969/54 years old as of December 31, 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada pada tahun (1998).	Bachelor of Law from Gajah Mada University in (1998).
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> AGM Kepatuhan Internal dan Tanggap Bencana / PFSO Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2012-2014); Deputi <i>Safety, Security and Environment</i> PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2016); DGM hukum dan Pengendalian Internal Cabang Pelabuhan Tanjung Priok PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2018); Direktur SDM PT New Priok Container Terminal One (2018-2020); SVP Hukum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021); EVP Sekretariat Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun (2021); <i>Group Head Sekretariat Perseroan</i> PT Pelabuhan Indonesia (Perseo) (2021-2024). 	<ul style="list-style-type: none"> AGM Internal Compliance and Disaster Response/ PFSO Tanjung Priok Port Branch in (2012-2014); Deputy for Safety, Security and Environment of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2016); Legal DGM and Internal Control of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tanjung Priok Port Branch (2016-2018); HC Director of PT New Priok Container Terminal One (2018-2020); SVP of Law of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021); EVP Corporate Secretariat of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in (2021); Group Head Corporate Secretariat of PT Pelabuhan Indonesia (Perseo) (2021-2024).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Berita Acara Kesepakatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Pekerjaan Pada Jabatan Sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	Minutes of Agreement of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 concerning Approval for Appointment of Officials at Corporate Secretariat and Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

*Berhenti menjabat sejak 29 Februari 2024

*No longer served on February 29, 2024



ARDHY WAHYU BASUKI

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



Kewarganegaraan Nationality	Warga Negara Indonesia	Indonesian citizen
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Surabaya, 11 September 1978/Usia 45 tahun per Desember 2023	Surabaya, September 11, 1978/ 45 years old as of December 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Teknik Institut Teknik Sepuluh November	Bachelor of Engineering from Sepuluh November Technical Institute
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> ▪ General Manager Maumere Pelindo (2015-2017); ▪ General Manager Benoa Pelindo (2017-2018); ▪ General Manager Semarang Pelindo (2018); ▪ CEO Regional Jawa Tengah Pelindo (2018-2019); ▪ SVP Marketing Pelindo (2019-2020); ▪ Corporate Secretary (2020). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ General Manager Maumere Pelindo (2015-2017) ▪ General Manager Benoa Pelindo (2017-2018) ▪ General Manager Semarang Pelindo (2018) ▪ Regional CEO Central Java Pelindo (2018-2019) ▪ SVP Marketing Pelindo (2019-2020) ▪ Corporate Secretary (2020)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.02/29/2/1/RKTK/UTMA/PLND-24 tanggal 1 Maret 2024.	Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No: KP.10.02/29/2/1/RKTK/UTMA/PLND-24 dated March 1, 2024.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Nama Name	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Type of Training and Subject of Training/Competency Development	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Ali Mulyono	<i>Port and People Development from Design to Operate</i> Port and Community Development from Design to Operation	23 Mei 2023 May 23, 2023	Corpu Pelindo
	<i>Transformasi Layanan Berbasis Planning & Control</i> Service Transformation Based on Planning & Control	10 Juli 2023 July 10, 2023	Corpu Pelindo
	<i>Safety Induction Pelindo Tower</i> Pelindo Tower Safety Induction	21 Agustus 2023 August 21, 2023	Corpu Pelindo
	Seminar Manajemen Risiko 2023 Risk Management Seminar 2023	12 Desember 2023 December 12, 2023	Corpu Pelindo

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Perusahaan Tahun 2023

Pelaksanaan tugas Sekretariat Perusahaan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Departemen Komunikasi Korporasi
 - a. Pengelolaan Informasi internal dan eksternal;
 - b. Pengelolaan kegiatan internal dan eksternal;
 - c. Partisipasi *Sponsorship* dan Bentuk Partisipasi Lainnya;

Corporate Secretary Duties Implementation in 2023

The Corporate Secretariat duties implementation during 2023 are as follows:

1. Corporate Communication Department
 - a. Internal and external information management;
 - b. Management of internal and external activities;
 - c. Sponsorship and other forms of participation;



- | | |
|--|---|
| <p>d. Partisipasi dalam kegiatan <i>award</i>;</p> <p>e. Konsultansi Kehumasan;</p> <p>f. Pembuatan <i>Annual Report & Sustainability Report</i> Tahun 2022;</p> <p>g. Mengikuti kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi keterbukaan informasi publik;</p> <p>h. Penerbitan Iklan;</p> <p>i. Pendokumentasian Kegiatan Perseroan;</p> <p>j. Produksi Cinderamata Perseroan;</p> <p>k. Pembuatan kalender dan agenda Perseroan;</p> <p>l. Pembelian langsung/langganan surat kabar;</p> <p>2. Departemen Hubungan Lembaga dan Investor</p> <p>a. Hubungan Antar Lembaga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan hubungan lembaga dan <i>issue</i> strategis lembaga; ▪ Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Kementerian, Lembaga Eksternal, <i>Sharing Knowledge</i> dan <i>Port Visit</i> Lembaga; ▪ Pelaksanaan Pendampingan RDP dan Kunjungan Kerja DPR-RI ke Cabang Pelabuhan; ▪ Sinergi antara Pelindo dengan Pemerintah/ Lembaga lainnya; ▪ Pelaksanaan kegiatan Perseroan, termasuk Acara Peresmian; ▪ Keanggotaan aktif pada Organisasi Internasional. <p>b. Hubungan Investor</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan OJK terkait hubungan investor dan kepatuhan POJK No. 14 tahun 2022; ▪ Pengiriman surat terkait laporan kepatuhan terhadap OJK dan Bursa Efek Indonesia. <p>3. Departemen Protokoler dan TU Direksi</p> <p>a. Pelaksanaan Rapat Direksi;</p> <p>b. Pelaksanaan Rapat Komisaris dan Direksi;</p> <p>c. Pelaksanaan Pelatihan Direksi dan Komisaris;</p> <p>d. Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Kegiatan Operasional Komisaris dan Direksi;</p> <p>e. Manajemen Kegiatan Direksi;</p> <p>f. Pemenuhan Kelengkapan Komisaris dan Direksi;</p> <p>g. Penyusunan SOP Administrasi Direksi Pasca Merger;</p> <p>h. Penyusunan Peraturan Direksi Tahun 2023;</p> <p>i. Pelaksanaan Pelindo Forum;</p> <p>j. Program Perkenalan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023.</p> <p>4. Departemen Tanggung Jawab Sosial</p> <p>a. Perencanaan dan Pelaksanaan Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Program TJSL Sesuai Prioritas Bidang Pendidikan; ▪ Pelaksanaan Program TJSL Sesuai Prioritas Bidang Lingkungan; ▪ Pelaksanaan Program TJSL dengan Pendekatan CSV; ▪ Pelaksanaan Program TJSL Non Bidang Prioritas; | <p>d. Participation in award activities;</p> <p>e. Public Relations Consultancy;</p> <p>f. Preparation of 2022 Annual Report & Sustainability Report;</p> <p>g. Participating in monitoring and evaluation of public information disclosure activities;</p> <p>h. Issuance of advertisements;</p> <p>i. Documentation of Company Activities;</p> <p>j. Production of Company Souvenirs;</p> <p>k. Production of Company calendars and agendas; and</p> <p>l. Direct purchase/newspaper subscription.</p> <p>2. Department of Institutional and Investor Relations</p> <p>a. Inter-Institutional Relations</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Management of institutional relations and institutional strategic issues; ▪ Implementation of Ministry Official Visit Activities, External Institutions, Knowledge Sharing and Institutions Port Visit; ▪ Implementation of DPR-RI's RDP and Working Visit Assistance to Port Branches; ▪ Synergy between Pelindo and other Governments/ Institutions; ▪ Implementation of Company event activities and Inauguration Events; and ▪ Active membership in International Organizations. <p>b. Investor Relations</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordination with OJK regarding Investor Relations and compliance with POJK No. 14 of 2022; ▪ Delivery of letters related to compliance reports to OJK and Indonesia Stock Exchange. <p>3. Protocol and TU Directors' Department</p> <p>a. Implementation of Board of Directors Meeting;</p> <p>b. Implementation of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings;</p> <p>c. Implementation of Board of Directors and Commissioners Training;</p> <p>d. Implementation of Administrative and Financial Operational Activities of Board of Commissioners and Board of Directors;</p> <p>e. Activity Management of Board of Directors;</p> <p>f. Fulfilment of Completeness of Board of Commissioners and Board of Directors;</p> <p>g. Preparation of SOP for Post-Merger Board of Directors Administration;</p> <p>h. Preparation of Board of Directors Regulation 2023;</p> <p>i. Implementation of Pelindo Forum;</p> <p>j. Introduction Program of Board of Commissioners and Board of Directors in 2023.</p> <p>4. Social Responsibility and Environment Department</p> <p>a. Program Planning and Implementation</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementation of CSR Programs in accordance with Education Priorities; ▪ Implementation of CSR Program in accordance with the priorities of Environmental Sector; ▪ Implementation of CSR Programs with a CSV Approach; ▪ Implementation of CSR Programs with Non-Priority Sectors; |
|--|---|

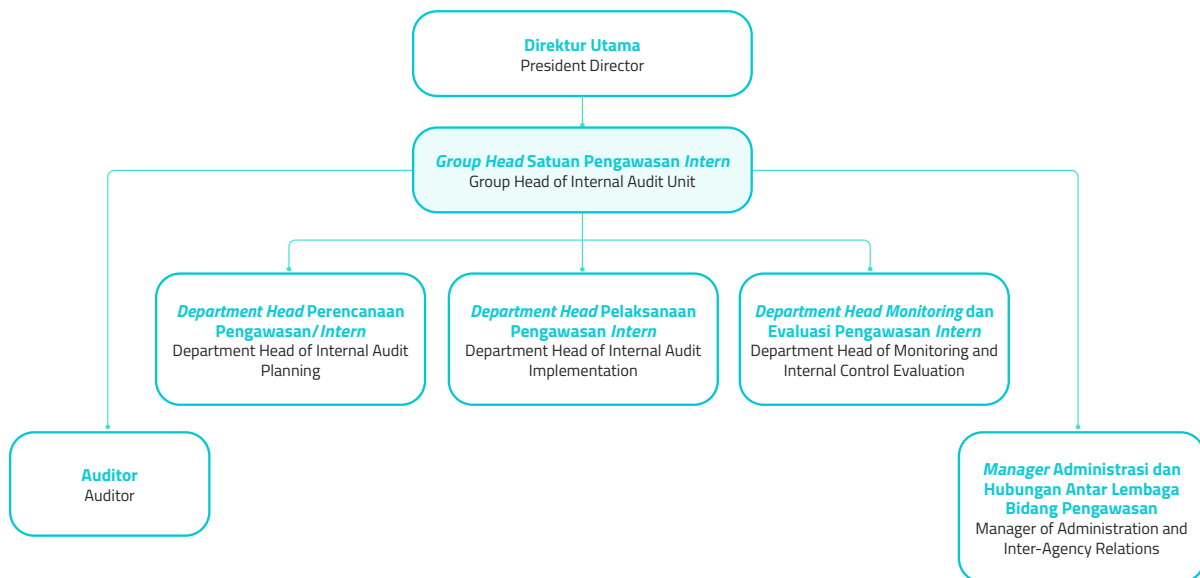
- Penyusunan SOP TJSJL Pasca Merger.
- b. *Monitoring* dan Pelaporan Program
 - Pelaksanaan Program TJSJL Sesuai Prioritas Bidang Pengembangan UMK;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Penagihan Piutang Mitra Binaan;
 - Pemutakhiran Aplikasi Sistem Informasi TJSJL Pelindo;
 - Penyusunan SOP TJSJL Pasca Merger;
 - Pembentukan Komite TJSJL.
- Preparation of Post-Merger SOP of CSR.
- b. Program Monitoring and Reporting
 - Implementation of CSR Programs in accordance with MSE Development Priorities;
 - Implementation of Monitoring and Collection of Assisted Partner Receivables;
 - Updating Pelindo CSR Information System Application;
 - Preparation of Post-Merger SOP of CSR;
 - Establishment of CSR Committee.

SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT UNIT

STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT ORGANIZATIONAL STRUCTURE



KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM STRUKTUR ORGANISASI

INTERNAL AUDIT UNIT POSITION IN ORGANIZATION

Satuan Pengawasan Intern merupakan bagian dari manajemen yang independen dan dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan *Intern* dan secara stuktur bertanggungjawab langsung pada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Auditor Internal yang ditugaskan di Satuan Pengawasan Intern bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Satuan Pengawasan *Intern*.

Internal Audit Unit is part of independent management and is led by the Head of Internal Audit I Unit and is structurally responsible directly to the President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Internal Auditor assigned to Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of Internal Audit Unit.



PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT PROFILE



WIDODO

Group Head Satuan Pengendalian Internal
 Group Head of Internal Audit Unit



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Semarang, 28 September 1969/54 tahun per Desember 2023.	Semarang, September 28, 1969/54 years old as of December 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1993); Magister Manajemen dari Universitas Budi Luhur (2001); Magister Infrastructure Management dari Institut Teknologi Bandung (2005); Master Shipping and Transportation dari Netherlands Maritime University (2013). 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1993); Master of Management from Budi Luhur University (2001); Master of Infrastructure Management from Bandung Institute of Technology (2005); Master of Shipping and Transportation from Netherlands Maritime University (2013).
Sertifikasi Certification	<ul style="list-style-type: none"> Qualified Internal Auditor; Qualified Risk Management Professional (QRMP); Ahli Kepelabuhanan (IPP 1, IPP3 dan POM). 	<ul style="list-style-type: none"> Qualified Internal Auditor; Qualified Risk Management Professional (QRMP); Port Expert (IPP 1, IPP3 and POM).
Pengalaman Kerja Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Sumber Daya Manusia PT Jakarta International Container Terminal (Juli 2020 – Oktober 2021); EVP Satuan Pengawasan Internal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (September 2016 – Juli 2020); Kepala Biro Pengadaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (April 2014 – Agustus 2016); Senior Manager Perencanaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Oktober 2013 - Maret 2014); Staf Madya Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Agustus 2011 - September 2013); Manager Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Oktober 2019 – Agustus 2011). 	<ul style="list-style-type: none"> Human Capital Director of PT Jakarta International Container Terminal (July 2020 – October 2021); EVP of Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (September 2016 – July 2020); Head of Procurement Bureau of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (April 2014 – August 2016); Senior Manager of Planning of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (October 2013 - March 2014); Associate Staff Director of Human Capital of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (August 2011 - September 2013); Technical Manager of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (October 2019 – August 2011)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021.	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Decree No. KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Satuan Pengawasan Intern selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

INTERNAL AUDIT UNIT COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Competency development that have been followed by Internal Audit Unit Employees during 2023 are as follows

No.	Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Peningkatan Komeptensi Training/Competency Development	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
1	Widodo	Kepala SPI Head of SPI	<i>IIA Indonesia National Conference 2023</i>	30-31 Agustus 2023 August 30-31, 2023	IIA Indonesia
			<i>Pelindo E-Talks (Empowering Talks) Vol. 5 : Ingraining AKHLAK. Igniting Business Growth</i>	20 Juli 2023 July 20, 2023	PMLI
			<i>Pelindo E-Talks vol. 6 : Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	PMLI
			<i>Qualified Chief Risk Officer (QCRO)</i>	13 - 14 Juni 2023 June 13-14, 2023	Learning - PMLI
2	Purbo Wijanarko	Anggota SPI Member of SPI	<i>ALPI Program</i>	Oktober - November 2023 October - November 2023	PMLI
			<i>IIA Indonesia National Conference 2023</i>	30-31 Agustus 2023 August 30-31, 2023	IIA Indonesia
			<i>Pelindo E-Talks vol. 6 : Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	PMLI
3	Rumaji	Anggota SPI Member of SPI	<i>Internal Audit Roles and Competency Competency Framework</i>	13 April 2023 April 13, 2023	IIA INDONESIA
			<i>Cyber security Risk</i>	15 April 2023 April 15, 2023	YPIA
			<i>Audit System Management Based on ISO 19011:2018</i>	5 Agustus 2023 August 5, 2023	Motekar Edukasi
			<i>Pelindo E-Talks vol. 6 : Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	PMLI
			<i>Penyusunan KMAP HO Batch 1 Preparation od KMAP HO Batch 1</i>	20 Maret 2023 March 20, 2023	PMLI
			<i>Udemy Business - Strategy for Management Consultants & Business Analysts</i>	22 September - 22 Maret 2023 September 22 - March 22, 2023	Udemy
			<i>Udemy Business - Economics, Management & Strategy Masterclass</i>	22 September - 22 Maret 2023 September 22 - March 22, 2023	Udemy
			<i>Leader as a Coach</i>	24 November 2023 November 24, 2023	Coaching Indonesia
			<i>IT Audit</i>	28 Agustus 2023 August 28, 2023	ISACA
<i>Udemy Business - Business Lesson from CEO</i>	1 November - 31 Desember 2023 November 1 - December 31, 2023	PMLI UDEMY			



No.	Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Peningkatan Komeptensi Training/Competency Development	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
4	Yan Berhen P S	Anggota SPI Member of SPI	Memahami Kode Etik Akuntan Indonesia Bagi Akuntan Pendidik Understanding the Indonesian Accountants Code of Conduct for Accountant Educators	17/5/2023 s.d 17/5/2023 May 17, 2023 to May 17, 2023	Ikatan Akuntan Indonesia
			Penerapan GRC Terintegrasi untuk Tata Kelola dan meningkatkan Pengelolaan Risiko yang lebih baik Integrated GRC Implementation for better Governance and enhanced Risk Management	04/1/2023 s.d. 4/1/2023 January 4, 2023 to January 4, 2023	IIA
			<i>Certified Governance, Risk and Compliance Professional Advanced</i>	Januari 2023 January 2023	Motekar Edukasi Indonesia
5	Sari P Susweni	Anggota SPI Member of SPI	Dasar - Dasar Audit Audit Basics	5 - 17 September 2022 September 5 - 17, 2022	YPIA
			<i>ISO 31000 Series 1: ERM Fundamentals</i>	8 - 10 Maret 2021 March 8 - 10, 2021	CRMS
			<i>Leader as A Coach</i>	November 2023 November 23	Coaching Indonesia
			<i>IT Audit Sharing Session with ISACA Indonesia Chapter</i>	28 Agustus 2023 August 28, 2023	ISACA
			<i>Certified Risk Based Audit Professional</i>	23 Desember 2023 December 23, 2023	Dilatih.co
6	Hanung Hamboro	Anggota SPI Member of SPI	BERLABUH "How to Develop Innovation Product"	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Knowledge Management - PMLI
			<i>Pelatihan Audit Internal Tingkat Dasar Basic Internal Audit Training</i>	4 - 16 September 2023 September 4 - 16, 2023	Learning - PMLI
			<i>Pelindo E-Talks vol. 6 : Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 23	PMLI
			<i>Ready to Retire Batch 2</i>	9 - 12 Oktober 2023 9 - 12 October 2023	Learning - PMLI
7	Urip Nurhayat	Anggota SPI Member of SPI	Mengenal Operasi Terminal Ro Ro Kendaraan Terbesar di Indonesia Getting to Know Indonesia's Largest Vehicle Ro Ro Terminal Operation	8 September 2023 September 8, 2023	Learning - PMLI
8	Deni Rahayu Santoso	Anggota SPI Member of SPI	Diklat Audit Internal Tingkat Dasar Basic Internal Audit Training	17 - 31 Juli 2023 17 - 31 July 2023	YPIA
			<i>Pelindo E-Talks vol. 6 : Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	PMLI

No.	Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Peningkatan Komeptensi Training/Competency Development	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
9	Agus Sulistyو	Anggota SPI Member of SPI	Apakah Uang Saya Cukup? (<i>Is My Money Enough?</i>) Is My Money Enough?	10 Januari - 10 Februari 2023 January 10 - February 10, 2023	PT. Qando Qoaching
			Diklat Audit Internal Tingkat Dasar Basic Internal Audit Training	22 Mei - 5 Juni 2023 May 22 - June 5, 2023	Learning - PMLI
			Pelindo E-Talks (<i>Empowering Talks</i>) Vol. 5 : <i>Ingraining AKHLAK. Igniting Business Growth</i>	20 Juli 2023 July 20, 2023	PMLI
			Pelindo E-Talks vol. 6 : <i>Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	PMLI
			<i>Certified Internal Audit Professional Advance</i> (CIAPA)	28 Januari 2023 January 28, 2023	Dilatih.co
			<i>Certified IT Audit Professional</i> (CITAP)	11 Februari 2023 February 11, 2023	Dilatih.co
			<i>Certified Risk Based Audit Professional</i> (CRBAP)	25 Februari 2023 February 25, 2023	Dilatih.co
10	Hasrullah	Anggota SPI Member of SPI	Sertifikasi Auditor <i>Basic Level</i> Auditor Certification Basic Level	28 November - 10 Desember 2022 November 28 to December 10, 2022	Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor
			Kegiatan Bincang SPI SPI Talk Activity	28 Juli 2023 July 28, 2023	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern Wilayah Jawa Barat-Banten
			IDEA <i>Data Analysis Overview</i>	10 Juli 2023 July 10, 2023	Insight Consulting IDEA Regional Patner
			IT Audit <i>Sharing Session With ISACA Indonesia</i> <i>Cahpter</i>	28 Agustus 2023 August 28, 2023	ISACA Indonesia Chapter
			<i>Certified Internal Audit Professional Advanced</i> (CIAPA)	9 Desember - 16 Desember 2023 December 9 to December 16, 2023	Dilatih.co
			<i>Certified Corporate Forensic Auditor</i> (CCFA)	16 Desember - 23 Desember 2023 December 16 to December 23, 2023	Dilatif.co
			<i>Certified Risk Based Audit Professional</i> (CRBAP)	23 Desember 2023 - 30 Desember 2023 December 23 to December 30, 2023	Dilatih.co



No.	Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Peningkatan Komeptensi Training/Competency Development	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
11	Sigit Poernomo	Anggota SPI Member of SPI	<i>Training Awareness Sistem Manajemen Terpadu ISO 37001:2016 & ISO 9001:2015 Tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Integrated Management System Awareness Training ISO 37001: 2016 & ISO 9001: 2015 Year 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</i>	9 Oktober 2023 October 9, 2023	PMLI
			<i>International Standard on Auditing</i>	2 November - 22 November 2023 November 2 - November 22, 2023	PMLI UDEMY
			<i>Master The Art of Auditing Financial Statements : In Dept Analysis, Techniques, and Real World Case Studies (Audit Financial Statement)</i>	2 November 23 - 22 November 2023 November 2 - November 22, 2023	PMLI UDEMY
			<i>Certified Internal Auditor (CIA) Part 1-Full Study Course</i>	4 November 23 - 22 November 2023 November 4 - November 22, 2023	PMLI UdemY
			<i>Certified Internal Auditor (CIA) Part 2-Full Study Course</i>	5 November 23 - 22 November 2023 November 5 - November 22, 2023	PMLI UDEMY
			<i>Internal Control Design Implementation and Monitoring</i>	15 November 23 - 22 November 2023 November 15 - November 22, 2023	PMLI UDEMI
			<i>IT Audit Sharing Session with ISACA Indonesia Chapter</i>	28 Agustus 2023 August 28, 2023	ISACA INDONESIA CHAPTER
			<i>Internal Audit : A Guide For Management</i>	3 November - 22 November 2023 November 3 - November 22, 2023	PMLI UDEMY
			<i>Modern Internal Audit Leadership</i>	22 November 2023 November 22, 2023	PMLI UDEMY
			<i>Sarbanes Oxley ITGC Audit Concepts and Coordination</i>	22 November 2023 November 22, 2023	PMLI UDEMY
12	Afif Somadi	Anggota SPI Member of SPI	<i>Diklat Audit Internal Tingkat Dasar Basic Internal Audit Training</i>	17 - 31 Juli 2023 July 17 - 31, 2023	Learning - PMLI
			<i>Pelindo E-Talks vol. 6 : Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	PMLI
			<i>Updating Knowledge Map (KMAP) Regional 2</i>	27-28 Maret 2023 March 27-28, 2023	PMLI
13	Sugiarto	Anggota SPI Member of SPI	<i>Pelindo E-Talks vol. 6 : Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	PMLI
			<i>Udemy Business - The Complete Financial Analyst Course 2023</i>	22 September 2022 - 22 Maret 2023 September 22, 2022 - March 22, 2023	Udemy
			<i>Udemy Business - Certified Internal Auditor (CIA) Part 1 - Full Study Course</i>	22 September 2022 - 22 Maret 2023 September 22, 2022 - March 22, 2023	Udemy
14	Nofal Hayin K	Anggota SPI Member of SPI	<i>Pelatihan Audit Internal Tingkat Dasar Basic Internal Audit Training</i>	3 - 17 April 2023 April 3 - 17, 2023	Learning - PMLI

No.	Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Peningkatan Komeptensi Training/Competency Development	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
15	Kresnajaya Prasetya Pancakarsa	Anggota SPI Member of SPI	ALPI Program	Oktober - November 2023 October - November 2023	PMLI
16	Suwondo Widjatmoko	Anggota SPI Member of SPI	Pelindo E-Talks vol. 6 : <i>Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	PMLI
17	Donny Simon Mayman Hutasoit	Anggota SPI Member of SPI	Tren dan Tantangan Internal Audit Internal Audit Trends and Challenges	20 Januari 2023 January 20, 2023	YPIA
18	Yulias Caesar Sihombing	Anggota SPI Member of SPI	<i>Port and People Development from Design to Operate</i>	9 Mei 2023 May 9, 2023	PMLI
19	Pramudito	Anggota SPI Member of SPI	Proposal <i>Masterplan</i> Pembangunan Poros Maritim Nawacita Indonesia Berbasis Teknologi Tahun 2024 – 2030 Proposal for Technology-Based Indonesian Nawacita Maritime Axis Development Master Plan 2024 - 2030	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Learning - PMLI
20	Eko Henri Sufiawan	Anggota SPI Member of SPI	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) National Seminar on Internal Audit (SNIA)	5-6 Juli 2023 July 5-6, 2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
21	Rery Indra Kusuma	Anggota SPI Member of SPI	Pelindo E-Talks (<i>Empowering Talks</i>) Vol. 5 : <i>Ingraining AKHLAK. Igniting Business Growth</i>	20 Juli 2023 July 20, 2023	PMLI
22	Ibnu Sukarma	Anggota SPI Member of SPI	<i>G20/B20 Integrity & Compliance Policy Paper : Action Plan For Internal Auditor</i>	23 Februari 2023 February 23, 2023	IIA INDONESIA
23	Tanjung Halomoan Ambarita	Anggota SPI Member of SPI	<i>Certified IT Audit Professional (CITAP)</i>	19 November 2023 November 19, 2023	dilatih.co
24	Fitri Herayati Nasution	Anggota SPI Member of SPI	<i>Certified IT Audit Professional (CITAP)</i>	11 Mei 2023 May 11, 2023	dilatih.co
25	Muhammad Badrum	Anggota SPI Member of SPI	<i>Audit System Management Based on ISO 19011:2018</i>	5 Agustus 2023 August 5, 2023	dilatih.co
26	Rustini	Anggota SPI Member of SPI	<i>Certified Practitioner of Internal Audit</i>	4 Desember - 15 Desember 2023 December 4, 2023 - December 15, 2023	YPIA
27	Khrismayanti Dewi	Anggota SPI Member of SPI	<i>Q M S Auditor/Lead Auditor Course</i>	28 November 2023 November 28, 2023	UDEMY
28	Septa Andreas Sitepu	Anggota SPI Member of SPI	Mengenal Operasi Terminal Ro Ro Kendaraan Terbesar di Indonesia Getting to Know Indonesia's Largest Vehicle Ro Ro Terminal Operation	8 September 2023 September 8, 2023	PMLI
29	Holly Tantyaka Y Keswara	Anggota SPI Member of SPI	<i>G20/B20 Integrity & Compliance Policy Paper: Action Plan for Internal Auditor</i>	23 Februari 2023 February 23, 2023	IIA INDONESIA
30	Baihaqi	Anggota SPI Member of SPI	IDEA DATA Analysis Overview	10 Juli 2023 July 10, 2023	Insight Consulting
31	Darul Ikhran Angkasa Batubara	Anggota SPI Member of SPI	<i>FREE Exclusive Program: Mutiara Pelindo Wellness Program</i>	13 Januari - 11 Februari 2023 January 13 - February 11, 2023	Coaching Indonesia
32	Ervina Lady M S	Anggota SPI Member of SPI	Pelindo E-Talks (<i>Empowering Talks</i>) Vol. 5 : <i>Ingraining AKHLAK. Igniting Business Growth</i>	20 Juli 2023 July 20, 2023	PMLI
33	Arenda Haryo Prabowo	Anggota SPI Member of SPI	IT Audit <i>Sharing Session</i> with ISACA Indonesia Chapter	28 Agustus 2023 August 28, 2023	ISACA Indonesia Chapter



No.	Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Peningkatan Komeptensi Training/Competency Development	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
34	Irfan Firdaus	Anggota SPI Member of SPI	Diklat Audit Internal Tingkat Dasar Basic Internal Audit Training	22 Mei - 5 Juni 2023 May 22 - June 5, 2023	Learning - PMLI
35	Adnan Lubis	Anggota SPI Member of SPI	Diklat Audit Internal Tingkat Dasar Basic Internal Audit Training	17-31 Juli 2023 July 17-31, 2023	Learning - PMLI
36	Sapri Ependi	Anggota SPI Member of SPI	Pelindo E-Talks vol. 6 : <i>Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	PMLI
37	Rusli	Anggota SPI Member of SPI	Pelindo E-Talks vol. 6 : <i>Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	PMLI
38	Herryansyah	Anggota SPI Member of SPI	Mengenal Operasi Terminal Ro Ro Kendaraan Terbesar di Indonesia Getting to know Indonesia's Largest Vehicle Ro Ro Terminal Operation	8 September 2023 September 8, 2023	PMLI
39	Rosseno Ratman	Anggota SPI Member of SPI	Pelindo E-Talks vol. 6 : <i>Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	PMLI
40	Aldimas Kharunia Zaman	Anggota SPI Member of SPI	<i>Udemy Business - Financial Analysis</i>	1 Januari - 30 September 2023 January 1 - September 30, 2023	Udemy
41	Deski Rizaldi	Anggota SPI Member of SPI	<i>Audit Sistem Informasi Based on COBIT 2019</i>	26 Agustus - 26 Agustus 2023 August 26, 2023 - August 26, 2023	dilatih.co
42	Ramdhana Feri Martin	Anggota SPI Member of SPI	<i>Internal Auditor Based ISO 19011:2018</i>	4 Agustus 2023 August 4, 2023	Expert Club Indonesia
43	Abd. Rachman	Anggota SPI Member of SPI	Pelindo E-Talks (<i>Empowering Talks</i>) Vol. 5 : <i>Ingraining AKHLAK. Igniting Business Growth</i>	20 Juli 2023 July 20, 2023	PMLI
44	Pandita Wisna Patria	Anggota SPI Member of SPI	Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas Basic Anti-Corruption Knowledge and Integrity	16 September 2023 September 16, 2023	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
45	Jufrianto Siahaan	Anggota SPI Member of SPI	Tren dan Tantangan Internal Audit Internal Audit Trends and Challenges	20 Januari 2023 January 20, 2023	YPIA
46	Kurniawan Haryo Yudianto	Anggota SPI Member of SPI	Pelindo E-Talks vol. 6 : <i>Navigating the merger landscape : Lesson the future</i>	25 September 2023 September 25, 2023	
47	Nurwan Bayu Setyawan	Anggota SPI Member of SPI	Dasar - Dasar Audit Audit Basics	5 - 17 September 2022 September 5 - 17, 2022	YPIA
48	Bara Wijianto	Anggota SPI Member of SPI	<i>International standards on auditing (ISA)</i>	22 November 2023 November 22, 2023	Udemy
49	Samsul	Anggota SPI Member of SPI	<i>Certified Risk Based Audit Profesional</i>	25 Februari 2023 February 25, 2023	dilatih.co
50	Henny Nur Aini	Anggota SPI Member of SPI	<i>Fundamental of Cybersecurity Auditing</i>	17 Juli & 20 Juli 2023 July 17, 2023 & July 20, 2023	IIA Indonesia
51	Wimbi Perdana Putra	Anggota SPI Member of SPI	Diklat Audit Tingkat Dasar Basic Internal Audit Training	16-28 Januari 2023 January 16-28, 2023	Learning - PMLI
52	Indri Andriani	Anggota SPI Member of SPI	BERLABUH "Pelindo Muda <i>Story: To Be Outstanding Significant Employee</i> "	31 Mei 2023 May 31, 2023	Knowledge Management - PMLI
53	Mohamad Jamil	Anggota SPI Member of SPI	<i>Entrepreneurial Marketing Winning Pelindo Competitive Advantage</i>	15 September 2023 September 15, 2023	Learning - PMLI
54	Fransisca Dina K	Anggota SPI Member of SPI	BERLABUH "Pelindo Muda <i>Story: To Be Outstanding Significant Employee</i> "	31 Mei 2023 May 31, 23	Knowledge Management - PMLI

No.	Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Peningkatan Komeptensi Training/Competency Development	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
55	Arief Budiman	Anggota SPI Member of SPI	Port and People Development from Design to Operate	2 Oktober 2023 October 2, 2023	Corpu Pelindo

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris yang mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian auditor internal dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapat dari Kepala Satuan Pengawasan Intern dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Dalam mewujudkan tugasnya secara profesional, kompeten, independen dan objektif, unit Satuan Pengawasan Intern mengacu pada *Audit Charter* Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Nomor PW.01/17/1/1/PMPL/UTMA/PLND-22 tanggal 17 Januari 2022. Adapun isi *Audit Charter* Satuan Pengawasan Intern yaitu:

- Pendahuluan;
- Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Strategi;
- Ruang Lingkup;
- Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Kewenangan, dan Akuntabilitas;
- Kode Etik;
- Pengorganisasian;
- Program Asurans dan Peningkatan Kualitas SPI;
- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- Pelaporan dan *Monitoring*;
- Komunikasi SPI dengan Pihak Lain;
- Hubungan Kerja dengan Pihak Lain;
- Evaluasi Piagam Satuan Pengawasan Intern;
- Penutup.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT

1. Mengelola kegiatan pengawasan sesuai kode etik melalui jasa *assurance*, *probity* dan *consulting*, serta audit khusus dan audit objek tertentu lainnya atas perintah Direktur Utama di seluruh unit kerja di Perseroan, anak Perseroan dan afiliasinya.
2. Menguji, mengevaluasi, menilai dan melaporkan pelaksanaan pengawasan dan sistem manajemen risiko dan tata kelola Perseroan sesuai dengan standar audit.
3. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan pengawasan intern berbasis risiko (*Risiko Based Audit*) dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners and a recommendation from the Audit Committee. President Director may dismiss the Head of Internal Audit Unit with Board of Commissioners' approval. The appointment and dismissal of internal auditor is carried out by taking into account the opinion of Head of Internal Audit Unit and fulfilling the requirements set by the Company.

INTERNAL AUDIT CHARTER

In carrying out its duties in a professional, competent, independent and objective manner, Internal Audit Unit refers to the Internal Audit Charter Number PW.01/17/1/1/PMPL/UTMA/ PLND-22 dated January 17, 2022. The content of Internal Audit Charter is:

- Introduction;
- Vision, Mission, Objectives, Values and Strategy;
- Scope;
- Functions, Duties, Responsibilities, Authority, and Accountability;
- Code of Conduct;
- Organization;
- SPI Assurance and Quality Improvement Program; 8. Annual Supervisory Work Program (PKPT);
- Reporting and Monitoring; 10. SPI Communication with Other Parties;
- Working Relationship with Other Parties;
- Internal Audit Charter Evaluation; and
- Closing.

INTERNAL AUDIT DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Manage supervisory activities according to the code of conduct through assurance, probity and consulting services, as well as special audit and audit of certain other objects on orders from President Director in all work units in the Company, its subsidiaries and affiliates.
2. Test, evaluate, assess and report the implementation of supervision and risk management system and corporate governance in accordance with auditing standards.
3. Develop and implement an annual risk-based internal control work program (Risk Based Audit) and submit it to President Director and Board of Commissioners cq Audit Committee for consideration and advice.



4. Memberikan rekomendasi dan saran yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta melaporkan hasil pengawasan intern kepada *stakeholder* Satuan Pengawasan Intern.
 5. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit oleh auditor internal maupun eksternal dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.
 6. Melakukan pendampingan kepada auditor eksternal dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan menjadi fasilitator bagi auditor eksternal dalam berinteraksi dengan unit-unit kerja di Perseroan.
 7. Melakukan komunikasi, koordinasi dan pelaporan secara periodik atas kegiatan SPI kepada *stakeholder* Satuan Pengawasan Intern.
 8. Mengembangkan teknologi yang terintegrasi untuk perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan di Satuan Pengawasan Intern.
 9. Menjaga profesionalitas auditor dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup serta sertifikasi yang diperlukan.
 10. Melakukan *assessment* untuk mengevaluasi mutu dari Satuan Pengawasan Intern secara periodik.
 11. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar terciptanya sinergis atas kegiatan Satuan Pengawasan Inten.
4. Provide objective recommendations and suggestions on audited activities in all work units within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), as well as report the results of internal audit to stakeholders of Internal Audit Unit.
 5. Monitor, evaluate and report the results of monitoring on the follow-up to recommendations of audit results by internal and external auditors, and the results are reported to President Director and a copy is submitted to Board of Commissioners cq Audit Committee.
 6. Provide assistance to external auditors by providing the required information and become a facilitator for external auditors in interacting with work units in the Company.
 7. Communicating, coordinating and reporting periodically about SPI's activities to stakeholders of Internal Audit Unit.
 8. Develop integrated technology for planning, implementation, monitoring, and reporting of all activities in Internal Audit Unit.
 9. Maintain the professionalism of the auditors by providing sufficient knowledge, skills and experience as well as the necessary certifications.
 10. Conduct an assessment to evaluate the quality of Internal Audit Unit periodically.
 11. Provide guidance and coordination with Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create synergies on the activities of Internal Audit Unit.

KEWENANGAN INTERNAL AUDIT

1. Unit SPI memiliki akses tak terbatas ke seluruh audit di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terhadap semua fungsi, catatan, dokumen, properti, personil, laporan hasil audit yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya dan bertanggung jawab atas kerahasiaan catatan dan informasi tersebut.
2. Kepala SPI akan memastikan bahwa aktivitas audit internal bebas dari kondisi yang mengancam kemampuan audit internal untuk melakukan pekerjaannya dalam keadaan yang tidak memihak. Jika independensi atau objektivitas audit internal terganggu secara *Fact or Appearance*, Kepala SPI akan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Jika sebelumnya Kepala SPI memiliki peran dan/ atau tanggung jawab di luar audit internal, maka harus dibuat ketentuan untuk membatasi terjadinya penurunan independensi dan obyektivitas.
3. Menyusun dan merubah kebijakan pengawasan internal, antara lain pedoman, prosedur dan ketentuan lainnya terkait pekerjaan pengawasan internal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar tercipta pengawasan yang terintegrasi.
4. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi penugasan, menetapkan objek penugasan, menentukan ruang lingkup penugasan, serta menetapkan teknik penugasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan.

INTERNAL AUDIT AUTHORITIES

1. Internal Audit Unit has unlimited access to all auditees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to all functions, records, documents, property, personnel, audit reports related to the implementation of their works and is responsible for the confidentiality of such records and information.
2. Head of Internal Audit will ensure that the internal audit activity is free from conditions that threaten the ability of internal audit to carry out its work in an impartial manner. If the independence or objectivity of the internal audit is impaired by *Fact or Appearance*, the Head of SPI will report to President Director and Board of Commissioners. If previously the Head of Internal Audit had roles and/ or responsibilities other than internal audit, provisions must be made to limit the decrease in independence and objectivity.
3. Develop and change internal control policies, including guidelines, procedures and other provisions related to internal control work within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create integrated supervision.
4. Allocating resources, determining the frequency of assignments, determining the object of assignment, determining the scope of assignment, and determining the assignment techniques needed to achieve the assignment objectives.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan optimalisasi atas sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pekerjaan/pemeriksaan antara lain berasal dari auditor di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan. 6. Mengusulkan penugasan tambahan terkait <i>Assurance, probity, consulting</i>, audit khusus atau audit lainnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit jika terdapat hal yang terindikasi akan mengganggu pencapaian tujuan Perseroan. 7. Melakukan peningkatan kualitas melalui penggunaan dan penerapan teknologi terintegrasi terkait pekerjaan pengawasan internal yang akan digunakan oleh Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 8. Menentukan pola pembinaan, <i>monitoring</i> dan koordinasi kepada Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar terciptanya pengawasan internal yang akan terintegrasi. 9. Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq Komite Audit. 10. Melarang perangkap tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 11. Menolak terhadap penugasan di luar fungsi, tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan keputusan dan menjalankan fungsi operasional secara langsung atau tidak langsung. b. Memulai dan menyetujui transaksi yang tidak berkaitan dengan Satuan Pengawasan Intern. c. Memberikan perintah secara langsung kepada pekerja di luar personil Satuan Pengawasan Intern. d. Bertanggung jawab terhadap personil, departemen atau aktivitas yang menjadi objek pemeriksaan. e. Memberhentikan karyawan atau membubarkan departemen terkait dengan temuan audit. f. Menyusun dan menjalankan prosedur, sistem atau aktivitas operasional yang menjadi objek Perseroan. g. Melakukan pelaksanaan audit yang sedang ditangani oleh aparat hukum negara Republik Indonesia (RI). | <ol style="list-style-type: none"> 5. Optimizing the resources used in work/audit activities, including from internal or external auditors. 6. Propose additional assignments related to assurance, probity, consulting, special audit or other audits to President Director and Board of Commissioners cq. Audit Committee if there are issues that are indicated will interfere with the achievement of Company goals. 7. Improve quality through the use and application of integrated technology related to internal control work that will be used by Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 8. Determine the pattern of guidance, monitoring and coordination to Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create an integrated internal control. 9. Have access to communicate directly with President Director and Board of Commissioners cq Audit Committee. 10. Prohibit the dual duties and positions of auditors and implementers who serve in Internal Audit Unit from carrying out Company operational activities within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 11. Refused to assignments other than the functions, duties and responsibilities of Internal Audit Unit, namely: <ol style="list-style-type: none"> a. Decision making and carrying out operational functions directly or indirectly. b. Initiate and approve transactions that are not related to Internal Audit Unit. c. Give orders directly to employees other than Internal Audit Unit personnel. d. Responsible for personnel, departments or activities that are the object of audit. e. Terminate employees or dissolve departments related to audit findings. f. Develop and carry out procedures, systems or operational activities that belong to the object of the Company. g. Carry out audit that is being handled by the state legal apparatus of the Republic of Indonesia (RI). |
|---|--|

KOMPOSISI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

COMPOSITION AND PROFESSIONAL CERTIFICATION OF INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1	Widodo	Group Head Satuan Pengawasan Intern Group Head of Internal Audit	QIA
2	Rumaji	Departemen Head Pelaksanaan Pengawasan Intern Department Head of Internal Audit Implementation	QIA
3	Purbo Wijnarko	Departemen Head Perencanaan Pengawasan Intern Department Head of Internal Audit Planning	QIA
4	Yan Berhen Pangondian	Departemen Head Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Intern Department Head of Internal Audit Monitoring and Evaluation	QIA
5	Sari Pratiwi Susweni	Manager Administrasi dan Hubungan Antar Lembaga Manager of Administration and Inter-Agency Relations	



No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
6	Hanung Hamboro	Koordinator SPI Reg 2 SPI Reg 2 Coordinator	
7	Urip Nurhayat	Koordinator SPI Reg 2 SPI Reg 2 Coordinator	QIA
8	Deni Rahayu Santoso	Koordinator SPI Reg 1 SPI Reg 1 Coordinator	
9	Agus Sulistyو	Koordinator SPI Reg 2 SPI Reg 2 Coordinator	
10	Hasrullah	Koordinator SPI Reg 4 SPI Reg 4 Coordinator	
11	Sigit Poernomo	<i>Principle Expert II Audit</i>	QIA
12	Sugiarto	<i>Senior Expert I Audit</i>	
13	Nofal Hayin K	Auditor Utama Main Auditor	QIA
14	Afif Somadi	<i>Principle Expert II Audit</i>	
15	Yan Ekalaya Hamong Panambang	<i>Principle Expert III Audit</i>	
16	Kresnajaya Prasetia Pancakarsa	<i>Principle Expert III Audit</i>	
17	Suwondo Widjatmoko	<i>Principle Expert III Audit</i>	QIA
18	Donny Simon Mayman H	<i>Senior Expert I Audit</i>	
19	Yulias Caesar Sihombing	<i>Principal Expert III Audit</i>	QIA
20	Pramudito	<i>Senior Expert I Audit</i>	
21	Eko Henri Sufiawan	<i>Principle Expert III Audit</i>	QIA
22	Rery Indra Kusuma	<i>Senior Expert I Audit</i>	QIA
23	Ibnu Sukarma	<i>Senior Expert II Audit</i>	QIA
24	Tanjung Halomoan Ambarita	<i>Senior Expert III Audit</i>	QIA
25	Fitri Herayati Nasution	<i>Senior Expert III Audit</i>	QIA
26	Muhammad Badrum	<i>Senior Expert III Audit</i>	
27	Rustini	<i>Senior Expert III Audit</i>	
28	Khirmayanti Dewi	<i>Senior Expert II Audit</i>	QIA
29	Septa Andreas Sitepu	<i>Senior Expert I Audit</i>	QIA
30	Holly Tantyaka Y Keswara	<i>Senior Expert II Audit</i>	QIA
31	Baihaqi	<i>Senior Expert III Audit</i>	QIA
32	Darul Ikhran Angkasa B	<i>Senior Expert III Audit</i>	
33	Ervina Lady M S	<i>Auditor Pratama</i>	QIA
34	Arenda Haryo Prabowo	<i>Senior Expert II Audit</i>	
35	Irfan Firdaus	<i>Senior Expert II Audit</i>	
36	Adnan Lubis	<i>Senior Expert III Audit</i>	

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
37	Sapri Ependi	Senior Expert III Audit	QIA
38	Rusli	Senior Expert III Audit	
39	Herryansyah	Audit Expert I	
40	Rosseno Ratman	Senior Expert III Audit	QIA
41	Aldimas Kharunia Zaman	Senior Expert III Audit	QIA
42	Deski Rizaldi	Expert I Audit	
43	Ramdhana Feri Martin	Senior Expert III Audit	QIA
44	Abd. Rachman	Expert I Audit	
45	Pandita Wisna Patria	Senior Expert III Audit	QIA
46	Jufrianto Siahaan	Senior Expert III Audit	
47	Kurniawan Haryo Yudanto	Expert III Audit	QIA
48	Nurwan Bayu Setyawan	Senior Expert III Audit	
49	Bara Wijianto	Senior Expert III Audit	
50	Samsul	Expert III Audit	QIA
51	Henny Nur Aini	Expert II Audit	QIA
52	Wimbi Perdana Putra	Expert I Audit	
53	Indri Andriani	Senior Officer II Perencanaan Pengawasan Intern Senior Officer II Internal Audit Planning	
54	Mohamad Jamil	Senior Office III dan Adm dan Hubungan Antar Lembaga Bidang Pengawasan pada Group Satuan Pengawasan Intern Kantor Pusat Senior Office III Adm and Inter-Agency Relations for Internal Audit Group at Head Office	
55	Fransisca Dina K	Senior Office III dan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Intern Senior Office III and Internal Audit Monitoring and Evaluation	
56	Arief Budiman	Senior Officer III Adm dan Hubungan Antar Lembaga Bidang Pengawasan pada Group Satuan Pengawasan Intern Kantor Pusat Senior Office III Adm and Inter-Agency Relations for Internal Audit Group at Head Office	



KODE ETIK AUDITOR

AUDITOR'S CODE OF CONDUCT

Prinsip Dasar Basic Principles	Aturan Prilaku Behavioral Guidance
<p>Integritas Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan dengan membangun kepercayaan untuk membuat pendapat (<i>judgment</i>) yang handal.</p> <p>Integrity Integrity of Internal auditors build confidence by building trust to generate reliable opinion (<i>judgment</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bekerja dengan jujur, tekun dan bertanggungjawab. ▪ Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sebagaimana yang diatur oleh hukum dan profesi. ▪ Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan apapun yang mencemarkan profesi Auditor Internal atau Perseroan. Menaruh hormat dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan Perseroan yang etis dan telah sesuai dengan hukum (<i>legitimate</i>). ▪ Work honestly, diligently and responsibly. ▪ Comply with the law and disclose information as required by law and the profession. ▪ Not involved in activities that violate the law or any activities that defame the profession of Internal Auditor or the Company. Respect and play a role in achieving the Company's goals that are ethical and in accordance with the law (<i>legitimate</i>).
<p>Objektivitas Auditor Internal menunjukkan objektivitas yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor Internal melakukan penilaian secara seimbang (<i>balance</i>) atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain, dalam membuat pendapat (<i>judgment</i>).</p> <p>Objectivity Internal auditors demonstrate high objectivity in obtaining, evaluating and communicating information about the audited activity or process. Internal Auditors perform a balanced assessment and are not influenced by personal interests or others, in making an opinion (<i>judgment</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengurangi atau dianggap mengurangi objektivitas Auditor Internal dalam melakukan penilaian, termasuk dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. ▪ Tidak menerima apapun yang dapat melemahkan atau dianggap melemahkan pertimbangan profesional. ▪ Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan atas aktivitas yang diperiksa. ▪ Not involved in activities that may reduce or be deemed to reduce the objectivity of Internal Auditor in conducting an assessment, including in activities or relationships that may cause a conflict of interest. ▪ Do not accept anything that could undermine or be deemed to impair professional judgment. ▪ Disclosing all known material facts, which if not disclosed can cause distortion of reporting on the activities being examined.
<p>Kerahasiaan Auditor Internal menghormati nilai dan kepentingan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.</p> <p>Confidentiality Internal auditors respect the value and the importance of information received and do not disclose such information without proper authorization unless there is a legal or professional obligation to disclose the information.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertindak hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan tugas. ▪ Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau mengganggu pencapaian sasaran Perseroan yang etis dan berlegitimasi. ▪ Act with caution in using and safeguarding the information obtained during the execution of tasks. ▪ Do not use information for personal gain or in any way that is against the law or interferes with the achievement of legitimate and ethical Company goals.
<p>Kompetensi Auditor internal menerapkan pengetahuan kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.</p> <p>Competence Internal auditors apply the knowledge, skills and experience required in providing internal audit services.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya terlibat dalam pemeriksaan apabila memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut. ▪ Melaksanakan fungsi pengawasan intern sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan pengelolaan SPI. ▪ Secara berkesinambungan meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pekerjaan; bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan standar profesional yang berlaku. ▪ Only engage in audit if they have the knowledge, skills and experience required for the audit. ▪ Carry out the internal control function at least in accordance with the requirements for IAU management. ▪ Continuously improve skills as well as effectiveness and quality of work; act sincerely and in accordance with the method of carrying out the work and applicable professional standards.

Prinsip Dasar Basic Principles	Aturan Prilaku Behavioral Guidance
<p>Perilaku Profesional Auditor Internal mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang dapat mengurangi kepercayaan kepada profesi.</p> <p>Professional Behavior Internal Auditors comply with applicable regulations and avoid any behavior that can reduce confidence in the profession.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan fungsi pengawasan intern sesuai dengan prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku. ▪ Menghindari perilaku apapun yang dapat mengurangi kepercayaan kepada profesi auditor. ▪ Dilarang menerima seiap pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan pekerjaannya baik dari dalam maupun dari luar Perseroan. ▪ Harus mematuhi hukum dan menjunjung tinggi norma professional Auditor Internal. ▪ Dilarang merangkap tugas dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, anak Perseroan maupun Perseroan terafiliasi bagi auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Internal Audit. ▪ Carry out the internal control function in accordance with applicable procedures, provisions and regulations. ▪ Avoid any behavior that can reduce confidence in the auditor profession. ▪ Forbidden to accept any gifts in any form from other parties related to their work, both inside and outside the Company. ▪ Must comply with the law and uphold the professional norms of Internal Auditor. ▪ Prohibited to hold concurrent duties and positions in the implementation of the Company's operational activities, subsidiaries and affiliated companies for auditors and executives who serve in the Internal Audit Unit.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2023

Realisasi atas Rencana Kerja Manajemen (RKM) Satuan Pengawasan Internal selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

BRIEF REPORT OF INTERNAL AUDIT ACTIVITIES IN 2023

Realization of Management Work Plan (RKM) Internal Audit during 2023 is as follows.

No.	Rencana Program Program Plan	% Akumulasi % Accumulation	Deskripsi Progress/Pencapaian Description of Progress/Achievement
1.	Pelaksanaan Audit Rutin Routine Audit	100%	<p>Telah dilaksanakan Audit Rutin pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pusat diantaranya 7 Direktorat (Direktorat Utama, Direktorat Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko, Direktorat SDM & Umum, Direktorat Strategi, Direktorat Investasi dan Direktorat Pengelola); 2. Regional 1 diantaranya 12 Unit Kerja pada Regional 1 (Kantor Regional 1, Cabang Pelabuhan Belawan, Cabang Pelabuhan TPK Belawan, Cabang Pelabuhan Dumai, Cabang Pekanbaru, Pelabuhan Cabang Pelabuhan TPK Perawang, Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Cabang Pelabuhan Sei Pakning, Cabang Pelabuhan Sibolga, Cabang Pelabuhan Tanjung Pinang, Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung, Cabang Pelabuhan Batam) dan audit performansi dan kepatuhan pada 1 anak Perseroan PT Prima Multi Terminal; 3. Other Portofolio Business: KSO TPK Koja, PDS, TMDS, PMLI dan EDII 4. Audit Pada PT Prima Indonesia Logistik dan PT Prima Multi Peralatan. 5. Audit pada Area Regional 4 19 <i>Auditable Unit</i> (Regional 4, Cabang Bontang Cabang Tarakan, Cabang Ternate, Cabang Pare-pare, Cabang Nunukan TPK Makassar, MNP, TPK Ambon, SPJM, EII, Cabang Makassar, Cabang Kendari, TPK Kendari Cabang Bitung, TPK Bitung, Cabang Balikpapan, Cabang Samarinda, Cabang Ambon). 6. Audit pada Area Regional 3: 12 <i>Auditable Unit</i>. <p>Routine Audits have been conducted on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head Office including 7 Directorates (Main Directorate, Vice President Directorate, Finance & Risk Management Directorate, HC & General Affairs Directorate, Strategy Directorate, Investment Directorate and Managing Directorate); 2. Regional 1 including 12 Work Units in Regional 1 (Regional 1 Office, Belawan Port Branch, Belawan TPK Port Branch, Dumai Port Branch, Pekanbaru Branch, Perawang TPK Port Branch, Tanjung Balai Karimun Port Branch, Sei Pakning Port Branch, Sibolga Port Branch, Tanjung Pinang Port Branch, Kuala Tanjung Port Branch, Batam Port Branch) and performance and compliance audits on 1 subsidiary PT Prima Multi Terminal; 3. Other Portfolio Business: KSO TPK Koja, PDS, TMDS, PMLI and EDII. 4. Audit on PT Prima Indonesia Logistik and PT Prima Multi Equipment. 5. Audit on Regional Area 4 19 Auditable Units (Regional 4, Bontang Branch Tarakan Branch, Ternate Branch, Pare-pare Branch, Nunukan Branch TPK Makassar, MNP, TPK Ambon, SPJM, EII, Makassar Branch, Kendari Branch, TPK Kendari Bitung Branch, TPK Bitung, Balikpapan Branch, Samarinda Branch, Ambon Branch). 6. Audit in Regional Area 3: 12 Auditable Units.



No.	Rencana Program Program Plan	% Akumulasi % Accumulation	Deskripsi Progress/Pencapaian Description of Progress/Achievement
2.	Pelaksanaan Audit Khusus/ Tematik Special/Thematic Audits	100%	<p>Telah dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> Audit Tematik: <i>Inventory</i>, Pengelolaan dan Pemindahan Aset, Pengelolaan Proyek Investasi & Implementasi IT; PSN; Audit Khusus: ILCS, Pengelolaan SPPD, Investasi Pangkal Balam, penyelesaian proyek pengerukan pada PT Rukindo, dan Audit Khusus STS di Nipah. <p>Has been conducted</p> <ol style="list-style-type: none"> Thematic Audit: Inventory, Asset Management and Transfer, Investment Project Management & IT Implementation; PSN; Special Audit: ILCS, SPPD Management, Pangkal Balam Investment, dredging project completion at PT Rukindo, and Special Audit of STS in Nipah.
3.	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Consultation Activities	100%	<p>Kegiatan Konsultansi Pekerjaan Penataan Interior Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada Gedung Pelindo Tower dan Kegiatan Konsultansi Penyediaan Fasilitas bagi Direksi dan Komisaris serta Organ Pendukung Komisaris di <i>Subholding</i>, Anak Perseroan, Cucu Perseroan, Afiliasi, dan KSO PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p> <p>Consultancy Activities for Interior Arrangement of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Head Office at Pelindo Tower Building and Consultancy Activities for Provision of Facilities for Board of Directors and Board of Commissioners and Supporting Organs of Board of Commissioners in Subholding, Subsidiaries, Sub- subsidiaries, Affiliates, and KSOs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p>
4.	Strategi pelaksanaan audit pada Pelindo <i>Group</i> d disesuaikan dengan dinamika Perseroan Pelindo <i>Group</i> Audit strategy in Pelindo Group is adjusted to the Pelindo Group Company dynamics	100%	<ol style="list-style-type: none"> Telah disampaikan nota dinas strategi pelaksanaan audit kepada Direktur Utama pada setiap pelaksanaan audit; Penyusunan perubahan kegiatan pelaksanaan audit 2024 melalui PKPT 2024. <ol style="list-style-type: none"> An audit strategy memorandum has been submitted to the President Director for each audit; Preparation of changes to audit implementation activities 2024 through the 2024 PKPT.
5.	<i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal Monitoring Follow- up of Internal Audit Recommendations	100%	<p>Telah dilakukan <i>monitoring</i> untuk temuan internal (LHA SPI) pada Regional 14 serta entitas lain pada grup PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara periodik;</p> <p>Monitoring has been carried out for internal findings (LHA SPI) in Regional 14 and other entities in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) group periodically.</p>
6.	<i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Eksternal Monitoring Follow- up of External Audit Recommendations	100%	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan <i>monitoring</i> untuk temuan eksternal (BPK dan KAP); Telah dilakukan komunikasi dan diskusi terkait tindak lanjut atas Audit Eksternal dengan KAP dan BPK pada TW IV 2023. <ol style="list-style-type: none"> Monitoring has been carried out for external findings (BPK and KAP); Communication and discussion has been carried out regarding the follow-up to the External Audit with KAP and BPK in the fourth quarter of 2023.
7.	Peningkatan Implementasi IT (AMS dan Data Analitik) Improved IT Implementation (AMS and Data Analytics)	100%	<p>Telah dilakukan: Penambahan <i>user ID</i> AMS untuk auditor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi implementasi AMS untuk Auditor; Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan aplikasi AMS pada <i>Auditee</i>; Telah dilakukan penyempurnaan skenario data analitik pada <i>software</i> IDEA. <p>Has been conducted: Addition of AMS user ID for auditors:</p> <ol style="list-style-type: none"> Socialization of AMS implementation for auditors; Report on the Implementation of Socialization/Training of AMS application to Auditee. Improvement of analytical data scenarios in IDEA software.
8.	<i>Review</i> dan sosialisasi infrastruktur SPI <i>charter</i> , (audit pedoman pengelolaan Unit SPI, SOP/WI perencanaan pelaksanaan audit, dan <i>audit reporting, monitoring</i> hasil audit) Review and socialization of SPI charter infrastructure, (audit of SPI Unit management guidelines, SOP/WI audit planning, and audit reporting, monitoring audit results)	100%	<ol style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan Surat Perintah <i>Review</i> dan sosialisasi infrastruktur SPI (<i>audit charter</i>, pedoman pengelolaan Unit SPI, SOP/WI perencanaan audit, pelaksanaan audit & <i>reporting, monitoring</i> hasil audit). Telah disusun draft Revisi <i>Audit Charter</i> yang telah dilakukan penyesuaian dengan Permen 2 Tahun 2023; Telah dilakukan diskusi untuk penyesuaian SOP dengan Sisman dan Altha; Sudah di <i>upload</i> ke sistem IMS; Telah dilakukan <i>review</i> SOP dan WI pada Group SPI yang telah disesuaikan dengan Permen 2 Tahun 2023. <ol style="list-style-type: none"> A Review Order has been issued and SPI infrastructure socialized (audit charter, SPI Unit management guidelines, SOP/WI for audit planning, audit implementation & reporting, monitoring audit results); A draft revision of the Audit Charter has been prepared, which has been adjusted to Permen 2 of 2023; Discussions have been held for SOP adjustments with Sisman and Altha; Uploaded to the IMS system; SOP and WI reviews have been carried out in the SPI Group which has been adjusted to Permen 2 of 2023.

No.	Rencana Program Program Plan	% Akumulasi % Accumulation	Deskripsi Progress/Pencapaian Description of Progress/Achievement
9.	Penyusunan PKPT Terintegrasi Tahun 2024 Preparation of Integrated PKPT 2024	100%	<ol style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan Surat Perintah Penyusunan PKPT Terintegrasi Tahun 2024; Telah dilakukan pengumpulan data dan pendukung penyusunan Terintegrasi 2024 dokumen untuk PKPT; Telah dilakukan penyusunan PKPT Terintegrasi 2024. <ol style="list-style-type: none"> An order has been issued for the preparation of 2024 Integrated PKPT; Data collection and supporting documents for the 2024 Integrated PKPT have been collected; The preparation of the Integrated PKPT 2024.
10.	Review Roadmap Unit SPI (sesuai dinamika Perseroan Pelindo Group) Review of SPI Unit Roadmap (according to the Pelindo Group Company dynamics)	100%	Telah dilakukan penyesuaian Roadmap Unit SPI dengan RJPP dan dinamika Perseroan. SPI Unit Roadmap has been adjusted with RJPP and Company dynamics.
11.	Penilaian Maturity Level dari Pihak Eksternal Maturity Level Assessment from External Parties	100%	<ol style="list-style-type: none"> Telah dikirimkan Permintaan Pendampingan dan sosialisasi Penilaian Maturity Level kepada BPKP; Pendampingan dan sosialisasi Penilaian Maturity Level oleh BPKP; Telah dilakukan penyampaian dokumen assessment dalam Sistem Penilaian Maturitas SPI di BPKP. <ol style="list-style-type: none"> Request for assistance and socialization of Maturity Level Assessment has been sent to BPKP; Assistance and socialization of Maturity Level Assessment by BPKP; Submission of assessment documents in the SPI Maturity Assessment System at BPKP has been carried out.
12.	Analisis kebutuhan dan penataan personil SPI yang ditempatkan di Holding & Regional Analysis of the needs and structuring of SPI personnel placed in Holding & Regional	100%	Telah disampaikan nota dinas usulan kebutuhan personil SPI kepada SDM dan Evaluasi kekuatan personil SPI secara periodik. An official memorandum has been submitted proposing SPI personnel needs to HC and periodic evaluation of SPI personnel strength.
13.	Pengembangan risk control matrix (RCM) pada bidang bisnis Perseroan Development of risk control matrix (RCM) in the Company's business field	100%	<ol style="list-style-type: none"> Telah disusun dokumen analisa pada Audit Tematik 2023; Telah disusun sebaran temuan dari hasil audit tematik berdasarkan dokumen RCM Eksisting; Telah disesuaikan RCM pada penyusunan PKPT 2024. <ol style="list-style-type: none"> An analysis document has been prepared for the 2023 Thematic Audit; The distribution of findings from thematic audit results based on Existing RCM documents has been compiled; RCM has been adjusted in the preparation of 2024 PKPT.
14.	Program Sinergi Audit Internal antara SPI Holding dengan SPI Subholding dan/atau SPI Anper Internal Audit Synergy Program between SPI Holding and SPI Subholding and	100%	Telah dilakukan rapat koordinasi antara SPI Holding dan Subholding serta telah disiapkan draft PKS Sinergi Audit dengan Subholding, Penandatanganan PKS Sinergi Audit dan Integrasi Program Kerja Pengawasan dalam PKPT Terintegrasi. A coordination meeting has been held between SPI Holding and Subholding and a draft of the Audit Synergy Agreement with Subholding has been prepared, the signing of Audit Synergy Agreement and Integration of Supervisory Work Program in Integrated PKPT.

RAPAT BERSAMA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT

- Fungsi Audit Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Komunikasi antara Kepala Satuan Pengawasan Internal dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris dapat dilakukan secara formal dan informal
- Satuan Pengawasan Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit secara periodik kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

JOINT MEETINGS OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR AUDIT COMMITTEE

- Internal Audit function in carrying out its duties and responsibilities and authority can communicate and coordinate with President Director and Board of Commissioners.
- Communication between Head of Internal Audit with President Director and Board of Commissioners can be done formally and informally.
- Internal Audit Unit submits periodic Audit Reports to President Director and Board of Commissioners.



4. Secara berkala Satuan Pengawasan Intern dengan Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melakukan rapat koordinasi melalui rapat *Board of Director (BOD)* dan/ atau Rapat Komisaris, serta menyampaikan hasil *survey* kepuasan *Auditee*.

4. Periodically, Internal Audit Unit with President Director and/ or Board of Commissioners conducts coordination meetings through Board of Director (BOD) meetings and/ or Board of Commissioners Meetings, and submits the results of Auditee satisfaction surveys.

Selama tahun 2023, SPI telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Direksi dan Komite Audit dengan rincian sebagai berikut.

During 2023, SPI has conducted coordination meetings with Audit Committee, with the following details.

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	Selasa, 30 Mei 2023 Tuesday, May 30, 2023	Rapat Koordinasi Triwulan I Tahun 2023 Komite Audit dan Satuan Pengawasan Intern. Coordination Meeting for the First Quarter of 2023 Audit Committee and Internal Audit Unit.
2	Senin, 31 Juli 2023 Monday, July 31, 2023	<i>Update</i> temuan BPK. Update on BPK findings.
3	Senin, 28 Agustus 2023 Monday, August 28, 2023	Rapat Koordinasi Triwulan II Tahun 2023 Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawasan Intern. Coordination Meeting for the Second Quarter of 2023 Audit Committee and Internal Audit Unit.
4	Jumat, 10 November 2023 Friday, November 10, 2023	Rapat Koordinasi Triwulan III Tahun 2023 Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawasan Intern. Coordination Meeting for the Third Quarter of 2023 Audit Committee with Internal Audit Unit.
5	Senin, 18 Desember 2023 Monday, 18 December 2023	<i>Update</i> temuan SPI Triwulan III Tahun 2023 serta <i>progress</i> temuan SPI tahun sebelumnya. Update on SPI findings in the third quarter of 2023 and progress on SPI findings in the previous year.

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Sampai dengan Desember 2023, *monitoring progress* tindak lanjut LHA telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

Tahun LHA Year LHA	Progress Tindak Lanjut Temuan SPI Progress of Follow-Up on SPI Findings			
	Regional 1 Region 1	Regional 2 Region 2	Regional 3 Region 3	Regional 4 Region 4
2016	-	-	96%	-
2017	-	-	93%	100%
2018	-	-	-	-
2019	-	-	94%	100%
2020	93%	100%	93%	100%
2021	100%	86%	62%	97%
2022	94%	-	37%	75%

Tahun LHA Year LHA	Progress Tindak Lanjut Temuan SPI Progress of Follow-Up on SPI Findings			
	SPMT	SPSL	SPTP	SPJM
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	100%	100%	100%	100%
2021	0%	100%	39%	100%
2022	0%	-	72%	82%

Tahun LHA Year LHA	Progress Tindak Lanjut Temuan SPI Progress of Follow-Up on SPI Findings	
	Kantor Pusat Head Office	NON CLUSTER
2016	-	-
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-
2020	-	94%
2021	18%	87%
2022	-	-

MONITORING TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Berdasarkan risalah pembahasan hasil pemantauan tindak lanjut LHP BPK RI pada pembahasan terakhir sesuai dengan Surat BPK Nomor. 102/S/IX-XX/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023, maka dapat disampaikan realisasi penyelesaian tindak lanjut sampai dengan

AUDIT FINDINGS AND THE FOLLOW-UP

As of December 2023, monitoring of LHA follow-up progress has been carried out with the following results:

FOLLOW-UP MONITORING OF BPK RI'S AUDIT REPORT

Based on the minutes of discussion on the follow-up monitoring results of BPK RI's LHP at the last discussion in accordance with BPK Letter Number. 102/S/IX-XX/12/2023 dated December 29, 2023 regarding the Follow-up Monitoring Report on Audit Recommendations for the first semester of 2023, it can be conveyed that the realization of follow-up completion up to the



Triwulan II tahun 2023 sebanyak 532 rekomendasi dari total 633 rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut:

second quarter of 2023 is 532 recommendations out of a total of 633 recommendations, with the following details:

Tahun LHA Year LHA	Progress Tindak Lanjut Temuan SPI Progress of Follow-Up on SPI Findings			
	Regional 1 Region 1	Regional 2 Region 2	Regional 3 Region 3	Regional 4 Region 4
JENIS LHP	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 Tahun 2010, 2011, dan 2012 (Triwulan I) Tahun 2012 s.d Semester I Tahun 2014 Tahun 2013 dan 2014 No. 33/AUDITAMA VII/PDPT/09/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 TAHUN 2010 DAN Semester I Tahun 2011 Tahun 2010, 2011, dan 2012 (Triwulan I) Tahun 2012 s.d Semester I Tahun 2014 Tahun 2013 dan 2014 NO 33/AUDITAMA VII/PDPT/09/2020 TANGGAL 27 AGUSTUS 2020 	<ul style="list-style-type: none"> 2004 2007-2008 PKBL 2010 – 2012 2010 – 2014 PT JJCT dan KSO koja 2016 – 2017 2018 – 2019 2004 2007-2008 PKBL 2010 – 2012 2010 – 2014 PT JJCT dan KSO koja 2016 – 2017 2018 – 2019 	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2012 & Semester 2013 Tahun 2012 s.d Semester 1 Tahun 2014 Tahun 2014 s.d. Triwulan 1 2016 Tahun 2015 s.d Semester 1 Tahun 2018 Tahun 2019 s.d. 2020 Tahun 2012 & Semester 2013 Tahun 2012 s.d. Semester 1 Tahun 2014 Tahun 2014 s.d. Triwulan 1 2016 Tahun 2015 s.d Semester 1 Tahun 2018 Tahun 2019 s.d. 2020 	<ul style="list-style-type: none"> 2006 (Tahun buku 2004, 2005, 2006) Tahun 2019 (Tahun buku 2017, 2018, 2019) 2006 (Tahun buku 2004, 2005, 2006) Tahun 2019 (Tahun buku 2017, 2018, 2019)
Progress Selesai Progress Complete	90% (160 dari 177 rekomendasi)	83% (197 dari 236 rekomendasi)	78% (133 dari 169 rekomendasi)	82% (42 dari 51 rekomendasi)

MONITORING TINDAK LANJUT LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KAP

Pada Triwulan IV tahun 2023, progres tindak lanjut rekomendasi terhadap Laporan Auditor Independen KAP 2022 sebanyak 97,2% atau sebanyak 35 (tiga puluh lima) Temuan dari total 36 (tiga puluh enam) Temuan.

- Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal telah ditindaklanjuti 100% atau sebanyak 1 (satu) Temuan dari total 1 (satu) Temuan.
- Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan telah ditindaklanjuti 83% atau sebanyak 5 (lima) Temuan dari total 6 (enam) Temuan.
- Laporan Auditor Independen atas Memorandum Hasil Audt Umum atas Laporan Keuangan Tahun 2022 telah ditindaklanjuti 100% atau sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Temuan dari total 29 (dua puluh sembilan) Rekomendasi

GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

Group Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan berfungsi untuk mengevaluasi, mengelola dan merekomendasikan penyusunan dan pengelolaan program kerja bidang manajemen risiko di lingkungan Perseroan untuk mendukung operasionalisasi dan pencapaian tujuan Perseroan untuk memastikan pencapaian visi dan misi Perseroan dan aspirasi pemegang saham.

FOLLOW-UP MONITORING OF THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

In the fourth quarter of 2023, the follow-up progress of recommendations on the 2022 KAP Independent Auditor's Report was 97.2% or 35 (thirty five) findings out of a total of 36 (thirty six) findings.

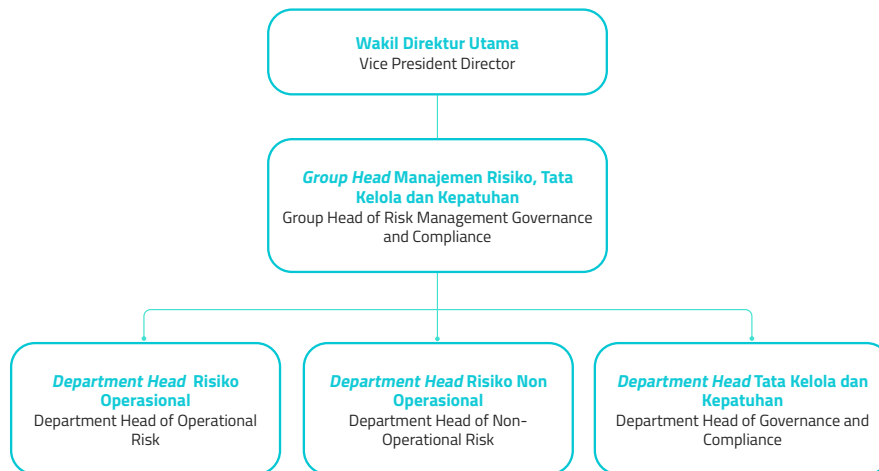
- The Independent Auditor's Report on Compliance with Internal Control has been followed up 100% or as many as 1 (one) Finding out of a total of 1 (one) Finding.
- The Independent Auditor's Report on Compliance with Laws and Regulations has been followed up 83% or 5 (five) Findings out of a total of 6 (six) Findings.
- The Independent Auditor's Report on General Audit Memorandum on Financial Statements for 2022 has been followed up 100% or as many as 29 (twenty nine) Findings out of a total of 29 (twenty nine) Recommendations.

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP

Risk Management Governance and Compliance Group functions to evaluate, manage and recommend the preparation and management of work programs in risk management and insurance management within the Company to support the operationalization and achievement of the Company's objectives to ensure the achievement of the Company's vision and mission and shareholders' aspirations.

STRUKTUR ORGANISASI GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP ORGANIZATIONAL STRUCTURE



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

1. Bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait risiko operasional dan non-operasional, penerapan tata kelola korporasi dan kepatuhan terintegrasi.
2. Bertanggung jawab terhadap budaya dan kesadaran risiko, pengelolaan keberlangsungan bisnis, standarisasi praktik terbaik mitigasi risiko serta pengelolaan komunikasi dan konsultasi risiko.
3. Bertanggung jawab untuk memastikan ketaatan dalam mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi sejalan dengan penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
4. Bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko, tata kelola dan kepatuhan (Gratifikasi, *Whistleblowing System*, Anti Penyuapan/Anti *Fraud*, serta GCG) terintegrasi di lingkungan Perseroan.
5. Bertanggung jawab terhadap kegiatan peningkatan kompetensi manajemen risiko, tata kelola dan kepatuhan terintegrasi serta inovasi risiko.
6. Bertanggung jawab menyusun dan mengimplementasikan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG).
7. Bertanggung jawab untuk menyusun, mengimplementasikan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan manajemen risiko, tata kelola dan kepatuhan terintegrasi di lingkungan Perseroan.
8. Bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi risiko pada setiap aktivitas terkait dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
9. Bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko serta mitigasi atas risiko.
10. Melakukan reviu dan evaluasi beserta mitigasi atas kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak pada *revenue* dan biaya yang akan diatur secara tersendiri di dalam Kebijakan dan SPO.

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Responsible for drafting policies, Standard Operating Procedures (SOPs), Work Programs, and Key Performance Indicators (KPIs) related to their main duties and responsibilities regarding operational and non-operational risks, corporate governance implementation, and integrated compliance.
2. Responsible for risk culture and awareness, business continuity management, standardization of best risk mitigation practices, as well as risk communication and consultation management.
3. Responsible for ensuring compliance with regulations regarding information disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance Principles.
4. Responsible for the integrated implementation of risk management, governance, and compliance (Gratuities, Whistleblowing System, Anti-Bribery/Anti-Fraud, and GCG) within the Company's environment.
5. Responsible for activities to competency enhancement of risk management, integrated governance and compliance, as well as risk innovation.
6. Responsible for preparing and implementing Good Corporate Governance (GCG) guidelines.
7. Responsible for preparing, implementing, monitoring, and evaluating risk management, governance, and integrated compliance policies within the Company's environment.
8. Responsible for identifying risks in every activity related to duties, authorities, and responsibilities.
9. Responsible for measuring risk by considering the magnitude of impact and the likelihood of risk opportunities, as well as mitigating risks.
10. Conducting review, evaluation, and mitigation of specific activities impacting revenue and costs, which will be separately regulated in Policies and SPOs.



11. Bertanggung jawab untuk mengelola strategi pengendalian secara berkesinambungan terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi atau signifikan.
12. Bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi atas penerapan budaya manajemen risiko.
13. Melaporkan hasil identifikasi, pemantauan dan tindak lanjut pengendalian risiko secara periodik;
14. Bertanggung jawab memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata Kelola Perusahaan.
15. Bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dari Satuan Pengawasan Intern.
16. Melaksanakan pembinaan Pekerja di *Group* yang dipimpin sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia.
17. Bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada Wakil Direktur Utama atas pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya.

11. Responsible for continuously managing control strategies for high-priority risks or significant risks;
12. Responsible for socializing and internalizing the risk management culture implementation;
13. Reporting periodically on the results of risk identification, monitoring, and follow-up controls;
14. Responsible for contributing to the improvement/enhancement of Corporate Governance processes;
15. Responsible for following up on recommendations regarding findings from the Internal Audit Unit;
16. Conducting training for Employees in the Group in accordance with Human Resources policies/guidelines;
17. Responsible for reporting to the Vice President Director on the implementation of duties and responsibilities;

PROFIL KEPALA *GROUP* MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

HEAD OF RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP PROFILE



USMAN SARONI

Group Head Manajemen Risiko Tata Kelola dan Kepatuhan
Group Head of Risk Management, Governance and Compliance



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Bandung, 13 Februari 1978/45 tahun per Desember 2023.	Bandung, February 13, 1978/45 years old as of December 2023.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Port Management</i>, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta (1996); ▪ <i>Shipping and Logistic</i>, World Maritime University, Swedia (2015). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Port Management, College of Shipping, Jakarta (1996); ▪ Shipping and Logistics, World Maritime University, Sweden (2015).
Sertifikasi Certification	<i>Qualified Risk Management Professional.</i>	Qualified Risk Management Professional.

<p>Pengalaman Kerja Work Experience</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Manager Ship Planning</i> JICT (Jakarta International Container Terminal) (2009-2019); ▪ <i>Manager Yard Planning</i> (Jakarta International Container Terminal) (2010-2011); ▪ <i>Manager Control Tower</i> (Jakarta International Container Terminal) (2011-2012); ▪ <i>Senior Manager</i> Petikemas IPC (2012-2014); ▪ <i>Vice President Quality Management</i> IPC (2016-2019); ▪ <i>Vice President</i> Pengelolaan Anak Perseroan dan Cabang IPC (2019-2021); ▪ <i>Direktur Keuangan dan SDM</i> PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2021-2022); ▪ <i>Group Head</i> Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (2022 - Februari 2023); ▪ <i>Group Head</i> Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Maret 2023 - Sekarang). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Manager Ship Planning</i> JICT (Jakarta International Container Terminal) (2009-2019); ▪ <i>Manager Yard Planning</i> (Jakarta International Container Terminal) (2010-2011); ▪ <i>Manager Control Tower</i> (Jakarta International Container Terminal) (2011-2012); ▪ <i>Senior Manager</i> Petikemas IPC (2012-2014); ▪ <i>Vice President Quality Management</i> IPC (2016-2019); ▪ <i>Vice President</i> Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang IPC (2019-2021); ▪ <i>Direktur Keuangan dan SDM</i> PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2021-2022); ▪ <i>Group Head</i> Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (2022 - Februari 2023); ▪ <i>Group Head</i> Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Maret 2023 - Sekarang).
<p>Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment</p>	<p>SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia Nomor: KP.10/02/31/7/1/RKTK/UTMA/PLND-23 Tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p>	<p>Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia No.KP.10/02/31/7/1/RKTK/UTMA/PLND-23 Concerning the Transfer of Duties/Job of Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p>

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Dalam periode tahun 2023 ini, telah dilaksanakan beberapa program pelatihan dan sertifikasi dengan rincian sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT IN RISK MANAGEMENT

In 2023, several training and certification programs have been implemented with the following details:

No	Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification	Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Date
1	<i>Qualified Chief Risk Officer (QCRO)</i>	BOD-1 Holding, Direktur Anak Perusahaan BOD-1 Holding, Director of Subsidiary	<i>Batch 1</i> : 6-10 Maret 2023 <i>Batch 2</i> : 13-16 Juni 2023 <i>Batch 3</i> : 16-18 Oktober 2023 Batch 1 : March 6-10, 2023 Batch 2 : June 13-16, 2023 Batch 3 : October 16-18, 2023
2	<i>Investment Risk Management</i>	<i>Risk Officer Holding, Subholding, Regional</i> Risk Officer Holding, Subholding, Regional	<i>Batch 1</i> : 29 Mei 2023 <i>Batch 2</i> : 30 Mei 2023 Batch 1: May 29, 2023 Batch 2 : May 30, 2023
3	<i>Risk-Based Budgeting</i>	<i>Risk Officer Holding</i> Risk Officer Holding	7-8 Juni 2023 June 7-8, 2023
4	<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>	Tim Manajemen Risiko Holding, Regional Risk Management Team Holding, Regional	13-16 Juni 2023 June 13-16, 2023
5	<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	BOC, BOD, Komite Holding dan Subholding BOC, BOD, Holding and Subholding Committee	8-11 Agustus 2023 6 dan 11 Des 2023 Aug 8-11, 2023 Dec 6 and 11, 2023
6	<i>Training For Trainer</i>	Tim Manajemen Risiko Holding dan Subholding Holding and Subholding Risk Management Team	28-29 Agustus 2023 August 28-29, 2023
7	<i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	Tim Manajemen Risiko dan Risk Owner Holding Holding Risk Management Team and Risk Owner	22-24 November 2023 November 22-24, 2023

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sertifikasi manajemen risiko yang telah dimiliki oleh pekerja Pelindo antara lain:

1. Sertifikasi Skema Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi (ATKRT-BNSP)/(CRGP-GIRMA).
2. *Qualified Risk Management Professional (QRMP)*.
3. *Certified Governance, Risk Management, Compliance Professional (CGRCP)*.
4. *Qualified Risk Governane Professional (QRGP)*.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

The risk management certifications owned by Pelindo employees include:

1. Integrated Risk Governance Expert Scheme Certification (ATKRT-BNSP)/(CRGP-GIRMA);
2. *Qualified Risk Management Professional (QRMP)*;
3. *Certified Governance, Risk Management, Compliance Professional (CGRCP)*;
4. *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*;



5. *Qualified Risk Management Officer (QRMO).*
6. *Certified Governance Professional (CGP)*
7. *Ahli Manajemen Risiko Terintegrasi (CRMP)*
8. *Qualified Risk Management Analyst (QRMA)*

PELAKSANAAN TUGAS GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN TAHUN 2023

Realisasi atas rencana kerja manajemen *Group* Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan selama tahun 2023 yaitu:

1. *Review* Kebijakan dan Prosedur terkait Manajemen Risiko.
2. Implementasi Sistem Manajemen Risiko di Pelindo *Group*.
3. Penilaian *Risk Maturity Index (RMI)* Tahun 2023.
4. Penguatan Fungsi Manajemen Risiko pada Komite *Governance, Risk, and Compliance (GRC)*.
5. Reviu Rencana Kerjasama Usaha, Rencana Investasi dan Aksi-Aksi Korporasi.
6. Peningkatan Fungsi dan Implementasi *Business Continuity Management*.
7. *Monitoring* dan Evaluasi Investasi Strategis.
8. Komunikasi, Konsultansi, *Monitoring* dan *Review* Implementasi Manajemen Risiko.
9. Pelaksanaan *Assessment GCG* Pelindo Tahun 2022.
10. Optimalisasi Implementasi *GCG* Tahun 2023 dan Pemenuhan Aol *GCG* Tahun 2022.
11. Penerapan, *monitoring*, evaluasi atas pengelolaan *Whistleblowing System* dan Gratifikasi.
12. Pembuatan Kerangka Pengelolaan *GCG* Perusahaan.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE PELINDO BERSIH

Dalam rangka pelaksanaan *GCG* di lingkungan Perseroan dan sejalan dengan program *BUMN Bersih* yang dicanangkan oleh Kementerian *BUMN*, maka Perseroan menerapkan *whistleblowing system*. Dalam rangka efektivitas penerapan *whistleblowing system* Direksi membentuk Komite Pelindo Bersih. Pada tahun 2023 terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga dilakukan pembaharuan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih Dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PEDOMAN KERJA KOMITE PELINDO BERSIH

Berdasarkan Peraturan Menteri *BUMN* Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Signifikan Badan Usaha Milik Negara, maka pada tahun 2023 perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan tentang Penerapan Pedoman *Whistleblowing System (WBS)* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

5. *Qualified Risk Management Officer (QRMO);*
6. *Certified Governance Professional (CGP);*
7. *Integrated Risk Management Expert (CRMP);*
8. *Qualified Risk Management Analyst (QRMA).*

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP DUTIES IMPLEMENTATION IN 2023

Realization of Risk Management, Governance and Compliance Group's work plan in 2023 are as follow:

1. *Reviewing* Policies and Procedures related to Risk Management.
2. *Implementing* Risk Management Systems in Pelindo Group.
3. *Assessing* the Risk Maturity Index (RMI) for the year 2023.
4. *Strengthening* the Risk Management function in the Governance, Risk, and Compliance (GRC) Committee.
5. *Reviewing* Business Collaboration Plans, Investment Plans, and Corporate Actions.
6. *Enhancing* the Function and Implementation of Business Continuity Management.
7. *Monitoring* and Evaluating Strategic Investments.
8. *Communicating*, Consulting, *Monitoring*, and *Reviewing* the Implementation of Risk Management.
9. *Conducting* the *GCG* Assessment for Pelindo in the year 2022.
10. *Optimizing* *GCG* Implementation in 2023 and Meeting the *GCG* Aol for 2022.
11. *Implementing*, *monitoring*, and evaluating the management of *Whistleblowing System* and Gratification.
12. *Developing* the Corporate *GCG* Management Framework.

PELINDO BERSIH COMMITTEE

In order to implement *GCG* within the Company and in line with the *BUMN Bersih* program launched by the Ministry of SOEs, the Company implements a whistleblowing system. To effectively implement the whistleblowing system, Board of Directors established Pelindo Bersih Committee. In 2023 there were changes in the organizational structure, so that the Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee were updated, in accordance with the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 dated July 25, 2023 concerning the Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in Implementing the Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PELINDO BERSIH COMMITTEE WORK GUIDELINES

Based on the SOE Minister Regulation Number PER-02/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Activities of State-Owned Enterprises, it is necessary to make changes to the Regulation on the Implementation of Whistleblowing System (WBS) Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pedoman kerja Komite Pelindo Bersih mengacu pada Peraturan Direksi Nomor SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih Dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PELINDO BERSIH

1. Membahas dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam saluran *whistleblowing system* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan pengaduan.
2. Rekomendasi yang diberikan berupa kesimpulan hasil pembahasan laporan *whistleblowing system* oleh komite (laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak dan membutuhkan investigasi lebih lanjut atau tidak) dan rekomendasi urgensi laporannya.
3. Mengkoordinasikan tindak lanjut dan investigasi laporan yang masuk selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima dibantu oleh Investigator, yaitu *Group Head* Satuan Pengawasan Intern dan *Group Head* Layanan SDM serta PIC WBS dari Regional, *Subholding* dan Anak Perseroan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
4. Melakukan investigasi dan membuat kesimpulan, saran serta rekomendasi atas hasil pemeriksaan/permintaan yang dikoordinasikan oleh *Group Head* Satuan Pengawasan Intern dan meminta keterangan ahli apabila diperlukan.
5. Memonitoring tindak lanjut/putusan atas laporan yang masuk jika terbukti terjadi pelanggaran, untuk tindak lanjut/putusan kepada internal dikoordinasikan oleh *Group Head* Layanan SDM.
6. Melakukan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui WBS.
7. Melakukan pengawasan terhadap independensi dan efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan.
8. Melakukan *benchmarking* pada Perseroan lain untuk melihat perkembangan skema WBS.
9. Setiap anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya.
10. Membuat dan mereview kebijakan dan sistem prosedur operasi (SOP) terkait WBS dibantu oleh pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
11. Melakukan sosialisasi kepada insan Pelindo dan stakeholder terkait penggunaan saluran WBS.
12. Membuat laporan secara berkala setiap semester kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama atas pelaksanaan WBS.
13. Perseroan dapat menunjuk pihak eksternal/KAP, atau pihak eksternal lainnya untuk menangani pengelolaan WBS di Perseroan.

The Pelindo Bersih Committee work guidelines refer to Board of Directors Regulation Number SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 dated December 13, 2023 concerning the Whistleblowing System Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and Board of Directors Decree Number SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 dated July 25, 2023 concerning the Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in Implementing the Whistleblowing System in PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PELINDO BERSIH COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Discuss and provide recommendations for follow-up on reports of alleged violations that enter the whistleblowing system channel no later than 14 (fourteen) working days from the receipt of the complaint.
2. Recommendations given in the form of conclusions on the results of the discussion of the whistleblowing system report by the committee (the report can be followed up or not and requires further investigation or not) and recommendations on the urgency of the report.
3. Coordinate the follow-up and investigation of incoming reports for 30 (thirty) working days after the report is received assisted by the Investigator, which is the Group Head of Internal Audit Unit, Group Head of HC Services and the WBS PIC from Regional, Subholding and Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
4. Conduct investigations and make conclusions, suggestions and recommendations on the results of examinations/requests coordinated by the Group Head of Internal Audit Unit and request expert testimony if necessary.
5. Monitoring the follow-up/decision on the incoming report if a violation is proven, for internal follow-up/decision coordinated by the Group Head of HC Services.
6. Conduct internal meetings at least 1 (one) time in every 3 (three) months and/or every time there is a report of alleged violation through WBS.
7. Supervise the independence and effectiveness of the Company's WBS implementation.
8. Conduct benchmarking with other companies to see the development of the WBS scheme.
9. Each Committee member is required to sign an integrity pact to always maintain confidentiality in carrying out their duties.
10. Create and review policies and system operating procedures (SOP) related to WBS assisted by an independent party appointed by the Company.
11. Conduct socialization to Pelindo People and stakeholders regarding the use of WBS channel.
12. Make periodic reports every semester to President Director and President Commissioner on the implementation of WBS.
13. The Company may appoint external parties/KAP, or other external parties to handle WBS management in the Company.



STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PELINDO BERSIH

PELINDO BERSIH COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

NO	Unit Kerja Working Unit	Jabatan dalam Tim Team Position
1.	<i>Group Head</i> Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kepatuhan Group Head of Risk Management, Governance and Compliance	Ketua (Merangkap Anggota) Chairman (Concurrent Member)
2.	<i>Group Head</i> Satuan Pengawasan Intern Group Head of Internal Audit	Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Vice Chairman (Concurrent Member)
3.	<i>Department Head</i> Tata Kelola dan Kepatuhan Department Head of Governance and Compliance	Sekretaris (Merangkap Anggota) Secretary (Concurrent Member)
4.	<i>Group Head</i> Sekretariat Perseroan Group Head Corporate Secretariat	Anggota Member
5.	<i>Group Head</i> Hukum Group Head of Legal	Anggota Member
6.	<i>Group Head</i> Layanan SDM Group Head of HR Services	Anggota Member
7.	<i>Group Head</i> Pelayanan Terminal Group Head of Terminal Services	Anggota Member

PROFIL KOMITE PELINDO BERSIH

PELINDO BERSIH COMMITTEE PROFILE

Ali Mulyono

Ketua merangkap Anggota / *Group Head* Sekretariat Perseroan
Chairman, concurrently Member / Group Head of Corporate Secretariat

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Sekretariat Perseroan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the Corporate Secretariat Profile section in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Widodo

Wakil Ketua merangkap Anggota / *Group Head* Satuan Pengawasan Intern
Vice Chairman, concurrently Member / Group Head of Internal Audit Unit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the Corporate Secretariat Profile section in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Yusuf Ferdian Umar

Sekretaris / *Department Head* Tata Kelola dan Kepatuhan
Secretary / Department Head of Governance and Compliance

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 12 Februari 1981. Beliau lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Persada Indonesia-YAI (2004), Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia (2005), Akuntan dari Program Profesi Akuntansi Universitas Indonesia (2008), Magister Manajemen (MBA) Jurusan Wealth Management dari Universitas Gadjah Mada (2011), Magister Sains Manajemen (MSC) Jurusan International Logistics and Supply Chain Management dari University. Beliau pernah menjabat sebagai Manajer Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal (Oktober 2015-April 2017), Senior Internal Auditor PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (April 2017-November 2019), Analyst Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (November 2019 – Oktober 2021), Project Manager Group Manajemen Integrasi / Transformasi Korporasi dan Manajemen Program PT Pelabuhan Department Head Tata kelola dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Juni 2023 – Sekarang).

Indonesian citizen. Born in Jakarta, February 12, 1981. He Graduated with a Bachelor of Economics majoring in Accounting from Persada Indonesia-YAI University (2004), Bachelor of Economics majoring in Financial Management from University of Indonesia (2005), Accountant from Accounting Professional Program of University of Indonesia (2008), Master of Management (MBA) majoring in Wealth Management from Gadjah Mada University (2011), Master of Science in Management (MSC) majoring in International Logistics and Supply Chain Management from University. Has served as Commercial and Business Development Manager of PT Indonesia Kendaraan Terminal (October 2015-April 2017), Senior Internal Auditor of PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (April 2017-November 2019), Analyst of Deputy President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (November 2019-October 2021), Project Manager of Integration Management Group / Corporate Transformation and Program Management of PT Pelabuhan Department Head of Governance and Compliance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (June 2023-Present).

Usman Saroni

Anggota/*Group Head* Manajemen Risiko
Member/*Group Head* of Risk Management

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala *Group* Manajemen Risiko dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the Risk Management *Group* Head Profile section in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Banu Astrini

Anggota/*Group Head* Layanan SDM
Member/*Group Head* of HC Services

Warga Negara Indonesia. Lahir di Yogyakarta, 17 Desember 1975. Beliau lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi UGM (1988) dan Magister *Business Administration* University of Melbourne (2002). Diangkat menjadi *Group Head* Layanan SDM berdasarkan surat keputusan KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21. Beliau Pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (2020-2021), Direktur SDM PT Jakarta International Container Terminal (2019-2020), Direktur Pemasaran PT Rumah Sakit Pelabuhan (2018-2019).

Indonesian citizen. Born in Yogyakarta, December 17, 1975. Graduated with a Bachelor of Communication Science degree from UGM (1988), and a Masters in Business Administration from the University of Melbourne (2002). Appointed as HR Services *Group Head* based on decree KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21. Previously served as President Director of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2020-2021), HR Director of PT Jakarta International Container Terminal (2019-2020), Marketing Director of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2018-2019).

Agus Hermawan

Anggota/*Group Head* Hukum
Member/*Group Head* of Legal

Warga Negara Indonesia. Lahir di Surabaya, 04 Oktober 1973. Beliau lulusan Sarjana dari Universitas Airlangga (1993). Menjabat sebagai *Group Head* Hukum sejak tahun 2021. Beliau Pernah menjabat sebagai SM Pengembangan Bisnis (2018-2021), *Project Coordinator* Pelayanan Kapal, Operasi Terminal (2017-2018) dan *General Manager* Operasi Terminal (2017).

Indonesian citizen. Born in Surabaya, October 4, 1973. Graduated with a Bachelor's Degree from Airlangga University (1993). Served as *Group Head* of Legal since 2021. Previously served as SM Business Development (2018-2021), *Project Coordinator* of Ship Services, Terminal Operations (2017-2018) and *General Manager* of Terminal Operations (2017).

Andi Hamdani

Anggota/*Group Head* Pelayanan Terminal
Member/*Group Head* of Terminal Services

Warga Negara Indonesia. Lahir di Serang, 22 September 1970. Beliau lulusan Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Terbuka (2002) dan Magister Shipping and Transportation Netherland Maritime University (2014). Beliau Pernah menjabat sebagai Direktur Komersial PT MTI (2019-2021), Direktur Operasi dan Teknik PT IKT (2021-2023).

Indonesian citizen. Born in Serang, September 22, 1970. Graduated with a Bachelor of Economics in Management from Open University (2002) and a Master of Shipping and Transportation from Netherland Maritime University (2014). Has served as Commercial Director of PT MTI (2019-2021), Operations and Engineering Director of PT IKT (2021-2023).



INDEPENDENSI KOMITE PELINDO BERSIH

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari Perseroan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PELINDO BERSIH

Komite melakukan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui WBS. Adapun pelaksanaan rapat dan pelaksanaan tugas Komite Pelindo Bersih selama tahun 2023 yaitu:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	31 Januari 2023 January 31, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Update laporan pelaksanaan WBS Tahun 2022 Pembahasan case No WBS-PLND-2022-263
2	22 Juni 2023 June 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Case R/935/PM.00.00/30-35/02/2023 Pembahasan Case WBS-PLND-2023-286 Pembahasan penggunaan saluran WBS di Pelindo Group
3	6 September 2023 September 6, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Update pengelolaan WBS sampai dengan semester I Tahun 2023 Pembahasan case No WBS-PLND-2022-263 Pembahasan Case R/935/PM.00.00/30-35/02/2023 Pembahasan Case WBS-PLND-2023-286
4	11 Desember 2023 December 11, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Case WBS-PLND-2023-307 Pembahasan jumlah laporan yang masuk ke WBS Tahun 2023

KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan transformasi bisnis yang memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko tata kelola dan kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Perseroan terkait dengan pengelolaan investasi, kebijakan strategis operasional Perseroan dan pengendalian kegiatan strategis usaha grup Pelindo, maka Direksi membentuk Komite Tata Kelola, Manajemen risiko dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dibentuk berdasarkan Keputusan No PW.05.02/24/11/2/MRNO/UTMA/PLND-23 tanggal 24 November 2023.

PELINDO BERSIH COMMITTEE INDEPENDENCE

All members of the Committee have no affiliation with other Directors, Commissioners or Controlling Shareholders, are not shareholders of a Company that can affect their ability to act independently, or are a Commissioner, Director or employee of a Company that has affiliations or conducts business with the Company.

PELINDO BERSIH COMMITTEE MEETINGS AND DUTIES

The Committee conducts internal meetings at least 1 (once) every 3 (three) months and/or whenever there is a report of alleged violations through the WBS. The implementation of Clean Bersih Committee meetings and duties during 2023, included:

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

In order to support the performance improvement and business transformation that takes into account the aspects of good corporate governance, risk management and compliance in the Company's decision-making process related to investment management, the Company's operational strategic policies and control of Pelindo group's strategic business activities, Board of Directors formed PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Governance, Risk Management and Compliance Committee based on Decree No. PW.05.02/24/11/2/MRNO/UTMA/PLND-23 dated November 24, 2023.

PEDOMAN KERJA KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Pedoman kerja Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor No PW.05.02/24/11/2/MRNO/UTMA/PLND-23 tanggal 24 November 2023 tentang Pembentukan Komite dan Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

1. Melaksanakan tugasnya secara kolektif dalam membantu Direksi.
2. Memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan atas usulan program investasi Perseroan, kebijakan strategis operasional dan pengendalian kegiatan strategis usaha Grup Perseroan.
3. Memberikan opini atas kelengkapan dan kesesuaian usulan program investasi Perseroan, kebijakan strategis operasional dan pengendalian kegiatan strategis usaha Grup Perseroan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Harus bersikap independen dan obyektif serta profesional dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
5. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian dari Direksi sebelum keputusan/kebijakan strategis akan ditetapkan oleh Perseroan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

No.	Jabatan Department	Posisi Position
1.	<i>Group Head</i> yang membidangi fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola Group Head in charge of Risk Management and Governance function	Ketua Chairman
2.	<i>Group Head</i> yang membidangi fungsi Hukum Group Head in charge of Legal function	Sekretaris Secretary
3.	<i>Group Head</i> yang membidangi fungsi Strategi Korporasi dan Inovasi Group Head in charge of Corporate Strategy and Innovation function	Anggota Member
4.	<i>Group Head</i> yang membidangi fungsi Manajemen Portofolio Anak Perseroan Group Head in charge of Subsidiary Portfolio Management function	Anggota Member
5.	<i>Group Head</i> yang membidangi fungsi Perencanaan dan Performa Keuangan Group Head in charge of Subsidiary Portfolio Management function	Anggota Member
6.	<i>Group Head</i> yang membidangi fungsi Pengelolaan Keuangan Group Head in charge of Financial Planning and Performance function	Anggota Member
7.	<i>Group Head</i> yang membidangi fungsi Sekretariat Perseroan Group Head in charge of Financial Management function	Anggota Member

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE WORK GUIDELINES

Governance, Risk Management and Compliance Committee work guidelines refer to the Board of Directors Decree No. PW.05.02/24/11/2/MRNO/UTMA/PLND-23 dated November 24, 2023 concerning the Establishment of Committees and Determination of the Charter of Governance, Risk Management and Compliance Committee of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Perform its duties collectively in assisting Board of Directors.
2. Ensure the suitability and completeness of governance, risk management and compliance documents on the Company's proposed investment program, strategic operational policies and control of the Company's Group business strategic activities.
3. Provide an opinion on the completeness and suitability of the Company's proposed investment program, operational strategic policies and control of the Group's strategic business activities related to governance, risk management and compliance with laws and regulations.
4. Must be independent and objective as well as professional in carrying out its duties as well as in reports and is directly responsible to the Board of Directors.
5. Identify matters that require attention from Board of Directors before strategic decisions/policies will be established by the Company.

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE



INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari Perseroan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Opini Komite dapat diberikan langsung pada saat pelaksanaan rapat komite dan dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua dan 3 (tiga) orang anggota komite. Komite mengadakan rapat koordinasi dengan fungsi tata Kelola, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan jika diperlukan. Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melakukan usulan program investasi Perseroan, kebijakan strategis operasional dan pengendalian kegiatan strategis usaha.

AKUNTAN PUBLIK

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Pemilihan penyedia jasa KAP dilakukan dengan *E-Procurement*. Dimulai dengan mengundang Pelaku Usaha dengan status *activated* pada tanggal 13 Oktober 2023. Sedangkan untuk penyampaian dokumen penawaran dibuka sejak tanggal 17 Oktober 2023 hingga 19 Oktober 2023. Hasil Laporan dan Usulan Penyedia selesai pada 25 Oktober 2023 dan disampaikan melalui surat dari Direktur Penyelenggara kepada dewan komisaris. Penetapan Pelaksana Pekerjaan Jasa Audit dikeluarkan pada 24 Oktober 2023, selanjutnya penetapan Imbalan Jasa Audit oleh Dewan Komisaaris dikeluarkan pada 31 Oktober 2023.

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE INDEPENDENCE

All Committee members have no affiliation with other Board of Directors, Board of Commissioners or Controlling Shareholders, are not shareholders of the Company that may affect their ability to act independently, Board of Commissioners, Board of Directors or employees of companies that have affiliation or business with the Company.

DUTIES IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

Committee meetings are chaired by the Committee Chairman. The Committee opinions can be given directly during committee meetings and are considered valid if attended by the chairman and 3 (three) committee members. The Committee holds coordination meetings with the governance function, risk management function and compliance function if necessary. The implementation of meetings and implementation of duties of Governance, Risk Management and Compliance Committee during 2023 are:

PUBLIC ACCOUNTANT

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT

The KAP service provider is selected using E-Procurement. Starting by inviting Business Actors with activated status on October 13, 2023. As for the submission of bid documents was open from October 17, 2023 to October 19, 2023. The results of Provider Report and Proposal was completed on October 25, 2023 and submitted by letter from Organizing Director to Board of Commissioners. The determination of the Audit Service Executor was issued on October 24, 2023, and the determination of Audit Service Fee by the Board of Commissioners was issued on October 31, 2023.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN FEE

PUBLIC ACCOUNTING FIRM, ACCOUNTANT NAME AND FEE

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee
Public Accounting Firm, Accountant Name and Fee

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Accountant Name (Responsible Partner)	Periode AP AP Period	Fee Jasa Audit Audit Service Fee
2023	Ernst Young	Periode Kesepuluh Tenth Period	Mochamad Dadang Syachruna	Periode Keempat Fourth Period	Rp11.795.000.000
2022	Ernst Young	Periode Kesembilan Ninth Period	Mochamad Dadang Syachruna	Periode Ketiga Third Period	Rp10.000.010.917
2021	Ernst Young	Periode Kedelapan Eighth Period	Mochamad Dadang Syachruna	Periode Kedua Second Period	Rp4.438.792.110
2020	Ernst Young	Periode Ketujuh Seventh Period	Mochamad Dadang Syachruna	Periode Pertama First Period	Rp3.802.636.200
2019	Ernst Young	Periode Keenam Sixth Period	Muhammad Kurniawan	Periode Ketiga Third Period	Rp3.874.519.000
2018	Ernst Young	Periode Kelima Fifth Period	Muhammad Kurniawan	Periode Kedua Second Period	Rp3.583.700.000
2017	Ernst Young	Periode Keempat Fourth Period	Muhammad Kurniawan	Periode Pertama First Period	Rp3.945.700.000

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Selama tahun 2023, tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

OTHER SERVICES PROVIDED BY ACCOUNTANT

During 2023, there were no others service provided by accountants.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan GCG, karena dapat mendorong Perseroan menjadi lebih transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, adil, dan terpercaya. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan andal mampu memberikan keyakinan bagi para *stakeholder* bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjadi tanggung jawab dari Manajemen Perseroan.

Sistem Pengendalian Intern Perseroan merupakan suatu proses pengendalian yang dilaksanakan secara terus menerus oleh Direksi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan Perseroan.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal Control System is a very crucial aspect in GCG implementation, because it can encourage the Company to be more transparent, accountable, responsible, independent, fair, and reliable. An effective and reliable Internal Control System is able to provide confidence to stakeholders that all available resources can be managed properly in order to achieve the Company's goals. The implementation of a reliable and effective Internal Control System at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is the responsibility of the Company's Management.

The Company's Internal Control System is a control process implemented continuously by Board of Directors, Structural Officers, Functional Officers, and Executives, designed to provide adequate assurance of the achievement of the Company's vision, mission, goals, and objectives.

TUJUAN PENGENDALIAN

1. Efisiensi dan Efektivitas Operasional
Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.

OBJECTIVES OF CONTROL

1. Operational Efficiency and Effectiveness
Intended to increase effectiveness and efficiency in managing the Company's resources in order to achieve the Company's objectives.



2. Keandalan Pelaporan
Dimaksudkan untuk menjamin laporan yang akurat, wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan operasional lebih terjamin dengan adanya pengendalian intern yang efektif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh data yang diolah adalah transaksi yang sah dan telah mendapat otorisasi, serta seluruh transaksi telah dicatat pada tanggal terjadinya dengan nilai yang akurat.
3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.

2. Reporting Reliability
Intended to guarantee accurate, fair, timely and relevant reports, as a basis for making appropriate and accountable decisions. The presentation and disclosure of information in financial and operational reports is more secure with effective internal control. This is intended to provide assurance that all processed data are valid and authorized transactions, and all transactions have been recorded on the date of occurrence with accurate values.
3. Compliance with Laws and Regulations
Intended to ensure that all of the Company's activities are carried out in accordance with the applicable laws and regulations, both provisions issued by the government or other authorities, as well as policies, provisions, and procedures established by the Company.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN

Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*);
5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

LINGKUNGAN PENGENDALIAN (*CONTROL ENVIRONMENT*)

Komponen Lingkungan Pengendalian di Perseroan terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu:

1. Menunjukkan Komitmen terhadap Integritas dan Nilai Etika.
Perseroan menunjukkan komitmen terhadap penegakan integritas dan nilai etika dengan:
 - a. Menegakkan keteladanan melalui arahan, tindakan, dan perilaku, komitmen terhadap integritas dan nilai etika untuk mendukung efektivitas Sistem Pengendalian Intern oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
 - b. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku (*code of conduct*) yang mendefinisikan integritas dan nilai etika.
 - c. Mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan perilaku.
 - d. Mengidentifikasi pelanggaran terhadap aturan perilaku dan memperbaiki secara tepat waktu dan konsisten.
 - e. Penetapan target dan sasaran yang realistis dapat dicapai dan tidak menuntut pegawai untuk mencapai sasaran yang tidak realistis.
 - f. Memberikan penghargaan yang sepadan kepada pegawai atas prestasi kerjanya dalam rangka penegakkan integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika.
 - g. Menegakkan sanksi sesuai aturan yang berlaku atas pelanggaran terhadap integritas dan nilai etika.

INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE COMPANY

The conceptual framework of COSO internal control as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control consists of 5 (five) components:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring and Evaluation.

CONTROL ENVIRONMENT

The Control Environment Component in the Company consists of 5 (five) principles, namely:

1. Demonstrating Commitment to Integrity and Ethical Values.
The Company demonstrates commitment to upholding integrity and ethical values by:
 - a. Upholding role models through direction, actions, and behavior, commitment to integrity and ethical values to support the effectiveness of Internal Control Systems by Board of Commissioners and Board of Directors.
 - b. Developing and implementing code of conduct that defines integrity and ethical values.
 - c. Evaluating compliance with the code of conduct.
 - d. Identify code of conduct violations and correct them in a timely and consistent manner.
 - e. Setting realistic targets and goals that are achievable and not requiring employees to achieve unrealistic goals.
 - f. Providing commensurate awards to employees for their work achievements in the context of upholding integrity and compliance with ethical values.
 - g. Enforcing sanctions in accordance with applicable regulations for violations of integrity and ethical values.

2. Implementasi Tanggung Jawab Pengawasan Dewan Komisaris bersikap independen terhadap Direksi dan mengimplementasikan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan dari pengendalian internal.
 - a. Tanggung jawab pengawasan oleh Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mengidentifikasi dan menerima tanggung jawab pengawasan terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
 - b. Memegang atau mendelegasikan tanggung jawab pengawasan
Dewan Komisaris memegang tanggung jawab pengawasan atau mendelegasikan tanggung jawab tersebut Direksi untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
 - c. Mengimplementasikan keahlian yang relevan
Dewan Komisaris mendefinisikan dan secara periodik menilai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh anggota-anggota Dewan Komisaris untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bersikap kritis terhadap Direksi dan mengambil tindakan yang diperlukan.
 - d. Beraktivitas secara independen
Dewan Komisaris memiliki jumlah anggota yang cukup, bersikap independen, dan objektif.
 3. Mencapai Tujuan Perseroan
Direksi membentuk struktur organisasi, jalur pelaporan dan kewenangan, serta pertanggungjawaban yang memadai untuk mencapai tujuan Perseroan, yaitu:
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris berada di Lini Pertama yang mempertimbangkan berbagai struktur yang digunakan (seluruh struktur entitas) termasuk unit operasional, entitas legal, penyedia jasa (*outsourcing*) untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
 - b. Manajemen mendesain dan mengevaluasi pola pelaporan untuk setiap struktur atau entitas agar mampu mengeksekusi kewenangan, tanggung jawab serta arus informasi dalam mengelola aktivitasnya.
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris mendelegasikan kewenangan, mendefinisikan, dan mengalokasikan, serta memisahkan fungsi secara memadai pada berbagai tingkatan dalam organisasi.
 - d. Manajemen melaksanakan evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan terhadap struktur organisasi dalam hal terjadi perubahan lingkungan yang strategis.
 - e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai untuk formasi yang dibutuhkan Perseroan.
 4. Komitmen terhadap Kompetensi
Perseroan menunjukkan komitmen terhadap kompetensi pegawai melalui tahapan proses untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang berkompeten, dengan cara:
 - a. Menyusun Kebijakan dan Praktik Standar Kompetensi yang menggambarkan harapan organisasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
2. Implementation of Supervisory Responsibilities
Board of Commissioners acts independently toward Board of Directors and implements oversight of the development and implementation of internal control.
 - a. Supervisory responsibilities by Board of Commissioners
Board of Commissioners identifies and accepts supervisory responsibility for the adequacy and effectiveness of internal control.
 - b. Holding or delegating supervisory responsibilities
Board of Commissioners holds supervisory responsibilities or delegates these responsibilities to Board of Directors to support the achievement of the Company's objectives.
 - c. Implement relevant skills
Board of Commissioners defines and periodically assesses the knowledge and skills required by members of Board of Commissioners to improve their ability to be critical of Board of Directors and take necessary action.
 - d. Work independently
Board of Commissioners has a sufficient number of members, is independent and objective.
 3. Achieving Company Objectives
Board of Directors establishes an adequate organizational structure, reporting lines and authority, and accountability to achieve the Company's objectives, namely:
 - a. Board of Directors and Board of Commissioners are in the First Line which considers the various structures used (all entity structures) including operational units, legal entities, service providers (*outsourcing*) to support the achievement of the Company's objectives.
 - b. Management designs and evaluates the reporting pattern for each structure or entity to be able to execute the authority, responsibility and information flow in managing its activities.
 - c. Board of Directors and Board of Commissioners delegate authority, define and allocate, and adequately separate functions at various levels in the organization.
 - d. Management conducts evaluations, adjustments, and improvements to the organizational structure in the event of strategic environmental changes.
 - e. Determining the appropriate number of employees for the formation required by the Company.
 4. Commitment on Competencies
The Company demonstrates commitment to employee competencies through the stages of process to recruit, develop and retain competent individuals, by:
 - a. Developing Competency Standard Policies and Practices that describe the organization's expectations of the competencies needed to support the achievement of the Company's objectives.



- b. Mengalokasikan pemenuhan kebutuhan untuk pembinaan dan pelatihan yang diperlukan untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan kecukupan dan kompetensi pekerja dan penyedia jasa *outsourcing*.
 - c. Mengevaluasi kompetensi seluruh tingkat dan individu organisasi, termasuk penyedia jasa *outsourcing*, terkait dengan kebijakan dan praktik yang ditetapkan, dan bertindak memadai untuk mengatasi kekurangan.
 - d. Merencanakan dan menyiapkan suksesi pelimpahan tanggung jawab secara signifikan.
5. Pengendalian Intern
- Perseroan meminta pertanggungjawaban individual atas area Pengendalian Intern yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan yang meliputi:
- a. Penegakan Akuntabilitas melalui Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab dengan cara membangun mekanisme untuk mengkomunikasikan dan menuntut para pekerja agar akuntabel atas pelaksanaan tanggung jawab Pengendalian Intern organisasi dan mengimplementasikan tindakan koreksi jika diperlukan.
 - b. Pembangunan Pengukuran Kinerja, Insentif, dan Penghargaan dengan cara membangun ukuran kinerja, insentif, dan penghargaan yang layak bagi pertanggungjawaban pada setiap level entitas, yang menggambarkan dimensi dan kinerja dan standar perilaku, dan mempertimbangkan pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. Mengevaluasi Ukuran Kinerja, Insentif, dan Penghargaan dengan caramenyelaraskan insentif dan penghargaan dengan pemenuhan tanggung jawab Pengendalian Intern dalam pencapaian tujuan Perseroan.
 - d. Mempertimbangkan Tekanan Berlebihan dengan cara mengevaluasi dan menyesuaikan tekanan-tekanan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan ketika memberikan tanggung jawab mengembangkan ukuran kinerja, dan mengevaluasi kinerja.
 - e. Mengevaluasi Kinerja, dan Penghargaan atau Sanksi Disiplin Individu dengan caramengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab Pengendalian Intern, termasuk kepatuhan terhadap aturan dan tingkat kompetensi yang diharapkan dapat memberikan penghargaan atau sanksi disiplin.
- b. Allocating the fulfillment of needs for coaching and training required to recruit, develop, and maintain adequate and competent workers and outsourcing service providers.
 - c. Evaluate the competence of all levels and individuals of the organization, including outsourced service providers, in relation to established policies and practices, and act accordingly to address deficiencies.
 - d. Plan and prepare for the succession of significant delegations of responsibility.
5. Internal Control
- The Company holds individuals accountable for the areas of Internal Control for which they are responsible in order to achieve the objectives which include:
- a. Enforcement of Accountability through Structure, Authority, and Responsibility by establishing mechanisms to communicate and hold workers accountable for carrying out the organization's Internal Control responsibilities and implementing corrective actions where necessary.
 - b. Building Performance Measures, Incentives, and Rewards by building appropriate performance measures, incentives, and rewards for accountability at each level of the entity, which describes the dimensions and performance and behavior standards, and considers the achievement of short-term and long-term goals;
 - c. Evaluating Performance Measures, Incentives, and Rewards by aligning incentives and rewards with the fulfillment of Internal Control responsibilities in achieving Company objectives.
 - d. Considering Excessive Pressure by evaluating and adjusting pressures related to achieving goals when assigning responsibility for developing performance measures, and evaluating performance.
 - e. Evaluating Performance, and Rewards or Disciplinary Sanctions for Individuals by evaluating the implementation of Internal Control responsibilities, including compliance with rules and the level of competence expected to provide rewards or disciplinary sanctions.

PENILAIAN RISIKO (*RISK ASSESSMENT*)

Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) merupakan basis untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Sebelum melakukan penilaian risiko, terlebih dahulu harus ditetapkan tujuan Perseroan sampai pada tingkat kegiatan, yang dibagi menjadi tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Penetapan tujuan Perseroan memuat pernyataan dan arahan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu serta dikomunikasikan ke seluruh pegawai.

Komponen Penilaian Risiko terdiri dari 4 (empat) prinsip, yaitu:

1. Perseroan menetapkan tujuan secara jelas untuk implementasi proses identifikasi dan penilaian risiko-risiko terkait dengan tujuan dengan atribut-atribut Pengendalian Intern sebagai berikut:
 - a. Atribut Terkait Tujuan Operasional
 - Manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima dalam pencapaian tujuan operasional.
 - Tujuan operasional menggambarkan pilihan manajemen terkait struktur, pertimbangan industri, dan kinerja Perseroan.
 - Perseroan menggambarkan tingkat kinerja operasional dan keuangan yang diharapkan dalam tujuan operasional.
 - Manajemen menggunakan tujuan operasional sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja operasional dan keuangan yang diharapkan.
 - b. Untuk tujuan pelaporan, atribut diberdakan menjadi:
 - Tujuan Pelaporan Internal (Keuangan dan/atau Non-Keuangan)
 - » Manajemen mempertimbangkan tingkat akurasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam tujuan pelaporan non-keuangan dan materialitas, serta dalam tujuan pelaporan keuangan.
 - » Pelaporan internal menyediakan informasi yang akurat dan lengkap terkait pilihan manajemen dan informasi yang dibutuhkan dalam mengelola Perseroan.
 - » Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.
 - Tujuan Pelaporan Keuangan Eksternal
 - » Manajemen mempertimbangkan materialitas dalam penyajian laporan keuangan.
 - » Tujuan pelaporan keuangan konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan tersedia di Perseroan. Prinsip akuntansi dipilih sesuai dengan keadaan dan mematuhi Standar Akuntansi Keuangan.
 - » Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.

RISK ASSESSMENT

Risk assessment is the basis for determining how risks will be managed. Before conducting a risk assessment, the Company's objectives must first be set down to the activity level, which is divided into operational, reporting and compliance objectives. The Company's goal setting contains statements and directions that are specific, measurable, achievable, realistic and timebound, and communicated to all employees.

The Risk Assessment component consists of 4 (four) principles, namely:

1. The Company sets clear goals for the implementation of the process of identifying and assessing risks related to objectives with the following Internal Control attributes:
 - a. Attributes Related to Operational Goals
 - Management considers the level of risk that is acceptable in achieving operational goals.
 - Operational goals describe management's choices regarding the structure, industry considerations, and performance of the Company.
 - The Company describes the expected level of operational and financial performance in the operational objectives.
 - Management uses the operational objectives as a basis for allocating the resources needed to achieve operational and financial performance needed to achieve the expected operational and financial performance.
 - b. For reporting purposes, attributes are divided into:
 - Internal Reporting Objectives (Financial and/or NonFinancial)
 - » Management considers the level of accuracy appropriate to user needs in non-financial reporting objectives and materiality, as well as in financial reporting objectives.
 - » Internal reporting provides accurate and complete information related to management choices and information needed to manage the Company.
 - » External reporting describes the underlying transactions and events within acceptable limits.
 - Objectives of External Financial Reporting
 - » Management considers materiality in the presentation of financial statements.
 - » The financial reporting objectives are consistent with the accounting principles applicable and available to the Company.
 - » Accounting principles are selected according to the circumstances and comply with Financial Accounting Standards.
 - » External reporting describes the underlying transactions and events within acceptable ranges.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> e. Penilaian risiko kecurangan (<i>fraud</i>) mempertimbangkan bagaimana manajemen dan pekerja lainnya dapat menjustifikasi tindakan tidak patut. f. Penilaian risiko mempertimbangkan tindakan memberi/menerima suap kepada pihak eksternal/internal yang dapat mempengaruhi proses kerja dan pilihan keputusan pejabat pihak eksternal/internal sehingga mengeluarkan keputusan yang diinginkan dan memberi dampak kerugian bagi Perseroan. <p>4. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan Signifikan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proses identifikasi risiko mempertimbangkan perubahan faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mencapai tujuannya. b. Perseroan mempertimbangkan dampak potensial dari bisnis baru, perubahan besar pada komposisi bisnis yang ada, mengakuisisi atau melepas operasi bisnis terhadap Sistem Pengendalian Internal, perubahan geografi luar negeri, teknologi baru, dan perubahan lingkungan fisik dimana bisnis beroperasi. c. Perseroan mempertimbangkan perubahan dalam manajemen, yaitu perilaku dan filosofi manajemen terhadap Sistem Pengendalian Internal. | <ul style="list-style-type: none"> e. The fraud risk assessment considers how management and other employees may justify improper actions. f. Risk assessment considers the act of giving/receiving bribes to external/internal parties that can influence the work process and decision choices of external/internal party officials so as to issue the desired decision and have a loss impact on the Company. <p>4. Identifying and Analyzing Significant Changes</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The risk identification process considers changes in external factors that significantly affect the Company's ability to achieve its objectives. b. The Company considers the potential impact of new businesses, major changes to the composition of existing businesses, acquiring or disposing of business operations on the Internal Control System, changes in overseas geography, new technology, and changes in the physical environment in which the business operates. c. The Company considers changes in management, namely management behavior and philosophy on the Internal Control System. |
|---|---|

KEGIATAN PENGENDALIAN (*CONTROL ACTIVITIES*) - PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*) dilaksanakan di semua tingkatan Perseroan, di berbagai tahapan proses bisnis, dan termasuk di lingkup pengembangan teknologi yang meliputi kebijakan prosedur yang membantu untuk menjamin arahan manajemen dapat dilaksanakan dengan benar.

Komponen kegiatan pengendalian terdiri dari 3 (tiga) prinsip, yaitu:

1. Menetapkan dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian Perseroan menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian untuk memitigasi risiko signifikan terhadap pencapaian tujuan Perseroan ke level yang dapat diterima melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Aktivitas pengendalian membantu dan menjamin respons risiko telah dilaksanakan dalam mengatasi dan memitigasi risiko signifikan. Setelah proses penilaian risiko, manajemen mengidentifikasi dan mengimplementasikan aktivitas yang diperlukan untuk merespons risiko tertentu.
 - b. Manajemen menentukan proses bisnis yang relevan yang membutuhkan aktivitas pengendalian.
 - c. Manajemen mempertimbangkan kompleksitas, sifat, dan operasional lingkungan, serta karakteristik spesifik dari Perseroan yang mempengaruhi pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian.
 - d. Aktivitas pengendalian termasuk rentang, variasi, dan bauran pengendalian untuk memitigasi risiko, dengan mempertimbangkan pengendalian manual dan otomatis, serta pengendalian preventif dan detektif.

CONTROL ACTIVITIES - FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL

Control Activities are implemented at all levels of the Company, at various stages of the business process, and including in the scope of technology development which includes policy procedures that help to ensure management directives can be implemented correctly.

The components of control activities consist of 3 (three) principles, namely:

1. Establish and Develop Control Activities
The Company establishes and develops control activities to mitigate significant risks to the achievement of the Company's objectives to an acceptable level through the following activities:
 - a. Control activities assist and ensure that risk responses have been implemented to address and mitigate significant risks. Following the risk assessment process, management identifies and implements the activities required to respond to specific risks.
 - b. Management determines the relevant business processes that require control activities.
 - c. Management considers the complexity, nature, and operational environment, as well as the specific characteristics of the Company that affect the selection and development of control activities.
 - d. Control activities include the range, variety, and mix of controls to mitigate risk, taking into account manual and automated controls, as well as preventive and detective controls.



- e. Manajemen memisahkan fungsi/tugas yang tidak kompatibel (tidak dapat bersamaan), dan ketika pemisahan tersebut menjadi tidak praktis dan efisien, manajemen menentukan dan mengembangkan aktivitas pengendalian alternatif (pengendalian kompensatif).
- f. Pemisahan fungsi umumnya membagi tanggung jawab pencatatan, otorisasi, dan persetujuan transaksi, serta penanganan aset terkait. Ketidakhadiran pemisahan fungsi dan pengendalian kompensatif akan:
- Membuat pengendalian internal menjadi tidak efektif, sehingga dapat menimbulkan tindakan kecurangan (*fraud*).
 - Memitigasi risiko terjadinya manajemen *override* (pengabaian manajemen), yang sering terjadi saat melakukan kecurangan (*fraud*).
 - Pemisahan fungsi juga mengurangi risiko kecurangan (*fraud*) oleh satu orang dan risiko kesalahan karena para pihak terpisah tidak saling mereviu pekerjaan pihak lainnya.
 - Namun, kadang kala pemisahan fungsi tidak praktis atau tidak efisien. Dalam situasi ini, manajemen menetapkan dan mengembangkan pengendalian internal alternatif sebagai kompensasi dari tidak diterapkannya prinsip pengendalian internal.
- g. Pemisahan fungsi diarahkan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan, dan pemborosan. Pemisahan fungsi di lingkungan Perseroan, dilakukan dengan memastikan bahwa:
- Tidak seorang pun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama kejadian dan transaksi dari awal sampai akhir proses.
 - Pemisahan tanggung jawab dan tugas atas kejadian dan transaksi kepada pegawai yang berbeda berkaitan dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.
 - Pembagian tugas kepada lebih dari satu orang pegawai dilakukan secara sistematis untuk memberikan keyakinan adanya *check and balances*.
 - Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kolusi.
2. Menetapkan dan Mengembangkan Pengendalian Umum (*General Controls*) terhadap Teknologi
Manajemen memahami dan menentukan ketergantungan dan hubungan antara proses bisnis, aktivitas pengendalian otomatis, dan pengendalian umum teknologi.
- a. Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian atas infrastruktur teknologi, yang dirancang dan diimplementasikan untuk membantu menjamin kelengkapan, akurasi, dan keberlangsungan proses teknologi.
- b. Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang didesain dan diimplementasikan untuk membatasi hak akses teknologi hanya bagi pengguna terotorisasi sesuai dengan tanggung jawab
- e. Management separates incompatible functions/tasks (cannot concurrently), and when such separation becomes impractical and efficient, management determines and develops alternative control activities (compensative control).
- f. Segregation of functions generally divides the responsibilities of recording, authorizing, and approving transactions, and handling the associated assets. The absence of segregation of functions and compensatory controls will:
- Making internal control ineffective, hence can lead to fraud.
 - Mitigating the risk of management override, which often occurs when committing fraud.
 - The separation of functions also reduces the risk of fraud by one person and the risk of error because the separate parties do not review each other's work.
 - However, sometimes separation of functions is impractical or inefficient. In this situation, management establishes and develops alternative internal controls as compensation for not applying the principles of internal control.
- g. Segregation of functions is geared towards reducing errors, fraud, and waste. The separation of functions within the Company is carried out by ensuring that:
- No one is allowed to control all major aspects of events and transactions from start to finish.
 - Segregation of responsibilities and duties for events and transactions to different employees relating to authorization, approval, processing and recording, payment or receipt of funds, reviews and audits, and asset storage and handling functions.
 - The division of tasks to more than one employee is carried out systematically to ensure that there are checks and balances.
 - The Board of Directors establishes policies to reduce opportunities for collusion.
2. Establish and Develop General Controls on Technology
Management understands and determines the dependencies and relationships between business processes, automated control activities, and general technology controls.
- a. Management establishes and develops control activities over the technology infrastructure, designed and implemented to help ensure the completeness, accuracy, and continuity of technology processes.
- b. Management establishes and develops control activities designed and implemented to limit technology access rights only to authorized users in accordance with their responsibilities and to protect

- tugasnya dan untuk melindungi aset Perseroan dari ancaman eksternal dan internal.
- c. Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian terkait akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi dan infrastrukturnya, untuk mencapai tujuan Perseroan.
 - d. Secara detail, pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*) atas sistem informasi diatur dalam Kerangka Sistem Informasi Perseroan.
3. Implementasi Melalui Kebijakan dan Prosedur yang dilakukan dengan cara:
- a. Manajemen membentuk aktivitas pengendalian yang dibangun ke dalam proses bisnis dan aktivitas sehari-hari para pekerja, melalui kebijakan dan prosedur untuk mendukung pelaksanaan arahan manajemen.
 - b. Manajemen membangun tanggung jawab dan akuntabilitas atas aktivitas pengendalian melalui personel yang ditunjuk dari unit bisnis atau fungsi, dengan risiko relevan berada.
 - c. Manajemen menjamin bahwa pekerja yang kompeten dapat melaksanakan aktivitas pengendalian dengan tekun dan berkelanjutan.
 - d. Manajemen memastikan kepada pekerja untuk melaksanakan aktivitas pengendalian secara tepat waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur.
 - e. Pekerja yang bertanggung jawab dapat melakukan investigasi dan merespon permasalahan yang teridentifikasi dari pelaksanaan aktivitas pengendalian.
 - f. Manajemen secara periodik mereviu aktivitas pengendalian untuk menilai relevansi dan keperluan pembaharuan saat diperlukan.
- the Company's assets from external and internal threats.
- c. Management establishes and develops control activities related to the acquisition, development, and maintenance of technology and infrastructure, to achieve the Company's objectives.
 - d. In detail, general control and application control over the information system are regulated in the Company's Information System Framework.
3. Implementation through Policies and Procedures carried out by:
- a. Management establishes control activities that are built into business processes and daily activities of workers, through policies and procedures.
 - b. Management establishes responsibility and accountability for control activities through designated personnel from the business unit or function, where the relevant risk is located.
 - c. Management ensures that competent employees can carry out control activities diligently and continuously.
 - d. Management ensures that workers carry out control activities in a timely manner as specified in policies and procedures.
 - e. Responsible workers can investigate and respond to problems identified from the implementation of control activities.
 - f. Management periodically reviews control activities to assess whether they are still relevant and can be updated if necessary.

PENGENDALIAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Dalam meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, Perseroan memiliki Komite di bawah Direksi yaitu Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang memiliki tugas memberikan opini atas kelengkapan dan kesesuaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan Mempertimbangkan toleransi risiko yaitu manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima terkait pencapaian tujuan kepatuhan serta mempertimbangkan aturan dan hukum eksternal yaitu Hukum dan aturan merupakan standar minimal yang diintegrasikan ke dalam tujuan kepatuhan.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI (INFORMATION AND COMMUNICATION)

Direksi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi (*Information and Communication*) keuangan maupun non-keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu dan bentuk yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawabannya.

COMPLIANCE CONTROL WITH OTHER LEGAL REGULATIONS

In improving the Company's compliance with laws and regulations, the Company has a Committee under Board of Directors, namely Governance, Risk Management and Compliance Committee which has the task of providing opinions on the completeness and suitability of compliance with laws and regulations. Compliance with laws and regulations is carried out by considering risk tolerance, i.e. management considers the level of risk that can be management considers the acceptable level of risk related to achieving compliance objectives and considers external rules and laws i.e. Laws and rules are minimum standards that are integrated into compliance objectives.

INFORMATION & COMMUNICATION

Boards of Directors is required to identify, record, and communicate financial and non-financial information related to the implementation of their main duties and functions in a timely and appropriate form to facilitate implementation, control, and accountability.



Komponen Informasi dan Komunikasi terdiri dari 3 (tiga) prinsip, yaitu:

1. Menggunakan Informasi Relevan
Perseroan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas, relevan untuk mendukung efektivitas komponen-komponen pengendalian internal yang dilakukan dengan:
 - a. Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan
Suatu proses dilaksanakan untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan diharapkan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal dan pencapaian tujuan Perseroan.
 - b. Mendapatkan data eksternal dan internal
Sistem informasi dapat memperoleh data eksternal dan internal.
 - c. Memproses data relevan menjadi informasi
Sistem informasi memproses dan mengubah data relevan menjadi informasi.
 - d. Memelihara kualitas selama proses berlangsung
Sistem informasi menghasilkan informasi secara tepat waktu, terkini, akurat, lengkap, dapat diakses, terlindungi, dan dapat diverifikasi, serta dapat disimpan. Informasi direviu untuk menilai relevansinya dalam mendukung efektivitas pengendalian internal.
 - e. Mempertimbangkan biaya dan manfaat
Sifat, kuantitas, dan akurasi informasi disinkronkan dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
2. Komunikasi secara Internal
Perseroan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab atas pengendalian internal, yang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal yang dilakukan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Mengkomunikasikan pengendalian internal atas informasi ke para pekerja
Untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan agar para pekerja dapat memahami dan melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal mereka.
 - b. Mengkomunikasikan dengan Dewan Komisaris
Terdapat komunikasi antara manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga mereka memiliki informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi peran mereka dalam mencapai tujuan Perseroan.
 - c. Menyediakan garis komunikasi yang terpisah sebagai *fail safe mechanisms* untuk dijalankan sebagai komunikasi anonim atau rahasia ketika jalur normal tidak beroperasi atau tidak efektif. Seperti saluran khusus *whistleblower*.
 - d. Menetapkan metode komunikasi relevan dengan mempertimbangkan waktu, audiens/ pendengar, dan sifat informasi.
3. Komunikasi secara Eksternal
Perseroan mengkomunikasikan dengan pihak eksternal terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal yang dilakukan dengan cara:
 - a. Komunikasi dengan pihak eksternal
Suatu proses diterapkan untuk mengkomunikasikan informasi relevan dan secara tepat waktu ke pihak

The Information and Communication component consists of 3 (three) principles, namely:

1. Using Relevant Information
The Company obtains or generates and uses quality, relevant information to support the effectiveness of internal control components carried out with:
 - a. Identify the information needed
A process is implemented to identify the information needed and expected to support the effectiveness of internal control and the achievement of the Company's objectives.
 - b. Obtain external and internal data
Information systems can obtain external and internal data.
 - c. Processing relevant data into information
Information systems process and convert relevant data into information.
 - d. Maintain quality throughout the process
Information systems produce information that is timely, current, accurate, complete, accessible, protected, and verifiable, and can be stored. Information is reviewed to assess its relevance in supporting the effectiveness of internal control.
 - e. Considering costs and benefits
The nature, quantity, and accuracy of information are synchronized to support the achievement of the Company's objectives.
2. Internal Communication
The Company communicates information internally, including the objectives and responsibilities for internal control, which is needed to support the effectiveness of internal control carried out with the following details:
 - a. Communicating internal control over information to employees
To communicate the information needed for employees to understand and carry out their internal control responsibilities.
 - b. Communicating with the Board of Commissioners
There is communication between the management/ Board of Directors and the Board of Commissioners, so that they have the information needed to fulfill their role in achieving the Company's goals.
 - c. Provide separate lines of communication as fail safe mechanisms to run as anonymous or confidential communication when normal lines are not operational or ineffective. Such as a dedicated whistleblower channel.
 - d. Establish relevant communication methods by considering the time, audience/listener, and nature of the information.
3. External Communication
The Company communicates with external parties regarding matters that affect the effectiveness of internal control by means of:
 - a. Communication with external parties
A process is implemented to communicate relevant and timely information to external parties including

eksternal termasuk pemegang saham, partner, pemilik, pemerintah, konsumen, analis keuangan, serta pihak eksternal lainnya.

- b. Memudahkan komunikasi masuk
Jalur komunikasi terbuka memudahkan input dari konsumen, pemasok, auditor eksternal, pemerintah, analis keuangan, dan lainnya, untuk menyediakan informasi relevan bagi manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Menyediakan garis komunikasi yang terpisah
Jalur komunikasi terpisah diterapkan sebagai *fail safe mechanisms* untuk dijalankan sebagai komunikasi anonim atau rahasia ketika jalur normal tidak beroperasi atau tidak efektif. Seperti saluran khusus *whistleblower*.
- d. Komunikasi dengan Dewan Komisaris
Informasi relevan dihasilkan dari penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal dikomunikasikan kepada manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. Menetapkan metode komunikasi
Metode komunikasi mempertimbangkan waktu, audiens/pendengar, sifat komunikasi, serta ketentuan perjanjian dan aturan pemerintah.

shareholders, partners, owners, governments, consumers, financial analysts and other external parties.

- b. Facilitate incoming communication
Open lines of communication facilitate input from consumers, suppliers, external auditors, government, financial analysts, and others, to provide relevant information to management/Board of Directors and the Board of Commissioners.
- c. Provide a separate line of communication
Separate communication lines are implemented as fail safe mechanisms to operate as anonymous or confidential communications when normal lines are inoperative or ineffective. Like a special whistleblower channel.
- d. Communication with the Board of Commissioners
Relevant information generated from the assessment carried out by external parties is communicated to the management/Board of Directors and the Board of Commissioners.
- e. Establish communication methods
The communication method takes into account the timing, audience, nature of communication, as well as the terms of agreement and government regulations.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi adalah proses menilai kualitas Sistem Pengendalian Intern Perseroan dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui:

1. Melakukan Evaluasi Berkelanjutan dan/atau Terpisah
Perseroan menetapkan, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berjalan dan/atau terpisah untuk meyakinkan bahwa pengendalian internal telah didesain secara memadai dan efektif.
 - a. Mempertimbangkan bauran evaluasi berkelanjutan dan terpisah.
 - b. Mengembangkan pemahaman titik awal.
Desain dan kondisi saat ini dari Sistem Pengendalian Internal digunakan untuk membangun titik awal untuk evaluasi berkelanjutan dan terpisah.
 - c. Mempertimbangkan tingkat perubahan.
Manajemen mempertimbangkan tingkat perubahan dalam proses bisnis ketika menetapkan dan mengembangkan evaluasi berkelanjutan dan terpisah.
 - d. Menggunakan pekerja yang kompeten.
Evaluators yang melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan terpisah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami apa yang sedang dievaluasi.
 - e. Terintegrasi dengan proses bisnis.
Evaluasi berjalan dibangun dalam proses bisnis dan disesuaikan dengan perubahan kondisi.
 - f. Evaluasi obyektif dilakukan secara terpisah dan periodik untuk memberikan masukan yang obyektif.
 - g. Menyesuaikan lingkup dan frekuensi.
Manajemen menyesuaikan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah, tergantung pada risiko.

MONITORING AND EVALUATION

Monitoring and Evaluation is the process of assessing the quality of the Company's Internal Control System within a certain period of time. Monitoring and evaluation is carried out through:

1. Conduct Continuous and/or Separate Evaluations
The Company establishes, develops, and carries out ongoing and/or separate evaluations to ensure that internal controls have been designed adequately and effectively.
 - a. Consider a mix of ongoing and separate evaluations .
 - b. Develop an understanding of starting point.
The design and running state of the Internal Control System is used to establish a starting point for ongoing and separate evaluations.
 - c. Consider the rate of change.
Management considers the degree of change in business processes when establishing and developing ongoing and separate evaluations.
 - d. Using competent workers.
Evaluators who carry out ongoing and separate evaluations have sufficient knowledge to understand what is being evaluated.
 - e. Integrated with business processes.
Ongoing evaluation is built into business processes and adapted to changing conditions.
 - f. Evaluation objectively Separate evaluations are carried out periodically to provide objective input.
 - g. Adjust the scope and frequency Management adjusts the scope and frequency of separate evaluations, depending on the risk.



2. Evaluasi dan Komunikasi Kelemahan Pengendalian Intern kepada para pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris melalui:
 - a. Penilaian hasil evaluasi berkelanjutan dan terpisah oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Mengkomunikasikan kelemahan kepada manajemen kepada pihak yang bertanggung jawab untuk dilakukan perbaikan dan dapat disampaikan kepada manajemen senior.
 - c. Melaporkan kelemahan signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Memonitor tindakan perbaikan oleh manajemen.

2. Evaluation and Communication of Internal Control Weaknesses to the parties responsible for taking corrective action, including Board of Directors and Board of Commissioners through:
 - a. Assessment of the results of continuous and separate evaluations by Board of Directors and Board of Commissioners.
 - b. Communicating weaknesses to management to the responsible party for improvement and can be conveyed to senior management.
 - c. Reporting significant weaknesses to Board of Directors and Board of Commissioners.
 - d. Monitor corrective actions by management.

KESESUAIAN DENGAN COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF TREADWAY COMMISSION (COSO)

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah mengacu ke COSO *Internal Control Integrated Framework* Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*);
5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

COMPLIANCE WITH THE COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF TREADWAY COMMISSION (COSO)

The Company's Internal Control System has referred to the COSO *Internal Control Integrated Framework*. The COSO internal control conceptual framework as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control consists of 5 (five) components:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring and Evaluation.

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pelindo secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan serta konsistensi implementasinya. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun 2023 telah dilakukan secara *self assessment* dengan hasil bahwa seluruh Sistem Pengendalian Internal Perseroan terbukti dapat berjalan cukup efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan telah mematuhi elemen-elemen pengendalian internal yang telah disusun.

EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

Pelindo routinely evaluates the effectiveness of Internal Control System. This evaluation aims to assess the reliability of Company's Internal Control System and the consistency of its implementation. Evaluation on the implementation of internal control system in 2023 has been carried out through a self-assessment with the result that the entire Internal Control System of Company is proven to be running effectively. This shows that Company has complied with the internal control elements that have been prepared.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah dicapai oleh Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) pada tahun 2023. Kecukupan pengendalian internal tercermin dalam laporan hasil audit yang telah disampaikan oleh SPI kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Commissioners is of the view that the application of internal control system has been running well. Board the Commissioner expresses an appreciation for the performance that has been achieved by the Internal Audit Unit (SPI) in 2022. The adequacy of internal control is reflected in the audit results report that has been submitted by SPI to the Board of Directors and the Board Commissioner.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis Perseroan karena semakin berkembangnya dunia Perseroan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas Perseroan mengakibatkan meningkatnya tingkat eksposur risiko yang dihadapi Perseroan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi dan menciptakan nilai Perseroan. Perseroan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga Perseroan akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya.

Pelindo menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada ISO 31000:2018. Setiap Perseroan pasti menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Target Perseroan mencakup berbagai aspek, nilai dari aspek strategis, operasional, finansial, pembentukan citra Perseroan keselarasan hukum dan kepatuhan, lingkungan serta keselamatan kerja.

Risk management is an important element in run the Company's business because it is growing corporate world and the increasing complexity of activities Company resulting in increased level of risk exposure faced by the Company. The main target of the implementation risk management is protecting and creating the value of the Company. The Company manages risk by balance between business strategy and management risks so that the Company will get optimal results from its operations.

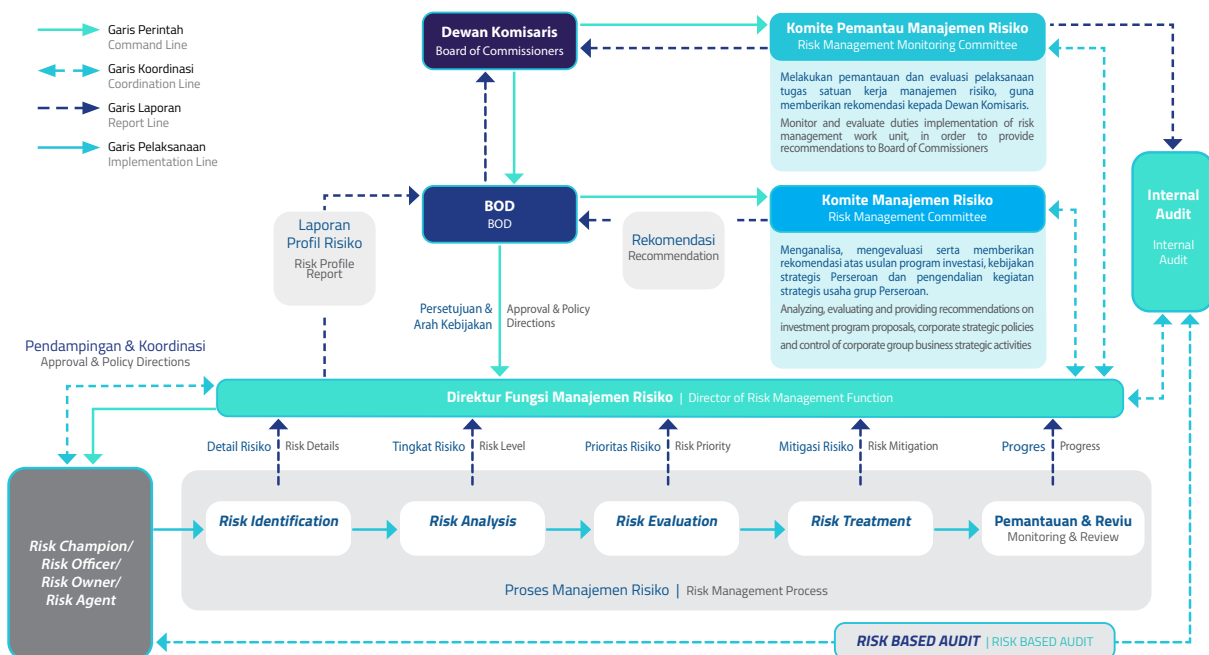
Pelindo applies risk management that refers to ISO 31000:2018. Every Company certainly has to deal with risks that can affect the achievement of targets that have been set. The Company's targets cover various aspects, values from strategic, operational, financial aspects, corporate image formation, legal and compliance, environmental and work safety aspects.

STRUKTUR KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Dalam implementasi manajemen risiko diperlukan struktur koordinasi dan komunikasi yang efektif, sehingga fungsi perintah koordinasi, pelaksanaan dan pelaporan terpetakan dengan jelas. Struktur koordinasi dan komunikasi serta pengelolaan manajemen risiko digambarkan sebagai berikut.

COORDINATION AND COMMUNICATION STRUCTURE

The risk management requires an effective coordination and communication structure, so that the functions of coordination, implementation and reporting are clearly mapped. The structure of coordination and communication and risk management is described as follows.



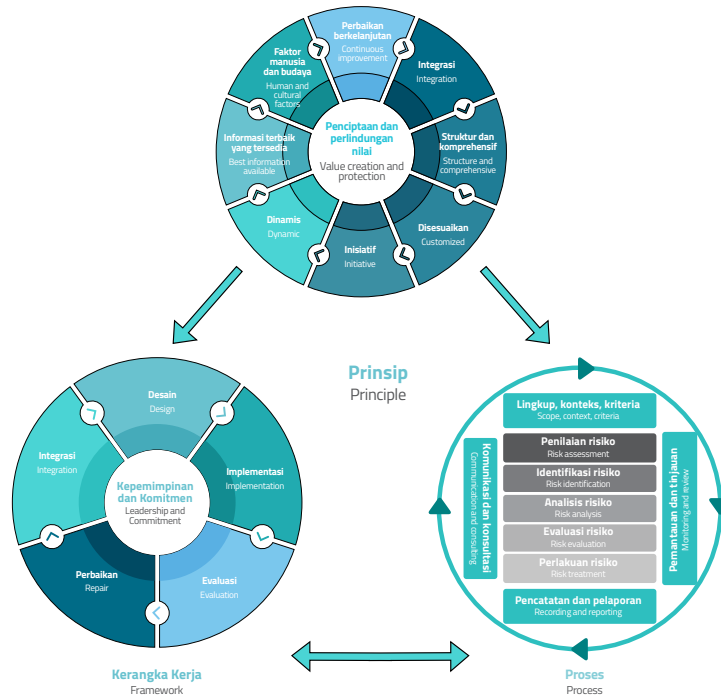


SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pelindo telah mengadopsi standar arsitektur manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 *Risk Management Guidelines*, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Pelindo has adopted the risk management architecture standard based on ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines, which consists of 3 (three) parts, namely Principles, Framework and Risk Management Process.

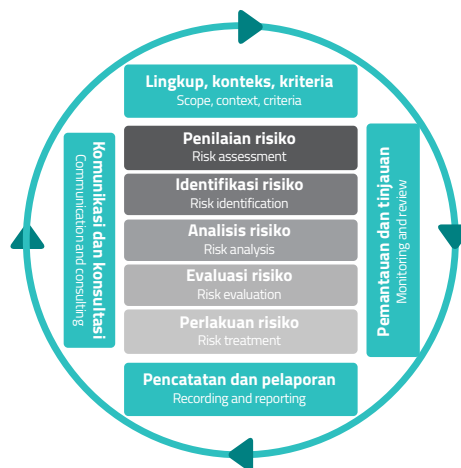


SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko melibatkan penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian, perlakuan, pemantauan, peninjauan, pencatatan dan pelaporan risiko.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

The risk management process involves systematic application of policies, procedures and practices to communication and consulting activities, context setting, and risk assessment, treatment, monitoring, review, recording and reporting.



KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

Komunikasi dan konsultasi membantu *risk owner* dalam memahami risiko, sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang diperlukan. Komunikasi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sementara konsultasi mencakup umpan balik (*feedback*) dan informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Koordinasi harus memfasilitasi secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat dan dapat dimengerti. Pertukaran informasi harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi, termasuk hak cipta individu.

RUANG LINGKUP, KONTEKS DAN KRITERIA

Tujuan penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang memadai. Ruang lingkup, konteks dan kriteria mencakup penentuan ruang lingkup proses dan pemahaman konteks eksternal dan internal.

PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko adalah proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko. Penilaian risiko sebaiknya dilakukan secara sistematis, berulang dan kolaboratif berdasarkan pengetahuan dan pandangan pemangku kepentingan.

1. Identifikasi risiko
Tujuan identifikasi risiko adalah untuk menemukan, mengenali dan menguraikan risiko yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai sasarnya. Informasi yang relevan, memadai dan mutakhir penting dalam mengidentifikasi risiko. Perseroan mengidentifikasi risiko tanpa memandang apakah sumber risiko dapat dikendalikan atau tidak.
2. Analisis Risiko
Tujuan analisis risiko adalah untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya, termasuk, jika memungkinkan tingkat risikonya. Analisis risiko melibatkan pertimbangan mendetail terhadap ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa, skenario, kendali dan efektivitas kendali tersebut. Analisis risiko dapat dilakukan dengan beragam tingkat detail dan kompleksitas, bergantung pada tujuan analisis, ketersediaan dan keandalan informasi serta ketersediaan sumber daya. Analisis risiko memberikan masukan untuk evaluasi risiko, untuk keputusan apakah risiko memerlukan perlakuan dan bagaimana perlakuannya, serta terhadap strategi dan metode perlakuan risiko yang paling sesuai.
3. Evaluasi Risiko
Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi risiko melibatkan perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan tambahan.

COMMUNICATION AND CONSULTATION

Communication and consultation helps the risk owner in understanding the risk, as the basis for making decisions and the reasons for taking required actions. Communication will increase awareness and understanding of risk, while consultation includes feedback and information obtained to support decision making. Coordination must be factual, timely, relevant, accurate and understandable. Information exchange must pay attention to the confidentiality and integrity of information, including individual copyrights.

SCOPE, CONTEXT AND CRITERIA

The purpose of establishing the scope, context and criteria is to adapt the risk management process, enable effective risk assessment and adequate risk assessment. Scope, context and criteria include determining the scope of the process and understanding the external and internal context.

RISK ASSESSMENT

Risk Assessment is a comprehensive process of risk identification, risk analysis and risk evaluation. Risk assessment should be carried out in a systematic, iterative and collaborative manner based on the knowledge and views of stakeholders.

1. Risk identification
The purpose of risk identification is to find, identify and describe risks that can help or hinder the organization in achieving its goals. Relevant, adequate and up-to-date information is important in identifying risks. The Company identifies risks regardless of whether the source of the risk can be controlled or not.
2. Risk Analysis
The purpose of risk analysis is to understand the nature of the risk and its characteristics, including, if possible, the level of risk. Risk analysis involves a detailed consideration of the uncertainties, sources of risk, impacts, possibilities, events, scenarios, controls and the effectiveness of those controls. Risk analysis can be carried out with varying levels of detail and complexity, depending on the purpose of the analysis, the availability and reliability of the information and the availability of resources. Risk analysis provides input for risk evaluation, for decisions on whether risks need treatment and how to treat them, as well as on the most appropriate risk treatment strategies and methods.
3. Risk Evaluation
The purpose of risk evaluation is to support decision making. Risk evaluation involves comparing the results of risk analysis with the established risk criteria to determine whether additional action is required.



4. Perlakuan Risiko
Tujuan perlakuan risiko adalah untuk memilih dan menerapkan opsi penanganan risiko. Perlakuan risiko mencakup proses berulang dari:
 - a. Formulasi dan seleksi opsi perlakuan risiko.
 - b. Perencanaan dan implementasi perlakuan risiko.
 - c. Penilaian efektivitas perlakuan itu.
 - d. Pengambilan keputusan apakah risiko tersisa dapat diterima.
 - e. Pelaksanaan perlakuan lanjutan, jika opsi tidak diterima.

MONITORING DAN REVIU

Bentuk *monitoring* dan *revisi* terdiri atas:

1. *Monitoring* berkelanjutan (*on going monitoring*)
Unit pemilik risiko secara terus menerus melakukan *monitoring* atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi lingkungan Perseroan. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam:
 - a. Ruang lingkup dan konteks.
 - b. Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas risiko.
 - c. Sistem pengendalian/media kontrol yang sudah ada.
 - d. Penanganan risiko.

Dalam hal terjadi perubahan signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil risiko. *Monitoring* dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dalam proses bisnis Perseroan.

2. *Monitoring* berkala
Monitoring risiko dilakukan untuk memantau pelaksanaan realisasi penanganan risiko, analisis status indikator risiko utama serta tren perubahan tingkat exposure risiko. Setelah dilakukan *monitoring* oleh *risk owner*, dilakukan pembahasan profil risiko bersama fungsi manajemen risiko dan *risk owner* yang dihadiri minimal terdiri dari *risk agent* dan *risk officer*.
3. *Revisi*
Revisi Implementasi manajemen risiko bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan *output* seluruh proses manajemen risiko dengan ketentuan yang berlaku. *Revisi* implementasi manajemen risiko dilaksanakan oleh fungsi manajemen risiko dan/atau pengelola risiko/pemilik risiko sesuai kewenangannya.

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Proses dan hasil keluaran manajemen risiko sebaiknya didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk:

1. Mengkomunikasikan aktivitas manajemen risiko dan hasil keluaran dari proses manajemen risiko.
2. Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko.
4. Membantu interaksi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk aktivitas manajemen risiko.

4. Risk Treatment
The purpose of risk treatment is to select and implement risk treatment options. Risk treatment includes an iterative process of:
 - a. Formulation and selection of risk treatment options.
 - b. Planning and implementation of risk treatment.
 - c. Assessment of the effectiveness of treatment.
 - d. Decision making whether the remaining risk is acceptable.
 - e. Implementation of further treatment, if the option is not accepted.

MONITORING AND REVIEW

The form of monitoring and review consists of:

1. On going monitoring
The risk owner unit continuously monitors all factors that affect the risk and environmental conditions of the Company. If there is a planned organizational change or a changing external environment, changes are most likely to occur in:
 - a. The scope and context.
 - b. The risk that occurs or the priority level of risk.
 - c. Existing control system/control media.
 - d. Risk handling.

In the event of a significant change, it is possible to reassess the risk profile. Monitoring is carried out regularly and becomes part of the Company's business processes.

2. Periodic monitoring
Risk monitoring is carried out to monitor the implementation of the realization of risk management, analysis of the status of main risk indicators as well as trends in changes in the level of risk exposure. After monitoring by the risk owner, a discussion of the risk profile is carried out with the risk management function and risk owner, which consists of at least risk agents and risk officers.
3. Review
The risk management review aims to see the suitability of the implementation and the output of the entire risk management process with applicable regulations. The risk management review is carried out by the risk management function and/or risk manager/risk owner according to their respective authorities.

RECORDING AND REPORTING

Risk management processes and outputs should be documented and reported through appropriate mechanisms. Recording and reporting aims to:

1. Communicating risk management activities and the outputs of risk management process.
2. Provide information for decision making.
3. Increase the effectiveness of risk management.
4. Assist in interaction with Board of Directors, Board of Commissioners and Risk Management Monitoring Committee, including those who have responsibility and accountability for risk management activities.

PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Adapun detail Perlakuan Risiko yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 untuk masing-masing Sub-Kelompok diuraikan pada penjelasan di bawah ini.

Perencanaan (ST1)

Penyebab Risiko Risk Causation

Peristiwa Risiko:
Kegagalan Implementasi Standardisasi Operasi Pelabuhan Pasca Merger

Aspek Pelayanan Kapal

1. Fasilitas eksisting Terminal Penumpang yang terbatas dan kurang optimal.
2. Belum adanya standarisasi aplikasi di terminal penumpang.
3. Pelayanan Embarkasi/Debarkasi belum dilakukan dengan baik.
4. SDM belum Optimal dalam pelayanan kepada Penumpang.
5. Pelaksanaan Gap Analisis Standardisasi dan Digitalisasi Operasi Pelayanan Kapal tidak Komprehensif.
6. Keterlambatan pengembangan dan integrasi sistem pelayanan kapal.
7. Perbedaan Karakteristik khusus pada Operasional Pelayanan Kapal di Cabang Pelabuhan tertentu, seperti adanya Pemanduan Pengolongan.
8. Pola Jaga dan Kebutuhan Pandu di Lapangan belum sesuai dengan *Guidebook* Pelayanan Kapal.

Aspect of Ship Service

1. Facilities at the existing passenger terminal are limited and suboptimal.
2. Lack of standardization of applications at the passenger terminal.
3. Embarkation/disembarkation services are not being conducted well.
4. Human resources are not optimal in serving passengers.
5. Implementation of Gap Analysis in Standardization and Digitalization of Ship Service Operations is not comprehensive.
6. Delay in the development and integration of ship service systems.
7. Special operational characteristics in Ship Service Operations at certain port branches, such as Grouping Guidance.
8. Shift patterns and Pilot requirements in the field do not align with the Ship Service Guidebook.

Aspek Pelayanan Terminal Petikemas

1. Kesalahan pemahaman penerapan standar pola operasi pelayanan petikemas.
2. Perbedaan pola operasi/ pelayanan di setiap cabang pelabuhan.

Aspect of Container Terminal Service

1. Misunderstanding in applying standard patterns of container service operation.
2. Differences in operation/service patterns at each port branch.

RISK PROFILE AND THE MITIGATION

Details of Risk Treatment that has been carried out up to Quarter IV of 2023 for each Sub-Group are described in the explanation below.

Planning (ST1)

Perlakuan Risiko Risk Treatment

Risk Events:
Failure to Implement Standardization of Port Operations Post-Merger

Aspek Pelayanan Kapal

1. Standarisasi Fasilitas Terminal Penumpang sesuai dengan *Guide Book* pelayanan kapal penumpang dan ro-ro serta Pelaksanaan *Assessment* Terminal Penumpang dan Roro.
2. Akan dilakukan pengembangan aplikasi di terminal penumpang dan Roro yang dapat diimplementasikan pada tiap Regional.
3. Penyusunan Pola Operasi/*Re- layout* untuk kegiatan Embarkasi dan Debarkasi penumpang untuk standarisasi pelayanan Terminal Penumpang dan Roro.
4. Perlu dilakukan *Training* untuk meningkatkan kecakapan petugas pelayanan Terminal Penumpang.
5. Melaksanakan *Assessment* sesuai dengan prosedur operasional Pelayanan Kapal.
6. Pembuatan *Blueprint* yang Komprehensif sebelum Pelaksanaan Pengembangan, SIT dan UAT.
7. Monitoring, dan Evaluasi *Action Plan* untuk mitigasi/mendukung Layanan Pemanduan Pengolongan.
8. Koordinasi dengan Regional/ *Sub-Holding*/Sub-Regional/Cabang serta evaluasi pola operasional untuk Penyelarasan Pola Jaga serta Analisis Kebutuhan Pandu.

Aspect of Ship Service

1. Standardization of Passenger Terminal Facilities in accordance with the Ship Passenger and RORO Service Guidebook, as well as Implementation of Passenger and RORO Terminal Assessments.
2. Development of applications for passenger and RORO terminals that can be implemented in each region.
3. Preparation of Operational Patterns/*Re-layout* for passenger embarkation and disembarkation activities to standardize Passenger and RORO Terminal services.
4. Training is needed to enhance the skills of passenger terminal service personnel.
5. Implementation of Assessments in accordance with Ship Service operational procedures.
6. Comprehensive Blueprint creation before Development, SIT, and UAT Implementation.
7. Monitoring and Evaluation of Action Plans for mitigation/support of Pilotage Grouping Services.
8. Coordination with Regional/*Sub-Holding*/Sub-Regional/Branch and evaluation of operational patterns for Shift Alignment as well as Pilot Needs Analysis.

Aspek Pelayanan Terminal Petikemas

1. Pelaksanaan *maturity level* Terminal/ *Gap Analysis* pada Cabang Pelabuhan yang dijadikan *object* standarisasi.
2. Pelaksanaan Standarisasi Operasi Pelayanan Petikemas pada Cabang Pelabuhan sesuai *Guidebook* Layanan Petikemas.

Aspect of Container Terminal Service

1. Conduct terminal maturity level/gap analysis at the port branch that become the standardization object.
2. Container service standardized operations at the port branch according to Container Service Guidebook.



Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Aspek Pelayanan Terminal Multipurpose</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas eksisting Terminal Multipurpose tidak sesuai standar. 2. Keterbatasan kapabilitas dan/atau jumlah SDM dalam implementasi 24/7. <p>Aspect of Multipurpose Terminal Services</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The existing facilities at the Multipurpose Terminal do not meet the standards. 2. Limitations in the capabilities and/or number of human resources in implementing 24/7 operations. 	<p>Aspek Pelayanan Terminal Multipurpose</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standarisasi Operasi Pelayanan Multipurpose pada Cabang Pelabuhan sesuai <i>Guidebook</i> dan Standarisasi Operasi Terminal <i>Multipurpose</i>. 2. <i>Mapping</i> Pelabuhan dan Pembuatan Konsep Penataan kerja 24 Jam. <p>Aspect of Multipurpose Terminal Services</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Multipurpose Services Standardized Operations at Port Branches in accordance with the <i>Guidebook</i> and Standardization of Multipurpose Terminal Operations. 2. Port Mapping and Conceptualization of 24-Hour Work Arrangement.
<p>Aspek Pelayanan Terminal Curah</p> <p>Pola operasi Terminal Curah eksisting belum optimal.</p> <p>Aspect of Bulk Terminal Services</p> <p>Pola operasi Terminal Curah eksisting belum optimal.</p>	<p>Aspek Pelayanan Terminal Curah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan <i>maturity level</i> Terminal/<i>Gap Analysis</i> di Cabang yang dijadikan object standarisasi. 2. Pelaksanaan Standarisasi Operasi Terminal Curah pada Cabang Pelabuhan sesuai <i>Guidebook</i>. <p>Aspect of Bulk Terminal Services</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conduct terminal maturity level/<i>Gap Analysis</i> at the branch that become the standardization object. 2. Bulk Terminal Standardized Operations at the Port Branch according to the <i>Guidebook</i>.
<p>Peristiwa Risiko: Terhambatnya Implementasi Inisiatif Strategis pada <i>Subholding</i>.</p> <p>Risk Event: Obstruction in Strategic Initiatives Implementation at the Subholding.</p>	
<p>PT Pelindo Terminal Petikemas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terwujudnya kerjasama dengan INA untuk pengembangan dan pengelolaan Belawan Container Terminal. 2. Tidak tercapainya optimalisasi model bisnis pada klaster Petikemas. 3. Tidak terlaksananya standarisasi 9 terminal Petikemas pada tahun 2023. <ol style="list-style-type: none"> 1. Failure to collaborate with INA for the development and management of Belawan Container Terminal. 2. Failure to achieve business model optimization of the Container Cluster. 3. Failure to implement standardization across 9 Container Terminals in 2023. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program <i>Monitoring & Reporting</i> Inisiatif Strategis Kantor Pusat dan <i>Subholding</i>. 2. Implementasi Sistem <i>Monitoring</i> Program Kerja. 3. <i>Review, Analisa dan Penyelarasan Masterplan</i> dan <i>Value Creation Holding dan Subholding</i>. <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring and Reporting Program for Strategic Initiatives at the Head Office and Sub-Holding levels. 2. Implementation of Work Program Monitoring System. 3. Review, Analysis, and Alignment of Master Plans and Value Creation of the Holding and Sub-Holding.
<p>PT Pelindo Multi Terminal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target standarisasi non petikemas hingga tahun 2023 sesuai dengan <i>Masterplan</i> dan RJPP yang cukup menantang yaitu sejumlah 31 terminal. 2. Tidak terlaksananya kerjasama pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) BUMN dan Swasta sesuai target tahun 2023. 3. Tidak terlaksananya kerjasama pengelolaan Pelabuhan Kementerian dan/ atau Lembaga (K/L) sesuai target tahun 2023 yaitu 1 Pelabuhan K/L. <ol style="list-style-type: none"> 1. The target for standardization of non-container terminals until 2023 according to the Master Plan and RJPP is quite challenging, involving a total of 31 terminals. 2. Failure to implement cooperation for Self-Interest Terminal Management (TUKS) between SOEs and Private sectors as targeted for 2023. 3. Failure to implement cooperation in managing Ministries Ports and/or Institutions (K/L) as targeted for 2023, specifically involving 1 Port K/L. 	

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>PT Pelindo Solusi Logistik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercapainya program – program optimalisasi <i>cost of fund</i> pada tahun 2023. 2. Tidak terlaksananya rencana kolaborasi dengan pelaku industri logistik baik untuk kerjasama intra-kolaborasi, inter-kolaborasi, dan kerjasama dengan mitra strategis. 3. Tidak terlaksananya program – program optimalisasi aset klaster logistik. <p>1. Failure to achieve cost of fund optimization programs in 2023. 2. Failure to execute collaboration plans with logistics industry actors, both for intra-collaboration, inter-collaboration, and partnerships with strategic partners. 3. Failure to implement asset optimization programs in the logistics cluster.</p> <p>PT Pelindo Jasa Maritim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target standarisasi pelayanan kapal hingga tahun 2023 sesuai dengan Masterplan dan RJPP yang cukup menantang yaitu sejumlah 37 Cabang Pelabuhan dan digitalisasi sebanyak 10 (sepuluh) hub. 2. Tidak terlaksananya rencana pengembangan layanan tambahan MEPS sesuai dengan <i>Masterplan</i> dan RJPP. 3. Tidak terlaksananya program pengembangan infrastruktur dan peralatan MEPS. <p>1. Standardization target of ship services by 2023 according to Masterplan and RJPP, which was quite challenging with a total of 37 Port Branches and digitalization of 10 (ten) hubs. 2. Failure to execute development plans of additional MEPS services as per the Masterplan and RJPP. 3. Failure to implement MEPS infrastructure and equipment development programs.</p>	

M&A dan Aliansi Strategis (ST3)

M&A and Strategic Alliances (ST3)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Kegagalan Pengembangan Bisnis melalui <i>Strategic Partnership</i> (e.g. INA).</p> <p>Risk Events: Failure in Business Development through Strategic Partnership (e.g., INA).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya kesepakatan dengan mitra. 2. Kelalaian dalam tata kelola pemilihan mitra. 3. Negligence in the governance of partner selection. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi secara intens dengan calon mitra sampai terbentuk NewCo. 2. FGD/koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk pendampingan sehingga tidak adanya kelalaian terkait tata kelola. <p>1. Intensive communication with potential partners until the formation of NewCo. 2. FGDs or coordination with relevant stakeholders for guidance to avoid governance negligence.</p>
<p>Peristiwa Risiko: Gagal Kerjasama dengan Mitra (Perseroan Logistik, Kawasan Industri, TUKS/Tersus, UPP, Pelayaran).</p> <p>Risk Events: Failed Collaboration with Partners (Logistics Companies, Industrial Estates, TUKS/Tersus, UPP, Shipping).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya kesepakatan dengan mitra. 2. Keterbatasan informasi mengenai mitra. 3. Kelalaian dalam prosedur pemilihan mitra. <p>1. Failure to made agreement with partners. 2. Limited information about partners. 3. Negligence in partner selection procedures.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Pengembangan Terintegrasi Pelabuhan dengan Kawasan Industri/KEK Arun. 2. Pemetaan Pelabuhan UPP Kemenhub yang akan dikerjakamkan. 3. Kajian Kerjasama Pengembangan dan Pengoperasian Bisnis Logistik dengan BUMN (PT KBN). 4. SPMT : Penjajakan kerjasama dengan TUKS/Tersus. <p>1. Integrated Port Development Study with Arun Industrial Estate/KEK. 2. Mapping of Ministry of Transportation UPP Ports to be collaborated. 3. Study of Collaboration for Logistics Business Development and Operation with SOE (PT KBN). 4. SPMT: Explore cooperation with TUKS/Tersus.</p>
<p>Peristiwa Risiko: Kegagalan dalam penataan/pemurnian bisnis anak dan cucu perusahaan Pelindo Group.</p> <p>Risk Events: Failure in organizing/streamlining the business of subsidiaries and affiliated companies of Pelindo Group.</p>	



Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Banyaknya Anak/Cucu Perusahaan Pelindo pasca merger yang bergabung dengan membawa isu-isu spesifik seperti performansi yang kurang optimal, <i>non core</i> bisnis pelabuhan, <i>overlapping</i> segmen bisnis, kepemilikan non-Pelindo, dan <i>misalignment</i> dengan <i>Subholding</i> di atasnya.</p> <p>Many of post-merger Pelindo's subsidiaries/affiliated companies which brought specific issues such as suboptimal performance, non-core port business, overlapping business segments, non-Pelindo ownership, and misalignment with the Subholding above them.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi Tata Kelola Aksi Korporasi Pemurnian Fokus Bisnis Pelindo Group. Implementasi Aksi Korporasi Pemurnian Fokus Bisnis Pelindo Group. <ol style="list-style-type: none"> Implementation of Corporate Action Governance Refining Pelindo Group's Business Focus. Implementation of Corporate Action to Refine Pelindo Group's Business Focus.
<p>Peristiwa Risiko: Kegagalan Divestasi Saham PT CTP.</p> <p>Risk Events: Kegagalan Divestasi Saham PT CTP.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> Tidak adanya kesepakatan dengan calon mitra yang terpilih. Realisasi trafik JTCC masih di bawah RKAP 2023 (Realisasi LHR Average 6.641 vs 14.967). Lingkup dan kondisi fasilitas kredit investasi memberatkan valuasi investor asing. <ol style="list-style-type: none"> Failure to made agreement with selected potential partners. Realization of JTCC traffic is still below the 2023 RKAP (Realization of LHR Average 6,641 vs 14,967). The scope and conditions of investment credit facilities burden the valuation of foreign investors. 	<ol style="list-style-type: none"> Mempertahankan proses divestasi (fire 2.0) sambil menunggu penyelesaian fisik JTCC hingga 100%. Melakukan terminasi divestasi (Fire 2.0) jika tidak ada perkembangan hingga fisik JTCC selesai 100%. Mengulang proses divestasi (Fire 2.1) dengan menambahkan persyaratan jaminan penawaran. Menyeleksi calon investor yang diyakini bonafid dengan bukti yang cukup memadai. <ol style="list-style-type: none"> Maintaining the divestment process (Fire 2.0) while waiting for JTCC physical 100% completion. Divestment termination (Fire 2.0) if there is no progress until JTCC physical 100% completion. Repeating divestment process (Fire 2.1) with additional requirements of offer guarantee. Selecting investors believed to be bona fide with sufficient supporting evidence.

Pergerakan Rupiah (PM2)

Rupiah Movement (PM2)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Rugi Selisih Kurs.</p> <p>Risk Events: Rugi Selisih Kurs.</p>	
<p>Adanya kewajiban perusahaan dalam bentuk valas yang sangat dipengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika.</p> <p>The Company's foreign currency obligation that is highly influenced by exchange rate fluctuations of Indonesian Rupiah against US Dollar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Buyback Global Bonds.</i> Penerapan <i>accounting hedge.</i> Upaya Peningkatan Pendapatan berbasis USD dalam rangka meningkatkan <i>Non-Contractual Most Probably Revenue.</i> <ol style="list-style-type: none"> Kerjasama dengan Mitra/Operator Terminal Global. Penyesuaian Tarif Layanan Internasional. Buyback Global Bonds. Implementation of accounting hedge. Efforts to Increase USD-based Revenue to Improve Non-Contractual Most Probably Revenue. <ol style="list-style-type: none"> Collaboration with Global Terminal Partners/Operators. Adjustment of International Service Tariffs.

Pergerakan Komoditas (PM3)

Commodity Movement (PM3)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Penurunan Trafik Kapal.</p> <p>Risk Events: Decrease in Ship Traffic.</p> <ol style="list-style-type: none"> Standard Operasi dan Kualitas Pelayanan Pemanduan dan Penundaan belum optimal. Adanya perpindahan arus kapal ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kompetitor. <ol style="list-style-type: none"> Standard Operations and Service Quality of Piloting and Delay are not optimal. Shift of vessel traffic to competitor Port Business Entities (BUP). 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Standar Pelayanan dan Standard Operasi Pelayanan Pemanduan kepada Regional, <i>Subholding</i>, Cabang dan Anak Perusahaan. Kerjasama pelayanan jasa kapal dengan mitra (BUP/TUKS/Tersus) yang berada di seluruh wilayah sekitar Cabang Pelindo. <ol style="list-style-type: none"> Monitoring and Evaluation of Service and Operating Standards for Piloting Services to Regional, Subholding, Branches, and Subsidiaries. Collaboration of ship services with partners (BUP/TUKS/Tersus) located throughout the areas surrounding Pelindo Branches.
<p>Peristiwa Risiko: Penurunan Throughput Petikemas.</p> <p>Risk Events: Decrease in Container Throughput.</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya perpindahan petikemas ke TUKS yang dapat terjadi karena belum terstandarnya pelayanan terminal petikemas Pelindo. Belum berjalannya konsep <i>Hub and Spoke</i>. <ol style="list-style-type: none"> Container moved to TUKS due to lack of standardization in Pelindo's container terminal services. The Hub and Spoke concept has not yet been implemented. 	<ol style="list-style-type: none"> Standarisasi Operasi Pelayanan Petikemas. Digitalisasi dan Sistemisasi Pelayanan Petikemas. Kerjasama antar Pelabuhan dan <i>Shipping Line</i> untuk Optimalisasi Konsep <i>Hub and Spoke</i>. Peningkatan Pelayanan melalui <i>Key Account Management</i> terintegrasi. Standarisasi <i>Master Data</i> dan Implementasi Sistem MDM dan <i>Single CRM</i>. <ol style="list-style-type: none"> Standardization of Container Terminal Operations. Digitalization and Systemization of Container Terminal Services. Collaboration between Ports and Shipping Lines for Hub and Spoke Optimization. Enhanced Services through Integrated Key Account Management. Standardization of Master Data and MDM and Single CRM Systems implementation.
<p>Peristiwa Risiko: Penurunan <i>Throughput</i> Non Petikemas.</p> <p>Risk Events: Decrease in Non Container Throughput.</p> <p>Faktor eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penurunan kegiatan <i>import steel product</i> seiring dengan penurunan kegiatan industri otomotif dan baja konstruksi. Penurunan ekspor curah kering berupa Batubara. Penurunan ekspor curah cair khususnya <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) akibat kebijakan Uni Eropa. Penurunan kegiatan <i>handling</i> kendaraan seiring dengan menurunnya industri otomotif dan muatan barang <i>unitized</i> akibat pandemi COVID-19. <p>External Factors:</p> <ol style="list-style-type: none"> Decrease in steel products import due to reduced activities of automotive and construction steel industry. Decrease in dry bulk exports such as coal. Decrease in liquid bulk exports, especially Crude Palm Oil (CPO), due to European Union policies. Decrease in vehicle handling activities due to reduced automotive industry and unitized cargo loads as a result of COVID-19 pandemic. <p>Faktor internal: Belum terstandarnya layanan non petikemas pada beberapa cabang pelabuhan Pelindo.</p> <p>Internal Factors: Belum terstandarnya layanan non petikemas pada beberapa cabang pelabuhan Pelindo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Standarisasi Operasi Terminal Curah. Standarisasi Operasional Terminal Multipurpose. Digitalisasi dan Sistemisasi Terminal Curah. Digitalisasi dan Sistemisasi Terminal Multipurpose. Kerjasama cargo handling milik TUKS/Tersus. Peningkatan Pelayanan melalui <i>Key Account Management</i> terintegrasi. Standarisasi Master Data dan Implementasi Sistem MDM dan <i>Single CRM</i>. <ol style="list-style-type: none"> Standardization of Bulk Terminal Operations. Standardization of Multipurpose Terminal Operations. Digitalization and Systemization of Bulk Terminals. Digitalization and Systemization of Multipurpose Terminals. Collaboration with cargo handling owned by TUKS/Tersus. Improvement of Services through Integrated Key Account Management. Standardization of Master Data and Implementation of MDM and Single CRM System.



Environmental Social Governance (SL1)

Environmental Social Governance (SL1)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Komplain/Tuntutan Masyarakat pada Proyek BMTH.</p> <p>Risk Events: Community Complaints/Claims on BMTH Projects.</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan dipandang masyarakat mengganggu aktivitas nelayan/masyarakat/aset milik masyarakat sekitar proyek. Project implementation is seen as disturbing fishermen activities/ community/community assets around the project.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan program CSR. 2. Perekrutan tenaga lokal dalam pekerjaan proyek BMTH. 1. CSR programs implementation. 2. Recruit Local workforce for BMTH project.

Pencemaran Lingkungan (SL2)

Environmental Pollution (SL2)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Pencemaran Lingkungan.</p> <p>Risk Events: Environmental Pollution (SL2).</p> <p>Pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) karena kegiatan konstruksi dan operasional Pelabuhan. Environmental pollution (water, soil and air) due to Port construction and operational activities.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas dan perizinan pengolahan limbah cair, limbah B3 dan pengelolaan sampah. 2. Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. 3. SPMT : Pelatihan/traning untuk meningkatkan kompetensi SDM terkait <i>handling cargo</i> sesuai karakteristik cargo. 1. Provide facilities and licenses for liquid waste treatment, hazardous waste and waste management. 2. Environmental management and monitoring activities. 3. SPMT: Training to improve staff's competencies related to cargo handling according to cargo characteristics.

Keamanan Jaringan (TK2)

Network Security (TK2)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: <i>Cyber Attack</i> Sistem Informasi.</p> <p>Risk Events: Cyber Attack on Information System.</p> <p>Adanya ancaman tindakan berbahaya seperti Virus, malware, dan lainnya. Threat of malicious actions such as Viruses, malware, and more.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan & Implementasi SOC (<i>Security Operation Center</i>): <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Tim SIRT (<i>Security Incident Response Team</i>) Pelindo Group. b. Peningkatan kapabilitas IT Security. c. Peningkatan kapabilitas SOC (<i>Security Operation Center</i>). d. Akan dilakukan <i>assessment</i> Keamanan Informasi atas layanan IT yang dilakukan di Pelindo Group. 2. Melakukan penyusunan DRP (<i>Disaster Recovery Plan</i>). 3. <i>Journey to Cloud</i> dan Implementasi <i>Cloud Management Platform</i>. <ol style="list-style-type: none"> 1. Formation and Implementation of SOC (Security Operation Center): <ol style="list-style-type: none"> a. Formation of SIRT (Security Incident Response Team) of Pelindo Group. b. Enhancement of IT Security capabilities. c. Enhancement of SOC (Security Operation Center) capabilities. d. Information Security assessment will be conducted on IT services within Pelindo Group. 2. Development of DRP (Disaster Recovery Plan). 3. Journey to Cloud and Implementation of Cloud Management Platform.

Cash Flow (KE2)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Piutang Macet.</p> <p>Risk Events: Non-performing Loans.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> Belum meratanya implementasi skema pembayaran <i>Autocollection</i>, <i>Billing Payment</i>, <i>UPER/advanced payment</i> di seluruh <i>Group PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</i>. Pengguna jasa tidak mampu dan/atau tidak mau membayar piutang macet. The uneven implementation of <i>Autocollection</i>, <i>Billing Payment</i>, <i>UPER/advanced payment</i> schemes across the entire <i>PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group</i>. Users are unable and/or unwilling to pay outstanding debts. 	<p>Mengurangi Dampak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Monitoring</i> Penyelesaian Piutang Usaha Macet. Penagihan Piutang Macet. <p>Mengurangi Kemungkinan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi <i>Auto Collection System</i>. Optimalisasi <i>Supply Chain Financing</i>. Implementasi <i>Locking System</i>. <p>Reducing Impact:</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitoring the settlement of overdue business debts. Collection of overdue debts. <p>Reducing the Likelihood:</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimization of the <i>Auto Collection System</i>. Optimization of <i>Supply Chain Financing</i>. Implementation of <i>Locking System</i>.

Pajak (KE3)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Kurang Bayar dan Denda Pajak.</p> <p>Risk Events: Underpayment and Tax Penalties.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> Ketidaktepatan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, materai, PNPB, dan konsesi. Ketidaksesuaian pengenaan jenis dan tarif pajak. Perubahan ketentuan perpajakan. <ol style="list-style-type: none"> Inaccuracy in tax, stamp duty, non-tax revenue, and concession calculation, payment, and reporting. Inappropriate application of tax types and rates. Changes in tax regulations. 	<ol style="list-style-type: none"> Perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak telah dilakukan secara terpusat dan menggunakan sistem yang sama (<i>single ERP</i>). Peningkatan pengetahuan pajak dan sosialisasi penerapan peraturan perpajakan. Sosialisasi penerapan peraturan perpajakan (<i>update</i> peraturan). <ol style="list-style-type: none"> Tax calculation, payment, and reporting have been centralized and done using the same system (<i>single ERP</i>). Improved tax knowledge and socialization of tax regulation implementation. Socialization of tax regulation implementation (regulatory updates).

Kewajiban Kontinjen (KE7)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Kegagalan Pengelolaan Dana Pensiun.</p> <p>Risk Events: Mismanagement of Pension Funds.</p>	
<p>Faktor rasio kecukupan dan kualitas pendanaan Dana Pensiun. Factor of adequacy ratio and quality of pension fund financing.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Uji Tuntas atas tingkat kesehatan Dana Pensiun. Memenuhi kewajiban atas kekurangan pendanaan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyusunan <i>Corporate Roadmap (Transformasi) Pengelolaan Dana Pensiun</i>. <ol style="list-style-type: none"> Conducting a Comprehensive Examination of the Health Level of the Pension Fund. Fulfilling obligations for the shortfall in pension fund financing according to applicable regulations. Formulating a <i>Corporate Roadmap (Transformation) for Pension Fund Management</i>.



Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OP3)

Occupational Health and Safety (OP3)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Kecelakaan Kerja (<i>Fatality</i>).</p> <p>Risk Events: Work Accidents (<i>Fatality</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> Implementasi SMK3 yang belum konsisten. Pengawasan kegiatan operasional yang minim oleh <i>stakeholder</i>. Kualitas infrastruktur di lapangan yang buruk sehingga menimbulkan potensi bahaya. Belum adanya clusterisasi sesuai dengan jenis kegiatan bongkar muat. Belum terstandarnya komitmen SMK3 dalam kontrak kerja sama dengan mitra yang beroperasi di area pelabuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan Sarana Prasarana HSSE di Cabang dan Terminal Non-Petikemas. HSSE <i>Silent Inspection</i>. Pelaksanaan <i>rewards and punishment</i> dalam penerapan <i>safety culture</i>. Penguatan <i>safety awareness</i> dan <i>safety briefing</i> di Cabang Pelabuhan. <ol style="list-style-type: none"> Fulfillment of HSSE Facilities and Infrastructure at Non-Container Branches and Terminals. HSSE <i>Silent Inspection</i>. Implementation of rewards and punishments in the application of safety culture. Strengthening safety awareness and safety briefing at Port Branches.

Sales & Marketing (OP4)

Sales & Marketing (OP4)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Tidak Optimalnya Pengelolaan Aset <i>Idle</i>.</p> <p>Risk Events: Suboptimal Management of Idle Assets.</p> <ol style="list-style-type: none"> Lokasi lahan yang tidak strategis. Fasilitas dan peralatan pelabuhan yang tidak memadai. Kurangnya minat pengguna jasa. 	<ol style="list-style-type: none"> Mapping lahan idle seluruh Regional. Evaluasi kesiapan pemanfaatan lahan idle. Koordinasi rencana kerjasama dengan mitra. Koordinasi proses perikatan perjanjian. Pemasaran lahan oleh Regional dan Cabang Pelabuhan. <ol style="list-style-type: none"> Mapping all idle land across Regions. Evaluating the readiness for idle land utilization. Partnership plans coordination with partners. Coordinating the agreement-binding process. Marketing the land by Regions and Port Branches.

Budaya dan Kesejahteraan (OP7)

Culture and Welfare (OP7)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Demotivasi Pekerja.</p> <p>Risk Events: Employee Demotivation.</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum adanya media/sarana untuk menyampaikan keluhan pekerja serta memberikan masukan untuk Manajemen. Belum terfasilitasinya penyaluran minat dan bakat pekerja. Belum adanya kebijakan yang selaras untuk pekerja. 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi aplikasi/media yang dapat menampung dan menyelesaikan keluhan pekerja. Peningkatan <i>engagement</i> pekerja dengan melalui penyaluran minat dan bakat terkait Baporkes dan kerohanian. Penyusunan kebijakan- kebijakan yang terkait dengan bidang organisasi, kesejahteraan, benefit dan fasilitas. <ol style="list-style-type: none"> Optimization of applications/media that can accommodate and resolve employee grievances. Increasing employee engagement by channeling interests and talents related to health and spirituality. Formulation of policies related to aspects of organizational, welfare, benefits, and facilities.

Kepatuhan (HK2)

Compliance (HK2)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Keterlambatan penyesuaian dokumen perizinan, konsesi, dan dokumen hukum lainnya pascamerger.</p> <p>Risk Events: Keterlambatan penyesuaian dokumen perizinan, konsesi, dan dokumen hukum lainnya pascamerger.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi antara Pelindo dengan instansi terkait untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian dokumen. Ketidaksesuaian prosedur penyesuaian dokumen dengan ketentuan/perundangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyesuaian Perizinan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pasca Merger kepada instansi terkait. Penyusunan Addendum Perjanjian Konsesi di wilayah PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
<ol style="list-style-type: none"> Lack of coordination between Pelindo and relevant agencies to fulfill document adjustment requirements. Non-compliance of document adjustment procedures with applicable regulations and laws. 	<ol style="list-style-type: none"> Adjustment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Licenses Post Merger with relevant authorities. Preparation of Addendum to Concession Agreements in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) areas.
<p>Peristiwa Risiko: Pelanggaran Kode Etik (<i>Fraud</i>, <i>Penyuapan</i>, <i>Gratifikasi</i>, dan lainnya).</p> <p>Risk Events: Violation of Code of Conduct (<i>Fraud</i>, <i>Bribery</i>, <i>Gratification</i>, and others).</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum semua pekerja paham dan sadar terkait larangan tindakan suap, curang, gratifikasi dan pemerasan. Masih minimnya sosialisasi larangan tindakan suap, curang, gratifikasi dan pemerasan. Tidak semua insan Pelindo yang mengetahui dan menerima adanya tindakan suap, curang, gratifikasi dan pemerasan akan melaporkan tindakan tersebut ke kontak satuan pengawas Pelindo Bersih (<i>Whistleblowing</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan, <i>monitoring</i>, evaluasi atas pengelolaan <i>Whistleblowing System</i>. <i>Surveillance</i>/Sertifikasi ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) Terintegrasi Multisite. Sosialisasi larangan tindakan curang, korupsi dan pemerasan kepada seluruh Unit Kerja di Pelindo Group. Penguatan Kebijakan pada Perusahaan untuk mengurangi risiko pelanggaran kode etik (<i>Fraud</i>, Korupsi, Kecurangan, Penyuapan dan Gratifikasi).
<ol style="list-style-type: none"> Not all employees are aware of and understand the prohibition of bribery, cheating, gratification, and extortion. There is still a lack of socialization regarding the prohibition of bribery, cheating, gratification, and extortion. Not all Pelindo employees who are aware of and accept instances of bribery, cheating, gratification, and extortion will report such actions to the Pelindo Bersih supervisory unit (<i>Whistleblowing</i> contact). 	<ol style="list-style-type: none"> Implementation, monitoring, and evaluation of <i>Whistleblowing System</i> management. <i>Surveillance</i>/Certification of ISO 37001 (Anti-Bribery Management System) Integrated Multisite. Socialization of the prohibition of cheating, corruption, and extortion to all Work Units in Pelindo Group. Strengthening Policies in the Company to reduce the risk of ethical code violations (<i>Fraud</i>, Corruption, Cheating, Bribery, and Gratuities).

Kehilangan Hak atas Aset (HK4)

Loss of Rights to Assets (HK4)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Sengketa Aset Lahan.</p> <p>Risk Events: Land Asset Dispute.</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya penguasaan aset Perusahaan oleh pihak lain yang sebelumnya menjadi mitra dan telah habis masa perjanjiannya. Adanya tumpang tindih bukti kepemilikan lahan dan/ atau kesalahan dalam pencantuman objek tanah pada register buku tanah milik instansi yang berwenang. Adanya aset lahan milik perusahaan yang ditempati/dimanfaatkan oleh warga tanpa adanya perjanjian kerjasama. Kurang optimalnya pengamanan aset baik secara legalitas maupun fisik terhadap lahan yang belum dimanfaatkan/ dikerjasamakan. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan <i>ploting</i> dan coklit ulang pada peta bidang HPL yang bersengketa dengan melibatkan BPN. Melakukan pencatatan dan inventarisasi terhadap aset yang bersengketa dengan warga maupun pihak ketiga. Melakukan eksekusi putusan perkara sengketa tanah. Melakukan gugatan/ upaya hukum kepada pihak yang mengklaim/ menguasai secara fisik tanah milik perusahaan. Melakukan perlawanan atas gugatan pihak lain yang mengklaim aset tanah Perseroan. Evaluasi dan pengamanan aset lahan komersial dan aset non komersial Perseroan. Membuat MOU dengan Kementerian ATR/BPN.
<ol style="list-style-type: none"> The Company's assets being taken over by other parties who were previously partners and whose agreements have expired. Overlapping ownership evidence of land and/or errors in recording land objects in the land register owned by the authorized agency. Company-owned land assets being occupied/utilized by residents without any cooperation agreement. Suboptimal security of assets, both in terms of legality and physically, for land that has not been utilized or cooperated with. 	<ol style="list-style-type: none"> Conducting re-survey and verification of disputed land by involving the BPN. Recording and inventory assets that are in dispute with residents or third parties. Executing court decisions on land dispute cases. Filing lawsuits/legal actions against parties claiming/physically occupying the Company's land. Defending against lawsuits from other parties claiming the Company's assets. Evaluating and securing the Company's commercial and non-commercial land assets. Establishing a MOU with the Ministry of ATR/BPN.



Pelaksanaan Proyek (PR1)

Project Implementation (PR1)

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Keterlambatan Penyerapan Investasi.</p> <p>Risk Events: Delay in Investment Absorption.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kajian/studi desain yang tidak komprehensif. Perizinan yang belum lengkap. Kondisi area kerja yang belum <i>clean & clear</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Monitoring</i> dan pengendalian pelaksanaan proyek konstruksi. Filterisasi dan evaluasi pengusulan investasi melalui Komite GRC. Pembentukan Group yang <i>dedicated</i> mengelola investasi.
<ol style="list-style-type: none"> Non-comprehensive study design Incomplete License. Unclear and Unprepared Working Area Conditions. 	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring and controlling the projects construction. Filtering and evaluating investment proposals through the GRC Committee. Formation of a dedicated group to manage investments.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PR2)

National Strategic Projects (PR2)

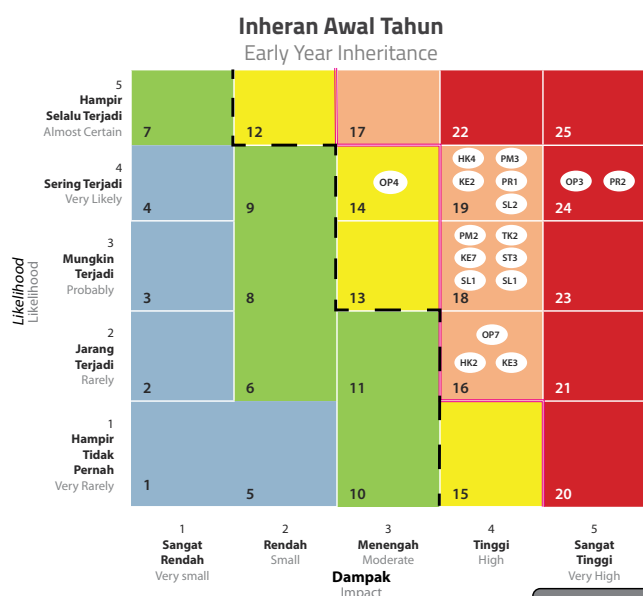
Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Peristiwa Risiko: Keterlambatan Penyelesaian Proyek BMTH.</p> <p>Risk Events: Delay in Completion of BMTH Project.</p> <ol style="list-style-type: none"> Terhambatnya penerbitan Rencana Induk Pelabuhan. Terhambatnya proses pengesahan Izin Lingkungan oleh KLHK. 	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Stakeholder (Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, KPPIP, Kemenko Marves, PPS Kejaksaan Agung, Pemerintah Daerah) untuk percepatan proses penerbitan RIP. Melakukan perencanaan dan pelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Izin Lingkungan (Addendum AMDAL termasuk Izin Dumping Area, dll). Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada konsultan dan komunikasi dengan divisi fungsional terkait.
<ol style="list-style-type: none"> Obstruction in issuing the Port Master Plan. Obstruction in the approval process of Environmental Permit by the Ministry of KLHK. 	<ol style="list-style-type: none"> Coordinating with Stakeholders (Ministry of Transportation, Ministry of State-Owned Enterprises, KPPIP, Coordinating Ministry for Maritime Affairs, PPS of the Attorney General's Office, Regional Government) to expedite the issuance process of the Port Master Plan. Planning and completing the necessary documents for obtaining the Environmental Permit (including AMDAL Addendum, Dumping Area Permit, etc.). Coordinating and assisting consultants and communicating with relevant functional divisions.
<p>Peristiwa Risiko: Alokasi Pendanaan PMN BMTH Tidak Sesuai Rencana.</p> <p>Risk Events: The Allocation of BMTH PMN Funding Does Not Align with the Plan.</p> <p><i>Progress</i> pekerjaan PMN tidak sesuai dengan rencana. PMN work progress does not align with the plan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyusunan Justifikasi oleh Individual <i>Expert</i> Independen. Pelaporan secara rutin kepada <i>Stakeholder</i> Terkait dengan sebelumnya melakukan asistensi kepada BPKP. Dilakukan pembahasan terkait dengan rencana perubahan tata cara pembayaran. Menghitung kebutuhan riil dana PMN untuk penyelesaian pekerjaan pengerukan alur dan kolam.
	<ol style="list-style-type: none"> Formulating Justifications by Independent Individual Experts. Regular Reporting to Relevant Stakeholders with prior assistance from BPKP. Discussions regarding the planned changes in payment procedures. Calculating the actual funding needs of PMN for the completion of dredging and basin work.
<p>Peristiwa Risiko: Keterlambatan Penyelesaian Proyek Makassar <i>New Port</i> (Tahap 1B dan 1C).</p> <p>Risk Events: Delay in Completion of the Makassar <i>New Port</i> Project (Phase 1B and 1C).</p>	

Penyebab Risiko Risk Causation	Perlakuan Risiko Risk Treatment
<p>Adanya item pekerjaan yang tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan dalam dokumen teknis. There are work items that are not included in the scope of work as defined in the technical documents.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan koordinasi dengan Konsultan Perencanaan terkait proses review area disposal. 2. Koordinasi dengan HO PT Pelindo (Persero) terkait persiapan pelelangan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation and coordination with Planning Consultants regarding the review process of disposal area. 2. Coordination with Head Office of PT Pelindo (Persero) regarding preparation for auction.
<p>Peristiwa Risiko: Keterlambatan Penyelesaian Relokasi Jalan Nasional pada Terminal Kijing.</p>	
<p>Risk Events: Delay in Completing the Relocation of National Road at Kijing Terminal.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksesuaian kondisi di lapangan dengan DED. 2. Keterlambatan pengurusan dan penerbitan perizinan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Inconsistency between field conditions and Detailed Engineering Design (DED). 2. Delays in processing and issuing permits. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Tim Perencana dan Tim BPJN Kalimantan Barat untuk penyesuaian desain. 2. Berkoordinasi secara intensif dan melakukan asistensi kepada <i>stakeholder</i> dan instansi terkait. <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinate with the Planning Team and BPJN Kalimantan Barat for design adjustments. 2. Intensive and assistance to stakeholders and relevant agencies.
<p>Peristiwa Risiko: Keterlambatan Penyiapan Perizinan dan Pengadaan Lahan Proyek New Priok Eastern Access (NPEA).</p>	
<p>Risk Events: Delay in the Preparation of Permits and Land Acquisition for the New Priok Eastern Access (NPEA) Project.</p>	
<p>Realisasi SLA proses internal instansi terkait dalam hal pengurusan perizinan terkadang tidak sesuai dengan yang dituangkan dalam peraturan penerbitan perizinan. The realization of SLAs in the internal processes of related agencies regarding permit management sometimes does not align with what is stipulated in the licensing regulations.</p>	<p>Mengidentifikasi <i>key person</i> dalam pengurusan perizinan tertentu dan proses pengadaan lahan serta melakukan koordinasi intensif dalam rangka percepatan penerbitan perizinan dan proses pengadaan lahan. Identifying key personnel involved in specific licensing processes and land acquisition, and conducting intensive coordination to expedite permit issuance and land acquisition processes.</p>



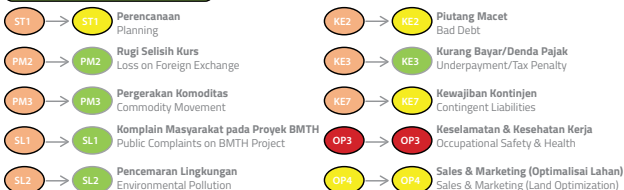
PENILAIAN RISIKO

RISK ASSESSMENT



Trend Risiko dari Awal | Likelihood

Penurunan Level Risiko Likelihood



Risiko Tidak Bergerak Unmovable Risk



EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT EVALUATION

Mekanisme pelaksanaan evaluasi Manajemen Risiko dilakukan secara berjenjang, mulai dari Cabang Pelabuhan ke Fungsi Manajemen Risiko Regional kemudian diteruskan ke *Group* Manajemen Risiko Kantor Pusat, sedangkan untuk anak Perseroan ke Divisi Manajemen Risiko *Sub-holding* kemudian dilaporkan ke *Group* Manajemen Risiko Kantor Pusat dan untuk anak perusahaan di luar *cluster* bisnis, dilakukan evaluasi secara langsung oleh *Group* Manajemen Risiko Kantor Pusat. Evaluasi telah dilakukan dengan melihat data pada pengisian profil risiko pada kertas kerja *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dengan pendekatan efektivitas tindakan mitigasi yang telah dilaksanakan oleh pemilik risiko (*Risk Owner*), kemudian divalidasi dan diverifikasi kembali dengan menunjukkan data-data kinerja operasional, keuangan, investasi dan data pendukung lainnya serta menggunakan data kejadian yang merugikan (*loss event*).

The Risk Management evaluation mechanism is carried out in stages, starting from the Port Branch to the Regional Risk Management Function then forwarded to the Head Office Risk Management Group, while for subsidiaries to the Sub-holding Risk Management Division then reported to the Head Office Risk Management Group and for subsidiaries outside the business cluster, the evaluation is carried out directly by the Head Office Risk Management Group. The evaluation has been carried out by looking at the data on risk profile filling in the Risk Control Self Assessment (RCSA) working paper with the approach of effectiveness of mitigation actions that have been implemented by the risk owner, then validated and verified again by showing operational, financial, investment and other supporting data and using loss event data.

Hasil evaluasi disampaikan melalui Nota Dinas kepada Unit Kerja terkait ataupun dilakukan pembahasan secara langsung bersama dengan *risk owner* dengan mekanisme memberikan masukan, saran, dan *feed back* terkait pengisian RCSA.

The evaluation results are submitted through a Service Memorandum to the relevant Work Unit or discussed directly with the risk owner with the mechanism of providing input, suggestions, and feed back related to RCSA filling.

Rencana mitigasi yang sudah ada akan dilakukan *monitoring* dengan periode bulanan dan pelaporan dilakukan per triwulanan. Selanjutnya, laporan *monitoring* profil risiko triwulanan akan disusun dan disampaikan kepada Group Anggaran dan Pelaporan untuk dimuat dalam laporan manajemen triwulanan korporat.

Pada tahun 2023 telah dilakukan asesmen maturitas penerapan manajemen risiko berdasarkan pada 5 (lima) dimensi dan 65 parameter penilaian. Penerapan manajemen risiko yang dinilai meliputi Dimensi Budaya dan Kapabilitas Risiko, Dimensi Organisasi dan Tata Kelola Risiko, Dimensi Kerangka Risiko dan Kepatuhan, Dimensi Proses dan Kontrol Risiko, Dimensi Model, Data dan Teknologi Risiko. Hasil asesmen maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan skor sebesar 3,68, dengan predikat Fase Praktik yang Baik.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris Perseroan memiliki organ pendukung yakni Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantau Manajemen Risiko yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dan Direksi berpandangan bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai. Hal ini berdasarkan bawah *Group* Manajemen Risiko Kantor Pusat secara periodik selalu melakukan pertemuan dengan Komite GCG dan PMR dalam rangka melakukan koordinasi terkait rencana dan *monitoring* proses implementasi Manajemen Risiko Perusahaan. Hasil koordinasi dituangkan dalam bentuk notulen rapat untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh *Group* Manajemen Risiko. Koordinasi yang secara rutin telah dilakukan dengan Komite GCG dan PMR di tahun 2023 adalah Koordinasi Bulanan dan Koordinasi Triwulanan. Adapun topik yang dibahas dalam koordinasi tersebut diantaranya meliputi Usulan Profil Risiko RKAP, Hasil *Monitoring* Profil Risiko Triwulanan dan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian Direksi dan Komisaris.

The existing mitigation plan will be monitored with a monthly period and reporting is carried out quarterly. Furthermore, a quarterly risk profile monitoring report will be prepared and submitted to the Budget and Reporting Group to be included in the quarterly corporate management report.

In 2023, an assessment of risk management maturity was conducted based on 5 dimensions and 65 assessment parameters. The risk management assessed includes the dimensions of Risk Culture and Capability, Organizational and Risk Governance, Risk Framework and Compliance, Risk Process and Control, and Risk Model, Data, and Technology. The results of risk management maturity assessment showed a score of 3.68, with a predicate of Good Practice Phase.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company's Board of Commissioners has supporting organs, including the Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring (GCG and RMM) Committee that is tasked with monitoring and evaluating the Risk Management work unit duties in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Board of Commissioners and Board of Directors are of the view that the risk management system is adequate. This is based on the fact that the Head Office Risk Management Group periodically holds meetings with the GCG and PMR Committees in order to coordinate plans and monitor the Company's Risk Management implementation process. The results of coordination are presented in the form of meeting minutes for further follow-up by the Risk Management Group. Coordination that has been routinely carried out with the GCG and PMR Committees in 2023 is Monthly Coordination and Quarterly Coordination. The topics discussed in this coordination include the Proposed RKAP Risk Profile, Quarterly Risk Profile Monitoring Results and other matters of concern to the Directors and Commissioners.



PERKARA HUKUM LEGAL CASES

Tabel Perkara Hukum
Legal Cases

No.	Perkara Penting Litigation	Jumlah Amount		
		Perdata Civil	Pidana Criminal	Hubungan Industrial Industrial Relations
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Completed (had permanent legal force)	11	0	4
2.	Dalam proses penyelesaian In the process of completion	34	0	2
Jumlah Total		45	0	6

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN LEGAL CASES FACED BY THE COMPANY

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan
Legal Cases Faced by the Company

No	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Status Penyelesaian Settlement Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perseroan Impact on the Company's Condition
1	<p>Gugatan yang diajukan oleh Thomas Situmorang di Pengadilan Negeri Kisaran dengan nomor register 78/Pdt.G/2021/PN.KIS terkait dengan keberatan atas nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Terminal <i>Multipurpose</i> pada Pelabuhan Kuala Tanjung yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 25/Pdt.P.Kos/2021/PN.Kis.</p> <p>The lawsuit filed by Thomas Situmorang at the Kisaran District Court with the register number 78/Pdt.G/2021/PN.KIS is related to objections to the value of compensation in land acquisition for the construction of Multipurpose Terminal at the Port of Kuala Tanjung which is determined based on the Consignment Stipulation of the Kisaran District Court Number 25/Pdt.P.Kos/2021/PN.Kis.</p>	<p>Perseroan telah menang pada tingkat pertama serta Banding dan saat ini dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung.</p> <p>The Company has won at first instance as well as on appeal and is currently in the Cassation stage at the Supreme Court.</p>	<p>Meminta nilai Penggantian pembebasan tanah seluas 208 M2 berikut bangunan milik Penggugat sebesar Rp975.600.000.</p> <p>The request for compensation for the land acquisition of 208 square meters including the buildings owned by the Plaintiff is Rp975,600,000.</p>	Tidak ada None	<p>Terhambatnya Proses Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung.</p> <p>Obstacles in Land Acquisition Process for Kuala Tanjung Port Development.</p>
2	<p>Gugatan yang diajukan oleh Junianto Sitinjak di Pengadilan Negeri Kisaran dengan nomor register 79/Pdt.G/2021/PN.KIS terkait dengan keberatan atas nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Terminal <i>Multipurpose</i> pada Pelabuhan Kuala Tanjung yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pdt.P.Kos/2021/PN.Kis.</p> <p>The lawsuit filed by Junianto Sitinjak at the Kisaran District Court with register number 79/Pdt.G/2021/PN.KIS is related to objections to the value of compensation in land acquisition for the construction of Multipurpose Terminal at the Port of Kuala Tanjung which is determined based on the Consignment Stipulation of the Kisaran District Court Number 27/Pdt.P.Kos/2021/PN.Kis.</p>	<p>Perseroan telah menang pada tingkat pertama serta Banding dan saat ini dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung.</p> <p>The Company has won at first instance as well as on appeal and is currently in the Cassation stage at the Supreme Court.</p>	<p>Menetapkan nilai Penggantian pembebasan tanah seluas 177,2 M2 berikut bangunan milik Penggugat tersebut sebesar Rp777.040.000.</p> <p>The compensation value for the land acquisition of 177.2 square meters including the buildings owned by the Plaintiff is set at Rp777,040,000.</p>	Tidak ada None	<p>Terhambatnya Proses Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung.</p> <p>Obstacles in Land Acquisition Process for Kuala Tanjung Port Development.</p>

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan
Legal Cases Faced by the Company

No	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Status Penyelesaian Settlement Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perseroan Impact on the Company's Condition
3	<p>Gugatan yang diajukan oleh PT Pelindo Regional 2 Jambi kepada PT Way Bekhak Perkasa (Tergugat I) dan PT 4Cipta Konsultan (Tergugat II) di Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor Register Perkara 57/Pdt.G/2023/PN.Snt terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pelaksanaan Pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi.</p> <p>The lawsuit filed by PT Pelindo Regional 2 Jambi against PT Way Bekhak Perkasa (Defendant I) and PT 4Cipta Konsultan (Defendant II) at the Sengeti District Court with Case Register Number 57/Pdt.G/2023/PN.Snt related to the default committed by Defendant I and Defendant II in the implementation of Upgrade Work of Teluk Assembly Guide Station, Jambi Port Branch.</p>	<p>Telah ada Putusan Pengadilan Negeri Sengeti (Pelindo Menang).</p> <p>Telah ada Putusan Pengadilan Negeri Sengeti (Pelindo Menang).</p>	<p>PT Pelindo berpotensi mengalami kerugian atas ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas Pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp3.924.713.299,17.</p> <p>PT Pelindo has the potential to suffer losses due to discrepancies in the quality and quantity of work performed by Defendant I in the amount of Rp3,924,713,299.17.</p>	<p>Tidak ada None</p>	<p>Penerapan Anggaran Investasi tidak maksimal.</p> <p>Investment Budget Absorption is not maximized.</p>
4	<p>Gugatan yang diajukan oleh M. Ali Hamid kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Tjk terkait dengan Permintaan Ganti Rugi atas matinya ikan yang disebabkan naiknya Baku Mutu Air Laut akibat Pekerjaan pengerukan Alor Kolam Pelabuhan Panjang.</p> <p>The lawsuit filed by M. Ali Hamid against Defendants at the Tanjung Karang District Court with Register Number 26/Pdt.G/2023/PN.Tjk related to the Request for Compensation for death of fish caused by the increase in Sea Water Quality Standards due to dredging work at Panjang Harbor Pond.</p>	<p>Perseroan telah menang pada tingkat pertama dan saat ini pihak lawan mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Lampung.</p> <p>The Company has won at first instance and currently the opposing party has filed an appeal through the Registrar of Lampung High Court.</p>	<p>Apabila kalah, Perseroan harus membayar ±Rp800 Miliar atas kerugian yang dialami Para Penggugat.</p> <p>If defeated, the Company must pay ±Rp800 Billion for the losses suffered by the Plaintiffs.</p>	<p>Tidak Ada None</p>	<p>Tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan apabila menang.</p> <p>Does not affect the Company's financial condition if it wins.</p>
5	<p>Gugatan yang diajukan oleh Siti Hawa Binti Umar, DKK di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan nomor register 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu terkait dengan sengketa kepemilikan tanah dengan seluas 14.150 M2 yang terletak di Sungai Kalap/ Sungai Kumai RT.12, kelurahan Kumai Hulu, kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.</p> <p>The lawsuit filed by Siti Hawa Binti Umar, DKK at the Pangkalan Bun District Court with register number 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu related to a land ownership dispute with an area of 14,150 M2 located at Sungai Kalap/Sungai Kumai RT.12, Kumai Hulu village, Kumai sub-district, West Kotawaringin Regency.</p>	<p>Perseroan kalah pada tingkat pertama dan menang di tahap Banding. Saat ini dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung.</p> <p>The Company lost at first instance and won at the Appeal stage. Currently in the Cassation stage at the Supreme Court.</p>	<p>Apabila kalah, Perseroan harus mengembalikan sebagian tanah HPL Perseroan seluas 14.150 M2 yang diakui milik Para Penggugat dan belum dilakukan Pembayaran Ganti Rugi.</p> <p>If defeated, the Company must return a portion of the Company's 14,150 M2 HPL land that is recognized as belonging to the Plaintiffs and for which no compensation payments have been made.</p>	<p>Tidak Ada None</p>	<p>Tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan apabila menang.</p> <p>Does not affect the Company's financial condition if it wins.</p>



Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan
Legal Cases Faced by the Company

No	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Status Penyelesaian Settlement Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perseroan Impact on the Company's Condition
6	<p>Gugatan yang diajukan oleh PT Kapuas Prima Coal (kpc), Tbk di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan nomor register 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan tanah dengan seluas 3.029 M2/0,39 Ha yang terletak di Jalan CPO Pelabuhan Kalap, Rukun Tetangga 018, kelurahan Kumai Hulu, kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>The lawsuit filed by PT Kapuas Prima Coal (kpc), Tbk at the Pangkalan Bun District Court with the register number 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu is related to Unlawful Acts over a land ownership dispute with an area of 3,029 M2/0.39 Ha located at Jalan CPO Pelabuhan Kalap, Rukun Tetangga 018, Kumai Hulu village, Kumai sub-district, West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province.</p>	<p>Perusahaan kalah pada tingkat pertama dan menang di tahap Banding. Telah ada Putusan Kasasi (Pelindo Menang).</p>	<p>Apabila kalah, Perseroan harus mengembalikan sebagian tanah HPL Perseroan seluas 3.029 M2/0,39 Ha yang diakui milik Para Penggugat dan belum dilakukan Pembayaran Ganti Rugi.</p> <p>If defeated, the Company must return a portion of the Company's HPL land of 3,029 M2/0.39 Ha which is recognized as belonging to the Plaintiffs and for which compensation payments have not been made.</p>	<p>Tidak Ada None</p>	<p>T i d a k mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan apabila menang.</p> <p>Does not affect the Company's financial condition if it wins.</p>
7	<p>Gugatan perdata oleh A. Syarifuddin Dire bin H. A. Mane Karaeng I Rate dengan nomor register perkara 301/Pdt.G/2023/PN.Mks tanggal 16 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Makassar. Penggugat menyatakan bahwa tanah yang berada di bawah penguasaan Regional 4 Makassar (Pelabuhan Makassar) merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yaitu tanah seluas 528 Ha (lima ratus dua puluh delapan hektar).</p> <p>Civil lawsuit by A. Syarifuddin Dire bin H. A. Mane Karaeng I Rate with case register number 301/Pdt.G/2023/PN.Mks dated August 16, 2023 at the Makassar District Court. The plaintiff stated that the land under the control of Regional 4 Makassar (Makassar Port) is part of the plaintiff's land, which is 528 hectares (five hundred and twenty-eight acres).</p>	<p>Saat ini dalam tahap Persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Makassar. Telah ada Putusan PN Makassar (Pelindo Menang).</p>	<p>Apabila kalah, Perseroan harus melepaskan sebagian tanah HPL seluas 528 Ha.</p> <p>If defeated, the Company will have to relinquish some of the 528 hectares of HPL land.</p>	<p>Tidak Ada None</p>	<p>T i d a k mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan apabila menang.</p> <p>Does not affect the Company's financial condition if it wins</p>

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

LEGAL CASES FACED BY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN OFFICE

During 2023, there were no legal cases faced by Board of Commissioners and Board of Directors in office.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANAK PERSEROAN

LEGAL ISSUES FACED BY SUBSIDIARIES

No	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap kondisi Perseroan Impact on the Company's Condition
1	<p>Gugatan yang diajukan oleh Reyza di Pengadilan Negeri Kisaran dengan nomor register 70/Pdt.G/2021/PN.KIS terkait dengan keberatan atas nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Terminal <i>Multipurpose</i> pada Pelabuhan Kuala Tanjung.</p> <p>The lawsuit filed by Reyza at the Kisaran District Court with the register number 70/Pdt.G/2021/PN.KIS is related to objections to the value of compensation in land acquisition for the construction of Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung Port.</p>	<p>Perseroan telah menang pada tingkat pertama serta Banding dan saat ini dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung.</p> <p>The Company has won at first instance as well as on appeal and is currently in the Cassation stage at the Supreme Court.</p>	<p>Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan kepada Penggugat uang muka/<i>down payment</i> yang telah diterima dari Penggugat sebanyak Rp406.778.125.</p> <p>PT Prima Pengembangan Kawasan (SPSL) sebagai Turut Tergugat II dan perkara tersebut telah inkraht (berkekuatan hukum tetap).</p> <p>Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan kepada Penggugat uang muka/<i>down payment</i> yang telah diterima dari Penggugat sebanyak Rp406.778.125.</p> <p>PT Prima Pengembangan Kawasan (SPSL) sebagai Turut Tergugat II dan perkara tersebut telah inkraht (berkekuatan hukum tetap).</p>	<p>Tidak ada None</p>	<p>Terhambatnya Proses Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung.</p> <p>Obstacles in Land Acquisition Process for Kuala Tanjung Port Development.</p>



SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERSEROAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI OLEH OTORITAS PASAR MODAL DAN OTORITAS LAINNYA

ADMINISTRATIVE SANCTIONS IMPOSED ON THE COMPANY, MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS BY CAPITAL MARKET AUTHORITIES AND OTHER AUTHORITIES

Selama tahun 2023, tidak terdapat Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perseroan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya.

During 2023, there were no Administrative Sanctions Imposed on the Company, Members of Board of Commissioners and Board of Directors by the Capital Market Authority and Other Authorities.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERSEROAN ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Perseroan akan mengungkapkan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Pengungkapan informasi kepada Publik dan *Stakeholders* lainnya dilakukan secara wajar, dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perseroan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap jajaran Perseroan tidak diperkenankan melakukan pengungkapan informasi yang bertentangan dengan peraturan dan etika bisnis, antara lain:

1. Mengungkapkan informasi yang salah;
2. Mengungkapkan informasi yang tidak seluruhnya benar;
3. Mengungkapkan informasi yang tidak lengkap;
4. Perseroan melarang penggunaan informasi oleh Orang Dalam, termasuk data/informasi yang berasal dari Anak Perseroan yang sudah tercatat di Bursa Efek dan belum diungkap ke publik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau orang lain secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Perseroan melarang memperbincangkan tentang informasi rahasia dengan keluarga atau pihak di luar Perseroan, atau membicarakannya di tempat-tempat umum di luar lingkungan Perseroan;
6. Pengungkapan Informasi Biasa dapat dilakukan oleh setiap jajaran Perseroan;
7. Pengungkapan Informasi Terbatas kepada pihak lain dapat dilakukan oleh Pejabat di bawah Direktur terkait atau Pejabat lainnya yang secara khusus ditunjuk oleh Direksi;

he Company discloses complete, accurate and timely information to Shareholders and Board of Commissioners. Disclosure of information to the Public and other Stakeholders is carried out reasonably, taking into account the classification of information, the interests of the Company and the needs of interested parties in accordance with applicable regulations. Each line of the Company is not allowed to disclose information that is contrary to regulations and business ethics, including:

1. Disclosing false information;
2. Disclosing information that is not entirely correct;
3. Disclosing incomplete information;
4. The Company prohibits the use of information by Insiders, including data/information originating from Subsidiaries that have been listed on the Stock Exchange and have not been disclosed to the public, with the intention of benefiting themselves, groups, or others illegally and contrary to applicable laws and regulations;
5. The Company prohibits discussing confidential information with family or parties outside the Company, or discussing it in public places outside the Company;
6. Disclosure of Ordinary Information can be done by every line of the Company;
7. Disclosure of Restricted Information to other parties may be made by Officers under the relevant Director or other Officers specifically appointed by Board of Directors;

8. Pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak lain dapat dilakukan, dimana Direktur atau Pejabat Perseroan dapat ditugasi oleh Direksi untuk meminta persetujuan tertulis dari Direktur Utama atau Direktur terkait;
9. Informasi yang belum terklasifikasi tidak dapat diungkapkan pihak lain sebelum informasi tersebut ditetapkan klasifikasinya oleh Direksi.

Pengungkapan informasi Perseroan harus memperhatikan tingkat *urgency* dan manfaat bagi Perseroan. Informasi Biasa Perseroan yang dipublikasikan dapat diperoleh atau diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi Perseroan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat umum, Perseroan telah menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.

8. Disclosure of Confidential Information to other parties may be made, where a Director or Officer of the Company may be assigned by the Board of Directors to seek written approval from President Director or relevant Director;
9. Unclassified information cannot be disclosed to other parties before the information is classified by Board of Directors.

The disclosure of the Company's information must pay attention to the level of urgency and benefits for the Company. The Company's published Ordinary Information can be obtained or accessed quickly and on time, at low cost, and in a simple manner.

As a form of implementation of the Company's information disclosure to stakeholders and the general public, the Company has provided information in a timely, relevant, adequate, clear, accurate, and easily accessible manner through various media, both print and electronic media.

Kantor Pusat | Head Office:

Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14310, Indonesia
Telp: 021 4301080
Email: info@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Investor Relation:

David Rumeser
Department Head Hubungan Lembaga dan Investor
Department Head of Institutional and Investor Relations
Phone: +6221-4301080
Web: www.pelindo.co.id
Email: investor_relations@pelindo.co.id

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary:

Ali Mulyono
Email: corp_sec@pelindo.co.id

Media Sosial | Social Media:

Facebook: BUMN Pelabuhan Indonesia
Twitter: @indonesiaport
Instagram: @pelindo
Youtube: Pelindo

SIARAN PERS

PRESS CONFERENCE

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
1	2 Januari 2023 January 2, 2023	Cuaca Ekstrem, Pelindo Optimis Operasional Lancar Extreme Weather, Pelindo is Optimistic for Smooth Operation
2	3 Januari 2023 January 3, 2023	Tinggi Penumpukan Peti Kemas Dibatasi Container Stacking Height Restricted
3	16 Januari 2023 January 16, 2023	Di Tengah Dinamika Global dan Lokal, Arus Peti Kemas Pelindo Tumbuh 1,08% Amid Global and Local Dynamics, Pelindo's Container Flow Grew 1.08%
4	19 Januari 2023 January 19, 2023	Erick Thohir Dorong Pelindo Teruskan Transformasi Erick Thohir Encourages Pelindo to Continue Transformation
5	30 Januari 2023 January 30, 2023	Optimalkan Layanan, Pelindo Awali Tahun Tuntaskan <i>Inbreng</i> Saham Optimizing Services, Pelindo Started the Year by Completing Share <i>Inbreng</i>



No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
6	31 Januari 2023 January 31, 2023	Dukung Efisiensi Logistik, Pelindo Solusi Logistik Optimalisasi Layanan Integrasi Multimoda Supporting Logistics Efficiency, Pelindo Logistics Solutions Optimizes Multimodal Integration Services
7	5 Februari 2023 February 5, 2023	Erick Thohir dan Bulan K3 Erick Thohir and OHS Month
8	10 Februari 2023 February 10, 2023	Sukseskan Program Pemerintah, Pelindo Kembangkan KEK Arun Lhokseumawe Successful Government Program, Pelindo Develops KEK Arun Lhokseumawe
9	11 Februari 2023 February 11, 2023	Penuhi Peraturan Lingkungan, Pelindo Bersinergi dengan KLHK Fulfilling Environmental Regulations, Pelindo Synergizes with KLHK
10	13 Februari 2023 February 13, 2023	Pelindo Siapkan TPK Sorong Jadi Pusat Aktivitas Peti Kemas di Indonesia Timur Pelindo prepares TPK Sorong to be the center of container activity in Eastern Indonesia
11	16 Februari 2023 February 16, 2023	Dorong Hilirisasi Industri Kalbar, <i>Subholding</i> Pelindo & PT PBI Garap Kawasan Terminal Kijing Encouraging Downstreaming of West Kalimantan Industry, Pelindo Subholding & PT PBI Work on Kijing Terminal Area
12	17 Februari 2023 February 17, 2023	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Akselerasi Transformasi Organisasi Port Company Pension Fund Accelerated the Organizational Transformation
13	22 Februari 2023 February 22, 2023	Transformasi Dana Pensiun Pelabuhan, Pelindo Dukung Proses Hukum di Kejaksaan Port Pension Fund Transformation, Pelindo Supported Legal Process at AGO
14	22 Februari 2023 February 22, 2023	Perubahan Dewan Komisaris Pelindo Changes in Pelindo's Board of Commissioners
15	23 Februari 2023 February 23, 2023	Pelindo Dukung Sinergi Maritim 4 Negara di BIMP-EAGA Pelindo Supports Maritime Synergy of 4 Countries in BIMP-EAGA
16	1 Maret 2023 March 1, 2023	Pelindo Angkat Dewan Komisaris dan Direksi Baru Empat Subholding Pelindo Appointed New Board of Commissioners and Board of Directors for Four Subholdings
17	3 Maret 2023 March 3, 2023	Erick Thohir: Merger Pelindo Cara Tepat Menekan Ongkos Logistik Erick Thohir: Pelindo Merger is the Right Way to Reduce Logistics Costs
18	6 Maret 2023 March 6, 2023	Dorong UMKM Naik Kelas, <i>Subholding</i> Pelindo Serahkan Sertifikat Halal Encouraging MSMEs to upgrade, Pelindo Subholding handed out Halal Certificates
19	7 Maret 2023 March 7, 2023	Ikuti Arahan Erick Thohir, Pelindo Siap Fasilitas Relokasi TPPB Pertamina Following Erick Thohir's direction, Pelindo is ready to facilitate Pertamina's TPPB relocation
20	15 Maret 2023 March 15, 2023	Pelindo Segera Memulai Transformasi Belawan Pelindo Immediately Started Belawan Transformation
21	29 Maret 2023 March 29, 2023	Perdana, <i>Subholding</i> Pelindo Garap Ekspor 29 Ton Hasil Laut ke Tiongkok Inaugural, Pelindo Subholding Exported 29 Tons of Seafood to China
22	30 Maret 2023 March 30, 2023	Dukung Arus Mudik dan Barang Lebaran 2023, Jalan Tol Cibitung – Cilincing (JTCC) Segera Beroperasi Fungsional Supporting the Flow of Homecoming and Goods for Eid 2023, the Cibitung - Cilincing Toll Road (JTCC) Will Soon Operate Functionally
23	4 April 2023 April 4, 2023	63 Terminal Penumpang dan Roro Pelindo Siap Layani Arus Mudik Lebaran 2023 63 Passenger Terminals and Roro Pelindo is Ready to Serve Eid Mudik Flow 2023
24	4 April 2023 April 4, 2023	Cetak Sejarah, Pelabuhan Benoa Sukses Disandari Cruise Berukuran Jumbo Berpenumpang 3000 Orang Print History, Benoa Port Successfully Served by Jumbo-Sized Cruise with 3000 Passengers
25	5 April 2023 April 5, 2023	Pelindo Regional 3 Prediksi, Kenaikan Penumpang Mudik Lebaran 2023 Sebanyak 15% Pelindo Regional 3 Predicted 15% Increase in 2023 Eid Mudik Passengers
26	6 April 2023 April 6, 2023	Asesmen GCG Perdana Pelindo Pasca Merger, Raih Predikat Sangat Baik Pelindo's Initial GCG Assessment After Merger, Achieved Very Good Predicate
27	7 April 2023 April 7, 2023	Pelindo Regional 2 Menjamin Kelancaran Arus Logistik Dengan Tetap Beroperasi Selama Libur Lebaran 2023 Pelindo Regional 2 Guarantees Smooth Logistics Flow by Staying Operational During Eid Holiday 2023
28	8 April 2023 April 8, 2023	Kementerian BUMN Nilai Transformasi Terminal Penumpang Pelindo Sudah Signifikan Ministry of SOEs Assesses Pelindo's Passenger Terminal Transformation as Significant

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
29	11 April 2023 April 11, 2023	Cegah Terorisme, Pelindo Jalin Sinergi dengan BNPT Preventing Terrorism, Pelindo Establishes Synergy with BNPT
30	12 April 2023 April 12, 2023	Paska Merger Pelindo Wujudkan Efisiensi dan Optimalisasi Senilai Rp 1,3 Triliun Post-Merger Pelindo Realized Efficiency and Optimization Worth Rp 1.3 Trillion
31	13 April 2023 April 13, 2023	Sambut Mudik Lebaran 2023, Jalan Tol Cibitung – Cilincing (JTCC) Berikan Diskon Hingga 58 Persen Welcoming Eid Mudik 2023, Cibitung - Cilincing Toll Road (JTCC) Provided Discounts of Up to 58 Percent
32	14 April 2023 April 14, 2023	Keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung Sudah Tepat, Ini Kata Pengamat The existence of Kuala Tanjung Port is appropriate, as stated by many observers
33	15 April 2023 April 15, 2023	Kunker ke Banjarmasin, Dirut Pelindo Pastikan Terminal Penumpang Bandarmasih Siap Layani Mudik Lebaran 2023 Visit to Banjarmasin, Managing Director of Pelindo Ensures Bandarmasih Passenger Terminal is Ready to Serve Eid Mudik 2023
34	15 April 2023 April 15, 2023	Hingga H-8 Pemudik Lewat Pelabuhan Pelindo Tembus 370.249 Orang Until D-8, travelers through Pelindo Port Reached 370,249 People
35	16 April 2023 April 16, 2023	Jelang Pembatasan Angkutan Lebaran, Pelindo Berikan Diskon Penumpukan Hingga 50% Ahead of Eid Transportation Restrictions, Pelindo Provided Stacking Discounts Up to 50%
36	17 April 2023 April 17, 2023	Lagi, Pelindo Group Memfasilitasi 3.650 Peserta Mudik Gratis ke Berbagai Kota Once Again, Pelindo Group Facilitated 3,650 Free Mudik Participants to Various Cities
37	20 April 2023 April 20, 2023	Kapolri Beserta Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 1444 H Via Kapal Laut di Pelabuhan Tanjung Perak Aman National Police Chief and Ministry of Transportation Ensure Safe Eid 1444 H Mudik via Sea Ship at Tanjung Perak Port
38	20 April 2023 April 20, 2023	Pelindo Multi Terminal Pastikan Kesiapan Layanan Operasional Selama Periode Libur Idul Fitri Pelindo Multi Terminal Ensures Operational Service Readiness During Eid Holiday Period
39	20 April 2023 April 20, 2023	H-2 Lebaran, 768 Ribu Pemudik Lewati Pelabuhan Pelindo D-2 Eid, 768 Thousand Travelers Passed through Pelindo Ports
40	21 April 2023 April 21, 2023	Hadirkan <i>Port Digitalization Experience</i> , Pelindo Tampilkan Single System 4.0 dalam Pameran Hannover-Messe 2023 Presenting Port Digitalization Experience, Pelindo Showcased Single System 4.0 in Hannover-Messe 2023 Exhibition
41	25 April 2023 April 25, 2023	Pelindo Siap Layani Arus Balik Lebaran 2023 Pelindo is Ready to Serve the Eid 2023 Backflow
42	28 April 2023 April 28, 2023	63 Terminal Pelindo Telah Layani 1,1 Juta Penumpang 63 Pelindo Terminals Have Served 1.1 Million Passengers
43	30 April 2023 April 30, 2023	Dukung Kelancaran Arus Transportasi Barang, Jalan Tol Cibitung – Cilincing (JTCC) Berikan Tambahan Diskon Tarif Supporting the Smooth Flow of Goods Transportation, Cibitung - Cilincing Toll Road (JTCC) Provided Additional Discount Rates
44	1 Mei 2023 May 1, 2023	Dukung Kelancaran Arus Barang Paska Lebaran 2023, JTCC Perpanjang Diskon Tarif Supporting the Smooth Flow of Goods After Eid 2023, JTCC Extended Tariff Discounts
45	2 Mei 2023 May 2, 2023	Komitmen Dukung KTT ASEAN 2023, Pelindo Layani Pengiriman 200 Mobil Listrik di Labuan Bajo Committed to Supporting the 2023 ASEAN Summit, Pelindo Served the Delivery of 200 Electric Cars in Labuan Bajo
46	5 Mei 2023 May 5, 2023	Pelindo Siap Siagakan Kapal Tunda Jayanegara 306, di Pelabuhan Labuhan Bajo untuk Dukung Pelaksanaan KTT ASEAN Pelindo is Ready to Put Tugboat Jayanegara 306 on Standby, at Labuhan Bajo Port to Support the ASEAN Summit Event
47	6 Mei 2023 May 6, 2023	Pelindo Cabang Labuan Bajo, Layani Sandar KRI Banjarmasin 592 untuk Amankan KTT ASEAN 2023 Pelindo Labuan Bajo Branch, Served Banjarmasin KRI 592 to Secure the 2023 ASEAN Summit
48	9 Mei 2023 May 9, 2023	Posko Lebaran Resmi Ditutup, Pelindo Layani Berapa? Eid Posts are Officially Closed, How Many has Been Served by Pelindo?
49	10 Mei 2023 May 10, 2023	Dukung Proses Hukum Dapen, Dirut Pelindo: Pembinaan Pengelolaan Jalan Terus Supporting Dapen Legal Process, Pelindo President Director: Management Improvement Continues



No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
50	11 Mei 2023 May 11, 2023	Pelindo Regional 3 Pinjamkan Lahan HPL Ke Pemkot Semarang Untuk Program Penanganan Banjir Rob Pelindo Regional 3 Lended HPL Land to Semarang City Government for Rob Flood Handling Program
51	11 Mei 2023 May 11, 2023	Pelindo Turut Mendorong UMKM Mendunia melalui Pameran SME's HUB di KTT ASEAN 2023 Pelindo Participated in Encouraging MSMEs to Go Global through the SME's HUB Exhibition at the 2023 ASEAN Summit
52	12 Mei 2023 May 12, 2023	Kinerja Paska <i>Merger Solid</i> , Laba Pelindo 2022 Tembus 3,9 T Post-merger performance is solid, Pelindo's profit in 2022 reached 3.9 T
53	10 Juni 2023 May 12, 2023	<i>Gandeng Stakeholder, Subholding Pelindo Gelar Aksi Bersih Pantai</i> Partnering with Stakeholders, Pelindo Subholding Held Beach Cleanup Action
54	10 Juni 2023 May 12, 2023	Aksi Bersih Pantai, Pelindo Kumpulkan 1,7 Ton Sampah Pelindo Collected 1.7 Tons of Trash in Beach Cleanup Action
55	11 Juni 2023 June 11, 2023	Tingkatkan Layanan Untuk Pemakai Jasa, Pelindo Jasa Maritim Lanjutkan Standarisasi <i>Marine</i> Improve Services for Service Users, Pelindo Maritime Services Continue Marine Standardization
56	19 Juni 2023 June 19, 2023	SPSL Kerjasama Lapangan Penumpuk PT PIL SPSL Cooperates with PT PIL Stacker Field
57	20 Juni 2023 June 20, 2023	Peringkat <i>Rating Pelindo Pasca Merger Meningkatkan Setara dengan Rating Pemerintah Indonesia</i> Pelindo's Rating After Merger Increased Equal to Indonesian Government Rating
58	22 Juni 2023 June 22, 2023	Pelindo Multi Terminal Mulai Transformasi Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi Pelindo Multi Terminal Began the Transformation of Tanjung Wangi Port in Banyuwangi
59	22 Juni 2023 June 22, 2023	Peringati Hari Dermaga Nasional, SPMT <i>Subholding Pelindo, Bergerak Lakukan Aksi Bersihkan Pelabuhan</i> Commemorating National Dock Day, SPMT Subholding Pelindo, Performed the Clean the Port Action
60	23 Juni 2023 June 23, 2023	Pelindo dan Konsorsium INA-DPWorld Capai Momen Penting dalam Mentransformasi Belawan <i>New Container Terminal</i> Menjadi Pintu Gerbang Maritim Pelindo and INA-DPWorld Consortium Reached Key Moment in Transforming Belawan New Container Terminal into a Maritime Gateway
61	24 Juni 2023 June 24, 2023	Pelindo Petikemas Terima 16 Penghargaan K3 dari Menaker Pelindo Petikemas Received 16 OHS Awards from the Minister of Manpower
62	26 Juni 2023 June 26, 2023	Sebar Kebahagiaan, Pelindo Solusi Logistik Salurkan Hewan Kurban ke Berbagai Wilayah Indonesia Spreading Happiness, Pelindo Logistik Distributed Sacrificial Animals to Various Regions of Indonesia
63	27 Juni 2023 June 27, 2023	Wujudkan <i>Greenport</i> , Pelindo Ajak Pegawai Menerapkan <i>Eco-Lifestyle</i> Realizing Greenport, Pelindo Invites Employees to Implement Eco-Lifestyle
64	03 Juli 2023 July 3, 2023	28.153 Ekor Sapi Kurban Sukses Dikirim Melalui Pelabuhan Lembar Selama Momen Idul Adha 2023 28,153 Sacrificial Cattles were Successfully Delivered Through Lembar Port During Eid al-Adha Moment 2023
65	05 Juli 2023 July 5, 2023	Pelindo Petikemas Lakukan Peremajaan Alat Bongkar Muat Peti Kemas Pelindo Petikemas Rejuvenated Container Loading and Unloading Equipment
66	05 Juli 2023 July 5, 2023	Pelindo Layani 209 Ribu Penumpang Selama Libur Idul Adha 2023 Pelindo Served 209 Thousand Passengers During Eid al-Adha Holiday 2023
67	06 Juli 2023 July 6, 2023	Dukung Interkoneksi Logistik, JTCC Kembali Berikan Diskon Tarif Supporting Logistics Interconnection, JTCC Provided Tariff Discount Again
68	11 Juli 2023 July 11, 2023	SPJM Terus Tingkatkan <i>Marine Awareness</i> Para Awak Kapal SPJM Continues to Improve Marine Awareness of Ship Crews
69	14 Juli 2023 July 14, 2023	Pelindo dan Aprindo Terapkan STID untuk Tingkatkan Efisiensi dan Keamanan Pelindo and Aprindo Implement STID to Improve Efficiency and Safety
70	14 Juli 2023 July 14, 2023	Pelindo Marines Kembangkan Pengangkutan Bioenergi Ramah Lingkungan Pelindo Marines Develops Environmentally Friendly Bioenergy Transportation
71	14 Juli 2023 July 14, 2023	Pasca Transformasi, Produksi CDCC Makassar Tembur 27 Ribu Box Post-transformation, CDCC Makassar's Production Increased to 27 Thousand Boxes
72	21 Juli 2023 July 21, 2023	Nihil <i>Accident</i> , SPJM Raih Bendera Emas Sertifikasi SMK3 Zero Accident, SPJM Achieved Gold Flag for SMK3 Certification

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
73	27 Juli 2023 July 27, 2023	Pelindo Gelar Lomba Karya Tulis Dua Tahun Perjalanan Merger Pelindo Held Writing Competition for Two Years of Merger Journey
74	29 Juli 2023 July 29, 2023	Dorong Hilirisasi Kelapa Sawit, <i>Subholding</i> Pelindo & PT KRC Garap Kawasan Pendukung Terminal Kijing Encouraging Palm Oil Downstreaming, Pelindo Subholding & PT KRC Develop Kijing Terminal Supporting Area
75	30 Juli 2023 July 30, 2023	Geliat Optimalisasi Aset, Pelindo Solusi Logistik Garap Depo Petikemas Pelabuhan Panjang Stretched Asset Optimization, Pelindo Logistics Solution Develops Panjang Port Container Depot
76	03 Agustus 2023 August 3, 2023	IPCM Bukukan Laba Rp84 Miliar, Ekspansi Wilayah Indonesia Timur Berjalan Positif IPCM Posted Rp84 Billion Profit, East Indonesia Expansion is Going Positively
77	3 Agustus 2023 August 3, 2023	Pelindo Peti Kemas Perluas Area Operasi Perusahaan Pelindo Container Expands the Company's Operational Area
78	4 Agustus 2023 August 4, 2023	Gandeng Johor Port, SPJM Kolaborasi Perkuat Layanan Marine Partnering with Johor Port, SPJM Collaborates to Strengthen Marine Services
79	4 Agustus 2023 August 4, 2023	Ekspor Impor Sulsel Picu Arus Barang Pelindo Regional 4 Tumbuh 156,87% South Sulawesi's Import and Export Triggered Pelindo Regional 4's Goods Flow to Grow 156.87%
80	15 Agustus 2023 August 15, 2023	Pelindo Inisiasi Forum Konsolidasi untuk Wujudkan Pelabuhan Bebas Korupsi Pelindo Initiates Consolidation Forum to Realize Corruption-Free Ports
81	16 Agustus 2023 August 16, 2023	Integrasikan Logistik di Kawasan Industri Jawa Timur, <i>Subholding</i> Pelindo Gandeng PT SIER Integrating Logistics in East Java Industrial Estate, Pelindo Subholding Collaborates with PT SIER
82	17 Agustus 2023 August 17, 2023	Digitalisasi Cegah Tindak Korupsi di Pelabuhan Digitalization Prevents Corruption in Ports
83	18 Agustus 2023 August 18, 2023	Transformasi Pelindo: Digitalisasi Proses Bisnis Jadikan TPK Jayapura Bebas Pungli Pelindo Transformation: Digitalization of Business Processes Made Jayapura TPK Illegal-Free
84	19 Agustus 2023 August 19, 2023	Ombudsman dan TII Jaga Pelabuhan Lewat Pencegahan Korupsi Ombudsman and TII Safeguard Ports through Corruption Prevention
85	19 Agustus 2023 August 19, 2023	<i>Subholding</i> Pelindo Perluas Standardisasi dan Digitalisasi Pelindo Subholding Expands Standardization and Digitalization
86	24 Agustus 2023 August 24, 2023	Pelindo Multi Terminal Tumbuh dengan Kinerja Positif pada Semester 1 2023 Pelindo Multi Terminal Grew with Positive Performance in The First Semester of 2023
87	31 Agustus 2023 August 31, 2023	Potensi Jadi Poros Maritim Dunia, Pelindo Buka Peluang Mitra Global Dalam AIPF Potential to become World Maritime Axis, Pelindo opens opportunities for global partners in AIPF
88	1 September 2023 September 1, 2023	Pelindo Peti Kemas Bersiap Ubah Wajah Pelabuhan Ternate dan Merauke Pelindo Peti Kemas Prepares to Change the Face of Ternate and Merauke Ports
89	2 September 2023 September 2, 2023	Tingkatkan Ketahanan Energi Nasional, Pelindo dan Pertamina Kembangkan Jakarta <i>Integrated Green Terminal</i> Improving National Energy Security, Pelindo and Pertamina Develop Jakarta <i>Integrated Green Terminal</i>
90	3 September 2023 September 3, 2023	Peringati 2 Tahun <i>Merger</i> , Pelindo Gelar Pelindo <i>Run and Ride</i> Commemorating 2 Years of Merger, Pelindo Held Pelindo Run and Ride
91	4 September 2023 September 4, 2023	Pelindo - Gangguan Teratasi, Sistem Layanan Pelindo Kembali Normal Pelindo - Disruption Resolved, Pelindo Service System Back to Normal
92	5 September 2023 September 5, 2023	Pelindo Sebut Layanan Terminal Peti Kemas Kembali Normal Pelindo Mentioned Container Terminal Services Returning to Normal
93	6 September 2023 September 6, 2023	Empat Proyek Strategis Pelindo Tarik Perhatian Investor Global Pada AIPF 2023 Four Pelindo Strategic Projects Attract Global Investors' Attention at AIPF 2023
94	7 September 2023 September 7, 2023	Hari Pelindo Tahun 2023 : Pelindo <i>Run and Ride</i> , Peduli Lingkungan Hingga Donor Darah Pelindo Day 2023: Pelindo Run and Ride, Environmental Concern to Blood Donation
95	09 September 2023 September 9, 2023	Gelar <i>Flag Off Ceremony</i> Serentak Di Empat Kota, Pelindo <i>Run and Ride</i> 2023 Resmi Dimula Flag Off Ceremony Held Simultaneously in Four Cities, Pelindo Run And Ride 2023 Officially Started
96	07 September 2023 September 7, 2023	Proyek New Priok Terminal dan Bali Maritime Tourism Hub menjadi sorotan pada AIPF 2023 New Priok Terminal and Bali Maritime Tourism Hub projects highlighted at AIPF 2023



No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
97	19 September 2023 September 19, 2023	Dua Tahun PT Pelindo Terminal Petikemas, Transformasi Operasional Terminal Peti Kemas Jadi Prioritas Two Years of PT Pelindo Terminal Petikemas, Operational Transformation of Container Terminal is a Priority
98	21 September 2023 September 21, 2023	Biaya Logistik di Indonesia Turun 40 Persen Dalam Lima Tahun Logistics Costs in Indonesia Dropped 40 Percent in Five Years
99	27 September 2023 September 27, 2023	Dua Tahun <i>Merger</i> Pelindo, Menhub Resmikan PTOS-M Two Years of Pelindo Merger, Minister of Transportation Inaugurated PTOS-M
100	01 Oktober 2023 October 1, 2023	Rekor MURI Warnai Puncak Kegiatan Hari Pelindo MURI Records Colored the Peak of Pelindo Day Activities
101	13 Oktober 2023 October 13, 2023	Pelindo Ikut Mendorong Penurunan Biaya Logistik di Indonesia Timur Pelindo Participated in Driving Down Logistics Costs in Eastern Indonesia
102	17 Oktober 2023 October 17, 2023	Transformasi Pelindo Jalan Terus, UMK Rasakan Manfaatnya Pelindo's Transformation Continues, MSEs Feel the Benefits
103	18 Oktober 2023 October 18, 2023	Pasca 2 Tahun <i>Merger</i> Pelindo, SPJM Lakukan Pemurnian Bisnis Anak Perusahaan After 2 Years of Pelindo Merger, SPJM Purifies Subsidiary Businesses
104	23 Oktober 2023 October 23, 2023	Pelindo Catatkan 125 Juta Ton Arus Barang di Triwulan III 2023 Pelindo Recorded 125 Million Tons of Goods Flow in the Third Quarter of 2023
105	24 Oktober 2023 October 24, 2023	Pelindo Apresiasi Terpilihnya Penglipuran yang merupakan salah satu Desa binaan Program TJSL Perseroan Sebagai Desa Wisata Terbaik Dunia Pelindo Appreciated the Selection of Penglipuran, which is one of the villages assisted by the Company's CSR Program, as the World's Best Tourism Village
106	30 Oktober 2023 October 30, 2023	Pelindo Regional 3 Benoa Sukses Sandarkan Cruise Jumbo Berukuran 317 Meter, <i>Cruise Celebrity Solstice</i> Pelindo Regional 3 Benoa Successfully Settled 317 Meter Jumbo Cruise, Celebrity Solstice Cruise
107	02 November 2023 November 2, 2023	LEGI Resmi Menjadi Anak Perusahaan SubHolding Pelindo Jasa Maritim LEGI Officially Became a Subsidiary of Pelindo SubHolding Maritime Services
108	06 November 2023 November 6, 2023	Kolaborasi Pelindo Membangun Pelabuhan Terintegrasi Kawasan Industri Pelindo's Collaboration to Build an Integrated Port for Industrial Estates
109	12 November 2023 November 12, 2023	Pelayanan Pelindo 24/7 Mempercepat Realisasi Impor Beras Pelindo 24/7 Service Accelerates Rice Import Realization
110	14 November 2023 November 14, 2023	Indonesia Tuan Rumah ASEAN <i>Ports Association (APA) Meeting Ke-47</i> Indonesia Hosted the 47th ASEAN Ports Association (APA) Meeting
111	24 November 2023 November 24, 2023	SPJM Sandarkan Kapal Pesiar Mv. Star Breeze di Pelabuhan Makassar SPJM Berthed Cruise Ship Mv. Star Breeze at Makassar Port
112	26 November 2023 November 26, 2023	Atasi Dampak Perubahan Iklim, Pelindo Jasa Maritim Gencar Tanam Bakau Overcoming the Impact of Climate Change, Pelindo Maritime Services Intensively Plant Mangroves
113	29 November 2023 November 29, 2023	Pelindo Kembali Sukses Sandarkan Cruise Berukuran Lebih 300 M Di Pelabuhan Benoa Pelindo successfully berthed 300m cruise ship at Benoa Harbor
114	29 November 2023 November 29, 2023	Pelindo <i>Merger</i> , Perusahaan Pelayaran Lebih Efisien Pelindo Merger, More Efficient Shipping Company
115	01 Desember 2023 December 1, 2023	Digitalisasi untuk Mengurangi <i>Port Stay</i> Digitalization to Reduce Port Stay
116	02 Desember 2023 December 2, 2023	PDS Masuk 3 Besar Perusahaan Terbaik di Menaker Award 2023 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI PDS Entered the Top 3 Best Companies in the 2023 Menaker Award from the Indonesian Ministry of Manpower
117	03 Desember 2023 December 3, 2023	Pelindo Raih Dua Penghargaan Sekaligus Dari Bisnis Indonesia Pelindo Received Two Awards at Once from Bisnis Indonesia
118	06 Desember 2023 December 6, 2023	63 Terminal Penumpang Pelindo Siap Layani Arus Mudik Nataru 2023 63 Pelindo Passenger Terminals is Ready to Serve Nataru Mudik Flow 2023
119	08 Desember 2023 December 8, 2023	ALPI Pelindo Bekali SDM Dengan Eksposur Global ALPI Pelindo Provides Human Capital with Global Exposure
120	13 Desember 2023 December 13, 2023	Sinergi Pelindo dan Desa Penglipuran, Wujudkan Desa Terbaik Dunia Pelindo and Penglipuran Village Synergy, Realizing the World's Best Village

No	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
121	14 Desember 2023 December 14, 2023	Stranas Pk Apresiasi Aksi Pencegahan Korupsi Pelindo Stranas Pk Appreciates Pelindo's Corruption Prevention Action
122	15 Desember 2023 December 15, 2023	Pelindo Menjalinkan Potensi Kerja Sama Dengan Mitra Bisnis Untuk Pengembangan Area Komersial Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) Pelindo Established Potential Cooperation with Business Partners for Development of Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) Commercial Area
123	16 Desember 2023 December 16, 2023	H-10 Nataru, Pelindo Layani 306 Ribu Penumpang H-10 Nataru, Pelindo Served 306 Thousand Passengers
124	19 Desember 2023 December 19, 2023	Pelindo Pertahankan Predikat Sebagai BUMN Informatif Pelindo maintains its title as an informative SOE
125	20 Desember 2023 December 20, 2023	Dukung Apel Kesiapan Nataru, Pelindo Jaga Kelancaran dan Keamanan Penumpang Supporting Nataru Readiness Apple, Pelindo Kept Passengers Smooth and Safe
126	24 Desember 2023 December 24, 2023	Pelindo Pastikan Layanan 24/7 Selama Periode Nataru Pelindo Ensured 24/7 Service During Nataru Period
127	27 Desember 2023 December 27, 2023	Lepas 994.866 Pemudik, Pelindo Siap Layani Puncak Arus Balik Nataru 2023/2024 Releasing 994,866 Travelers, Pelindo is Ready to Serve the Peak of Nataru Backflow 2023/2024
128	28 Desember 2023 December 28, 2023	BULOG Gandeng Pelindo Tingkatkan Pelayanan Bongkar Muat Komoditas Pangan BULOG Cooperates with Pelindo to Improve Loading and Unloading Services for Food Commodities
129	29 Desember 2023 December 29, 2023	Lampau Target, Pelindo Sukses Implementasikan Phinnisi di 34 Pelabuhan Exceeding Target, Pelindo Successfully Implemented Phinnisi in 34 Ports

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi kewajiban penyampaian laporan yang bersifat insidental maupun sektoral yang dimintakan oleh *Regulator*, Pemegang Saham, maupun pihak lain yang memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun laporan yang telah disampaikan selama tahun 2023 antara lain:

1. Laporan Tahunan.
2. Laporan Manajemen Triwulan I, II, III, IV, dan *Audited*.
3. Laporan Kinerja TJSL Triwulan I, II, III, Laporan Tahunan, dan *Audited*.
4. Laporan Pelaksanaan *Assessment* GCG.
5. Pelaporan Pemberitaan Agenda *Setting*.
6. Laporan *Progress* Pelindo Paska Penggabungan.

Pelindo menyadari akan pentingnya arti implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis.

TRANSPARENCY OF REPORT SUBMISSION

The Company is committed to complying with the obligation to submit incidental and sectoral reports requested by Regulators, Shareholders and other parties who have rights in accordance with applicable laws and regulations. The reports that have been submitted during 2023 include:

1. Annual Report.
2. 1st, 2nd, 3rd, 4th Quarterly Management Report, and Audited.
3. SER Performance Report for 1st, 2nd, 3rd Quarter, Annual Report, and Audited.
4. GCG Assessment Report.
5. Agenda Setting News Reporting.
6. Post-Merger Pelindo Progress Report.

Pelindo is aware of the importance of implementing GCG as a tool to increase business value and growth.



KODE ETIK CODE OF CONDUCT

Pelindo menyadari akan pentingnya arti implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang dan secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang saham (*shareholder*) namun juga untuk segenap Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*).

Pedoman Kode Etik Bisnis adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari Etika Profesional dan Etika Kerja Insan Pelindo yang memuat Panduan Perilaku Insan Pelindo, yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku dengan nilai-nilai dan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan misi.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-02/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan aturan baru tersebut, Perseroan melakukan penyesuaian terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis Perseroan yang telah ditetapkan pada Peraturan Direksi Nomor HK.01/27/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap Insan Pelindo memahami bahwa segala aktivitas Perseroan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik yang meliputi Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Ketidakberpihakan, Kewajaran dan Terpercaya;
 - b. Mendorong seluruh Insan Pelindo untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perseroan;
 - c. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan;
 - d. Membangun reputasi Perseroan lebih baik;
 - e. Meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan.
2. Tujuan penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha;

Pelindo realizes the importance of GCG implementation as a tool to increase value and long-term business growth on a sustainable basis, not only for shareholders but also for all other stakeholders. Therefore, the Company is committed to implementing GCG consistently, one of which is done through the implementation of Code of Conduct.

The Code of Conduct is a set of commitments consisting of the Professional Ethics and Work Ethics of Pelindo employees that contain Pelindo People' Behavioral Guidance, which is prepared to influence, shape and direct behavioral conformity with the values and culture of the Company in achieving the vision and mission.

In order to implement the State-Owned Enterprises Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Based on these new rules, the Company made adjustments to the Company's Code of Business Ethics Guidelines which have been stipulated in Board of Directors Regulation Number HK.01/27/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 dated December 27, 2023 concerning the Code of Business Ethics Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PURPOSE AND OBJECTIVES

1. The purposes of implementing the Code of Conduct for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are as follows:
 - a. Every Pelindo People understands that all Company's activities are based on the principles of good corporate governance which include Transparency, Accountability, Responsibility, Impartiality, Fairness and Trustworthiness;
 - b. Encouraging all Pelindo people to behave well in carrying out all Company's activities;
 - c. Creating a healthy and comfortable working atmosphere in the Company's environment;
 - d. Build a better reputation of the Company;
 - e. Minimize the chance of deviation.
2. The objectives of implementing the Code of Conduct for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are as follows:
 - a. As a shared commitment to realize the vision and carry out the mission of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in a professional and ethical manner of doing a business;

- b. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Pelindo yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis;
- c. Sebagai landasan etis untuk bertindak dan berpikir serta mengambil keputusan yang terkait dengan Perseroan;
- d. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika, agar menjadi Perseroan yang berdaya saing tinggi;
- e. Setiap Insan Pelindo memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawabnya untuk berperilaku sesuai pedoman tentang perilaku dan etika (*code of conduct*).

POKOK-POKOK KODE ETIK

Kode Etik Bisnis mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang menjadi panduan Insan Pelindo dalam berinteraksi dengan semua Pemangku Kepentingan (Karyawan, Pelanggan, Pemerintah, Vendor, dan Komunitas) untuk membangun hubungan jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman serta cara untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidakjelasan terkait dengan etika profesional dan etika kerja. Kode etik Bisnis Perseroan mengatur terkait Etika Profesional dan Etika Kerja.

1. Etika Profesional

Etika Profesional yaitu etika yang berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk memastikan kualitas dan proses yang dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dalam profesi serta sebagai acuan untuk berhubungan dengan *Stakeholders*. Dalam etika profesional mengatur mengenai:

 - a. Hubungan dengan Pekerja;
 - b. Hubungan dengan Pemegang Saham;
 - c. Hubungan dengan Serikat Pekerja;
 - d. Hubungan dengan Pelanggan;
 - e. Hubungan dengan Vendor;
 - f. Hubungan dengan Kreditur;
 - g. Hubungan dengan Debitur;
 - h. Hubungan dengan Investor dan Lembaga Keuangan;
 - i. Hubungan dengan Pesaing;
 - j. Hubungan dengan Masyarakat, Komunitas dan Lingkungan;
 - k. Hubungan dengan *Regulator* dan Aparatur Pemerintah;
 - l. Hubungan dengan *Sub Holding* dan/atau Anak Perseroan; dan
 - m. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Lain.
2. Etika Kerja

Etika Kerja yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan dalam bekerja didasarkan pada kerja keras dan ketekunan yang diharapkan dapat meningkatkan karakter moral Insan Pelindo seperti kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan loyalitas.

 - a. Kepatuhan Terhadap Hukum, Peraturan Perundang-

PRINCIPLES OF CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct reflects the actions and values that guide Pelindo People in interacting with all Stakeholders (Employees, Customers, Government, Vendors, and Communities) to build long-term relationships that aim to provide information, understanding and ways to report any violations or ambiguity regarding professional ethics and work ethics. The Company's Code of Conduct regulates Professional Ethics and Work Ethics.

1. Professional Ethics

Professional Ethics, namely ethics related to the field of work in order to ensure the quality and processes carried out in accordance with the rules in the profession as well as as a reference for dealing with stakeholders. Professional ethics regulates:

 - a. Relationship with Employees;
 - b. Relationship with Shareholders;
 - c. Relationship with Trade Union;
 - d. Relationship with Customers;
 - e. Relationship with Vendors;
 - f. Relationship with Creditors;
 - g. Relationship with Debtors;
 - h. Relationship with Investors and Financial Institutions;
 - i. Relationship with Competitors;
 - j. Relationship with Society, Community and Environment;
 - k. Relationship with Regulators and Government Apparatus;
 - l. Relationship with Sub Holding and/or Subsidiaries; dan
 - m. Relationship with Other Stakeholders.
2. Work Ethics

Work Ethics is a system of values or norms used in work based on hard work and perseverance, which is expected to improve the moral character of Pelindo People such as honesty, openness, sincerity and loyalty.

 - a. Compliance with Laws, Legislations and Other



- undangan dan Ketentuan Lainnya;
- b. Benturan Kepentingan;
- c. Korupsi dan Suap;
- d. Anti Kecurangan (*Fraud*);
- e. Pencurian dan Penyelewengan Sejenisnya;
- f. Pencucian Uang;
- g. Gratifikasi (Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Imbalan, Jamuan, Hiburan dan Donasi);
- h. Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi;
- i. Pendokumentasian dan Pencatatan Perseroan;
- j. Integritas Laporan Keuangan;
- k. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi;
- l. Media, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi;
- m. Pengelolaan Arsip;
- n. Perlindungan Harta Perseroan;
- o. Pengendalian Intern;
- p. Perjalanan Dinas;
- q. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- r. Aktivitas Politik dan Sosial;
- s. Perilaku Etis Terhadap Sesama Pekerja; dan
- t. Pelanggaran *Insider Trading*;

- Provisions;
- b. Conflict of Interest;
- c. Corruption and Bribery;
- d. Anti-fraud;
- e. Theft and Other Misappropriation;
- f. Money Laundering;
- g. Gratification (Giving and Receiving of Gifts or Rewards, Meals, Entertainment and Donations);
- h. Equal Opportunity to Get Job and Promotion;
- i. Company's Documentation and Records;
- j. Financial Report Integrity;
- k. Confidentiality of Data and/or Information;
- l. Media, Communication and Information Dissemination;
- m. Archive Management;
- n. Company's Assets Protection;
- o. Internal Control;
- p. Service Travel;
- q. Intellectual Property Rights (HAKI);
- r. Political and Social Activities;
- s. Ethical Behavior towards Fellow Workers; and
- t. Insider Trading Violations.

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

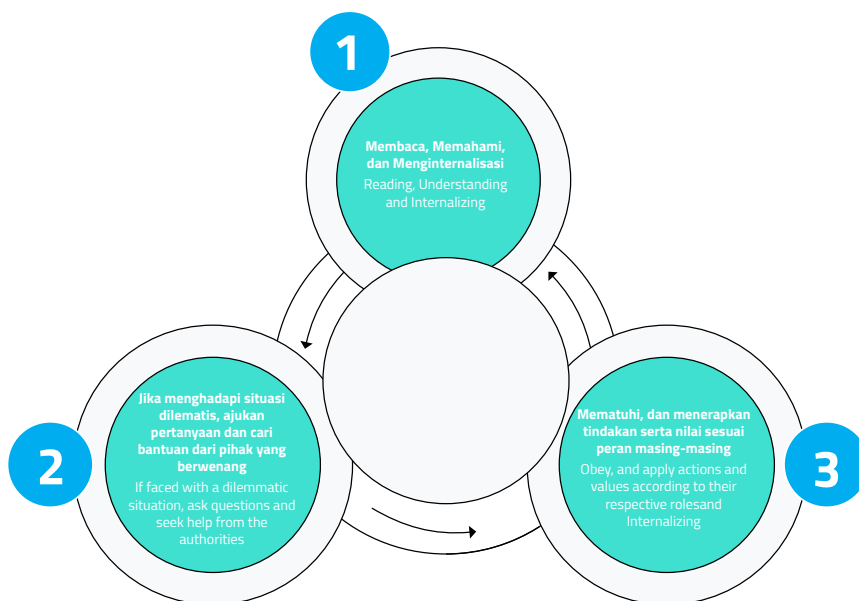
Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi seluruh Insan Pelindo yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Karyawan Pelindo. Setiap tahun seluruh Insan Pelindo menandatangani Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis.

Setiap tahun seluruh Insan Pelindo menandatangani Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis sebagai bentuk komitmen bersama atas kepatuhan kepada asas-asas GCG. Penandatanganan pakta integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis di Pelindo pada tahun 2023 tercapai penuh. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan 100% Pegawai Pelindo telah menandatangani pakta integritas melalui sistem PGOOD.

COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct applies to all Pelindo People, i.e., Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of Pelindo.

Every year, all Pelindo People sign the Integrity Pact and Compliance with the Code of Conduct as a form of joint commitment to comply with GCG principles. The signing of integrity pacts and compliance with the Code of Conduct in Pelindo in 2023 was fully achieved. The entire Board of Commissioners, Board of Directors and 100% of Pelindo people have signed an integrity pact through the Pelindo Good Corporate Governance (PGood) system.



PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Dalam rangka membangun kultur Perseroan berbasis nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dan *corporate culture*, maka Perseroan melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pedoman Kode Etik Bisnis kepada seluruh insan Pelindo secara berkala. Adapun kegiatan sosialisasi kode etik selama 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Direksi terkait *Board Manual*, Gratifikasi GCG, Kode Etik, Whistleblowing kepada seluruh pegawai dengan disampaikan melalui PEO;
2. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Direksi terkait *Board Manual*, Gratifikasi GCG, Kode Etik, Whistleblowing kepada seluruh pegawai dengan disampaikan melalui saluran komunikasi internal Perseroan dan kanal komunikasi Perseroan seperti *website*, *e-office*, Instagram, facebook, twitter yang dapat diakses oleh internal dan eksternal Perseroan;
3. Sosialisasi Tata Muka terkait GCG, WBS, Kode Etik, Gratifikasi, yang dilakukan pada:
 - a. Tanggal 5 September 2023 di PT PMLI,
 - b. Tanggal 25 September 2023 di PT EDII;
 - c. Tanggal 7 Desember 2023 Regional 3, Surabaya
4. Sosialisasi dengan sistem Pelindo *Good Corporate Governance* (P-Good).

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), maka seluruh Insan Pelindo memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perseroan;
2. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perseroan;
3. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan;
4. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan/mitra bisnis dan dengan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta bersedia berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi;
6. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perseroan;
7. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang;
8. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan Pelindo dengan baik serta memahami dan mematuhi etika dan perilaku;

CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION

In order to build a corporate culture based on the values of good corporate governance and corporate culture, the Company regularly socializes and internalizes the values contained in the Code of Conduct to all Pelindo people. The code of conduct dissemination activities during 2023 are as follows.

1. Socialization of Board of Directors Regulations related to Board Manual, GCG Gratification, Code of Conduct, Whistleblowing to all employees through PEO;
2. Socialization of Board of Directors Regulations related to Board Manual, GCG Gratification, Code of Conduct, Whistleblowing to all employees by being delivered through the Company's internal communication channels and corporate communication channels such as website, e-office, Instagram, facebook, twitter that can be accessed by internal and external companies;
3. Socialization of GCG, WBS, Code of Conduct, Gratification, which was conducted on:
 - a. September 5, 2023 at PT PMLI,
 - b. September 25, 2023 at PT EDII;
 - c. December 7, 2023 Regional 3, Surabaya
4. Socialization with the Pelindo Good Corporate Governance (P-Good) system.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT EFFORTS

In order to realize the Company's commitment to stakeholders, all Pelindo People are committed to:

1. Always think and behave in a corporate manner by prioritizing the interests of the Company above personal and/or group interests and to provide the best for the Company;
2. Always care and maintain the good image and reputation of the Company;
3. Carry out duties professionally with full responsibility and uphold integrity, honesty, and the spirit of togetherness;
4. Care and respond to customer/business partner complaints and immediately follow up in accordance with applicable regulations;
5. Have a strong motivation to develop themselves and expand their knowledge and are willing to share knowledge and skills as well as help other co-workers without fearing competition;
6. Always be commendable as an individual and a member of the community and not commit any disgraceful act that could degrade the Company's image;
7. Avoid all actions that may violate the provisions and or abuse authority;
8. Carry out religious worship adhered to by each Pelindo People properly, and understand and comply with ethics and behavior;



9. Bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik.

9. Work in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

Oleh sebab itu sebagai perwujudan Komitmen di atas maka:

As an embodiment of the above commitments:

1. Seluruh Insan Pelindo wajib menandatangani Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis yang merupakan komitmen Insan Pelindo untuk melaksanakan Pedoman Kode Etik Bisnis yang diperbaharui setiap tahun;
2. Pedoman Kode Etik Bisnis harus disosialisasikan dan dipahami oleh Insan Pelindo;
3. Pakta Integritas, Janji Pedoman Kode Etik Bisnis dan Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam satu rangkap dan disimpan di Sekretaris Perseroan;
4. Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis Pekerja Perusahaan dibuat dan ditandatangani pada sistem P-Good (Pelindo *Good Corporate Governance*);
5. Adapun unit kerja di Kantor Pusat (Departemen Head Tata Kelola dan Kepatuhan), Regional (Departemen Head Pelayanan SDM dan Umum), Sub Holding dan Anak Perusahaan (SVP Sekretariat Perusahaan) melakukan monitoring, membuat laporan dan rekapitulasi Pekerja Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas di wilayah kerjanya masing-masing setiap tahunnya, untuk kemudian disampaikan kepada Group Head Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
6. Seluruh Pimpinan Unit Kerja sampai dengan pimpinan 2 (dua) level di bawahnya bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis ini.

1. All Pelindo People are required to sign the Integrity Pact which are the commitments of Pelindo People to implement the Code of Conduct that is updated every year;
2. The Code of Conduct must be socialized and understood by Pelindo People;
3. Integrity Pact, Promises of Code of Business Ethics Guidelines and Statements of Conflicts of Interest of the Board of Commissioners and Directors are made and signed in one copy and kept in the Corporate Secretary;
4. The Integrity Pact and Code of Conduct Commitment for Company Employees are created and signed in the P-Good system (Pelindo Good Corporate Governance);
5. The work units at the Head Office (Governance and Compliance Department Head), Regional Offices (Human Resources and General Services Department Head), Sub-Holdings, and Subsidiaries (SVP Company Secretariat) monitor, report, and summarize the employees who sign the Integrity Pact in their respective areas of work each year. This information is then presented to the Group Head of Risk Management, Governance, and Compliance at PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
6. All Heads of Work Units up to 2 (two) levels below are responsible for and set an example for their subordinates for the implementation of this Code of Conduct.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

TYPE OF SANCTION FOR VIOLATION OF CODE OF CONDUCT

Jenis Pelanggaran Type of Violation	Sanksi Sanction
Ringan Mild	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teguran Tertulis ▪ Teguran Lisan ▪ Pernyataan Tidak Puas ▪ Pemotongan Tunjangan posisi 5% selama 2 (dua) bulan ▪ Written Reprimand ▪ Oral Reprimand ▪ Statement of Dissatisfaction ▪ Position allowance deduction of 5% for 2 (two) months
Sedang Moderate	<p>Pemotongan Penghasilan sebesar 20% selama 3 (tiga) bulan Income deduction of 20% for 3 (three) months</p>
Berat Severe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan Kelas Jabatan 3 (tiga) Tingkat Lebih Rendah ▪ Pemutusan Hubungan Kerja ▪ Demotion to 3 (three) Levels Lower Termination of Employment ▪ Termination of Employment

JUMLAH PELANGGARAN DAN SANKSI YANG DIBERIKAN

NUMBER OF VIOLATIONS AND SANCTIONS IMPOSED

No	Kategori Category	H0	R1	R2	R3	R4	SPMT	SPTP	SPJM	SPSL	TOTAL
1	Ringan Mild	9	2	1	3	0	0	3	0	0	18
2	Sedang Moderate	0	1	0	3	1	0	1	0	0	6
3	Berat Severe	0	0	0	1	0	0	2	1	0	4
4	PHK Termination of Employment	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	Skorsing Suspension	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		16	3	1	7	1	0	6	1	0	35



KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA

PERFORMANCE-BASED LONG-TERM COMPENSATION POLICY

Perseroan belum memiliki kebijakan kompensasi jangka panjang berbasis kinerja. Di samping itu, Pelindo bukan merupakan Perseroan Terbuka sehingga tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

The Company does not yet have a long-term performance-based compensation policy. In addition, Pelindo is not a Public Company, hence does not have an Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP).

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PELAKSANAANNYA

POLICY ON INFORMATION DISCLOSURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP AND THE IMPLEMENTATION

Pelindo bukan merupakan Perseroan Terbuka sehingga tidak terdapat informasi Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan Terbuka.

Pelindo is not a Public Company, hence there is no information on share ownership of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the ownership or any changes in the ownership of shares of Public Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) atau yang disebut Pelindo Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik.

Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen Pelindo beserta seluruh cabang pelabuhan dan grup Perseroan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan.

PENYAMPAIAN DAN MEDIA LAPORAN PELANGGARAN

Pelindo menyediakan aplikasi/sistem untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan terindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan Pelindo, cabang pelabuhan, dan grup Perseroan melalui sistem yang independen. Melalui sistem ini, Pelindo dapat menjadi Perseroan yang lebih baik dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional. Bagi insan Pelindo atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah sistem yang digunakan untuk menerima, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Telah dilakukan penyampaian surat terkait tindak lanjut pelaksanaan penerapan *single WBS* untuk pelindo group dimana di dalam nya juga terdapat perintah untuk melakukan publikasi terkait larangan pungli, praktik suap serta gratifikasi No SK.01.01/21/12/1/HLTI/WDUT/PLND-21 tanggal 21 Desember 2021. Sehingga saluran WBS Pelindo Group terkelola menjadi satu pintu di Kantor Pusat. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-02/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan aturan baru tersebut, Perseroan melakukan penyesuaian terhadap Pedoman *Whistleblowing System* yang telah ditetapkan pada Peraturan Direksi Nomor SK.01.01/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Whistleblowing System (WBS) or what is known as Pelindo Bersih was introduced to strengthen its implementation in providing opportunities for all Pelindo people and other stakeholders to submit report regarding indications of violations of applicable ethical values, based on accountable evidence and with good intentions.

Pelindo Bersih is a real program from Pelindo management and all port branches and corporate groups to create a workplace that is clean from fraud, corruption and extortion.

SUBMISSION AND MEDIA FOR VIOLATION REPORTS

Pelindo provides an application/system to report fraudulent acts, corruption, and extortion for all stakeholders who have information and wish to report an act indicating a violation committed by Pelindo people, port branches, and corporate groups through an independent system. Through this system, Pelindo can become a better Company and have competitiveness both at the national and international level. Pelindo people or stakeholders who report will be given a protection, both in terms of identity confidentiality and from possible retaliation by the reported party.

The whistleblowing system is a system used to receive, process and follow up as well as make report on information submitted by the whistleblower regarding violation that occurred within the Company.

A letter has been submitted regarding the follow-up to the implementation of the *single WBS* implementation for the Pelindo group in which there is also an order to publish a publication regarding the prohibition of extortion, bribery and gratuities No SK.01.01/21/12/1/HLTI/WDUT/PLND-21 dated December 21, 2021. So that the Pelindo Group WBS channel is managed into one door at the Head Office. In order to implement the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Based on this new regulation, the Company has made adjustments to the Whistleblowing System as stipulated in the Board of Directors Regulation No. SK.01.01/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 dated December 13, 2023, regarding the Whistleblowing System Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).



PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

1. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib;
2. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap di proses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan;
3. Perseroan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan saluran WBS dan ditegaskan bahwa para pihak yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor;
4. Perseroan menjamin terhadap pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;

WHISTLEBLOWER PROTECTION

1. The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity, except if the disclosure is required related to the report or investigation conducted by the authorities;
2. Report made without an identity will still be processed, however, the seriousness of the report content, credibility, and evidence submitted, as well as the possibility to confirm the report will be considered;
3. The Company stipulates sanctions for the misuse of WBS channel and emphasizes that parties who submit report in the form of slander or false report will be subject to sanctions including legal processes and does not receive either guarantees of confidentiality or Whistleblower protection;
4. The Company guarantees the whistleblower against all lawsuits, both criminal and civil, intimidation, punishment or unpleasant actions from any party for the testimony and/ or reporting that will be, is being or has been given, unless the testimony and/or report is not submitted with good intention;

5. Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemecatan yang tidak adil;
 - b. Penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas;
 - c. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*);
6. Perseroan menjamin kepentingan dan memberikan pendampingan hukum bagi pelapor pada saat sebelum dan setelah selesainya proses kasus terkait hal yang dilaporkan;
7. Perseroan memberikan hak kepada pelapor untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan kepentingan dan pendampingan hukum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan Perseroan.

PENANGANAN PENGADUAN

1. Pengelolaan WBS Pelindo Bersih dibantu oleh Pengelola Eksternal yang merupakan pihak ketiga independen. Pengelolaan oleh pihak ketiga independen termasuk pada aktivitas penerimaan, administrasi dan konfirmasi kelengkapan laporan yang kemudian diteruskan kepada Komite Pelindo Bersih;
2. Komite Pelindo Bersih melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor untuk menentukan pemenuhan syarat/kriteria pengaduan;
3. Komite Pelindo Bersih selanjutnya memformulasikan hasil verifikasi dan identifikasi laporan;
4. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan Hasil verifikasi yang disusun secara sistematis, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan serta dilengkapi data pendukung dan saran tindak lanjut;
5. Teknik verifikasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan Komite Pelindo Bersih dengan prinsip-prinsip proporsional sebanding atas materi yang dilaporkan;
6. Jika diperlukan investigasi lebih lanjut, maka Komite Pelindo Bersih dapat meminta persetujuan Direktur Utama untuk pelaksanaan investigasi oleh fungsi Satuan Pengawasan Intern;
7. Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat maka Komite Pelindo Bersih tidak menindaklanjuti dan pengaduan disimpan dalam *file* berkas pengaduan;
8. Hasil laporan yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Direktur Utama dan atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai hasil investigasi;
9. Untuk tindak lanjut pelaporan Sub Holding, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi dan Anak Perusahaan Other Business Portofolio maka investasi akan dilakukan oleh Tim WBS dari masing-masing perusahaan. Sementara untuk pelaporan Regional, investigasi akan dibantu oleh Regional Head dan SVP Layanan SDM dan Umum Regional. Investigasi dapat melibatkan Tim Indisipliner, Pengendalian Internal, Hukum, Pengelola SDM dan Penanggung Jawab Operasional di wilayah kerja masing-masing hingga tindak lanjut dianggap selesai dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan dan identitas pelapor;

5. The Company provides protection to the whistleblower against the possibility of the following things:
 - a. Unfair dismissal;
 - b. Demotion of rank for unclear reasons;
 - c. Adverse records in his/her personal file record;
6. The Company guarantees the interests and provides legal assistance to the whistleblower before and after the completion of the case process related to the reported matter;
7. The Company grants the right to the whistleblower to participate in the process of selecting and determining the form of interest protection and legal assistance as long as does not conflict with Company regulations.

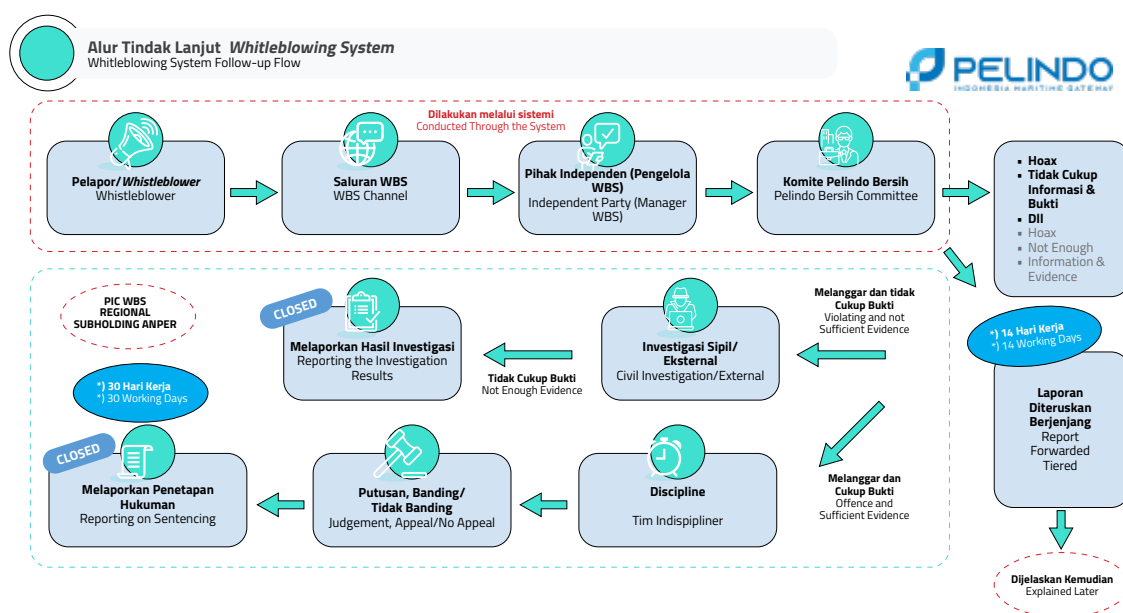
COMPLAINT HANDLING

1. The management of Pelindo Bersih WBS is assisted by an External Manager who is an independent third-party entity with activities includes receiving, administering, and confirming the completeness of reports, which are then forwarded to Pelindo Bersih Committee.
2. Pelindo Bersih Committee verifies the submitted reports then determine compliance with the complaint criteria/requirements.
3. Pelindo Bersih Committee then formulates verification results and report identification.
4. Verification results are documented in a Verification Results report that is systematically, concisely, clearly, and accountably prepared, containing conclusions and supporting data, as well as follow-up recommendations.
5. Verification techniques are confidential and under Pelindo Bersih Committee authorization, guided by proportional principles aligned with the reported material.
6. If further investigation is required, Pelindo Bersih Committee may seek approval from President Director for the Internal Supervision Unit to conduct the investigation;
7. If a complaint does not meet the criteria, Pelindo Bersih Committee will not pursue it, and the complaint will be kept in the complaint file;
8. The discussed and agreed-upon report results are presented to the President Director and/or relevant parties for further action according to the investigation results.
9. For follow-up on reports from Sub Holdings, Subsidiaries, Affiliate Companies, and Other Business Portfolio Subsidiaries, the investigation will be carried out by WBS Team of each company. Meanwhile, for Regional reporting, the investigation will be assisted by Regional Head and SVP of HR and General Services of the respective region. The investigation may involve Disciplinary Team, Internal Control, Legal, HR Management, and Operational Official in their respective areas until the follow-up is considered complete while maintaining reports confidentiality and reporters' identities.



10. Kepada pihak terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan dan/atau undang-undang. Penjatuhan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipliner masing-masing wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Direksi Terkait Indisipliner. PIC WBS masing-masing wilayah kerja melaporkannya kepada Komite Pelindo Bersih;
11. Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tetap mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan di luar Tim Indisipliner dengan memperhatikan kepentingan perusahaan terutama untuk menjaga nama baik perusahaan dan efektifitas penanganan pengaduan tetapi tetap memberikan sanksi apabila terlampir terbukti bersalah.

10. Individuals found guilty may be subject to penalties according to the Company's regulations and/or laws. The imposition of penalties can be carried out by the Disciplinary Team in each work area according to the Relevant Disciplinary Regulations. The WBS PIC in each work area reports it to the Pelindo Bersih Committee;
11. The Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) retains the authority to take action outside of Disciplinary Team while considering the Company's interests, especially in maintaining the Company's reputation and effectiveness of handling complaints, but still imposes sanctions if proven guilty.



JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah semua perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Perseroan, kode etik, melawan hukum dan segala perbuatan di luar ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian secara materiel maupun penurunan citra Perseroan.

Kategori pelanggaran meliputi:

1. Tindakan Curang (Tidak Adil)

Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok Insan Pelindo dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.

Contoh dari tindakan curang:

- Menyetujui pemberian order kepada *supplier* yang memiliki "hubungan istimewa";
- Membayar atau tidak membayar vendor yang memiliki "hubungan istimewa", yang secara langsung-tidak

TYPES OF VIOLATIONS THAT CAN BE REPORTED

Violations that can be reported are all acts that deviate or conflict with Company regulations, code of conduct, against the law and all actions outside the provisions that can result in material losses or a decrease in the Company's image.

The categories of violation are:

1. Fraudulent Action

It is an act committed by individual/a group of Pelindo People for personal benefit or others by using false identity or false dignity by trickery or lies or moving others to benefit him or her in prohibited and unlawful ways.

Example of fraudulent action:

- Approve an order to supplier with special relationship.
- Paying or not paying vendors who have a "special relationship", which directly or indirectly provides a

langsung memberi keuntungan komersial atau bentuk manfaat kompetitif lainnya bagi pada vendor lain;

- c. Merekrut staf yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, sementara ada kandidat yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.

2. Korupsi

Tindakan Insan Pelindo, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Contoh dari tindakan korupsi:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- b. Menerima keuntungan (contohnya uang, hadiah, keramah-tamahan) yang bertentangan dengan tanggung jawab jabatan;
- c. Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi Perseroan dan anak Perseroan untuk aktivitas diluar kedinasan;
- d. Menerima keuntungan (dalam bentuk apapun) dari siapapun selain dari gaji dan tunjangan yang berhak mereka terima.

3. Pencurian

Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (KUHP Pasal 362).

Contoh dari tindakan pencurian:

- a. Mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tersebut;
- b. Menggunakan identitas diri orang lain untuk mendapatkan barang dan pelayanan;
- c. Menjual benda-benda dan menyimpan hasil dari penjualan secara rahasia;
- d. Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/barang/data/ dokumen milik Perseroan dan/ atau nasabah di lingkungan kerja.

4. Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perseroan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan Pelindo baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perseroan dan Anak Perseroan. Pelaku pelanggaran ini dapat diancam sanksi menurut ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

Contoh dari tindakan pelanggaran kebijakan dan peraturan Perseroan:

- a. Menjalankan tugas diluar prosedur dan instruksi yang telah ditetapkan;
- b. Membocorkan informasi Perseroan, seperti: mengenai anggaran, penawaran dari pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak di luar kewenangannya;
- c. Membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin

commercial advantage or other form of competitive advantage to other vendors;

- c. Recruit staff that has a "special relationship" with them while there are candidates with better qualifications.

2. Corruption

It is an act of Pelindo People that improperly and illegally enriches or enriches those who have a "special relationship", by abusing positions and powers.

Example of corruption act:

- a. Abusing power for personal or group interests;
- b. Receiving benefits (eg money, gifts, hospitality) contrary to the responsibilities of his/her position;
- c. Using budgets, assets, services and information of the Company and subsidiaries for activities outside the service;
- d. Receive benefits (in any form) from anyone other than salary and benefits that they are entitled to receive.

3. Theft

It is the activity/action to take goods, wholly or partly belongs to another person, with the intent to possess unlawfully (KUHP Article 362).

Example of theft:

- a. Taking the property of other person without the owner's consent;
- b. Using the identity of others to get goods and services;
- c. Selling goods and keeping the proceeds from the sale in secret;
- d. Abusing/taking without any reason in the form of money/ goods/data/documents owned by the Company in the workplace.

4. Violations of Company Policies and Regulations

Activities/actions carried out by Pelindo Pelindo, whether intentional or planned, are contrary to the internal policies and regulations of the Company and its Subsidiaries. Perpetrators of this violation can be threatened with sanctions according to applicable regulations, both internal and external.

Example of violation of Company policies and policies:

- a. Carry out the tasks other than the established procedures and instructions;
- b. Leaking corporate information, such as: about the budget, supply from suppliers, business strategies and so on to unauthorized people.
- c. Creating and/or using and/or providing and/or changing and/or copying and/or duplicating data and/



dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga merugikan Perseroan dan/atau nasabah dan/atau investor/calon investor;

- d. Pemberian fasilitas kredit atau perpanjangan waktu pembayaran kewajiban kepada pelanggan atau vendor/*supplier* yang terindikasi melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan Perseroan dan Anak Perseroan secara ekonomis;
- e. Pelanggaran Norma & Etika (Kode Etik) dengan tindakan diantaranya Perbuatan asusila dilingkungan perseroan, pelecehan, penggunaan narkoba dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang di larang.

5. Benturan Kepentingan

Sebuah situasi dan kondisi dimana Insan Pelindo atau Pemegang Saham karena kedudukan atau jabatan di Perseroan dan Anak Perseroan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan dan Anak Perseroan.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas keputusan atas tugas yang diamanatkan kepadanya, sehingga kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perseroan dan Anak Perseroan.

Contoh dari tindakan Benturan Kepentingan:

- a. Menerima hadiah dalam bentuk uang atau hiburan dari vendor atau *supplier*;
- b. Menerima bantuan finansial atau non-finansial dari vendor atau *supplier*;
- c. Di mana seseorang atau pasangannya melakukan tindakan yang memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kegiatan bisnis di Perseroan;
- d. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, dimana insan Pelindo tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.

6. Penyuapan / Gratifikasi

Suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar menerima sesuatu atau janji, sedangkan dia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya dia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Pasal 128 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

or information that are not in accordance with the truth, detrimental to the Company and/or customers and/or investors/ potential investors;

- d. Provision of credit facilities and extension of obligation payments to customers or vendors/suppliers indicated to violate the provisions and potentially harm the Company and Subsidiaries in an economic manner.
- e. Violation of Code of Conduct with actions including immoral acts within the Company, harassment, drug use and involvement in prohibited community activities.

5. Conflict of Interest

A situation in which Pelindo People or the Shareholder due to the position in the Company has the authority that is potentially misused either intentionally or unintentionally for his or her personal interest, resulting in a conflict between personal interests and/or groups and/or families with the economic interests of the Company.

Such condition can affect the quality of decision on the tasks assigned, so that the performance of the decision results can be detrimental to the Company and its Subsidiaries.

Example of Conflict of Interest:

- a. Receive prizes in the form of money or entertainment from vendors or suppliers;
- b. Receive financial or non-financial assistance from vendors or suppliers;
- c. A person or his/her spouse performs actions that have conflict of interests with business activities in the Company;
- d. Decide the appointment of a certain party as a provider of goods/services, in which Pelindo people have an economic interest in the appointed party.

6. Bribery/Gratification

A deliberate and conscious act of accepting something or a promise, while he or she knows or can reasonably expect that the giving of something or a promise is meant for he or she to do something or to do anything in his or her duties, which is contrary to his or her authority or obligation in the public interest (Article 3 of Law No. 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery).

In a broad sense, giving includes the provision of money, goods, rebates, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities. (Article 128 of Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning

Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Untuk informasi lebih lanjut terkait Penyuapan/Gratifikasi terdapat di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Contoh dari tindakan penyuapan / gratifikasi:

- a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis Perseroan;
- b. Menerima keuntungan-keuntungan dalam bentuk apapun yang mempengaruhi penilaian atau keputusan bisnis Perseroan yang akan diambil.

7. Penipuan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 378).

Contoh dari tindakan Penipuan:

- a. Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan;
- b. Dengan sengaja memberikan produk yang dalam kondisi rusak yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk finansial;
- c. Bekerja sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain untuk menipu atasan atau Perseroan dengan menggunakan tanda tangan palsu atau faktur palsu.

8. Pemerasan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 368).

Contoh dari tindakan Pemerasan:

- a. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;
- b. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon supplier sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan;
- c. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada pelanggan sebagai pengganti untuk sebuah pelayanan istimewa/khusus.

9. Penggelapan

Tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. (KUHP Pasal 372).

Eradication of Criminal Acts of Corruption. For further information regarding Bribery/Gratification, please refer to the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Gratification Control Guidelines.

Example of bribery/gratification:

- a. Receive direct or indirect benefits from any parties related to a business transaction of his or her Company.
- b. Receive benefits in any form that affect the assessment or business decisions to be taken.

7. Embezzlement

A deliberate and conscious act with the intent to unlawfully benefit oneself or others, by using a false name or false prestige, by deception, or a series of lies, to incite other people to hand over something to them, or to give debt or write off receivables (KUHP Article 378).

Example of Embezzlement:

- a. A ruse used by a party to cause the other party to sign the contract, even though without this ruse the other party would not have signed the contract concerned;
- b. Deliberately providing products that are in a damaged condition resulting in financial losses;
- c. Working alone or in collaboration with other parties to deceive superiors or the Company by using fake signatures or fake invoices.

8. Fraud

A deliberate and conscious act that is intended to benefit themselves or others unlawfully, using false identity or false dignity, with tricks, or lies, moving others to surrender something to them, or to give debt or write off accounts receivable (KUHP Article 368).

Example of Fraud:

- a. Performing illegal levies in any form in carrying out their duties for the interests of personal/group/other party;
- b. Requesting a sum of money or a gift from potential supplier as a substitute for a job;
- c. Requesting a certain amount of money or a gift from a customer in exchange for a special service.

9. Extortion

A deliberate and conscious unlawful act to possess goods that are wholly or partly owned by another person, which is currently under their control, not because of a crime. (KUHP Article 372).



Contoh dari tindakan Penggelapan:

- a. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Perseroan, yang dalam kekuasaannya baik karena jabatannya maupun bukan karena jabatannya.
- b. Melakukan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/ harta Perseroan tanpa sepengetahuan perusahaan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Example of Exortion:

- a. Deliberately and unlawfully owns an object which is wholly or partly owned by the Company, which is under his/her control either because of his/her position or not because of his/her position.
- b. Performing dishonest actions by hiding Company goods/ assets without the Company's knowledge with the aim of possessing, controlling, or using them for other purposes.

PENGELOLA LAPORAN PELANGGARAN

Pedoman kerja Komite Pelindo Bersih mengacu pada Peraturan Direksi Nomor SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, pengelola WBS Perseroan harus dikelola oleh pihak independen. Pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Integrity Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama pihak ketiga selaku mitra dalam penerapan sistem WBS telah menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eksternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim Pelindo Bersih sebagai counterpart yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih Dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang beranggotakan:

WHISTLEBLOWING MANAGEMENT

Pelindo Bersih Committee work guidelines refer to Board of Directors Regulation Number SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 dated December 13, 2023 concerning PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System Guidelines. Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the Company's WBS manager must be managed by an independent party. The independent party appointed by the Company is PT Integrity Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) together with third parties as partners in implementing the WBS system have received and monitored both internal and external complaints and made monthly reports to the Pelindo Bersih Team as a counterpart regulated in Board of Directors Decree Number: SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 dated July 25, 2023 concerning the Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in Implementing the Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which consists of:

NO	Unit Kerja Working Unit	Jabatan Dalam Tim Team Position
1.	<i>Group Head</i> Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kepatuhan Group Head of Risk Management, Governance and Compliance	Ketua (Merangkap Anggota) Chairman (Concurrent Member)
2.	<i>Group Head</i> Satuan Pengawasan Intern Group Head of Internal Audit	Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Vice Chairman (Concurrent Member)
3.	<i>Department Head</i> Tata Kelola dan Kepatuhan Department Head of Governance and Compliance	Sekretaris (Merangkap Anggota) Secretary (Concurrent Member)
4.	<i>Group Head</i> Sekretariat Perusahaan Group Head Corporate Secretariat	Anggota Member
5.	<i>Group Head</i> Hukum Group Head of Legal	Anggota Member
6.	<i>Group Head</i> Layanan SDM Group Head of HR Services	Anggota Member
7.	<i>Group Head</i> Pelayanan Terminal Group Head of Terminal Services	Anggota Member

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Direksi terkait *Board Manual*, GCG, Kode Etik, Gratifikasi kepada seluruh pegawai dengan disampaikan melalui PEO;

WHISTLEBLOWING SYSTEM SOCIALIZATION

1. Socialization of Board of Directors Regulations related to Board Manual, GCG, Code of Conduct, Gratification to all employees through PEO;

2. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Direksi terkait *Board Manual*, Gratifikasi GCG, Kode Etik, *Whistleblowing* kepada seluruh pegawai dengan disampaikan melalui saluran komunikasi internal Perseroan dan kanal komunikasi Perseroan seperti *website*, *e-office*, Instagram, facebook, twitter yang dapat diakses oleh internal dan eksternal Perseroan;
3. Sosialisasi Tata Muka terkait GCG, WBS, Kode Etik, Gratifikasi, yang dilakukan pada:
 - a. Tanggal 5 September 2023 di PT PMLI,
 - b. Tanggal 25 September 2023 di PT EDII;
 - c. Tanggal 7 Desember 2023 Regional 3, Surabaya
4. Sosialisasi dengan sistem Pelindo *Good Corporate Governance* (P-Good).

2. Socialization of Board of Directors Regulations related to Board Manual, GCG Gratification, Code of Conduct, Whistleblowing to all employees by being delivered through the Company's internal communication channels and corporate communication channels such as website, e-office, Instagram, facebook, twitter that can be accessed by internal and external the Company's;
3. Socialization of GCG, WBS, Code of Conduct, Gratification, which is carried out on:
 - a. September 5, 2023 at PT PMLI,
 - b. September 25, 2023 at PT EDII;
 - c. December 7, 2023 Regional 3, Surabaya
4. Socialization with Pelindo Good Corporate Governance (P-Good) system.

JUMLAH PENGADUAN DAN PROSES PENGADUAN

Selama tahun 2023 melalui sistem *Whistleblowing*, Pelindo telah menerima laporan yang masuk sebanyak 635 laporan dengan 4 (empat) laporan yang termasuk kedalam kategori pelanggaran dan 631 Laporan yang termasuk *out of scope*. Pelaporan terkait indikasi pelanggaran dari 4 (empat) laporan yang masuk kepada Komite Pelindo Bersih telah ditindaklanjuti sebanyak 4 (empat) laporan. 3 (tiga) laporan telah selesai diproses dengan capaian 100% dan 1 (satu) laporan masih dalam proses investigasi dengan capaian 60%. Laporan yang termasuk dalam kategori *out of scope* telah disarankan oleh pengelola WBS Independen untuk melakukan pelaporan kepada saluran terkait dan/atau *customer service* Pelindo Group.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2023

Kepada pihak terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perseroan dan/atau perundang-undangan. Penjatuan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipliner masing-masing wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Direksi Terkait Indisipliner. Sepanjang tahun 2023, terdapat 4 (empat) laporan WBS yang telah ditindaklanjuti, sebagai berikut:

No	No Laporan Report No.	Pelanggaran Violation	Tindak Lanjut Follow-up
1	WBS-PLND-2022-264	Indikasi Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perseroan Indication on Violations of Company Policies and Regulations	100%
2	R/935/PM.00.00/30-35/02/2023	Indikasi Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perseroan Indication on Violations of Company Policies and Regulations	100%
3	WBS-PLND-2023-286	Indikasi Kecurangan Indication on Fraud	100%
4	WBS-PLND-2023-307	Indikasi Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perseroan Indication on Violations of Company Policies and Regulations	60%

Berdasarkan tindak lanjut atas 4 (empat) laporan WBS yang telah diproses dan terbukti selanjutnya diberikan sanksi kepada terlapor yaitu hukuman penurunan penghasilan 2 (dua) periodik lebih rendah dan hukuman disiplin tertulis ke 2 (dua) dan sanksi pemotongan tunjangan posisi sebesar 10% selama 2 (dua) tahun.

NUMBER OF COMPLAINTS AND COMPLAINTS HANDLING

During 2023, through the Whistleblowing system, Pelindo has received 635 incoming reports with 4 (four) reports included in the category of violations and 631 reports included in the out of scope. Reporting related to indications of violations from 4 (four) incoming reports to Pelindo Bersih Committee has been followed up as many as 4 (four) reports. 3 (three) reports have been processed with 100% achievement and 1 (one) report is still in the investigation process with 60% achievement. Reports that fall into the out of scope category have been advised by the Independent WBS manager to related report and/or to Pelindo Group customer service channel.

SANCTIONS/FOLLOW-UP ON COMPLAINTS IN 2023

Reported parties who are proven guilty can be sentenced according to the regulations in force in the Company and/or laws. Punishment can be executed by the disciplinary team in each work area in accordance with the Board of Directors Regulations regarding disciplinary matters. Throughout 2023, there were 4 (four) WBS reports that have been followed up:

Based on the follow-up of 4 (four) WBS reports that have been processed and proven, sanctions are then given to the reported party, namely a penalty of 2 (two) periodik lower income and 2 (two) written disciplinary penalties and a sanction to cut the position allowance by 10% for 2 (two) years.



PROGRAM ANTI KORUPSI ANTI-CORRUPTION PROGRAM

Program Anti Korupsi Perseroan diatur dalam kode etik, pedoman *Whistleblowing System* serta pedoman gratifikasi Perseroan. Pelindo berkomitmen menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan (*Fraud*). Komitmen Perseroan diperkuat dengan dibentuknya sistem *Whistleblowing System* yaitu sistem yang disediakan oleh Pelindo bagi seluruh *stakeholders*.

Pelindo melarang segala bentuk korupsi dan suap. Korupsi (*Corruption*), merupakan tindakan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan lain yang merugikan atau perekonomian Negara. Penyuapan dapat diartikan sebagai pemberian atau penerimaan segala bentuk penawaran, komitmen, uang, hadiah, hiburan, atau barang berharga yang tidak sesuai dengan etika, yang diberikan atau diterima dengan tujuan favoritisme, mempengaruhi, mengubah keputusan, melanggar perjanjian kerja, memberikan keuntungan yang tidak pantas dan tidak sesuai etika ketika Insan Pelindo berada dalam kapasitas pekerjaan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengharapkan semua Insan Pelindo untuk:

1. Tidak memberi atau menerima semua hal yang telah disebutkan di atas dari pihak eksternal seperti pelanggan, pesaing dan vendor;
2. Apabila terdapat pihak eksternal yang memberikan penawaran atau mencoba untuk melakukan hal serupa, Insan Pelindo perlu melaporkannya kepada atasan untuk menentukan tindakan yang pantas dilakukan dan/atau Tim UPG.

Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 yaitu:

1. Pelaksanaan FORUM KONSOLIDASI "KOMITMEN BERSAMA MASYARAKAT PELABUHAN MEMBERANTAS KORUPSI" dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan *keynote speaker* Bapak Mahfud MD;
2. Pelaksanaan keikutsertaan Perseroan dalam Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 (HAKORDIA) dengan mendirikan booth pameran di Istora Senayan pada tanggal 12-13 Desember 2023;
3. Penghargaan dari Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) sebagai BUMN yang berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi;
4. Mengikuti *Training* pengawasan intern (PELUIT) dari KPK, dan telah mendapatkan sertifikat;
5. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi bersama KPK;
6. Apresiasi dari KPK melalui Surat No. B/9394/PM.00/30-35/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Monitor dan Evaluasi Pembangunan WBS TPK Terintegrasi.

The anti-corruption program in the Company's is regulated in the code of conduct, Whistleblowing System guidelines and the Company's gratification guidelines. Pelindo is committed to creating clean business practices and avoiding all forms of fraud. The Company's commitment is strengthened by the establishment of Whistleblowing System, which is a system provided by Pelindo for all stakeholders.

Pelindo prohibits all forms of fraud, corruption, gratification and bribery. Corruption, is an act against the law, enriching oneself, other people or other entities that harm or the economy of the State. Bribery can be defined as the giving or receiving of any form of offer, commitment, money, gift, entertainment, or valuable goods that are not in accordance with ethics, which are given or received with the aim of favoritism, influencing, changing decisions, violating employment agreements, providing inappropriate and unethical benefits when Pelindo People are in a work capacity.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) expects all Pelindo people to:

1. Not give or receive any of the above from external parties such as customers, competitors and vendors;
2. If there are external parties who make offers or try to do the same, Pelindo People need to report it to their superiors to determine the appropriate action and/or the UPG Team.

The implementation of activities during 2023 are:

1. CONSOLIDATION FORUM "JOINT COMMITMENT OF THE LABOR COMMUNITY AGAINST CORRUPTION" held on August 15, 2023 with keynote speaker Mr. Mahfud MD;
2. Implementation of the Company's participation in the 2023 World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) by setting up an exhibition booth at Istora Senayan on December 12-13, 2023;
3. Award from the National Strategy for Corruption Eradication (Stranas PK) as an SOE that is committed and contributes significantly to the implementation of corruption eradication actions;
4. Participated in internal supervision training (PELUIT) from KPK, and received a certificate;
5. Implementation of Monitoring and Evaluation of Corruption Whistleblowing System with KPK;
6. Appreciation from KPK through Letter No. B/9394/PM.00/30-35/12/2023 dated December 22, 2023 regarding Submission of Monitoring and Evaluation Results of Integrated WBS TPK Development.

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk menetapkan kebijakan anti penyuapan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang bersih dari praktik suap dan korupsi dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Salah satu implementasi SMAP yang dilakukan oleh Pelindo adalah, Perseroan melakukan audit sertifikasi ISO 37001:2016 yang dilakukan oleh PT British Standard Institute (BSI) Group Indonesia, dengan hasil sebagai berikut

No	Wilayah Kerja Working Area	No Sertifikat Certificate No.	Exp Date
1	Kantor Pusat Head Office	IABMS 791634	6 Juli 2026 July 26, 2026
2	Regional 1 Region 2	IABMS 791631	6 Juli 2026 July 26, 2026
3	Regional 2 Region 2	IABMS 791638	6 Juli 2026 July 26, 2026
4	Regional 3 Region 3	IABMS 791641	6 Juli 2026 July 26, 2026
5	Regional 4 Region 4	IABMS 791643	6 Juli 2026 July 26, 2026

Komitmen penerapan kebijakan anti penyuapan telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta di sosialisasikan ke seluruh wilayah Pelindo Group.

PROGRAMS AND PROCEDURES UNDERTAKEN TO OVERCOME CORRUPTION PRACTICES

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

Board of Commissioners and Board of Directors are committed to establishing anti-bribery policies in carrying out business activities that are clean from bribery and corruption by implementing the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP). One of the SMAP implementations carried out by Pelindo is that the Company conducted an ISO 37001: 2016 certification audit conducted by PT British Standard Institute (BSI) Group Indonesia, with the following results

The commitment to implement the anti-bribery policy has been signed by Board of Commissioners and Board of Directors and socialized to all areas of Pelindo Group.






KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhan menetapkan Kebijakan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang bersih dari praktik suap dan korupsi dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkomitmen untuk:

1. Melarang tindakan suap dan korupsi sesuai tujuan organisasi;
2. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai Sasaran Anti Penyuapan;
3. Mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan tentang suap dan korupsi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
4. Mendorong peningkatan Kepedulian Anti Penyuapan di lingkungan perusahaan dengan itikad baik dan atau atas dasar keyakinan yang wajar;
5. Menetapkan kewenangan dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
6. Memenuhi persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melakukan peningkatan secara berkelanjutan;
7. Menjaga kerahasiaan dan melindungi pelapor tindakan penyuapan dari tindakan balasan karena kepeduliannya pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan.

Konsekuensi tidak dipatuhinya kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan serius berupa sanksi disiplin pemutusan hubungan kerja, sanksi perdata dan/atau sanksi pidana.

Jajaran Komisaris



Jajaran Direksi




www.pelindo.co.id
 @pelindo
  Pelindo
  @indonesiaport
  Pelabuhan Indonesia

Budaya anti penyuapan dilakukan dengan menerapkan *zero tolerance* terhadap penyuapan yang dilakukan oleh setiap Insan Pelindo. *Zero tolerance* terhadap penyuapan salah satunya dilakukan dengan Menjunjung tinggi nilai integrasi dan berpegang teguh pada Peraturan Perseroan serta prinsip *5No's*, yaitu:

1. *No Bribery* (Tidak boleh ada suap menyuap);
2. *No Kickback* (Tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
3. *No Gift* (Tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
4. *No Luxurious Hospitality* (Tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan);
5. *No Corruption* (Tidak boleh melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi baik secara sadar maupun tidak disadari).

Perseroan tidak akan melakukan toleransi atas segala bentuk tindakan pelanggaran gratifikasi dan suap.

Anti-bribery culture is carried out by applying zero tolerance to bribery committed by every Pelindo People. Zero tolerance for bribery is carried out by upholding the value of integration and adhering to Company Regulations and the 5No's principle, namely:

1. No Bribery (There should be no bribery);
2. No Kickback (No commissions, gratuities in the form of money and other forms);
3. No Gift (There should be no gifts or gratuities that are contrary to the applicable rules and regulations);
4. No Luxurious Hospitality (No excessive welcoming and hospitality);
5. No Corruption (No corruption to enrich oneself or the corporation either consciously or unconsciously).

The Company will not tolerate all forms of gratification and bribery violations.



KEBIJAKAN GRATIFIKASI

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan Pelindo memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan Pelindo untuk tidak terjerat dalam praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap.

Pengertian Gratifikasi menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 pasal 12B adalah Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Insan Pelindo yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya di Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

GRATIFICATION POLICY

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) realizes that in establishing a working relationship with third parties, the practice of gratification is often involved, hence a guideline is needed to control this practice. This aims for all Pelindo People to have the same understanding about the treatment of gratification and assist Pelindo People not to be entangled in gratification practices which is included the crime of bribery.

The definition of gratification according to Law No. 20 of 2001 article 12B is a gift in a broad sense, which includes the giving and/or receipt of gifts/souvenirs and entertainment, both received domestically and abroad and carried out using electronic devices or without electronic devices, given or received by Pelindo People that occur due to their position/authority in the Company, which may cause a conflict of interest and/or affect their independence at work as well as contrary to their obligations or duties.



Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-02/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan aturan baru tersebut, Perseroan melakukan penyesuaian terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Direksi Nomor HK.01/9/11/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 9 November 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam kondisi tertentu, saat insan Pelindo tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dengan pemberian tersebut di luar ketentuan atau pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada/ melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Pelindo, maka yang bersangkutan wajib melaporkan baik secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai mekanisme yang telah diatur.

Manajemen telah membentuk unit pengelolaan gratifikasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK.01.01/24/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang Sekaligus Sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan Fraud Dalam Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang terdiri dari:

In order to implement the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Based on these new rules, the Company made adjustments to the Gratification Control Guidelines set out in Board of Directors Regulation Number HK.01/9/11/3/TKPT/UTMA/PLND-23 dated November 9, 2023 concerning Gratification Control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

GRATIFICATION CONTROL MANAGEMENT

Under certain conditions, when Pelindo people cannot avoid receiving a gift from a Third Party, provided that the gift is other than the provisions or the gift is already in a place that is entrusted to/through another person without the knowledge of Pelindo people, then the person concerned must report it either directly to KPK or through Gratification Control Unit (GCU) according to the regulated mechanism.

Management has established a gratification management unit as stipulated in the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK.01.01/24/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 dated July 24, 2023 concerning Establishment of Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) which is also a Gratification Control Unit (UPG), Conflict of Interest and Fraud Management Unit in the Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), consisting of:

NO	Jabatan Dalam Tim Team Position	Jabatan Position
1	Ketua (Sekaligus Anggota) Chairman (Concurrent Member)	Group Head Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kepatuhan Group Head of Risk Management, Governance and Compliance
2	Wakil Ketua (Sekaligus Anggota) Vice Chairman (Concurrent Member)	Group Head Satuan Pengawasan Internal Group Head of Internal Audit
3	Sekretaris (Sekaligus Anggota) Secretary (Concurrent Member)	Departement Head Tata Kelola dan Kepatuhan Department Head of Governance and Compliance
4	Anggota Member	Group Head Sekretariat Perusahaan Group Head Corporate Secretariat
5	Anggota Member	Group Head Hukum Group Head of Legal
6	Anggota Member	Group Head Layanan SDM Group Head of HR Services
7	Penanggung Jawab TIM FKAP sekaligus TIM UPG - Regional Responsible for the FKAP TEAM concurrent the UPG - Regional TEAM	Regional Head 1, 2, 3, 4
8	Anggota TIM FKAP sekaligus TIM UPG - Regional Member of the FKAP TEAM concurrent the UPG - Regional TEAM	Division Head Pelayanan SDM dan Umum Regional 1, 2, 3 dan 4 Head of HR and Public Services Division for Regional 1, 2, 3 and 4
9	Penanggung Jawab TIM FKAP sekaligus TIM UPG – Cabang/Sub Regional Responsible for the FKAP TEAM concurrent the UPG - Branch/Sub Regional	General Manager/CEO Sub Regional
10	Anggota sekaligus TIM UPG – Cabang/Sub Regional Member and UPG TEAM – Branch/Sub Regional	Unit Pengelola Layanan SDM dan Umum HR and General Services Management Unit

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi

1. Tim UPG Kantor Pusat:

- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
- c. Mereview dan memperbaharui kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- d. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK;
- f. Menindaklanjuti hasil rekomendasi KPK atas penetapan status barang gratifikasi;
- g. Berkoordinasi dengan tim KPK terkait dengan pelaksanaan gratifikasi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan
- h. Berkoordinasi dengan Tim UPG Regional, Cabang, Holding, Anak Perseroan, Perseroan Afiliasi dan *Other Business Portfolio* terkait Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

2. Tim UPG Regional:

- a. Para *Regional Head* menjadi penanggung jawab di wilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan Group Head Sekretariat Perseroan dalam hal pengelolaan gratifikasi di wilayah *regional* masing-masing;
- b. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkoordinasi dengan Tim UPG Kantor Pusat;
- c. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Tim UPG Kantor Pusat;
- d. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK dan melaporkannya ke Tim UPG Kantor Pusat.

3. Tim UPG Cabang:

- a. Para *General Manager* cabang menjadi penanggung jawab di wilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan Regional Head dan Kantor Pusat dalam hal pengelolaan gratifikasi di wilayah regional masing-masing;
- b. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkoordinasi dengan Tim UPG Regional;
- c. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Tim UPG Kantor Pusat dan tembusan kepada *Regional Head*;

Gratification Control Unit Duties and Responsibilities

1. Head Office GCU Team:

- a. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- b. Coordinate with units or sections related to the implementation and effectiveness of gratification control;
- c. Reviewing and updating management policies, establishing an anti-gratification environment and preventing corruption within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
- d. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Corruption Eradication Commission;
- e. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by KPK;
- f. Following up on the results of KPK's recommendation on the determination of the status of goods of gratification;
- g. Coordinate with KPK team related to the implementation of gratification in working environment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); and
- h. Coordinate with the Regional GCU Team, Branches, Holding, Subsidiaries, Affiliated Companies and Other Business Portfolios related to Gratification Control in working environment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

2. Regional GCU Team:

- a. Regional Heads are responsible for their working areas and coordinate with the Group Head Corporate Secretariat in terms of gratification management in their respective regional areas;
- b. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in coordination with the Head Office GCU Team;
- c. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Head Office GCU Team;
- d. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by the KPK and reporting it to the Head Office GCU Team.

3. Branch GCU Team:

- a. Branch General Managers are responsible for their working areas and coordinate with Regional Heads and Head Office in terms of gratification management in their respective regional areas;
- b. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in coordination with the Regional GCU Team;
- c. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Head Office GCU Team and a copy to the Regional Head;

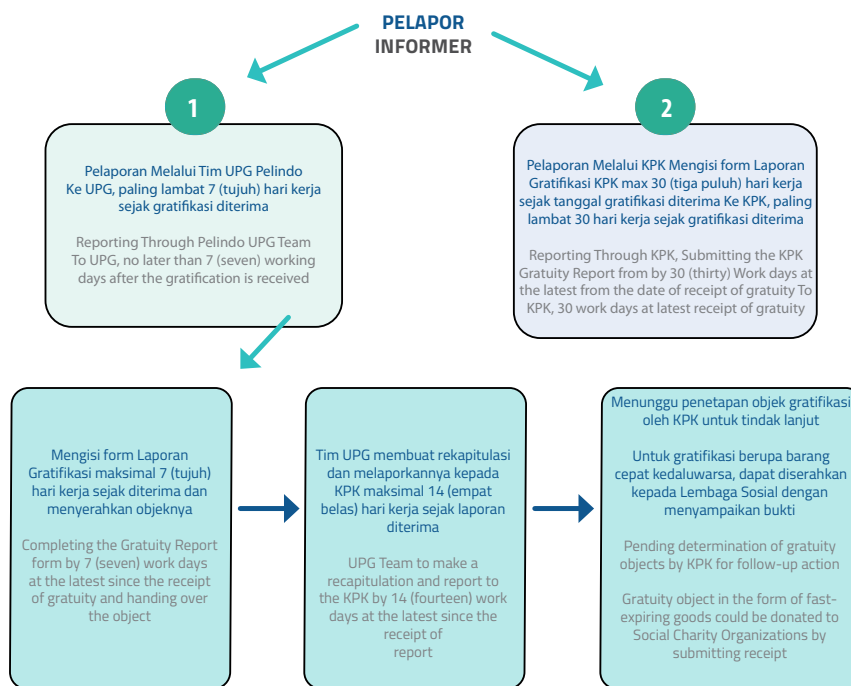


- d. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkan status barang gratifikasi oleh KPK dan melaporkannya ke Tim UPG Kantor Pusat tembusan kepada *Regional Head*.

- d. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by KPK and reporting it to the Head Office GCU Team with a copy to the Regional Head.

Mekanisme Pelaporan

Reporting Mechanism



Apabila terdapat Gratifikasi sebagaimana yang sudah diatur Perseroan, maka Insan Pelindo yang bersangkutan wajib melaporkan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Saluran Pelaporan Gratifikasi, jika Insan Pelindo menerima barang Gratifikasi:
 - a. Pelaporan Melalui KPK
Laporan Gratifikasi disampaikan secara online melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL). Laporan Gratifikasi akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di <https://gol.kpk.go.id/login>;
 - b. Pelaporan Melalui Tim UPG Perseroan
Jika Insan Pelindo menerima baik secara langsung maupun tidak langsung gratifikasi dapat mengisi form Laporan Gratifikasi UPG Perseroan sebagaimana terlampir, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima dengan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima.
2. Tim UPG membuat rekapitulasi Laporan Gratifikasi serta melaporkannya kepada KPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh Tim UPG Perusahaan untuk selanjutnya mendapat penetapan status objek Gratifikasi oleh KPK;
3. Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang yang cepat kadaluarsa (misal: makanan dan minuman),

In the event of a gratification occurs, as stipulated by the Company, the relevant Pelindo People must report it in the following manner:

1. Gratification Reporting Channel, if Pelindo People receive Gratification goods:
 - a. Reporting Through KPK
The Gratification Report is submitted online through the Online Gratification (GOL) application. The Gratification Report will be processed by KPK within 30 (thirty) working days after the report is declared complete and received by KPK. For more complete information, see <https://gol.kpk.go.id/login>;
 - b. Reporting Through the Company's UPG Team
If Pelindo People receive gratuities directly or indirectly, they can fill out the Company's UPG Gratification Report form as attached, no later than 7 (seven) working days from the receipt date of the Gratification by submitting the object of gratification received.
2. The UPG Team makes a recapitulation of the Gratification Report and submit a report to KPK no later than 14 (fourteen) working days after the Gratification report is received by the Company's UPG Team for further approval of the status of Gratification object by KPK;
3. For Gratification which is an item that expires quickly (eg food and drink), can be submitted to Social Institutions by

maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud, dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;

4. Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang seperti Cinderamata/Uang/Makanan yang tidak cepat kadaluarsa, dan sebagainya menunggu penetapan objek Gratifikasi oleh KPK untuk tindak lanjut.
5. Saluran Pelaporan Gratifikasi, jika Insan Pelindo melihat adanya dugaan pelanggaran terkait Gratifikasi:

Penyampaian laporan gratifikasi juga dapat dilakukan melalui saluran *Whistleblowing System* (Pelindo Bersih) bagi Insan Pelindo yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran gratifikasi, sebagaimana yang telah diatur pada Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

submitting proof of handover to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the receipt date of the Gratification, using the Format as regulated in these Guidelines;

4. For Gratification in the form of goods such as Souvenirs/ Money/Food that does not expire quickly, and others, is waiting for the determination of the object of Gratification by KPK for follow-up.
5. Gratification Reporting Channel, if Pelindo Personel witnesses an alleged violation related to Gratification:

Gratification report can also be submitted through the Whistleblowing System (Pelindo Bersih) channel for Pelindo People who are aware of any indications of gratification violation, as stipulated in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System Guidelines.



LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2023

Selama tahun 2023 terdapat 10 (sepuluh) laporan gratifikasi yang tersebar di Kantor Pusat, Regional, *Subholding* dan Anak Perusahaan Non Cluster. 10 (sepuluh) laporan gratifikasi tersebut terdiri dari 9 (sembilan) makanan/minuman cepat kadaluarsa dan 1 (satu) barang.

Untuk makanan/minuman cepat kadaluarsa, 7 (tujuh) objek telah disalurkan ke Yayasan Sosial dan 2 (dua) objek langsung dikembalikan kepada pemberi. 1 (satu) objek gratifikasi berupa barang telah Ditetapkan sebagai Barang Milik Negara oleh KPK dan telah disampaikan kepada KPK berdasarkan surat

GRATIFICATION REPORT IN 2023

In 2023, there were 10 (ten) gratification reports from across the Head Office, Regional Offices, Subholding, and Non-Cluster Subsidiaries. These reports consist of 9 (nine) food/drink that expires quickly and 1 (one) item.

Regarding the food/drink that expires quickly, 7 (seven) items were distributed to Social Foundations, while 2 (two) items were returned directly to the givers. The 1 (one) gratification item has been declared as State Property by the Corruption Eradication Commission (KPK) and has been submitted to the



Keputusan pimpinan KPK No. 1373/GTF.02/13/12/2023 tanggal 6 Desember 2023.

KPK based on the Decision Letter of Head of KPK No. 1373/GTF.02/13/12/2023 dated December 6, 2023.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA KARYAWAN

1. Pelaksanaan FORUM KONSOLIDASI "KOMITMEN BERSAMA MASYARAKAT PELABUHAN MEMBERANTAS KORUPSI" dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan keynote speaker Bapak Mahfud MD;
2. Pelaksanaan keikutsertaan Perseroan dalam Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 (HAKORDIA) dengan mendirikan *booth* pameran di Istora Senayan pada tanggal 12-13 Desember 2023;
3. Penghargaan dari Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) sebagai BUMN yang berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi;
4. Mengikuti *Training* pengawasan intern (PELUIT) dari KPK, dan telah mendapatkan sertifikat;
5. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi bersama KPK;
6. Apresiasi dari KPK melalui Surat No. B/9394/PM.00/30-35/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Monitor dan Evaluasi Pembangunan WBS TPK Terintegrasi.
7. Penyampaian surat himbuan larangan pungutan liar, pemberian dan penerimaan gratifikasi pada perayaan hari raya besar keagamaan dan tahun baru untuk seluruh pegawai pada tahun 2023;
8. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Direksi terkait *Board Manual*, Gratifikasi GCG, Kode Etik, *Whistleblowing* kepada seluruh pegawai dengan disampaikan melalui saluran komunikasi internal Perseroan dan kanal komunikasi Perseroan seperti *website*, *e-office*, Instagram, facebook, twitter yang dapat diakses oleh internal dan eksternal Perseroan;
9. Pelaksanaan sosialisasi WBS, gratifikasi, SMAP pada tahun 2023 dilakukan dengan media sosial, media internal Perseroan (*email*, *pop-up Pelindo Office*, *Digital TV* di Kantor, *event* perusahaan), P-Good, *email* serta pertemuan tatap muka;
10. Sosialisasi Tata Muka terkait GCG, WBS, Kode Etik, Gratifikasi, yang dilakukan pada:
 - a. Tanggal 5 September 2023 di PT PMLI,
 - b. Tanggal 25 September 2023 di PT EDII;
 - c. Tanggal 7 Desember 2023 Regional 3, Surabaya
11. Pembelajaran Gratifikasi dan WBS pada sistem Pelindo *Good Corporate Governance* (PGOOD).

ANTI-CORRUPTION TRAINING/SOCIALIZATION TO EMPLOYEES

1. CONSOLIDATION FORUM "JOINT COMMITMENT OF THE LABOR COMMUNITY AGAINST CORRUPTION" held on August 15, 2023 with keynote speaker Mr. Mahfud MD;
2. Implementation of the Company's participation in the 2023 World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) by setting up an exhibition booth at Istora Senayan on December 12-13, 2023;
3. Award from the National Strategy for Corruption Eradication (Stranas PK) as an SOE that is committed and contributes significantly to the implementation of corruption eradication actions;
4. Participated in internal supervision training (PELUIT) from KPK, and received a certificate;
5. Implementation of Monitoring and Evaluation of Corruption Whistleblowing System with KPK;
6. Appreciation from KPK through Letter No. B/9394/PM.00/30-35/12/2023 dated December 22, 2023 regarding Submission of Monitoring and Evaluation Results of Integrated WBS TPK Development.
7. Submission of an appeal letter prohibiting illegal levies, giving and receiving gratuities during the celebration of religious holidays and the new year for all employees in 2023;
8. Implementation of socialization of Board of Directors Regulations related to Board Manual, GCG Gratification, Code of Conduct, Whistleblowing to all employees by being delivered through the Company's internal communication channels and corporate communication channels such as websites, e-office, Instagram, Facebook, Twitter that can be accessed by internal and external companies;
9. Implementation of socialization of WBS, gratification, SMAP in 2023 is carried out with social media, internal Company media (*email*, *pop-up Pelindo Office*, *Digital TV* in the Office, Company events), P-Good, email and face-to-face meetings;
10. Socialization of the Advance System related to GCG, WBS, Code of Conduct, Gratification, which was carried out on:
 - a. September 5, 2023 at PT PMLI,
 - b. September 25, 2023 at PT EDII;
 - c. December 7, 2023 Regional 3, Surabaya
11. Gratification and WBS learning on Pelindo Good Corporate Governance (PGOOD) system.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) STATE OFFICIAL WEALTH REPORT (LHKPN)

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Adapun pengelola LHKPN yaitu:

- Penanggung jawab: *Group Head* Kesekretariatan Perseroan Kantor Pusat.
- Koordinator Bidang Kepegawaian: *Group Head* Layanan SDM Kantor Pusat.
- Koordinator Bidang Pengawasan: *Group Head* Hukum Kantor Pusat.

Jumlah wajib lapor di lingkungan Pelindo sebanyak 366 orang. Pada tahun 2023 wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 349 (95%) orang dan sebanyak 17 (5%) orang belum melaporkan.

The Company has a policy regarding the management of State Official Wealth Report (LHKPN), which has been ratified based on the Board of Directors Regulation No. HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 dated December 20, 2021 concerning Guidelines for Wealth Report of Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officers within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

The management team of LHKPN are:

- Person in charge: Corporate Secretarial Group Head of Head Office.
- Personnel Coordinator: HC Services Group Head of Head Office.
- Coordinator of Supervision: Legal Group Head of Head Office.

Mandatory reporters in Pelindo is as much as 366 people. In 2023, the mandatory reporters who have reported their Wealth Report (LHKPN) are 349 people (95%), while 17 people (5%) have not yet reported.

INSIDER TRADING INSIDER TRADING

Pelindo bukan merupakan Perusahaan terbuka sehingga tidak terdapat kepemilikan saham yang di perdagangkan pada bursa efek sehingga perseroan belum memiliki kebijakan *insider trading*.

Pelindo is not a public company, hence no share ownership that is traded on the stock exchange and the Company does not have an insider trading policy.



TATA KELOLA TERINTEGRASI INTEGRATED GOVERNANCE

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Perusahaan Pelindo, serta sebagai tindak lanjut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Pelindo membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berada di bawah organ Dewan Komisaris.

Sebagai pengendali group perusahaan, Pelindo memiliki kapasitas untuk mengawasi dan melakukan koordinasi di segala lini bisnis Perusahaan. Sinergi positif antara Pelindo dengan Anak Perusahaan diharapkan dapat mendukung upaya terwujudnya Pelindo sebagai Indonesia *Maritime Gateway*.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan peran serta Pelindo untuk mengarahkan dan mengawasi Anak Perusahaan agar dalam pengelolaan setiap Anak Perusahaan agar sejalan dengan kebijakan strategis Pelindo guna mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada klasifikasi risiko Konglomerasi.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Perusahaan Konglomerasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) harus senantiasa berlandaskan pada 6 (Enam) prinsip dasar tata kelola yang baik yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*)
Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para Pemangku Kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para Pemangku Kepentingan sesuai dengan klasifikasi Informasi Perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
Perseroan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis, dan budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* guna mencapai kinerja Perseroan secara berkesinambungan.

As a manifestation of transparency in the implementation of Integrated Governance at Pelindo Corporate Conglomeration, and as a follow-up to the provisions set forth in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Pelindo has formed an Integrated Governance Committee under the oversight of the Board of Commissioners.

As the controlling entity, Pelindo has the capacity to oversee and coordinate across all of the Company's lines of business. Positive synergy between Pelindo and its subsidiaries is expected to support efforts to establish Pelindo as the Indonesia *Maritime Gateway*.

To achieve this goal, Pelindo's role is needed to direct and supervise its subsidiaries in aligning their management with Pelindo's strategic policies, thereby promoting the good Corporate Governance implementation in risk classification of Conglomeration.

Integrated Governance implementation in Conglomerate Company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) should based on 6 (Six) fundamental principles of good governance, namely:

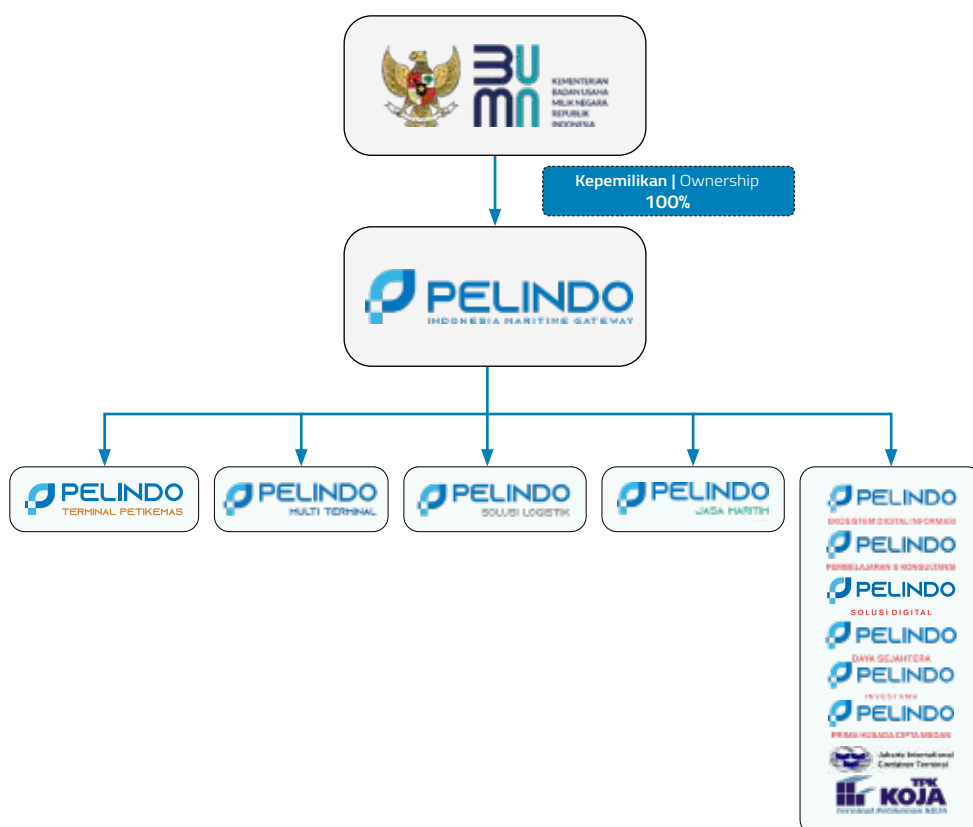
1. Openness (*Transparency*)
The Company ensures openness and objectivity in decisions making process of its business activities. The Company must provide material and relevant information in a manner that is easily accessible and understandable by stakeholders. The Company should take initiative to disclose not only the information required by the Articles of Association and applicable regulations but also matters that are important and impacting stakeholders' decision according to the Company's classification of Information.
2. Accountability
The Company operates with a high accountability to responsible for its action transparently and fairly for the benefit of the Company in accordance with the provisions in the Articles of Association, applicable regulations, business ethics, and the Company's culture while also considering the interests of stakeholders to achieve the Company's performance continuously.

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**
Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap Masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan.
4. **Kemandirian (*Independent*)**
Perseroan dikelola secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**
Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
6. **Terpercaya (*Trusted*)**
Perseroan mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan.

3. **Responsibility**
The Company adheres strictly to the prudence principle and ensures compliance with the Company's regulations, Articles of Association, applicable laws and regulations, as well as carries out social responsibilities, which including attention to the community and environmental sustainability, especially around the Company, by making adequate planning and implementation to maintain the Company's business continuity.
4. **Independence**
The Company is professionally managed by avoiding conflicts of interest and influence/pressure from any parties that do not comply with applicable laws and regulations which not adhering to principles of sound corporate governance.
5. **Fairness and Equality**
In carrying out its activities, the Company always considers interests based on the principles of fairness and equality.
6. **Trusted**
The Company gains trust and full support from all stakeholders.

Struktur

Structure





PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMPANY GOVERNANCE GUIDELINES

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
A.	Aspek 1 : Hubungan Perseroan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Aspect 1: Relationship between Public Company and Shareholders in guaranteeing Shareholders' rights	
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1: Increase value of General Meetings of Shareholders (GMS) Implementation	
A.1.1.	<p>Rekomendasi 1: Perseroan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan: Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perseroan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p> <p>Recommendation 1: Public Company has open and closed voting based decision making mechanism and procedure that promote independency and interest of Shareholders.</p> <p>Explanation: Any shares with right to vote that issued have one vote (<i>one share one vote</i>). Shareholders may use their voting rights at the time of decision making, especially if voting needs to be done. However, the decision making mechanism by voting either openly or closedly has not been regulated in details.</p> <p>Public Company is recommended to have a voting procedure in making its decisions as one of GMS' agenda. The voting procedure must maintain shareholders's independency. For example, voting is done openly by raising hands to choose the options offered by the GMS' chairman. Meanwhile, closed voting is done in a decision making process that need secrecy or as requested by shareholders. This procedure may use card or electronic voting.</p>	<p>Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait tata cara prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka maupun tertutup disebabkan karena Perseroan bukan merupakan Perusahaan Terbuka.</p> <p>The Company does not apply policy regarding technical procedures for open or closed voting because the Company is not a publicly traded company.</p> <p style="text-align: center;"><i>Comply</i></p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
A.1.2.	<p>Rekomendasi 2: Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan: Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p> <p>Recommendation 2: Every Board of Directors and Board of Commissioners Member of the Public Company attend the Annual GMS.</p> <p>Explanation: The presence of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is intended to ensure that each member is able to observe, explain and answer directly the problems or questions raised by shareholders regarding the GMS' agenda.</p>	<p>Setiap tahunan Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPS tahunan yang dipimpin oleh Pemegang Saham (kuasa Pemegang Saham) dari Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Ketidakhadiran Direksi dan Dewan Komisaris disertai dengan Surat Kuasa.</p> <p>Every year, the entire Board of Directors and Board of Commissioners attend the GMS that led by the Shareholders (proxy of the Shareholders) from the Government represented by the Ministry of SOE. The absence of Directors and Commissioners is stated with letter of authorization.</p> <p><i>Comply</i></p>
A.1.3.	<p>Rekomendasi 3: Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs <i>Web</i> Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs <i>Web</i> Perseroan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs <i>Web</i> dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p> <p>Recommendation 3: Summary of GMS Minutes shall be available at the Public Company Website minimum for 1 (one) year.</p> <p>Explanation: Public Company must prepare summary of GMS minutes in Indonesian and other languages (minimum in English), and announced to the public in 2 (two) working days after the GMS was held, one of it is through the Company's Website. The availability of summary of GMS minutes at the Company's website provides an opportunity for the absent shareholders in GMS to obtain important easily and quickly. Therefore, the regulation concerning the minimum period of the availability of summary of GMS minutes on the Website is intended to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.</p>	<p>Perseroan bukan Perseroan terbuka sehingga tidak menerbitkan risalah RUPS pada <i>web</i> Perseroan.</p> <p>The Company is not a public company and therefore does not publish the GMS minutes on the Company's website.</p> <p><i>Comply</i></p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
A.2.	<p>Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2: Improve quality of Communication between Public Company and Shareholders or Investors</p>	
A.2.1.	<p>Rekomendasi 4: Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan: Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p> <p>Recommendation 4: Public Company has a policy on communication with shareholders or investors.</p> <p>Explanation: Any communication between the Company and shareholders or investors is intended for them to gain a clearer understanding of publicly available information, such as periodic reports, information disclosure, business or performance conditions and prospects, and Corporate Governance implementation. In addition, shareholders or investors may also submit feedback and opinions to the Company's management</p> <p>The Company's commitment in conducting communication with shareholders or investors is demonstrated by the communication policy. Such policy may includes strategies, programs, and communication timelines, as well as guidance that support shareholders or investors to participate in such communications.</p>	<p>Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Setiap tahunnya perusahaan rutin melakukan pertemuan dengan Pemegang Saham, Investor dan <i>Stakeholders</i> lainnya untuk menyampaikan informasi dan aktivitas perusahaan terkini termasuk isu-isu yang berkembang.</p> <p>The Company has a communication policy with shareholders or investors. Every year the Company routinely conducts meetings with shareholders, investors and other stakeholders to convey the latest information and activities including emerging issues.</p> <p><i>Comply</i></p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
A.2.2.	<p>Rekomendasi 5: Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs <i>Web</i>.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perseroan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Recommendation 5: Public Company shall disclose communication policy of Public Company with Shareholders or investors at the website.</p> <p>Explanation: The Company's commitment on transparency in providing equity to all shareholders or investors is shown in the communication policy disclosure. Such disclosure also aims to increase shareholders or investors' participation and role in the Company's communication program implementation</p>	<p>Dalam rangka keterbukaan informasi publik, Perseroan mempublikasikan laporan tahunan, laporan keuangan, dan informasi terkait lainnya di dalam situs <i>Web</i> secara berkala. Bagi <i>stakeholders</i> yang menginginkan informasi selain yang terdapat di <i>website</i> dapat menyampaikan pada sistem PPID Pelindo di <i>website</i> Perseroan.</p> <p>As part of public information transparency, the Company publishes annual reports, financial statements, and other related information on its website regularly. For stakeholders seeking information beyond what is available on the website, they can submit their requests through Pelindo's PPID on the Company's website.</p> <p><i>Comply</i></p>
<p>B. Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Board of Commissioners' Function and Role</p>		
B.1.	<p>Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3: Strengthening Board of Commissioners membership and composition.</p>	
B.1.1.	<p>Rekomendasi 6: Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p> <p>Recommendation 6: Determination of the number of Board of Commissioners member takes into account the condition of Public Company.</p> <p>Explanation: The number of Board of Commissioners members may affect their effectiveness in work. The number of members determination shall refer to the applicable laws, that at least 2 (two) persons according to Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider the Company's conditions which include, among other things, the characteristics, capacities and sizes, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among the Company. However, too many members of Board of Commissioners is potentially disrupt the effectiveness of Board of Commissioners' functions implementation.</p>	<p>Per 31 Desember 2023, anggota Dewan Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang atau 28,57% persen dari total anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu minimal 20 persen dari total anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>As of December 31, 2023, the number of Independent Commissioners is 2 (two) or 28.57% of the total Board of Commissioners members, which amounts to 7 (seven) individuals, thus meeting the required criteria of at least 20 percent.</p> <p><i>Comply</i></p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
B.1.2.	<p>Rekomendasi 7: Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan: Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perseroan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p> <p>Recommendation 7: Determination of the composition of Board of Commissioners members concerns diversity of required skill, knowledge and experience.</p> <p>Explanation: Board of Commissioners composition is a characteristics combination both in terms of Board of Commissioners as a body and Board of Commissioners members as an individual, in accordance with the Company's needs. Such characteristics may be reflected in the determination of skills, knowledge and experience required for supervisory and advisory tasks implementation by Board of Commissioners of the Company. Composition that has taken into account the needs of the Company is a positive thing, especially regarding decision-making in supervisory function implementation that consider various broader aspects.</p>	<p>Komposisi Dewan Komisaris Perseroan termasuk beragam dengan tingkat pengalaman dan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dibutuhkan Perseroan dalam menjalankan fungsi pengawasan.</p> <p>The composition of Board of Commissioners is diverse, encompassing varying levels of experience and competence that align with the roles and functions required by the Company in carrying out its supervisory functions.</p> <p>Comply</p>
B.2.	<p>Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.</p>	
B.2.1.	<p>Rekomendasi 8: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolejal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolejal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Recommendation 8: Board of Commissioners has self assessment policy to evaluate its performance.</p> <p>Explanation: Board of Commissioners' self assessment policy is a guideline used as a form of accountability for Board of Commissioners' performance in a collegial manner. The Self Assessment is undertaken by each member to assess Board of Commissioners' performance in a collegial manner, rather than assessing the individual performance of each member. By doing self assessment, each member of Board of Commissioners is expected to contribute in continuous performance improvement.</p> <p>This policy contains assessment activities undertaken, purposes and objectives, periodic execution time, and assessment indicators or criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Company, where such function is required in Financial Services Authority Regulations No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.</p>	<p>Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan dan <i>Board Manual</i>.</p> <p>Dewan Komisaris juga memiliki <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) secara kolejal maupun secara individu yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, sebagai sasaran kerja dari Dewan Komisaris</p> <p>Performance Assessments of Board of Commissioners are regulated in the Corporate Governance Guidelines and Board Manual.</p> <p>The Board of Commissioners also has collegial and individual Key Performance Indicators (KPIs) that has been approved by Shareholders, serving as work targets for Board of Commissioners.</p> <p>Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
B.2.2.	<p>Rekomendasi 9: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Recommendation 9: Self Assessment policy to evaluate Board of Commissioners' performance shall be disclosed in the Annual Report of Public Company.</p> <p>Explanation: The disclosure on policy of Board of Commissioners' performance Self Assessment is conducted not only to fulfill the transparency aspect as part of performance accountability, but also to give confidence to shareholders or investors upon the efforts to improve Board of Commissioners' performance. This disclosure enables shareholders or investors to acknowledge the check and balance mechanism on Board of Commissioners' performance.</p>	<p>Setiap tahunnya Perseroan menerbitkan Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan di publikasikan melalui <i>website</i> Perseroan</p> <p>Didalam Laporan tahunan juga disajikan tugas dan kegiatan Dewan Komisaris dalam satu tahun terakhir termasuk memberikan penilaian atas kinerja Direksi dan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.</p> <p>Every year, the Company publishes an Annual Report which is presented to the Shareholders and made available on the Company's website.</p> <p>Annual Report also present the Board of Commissioners' tasks and activities in the past year, including Board of Directors performance assessment and Board of Commissioners' role in supervision.</p> <p><i>Comply</i></p>
B.2.3.	<p>Rekomendasi 10: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perseroan Terbuka, sehingga integritas Perseroan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perseroan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>Recommendation 10: Board of Commissioners has policy on resignation of Board of Commissioners members if involved in financial crime.</p> <p>Explanation: The resignation policy of Board of Commissioners members that involved in financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Company, so that the Company's integrity will be maintained. This policy is required to expedite the legal process and to ensure that the legal process does not interfere business activities. In addition, from morality side, this policy builds an ethical culture within the Company's environment. This policy may be covered in the Board Manual or Code of Conduct that are applicable to Board of Commissioners.</p> <p>Furthermore, what is meant by involved in financial crime is the convicted status of Board of Commissioners' member from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and fraud in the financial service activities and Money Laundering Crime Act as referred to Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime.</p>	<p>Perseroan memiliki <i>Board Manual</i> sebagai dasar tata kelola antar organ Perseroan yang mengatur tentang kebijakan pengunduran diri serta termasuk mengatur Etika jabatan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Selain itu Dewan Komisaris juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.</p> <p>The Company has a Board Manual serve as the basis for governance among the Company's organs, which regulates policies on resignation as well as governs the Code of Conduct of Board of Commissioners and prohibited actions.</p> <p>In addition, the Board of Commissioners also signs an Integrity Pact as a commitment to uphold ethical conduct that in line with the Company's values.</p> <p><i>Comply</i></p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
B.2.4.	<p>Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di Perseroan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan.</p> <p>Recommendation 11: Board of Commissioners or Committee who is in charge in Nomination and Remuneration function formulates succession policy in Board of Directors members nomination process.</p> <p>Explanation: Based on Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the nomination committee has duty to formulate policies and criteria required in Board of Directors' candidates nomination process. One of the policies is the succession policy of Board of Directors members. The succession policy aims to maintain the leadership regeneration process in the Company in order to maintain the Company's business sustainability and long-term goals..</p>	<p>Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas melakukan proses nominasi untuk suksesi kepemimpinan Perseroan termasuk Direksi.</p> <p>Board of Commissioners has established a Nomination and Remuneration Committee tasked with the nomination process for the Company's leadership succession, including Board of Directors.</p> <p><i>Comply</i></p>
C.	<p>Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: Board of Directors' Role and Function</p>	
C.1.	<p>Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5: Strengthening Board of Directors membership and composition</p>	
C.1.1.	<p>Rekomendasi 12: Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan: Sebagai organ Perseroan yang berwenang dalam pengurusan Perseroan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p> <p>Recommendation 12: Determination of the number of Board of Directors members takes into account the condition of the Public Company and effectiveness in the decision making process.</p> <p>Explanation: As corporate body in charge of managing the Company, the determination of the number of Board of Directors greatly affects the Company's performance. Thus, the number of Board of Directors' members determination shall be conducted through careful consideration and shall refer to the prevailing laws and regulations, which in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies that shall comprises of at least 2 (two) persons. In addition, in determining the number of Board of Directors shall be based on the need to achieve the Company's goals and objectives and adjusted to the Company's conditions, including characteristics, capacity and size, and how effective Board of Directors in decision making.</p>	<p>Saat ini jumlah Direksi sebanyak 7 orang yang salah satunya berperan sebagai Direktur Utama.</p> <p>Pembagian tugas Direksi terdiri atas 7 Direktorat yang saling terkait dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan ke depan.</p> <p>Setiap Direktorat membawahi divisi-divisi yang telah disesuaikan dan dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing Direktorat, sehingga setiap Divisi memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi untuk pencapaian tujuan Perseroan.</p> <p>Saat ini perusahaan memiliki 23 Divisi yang dipimpin oleh <i>Group Head</i> dan dibantu oleh <i>Departement Head</i></p> <p>Currently, there are 7 Directors, one of whom serves as the President Director.</p> <p>The division of tasks among Directors consists of 7 Directorates that are interrelated and aligned with the Company's future needs.</p> <p>Each Directorate oversees Divisions that have been adjusted and grouped based on the tasks and functions of each Directorate, so that each Division has complementary tasks and functions for achieving the Company's goals.</p> <p>At present, the Company has 23 Divisions led by Group Heads and assisted by Department Heads.</p> <p><i>Comply</i></p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
C.1.2.	<p>Rekomendasi 13: Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan: Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perseroan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolejal.</p> <p>Recommendation 13: Determination of Board of Directors members composition takes into account the diversity of required skill, knowledge and experience.</p> <p>Explanation: As with Board of Commissioners, the diversity of Board of Directors' members composition is the desirable characteristics of Board of Directors as an organization and Board of Directors members as an individual, in accordance to the Company's needs. The combination is determined by taking into account the appropriate skills, knowledge and experiences on Board of Directors' division and functions in achieving the Company's objectives. Therefore, the characteristics consideration will have an impact in the accuracy of nomination process and individual appointment of Board of Directors's members in a collegial manner.</p>	<p>Perseroan saat ini memiliki komposisi anggota Direksi yang beragam namun sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang mumpuni.</p> <p>Currently, the Company has a diverse composition of Directors that aligns with their roles and functions based on their extensive experience and competence.</p> <p><i>Comply</i></p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
C.1.3.	<p>Rekomendasi 14: Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan: Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p> <p>Recommendation 14: Board of Directors member who supervises Accounting or Finance has expertise and/or knowledge in Accounting.</p> <p>Explanation: The Financial Statements is the management accountability report on managing the resources owned by the Public Company, which must be prepared and presented in accordance with the generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia as well as related OJK regulations, including regulation on the Capital Market sector regarding the presentation and disclosure of Public Company's Financial Statements. Under the Capital Market sector laws and regulations that governing Board of Directors' responsibilities on the Financial Statements, Board of Directors is jointly and severally liable for the Financial Statements, signed by the President Director and Director that is in charge of accounting or finance.</p> <p>Thus, the disclosure and compilation of financial information presented in the financial statements will largely depend on the expertise, and/or knowledge of Board of Directors, especially members of Board of Directors in charge of accounting or finance. The expertise and/or knowledge qualification in the accounting field at least give Board of Directors members confidence in the preparation of Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied upon by the stakeholders as the basis for economic decision making. Such expertise and/or knowledge may be evidenced by educational background, training certification and/ or related work experience.</p>	<p>Direksi bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan dan setiap tutup tahun dilakukan audit kewajaran atas penyajian laporan keuangan oleh Auditor eksternal.</p> <p>Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan melakukan fungsi pengendalian disetiap proses transaksi keuangan sampai transaksi tersebut dibukukan dalam pencatatan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dan Keuangan yang senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan PSAK terkini.</p> <p>Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.</p> <p>The Board of Directors is responsible for presenting financial statements which audited by an external auditor at the end of each fiscal year to ensure fairness of the financial statement.</p> <p>The Directorate in charge of accounting and finance performs control functions at each financial transaction process up to transactions recording according to the Accounting and Financial Policies, which are constantly evaluated and adjusted with the latest PSAK regulations.</p> <p>Directors in charge of accounting and finance have adequate qualifications, competencies and experience in carrying out their duties.</p> <p>Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
C.2.	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6: Improve the quality of Board of Directors duty and responsibility implementation.	
C.2.1.	<p>Rekomendasi 15: Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Penjelasan: Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolejal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolejal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik.</p> <p>Recommendation 15: Board of Directors has self assessment policy to evaluate Board of Directors' performance.</p> <p>Explanation: As with Board of Commissioners, Board of Directors' self assessment policy is a guideline used as a performance accountability for Board of Directors in a collegial manner. The Self Assessment is conducted by each member of Board of Directors to assess Board of Directors' performance in a collegial manner rather than assessing the individual performance of each member of Board of Directors. With the existence of Self Assessment is expected that each member of Board of Directors can contribute to improve Board of Directors' performance on an ongoing basis.</p> <p>The policy contains assessment activities undertaken, purposes and objectives, periodic execution time, and assessment indicators and criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Company, where such function is required in Financial Services Authority Regulation No. 34/ POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.</p>	<p>Setiap triwulan Direksi menerbitkan laporan kinerja Perseroan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.</p> <p>Kebijakan penilaian kinerja Direksi sesuai dengan Pedoman tata kelola Perseroan dan <i>Board Manual</i>.</p> <p>Pelaporan atas Kinerja Direksi sesuai dengan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang telah disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Penilaian Direksi dilakukan secara Kolejal dan Individual.</p> <p>Every quarter, the Board of Directors issues a company performance report, which is then reported to the Board of Commissioners and shareholders.</p> <p>The policy for performance assesment of Board of Directors has complies with the Corporate Governance Guidelines and Board Manual.</p> <p>Reporting on the Board of Directors' performance is in accordance with the Key Performance Indicator (KPI) approved by the Shareholders and the Board of Commissioners. The Board of Directors assessment is conducted collegially and individually.</p> <p><i>Comply</i></p>
C.2.2.	<p>Rekomendasi 16: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan Perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p> <p>Recommendation 16: Self-assessment policy to evaluate Board of Director's performance shall be disclosed in the Annual Report of Public Company.</p> <p>Explanation: The disclosure of Self Assessment policy on Board of Directors' performance is conducted not only to fulfill the transparency aspect as a performance accountability, but also to provide important information regarding improvement efforts in the management of the Public Company. Such information is very useful to provide confidence to shareholders or investors that there is certainty of corporate management to be continuously carried out in a better direction. With the disclosure, shareholders or investors acknowledge the check and balance mechanism on Board of Directors' performance</p>	<p>Direksi telah mengungkapkan penilaian kinerja Direksi melalui laporan tahunan Perseroan.</p> <p>The Board of Directors has disclosed its performance assessment through the Company's annual report</p> <p><i>Comply</i></p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
C.2.3.	<p>Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perseroan Terbuka, sehingga integritas Perseroan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perseroan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>Recommendation 17: Board of Directors has policy related to resignation of Board of Directors member if involved in financial crime.</p> <p>Explanation: The resignation policy of Board of Directors members that involved in financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Company, so that the Company's integrity will be maintained. This policy is required to expedite the legal process and to ensure that the legal process does not interfere business activities. In addition, from morality side, this policy builds an ethical culture within the Company's environment. This policy may be covered in the Guidelines or Code of Conducts that are applicable to Board of Directors.</p> <p>Furthermore, what is meant by involved in financial crime is the convicted status of Board of Directors member from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and fraud in the financial service activities and Money Laundering Crime Act as referred to Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime.</p>	<p>Perseroan memiliki <i>Board Manual</i> sebagai dasar tata kelola antar organ perusahaan yang mengatur pengunduran diri anggota Direksi termasuk mengatur Etika jabatan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Direksi.</p> <p>Selain itu Direksi juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai Perseroan.</p> <p>The Company has a Board Manual serve as the basis for governance among the Company's organs, which regulates policies on resignation as well as governs the Code of Conduct of Board of Directors and prohibited actions.</p> <p>In addition, the Board of Directors also signs an Integrity Pact as a commitment to uphold ethical conduct that in line with the Company's values.</p> <p><i>Comply</i></p>
D.	<p>Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholders Participation</p>	
D.1.	<p>Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perseroan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7: Improve Corporate Governance Aspect through Stakeholders Participation.</p>	
D.1.1.	<p>Rekomendasi 18: Perseroan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.</p> <p>Penjelasan: Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p> <p>Recommendation 18: Public Company has policy to prevent insider trading.</p> <p>Explanation: A person who has inside information is prohibited to engaging in a Securities transaction by using inside information as referred to the Capital Market Law. Public Companies can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example by strictly separating confidential data and/or public information, as well as dividing the management duties and responsibilities for such information in a proportionate and efficient manner</p>	<p>Perseroan tidak menerbitkan Saham pada Pasar Modal, karena Perseroan merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.</p> <p>The Company does not issue shares on the Capital Market because it is a State-Owned Enterprise (SOE) whose shares are owned by the Government.</p> <p><i>Comply</i></p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
D.1.2.	<p>Rekomendasi 19: Perseroan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i>.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p> <p>Recommendation 19: Public Company has anti-corruption and anti-fraud policy.</p> <p>Explanation: Anti-corruption policy is useful to ensure that the Company's business activities are conducted legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy may be part of the code of conduct, or in its own form. The policy may include, among others, the programs and procedures undertaken in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in the Public Company. The policy scope should illustrate the Public Company's prevention against any corrupt practices of either giving or receiving from other parties.</p>	<p>Perseroan memiliki kebijakan Kode Etik Bisnis dimana di dalamnya mengatur mengenai anti korupsi dan <i>anti fraud</i></p> <p>Selain itu Seluruh Pegawai juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai Perseroan.</p> <p>The Company has a Business Code of Ethics policy that includes provisions on anti-corruption and anti-fraud.</p> <p>In addition, all personel also signs an Integrity Pact as a commitment to uphold ethical conduct that in line with the Company's values</p> <p><i>Comply</i></p>
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20: Perseroan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perseroan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan Perseroan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> Perseroan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p> <p>Recommendation 20: Public Company has policy on suppliers and vendors selection and capacity building.</p> <p>Explanation: The policy on suppliers or vendors selection is useful to ensure that Public Company obtains the goods or services needed at competitive prices and good quality. While the policy on capacity building of suppliers or vendors is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services needed by the Company will affect the quality of the Company's output.</p> <p>The implementation of these policies can guarantee supply continuity, both in terms of quantity and quality required by Public Company. The scope of these policies includes criteria in selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanism, efforts to increase the ability of suppliers or vendors, and fulfillment of rights relating to suppliers or vendors.</p> <p>The Company has a policy related to the procurement of goods and services which contains the selection and improvement of supplier or vendor capabilities as stated in the standard <i>Procurement Guidelines</i>.</p>	<p>Perseroan memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Peraturan Direksi yang telah mengatur mengenai mekanisme seleksi pemasok/vendor dan jenis-jenis pengadaannya.</p> <p>The Company has Policy for Procurement of Goods and Services through a Board Regulation that governs the selection mechanism for suppliers/vendors and the types of procurement.</p> <p><i>Comply</i></p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
D.1.4.	<p>Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perseroan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perseroan Terbuka kepada kreditur.</p> <p>Recommendation 21: Public Company has policy on creditors' rights fulfillment.</p> <p>Explanation: The creditors' rights fulfillment policy is used as a guide in providing loan to creditors. The policy's objective is to maintain the rights fulfillment and the creditors' trust to the Company. The policy includes consideration in making agreements, as well as follow-up in obligations fulfillment by the Company to the creditors.</p>	<p><i>Explain</i> Saat ini, Perseroan masih menyusun kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Currently, the Company is still formulating policies regarding the fulfillment of creditors' rights.</p>
D.1.5.	<p>Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perseroan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola Perseroan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p> <p>Recommendation 22: Public Company has whistleblowing system policy.</p> <p>Explanation: Well-structured whistleblowing policy will provide protection assurance to witnesses or whistleblowers for a violation indication committed by employee or management. Policy system implementation will have an impact on the establishment of good corporate governance culture. Whistleblowing system policies include, among others, types of offenses, complaints, whistleblower's protection and confidentiality, complaint handling, complaint handling party, and the results of handling and follow-up.</p>	<p>Perusahaan telah memiliki kebijakan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) melalui Peraturan Direksi No SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 13 Desember 2023 tentang pedoman <i>Whistleblowing System</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p> <p>Sistem WBS diterapkan melalui 6 saluran utama yaitu:</p> <p><i>Web</i> : https://pelindobersih.online/whistleblowing.link/ <i>Online</i> : whistleblowing.link/ <i>Telepon</i> : +62 21 2782 2345 <i>Faksimile</i> : +62 21 2782 3456 <i>SMS / WhatsApp</i> : +62 811 933 2345 / +62 811 9511 665 <i>Email</i> : pelindobersih@whistleblowing.link <i>Pos</i> : Pelindo Bersih. PO Box 1074. JKS 12010</p> <p>Perseroan juga mempunyai Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih dalam Pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 25 Juli 2023.</p> <p><i>Comply</i></p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
		<p>The Company has established a Whistleblowing System (WBS) policy through Board Regulation No. SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 dated December 13, 2023, regarding the Guidelines for Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).</p> <p>WBS system is implemented through 6 main channels, namely:</p> <p>Web : https://pelindobersih.online/whistleblowing.link/ Online : whistleblowing.link/ Telepon : +62 21 2782 2345 Faksimile : +62 21 2782 3456 SMS / WhatsApp : +62 811 933 2345 / +62 811 9511 665 Email : pelindobersih@whistleblowing.link Pos : Pelindo Bersih, PO Box 1074, JKS 12010</p> <p>The Company also has Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regarding Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in the Whistleblowing System Implementation No. SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 dated July 25, 2023.</p> <p>Comply</p>
D.1.6.	<p>Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan: Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang Perseroan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang Perseroan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perseroan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perseroan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perseroan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perseroan Terbuka yang ada.</p> <p>Recommendation 23: Public Company has long-term incentives for Board of Directors and employees.</p> <p>Explanation: Long-term incentives are incentive based on long-term performance achievement. Long-term incentive plan has a rationale that the Company's long-term performance is reflected by the stock value growth or other long-term targets of the Company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and motivate Board of Directors and employees to improve performance or productivity that will impact on improving the Company's performance over the long term.</p> <p>The long-term incentives policy is the Company's actual commitment to encourage the long-term incentives to Board of Directors and Employees on terms, procedures and forms that are comply to long-term objectives of the Company. Such policies may include, goals and purposes of providing long-term incentives, terms and procedures for granting incentives, as well as the conditions and risks to be considered by the Company in providing incentives. The policy may also be included in the Company's existing remuneration policy.</p>	<p>Perseroan telah memiliki Jaminan Hari Tua untuk Direksi dan Karyawan.</p> <p>Selain itu Direksi juga diberikan asuransi purna jabatan.</p> <p>The Company has Retirement Benefit Plan for Directors and Employees.</p> <p>In addition, the Board of Directors is also provided with retirement insurance.</p> <p>Comply</p>



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recommendations	Comply or Explain Comply or Explain
E.	Aspek 5: Keterbukaan Informasi Aspect 5: Information Disclosure	
E.1.	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8: Improve the implementation of information disclosure.	
E.1.1.	<p>Rekomendasi 24: Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan: Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perseroan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan Perseroan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi Perseroan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya Perseroan.</p> <p>Recommendation 24: Public Company utilizes broader information technology application besides website as means of information disclosure.</p> <p>Explanation: Information technology can be useful as a way of information disclosure. The information disclosure is not only those that have been regulated in legislation, but also other information related to the Company that is felt useful to be known by shareholders or investors. With the utilization of more widely technology than the Website, the Company is expected to improve the corporate information dissemination effectiveness. Nevertheless, the information technology utilization should still pay attention to the Company's benefits and costs.</p>	<p>Perseroan telah memiliki <i>website</i> resmi melalui www.pelindo.co.id, pemutahiran <i>websites</i> ini dilakukan secara periodik dan merupakan tanggungjawab Sekretariat Perusahaan.</p> <p>Selain itu Perseroan juga memiliki media sosial melalui Youtube, Twitter, Facebook dan Instagram.</p> <p>The Company has an official website at www.pelindo.co.id, which updated periodically and under responsibility of the Corporate Secretary.</p> <p>The Company also has social media accounts on YouTube, Twitter, Facebook, and Instagram.</p> <p><i>Comply</i></p>
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25: Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan: Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perseroan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perseroan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perseroan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perseroan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Recommendation 25: Annual Report of Public Company shall disclose the shareholding of Public Company minimum 5% (five percent), in addition to disclosure of end-benefit owners in the shareholding of Public Company via major and controlling shareholders.</p> <p>Explanation: The Capital Market sector legislation in governing the Company's annual report submission has set out the obligation to disclose information regarding the shareholders of 5% (five percent) or more as well as the major and controlling shareholders of the Company either directly or indirectly up to the end-benefit owners in the ownership of such shares. In the Governance Manual, it is recommended to disclose the end-benefit owners of Public Company's shares of at least 5% (five percent), other than to disclose the end-benefit owners of shares by major and controlling shareholders.</p>	<p>Saham Perseroan saat masih dimiliki oleh mayoritas Pemerintah, karena status Perseroan sebagai BUMN.</p> <p>Saham Perseroan belum dimiliki oleh masyarakat karena Perseroan belum melakukan IPO.</p> <p>The Company's shares are still majority-owned by the government due to its status as a state-owned enterprise (SOE).</p> <p>The Company's shares are not owned by the public because the Company has not conducted an IPO yet.</p> <p><i>Comply</i></p>

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

GCG ASSESSMENT BERDASARKAN SK-16/S. MBU/2012

Untuk mengetahui efektivitas dan mengukur tingkat implementasi praktik GCG di lingkup usaha, Perseroan setiap tahunnya melakukan asesmen GCG. Pelaksanaan asesmen GCG ini menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai acuan Perseroan dalam melakukan perbaikan praktik GCG di Perseroan secara berkelanjutan. Prosedur pelaksanaan penilaian GCG Pelindo mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
5. Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No. SE14/MBU/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Program *Assessment* dan *Review* Pelaksanaan GCG.

KRITERIA PENILAIAN

Assessment GCG untuk tahun buku 2022 dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Indikator yang digunakan dalam *assessment* GCG tersebut meliputi:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola Perseroan yang baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi; dan
6. Aspek lainnya.

GCG ASSESSMENT BASED ON SK-16/S. MBU/2012

To identify the effectiveness and measure the level of GCG practices implementation in the business scope, the Company annually conducts a GCG assessment. The GCG assessment produces recommendations that can be used as a reference for the Company in continuously improving GCG practices in the Company. The procedure of Pelindo's GCG assessment refers to several provisions, including:

1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
2. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
3. Decree of the Minister of SOEs No. KEP-117/MMBU/2002 dated August 1, 2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises.
4. Decree of the Secretary of Ministry of SOEs No. SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
5. Circular Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SE14/MBU/2010 dated November 11, 2010 concerning Assessment and Review Program of GCG Implementation.

ASSESSMENT CRITERIA

The GCG assessment for 2022 fiscal year was carried out using assessment criteria based on the Decree of Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The indicators used in the GCG assessment include:

1. Commitment on sustainable implementation of good corporate governance;
2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Board of Directors;
5. Disclosure of information and transparency; and
6. Other aspects.



PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Pihak yang melakukan penilaian implementasi GCG di tahun buku 2022 adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

HASIL PENILAIAN

Skor penilaian GCG Perseroan selama tahun buku 2021 sampai dengan tahun buku 2022 sebagai berikut:

Tahun Buku Fiscal Year	Skor Penilaian Assessment Score	Kategori Category	Pelaksana Assessor
2021	<i>Diagnostic Assessment</i>	-	BPKP RI
2022	90,473	Sangat Baik	BPKP RI

Rincian hasil GCG *assessment* Pelindo tahun buku 2022 sebagai berikut:

No	Aspek Governance Governance Aspects	Bobot Weight	Capaian Perusahaan Company Achievements	Persentase (%) Percentage (%)
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Governance Implementation	7	6,848	97,824
2	Pemegang Saham Shareholders	9	8,369	92,986
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	32,337	92,390
4	Direksi Board of Directors	35	32,194	91,984
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9	8,850	98,341
	Sub-Total	95	88,598	
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5	1,875	
	Jumlah Total	100	90,473	90,473

Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN RI No SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan belum terdapat aturan terbaru terkait penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sehingga sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan Perseroan belum melaksanakan GCG *Assessment* tahun buku 2023. Perseroan masih menunggu arahan dari Kementerian BUMN untuk melakukan penilaian GCG tahun buku 2023.

ASSESSOR

The GCG assessment in 2022 fiscal year was conducted by the Financial and Development Supervisory Agency.

ASSESSMENT RESULT

The Company's GCG assessment score for 2021 to 2022 fiscal year as follows:

Details of Pelindo's GCG assessment results for 2022 fiscal year are as follows:

Based on a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia No SK-12/S.MBU/08/2023 dated August 16, 2023 concerning the Revocation of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators / Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and there are no recent regulations related to the assessment of the implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, so that until this Annual Report is published the Company has not carried out GCG Assessment for fiscal year 2023. The Company is still waiting for direction from the Ministry of SOEs to conduct a GCG assessment for 2023 fiscal year.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA

Berdasarkan hasil penilaian GCG untuk tahun buku 2022, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi Pelindo untuk segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan GCG di Pelindo semakin baik. Adapun *Area of Improvement* (AoI) untuk tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

RECOMMENDATION AND FOLLOW UP

Based on the GCG assessment results for 2022 fiscal year, there are several things that need attention for Pelindo to be followed up immediately so that the GCG implementation in Pelindo is getting better. The Areas of Improvement (AoI) for 2022 fiscal year are as follows:

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up	Capaian Achievements
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Governance Implementation				
1.	Parameter 9: Perseroan melaksanakan kebijakan /SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara. Parameter 9: The Company applies policies/SOPs regarding compliance with the state officials' assets reporting.	Agar diberlakukan sanksi kepada pegawai yang belum menyampaikan LHKPN sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelindo Nomor HK/01/20/12/1/ADKS/UTMA/2021 tanggal 20 Desember 2021. Sanctions should be imposed to employees who have not submitted their LHKPN according to the time specified as stipulated in PT Pelindo Board of Directors Regulation Number: HK/01/20/12/1/ADKS/UTMA/2021 dated December 20, 2021.	Telah disampaikan Surat kepada BoD, BoC Anper yang belum melakukan pelaporan untuk tetap melapor yang ditandatangani Wadirut yang dibuat oleh GH Sekretariat Perusahaan selaku Penanggungjawab pelaporan LHKPN. A letter has been sent to the BoD, BoC of Subsidiaries who have not reported, to continue reporting, signed by the Vice President, made by GH the Corporate Secretariat as the person in charge of LHKPN reporting.	100%
Pemegang Saham Shareholders				
1.	Parameter 23: Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris. Parameter 23: Shareholders/GMS/Capital Owners carry out an assessment of prospective members of Board of Commissioners.	Pemegang Saham agar meminta masukan secara formal dari Departemen teknis BUMN untuk calon anggota Komisaris. Shareholders are asked to request formal input from the SOE technical department for prospective members of Board of Commissioners.	Penyerahan salinan SK Menteri BUMN tentang pengangkatan Dewan Komisaris ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Penyerahan. The submission of a copy of the SOE Minister's Decree on the appointment of Board of Commissioners is followed up by making a Minutes of Submission.	100%
2.	Parameter 24: Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan komposisinya. Parameter 24: Shareholders/GMS/Capital Owners determine the appointment of members of Board of Commissioners and their composition.	Pemegang saham agar melengkapi Penetapan pengangkatan Dewan Komisaris dengan Berita Acara RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris. Shareholders are required to complete the determination of appointment of Board of Commissioners with the minutes of GMS/Inauguration of Board of Commissioners	Penyerahan salinan SK Menteri BUMN tentang pengangkatan Dewan Komisaris ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Penyerahan. The submission of a copy of the SOE Minister's Decree on the appointment of Board of Commissioners is followed up by making a Minutes of Submission.	100%
3.	Parameter 27: Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) atau Revisi RJPP. Parameter 27: Shareholders/GMS/Capital Owners ratify the Company's Long Term Plan (RJPP) or Revised RJPP.	Pemegang saham agar melakukan upaya percepatan pembahasan rancangan RJPP Tahun 2021-2025 bersama Direksi dan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sehingga dapat segera melakukan pengesahan RJPP Tahun 2021-2025. 2021-2025. Shareholders should make efforts to accelerate the discussion of 2021- 2025 RJPP draft with Directors and Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) so the 2021-2025 RJPP can be immediately ratified.	Percepatan proses persetujuan RJPP sehingga sesuai dengan batas waktu sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023. Accelerate the RJPP approval process so that it is in accordance with the deadline as stipulated in the Minister of SOE Regulation Number: PER-02/MBU/03/2023.	100%



No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up	Capaian Achievements
4.	Parameter 28: Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP). Parameter 28: Shareholders/GMS/Capital Owners ratify the Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP).	Pemegang saham agar melakukan pengesahan RKAP tepat waktu sesuai ketentuan. Shareholders are required to ratify the RKAP in a timely manner according to the provisions.	Percepatan evaluasi atas usulan RKAP, dan mempercepat proses pengusulan Surat Kuasa Menteri BUMN sehingga RKAP dapat disetujui paling lambat sebelum akhir bulan Desember. Accelerate the evaluation of RKAP proposals, and accelerate the process of proposing the Minister of SOEs' Authorization Letter so that the RKAP can be approved no later than the end of December.	100%
5.	Parameter 32: Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan. Parameter 32: Shareholders/GMS/Capital Owners determine external auditors to audit the Company's Financial Statements	Pemegang Saham agar melakukan penetapan besarnya honorarium. Shareholders should determine the amount of honorarium.	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan arahan kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan besarnya nilai honorarium auditor eksternal (KAP) kepada RUPS sebagaimana diatur pada PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dengan besaran sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan RUPS Tahunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Provide direction to the Board of Commissioners to propose the amount of honorarium for external auditors (KAP) to the GMS as stipulated in PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Provide delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of audit fees with the amount proposed by Board of Commissioners through the Annual GMS Resolution of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). 	100%
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
1.	Parameter 44: Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris. Parameter 44: The Board of Commissioners determines the mechanism for Board of Commissioners' decision making.	Dewan Komisaris agar melaksanakan dan <i>memonitoring</i> tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi sesuai dengan standar waktu yang ditentukan. Board of Commissioners is required to carry out and monitor the level of urgency in making approval decisions on the Board of Directors' proposals in accordance with the specified time standard.	Telah dilakukan evaluasi dan <i>monitoring</i> tingkat kesegeraan tanggapan Dewan Komisaris. Evaluation and monitoring of the level of immediacy of the Board of Commissioners' response has been carried out.	100%
2.	Parameter 47: Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. Parameter 47: The Board of Commissioners gives approval for the RKAP draft submitted by the Board of Directors.	Dewan Komisaris agar dalam memberikan tanggapan atas usulan RKAP memuat simpulan atas keselarasan rancangan RKAP dengan RJPP. Board of Commissioners in responding to the RKAP proposal should include a conclusion on the alignment of RKAP draft with RJPP.	Telah diakomodir di dalam tanggapan RKAP 2024. Has been accommodated in the 2024 RKAP response.	100%
3.	Parameter 51: Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern Perseroan. Parameter 51: The Board of Commissioners provides direction on strengthening the Company's internal control system.	Dewan Komisaris agar melakukan telaah atas <i>internal control report</i> yang dibuat oleh Manajemen. Board of Commissioners is required to review the internal control report prepared by Management.	Komite Audit telah melakukan Evaluasi terhadap Laporan Manajemen tahun 2022 (<i>Audited</i>). Audit Committee has evaluated the 2022 Management Report (Audited).	100%

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up	Capaian Achievements
4.	Parameter 58: Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. Parameter 58: The Board of Commissioners supervises and monitors the compliance of the Board of Directors in carrying out applicable laws and regulations and agreements with third parties.	Menambahkan pada <i>Board manual/SOP</i> Dewan Komisaris kebijakan/pedoman yang mengatur Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar. Add to the Board manual/SOP of Board of Commissioners, policies/ guidelines that regulate the Commissioners to supervise the Company's compliance with the Articles of Association.	Telah ditambahkan di dalam <i>Board Manual</i> , dimana <i>Board Manual</i> terbaru juga telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Pelindo No HK.01/27/11/2/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 27 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>). It has been added in the Board Manual, where the latest Board Manual has also been ratified based on Pelindo Board of Directors Regulation No. HK.01/27/11/2/TKPT/UTMA/PLND-23 dated November 27, 2023 concerning Guidelines for Work Procedures for Board of Commissioners and Board of Directors Relations.	100%
5.	Parameter 58: Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. Parameter 58: The Board of Commissioners supervises and monitors the compliance of the Board of Directors in carrying out applicable laws and regulations and agreements with third parties.	Melaporkan hasil evaluasi/pembahasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan komisaris secara semesteran dan tahunan. Report the results of evaluation/ discussion of applicable laws and regulations and the articles of association as well as the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties to the GMS in the semiannual and annual Board of Commissioners supervisory report.	Pengawasan terhadap kesesuaian dengan peraturan, anggaran dasar dan <i>review</i> komitmen kerjasama dengan pihak ketiga telah diakomodir di dalam nota dinas KGCGPMR saat evaluasi kajian kerjasama dengan pihak eksternal dan kerjasama lainnya. Supervision of compliance with regulations, articles of association and review of cooperation commitments with third parties has been accommodated in the KGCGPMR official memorandum when evaluating the review of cooperation with external parties and other cooperation.	100%
6.	Parameter 60: Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal. Parameter 60: The Board of Commissioners gives approval for transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners or GMS/Capital Owners.	Dewan Komisaris agar memastikan/memonitoring pemberian otorisasi atau rekomendasi tidak melebihi ketentuan (paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris). Board of Commissioners must ensure/monitor the granting of authorization or recommendations that do not exceed the provisions (no later than 14 days after the complete proposal or document is received by Board of Commissioners).	Telah dilakukan evaluasi dan <i>monitoring</i> tingkat kesegeraan tanggapan Dewan Komisaris. Evaluation and monitoring of the level of immediacy of the Board of Commissioners' response has been carried out.	100%
7.	Parameter 61: Dewan Komisaris (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal. Parameter 61: The Board of Commissioners (based on the recommendation from Audit Committee) proposes a candidate for External Auditor to the GMS/Capital Owners.	Dewan Komisaris agar memuat besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor dalam Usulan Auditor Eksternal kepada RUPS. Board of Commissioners should include the amount of honorarium/remuneration proposed for external auditors in the External Auditor's Proposal to the GMS.	Telah dilakukan Usulan Penetapan dan Persetujuan Kantor Akuntan Publik (KAP) tahun buku 2023 pada tanggal 23 Mei 2023 yang didalamnya telah memuat Nilai Honorarium sebagaimana dimaksud dalam parameter. Proposal for Determination and Approval of Public Accountant Firm (KAP) for fiscal year 2023 has been made on May 23, 2023, which contains Honorarium Fee as referred to in parameter.	100%
8.	Parameter 62: Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris. Parameter 62: The Board of Commissioners ensures that external audit and internal audit are carried out effectively and review complaints related to SOEs received by the Board of Commissioners	Dewan Komisaris agar Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal. Board of Commissioners should give directions to the Board of Directors regarding increasing the effectiveness of internal audit.	Telah disampaikan pada tanggapan Laporan Manajemen Triwulanan Tahun 2023. Has been submitted in the 2023 Quarterly Management Report response.	100%



No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up	Capaian Achievements
9.	<p>Parameter 65: Peran Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan-Perusahaan/ perusahaan patungan.</p> <p>Parameter 65: The role of Board of Commissioners in selecting candidates for members of Board of Directors and Board of Commissioners of a Subsidiary Company/joint venture.</p>	<p>Dewan Komisaris agar melakukan Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/ perusahaan patungan paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.</p> <p>Board of Commissioners is required to make a written determination regarding the process of appointing Board of Directors and Board of Commissioners of a subsidiary/joint venture no later than 15 calendar days from the date of receipt of the candidates for Board of Directors and Board of Commissioners of the subsidiary/ joint venture.</p>	<p>Penetapan tertulis atas proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak Perseroan/ Perseroan patungan yang melebihi SLA (15 hari kalender) akan dijelaskan pada saat proses penilaian GCG.</p> <p>Written stipulations on the appointment process of Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures that exceed the SLA (15 calendar days) will be explained during GCG assessment process.</p>	100%
10.	<p>Parameter 67: Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.</p> <p>Parameter 67: The Board of Commissioners evaluates Board of Directors and reports the assessment results to Shareholders/Capital Owners.</p>	<p>Dewan Komisaris agar menambahkan pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham dalam Rencana Kerja (RKA) Dewan Komisaris.</p> <p>Board of Commissioners should add monitoring of the performance of Board of Directors and reporting to Shareholders in the Work Plan (RKA) of Board of Commissioners</p>	<p>Telah disusun dan di kirimkan ke Kementerian BUMN perihal RKA Dewan Komisaris tahun 2024.</p> <p>Has been prepared and submitted to the Ministry of SOEs regarding the RKA for Board of Commissioners in 2024.</p>	100%
11.	<p>Parameter 67: Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.</p> <p>Parameter 67: The Board of Commissioners evaluates Board of Directors and reports the assessment results to Shareholders/Capital Owners.</p>	<p>Dewan Komisaris agar menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.</p> <p>Board of Commissioners should submit the results of performance assessment of Board of Directors collegially and individually to the GMS in the semi-annual and annual report of Board of Commissioners' supervisory duties.</p>	<p>hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan disampaikan kepada RUPS.</p> <p>The Board of Directors' performance assessment results on a collegial and individual basis are submitted to the GMS in the Board of Commissioners' supervisory duty reports on a semesterly and annual basis.</p>	100%
12.	<p>Parameter 71: Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Parameter 71: The Board of Commissioners measures and evaluates the performance of Board of Commissioners.</p>	<p>Dewan Komisaris agar dalam mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>Board of Commissioners should evaluate the performance achievements of each member of Board of Commissioners as outlined in the minutes of Board of Commissioners' meeting.</p>	<p>Dewan Komisaris melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners evaluates the performance achievements of each member of Board of Commissioners as outlined in the minutes of Board of Commissioners Meetings.</p>	100%
13.	<p>Parameter 83: Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Parameter 83 : Committees of Board of Commissioners report on the activities and results of their assignments to the Board of Commissioners.</p>	<p>Dewan Komisaris agar menginstruksikan kepada Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menyusun laporan triwulanan dan laporan tahunan komite agar memuat Perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan, Substansi hasil kegiatan dan Rekomendasi yang diberikan.</p> <p>Board of Commissioners should evaluate the performance achievements of each member of Board of Commissioners as outlined in the minutes of Board of Commissioners' meeting.</p>	<p>Laporan triwulan dan laporan tahunan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memuat Perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan, Substansi hasil kegiatan dan Rekomendasi yang diberikan.</p> <p>The quarterly reports and annual reports of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee have contained Comparison of activity realization with annual work program, Substance of activity results and Recommendations given.</p>	100%

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up	Capaian Achievements
Direksi Board of Directors				
1.	<p>Parameter 86: Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan.</p> <p>Parameter 86: The Board of Directors determines the organizational structure/organization according to the needs of the Company.</p>	<p>Direksi agar mengesahkan kebijakan yang berisi spesifikasi jabatan yang di dalamnya memuat kompetensi yang dibutuhkan untuk semua tingkat jabatan.</p> <p>Board of Directors must adopt a policy on job specifications, which contains the competencies needed for all job levels.</p>	<p>Telah disahkannya Perdir kamus kompetensi Nomor: HK.01/4/12/2/PSOG/UTMA/PLND-23 tentang Direktori Kompetensi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai dasar penyusunan profil kompetensi jabatan.</p> <p>The competency dictionary Board of Directors Regulation Number: HK.01/4/12/2/PSOG/UTMA/PLND-23 concerning Competency Directory within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has been approved as the basis for preparing position competency profiles.</p>	100%
2.	<p>Parameter 89: Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/ Pemilik Modal.</p> <p>Parameter 89: The Board of Directors has a Long Term Plan (RJPP), which is approved by the GMS/ Capital Owners.</p>	<p>Direksi agar memperhatikan ketepatan waktu penyusunan RJPP periode selanjutnya dan penyampaian ke Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sesuai ketentuan.</p> <p>Board of Directors should pay attention to the timeliness of preparing the RJPP for the next period and submitting it to the Board of Commissioners and Shareholders in accordance with the provisions.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku RJP 2021-2025 telah disampaikan kembali pada Surat Direktur Utama kepada Menteri BUMN No. PR.03/9/12/1/PRKP/UTMA/PLND-22 tanggal 9 Desember 2022 perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan RJPP Tahun 2021-2025 (Terdapat tanda terima dari KBUMN) ▪ Sebagaimana PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN pada Pasal 92 pada no (2) dan (3) disebutkan RJP yang sudah disampaikan dianggap sah untuk dilaksanakan jika tidak mendapatkan pengesahan RUPS/ Menteri dalam waktu 60 hari. ▪ The RJP 2021-2025 book has been resubmitted in the President Director's Letter to the Minister of SOEs No. PR.03/9/12/1/PRKP/UTMA/PLND-22 dated December 9, 2022 regarding Submission of Adjustments to the Draft RJPP 2021-2025 (There was a receipt from KBUMN) ▪ As PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs in Article 92 at no (2) and (3) states that the RJP that has been submitted is considered valid for implementation if it does not get the GMS/Ministerial ratification within 60 days. 	100%
3.	<p>Parameter 91: Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perseroan.</p> <p>Parameter 91: The Board of Directors places employees at all job levels in accordance with the job specifications and has a succession plan for all positions within the Company.</p>	<p>Direksi agar memperhatikan kompetensi dan aspirasi pegawai dalam penempatan karyawan di semua tingkatan.</p> <p>Board of Directors should pay attention to the competency and aspirations of employees in the placement of employees at all levels.</p>	<p>Pelaksanaan <i>job bidding</i> untuk pengisian posisi struktural yang bisa diikuti oleh seluruh pekerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan persyaratan yang telah ditentukan.</p> <p>Implementation of job bidding for filling structural positions that can be followed by all employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with predetermined requirements.</p>	100%



No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up	Capaian Achievements
4.	<p>Parameter 92: Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perseroan, penghematan/efisiensi Perseroan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.</p> <p>Parameter 92: The Board of Directors responds to proposed business opportunities that have the potential to increase Company revenue, savings/efficiency, asset utilization, and other benefits.</p>	<p>Direksi agar mengupayakan penurunan komplain dari <i>stakeholders</i> terutama yang berdampak bagi masyarakat sekitar.</p> <p>Board of Directors should strive to reduce complaints from stakeholders, especially those that have an impact on the surrounding community.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari Sisi TJSL: Telah dilaksanakan pelaksanaan program TJSL di wilayah Makassar New Port dalam rangka mengatasi tuntutan masyarakat di wilayah sekitar diantaranya sbb: Pembentukan Bank Sampah di berbagai kelurahan terdampak, Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) istri Nelayan di berbagai kelurahan terdampak, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dari sisi K3: Telah dilakukan: <i>Lesson Learn</i> Merauke dan dikirimkan ke semua Regional 1 s/d 4. ▪ Proses <i>Monitoring</i> dan Reminder terhadap Daftar <i>Action Log</i> Tindak Lanjut yang diharuskan untuk dipenuhi 100% bagi Cabang Merauke. ▪ From the CSR side: The implementation of CSR programs in Makassar New Port area has been carried out in order to overcome the demands of the community in the surrounding area, including the following: Formation of Waste Banks in various affected villages, Formation of Joint Business Groups (KUBE) for Fishermen's wives in various affected villages, Free Health Checks In terms of OHS: Has been done: Merauke Lesson Learn and sent to all Regions 1 to 4. ▪ Monitoring and Reminder process of Action Log Follow-up List that is required to be fulfilled 100% for Merauke Branch. 	100%
5.	<p>Parameter 93: Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.</p> <p>Parameter 93: The Board of Directors responds to current issues from external regarding changes in the business environment and their problems, in a timely and relevant manner.</p>	<p>Direksi agar menyusun dan menetapkan kebijakan atau mekanisme dalam membahas isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya.</p> <p>Board of Directors is required to formulate and establish policies or mechanisms to discuss current issues regarding changes in the business environment and their problems.</p>	<p>Telah disahkan Peraturan Direksi mengenai Pedoman Pengembangan Bisnis di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) nomor: HK.01/21/11/PGBS/UTMA/PLND-22.</p> <p>The Board of Directors Regulation regarding Business Development Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has been approved number: HK.01/21/11/PGBS/UTMA/PLND-22.</p>	100%
6.	<p>Parameter 101: Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.</p> <p>Parameter 101: The Board of Directors applies product and service quality improvement system.</p>	<p>Direksi agar menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman terkait kompensasi bila mutu tidak terpenuhi.</p> <p>Board of Directors should formulate and establish policies/guidelines related to compensation if quality is not met.</p>	<p>Telah disusun Peraturan Direksi Nomor: HK.01/3/10/1/BNPL/UTMA/PLND-22 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pelayanan Jasa Kapal di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang di dalamnya di atur tentang kompensasi untuk pengguna jasa terhadap pelayanan jasa tambat. (Dapat dilihat pada pasal 7 ayat 9).</p> <p>Board of Directors Regulation Number: HK.01/3/10/1/BNPL/UTMA/PLND-22 dated October 3, 2022 concerning Ship Services within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which regulates compensation for service users for mooring services. (Can be seen in article 7 paragraph 9).</p>	100%

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up	Capaian Achievements
7.	Parameter 103: Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perseroan. Parameter 103: The Board of Directors develops Human Capital, evaluates performance and provides appropriate remuneration, and builds an HC environment that effectively supports the Company's achievements.	Direksi agar menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman terkait remunerasi pegawai dan mensosialisasikannya. Board of Directors should formulate and establish policies/guidelines related to employee remuneration and socialize them.	Pasca Merger Kebijakan Remunerasi telah ditetapkan oleh Manajemen Post Merger Remuneration Policy has been determined by Management	100%
8.	Parameter 110: Perseroan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. Parameter 110: The Company complies with applicable laws and regulations and agreements with third parties.	Memaksimalkan rencana tindak lanjut yang telah disusun oleh manajemen sehingga hasil penilaian dari KLHK pada tahun berikutnya dapat berkurang yang mendapatkan peringkat merah. Maximizing follow-up plans that have been prepared by management so that the results of evaluation from the Ministry of Environment and Forestry in the following year can reduce those that received red rating.	Telah Terbit SK Pemerinkatan PROPER dan Rapor Final Biru yaitu: Tanjung Pandan, Tenau Kupang, Panjang, Pangkalbalam, Balikpapan, Tanjung Mas, Palembang, dan Tanjung Priok PROPER Ranking Decree and Blue Final Report have been issued, namely: Tanjung Pandan, Tenau Kupang, Panjang, Pangkalbalam, Balikpapan, Tanjung Mas, Palembang, and Tanjung Priok.	100%
9.	Parameter 110 : Perseroan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga. Parameter 110: The Company complies with applicable laws and regulations and agreements with third parties.	Melakukan <i>updating</i> peraturan yang mengatur Seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan Perseroan dan pihak ketiga wajib Menggunakan bahasa Indonesia. Updating the regulation governing that all Memorandums of Understanding and agreements involving companies and third parties must use the Indonesian language.	Pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia yang melibatkan Perseroan dan pihak ketiga telah diatur dalam Peraturan Direksi Tata Naskah. Arrangements for the use of Indonesian language involving companies and third parties have been regulated in the Board of Directors Regulation on Manuscripts	100%
10.	Parameter 112 A: Pelaksanaan hubungan dengan pemasok. Parameter 112 A: Relations with suppliers	Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas rekomendasi hasil <i>assessment</i> pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (<i>quality, cost, delivery, service</i>) dan menyusun dalam bentuk persentase terkait yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum. Monitor and evaluate the recommendations from supplier assessment results based on QCDS (quality, cost, delivery, service) achievements and compile them in the form of percentages of those that have been followed up and those that have not.	QCDS sudah dalam <i>survey</i> kepuasan vendor. QCDS is already in the vendor satisfaction survey.	100%
11	Parameter 112 B: Pelaksanaan hubungan dengan pemasok. Parameter 112 B: Relations with suppliers	Mencantumkan data status pembayaran apakah terlambat atau belum yang dilakukan kepada pemasok atau penyedia, bila terlambat perlu dilengkapi juga dengan tindak lanjutnya. Include data on the status of payment whether late or not made to suppliers or providers, if it is late, needs to be accompanied by follow-up actions.	Sudah bersurat ke layanan keuangan mengenai keluhan vendor terkait pembayaran Letters have been submitted to financial services regarding vendor complaints regarding payments	100%
12	Parameter 112 C: Pelaksanaan hubungan dengan pemasok. Parameter 112 C: Relations with suppliers	Menyusun analisis survei kepuasan penyedia terhadap proses pengadaan dengan mempertimbangkan aspek <i>fairness</i> dan <i>transparansi</i> . Prepare a provider satisfaction survey analysis of the procurement process by considering the aspects of fairness and transparency.	Aspek <i>fairness</i> dan <i>transparansi</i> sudah masuk dalam <i>survey</i> kepuasan vendor. Fairness and transparency aspects have been included in the vendor satisfaction survey	100%



No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up	Capaian Achievements
13.	Parameter 115: Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perseroan. Parameter 115: Relations with Company employees.	Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait dengan penetapan jenis kebijakan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya. Develop and establish policies related to determining the types of policies that must be communicated to employees and policies that must involve employees in their formulation.	Telah di tandatanganinya PKB Periode Tahun 2023-2025 antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu Nomor: KP.08.03/10/11/2/HBUP/UTMA/PLND-23 dan Nomor: 01/XI/SKEP/SPPI-B/2023 tanggal 10 November 2023. The PKB has been signed for the 2023-2025 period between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the United Indonesian Port Workers Union Number: KP.08.03/10/11/2/HBUP/UTMA/PLND-23 and Number: 01/XI/SKEP/SPPI-B/2023 dated November 10, 2023.	100%
14.	Parameter 116: Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan <i>stakeholders</i> . Parameter 116: There is a written procedure for accommodating and following up on stakeholder complaints	Menyusun dokumen terkait dengan realisasi tindak lanjut atas keluhan-keluhan <i>stakeholders</i> . Prepare documents related to the realization of follow-up on stakeholder complaints.	telah tersedianya wadah keluh kesah pekerja melalui Aplikasi Pelindo Talk dan Pelindo Kekeku yang sudah disosialisasikan kepada Pekerja pada tanggal 6 November 2023. Untuk pelanggan telah dilakukan <i>survey</i> kepuasan Pelanggan The availability of a forum for workers' complaints through the Pelindo Talk and Pelindo Kekeku applications that have been socialised to employees on November 6, 2023. For customers, a customer satisfaction survey has been conducted.	100%
15.	Parameter 118 A: Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial Perseroan untuk mendukung keberlanjutan operasi Perseroan. Parameter 118 A: The Company carries out corporate social responsibility to support the sustainability of its operations.	Menyelesaikan penyusunan SOP yang memuat kewajiban Perseroan untuk memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan. Complete the preparation of SOPs which contain the Company's obligations to ensure that the Company's assets and business locations and other facilities comply with applicable laws and regulations regarding environmental preservation.	SOP yang memuat kewajiban Perseroan untuk memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan telah dibuat. SOPs that contain the Company's obligation to ensure that assets and business locations as well as other Company facilities fulfil the laws and regulations have been made.	100%
16.	Parameter 118 B: Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial Perseroan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan. Parameter 118 B: The Company carries out corporate social responsibility to support the sustainability of its operations.	Menyusun rencana dan strategi agar tidak terjadi lagi kenaikan tunggakan pinjaman UMKM. Develop plans and strategies to prevent an increase in MSME loan arrears.	Terdapat program pengembangan UMK khusus mitra binaan Pelindo dengan memberikan bantuan program peningkatan kapasitas dan masyarakat, program keikutsertaan pameran serta program sertifikasi usaha. Special MSE development program for Pelindo's fostered partners by providing assistance for capacity building and community programs, exhibition participation programs and business certification programs.	100%
17.	Parameter 119 : Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan. Parameter 119: The Board of Directors establishes a policy regarding mechanisms for Board of Directors and structural officials to prevent personal and other parties from taking advantage due to conflicts of interest.	Direksi agar melaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan di setiap awal tahun. Board of Directors is required to carry out the signing of the Statement of Conflict of Interest at the beginning of each year.	Telah dilakukan Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan dari tiap Direksi dan Komisaris di awal tahun. A Conflict of Interest Statement has been signed by each Board of Directors and Board of Commissioners at the beginning of the year.	100%

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up	Capaian Achievements
18.	Parameter 132 A: Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya. Parameter 132 A: The corporate secretary performs its functions.	Direksi agar menyampaikan laporan triwulanan ke Dewan Komisaris secara tepat waktu sesuai ketentuan. Board of Directors is required to submit quarterly reports to the Board of Commissioners in a timely manner according to regulations.	<i>Draft</i> Revisi Peraturan Direksi Pedoman Penyusunan RKAP, Pengendalian Anggaran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah disusun yang pada isinya terdapat pengaturan batas waktu penyampaian laporan ke Komisaris maksimal tanggal 25 bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir. The Draft Revision of Board of Directors Regulation on Guidelines for Preparation of RKAP, Budget Control and Performance Reporting within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has been prepared, which in its contents regulates the deadline for submitting reports to the Board of Commissioners by the 25th of following month after the quarterly period ends.	100%
19.	Parameter 132 B: Sekretaris Perseroan menjalankan fungsinya. Parameter 132 B: The corporate secretary performs its functions.	Direksi agar mendorong Pemegang S a h a m untuk mengesahkan RJPP dan menyusun risalah RUPSnya. Board of Directors to encourage Shareholders to ratify the RJPP and prepare the minutes of GMS.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku RJP 2021-2025 telah disampaikan kembali pada Surat Direktur Utama kepada Menteri BUMN No. PR.03/9/12/1/PRKP/UTMA/PLND-22 tanggal 9 Desember 2022 perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan RJPP Tahun 2021-2025 (Terdapat tanda terima dari KBUMN). ▪ Sebagaimana PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN pada Pasal 92 pada no (2) dan (3) disebutkan RJPP yang sudah disampaikan dianggap sah untuk dilaksanakan jika tidak mendapatkan pengesahan RUPS/Menteri dalam waktu 60 hari. ▪ The RJP 2021-2025 book has been resubmitted in the President Director's Letter to the Minister of SOEs No. PR.03/9/12/1/PRKP/UTMA/PLND-22 dated December 9, 2022 regarding Submission of Adjustments to the Draft RJPP 2021-2025 (There was a receipt from KBUMN). ▪ As PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs in Article 92 at no (2) and (3) states that the RJPP that has been submitted is considered valid for implementation if it does not get GMS/ Ministerial ratification within 60 days. 	100%



No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-up	Capaian Achievements
20.	<p>Parameter 134: Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Parameter 134: The Board of Directors holds GMS in accordance with the procedures stipulated in the Articles of Association and laws and regulations.</p>	<p>Melakukan RUPS terkait dengan pengesahan/persetujuan RKAP pada akhir tahun anggaran, untuk RKAP tahun berikutnya.</p> <p>Communicating and coordinating with stakeholders so that the GMS related to the approval of RJPP can be carried out immediately.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengesahan RKAP 2023 sudah dilakukan oleh Pemegang Saham (Kementerian BUMN) pada tanggal 29 Januari 2023 serta dasar pengesahan RKAP oleh Kementerian BUMN sesuai SK 373/MBU/11/2020 tanggal 17 November 2020 d lampiran 7 disebutkan bahwa pengesahan RKAP BUMN dilakukan paling lambat 31 januari pada tahun berjalan Buku RJP 2021-2025 telah disampaikan kembali pada Surat Direktur Utama kepada Menteri BUMN No. PR:03/9/12/1/PRKP/UTMA/PLND-22 tanggal 9 Desember 2022 perihal Penyampaian Penyesuaian Rancangan RJPP Tahun 2021-2025 (Terdapat tanda terima dari KBUMN) Sebagaimana PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN pada Pasal 92 pada no (2) dan (3) disebutkan RJP yang sudah disampaikan dianggap sah untuk dilaksanakan jika tidak mendapatkan pengesahan RUPS/ Menteri dalam waktu 60 hari. The ratification of 2023 RKAP has been carried out by the Shareholders (Ministry of SOEs) on January 29, 2023 and the basis for the RKAP ratification by the Ministry of SOEs in accordance with SK 373/MBU/11/2020 dated November 17, 2020 in attachment 7 states that the SOE RKAP ratification is carried out no later than January 31 of the current year. The RJP 2021-2025 book has been resubmitted in the President Director's Letter to the Minister of SOEs No. PR: 03/9/12/1/PRKP/UTMA/PLND-22 dated December 9, 2022 regarding Submission of Adjustments to the Draft RJPP 2021-2025 (There was a receipt from KBUMN) As PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs in Article 92 at no (2) and (3) states that the RJP that has been submitted is considered valid for implementation if it does not get the GMS/Ministerial ratification within 60 days. 	100%

Pengungkapan Informasi

Information Disclosure

1.	<p>Parameter 144: Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.</p> <p>Parameter 144: The Annual Report contains Summary of Important Financial Data.</p>	<p>Belum terpenuhi karena masih entitas baru.</p> <p>Not yet fulfilled because it is still a new entity.</p>	<p><i>Annual Report dan sustainability report</i> telah selesai dilakukan.</p> <p>Annual Report and sustainability report have been completed.</p>	100%
2.	<p>Parameter 148: Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perseroan yang Baik.</p> <p>Parameter 148: The Annual Report contains disclosure of Good Corporate Governance practices.</p>	<p>Agar perusahaan menyajikan informasi pada laporan tahunan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan.</p> <p>The Company should present information in the annual report relating to corporate social responsibility in accordance with the provisions.</p>	<p><i>Annual Report dan sustainability report</i> telah selesai dilakukan.</p> <p>Annual Report and sustainability report have been completed.</p>	100%

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI)

CGPI merupakan program riset dan pemeringkat praktik GCG di Indonesia yang bertujuan mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan GCG melalui perbaikan yang berkelanjutan. CGPI dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan penilaian perusahaan dalam menerapkan praktik GCG sebagai upaya mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat. CGPI diselenggarakan di tahun 2023 untuk melakukan penilaian tahun buku 2022. Pada tahun ini CGPI mengusung tema "Membangun Ketangkasan Perusahaan dalam Kerangka GCG", menilai dari pemenuhan aspek dan indikator penilaian.

KRITERIA PENILAIAN

Terdapat tiga (3) penilaian yang kemudian dirinci dalam 25 indikator penilaian sebagai berikut:

1. Aspek Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Merupakan penilaian terhadap kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur untuk memberikan fleksibilitas yang kreatif terhadap dinamika perubahan lingkungan kontekstual perusahaan sesuai tata nilai, prinsip dan kepatantasan tata kelola guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Secara rinci aspek struktur tata kelola ini terdiri dari beberapa indikator berikut:

- a. Pemegang Saham & RUPS
- b. Dewan Direksi
- c. Direksi
- d. Organ Pendukung Dewan Komisaris
- e. Organ Kelengkapan Direksi
- f. Organ Tata Kelola Terintegrasi
- g. Manajemen Fungsional

2. Aspek Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Merupakan penilaian terhadap sistem dan mekanisme operasional yang efisien serta produktif untuk mewujudkan fleksibilitas yang kreatif terhadap dinamika perubahan lingkungan kontekstual perusahaan sesuai tata nilai, prinsip dan kepatantasan tata kelola guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etika dan bermartabat. Secara rinci aspek proses tata kelola ini terdiri dari beberapa indikator berikut:

- a. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pemegang Saham dan RUPS
- b. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi
- c. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perilaku Keorganisasian
- d. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi
- e. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Risiko, Kepatuhan, serta Pengendalian dan Pengawasan
- f. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perumusan dan Perwujudan Sasaran Strategis
- g. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Infrastruktur Organisasi

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI)

CGPI is a research and rating program for corporate governance practices in Indonesia aimed at encouraging companies to improve the quality of their GCG implementation through continuous enhancement. CGPI can be used as a company evaluation and assessment tools in implementing GCG practices to achieve ethical and dignified business. CGPI was held in 2023 to assess the 2022 fiscal year. This year, CGPI adopts the theme "Building Company Agility within the GCG Framework," evaluating based on the fulfillment of assessment aspects and indicators.

ASSESSMENT CRITERIA

There are three (3) assessments, which are then detailed into 25 assessment indicators as follows:

1. Governance Structure Aspect

This assessment evaluates the completeness of organs, structures, and infrastructure to provide creative flexibility in response to the dynamic changes in the contextual environment of the Company according to the values, principles, and appropriateness of governance to ensure sustainable growth ethically and with dignity. In detail, this governance structure aspect consists of several indicators as follows:

- a. Shareholders & GMS
- b. Board of Commissioners
- c. Board of Directors
- d. Supporting Organs of Board of Commissioners
- e. Completion Organs of Board of Directors
- f. Integrated Governance Organs
- g. Functional Management

2. Governance Process Aspect

This assessment evaluates the system and operational mechanisms that are efficient and productive in achieving creative flexibility in response to the dynamic changes in the contextual environment of the Company according to values, principles, and appropriateness of governance to ensure sustainable growth ethically with dignity. In detail, this governance process aspect consists of several indicators as follows:

- a. Shareholders and GMS Governance System and Mechanisms
- b. Board of Commissioners and Board of Directors Governance System and Mechanisms
- c. Organizational Behavior Governance System and Mechanisms
- d. Disclosure and Information Transparency Governance System and Mechanisms
- e. Risk, Compliance, Control, and Supervision Governance System and Mechanisms
- f. Formulation and Achievement of Strategic Objectives Governance System and Mechanisms
- g. Organizational Infrastructure Governance System and Mechanisms



- h. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Teknologi Informasi
- i. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kreativitas dan Inovasi Berkelanjutan
- j. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- k. Ekosistem dan Mekanisme Tata Kelola Dunia Usaha dan Industri
- l. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Membangun Ketangkasan

- h. Information Technology Governance System and Mechanisms
- i. Creativity and Sustainable Innovation Governance System and Mechanisms
- j. Sustainable Development Goals Governance System and Mechanisms
- k. Business and Industry Ecosystem Governance System and Mechanisms
- l. Building Agility Governance System and Mechanisms

3. Aspek Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Merupakan penilaian terhadap hal mengenai kualitas, kuantitas, manfaat, dan kontribusi yang berhasil guna dan berdaya guna yang dimiliki perusahaan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Secara rinci aspek hasil tata kelola ini terdiri dari beberapa indikator berikut:

- a. Hasil, Dampak, dan Kontribusi Tata Kelola Organ Perusahaan
- b. Hasil, Dampak, dan Kontribusi Kesesuaian Perilaku Keorganisasian
- c. Hasil, Dampak, dan Kontribusi Tata Kelola Risiko, Kepatuhan, serta Pengendalian & Pengawasan
- d. Hasil, Dampak dan Kontribusi Tata Kelola Ekosistem Dunia Usaha dan Industri
- e. Hasil, Dampak dan Kontribusi Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- f. Hasil, Dampak dan Kontribusi Tata Kelola Membangun Ketangkasan

3. Governance Outcome Aspect

This assessment evaluates the quality, quantity, benefits, and contributions that is effective and efficient which possessed by the Company in creating added value to sustainable economic, social, and environmental ethically and with dignity. In detail, this governance outcome aspect consists of several indicators as follows:

- a. Results, Impact, and Contributions of Corporate Organ Governance
- b. Results, Impact, and Contributions of Organizational Behavior Compliance
- c. Results, Impact, and Contributions of Risk, Compliance, Control, and Supervision Governance
- d. Results, Impact, and Contributions of Business and Industry Ecosystem Governance
- e. Results, Impact, and Contributions of Sustainable Development Goals Governance
- f. Results, Impact, and Contributions of Agility Building Governance

Tahapan penilaian CGPI 2022

Penilaian CGPI 2022 melakukan penilaian terhadap aspek dan indikator penilaian melalui 2 (dua) tahapan penilaian yaitu:

1. Tahapan Analisis
Tahapan ini dilakukan melalui analisis terhadap aspek dan indikator penilaian CGPI 2022 melalui metode:
 - a. Pengisian Kuesioner *Self Assessment*
 - b. Penilaian Sistem Dokumentasi
2. Tahapan Observasi
Tahapan ini merupakan klasifikasi terhadap hasil yang diperoleh dari tahapan analisis di atas melalui metode diskusi tanya jawab Tim Observer CGPI bersama Organ Perusahaan.

CGPI assessment stages in 2022

CGPI assessment in 2022 evaluates aspects and indicators through 2 (two) stages, namely:

1. Analysis Stage
This stage is carried out through an analysis on CGPI assessment aspects and indicators using the following methods:
 - a. Completion of Self-Assessment Questionnaire
 - b. Assessment of Documentation Systems
2. Observation Stage
This stage involves classification of results obtained from the analysis stage above through discussion and Q&A sessions between the CGPI Observer Team and the Company's Organ.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*.

ASSESSOR

The assessment was conducted by Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

HASIL PENILAIAN

Pelindo Meraih penghargaan dalam Agenda *Corporate Governance Perception Index (CGPI) - Indonesia Trusted Companies Award* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* dan majalah SWA.

ASSESSMENT RESULTS

Pelindo was awarded in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) Agenda - Indonesia Trusted Companies Award organized by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) and SWA magazine.

Pelindo masuk kedalam kelompok perusahaan non keuangan (emiten, BUMN, BUMND). Pelindo berhasil menorehkan penghargaan kategori *Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* dengan skor 84,05 (TERPERCAYA), dengan detail sebagai berikut:

Pelindo is included in the non-financial company group (issuers, SOEs, regional SOEs). Pelindo achieved the *Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* award with a score of 84.05 (TRUSTED), with the following details:

No	Aspek Penilaian Assessment Aspect	Skor Score
1	Struktur Tata Kelola Governance Structure	27,86
2	Proses Tata Kelola Governance Process	27,60
3	Hasil Tata Kelola Governance Outcome	28,59

Adapun rincian penilaian adalah sebagai berikut:

The assessment details are as follows:

No	Indikator Indicator	Nilai Rerata Average Score	Pemenuhan Fulfillment	Kategori Category
I	Aspek Struktur Tata Kelola (Governance Structure) Governance Structure Aspects	27,86	84,17%	Baik Good
1	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders & GMS	27,93	84,37%	Baik Good
2	Dewan Komisaris Board of Commissioners	27,98	84,53%	Baik Good
3	Direksi Board of Directors	28,06	84,78%	Baik Good
4	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of Board of Commissioners	27,85	84,14%	Baik Good
5	Organ Kelengkapan Direksi Completion of Organs of Board of Directors	27,76	83,85%	Baik Good
6	Organ Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Organs	27,74	83,79%	Baik Good
7	Manajemen Fungsional Functional Management	27,70	83,69%	Baik Good
II	Aspek Proses Tata Kelola (Governance Process) Governance Process Aspect	27,60	84,13%	Baik Good
1	Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pemegang Saham & RUPS Shareholders and GMS Governance System and Mechanisms	27,77	84,63%	Baik Good
2	Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Governance System and Mechanisms	27,82	84,81%	Baik Good
3	Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perilaku Keorganisasian Organizational Behavior Governance System and Mechanisms	27,70	84,43%	Baik Good
4	Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Disclosure and Information Transparency Governance System and Mechanisms	27,52	83,88%	Baik Good
5	Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Risiko, Kepatuhan, serta Pengendalian dan Pengawasan Risk, Compliance, Control, and Supervision Governance System and Mechanisms	27,65	84,26%	Baik Good
6	Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perumusan dan Perwujudan Sasaran Strategis Formulation and Achievement of Strategic Objectives Governance System and Mechanisms	27,77	84,63%	Baik Good
7	Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Infrastruktur Organisasi Organizational Infrastructure Governance System and Mechanisms	27,46	83,70%	Baik Good



No	Indikator Indicator	Nilai Rerata Average Score	Pemenuhan Fulfillment	Kategori Category
8	Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance System and Mechanisms	27,53	83,91%	Baik Good
9	Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kreativitas dan Inovasi Berkelanjutan Creativity and Sustainable Innovation Governance System and Mechanisms	27,47	83,74%	Baik Good
10	Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals Governance System and Mechanisms	27,55	83,97%	Baik Good
11	Ekosistem dan Mekanisme Tata Kelola Dunia Usaha dan Industri Business and Industry Ecosystem Governance System and Mechanisms	27,54	83,95%	Baik Good
12	Sistem dan Mekanisme Membangun Ketangkasasan Building Agility Governance System and Mechanisms	27,45	83,67%	Baik Good
III	Aspek Hasil Tata Kelola (Governance Outcome) Governance Outcome Aspect	28,59	83,85%	Baik Good
1	Hasil, Dampak, dan Kontribusi Tata Kelola Organ Perusahaan Results, Impact, and Contributions of Corporate Organ Governance	28,79	84,46%	Baik Good
2	Hasil, Dampak, dan Kontribusi Kesesuaian Perilaku Keorganisasian Results, Impact, and Contributions of Organizational Behavior Compliance	28,78	84,43%	Baik Good
3	Hasil, Dampak, dan Kontribusi Tata Kelola Risiko, Kepatuhan, serta Pengendalian dan Pengawasan Results, Impact, and Contributions of Risk, Compliance, Control, and Supervision Governance	28,58	83,82%	Baik Good
4	Hasil, Dampak, dan Kontribusi Tata Kelola Ekosistem Dunia Usaha dan Industri Results, Impact, and Contributions of Business and Industry Ecosystem Governance	28,41	83,34%	Baik Good
5	Hasil, Dampak, dan Kontribusi Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Results, Impact, and Contributions of Sustainable Development Goals Governance	28,49	83,57%	Baik Good
6	Hasil, Dampak, dan Kontribusi Tata Kelola Membangun Ketangkasasan Results, Impact, and Contributions of Agility Building Governance	28,46	83,49%	Baik Good
NILAI CGPI 2022 CGPI SCORE 2022		84,05		Terpercaya Trusted

Hasil CGPI 2022 yang diperoleh Pelindo dengan predikat “Terpercaya” tersebut menggambarkan bahwa organ perusahaan dan segenap anggota perusahaan Pelindo telah berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan prinsip dan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*). Pelindo juga telah berhasil membangun kolaborasi dan sinergitas di antara pemangku kepentingan terutama dengan anggota Perseroan untuk beradaptasi secara tangkas, cepat, tepat dan akurat terhadap perubahan dinamika bisnis yang kompleks dalam menciptakan nilai tambah sosial, lingkungan dan ekonomi yang selaras dengan nilai, prinsip dan aturan GCG. Dengan demikian Pelindo dapat menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA

Secara keseluruhan capaian pemenuhan aspek dan indikator penilaian di Pelindo sudah termasuk kategori baik. Capaian tersebut untuk beberapa indikator masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Walaupun upaya peningkatan sudah banyak dilakukan Pelindo dari tahun sebelumnya.

The 2022 CGPI results obtained by Pelindo with “Trusted” predicate describe that the Company’s organs and all members of Pelindo have committed and consistently implemented good corporate governance (GCG) principles and systems. Pelindo has also successfully built collaboration and synergy among stakeholders, especially with Company members, to adapt swiftly, accurately, and effectively to the complex business dynamics changes in creating added value for social, environmental, and economic aspects that align with GCG values, principles, and rules. Therefore, Pelindo can create added value for stakeholders and ensure sustainable, ethical, and dignified company growth.

RECOMMENDATIONS AND FOLLOW-UPS

In overall fulfillment of aspects and indicators, Pelindo is in good category already. Although, achievements in some indicators still need to be maintained and improved despite many improvement efforts by Pelindo from the previous year.

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi khusus untuk kepesertaan Perseroan pada CGPI 2022 adalah sebagai berikut:

1. Aspek Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

Perseroan telah mengembangkan kecukupan struktur organisasi yang adaptif dan fleksibel, yang mampu mengharmonisasikan isu, tantangan, potensi, dan regulasi yang muncul dengan menyinergikan ke dalam integrasi bisnis di berbagai fungsi organisasi. Pelindo juga mengembangkan kecukupan dan kelengkapan infrastruktur sistem tata kelola perusahaan yang mencakup pedoman, kebijakan dan strategi perusahaan dalam membangun sistem ketangkasannya terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan kepastian tata kelola guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Kecukupan dan kelengkapan dari struktur tata kelola yang telah dikembangkan Pelindo masih perlu terus dilaksanakan secara konsisten dan dioptimalkan sehingga menjadikannya lebih baik serta dapat mendukung terciptanya pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Beberapa catatan perbaikan penerapan aspek struktur tata kelola yang dapat dilakukan Pelindo antara lain:

- a. Perseroan perlu mengembangkan konsistensi dan komitmen dalam mempertahankan struktur keuangan yang sehat dengan tetap memperhitungkan risiko dan mengedepankan GCG, untuk menunjang bisnis yang tumbuh secara berkelanjutan.
- b. Perseroan perlu mengoptimalkan kebijakan pengembangan kepemimpinan di perusahaan untuk memastikan ketersediaan calon pemimpin perusahaan yang kompeten, kompetitif, adaptif dan lincah dalam menghadapi dinamika perubahan secara berkelanjutan.
- c. Perseroan perlu mengoptimalkan kompetensi SDM terutama untuk posisi kunci dalam struktur organisasi yang dilengkapi dengan sertifikasi yang sesuai dan berstandar nasional maupun internasional.
- d. Perseroan perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi perusahaan secara berkala dan hati-hati di setiap dinamika perubahan yang terjadi dengan mengeksplorasi tantangan yang muncul, mengelola kerentanan, beradaptasi mengelola perubahan, dan mengambil peluang dengan mengoptimalkan potensi sehingga dapat meraih tujuannya berdasarkan capaian terbaik.

2. Aspek Proses Tata Kelola (Governance Process)

Perseroan telah melakukan adaptasi terhadap perubahan makroekonomi, lingkungan industri dan bisnisnya melalui perencanaan strategis, perancangan sistem dan mekanisme perusahaan yang lengkap dengan berbagai kebijakan dan programnya, hingga mengukur tingkat kematangan diberbagai aspek seperti teknologi, proses bisnis, sumber daya, dan organisasi. Pelindo telah mengembangkan sistem dan mekanisme operasional yang efisien serta produktif untuk mewujudkan fleksibilitas yang kreatif terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan kepastian tata kelola guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Some conclusions and specific recommendations for Company's participation in CGPI 2022 are as follows:

1. Governance Structure Aspect

Company has developed a sufficiently adaptive and flexible organizational structure, capable of harmonizing emerging issues, challenges, potentials, and regulations by synergizing them into business integration across various organizational functions. Pelindo has also developed adequacy and completeness in the Company's infrastructure governance system, including guidelines, policies, and management strategies in building an agile system towards dynamic changes according to governance values, principles, and appropriateness to ensure sustainable growth ethically and dignified.

The adequacy and completeness of governance structure developed by Pelindo still need to be consistently implemented and optimized to make it better and support the creation of sustainable company growth. Some improvement notes for the implementation of governance structure aspects that Pelindo can undertake include:

- a. Company needs to develop consistency and commitment in maintaining a healthy financial structure while considering risks and prioritizing GCG, to support sustainable business growth.
- b. Company needs to optimize leadership development policies in the Company to ensure the availability of competent, competitive, adaptive, and agile company leaders in facing dynamics of change in sustainable manner.
- c. Company needs to optimize human resources competencies, especially for key positions in the organizational structure, equipped with appropriate national and international standard certifications.
- d. Company needs to periodically and carefully adjust company policies and strategies to every dynamic change by exploring emerging challenges, managing vulnerabilities, adapting to change, and seizing opportunities by optimizing potentials to achieve its goals based on the best performances.

2. Governance Process Aspect

Company has adapted to macroeconomic changes, industry environment, and its business through strategic planning, designing comprehensive corporate management systems and mechanisms complete with various policies and programs, and measuring maturity levels across aspects such as technology, business processes, resources, and organization. Pelindo has developed efficient and productive operational systems and mechanisms to achieve creative flexibility towards dynamic changes according to governance values, principles, and appropriateness to ensure sustainable growth ethically and dignified.



Aspek proses tata kelola yang telah dikembangkan Perseroan masih perlu terus dilaksanakan secara konsisten dan dioptimalkan sehingga menjadikannya lebih baik serta dapat mendukung terciptanya pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Beberapa catatan perbaikan penerapan aspek proses tata kelola yang dapat dilakukan Perseroan antara lain:

- a. Pelindo dapat mempertimbangkan penerapan pedoman ISO 37000:2021 *Governance of Organization* (Tata Kelola Organisasi).
- b. Pelindo dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme pelaporan dan pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*) dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37002:2021 *Whistleblowing Management System*.
- c. Pelindo perlu mengoptimalkan penguatan pengendalian internal yang meningkatkan efektivitas *three lines of defense* serta disesuaikan dengan rencana strategis Perusahaan.
- d. Pelindo perlu mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan diantaranya melalui implementasi ICoFR (*Internal Control Over Financial Reporting*) yang disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan strategi Perseroan.
- e. Pelindo perlu mengoptimalkan program penguatan kolaborasi dan pemberdayaan yang mendukung penguatan budaya Perseroan dan keterikatan karyawan.
- f. Pelindo perlu mengoptimalkan penerapan konsep ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang terintegrasi diseluruh lini bisnis dan dievaluasi sehingga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.
- g. Pelindo perlu mengembangkan sistem dan mekanisme evaluasi tindak lanjut Rencana Jangka Panjang Perusahaan agar selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan serta Program Prioritas Kementerian BUMN.
- h. Pelindo perlu mengembangkan struktur dan sistem terkait perlindungan dan pemberdayaan konsumen yang andal dan memberikan nilai tambah.
- i. Pelindo perlu mengembangkan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan agar pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berjalan secara berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Perusahaan.

3. Aspek Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Perseroan telah memperoleh capaian hasil yang secara terukur melakukan perumusan strategi dan program yang efektif dan efisien dalam merespon lingkungan yang dinamis dan kompleks. Perseroan mampu mencapai hasil dan memperoleh manfaat dari respon cepat, tindakan tepat, akurat terhadap perubahan dinamika industri dan bisnis yang kompleks di era *industry 4.0* dan *society 5.0*. Terwujudnya ketangkasan perusahaan, mampu menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan upaya memastikan terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

The governance process aspect developed by Company still needs to be consistently implemented and optimized to make it better and support the creation of the Company's sustainable growth. Some improvement notes for the implementation of governance process aspects that Company can undertake include:

- a. Pelindo may consider implementing the ISO 37000:2021 *Governance of Organization* guidelines.
- b. Pelindo can optimize the system and mechanism of reporting and violation (*Whistleblowing System/ WBS*) by considering to adopt or implementing the ISO 37002:2021 *Whistleblowing Management System* standard.
- c. Pelindo needs to strengthen internal controls that enhance the effectiveness of the three lines of defense and align them with the Company's strategic plan.
- d. Pelindo needs to optimize the implementation of risk management and internal control in financial reporting, including through the implementation of ICoFR (*Internal Control Over Financial Reporting*) aligned with the Company's objectives, targets, and strategies.
- e. Pelindo needs to optimize collaboration and empowerment programs that support the strengthening of Company's culture and employee engagement.
- f. Pelindo needs to optimize the integrated implementation of ESG (*Environmental, Social, and Governance*) concept across all business lines and evaluate it to provide sustainable added value.
- g. Pelindo needs to develop a system and mechanism to evaluate the follow-up of the Company's Long-Term Plan to align with the Company's Vision and Mission and the Priority Programs of the Ministry of SOEs.
- h. Pelindo needs to develop structures and systems related to a reliable and add value of consumer protection and empowerment.
- i. Pelindo needs to develop a *Corporate Governance Roadmap* for the continuous implementation of *Corporate Governance* according to the Company's Strategic Plan.

3. Governance Outcome Aspect

Company has achieved measurable outcomes by formulating effective and efficient strategies and programs to respond to a dynamic and complex environment. Company has been able to achieve results and benefits from rapid responses, precise actions, and accurate adjustments to changes in the complex industry and business dynamics in the era of *Industry 4.0* and *Society 5.0*. The realization of the Company agility has created added value for stakeholders and efforts to ensure sustainable growth in an ethical and dignified manner.

Hasil tata kelola yang telah diperoleh Perseroan masih perlu terus diupayakan pencapaiannya secara konsisten dan dioptimalkan sehingga menjadikannya lebih baik serta dapat mendukung terciptanya pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Beberapa catatan perbaikan penerapan aspek hasil tata kelola yang dapat dilakukan Perseroan antara lain:

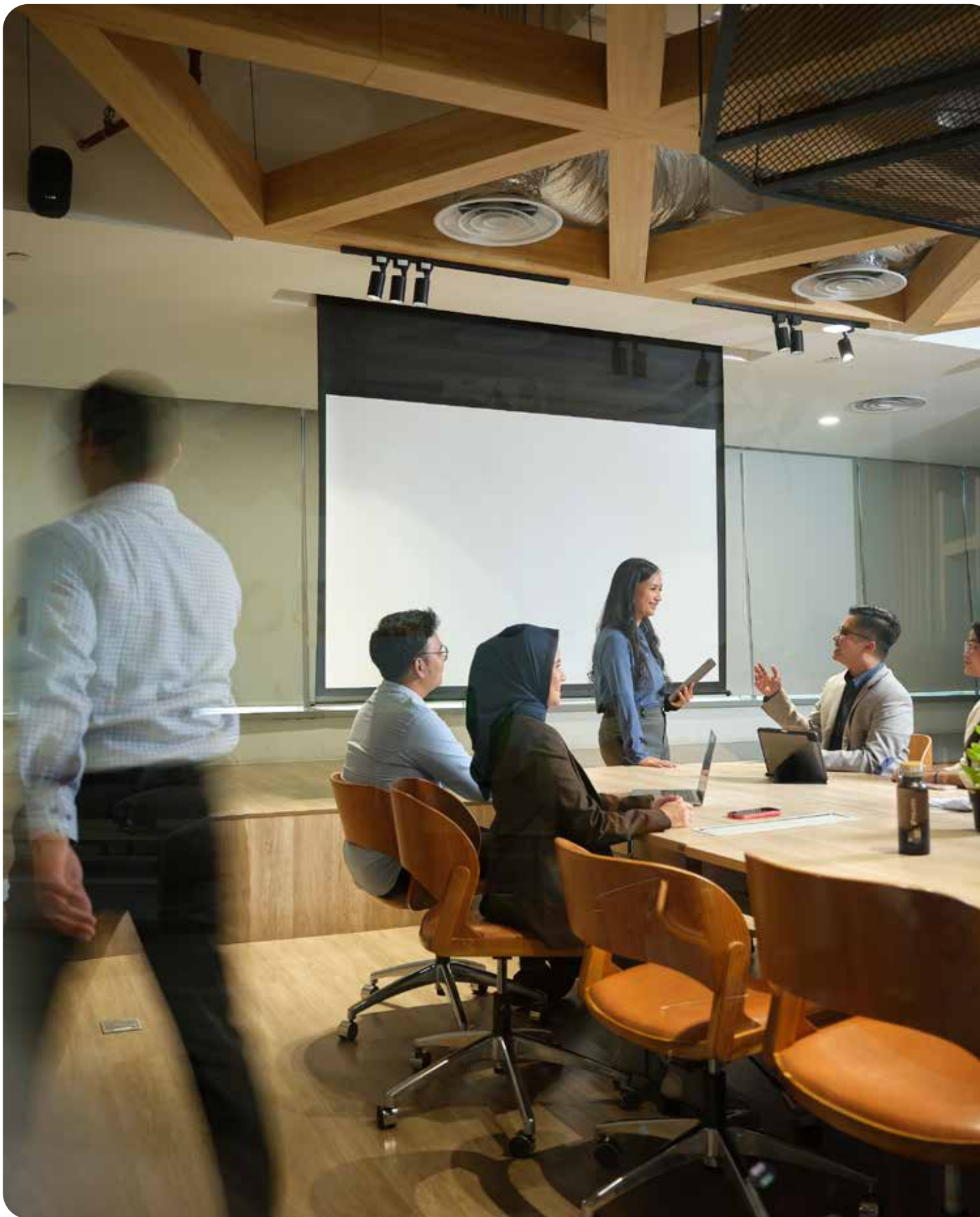
- a. Perseroan perlu menumbuhkan budaya tangguh dan tangkas dengan kemampuan untuk cepat beradaptasi dan merespon perubahan serta mengelola tantangan agar dapat menjadi peluang untuk bersaing.
- b. Perseroan perlu mengoptimalkan kapabilitas, kapasitas, kompetensi utama perusahaan melalui capaian implementasi strategi yang adaptif, kuat, tangkas dan efisien dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.
- c. Perseroan perlu mengoptimalkan budaya risiko yang kuat dalam beradaptasi secara cepat, akurat dan tepat dengan dinamika perubahan dan tingginya transformasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Perseroan.
- d. Perseroan perlu mengoptimalkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas digital perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta meningkatkan peran perusahaan dalam ekosistem kemaritiman nasional dan global.
- e. Perseroan perlu melakukan penanganan secara baik atas seluruh perkara hukum yang sedang dihadapi dan mengupayakan mitigasi risiko yang optimal atas gugatan-gugatan hukum, serta mencegah terjadinya kembali perkara hukum Perseroan.

Hasil *assessment* telah menjadi dasar untuk melakukan *continues improvement* dengan menindaklanjuti hasil *assessment* (rekomendasi) yang telah diperoleh.

The governance outcomes aspect achieved by Company still needs to be consistently implemented and optimized to make it better and support the creation of the Company's sustainable growth. Some improvement notes for implementing governance outcomes that Company can undertake include:

- a. Company needs to cultivate a resilient and agile culture with the ability to adapt quickly and respond to changes as well as managing challenges to turn them into opportunities for competition.
- b. Company needs to optimize the Company's main capabilities, capacities, and competencies through the implementation of adaptive, strong, agile, and efficient strategies that support the Company sustainable growth.
- c. Company needs to optimize a strong risk culture to adapt quickly, accurately, and appropriately to changing dynamics and the high transformation of information and communication technology usage in the Company.
- d. Company needs to optimize the improvement of the Company's digital capacity and capability, supporting efficient business development and sustainable business growth, and enhancing the Company's role in the national and global maritime ecosystem.
- e. Company needs to handle all legal matters well and strive for optimal risk mitigation regarding legal claims, as well as prevent the recurrence of legal issues for the Company.

The assessment results have become the basis for carrying out continuous improvement by following up on the assessment results (recommendations) that have been obtained.








Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Social and Environmental Responsibility (SER) Program



Selama Tahun 2023 telah dilaksanakan Program TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya (Non PUMK) dengan realisasi sebesar Rp127,84 miliar atau 96,29% dari anggaran sebesar Rp132,76 miliar. Pelaksanaan program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya dikelompokan berdasarkan prioritas yaitu bidang prioritas sebesar Rp76,91 miliar dan non prioritas sebesar Rp50,91 miliar.

During 2023, the SER Assistance and/or Other Activities (Non PUMK) Programs have carried out with a realization of Rp127.84 billion or 96.29% of the budget of Rp132.76 billion. The implementation of the Assistance and/or Other Activities program grouped based on priorities was priority areas amounting to Rp76.91 billion and non-priority areas amounting to Rp50.91 billion.



Pada era globalisasi sekarang ini penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) terus mengalami perkembangan. TJSL tersebut bukan hanya untuk kepentingan reputasi Perseroan semata, namun juga harus mampu menjaga keberlanjutan usaha perusahaan melalui program-program di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan serta berbasis pelibatan masyarakat dan *stakeholder* perusahaan. Regulasi terkait TJSL diatur dalam beberapa dasar hukum, seperti pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait komitmen melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, peraturan terkait TJSL dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

In the current globalization era, the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (SER) continues to develop. SER is not only for the benefit of the Company's reputation, but must also be able to maintain the sustainability of the Company's business through economic, social and environmental programs, and the Company's community and stakeholder engagement. Regulations related to SER are stipulated in several Laws, including Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies commitment to carry out Social and Environmental Responsibility (SER), Republic of Indonesia Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility (SER) for Limited Liability Companies, and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. SER within State-Owned Enterprises (SOEs) is also stipulated in Minister of SOEs Regulation No. Per-01/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises.



Sebagai BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara konsisten melaksanakan program TJSL yang mencakup aspek perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan program TJSL, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* (yang berisi 7 subyek utama) dan mengintegrasikan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya 7 prioritas SDGs yang menjadi arahan Pemegang Saham. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/03/2023 Pasal 20 Program TJSL dilakukan dalam bentuk Pembiayaan Usaha Mikro & Usaha Kecil (PUMK) serta dalam bentuk bantuan/kegiatan lainnya termasuk pembinaan.

Wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meliputi 4 (empat) Regional. Regional 1 yang bertanggungjawab dalam menjalankan program TJSL di 4 (empat) Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Regional 2 yang bertanggungjawab dalam menjalankan program TJSL di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Regional 3 yang bertanggungjawab dalam menjalankan program TJSL di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Regional 4 yang bertanggungjawab dalam 11 (sebelas) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Susunan pengelola adalah unit kerja perusahaan yang secara struktural berada dibawah *Group Head* Sekretariat Perusahaan. Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/28/12/2/PPLP/UTMA/PLND-23 tanggal 28 Desember 2023 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/24/7/1/PSOG/UTMA/PLND-23 tanggal 24 Juli 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero), susunan pengelola adalah sebagai berikut:

Direktur Utama President Director	:	Arif Suhartono
Direktur SDM & Umum Human Resources and General Affairs Director	:	Ihsanuddin Usman
Group Head Sekretariat Perusahaan Group Head of Corporate Secretariat	:	Ali Mulyono
Departemen Head Tanggung Jawab Sosial Social Responsibility Head Department	:	Febrianto Zenny Sulisty Hari Murti
Manager Perencanaan dan Pengelolaan Program Planning and Management Program Manager	:	Dimas Giri Prabowo
Manager Monitoring dan Pelaporan Program Monitoring and Reporting Program Manager	:	Annisa Karimah

As a SOE, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) consistently implements the SER program that includes aspects of sustainable governance improvement. When implementing the SER program, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) refers to the ISO 26000 guidelines: *Guidance on Social Responsibility* (which contains 7 main subjects) and integrates the principles of *Sustainable Development Goals* (SDGs) (SDG), especially the 7 SDG priorities as directed by the Shareholders. In accordance with Minister of SOEs Regulation No. Per-01/MBU/03/2023, Article 20 that the SER Program is carried out in the form of Micro & Small Business Financing (PUMK) as well as in the form of other assistance/activities including coaching.

The working area of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) covers 4 (four) regions. Regional 1 is responsible for implementing the SER program in 4 (four) provinces, namely Aceh, North Sumatra, Riau and the Riau Islands. Regional 2 is responsible for implementing the SER program in 9 (nine) Provinces, namely West Sumatra, Bangka Belitung, Bengkulu, South Sumatra, Lampung, Banten, DKI Jakarta, West Java and West Kalimantan. Regional 3 is responsible for implementing the SER program in 7 (seven) provinces, namely East Java, Central Java, South Kalimantan, Central Kalimantan, Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara. Regional 4 is responsible for 11 (eleven) provinces, namely South Sulawesi, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, North Sulawesi, Gorontalo, East Kalimantan, North Kalimantan, Maluku, North Maluku, Papua, and West Papua.

The management structure is a work unit of the a Company that is structurally under the Group Head of Corporate Secretariat. Based on the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: HK.01/28/12/2/PPLP/UTMA/PLND-23 dated December 28, 2023 concerning Guidelines for Implementing Social and Environmental Responsibility Programs within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and Board of Directors Decree Number HK.01/24/7/1/PSOG/UTMA/PLND-23 dated July 24, 2023 concerning Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the management structure is as follows:

Penyusunan Laporan TJSL di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berpedoman pada:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19/2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 (turut aktif membimbing dan membantu ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat) dan Pasal 88 (sumber dana dapat dari penyisihan laba);
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
- Peraturan Pemerintah No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas;
- Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. Per-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022;
- Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-5/MBU/DSI/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disesase* 2019 (COVID-19) Melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- Surat Menteri BUMN No. SE-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK");
- Surat Plt. Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN No. S-125/DSI.MBU/11/2022 tanggal 15 November 2022 perihal *Key Performance Indicator* Program TJSL BUMN Tahun 2023;
- Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. B.12/MBD/12/2022 dan HL.02/5/12/1/PPLP/SKPR/PLND-22 tanggal 5 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/28/12/2/PPLP/UTMA/PLND-23 tanggal 28 Desember 2023 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Preparation of the SER Report at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is guided by:

- Law of the Republic of Indonesia No. 19/2003 dated June 19, 2003 concerning SOEs Article 2 (actively participating in guiding and assisting weak economies, cooperatives and communities) and Article 88 (source of funds can be from profit allowances);
- Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies Chapter V concerning Social Environmental Responsibility
- Government Regulation No. 47/2012 concerning Social and Environmental Responsibility (SER) of Limited Liability Companies;
- Presidential Decree No. 59/2017 concerning Achievement of Sustainable Development Goals;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for SOEs;
- Minister of SOEs Letter No. S-170/MBU/03/2023 dated March 21, 2023 concerning Health Level Assessment of the Micro and Small Business Funding Program Performance for the Fiscal Year 2022;
- Minister of SOEs Circular Letter No. SE-02/MBU/WK/2012 dated February 23, 2012 concerning Determination of Accounting Guidelines for Partnership and Community Development Programs;
- Minister of SOEs Circular Letter No. SE-5/MBU/DSI/03/2020 dated March 17, 2020 concerning Combating the Spread of the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) through Social and Environmental Responsibility Activities;
- Minister of SOEs Circular Letter No. SE-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022 concerning Cooperation in Micro and Small Business Funding Programs ("PUMK Program Cooperation");
- Acting Deputy for HC, Technology and Information of the Ministry of SOEs Letter No. S-125/DSI.MBU/11/2022 dated November 15, 2022 concerning Key Performance Indicators for the 2023 SOE SER Program;
- Cooperation Agreement between PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. B.12/MBD/12/2022 and HL.02/5/12/1/PPLP/SKPR/PLND-22 dated December 5, 2022 concerning Micro and Small Business Funding Programs;
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation No. HK.01/28/12/2/PPLP/UTMA/PLND-23 dated December 28, 2023 concerning Guidelines for Implementing Social and Environmental Responsibility Programs within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).



KINERJA PROGRAM TJSL SER PROGRAM PERFORMANCE

Realisasi penyaluran Program TJSL PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada tahun 2023 sebesar Rp151.722.459.919,00 atau 96,86% dari RKA Program TJSL Tahun 2023 yang terdiri atas:

1. Realisasi Program TJSL yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (CID) bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Perseroan tahun 2023 sebesar Rp126.701.825.276,00 atau 99,93% dari RKA 2023.
2. Realisasi Program TJSL yang dijalankan di luar unit CID yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKA Perseroan tahun 2023 sebesar Rp1.140.339.488,00 atau 19,09% dari RKA 2023.
3. Realisasi Program TJSL melalui Program Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK tahun 2023 sebesar Rp23.880.295.155,00 atau 100% dari RKA 2023 melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)

Program PUMK Tahun 2023 sesuai arahan sebagaimana Surat Menteri BUMN dianggarkan untuk dilaksanakan melalui kerjasama Kolaborasi dengan PT Bank BRI (Persero) pada Tahun 2023 sebesar Rp23,89 miliar. Atas dana PUMK tahun 2022, telah dilakukan kerjasama dan transfer dana PUMK tahun 2022 sebesar Rp79.782.062.832 dengan *plotting* wilayah sebanyak 260 unit BRI. Sesuai *Dashboard* PUMK BRI Periode 31 Desember 2023, penyaluran PUMK telah disalurkan oleh BRI sebesar Rp56.548.200.000 ke 2.182 mitra binaan, dengan jumlah *outstanding* saat ini sebesar Rp46.699.994.387. Atas dana PUMK tahun 2023, telah dilakukan transfer dana PUMK tahun 2023 sebesar Rp23.880.295.155.

REALISASI PROGRAM PENDANAAN UMK (PUMK)

Program PUMK Tahun 2023 sesuai Surat Menteri BUMN Kerjasama Kolaborasi dengan PT Bank BRI (Persero) pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp23,89 miliar, telah dilakukan pemindahbukuan sesuai dengan Berita Acara No. TL.01/14/12/2/PPLP/SDMA/PLND-23 tanggal 14 Desember 2023 perihal Berita Acara Penyetoran Dana Program Pendanaan UMK Tahun 2023. Gambaran besaran penyaluran PUMK sebagaimana berikut:

The realization of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) SEF Program distribution in 2023 amounted to Rp151,722,459,919.00 or 96.86% of the 2023 SER Program RKA, which consists of:

1. Realization of SER Program carried out by the Community Involvement and Development (CID) unit comes from a budget calculated as Company costs for 2023 amounting to Rp126,701,825,276.00 or 99.93% of the 2023 RKA.
2. Realization of SER Program outside the CID unit which is sourced from the budget calculated as costs in the Company's 2023 RKA report amounting to Rp1,140,339,488.00 or 19.09% of the 2023 RKA.
3. Realization of SER Program through the UMK Funding Program which is sourced from the 2023 UMK Funding Program revolving funds amounting to Rp23,880,295,155.00 or 100% of the 2023 RKA through collaboration with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

MICRO AND SMALL BUSINESS FUNDING PROGRAM (PUMK)

The 2023 PUMK program was budgeted in collaboration with PT Bank BRI (Persero) and in 2023 was Rp23.89 billion, in accordance with the directives stated in the Minister of SOEs Letter for the 2022 PUMK funds, cooperation and transfer of 2022 PUMK funds amounted to Rp79,782,062,832 was carried out by plotting areas in 260 BRI units. According to the BRI PUMK Dashboard for the period December 31, 2023, BRI distributed PUMK amounting to Rp56,548,200,000 to 2,182 fostered partners, with a current outstanding amount of Rp46,699,994,387. For the 2023 PUMK funds, a transfer of 2023 PUMK funds amounting to Rp23,880,295,155 has been carried out.

MSE FUNDING PROGRAM (PUMK) REALIZATION

The 2023 PUMK program in accordance with the Letter of the Minister of SOEs Collaborative Cooperation with PT Bank BRI (Persero) in 2023 realized Rp23.89 billion, with transfers carried out in accordance with Minutes No. TL.01/14/12/2/PPLP/SDMA/ PLND-23 dated December 14, 2023 concerning Minutes of Fund Disbursement for the 2023 MSE Funding Program. An overview of the PUMK distribution is as follows:

Tabel Penyaluran PUMK
Distribution of PUMK

(dalam Rupiah)

(in Rupiah)

Uraian Description	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Period ending December 31, 2022	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Period ending December 31, 2023
Distribusi dana Funds distribution		
Jumlah dana yang disalurkan Amount of funds disbursed	79.837.062.832	23.880.295.155
Jumlah distribusi dana Total funds distribution	79.837.062.832	23.880.295.155

RINCIAN DANA PROGRAM PUMK

Dana Program PUMK berasal dari dana bergulir Program PUMK sampai 31 Desember 2022, dana Program PUMK yang tersedia sebesar Rp113.482.426.709 dengan rincian sebagai berikut:

PUMK PROGRAM FUNDING DETAILS

PUMK Program funds comes from the PUMK Program revolving funds up to December 31, 2022, where the available PUMK Program funds amounted to Rp113,482,426,709 with the following details:

Tabel Rincian Dana Program PUMK
PUMK Program Funding

(dalam Rupiah)

(in Rupiah)

Uraian Description	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Period ending December 31, 2022	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Period ending December 31, 2023
Dana yang tersedia Available funds		
Saldo Awal Opening balance	78.717.119.566	30.281.767.979
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Repayment of Fostered Partner Loans	28.574.370.210	13.816.474.830
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Services Revenue	1.634.354.094	978.246.386
Penerimaan Jasa Administrasi Bank Acceptance of Bank Administration Services	1.403.592.839	338.591.744
Pendapatan Lain Other Revenue	(210.605.898)	3.497.910.636
Jumlah dana yang tersedia Total available funds	110.118.830.811	48.912.991.575

PROGRAM TJSL BANTUAN DAN/ATAU KEGIATAN LAINNYA (NON-PUMK)

Selama tahun 2023, telah dilaksanakan Program TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya (Non-PUMK) dengan realisasi sebesar Rp127,84 miliar atau 96,29% dari anggaran sebesar Rp132,76 miliar. Pelaksanaan program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya dikelompokkan berdasarkan prioritas yaitu bidang prioritas sebesar Rp76,91 miliar dan non-prioritas sebesar Rp50,91 miliar. Adapun untuk pengelompokkan yang berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdiri dari Pilar Sosial sebesar Rp60,41 miliar, Pilar Ekonomi sebesar Rp22,72 miliar, Pilar Lingkungan sebesar Rp42,86 miliar dan Pilar Hukum dan Tata Kelola sebesar Rp1,85 miliar.

SER ASSISTANCE AND/OR OTHER ACTIVITIES (NON-PUMK) PROGRAM

During 2023, the SER for Assistance and/or Other Activities (Non-PUMK) Program was implemented with a realization of Rp127.84 billion, or 96.29% of the budget of Rp132.76 billion. The distribution of Assistance and/or Other Activities programs is grouped based on priority, and included priority areas amounting to Rp76.91 billion, and non-priority areas amounting to Rp50.91 billion. For grouping oriented towards achieving the Sustainable Development Goals (SDG), they are made up of the Social Pillar with Rp60.41 billion, the Economic Pillar with Rp22.72 billion, the Environmental Pillar with Rp42.86 billion and the Legal and Governance Pillar with Rp1.85 billion.



Program *Creating Shared Value* (CSV) dan Program Prioritas/ Unggulan Program CSV merupakan bagian dari Program TJSL Bantuan dan/ Kegiatan Lainnya (Non-PUMK). Pada Tahun 2023 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah melaksanakan program CSV dengan realisasi sebesar Rp13,89 miliar yang terdiri dari 4 program yaitu Program Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pesisir, Program Penanaman dan Pemberdayaan Mangrove, Program Pelatihan/Vokasi Bagi Komunitas Pelabuhan dan Program TJSL pada proyek Strategis.

The *Creating Shared Value* (CSV) Program and the CSV Priority/ Excellent Program are part of the SER Assistance and/Other Activities Program (Non-PUMK). In 2023, the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) CSV program realized Rp13.89 billion, and consisted of 4 programs, the Coastal Area Rehabilitation and Conservation Program, Mangrove Planting and Empowerment Program, Training/Vocational Program for Port Communities and SER Program in Strategic projects.

REALISASI PROGRAM KERJA

Sumber dana Program TJSL CID dan Non-CID Bantuan dan/ atau Kegiatan Lainnya berasal dari anggaran yang dibiayakan pada Perseroan. Pelaksanaan Program TJSL CID dan Non-CID Bantuan dan/ atau Kegiatan Lainnya Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp127,84 miliar atau 96,29% dari anggaran Tahun 2023, atau dibandingkan dengan anggaran periode yang sama sebesar Rp118,93 miliar atau 107,49%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

REALIZATION OF WORK PROGRAMS

The source of funds for the SER CID and Non-CID Assistance and/ or Other Activities Program comes from the budget allocated to the Company. In 2023 the SER CID and Non-CID Assistance and/ or Other Activities Program realized Rp127.84 billion, or 96.29% of the 2023 budget, compared to the budget for the same period of Rp118.93 billion or 107.49%, as can be seen in the following table:

Tabel Realisasi Program Bantuan dan/ atau Kegiatan Lainnya (NON-PUMK)

Realization of Assistance Programs and/ or Other Activities (Non-PUMK)

(dalam Rupiah)		(in Rupiah)			
Program Program	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization	RKA 2023 2023 RKA	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization	Persentase Capaian Percentage Achievement	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
Bantuan dan/ atau Kegiatan Lainnya Assistance and/ or Other Activities	118.931.369.006	132.761.839.320	127.842.164.764	107,49	96,29

PROGRAM COMMUNITY INVOLVEMENT DEVELOPMENT (CID) DAN NON-COMMUNITY INVOLVEMENT DEVELOPMENT (NON-CID)

Program Bantuan dan/ atau Kegiatan Lainnya terdiri dari Program yang dijalankan Departemen Tanggung Jawab Sosial pada Grup Sekretariat Perusahaan yang disebut dengan Program *Community Involvement Development* (CID) dan Program *Non-Community Involvement Development* (Non-CID) yang dijalankan oleh Perseroan di luar Grup Sekretariat Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

COMMUNITY INVOLVEMENT DEVELOPMENT (CID) AND NON-COMMUNITY INVOLVEMENT DEVELOPMENT (NON-CID) PROGRAMS

Assistance and/ or Other Activities Programs consist of Programs run by the Social Responsibility Department at the Company Secretariat Group, and are called the *Community Involvement Development* (CID) and *Non-Community Involvement Development* (Non-CID) Programs run by Companies outside the Company's Secretariat Group, with the following details:

Tabel Realisasi Program CID dan Program Non-CID

Realization of CID Programs and Non-CID Programs

(dalam Rupiah)		(in Rupiah)				
No	Program Program	Realisasi Tahun 2022 2022 Realization	RKA 2023 2023 RKA	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization	Persentase Capaian Percentage Achievement	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5/4	(7) = 5/3
1	Program CID	112.521.461.548	126.789.177.000	126.701.825.276	112,60	99,93
2	Program Non CID	6.409.907.458	5.972.662.320	1.140.339.488	17,79	19,09
Total		118.931.369.006	132.761.839.320	127.842.164.764	107,49	96,29

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Pelaksanaan program berdasarkan TPB dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

The SDG Program can be grouped into 4 (four) pillars as shown in the following table:

Tabel TPB
SDG

Pilar Pillar	Realisasi Tahun 2022 (audited) 2022 Realization (audited)	RKA 2023 2023 RKA	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization	Persentase Capaian Percentage Achievement	
				6=5/3	7=5/4
2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Sosial Social	54.271.398.273	67.934.596.000	60.406.905.577	111,31	88,92
Ekonomi Economy	31.307.610.432	51.817.621.450	46.607.161.713	148,87	88,94
Lingkungan Environment	31.756.676.567	34.508.000.000	42.861.992.043	134,97	124,21
Hukum & Tata Kelola Legal & Governance	1.595.683.734	2.382.000.000	1.846.400.586	115,71	77,51
Jumlah Total	118.931.369.006	156.642.217.450	151.722.459.919	107,49	96,86

PROGRAM CREATING SHARED VALUE (CSV)

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang menciptakan nilai tambah bagi Perseroan yang terkait dengan bisnis inti atau *Creating Shared Value (CSV)* adalah bentuk strategi Perseroan untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial secara bersamaan untuk kepentingan masyarakat maupun bisnis Perseroan. Adapun rincian pelaksanaan Program CSV sebagai berikut:

CREATING SHARED VALUE PROGRAM (CSV)

The Social and Environmental Responsibility Program (SER) that creates added value (CSV) for the Company related to its core business includes the Company's strategy to create economic and social value simultaneously for the benefit of the communities and the Company's business. Details of the CSV Program are as follows:

Tabel Rincian Pelaksanaan Program CSV
CSV Program Details

No	Program CSV CSV Program	RKA 2023 2023 RKA	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization	Nilai Manfat CSV bagi Perseroan Value of CSV Benefits for the Company
1	Program Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pesisir (CSV) Coastal Area Rehabilitation and Conservation Program (CSV)	6.365.000.000	6.805.602.387	Rehabilitasi wilayah pesisir dan laut Rehabilitation of coastal and marine areas
2	Program Penanaman dan pemberdayaan mangrove (CSV) Mangrove Planting and Empowerment Program (CSV)	7.197.000.000	4.778.903.327	Memberi nilai tambah perusahaan dalam penilaian/asesmen <i>Green Port</i> Adding value to the company in the Green Port assessment
3	Program Pelatihan/vokasi bagi komunitas pelabuhan (CSV) Training/Vocational Program for Port Communities (CSV)	2.050.000.000	1.495.092.783	Memberi nilai tambah Perusahaan pada <i>Awareness</i> Komunitas Pelabuhan pada K3 Adding value to the Company in Port Community Awareness in K3
4	Program TJSL Pada Proyek Strategis (CSV) SER Program for Strategic Projects (CSV)	1.900.000.000	813.900.900	Memitigasi dampak sosial akibat pelaksanaan proyek strategis Mitigating social impacts resulting from strategic project implementation
Total		17.512.000.000	13.893.499.397	



PROGRAM PRIORITAS/UNGGULAN

Program *Creating Shared Value* (CSV) dan Program Prioritas/ Unggulan Penyaluran Program TJSJ yang sejalan dengan program prioritas/unggulan yang mendukung pencapaian TPB. Program tiga bidang prioritas terealisasi sebesar Rp76.923.679.962 atau 82,65% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp93.075.573.320 dengan rincian antara lain:

PRIORITY/EXCELLENT PROGRAM

The *Creating Shared Value* (CSV) Program and Priority/ Excellent Program for SER Program Distribution is in line with priority/ excellent programs that support the achievement of the SDGs. The three priority sector programs realized Rp76,923,679,962, or 82.65% of the 2023 RKA of Rp93,075,573,320, with details as follows:

No	Program Unggulan/Prioritas Priority/Leading Program	TPB SDG	RKA 2023 (Rp) 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp) 2023 Realization (Rp)
1	Program Penunjang Pendidikan Education Support Program	4	5.582.000.000	8.078.351.472
2	Program Kolaborasi TJSJ Pendidikan SER Education Collaboration Program	4	12.789.260.000	1.161.102.096
3	Program Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas Capacity Building Program for People with Disabilities	10	1.118.000.000	1.093.820.000
4	Dukungan Pembangunan Nasional untuk Pendidikan National Development Support Program for Education	3	19.500.000.000	16.793.040.000
5	Program beasiswa dan Riset Pelindo Pelindo Scholarship and Research Program	4	3.951.577.000	4.481.976.405
6	Program Pelatihan/vokasi bagi komunitas pelabuhan (CSV) Training/Vocational Program for Port Communities (CSV)	3	2.050.000.000	1.495.092.783
7	Penyediaan APD untuk TKBM pada cabang-cabang yang akan melaksanakan transformasi operasional Provision of PPE for TKBM in Branches that will carry out operational transformation	3	400.000.000	216.145.488
8	Program Mahasiswa Magang Student Internship Program	4	18.850.000	18.850.000
9	Program Pelatihan Purnabakti Retirement Training Program	4	6.560.000	6.560.000
10	Penyelenggaraan Seminar, Perhitungan Dampak dan Publikasi TJSJ Organizing SER Seminars, Impact Calculations and Publications	16	2.382.000.000	1.846.400.586
Jumlah Total			47.798.247.000	35.191.338.830

No	Program Unggulan/Prioritas Priority/Leading Program	TPB SDG	RKA 2023 (Rp) 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp) 2023 Realization (Rp)
1	Program Pengelolaan Sampah Terpadu Integrated Waste Management Program	12	1.100.000.000	2.350.652.273
2	Program Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pesisir (CSV) Coastal Area Rehabilitation and Conservation Program (CSV)	14	6.365.000.000	6.805.602.387
3	Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Clean Water and Sanitation Provision Program	6	1.950.000.000	1.783.257.611
4	Program Penghijauan Greening Program	15	1.846.000.000	4.380.878.976
5	Program Penanaman dan Pemberdayaan Mangrove (CSV) Mangrove Planting and Empowerment Program (CSV)	13	7.197.000.000	4.778.903.327
Jumlah Total			18.458.000.000	20.099.294.574

No	Program Unggulan/Prioritas Priority/Leading Program	TPB SDG	RKA 2023 (Rp) 2023 RKA (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp) 2023 Realization (Rp)
1	Program Pelatihan dan Sertifikasi Usaha Business Training and Certification Program	8	4.284.000.000	1.828.976.957
2	Program Keikutsertaan Pameran Exhibition Participation Program	8	3.685.000.000	6.005.338.177
3	Program Bantuan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Masyarakat Business and Community Capacity Building Assistance Program	8	5.835.000.000	4.602.848.079
4	Program Pengembangan Desa Sejahtera Prosperous Village Development Program	9	3.368.074.000	3.822.139.345
5	Dukungan Pembangunan Nasional Pengembangan Ekonomi National Development Support for Economic Development	9	4.100.000.000	4.474.960.000
6	Program Penanganan Sosial Kemasyarakatan Proyek Pembangunan Terminal Kijing Tahun II Project Social Management Program Construction of Kijing Terminal Year II	9	4.704.152.320	-
7	Survei Kepuasan Vendor Vendor Satisfaction Survey	17	800.000.000	418.470.000
8	Vendor Award Vendor Award	17	43.100.000	480.314.000
Jumlah Total			26.819.326.320	21.633.046.558

PROGRAM PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (UMK)

Program Pembinaan UMK dilaksanakan melalui Program Pengembangan Ekonomi dan UMK untuk mendukung Program Pendanaan UMK melalui beberapa sub program antara lain Program Pelatihan dan Sertifikasi Usaha, Program Keikutsertaan Pameran serta Program Bantuan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Masyarakat. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran yang dibiayakan pada Perseroan dan merupakan bagian dari Program TJSL Bantuan dan/Kegiatan Lainnya.

MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSE) DEVELOPMENT PROGRAM

The MSE Development Program is implemented through the Economic and MSE Development Program to support the MSE Funding Program with several sub-programs including the Business Training and Certification Program, the Exhibition Participation Program and the Business and Community Capacity Building Assistance Program. These programs use a budget funded by the Company and are part of the SER Assistance and/Other Activities Program.

1. Pameran Pada Pelindo Forum Pelindo Forum Exhibition



Pelaksanaan Implementation	:	17-19 Januari 2023 January 17-19, 2023
Lokasi Location	:	PMLI Bogor
Mitra Binaan Foster Partners	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yao Ecocraft ▪ Keraton Batik ▪ Tangguh Berkibar ▪ Ebhi Coffeew ▪ Batik Saputri ▪ Morehandcraft Bank Sampah ▪ Witrove ▪ Danasty



2. **Pameran Kriya Fest Sumatera Utara**
North Sumatra Craft Fest Exhibition



Pelaksanaan Implementation	:	23 Februari 2023 February 23, 2023
Lokasi Location	:	Medan
Mitra Binaan Foster Partners	:	-

3. **Pameran Inacraft 2023**
Inacraft Exhibition 2023



Pelaksanaan Implementation	:	1-5 Maret 2023 March 1-5, 2023
Lokasi Location	:	Jakarta Convention Center (JCC)
Mitra Binaan Foster Partners	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keraton Batik ▪ Alrafi ▪ Rumah Sabut Risa ▪ CV Industri Classica Variasi

4. **Pameran Fashion Show Pada Muffest (Muslim Fashion Festival)**
Fashion Show Exhibition at Muffest (Muslim Fashion Festival)



Pelaksanaan Implementation	:	7-10 Maret 2023 March 7-10, 2023
Lokasi Location	:	The Westin. Jakarta
Mitra Binaan Foster Partners	:	-

5. **Pelatihan Gedor Ekspor**
Export Training



Pelaksanaan Implementation	: 14 Maret 2023 March 14, 2023
Lokasi Location	: Jakarta Convention Center (JCC)
Mitra Binaan Foster Partners	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CV Morisama Sejahtera ▪ VC Jearifan Lokal ▪ CV Casheila ▪ UD Utami ▪ Aiswarya Endek Bali ▪ CV Andalan Semesta ▪ PT Fahma Hair ▪ Nadia Folia ▪ CV Kafein Wisanggeni ▪ Renata Label ▪ CV Industri Classica Variatif ▪ Amaopi ▪ Kenara ▪ UD Narwastu ▪ efGreen Kopi Hirang ▪ Witrove ▪ CV Kunikita Persada ▪ Non Menik ▪ UD Sinar Ayu Sejahtera

6. **Pameran Bazar UMK Safari Ramadhan BUMN 2023**
SOE MSE Safari Ramadhan Bazaar Exhibition 2023



Pelaksanaan Implementation	: 30 Maret 2023 March 30, 2023
Lokasi Location	: Walang, Jakarta Utara Walang, North Jakarta
Mitra Binaan Foster Partners	: 10 (sepuluh) Mitra Binaan Regional 2 Tanjung Priok 10 (ten) Tanjung Priok Regional 2 Development Partners

7. **Pelatihan Inkubasi Usaha Pandu Gedor Ekspor**
Export Business Guide Incubation Training



Pelaksanaan Implementation	: 2-3 Mei 2023 May 2-3, 2023
Lokasi Location	: Gedung Sarinah Sarinah Building
Peserta Participants	: 50 UMK terpilih pelatihan <i>offline</i> 50 selected MSEs for offline training



8. **Pameran pada *Cruise Market Day Tanjung Perak***
Exhibition at Cruise Market Day Tanjung Perak



Pelaksanaan Implementation	:	8 April 2023 April 8, 2023
Lokasi Location	:	Terminal Penumpang Tanjung Perak Tanjung Perak Passenger Terminal
Mitra Binaan Foster Partners	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Timez Bed ▪ Namira Ecoprint ▪ Amaopi ▪ Arara art ▪ Witrove ▪ Dian Collection ▪ Kampung Lawas ▪ Batik Melati ▪ Luwak Kopi ▪ Kulit Kreasindo

9. **Pameran pada *Cruise Market Day Tanjung Priok***
Exhibition at Cruise Market Day Tanjung Priok



Pelaksanaan Implementation	:	10-11 April 2023 April 10-11, 2023
Lokasi Location	:	Terminal Penumpang Tanjung Priok Tanjung Priok Passenger Terminal
Mitra Binaan Foster Partners	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yao Ecocraft ▪ Epeni Galeri ▪ Wanguse Wayang Kulit ▪ Tridol Bag ▪ Alda JP ▪ Jejaring ▪ Mejihuhibiniu Batik ▪ Yata Craft ▪ Gusbeisakung ▪ Nadha Jabu Etnik ▪ Nazilie Lukis ▪ Marikoe (Lely) ▪ Asia Craft ▪ Pajar Suvenir ▪ Artha Betawi Craft ▪ Nara's Beads ▪ Dcraft Indonesia ▪ Sugikreatip2k ▪ Mommy Kens ▪ Batik Kojja ▪ Kirana Cipta Lestari ▪ Six Scents

10. **Pameran pada Cruise Market Day Benoa Bali**
Exhibition at Cruise Market Day Benoa Bali



Pelaksanaan Implementation	: 22 April 2023 April 22, 2023
Lokasi Location	: Terminal Penumpang Benoa Bali Benoa Bali Passenger Terminal
Mitra Binaan Foster Partners	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Astri Art ▪ Panaya Collection ▪ Aпти Butik ▪ Srkar Laut Souvenir Shop ▪ Eka Tirta Art Shop ▪ Miti Collection ▪ Gus Oka Art Shop ▪ Jana Segara Sanghara Benoa ▪ Sweet Shop ▪ Artha Sari Shop ▪ Bali Mesari Art Shop ▪ Arti Shop ▪ Erlinda Rajut ▪ Karisna Shop ▪ Muda Collection ▪ Manina Collection ▪ Arta Kerajinan ▪ Marutaka Bali ▪ Sri Rejeki Art Shop

11. **Pameran pada Side Event ASEAN Summit Labuan Bajo**
Exhibition at the ASEAN Summit Labuan Bajo Side Event



Pelaksanaan Implementation	: 9-13 Mei 2023 May 9-13, 2023
Lokasi Location	: Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Convention Center (JCC)
Mitra Binaan Foster Partners	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ UD Utami ▪ CV Agradaya Indonesia

12. **Pameran Gelar Batik Nusantara**
Archipelago Batik Exhibition



Pelaksanaan Implementation	: 2-6 Agustus 2023 August 2-6, 2023
Lokasi Location	: Senayan Park, Jakarta Senayan Park, Jakarta
Mitra Binaan Foster Partners	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keraton Batik ▪ Ramza Batik ▪ Nila Hibali ▪ Batik Saputri ▪ Batik Dewi Arum ▪ Rosita Batik Shibori ▪ Batik Lavega ▪ Tiara Queen



13. Pameran Indonesia Fair Tahun 2023
Indonesia Fair Exhibition 2023



Pelaksanaan Implementation	:	25-27 Agustus 2023 August 25-27, 2023
Lokasi Location	:	Central World Bangkok
Mitra Binaan Foster Partners	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CV Kunikita Persada ▪ Agradaya

14. Pameran IFFINA
IFFINA Exhibition



Pelaksanaan Implementation	:	14-17 September 2023 September 14-17, 2023
Lokasi Location	:	Ice BSD Tangerang
Mitra Binaan Foster Partners	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yao Ecocraft ▪ CV. Kirana Cipta Lestari ▪ Tridolbag ▪ Wongpur

15. Program Inkubasi Usaha Kolaborasi Rumah BUMN dan Bisa Tumbuh
SOE Home Collaboration Business Incubation Program and Can Grow



Pelaksanaan Implementation	:	6 September 2023 September 6, 2023
Lokasi Location	:	Central World Bangkok
Mitra Binaan Foster Partners	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Epeni Galery ▪ Kunikita ▪ Baline Chocolate ▪ Nurvan Kreatif

16. Pameran China ASEAN-Expo ke 20
20th China ASEAN-Expo



Pelaksanaan Implementation	:	13 – 20 September 2023 September 13 – 20, 2023
Lokasi Location	:	Nanning, China
Mitra Binaan Foster Partners	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enclave ▪ Witrove ▪ Secret Potion ▪ Gusbesikung ▪ Manika ▪ Maharani

17. **Pameran Pelindo Birthday Sale**
Pelindo Birthday Sale Exhibition



Pelaksanaan Implementation	:	1 Oktober 2023 October 1, 2023
Lokasi Location	:	Medan
Mitra Binaan Foster Partners	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agradaya ▪ Nurvan Kreatif ▪ Epeni Galery ▪ Nadha Jabu Etnik ▪ Yasminida ▪ Sundanika ▪ Mak Judess ▪ Alrafi ▪ Baline Chocolate ▪ Ma Ira

18. **Pameran Inacraft pada bulan Oktober**
Inacraft Exhibition in October



Pelaksanaan Implementation	:	4-8 Oktober 2023 October 4-8, 2023
Lokasi Location	:	JCC, Jakarta JCC, Jakarta
Mitra Binaan Foster Partners	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nurvan ▪ Emma Little Things ▪ Al Rafi ▪ Hansee ▪ Batik Saputri ▪ Batik Dewi Arum ▪ Batik Lavega ▪ Mama Ira ▪ Yasminida ▪ Mak Judes

19. **Pameran Indonesia Premium Coffee Expo**
Indonesia Premium Coffee Expo Exhibition



Pelaksanaan Implementation	:	12-15 Oktober 2023 October 12-15, 2023
Lokasi Location	:	Cendrawasih Hall, Jakarta Cendrawasih Hall, Jakarta
Mitra Binaan Foster Partners	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sundanika Indonesia ▪ Kafein Wisanggeni ▪ Sinona Indonesia ▪ Efgreen Kopi Hirang



20. Pameran Trade Expo Indonesia
Indonesia Trade Expo Exhibition



Pelaksanaan Implementation	: 18-22 Oktober 2023 October 18-22, 2023
Lokasi Location	: Ice BSD, Tangerang Ice BSD, Tangerang
Mitra Binaan Foster Partners	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agradaya Indonesia ▪ Tangguh Berkibar ▪ Kunikita Persada ▪ Epeni Galeri ▪ Nadha Jabu Etnik ▪ Mejikuhibiniu Butik ▪ Gusbeisaekung ▪ Nara;s Beads Collection ▪ Fibi Jewelry ▪ Tridolbag ▪ Al Rafi ▪ UD. Utami (Baline chocolate) ▪ Namira Ecoprint ▪ Maharani CV

21. Pameran Sail Cendrawasih
Cendrawasih Sail Exhibition



Pelaksanaan Implementation	: 20-25 November 2023 November 20-25, 2023
Lokasi Location	: Biak Biak
Mitra Binaan Foster Partners	: Regional 4 Region 4

22. Pameran Kolaborasi BUMN Bazar UMKM untuk Indonesia
SOE Collaboration Exhibition MSME for Indonesia Bazaar



Pelaksanaan Implementation	: 30 November – 3 Desember 2023 November 30– December 3, 2023
Lokasi Location	: Sarinah Mall, Jakarta Sarinah Mall, Jakarta
Mitra Binaan Foster Partners	: 85 Mitra Binaan 85 Foster Partners

23. Pelatihan Gedor Ekspor Inkubator Export Incubator Training



Pelaksanaan Implementation	:	Desember 2023 December 2023
Lokasi Location	:	Pelindo Tower, Jakarta Pelindo Tower, Jakarta
Mitra Binaan Foster Partners	:	50 Mitra Binaan 50 Foster Partners

- | | |
|---|--|
| <p>24. Bantuan Peningkatan Kapasitas kepada CV Ramza Karya Bersama.</p> <p>25. Pemberian bantuan peningkatan kapasitas berupa bantuan bahan kain kepada CV Ramza Karya Bersama.</p> <p>26. Bantuan Peningkatan Kapasitas kepada Ebhu Coffee.</p> <p>27. Pemberian hibah Bantuan peningkatan kapasitas berupa Bantuan bahan baku pembuat kopi dan perlengkapan kepada Ebhu Coffee.</p> <p>28. Bantuan Peningkatan Kapasitas Keraton Batik.</p> <p>29. Pemberian hibah Bantuan peningkatan kapasitas berupa Bantuan bahan perlengkapan kepada Keraton Batik.</p> <p>30. Bantuan Peningkatan Kapasitas kepada Sanggar Budaya Lagoa.</p> <p>31. Pemberian hibah Bantuan peningkatan kapasitas berupa alat musik dan seragam tari kepada Sanggar Lagoa.</p> <p>32. Bantuan Peningkatan Kapasitas kepada 5 UMK Champion.</p> <p>33. Pemberian hibah Bantuan peningkatan kapasitas berupa Bantuan <i>packaging rebranding</i> Pelindo kepada 5 UMK <i>Champion</i>.</p> <p>34. Bantuan Peningkatan Kapasitas kepada PT Nurvan Kreatif Bersama.</p> <p>35. Pemberian hibah Bantuan peningkatan kapasitas berupa Bantuan <i>packaging rebranding</i> Pelindo dan mesin jahit kepada PT Nurvan Kreatif Bersama.</p> <p>36. Bantuan Peningkatan Kapasitas kepada 5 UMK <i>Champion Batch II</i>.</p> <p>37. Pemberian hibah Bantuan peningkatan kapasitas berupa Bantuan peningkatan <i>branding/promosi</i> produk kepada 5 UMK <i>Champion Batch II</i>.</p> | <p>24. Capacity Building Assistance to CV Ramza Karya Bersama.</p> <p>25. Providing capacity building assistance in the form of cloth materials to CV Ramza Karya Bersama.</p> <p>26. Capacity Building Assistance to Ebhu Coffee.</p> <p>27. Providing grants for capacity building assistance in the form of assistance for coffee making using raw materials and equipment at Ebhu Coffee.</p> <p>28. Assistance to Increase the Capacity of Keraton Batik.</p> <p>29. Providing grants for capacity building assistance in the form of supplies and equipment to Keraton Batik.</p> <p>30. Capacity Building Assistance to Sanggar Budaya Lagoa.</p> <p>31. Providing grants for capacity building assistance in the form of musical instruments and dance uniforms to Sanggar Lagoa.</p> <p>32. Capacity Building Assistance to 5 Champion MSEs.</p> <p>33. Providing grants for capacity building assistance in the form of Pelindo packaging rebranding assistance to 5 Champion MSEs.</p> <p>34. Capacity Building Assistance to PT Nurvan Kreatif Bersama.</p> <p>35. Providing grants for capacity building assistance in the form of Pelindo packaging rebranding assistance and sewing machines to PT Nurvan Kreatif Bersama.</p> <p>36. Capacity Building Assistance to 5 Champion Batch II MSEs.</p> <p>37. Providing grants for capacity building assistance in the form of assistance to improve branding/product promotion in 5 Champion Batch II MSEs.</p> |
|---|--|



REALISASI PROGRAM TJSL TAHUN 2023

SER PROGRAM REALIZATION IN 2023

Realisasi program TJSL tahun 2023 disajikan sebagai berikut: The SER program realization in 2023 was as follows:

Tabel Realisasi Program TJSL
SER Program Realization

(dalam Rupiah)

(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
A PROGRAM PRIORITAS PRIORITY PROGRAMS							
BIDANG LINGKUNGAN ENVIRONMENT							
1	Program Pengelolaan Sampah Terpadu Intergrated Waste Management Program	12	3	Terlaksananya Program Pengelolaan Sampah Terpadu di 10 (sepuluh) lokasi Implementation of the Integrated Waste Management Program in 10 (ten) locations	Jakarta, Belawan, Teluk Bayur, Panjang, Benoa, Ende, Banjarmasin, Labuan Bajo, Bima, Tanjung Perak	1.100.000.000	2.350.652.273
2	Program Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pesisir (CSV) Coastal Area Rehabilitation and Conservation Program (CSV)	14	3	Terlaksananya Program Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pesisir di 13 (tiga belas) lokasi Implementation of the Coastal Area Rehabilitation and Conservation Program in 13 (thirteen) locations	Denpasar, Makassar, Tanjung Perak, Maumere, Bima, benoa, Tanjung Perak, Lampung, Tanjung Priok, Tanjung Pandan, Banten, Sunda Kelapa, Panjang	6.365.000.000	6.805.602.387
3	Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Clean Water and Sanitation Provision Program	6	3	Terlaksananya Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi di 12 (dua belas) lokasi Implementation of the Clean Water and Sanitation Provision Program in 12 (twelve) locations	Denpasar, Tanjung Priok, Palembang, Panjang, Pontianak, Banten, Makassar, Tanjung Perak, Tanjung Intan, Kumai, Bima, Benoa	1.950.000.000	1.783.257.611
4	Program Penghijauan Greening Program	15	3	Terlaksananya Program Penghijauan Implementation of the Greening Program	Tanjung Priok, Banten, Palembang, Pontianak, Cirebon, Bengkulu, Lampung, Jambi, Bandar Lampung, Jakarta, Denpasar, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Kumai, Banjarmasin, Sampit, Bima, Makassar, Belawan, Pangkal Balam, Sunda Kelapa, Teluk Bayur	1.846.000.000	4.380.878.976

Tabel Realisasi Program TJSL
SER Program Realization

(dalam Rupiah)

(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
5	Program Penanaman dan pemberdayaan mangrove (CSV) Mangrove Planting and Empowerment Program (CSV)	13	3	Terlaksananya Program Penanaman dan Pemberdayaan Mangrove sejumlah 290 Hektar Implementation of Mangrove Planting and Empowerment Program in 290 Hectares	Banten, Cirebon, Tanjung Pandan, Pontianak, Sunda Kelapa, Panjang, Belawan, Tanjung Perak, Celukan Bawang, Lembar, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Tenau Kupang, Benoa, Makassar	7.197.000.000	4.778.903.327
BIDANG PENDIDIKAN EDUCATION							
6	Program Pendidikan Penunjang Support Program	4	1	Terlaksananya Program Penunjang Pendidikan mencapai 144% dari nilai anggaran Implementation of the Education Support Program reached 144% of the budget value	Teluk Bayur, Bengkulu, Palembang, Tanjung Priok, Panjang, Pontianak, Cirebon, Sunda kelapa, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Jambi, Semarang, Pemalang, Jakarta, Deli Serdang, Cillegon, Samarinda, Balikpapan, Tanjung Tembaga, Tanjung Intan, Tanjung Perak, Bima, Banjarmasin, Labuan Bajo, Makassar, Belawan, Dumai, Gunungsitoli	5.582.000.000	8.078.351.472
7	Program Kolaborasi TJSL Pendidikan SER Education Collaboration Program	4	1	Terlaksananya Program untuk membantu pendidikan masyarakat melalui kolaborasi antar BUMN mencapai 9,1% dari anggaran Implementation of the program to assist public education through collaboration between SOEs reached 9.1% of the budget	Teluk Bayur, Tanjung Pandan, Tanjung Perak, Makassar	12.789.260.000	1.161.102.096



Tabel Realisasi Program TJSL
SER Program Realization

(dalam Rupiah)

(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
8	Program Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas Capacity Building Program for People with Disabilities	10	2	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas mencapai 97,83% dari nilai anggaran Implementation of the Capacity Building Program for People with Disabilities reached 97.83% of the budget	Tangerang, Jakarta, Maumere, Tanjung Perak, Benoa, Sunda kelapa, Makassar	1.118.000.000	1.093.820.000
9	Dukungan Pembangunan Nasional untuk Pendidikan National Education Development Support Program	3	1	Turlaksananya Program Dukungan Pembangunan Nasional Pendidikan di lokasi/wilayah kerja Perseroan Implementation of the National Education Development Support Program in the Company's location/work area	Jakarta, Maumere	19.500.000.000	16.793.040.000
10	Program Beasiswa dan Riset Pelindo Pelindo Scholarship and Research Program	4	1	Terlaksananya Program Beasiswa dan Riset Pelindo mencapai 113% dari anggaran Implementation of the Pelindo Scholarship and Research Program reached 113% of the budget	Jakarta, Pontianak, Jambi, Lampung, Cirebon, Pangkal Balam, Bengkulu, Teluk Bayur, Palembang, Sunda kelapa, Banten	3.951.577.000	4.481.976.405
11	Program Pelatihan/Vokasi bagi Komunitas Pelabuhan (CSV) Training/Vocational Program for Port Communities (CSV)	3	1	Terlaksananya Program Pelatihan/Vokasi bagi Komunitas Pelabuhan Implementation of Training/Vocational Programs for Port Communities	Medan, Pangkal Balam, Sunda kelapa, Jambi, Tanjung Priok, Makassar, Tanjung Balai Asahan, Bima, Banjarmasin, Tanjung Perak	2.050.000.000	1.495.092.783

Tabel Realisasi Program TJSL
SER Program Realization

(dalam Rupiah)

(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
12	Penyediaan APD untuk TKBM pada cabang-cabang yang akan melaksanakan transformasi operasional Provision of PPE for TKBM in Branches that will carry out operational transformation	3	1	Terlaksananya Penyediaan APD untuk TKBM pada cabang-cabang yang akan melaksanakan transformasi operasional Implementation of Provision of PPE for TKBM in branches that will carry out operational transformation	Tanjung Priok, Maumere	400.000.000	216.145.488
13	Program Magang Student Program Mahasiswa Internship	4	1	Terlaksananya Program Magang sebanyak 1 (satu) kali Implementation of Student Internship Program 1 (one) time	Jakarta	18.850.000	18.850.000
14	Program Purnabakti Retirement Program Pelatihan Training	4	1	Terlaksananya Program Pelatihan Purnabakti sebanyak 1 (satu) kali Implementation of Retirement Training Program 1 (one) time	Jakarta	6.560.000	6.560.000
15	Penyelenggaraan Seminar, Perhitungan Dampak dan Publikasi TJSL Organizing SER Seminars, Impact Calculations and Publications	16	4	Terlaksananya Penyelenggaraan Seminar, Perhitungan Dampak, dan Publikasi TJSL sebanyak 3 (tiga) kali Implementation of SER seminars, impact calculations and publications 3 (three) times	Yogyakarta, Pontianak	2.382.000.000	1.846.400.586
BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN UMK ECONOMIC AND MSE DEVELOPMENT							
16	Program Pelatihan dan Sertifikasi Usaha Business Training and Certification Programs	8	2	Terlaksananya Program Pelatihan dan Sertifikasi Usaha Implementation of Business Training and Certification Programs	Jakarta, Belawan, Surabaya, Bali, Makassar	4.284.000.000	1.828.976.957
17	Program Pameran Keikutsertaan Exhibition Participation Program	8	2	Terlaksananya Program Keikutsertaan Pameran Implementation of the Exhibition Participation Program	Jakarta, Medan, Surabaya, Bali, Makassar, Tanjung Balai Karimun, Pontianak, Cirebon, Tanjung Priok, Lampung, Palembang, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Benoa, Makassar	3.685.000.000	6.005.338.177



Tabel Realisasi Program TJSL
SER Program Realization

(dalam Rupiah)

(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
18	Program Bantuan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Masyarakat Business and Community Capacity Building Assistance Program	8	2	Terlaksananya Program Bantuan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Masyarakat Implementation of the Business and Community Capacity Building Assistance Program	Jakarta, Medan, Waingapu, Tenau Kupang, Tanjung Perak, Labuan Bajo, Banjarmasin, Bena, Pontianak, Banten, Lampung, Tanjung Priok, Makassar	5.835.000.000	4.602.848.079
19	Program Pengembangan Desa Sejahtera Prosperous Village Development Program	9	2	Terlaksananya Program Pengembangan Desa Sejahtera Implementation of the Prosperous Village Development Program	Tanjung Pandan, Sunda Kelapa, Lampung, Pontianak, Palembang, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Medan	3.368.074.000	3.822.139.345
20	Dukungan Pembangunan Nasional Pengembangan Ekonomi National Development Support for Economic Development	9	2	Terlaksananya Penyaluran TJSL atas penugasan dari Kementerian BUMN untuk Program Dukungan Pembangunan Nasional Pengembangan Ekonomi di wilayah/ lokasi kerja Perseroan Implementation of SER distribution on assignment from the Ministry of SOEs for the National Development Support Program for Economic Development in the Company's work areas/locations	Jakarta	4.100.000.000	4.474.960.000
21	Program Penanganan Sosial Kemasyarakatan Proyek Pembangunan Terminal Kijing Tahun II Community Social Handling Program for Kijing Terminal Development Project Year II	9	2	Terlaksananya Program Penanganan Sosial Kemasyarakatan Proyek Pembangunan Terminal Kijing Tahun II di 1 (satu) lokasi Implementation of the Community Social Handling Program for Kijing Terminal Development Project Year II in 1 (one) location	Kijing	4.704.152.320	-

Tabel Realisasi Program TJSL
SER Program Realization

(dalam Rupiah)

(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
22	Survey Kepuasan Vendor Vendor Satisfaction Survey	17	2	Terlaksananya Survey Kepuasan Vendor sebanyak 1 (satu) kali Implementation of Vendor Satisfaction Survey 1 (one) time	Jakarta	800.000.000	418.470.000
23	Vendor Award Vendor Award	17	2	Terlaksananya Vendor Award sebanyak 1 (satu) kali Implementation of Vendor Award 1 (one) time	Jakarta	43.100.000	480.314.000
24	Program PUMK PUMK Program	8	2	Terlaksananya Pendanaan PUMK sebanyak 1 (satu) kali Implementation of PUMK funding 1 (one) time	Kerjasama Kolaborasi BRI	23.880.295.155	23.880.295.155
PROGRAM NON-PRIORITAS NON-PRIORITY PROGRAM							
25	Program Pelindo Berbagi dan Peduli Pelindo Sharing and Caring Program	2	1	Terlaksananya program Pelindo Berbagi dalam rangka penyaluran sembako dan kebutuhan pangan lainnya untuk masyarakat kurang mampu Implementation of the Pelindo Sharing program by distributing basic necessities and other food needs to underprivileged communities	Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Malahayati, Sibolga, Tanjungpinang, Tembilahan, Tanjung Balai Karimun, Gunung Sitoli, Tanjung Balai Asahan, Dumai, Medan, Kuala Tanjung, Palembang, Bengkulu, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, Cirebon, Pontianak, Lampung, Pangkal Balam, Tanjung Pandan	18.720.260.000	22.275.252.247
26	Program Peningkatan Kesehatan dan Imunitas Health and Immunity Improvement Program	3	1	Terlaksananya Program Peningkatan Kesehatan dan Imunitas mencapai 167% dari nilai anggaran Implementation of the Health and Immunity Improvement Program reached 167% of the budget	Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Palembang, Cirebon, Sunda kelapa, Pontianak, Banten, Bena, Tanjung Perak, Sampit, Maumere, Celukan Bawang, Bima, Kotabaru	3.016.089.000	5.066.634.186



Tabel Realisasi Program TJSL
SER Program Realization

(dalam Rupiah)

(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
27	Program Tanggap Bencana dan Musibah Disaster and Accident Response Program	13	3	Terlaksananya Program Tanggap Bencana dan Musibah di 8 (delapan) lokasi Implementation of the Disaster and Accident Response Program in 8 (eight) locations	Surabaya, Makassar, Benoa, Banjarmasin, Sampit, Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Palembang	1.000.000.000	740.703.725
28	Program TJSL Pada Proyek Strategis (CSV) SER Program for Strategic Projects (CSV)	2	1	Terlaksananya Program TJSL Pada Proyek Strategis di 17 (tujuh belas) lokasi Implementation of the SER Program for Strategic Projects in 17 (seventeen) locations	Pontianak, Surabaya, Maumere, Benoa, Lembar, Tanjung Perak, Ende dan Lppi, Tanjung Intan, Celukan Bawang, Tanjung Tembaga, Kotabaru, Tenau Kupang, Sampit, Batulicin, Pulau Pisang, Banjarmasin, Bima	1.900.000.000	813.900.900
29	Bantuan Sarana dan Prasarana Assistance Facilities and Infrastructure	11	3	Terlaksananya Bantuan Sarana dan Prasarana mencapai 212% dari nilai anggaran Implementation of Facilities and Infrastructure Assistance reached 212% of the budget	Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Tanjung Pinang, Belawan, Gunungsitoli, Pekanbaru, Tanjung Priok, Tanjung Pandan, Panjang, Pontianak, Palembang, Cirebon, Bengkulu, Banten, Pangkal Balam, Lampung, Sunda Kelapa, Banten, Maumere, Bima, Tanjung Perak, Tanjung Intan, Bantarmasin, Batulicin, Sampit	5.050.000.000	10.706.787.744
30	Program Dukungan Pembangunan Nasional Sosial National Social Development Support Program	11	3	Penyaluran TJSL atas penugasan dari Kementerian BUMN untuk Program Dukungan Pembangunan Nasional Distribution of SER on assignment from the Ministry of SOEs for the National Development Support Program	Jakarta, Celukan Bawang	10.000.000.000	11.315.206.000
TOTAL REALISASI PENYALURAN							127.842.164.764
TOTAL DISTRIBUTION REALIZATION							

Tabel TPB Keseluruhan yang dilaksanakan Perseroan
Overall SDG implemented by the Company

(dalam Rupiah)

(in Rupiah)

No	TPB SDG	Realisasi Tahun 2022 (audited) 2022 Realization (audited)	RKA 2023 2023 RKA	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization	Presentasi Capaian Percentage Achievement	
					Real 2023/ 2022 (%) Real 2023/ 2022 (%)	Real/RKA (%) Real/RKA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
A	PILAR SOSIAL SOCIAL PILLAR	54.271.398.273	67.934.596.000	60.406.905.577	111,31	88,92
1	TPB 1	-	-	-	0,00	0,00
2	TPB 2	19.095.310.342	20.620.260.000	23.089.153.147	120,92	111,97
3	TPB 3	5.856.906.736	24.966.089.000	23.570.912.457	402,45	94,41
4	TPB 4	29.319.181.195	22.348.247.000	13.746.839.973	46,89	61,51
5	TPB 5	-	-	-	0,00	0,00
B	PILAR EKONOMI ECONOMIC PILLAR	31.307.610.432	27.937.326.320	22.726.866.558	72,59	81,35
1	TPB 7	1.944.054.982	-	-	0,00	0,00
2	TPB 8	11.653.797.849	13.804.000.000	12.437.163.213	106,72	90,10
3	TPB 9	5.572.638.059	12.172.226.320	8.297.099.345	148,89	68,16
4	TPB 10	12.137.119.542	1.118.000.000	1.093.820.000	9,01	97,84
5	TPB 17	-	843.100.000	898.784.000	106,60	152,29
C	PILAR LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PILLAR	31.756.676.567	34.507.917.000	42.861.992.043	134,97	124,21
1	TPB 6	2.626.385.187	1.950.000.000	1.783.257.611	67,90	91,45
2	TPB 11	13.054.718.250	15.049.917.000	22.021.993.744	168,69	146,33
3	TPB 12	4.171.260.827	1.100.000.000	2.350.652.273	56,35	213,70
4	TPB 13	813.877.250	8.197.000.000	5.519.607.052	678,19	67,34
5	TPB 14	7.616.579.347	6.365.000.000	6.805.602.387	89,35	106,92
6	TPB 15	3.473.855.706	1.846.000.000	4.380.878.976	126,11	237,32
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA LEGAL AND GOVERNANCE PILLAR	1.595.683.734	2.382.000.000	1.846.400.586	115,71	77,51
1	TPB 16	1.595.683.734	2.382.000.000	1.846.400.586	115,71	77,51
TOTAL		118.931.369.006	132.761.839.320	127.842.164.764	107,49	96,29



Berikut adalah rincian pelaksanaan Program TJSI Tahun 2023 CID dan Non-CID yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Pilar yang bersumber dari biaya Perseroan:

1. Pilar Sosial

Pilar Sosial bertujuan untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Program TJSI Perseroan yang telah dilaksanakan meliputi:

a. TPB 2 (Tanpa Kelaparan)

Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSI Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 2 sebesar Rp23.089.153.147,00 atau tercapai 111,97% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp20.620.260.000,00 dan 120,92% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).

b. TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSI Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 3 sebesar Rp23.570.912.457,00 atau 94,41% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp24.966.089.000,00 dan 402,45% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).

c. TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)

Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSI Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 4 sebesar Rp13.746.839.973,00 atau 61,51% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp22.348.247.000,00 dan 46,89% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).

2. Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi bertujuan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau serta didukung kemitraan. Program TJSI Perseroan yang telah dilaksanakan meliputi:

a. TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSI Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 8 sebesar Rp12.437.163.213,00 atau 90,10% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp13.804.000.000,00 dan 106,72% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).

b. TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)

Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSI Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 9 sebesar Rp8.297.099.345,00 atau 68,16% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp12.172.226.320,00 dan 148,89% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).

c. TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan)

Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSI Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 10 sebesar Rp1.093.820.000,00 atau 97,84% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.118.000.000,00 dan 9,01% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).

The following shows details of the 2023 CID and Non-CID SER Program, grouped into 4 (four) Pillars sourced at the Company's cost:

1. Social Pillar

The Social Pillar aims to achieve quality fulfillment of basic human rights in a fair and equal manner to improve welfare for all communities. The company's SER program included:

a. SDG 2 (Zero Hunger)

As of December 31, 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities for SDG 2 amounted to Rp23,089,153,147.00, or 111.97% of the 2023 budget of Rp20,620,260,000.00, and 120.92% of the realization in 2022 (audited).

b. SDG 3 (Good Health and Well-Being)

As of December 31, 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities for SDG 3 amounting to Rp23,570,912,457.00, or 94.41% of the 2023 budget of Rp24,966,089,000.00, and 402.45% of the realization in 2022 (audited).

c. SDG 4 (Quality Education)

As of December 31, 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities for SDG 4 amounting to Rp13,746,839,973.00, or 61.51% of the 2023 budget of Rp22,348,247,000.00, and 46.89% of the realization in 2022 (audited).

2. Economic Pillar

The Economic Pillar aims to achieve quality economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy and supported by partnerships. The Company's SER program includes:

a. SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)

As of December 31, 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities SDG 8 amounting to Rp12,437,163,213.00, or 90.10% of the 2023 budget of Rp13,804,000,000.00, and 106.72% of the realization in 2022 (audited).

b. SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure)

As of December 31, 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities SDG 9 amounting to Rp8,297,099,345.00, or 68.16% of the 2023 budget of Rp12,172,226,320.00, and 148.89% of the realization in 2022 (audited).

c. SDG 10 (Reducing Inequality)

As of December 31, 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities SDG 10 amounting to Rp1,093,820,000.00, or 97.84% of the 2023 budget of Rp1,118,000,000.00, and 9.01% of the realization in 2022 (audited).

3. Pilar Lingkungan

Pilar Lingkungan bertujuan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Program TJSL Perseroan yang dilaksanakan meliputi:

- a. TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)
Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 6 sebesar Rp1.783.257.611,00 atau 91,45% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.950.000.000,00 dan 67,90% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).
- b. TPB 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)
Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 11 sebesar Rp22.021.993.744,00 atau 146,33% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp15.049.917.000,00 dan 168,69% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).
- c. TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab)
Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 12 sebesar Rp2.350.652.273,00 atau 213,70% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00 dan 56,35% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).
- d. TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim)
Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 13 sebesar Rp5.519.607.052,00 atau 67,34% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp8.197.000.000,00 dan 678,19% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).
- e. TPB 14 (Ekosistem Laut)
Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 14 sebesar Rp6.805.602.387,00 atau 106,92% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp6.365.000.000,00 dan 89,35% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).
- f. TPB 15 (Ekosistem Daratan)
Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 15 sebesar Rp4.380.878.976,00 atau 237,32% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.846.000.000,00 dan 126,11% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar Hukum dan Tata Kelola bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif transparan. Akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Program TJSL yang dilaksanakan oleh Perseroan meliputi:

3. Environmental Pillar

The Environmental Pillar aims for sustainable management of natural resources and the environment as a support for all life. The Company's SER program includes:

- a. SDG 6 (Clean Water and Sanitation)
As of December 31, 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities SDG 6 amounting to Rp1,783,257,611.00, or 91.45% of the 2023 budget of Rp1,950,000,000.00, and 67.90% of the realization in 2022 (*audited*).
- b. SDG 11 (Sustainable Cities and Communities)
As of 31 December 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities SDG 11 amounting to Rp22,021,993,744.00, or 146.33% of the 2023 budget of Rp15,049,917,000.00, and 168.69% of the realization in 2022 (*audited*).
- c. SDG 12 (Responsible Consumption and Production)
As of December 31, 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities SDG 12 amounting to Rp2,350,652,273.00, or 213.70% of the 2023 budget of Rp1,100,000,000.00, and 56.35% of the realization in 2022 (*audited*).
- d. TPB 13 (Climate Action)
As of 31 December 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities SDG 13 amounting to Rp5,519,607,052.00, or 67.34% of the 2023 budget of Rp8,197,000,000.00, and 678.19% of the realization in 2022 (*audited*).
- e. SDG 14 (Life Below Water)
As of December 31, 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities SDG 14 amounting to Rp6,805,602,387.00, or 106.92% of the 2023 budget of Rp6,365,000,000.00, and 89.35% of the realization in 2022 (*audited*).
- f. SDG 15 (Life on Land)
As of December 31, 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities SDG 15 amounting to Rp4,380,878,976.00, or 237.32% of the 2023 budget of Rp1,846,000,000.00, and 126.11% of the realization in 2022 (*audited*).

4. Legal and Governance Pillar

The Legal and Governance Pillar aims to create legal certainty and transparent, effective governance. Accountable and participatory to create security stability and achieve a state based on law. The Company's SER programs include:



- a. TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)
Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terlaksana penyaluran dana TJSJ Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 16 sebesar Rp1.846.400.000.00 atau 77,51% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp2.382.000.000,00 dan 115,71% dari realisasi Tahun 2022 (*audited*).






- a. SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)

As of December 31, 2023, SER funds were distributed for assistance and/or other activities SDG 16 amounting to Rp1,846,400,000.00, or 77.51% of the 2023 budget of Rp2,382,000,000.00, and 115.71% of the realization in 2022 (audited).






Dokumentasi Pelaksanaan Program





Program Implementation Documentation

No	Program Program	Dokumentasi Documentation
1	Program Pengelolaan Sampah Terpadu Integrated Waste Management Program	
2	Program Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pesisir (CSV) Coastal Area Rehabilitation and Conservation Program (CSV)	
3	Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Clean Water and Sanitation Provision Program	
4	Program Penghijauan Greening Program	

No	Program Program	Dokumentasi Documentation
5	Program Penanaman dan Pemberdayaan Mangrove (CSV) Mangrove Planting and Empowerment Program (CSV)	
6	Program Penunjang Pendidikan Education Support Program	
7	Program Kolaborasi TJSL Pendidikan SER Education Collaboration Program	
8	Program Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas Capacity Building Program for People with Disabilities	
9	Program Dukungan Pembangunan Nasional Untuk Pendidikan National Development Support Program for Education	



No	Program Program	Dokumentasi Documentation
10	Program Beasiswa dan Riset Pelindo Pelindo Scholarship and Research Program	
11	Program Pelatihan/Vokasi Bagi Komunitas Pelabuhan (CSV) Training/Vocational Program for Port Communities (CSV)	
12	Penyediaan APD untuk TKBM pada Cabang-Cabang yang akan melaksanakan transformasi operasional Provision of PPE for TKBM in Branches that will carry out operational transformation	
13	Program Mahasiswa Magang Student Internship Program	
14	Program Pelatihan Purnabakti Retirement Training Program	



No	Program Program	Dokumentasi Documentation
15	Penyelenggaraan Seminar, Perhitungan Dampak, dan Publikasi TJSL Organizing SER Seminars, Impact Calculations, and Publications	
16	Program Pelatihan dan Sertifikasi Usaha Business Training and Certification Program	
17	Program Keikutsertaan Pameran Exhibition Participation Program	
18	Program Bantuan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Masyarakat Business and Community Capacity Building Assistance Program	



No	Program Program	Dokumentasi Documentation
19	Program Pengembangan Desa Sejahtera Prosperous Village Development Program	
20	Dukungan Pembangunan Nasional Pengembangan Ekonomi National Development Support for Economic Development	
21	Survei Kepuasan Vendor Vendor Satisfaction Survey	
22	Vendor Award Vendor Award	

No	Program Program	Dokumentasi Documentation
23	Program Pelindo Berbagi dan Peduli Pelindo Sharing and Caring Program	
24	Program Peningkatan Kesehatan dan Imunitas Health and Immunity Improvement Program	
25	Program Tanggap Bencana dan Musibah Disaster and Accident Response Program	
26	Program TJSL Pada Proyek Strategis (CSV) SER Program for Strategic Projects (CSV)	



No	Program Program	Dokumentasi Documentation
27	Bantuan Sarana dan Prasarana Assistance Facilities and Infrastructure	
28	Program Dukungan Pembangunan Nasional Sosial National Social Development Support Program	

KPI PROGRAM TJSL

SER PROGRAM KPIS

Pencapaian *Key Performance Indicator* PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *Key Performance Indicator* Achievement

No	Indikator Indicators	Target Target	Realisasi Realization	Bobot Weight	Nilai Score
1.	Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan metode <i>Social Return on Investment</i> (SROI). Measuring the impact of SER program using the Social Return on Investment (SROI) method.	3 program 3 programs	6 program 6 program	20%	20
2.	Menetapkan kebijakan <i>levelling</i> unit kerja TJSL menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut Establish a leveling policy for SER work units to BOD-1 level or adjust to the results of studies related to this matter.	BOD-2 (dengan kajian) BOD-2 (with study)	BOD-2	20%	20
3.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN. Increasing the use of information technology in the SER program, including to fulfill the filling in of the Ministry of SOE's information technology-based information system.	Lengkap dan tepat waktu Complete and on time	Lengkap dan tepat waktu Complete and on time	20%	20
4.	Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program. Increase collaboration between SOEs and with other parties that match their competence in implementing the SER program, with the aim of increasing positive impact of the program.	3 program 3 programs	11 program 11 programs	20%	20
5.	Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL. Actively involve employee participation in the SER program.	7.106 karyawan 7,106 employees	7.106 karyawan 7,106 employees	20%	20
Total				100%	100

A. Pengukuran SROI
Pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan metode *Social/Return on Investment* (SROI)

A. SROI measurement
Measuring the impact of SER program using the *Social/Return on Investment* (SROI) method

No	Program Program	Skor Score
1	Pengembangan Wisata Desa Budo Budo Village Tourism Development	2,98
2	Pengembangan Wisata Desa Penglipuran Penglipuran Village Tourism Development	3,51 (2021), 3,05 (2022), 10,18 (2023)
3	Pengembangan Kampung Warna-Warni Kampung Warna-Warni Development	4,03
4	Penanganan Sosial Kemasyarakatan Proyek Pembangunan Terminal Kijing Social Handling of Kijing Terminal Construction Project	1,27



No	Program Program	Skor Score
5	Program Gedor Ekspor Gedor Ekspor Program	18,4
6	Program Rumah Belajar JICT JICT House of Learning Program	5,63

B. Program Kolaborasi BUMN

B. Program Kolaborasi BUMN

No.	Nama Program Program Name	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location	Jenis Bantuan Type of Assistance	Jumlah Penerima Manfaat (orang) Number of Beneficiaries (person)	Keterangan Dampak yang diberikan bagi penerima manfaat Description of the impact provided to the beneficiaries
Pelindo sebagai PIC Pelindo as PIC						
1	Kolaborasi Pelita Warna Collaboration	Rp223.760.000 dari Rp473.760.000 Rp223,760,000 out of Rp473,760,000	Jakarta	Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Clean Water and Sanitation Program	390	Dampak Penyelenggaraan Sosialisasi Anti Narkoba Kepada 300 Peserta, Pendampingan Psikologi Untuk 30 Warga Binaan, Pembangunan BUMN Cafe Corner, Pelatihan Marketing untuk 47 Warga Binaan, Optimalisasi Perpustakaan, Bantuan 1 unit Pengolah Air Bersih, Bantuan 1 Set Peralatan Laundry Impact of Anti-Drug Socialization for 300 Participants, Psychological Assistance for 30 Inmates, Construction of SOE Cafe Corner, Marketing Training for 47 Inmates, Library Optimization, Assistance for 1 Clean Water Processing Unit, Assistance for 1 Set of Laundry Equipment
2	Kolaborasi Lingkungan Kawasan Konservasi Raja Ampat Raja Ampat Conservation Area Environmental Collaboration	Rp350.000.000 dari Rp1.550.000.000 Rp350,000,000 out of Rp1,550,000,000	Papua	Program Rehabilitasi dan Konservasi Rehabilitation and Conservation Program	617	50 Media Reef Star Tertanam, 1.500 Propagul Mangrove Tertanam, Renovasi 1 Dermaga, Renovasi 3 MCK, Renovasi 1 Masjid, Pelatihan SDM 2 kali, 50 Reef Star Media Planted, 1,500 Mangrove propagules planted, 1 dock renovated, 3 toilets renovated, 1 mosque renovated, 2 human resource training,

No.	Nama Program Program Name	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location	Jenis Bantuan Type of Assistance	Jumlah Penerima Manfaat (orang) Number of Beneficiaries (person)	Keterangan Dampak yang diberikan bagi penerima manfaat Description of the impact provided to the beneficiaries
3	Kolaborasi Pembangunan P o m p e s Assalafi Al-Fitrah Surabaya Collaboration for the Construction of Assalafi Al-Fitrah Islamic Boarding School, Surabaya	Rp250.000.000 dari Rp1.000.000.000 Rp250,000,000 out of Rp1,000,000,000	Surabaya	Bantuan Sarana dan Prasarana Facilities and Infrastructure Assistance	3.208	Membantu pembangunan Gedung Putra Ponpes Assisting the construction of Boys Islamic Boarding School Building
4	Kolaborasi Bazaar UMKM untuk Indonesia MSME Bazaar Collaboration for Indonesia	Rp1.253.226.353 dari Rp2.506.452.705 Rp1,253,226,353 out of Rp2,506,452,705	Jakarta	Program Keikutsertaan Pameran Exhibition Participation Program	255 UMKM 255 MSMEs	Meningkatkan Pemasaran UMKM Binaan Pelindo dan BRI Improving Marketing of MSMEs Assisted by Pelindo and BRI
Pelindo Sebagai Kolaborator Pelindo as Collaborator						
1	Kolaborasi Dukungan Pembangunan Fasilitas Olahraga Lampung Tengah Collaboration to Support the Development of Sports Facilities in Central Lampung	Rp600.000.000 dari 10.076.751.279 Rp600,000,000 out of 10,076,751,279	Lampung Tengah Central Lampung	Bantuan Sarana dan Prasarana Facilities and Infrastructure Assistance	40.000	Terbangunnya Sentra Fasilitas Olahraga Terbuka di Lampung Tengah Construction of Open Sports Facility Center in Central Lampung
2	Kolaborasi Dukungan Sembako Ramadhan 1444 H Tahun 2023 Collaboration to Support Basic Food Donation for Ramadhan 1444 H in 2023	Rp261.250.000 dari Rp6.270.000.000 Rp261,250,000 out of Rp6,270,000,000			30.000	Terdistribusinya 30.000 Paket Sembako kepada Santri Ponpes di 6 Provinsi Distribution of 30,000 food packages to Students of Islamic Boarding School in 6 provinces



No.	Nama Program Program Name	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location	Jenis Bantuan Type of Assistance	Jumlah Penerima Manfaat (orang) Number of Beneficiaries (person)	Keterangan Dampak yang diberikan bagi penerima manfaat Description of the impact provided to the beneficiaries
3	Kolaborasi Tana Lino II Tana Lino II Collaboration	Rp60.680.000 dari Rp1.708.904.000 Rp60,680,000 out of Rp1,708,904,000	P u l a u Komodo K o m o d o Island	Penunjang Pendidikan Education Support	227	Renovasi Ruang Kelas, Penyediaan Internet, Penyediaan Alat Laboratorium, Pembangunan Lapangan Sekolah, Furnishing Ruang Guru, Renovasi Ruang Kelas dan Rumah Dinas Guru di SDN Komodo serta Pembangunan Sentra Kuliner dan Pelatihan UMKM Pulau Komodo Classroom Renovation, Internet Provision, Laboratory Equipment Provision, School Field Construction, Teacher Room Furnishing and Teacher Office House Renovation at SDN Komodo as well as Culinary Center Construction and Komodo Island MSMEs Training
4	Kolaborasi Teman Tersenyum T e m a n Tersenyum Collaboration	Rp100.000.000 dari Rp1.179.000.000 Rp100,000,000 of Rp1,179,000,000	Temanggung	Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitas Clean Water Supply and Sanitation Program	144	Pipanisasi Air Bersih di Desa Gentan, Penyediaan Sarpras Camping Ground di Desa Rejosari, Bantuan Sarpras Rumah Kemasan di Desa Rejosari, Pembangunan 9 Kios UMKM, Pelatihan Manajemen Bumdes, Pelatihan Digital marketing Clean Water Pipeline in Gentan Village, Provision of Camping Ground Infrastructure in Rejosari Village, Packaging House Infrastructure Assistance in Rejosari Village, Construction of 9 MSMEs Kiosks, Bumdes Management Training, Digital marketing Training
5	Kolaborasi Gotong Royong Pohon G o t o n g Royong Pohon Collaboration	Rp500.000.000 dari Rp9.392.682.113 Rp500,000,000 of Rp9,392,682,113	Jakarta	Program Penanaman Pohon Tree Planting Program	5.323	Penanaman 100.000 bibit Pohon oleh Masyarakat dan Karyawan BUMN Planting of 100,000 Tree seedlings by the Community and SOE Employees

No.	Nama Program Program Name	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location	Jenis Bantuan Type of Assistance	Jumlah Penerima Manfaat (orang) Number of Beneficiaries (person)	Keterangan Dampak yang diberikan bagi penerima manfaat Description of the impact provided to the beneficiaries
6	Kolaborasi Pengelolaan Sampah di Likupang Waste Management Collaboration in Likupang	Rp100.000.000 dari Rp2.123.681.500 Rp100,000,000 from Rp2,123,681,500	Likupang	Pengelolaan Sampah Terintegrasi Integrated Waste Management	50	5.292 Kg Sampah diolah jadi Souvenir, Penjualan Souvenir Sampah Rp26 juta per bulan, kenaikan jumlah wisatawan dari 1.5000 menjadi 1.725 perminggu 5,292 Kg of Waste processed into Souvenirs, Sales of Waste Souvenirs Rp26 million per month, increase in the number of tourists from 1,5000 to 1,725 per week
7	Kolaborasi Tambahan Biaya Pembangunan Landscape BUMN Collaboration on Additional Costs for SOE Landscape Development	Rp813.839.595 dari 10.173.504.556 Rp813,839,595 out of 10,173,504,556	Jakarta	Program Bantuan Sarana dan Prasarana Fasilitas and Infrastruktur Assistance Program	1000+	Revitalisasi Landscape Kementerian BUMN Landscape Revitalization of the Ministry of SOEs

C. *Employee Social Responsibility*
Laporan Pelaksanaan Keikutsertaan Karyawan dan Program TJSL Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

C. *Employee Social Responsibility*
Report on the Implementation of Employee Participation and the Company's SER Program with the following details:

No	Instansi Institution	Jumlah Karyawan Number of Employees
1	Head Office	545
2	Regional 1	269
3	Regional 2	916
4	Regional 3	1.072
5	Regional 4	366
6	Pelindo Jasa Maritim	677
7	Pelindo Solusi Logistik	266
8	Pelindo Terminal Petikemas	2.460
9	Pelindo Multi Terminal	535
Total		7.106



INFORMASI TJSL SESUAI PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-01/MBU/03/2023

SER FULFILLMENT RELATED TO MINISTER OF SOES REGULATION PER-01/
MBU/03/20231

Perseroan telah merancang strategi keberlanjutan yang komprehensif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penerapan program TJSL yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan. Perseroan senantiasa menyusun dan mengimplementasikan program-program TJSL yang mampu membawa manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran program TJSL Perseroan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

The Company has instigated a comprehensive sustainability strategy to support the achievement of sustainable development goals, through SER programs that are more integrated, targeted, with measurable impacts that can be accounted for and form part of the Company's business approach. The Company prepares and implements SER programs that can bring optimal benefits to all stakeholders. The preparation of the work plan and budget for the Company's SER program is guided by the Minister of BUMN Regulation Number: Per-01/MBU/03/2023 dated 3 March 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises.

INFORMASI TJSL SESUAI SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/SEOJK.04/2021

SER FULFILLMENT RELATED TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY CIRCULAR
LETTER No. 16/SEOJK.04/2021

Selain menyusun Laporan TJSL sesuai dengan Standar Kementerian BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021, sebagai bentuk pemenuhan kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Perseroan juga telah menyusun Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun 2022 yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan ini. Laporan Keberlanjutan ini merupakan laporan berkala yang mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Pedoman Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI).

As well as preparing the SER Report in accordance with the Ministry of SOEs Standards in the Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/04/2021, the Company also complies with the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, the Company also prepared a 2022 Company Sustainability Report that was presented separately from the Annual Report. The Sustainability Report is a periodic report that explains the Company's Social and Environmental Responsibility, and is prepared with reference to the Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Issuers or Public Companies Annual Reports and Sustainability Reporting Guidelines (GRI Standards).



Lampiran

Apendix



REFERENSI SILANG SEOJK NO. 16 /SEOJK.04/2021: BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

CROSS-REFERENCE NO. 16/SEOJK.04/2021: FORMAT AND COMPLETING THE ANNUAL REPORT OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan Description	Halaman Page
Ketentuan Umum General Terms	
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
<p>a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.</p>	
<p>b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.</p>	
<p>c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.</p>	
<p>d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publicly-listed Company</p>	
<p>e. Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.</p>	
<p>f. Direksi: Board of Directors:</p>	
<p>» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and</p>	
<p>» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.</p>	
<p>g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:</p>	
<p>» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and</p>	



Keterangan Description	Halaman Page
<p>» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.</p>	
<p>h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:</p>	
<p>» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and</p>	
<p>» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity.</p>	
<p>Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.</p>	
<p>Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.</p>	
<p>Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.</p>	
<p>Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.</p>	
<p>Bentuk Laporan Report Format</p>	
<p>Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.</p>	√
<p>Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.</p>	√
<p>Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.</p>	√



Keterangan Description	Halaman Page
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam <i>Portable Document Format</i> (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	√
Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
a. ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	√
b. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	√
c. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	√
d. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	√
e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	√
f. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	√
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	√
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	√
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	√
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	
Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	
» pendapatan/penjualan; income/sales;	26
» laba bruto; gross profit;	26
» laba (rugi); profit (loss);	27
» jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	27
» total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	27
» jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	28
» laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	28
» jumlah aset; total assets;	24
» jumlah liabilitas; total liabilities;	25
» jumlah ekuitas; total equity;	26



Keterangan Description	Halaman Page
» rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	30
» rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	30
» rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	30
» rasio lancar; current ratio;	30
» rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	30
» rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	30
» informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	30
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	
» saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	
c. jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	34
d. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	
e. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	
f. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	
dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	
a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	
b. rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	
c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	34
d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	
e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	



Keterangan Description	Halaman Page
dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (<i>suspension</i>) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	
dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (<i>delisting</i>).	34
Laporan Direksi Board of Directors' Report	
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
a. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	
» strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	46-48
» peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	46
» proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	46
» perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	48
» kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	50
b. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	51-52
c. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	53-55
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
a. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	59-62
b. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	62-63
c. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	63-68
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	
a. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	76



Keterangan Description	Halaman Page
b. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	
» alamat; address;	78-81
» nomor telepon; telephone number;	
» alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	
» alamat situs web; website address;	
c. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	
d. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	85-86
e. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	87-92
f. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	93
g. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	96-97
h. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	94



Keterangan Description	Halaman Page
<p>i. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:</p> <ul style="list-style-type: none">» nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;» foto terbaru; recent photograph;» usia; age;» kewarganegaraan; nationality;» riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
<p>j. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;</p>	
<p>k. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and</p>	98-107
<p>l. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;</p> <ul style="list-style-type: none">» hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and» perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	



Keterangan Description	Halaman Page
<p>a. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:</p> <ul style="list-style-type: none"> » nama dan jabatan; name and position; » foto terbaru; recent photograph; » usia; age; » kewarganegaraan; nationality; » riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification; » riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on: 	
<p>b. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;</p>	
<p>c. dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;</p>	
<p>d. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and</p>	110-124
<p>e. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;</p> <ul style="list-style-type: none"> » hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; » pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and » perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed; 	
<p>dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;</p>	
<p>jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.</p>	125-128



Keterangan Description	Halaman Page
nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	
persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	129
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	
jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	
informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	130
nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	131-147
kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	150-152
informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbalance hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	152-155



Keterangan Description	Halaman Page
<p>informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:</p> <p>20) information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:</p>	
a. nama dan alamat; name and address;	
b. periode penugasan; assignment period;	
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	
d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	155
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	
<p>Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p> <p>Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/alliances can be presented in tabular form.</p>	
nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	156
Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion	
<p>Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:</p> <p>Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:</p>	
tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	227-233
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	234-237
c. profitabilitas; profitability;	234-237
<p>kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:</p> <p>comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:</p>	
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	247-248, 251-265
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	249-250, 265-274
c. ekuitas; equity;	250-25, 275
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	276-289
e. arus kas; cash flows;	289-292
kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	292-295
tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	295-296



Keterangan Description	Halaman Page
struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	296-297
bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	298
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	298
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	298
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	299
bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	299
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	301
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	299
informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	302
prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	304-307
perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	312-313
b. laba (rugi); profit (loss);	312-313
c. struktur modal (<i>capital structure</i>); atau capital structure; or	313-314
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	307-312, 314-319
target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: 11) targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	321
b. laba (rugi); profit (loss);	321
c. struktur modal (<i>capital structure</i>); capital structure;	322
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	322
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	320-321, 322-326
aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	219-226



Keterangan Description	Halaman Page
uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	333-334
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: 14) realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	334
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	



Keterangan Description	Halaman Page
<p>Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :</p>	
<p>a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;</p>	
<p>b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;</p>	
<p>c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);</p>	
<p>d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;</p>	
<p>e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and</p>	
<p>f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:</p>	
<p>pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>); dan (1) a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and</p>	
<p>peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>); (2) the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;</p>	334-344
<p>untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; g) for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;</p>	
<p>Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.</p>	
<p>untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; h) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;</p>	
<p>dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;</p>	
<p>perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and</p>	344-345
<p>perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).</p>	346-347



Keterangan Description	Halaman Page
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
a. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	
» Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	404-441
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (1) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; (2) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	
b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	
Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	
Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	
a. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	443-450
b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	452-453
c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	456-477
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	476-480
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	
e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	
» prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	481-482
f. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	



Keterangan Description	Halaman Page
Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	483-485
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	487-488
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	493-517
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	516-520
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	
» prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	521-539
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	
» pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and	
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	
» prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	540
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
a. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	544
b. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	
» prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	545
» struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	546



Keterangan Description	Halaman Page
<ul style="list-style-type: none"> » besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form. 	547-550
<p>Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:</p>	
a. nama; name;	N/A
b. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	
c. periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	
d. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	
e. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	
<p>Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:</p>	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	556-558
b. usia; age;	
c. kewarganegaraan; nationality;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
<ul style="list-style-type: none"> » dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member; » rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and » pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; 	
f. periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	559-560
g. pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	560
i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	561-564
j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	564-565



Keterangan Description	Halaman Page
komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	
b. usia; age;	
c. kewarganegaraan; nationality;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	568-570
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	571-572
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	572
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	566-567
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>); a statement that it has a guideline or charter;	567
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	572-576
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	576-578
m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	
» alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	
» pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;	
komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	



Keterangan Description	Halaman Page
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	
b. usia; age;	
c. riwayat pendidikan; educational history;	
d. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	581-583, 592-596
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
e. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	
f. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	584, 597-598
g. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	585, 598-599
h. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	578-579, 590
i. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	580
j. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	586-589, 600-601
k. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	589-590, 601
Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	
a. nama; name;	
b. domisili; domicile;	
c. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
» dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as company secretary; and	605-606
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	606
f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	606-608



Keterangan Description	Halaman Page
Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	
a. nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	
b. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
» dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	609
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	610-616
e. struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	608
f. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	616-617
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	616
h. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	622-625
uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	639-649
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	649
c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	649
sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	651-653
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	654-664
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	665-666
d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	666
perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	667-670
a. pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	
informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); 14) information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	671



Keterangan Description	Halaman Page
informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: 15) information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	
a. pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	680-681
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	681
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	682-683
uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>); 16) a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	685
a. jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	
b. jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	
uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan a) share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	685
b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	
uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	686-687
b. perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	687-688
c. penanganan pengaduan; complaint handling;	688-689
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	693
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	694
» jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	
» tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints;	



Keterangan Description	Halaman Page
<p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.</p>	
<p>uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:</p>	
<p>a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and</p>	695-703
<p>b. pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;</p>	703
<p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.</p>	
<p>penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:</p>	
<p>a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or</p>	
<p>b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).</p>	707-721
<p>Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.</p>	
<p>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies</p>	
<p>Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at least includes:</p>	
<p>a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;</p>	
<p>b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);</p>	
<p>c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;</p>	
<p>d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;</p>	
<p>e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;</p>	
<p>f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance;</p>	
<p>g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any;</p>	
<p>h. lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and</p>	
<p>tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;</p>	
<p>Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;</p>	
<p>informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:</p>	744-780



Keterangan Description	Halaman Page
<p>a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or</p>	
<p>b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;</p>	
<p>Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;</p>	
<p>Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:</p>	
<p>a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and</p>	
<p>b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;</p>	
<p>Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and</p>	
<p>Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.</p>	
<p>Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report</p>	
<p>Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.</p>	√
<p>Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.</p>	√

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia
dan entitas anaknya/
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia
and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen
Consolidated financial statements
as of December 31, 2023 for the year then ended
with independent auditor's report

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8-264	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTOR'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

- : Arif Suhartono
: Pelabuhan Indonesia (Persero)
: Jl. Yos Sudarso No 9, Kec. Koja,
: Jakarta Utara 14230, Indonesia
: Jl. Tunas Kelapa Raya/167 RT/RW 005/007 Kel.
: Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu
: Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
: 62-21-4301080
: Direktur Utama/President Director

- : Mega Satria
: Pelabuhan Indonesia (Persero)
: Jl. Yos Sudarso No 9, Kec. Koja,
: Jakarta Utara 14230, Indonesia
: Jl. Senayan Blok HH 11/4 RT/RW 003/015 Kel.
: Pondok Pucung Kec. Pondok Aren
: Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
: 62-21-4301080
: Direktur Keuangan/Finance Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2023 and for the year then ended.
2. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, and
b. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control system.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 27 Maret 2024 / March 27, 2024


Arif Suhartono
Direktur Utama/President Director


Mega Satria
Direktur Keuangan/Finance Director





Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024

The Shareholder and the Boards of Commissioners and Directors Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Hal audit utama

Key audit matters

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Akuntansi Lindung Nilai Arus Kas

Penjelasan atas hal audit utama:

Grup memiliki eksposur terhadap risiko mata uang asing dari pendapatan dan utang obligasi serta pinjaman sindikasi dalam mata uang Dolar AS karena mata uang fungsional Grup adalah Rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Juli 2023, Grup menetapkan beberapa hubungan lindung nilai arus kas antara pendapatan kontraktual dan non-kontraktualnya dalam mata uang Dolar AS di masa yang akan datang sebagai item lindung nilai dan utang obligasi dan pinjaman sindikasi dalam mata uang Dolar AS yang ada sebagai instrumen lindung nilai. Tujuannya adalah untuk melindungi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang atas pendapatan yang diterima dalam mata uang Dolar AS dengan utang obligasi dan pinjaman sindikasi yang ada dalam mata uang Dolar AS. Kami menganggap ini sebagai hal audit utama dalam audit tahun berjalan karena kompleksitas yang terkait dengan penerapan akuntansi lindung nilai. Penilaian item lindung nilai dan instrumen lindung nilai, penilaian efektivitas lindung nilai dan cadangan lindung nilai, serta penerapan rebalancing hubungan lindung nilai melibatkan model kuantitatif yang kompleks dan pertimbangan signifikan yang terkait dengan asumsi yang diterapkan dalam akuntansi lindung nilai. Disamping itu, perlakuan akuntansi tersebut menghasilkan dampak yang signifikan terhadap saldo-saldo Grup sebagai akibat dari pemilihan untuk menerapkan akuntansi lindung nilai.

Pengungkapan terkait lindung nilai arus kas disajikan dalam Catatan 2v, 24, 25 dan 47 atas laporan keuangan konsolidasian.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

Cash Flow Hedge Accounting

Description of the key audit matter:

The Group is exposed to foreign currency risk from revenue and bonds payable and syndicated loan in US Dollars because the Group's functional currency is Rupiah. On January 1, 2022 and July 1, 2023, the Group designated several cash flow hedge relationships between its future US Dollars contractual and non-contractual revenues as hedged items and its existing US Dollar bonds payables and syndicated loan as hedging instruments. The objective is to hedge the risk of exchange rate fluctuation on income received in US Dollars with the existing bonds payable and syndicated loan in US Dollars. We consider this as the key audit matter in the current year audit of the consolidated financial statements due to the complexities associated with the application of hedge accounting. The valuation of underlying hedged items and hedging instruments, the assessment of hedge effectiveness and hedge reserve balances, and the application of the rebalancing of hedge relationships involve complex quantitative models and significant judgement associated with the assumptions applied in hedge accounting. Furthermore, the accounting treatment results in a significant impact to the Group balances that arise as a result of the election to apply hedge accounting.

The disclosures related to the cash flow hedge are presented in Notes 2v, 24, 25 and 47 to the consolidated financial statements.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Hal audit utama (lanjutan)

Key audit matters (continued)

Akuntansi Lindung Nilai Arus Kas (lanjutan)

Cash Flow Hedge Accounting (continued)

Respons audit:

Audit response:

Kami memperoleh pemahaman tentang strategi manajemen risiko dan tujuan dilakukannya lindung nilai arus kas, serta memperoleh dokumentasi penetapan hubungan lindung nilai arus kas yang dibuat oleh manajemen dan ahli eksternal yang ditunjuk oleh Grup. Kami menilai independensi, kualifikasi dan obyektivitas dari ahli manajemen eksternal tersebut. Kami mengevaluasi apakah penerapan akuntansi lindung nilai arus kas telah sesuai dengan kriteria kualifikasian dan prinsip-prinsip lainnya dalam akuntansi untuk lindung nilai arus kas sesuai dengan PSAK 71: Instrumen Keuangan. Kami menguji asumsi utama yang digunakan dalam model dan membandingkannya dengan informasi yang diperoleh dari sumber input, analisis historis, informasi yang tersedia untuk umum dan pengetahuan industri. Kami menguji akurasi aritmetika dari model yang digunakan dalam penilaian efektivitas serta penerapan lower-of-test. Kami menilai dan menguji dasar dan penerapan rebalancing atas hubungan lindung nilai. Kami juga mengevaluasi kecukupan pengungkapan mengenai hal ini di dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir.

We obtained an understanding of the risk management strategy and objective in conducting a cash flow hedge and obtained documentation of the cash flow hedge relationships designation prepared by the management and the external expert engaged by the Group. We assessed the independence, qualification, and objectivity of the external management's expert. We evaluated whether the cash flow hedge accounting application is in compliance with the qualifying criteria and other principles in accounting for cash flow hedge in accordance with PSAK 71: Financial Instruments. We tested the key assumptions used in the model and compared them with the information obtained from input sources, historical analysis, publicly available information and industry knowledge. We tested the arithmetical accuracy of the model used for effectiveness assessment as well as the application of lower-of-test. We assessed and challenged the bases and application of the rebalancing of hedge relationships. We also evaluated adequacy of disclosures on this matter in the accompanying consolidated financial statements.

Informasi lain

Other information

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2023 Annual Report ("The Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Other information (continued)

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

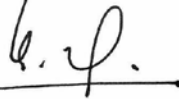
Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

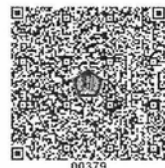
KAP Purwanto, Sungkoro & Surja



Moch. Dadang Syachruna

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/Public Accountant Registration No. AP.0697

27 Maret 2024/March 27, 2024



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	12.491.274.250	4,44,45,46	13.597.640.823	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	3.769.584.376	5,44,45,46	3.943.051.999	<i>Short-term investments</i>
Piutang usaha - neto		6,45,46		<i>Trade receivables - net</i>
Pihak ketiga	1.056.562.835		1.130.425.885	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	291.600.099	44	319.681.316	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain - neto		7,46		<i>Other receivables - net</i>
Pihak ketiga	44.613.085		54.645.010	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	170.985.810	44,45	392.181.781	<i>Related parties</i>
Uang muka dan beban dibayar di muka	208.543.807	8	225.480.260	<i>Advances and prepaid expenses</i>
Pendapatan masih akan diterima		9,46		<i>Accrued revenues</i>
Pihak ketiga	572.269.934		543.670.248	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	152.492.130	44	107.559.957	<i>Related parties</i>
Persediaan	270.428.290	10	276.990.511	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar di muka	1.190.287.684	23a	972.176.643	<i>Prepaid taxes</i>
Aset lancar lainnya	100.458.674	46	56.662.961	<i>Other current assets</i>
Total Aset Lancar	20.319.100.974		21.620.167.394	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi jangka panjang	4.708.437.323	11,46	4.118.791.190	<i>Long-term investment</i>
Properti investasi - neto	1.380.726.349	12	1.233.319.427	<i>Investment properties - net</i>
Aset tetap - neto	40.513.752.433	13	45.033.835.147	<i>Fixed assets - net</i>
Aset kerjasama operasi - neto	358.909.828	14	379.887.734	<i>Joint operation assets - net</i>
Aset hak-guna - neto	454.253.106	16	453.988.347	<i>Right-of-use assets - net</i>
Aset pajak tangguhan	844.098.609	23f	632.879.439	<i>Deferred tax assets</i>
Aset takberwujud - neto	46.882.443.268	15	42.546.542.738	<i>Intangible assets - net</i>
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.348.106.857	23a	1.109.658.955	<i>Estimated claims for tax refund</i>
Aset tidak lancar lainnya	1.531.236.928	17,46	1.221.507.535	<i>Other non-current assets</i>
Total Aset Tidak Lancar	98.021.964.701		96.730.410.512	Total Non-current Assets
TOTAL ASET	118.341.065.675		118.350.577.906	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	3.330.172	18,44,46	105.361.831	Short-term bank loans
Utang usaha		19,46		Trade payables
Pihak ketiga	620.890.592	45	976.563.635	Third parties
Pihak berelasi	636.747.827	44	1.092.012.208	Related parties
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	1.393.628.171	20	1.594.355.077	Short-term unearned revenues
Utang pajak	885.558.244	23b	1.025.273.741	Taxes payable
Beban akrual	5.419.485.908	21,46	5.273.585.288	Accrued expenses
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang				Current maturities of long-term liabilities
Utang obligasi	7.574.312.147	24,45,46	8.637.804.928	Bonds payable
Utang bank	445.526.921	25,45,46	152.606.159	Bank loans
Liabilitas sewa	70.113.816	16,46	49.907.726	Lease liabilities
Liabilitas jangka pendek lainnya		22,46		Other current liabilities
Pihak ketiga	465.350.521		855.825.793	Third parties
Pihak berelasi	659.009.231	44	185.307.298	Related parties
Total Liabilitas Jangka Pendek	18.173.953.550		19.948.603.684	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang obligasi	25.549.740.350	24,45,46	34.116.829.197	Bonds payable
Utang bank	13.901.255.263	25,45,46	7.678.666.058	Bank loans
Liabilitas sewa	417.609.648	16,46	385.228.086	Lease liabilities
Utang lembaga keuangan non-bank		26,46		Loan from non-bank financial institution
Pihak ketiga	697.862.861		584.328.133	Third parties
Pihak berelasi	1.372.013.613	44	1.160.435.133	Related parties
Liabilitas pajak tangguhan	86.843.304	23f	231.128.682	Deferred tax liabilities
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.192.970.146	27	4.544.771.276	Long-term unearned revenue
Liabilitas jangka panjang lainnya	838.428.454	28,44,45,46	1.126.588.038	Other long-term liabilities
Liabilitas imbalan kerja	6.269.173.328	29	5.769.306.844	Employee benefit liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	53.325.896.967		55.597.281.447	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	71.499.850.517		75.545.885.131	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B				Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively
Modal dasar - 156.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 155.999.999 saham Seri B				Authorized capital - 156,000,000 shares as of December 31, 2022 and 2023, consist of: 1 Series A Dwiwarna share and 155,999,999 Series B shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.575.584 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri dari: 1 saham Seri A Dwiwarna dan 40.575.583 saham Seri B	40.575.584.000	30	40.575.584.000	Issued and fully paid - 40,575,584 shares as of December 31, 2023 and 2022 consists of: 1 Series A Dwiwarna share and 40,575,583 Series B shares
Modal donasi	26.825.982	31	26.825.982	Donated capital
Tambahan modal disetor	(33.358.048.450)	32	(33.358.048.450)	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya	1.466.121		1.466.121	Other equity component
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	836.905.071	1b,33	836.905.071	Difference in value of transactions with non-controlling interest
Saldo laba				Retained earnings
Ditetapkan penggunaannya	34.296.140.473		31.900.794.522	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	4.964.897.779		4.915.321.447	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	(2.373.018.577)	35	(3.774.159.697)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	44.970.752.399		41.124.688.996	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali	1.870.462.759	36	1.680.003.779	Non-controlling interests
Ekuitas - neto	46.841.215.158		42.804.692.775	Equity - net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	118.341.065.675		118.350.577.906	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)**

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2023	Catatan/ Notes	2022	
Pendapatan operasi	31.018.217.702	37	29.700.604.135	Operating revenues
Pendapatan konstruksi	2.897.789.567	38	2.397.701.575	Construction revenues
Beban operasi	(24.343.231.471)	39	(23.154.429.191)	Operating expenses
Beban konstruksi	(2.897.789.567)	38	(2.397.701.575)	Construction expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	310.596.193	40	568.645.497	Other operating income - net
LABA USAHA	6.985.582.424		7.114.820.441	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	627.295.432	41	380.490.270	Finance income
Beban keuangan	(2.860.119.853)	42	(2.571.042.968)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi	370.377.560	43	302.615.692	Equity in income of associates
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	5.123.135.563		5.226.883.435	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(515.481.368)	23d	(488.229.302)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	4.607.654.195		4.738.654.133	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(999.545.702)	23d,23e	(958.337.498)	Current
Tangguhan	404.472.770	23d	128.153.222	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN	4.012.581.263		3.908.469.857	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak	9.333.500	35	823.295.840	Remeasurements of defined benefit plans - net off tax
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	108.703.163	35	87.470.875	Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(30.153.334)	1f,35	198.045.650	Exchange differences due to financial statements translation
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	1.313.257.791	35	(2.820.468.471)	Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.413.722.383		2.196.813.751	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)**

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
		2023	Catatan/ Notes	2022
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	3.822.122.283			3.772.545.951
Kepentingan nonpengendali	190.458.980	2c,36		135.923.906
LABA TAHUN BERJALAN	4.012.581.263			3.908.469.857
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	5.223.263.403			2.060.889.845
Kepentingan nonpengendali	190.458.980	2c,36		135.923.906
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.413.722.383			2.196.813.751
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	94.198	2w		92.976
				BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh)	92.990	2w		91.783
				DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,				
	2023	Catatan/ Notes	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	35.444.805.305		31.671.281.588	Cash receipts from customers
Penerimaan pendapatan bunga	147.125.596		132.629.570	Receipt of interest income
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(15.326.373.675)		(14.592.877.976)	Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(6.373.858.615)		(5.662.070.239)	Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(1.187.161.753)		(1.396.604.110)	Payment for income taxes
Penerimaan (pembayaran) pajak	(179.477.232)		949.549.254	Tax receipt (payment)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	12.525.059.626		11.101.908.087	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pencairan investasi jangka pendek	653.637.459		2.245.190.808	Withdrawal of short-term investments
Penerimaan dividen	469.784.726		366.126.855	Receipt of dividend
Hasil penjualan aset tetap	3.736.904		37.117.004	Proceed on sales assets
Perolehan aset tetap, properti investasi dan aset takberwujud	(7.371.717.546)		(6.511.011.701)	Acquisition of fixed assets, investment properties and intangible assets
Penyertaan saham	(40.970.691)		(395.591.435)	Investment in shares
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(6.285.529.148)		(4.258.168.469)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	8.513.257.386	53	1.983.144.166	Receipt of loans
Pembayaran pinjaman bank dan utang obligasi	(11.074.117.654)	53	(4.221.618.857)	Payment of bank loans and bonds payable
Pembayaran bunga	(2.854.269.807)		(2.512.723.161)	Interest payment
Pembayaran dividen	(1.453.964.849)		(1.316.854.000)	Payment of dividend
Pembayaran liabilitas sewa	(417.597.215)	16,53	(138.892.333)	Payments of lease liabilities
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(7.286.692.139)		(6.206.944.185)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(1.047.161.661)		636.795.433	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(59.204.912)		38.456.803	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	13.597.640.823	4	12.922.388.587	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	12.491.274.250	4	13.597.640.823	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" atau "Pelindo II") ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian BUMN pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No.2 Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 9 Februari 2022 tentang perubahan struktur permodalan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-0014773.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" or "Pelindo II") ("the Company" or "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on PP No. 57 of 1991, Perum Pelabuhan II underwent a transfer of form to become a Limited Liability Company (Persero). As a follow-up to the PP, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Deed of Notary Imas Fatimah, S.H., No. 3 dated December 1, 1992. This establishment deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by Decree no. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the formation of the Ministry of SOE in 1998, the Company has been under the guidance of the Ministry of BUMN. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No.2 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated February 9, 2022 regarding changes in capital structure and changes to the Articles of Association of the Company. The Deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-0014773.AH.01.02 Tahun 2022 dated March 1, 2022.

Based on the Notarial Deed No. 09 dated August 21, 2019, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs to changes the type of shares which originally without series, changed to be consisted of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta 14230, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") melakukan penggabungan ke dalam Perusahaan, dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1g).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, information technology services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Gedung Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta 14230, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

On October 1, 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") merged to the Company, with the Company as the surviving entity (Note 1g).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Sehubungan dengan penggabungan tersebut di atas, Perusahaan mengelola 4 (empat) Regional yang terdiri dari:

Regional 1

Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Regional 1 memiliki 10 (sepuluh) pelabuhan cabang yang terdiri dari Belawan, Dumai, Tanjungpinang, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Tembilahan, Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, dan Kuala Tanjung.

Regional 2

Regional 2 mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari Tanjung Priok, Banten, Panjang, Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi, Cirebon, Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan Tanjung Pandan.

Regional 3

Regional 3 mengelola 3 (tiga) kantor sub-regional yang meliputi 16 (enam belas) Terminal Pelabuhan (Cabang) yang terdiri dari:

<u>Sub-regional</u>	<u>Cabang/Branch</u>
Jawa	Tegal, Kalimas, GSN, Kaliangget, dan/and Tanjung Tembaga
Bali Nusra	Benoa, Bima, Celukan Bawang, Maumere, Waingapu, Kalabahi, Ende-IPPI, dan/and Labuan Bajo
Kalimantan	Kotabaru, Pulang Pisau, dan/and Batulicin

Regional 4

Regional 4 mengelola 19 (sembilan belas) cabang yang terdiri dari Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bitung, Sorong, Ambon, Jayapura, Tarakan, Pantoloan, Kendari, Bontang, Nunukan, Biak, Manokwari, Tanjung Redeb, Gorontalo, Tolitoli, Fakfak dan Manado.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

In relation to the merger as mentioned above, the Company manages 4 (four) Regions as follows:

Region 1

In providing its services, Region 1 has 13 (thirteen) port branches as follows Belawan, Dumai, Tanjungpinang, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Tembilahan, Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, and Kuala Tanjung.

Region 2

Region 2 manages 12 (twelve) Port Branches as follows Tanjung Priok, Banten, Panjang, Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi, Cirebon, Pangkal Balam, Sunda Kelapa and Tanjung Pandan.

Region 3

Region 3 manages 3 (three) regional offices which includes 16 (sixteen) Port Terminals (Branches) as follows:

<u>Sub-region</u>
Java
Bali Nusra
Kalimantan

Region 4

Region 4 manages 19 (nineteen) branches as follows Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bitung, Sorong, Ambon, Jayapura, Tarakan, Pantoloan, Kendari, Bontang, Nunukan, Biak, Manokwari, Tanjung Redeb, Gorontalo, Tolitoli, Fakfak and Manado.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tanggal 7 Mei 2008.
- b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015.
- c. Surat Menteri Perhubungan No. HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).
- d. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan No. 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 121 Tahun 2018.
- f. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 166 Tahun 2015.
- g. Peraturan Menteri Perhubungan No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- h. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- i. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP").

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations:

- a. Act No. 17 Tahun 2008 regarding Shipping dated May 7, 2008.
- b. Government Regulation No. 61 Tahun 2009 regarding Port dated October 20, 2009, as amended by Government Regulation No. 64 Year 2015.
- c. Minister of Transportation's Letter No. HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No. 17 Tahun 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).
- d. Government Regulation No. 15 Tahun 2016 regarding Type and Tariff on Non-Tax Revenues types that apply to the Ministry of Transportation.
- e. Regulation of the Minister of Transportation No. 72 Tahun 2017 on Types, Structures, Classes, and Mechanisms for Determining Port Services Rates as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 121 Tahun 2018.
- f. Regulation of the Minister of Transportation No. 15 Tahun 2015 on Concessions and Other Forms of Cooperation between the Government and Business Entity Ports Sector as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 166 Tahun 2015.
- g. Regulation of the Minister of Transportation No. 57 Tahun 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation No. 51 Tahun 2015 concerning the Operation of Seaports.
- h. Regulation of the Minister of Transportation No. 77 Tahun 2016 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax Revenue that apply At the Directorate General of Sea Transportation.
- i. Decree of the Minister of Transportation of Republic Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 dated March 2, 2011 regarding issuance of business permit to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a Port Operation Entity ("BUP").

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

- j. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 936 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai BUP.
- k. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- l. Keputusan Menteri Perhubungan No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP").
- m. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 603 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- n. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.
- o. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 730 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- p. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ("NIB") kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan tanggal 25 September 2018.
- q. Perjanjian konsesi (Catatan 48).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations: (continued)

- j. Decision of Minister of Transportation No. KP 936 Tahun 2012 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as BUP.
- k. Decision of Minister of Transportation No. KP 1121 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- l. Decree of Minister of Transportation No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as Port Operation Entity ("BUP").
- m. Decree of Minister of Transportation No. KP 603 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- n. Decision of Minister of Transportation No. KP 27 Tahun 2011 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) as Port Operation Entity.
- o. Decision of Minister of Transportation No. KP 730 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- p. The Government of the Republic of Indonesia c.q OSS Organizing Management Institution based on the provisions of Article 24 paragraph 1 of government regulation number 24 year 2018 concerning electronic integrated business licensing services ("NIB") to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which are set on September 25, 2018.
- q. Concession agreement (Note 48).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit,
Sekretaris Perusahaan dan Karyawan**

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-34/MBU/02/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No.11 tanggal 14 Maret 2023 dan SK-101/MBU/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No.01 tanggal 5 Juni 2023, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

31 Desember 2023

Dewan Komisaris

Plt. Komisaris Utama/
Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Agus Suhartono
Sudung Situmorang
Arif Toha Tjahjagama
Didi Sumedi
Jodi Mahardi
Heru Sukanto
Muchtari Luthfi Mutty

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum
Direktur Strategi
Direktur Investasi
Direktur Pengelola

Arif Suhartono
Hambra
Mega Satria
Ihsanuddin Usman
Prasetyo
Boy Robyanto
Putut Sri Muljanto

1. GENERAL (continued)

**b. Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee, Corporate Secretary and
Employees**

Board of Commissioners and Directors

Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-34/MBU/02/2023 dated February 22, 2023 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.11 dated March 14, 2023 and No. SK 101/MBU/05/2023 dated May 19, 2023 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.01 dated June 05, 2023, the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commissioners and Directors as follows:

December 31, 2023

Board of Commissioners

Acting President/Independent
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Directors

President Director
Vice President Director
Director of Finance
Director of Human Resources and
General Affair
Strategy Director
Investment Director
Managing Director

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-206/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No. 15 tanggal 17 Oktober 2022, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:
31 Desember 2022

Dewan Komisaris

Plt. Komisaris Utama/
Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Marsetio
Arif Toha Tjahjagama
Didi Sumedi
Sudung Situmorang
Antonius Rainier Haryanto
Heru Sukanto
Muchtar Luthfi Mutty

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko
Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum
Direktur Strategi
Direktur Investasi
Direktur Pengelola

Arif Suhartono
Hambra
Mega Satria
Ihsanuddin Usman
Prasetyo
Boy Robyanto
Putut Sri Muljanto

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota

Heru Sukanto
Didi Sumedi
Ahmad Zakie Mubarrok
Sofia Chairunnisa

Sekretaris Perusahaan

Ali Mulyono

Karyawan

Total karyawan tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 9.494 dan 9.790 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Board of Commissioners and Directors (continued)

Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-206/MBU/09/2022 dated September 20, 2022 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.15 dated October 17, 2022, the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commissioners and Directors as follows:
December 31, 2022

Board of Commissioners

Acting President/Independent
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Directors

President Director
Vice President Director
Director of Finance and Risk
Management
Director of Human Resources and
General Affair
Strategy Director
Investment Director
Managing Director

Audit Committee and Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Audit Committee

Head
Deputy Head
Member
Member

Corporate Secretary

Employees

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2023 and 2022 are 9,494 and 9,790 employees, respectively (unaudited).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/% Ownership		Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022		31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022
<u>Kepemilikan langsung/ Direct ownership</u>							
PT Pelindo Terminal Petikemas ("SPTP")	Surabaya	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim/ Provision and operation of maritime services	99,99%	99,99%	2013	18.713.691.972	14.978.153.302
PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")	Makassar	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim/ Provision and operation of maritime services	99,99%	99,99%	2021	5.845.836.809	4.824.128.424
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	Medan	Pelayanan jasa terminal non-petikemas/ Non-container terminal services	99,98%	99,98%	2021	4.316.987.722	4.483.925.777
PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL")	Jakarta	Jasa logistik/Logistic services	99,98%	99,98%	2021	19.226.350.194	19.171.437.957
PT Prima Husada Cipta Medan ("PHCM")	Medan	Layanan jasa kesehatan/ Health care services	99,69%	99,69%	2016	57.449.938	59.751.417
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDI")	Jakarta	Sistem informasi/ Information system	51,00%	51,00%	1995	39.517.393	48.170.376
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Jakarta	Investasi pasar modal dan konsultan bisnis/ Investment in stock exchange and business consultant	99,00%	99,00%	2017	1.136.182.103	1.083.767.903
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	Jakarta	Sistem informasi/ Information system	99,00%	99,00%	2012	312.341.922	256.625.377
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Jakarta	Jasa pelatihan dan pendidikan maritim dan logistik/Maritime and logistic education services	99,00%	99,00%	2013	130.534.953	144.527.982
PT Pelindo Daya Sejahtera ("PDS")	Surabaya	Layanan penyedia jasa tenaga kerja/ Human resources services	90,00%	90,00%	2008	318.619.082	357.487.370
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership</u>							
<u>Dimiliki melalui/Owned through SPTP</u>							
PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/ Container and multicargo terminal	99,00%	99,00%	2013	1.657.747.317	1.504.100.163
PT Prima Terminal Petikemas ("PTP1")	Medan	Layanan terminal petikemas/ Container port services	99,70%	100,00%	2013	3.219.526.261	3.128.596.698
PT Terminal Teluk Lamong ("TTL")	Surabaya	Layanan terminal petikemas dan curah kering/ Container And dry bulk port services	99,50%	99,50%	2013	784.217.141	767.009.334
PT Terminal Petikemas Surabaya ("TPS")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/ Container port services	99,50%	99,50%	1999	2.533.702.957	2.444.133.471
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/ Container port services	96,84%	96,84%	2002	5.090.674.893	5.073.110.916
PT Kaltim Kariangau Terminal ("KKT")	Balikpapan	Layanan terminal petikemas/ Container port service	50,00%	50,00%	2012	219.707.058	193.975.803
PT Prima Multi Terminal ("PMT") ^(vi)	Medan	Terminal petikemas dan konvensional/ Container and multicargo terminal	97,73%	97,73%	2014	3.840.359.090	3.705.299.176

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/% Ownership		Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022		31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership (lanjutan/continued)</u>							
<u>Dimiliki melalui/Owned through SPJM</u>							
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Jakarta	Jasa peralatan pelabuhan/Port equipment services	99,00%	99,00%	2012	256.166.225	227.340.873
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("JAI") ⁽ⁱ⁾	Jakarta	Penyedia jasa transportasi laut/ Ship transportation services provider	76,89%	76,89%	2013	1.522.134.613	1.488.208.065
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyedia energi listrik dan air bersih/ Electricity provider and treated water	55,00%	55,00%	2012	202.038.387	182.774.864
PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo")	Jakarta	Pengerukan alur/ Dredging	99,91%	99,91%	1991	322.325.698	381.249.720
PT Pelindo Marine Service ("PMS")	Surabaya	Layanan jasa kapal/ Shipping services	98,23%	98,23%	2011	2.554.757.145	2.136.902.988
PT Equiport Inti Indonesia ("EII")	Makassar	Jasa pemeliharaan/ Maintenance services	99,29%	99,29%	2012	116.621.996	105.766.256
PT Berkah Industri Mesin Angkat ("BIMA") ⁽ⁱⁱ⁾	Surabaya	Jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan/ Port equipment equipment maintenance and repair service	90,00%	90,00%	2015	320.603.667	234.022.019
PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI") ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Surabaya	Penyediaan energi/ Energy provider	99,00%	99,00%	2014	245.375.525	189.725.126
<u>Dimiliki melalui/Owned through SPMT</u>							
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTPR")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/ container and multicargo terminal	99,00%	99,00%	2013	1.071.871.432	1.338.970.877
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") ⁽ⁱ⁾	Jakarta	Terminal kendaraan/ Car terminal	71,28%	71,28%	2012	1.788.314.387	2.191.828.371
PT Terminal Curah Utama ("TCU")	Semarang	Jasa pelayanan curah cair dan gas/Liquid bulk and gas services	51,00%	100,00%	2015	7.558.425	373.224
<u>Dimiliki melalui/Owned through SPSL</u>							
PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")	Jakarta	Penyertaan saham pada proyek Jalan Tol/Investment in Toll and access Road Project	99,68%	99,68%	2014	12.740.434.429	12.501.180.421
PT Menara Maritim Indonesia ("MMI")	Jakarta	Jasa pengelola properti/Building management service	99,99%	99,99%	2018	975.950.321	988.445.644
PT Prima Pengembangan Kawasan ("PPK")	Medan	Pengembangan kawasan/Region developer	90,00%	90,00%	2015	901.110.844	902.622.818
PT Prima Indonesia Logistik ("PIL")	Medan	Jasa logistik/Logistic service	99,67%	99,67%	2014	351.398.270	331.280.719
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI") ⁽ⁱ⁾	Jakarta	Jasa logistik/Logistic services	99,78%	99,00%	2002	870.683.654	908.266.379
PT Nusantara Terminal Services ("NTS") ⁽ⁱⁱ⁾	Makassar	Bongkar muat/Loading unloading	-	99,16%	2013	-	90.774.652
<u>Dimiliki melalui/Owned through PDS</u>							
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera ("TEDS")	Surabaya	Kegiatan tally/ Tally activity	99,00%	99,00%	2014	27.476.852	25.971.645

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/% Ownership		Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022		31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership (lanjutan/continued)</u>							
<u>Dimiliki melalui/Owned through PTPR</u>							
PT Pelindo 3 Terminal Peti Kemas ("P3TPK") ⁽³⁾	Surabaya	Jasa terminal petikemas/ Container port services	100,00%	100,00%	2016	678.882	675.207
<u>Dimiliki melalui/Owned through BJTJ</u>							
PT Berkah Manyar Sejahtera ("BMS")	Surabaya	Layanan terminal/ Port services	60,00%	60,00%	2012	1.832.548.639	1.896.823.463
PT Pelindo Properti Indonesia ("PPI3")	Surabaya	Pengelolaan properti/ Property management	99,93%	99,93%	2014	231.604.656	198.754.433
<u>Dimiliki melalui/Owned through PMS</u>							
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS")	Surabaya	Jasa pengerukan, reklamasi dan pengelolaan alur pelayaran/ Dredging, reclamation service and management of shipping channel	93,00%	93,00%	2014	592.244.676	555.094.927
PT Pelindo Energi Logistik ("PEL")	Surabaya	Perdagangan jasa/ Trading services	98,90%	98,90%	2014	630.154.381	611.636.947
PT Berkah Multi Cargo ("BMC")	Surabaya	Jasa angkutan multi moda/ Multi-modal transportation services	99,80%	99,80%	2015	103.265.557	117.567.958
<u>Dimiliki melalui/Owned through API</u>							
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (Catatan 1d/Note 1d)	Jakarta	Pengelola jalan tol/ Toll road operator	99,998%	99,998%	2006	12.717.009.033	12.443.904.147
<u>Dimiliki melalui/Owned through PIL</u>							
PT Prima Multi Peralatan ("PMP")	Medan	Jasa pemeliharaan dan perbaikan/ Equipment maintenance and repair services	99,00%	99,00%	2019	74.980.484	67.850.590
<u>Dimiliki melalui/Owned through MTI</u>							
PT Intan Sejahtera Utama ("ISMA")	Makassar	Penyediaan jasa ketenagakerjaan/ Employment services provider	99,60%	99,60%	2019	48.518.824	60.384.324

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/% Ownership		Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022		31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership (lanjutan/continued)</u>							
<u>Entitas asosiasi/Associate entities</u>							
PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP") ^(*)	Jakarta	Rumah sakit/ Hospital	32,88%	32,88%	1999	534.797.409	576.419.708
PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")	Banjarmasin	Pengelolaan alur pelayanan Sungai Barito/Management of Shipping Barito River	40,00%	40,00%	2004	190.932.072	176.137.893
PT Jasa Marga Bali Tol ("JBT")	Bali	Pengelolaan jalan tol/ Toll road operator	13,86%	13,86%	2011	1.940.424.000	1.909.164.000
PT Pelindo Husada Citra ("PHC")	Surabaya	Layanan jasa kesehatan/ Health care services	31,73%	31,73%	1999	459.313.800	450.973.393
PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") (Catatan 49e/ Note 49e) ^(*)	Jakarta	Terminal petikemas/ Container terminal	51,00%	51,00%	1999	15.681.892.722	17.437.073.372
<u>Dimiliki melalui/Owned through PTP1</u>							
PT Belawan New Container Terminal (BNCT) ^(*)	Medan	Terminal petikemas/ Container Terminal	51,00%	-	2023	12.331.509	-
<u>Dimiliki melalui/Owned through IPC TPK</u>							
PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") (Catatan 49c/ Note 49c) ^(*)	Jakarta	Terminal petikemas/ Container terminal	51,00%	51,00%	2014	3.614.560.817	3.765.167.657
<u>Dimiliki melalui/Owned through BJT</u>							
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("BKMS")	Surabaya	Pengelolaan kawasan industri JIPE/JIPE industrial estate management	40,00%	40,00%	2012	9.876.598.590	8.068.040.527
PT Terminal Nilam Utara ("TNU")	Surabaya	Layanan terminal curah cair dan gas/ Liquid and gas bulk terminal service	40,00%	40,00%	2013	387.995.130	383.033.880
PT Energi Manyar Sejahtera ("EMS")	Surabaya	Jasa pembangkit listrik/ Power plant service	30,00%	30,00%	2015	1.101.762	1.101.762
PT Prima Citra Nutrisi ("PCN")	Surabaya	Layanan jasa catering/ Catering service	30,00%	30,00%	2016	7.217.153	13.462.006
<u>Dimiliki melalui/Owned through PEL</u>							
PT Lamong Nusantara Gas ("LNG")	Surabaya	Pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian Terminal LNG Jawa Timur/ Development, management and operation of LNG terminal in East Java	49,00%	49,00%	2019	150.358.107	148.980.961
<u>Dimiliki melalui/Owned through PIL</u>							
PT Prima Tangki Indonesia ("PTI")	Medan	Perdagangan dan pergudangan/ Trading and warehousing	20,00%	20,00%	2013	220.351.640	216.768.273

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/% Ownership		Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022		31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022
Operasi Bersama/ Joint Operation							
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja ("TPK Koja") (Catatan 49d/ Note 49d)	Jakarta	Terminal petikemas/ Container terminal	54,91%	54,91%	1994	6.686.387.583	7.100.250.126
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Koja ("MKO MTKI")	Gresik	Terminal kendaraan/ Car terminal	45,00%	45,00%	2015	3.212.745	2.751.810

- i) Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1.
- ii) Pada bulan Desember 2017, JAI menerbitkan saham baru sebanyak 1.215.506.500 saham atau 23% dari modal ditempatkan dan disetor JAI setelah penawaran umum perdana saham JAI di Bursa Efek Indonesia.
- iii) Pada bulan Juli 2018, IKT menerbitkan saham baru sebanyak 509.147.700 saham atau 28% dari modal ditempatkan dan disetor IKT setelah penawaran umum perdana saham IKT di Bursa Efek Indonesia.
- iv) Laporan keuangan BNCT tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan PTP1, karena PTP1 tidak memiliki pengendalian atas BNCT.
- v) Pada tanggal 1 Oktober 2023, MTI menggabungkan diri dengan NTS, dimana MTI sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha.
- vi) Pada tanggal 1 Oktober 2023, terdapat pengalihan 90% saham BIMA milik BJTI kepada SPJM.
- vii) Pada tanggal 1 November 2023, terdapat pengalihan saham LEGI milik TTL kepada SPJM.
- viii) Pada tanggal 30 Januari 2023, terdapat pengalihan 97,73% saham PMT milik Pelindo kepada SPTP.
- ix) Pada tanggal 18 April 2023, terdapat pengalihan 100% saham P3TPK milik TPS kepada PTPR.
- x) Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan mengakuisisi saham JICT dari Hutchison Ports Jakarta Pte Ltd (HPJ) sebanyak 9.300.917 lembar saham sehingga kepemilikan saham JICT oleh Perusahaan menjadi sebesar 51%. Laporan keuangan JICT tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perusahaan karena Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas JICT.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

- i) The financial statements of NPCT1 is not consolidated into IPC TPK's financial statements, due to IPC TPK has no control over NPCT1.
- ii) On December 2017, JAI issued new shares of 1,215,506,500 shares or 23% of JAI's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.
- iii) On July 2018, IKT issued new shares of 509,147,700 shares or 28% of IKT's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.
- iv) The financial statement of BNCT is not consolidated in to PTP1's financial statement, due to PTP1 has no control over BNCT.
- v) On October 1, 2023, MTI agreed to merge with NTS, where the MTI as the surviving entity.
- vi) On October 1, 2023, there was a transfer of 90% of BIMA shares owned by BJTI to SPJM.
- vii) On November 1, 2023, there was a transfer of 99% of LEGI shares owned by TTL to SPJM.
- viii) On January 30, 2023, there was a transfer of 97.73% of PMT shares owned by Pelindo to SPTP.
- ix) On April 18, 2023, there was a transfer of 100% of P3TPK shares owned by TPS to PTPR.
- x) On March 30, 2022, the Company acquired JICT shares from Hutchison Ports Jakarta Pte Ltd (HPJ) amounting to 9,300,917 shares, therefore, JICT shares ownership by the Company amounting to 51%. The financial statements of JICT is not consolidated into the Company's financial statements due to the Company has no control over JICT.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru

SPTP

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPTP:

- Saham BJTI sebanyak 1.079.138 lembar saham atau setara dengan 96,84% dengan nilai nominal Rp1.079.138.000.000 (nilai penuh).
- Saham TPS sebanyak 254.489.274 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp127.244.637.000 (nilai penuh).
- Saham TTL sebanyak 134.325 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp134.325.000.000 (nilai penuh).
- Saham PTP1 sebanyak 855.724.000 lembar saham atau setara dengan 70,00% dengan nilai nominal Rp855.724.000.000 (nilai penuh).
- Saham KKT sebanyak 125 lembar saham atau setara dengan 50,00% dengan nilai nominal Rp62.500.000 (nilai penuh).
- Saham IPC TPK sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-1048/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPTP menerbitkan 1.079.138 saham baru, 127.244 saham baru, 134.325 saham baru, 855.724 saham baru, 62 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT dan IPC TPK dari Perusahaan kepada SPTP.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares

SPTP

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPTP:

- BJTI shares amounting to 1,079,138 shares or equivalent to 96.84% with nominal value of Rp1,079,138,000,000 (full amount).
- TPS shares amounting to 254,489,274 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp127,244,637,000 (full amount).
- TTL shares amounting to 134,325 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp134,325,000,000 (full amount).
- PTP1 shares amounting to 855,724,000 shares or equivalent to 70.00% with nominal value of Rp855,724,000,000 (full amount).
- KKT shares amounting to 125 shares or equivalent to 50.00% with nominal value of Rp62,500,000 (full amount).
- IPC TPK shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1048/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPTP issued 1,079,138 new shares, 127,244 new shares, 134,325 new shares, 855,724 new shares, 62 new shares and 24,750 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT and IPC TPK shares from the Company to SPTP, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan
Penerbitan Saham Baru (lanjutan)**

SPTP (lanjutan)

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 8 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPTP melakukan penerbitan 5.041.993 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp5.041.993.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPTP. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahukan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232830 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

SPJM

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPJM:

- Saham JAI sebanyak 4.063.504.600 lembar saham atau setara dengan 76,89% dengan nilai nominal Rp406.350.460.000 (nilai penuh).
- Saham JPPI sebanyak 2.475.000 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).
- Saham EII sebanyak 28.050 lembar saham atau setara dengan 99,29% dengan nilai nominal Rp28.050.000.000 (nilai penuh).

1. GENERAL (continued)

**d. Transfer of Shares Ownership and Issuance
of New Shares (continued)**

SPTP (continued)

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 8 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPTP performed issuance of 5,041,993 new shares with nominal value of Rp5,041,993,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPTP. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232830 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

SPJM

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPJM:

- JAI shares amounting to 4,063,504,600 shares or equivalent to 76.89% with nominal value of Rp406,350,460,000 (full amount).
- JPPI shares amounting to 2,475,000 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).
- EII shares amounting to 28,050 shares or equivalent to 99.29% with nominal value of Rp28,050,000,000 (full amount).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPJM (lanjutan)

Pada tanggal 1 November 2023, saham-saham milik TTL dialihkan kepada SPJM:

- Saham LEGI sebanyak 92.109 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp92.109.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPJM:

- Saham EPI sebanyak 2.400.000 lembar saham atau setara dengan 55,00% dengan nilai nominal Rp24.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham PMS sebanyak 305.000.000 lembar saham atau setara dengan 98,23% dengan nilai nominal Rp305.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham Rukindo sebanyak 611.622 lembar saham atau setara dengan 99,91% dengan nilai nominal Rp611.622.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-1050/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPJM menerbitkan 406.350 saham baru, 24.750 saham baru, 28.050 saham baru, 24.000 saham baru, 305.000 saham baru dan 611.622 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham JAI, JPPI, EII, EPI, PMS dan Rukindo dari Perusahaan kepada SPJM.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPJM (continued)

On November 1, 2023, the following shares owned by TTL were transferred to SPJM:

- LEGI shares amounting to 92,109 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp92,109,000,000 (full amount).

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPJM:

- EPI shares amounting to 2,400,000 shares or equivalent to 55.00% with nominal value of Rp24,000,000,000 (full amount).
- PMS shares amounting to 305,000,000 shares or equivalent to 98.23% with nominal value of Rp305,000,000,000 (full amount).
- Rukindo shares amounting to 611,622 shares or equivalent to 99.91% with nominal value of Rp611,622,000,000 (full amount).

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1050/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPJM issued 406,350 new shares, 24,750 new shares, 28,050 new shares, 24,000 new shares, 305,000 new shares and 611,622 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of JAI, JPPI, EII, EPI, PMS and Rukindo shares from the Company to SPJM, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPJM (lanjutan)

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 7 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPJM melakukan penerbitan 1.318.372 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp1.318.372.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPJM. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232879 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

SPMT

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPMT:

- Saham IKT sebanyak 1.296.144.749 lembar saham atau setara dengan 71,28% dengan nilai nominal Rp129.614.474.900 (nilai penuh).
- Saham PTPR sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui surat No. S-1049/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPJM (continued)

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 7 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPJM performed issuance of 1,318,372 new shares with nominal value of Rp1,318,372,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPJM. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232879 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

SPMT

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPMT:

- IKT shares amounting to 1,296,144,749 shares or equivalent to 71.28% with nominal value of Rp129,614,474,900 (full amount).
- PTPR shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1049/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPMT (lanjutan)

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPMT menerbitkan 129.614 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham IKT dan PTPR dari Perusahaan kepada SPMT.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 9 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPMT melakukan penerbitan 1.151.941 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp1.151.941.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPMT. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0002173 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPMT (continued)

In relation to such transfer of right of shares, SPMT issued 129,614 new shares and 24,750 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of IKT and PTPR shares from the Company to SPMT, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 9 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPMT performed issuance of 1,151,941 new shares with nominal value of Rp1,151,941,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPMT. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0002173 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPSL

Pada tanggal 28 Februari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPSL:

- Saham MTI sebanyak 34.283.150 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp17.141.575.000 (nilai penuh).
- Saham NTS sebanyak 60.240 lembar saham atau setara dengan 99,16% dengan nilai nominal Rp60.240.000.000 (nilai penuh).
- Saham PIL sebanyak 204.820 lembar saham atau setara dengan 99,67% dengan nilai nominal Rp204.820.000.000 (nilai penuh).
- Saham PPK sebanyak 759.000 lembar saham atau setara dengan 90,00% dengan nilai nominal Rp759.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham PLI (dahulu SPSL) sebanyak 101.898 lembar saham atau setara dengan 99,90% dengan nilai nominal Rp101.898.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-133/MBU/02/2022 pada tanggal 25 Februari 2022. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPSL menerbitkan 1.714.157 saham baru, 6.024.000 saham baru, 20.482.000 saham baru, 75.900.000 saham baru dan 10.189.800 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham MTI, NTS, PIL, PPK dan PLI dari Perusahaan kepada SPSL.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Maret 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPSL

On February 28, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPSL:

- MTI shares amounting to 34,283,150 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp17,141,575,000 (full amount).
- NTS shares amounting to 60,240 shares or equivalent to 99.16% with nominal value of Rp60,240,000,000 (full amount).
- PIL shares amounting to 204,820 shares or equivalent to 99.67% with nominal value of Rp204,820,000,000 (full amount).
- PPK shares amounting to 759,000 shares or equivalent to 90.00% with nominal value of Rp759,000,000,000 (full amount).
- PLI (formerly SPSL) shares amounting to 101,898 shares or equivalent to 99.90% with nominal value of Rp101,898,000,000 (full amount).

The transfer of shares has been approved by the Ministry SOE through its letter No. S-133/MBU/02/2022 on February 25, 2022. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPSL issued 1,714,157 new shares, 6,024,000 new shares, 20,482,000 new shares, 75,900,000 new shares and 10,189,800 new shares for the Company with nominal value of Rp10,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of MTI, NTS, PIL, PPK and PLI shares from the Company to SPSL, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated March 1, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPSL (lanjutan)

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 6 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPSL melakukan penerbitan 77.270.475 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp772.704.750 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPSL. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232765 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

PTP1

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 26 Juli 2022 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, SPTP mengakuisisi saham seluruh PTP1 milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) masing-masing sebanyak 183.370.000 saham dengan nilai pembelian masing-masing sebesar Rp187.954.250. Dengan demikian, kepemilikan SPTP pada PTP1 mengalami peningkatan dari 70,00% menjadi 100,00%. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0036981 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022.

SPTP telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) pada tanggal 25 Juli 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPSL (continued)

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 6 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPSL performed issuance of 77,270,475 new shares with nominal value of Rp772,704,750 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPSL. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232765 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

PTP1

Based on deed No. 10 dated July 26, 2022 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, SPTP acquired all PTP1 shares owned by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Hutama Karya (Persero) amounting to 183,370,000 shares, respectively, with purchase price of Rp187,954,250, respectively. Therefore, SPTP ownerships in PTP1 increased from 70.00% to 100.00%. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0036981 Year 2022 dated July 26, 2022.

SPTP has made payment of the shares transfer to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Hutama Karya (Persero) on July 25, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

PTP1 (lanjutan)

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto di PTP1 diakui sebagai bagian dari akun "Tambah Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan perhitungan sebagai berikut:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ Amount recognized on transaction	
Peningkatan aset neto	302.382.814	<i>Increase in net assets</i>
Imbalan yang dialihkan	375.908.500	<i>Consideration paid</i>
Tambahan modal disetor	(73.525.686)	<i>Additional paid-in capital</i>

PMT

Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham PMT menyetujui diantaranya:

- Menerima dan menyetujui penambahan modal dasar dari semula Rp3.177.000.000 yang terbagi atas 3.177.000 saham menjadi Rp9.001.395.800 yang terbagi atas 56.077.000 saham, dengan rincian:
 - Saham seri A sejumlah 3.177.000 saham dengan nilai nominal Rp3.177.000.000 (Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham).
 - Saham seri B sejumlah 52.900.000 saham dengan nilai nominal Rp5.824.395.800 (Rp110.102 (nilai penuh) per saham).

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

PTP1 (continued)

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control". The difference between the consideration paid and the carrying amount of the net assets in CTP is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position with calculation as follows:

PMT

Based on the resolution of PMT's Circular Shareholders meeting dated October 24, 2022 concerning Capital Increase and Amendment to the Company's Articles of Association, PMT's shareholders approved among others:

- Received and approved the increase in authorized capital from the original Rp3,177,000,000 divided into 3,177,000 shares to Rp9,001,395,800 divided into 56,077,000 shares, with details:
 - Series A shares totaling 3,177,000 shares with a nominal value of Rp3,177,000,000 (Rp1,000,000 (full amount) per share).
 - Series B shares totaling 52,900,000 shares with a nominal value of Rp5,824,395,800 (Rp110,102 (full amount) per share).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

PMT (lanjutan)

Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham PMT menyetujui diantaranya: (lanjutan)

- Menerima dan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp1.467.360.000 yang terbagi atas 1.467.360 saham menjadi sebesar Rp4.504.361.049 yang terbagi atas 2 klasifikasi saham:
 - Saham seri A (saham preferen) sejumlah 1.467.360 saham dengan nilai nominal Rp1.467.360.000 yang memiliki hak prioritas untuk menerima tahapan pembayaran dividen terlebih dahulu dari saham seri B.
 - Saham seri B (saham biasa) sejumlah 27.583.523 saham dengan nilai nominal Rp3.037.001.049, yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan dan dibayarkan dengan cara konversi pinjaman menjadi modal sebesar Rp466.878.000 dan setoran tunai sebesar Rp2.570.123.049.
- Menerima dan menyetujui pemberian hak put option kepada PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dimana saham seri A yang dimiliki PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan dibeli oleh Perusahaan dengan harga nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham ketika berdasarkan hasil valuasi penilai independen sudah mencapai harga nominal tersebut dan tidak lebih dari 7,5% diatas nominal.

Penerbitan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih sebesar Rp55.682.866 yang timbul atas perubahan nilai buku investasi setelah penerbitan saham baru dicatat sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

PMT (continued)

Based on the resolution of PMT's Circular Shareholders meeting dated October 24, 2022 concerning Capital Increase and Amendment to the Company's Articles of Association, PMT's shareholders approved among others: (continued)

- Received and approved the increase in issued and paid-up capital from the original Rp1,467,360,000 divided into 1,467,360 shares to Rp4,504,361,049 divided into 2 classifications of shares:
 - Series A shares (preferred shares) amounting to 1,467,360 shares with a nominal value of Rp1,467,360,000 which have priority rights to receive dividend payment tranches in advance of series B shares.
 - Series B shares (ordinary shares) totaling 27,583,523 shares with a nominal value of Rp3,037,001,049, all of which were subscribed by the Company and paid by way of conversion of loan into capital amounting to Rp466,878,000 and cash deposit amounting to Rp2,570,123,049.
- Received and approved the granting of put option rights to PT PP (Persero) Tbk and PT Waskita Karya (Persero) Tbk, where the Series A shares owned by PT PP (Persero) Tbk and PT Waskita Karya (Persero) Tbk will be purchased by the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share when the shares reach that value based on independent appraisal valuation and not more than 7.5% above.

The issuance of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control". The difference amounting to Rp55,682,866 resulting from changes in book value of investment after issuance of new shares is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

TCS

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 Desember 2022 dari Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, SPMT mengakuisisi seluruh saham TCS milik BJTI dan PT Andahanesa Abadi masing-masing sebanyak 1.020 lembar saham dan 980 lembar saham dengan nilai pembelian masing-masing sebesar Rp153.897 dan Rp147.862. Dengan demikian, SPMT memiliki 100% saham TCS. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0088699 tanggal 19 Desember 2022.

SPMT telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada BJTI dan PT Andahanesa Abadi masing-masing pada tanggal 5 Desember 2022 dan 6 Desember 2022.

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 Mei 2023, dari Dewi Sugina Mulyani, Notaris di Jakarta Utara yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-0024425.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Mei 2023 TCS melakukan perubahan data perseroan menjadi PT Terminal Curah Utama ("TCU").

Berdasarkan akta No. 66 tanggal 25 Mei 2023 dari Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, SPMT mengalihkan 980 lembar saham atau 49% kepemilikan atas TCU kepada PT Indonesia Bulk Terminal dengan nilai penjualan sebesar Rp221.794, sehingga kepemilikan SPMT pada TCU menjadi 51%. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09.0121757 tanggal 25 Mei 2023.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

TCS

Based on Deed No. 10, dated December 5, 2022, of Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, SPMT acquired all TCS shares owned by BJTI and PT Andahanesa Abadi amounting to 1,020 shares and 980 shares, respectively, with purchase price of Rp153,897 and Rp147,862, respectively. Therefore, SPMT owned 100% TCS shares. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0088699, dated December 19, 2022.

SPMT has made payment of the shares transfer to BJTI and PT Andahanesa Abadi on December 5, 2022 and December 6, 2022, respectively.

Based on Deed no. 2, dated May 2, 2023 of Dewi Sugina Mulyani, Notary in North Jakarta which was approved by the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-0024425.AH.01.02.TAHUN 2023 dated May 3, 2023 TCS changed the company data to PT Terminal Curah Utama ("TCU").

Based on Deed no. 66 dated May 25, 2023 of Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, SPMT transferred 980 shares or 49% ownership of TCU to PT Indonesia Bulk Terminal with a sales value of Rp221,794, which made SPMT's ownership of TCU became 51%. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09.0121757 dated 25 May 2023.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

P3TPK

Pada tanggal 18 April 2023, PTPR membeli saham PT Pelindo3 Terminal Petikemas (P3TPK) dari PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia (Kopelindo), dengan total 500 saham atau 100% dari total saham P3TPK, dengan skema sebagai berikut:

- Penjualan dan pengalihan 495 saham yang dimiliki oleh TPS
- Penjualan dan pengalihan 5 saham yang dimiliki oleh Kopelindo

TPS dan PTPR sepakat tentang harga pembelian saham sebesar Rp1.351.414 (nilai penuh) per saham, dengan total harga pembelian Rp668.949.930 (nilai penuh) untuk 495 saham. Kopelindo dan PTPR sepakat tentang harga pembelian saham sebesar Rp1.351.414 (nilai penuh) per saham, dengan total harga pembelian Rp6.757.070 (nilai penuh) untuk 5 saham.

PTPR telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada TPS dan Kopelindo pada tanggal 28 April 2023.

CTP

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat pada tanggal 21 Juli 2021 dan Akta Jual Beli Saham yang diaktakan dengan akta Notaris Ny. Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn, No. 1 tanggal 1 Oktober 2021, API membeli saham CTP yang dimiliki oleh PT Waskita Toll Road (entitas dibawah pengendalian yang sama dan tidak bersifat sementara) sebanyak 1.386.131 lembar saham yang mewakili 55,00% kepemilikan saham di CTP dengan harga beli sebesar Rp2.445.141.067 sehingga kepemilikan API pada CTP mengalami peningkatan dari 45,00% menjadi 100,00%.

API telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada PT Waskita Toll Road pada tanggal 14 Oktober 2021.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

P3TPK

On April 18, 2023, PTPR purchased shares of PT Pelindo3 Terminal Petikemas from PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) and the Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia (Kopelindo), totaling 500 shares, or 100% of the P3TPK total shares, with the following scheme:

- Sale and transfer of 495 shares owned by TPS
- Sale and transfer of 5 shares owned by Kopelindo

TPS and PTPR agreed on a share purchase price of Rp1,351,414 (full amount) per share, with a total purchase price of Rp668,949,930 (full amount) for the 495 shares. Kopelindo and PTPR agreed on a share purchase price of Rp1,351,414 (full amount) per share, with a total purchase price of Rp6,757,070 (full amount) for the 5 shares.

PTPR has made payment of the shares transfer to TPS and Kopelindo on April 28, 2023.

CTP

Based on the Conditional Sales and Purchase Agreement on July 21, 2021 and The Deed of Shares Sales and Purchase which notarized by the Notarial Deed of Ny. Hastuti Nainggolan S.H., M.Kn, No. 1 dated October 1 2021, API acquired CTP's shares which owned by PT Waskita Toll Road (an entity under common control and is not temporary) amounted to 1,386,131 shares represents 55.00% shares ownership in CTP at a purchase price of Rp2,445,141,067 which made API's ownership in CTP increased from 45.00% to 100.00%.

API has made payment of the shares transfer to PT Waskita Toll Road on October 14, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan
Penerbitan Saham Baru (lanjutan)**

CTP

Pembelian saham CTP sebesar 55,00% tersebut di atas oleh API memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi penambahan kepemilikan di CTP tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto di CTP diakui sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan perhitungan sebagai berikut:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ Amount recognized on transaction	
Total nilai tercatat aset neto	2.256.810.554	Total carrying amount of net assets
55,00% dari total nilai tercatat aset neto	1.241.245.805	55.00% of total carrying amount of net assets
Peningkatan aset neto	1.241.245.805	Increase in net assets
Imbalan yang dialihkan	2.445.141.067	Consideration paid
Tambahan modal disetor	(1.203.895.262)	Additional paid-in capital

ILCS

Berdasarkan Akta No. 200 tanggal 29 September 2023 dari Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, SPSL menyetujui pengalihan saham ILCS kepada Koperasi Jasa Pegawai Maritim Tanjung Priok sejumlah 101.010 saham atau sebesar 1% dari total keseluruhan saham pada ILCS dengan harga transaksi Rp3.029.299. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0169539 tanggal 3 Oktober 2023.

BNCT

Pada tanggal 23 Juni 2023, PTP1 dan PT INA-DPWorld Investment ("SPS") menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dimana PTP1 dan SPS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebanyak 10.000 lembar saham yang terbagi menjadi 5.100 lembar saham seri A yang dimiliki PTP1 dan 4.900 saham seri B yang dimiliki SPS.

1. GENERAL (continued)

**d. Transfer of Shares Ownership and Issuance
of New Shares (continued)**

CTP

The acquisition of 55.00% CTP's shares by API meet the criteria of business combination entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the increase in ownership of CTP transaction is recognized using the pooling of interest method. The difference between the consideration paid and the carrying amount of the net assets in CTP is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position, with calculation as follows:

ILCS

Based on Deed No. 200, dated September 29, 2023, of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, SPSL agreed to transfer the shares of ILCS to Koperasi Jasa Pegawai Maritim Tanjung Priok amounting to 101,010 shares or 1% of the total shares of ILCS with the purchase price of Rp3,029,299. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0169539 dated October 3, 2023.

BNCT

On June 23, 2023, PTP1 and PT INA-DPWorld Investment ("SPS") signed a Shareholders Agreement wherein PTP1 and SPS will establish a company with total shares amounted 10,000 shares comprising of 5,100 shares owned by PTP1 and 4,900 shares owned by SPS.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

BNCT (lanjutan)

Perusahaan tersebut didirikan dalam rangka pembangunan, pembiayaan, operasi dan pemeliharaan proyek Pelabuhan Belawan sesuai dengan Perjanjian Konstruksi dan Operasi yang telah disepakati.

Jika dalam suatu tahun buku perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan, maka distribusi akan dilakukan pertama untuk SPS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada SPS dan PTP1 sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

Kepemilikan saham PTP1 pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian, oleh karena itu laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan PTP1.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian diatas bernama PT Belawan New Container Terminal ("BNCT") yang didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 September 2023.

e. Mata Uang Pelaporan

Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah, kecuali TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat.

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup adalah Rupiah.

f. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup, laporan keuangan TPK Koja, NPCT1 dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

1. GENERAL (continued)

BNCT (continued)

The company was established for the purpose of construction, financing, operation and maintenance of the Belawan Port project in accordance with the agreed Construction and Operation Agreement.

If in a financial year the company has profits available for distribution, then the distribution will be made first to SPS until the permitted return has been achieved and secondly distributed proportionally to SPS and PTP1 in accordance with their respective ownerships. Other terms and conditions are stipulated in the agreement.

PTP1's ownership in the company established is not followed by control, therefore the financial statements of the company are not consolidated into the PTP1's financial statements.

The company established in relation with the above agreement is PT Belawan New Container Terminal ("BNCT") which was established based on Deed No. 2 dated September 1, 2023.

e. Reporting Currency

The Group's functional currency is Rupiah, except TPK Koja, NPCT1 and JICT which are in United States Dollar.

The presentation currency of the Group's consolidated financial statements is in Rupiah.

f. Translation into Presentation Currency

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of TPK Koja, NPCT1 and JICT were translated to Rupiah currency based on the following:

- Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;
- Income and expenses were translated using the average exchange rate; and
- All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian (lanjutan)

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Saldo awal	502.800.135	304.754.485
Efek penjabaran - neto	24.974.910	198.045.650
Saldo akhir	527.775.045	502.800.135

g. Penggabungan

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") pada tanggal 1 Oktober 2021 mengatur diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yang telah diselenggarakan beserta aset pengusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selanjutnya diselenggarakan dan dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo II;
- Pelindo II wajib melakukan penyesuaian terhadap perizinan, konsesi dan dokumen hukum paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penggabungan;
- Nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Pelindo II ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN.

1. GENERAL (continued)

f. Translation into Presentation Currency (continued)

Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Saldo awal	502.800.135	304.754.485
Efek penjabaran - neto	24.974.910	198.045.650
Saldo akhir	527.775.045	502.800.135

g. Merger

Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 101 Year 2021 regarding the Merger of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") into Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") on October 1, 2021, stipulating among others:

- *Port operational activities that have been carried out along with the operational assets owned or controlled by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are subsequently managed and owned or controlled by Pelindo II;*
- *Pelindo II is required to make adjustments to permits, concessions and legal documents no later than 2 (two) years since the date of merger;*
- *The definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are combined into Pelindo II are determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOE.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tanggal 1 Oktober 2021 dari notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV setuju dan sepakat untuk menggabungkan diri dengan Pelindo II, dimana Pelindo II sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha. Rancangan penggabungan telah disetujui oleh pemegang saham masing-masing perusahaan pada tanggal yang sama sebagai berikut:

- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo I No. 1 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo II No. 2 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo III No. 3 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo IV No. 4 tanggal 1 Oktober 2021.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, seluruh pihak menyetujui penggabungan dengan kondisi diantaranya sebagai berikut:

1. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas dari Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih kepada Pelindo II.
2. Semua izin, konsesi, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.
3. Sejak tanggal efektif, seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.
4. Seluruh pekerja Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV akan menjadi pekerja Pelindo II mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja dan Berita Acara Kesepakatan antara Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV dengan para pengurus serikat pekerja Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV tanggal 24 Juni 2021.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

Based on the Deed of Merger No. 5 dated October 1, 2021 from the notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV agreed to merge with Pelindo II, where Pelindo II as the surviving entity. The plan design of merger was approved by the shareholders of each company on the same date as follows:

- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo I General Shareholders Meeting (GSM) No. 1 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo II General Shareholders Meeting (GSM) No. 2 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo III General Shareholders Meeting (GSM) No. 3 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo IV General Shareholders Meeting (GSM) No. 4 on October 1, 2021.*

Based on the Deed of Merger No. 5, all parties agreed to the merger with the following conditions among others:

1. *All operations, businesses, and activities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
2. *All permits, concessions, facilities, licenses, approvals and utilizations that have been granted by the authorities to Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
3. *Since the effective date, all assets and liabilities owned by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
4. *All Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV workers will become Pelindo II workers in accordance with the provisions of the laws and regulations regarding labor and the Minutes of Agreement between Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV with the management of the Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV labor union on June 24, 2021.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Komposisi modal saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV sebelum dan setelah penggabungan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

Sebelum Penggabungan

Pelindo I

Modal Dasar	Rp6.800.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.700.000.000

Pelindo II

Modal Dasar	Rp4.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.444.029.000

Pelindo III

Modal Dasar	Rp3.200.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp2.218.953.000

Pelindo IV

Modal Dasar	Rp10.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp3.112.085.000

Setelah Penggabungan

Pelindo II

Modal Dasar	Rp33.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp8.475.067.000

Saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV memiliki nilai nominal saham yang sama, yaitu sebesar Rp1.000 per saham. Sehubungan penggabungan, Pelindo II akan menerbitkan saham baru kepada Negara Republik Indonesia sesuai dengan jumlah saham yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia pada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV. Hal ini merupakan nilai sementara atas Pelindo II dimana nilai definitif atas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabung ke dalam Pelindo II akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, dinyatakan bahwa tanggal efektif penggabungan adalah pada saat terbitnya Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pelindo II sehubungan penggabungan, yaitu melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-0014401 tanggal 1 Oktober 2021. Dengan efektifnya penggabungan ini, maka Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selaku perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar demi hukum sejak tanggal tersebut.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

The composition of the share capital of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV before and after the merger are as follows (full amount):

Before Merger

Pelindo I

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

Pelindo II

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

Pelindo III

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

Pelindo IV

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

After Merger

Pelindo II

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

The shares of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV have the same nominal value, which is Rp1,000 per share. In connection with the merger, Pelindo II will issue new shares to the Republic of Indonesia in accordance with the number of shares previously owned by the Republic of Indonesia in Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV. This is a temporary value for Pelindo II where the definitive value for Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are merged into Pelindo II will be determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOEs.

Based on the above Deed of Merger No. 5, it is stated that the effective date of the merger is the date of issuance of the Receipt Notification of the Merger of the Entities from the Minister of Law and Human Rights of Pelindo II in connection with the merger, which is through its letter No. AHU-AH.01.10-0014401 dated October 1, 2021. With the commencement of this merger, Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV as the merging entities are dissolved by law since that date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah menyajikan dampak dari penggabungan tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 7 tanggal 1 Oktober 2021, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya perubahan Anggaran Dasar, logo dan nama Perusahaan dari sebelumnya Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia atau disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021.

Pengalihan aset dan liabilitas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Pelindo II dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berdasarkan PSAK No. 38, pengalihan aset, liabilitas, saham dan/atau instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama.

Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan.

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan konsolidasian selama penggabungan terjadi disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended, have presented the effects of the merger.

Based on the Deed of General Meeting of Shareholders Decision No. 7 dated October 1, 2021, the shareholders approved among others the changes of Article of Association, logo and name of the Company from Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia or abbreviated PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0053936.AH.01.02 dated October 1, 2021.

The transfer of assets and liabilities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to Pelindo II are recorded based on the pooling of interest method in accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination of Entities Under Common Control".

Based on PSAK No. 38, the transfer of assets, liabilities, shares and/or other ownership instruments between entities under common control will not result in a profit or loss for the Company or individual entities that are in the same group.

Because of restructuring transactions between entities under common control do not change the economic substance of the ownership of the assets, liabilities, shares or other ownership instruments that are exchanged, the transferred assets or liabilities must be recorded at their book value using the pooling of interest method.

In applying the pool of interests method, the components of the consolidated financial statements during the merger occurred are presented as if the merger had occurred since the beginning of the earliest presentation period.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Penggabungan tersebut di atas menggunakan nilai buku berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Perubahan kedua atas PMK No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha.

Sesuai dengan peraturan tersebut, manajemen akan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan aset Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Perusahaan. Manajemen berkeyakinan dapat memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut untuk menggunakan nilai buku untuk tujuan perpajakan sehubungan dengan transaksi penggabungan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode pelaporan. Penyesuaian bagian kepentingan Perusahaan atas aset neto Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV, disajikan pada "Ekuitas *Merging Entity*" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019. Laba neto dari entitas yang bergabung dicatat sebagai "Laba Proforma *Merging Entity*" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

Such merger as mentioned above is using book value which based on Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 dated June 4, 2021 regarding Second Amendment on PMK No. 52/PMK.010/2017 regarding The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover and General Director of Tax Regulation No. PER-21/PJ/2021 dated December 9, 2021 regarding Amendment on General Director of Tax Regulation No. PER-03/PJ/2021 regarding Procedures of Proposal and Issuance on Using Book Value for The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover.

In accordance with the regulation, management will submit proposal to General Director of Tax to obtain approval for using book value on the transfers of assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company. Management believes that it can fulfill all requirements as required by such regulation for using book value for tax purposes in relation to the merger.

The consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 have been restated as if the effect of merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV into the Company had occurred since the beginning of the reporting period. The adjustment of the Company's interest in the net assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV is presented in "Merging Entity Equity" in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019. Net income from entities merged are recorded as "Proforma Income from Merging Entity" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Sehubungan dengan telah ditetapkan PP No. 101 tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) serta Surat Direksi Perusahaan (dahulu Pelindo II) tanggal 24 November 2021 tentang Usulan Nilai Kekayaan Definitif Perusahaan, Menteri BUMN menyampaikan usulan nilai kekayaan definitif kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No. S-956/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Usulan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) berdasarkan laporan KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 23 September 2021.

Berdasarkan usulan Menteri BUMN tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusannya No.527/KMK.6/2021 tanggal 29 Desember 2021, menetapkan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh).

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Nomor S-38/MBU/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah diaktakan oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notaris di Jakarta, melalui Akta Nomor 2 tanggal 9 Februari 2022, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya:

- Peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp156.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 156.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).
- Pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 39.131.555 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) sehingga seluruhnya berjumlah Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

In relation to the establishment of PP No. 101 Year 2021 dated October 1, 2021 regarding the merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company (formerly Pelindo II) and the Company's (formerly Pelindo II) Directors Letter dated November 24, 2021 regarding Proposal of Definitive Net Assets Value of the Company, the Minister of SOE delivered proposal of definitive net assets value to Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its letter No. S-956/MBU/12/2021 dated December 14, 2021. Such proposed definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount) based on the report of KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, independent appraisal, dated September 23, 2021.

Based on the proposal of the Minister of SOE as mentioned, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its Decision No.527/KMK.6/2021 dated December 29, 2021 established the definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount).

Based on the decision of the Minister of SOE as the GMS Number S-38/MBU/01/2022 dated January 12, 2022 regarding Changes of Capital Structure and Changes of the Company's Article of Association, which has been notarized by Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notary in Jakarta, through Deed No. 2 dated February 9, 2022, the Company's shareholder approved among others:

- Increase of the Company's authorized capital to Rp156,000,000,000,000 (full amount) divided into 156,000,000 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).
- Issuance/placement of unused shares (portfolio) amounting to 39,131,555 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) totalling to Rp39,131,555,000,000 (full amount) which all taken by the State of The Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Nomor S-38/MBU/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah diaktakan oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notaris di Jakarta, melalui Akta Nomor 2 tanggal 9 Februari 2022, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya: (lanjutan)

- Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh):
 - Sebesar Rp13.378.078.900.000 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo I ke dalam Perusahaan.
 - Sebesar Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo III ke dalam Perusahaan.
 - Sebesar Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo IV ke dalam Perusahaan.
 - Sebesar Rp878.740 (nilai penuh) merupakan setoran modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan.

Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

h. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 27 Maret 2024. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

Based on the decision of the Minister of SOE as the GMS Number S-38/MBU/01/2022 dated January 12, 2022 regarding Changes of Capital Structure and Changes of the Company's Article of Association, which has been notarized by Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notary in Jakarta, through Deed No. 2 dated February 9, 2022, the Company's shareholder approved among others: (continued)

- *Additional capital by the State of The Republic of Indonesia to the Company's shares amounting to Rp39,131,555,000,000 (full amount):*
 - *Amounting to Rp13,378,078,900,000 (full amount) as a result of the merger of Pelindo I to the Company.*
 - *Amounting to Rp17,323,408,459,305 (full amount) as a result of the merger of Pelindo III to the Company.*
 - *Amounting to Rp8,435,066,761,955 (full amount) as a result of the merger of Pelindo IV to the Company.*
 - *Amounting to Rp878,740 (full amount) is a capital injection by the State of The Republic of Indonesia arising from the capitalization of part of the Company's reserves.*

The Deed of changes in Article of Association as mentioned above has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Number AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 dated March 1, 2022

h. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2023 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on March 27, 2024. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b di bawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards of Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan" or "OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Grup, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian *item* apa pun dalam laporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

b. Changes in Accounting Principles

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provide guidance to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments have had an impact on the Group's disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Group's financial statements.

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan -
Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas
Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal**

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Grup beroperasi. Oleh karena itu, Grup masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan -
Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan
Model Pilar Dua**

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tanggahan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in Accounting Principles (continue)

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -
Deferred Tax related to Assets and
Liabilities arising from a Single Transaction**

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

As of December 31, 2023, the Pillar Two income taxes legislation has not yet been enacted or has not yet substantively enacted in Indonesia where the Group operates. Therefore, the Group is still in the process of assessing the potential exposure to Pillar Two income taxes. The potential exposure, if any, to Pillar Two income taxes is currently not known or reasonably estimable.

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -
International Tax Reform - Pillar Two Model
Rules**

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and include:

- An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and
- Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan -
Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan
Model Pilar Dua (lanjutan)**

Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan kemampuan mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, *investor* mengendalikan *investee* jika dan hanya jika *investor* memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in Accounting Principles (continue)

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -
International Tax Reform - Pillar Two Model
Rules (continued)**

The exception - the use of which is required to be disclosed - applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through its power over the *investee*. Thus, the Group controls an *investee* if and only if the Group has all of the following:

- i) Power over the *investee*, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the *investee*,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the *investee*, and
- iii) The ability to use its power over the *investee* to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an *investee*, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an *investee*, including:

- i) The contractual arrangement with the other vote holders of the *investee*,
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Principles of Consolidation (continued)

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Grup menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" (Catatan 1e dan 1f).

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam Grup, kecuali TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat. Tiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset takberwujud dan selisih kurs yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (nilai penuh):

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	15.416	15.731
Euro Eropa (EUR) 1	17.140	16.712
Dolar Singapura (SGD) 1	11.712	11.659

Transaksi dalam mata uang asing lainnya adalah tidak signifikan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" (Note 1e and 1f).

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is also each entity's in the Group functional currency, except KOJA, NPCT1 dan JICT whose functional currency is United States Dollar ("US Dollar"). Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets and foreign exchange difference recognized in other comprehensive income as effective portion of gains and losses on hedging instruments in relation to cash flow hedge.

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2023 and 2022 (full amount):

United States Dollar (USD) 1
European Euro (EUR) 1
Singapore Dollar (SGD) 1

Transactions in other foreign currencies are not significant.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 44. Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam kesepengendalian.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Transactions with Related Parties

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 44. Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

**f. Business Combinations Entities Under
Common Control**

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three (3) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan crane, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

i. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

h. Inventory

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method and specific identification. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

The Group provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

i. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**i. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan
(lanjutan)**

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah salah satu tipe pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**i. Impairment of Non-Financial Assets
(continued)**

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

j. Investment in Associates Entities

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Investasi Grup pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**j. Investment in Associates Entities
(continued)**

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

k. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Grup untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

j. Investment in Associates (continued)

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

k. Investment Properties

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Company has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lives of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Properti Investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya ketika telah dilepaskan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak lagi digunakan secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada periode penghentian pengakuan. Dalam menentukan jumlah imbalan dari penghentian pengakuan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari imbalan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non-kas, dan imbalan yang harus dibayar kepada pembeli (jika ada).

Transfer dilakukan ke (atau dari) properti investasi hanya jika ada perubahan penggunaan. Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, biaya yang diperhitungkan untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi, Grup mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam aset tetap sampai dengan tanggal perubahan penggunaan.

l. Aset Tetap

Seluruh aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

k. Investment Properties (continued)

Investment properties are derecognized either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in profit or loss in the period of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

l. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Subsequent to initial recognition, these assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

1. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Grup dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

<u>Jenis Aset</u>	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	2 - 50
Kapal	4 - 20
Alat fasilitas pelabuhan	2 - 20
Instalasi fasilitas pelabuhan	2 - 50
Jalan dan bangunan	2 - 50
Peralatan	3 - 25
Kendaraan	4 - 5
Emplasemen	3 - 50

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

1. Fixed Assets (continued)

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follow:

<u>Type of Assets</u>
<i>Building and port facilities</i>
<i>Vessels</i>
<i>Port facility equipment</i>
<i>Port facility installation</i>
<i>Roads and building</i>
<i>Equipment</i>
<i>Vehicles</i>
<i>Emplacement</i>

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of these assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

The residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

l. Aset Tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemeliharaan dan perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Aset kerjasama operasi merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset kerjasama operasi dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

m. Sewa

Grup menilai pada saat inisiasi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

l. Fixed Assets (continued)

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major repairs and maintenance is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Land is stated at cost and not depreciated.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Joint operation assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Joint operation assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

m. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Leases (continued)

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Lease (continued)

Lease liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Pengaturan bersama

Grup merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Grup dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Grup mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:

- Ventura bersama: ketika Grup memiliki hak hanya pada aset neto dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Grup memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Grup mempertimbangkan hal-hal berikut:

- struktur pengaturan bersama
- bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- persyaratan pengaturan kontraktual
- ketika relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Grup mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Grup terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Grup kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Joint arrangements

The Group is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Group and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Group classifies its interests in joint arrangements as either:

- Joint ventures: where the Group has rights to only the net assets of the joint arrangement
- Joint operations: where the Group has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Group considers:

- the structure of the joint arrangement
- the legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle
- the contractual terms of the joint arrangement agreement
- any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).

The Group accounts for its interests joint operations by recognising its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

o. Intangible Assets

Intangible assets of the Group consist of concession rights asset, software and deferred charges.

Intangible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dinilai penurunan nilainya setiap kali terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas ditelaah setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi.

Aset Hak Konsesi

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

An intangible asset is derecognized upon disposal (i.e., at the date the recipient obtains control) or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising upon derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss.

Concession Rights Assets

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi terminal pelabuhan dan alur pelayaran diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Grup dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/OP. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/OP pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

The Group records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are port terminal and shipping channel concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of the port terminal and shipping channel. During the construction period, the accumulated port terminal and shipping channel construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") for no consideration.

Concession asset which granted to the Group are transferrable with approval from the Government/OP. These concession assets will be transferred to the Government/OP at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang meliputi biaya pembangunan dermaga, pengadaan tanah dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi Pemeliharaan Terminal

Dalam pengoperasian terminal, Grup mempunyai kewajiban untuk menyerahkan aset pada akhir masa konsesi kepada OP dalam kondisi baik, antara lain dengan melakukan pemeliharaan secara berkala. Provisi pemeliharaan terminal diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - port terminal and shipping channel which includes cost of port development, land acquisition and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets are amortized over the concession period using straight line method.

Provision for Terminal Maintenance

In operating terminal, the Group has the obligation to transfer assets to OP at the end of concession period in good condition, among others by performing regular maintenance. The estimated net provision for terminal maintenance is discounted to its present value that reflects current provision.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya lain yang ditanggung Grup sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi Grup.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

q. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima di muka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

p. Borrowing Cost

Borrowing costs consist of interest expenses and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing funds. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

q. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban**

Grup mengadopsi PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dengan menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah (*5-steps model*) tunggal berbasis prinsip untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan, sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Selain itu, dalam mengadopsi PSAK 72, Grup juga memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pembiayaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengalihan untuk barang atau layanan tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses**

The Group adopted PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers" by providing a comprehensive framework for determining how, when and how much revenue should be recognized. This standard provides a principle-based, single 5-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers, as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

In addition, in adopting PSAK 72, the Group has also chosen to apply practical guidance not to take into account the impact of the financing component when the period between payment for the goods or services promised and the transfer for the goods or services to the customer is less than one year.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk pendapatan pelayanan terminal petikemas, perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik, pelayanan jasa terminal, pelayanan jasa kapal, jasa logistik, pelayanan kesehatan, pendapatan pas pelabuhan, perusahaan peralatan, pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi, pelayanan jasa barang, jasa keuangan, pendapatan dan pendapatan jasa lain-lain.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Grup menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa.

Fitur yang mengindikasikan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal mencakup:

- a. Pada dasarnya entitas bertanggung jawab dalam pemenuhan dan penerimaan;
- b. Entitas memiliki risiko pada inventory sebelum dan sesudah pengalihan kepada pelanggan;
- c. Entitas memiliki keleluasaan dalam menetapkan harga.

Grup telah melakukan analisa atas transaksi penjualan dan menyimpulkan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal pada semua perjanjian pendapatan.

Pada tanggal pelaporan, pendapatan yang sudah diakui namun belum ditagihkan dicatat sebagai "Pendapatan Yang Masih Akan Diterima" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses (continued)**

Below is a summary of the Group's revenue recognition accounting policies for revenue from container services, land, building, water and electricity, terminal services, vessel services, logistic services, medical services, port entry fee, equipment services, network services and consultant of information system, cargo services, financial services, cleaning services and other services.

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Group and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.

The Group assesses its revenue arrangements against certain criteria to determine whether it is acting as principal or agent. The Group acts as the principal if it bears the impact of significant benefits and risks associated with the sale of goods and services.

Features that indicate that the Group is acting as a principal include:

- a. The entity is primarily responsible for fulfillment and acceptability;*
- b. The entity has inventory risk before or after transfer to customer;*
- c. The entity has discretion in setting price.*

The Group has analyzed the sales transaction and concluded that the Group acts as the principal in all revenue agreements.

At reporting date, revenues earned but not yet billed to customer are recorded as "Accrued Income" in the consolidated statement of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

Penghasilan Sewa

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

s. Perpajakan

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses (continued)**

Lease Income

Lease income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

Expenses Recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

s. Taxation

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

- i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Current Tax (continued)

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Corporate Income Tax - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;*
- ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

- i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali: (lanjutan)

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except: (continued)

ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Manfaat pajak yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk pengakuan terpisah pada tanggal tersebut, diakui selanjutnya jika informasi baru tentang fakta dan keadaan berubah. Penyesuaian tersebut diperlakukan sebagai pengurangan *goodwill* (selama tidak melebihi *goodwill*) jika terjadi selama periode pengukuran atau diakui dalam laba rugi.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Tax benefits acquired as part of a business combination, but not satisfying the criteria for separate recognition at that date, are recognised subsequently if new information about facts and circumstances change. The adjustment is either treated as a reduction in goodwill (as long as it does not exceed goodwill) if it was incurred during the measurement period or recognized in profit or loss.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak
Penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Imbalan Pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku.

Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Uncertainty over Income Tax

In accordance with ISAK 34: Uncertainty Over Income Tax Treatments which is effective on January 1, 2019, stated that the recognition and measurement of tax assets and liabilities that contain uncertainty over income tax are determined by considering whether to be treated separately or together, the assumptions used in the examination of tax treatments by the Tax Authorities, consideration the probability that the Tax Authorities will accept uncertain tax treatment and re-consideration or estimation if there is a change in facts and circumstances.

If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is probable, the measurement is in line with income tax fillings. If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is not possible, the Group measures its tax balances using the method that provides the better predict of resolution (i.e. most likely amount or expected value).

Accordingly, management believes that the interpretation did not have a significant impact on the consolidated financial statements.

Post-Employment Benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA).

The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja (lanjutan)

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Employee Benefits

Post-Employment Benefits (continued)

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the *projected-unit-credit* method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the *projected-unit-credit* method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and
- ii) the date the Group recognizes related restructuring costs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- Beban atau penghasilan bunga neto.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat memengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan. Penerapan peraturan tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini.

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Goods Sold" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and
- ii) Net interest expense or income.

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees. The implementation of the new regulation did not result in major changes to the Group's accounting policy and had no material impact on the amounts reported for the current.

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Program Iuran Pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara regular merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") menerbitkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Siaran pers tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS 19*. Grup telah menerapkan siaran pers tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi terkait atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Other long term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Defined Contribution Plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

Changes in Accounting Policy

In April 2022, the Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board ("DSAK IAI") issued a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: *Employee Benefits* which was adopted from IAS 19 *Employee Benefits*. The press release conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS 19*. The Company has adopted the said press release and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Pada tahun-tahun sebelumnya, Grup mengatribusikan imbalan berdasarkan formula imbalan program imbalan pasti berdasarkan masa kerja sejak tanggal pekerja memberikan jasa hingga usia pensiun. Berdasarkan siaran pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) di bulan April 2022, Grup telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk mengatribusikan imbalan berdasarkan program tersebut, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material dibawah program tersebut. Namun, perubahan tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan dan telah dibebankan pada periode berjalan.

u. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (“NWLR”). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2r.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (“SPPB”) dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Changes in Accounting Policy (continued)

In prior years, the Group attribute benefits under the defined benefit plan's benefit formula to periods of service from the date when employees provide their services until their retirement age. Based on the press release of the Board of Financial Accounting Standard (“DSAK”) in April 2022, the Group change the policy for attributing benefits under the plan to the date when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further employee service will lead to no material amount of further benefits under the plan. However, the impact is not material to the financial statements and charged to current period.

u. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss (“FVTPL”). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2r.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are ‘solely payments of principal and interest (“SPPI”) on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLRL).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi pada penyertaan saham dan investasi pada surat utang yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang, aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- Fair value through profit or loss (FVTPL).

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, accrued revenues, investment in share of stocks and investment in bonds under long-term investment, other current assets and other non-current assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

*Aset keuangan pada NWPKL dengan
pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen
utang)*

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang) (lanjutan)

Instrumen utang Grup yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada instrumen utang dengan kuotasi yang termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas).

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments) (continued)

The Group's debt instruments at FVOCI includes investments in quoted debt instruments included under other non-current financial assets.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara tak terbatal pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir;
Atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan berikutnya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
Or
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (forward-looking) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Grup menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut.

Instrumen utang Grup pada NWPKL hanya terdiri dari obligasi kuotasi yang dinilai dalam kategori investasi teratas. Oleh karena itu, dianggap sebagai investasi dengan risiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur KKE pada instrumen tersebut setiap 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak diterbitkan, penyisihan akan didasarkan pada KKE sepanjang umurnya.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, utang bank jangka panjang, utang obligasi, utang lembaga keuangan non-bank, liabilitas jangka panjang lainnya, dan liabilitas sewa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

For debt instruments at FVOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument.

The Group's debt instruments at FVOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category. Therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liability, long-term bank loans, bonds payable, loan from non-bank financial institution, other non-current liabilities, and lease liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

(ii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**v. Instrumen keuangan dan akuntansi
lindung nilai**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup menggunakan instrumen keuangan berupa utang obligasi untuk melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing.

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, lindung nilai diklasifikasikan sebagai lindung nilai arus kas ketika melakukan lindung nilai atas eksposur terhadap variabilitas dalam arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi atau risiko mata uang asing dalam komitmen pasti yang tidak diakui.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**v. Financial instruments and hedge
accounting**

Initial Recognition and Measurement

The Group uses financial instruments in the form of bonds payable to hedge its foreign currency risk.

For the purpose of hedge accounting, hedges are classified as cash flow hedges when hedging the exposure to variability in cash flows that is either attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction or the foreign currency risk in an unrecognized firm commitment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**v. Instrumen keuangan dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Pada saat inisiasi hubungan lindung nilai, Grup secara formal menetapkan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai yang mana ingin diterapkan akuntansi lindung nilai dan tujuan serta strategi manajemen risiko untuk melakukan lindung nilai.

Dokumentasi mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, item lindung nilai, sifat risiko yang dilindung nilai dan bagaimana Grup akan menilai apakah hubungan lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai (termasuk analisis sumber ketidakefektifan lindung nilai dan bagaimana rasio lindung nilai ditentukan). Hubungan lindung nilai memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai jika memenuhi semua persyaratan efektivitas berikut:

- Ada 'hubungan ekonomik' antara item lindung nilai dan instrumen lindung nilai.
- Pengaruh risiko kredit tidak 'mendominasi perubahan nilai' yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut.
- Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama yang dihasilkan dari kuantitas item lindung nilai yang aktual digunakan oleh Grup melindungi nilai sejumlah kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan oleh Grup untuk melindungi sejumlah kuantitas item lindung nilai.

Lindung nilai atas arus kas

Grup menggunakan utang obligasi sebagai lindung nilai dari eksposur risiko mata uang asing dalam pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**v. Financial instruments and hedge
accounting (continued)**

Initial Recognition and Measurement
(continued)

At the inception of a hedge relationship, the Group formally designates and documents the hedge relationship to which it wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge.

The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item, the nature of the risk being hedged and how the Group will assess whether the hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements (including the analysis of sources of hedge ineffectiveness and how the hedge ratio is determined). A hedging relationship qualifies for hedge accounting if it meets all of the following effectiveness requirements:

- There is 'an economic relationship' between the hedged item and the hedging instrument.
- The effect of credit risk does not 'dominate the value changes' that result from that economic relationship.
- The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Group actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the Group actually uses to hedge that quantity of hedged item.

Cash flow hedges

The Group uses bonds payable to hedge its exposure to foreign currency risk for revenues to be received in the future.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**v. Instrumen keuangan dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Bagian yang efektif atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai "Penghasilan komprehensif lain" pada bagian ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif diakui langsung sebagai laba atau rugi. Jumlah akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas dibebankan sebagai laba atau rugi komprehensif ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba neto. Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan maupun kerugian yang ada pada ekuitas saat itu dibebankan sebagai laba atau rugi.

Cadangan lindung nilai atas arus kas disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah antara keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai dan perubahan kumulatif nilai wajar dari item lindung nilai.

w. Laba per Saham

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2023.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun pelaporan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.

Pada tahun 2023 dan 2022, laba per saham dihitung menggunakan total rata-rata tertimbang saham yang beredar setelah terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 1g).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**v. Financial instruments and hedge
accounting (continued)**

Initial Recognition and Measurement
(continued)

The effective portion of changes in the fair value of the financial instruments that are designated and qualified as cash flow hedges are recognized in "Other comprehensive income" and reported to equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss. Amounts accumulated in equity are recycled to profit or loss in the periods in which the hedged item will affect net profit. When a hedging instrument expires, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time is charged to profit or loss.

The cash flow hedge reserve is adjusted to the lower of the cumulative gain or loss on the hedging instrument and the cumulative change in fair value of the hedged item.

w. Earnings per Share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2023.

Diluted earning per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting year, adjusted to assume conversion of all potential dilutive ordinary shares.

On 2023 and 2022, earnings per share is computed using total weighted-average number of shares after the event of business combination of entities under common control (Note 1g).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

x. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisi untuk biaya pembongkaran aset diestimasi berdasarkan beberapa asumsi dan disajikan pada nilai wajar sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku.

y. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

x. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Provision for asset dismantling costs is estimated based on certain assumptions and carried at fair value based on applicable discount rates.

y. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. Segments are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

z. Klasifikasi Lancar dan Tak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- 1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- 2) untuk diperdagangkan,
- 3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- 4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal periode pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

aa. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

z. Current and Non-Current Classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- 1) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- 2) held primarily for the purpose of trading,
- 3) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or
- 4) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no right at the end of reporting period to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

aa. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i) In the principal market for the asset or liability, or
- ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

aa. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) *Level 2* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) *Level 3* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

aa. Fair Value Measurement (continued)

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- ii) *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- iii) *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

aa. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan, terutama aset biologis. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Grup dan penilai eksternal.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

**ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan
Namun Belum Berlaku Efektif**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal 31 Maret 2024:

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

aa. Fair Value Measurement (continued)

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets, in particular, the biological assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Group and external valuers.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**ab. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective**

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of March 31, 2024:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2024

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Amendemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang
dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menanggguhkan pelunasan,
- hak untuk menanggguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menanggguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ab. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

Effective beginning on or after
January 1, 2024

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. Pillar 1 International Financial Accounting Standards,
2. Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),
3. Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and
4. Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities
with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2024 (lanjutan)**

**Amendemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang
dengan Kovenan (lanjutan)**

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif dengan penerapan dini diperkenankan.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

**Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam
Jual Beli dan Sewa-balik**

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

**Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan
Pembiayaan Pemasok**

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amendemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan, namun perlu diungkapkan. Amendemen tersebut diperkirakan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ab. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

**Effective beginning on or after
January 1, 2024 (continued)**

**Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities
with Covenants (continued)**

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 retrospectively with early adoption permitted.

The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

**Amendment of PSAK 73: Lease liability in a
Sale and Leaseback**

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Earlier application is permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

**Amendment of PSAK 2 and PSAK 60: Supplier
Finance Arrangements**

The amendments to PSAK 2 and PSAK 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments will be effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Early adoption is permitted, but will need to be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1
Januari 2025**

PSAK 74: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 74 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 74. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**ac. Dasar Penyajian Informasi Keuangan Entitas
Induk**

Laporan keuangan tersendiri disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Tersendiri" (Catatan 54).

PSAK No. 4 (Revisi 2009) menyatakan bahwa ketika sebuah entitas induk memilih untuk menyajikan laporan keuangan terpisah, laporan keuangan tersebut seharusnya hanya disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan tersendiri yang disajikan oleh entitas induk, di mana investasi dalam entitas anak, entitas asosiasi dan entitas dikendalikan bersama dicatat berdasarkan atas kepemilikan langsung dan bukan berdasarkan hasil yang dilaporkan dan aset neto entitas investasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ab. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

**Effective beginning on or after January 1,
2025**

PSAK 74: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 74 will replace PSAK 62: *Insurance Contracts*. PSAK 74 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

PSAK 74 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 71 and PSAK 72 on or before the date of initial application of PSAK 74. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

**ac. Basis of Preparation of Parent Entity
Financial Information**

The separate financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 4 (Revised 2009), "Consolidated and Separate Financial Statements" (Note 54).

PSAK No. 4 (Revised 2009) provides that when a parent entity chose to present the separate financial statements, such financial statements should only be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent, in which the investments in the subsidiary, associate entity and jointly controlled entity are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**ac. Dasar Penyajian Informasi Keuangan Entitas
Induk (continued)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan informasi keuangan entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak, kecuali untuk investasi pada entitas anak.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2009), entitas induk mencatat investasi pada entitas anak menggunakan metode biaya.

Entitas Induk juga mengakui dividen dari entitas anak dan entitas asosiasi pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ac. Basis of Preparation of Parent Entity
Financial Information (continued)**

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity financial information are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the Company and its subsidiaries consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries.

In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2009), the parent entity recorded the accounting for investments in subsidiaries using cost method.

The Parent Entity also recognizes dividends from subsidiaries and associate in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgements

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian: (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 23.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Grup sebagai penyewa

Grup menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Grup mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Grup menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 16.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements: (continued)

Taxes (continued)

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. Further explanations regarding this account are provided in Note 23.

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Group as lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 16.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak -
Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2u.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Lease term of contracts with renewal and
termination options - the Group as lessee
(continued)

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by complying the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2u.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. ISAK 16 provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Otoritas Pelabuhan ("OP") memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 48).

Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan terminal pelabuhan dan alur pelayaran kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran.

Grup berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Grup diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar dan Rp2.897.789.567 dan Rp2.397.701.575.

Grup mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Grup mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

Kerugian Kredit Ekpektasian untuk Aset Keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekpektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Port Authority ("OP") granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 48).

Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the port terminal and shipping channel free of any form of charges, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the port terminal and shipping channel.

The Group has made judgement that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the year ended December 31, 2023 dan 2022, the Group recognized construction revenue amounting to and Rp2,897,789,567 and Rp2,397,701,575, respectively.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

Expected Credit Loss for Financial Assets

For trade receivables and contract assets, the Group applies practical guidelines in calculating expected credit losses. Accordingly, the Group does not identify changes in credit risk, but rather measures the allowance for losses based on expected credit losses as long as the assets hold at the reporting date. The Group has established a provisioning matrix based on historical data on credit losses, adjusted for specific forward-looking factors related to customers and the economic environment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekpektasian untuk Aset Keuangan
(lanjutan)

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat keteragihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 6 dan 7.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Expected Credit Loss for Financial Assets
(continued)

For debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, the Group applies the simplified method. At each reporting date, the Group evaluates whether a debt instrument is considered to have low credit risk using all available information without undue cost or effort. In conducting this evaluation, the Group reassesses the external credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when the contract payment is more than 30 days in arrears.

The Group evaluates whether there is objective evidence that trade receivables are impaired at the end of each reporting period. Provision for impairment of trade and other receivables is calculated based on the current condition and historical collectibility of trade receivables. These provisions are adjusted periodically to reflect actual and estimated results. Details of the nature and carrying amount of provision for impairment of receivables are disclosed in Notes 6 and 7.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL atas piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk mengelompokkan pelanggan ke segmen yang memiliki pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif *default* yang diamati Grup secara historis. Grup akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi kedepan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah *default* di sektor usaha Grup, tingkat *default* historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi ke depan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang dapat diamati secara historis, taksiran kondisi ekonomi dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual *default* pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset.

Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Group's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Estimate useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2l. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2h, 2j, 2k, 2l, 2o, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 17.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 23.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2s dan 23.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimate useful lives of fixed assets (continued)

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2l. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Group's operations.

Further details are disclosed in Notes 2h, 2j, 2k, 2l, 2o, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 17.

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 23.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2s and 23.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan masing-masing sebesar Rp6.269.173.328 (2022: Rp5.769.306.844) (Catatan 29).

Penyusutan aset hak-guna

Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset hak-guna antara 1 (satu) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental dari Suatu Sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Employee benefits

The measurement of the Group's employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the the period in which they occur.

While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2023, employee benefits liability amounted to Rp6,269,173,328 (2022: Rp5,769,306,844) (Note 29).

Depreciation of right-of-use assets

The costs of right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these leased assets to be within 1 (one) to 33 (thirty three) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Estimating the Incremental Borrowing Rate of a Lease

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental
dari Suatu Sewa (lanjutan)

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Grup yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Grup menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

Amortisasi aset hak konsesi

Grup melakukan amortisasi aset hak konsesi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi pemeliharaan aset konsesi

Provisi pemeliharaan aset konsesi ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk pemeliharaan sehubungan dengan kewajiban penyerahan aset kepada OP dalam kondisi baik pada akhir masa konsesi.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
Kas	5.950.787	39.387.247	Cash on hand
Bank	4.113.239.062	6.321.179.839	Cash in banks
Deposito berjangka	8.372.084.401	7.237.073.737	Time deposits
Total kas dan setara kas	<u>12.491.274.250</u>	<u>13.597.640.823</u>	Total cash and cash equivalents

a. Kas

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
Rupiah	<u>5.950.787</u>	<u>39.387.247</u>	Rupiah

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimating the Incremental Borrowing Rate of a
Lease (continued)

The IBR therefore reflects interest the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Group that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.

Amortization of concession assets

The Group decided to amortized concession assets using straight line method over the concession period.

Provision for concession assets maintenance

Provision for concession assets maintenance will be recorded periodically based on the estimated provision needed for maintenance in relation to the obligation to transfer assets to OP in good condition at the end of concession period.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

a. Cash on hand

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

b. Bank

b. Cash in banks

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	217.830.230	306.183.071	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	60.069.815	58.413.072	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	50.404.689	61.649.190	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.440.426	408.410	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Tbk	1.162.837	-	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank BCA Syariah	1.019.735	736.496	PT Bank BCA Syariah
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	1.742.849	2.539.415	Others (each below Rp1 billion)
Pihak berelasi (Catatan 44a)	3.310.531.140	4.394.220.513	Related parties (Note 44a)
Subtotal	3.645.201.721	4.824.150.167	Sub-total
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.408.090	1.431.311	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	19.137	402.884	Others (each below Rp1 billion)
Pihak berelasi (Catatan 44a)	466.610.114	1.495.195.477	Related parties (Note 44a)
Subtotal	468.037.341	1.497.029.672	Sub-total
Total bank	4.113.239.062	6.321.179.839	Total cash in banks

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	331.000.000	474.600.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia	320.000.000	93.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia
PT Bank Mayapada International Tbk	72.000.000	-	PT Bank Mayapada International Tbk
PT Bank BTPN Tbk	56.000.000	-	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	27.000.000	45.000.000	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	18.600.000	15.100.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	10.000.000	10.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	8.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	5.000.000	5.500.000	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.000.000	2.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	-	45.000.000	PT Bank Permata Tbk
Pihak berelasi (Catatan 44a)	6.304.411.208	6.377.884.801	Related parties (Note 44a)
Subtotal	7.154.011.208	7.068.084.801	Sub-total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Dolar AS:		
Pihak ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.047.611.884	-
Pihak berelasi (Catatan 44a)	170.461.309	168.988.936
Subtotal	1.218.073.193	168.988.936
Total deposito berjangka	8.372.084.401	7.237.073.737

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Rupiah	5,00% - 7,35%	3,21% - 6,00%
Dolar AS	1,15% - 6,90%	0,20% - 4,25%

Rekening bank yang terdiri dari rekening penampungan dijadikan jaminan atas fasilitas kredit bilateral yang diperoleh BMS dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan atas fasilitas pinjaman bank sindikasi yang diperoleh CTP dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, dan PT Bank DKI (Catatan 25).

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Time deposits (continued)

	US Dollar:
	Third parties
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Pihak berelasi (Note 44a)	Related parties (Note 44a)
Sub-total	Sub-total
Total time deposits	Total time deposits

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

The cash in bank consists of escrow account as collateral for bilateral credit facilities from BMS obtained from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk and from syndicated loan obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, and PT Bank DKI (Note 25).

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Deposito berjangka		
Rupiah:		
Pihak ketiga		
PT Bank KB Bukopin Tbk	-	20.000.000
Pihak berelasi (Catatan 44b)	2.675.000.000	1.667.500.000
Dolar AS:		
Pihak berelasi (Catatan 44b)	1.094.582.414	2.255.550.108
Total deposito berjangka	3.769.582.414	3.943.050.108
Efek yang diperdagangkan	1.962	1.891
Total investasi jangka pendek	3.769.584.376	3.943.051.999

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

	Time deposits
	Rupiah:
	Third parties
PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk
Pihak berelasi (Note 44b)	Related parties (Note 44b)
	US Dollar:
Pihak berelasi (Note 44b)	Related parties (Note 44b)
Total time deposits	Total time deposits
Marketable securities	Marketable securities
Total short-term investments	Total short-term investments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

	2023	2022	
Rupiah	4,00% - 7,66%	3,15% - 6,05%	Rupiah
Dolar AS	3,00% - 6,37%	0,30% - 4,15%	US Dollar

Efek yang diperdagangkan merupakan instrumen keuangan dalam bentuk reksadana pasar uang.

5. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)

Time deposits represent deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and were not used as collateral.

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

Marketable securities represent financial instrument in money market mutual funds.

6. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	1.841.322.791	1.929.970.138	Private
Perorangan	22.553.520	11.689.593	Individuals
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(807.313.476)	(811.233.846)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	1.056.562.835	1.130.425.885	Third parties - net
Pihak berelasi	630.076.618	644.413.405	Related parties
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(338.476.519)	(324.732.089)	Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto (Catatan 44c)	291.600.099	319.681.316	Related parties - net (Note 44c)
Total piutang usaha - neto	1.348.162.934	1.450.107.201	Total trade receivables - net

6. TRADE RECEIVABLES

a. By customer

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Rupiah	2.462.924.818	2.501.225.677	Rupiah
Dolar AS	31.018.794	84.847.459	US Dollar
Dolar SG	9.317	-	SG Dollar
Total	2.493.952.929	2.586.073.136	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(1.145.789.995)	(1.135.965.935)	Allowance for impairment
Neto	1.348.162.934	1.450.107.201	Net

b. By currency

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

- c. Mutasi saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Saldo awal	1.135.965.935	1.161.228.927
Penyisihan	66.694.712	57.355.739
Pemulihan	(56.870.652)	(82.618.731)
Saldo akhir	1.145.789.995	1.135.965.935

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Belum jatuh tempo	462.294.078	263.711.508
Lewat jatuh tempo		
1-90 hari	707.857.139	949.936.337
91-180 hari	130.920.890	217.120.498
Lebih dari 180 hari	1.192.880.822	1.155.304.793
Subtotal	2.493.952.929	2.586.073.136
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(1.145.789.995)	(1.135.965.935)
Neto	1.348.162.934	1.450.107.201

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

- c. Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

Beginning balance
Allowance for impairment
Reversal
Ending balance

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

The following table presents the aging analysis of trade receivables.

Not yet overdue
Overdue
1-90 days
91-180 days
More than 180 days
Sub-total
Less:
Allowance for impairment
Net

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Pihak ketiga		
Swasta	91.431.732	105.476.103
Perorangan	7.265.270	7.022.243
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(54.083.917)	(57.853.336)
Pihak ketiga - neto	44.613.085	54.645.010
Pihak berelasi	192.224.567	420.385.729
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(21.238.757)	(28.203.948)
Pihak berelasi - neto (Catatan 44d)	170.985.810	392.181.781
Piutang lain-lain - neto	215.598.895	446.826.791

7. OTHER RECEIVABLES

Third parties
Private
Individuals
Less:
Allowance for impairment
Third parties - net
Related parties
Less:
Allowance for impairment
Related parties - net (Note 44d)
Other receivables - net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal	86.057.284	158.627.341	<i>Beginning balance</i>
Pemulihan tahun berjalan	(10.734.610)	(72.570.057)	<i>Recovery for the year</i>
Saldo akhir	75.322.674	86.057.284	<i>Ending balance</i>

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir tahun pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

7. OTHER RECEIVABLES

The movement in the allowance for impairment of other receivable are as follows:

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting year, the Group's management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Uang muka			<i>Advances</i>
Operasional	98.158.135	101.992.679	<i>Operational</i>
Lain-lain	36.482.420	16.008.986	<i>Others</i>
Subtotal	134.640.555	118.001.665	<i>Sub-total</i>
Beban dibayar di muka			<i>Prepaid expenses</i>
Kerja sama mitra usaha	19.334.188	3.208.355	<i>Partnership</i>
Asuransi	11.707.441	29.205.098	<i>Insurance</i>
Pegawai	10.113.663	24.814.892	<i>Employees</i>
Umum	6.940.539	7.765.609	<i>General</i>
Sewa	4.652.231	22.346.127	<i>Rental</i>
Pemeliharaan	1.263.330	974.611	<i>Maintenance</i>
Lain-lain	19.891.860	19.163.903	<i>Others</i>
Subtotal	73.903.252	107.478.595	<i>Sub-total</i>
Total	208.543.807	225.480.260	<i>Total</i>

8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pihak ketiga	572.269.934	543.670.248	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 44e)	152.492.130	107.559.957	<i>Related parties (Note 44e)</i>
Total	724.762.064	651.230.205	<i>Total</i>

9. ACCRUED REVENUES

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PERSEDIAAN

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Suku cadang	209.207.446	212.364.275	Spareparts
Bahan bakar	63.957.583	67.065.664	Fuels
Alat tulis dan barang cetakan	341.076	188.794	Stationaries and printings
Obat, bahan, dan alat medis	455.367	288.194	Medicines, materials, and medical equipment
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp250 juta)	7.461.249	4.467.560	Others (each below Rp250 million)
Total	281.422.721	284.374.487	Total
Dikurangi: Penyisihan persediaan usang	(10.994.431)	(7.383.976)	Less: Allowance for inventory obsolescence
Neto	270.428.290	276.990.511	Net

10. INVENTORIES

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolescence is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal	7.383.976	8.484.930	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	3.716.227	693.962	Allowance for the year
Penghapusan selama tahun berjalan	(105.772)	(1.794.916)	Write-off during the year
Saldo akhir	10.994.431	7.383.976	Ending balance

11. INVESTASI JANGKA PANJANG

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Investasi pada entitas asosiasi	3.981.210.179	3.483.541.212	Investment in associates entities
Investasi pada penyertaan saham	34.840.893	35.239.244	Investment in share of stocks
Investasi pada surat utang	692.386.251	600.010.734	Investment in bonds
Total	4.708.437.323	4.118.791.190	Total

11. LONG-TERM INVESTMENT

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

11. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

a. Investasi pada entitas asosiasi

a. Investment in associates entities

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Metode ekuitas			Equity method
BKMS	1.593.511.334	1.238.232.578	BKMS
JICT (Catatan 49g)	1.032.753.955	1.029.969.681	JICT (Note 49g)
NPCT1 (Catatan 49c)	456.415.776	483.859.214	NPCT1 (Note 49c)
PHC	117.779.582	96.292.473	PHC
TNU	77.332.921	30.975.946	TNU
LNG	72.857.573	72.322.343	LNG
RSP	62.064.984	46.976.836	RSP
PTI	35.655.696	21.977.341	PTI
Ambapers	33.287.648	29.483.810	Ambapers
BNCT	4.363.877	-	BNCT
JBT	3.684.958	13.911.836	JBT
PCN	230.665	2.186.625	PCN
EMS	330.529	330.529	EMS
NWPKL			FVOCI
PBM IHC	490.940.681	417.022.000	PBM IHC
Total	3.981.210.179	3.483.541.212	Total

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The movements of investments in associates are as follows:

31 Desember/December 31, 2023						
	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas						Equity method
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
JICT	51,00%	249.961.243	297.284.256	485.508.456	1.032.753.955	JICT
PHC	31,73%	45.060.000	73.398.576	(678.994)	117.779.582	PHC
RSP	32,88%	13.706.360	44.867.544	3.491.080	62.064.984	RSP
Ambapers	40,00%	6.000.000	27.062.508	225.140	33.287.648	Ambapers
JBT	13,86%	131.048.000	(127.341.175)	(21.867)	3.684.958	JBT
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	Portek Indonesia
Dimiliki melalui BJTI						Owned through the BJTI
BKMS	40,00%	800.000.000	794.086.991	(575.657)	1.593.511.334	BKMS
TNU	40,00%	68.500.000	8.834.969	(2.048)	77.332.921	TNU
PCN	30,00%	1.500.000	(1.279.704)	10.369	230.665	PCN
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	EMS
Dimiliki melalui IPC TPK						Owned through IPC TPK
NPCT1	51,00%	173.770.056	213.422.503	69.223.217	456.415.776	NPCT1
Dimiliki melalui PMS						Owned through the PMS
LNG	49,00%	71.050.000	1.807.573	-	72.857.573	LNG
Dimiliki melalui PIL						Owned through the PIL
PTI	20,00%	18.000.000	17.655.696	-	35.655.696	PTI
Dimiliki melalui PTP1						Owned through the PTP1
BNCT	51,00%	5.100.000	(736.123)	-	4.363.877	BNCT
NWPKL						FVOCI
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
PBM IHC	6,00%	288.750.000	-	202.190.681	490.940.681	PBM IHC
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	(20.628.000)	-	PT Djakarta Llyod
Total		1.896.044.159	1.346.423.643	738.742.377	3.981.210.179	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2022					
	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas						Equity method
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
JICT	51,00%	249.961.243	289.367.055	490.641.383	1.029.969.681	JICT
PHC	31,73%	45.060.000	51.716.789	(484.316)	96.292.473	PHC
RSP	32,88%	13.706.360	32.446.516	823.960	46.976.836	RSP
Ambapers	40,00%	6.000.000	23.401.854	81.956	29.483.810	Ambapers
JBT	13,86%	131.048.000	(117.082.973)	(53.191)	13.911.836	JBT
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	Portek Indonesia
Dimiliki melalui BJTI						Owned through the BJTI
BKMS	40,00%	800.000.000	438.187.227	45.351	1.238.232.578	BKMS
TNU	40,00%	68.500.000	(37.524.054)	-	30.975.946	TNU
PCN	30,00%	1.500.000	686.625	-	2.186.625	PCN
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	EMS
Dimiliki melalui IPC TPK NPCT1	51,00%	173.770.056	280.432.975	29.656.183	483.859.214	Owned through IPC TPK NPCT1
Dimiliki melalui PMS LNG	49,00%	71.050.000	1.272.343	-	72.322.343	Owned through the PMS LNG
Dimiliki melalui PIL PTI	20,00%	18.000.000	3.977.341	-	21.977.341	Owned through the PIL PTI
NWPKL						FVOCI
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
PBM IHC	6,00%	288.750.000	-	128.272.000	417.022.000	PBM IHC
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	(20.628.000)	-	PT Djakarta Llyod
Total		1.890.944.159	964.241.727	628.355.326	3.483.541.212	Total

b. Investasi pada saham

b. Investment in share of stock

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
NWPKL			FVOCI
PT Astra International Tbk	14.125.000	14.250.000	PT Astra International Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	7.564.936	7.428.876	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.951.368	4.217.832	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	2.076.000	1.236.000	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	6.123.589	8.106.536	Others (each below Rp2 billion)
Total	34.840.893	35.239.244	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

11. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

c. Investasi pada surat utang

c. Investment in bonds

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	68.747.400	57.277.510	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	20.242.500	20.834.400	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	10.866.900	11.799.700	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Samator Indo Gas Tbk	10.450.000	10.715.000	PT Samator Indo Gas Tbk
PT Merdeka Gold Copper Tbk	10.318.000	-	PT Merdeka Gold Copper Tbk
PT Mora Telematika Indonesia Tbk	10.244.000	10.798.250	PT Mora Telematika Indonesia Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	10.190.000	-	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)	10.000.000	10.607.800	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.000.000	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Oki Pulp & Paper Mills	9.996.500	-	PT Oki Pulp & Paper Mills
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	5.222.500	5.175.000	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Medco Power Indonesia	-	50.512.500	PT Medco Power Indonesia
Lain-lain (dalam Reksadana)	40.151.100	-	Others (on Mutual funds)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	475.957.351	422.290.574	Others (each below Rp2 billion)
Total	692.386.251	600.010.734	Total

12. PROPERTI INVESTASI

12. INVESTMENT PROPERTIES

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/
Year Ended December 31, 2023

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	824.489.045	32.227.505	-	6.850.293	863.566.843	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	702.192.357	-	-	37.155.081	739.347.438	Building and port facilities
Jalan dan bangunan	176.269.950	-	-	95.341.149	271.611.099	Roads and buildings
Total	1.702.951.352	32.227.505	-	139.346.523	1.874.525.380	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(437.731.763)	(24.086.699)	-	(128.098)	(461.946.560)	Building and port facilities
Jalan dan bangunan	(30.373.352)	(1.219.002)	-	1.266.693	(30.325.661)	Roads and buildings
Total	(468.105.115)	(25.305.701)	-	1.138.595	(492.272.221)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(1.526.810)	-	-	-	(1.526.810)	Less: Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	1.233.319.427				1.380.726.349	Net carrying value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

12. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/
Year Ended December 31, 2022

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	576.010.187	248.478.858	-	-	824.489.045	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	700.131.110	2.061.247	-	-	702.192.357	Building and port facilities
Jalan dan bangunan	28.074.591	-	-	148.195.359	176.269.950	Roads and buildings
Total	1.304.215.888	250.540.105	-	148.195.359	1.702.951.352	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(416.980.942)	(20.750.821)	-	-	(437.731.763)	Building and port facilities
Jalan dan bangunan	(12.274.158)	(482.441)	-	(17.616.753)	(30.373.352)	Roads and buildings
Total	(429.255.100)	(21.233.262)	-	(17.616.753)	(468.105.115)	Total
Dikurangi:						Less:
Penyisihan penurunan nilai	(1.526.810)	-	-	-	(1.526.810)	Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	873.433.978				1.233.319.427	Net carrying value

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp37.960.742.762 dan Rp36.963.174.503, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas properti investasi.

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi sebesar Rp103.541.622, reklasifikasi aset tetap dalam penyelesaian menjadi properti investasi sebesar Rp38.477.468 dan reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap sebesar Rp1.533.972.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as part of operating expenses.

The fair value of investment properties as of December 31, 2023 and 2022 are calculated amounting to Rp37,960,742,762 and Rp36,963,174,503, respectively, which determined based on Sales Value of Tax Object (NJOP) of the investment properties.

Reclassification as of December 31, 2023 includes reclassification of fixed assets into investment property amounting to Rp103,541,622, reclassification of fixed assets under construction into investment properties amounting to Rp38,477,468 and reclassification of investment property into fixed asset amounting to Rp1,533,972.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/
Year Ended December 31, 2023

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	3.743.932.670	4.569.699	-	(246.269.312)	3.502.233.057	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	20.767.002.876	684.494.266	(883.943)	808.552.993	22.259.166.192	Building and port facilities
Kapal	5.758.866.093	50.705.194	-	154.120.349	5.963.691.636	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	16.649.210.544	408.441.220	(31.986.246)	509.763.156	17.535.428.674	Port facility equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	3.676.364.496	9.969.936	(2.965.259)	16.484.273	3.699.853.446	Port facility installation
Jalan dan bangunan	6.266.749.811	42.361.147	(16.305.516)	295.273.533	6.588.078.975	Roads and buildings
Peralatan	1.535.155.304	17.051.598	(30.479.569)	120.093.244	1.641.820.577	Equipment
Kendaraan	177.809.769	1.899.909	(4.796.426)	5.075.399	179.988.651	Vehicles
Emplasemen	654.521.177	397.876	(858.593)	43.723.352	697.783.812	Emplacement
Subtotal	59.229.612.740	1.219.890.845	(88.275.552)	1.706.816.987	62.068.045.020	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	6.679.813.380	2.118.483.817	(269.438.610)	(5.478.774.636)	3.050.083.951	Construction in progress
Total	65.909.426.120	3.338.374.662	(357.714.162)	(3.771.957.649)	65.118.128.971	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(5.559.755.780)	(1.556.683.145)	445.883	(7.287.673)	(7.123.280.715)	Building and port facilities
Kapal	(2.489.818.281)	(235.548.892)	-	625.689	(2.724.741.484)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(8.190.134.463)	(1.377.728.553)	30.014.833	(20.216.845)	(9.558.065.028)	Port facility equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.324.610.489)	(196.295.985)	2.903.656	15.044.881	(1.502.957.937)	Port facility installation
Jalan dan bangunan	(1.761.782.334)	(247.220.670)	959.725	(5.404.385)	(2.013.447.664)	Roads and buildings
Peralatan	(1.158.052.412)	(122.139.552)	27.283.483	388.148	(1.252.520.333)	Equipment
Kendaraan	(134.142.934)	(13.395.517)	3.927.255	3.172.934	(140.438.262)	Vehicles
Emplasemen	(223.477.580)	(29.594.664)	-	1.508.434	(251.563.810)	Emplacement
Total	(20.841.774.273)	(3.778.606.978)	65.534.835	(12.168.817)	(24.567.015.233)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(33.816.700)	(4.277.605)	733.000	-	(37.361.305)	Less: Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	45.033.835.147				40.513.752.433	Net carrying value

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/
Year Ended December 31, 2022

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	3.403.711.516	6.848.233	-	333.372.921	3.743.932.670	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	19.113.857.430	58.521.316	(2.614.969)	1.597.239.099	20.767.002.876	Building and port facilities
Kapal	5.945.716.876	1.131.369	(5.828.290)	(182.153.862)	5.758.866.093	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	16.712.741.883	31.934.176	(152.712.503)	57.246.988	16.649.210.544	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	3.498.893.462	38.151.166	(1.193.710)	140.513.578	3.676.364.496	Port facility installation
Jalan dan bangunan	5.779.160.164	254.628.539	(6.007.112)	238.968.220	6.266.749.811	Roads and buildings
Peralatan	1.669.392.356	46.793.573	(26.010.299)	(155.020.326)	1.535.155.304	Equipment
Kendaraan	178.116.172	3.552.476	(4.002.888)	144.009	177.809.769	Vehicles
Emplasemen	662.029.394	763.729	-	(8.271.946)	654.521.177	Emplacement
Subtotal	56.963.619.253	442.324.577	(198.369.771)	2.022.038.681	59.229.612.740	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	7.933.244.086	1.516.684.153	(27.116.331)	(2.742.998.528)	6.679.813.380	Construction in progress
Total	64.896.863.339	1.959.008.730	(225.486.102)	(720.959.847)	65.909.426.120	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(4.401.196.283)	(1.063.910.949)	1.570.254	(96.218.802)	(5.559.755.780)	Building and port facilities
Kapal	(2.332.572.149)	(159.853.661)	5.484.195	(2.876.666)	(2.489.818.281)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(7.428.092.453)	(736.070.333)	144.492.420	(170.464.097)	(8.190.134.463)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.154.558.120)	(173.308.240)	830.814	2.425.057	(1.324.610.489)	Port facility installation
Jalan dan bangunan	(1.693.743.550)	(90.397.111)	3.889.623	18.468.704	(1.761.782.334)	Roads and buildings
Peralatan	(1.199.778.545)	(129.120.835)	24.201.233	146.645.735	(1.158.052.412)	Equipment
Kendaraan	(117.378.975)	(9.155.247)	3.251.447	(10.860.159)	(134.142.934)	Vehicles
Emplasemen	(205.674.269)	(24.994.148)	-	7.190.837	(223.477.580)	Emplacement
Total	(18.532.994.344)	(2.386.810.524)	183.719.986	(105.689.391)	(20.841.774.273)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(63.686.073)	-	9.023.472	20.845.901	(33.816.700)	Less: Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	46.300.182.922				45.033.835.147	Net carrying value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mengasuransikan aset tetap sebagai berikut:

31 Desember 2023

Perusahaan Asuransi/ Insurance Company
PT Asuransi Kredit Indonesia
PT Asuransi Tri Pakarta
PT Asuransi Ramayana Tbk
PT MS Amlin
Shipowners Mutual Protection Indemnity Association
PT Asuransi Central Asia
PT Asuransi FPG Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
PT Asuransi Jasaraharja Putera

31 Desember 2022

Perusahaan Asuransi/ Insurance Company
PT Asuransi Kredit Indonesia
PT Asuransi Tri Pakarta
PT Asuransi Ramayana Tbk
PT MS Amlin
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Shipowners Mutual Protection Indemnity Association
PT Asuransi Central Asia
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
PT Asuransi FPG Indonesia
PT Asuransi Wahana Tata
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi sebesar Rp103.541.622, reklasifikasi aset tetap menjadi aset tetap tersedia untuk dijual sebesar Rp4.928.627, reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset takberwujud sebesar Rp3.057.814.606, reklasifikasi aset tetap menjadi aset kerjasama operasi sebesar Rp5.368.675, reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi properti investasi sebesar Rp38.477.468 dan reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap Rp1.533.972.

13. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation expense of fixed assets are recorded as part of operating expenses.

As of December 31, 2023 and 2022, the Group insured its fixed assets as follows:

December 31, 2023

Risiko Asuransi/ Insurable Risk	Nilai Pertanggungan Asuransi/Insurance Coverage Amount
Risiko kebakaran, <i>property all risk, industrial all risk</i> dan risiko lainnya/ <i>Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks</i>	Rp37.596.304.247; USD593.000.000

December 31, 2022

Risiko Asuransi/ Insurable Risk	Nilai Pertanggungan Asuransi/Insurance Coverage Amount
Risiko kebakaran, <i>property all risk, industrial all risk</i> dan risiko lainnya/ <i>Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks</i>	Rp46.585.743.730; USD547.000.000

In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

Reclassification as of December 31, 2023 includes reclassification of fixed assets into investment property amounting to Rp103,541,622, reclassification of fixed assets into fixed asset for sale amounting to Rp4,928,627, reclassification of assets under construction into intangible assets amounting to Rp3,057,814,606, reclassification of fixed asset into joint operation assets amounting to Rp5,368,675, reclassification of assets under construction into investment properties amounting to Rp38,477,468 and reclassification of investment properties into fixed asset Rp1,533,972.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi sebesar Rp126.582.190, reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset takberwujud sebesar Rp34.148.365, reklasifikasi aset tetap menjadi aset takberwujud sebesar Rp822.386.523, reklasifikasi aset tidak lancar lainnya menjadi aset tetap sebesar Rp150.272.583 dan reklasifikasi aset takberwujud menjadi aset tetap sebesar Rp111.884.648.

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap

Pada tahun 2023 dan 2022, Grup menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2023/Year 2023

Penjualan aset tetap/Sale of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai pelepasan/Sales value	Nilai buku/Book value	Laba (rugi) penjualan/Gain (loss) on sales	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners Approval
Perusahaan/ The Company	3.569.722	1.557.539	2.012.183	No. 101/DK/PI/XII-2022 tanggal 19 Desember 2022 dan 54/DKP/PI.II/IX-2021 tanggal 15 September 2021/ No. 101/DK/PI/XII-2022 dated December 19, 2022 and No. 54/DKP/PI.II/IX-2021 dated September 15, 2021
EDII	167.182	244.303	(77.120)	No. KS-045/LEG/SISTEK-PELINDO/XII/2022 tanggal Desember 2022 dan No. SK.03/9/12/1/PBAN/UTMA/PLND-22 tanggal Desember 2022/ No. KS-045/LEG/SISTEK-PELINDO/XII/2022 dated December, 2022 and SK.03/9/12/1/PBAN/UTMA/PLND-22 dated December, 2022
Total	3.736.904	1.801.842	1.935.063	

Penghapusan aset tetap/Write-off of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai buku/Book value	Rugi penghapusan/ Loss on disposals	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners Approval
Perusahaan/ The Company	5.676.381	(5.676.381)	Nota Dinas No: KU.02.08/21/12/1/ASTP/KUMR-22 tanggal 21 Desember 2022/ No. Nomor: KU.02.08/21/12/1/ASTP/KUMR-22 dated December 21, 2022
SPTP	14.165.964	(14.165.964)	Nota Dinas No.: PD.02/5/12/1/BRPR/BRPR-23 tanggal Desember 2023; KU.02.08/28/11/1/BRPR/BRPR-23 tanggal November 2023; dan PD.01/19/12/5/BRPR/BRPR-23 tanggal Desember 2023/ Nota Dinas No.: PD.02/5/12/1/BRPR/BRPR-23 dated December 2023; KU.02.08/28/11/1/BRPR/BRPR-23 dated November 2023; dan PD.01/19/12/5/BRPR/BRPR-23 dated December 2023
SPMT	363.530	(363.530)	No.PP.01/27/12/II/ AKPJ/DIRUT/IKT-23 tanggal 27 Desember 2023/ No.PP.01/27/12/II/ AKPJ/DIRUT/IKT-23 dated Desember 27, 2023
Total	20.205.875	(20.205.875)	

13. FIXED ASSETS (continued)

Reclassification as of December 31, 2022 includes reclassification of assets into investment property amounting to Rp126,582,190, reclassification of assets under construction into intangible assets amounting to Rp34,148,365, reclassification of assets into intangible assets amounting to Rp822,386,523, reclassification of other non-current assets to assets amounting to Rp150,272,585 and reclassification of intangible assets to assets amounting to Rp111,884,648.

Sale and Write-off of Fixed Assets

In 2023 and 2022, the Group sold and written-off several fixed assets with details as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

**Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap
(lanjutan)**

Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)

Tahun 2022/Year 2022

Penjualan aset tetap/Sale of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai pelepasan/Sales value	Nilai buku/Book value	Laba (rugi) penjualan/Gain (loss) on sales	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners Approval
Perusahaan/ The Company	1.549.243	2.385.969	(836.726)	No. 101/DK/PI/XII-2022 tanggal 19 Desember 2022 dan 54/DKP/PI.II/IX-2021 tanggal 15 September 2021/ No. 101/DK/PI/XII-2022 dated December 19, 2022 and No. 54/DKP/PI.II/IX-2021 dated September 15, 2021
Perusahaan/ The Company	1.839.654	1.075.161	764.493	SK Menteri no. S-546/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021, 54/DKP/PI.II/IX-2021 tanggal 15 September 2021/ Ministerial Decree No. S-546/MBU/07/2021 dated July 30, 2021 and 54/DKP/PI.II/IX-2021 dated September 15, 2021
Perusahaan/ The Company	6.690.122	6.253.210	436.911	SK Menteri No. S-724/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/ Ministerial Decree No. S-724/MBU/09/2021 dated September 23, 2021
Total	10.079.019	9.714.340	364.678	

Penghapusan aset tetap/Write-off of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai buku/Book value	Rugi penghapusan/ Loss on disposals	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners Approval
Perusahaan/ The Company	520.468	(520.468)	Surat Menteri No. S-546/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021/ Ministerial Decree No. S-546/MBU/07/2021 dated July 30, 2021
BJTI	2.955.783	(2.955.783)	No.KU.03.02/22/12/1/PAPU/KUPP/PLTP-22 tanggal 22 Desember 2022/ No. KU.03.02/22/12/1/PAPU/KUPP/PLTP-22 dated December 22, 2022
EDII	401.274	(401.274)	No.2632/D01/KU.280/09/2022 tanggal 21 September 2022/ No. 2632/D01/KU.280/09/2022 dated September 21, 2022
Perusahaan/ The Company	1.057.920	(1.057.920)	SK Menteri No. S-724/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/ Ministerial Decree No. S-724/MBU/09/2021 dated September 23, 2021
Total	4.935.445	(4.935.445)	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.872.428.282	5.053.381.370
Instalasi fasilitas pelabuhan	199.206.366	90.024.952
Jalan dan bangunan	180.066.566	397.044.977
Alat fasilitas pelabuhan	171.003.412	188.442.169
Peralatan	58.349.198	113.439.856
Emplasemen	60.407.721	465.103.753
Kapal	55.915.229	333.792.155
Lainnya	452.707.177	38.584.148
Total	3.050.083.951	6.679.813.380

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	76,97% - 95,00%
Pekerjaan pembangunan kapal	14,82%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	84,89%
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	7,80% - 99,00%
Instalasi fasilitas pelabuhan	30,00% - 99,00%
Jalan dan bangunan	5,00% - 99,00%

31 Desember 2022

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	9,11% - 94,62%
Pekerjaan pembangunan kapal	80,4% - 82,88%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	16,58% - 93,10%
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	6,37% - 95,00%
Instalasi fasilitas pelabuhan	10,00% - 92,18%

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp71.560.858 dan Rp47.306.746 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

13. FIXED ASSETS (continued)

Construction in Progress

Construction in progress consists of:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.872.428.282	5.053.381.370
Instalasi fasilitas pelabuhan	199.206.366	90.024.952
Jalan dan bangunan	180.066.566	397.044.977
Alat fasilitas pelabuhan	171.003.412	188.442.169
Peralatan	58.349.198	113.439.856
Emplasemen	60.407.721	465.103.753
Kapal	55.915.229	333.792.155
Lainnya	452.707.177	38.584.148
Total	3.050.083.951	6.679.813.380

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

December 31, 2023

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2024 - 2025	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2024	Construction of ship
2024	Construction of yard
2024 - 2025	Building and port equipment facilities
2024	Port facility installation
2024 - 2025	Roads and buildings

December 31, 2022

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2023 - 2025	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2023	Construction of ship
2023	Construction of yard
2023 - 2026	Building and port equipment facilities
2023	Port facility installation

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to Rp71,560,858 and Rp47,306,746 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET KERJASAMA OPERASI

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 49d) dan PT Maspion Industrial Estate, dengan rincian sebagai berikut:

14. JOINT OPERATION ASSETS

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja and MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 49d) and PT Maspion Industrial Estate, respectively, with details as follow:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ Year ended December 31, 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	-	-	-	4.960.306	4.960.306	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	-	772.669.489	Building and port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.759	-	-	-	86.424.759	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	Port facility installation
Jalan dan bangunan	1.082.111	-	-	1.433.443	2.515.554	Roads and buildings
Peralatan	1.535.821	-	-	-	1.535.821	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	876.747.147	-	-	6.393.749	883.140.896	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(422.773.568)	(20.456.148)	-	(60.467)	(443.290.183)	Building and port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(65.656.972)	(5.215.664)	-	-	(70.872.636)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(5.133.256)	(323.210)	-	-	(5.456.466)	Port facility installation
Jalan dan bangunan	(486.871)	(115.837)	-	(1.022.733)	(1.625.441)	Roads and buildings
Peralatan	(1.505.107)	-	-	-	(1.505.107)	Equipment
Emplasemen	(1.243.172)	(177.596)	-	-	(1.420.768)	Emplacement
Total	(496.798.946)	(26.288.455)	-	(1.083.200)	(524.170.601)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(60.467)	-	-	-	(60.467)	Less: Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	379.887.734				358.909.828	Net carrying value
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/ Year ended December 31, 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	-	772.669.489	Building and port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	87.538.706	-	-	(1.113.947)	86.424.759	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	Port facility installation
Jalan dan bangunan	1.082.111	-	-	-	1.082.111	Roads and buildings
Peralatan	1.535.821	-	-	-	1.535.821	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	877.861.094	-	-	(1.113.947)	876.747.147	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(402.256.954)	(20.516.614)	-	-	(422.773.568)	Building and port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(59.719.821)	(5.985.692)	-	48.541	(65.656.972)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(4.810.046)	(323.210)	-	-	(5.133.256)	Port facility installation
Jalan dan bangunan	(429.977)	(56.894)	-	-	(486.871)	Roads and buildings
Peralatan	(1.505.107)	-	-	-	(1.505.107)	Equipment
Emplasemen	(1.065.576)	(177.596)	-	-	(1.243.172)	Emplacement
Total	(469.787.481)	(27.060.006)	-	48.541	(496.798.946)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(60.467)	-	-	-	(60.467)	Less: Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	408.013.146				379.887.734	Net carrying value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAK BERWUJUD

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Aset hak konsesi	44.839.160.393	42.332.482.771	Concession rights assets
Piranti lunak	1.446.934.743	1.386.093.582	Software application
Lisensi	93.271.515	93.784.038	License
Lainnya	222.898.942	104.379.824	Others
Aset dalam penyelesaian	3.612.121.799	1.649.219.115	Construction in progress
Subtotal	50.214.387.392	45.565.959.330	Sub-total
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(3.331.944.124)	(3.019.416.592)	Accumulated amortization allowance for impairment
Neto	46.882.443.268	42.546.542.738	Net

15. INTANGIBLE ASSETS

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset takberwujud tidak dijaminan.

As of December 31, 2023 and 2022, intangible assets are not pledged as collateral.

Aset hak konsesi

Concession rights assets

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan terminal pelabuhan dan jalan tol Cibitung - Cilincing berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 48a).

Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Port Authority to the Company to develop and operate port terminal and the Cibitung - Cilincing toll road based on Concession Agreement (Note 48a).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal pelabuhan dan konstruksi jalan tol masih dalam konstruksi adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the average percentage completion of port and toll road construction are as follows:

Terminal Pelabuhan dan Jalan Tol/ Port Terminal and Toll Road	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Kalibaru	76,09%	69,79%
Kijing	96,87%	95,62%
Teluk Lamong	100,00%	100,00%
Manyar Gresik	100,00%	91,00%
Makassar New Port	100,00%	94,00%
Cibitung-Cilincing Toll Road	100,00%	98,80%

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal pelabuhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Borrowing costs capitalized for the concession assets of port terminal for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Terminal Pelabuhan dan Jalan Tol/ Port Terminal and Toll Road	2023	2022
Kalibaru	144.066.595	143.445.657
Kijing	109.285.433	240.350.899
Makassar New Port	113.218.770	256.123.548
Cibitung-Cilincing Toll Road	57.424.475	404.690.477
Manyar Gresik	-	15.136.177

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (*electronic data interchange*), aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan VGM untuk sistem operasi terminal.

16. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ Year ended December 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Haraga perolehan					
Bangunan fasilitas pelabuhan	283.428.093	289.805.700	(314.122.196)	(1.588.230)	257.523.367
Kapal	148.030.137	92.316.087	(1.374.212)	(71.403.456)	167.568.556
Alat fasilitas pelabuhan	1.754.274	7.869.901	(6.224.254)	1.754.274	5.154.195
Peralatan	3.038.404	3.812.936	(709.054)	-	6.142.286
Tanah	188.946.426	-	(30.502.421)	(1.588.230)	156.855.775
Kendaraan	76.915.310	36.601.358	(6.789.929)	(6.953.493)	99.773.246
Subtotal	702.112.644	430.405.982	(359.722.066)	(79.779.135)	693.017.425
Akumulasi penyusutan					
Bangunan fasilitas pelabuhan	(93.211.612)	(22.459.417)	8.787.051	5.433.960	(101.450.018)
Kapal	(99.568.953)	(27.446.752)	3.586.070	-	(123.429.635)
Alat fasilitas pelabuhan	(1.754.274)	(11.021.528)	4.469.980	71.403.456	(3.903.366)
Peralatan	(1.455.887)	(1.967.645)	1.247.267	(1.754.274)	(3.930.539)
Tanah	(7.073.892)	(9.251.669)	8.160.102	-	(8.165.459)
Kendaraan	(45.059.680)	(33.857.778)	10.923.393	3.107.763	(64.886.302)
Subtotal	(248.124.298)	(106.004.789)	37.173.863	78.190.905	(238.764.319)
Nilai tercatat neto	453.988.346				454.253.106

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

The Group's management believes that there was no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2023 and 2022.

Software

Software application represents cost incurred for the development of *Port Wide Solution* application for *car terminal* services, *container terminal* services and *warehouse* and *Annual Technical Support (ATS)* and *change request*, licensed software application used for *electronic data interchange*, *operational application*, *ERP (finance, human resources, technical information system)*, *development of Port Community System/Inaportnet*, *dash board system* application to present information regarding operational performance, system integration, *autogate* integration and VGM for terminal operating system.

16. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The movements in right-of-use assets are as follows:

Acquisition costs
Port facilities
Vessels
Port equipment
Equipments
Lands
Vehicles

Subtotal

Accumulated depreciation
Port facilities
Vessels
Port equipment
Equipment
Lands
Vehicles

Subtotal

Net carrying value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**16. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA
(lanjutan)**

**16. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE
LIABILITIES (continued)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/
Year ended December 31, 2022

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition costs
Bangunan fasilitas pelabuhan	203.669.947	206.935.857	(127.177.711)	-	283.428.093	Port facilities
Kapal	119.407.557	38.428.227	(9.805.647)	-	148.030.137	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	25.697.627	986.764	(24.930.117)	-	1.754.274	Port equipment
Peralatan	98.735.557	587.533	(96.284.686)	-	3.038.404	Equipments
Tanah	173.665.160	31.991.371	(16.710.105)	-	188.946.426	Lands
Kendaraan	36.365.322	42.604.722	(2.054.734)	-	76.915.310	Vehicles
Subtotal	657.541.170	321.534.474	(276.963.000)	-	702.112.644	Subtotal
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(71.811.896)	(21.496.959)	97.243	-	(93.211.612)	Port facilities
Kapal	(84.619.316)	(19.067.430)	4.117.793	-	(99.568.953)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(18.432.755)	(13.422.030)	30.100.511	-	(1.754.274)	Port equipment
Peralatan	(10.742.429)	(4.442.654)	13.729.196	-	(1.455.887)	Equipment
Tanah	(3.576.677)	(9.760.737)	6.263.523	-	(7.073.891)	Lands
Kendaraan	(16.355.908)	(28.703.772)	-	-	(45.059.680)	Vehicles
Subtotal	(205.538.981)	(96.893.582)	54.308.266	-	(248.124.297)	Subtotal
Nilai tercatat neto	452.002.189				453.988.347	Net carrying value

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Liabilitas sewa			Lease liabilities
Bagian jangka pendek	70.113.816	49.907.726	Current portion
Bagian jangka panjang	417.609.648	385.228.086	Long-term portion
Total	487.723.464	435.135.812	Total

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts recognized on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Beban penyusutan aset hak-guna	106.004.789	96.893.582	Depreciation of right-of-use assets
Bunga atas liabilitas sewa	34.441.109	30.313.025	Interest on lease liabilities
Total	140.445.898	127.206.607	Total

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in statement of cash flow are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Jumlah kas keluar untuk:			Total cash outflow for:
Pembayaran liabilitas sewa	379.979.003	106.561.367	Payment of lease liabilities
Pembayaran bunga	37.618.212	32.330.966	Payment of interests
Total	417.597.215	138.892.333	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**16. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA
(lanjutan)**

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Grup mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
<u>Liabilitas sewa</u>		
Saldo awal	435.135.812	333.885.711
Penambahan selama tahun berjalan	430.405.982	321.534.474
Arus kas	(417.597.215)	(138.892.333)
Perubahan non-kas	42.703.592	38.288.643
Terminasi kontrak	(2.924.707)	(119.680.683)
Saldo akhir	487.723.464	435.135.812

Berdasarkan penilaian manajemen Grup, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**16. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE
LIABILITIES (continued)**

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as follow:

Lease liabilities	
	Beginning balance
	Additions during the year
	Cash flow
	Non-cash change
	Contract termination
	Ending balance

Based on the evaluation of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of right-of-use assets as of December 31, 2023 and 2022.

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 49p)	504.781.807	-
Piutang pemulihan investasi	278.418.557	80.303.277
Uang muka pembelian aset tetap	277.204.540	535.957.148
Piutang perluasan kawasan industri	118.495.097	124.811.321
Pajak final dibayar di muka	108.318.331	113.836.681
Uang jaminan	48.007.618	34.422.211
Jaminan pelaksanaan	37.000.000	37.000.000
Goodwill	32.550.784	42.266.304
Biaya transaksi pinjaman sindikasi	-	29.506.875
Piutang pajak	-	28.361.374
Aset lain-lain	410.965.701	567.274.678
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(284.505.507)	(372.232.334)
Total	1.531.236.928	1.221.507.535

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Finance lease receivables (Note 49p)
Receivable investment recovery
Advances for purchase of fixed assets
Receivable for expansion of industrial estate
Prepaid final tax
Guarantee
Performance guarantee
Goodwill
Syndicated loan transaction fee
Tax receivables
Other assets
Less:
Accumulated depreciation and impairment

Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Uang muka pembelian aset tetap terutama merupakan uang muka atas pengadaan kapal, pembangunan Terminal Kalibaru dan pembangunan proyek *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH) di Benoa, Bali.

Piutang perluasan kawasan industri merupakan piutang dari BKMS.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara BJTI dengan BKMS No. KKS.005-00/II/BJTI-2020 tanggal 26 Februari 2020, BJTI menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp200.000.000 dalam rangka perluasan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun yang dibayar setiap bulan dan akan dikenakan denda jika melewati jatuh tempo. Sampai dengan 31 Desember 2023, BKMS telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp200.000.000 dan dibayar sebagian oleh BKMS sehingga saldo pinjaman per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp118.495.097 dan Rp124.811.321.

Pajak final dibayar di muka merupakan pajak final atas pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1, Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang dibayarkan di muka oleh SPSL kepada NPCT1 (Catatan 49c).

Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan.

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru dan Kijing (Catatan 48a).

Goodwill terutama merupakan *goodwill* yang timbul dari transaksi akuisisi 45,00% kepemilikan saham di CTP (dahulu MTDX) senilai Rp31.407.481 pada tahun 2015.

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan instalasi listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Advances for purchase of fixed assets mainly represent advances for ship procurement, construction of the Kalibaru Terminal and construction for Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) in Benoa, Bali.

Receivable for expansion of industrial estate represents receivables from BKMS.

According to the Loan Facility Agreement between BJTI and BKMS No. KKS.005-00/II/BJTI-2020 dated February 26, 2020, BJTI agreed to provide a loan facility amounting to Rp200,000,000 for the purpose of the extension of industrial estate facilities which is integrated with the port. The loan period is 5 years from the signing date of the agreement. The loan interest is at 9.5% which is paid monthly and will be charged with penalty if it passes the due date. Until December 31, 2023, BKMS has withdrawn the loan amounting to Rp200,000,000 and partially paid by BKMS, therefore, with the loan balance as of December 31, 2023, and 2022 amounting to Rp118,495,097 and Rp124,811,321, and respectively.

Prepaid final tax represents the final tax for the construction and operation of Container Terminal 1, Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port which was paid in advance by SPSL to NPCT1 (Note 49c).

Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which has not been distributed to the Company.

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal and Kijing Terminal (Note 48a).

Goodwill mainly represents goodwill arising from acquisition of 45.00% shares ownership in CTP (formerly MTDX) amounting to Rp31,407,481 in 2015.

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Biaya transaksi pinjaman sindikasi merupakan beban ditangguhkan atas pinjaman sindikasi ke PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang belum efektif per 31 Desember 2022.

Piutang pajak merupakan piutang kelebihan pembayaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Piutang pajak telah dibebankan pada tahun berjalan.

Aset tetap tidak produktif merupakan aset tetap yang tidak dapat dioperasikan lagi dalam kegiatan operasional Grup, yang sebagian besar terdiri atas kapal, dan alat-alat fasilitas pelabuhan seperti *transtainer*, *Rubber Tired Gantry Crane (RTGC)*, *forklift*, *reach stacker*, dan *harbour mobile crane*.

Aset lain-lain terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam, peralatan *vessel traffic service*, relokasi aset dan perbaikan kapal keruk.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek terdiri dari:

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>
Rupiah		
Pihak ketiga		
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.330.172	2.255.302
Pihak berelasi (Catatan 44f)	-	103.106.529
Total	<u>3.330.172</u>	<u>105.361.831</u>

EDII

Pada tanggal 13 November 2012, EDII memperoleh fasilitas dari PT Bank OCBC NISP ("Bank OCBC") dimana atas perjanjian tersebut terakhir diperpanjang berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 152/BBL-GSH-COMM/PPP/XI/2022 tanggal 28 November 2022. Adapun fasilitas yang diberikan adalah Fasilitas Rekening Koran sebesar Rp4.000.000 dengan suku bunga 10,25% per tahun; Fasilitas Bank Garansi Rp10.000.000 dan Fasilitas *Demand Loan* sebesar Rp10.000.000 dengan suku bunga 10,25% per tahun *floating*. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 28 Juni 2024.

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Syndicated loan transaction fee represent deferred charges on syndicated loans to PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk which have not yet been effective as of 31 December 2022.

Tax receivables represents overpayment of Tax of Land and Building (PBB) and Value Added Tax (VAT). Tax receivables charged to current period.

Unproductive fixed assets are fixed assets that cannot be operated anymore in the Group's operational activities, which mostly consist of ships and port facilities such as transtainer, Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), forklift, reach stacker, and harbour mobile crane.

Other assets mainly represents deferred charge for dredging, vessel traffic service equipment, asset relocation and dredges repairment.

18. SHORT-TERM BANK LOANS

Short-term bank loans consist of:

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>
Rupiah		
Third parties		
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.330.172	2.255.302
Related party (Note 44f)	-	103.106.529
Total	<u>3.330.172</u>	<u>105.361.831</u>

EDII

On November 13, 2012, EDII obtained a facility from PT Bank OCBC NISP ("Bank OCBC") which the agreement was recently extended based on Amendment to Loan Agreement No. 152/BBL-GSH-COMM/PPP/XI/2022 on November 28, 2022. The facilities provided are Current Account Facility of Rp4,000,000 with an interest rate of 10.25% p.a; Bank Guarantee facility of Rp10,000,000 and Demand Loan Facility of Rp10,000,000 with an interest rate of 10.25% p.a floating. This agreement expires on June 28, 2024.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	593.671.619	968.720.686	Private
Perorangan	27.218.973	7.842.949	Individuals
Subtotal - pihak ketiga	620.890.592	976.563.635	Subtotal - third parties
Pihak berelasi (Catatan 44g)	636.747.827	1.092.012.208	Related parties (Note 44g)
Total	1.257.638.419	2.068.575.843	Total

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Rupiah	1.253.627.740	2.044.081.525	Rupiah
Dolar AS	4.010.679	24.494.318	US Dollar
Total	1.257.638.419	2.068.575.843	Total

19. TRADE PAYABLES

a. Based on suppliers

b. By currency

**20. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA
PENDEK**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Sewa kuartalan (Catatan 49c dan 49d)	680.459.940	683.682.059	Quarterly rent (Notes 49c and 49d)
Pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	324.642.525	402.204.627	Land, building, water and electricity services
Uang untuk diperhitungkan Pihak ketiga	245.192.878	292.643.156	Advances from customers Third parties
Pihak berelasi (Catatan 44h)	25.275.606	8.286.359	Related parties (Note 44h)
Pendapatan diterima di muka jangka pendek - lainnya	45.794.794	36.400.194	Other short-term unearned revenues
Subtotal	1.321.365.743	1.423.216.395	Sub-total
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang (Catatan 27)	72.262.428	171.138.682	Current portion of long-term unearned revenue (Note 27)
Total	1.393.628.171	1.594.355.077	Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Grup.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Pegawai	1.769.464.584
Kerjasama mitra usaha Umum	1.012.776.488
Bunga	689.845.064
Bahan	372.120.797
Pemeliharaan	351.465.388
Asuransi	326.517.786
Biaya konsesi	30.102.165
Lain-lain	21.221.922
Total	845.971.714

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pelatihan dan pendidikan.

Beban akrual - biaya konsesi merupakan biaya konsesi yang harus dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Perjanjian Konsesi (Catatan 48a).

21. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	1.543.094.665	<i>Employees</i>
	1.023.263.751	<i>Partnership</i>
	662.233.036	<i>General</i>
	379.603.334	<i>Interest</i>
	239.342.300	<i>Material</i>
	449.258.262	<i>Maintenance</i>
	30.272.043	<i>Insurance</i>
	40.277.983	<i>Concession fee</i>
	906.239.914	<i>Others</i>
Total	5.273.585.288	Total

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for training and education.

Accrued expenses - concession fee represents concession fee to be paid to Port Authority in accordance with Concession Agreement (Note 48a).

22. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Pihak ketiga	465.350.521
Pihak berelasi (Catatan 44i dan 44j)	659.009.231
Total	1.124.359.752

22. OTHER CURRENT LIABILITIES

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	855.825.793	<i>Third parties</i>
	185.307.298	<i>Related parties</i>
	1.041.133.091	<i>(Notes 44i and 44j)</i>
Total	1.041.133.091	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**22. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
(lanjutan)**

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Uang titipan dari pihak ketiga		
Pelanggan swasta	302.322.135	280.341.599
Lain-lain	12.240.669	37.919.696
Pihak berelasi (Catatan 44i)	58.921.643	75.209.277
Subtotal	<u>373.484.447</u>	<u>393.470.572</u>
Lain-lain		
Pihak ketiga	150.787.717	537.564.498
Pihak berelasi (Catatan 44j)	600.087.588	110.098.021
Subtotal	<u>750.875.305</u>	<u>647.662.519</u>
Total	<u>1.124.359.752</u>	<u>1.041.133.091</u>

Uang titipan dari pihak ketiga - pelanggan swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Uang titipan dari pihak ketiga - lain-lain terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi dan koperasi pegawai.

Liabilitas jangka pendek lainnya - lain-lain pihak ketiga terutama merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang jaminan penyediaan listrik.

22. OTHER CURRENT LIABILITIES (continued)

Details of other current liabilities as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Deposit from third parties
Private customers
Others
Related parties (Note 44i)
Sub-total
Others
Third parties
Related parties (Note 44j)
Sub-total
Total

Deposit from third parties - private customers mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled with the customer or will be taken into account with subsequent services.

Deposit from third parties - others mainly represents deposit from employee monthly salary for jamsostek contribution, insurance and employee co-operatives.

Other current liabilities others third party mainly represents payables from deposits received for electricity provision.

23. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	224.505.044	154.235.105
Pajak Penghasilan	149.933.546	159.117.505
Subtotal	<u>374.438.590</u>	<u>313.352.610</u>
Entitas anak		
Pajak Pertambahan Nilai	468.322.807	524.525.927
Pajak Penghasilan	347.526.287	134.298.106
Subtotal	<u>815.849.094</u>	<u>658.824.033</u>
Total	<u>1.190.287.684</u>	<u>972.176.643</u>

23. TAXATION

a. Prepaid taxes

<i>The Company</i>
<i>Value Added Tax</i>
<i>Income Taxes</i>
Sub-total
<i>Subsidiaries</i>
<i>Value Added Tax</i>
<i>Income Taxes</i>
Sub-total
Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

Taksiran tagihan restitusi pajak

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai		
2021	-	5.441.845
Pajak Penghasilan		
2023	454.109.733	-
2022	387.003.886	314.475.286
2021	-	178.467.687
2019	279.182.732	279.182.732
Subtotal	<u>1.120.296.351</u>	<u>777.567.550</u>
Entitas anak		
Pajak Pertambahan Nilai		
2023	1.572.586	-
2022	129.871.913	94.869.273
2021	-	54.509.697
2020	-	16.401.295
2019	-	73.216.764
Pajak Penghasilan	96.366.007	93.094.376
Subtotal	<u>227.810.506</u>	<u>332.091.405</u>
Total	<u>1.348.106.857</u>	<u>1.109.658.955</u>

23. TAXATION (continued)

a. Prepaid taxes (continued)

Estimated claims for tax refund

The Company
Value Added Tax
2021
Income Tax
2023
2022
2021
2019
Sub-total
Subsidiaries
Value Added Tax
2023
2022
2021
2020
2019
Income Tax
Sub-total
Total

b. Utang pajak

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	230.219.334	248.557.423
Pajak Penghasilan		
Pasal 4(2)	39.904.172	49.651.601
Pasal 21	96.290.015	59.464.194
Pasal 22	322.304	306.414
Pasal 23/26	8.465.992	11.191.059
Lainnya	-	2.861.827
Subtotal	<u>375.201.817</u>	<u>372.032.518</u>
Entitas anak		
PPH badan (Pasal 29)		
2023	136.679.481	-
2022	8.924.517	387.288.280
2021	-	4.390
Pajak Pertambahan Nilai	135.139.413	139.893.953
Pajak Penghasilan		
Pasal 4(2)	13.282.484	14.261.967
Pasal 15	156.467	1.626.972
Pasal 21	140.831.320	59.710.349
Pasal 22	278.136	336.066
Pasal 23/26	30.126.661	24.082.450
Pasal 25	42.945.372	12.533.946
Lainnya	1.992.576	13.502.850
Subtotal	<u>510.356.427</u>	<u>653.241.223</u>
Total	<u>885.558.244</u>	<u>1.025.273.741</u>

b. Taxes payable

The Company
Value Added Tax
Income Taxes
Article 4(2)
Article 21
Article 22
Article 23/26
Others
Sub-total
Subsidiaries
Corporate Income Tax (Article 29)
2023
2022
2021
Value Added Tax
Income Taxes
Article 4(2)
Article 15
Article 21
Article 22
Article 23/26
Article 25
Others
Sub-total
Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.607.654.195	4.738.654.133	<i>Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Laba entitas anak sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan	4.205.705.684	3.481.280.655	<i>Income before final and corporate income tax of subsidiaries</i>
Pembalikan atas jurnal eliminasi <i>Reversal of intercompany</i> antar perusahaan pada saat konsolidasian	(3.889.251.825)	(2.582.197.428)	<i>elimination entries during consolidation</i>
Laba sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	4.291.200.336	3.839.570.906	<i>Income before corporate income tax expenses - the Company</i>
<u>Beda temporer:</u>			<u><i>Temporary differences:</i></u>
Penyisihan imbalan kerja karyawan	425.177.136	282.215.912	<i>Provision for employee benefits</i>
Bonus dan tantiem	(212.350.451)	424.251.278	<i>Bonus and tantiem</i>
Penyisihan penurunan nilai	56.626.951	18.457.408	<i>Allowance for impairment</i>
Penyusutan dan amortisasi	13.721.459	(669.152.231)	<i>Depreciation and amortization</i>
<u>Beda permanen:</u>			<u><i>Permanent differences:</i></u>
Beban umum	624.441.322	569.693.452	<i>General expenses</i>
Beban kesejahteraan karyawan	111.325	220.737.839	<i>Employees social welfare expenses</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(3.267.104.919)	(3.216.650.190)	<i>Income subject to final income tax</i>
Beban berkaitan pajak penghasilan final	1.466.545.415	827.839.493	<i>Expenses related to final income tax</i>
Bagian laba (neto) entitas asosiasi	(3.168.665.657)	(2.630.034.201)	<i>Equity in net income of associates</i>
Beban-beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	230.705.573	461.512.703	<i>Expenses that are not deductible for tax purposes</i>
Pendapatan yang bukan merupakan objek pajak	(662.781.952)	(24.642.749)	<i>Income that are not subject for tax purposes</i>
Subtotal	(4.493.573.798)	(3.735.771.286)	<i>Sub-total</i>
Taksiran laba (rugi) pajak	(202.373.462)	103.799.620	<i>Estimated taxable income (loss)</i>

23. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.607.654.195	4.738.654.133
Dikurangi: Pendapatan kena pajak final	4.147.656.307	3.484.410.122
Laba sebelum pajak penghasilan badan	459.997.888	1.254.244.011
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	101.199.535	275.933.682
<u>Dampak perbedaan permanen:</u> Beban yang tidak dapat dikurangkan	(275.584.850)	(209.938.623)
Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	(174.385.315)	65.995.059
Beban pajak penghasilan badan - Entitas anak	769.458.247	764.189.217
Total	595.072.932	830.184.276

Untuk tujuan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan melakukan perhitungan taksiran laba (rugi) pajak secara tahunan.

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2023 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2023.

23. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate are as follows:

Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	
Less:	
Income subject to final tax	
Income before corporate income tax expenses	
Income tax calculated at applicable rate	
<u>Effect of permanent differences:</u>	
Non deductible expenses	
Corporate income tax expense - The Company	
Corporate income tax expense - Subsidiaries	
Total	

For the purpose of filling the annual corporate income tax return, the Company calculate the taxable income (loss) on annual basis.

The calculation of estimated taxable income for the year 2023 will be used as a basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return for the year 2023.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Beban pajak final		
Perusahaan	340.249.585	333.173.903
Entitas anak	175.231.783	155.055.399
Total	515.481.368	488.229.302
Beban pajak penghasilan badan		
Kini		
Perusahaan	-	22.835.916
Entitas anak	999.545.702	935.501.582
Subtotal	999.545.702	958.337.498
Tangguhan		
Perusahaan	(174.385.315)	43.159.143
Entitas anak	(230.087.455)	(171.312.365)
Subtotal	(404.472.770)	(128.153.222)
Total	595.072.932	830.184.276

*Final tax expense
The Company
Subsidiaries*

Total

*Corporate income tax expense
Current*

*The Company
Subsidiaries*

Sub-total

Deferred

*The Company
Subsidiaries*

Sub-total

Total

- e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Taksiran laba kena pajak		
Perusahaan	-	103.799.620
Entitas anak	1.746.489.525	4.252.279.916
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	1.746.489.525	4.356.079.536
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan		
Perusahaan	-	22.835.916
Entitas anak	999.545.702	935.501.582
Jumlah beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	999.545.702	958.337.498

*Estimated taxable income
The Company
Subsidiaries*

Total estimated taxable income

*Corporate income tax expense - current
The Company
Subsidiaries*

*Corporate income tax expense
per consolidated statement of
profit or loss and other
comprehensive income*

- d. The details of Income tax expenses and final tax expenses are as follows:

- e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

- e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			
Perusahaan	454.109.733	413.888.075	<i>Less prepaid income tax The Company</i>
Entitas anak	908.611.559	590.000.142	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	1.362.721.292	1.003.888.217	<i>Total prepaid income tax</i>
Taksiran utang pajak penghasilan - Pasal 29			
Perusahaan	-	-	<i>Estimated income tax payable - Article 29 The Company</i>
Entitas anak	136.679.481	387.288.280	<i>Subsidiaries</i>
Total	136.679.481	387.288.280	Total
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan			
Perusahaan	454.109.733	593.658.018	<i>Estimated claims for tax refund The Company</i>
Entitas anak	45.745.338	41.786.840	<i>Subsidiaries</i>
Total	499.855.071	635.444.858	Total

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Grup menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred taxes

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/ Year Ended December 31, 2023						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Perusahaan						The Company
Liabilitas imbalan kerja	1.167.736.119	93.538.970	(22.483.386)	22.483.387	1.261.275.090	Employers benefit liabilities
Cadangan beban pegawai	93.335.281	(46.717.099)	-	55.089.939	101.708.121	Reserve for employee expense
Penyisihan penurunan nilai piutang	179.284.211	12.457.929	-	17.094.585	208.836.725	Provision for impairment of receivables
Penyusutan dan amortisasi	(1.186.469.982)	3.018.721	-	(218.922.108)	(1.402.373.369)	Depreciation and amortization
Rugi fiskal	-	44.522.162	-	-	44.522.162	Fiscal loss
Subtotal	253.885.629	106.820.683	(22.483.386)	(124.254.197)	213.968.729	Sub-total
Entitas anak	378.993.810	274.865.031	(624.919)	(23.104.042)	630.129.880	Subsidiaries
Total	632.879.439	381.685.714	(23.108.305)	(147.358.239)	844.098.609	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(231.128.682)	(9.467.530)	11.946	153.740.962	(86.843.304)	Subsidiaries
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/ Year Ended December 31, 2022						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Perusahaan						The Company
Liabilitas imbalan kerja	1.507.790.375	62.087.501	(224.584.339)	(177.557.418)	1.167.736.119	Employers benefit liabilities
Cadangan beban pegawai	55.089.940	93.335.281	-	(55.089.940)	93.335.281	Reserve for employee expense
Penyisihan penurunan nilai piutang	191.845.572	4.060.630	-	(16.621.991)	179.284.211	Provision for impairment of receivables
Penyusutan dan amortisasi	(1.319.415.061)	(147.213.491)	-	280.158.570	(1.186.469.982)	Depreciation and amortization
Subtotal	435.310.826	12.269.921	(224.584.339)	30.889.221	253.885.629	Sub-total
Entitas anak	151.958.012	269.100.988	-	(42.065.190)	378.993.810	Subsidiaries
Total	587.268.838	281.370.909	(224.584.339)	(11.175.969)	632.879.439	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(105.071.621)	(127.083.810)	1.026.749	-	(231.128.682)	Subsidiaries

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

1. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2019

Regional IV (ex. Pelindo IV)

Pada 27 April 2020, Perusahaan melaporkan lebih bayar pajak penghasilan badan 2019 sebesar Rp49.937.711. Pemeriksaan pajak telah dimulai tanggal 14 Januari 2021, namun Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian 2019 pada 9 April 2021 yang mengubah lebih bayar pajak penghasilan 2019 menjadi Rp71.958.443.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp46.291.415 atas pajak penghasilan badan tahun 2019. Selisih antara penyajian kembali lebih bayar pajak penghasilan 2019 dengan SKPLB adalah sebesar Rp25.667.030 yang dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian tahun 2021.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp25.215.774. Selisih antara SKPLB dengan pengembalian pajak yang diterima sebesar Rp21.075.639 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2022.

Regional II (ex. Pelindo II)

Pada tanggal 27 April 2020, Perusahaan melaporkan lebih bayar pajak penghasilan badan 2019 sebesar Rp152.258.584. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tanggal 21 April 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas pajak penghasilan badan tahun 2019 sebesar Rp126.924.148, beserta keputusan lebih bayar pajak penghasilan badan yang disetujui oleh kantor pajak sebesar Rp149.312.463. Pada tanggal 19 Mei 2021, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pokok dan sanksi bunga serta mencatat aset tidak lancar lainnya sebesar Rp126.924.148.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter

The Company

1. Tax assessment for fiscal year 2019

Regional IV (ex. Pelindo IV)

On April 27, 2020, the Company submitted overpayment of corporate income tax 2019 amounting to Rp49,937,711. The tax audit has been started on January 14, 2021, but the Company restated the 2019 consolidated financial statement on April 9, 2021 which adjusted the overpayment of income tax 2019 to Rp71,958,443.

On October 28, 2021, the Company received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") related to corporate income tax for year 2019 amounting to Rp46,291,415. The difference between restatement of overpayment of income tax 2019 with SKPLB amounting to Rp25,667,030 recorded as part of income tax expense on the 2021 consolidated statement of profit loss and other comprehensive income.

On March 31, 2022, the Company received a tax refund amounting Rp25,215,774, the difference between SKPLB with tax refund received amounting Rp21,075,639 has been recorded in the 2022 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Regional II (ex. Pelindo II)

On April 27, 2020, the Company submitted overpayment of corporate income tax for fiscal year 2019 amounting to Rp152,258,584. Based on the result of tax audit dated on April 21, 2021, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") for the 2019 corporate income tax amounting to Rp126,924,148, along with the decision of Company's overpayment applications were approved by the tax office amounting to Rp149,312,463. On May 19, 2021, the Company has paid the principal and interest penalties and recorded the underpayment in other non-current assets amounting to Rp126,924,148.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

- g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

1. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2019 (lanjutan)

Regional II (ex. Pelindo II) (lanjutan)

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh badan 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00706/KEB/PJ/WPJ.19/2022 tanggal 7 Juli 2022, memutuskan menolak keberatan Perusahaan.

Pada tanggal 16 September 2022, Perusahaan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Hingga penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, pengajuan banding oleh Perusahaan masih dalam proses sidang di pengadilan.

2. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020

Regional II (ex. Pelindo II)

Pada tanggal 28 Juni 2022, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp92.435.704 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2020 dari yang diajukan sebesar Rp96.483.977. Atas selisih nilai yang diajukan dengan nilai yang disetujui oleh kantor pajak sebesar Rp4.048.272 telah dicatat pada laporan laba rugi.

Regional III (ex. Pelindo III)

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp49.182.325 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2020. Seluruh pengajuan lebih bayar Perusahaan disetujui oleh kantor pajak.

23. TAXATION (continued)

- g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

1. Tax assessment for fiscal year 2019 (continued)

Regional II (ex. Pelindo II) (continued)

On July 15, 2021, the Company filed an objection to the 2019 corporate income tax SKPKB. Based on the Decree of the Director General of Taxes No. KEP-00706/KEB/PJ/WPJ.19/2022 dated July 7, 2022, decided to reject the Company's objection.

On September 16, 2022, the Company filed an appeal to the tax court. Until the issuance of the consolidated statements of the Company, the Company's appeal is still in the process of being heard in court.

2. Tax assessment for fiscal year 2020

Regional II (ex. Pelindo II)

On June 28, 2022, the Company received SKPLB amounting to Rp92,435,704 for overpayment of corporate income tax for fiscal year 2020 from the amount submitted of Rp96,483,977. The difference between the amount submitted and the amount approved by the tax office amounting to Rp4,048,272 has been recorded in the income statement.

Regional III (ex. Pelindo III)

On April 22, 2022, the Company received SKPLB amounting to Rp49,182,325 for the overpayment of corporate income tax for the 2020 fiscal year. The Company's overpayment applications were approved by the tax office.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

- g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

2. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020 (lanjutan)

Regional IV (ex. Pelindo IV)

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp37.244.098 atas pajak penghasilan badan tahun 2020 dari yang diajukan sebesar Rp39.043.430.

Setelah dikompensasikan dengan kurang bayar pajak untuk masa pajak yang sama, jumlah yang diterima sebesar Rp30.395.852. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp1.799.332 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2022.

3. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021

Regional II (ex. Pelindo II)

Pada tanggal 13 April 2023, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp139.777.013 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2021 dari yang diajukan sebesar Rp160.812.150. Atas selisih nilai yang diajukan dengan nilai yang disetujui oleh kantor pajak sebesar Rp21.035.137 telah dicatat laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian tahun 2023.

Regional III (ex. Pelindo III)

Pada tanggal 13 April 2023, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp45.869.918 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2021. Seluruh pengajuan lebih bayar Perusahaan disetujui oleh fiskus. Pada tanggal 27 April 2023 Perusahaan menerima SPMKP sebesar Rp45.869.918. Pengembalian pajak sebesar SPMKP tersebut telah diterima pada tanggal 30 November 2023.

23. TAXATION (continued)

- g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

2. Tax assessment for fiscal year 2020 (continued)

Regional IV (ex. Pelindo IV)

On April 22, 2022, the Company received SKPLB related to corporate income tax for year 2020 amounting to Rp37,244,098.

After being compensated for the underpayment of tax for the same tax periods, the amount received was Rp30,395,852. The difference between the proposed amount and the agreed amount of Rp1,799,332 has been recorded in the 2022 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

3. Tax assessment for fiscal year 2021

Regional II (ex. Pelindo II)

On April 13, 2023, the Company received SKPLB amounting to Rp139,777,013 for overpayment of corporate income tax fiscal year 2021 from the amount submitted of Rp160,812,150. The difference between the amount submitted and the amount approved by the tax authorities amounting to Rp21,035,137 has been recorded in the 2023 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Regional III (ex. Pelindo III)

On April 13, 2023, the Company received SKPLB amounting to Rp45,869,918 for the overpayment of corporate income tax for the 2021 fiscal year. The Company's overpayment applications were approved by the tax authorities. On April 27, 2023, the Company received SPMKP amounting to Rp45,869,918. The tax refund in the amount of the SPMKP was received on November 30, 2023.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

- g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

3. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021 (lanjutan)

Regional IV (ex. Pelindo IV)

Pada tanggal 10 April 2023, Perusahaan menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun fiskal 2021 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp16.212.238 dari yang diajukan sebesar Rp16.573.211. Selisih antara SKPLB dengan jumlah yang diajukan sebesar Rp360.973 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Pada 10 April 2023, Perusahaan menerima SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk masa pajak September 2021 dengan jumlah sebesar Rp9.805.956 dari yang diajukan sebelumnya lebih bayar sebesar Rp5.441.845. Jumlah SKPKB dan yang dilaporkan sebelumnya sebesar Rp15.247.801 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

IPC TPK

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021

Pada tanggal 8 Juni 2023, IPC TPK menerima SKPLB atas pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2021 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp10.465.100 dari yang diajukan sebesar Rp12.050.719. Setelah dikompensasikan dengan kurang bayar pajak untuk masa pajak yang sama, jumlah yang diterima sebesar Rp9.382.434. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui senilai Rp1.585.619 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

23. TAXATION (continued)

- g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

3. Tax assessment for fiscal year 2021 (continued)

Regional IV (ex. Pelindo IV)

On April 10 2023, the Company received SKPLB for corporate income tax for the 2021 fiscal year with agreed amount of Rp16,212,238 from the proposed amount of Rp16,573,211. The difference between the SKPLB and the proposed amount of Rp360,973 has been recorded in the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

On April 10 2023, the Company received a SKPKB for Value Added Tax ("VAT") for the September 2021 tax period with amount of Rp9,805,956 from the previously proposed overpayment of Rp5,441,845. The sum of SKPKB and previously proposed amounting to Rp15,247,801 has been recorded in the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

IPC TPK

Tax assessment for fiscal year 2021

On June 8, 2023, IPC TPK received tax SKPLB for fiscal year 2021, with agreed amount is Rp10,465,100 from proposed amount of Rp12,050,719. After being compensated with underpayment for the same tax periods, the net refund received amounted to Rp9,382,434. The difference between the proposed amount and agreed amount with nominal Rp1,585,619 had been recorded in the current year's profit or loss and other comprehensive income statement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

IPC TPK (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020

Pada tanggal 18 Mei 2022, IPC TPK menerima SKPLB atas pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2020 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp22.138.083 dari yang diajukan sebesar Rp12.232.653. Atas kelebihan tersebut terlebih dahulu dikompensasikan ke utang pajak sebesar Rp837.382, sehingga nilai penerimaan lebih bayar pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2020 adalah sebesar Rp21.300.701 dan sudah diterima oleh IPC TPK pada tanggal 31 Mei 2022. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui senilai Rp9.068.048 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

PTP1

Pada tanggal 4 Februari 2022, PTP1 menerima SKPLB atas PPN untuk masa pajak Desember 2019 dan Desember 2020 masing-masing sebesar Rp111.137.216 dan Rp8.764.186.

Kemudian, PTP1 juga menerima SKPKB atas PPN untuk berbagai masa pajak di tahun 2019 dan 2020 dengan nilai pokok kurang bayar sebesar Rp119.901.402 dan denda sebesar Rp89.926.051.

PTP1 telah menerima pencairan restitusi tersebut pada tanggal 24 Februari 2022 dan 2 Maret 2022 dengan nilai masing-masing sebesar Rp8.764.186 dan Rp111.137.216. Untuk pembayaran atas nilai SKPKB telah dibayarkan pada tanggal 28 April 2022 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp88.554.088 yang dicatat sebagai penambah klaim restitusi pajak pertambahan nilai.

Atas terbitnya SKPLB dan SKPKB tersebut, PTP1 mengajukan banding ke pengadilan pajak pada tanggal 7 Februari 2023. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding tersebut masih dalam proses di pengadilan pajak.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

IPC TPK (continued)

Tax assessment for fiscal year 2020

On May 18, 2022, IPC TPK received tax SKPLB for fiscal year 2020, with agreed amount is Rp22,138,083 from proposed amount of Rp12,232,653. The amount had been compensated to tax expenses amounted to Rp837,382, thus the overpaid nominal of income tax for fiscal year 2020 is amounted Rp21,300,701 and had been received by the IPC TPK on May 31, 2022. The difference between the proposed amount and agreed amount with nominal Rp9,068,048 had been recorded in the current year's profit or loss and other comprehensive income statement.

PTP1

On February 4, 2022, PTP1 received SKPLB regarding VAT for tax period in December 2019 and December 2020, each amounting Rp111,137,216 and Rp8,764,186.

Furthermore, PTP1 also received SKPKB regarding VAT for various tax period in 2019 and 2020 with principal amount was Rp119,901,402 and penalty amount was Rp89,926,051.

PTP1 had been received the SKPLB disbursement on February 24, 2022 and March 2, 2022, each amounting Rp8,764,186 and Rp111,137,216. For payment of SKPKB had been paid on April 28, 2022 with amount paid was Rp88,554,088 and recorded as additional in claim for restitution of VAT.

For the issuance of the SKPLB and SKPKB, PTP1 had filed an appeal to tax court on February 7, 2023. Until the issuance date of this report, the appeal was still being proceed at the tax court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

PTPR

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020

Pada tanggal 22 Juli 2022, PTPR menerima SKPLB atas PPh Badan tahun fiskal 2020 sebesar Rp22.158.342. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan PTPR sebesar Rp1.421.158 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini. Pada tanggal 11 Agustus 2022, PTPR telah menerima pengembalian lebih bayar tersebut sebesar Rp21.426.306 setelah dikompensasikan dengan utang pajak penghasilan pasal 21 dan 23 sebesar Rp732.036.

SPSL

Pada tanggal 8 November 2022, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB atas Penghasilan Badan, SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai, dan SKPKB atas Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2017 masing-masing sebesar USD5.271.655, Rp59.140.947 dan Rp797.535.

Disamping itu, SPSL juga menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") atas Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2017 sebesar Rp4.116.157.

Pada tanggal 3 Februari 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp140.374.086 dan dicatat sebagai pajak dibayar di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 6 Februari 2023, SPSL mengajukan keberatan atas SKPKB Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2017 ke pengadilan pajak dengan nilai yang diajukan keberatan masing-masing sebesar USD5.177.601, Rp59.140.947, dan Rp431.493.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

PTPR

Tax assessment for fiscal year 2020

On July 22, 2022, PTPR received SKPLB on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal years 2020 amounting to Rp22,158,342. The difference of the tax assessment with the PTPR's record amounting to Rp1,421,158 has been recorded as part of current tax expense. On August 11, 2022, the PTPR has received this overpayment assessment amounting to Rp21,426,306 after being compensated with income tax payable of article tax 21 and 23 amounting to Rp732,036.

SPSL

On November 8, 2022, the Directorate General of Taxes issued SKPKB for the Company corporate income tax, SKPKB for the Company value-added tax, SKPKB for the Company income tax article 21 for fiscal year 2017 amounted to USD5,271,655, Rp59,140,947 and Rp797,535, respectively.

Furthermore, SPSL also received Tax Collection Notices ("STP") for the Company value-added tax for fiscal year 2017 as amounted Rp4,116,157.

On February 3, 2023, the Company has made a payment of Rp140,374,086 which is recorded as prepaid tax in the current year consolidated statement of financial position.

On February 6, 2023, SPSL had filed an appeal the tax court for the SKPKB corporate income tax, Value Added-tax and Income tax Article 21 for fiscal year 2017 amounted to USD5,177,601, Rp59,140,947 and Rp431,493, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

SPSL (lanjutan)

Pada tanggal 5 Desember 2023, Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Ketetapan nya mengabulkan seluruh keberatan terhadap SKPKB Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai setelah dikompensasi dengan STP PPN dan tahun 2017 masing-masing sebesar USD5.177.601 dan Rp55.024.790. Namun, Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan terhadap SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2017 sebesar Rp431.493. Atas penolakan keberatan SKPKB PPh 21 tersebut telah dicatat sebagai beban operasi lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2023.

MTI

Pada tanggal 18 Agustus 2022 dan 14 Oktober 2022, MTI menerima SKPLB atas Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2020 dengan jumlah yang disetujui masing-masing sebesar Rp2.543.627 dan Rp3.236.955 dari yang diajukan masing-masing sebesar Rp2.564.466 dan Rp3.309.401.

Disamping itu, pada tanggal 18 Agustus 2022, MTI menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2020 masing-masing sebesar Rp24.392 dan Rp16.641. MTI juga menerima surat tagihan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai tahun fiskal 2020 sebesar Rp98.386.

Pada tanggal 1 November 2022, MTI telah mencatat pengembalian lebih bayar setelah dikurangi kurang bayar serta tagihan pajak dengan total pengembalian sebesar Rp5.641.164 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021

Pada tanggal 12 April 2023, MTI menerima SKPLB atas PPh Badan dan PPN Masa Januari sampai dengan Maret dan PPN Masa Mei sampai dengan Oktober dan Desember untuk tahun fiskal 2021 dengan jumlah yang disetujui masing-masing sebesar Rp780.691 dan Rp1.916.896 dari yang diajukan masing-masing sebesar Rp799.443 dan Rp2.025.621.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

SPSL (lanjutan)

On December 5, 2023, the Directorate General of Taxes, through its Letter of Determination, granted all objections to the Corporate Income Tax and Value Added Tax after being compensated with VAT STP and 2017 respectively in the amount of USD5,177,601 and Rp55,024,790. However, the Directorate General of Taxes rejected the objection to the Corporate Income Tax Article 21 of 2017 amounting to IDR431,493. The rejection of this tax objection has been recorded as other operating expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income for 2023.

MTI

On August 18, 2022 and October 14, 2022, MTI received an SKPLB for Income Tax Article 23 and Value-Added Tax for the fiscal year 2020 with approved amount to Rp2,543,627 and Rp3,236,955 from proposed amount to Rp2,564,466 and Rp3,309,401, respectively.

Furthermore, on August 18, 2022, MTI received SKPKB for Income Tax Article 23 and Value-Added Tax for the fiscal year 2020 amounted to Rp24,392 and Rp16,641, respectively. MTI also received tax collection notices for Value-Added Tax fiscal year 2020 amounted to Rp98,386.

On November 1, 2022, MTI has recorded the tax overpayment after compensated with the tax underpayment and tax collection notices with total tax refund amounted to Rp5,641,164 in the current year's statement of profit or loss and other comprehensive income.

Tax assessment for fiscal year 2021

On April 12, 2023, MTI received an SKPLB on Corporate Income Tax and VAT for the January to March Period and VAT for the May to October and December Periods for fiscal year 2021 with an approved amount of Rp780,691 and Rp1,916,896 respectively from the proposed amount of Rp799,443 and Rp2,025,621 respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021
(lanjutan)

Atas lebih bayar tersebut terlebih dahulu dikompensasikan ke SKPKB atas PPN Masa April dan November, PPh 21 dan PPh 23 untuk tahun fiskal 2021 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp246.015, Rp35.655 dan Rp57.180.

Pada berbagai tanggal di bulan Mei 2023, MTI telah menerima lebih bayar tersebut sebesar Rp2.358.736. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui dan kompesasi telah dicatat sebagai beban operasi lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2022

Pada tanggal 20 Maret 2023, MTI menerima SKPLB dan STP atas PPN Masa Februari tahun fiskal 2022 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp941.334 dari yang diajukan sebesar Rp949.910. Pada tanggal 4 April 2023, MTI telah menerima lebih bayar tersebut sebesar Rp941.334. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui telah dicatat sebagai beban operasi lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 25 September 2023, MTI menerima SKPLB atas PPN beberapa Masa untuk tahun fiskal 2022 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp343.780 dari yang diajukan sebesar Rp377.276. Atas lebih bayar pajak tersebut dikompensasi ke SKPKB atas PPN Masa April dan September tahun 2022 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp8.576 dan Rp11.996. Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2023, MTI telah menerima lebih bayar tersebut sebesar Rp323.207. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui dan kompesasi telah dicatat sebagai beban operasi lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI (continued)

Tax assessment for fiscal year 2021
(continued)

The over payment was first compensated to the SKPKB on VAT for April and November Periods, Income Tax 21 and Income Tax 23 for fiscal year 2021 in the amount of Rp246,015, Rp35,655 and Rp57,180, respectively.

On various dates in May 2023, MTI has received the overpayment amounting to Rp2,358,736. The difference between the proposed amount and the approved amount and the compensation has been recorded as other operating expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Tax assessment for fiscal year 2022

On March 20, 2023, MTI received SKPLB and STP on VAT for February period of fiscal year 2022 with an approved amount of Rp941,334 from the proposed amount of Rp949,910. On April 4, 2023, MTI has received the overpayment amounting to Rp941,334. The difference between the amount proposed and the amount approved has been recorded as other operating expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

On September 25, 2023, MTI received SKPLB on several VAT periods for fiscal year 2022 with an approved amount of Rp343,780 from the proposed amount of Rp377,276. The tax overpayment was compensated to SKPKB on VAT for the April and September Periods of 2022 in the amount of Rp8,576 and Rp11,996, respectively. On various dates in October 2023, MTI has received the overpayment amounting to Rp323,207. The difference between the amount submitted and the amount approved and compensated has been recorded as other operating expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Rukindo

Pada tahun 2022, Rukindo mencatat lebih bayar atas PPN masa Januari sampai Desember sebesar Rp6.167.909. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp5.983.564 yang sudah diterima oleh Rukindo pada bulan Agustus 2022. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan Rukindo sebesar Rp184.346 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

JAI

Pada tahun 2020, JAI mencatat lebih bayar atas PPN masa Januari sampai Desember sebesar Rp17.707.446. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp17.208.810 yang sudah diterima oleh JAI pada bulan Februari 2022. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan JAI sebesar Rp498.636 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

SPJM

Pada tahun 2022, SPJM mencatat lebih bayar atas PPN masa Mei, Juni, dan Agustus sebesar Rp73.457.760. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp68.979.179 yang sudah diterima oleh SPJM pada bulan Desember 2022. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan SPJM sebesar Rp4.478.581 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

Rukindo

In 2022, Rukindo recorded an overpayment of VAT for the January to December period of Rp6,167,909. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the amount of the approved overpayment was Rp5,983,564 which had been received by Rukindo in August 2022. The difference in the results of the tax audit with Rukindo's records was Rp184,346 have been recorded as part of other operating expenses.

JAI

In 2020, JAI recorded an overpayment of VAT for the January to December period amounted Rp17,707,446. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the approved overpayment amounted to Rp17,208,810 which had been received by JAI in February 2022. The difference in the results of the tax audit with JAI's records amounted Rp498,636 has been recorded as part of other operating expenses.

SPJM

In 2022, SPJM recorded an overpayment of VAT for the May, June, and August period amounted Rp73,457,760. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the approved overpayment amounted to Rp68,979,179 which had been received by SPJM in December 2022. The difference in the results of the tax audit with SPJM's records amounted Rp4,478,581 has been recorded as part of other operating expenses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

BMS

Pada tanggal 9 Juni 2023, BMS telah menerima Surat Ketetapan Pajak yang menyetujui lebih bayar pajak pertambahan nilai periode Desember 2022 sejumlah Rp41.299.433 dari Rp41.301.115. Lebih bayar pajak tersebut sudah diterima oleh BMS pada tanggal 6 Juli 2023.

Pada tanggal 1 Maret 2023, BMS menerima SKPLB pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar Rp1.919.732. Lebih bayar pajak tersebut sudah diterima oleh BMS pada tanggal 30 Maret 2023.

Pada tanggal 20 Juni 2022, BMS menerima SKPLB pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp125.114 dari tagihan lebih bayar pajak Rp800.908. Selisih senilai Rp675.794 diperhitungkan dengan kurang bayar pajak pertambahan nilai periode Maret 2016. BMS tidak setuju dengan keputusan ini dan telah mengajukan banding senilai Rp675.794. Pengajuan banding atas selisih pajak penghasilan badan tahun 2020 yang diperhitungkan dengan kurang bayar pertambahan nilai periode Maret 2016 senilai Rp675.794 tersebut telah diterima oleh BMS secara berkala dengan penerimaan terakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.

BIMA

Pada tanggal 1 Juli 2022, BIMA telah menerima Surat Ketetapan Pajak yang menyetujui lebih bayar pajak pertambahan nilai periode Mei - Desember 2020 sejumlah Rp7.157.879 dari tagihan lebih bayar pajak Rp7.170.274. Selisih senilai Rp12.395 dibebankan sebagai beban pajak.

Pada tanggal 30 Juni 2022, BIMA telah menerima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang menyetujui lebih bayar pajak pertambahan nilai periode Januari - Desember 2021 dan periode Januari - Maret 2022 sejumlah Rp15.434.007 dari tagihan lebih bayar pajak Rp15.090.337. Selisih senilai Rp343.670 disajikan sebagai tagihan pajak.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

BMS

On June 9, 2023, BMS has received Tax Assessment Letter approving the overpayment of value added tax for the period of December 2022 amounting to Rp41,299,433 out of Rp41,301,115 claim for tax refund. The overpayment was received by BMS on July 6, 2023.

On March 1, 2023, BMS received SKPLB on corporate income tax for 2021 amounting to Rp1,919,732. The overpayment was received by BMS on March 30, 2023.

On June 20, 2022, BMS has received SKPLB of corporate income tax 2020 amounted to Rp125,114 out of Rp800,908 claim for tax refund. The difference of Rp675,794 was calculated by underpayment of value added tax for the period March 2016. BMS disagreed with this decision and submitted an appeal letter amounting to Rp675,794. The consent of appeals regarding the difference in 2020 corporate income tax calculated with the underpayment of value added for the March 2016 period amounting to Rp675,794 has been received by BMS periodically with the last receipt on August 31, 2023.

BIMA

On July 1, 2022, BIMA receiving Tax Assessment Letter approving the overpayment of value added tax for the period of May - December 2020 amounting to Rp7,157,879 out of Rp7,170,274 claim for tax refund. The difference amounting to Rp12,395 was charged to tax expense.

On June 30, 2022, BIMA received Refund of Overpayment Tax approving the overpayment of value added tax for the period of January - December 2021 and period of January - March 2022 amounting to Rp15,434,007 out of Rp15,090,337 claim for tax refund. The difference amounting to Rp343,670 was presented as estimated claim for tax refund.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

IKT

Pada berbagai tanggal di tahun 2023, IKT menerima surat tagihan pajak atas pajak penghasilan lain untuk berbagai masa pajak di tahun 2019, 2020 dan 2023 dan PPN untuk berbagai masa pajak di tahun 2020. IKT mengakui beban sebesar Rp21.831 sehubungan dengan tagihan tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

EDII

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021

Pada tanggal 21 Juni 2023, EDII menerima SKPLB atas pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2021 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp1.915.272 dari yang diajukan sebesar Rp1.915.272. Atas SKPLB tersebut terlebih dahulu dikompensasikan ke utang pajak sebesar Rp931.202, sehingga nilai penerimaan lebih bayar pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2021 adalah sebesar Rp984.070 dan sudah diterima oleh EDII pada tanggal 13 Juli 2023.

ILCS

Pajak Pertambahan Nilai Tahun Fiskal 2020

Pada tanggal 22 April 2022, ILCS menerima SKPLB atas PPN tahun 2020 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp2.949.278 dari yang diajukan sebesar Rp5.464.046. Pada tanggal 1 Juli 2022, ILCS mengajukan keberatan atas surat tagihan pajak sebesar Rp1.063.970. Selain itu, sebesar Rp1.338.304 dan Rp112.494 diajukan sebagai potongan surat ketetapan pajak kurang bayar luar negeri dan surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 10 November 2022, keberatan yang diajukan sebesar Rp1.063.970 telah ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak dan telah dibebankan oleh Perusahaan pada tersebut pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal 22 April 2022, ILCS menerima SKPKB PPh Badan untuk tahun fiskal 2020 sebesar Rp1.645.250 dari yang diajukan Lebih Bayar sebesar Rp2.069.176. Pada tanggal 15 Juli 2022, ILCS mengajukan surat keberatan atas hasil SKPKB PPh Badan 2020 tersebut.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

IKT

On various date in 2023, IKT also received tax underpayment for other income taxes for various tax periods in 2019, 2020 and 2023 and VAT for various tax periods in 2020. IKT recognized an expense of Rp21,831 in relation to these claims in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

EDII

Tax assessment for fiscal year 2021

On June 21, 2023, EDII received SKPLB for fiscal year 2021, with agreed amount is Rp1,915,272 from proposed amount of Rp1,915,272. The SKPLB had been compensated to tax expenses amounted to Rp931,202, thus the overpaid nominal of income tax for fiscal year 2021 is amounted Rp984,070 and had been received by EDII on July 13, 2023.

ILCS

Value Added Tax Fiscal Year 2020

On April 22, 2022, ILCS received an SKPLB of VAT for fiscal year 2020 with approved amount of Rp2,949,278 from proposed amount of Rp5,464,046. On July 1, 2022, ILCS filed an objection to the tax collection letter amounted to Rp1,063,970. In addition, Rp1,338,304 and Rp112,494 was proposed for deductions of foreign tax underpayment and income tax article 23 underpayment, respectively.

On November 10, 2022, the objection submitted amounting to Rp1,063,970 has been denied by the Director General of Taxes and has been charged by the Company in the income statement and other comprehensive income for the current year.

On April 22, 2022, ILCS received an SKPKB of corporate income tax for fiscal year 2020 amounting to Rp1,645,250 from the proposed overpayment of Rp2,069,176. On July 15, 2022, ILCS submitted an objection letter to the results of the 2020 Corporate Income Tax underpayments assessment letters.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

ILCS (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun Fiskal 2020

Pada tanggal 12 Mei 2023, ILCS menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan wajib pajak. Pada tanggal 10 Agustus 2023, ILCS mengajukan permohonan banding terhadap keputusan tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding oleh ILCS masih dalam proses di pengadilan pajak.

Pajak Penghasilan Badan Tahun Fiskal 2019

Pada tanggal 19 Mei 2021, ILCS menerima SKPKB atas PPh Badan tahun 2019 sebesar Rp15.032.728 dari yang sebelumnya diajukan Lebih Bayar sebesar Rp2.039.287. Pada tanggal 5 Agustus 2021, ILCS mengajukan Surat Keberatan atas hasil ketetapan tersebut. Pada tanggal 10 Juni 2022, pengajuan keberatan oleh ILCS tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Direktur Jenderal Pajak dan mengurangi jumlah SKPKB menjadi sebesar Rp14.867.681. Pada tanggal 5 September 2022, ILCS telah mengajukan banding ke pengadilan pajak yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, ILCS sedang menunggu putusan final dari pengadilan pajak.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

ILCS (continued)

Corporate Income Tax Fiscal Year 2020

On May 12, 2023, ILCS received a letter from the Director General of Taxes rejecting the taxpayer's objection. On August 10, 2023, ILCS filed an appeal against the decision. Until the issuance date of these financial statements, the appeal is still in process at the tax court.

Corporate Income Tax Fiscal Year 2019

On May 19, 2021, ILCS received an SKPKB of corporate income tax for fiscal year 2019 amounting to Rp15,032,728 from the previously proposed overpayment of Rp2,039,287. On August 5, 2021, ILCS submitted an objection letter to the decision. On June 10, 2022, the objection by ILCS was partially granted by the Director General of Taxes and reduced the amount of SKPKB to Rp14,867,681. On September 5, 2022, ILCS submitted an appeal to the tax court which was held on February 20, 2023.

Until the issuance date of these consolidated financial statements, ILCS is awaiting for the final decision from the tax court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. UTANG OBLIGASI

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut:

24. BONDS PAYABLE

As of December 31, 2023 and 2022, the details of bonds payable are as follows:

31 Desember/December 31, 2023							
Obligasi/ Bonds	Pokok Utang/ Debt Principal	Penerbit/ Issuer	Total/ Total	Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Discount and Transaction Cost	Neto/ Net	Jangka Pendek/ Current	Jangka Panjang/ Non- current
Senior Notes, Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD1.036.157.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ the Company (formerly Pelindo II)	15.958.233.289	(31.673.503)	15.926.559.786	-	15.926.559.786
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD465.200.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ the Company (formerly Pelindo II)	7.171.523.200	(121.775.059)	7.049.748.141	-	7.049.748.141
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ Issued in 2014	USD491.859.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ the Company (formerly Pelindo III)	7.582.498.344	(8.186.197)	7.574.312.147	7.574.312.147	-
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ Year 2016 Tranche D	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ the Company (formerly Pelindo I)	50.000.000	(58.056)	49.941.944	-	49.941.944
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/Year 2018 Tranche B	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ the Company (formerly Pelindo IV)	1.725.000.000	(798.399)	1.724.201.601	-	1.724.201.601
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/Year 2018 Tranche C	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ the Company (formerly Pelindo IV)	800.000.000	(711.122)	799.288.878	-	799.288.878
Total/Total					33.124.052.497	7.574.312.147	25.549.740.350

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. BONDS PAYABLE (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the details of bonds payable are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2022							
Obligasi/ Bonds	Pokok Utang/ Debt Principal	Penerbit/ Issuer	Total/ Total	Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Discount and Transaction Cost	Neto/ Net	Jangka Pendek/ Current	Jangka Panjang/ Non- current
Senior Notes, Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD1.058.375.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ the Company (formerly Pelindo II)	16.649.297.125	(56.502.824)	16.592.794.301	-	16.592.794.301
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD468.850.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ the Company (formerly Pelindo II)	7.375.479.350	(128.462.209)	7.247.017.141	-	7.247.017.141
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ Issued in 2014	USD491.859.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ the Company (formerly Pelindo III)	7.737.433.929	(15.463.015)	7.721.970.914	-	7.721.970.914
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ Issued in 2018	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ the Company (formerly Pelindo III)	7.865.500.000	(7.476.391)	7.858.023.609	7.858.023.609	-
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ Year 2016 Tranche C	Rp400.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ the Company (formerly Pelindo I)	400.000.000	(132.700)	399.867.300	399.867.300	-
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ Year 2016 Tranche D	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ the Company (formerly Pelindo I)	50.000.000	(81.279)	49.918.721	-	49.918.721
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ Year 2018 Tranche A	Rp380.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ the Company (formerly Pelindo IV)	380.000.000	(85.981)	379.914.019	379.914.019	-
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/Year 2018 Tranche B	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ the Company (formerly Pelindo IV)	1.707.297.043	(1.302.648)	1.705.994.395	-	1.705.994.395
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/Year 2018 Tranche C	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ the Company (formerly Pelindo IV)	800.000.000	(866.275)	799.133.725	-	799.133.725
Total/Total			42.965.007.447	(210.373.322)	42.754.634.125	8.637.804.928	34.116.829.197

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

24. BONDS PAYABLE (continued)

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Other information in relation to bonds payables as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Obligasi/ Bonds	Peringkat/ Rating	Wali Amanat/ Trustee	Tempat Pencatatan/Listed	Tanggal Terbit/Issue Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Periode Pembayaran Bunga/Intere st Payment Period	Tingkat Bunga per Tahun/ Interest Rate per Annum
Senior Notes, USD1.100.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015 i)	Baa2, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/and (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2025/ May 5, 2025	Setengah tahunan/ Semi-Annually	4,25%
Senior Notes, USD500.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015 i)	Baa2, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/and (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2045/ May 5, 2045	Setengah tahunan/ Semi-Annually	5,375%
Senior Notes USD500.000.000, Penerbitan Tahun 2014/ Issued in 2014 i)	Baa2, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/and (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	1 Oktober 2014/ October 1, 2014	1 Oktober 2024/ October 1, 2024	Setengah tahunan/Semi -Annually	4,875%
Senior Notes USD500.000.000, Penerbitan Tahun 2018/ Issued in 2018 i)	Baa2, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/and (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	2 Mei 2018/ May 2, 2018	2 Mei 2023/ May 2, 2023	Setengah tahunan/Semi -Annually	4,500%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ Year 2016 Tranche C ii)	idAAA/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2023/ June 21, 2023	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,250%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ Year 2016 Tranche D ii)	idAAA/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2026/ June 21, 2026	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,500%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ Year 2018 Tranche A i)	idAAA/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ July 4, 2018	4 Juli 2023/ July 4, 2023	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	8,000%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ Year 2018 Tranche B i)	idAAA/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ July 4, 2018	4 Juli 2025/ July 4, 2025	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,150%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ Year 2018 Tranche C i)	idAAA/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ July 4, 2018	4 Juli 2028/ July 4, 2028	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,350%

Jaminan

- i) Tidak dijamin
ii) Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan (dahulu Pelindo I) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP.

Collateral

- i) Unsecured
ii) These bonds are not guaranteed by special collaterals, but are guaranteed by all the Company's (formerly Pelindo I) assets, both moving and immovable goods, both existing and existing in the future to become collateral for bondholders in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the KUHP.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi digunakan untuk melunasi pinjaman dan rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan. Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

Pelunasan utang obligasi

Pada tahun 2023, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas utang obligasi dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Tanggal pelunasan/ Redemption date	Keterangan/ Description	Nilai nominal/ Face value
Senior Notes USD500.000.000, Penerbitan Tahun 2018/ Issued in 2018	27 April/April 2023	Pelunasan/ Redemption	USD500.000.000
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ Year 2016 Tranche C	20 Juni/June 2023	Pelunasan/ Redemption	Rp400.000.000
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/Year 2018 Tranche A	22 Juni/June 2023	Pelunasan/ Redemption	Rp 380.000.000

Lindung nilai arus kas

Proporsi dari Senior Notes USD1.100.000.000 Penerbitan Tahun 2015, Senior Notes USD500.000.000 Penerbitan Tahun 2015 dan Senior Notes USD500.000.000 Penerbitan Tahun 2014 telah memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas. Oleh karenanya, laba selisih kurs dari proporsi Senior Notes tersebut dalam mata uang asing dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain - neto sebesar Rp1.313.257.791 pada tahun 2023 dan pada tahun 2022 dicatat sebagai rugi komprehensif lain sebesar Rp2.820.468.471. Penghasilan komprehensif lain tersebut akan terealisasi ke laba rugi hingga tahun 2024, 2025 dan 2045 sesuai dengan jatuh tempo dari masing-masing Senior Notes tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, penghasilan komprehensif lain tersebut telah terealisasi ke laba rugi masing-masing sebesar Rp1.441.444.980 dan Rp131.422.241.

24. BONDS PAYABLE (continued)

Proceeds from the bond offering were used to refinance loan and will be used for the Company's expansion plan and the Company's general purposes. The Company must also maintain certain financial ratios.

Redemptions of bonds payable

On 2023, the Company have made redemptions of bonds payable with the following details:

Cash flow hedge

Proportions of Senior Notes USD1,100,000,000 Issued in 2015, Senior Notes USD500,000,000 Issued in 2015 and Senior Notes USD500,000,000 Issued in 2014 are designated as effective cash flow hedges. Therefore, the gain on foreign exchange of proportions of Senior Notes denominated in foreign currency were reported as part of other comprehensive income - net amounting to Rp1,313,257,791 in 2023 and in 2022 recorded as other comprehensive loss amounting to Rp2,820,468,471. Such other comprehensive income will be recycled to profit or loss until 2024, 2025 and 2045 in accordance with the maturity of each Senior Notes. For the year ended December 31, 2023 and 2022, such other comprehensive income has been recycled to profit or loss amounted to Rp1,441,444,980 and Rp131,422,241, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG

25. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Utang bank jangka panjang	14.346.782.184	7.831.272.217	Long-term bank loans
Bagian lancar	(445.526.921)	(152.606.159)	Current portion
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar	13.901.255.263	7.678.666.058	Long-term bank loans, net of current portion

31 Desember 2023	Bagian lancar/ Current portion	Bagian jangka panjang/Long term portion	Total	December 31, 2023
Perusahaan				The Company
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	128.473.090	2.440.988.710	2.569.461.800	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BTPN Tbk	128.473.090	2.440.988.710	2.569.461.800	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	77.072.292	1.464.373.548	1.541.445.840	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	51.381.528	976.249.032	1.027.630.560	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Subtotal	385.400.000	7.322.600.000	7.708.000.000	Sub-total
Entitas Anak				Subsidiaries
BMS				BMS
Bilateral				Bilateral
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	18.146.848	663.457.306	681.604.154	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk
CTP				CTP
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.920.251	1.449.784.539	1.464.704.790	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.945.967	1.606.345.599	1.621.291.566	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT CIMB Niaga Tbk	9.965.488	966.652.334	976.617.822	PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.969.883	870.078.693	879.048.576	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.987.193	483.757.762	488.744.955	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.305.399	286.332.550	288.637.949	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank DKI	2.496.178	285.716.663	288.212.841	PT Bank DKI
Subtotal	58.590.359	5.948.668.140	6.007.258.499	Sub-total
Total pokok utang	462.137.207	13.934.725.446	14.396.862.653	Total principal of loans
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(16.610.286)	(33.470.183)	(50.080.469)	Less: Unamortized costs of loans
Total	445.526.921	13.901.255.263	14.346.782.184	Total
31 Desember 2022	Bagian lancar/ Current portion	Bagian jangka panjang/ Long term portion	Total	December 31, 2022
Entitas Anak				Subsidiaries
PTP1				PTP1
Bilateral				Bilateral
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.259.147	1.019.918.076	1.075.177.223	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.205.138	428.294.981	451.500.119	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Indonesia Infrastructure Finance	23.205.138	428.294.981	451.500.119	PT Indonesia Infrastructure Finance
BMS				BMS
Bilateral				Bilateral
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	5.767.279	454.461.565	460.228.844	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk
Subtotal	107.436.702	2.330.969.603	2.438.406.305	Sub-total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

31 Desember 2022	Bagian lancar/ Current portion	Bagian jangka panjang/ Long term portion	Total	December 31, 2022
CTP				CTP
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.085.466	1.400.637.983	1.412.723.449	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.657.250	1.339.248.405	1.350.905.655	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT CIMB Niaga Tbk	8.063.089	934.373.568	942.436.657	PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.257.124	840.964.004	848.221.128	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.049.709	469.023.952	473.073.661	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1.613.436	186.953.337	188.566.773	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank DKI	1.612.568	186.866.462	188.479.030	PT Bank DKI
Subtotal	46.338.642	5.358.067.711	5.404.406.353	Sub-total
Total pokok utang	153.775.344	7.689.037.314	7.842.812.658	Total principal of loans
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(1.169.185)	(10.371.256)	(11.540.441)	Less: Unamortized costs of loans
Total	152.606.159	7.678.666.058	7.831.272.217	Total

Perusahaan

Berdasarkan Akta Perjanjian Ketentuan Umum Pembiayaan No. 19 tanggal 23 Desember 2022 dari Notaris Julius Purnawan, SH, MSi, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Agen Fasilitas Global.

Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Term Loan dan Term Financing AI Musyarakah sebesar maksimal USD750.000.000 dengan opsi akordion sebesar USD250.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

The Company

Based on the Deed of Agreement on General Provisions for Financing No. 19 dated December 23, 2022 from Notary Julius Purnawan, SH, MSi, notary in Jakarta, the Company obtained syndicated credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Facility Global Agent.

The Company obtained AI Musyarakah Term Loan and Term Financing facilities maximum amounting USD750,000,000 with accordion option amounting USD250,000,000, with the following details:

Agen Pinjaman Sindikasi/ Syndicated Loan Agent	Fasilitas A/ Facility A	Fasilitas B/ Facility B
Fasilitas Konvensional/Conventional Facilities		
PT Bank BTPN Tbk	USD166.675.000	USD83.325.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD166.675.000	USD83.325.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD99.990.000	USD50.010.000
Fasilitas Musyarakah/ Musyarakah Facility		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	USD66.660.000	USD33.340.000
Total	USD 500.000.000	USD 250.000.000

Pinjaman tersebut berjangka waktu 5 tahun digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan, termasuk pembiayaan kembali pinjaman yang telah ada. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga mengambang tahunan sebesar SOFR 3 bulan + margin 1%.

The loan will mature in 5 years period and was used to finance the Company operational activities, including the refinancing of its outstanding loan. The loan will bore interest at the annual floating rate of SOFR 3 Months + margin 1%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas Konvensional yang diberikan oleh para kreditur awal terdiri dari:

- Fasilitas Konvensional A: fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen, dan
- Fasilitas Konvensional B: fasilitas pinjaman berjangka tanpa komitmen.

Fasilitas Musyarakah yang diberikan oleh peserta Musyarakah awal terdiri dari:

- Fasilitas Musyarakah A: fasilitas pembiayaan berjangka *al musyarakah* dengan komitmen, dan
- Fasilitas Musyarakah B: fasilitas pembiayaan berjangka *al musyarakah* tanpa komitmen.

Perusahaan akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas untuk *general corporate purpose*, termasuk pembiayaan investasi maupun pembiayaan kembali pinjaman yang telah ada.

Berdasarkan surat permohonan No. KU.02.07/12/4/3/SKKS/KUMR/PLND-23 dan No. KU.02.07/12/4/4/SKKS/KUMR/PLND-23 pada tanggal 12 April 2023, Perusahaan mengajukan permohonan penarikan Fasilitas Konvensional term loan dengan Komitmen senilai USD433.340.000 dan penarikan Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Syariah dengan Komitmen senilai USD66.660.000.

Pada tanggal 26 April 2023, Perusahaan memperoleh Distribusi Penarikan Fasilitas Kredit Konvensional dan Fasilitas Musyarakah seri A (dengan komitmen) senilai USD500.000.000.

Pinjaman ini dijamin dengan seluruh aset milik Perusahaan atau Entitas Anak Perusahaan Material. Pembayaran angsuran pinjaman tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USDNihil. Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar USD500.000.000.

Proporsi dari pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk sejumlah USD433.340.000 telah memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas. Oleh karenanya, rugi selisih kurs dari proporsi pinjaman tersebut dalam mata uang asing dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain.

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Conventional facilities provided by the initial lenders consist of:

- *Conventional Facility A: committed term loan facility, and*
- *Conventional Facility B: uncommitted term loan facility.*

Musyarakah facilities provided by the initial Musyarakah participants consist of:

- *Musyarakah Facility A: committed term financing al musyarakah, and*
- *Musyarakah Facility B: uncommitted term financing al musyarakah.*

The Company will use all the amount borrowed by it based on the facility for general corporate purpose, including investment financing and refinancing existing loans.

Based on application letter No. KU.02.07/12/4/3/SKKS/KUMR/PLND-23 and No. KU.02.07/12/4/4/SKKS/KUMR/PLND-23 on April 12, 2023, the Company submitted an application for withdrawal of the Conventional Term Facility loan with a Commitment of USD433,340,000 and withdrawal of the Sharia Syndicated Financing Facility with a Commitment of USD66,660,000.

On April 26, 2023, the Company obtained a Series of Withdrawal Distribution of Conventional Credit Facility and Musyarakah Facility (with commitment) amounted USD500,000,000.

The loans are collateralized by all assets owned by the Company or Material Subsidiaries. Total installments payment for the year ended December 31, 2023 amounted to USDNil. As of December 31, 2023, the outstanding loan from this facility amounted to USD500,000,000.

Proportion of loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk totalling to USD433,340,000 are designated as effective cash flow hedges. Therefore, the losses on foreign were reported as part of other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Penghasilan komprehensif lain tersebut akan terrealisasi ke laba rugi hingga tahun 2027 sesuai dengan jatuh tempo pinjaman tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, belum terdapat penghasilan komprehensif lain yang terrealisasi ke laba rugi.

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
Perusahaan/The Company					
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2023-2027)	5	Tingkat suku bunga sebesar SOFR 3 bulan ditambah margin 1,00%/ Interest rate of 3 months average SOFR plus margin 1.00%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ The facility is guaranteed with collateral as follows: 1. Seluruh aset milik Perusahaan atau Entitas Anak Perusahaan Material/ All assets owned by the Company or Material Subsidiaries.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Such other comprehensive income will be recycled to profit or loss until 2027 in accordance with the maturity of loans. For the year ended December 31, 2023, there is no other comprehensive income has been recycled to profit or loss.

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
PTP1					
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2030)	12	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 3,85%/ Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin 3.85%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ The facility is guaranteed with collateral as follows: 1. Fidusia atas hasil klaim/proceed atas jaminan pembayaran (bank guarantee) dan/atau SBLC dan/atau asuransi atas proyek/ Fiduciary over the results of claims/proceed for bank guarantees and/or SBLC and/or insurance for the project. 2. Fidusia atas peralatan dan perlengkapan terminal petikemas BICT Fase II atas nama PTP1 yang dibiayai oleh kreditur sindikasi/ Fiduciary on BICT Phase II container terminal equipment and supplies on behalf of PTP1 financed by syndicated creditors. 3. Seluruh agunan tersebut wajib diasuransikan dengan mencantumkan banker's clause dengan nama agen jaminan atau nama kreditur sindikasi sebagai tertanggung oleh perusahaan asuransi rekanan kreditur sindikasi/ All collateral must be insured by including the banker's clause with the name of the collateral agent or the name of the syndicated creditor as insured by the syndicated creditor's partner insurance company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
PTP1					
Fasilitas Kredit Bilateral/ <i>Bilateral</i> Credit Facility	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several <i>installment</i> (2015-2030)	15	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 3,35%/ <i>Interest</i> <i>rate of 3</i> <i>months</i> average JIBOR plus margin 3.35%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ <i>The</i> <i>facility is guaranteed with collateral as follows:</i> 1. Tanah, bangunan dermaga dan <i>container</i> yard serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Petikemas Belawan Fase II dan dan diikat dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit fasilitas kredit/ <i>Land, jetty buildings</i> <i>and container yards as well as other objects</i> <i>attached to the land of the Belawan Container</i> <i>Terminal Phase II and bound with a Security</i> <i>Coverage Ratio of at least 120% of the credit</i> <i>facility limit.</i> 2. Seluruh hasil klaim atas garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur Dermaga dan Terminal Petikemas BICT II/ <i>All</i> <i>results of claims for guarantees and insurance on</i> <i>infrastructure development projects of Jetty and</i> <i>BICT II.</i>

PTP1

Pada tanggal 21 Maret 2023, PTP1 telah melakukan pelunasan seluruh fasilitas kredit sindikasi dari PT Indonesia Infrastructure Finance dan Bank Mandiri. Pada tanggal 18 April 2023, PTP1 telah melakukan pelunasan seluruh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri.

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

PTP1

On March 21, 2023, PTP1 has repaid all the syndicated credit facilities from PT Indonesia Infrastructure Finance and Bank Mandiri. On April 18, 2023, PTP1 has repaid the all investment credit facility from Bank Mandiri.

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
BMS					
Fasilitas Kredit Bilateral/ <i>Bilateral</i> Credit Facility	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Beberapa cicilan/several <i>installment</i> (2022-2029)	7	2,95% per tahun dengan JIBOR (selama periode konstruksi) dan 2,65% per tahun + JIBOR (setelah periode konstruksi selesai)/ <i>2.95% per</i> <i>annum with JIBOR</i> <i>(during the</i> <i>construction period)</i> <i>and 2.65% per</i> <i>annum + JIBOR</i> <i>(after the</i> <i>construction period</i> <i>is completed)</i>	Pinjaman ini dijamin oleh Rekening Penampungan dan <i>debt service reserve</i> <i>account (DSRA)</i> (Catatan 4) / <i>This loan is</i> <i>guaranteed by Escrow Account and debt</i> <i>service reserve account (DSRA) (Note 4).</i>

Pada tanggal 31 Desember 2023, BMS telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

As of December 31, 2023, BMS has complied all financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
CTP					
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15	Periode sebelum 22 Juni 2023/For the period before June 22, 2023: Tranche A: periode konstruksi /construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.80%) Tranche B: periode konstruksi /construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9.00%) Tranche C: periode konstruksi /construction period ATD+4.15% (min equiv. of 6.80%)	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung (Catatan 4), tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API, surat pernyataan tentang kesediaan CTP menggunakan konsultan pengawas penggunaan kredit serta surat pernyataan Notaris dari API selaku pemegang saham CTP yang menyatakan turut serta menyelesaikan proyek, memenuhi kewajiban rasio-rasio keuangan yang diwajibkan kepada CTP dan API selaku pemegang saham akan meminta ijin terlebih dahulu kepada para kreditur melalui agen fasilitas apabila API akan melakukan divestasi /
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15	Periode setelah 23 Juni 2023/For the period after June 23, 2023: Tranche A: periode operasional /operational period ATD+3.90% (min equiv. 6.55%) Tranche B: Periode operasional/ operational period ATD+5.94% (min equiv. of 9.00%) Tranche C: operasional period ATD+3.90% (min equiv. of 6.55%)	This loan is secured by concession rights, all invoices and operating revenues, escrow accounts (Note 4), receivables for insurance claims, CTP's guarantee from API and pledge of shares owned by API, statement letter regarding CTP's willingness to use a consultant to supervise the use of credit and a notarial statement from API as a shareholder of CTP stating that he participates in completing the project, fulfills the financial ratios required of CTP and API as the shareholder will seek prior permission from the creditors through the facility agent if API will divest.
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15		
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15		
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15		
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15		
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank DKI	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15		

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

CTP

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, fasilitas-fasilitas tersebut mengharuskan Grup untuk memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya persyaratan rasio keuangan.

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 30 Agustus 2023 oleh notaris Ariani Lakhsmijati Rachim tentang perubahan keempat terhadap akta pernyataan kembali atas kredit sindikasi No. 31 tanggal 26 Februari 2019, CTP mendapatkan tambahan fasilitas kredit *Tranche C* dengan limit maksimal sebesar Rp930.000.000 dari kreditur Bank Mandiri, Bank Jatim dan Bank DKI masing-masing sebesar Rp519.870.000, Rp205.065.000 dan Rp205.065.000.

Pada tanggal 31 Desember 2023, CTP tidak memenuhi sebagian persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman sehingga CTP mengirimkan surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Pada tanggal 21 Desember 2023, CTP telah memperoleh surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut.

26. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>
Rupiah		
Pihak ketiga		
PT Indonesia Infrastruktur Finance	697.862.861	584.328.133
Pihak berelasi (Catatan 44k)		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.372.013.613	1.160.435.133
Total	<u>2.069.876.474</u>	<u>1.744.763.266</u>

CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta. CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk ("SMI") dan lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 25) dimana SMI menjadi kreditur fasilitas *tranche B* yang bersifat Subordinasi.

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

CTP

Based on the loan agreement, the facilities requires the Group to comply to certain requirement, among others financial ratios as stipulated in the Loan Agreement.

Based on Deed No. 24 dated August 30, 2023 by notary Ariani Lakhsmijati Rachim regarding the fourth amendment to the deed of restatement of syndicated loan No. 31 dated February 26, 2019, CTP obtained additional *Tranche C* credit facilities with a maximum limit of Rp930,000,000 from creditors Bank Mandiri, Bank Jatim and Bank DKI amounting to Rp519,870,000, Rp205,065,000 and Rp205,065,000, respectively.

As of December 31, 2023, CTP did not comply to several financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement so that CTP sent the waiver letter on the incompliance of financial ratio covenant until December 31, 2023. On December 21, 2023, CTP has obtained waiver letters for non-fulfillment of the financial ratio requirements.

26. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION

	<u>Rupiah</u>
Third parties	
PT Indonesia Infrastruktur Finance	
Related parties (Notes 44k)	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	
Total	Total

CTP

Based on the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 45 dated December 21, 2018 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta which was restated based on the deed of Restatement of the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 31 dated February 26, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta. CTP entered into a Loan Syndicated with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk ("SMI") and other banking financial institution (Note 25) in which SMI is the creditor of the Subordinated *tranche B* facility.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**26. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK
(LANJUTAN)**

CTP (lanjutan)

Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi CTP untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan memiliki limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp7.404.162.000, dimana limit fasilitas kredit tranche B sebesar Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit termasuk *grace period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah Reference Rate + Margin eqv. 12,50% untuk *tranche B* yang bersifat Subordinasi.

Berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Penundukan Diri tertanggal 22 Oktober 2019, dinyatakan bahwa PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") selaku kreditur baru telah bergabung dengan pola incremental option dan telah menjadi salah satu kreditur untuk fasilitas *tranche B* dalam Perjanjian Kredit dengan limit pinjaman Rp521.248.000.

Pada tanggal 17 Desember 2019, para pihak sepakat untuk melakukan perubahan pertama terhadap Akta Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 Tanggal 26 Februari 2019, dimana para pihak sepakat untuk merubah limit fasilitas kredit investasi menjadi maksimal sebesar Rp7.321.248.000 dengan limit fasilitas kredit *tranche B* sebesar Rp1.521.248.000.

Berdasarkan surat Agen Fasilitas nomor SSK/3.2/1528 tanggal 9 Juni 2022, perihal perubahan masa penarikan fasilitas kredit CTP, para pihak sepakat untuk mengubah jangka waktu penarikan *Tranche A* dan *B* sampai dengan tanggal 30 September 2023 (57 bulan sejak tanggal perjanjian ini) atau paling lambat 9 bulan sejak tanggal pengoperasian keseluruhan proyek, mana yang lebih dulu terjadi.

Perjanjian kredit sindikasi telah mengalami perubahan keempat melalui Akta Nomor 24 tanggal 30 Agustus 2023 pada akta pernyataan kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 31 Tanggal 26 Februari 2019. Akta perubahan keempat tersebut mencakup penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit *Tranche B* selama masa konstruksi dari ATD+6,94% (equiv.9,48%) menjadi ATD+6,19% (min equiv. sebesar 9%) dan selama masa operasi dari ATD+6,69% (equiv. 9,23%) menjadi ATD+5,94% (min equiv. sebesar 9%).

**26. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL
INSTITUTION (CONTINUED)**

CTP (continued)

In accordance with the decision of the Syndicated Creditor for participation in the syndicated financing of CTP for the purpose of development financing investment has an Investment Credit facility limit of Rp7,404,162,000, which the credit facility limit of tranche B is Rp1,000,000,000 with a maximum period of 180 months from the signing of the credit agreement including grace period with the construction interest rate is the Reference Rate + Margin eqv. 12.50% for tranche B which is Subordinated.

Based on the Notification of Self-Submission Statement dated October 22, 2019, it was stated that PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") as a new creditor had joined the incremental option pattern and had become one of the creditors for tranche B facilities in the Credit Agreement with a loan limit of Rp521,248,000.

On December 17, 2019, the parties agreed to make the first amendment to the Deed of Restatement of Syndicated Credit Agreement No. 31 Dated February 26, 2019, where the parties agreed to change the investment credit facility limit to a maximum of Rp7,321,248,000 with credit facility limit of tranche B is Rp1,521,248,000.

Based on the Facility Agent's letter number SSK/3.2/1528 dated June 9, 2022, regarding the Amendment of Withdrawal Period of CTP Credit Facility, the parties agreed to amend the withdrawal period of Tranche A and B until September 30, 2023 (57 months from the date of this agreement) or no later than 9 months from the date of operation of the entire project, whichever occurs first.

The Syndicated Credit Agreement has enacted the Fourth Amendment through Deed Number 24 dated August 30, 2023, which pertains to the restatement deed of Syndicated Credit Agreement Number 31 dated February 26, 2019. This amendment incorporates an adjustment to the interest rate for the Tranche B credit facility during the construction phase from ATD+6.94% (equiv. 9.48%) to ATD+6.19% (equiv. at least 9%). Additionally, during the operational phase, the rate is adjusted from ATD+6.69% (equiv. 9.23%) to ATD+5.94% (equiv. at least 9%).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Premium JICT (Catatan 49h)	1.839.652.629	1.968.510.521
Sewa diterima di muka - NPCT1 (Catatan 49c)	1.121.591.603	1.170.100.949
Sewa tanah dan/atau bangunan	900.357.563	1.147.399.530
Premium TPK Koja (Catatan 49d)	402.163.542	429.898.958
Tanki Penyimpanan	1.467.237	-
Total	4.265.232.574	4.715.909.958
Bagian lancar (Catatan 20)	(72.262.428)	(171.138.682)
Total bagian jangka panjang	4.192.970.146	4.544.771.276

27. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

JICT Premium (Note 49h)
Advance rental fee - NPCT1 (Note 49c)
Land and/or building rental TPK Koja Premium (Note 49d)
Storage Tank
Total
Current portion (Note 20)
Total long-term portion

28. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Pihak ketiga		
Provisi pemeliharaan terminal Sea Terminal Management and Service Pte. Ltd., Singapura	579.260.245	400.217.319
Provisi pemeliharaan jalan tol	249.536.973	254.635.841
	4.709.465	2.387.365
Subtotal pihak ketiga	833.506.683	657.240.525
Pihak berelasi (Catatan 44l)	4.921.771	469.347.513
Total	838.428.454	1.126.588.038

28. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

Third parties
Provison for terminal maintenance Sea Terminal Management and Services Pte. Ltd., Singapura
Provison for toll road maintenance
Subtotal third parties
Related parties (Note 44l)
Total

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 berikut bunga terhutang (Catatan 49j).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 including the interest payable (Note 49j).

Provisi pemeliharaan terminal dan jalan tol merupakan provisi atas pemeliharaan terminal dan jalan tol terkait penerapan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa (Catatan 48a).

Provison for terminal and toll road maintenance represents provision for terminal maintenance and toll road related to the application of ISAK 16 concerning Service Concession Arrangements (Note 48a).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, PT Tower Watson Purbajaga, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, PT Emerald Delta Consulting, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan, Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan (dahulu PT Padma Radya Aktuaria), Kantor Konsultan Aktuaria Nandi dan Utama dan Kantor Konsultan Aktuaria Hanung Budiarto dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Tingkat diskonto	5,18% - 8,19%	5,52% - 7,44%	<i>Discount rate</i>
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	1,00% - 10,00%	2,00% - 10,00%	<i>Salary increase projection rate</i>
Tingkat mortalitas	TMI 2019 & TMI IV 2019	TMI 2019 & TMI IV 2019	<i>Mortality rate</i>
Tingkat cacat tetap	1-10% dari tabel amortisasi/ 1,00% untuk karyawan dibawah 30-40 tahun akan menurun sampai 0% pada usia 46-56 tahun/ 1.00% for employees under 30-40 years old will decrease to 0% at 46-56 years old	1-10% of amortization table	<i>Permanent disability rate</i>
Tingkat pengunduran diri	56 tahun/years	56 tahun/years	<i>Level of resignation</i>
Usia pensiun normal			<i>Normal pension age</i>

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The employee benefit liabilities are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Perusahaan			The Company
Program pensiun	712.369.101	630.783.130	<i>Pension program</i>
Program penghargaan masa bhakti	1.204.600.114	974.454.474	<i>Gratuity and compensation benefits</i>
Program kesehatan pensiunan	3.415.466.823	3.318.712.560	<i>Pension healthcare program</i>
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	400.632.551	383.941.290	<i>Other long-term employee benefits</i>
Subtotal	<u>5.733.068.589</u>	<u>5.307.891.454</u>	<i>Sub-total</i>
Entitas anak			Subsidiaries
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya	536.104.739	461.415.390	<i>Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program</i>
Total	<u>6.269.173.328</u>	<u>5.769.306.844</u>	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") dan untuk yang dipekerjakan sejak tahun 2004 dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas	1.668.051.605	1.600.593.581	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(1.100.657.945)	(1.166.992.320)	Fair value of plan assets
Defisit program	567.393.660	433.601.261	Deficit in plan
Dampak batas atas aset	144.975.441	197.181.869	Effect of asset ceiling
Liabilitas yang diakui	712.369.101	630.783.130	Recognized liabilities

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Pension Program

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in and before 2001 and managed by Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") and for employees hired with permanent status since 2004 managed by Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Biaya jasa kini	55.438.831	53.995.760	Current service cost
Biaya jasa lalu	(1.698.323)	-	Past service cost
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti - neto:			Net Interest on the net defined benefit liability (asset) - net:
- Bunga obligasi	29.045.591	29.758.706	Bond interest -
- Bunga aset	(35.419.980)	(34.469.739)	Asset interest -
- Bunga aset <i>ceiling</i>	6.374.388	4.711.033	Ceiling asset interest -
- Bunga atas kewajiban imbalan pasti	82.470.459	75.169.548	Interest on the defined - benefit obligation
- Pendapatan bunga atas aset program	(47.022.359)	(47.457.823)	Interest income on plan assets - Interest on the impact of the -
- Bunga atas dampak batas aset	3.785.257	8.193.913	asset limit
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	3.773.332	-	Remeasurement of other long term employee benefits
Beban yang diakui	96.747.196	89.901.398	Recognized expense

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Liabilitas awal tahun	630.783.130	626.265.347
Aplikasi IFRIC IAS 19		(19.375.565)
Beban yang diakui dalam laba rugi	96.747.196	89.901.398
Penghasilan komprehensif lain	81.720.380	57.169.146
luran pemberi kerja	(47.497.239)	(89.555.943)
Pembayaran manfaat	(49.384.366)	(33.621.253)
Liabilitas akhir tahun	712.369.101	630.783.130

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Pension Program (continued)

<i>Liabilities at beginning of year</i>
<i>Application of IFRIC IAS 19</i>
<i>Expense recognized in profit or loss</i>
<i>Other comprehensive income</i>
<i>Employer's contributions</i>
<i>Benefits payment</i>
<i>Liabilities at end of year</i>

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Nilai kini liabilitas - awal tahun	1.600.593.581	1.675.085.208
Aplikasi IFRIC IAS 19	-	(19.375.565)
Biaya jasa kini	55.438.831	53.995.760
Biaya jasa lalu	(1.698.323)	-
luran peserta program	1.567.352	883.604
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	82.470.459	75.169.548
Biaya bunga obligasi	29.045.591	29.758.706
Pembayaran manfaat	(189.499.185)	(172.883.907)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	90.133.299	(42.039.773)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	1.668.051.605	1.600.593.581

<i>Present value of liabilities - beginning of year</i>
<i>Application of IFRIC IAS 19</i>
<i>Current service cost</i>
<i>Past service cost</i>
<i>Plan participants' contributions</i>
<i>Interest on the defined benefit obligation</i>
<i>Bond interest costs</i>
<i>Benefits payment</i>
<i>Actuarial loss (gain)</i>
<i>Present value of liabilities - end of year</i>

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Nilai wajar aset program awal tahun	1.166.992.320	1.237.653.038
Pendapatan bunga atas aset program	47.022.359	47.457.823
luran pemberi kerja	47.497.239	89.555.943
luran peserta program	1.567.352	883.604
Pembayaran manfaat	(140.114.819)	(142.885.218)
Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas/aset imbalan pasti- neto	(25.883.817)	(29.330.638)
Imbal hasil ekspektasian aset program	35.419.980	34.469.739
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(9.526.831)	(70.811.971)
Imbalan yang dibayarkan	(22.315.838)	-
Nilai wajar aset program akhir tahun	1.100.657.945	1.166.992.320

<i>Fair value of program assets - beginning of year</i>
<i>Interest income on plan asset</i>
<i>Employer's contributions</i>
<i>Plan participants' contributions</i>
<i>Benefits payment</i>
<i>The return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability/asset</i>
<i>The expected return on plan assets</i>
<i>Actuarial gain (loss)</i>
<i>Rewards paid</i>
<i>Fair value of program assets - end of year</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

Aset program yang dimiliki oleh Grup adalah sebagai berikut:

- Aset Tetap 21,30%
- Reksa Dana 31,14%
- Investasi Saham 1,00%
- Surat Utang Negara 42,56%
- Deposito berjangka 0,92%
- Penyertaan langsung 3,08%

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Jatuh tempo <= 1 tahun	818.004.029	584.363.267
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	443.453.983	371.234.614
Jatuh tempo > 5 tahun	2.879.297.208	2.625.280.853
Total	4.140.755.220	3.580.878.734

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	1.574.406.095	1.782.279.525
Biaya jasa kini	47.562.008	62.499.330
Nilai kini liabilitas	1.747.747.493	1.599.470.482
Biaya jasa kini	61.121.068	50.618.171

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Pension Program (continued)

Plan assets owned by the Group is as follows:

- Fixed Assets 21.30%
- Mutual Funds 31.14%
- Investment in Shares 1.00%
- State Bonds 42.56%
- Time Deposits 0.92%
- Direct Investment 3.08%

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Jatuh tempo <= 1 tahun	818.004.029	584.363.267
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	443.453.983	371.234.614
Jatuh tempo > 5 tahun	2.879.297.208	2.625.280.853
Total	4.140.755.220	3.580.878.734

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations are as follows:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	1.574.406.095	1.782.279.525
Biaya jasa kini	47.562.008	62.499.330
Nilai kini liabilitas	1.747.747.493	1.599.470.482
Biaya jasa kini	61.121.068	50.618.171

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas	1.204.600.114	974.454.474	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	1.204.600.114	974.454.474	Recognized liabilities
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	2022	
Biaya jasa kini	67.896.144	56.865.507	Current service cost
Biaya jasa lalu	224.978	-	Past service cost
Biaya bunga	66.608.465	56.055.310	Interest cost
Beban yang diakui	134.729.587	112.920.817	Recognized expense
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Liabilitas awal tahun	974.454.474	915.903.689	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	134.729.587	112.920.817	Expense recognized in profit or loss
Rugi komprehensif lain	145.531.867	(5.277.252)	Other comprehensive loss
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(50.115.814)	(49.092.780)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	1.204.600.114	974.454.474	Liabilities at end of year
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	974.454.474	915.903.689	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	67.896.144	56.865.507	Current service cost
Biaya jasa lalu	224.978	-	Past service cost
Biaya bunga	66.608.465	56.055.310	Interest cost
Pembayaran manfaat dari pemberi kerja	(50.115.814)	(49.092.780)	Payment of benefits from the employer
Keuntungan (kerugian) aktuarial	145.531.867	(5.277.252)	Actuarial gain (loss)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	1.204.600.114	974.454.474	Present value of liabilities - end of year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Jatuh tempo <= 1 tahun	8.453.888	41.411.641	<i>Maturity <= 1 year</i>
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	44.069.556	337.191.119	<i>Maturity > 1 year and <= 5 years</i>
Jatuh tempo > 5 tahun	222.368.180	4.328.045.387	<i>Maturity > 5 years</i>
Total	274.891.624	4.706.648.147	Total

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	1.108.236.859	1.316.091.162	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	61.250.565	75.704.759	<i>Current service cost</i>
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	1.307.806.412	1.113.640.675	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	75.228.027	61.535.242	<i>Current service cost</i>

c. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga. Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas	3.415.466.823	3.318.712.560	<i>Present value of liabilities</i>
Nilai wajar aset program	-	-	<i>Fair value of plan assets</i>
Liabilitas yang diakui	3.415.466.823	3.318.712.560	Recognized liabilities

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statement of financial position based on the maturity date as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations are as follows:

c. Pension healthcare program

The Company also provides long term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family. The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Biaya jasa:		
- Biaya jasa kini	129.501.698	104.587.487
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti - neto:		
- Bunga atas kewajiban imbalan pasti	139.903.714	183.255.911
- Bunga obligasi	94.842.286	90.945.250
Beban yang diakui	364.247.698	378.788.648
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Liabilitas awal tahun	3.318.712.560	4.126.658.787
Aplikasi IFRIC IAS 19	-	772.559
Beban yang diakui dalam laba rugi	364.247.698	378.788.648
Penghasilan komprehensif lain	(125.256.492)	(1.063.155.721)
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(142.236.943)	(124.351.713)
Liabilitas akhir tahun	3.415.466.823	3.318.712.560
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Nilai kini liabilitas - awal tahun	3.318.712.560	4.126.658.787
Aplikasi IFRIC IAS 19	-	772.559
Biaya jasa kini	129.501.698	104.587.487
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	234.746.000	274.201.161
Pembayaran manfaat	(142.236.943)	(208.798.557)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(125.256.492)	(978.708.877)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	3.415.466.823	3.318.712.560

*Service cost:
Current service cost -
Net Interest on the net defined
benefit liability (asset) - net:
Interest on the defined -
benefit obligation
Bond interest -*

Recognized expense

*Liabilities at beginning of year
Application of IFRIC IAS 19*

*Expense recognized in profit or loss
Other comprehensive income*

Current year benefit payment

Liabilities at end of year

*Present value of liabilities - beginning
of year*

Application of IFRIC IAS 19

Current service cost

Interest on the defined benefit obligation

Benefit paid

Actuarial loss (gain)

Present value of liabilities - end of year

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statement of financial position based on the maturity date as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Jatuh tempo <= 1 tahun	146.165.067	90.994.133	<i>Maturity <= 1 year</i>
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	742.353.102	627.265.306	<i>Maturity > 1 year and <= 5 years</i>
Jatuh tempo > 5 tahun	7.278.377.704	7.255.897.622	<i>Maturity > 5 years</i>
Total	8.166.895.873	7.974.157.061	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase
Nilai kini liabilitas	2.932.632.919
Biaya jasa kini	101.293.883

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Nilai kini liabilitas	400.649.556	383.958.216
Nilai wajar aset program	(17.005)	(16.926)
Liabilitas yang diakui	400.632.551	383.941.290

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Biaya jasa kini	30.981.013	34.049.867
Biaya jasa lalu	2.812.493	-
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	24.519.205	19.783.906
Bunga obligasi	882.665	1.837.332
Pendapatan bunga atas aset program	(1.189)	(8.258)
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	(18.624.664)	(27.349.354)
Net Actuarial Losses (gains) recognized in year (OLTEB)	16.614.202	-
Beban yang diakui	57.183.725	28.313.493

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Pension healthcare program (continued)

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations are as follows:

	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	4.048.341.746	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	168.656.292	<i>Current service cost</i>

d. Other long-term employee benefits

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Liabilitas awal tahun	383.941.290	434.967.735	<i>Liabilities at beginning of year</i>
Aplikasi IFRIC IAS 19	-	(55.156.686)	<i>Application of IFRIC IAS 19</i>
Beban yang diakui dalam laba rugi	57.183.725	28.313.493	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	201.452	(6.147.805)	<i>Expenses (income) that recognized in other comprehensive incomes</i>
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(40.693.916)	(18.035.447)	<i>Current year benefit payment</i>
Liabilitas akhir tahun	400.632.551	383.941.290	<i>Liabilities at end of year</i>
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	383.958.216	435.094.715	<i>Present value of liabilities - beginning of year</i>
Aplikasi IFRIC IAS 19	-	(55.156.686)	<i>Application of IFRIC IAS 19</i>
Biaya jasa kini	30.981.013	34.049.867	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	2.812.493	-	<i>Past service cost</i>
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	24.519.205	19.783.906	<i>Interest on the defined benefit obligation</i>
Bunga obligasi	882.665	1.837.332	<i>Bond interest</i>
Pembayaran manfaat	(40.693.916)	(18.035.447)	<i>Benefits payment</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(1.810.120)	(33.615.471)	<i>Actuarial loss (gain)</i>
Nilai kini liabilitas akhir tahun	400.649.556	383.958.216	<i>Present value of liabilities - end of year</i>
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai wajar aset program awal tahun	16.926	126.980	<i>Fair value of program assets - beginning of year</i>
Pendapatan bunga atas aset program	1.189	8.258	<i>Interest income on program assets</i>
Pembayaran manfaat dari aset program	-	(113.747)	<i>Benefit paid by plan asset</i>
Imbal hasil atas aset program tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto	(1.110)	(4.565)	<i>The return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset)</i>
Nilai wajar aset program akhir tahun	17.005	16.926	<i>Fair value of program assets - end of year</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Jatuh tempo <= 1 tahun	47.500.786	63.595.287	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	208.761.068	166.258.175	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	1.591.413.220	1.423.190.288	Maturity > 5 years
Total	1.847.675.074	1.653.043.750	Total

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	375.198.220	429.369.303	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	28.343.674	34.049.977	Current service cost
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	426.404.620	377.388.928	Present value of liabilities
Biaya jasa kini	33.797.470	28.516.138	Current service cost

e. Program pensiun iuran pasti

Grup menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3"). Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, iuran program yang dibayarkan Grup masing-masing sebesar Rp54.919.295 dan Rp31.061.140.

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Other long-term employee benefits (continued)

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations are as follows:

e. Defined contribution plan

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3"). For the year ended December 31, 2023 and 2022, the contribution plans established by the Group amounted to Rp54,919,295 and Rp31,061,140, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
Negara Republik Indonesia	40.575.584	100,00%	40.575.584.000	Republic of Indonesia

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan sebagai berikut:

- 1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.
- 2) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

30. SHARE CAPITAL

The Shareholders of the Company as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Based on General Meeting of Shareholders held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Based on the Regulation of Government of The Republic of Indonesia No. 58 Year 2011 dated December 22, 2011 about Additional Participation Capital of The Republic of Indonesia in the Company as follows:

- 1) The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.
- 2) Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue and Expenditure Budget) in 2005.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

- 1) Approved the disbursement/placement of shares that were still in portfolio of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut: (lanjutan)

- 2) Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:
- a) Sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;
 - b) Sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dalam surat No. 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

30. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows: (continued)

- 2) Approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:
- a) Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Capital contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital;
 - b) Rp24 taken from the Company's reserve capitalization as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Based on the Deed of Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Company as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

Based on Minister of SOEs Decree Statement as The General Meeting of Shareholders of the Company, which was notarized in Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 dated August 21, 2019, The Government of the Republic of Indonesia, in this case represented by the Minister of SOEs, changed the types of shares that were originally without series became consisted of Series A Dwiwarna Shares and Series B shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dengan adanya perubahan jenis saham tersebut, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 3.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp1.444.029.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 1.444.028 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan penggabungan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV"), dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1g).

Dengan adanya penggabungan tersebut, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp33.000.000.000 yang terdiri dari 33.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 32.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp8.475.067.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 8.475.066 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Negara No. S-38/MBU/01/2022 yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 02 tanggal 9 Februari 2022, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan Anggaran Dasar.

30. SHARE CAPITAL (continued)

With the changes in types of shares, Company's authorized capital of the Company is Rp4,000,000,000 consisting of 4,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 3,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp1,444,029,000 consisting of 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 1,444,028 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

On October 1, 2021, the Company merged with Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV"), with the Company as the surviving entity (Note 1g).

With such merger, the Company's authorized capital of the company is Rp33,000,000,000 consisting of 33,000,000 shares and divided into 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 32,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp8,475,067,000 consisting of 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 8,475,066 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

Based on Minister of SOEs Decree Statement as No. S-38/MBU/01/2022 which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 02 dated February 9, 2022, The Government of the Republic Indonesia, in this case represented by the Minister of SOEs, changed the company's capital structure and Articles of Association.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dengan adanya perubahan struktur permodalan tersebut, modal dasar perseroan adalah Rp156.000.000.000 yang terbagi atas 156.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 dan 155.999.999 saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp40.575.584.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 40.575.583 saham seri B, masing-masing dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

31. MODAL DONASI

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

30. SHARE CAPITAL (continued)

With the changes in capital structure, Company's authorized capital of the Company is Rp156,000,000,000 consisting of 156,000,000 shares and divided into 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 155,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp40,575,584,000 consisting of 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 40,575,583 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

The amendment to the Company's Articles of Association has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-0014773.AH.01.02.Year 2022 dated March 1, 2022.

31. DONATED CAPITAL

In 1997, the Company received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447, respectively.

In 2009, the Company received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
<u>Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali</u>			<u>Difference in value of business combination transaction of entities und common control</u>
PHC	239.860.000	239.860.000	PHC
RSP	134.385.547	134.385.547	RSP
BMS	38.697.264	38.697.264	BMS
APBS	33.152.625	33.152.625	APBS
MMI	(8.565.613)	(8.565.613)	MMI
ILCS	(21.792.779)	(21.792.779)	ILCS
PMS	(34.886.436)	(34.886.436)	PMS
PMT (Catatan 1d)	(55.682.866)	(55.682.866)	PMT (Note 1d)
PTP1 (Catatan 1d)	(73.525.686)	(73.525.686)	PTP1 (Note 1d)
Rukindo	(317.597.475)	(317.597.475)	Rukindo
TPS	(514.813.986)	(514.813.986)	TPS
CTP (Catatan 1d)	(1.203.895.262)	(1.203.895.262)	CTP (Note 1d)
Transaksi penggabungan entitas sepengendali (Catatan 1g)	(32.100.517.000)	(32.100.517.000)	Merger transactions of entities under common control (Note 1g)
<u>Pengalihan barang milik negara</u>			<u>Transfer of government's assets</u>
Fasilitas Pelabuhan Dumai 2 (dua) unit kapal tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	414.128.745	414.128.745	Dumai Port Facility 2 (two) units of tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port
Dermaga Gunung Sitoli	53.560.436	53.560.436	Gunung Sitoli Jetty
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	37.991.647	37.991.647	Gunung Sitoli Port Facility
3 (tiga) unit forklift 3 ton dan 3 (tiga) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayati	1.686.300	1.686.300	3 (three) unit of 3 ton forklift and 3 (three) unit of 5 ton forklift in Malahayati Port
1 (satu) unit forklift 3 ton dan 1 (satu) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli	562.100	562.100	1 (one) unit of 3 ton forklift and 1 (one) unit of 5 ton forklift in Gunung Sitoli Port
Total	(33.358.048.450)	(33.358.048.450)	Total

a. Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif sebesar Rp32.100.517.000 merupakan selisih nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV sejumlah Rp39.131.554.121 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021 dengan nilai modal saham Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV pada saat penggabungan ke dalam Perusahaan, yaitu sebesar Rp7.031.038.000 (Catatan 1g). Penambahan modal tersebut akan dicatat sebagai modal saham pada saat telah disetujui dalam RUPS dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

a. Additional capital based on determination of definitive value amounting to Rp32,100,517,000 represents difference of definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV totalling to Rp39,131,554,121, which have been determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on December 29, 2021, with the share capital of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV at the time of merger to the Company, which amounting to Rp7,031,038,000 (Note 1g). The additional capital will be recorded as share capital upon approval of GMS and upon approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Transaksi penggabungan tersebut di atas menimbulkan selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar Rp32.100.517.000 sesuai dengan metode penyatuan kepemilikan (Catatan 1g).

- b. Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000. Atas pengalihan tersebut, Perusahaan memiliki 100% saham Rukindo.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan	108.820.525
Nilai pengalihan	426.418.000
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(317.597.475)

- c. Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat pada tanggal 30 Juni 2020, PBM IHC melakukan pengambilalihan 103.166 lembar saham RSP yang dimiliki oleh Perusahaan (67%) senilai Rp167.500.000 dengan mekanisme sebagai berikut:

- PBM IHC menerbitkan sejumlah 584.372 lembar saham baru kepada Perusahaan yang mewakili 2% saham di PBM IHC senilai Rp96.250.000. Sehingga PBM IHC memperoleh sebanyak 59.282 lembar saham RSP milik Perusahaan (38,5%).
- PBM IHC melakukan pembelian sejumlah 43.884 lembar saham RSP milik Perusahaan (28,5%) dengan mekanisme jual beli saham senilai Rp71.250.000.

PBM IHC telah melakukan penyetoran kas kepada Perusahaan pada tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp71.250.000.

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

The merger transaction as stated above created the difference in value of business combination transaction of entities under common control amounting to Rp32,100,517,000 in accordance with the pooling of interest method (Note 1g).

- b. On August 2, 2013, the Company received the transfer of all of Rukindo's shares owned by the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp426,418,000. After the transfer, the Company owned 100% shares of Rukindo.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entities under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of Rukindo as of transfer date	108,820,525
Transfer amount	426,418,000
Difference arising from business combination of entities under common control	(317,597,475)

- c. Based on Decision-Shares Conditional Agreement on June 30, 2020, PBM IHC takeover 103,166 RSP shares owned by the Company (67%) worth Rp167,500,000 by using the following mechanism:

- PBM IHC issued 584,372 new shares to the Company which represent 2% of the shares of PBM IHC amounting to Rp96,250,000. Therefore, PBM IHC acquired 59,282 RSP shares of the Company (38.5%).
- PBM IHC purchased a total of 43,884 RSP shares owned by the Company (28.5%) with a share sale and purchase mechanism worth Rp71,250,000.

PBM IHC have transferred cash to the Company amounted Rp71,250,000 on August 7, 2020 to the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham mengenai perubahan anggaran dasar RSP tanggal 7 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2020.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto RSP pada tanggal pengalihan	33.114.453
Nilai pengalihan	167.500.000
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(134.385.547)

- d. Berdasarkan akta jual beli saham tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan mengakuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49% porsi kepemilikan saham ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto ILCS pada tanggal pengalihan	27.407.221
Nilai pengalihan	49.200.000
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(21.792.779)

- e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MMI No. 54 tanggal 16 April 2021, SPSL mengakuisisi kepemilikan saham PT PP Properti Tbk pada MMI sebanyak 656.250.000 lembar saham atau setara dengan 21,13% porsi kepemilikan saham MMI dengan nilai pengalihan sebesar Rp70.087.500.

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

The Deed of Shareholder Decree Statement regarding the amendment to the RSP's articles of association dated August 7, 2020 has been notified to and received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on September 4, 2020.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of RSP as of transfer date
Transfer amount
Difference arising from business combination of entites under common control

- d. Based on share sales purchase agreement dated October 9, 2020, the Company acquired the share ownership of PT Multimedia Nusantara in ILCS of 4,900,000 shares or equivalent to 49% of the share ownership of ILCS with transfer value of Rp49,200,000.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of ILCS as of transfer date
Transfer amount
Difference arising from business combination of entites under common control

- e. Based on the Decision of the Meeting Deed of MMI No. 54 dated April 16, 2021, SPSL acquired the share ownership of PT PP Properti Tbk in MMI of 656,250,000 shares or equivalent to 21.13% of the share ownership of MMI with transfer value of Rp70,087,500.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto MMI pada tanggal pengalihan	61.521.887
Nilai pengalihan	70.087.500
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(8.565.613)

- f. Tambahan modal disetor APBS merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV masing-masing sebesar Rp33.152.625 pada tanggal 31 Desember 2022.
- g. Tambahan modal disetor PMS merupakan selisih antara nilai nominal saham milik APBS yang dibeli oleh PMS dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV dan PT Gerbang Samudra Utama dengan setoran modal saham sebesar masing-masing Rp29.236.335 dan Rp29.223.425 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
- h. Tambahan modal disetor TPS sebesar Rp514.813.986 merupakan selisih antara nilai nominal saham milik TPS yang dibeli oleh Perusahaan dari P&O Dover (Holdings) Limited dengan setoran modal saham.
- i. Tambahan modal disetor PHC merupakan selisih antara nilai nominal saham milik PHC yang dibeli oleh PBM IHC dari Perusahaan dengan setoran modal saham Rp239.860.000 pada tanggal 31 Desember 2020.
- j. Tambahan modal disetor PTP1 merupakan selisih antara nilai buku investasi PTP1 pada tanggal pengalihan dengan nilai pembelian saham yang dibeli oleh SPTP.

Aset neto PTP1 pada tanggal pengalihan	302.382.814
Nilai pengalihan	375.908.500
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(73.525.686)

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

*Net assets of MMI as of transfer date
Transfer amount*

Difference arising from business combination of entites under common control

- f. *Paid in capital of APBS represents the difference between the par value and the capital contribution received from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV amounting to Rp33,152,625 as of December 31, 2022.*
- g. *Paid in capital of PMS represents the difference between the par value owned by APBS which was purchased by PMS from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV and PT Gerbang Samudra Utama with the capital contribution received amounting to Rp29,236,335 and Rp29,223,425 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.*
- h. *Paid in capital of TPS amounting to Rp514,813,986 represents the difference between the par value owned by TPS which was purchased by the Company from P&O Dover (Holdings) Limited with the capital contribution received.*
- i. *Paid in capital of PHC represents the difference between the par value owned by PHC which was purchased by the PBM IHC from the Company with the capital contribution received amounting to Rp239,860,000 as of December 31, 2020.*
- j. *paid-in capital of PTP1 represents the difference between the book value of PTP1's investment and the purchase value of shares purchased by SPTP.*

*Net assets of PTP1 as of transfer date
Transfer amount*

Difference arising from business combination of entites under common control

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

k. Tambahan modal disetor PMT merupakan Selisih yang timbul perubahan nilai buku investasi setelah penerbitan saham baru dicatat sebagai tambahan modal disetor. Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022, para pemegang saham PMT menyetujui:

- Penambahan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp1.467.360.000 yang terbagi atas 1.467.360 saham menjadi sebesar Rp4.504.361.049 sejumlah 27.583.523 saham dengan nilai nominal Rp3.037.001.049, yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan.
- Pemberian hak put option kepada PP dan Waskita, dimana saham seri A yang dimiliki PP dan Waskita akan dibeli oleh Perusahaan dengan harga nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

l. Tambahan modal disetor yang berasal dari pengalihan barang milik negara merupakan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah ("PP") No. 10 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp527.133.217 yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

Rincian Barang Milik Negara yang dialihkan tersebut adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pelabuhan Dumai	414.128.745
2 (dua) unit kapal tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	53.560.436
Dermaga Gunung Sitoli	37.991.647
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	19.203.989
3 (tiga) unit forklift 3 ton dan 3 (tiga) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayati	1.686.300
1 (satu) unit forklift 3 ton dan 1 (satu) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli	562.100
Total	527.133.217

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

k. *Paid-in capital of PMT represents the difference arising from the change in book value of investment after the issuance of new shares is recorded as additional paid-in capital based on the resolution of PMT's Circular GMS dated October 24, 2022, PMT's shareholders approved:*

- *Increase in issued and paid-up capital from the original Rp1,467,360,000 divided into 1,467,360 shares to Rp4,504,361,049 totaling 27,583,523 shares with a nominal value of Rp3,037,001,049, all of which were subscribed by the Company.*
- *Granting put option rights to PP and Waskita, where series A shares owned by PP and Waskita will be purchased by the Company at a nominal price of Rp1,000,000 (full amount).*

l. *Additional paid-in capital arise from transfer of government's assets represents additional capital investment from the Republic of Indonesia which stipulated through Government Regulation ("PP") No. 10 Year 2019 dated February 22, 2019 amounting to Rp527,133,217 resulting from the transfer of Government's Assets under the Ministry of Transportation which provided from the Indonesian State Budget Year 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011.*

The details of the transferred Government's Assets are as follows:

Dumai Port Facility
<i>2 (two) units of tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port</i>
<i>Gunung Sitoli Jetty</i>
<i>Gunung Sitoli Port Facility</i>
<i>3 (three) unit of 3 ton forklift and 3 (three) unit of 5 ton forklift in Malahayati Port</i>
<i>1 (one) unit of 3 ton forklift and 1 (one) unit of 5 ton forklift in Gunung Sitoli Port</i>
Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**33. SELISIH NILAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK
NONPENGENDALI**

Rincian selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Penawaran saham perdana IKT	565.027.539	565.027.539
Penawaran saham perdana JAI	271.045.395	271.045.395
Peningkatan kepemilikan saham TCS	832.137	832.137
Total	836.905.071	836.905.071

Penurunan kepemilikan saham Perusahaan sehubungan dengan penawaran saham perdana di IKT dan JAI tidak disertai dengan hilangnya pengendalian.

34. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2023:

Perusahaan/ The Company	Rapat Umum Pemegang Saham/General Meeting of Shareholders	Pembagian Dividen/Dividend Distribution	Cadangan Umum/General Reserve	Tanggal Pembayaran Dividen/ Date of Dividend Payment
Perusahaan (dahulu Pelindo I,II,III,IV) (formerly Pelindo I,II,III,IV)	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.04 tanggal 19 Juni 2023/General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. 04 dated June 19, 2023	36,51% dari laba neto atau Rp1.377.200.000/ 36.51% of net income or amounted to Rp1,377,200,000	63,49% dari laba neto atau sebesar Rp2.395.345.951/ 63.49% of net income or amounted to Rp2,395,345,951	14 Juli 2023, 15 September 2023, dan 15 November 2023/ July 14, 2023, September 15, 2023, and November 15, 2023

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2022:

Perusahaan/ The Company	Rapat Umum Pemegang Saham/General Meeting of Shareholders	Pembagian Dividen/Dividend Distribution	Cadangan Umum/General Reserve	Tanggal Pembayaran Dividen/ Date of Dividend Payment
Perusahaan (dahulu Pelindo I,II,III,IV) (formerly Pelindo I,II,III,IV)	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.02 tanggal 18 Mei 2022/General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. 02 dated May 18, 2022	40,00% dari laba neto atau Rp1.316.854.000/ 40.00% of net income or amounted to Rp1,316,854,000	60,00% dari laba neto atau sebesar Rp1.975.279.734/ 60.00% of net income or amounted to Rp1,975,279,734	16 Juni 2022/ June 16, 2022

**33. DIFFERENCE IN VALUE OF TRANSACTIONS
WITH NON-CONTROLLING INTEREST**

The details of difference in value of transactions with non-controlling interest are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Initial public offering of IKT	565.027.539	565.027.539
Initial public offering of JAI	271.045.395	271.045.395
Increase in share ownership of TCS	832.137	832.137
Total	836.905.071	836.905.071

The decrease in company ownership in connection with the initial public offerings in IKT and JAI which is not accompanied by loss of control.

34. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2023:

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2022:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

35. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

35. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(1.380.419.751)	(1.389.753.251)	Remeasurement of defined benefit plans
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui rugi komprehensif lain	41.965.053	(66.738.110)	Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive loss
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(1.507.210.680)	(2.820.468.471)	Effective portion of gains and losses on hedging instrument in cash flow hedges
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	472.646.801	502.800.135	Exchange difference due to financial statements translation
Total	(2.373.018.577)	(3.774.159.697)	Total

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan terutama merupakan penjabaran laporan keuangan JICT, NPCT1 dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat.

Exchange difference due to financial statements translation mainly represents translation of financial statements of JICT, NPCT1 and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

36. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

36. NON-CONTROLLING INTERESTS

	Aset Neto/Net Assets		Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)		
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, 2023 2022		
BJTI	513.166.587	462.406.181	50.760.406	27.329.060	BJTI
IKT	353.278.198	294.896.513	58.381.685	56.554.399	IKT
PTP1	315.692.501	315.597.771	94.730	-	PTP1
PMT	204.653.911	203.492.958	1.160.953	(37.066.607)	PMT
JAI	193.636.892	153.894.814	39.742.078	18.218.861	JAI
PMS	148.138.184	124.272.635	23.865.549	60.590.274	PMS
EPI	60.318.262	56.500.933	3.817.329	1.776.922	EPI
KKT	43.232.339	36.522.483	6.709.856	3.720.848	KKT
PDS	18.087.578	17.523.553	564.025	4.068.275	PDS
TPS	16.027.924	13.288.411	2.739.513	2.582.856	TPS
MTI	7.202.531	6.984.080	218.451	903.367	MTI
TTL	5.400.518	4.929.027	471.491	718.496	TTL
PIL	1.027.943	955.795	72.148	84.032	PIL
EII	658.962	602.414	56.548	147.540	EII
PHCM	169.114	157.283	11.831	13.348	PHCM
EDII	(10.228.685)	(12.021.072)	1.792.387	(3.717.765)	EDII
Total	1.870.462.759	1.680.003.779	190.458.980	135.923.906	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

37. PENDAPATAN OPERASI

37. OPERATING REVENUES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Pelayanan terminal petikemas	13.454.823.324	12.927.659.143	Container services
Pelayanan jasa kapal	5.978.487.372	5.090.014.199	Vessel services
Pelayanan jasa terminal	4.843.880.284	4.499.450.059	Terminal services
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	3.869.774.935	3.787.257.944	Land, building, water and electricity services
Kerjasama dan fee for services	986.715.808	1.233.329.761	Partnership and fee for services
Pelayanan jasa barang	439.614.764	515.398.786	Cargo services
Pendapatan pas pelabuhan dan terminal	414.078.774	441.126.796	Port and terminal entry fee
Pengusahaan peralatan	356.232.673	370.796.897	Equipment services
Jasa maritim dan pengerukan	264.941.242	405.778.070	Marine and dredging services
Jasa logistik	180.968.551	159.334.977	Logistic services
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	119.849.121	155.363.848	Network services and consultant of information system
Pelayanan kesehatan	24.198.978	16.448.305	Medical services
Lain-lain	84.651.876	98.645.350	Others
Total	31.018.217.702	29.700.604.135	Total

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada transaksi dari satu pelanggan dengan total penjualan kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During the year ended as of December 31, 2023 and 2022, there were no sales made from any single customer with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

38. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

38. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Fase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya dan Jalan Tol Cibitung - Cilincing. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Phase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya and Cibitung - Cilincing Toll Road. Construction revenue is measured using cost method, where all costs are directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Pendapatan konstruksi	2.897.789.567	2.397.701.575	Construction revenues
Beban konstruksi	(2.897.789.567)	(2.397.701.575)	Construction expenses

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

39. BEBAN OPERASI

39. OPERATING EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Pegawai	5.801.056.215	5.801.903.082	Employee
Kerja sama mitra usaha	5.397.062.045	6.550.559.411	Partnership
Umum	3.733.733.087	3.309.282.651	General
Penyusutan dan amortisasi	3.673.836.192	3.567.862.133	Depreciation and amortization
Bahan bakar dan bahan habis pakai	3.372.092.843	2.367.251.451	Fuels and supplies
Pemeliharaan	1.801.592.392	1.030.572.335	Maintenance
Asuransi	447.830.815	433.675.572	Insurance
Administrasi kantor	116.027.882	93.322.556	Office administration
Total	24.343.231.471	23.154.429.191	Total

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports.

Beban umum terutama merupakan beban jasa konsultan, penyisihan penurunan nilai piutang, kontribusi kepada pihak lain, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of consultants, allowance for impairment of receivables, contribution to the other parties, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada transaksi dari satu pemasok dengan total pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During the year ended as of December 31, 2023 and 2022, there were no purchase made from any single supplier with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

40. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA - NETO

40. OTHER OPERATING INCOME - NET

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Amortisasi premium (Catatan 49e dan 49f)	154.194.408	161.033.845	Amortization of premium (Notes 49e and 49f)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	59.054.235	(182.036.994)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Pendapatan denda	42.869.047	92.212.745	Income from penalties
Penerimaan aset <i>build, operate, transfer</i>	38.842.587	26.537.083	Receive of build, operate, transfer assets
Keuntungan dari transaksi peningkatan kepemilikan saham pada entitas asosiasi	2.093.130	141.671.533	Gain from transaction of shares ownership increase in associate
Laba (rugi) penjualan aset tetap - neto	1.935.063	(748.245)	Gain (loss) on sale of fixed asset - net
Beban denda	(68.567.655)	(34.792.709)	Expenses from penalties
Efek penyesuaian IFRIC 19	-	82.855.722	Effect of IFRIC 19 adjustment
Lain-lain - neto	80.175.378	281.912.517	Others - net
Total	310.596.193	568.645.497	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. PENDAPATAN KEUANGAN

41. FINANCE INCOME

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Pendapatan bunga deposito	480.169.836	247.860.700	<i>Interest income from deposits</i>
Pendapatan jasa giro	127.747.368	104.501.094	<i>Interest income on current account</i>
Pendapatan bunga pinjaman	19.378.228	28.128.476	<i>Interest income from loan</i>
Total	627.295.432	380.490.270	Total

42. BEBAN KEUANGAN

42. FINANCE COSTS

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Beban bunga, amortisasi diskonto dan biaya transaksi	1.780.775.179	2.036.128.007	<i>Interest expenses, amortization of discount and transaction cost</i>
Beban bunga pinjaman bank	910.572.589	391.025.313	<i>Interest expense from bank loans</i>
Beban bunga provisi konsesi	117.504.090	96.208.028	<i>Provision interest expenses</i>
Beban bunga sewa	34.441.109	30.313.025	<i>Lease interest expenses</i>
Beban lain-lain	16.826.886	17.368.595	<i>Other expenses</i>
Total	2.860.119.853	2.571.042.968	Total

43. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

43. EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
BKMS	355.909.536	164.502.001	<i>BKMS</i>
Ambapers	13.921.206	3.040.547	<i>Ambapers</i>
PTI	11.741.432	2.951.271	<i>PTI</i>
RSP	11.740.049	10.210.479	<i>RSP</i>
PHC	8.156.012	(24.198.315)	<i>PHC</i>
JICT	7.917.201	62.413.034	<i>JICT</i>
TNU	2.349.252	(7.601.852)	<i>TNU</i>
LNG	535.730	380.592	<i>LNG</i>
BNCT	(736.124)	-	<i>BNCT</i>
PCN	(1.927.628)	102.185	<i>PCN</i>
JBT	(10.258.202)	(14.278.018)	<i>JBT</i>
NPCT1	(28.970.904)	105.093.768	<i>NPCT1</i>
Total	370.377.560	302.615.692	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Grup dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengeendalian dengan Grup.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Pemegang saham/ <i>Controlling Shareholder</i>	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi/ <i>Concession service</i>
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa Perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Mandiri Taspen	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Wika Haka Joint Operation	Jasa Pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the Company has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or have significant influence over these entities in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the controlling shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ <i>Government-related entity (continued)</i>	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4")	Jasa pensiun/ <i>Pension services</i>
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Utama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Penjualan jasa/ <i>Sales</i>
	Direktorat Jenderal Pajak	Perpajakan/ <i>Taxation</i>
	Badan Layanan Umum Sekretariat Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Pinjaman/ <i>Loan</i>
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT BNI Danareksa Sekuritas	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Jasa Klasifikasi dan Registrasi Kapal/ <i>Ship classification and registration services</i>
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa/ <i>Sales</i>
	PT Semen Padang (Persero)	Penjualan jasa/ <i>Sales</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ Government-related entity (continued)	Koperasi Pegawai PT Pelindo III	Penjualan jasa/ Sales
	PT Yodya Karya (Persero)	Konsultan/ Consultant
	PT Indonesia Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pinjaman/Loan
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Adhi Guna Putera	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Belawan New Container Terminal	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	Indonesia National Single Window	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	Konsorsium PP – Waskita	Jasa Pembangunan/ Construction Services
	Perum DAMRI	Pinjaman/ Loan
	PT Bank Mandiri Taspen	Jasa Perbankan / Banking Services
	PT Telekomunikasi Selular	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Jawa Satu Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/Government-related entity (continued)	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa/Sales
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa/Sales
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa/Sales
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa/Sales
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa/Sales
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa/Sales
	PT Semen Tonasa	Penjualan jasa/Sales
	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	Penjualan jasa/Sales
	Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3")	Jasa Pensiun/Pension services
	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Petrokimia Gresik	Penjualan jasa/Sales
	PT Prima Citra Nutrindo	Jasa Boga/Catering
	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT PP Presisi Tbk	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Bukit Prima Bahari	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operating activities
	PT Sarana Bandar Nasional	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Portek Indonesia	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Pengembangan Listrik Nasional Energi Gas	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/Government-related entity (continued)	PT Taspen (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	BPJS Ketenagakerjaan	Penjualan jasa/Sales
	PT Daya Radar Utama	Penjualan jasa/Sales
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	Lembaga Manajemen Aset Negara	Piutang pembebasan lahan/ Land acquisition receivables
	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Penjualan jasa/Sales
	PT Asuransi Kredit Indonesia	Jasa asuransi/Insurance services
	PT Asuransi Jiwasraya	Jasa asuransi/Insurance services
	PT Pertamina Hulu Energi	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Waskita Beton Precast Tbk	Jasa Pembangunan/ Construction services
	PT Asuransi Jasa Indonesia	Jasa Asuransi/Insurance services
	PT Berdikari (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Terminal Nilam Utara	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas asosiasi/Associate entities	JICT	Sewa dan royalti/ Rental and royalty
	NPCT1	Investasi/Investment
	RSP	Jasa Kesehatan/Health services
	PHC	Jasa Kesehatan/Health services
	KSO TPK KOJA	Penjualan/Sales
	BKMS	Pinjaman, penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Loan, sales and operational activities
	Ambapers	Penjualan jasa/Sales

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalents (Note 4)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.744.005.878	1,39	1.724.537.132	1,46	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.362.043.409	1,09	2.450.226.104	2,07	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	73.860.457	0,06	137.311.483	0,12	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	71.014.197	0,06	9.016.541	0,01	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	59.607.199	0,05	73.129.253	0,06	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Total	3.310.531.140	2,65	4.394.220.513	3,72	Total
Dolar AS					US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	455.167.517	0,36	1.478.727.324	1,25	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.940.651	0,01	6.829.657	0,01	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.195.150	0,00	9.588.955	0,01	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	-	49.541	0,00	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Lain-lain	306.796	0,00	-	-	Others
Total	466.610.114	0,37	1.495.195.477	1,27	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

a. Kas dan setara kas (Catatan 4) (lanjutan)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Deposito Berjangka				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Negara				
Indonesia (Persero) Tbk	2.561.806.538	2,05	2.441.799.450	2,06
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.111.935.636	1,69	1.160.768.887	0,98
PT Bank Rakyat				
Indonesia (Persero) Tbk	830.499.034	0,66	1.269.942.345	1,07
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	703.000.000	0,56	463.064.119	0,39
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.020.000	0,05	1.032.310.000	0,87
PT Bank Raya Indonesia Tbk	32.150.000	0,03	-	-
PT Bank Mandiri Taspen	-	-	10.000.000	0,01
Total	6.304.411.208	5,04	6.377.884.801	5,38
<u>Dolar AS</u>				
PT Bank Rakyat				
Indonesia (Persero) Tbk	80.387.729	0,06	79.720.239	0,07
PT Bank Negara				
Indonesia (Persero) Tbk	78.511.580	0,06	77.470.447	0,07
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.562.000	0,01	11.798.250	0,01
Total	170.461.309	0,13	168.988.936	0,15

*) dari total aset

b. Investasi jangka pendek (Catatan 5)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Deposito berjangka				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Tabungan				
Negara (Persero) Tbk	2.660.000.000	2,13	1.052.500.000	0,89
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.000.000	0,10	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	615.000.000	0,52
<u>Dolar AS</u>				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.094.582.414	0,87	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	1.736.427.108	1,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	519.123.000	0,44
Total	3.769.582.414	3,10	3.923.050.108	3,32

*) dari total aset

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

a. Cash and cash equivalents (Note 4) (continued)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Time Deposits				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Negara				
Indonesia (Persero) Tbk	2.561.806.538	2,05	2.441.799.450	2,06
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.111.935.636	1,69	1.160.768.887	0,98
PT Bank Rakyat				
Indonesia (Persero) Tbk	830.499.034	0,66	1.269.942.345	1,07
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	703.000.000	0,56	463.064.119	0,39
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.020.000	0,05	1.032.310.000	0,87
PT Bank Raya Indonesia Tbk	32.150.000	0,03	-	-
PT Bank Mandiri Taspen	-	-	10.000.000	0,01
Total	6.304.411.208	5,04	6.377.884.801	5,38
<u>US Dollar</u>				
PT Bank Rakyat				
Indonesia (Persero) Tbk	80.387.729	0,06	79.720.239	0,07
PT Bank Negara				
Indonesia (Persero) Tbk	78.511.580	0,06	77.470.447	0,07
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.562.000	0,01	11.798.250	0,01
Total	170.461.309	0,13	168.988.936	0,15

*) from total assets

b. Short-term investment (Note 5)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Time deposits				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.660.000.000	2,13	1.052.500.000	0,89
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.000.000	0,10	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	615.000.000	0,52
<u>US Dollar</u>				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.094.582.414	0,87	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	1.736.427.108	1,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	519.123.000	0,44
Total	3.769.582.414	3,10	3.923.050.108	3,32

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Piutang usaha (Catatan 6)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
PT Pertamina Trans Kontinental	171.754.949	0,15	186.892.251	0,16	PT Pertamina Trans Kontinental
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	118.796.482	0,10	37.605.527	0,03	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	82.285.569	0,07	77.330.943	0,07	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Jakarta Lloyd (Persero)	51.974.106	0,04	61.088.111	0,05	PT Jakarta Lloyd (Persero)
PT Petrokimia Gresik	32.069.443	0,03	32.354.443	0,03	PT Petrokimia Gresik
PT Freeport Indonesia	31.674.056	0,03	-	-	PT Freeport Indonesia
PT Jakarta International Container Terminal	19.104.905	0,02	366.255	0,00	PT Jakarta International Container Terminal
PT Pertamina Patra Niaga	12.832.734	0,01	25.444.746	0,02	PT Pertamina Patra Niaga
PT Bahtera Adhiguna	10.658.801	0,01	10.300.147	0,01	PT Bahtera Adhiguna
PT Perikanan Nusantara (Persero)	8.147.254	0,01	8.327.660	0,01	PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	7.809.747	0,01	9.061.653	0,01	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
KOJA	7.778.172	0,01	-	-	KOJA
PT Semen Tonasa	6.665.686	0,01	4.235.056	0,00	PT Semen Tonasa
PT Berdikari (Persero)	5.827.746	0,00	10.859.875	0,01	PT Berdikari (Persero)
PT Dharma Lautan Nusantara Instansi Pemerintah	5.652.008	0,00	5.650.682	0,00	PT Dharma Lautan Nusantara Government Institution
PT Semen Padang (Persero)	861.145	0,00	-	-	PT Semen Padang (Persero)
Tentara Nasional Indonesia	5.068.433	0,00	5.100.009	0,00	Indonesian Armed Forces
PHC	4.240.565	0,00	7.165.459	0,01	PHC
PT Pertamina (Persero)	4.377.923	0,00	1.529.954	0,00	PT Pertamina (Persero)
PT Semen Baturaja Tbk	4.376.233	0,00	3.750.749	0,00	PT Semen Baturaja Tbk
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	4.365.599	0,00	-	-	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2.738.940	0,00	-	-	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Sarana Bandar Nasional	2.661.926	0,00	6.093.250	0,00	PT Sarana Bandar Nasional
PT Portek Indonesia	1.856.489	0,00	-	-	PT Portek Indonesia
PT Telekomunikasi Seluler	1.802.165	0,00	2.004.544	0,00	PT Telekomunikasi Seluler
PT Bukit Asam Tbk	716.485	0,00	-	-	PT Bukit Asam Tbk
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1.255.090	0,00	5.311	0,00	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.219.656	0,00	9.593.112	0,01	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Pembangkitan Jawa Bali	414.388	0,00	2.306.689	0,00	PT Pembangkitan Jawa Bali
PCN	160.558	0,00	1.761.863	0,00	PCN
PT Terminal Nilam Utara	69.591	0,00	81.055.047	0,07	PT Terminal Nilam Utara
PT Jawa Satu Power	32.144	0,00	12.053.974	0,01	PT Jawa Satu Power
PT PP Presisi Tbk	-	-	11.412.148	0,01	PT PP Presisi Tbk
PT Pertamina Hulu Energi	-	-	4.203.201	0,00	PT Pertamina Hulu Energi
BPJS Ketenagakerjaan	-	-	1.885.037	0,00	BPJS Ketenagakerjaan
PT Kawasan Berikat Nusantara	-	-	1.301.141	0,00	PT Kawasan Berikat Nusantara
BPJS Kesehatan	-	-	1.180.620	0,00	BPJS Kesehatan
PT Daya Radar Utama	-	-	1.082.366	0,00	PT Daya Radar Utama
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	-	-	991.081	0,00	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
Lain-lain	-	-	5.303	0,00	Others
Lain-lain	20.762.669	0,02	20.361.545	0,02	Others
Subtotal	630.076.618	0,52	644.413.405	0,53	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(338.476.519)	(0,29)	(324.732.089)	(0,27)	Less: Allowance for impairment
Total	291.600.099	0,23	319.681.316	0,26	Total

*) dari total aset

*) from total assets

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

c. Trade receivables (Note 6)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

d. Piutang lain-lain (Catatan 7)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
BKMS	102.572.777	0,09	196.458.486	0,17
LMAN	42.700.027	0,04	142.604.259	0,12
Perum DAMRI	12.663.900	0,01	11.989.210	0,01
PT Jakarta Lloyd (Persero)	8.617.024	0,01	10.594.266	0,01
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	8.195.542	0,01	8.826.829	0,01
Direktorat Jenderal Pajak	4.924.357	0,00	-	-
JICT	3.336.220	0,00	16.457.437	0,01
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	1.090.646	0,00	-	-
PT Terminal Nilam Utara	-	-	2.833.149	0,00
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	-	2.601.775	0,00
PT Asuransi Kredit Indonesia	-	-	1.732.395	0,00
NPCT1	-	-	99.549	0,00
PT Adhi Karya (Persero)	-	-	63.593	0,00
Lain-lain	8.124.074	0,01	26.124.781	0,02
Subtotal	192.224.567	0,17	420.385.729	0,35
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(21.238.757)	(0,02)	(28.203.948)	(0,02)
Total	170.985.810	0,15	392.181.781	0,33

*) dari total aset

Piutang dari Lembaga Manajemen Aset Negara ("LMAN") merupakan dana talangan yang telah dibayarkan oleh CTP kepada pemilik lahan dan akan diganti oleh LMAN sesuai dengan amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dimana CTP menyediakan dana talangan dengan nilai maksimum sebesar Rp4.560.709.011. Piutang ini digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 25).

Piutang lain-lain BKMS merupakan pinjaman dari BJTI ke BKMS sehubungan dengan pengembangan lahan BKMS.

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

d. Other receivables (Note 7)

BKMS	196.458.486	0,17
LMAN	142.604.259	0,12
Perum DAMRI	11.989.210	0,01
PT Jakarta Lloyd (Persero)	10.594.266	0,01
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	8.826.829	0,01
Directorate General of Taxes	-	-
JICT	16.457.437	0,01
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	-	-
PT Terminal Nilam Utara	2.833.149	0,00
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2.601.775	0,00
PT Asuransi Kredit Indonesia	1.732.395	0,00
NPCT1	99.549	0,00
PT Adhi Karya (Persero)	63.593	0,00
Others	26.124.781	0,02
Sub-total	420.385.729	0,35
Less: Allowance for impairment	(28.203.948)	(0,02)
Total	392.181.781	0,33

*) from total assets

Receivables from the State Assets Management Body ("LMAN") represent bailout funds that have been paid by CTP to land owners and will be reimbursed to LMAN in accordance with the Toll Operation Cibitung-Cilincing Toll Road Agreement amendments where CTP provides funding with a maximum of Rp4,560,709,011. These receivables used as collateral for bank loan (Note 25).

Other receivables of BKMS are loan from BJTI to BKMS in relation to BKMS's land development.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

e. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 9)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Indonesia Power	40.677.156	0,03
PT Pertamina Patra Niaga	27.834.079	0,02
PT Jawa Satu Power	9.882.774	0,01
PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas	8.937.774	0,01
PT Adhi Guna Putera	7.422.853	0,01
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	5.115.200	0,00
PT Pertamina (Persero)	4.652.963	0,00
PT Pertamina Trans Kontinental	4.580.771	0,00
PT Semen Padang (Persero)	3.123.712	0,00
BPJS Kesehatan	2.376.347	0,00
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.825.458	0,00
BNCT	1.476.861	0,00
Indonesia National Single Window JICT	1.132.225	0,00
Lainnya	33.453.957	0,03
Total	152.492.130	0,11

*) dari total aset

f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 18)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-

**) dari total liabilitas

Kredit Non-Sindikasi

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Non-Sindikasi No. 83 tanggal 22 Maret 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., notaris di Jakarta, CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Non-Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. CTP memperoleh fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1.920.000.000 yang terbagi menjadi 2 (dua) tranche.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, CTP telah melunasi seluruh nilai pinjaman dan selanjutnya fasilitas ini telah berakhir.

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

e. Accrued revenues (Note 9)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Indonesia Power	23.021.589	0,02
PT Pertamina Patra Niaga	13.558.963	0,01
PT Jawa Satu Power	-	-
PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas	-	-
PT Adhi Guna Putera	-	-
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	861.800	0,00
PT Pertamina (Persero)	44.085.855	0,04
PT Pertamina Trans Kontinental	-	-
PT Semen Padang (Persero)	-	-
BPJS Kesehatan	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	-
BNCT	-	-
Indonesia National Single Window JICT	345.929	0,00
Others	25.685.821	0,02
Total	107.559.957	0,09

*) from total assets

f. Short-term bank loans (Note 18)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	103.106.529	0,14

**) from total liabilities

Non-Syndicated Loan

Based on the Non-Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 83 dated March 22, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a notary in Jakarta, CTP entered into a Non-Syndicated Loan with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a maximum credit facility of Rp1,920,000,000, divided in 2 (two) tranches.

On October 23, 2023, CTP has fully paid the loan and subsequently, this loan facility has ended.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 18)
(lanjutan)**

Kredit Non-Sindikasi (lanjutan)

Fasilitas kredit maksimum pada *tranche* I dan *tranche* II masing-masing adalah sebesar Rp890.000.000 dan Rp1.030.000.000. Fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk pembiayaan dana talangan tanah pembebasan lahan tol ruas Cibitung-Cilincing.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2021 (2 tahun setelah tanggal perjanjian). Denda 2% akan dihitung untuk semua saldo yang belum dibayar baik untuk pokok dan bunga.

Selain itu, CTP juga diwajibkan untuk mematuhi *negative covenant* antara lain:

- a. Mengubah bentuk, status badan hukum, dan lingkup kegiatan usaha debitur, dan investasi serta penyertaan bidang lain;
- b. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dan *go public*;
- c. Mengubah susunan pemegang saham
- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang;
- e. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham;
- f. Melakukan pembagian dividen;
- g. Mengalihkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit; dan
- h. Mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pada tanggal 5 Agustus 2022, para pihak sepakat untuk mengubah jumlah maksimum fasilitas kredit menjadi Rp1.494.685.000 dengan rincian sebagai berikut:

- *Tranche* I: Rp890.000.000
- *Tranche* II: Rp604.685.000

Para pihak juga sepakat untuk mengubah jangka waktu perjanjian menjadi 23 April 2023 dan suku bunga menjadi 7,25% per tahun.

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

f. Short-term bank loans (Note 18) (continued)

Non-Syndicated Loan (continued)

Maximum credit facilities for *tranche* I and II amounted to Rp890,000,000, and Rp1,030,000,000. The credit facility is intended to finance land bailout funds for land acquisition for the Cibitung-Cilincing toll road section.

This loan is subject to fixed interest rate of 8.50% per annum which shall mature in 2021 (2 years after the agreement date). A 2% penalty shall be calculated for all unpaid balances for both principal and interest.

In addition, CTP is required to adhere to the following negative covenants, among others:

- a. Change the form, status of legal entity, and scope of business activities, and investment and participation in other fields;
- b. Conduct mergers, acquisitions, sale of Company assets and *go public*;
- c. Change the composition of shareholders;
- d. Be bound as guarantor of debt;
- e. Pay off and or pay debts to shareholders;
- f. Declare dividends;
- g. Transfer to another party, in part or in whole of the rights and obligations arising in connection with the credit facility; and
- h. Declare bankruptcy.

On August 5, 2022, both parties agreed to amend the maximum credit facility to become Rp1,494,685,000 with each *tranche* as follows:

- *Tranche* I: Rp890,000,000
- *Tranche* II: Rp604,685,000

Both parties also agreed to change the maturity of the agreement to be on April 23, 2023 and the fixed interest rate to become 7.25% per annum.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

**f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 18)
(lanjutan)**

f. Short-term bank loans (Note 18) (continued)

Beban bunga yang diakui untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp16.516.834, yang dikapitalisasi ke aset dalam hak pengusahaan jalan tol (Catatan 15).

Interest expenses recognized for the year ended December 31, 2023 and 2022 amounted to RpNil and Rp16,516,834, respectively, which were all capitalized to toll road access rights during the period (Note 15).

g. Utang usaha (Catatan 19)

g. Trade payable (Note 19)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	529.297.017	0,74	864.094.284	1,14	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk	19.090.673	0,03	39.704.746	0,05	PT Waskita Beton Precast Tbk
Konsorsium PP - Waskita	15.465.927	0,02	-	0,00	Konsorsium PP - Waskita
DP3 Dana Pensiun	12.498.442	0,02	1.408.640	0,00	DP3 Dana Pensiun
Koperasi Pegawai Pelindo III	10.541.980	0,01	6.388.546	0,01	Koperasi Pegawai Pelindo III
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	6.508.760	0,01	10.800.841	0,01	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	5.335.337	0,01	22.995.319	0,03	PT Jasa Marga Tollroad Maintenance
DP4	2.117.598	0,00	2.117.598	0,00	DP4
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.790.529	0,00	2.047.567	0,00	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI Life Insurance	1.200.353	0,00	1.156.648	0,00	PT BNI Life Insurance
RSP	674.428	0,00	21.947.420	0,03	RSP
PT Pertamina Patra Niaga	601.950	0,00	3.778.502	0,00	PT Pertamina Patra Niaga
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	136.699	0,00	-	0,00	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	-	51.388.396	0,07	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Koperasi Pegawai Maritim	-	-	4.778.047	0,01	Koperasi Pegawai Maritim
PT Pertamina Trans Kontinental	-	-	3.931.110	0,01	PT Pertamina Trans Kontinental
Instansi Pemerintah	-	-	2.597.226	0,00	Government Institution
BKMS	-	-	2.294.563	0,00	BKMS
JICT	-	-	2.135.352	0,00	JICT
PT Yodya Karya	-	-	1.677.099	0,00	PT Yodya Karya
BPJS Ketenagakerjaan	-	-	1.567.265	0,00	BPJS Ketenagakerjaan
PT Pertamina (Persero)	-	-	1.012.396	0,00	PT Pertamina (Persero)
Lain-lain	31.488.134	0,04	44.190.643	0,07	Others
Total	636.747.827	0,88	1.092.012.208	1,43	Total

***) dari total liabilitas

***) from total liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

h. Uang untuk diperhitungkan (Catatan 20)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Asuransi Jasa Indonesia	10.803.176	0,02	-	-
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	2.691.009	0,00	-	-
PT Krakatau Bandar Samudera	1.035.057	0,00	-	-
PT Pertamina Trans Kontinental	915.772	0,00	3.183.827	0,00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	367.841	0,00	48.593	0,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	302.213	0,00	405.336	0,00
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	293.622	0,00	575.387	0,00
PT Pertamina (Persero)	232.353	0,00	101.018	0,00
PHC	63.661	0,00	63.661	0,00
PT Pertamina Patra Niaga (Persero) Tbk	12.962	0,00	8.867	0,00
PT Perusahaan Listrik Negara	9.785	0,00	-	-
Tentara Nasional Indonesia	4.183	0,00	3.213	0,00
Instansi Pemerintah	2.704	0,00	28.333	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	6.073	0,00	-	-
PT Semen Padang	-	0,00	35.619	0,00
Lain-lain	8.535.195	0,02	3.832.505	0,01
Total	25.275.606	0,04	8.286.359	0,01

**) dari total liabilitas

i. Uang titipan pelanggan (Catatan 22)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
BPJS Ketenagakerjaan	9.127.469	0,01	10.928.576	0,01
PT BNI Life Insurance	8.935.603	0,01	6.476.284	0,01
PT Taspen (Persero)	7.598.818	0,01	323.100	0,00
PT Pertamina (Persero)	4.881.770	0,01	4.925.638	0,01
Jiwasraya	3.245.154	0,01	-	-
BPJS Kesehatan	1.611.227	0,00	6.349.579	0,01
PHC	1.025.824	0,00	-	-
DP3	739.884	0,00	-	-
PT Semen Tonasa	449.211	0,00	-	-
DP4	392.591	0,00	2.157.999	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	329.348	0,00	2.330.595	0,00
PT Asuransi Kredit Indonesia	194.640	0,00	597.895	0,00
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	147.735	0,00	5.394.034	0,01
TNI dan Polri	69.464	0,00	989.182	0,00
PT Pertamina Trans Kontinental	-	-	6.843.520	0,01
Lain-lain	20.172.905	0,03	27.892.875	0,04
Total	58.921.643	0,08	75.209.277	0,10

**) dari total liabilitas

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

h. Advances from customer (Note 20)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Asuransi Jasa Indonesia	10.803.176	0,02	-	-
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	2.691.009	0,00	-	-
PT Krakatau Bandar Samudera	1.035.057	0,00	-	-
PT Pertamina Trans Kontinental	915.772	0,00	3.183.827	0,00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	367.841	0,00	48.593	0,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	302.213	0,00	405.336	0,00
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	293.622	0,00	575.387	0,00
PT Pertamina (Persero)	232.353	0,00	101.018	0,00
PHC	63.661	0,00	63.661	0,00
PT Pertamina Patra Niaga (Persero) Tbk	12.962	0,00	8.867	0,00
PT Perusahaan Listrik Negara	9.785	0,00	-	-
Indonesian Armed Forces	4.183	0,00	3.213	0,00
Government Institution	2.704	0,00	28.333	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	6.073	0,00	-	-
PT Semen Padang	-	0,00	35.619	0,00
Others	8.535.195	0,02	3.832.505	0,01
Total	25.275.606	0,04	8.286.359	0,01

**) from total liabilities

i. Deposits from customer (Note 22)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
BPJS Ketenagakerjaan	9.127.469	0,01	10.928.576	0,01
PT BNI Life Insurance	8.935.603	0,01	6.476.284	0,01
PT Taspen (Persero)	7.598.818	0,01	323.100	0,00
PT Pertamina (Persero)	4.881.770	0,01	4.925.638	0,01
Jiwasraya	3.245.154	0,01	-	-
BPJS Kesehatan	1.611.227	0,00	6.349.579	0,01
PHC	1.025.824	0,00	-	-
DP3	739.884	0,00	-	-
PT Semen Tonasa	449.211	0,00	-	-
DP4	392.591	0,00	2.157.999	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	329.348	0,00	2.330.595	0,00
PT Asuransi Kredit Indonesia	194.640	0,00	597.895	0,00
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	147.735	0,00	5.394.034	0,01
TNI and Polri	69.464	0,00	989.182	0,00
PT Pertamina Trans Kontinental	-	-	6.843.520	0,01
Others	20.172.905	0,03	27.892.875	0,04
Total	58.921.643	0,08	75.209.277	0,10

**) from total liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

j. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 22)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Lain-Lain		
BLU Set-BPJT	464.538.398	0,65
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	33.292.279	0,05
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,04
PHC	26.043.474	0,04
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	12.023.798	0,02
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	9.237.116	0,01
PT BNI Danareksa Sekuritas	4.376.000	0,01
DP3	3.272.923	0,00
Industri Sandang Nusantara Persero	2.375.255	0,00
Lain-lain	13.262.227	0,02
Total	600.087.588	0,84

**) dari total liabilitas

Utang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") merupakan pinjaman biaya pergantian atas pembelian tanah untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing.

Liabilitas jangka pendek lainnya - lain-lain kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan akrual retensi atas pekerjaan pembangunan dermaga PTFI dan fasilitas pendukungnya di Terminal Manyar Pelabuhan Gresik PT Berlian Manyar Sejahtera.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan No. 024/Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada PT Pelindo Husada Cipta ("PT PHC") merupakan pembayaran manajemen fee pelayanan kesehatan kepada PT PHC atas pelayanan kesehatan pegawai.

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

j. Other current liabilities (Notes 22)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
			Others
	2.000.000	0,00	BLU Set-BPJT
	-	-	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
			PT Dok & Perkapalan
	31.666.118	0,04	Kodja Bahari (Persero)
	24.857.416	0,03	PHC
			PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
	12.023.798	0,02	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
	9.237.116	0,01	PT BNI Danareksa Sekuritas
	4.376.000	0,00	DP3
	13.807.186	0,02	Industri Sandang Nusantara Persero
	2.375.255	0,00	Others
	9.755.132	0,02	
	110.098.021	0,14	Total

**) from total liabilities

Payable to the Ministry of Public Works and Public Housing - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") represents a loan for replacement costs for the purchase of land for the Cibitung-Cilincing toll road project.

Other current liabilities - others to PT Adhi Karya (Persero) Tbk represents the retention accrual for development projects of Jetty PTFI and its supporting facilities at Manyar Terminal Gresik Port PT Berlian Manyar Sejahtera.

Other current liabilities to PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) represents a shortage of payment of compensation to DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No. HK.566/27/11/PI.II-11 and No. 024/Kontr/I/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Other current liabilities to PT Pelindo Husada Cipta ("PT PHC") represents payment of health service management fees to PT PHC for employee health services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

k. Utang Lembaga Keuangan Non-Bank (Catatan 26)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.372.013.613	1,92
**) dari total liabilitas		

l. Liabilitas jangka panjang lainnya (Catatan 28)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT PLN	3.458.284	0,00
BLU Set-BPJT	-	-
Lain-lain	1.463.487	0,00
Total	4.921.771	0,00
**) dari total liabilitas		

Utang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") merupakan pinjaman biaya pergantian atas pembelian tanah untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing.

m. Remunerasi personil manajemen kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Grup adalah sebesar Rp726.121.037 dan Rp632.651.119 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

k. Loan from non-bank financial institution (Note 26)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.160.435.133	1,54
**) from total liabilities		

l. Other long-term liabilities (Notes 28)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT PLN	4.626.619	0,01
BLU Set-BPJT	464.538.398	0,61
Lain-lain	182.496	0,00
Total	469.347.513	0,62
**) from total liabilities		

Payable to the Ministry of Public Works and Public Housing - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") represents a loan for replacement costs for the purchase of land for the Cibitung-Cilincing toll road project.

m. Key management personnel remuneration

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp726,121,037 and Rp632,651,119, for the year ended December 31, 2023 and 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

45. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

31 Desember 2023/December 31, 2023

		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ <i>In foreign currencies (full amount)</i>	Setara dalam Rupiah/ <i>Equivalent in Rupiah</i>	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	109.374.062	1.686.110.534	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	USD	71.003.011	1.094.582.414	Short-term investments
Piutang usaha	USD	2.012.117	31.018.794	Trade receivables
Piutang usaha	SGD	796	9.317	Trade receivables
Piutang lain-lain	USD	547.107	8.434.201	Other receivables
Total aset			2.820.155.260	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	USD	260.163	4.010.679	Trade payables
Utang obligasi	USD	1.993.216.000	30.727.417.856	Bonds payables
Utang bank jangka panjang	USD	500.000.000	7.708.000.000	Long-term bank loan
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.882	249.536.973	Other long-term liabilities
Total liabilitas			38.688.965.508	Total liabilities
Liabilitas neto			35.868.810.248	Net liabilities

31 Desember 2022/December 31, 2022

		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ <i>In foreign currencies (full amount)</i>	Setara dalam Rupiah/ <i>Equivalent in Rupiah</i>	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	105.906.720	1.666.018.608	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	USD	143.382.500	2.255.550.108	Short-term investments
Piutang usaha	USD	5.393.647	84.847.459	Trade receivables
Piutang lain-lain	USD	547.107	8.606.540	Other receivables
Total aset			4.015.022.715	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	USD	1.557.073	24.494.318	Trade payables
Utang obligasi	USD	2.519.084.000	39.419.805.966	Bonds payables
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.882	254.635.841	Other long-term liabilities
Total liabilitas			39.698.936.125	Total liabilities
Liabilitas neto			35.683.913.410	Net liabilities

Untuk memitigasi risiko akibat selisih aset dan liabilitas valuta asing tersebut, Grup telah melakukan transaksi lindung nilai (Catatan 24)

To mitigate the risk arising from the gap between assets and liabilities in foreign currencies, the Group has entered into hedging transactions (Note 24).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Grup:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	12.491.274.250	13.597.640.823
Investasi jangka pendek	3.769.584.376	3.943.051.999
Piutang usaha - neto	1.348.162.934	1.450.107.201
Piutang lain-lain - neto	215.598.895	446.826.791
Pendapatan masih akan diterima	724.762.064	651.230.205
Aset lancar lainnya	100.458.674	56.662.961
Investasi jangka panjang - investasi pada penyertaan saham	34.840.893	35.239.244
Investasi jangka panjang - investasi pada surat utang	692.386.251	600.010.734
Aset tidak lancar lainnya	986.703.079	1.189.307.537
Total	20.363.771.416	21.970.077.495
Liabilitas Keuangan		
Pinjaman bank jangka pendek	3.330.172	105.361.831
Utang usaha	1.257.638.419	2.068.575.843
Beban akrual	5.419.485.908	5.273.585.288
Liabilitas jangka pendek lainnya	1.124.359.752	1.041.133.091
Utang bank jangka panjang	14.346.782.184	7.831.272.217
Utang obligasi	33.124.052.497	42.754.634.125
Utang lembaga keuangan non-bank	2.069.876.474	1.744.763.266
Liabilitas jangka panjang lainnya	838.428.454	1.126.588.038
Liabilitas sewa	487.723.464	435.135.812
Total	58.671.677.324	62.381.049.511

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Financial Assets		
Cash and cash equivalents	12.491.274.250	13.597.640.823
Short-term investments	3.769.584.376	3.943.051.999
Trade receivables - net	1.348.162.934	1.450.107.201
Other receivables - net	215.598.895	446.826.791
Accrued revenues	724.762.064	651.230.205
Other current assets	100.458.674	56.662.961
Long-term investment - investment in share of stocks	34.840.893	35.239.244
Long-term investment - investment in bonds	692.386.251	600.010.734
Other non-current assets	986.703.079	1.189.307.537
Total	20.363.771.416	21.970.077.495
Financial Liabilities		
Short-term bank loans	3.330.172	105.361.831
Trade payables	1.257.638.419	2.068.575.843
Accrued expenses	5.419.485.908	5.273.585.288
Other current liabilities	1.124.359.752	1.041.133.091
Long-term bank loan	14.346.782.184	7.831.272.217
Bonds payable	33.124.052.497	42.754.634.125
Loan from non-bank financial institution	2.069.876.474	1.744.763.266
Other non-current liabilities	838.428.454	1.126.588.038
Lease liabilities	487.723.464	435.135.812
Total	58.671.677.324	62.381.049.511

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek - deposito berjangka, investasi jangka pendek - aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, aset lancar lainnya, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Investasi jangka pendek - efek yang diperdagangkan dan investasi jangka panjang - penyertaan saham dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar. Investasi jangka panjang - surat utang dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
- Estimasi nilai wajar utang obligasi, liabilitas sewa, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

**46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- *The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments - time deposits, short-term investments - financial assets measured at fair value through profit or losses, trade receivables, other receivables, accrued revenues, other current assets, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discounting.*
- *Short-term investments - marketable securities and long-term investments - investment in share of stocks are presented at fair value using market price quotation. Long-term investments - bonds are presented at fair value by reference to similar bond price at reporting date.*
- *The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.*
- *The estimated fair values of bonds payable, lease liability, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, hirarki nilai wajar Grup untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023/December 31, 2023				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar				Non-current Assets
Properti investasi (Catatan 12)	37.960.742.762	-	37.960.742.762	-
				Investment properties (Note 12)
31 Desember 2022/December 31, 2022				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar				Non-current Assets
Properti investasi (Catatan 12)	36.963.174.503	-	36.963.174.503	-
				Investment properties (Note 12)

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Tingkat 1 dan Tingkat 2 dan tidak ada pengalihan dari Tingkat 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan berdasarkan nilai wajar selain yang telah dijelaskan di atas.

As of December 31, 2023 and 2022, fair value hierarchy of the Group for assets which fair value were disclosed are as follows:

As of December 31, 2023, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed based on fair value other than above explained.

**47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN**

Grup terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Grup menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Grup. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Grup bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Grup menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES**

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Grup. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang USD.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 45. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ (Increases) decreases on foreign exchange rates
Perubahan kurs mata uang asing 2023	(+)-100bps (-)-100bps
Perubahan kurs mata uang asing 2022	(+)-100bps (-)-100bps

Dalam mengelola risiko nilai tukar mata uang asingnya, Grup menggunakan utang obligasi dan pinjaman sindikasi sebagai lindung nilai dari eksposur risiko mata uang asing dalam pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang.

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in USD.

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 45. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

Dampak/ Effect	
	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2023</i>
(358.688.102)	
358.688.102	
	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2022</i>
(356.925.200)	
356.925.200	

In managing its foreign currency risk, the Group uses bond payables and syndicated loan to hedge its exposure to foreign currency risk for revenues to be received in the future.

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Grup yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2023.

	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Total	
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year		
Aset						Assets
Kas dan setara kas	4.119.189.850	-	8.372.084.400	-	12.491.274.250	Cash and cash equivalent
Investasi jangka pendek	-	-	3.769.584.376	-	3.769.584.376	Short-term investments
Total aset	4.119.189.850	-	12.141.668.776	-	16.260.858.626	Total assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	-	1.099.718.293	-	1.099.718.293	Other current liabilities
Utang bank jangka panjang	462.137.207	13.934.725.446	-	-	14.396.862.653	Long-term bank loan
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	21.145.867	-	-	21.145.867	Other long-term liabilities
Liabilitas sewa	-	-	67.904.105	419.819.358	487.723.464	Lease liabilities
Utang Obligasi	-	-	7.582.498.344	25.969.559.708	33.552.058.052	Bonds Payable
Total liabilitas	462.137.207	13.955.871.313	8.750.120.742	26.389.379.066	49.557.508.329	Total liabilities

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Grup dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Cash flows interest rate risk (continued)

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2023.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Kredit (lanjutan)

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Aset Keuangan		
Bank dan setara kas	12.485.323.463	13.558.253.576
Investasi jangka pendek	3.769.584.376	3.943.051.999
Piutang usaha	1.348.162.934	1.450.107.201
Piutang lain-lain	215.598.895	446.826.791
Pendapatan masih akan diterima	724.762.064	651.230.205
Aset lancar lainnya	100.458.674	56.662.961
Aset tidak lancar lainnya	708.284.522	1.221.507.535
Total	19.352.174.928	21.327.640.268

Salah satu risiko kredit utama yang dihadapi oleh Grup adalah kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk meringankan risiko kredit ini, Grup memiliki kebijakan dimana Grup melakukan verifikasi kredit untuk memastikan bahwa pelanggan yang diberikan kredit oleh Grup memiliki sejarah kredit yang baik dan dapat dipercaya. Selain itu, saldo piutang Grup dipantau secara berkala untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tak tertagih.

Tabel berikut ini menyajikan analisis umur piutang usaha:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Belum jatuh tempo	462.294.078	263.711.508
Lewat jatuh tempo		
1-90 hari	707.857.139	949.936.337
91-180 hari	130.920.890	217.120.498
Lebih dari 180 hari	1.192.880.822	1.155.304.793
Subtotal	2.493.952.929	2.586.073.136
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(1.145.789.995)	(1.135.965.935)
Neto	1.348.162.934	1.450.107.201

Risiko piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai untuk mengalami penurunan nilai adalah kecil karena pelanggan yang diberi kredit memiliki sejarah dan jejak kredit yang baik dengan Grup. Penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tak tertagih menurut penilaian Grup.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Credit Risk (continued)

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follow:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
			Financial Assets
			Cash in banks and cash equivalents
			Short-term investments
			Trade receivables
			Other receivables
			Accrued revenues
			Other current assets
			Other non-current assets
Total	19.352.174.928	21.327.640.268	Total

One of the main credit risk faced by the Group is credit granted to customers. To mitigate this credit risk, the Group has a policy in which the Group performs credit verification to ensure that customers who are granted credit by the Group have a good credit history and are trustworthy. In addition, the Group's receivables balances are monitored regularly to reduce the possibility of uncollectible receivables.

The following table presents the aging analysis of trade receivables:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Belum jatuh tempo	462.294.078	263.711.508	Not yet overdue
Lewat jatuh tempo			Overdue
1-90 hari	707.857.139	949.936.337	1-90 days
91-180 hari	130.920.890	217.120.498	91-180 days
Lebih dari 180 hari	1.192.880.822	1.155.304.793	More than 180 days
Subtotal	2.493.952.929	2.586.073.136	Sub-total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(1.145.789.995)	(1.135.965.935)	Allowance for impairment
Neto	1.348.162.934	1.450.107.201	Net

The risk of trade receivables that are neither past due nor impaired to be impaired is small because customers who are granted credit have a good credit history and track record with the Group. Specific allowance may be made if receivables are deemed uncollectible in the Group's judgement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Grup saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Grup terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Grup.

Selain itu, Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Grup berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

2023						
	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Jumlah/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	3.330.172	-	-	-	3.330.172	Short-term bank loan
Utang usaha	1.257.638.419	-	-	-	1.257.638.419	Trade payables
Beban akrual	5.419.485.907	-	-	-	5.419.485.907	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	1.124.359.752	-	-	-	1.124.359.752	Other short-term liabilities
Utang obligasi	7.574.312.147	17.650.761.389	49.941.944	7.849.037.017	33.124.052.497	Bonds payable
Utang bank jangka panjang	1.084.191.562	1.504.135.476	3.733.687.086	9.839.629.436	16.161.643.560	Long-term bank loan
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	1.935.621	659.014	251.242.132	253.836.767	Other Long-term liabilities
Liabilitas sewa	198.521.076	223.698.044	184.163.981	5.584.468.622	6.190.851.723	Lease liabilities
Total	16.661.839.035	19.380.530.530	3.968.452.025	23.524.377.207	63.535.198.797	Total
2022						
	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Jumlah/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	105.361.831	-	-	-	105.361.831	Short-term bank loan
Utang usaha	2.068.575.843	-	-	-	2.068.575.843	Trade payables
Beban akrual	5.273.585.288	-	-	-	5.273.585.288	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	1.041.133.091	-	-	-	1.041.133.091	Other short-term liabilities
Utang obligasi	8.637.804.928	-	24.314.765.215	9.802.063.981	42.754.634.124	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	-	1.126.588.038	1.126.588.038	Other Long-term liabilities
Liabilitas sewa	49.907.726	-	-	385.228.086	435.135.812	Lease liabilities
Total	17.176.368.707	-	24.314.765.215	11.313.880.105	52.805.014.027	Total

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI

a) Pembangunan dan Pengoperasian

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dimana Perusahaan diberi hak untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan dalam area konsesi. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat perjanjian konsesi berakhir, Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan aset yang berada di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian konsesi.

48. CONCESSION AGREEMENTS

a) Construction and Operation

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to construction and operation of port where the Company is granted the rights to construct and operate port within concession area. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of the concession agreement, the Company is obliged to transfer the assets on concession area to the Port Authority in accordance with the terms stipulated in concession agreement.

Area Konsesi/ Concession Area	Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/ Parties Related to Agreement	Tanggal Perjanjian/ Date of Agreement	Jangka Waktu Perjanjian/ Agreement Periods	Tarif Konsesi/ Concession Rate
Kalibaru	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok/ <i>The Company and Tanjung Priok Port Authority</i>	31 Agustus/ August 2012	70 tahun/years	0,5% dari pendapatan kotor/ <i>0.5% of gross revenue</i>
Kijing	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Pontianak/ <i>The Company and Pontianak Port Authority</i>	12 Juli/July 2018	69 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Kuala Tanjung	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung/ <i>The Company and Kuala Tanjung Port Authority</i>	23 Januari/ January 2015	69 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Belawan Fase 2	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Belawan/ <i>The Company and Belawan Port Authority</i>	4 April/April 2014	70 tahun/years	0,5% dari pendapatan kotor/ <i>0.5% of gross revenue</i>
Tanjung Perak (Alur Pelayaran Barat Surabaya)	Perusahaan dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia/ <i>The Company and Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia</i>	8 Mei/May 2014	25 tahun/years	3,5% dari pendapatan kotor/ <i>3.5% of gross revenue</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

a) Pembangunan dan Pengoperasian (lanjutan)

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dimana Perusahaan diberi hak untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan dalam area konsesi. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat perjanjian konsesi berakhir, Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan aset yang berada di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian konsesi. (lanjutan)

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

a) Construction and Operation (continued)

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to construction and operation of port where the Company is granted the rights to construct and operate port within concession area. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of the concession agreement, the Company is obliged to transfer the assets on concession area to the Port Authority in accordance with the terms stipulated in concession agreement. (continued)

Area Konsesi/ Concession Area	Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/ Parties Related to Agreement	Tanggal Perjanjian/ Date of Agreement	Jangka Waktu Perjanjian/ Agreement Periods	Tarif Konsesi/ Concession Rate
Teluk Lamong	Perusahaan dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia/ <i>The Company and Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia</i>	19 Mei/May 2015	72 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ 2.5% of gross revenue
Makassar New Port	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Makassar/ <i>The Company and Makassar Port Authority</i>	19 Mei/May 2015	70 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ 2.5% of gross revenue
Jalan Tol Cibitung-Cilincing	CTP dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ <i>CTP and Ministry of Public Works and Human Settlements</i>	29 Januari/ January 2007	50 tahun/years	-
Kendari New Port	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Kendari/ <i>The Company and Kendari Port Authority</i>	25 November/ November 2022	67 tahun/years dan/and 11 bulan/months	2,5% dari pendapatan kotor/ 2.5% of gross revenue

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

b) Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan kegiatan perusahaan di pelabuhan yang diusahakan oleh Perusahaan yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat berakhirnya perjanjian konsesi ini, seluruh aset Perusahaan di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

b) Port Operated by The Company

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to operational activities at port that was operated by the Company which includes granting rights from the Port Authority to the Company to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Sailing. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of Concession Agreement, all the Company's assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company.

Area Konsesi/ Concession Area	Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/ Parties Related to Agreement	Tanggal Perjanjian/ Date of Agreement	Jangka Waktu Perjanjian/ Agreement Periods	Tarif Konsesi/ Concession Rate
Tanjung Priok	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok/ <i>The Company and Tanjung Priok Port Authority</i>	11 November/ November 2015	50 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Belawan	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Belawan/ <i>The Company and Belawan Port Authority</i>	9 November/ November 2015	30 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Tanjung Perak	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak/ <i>The Company and Tanjung Perak Port Authority</i>	9 November/ November 2015	30 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Makassar	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Makassar/ <i>The Company and Makassar Port Authority</i>	9 November/ November 2015	30 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Gresik	BMS dan Otoritas Pelabuhan Gresik/ <i>BMS and Gresik Port Authority</i>	15 Desember/ December 2017	76 tahun/years	2,75% dari pendapatan kotor/ <i>2.75% of gross revenue</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

c) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN)

Perusahaan memiliki sebidang tanah seluas 36.333m² yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanah tersebut digunakan untuk area pembangunan fasilitas penunjang operasional dan dermaga curah cair Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Pada tanggal 31 Desember 2020, tanah tersebut diklasifikasikan sebagai aset tetap oleh Perusahaan.

Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan menerima surat Menteri BUMN No. S-747/MBU/09/2021 tentang Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Tanah di Terminal *Multipurpose* Pelabuhan Labuan Bajo. Berdasarkan surat tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pelepasan hak atas tanah kepada Negara Republik Indonesia c.q Kementerian Perhubungan dalam rangka pemanfaatan barang milik negara melalui penerbitan konsesi. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi aset tanah Labuan Bajo ke aset takberwujud sebesar Rp79.905.949.

Pada tanggal 8 November 2021, Perusahaan mengadakan Perjanjian KSP BMN dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan di area Pelabuhan Labuan Bajo dengan jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Perusahaan diwajibkan untuk membayar Rp171.000 dan setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 2,95%, dari total sebesar Rp19.005.671 selama 50 tahun serta keuntungan Bagi Hasil Perjanjian sebesar 16,81% dari Arus Kas Bersih Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

c) Utilization Cooperation of State Property (KSP-BMN)

The Company owns a parcel of land of 36,333m² located in Wae Kelambu, Komodo District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. The land is used for the construction of operational support facilities and a liquid bulk dock at the Wae Kelambu *Multipurpose* Terminal at Labuan Bajo Port. As of December 31, 2020, the land is classified as fixed asset by the Company.

On September 29, 2021, the Company received a letter from the Minister of SOE No. S-747/MBU/09/2021 regarding Approval for The Write-off of Land Fixed Assets at Labuan Bajo *Multipurpose* Port. Based on the letter, the Company is obliged to release the land rights to the Republic of Indonesia c.q the Ministry of Transportation in relation to utilization of state property through the issuance of concessions. On October 1, 2021, the Company reclassified the land assets of Labuan Bajo to intangible assets amounting to Rp79,905,949.

On November 8, 2021, the Company entered into KSP BMN agreement with the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation. Based on the agreement, the company has the right to operate and carry out port service activities and port-related services in Labuan Bajo Port area for a period of 50 (fifty) years from the date of the signing of the agreement. The Company is obliged to pay Rp171,000 and an annual increase of 2.95%, totaling Rp19,005,671 for 50 years as well as a Profit Sharing Agreement of 16.81% of the Net Cash Flow from Operating Activities and Investing Activities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

d) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN)

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara ("KSP BMN") dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Perusahaan berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan di area kerjasama. Kerjasama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Adapun aset yang dikerjasamakan adalah aset yang dibiayai oleh APBN dan dimiliki oleh negara kemudian dimanfaatkan oleh Perusahaan tanpa mengubah status kepemilikan aset. Objek Kerjasama akan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada akhir periode perjanjian.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

d) Utilization Cooperation of State Property (KSP-BMN)

The Company entered into several Cooperation agreements for the Utilization of State Property ("KSP BMN") with the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation. The company is able to operate and carry out port service activities and port-related services in the cooperation area. This collaboration aims to increase non-tax state revenues. Meanwhile, the assets being collaborated are assets financed by the APBN and owned by the state and then utilized by the Company without changing the asset ownership status. The objects of cooperation will be returned to the Directorate of Sea Transportation at the end of the agreement period.

Area Kerjasama/ Cooperation Area	Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/ Parties Related to Agreement	Tanggal Perjanjian/ Date of Agreement	Jangka Waktu Perjanjian/ Agreement Periods	Nilai Kontribusi Tetap/ Fixed Contribution Value	Persentase Bagi Hasil/ Percentage of Profit Sharing
Badas	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation	7 April/April 2022	30 tahun/years	Rp916.390 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 2,88%/ Rp916,390 and annual increase of 2.88%	46,55% dari Arus Kas Bersih Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi/ 46.55% of the Net Cash Flow from Operating Activities and Investing Activities
Waingapu	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation	7 April/April 2022	30 tahun/years	Rp572.051 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 1,93% / Rp572,051 and annual increase of 1.93%	44,29% dari Arus Kas Bersih Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi/ 44.29% of the Net Cash Flow from Operating Activities and Investing Activities
Bima	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation	7 September/ September 2022	30 tahun/years	Rp759.982 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 2,12%/ Rp759,982 and an annual increase of 2.12%	28,81% dari Arus Kas Bersih Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi/ 28.81% of the Net Cash Flow from Operating Activities and Investing Activities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

e) Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung

Pada tanggal 13 Februari 2015, sebagaimana telah digantikan dan diandendum masing-masing pada tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 20 Maret 2017, Perusahaan dan PMT menandatangani perjanjian untuk pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan terminal multipurpose Kuala Tanjung serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Berdasarkan perjanjian, PMT diharuskan untuk melakukan pembayaran kompensasi sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor pengelolaan terminal multipurpose Kuala Tanjung kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut berlaku selama 50 (lima puluh) tahun dihitung sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 12 Februari 2065.

f) Perjanjian Penugasan Belawan Fase 2

Pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana telah digantikan pada tanggal 18 Mei 2018, Perusahaan dan PTP1 menandatangani perjanjian untuk pembangunan dan pengelolaan terminal petikemas Belawan Fase 2. Berdasarkan perjanjian, PTP1 diharuskan untuk melakukan pembayaran kompensasi sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor pengelolaan terminal petikemas Belawan Fase 2 kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2044.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

e) Kuala Tanjung Assignment Agreement

On February 13, 2015, as replaced and amended on February 10, 2016 and March 20, 2017, respectively, the Company and PMT signed agreement for construction, financing, and operation of Kuala Tanjung multipurpose terminal and land utilisation and management. Based on agreement, PMT is obliged to pay compensation of certain percentage of gross revenue from the operation of Kuala Tanjung multipurpose terminal to the Company. The agreement is valid for 50 (fifty) years since February 13, 2015 until February 12, 2065.

f) Belawan Phase 2 Assignment Agreement

On October 31, 2014, as replaced on May 18, 2018, the Company and PTP1 signed agreement for construction and operation of Belawan Phase 2 container terminal. Based on agreement, PTP1 is obliged to pay compensation of certain percentage of gross revenue from the operation of Belawan Phase 2 container terminal to the Company. The agreement is valid for 30 (thirty) years since October 31, 2014 until October 30, 2044.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

a) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - SPSL

Perusahaan mendirikan SPSL pada tanggal 5 November 2012. Berdasarkan Surat Perusahaan No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan menginstruksikan SPSL untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan kepada SPSL. SPSL juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan *advisory* yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan akan dialihkan kepada SPSL dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari *proceed* yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan SPSL agar segera memproses pekerjaan *Technical, Legal, Financial, Tax dan Insurance Advisor*.

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), dimana Perusahaan memberikan kepada SPSL hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum SPSL menandatangani COA. Transaksi ini masuk ke dalam kategori sewa keuangan berdasarkan PSAK 73.

Sesuai dengan PIA, Perusahaan dan SPSL selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada PSK. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada SPSL.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

a) Project Implementation Agreement - SPSL

The Company established SPSL on November 5, 2012. Based on Letter of the Company No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company instructed SPSL to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal from PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the Company's contractor to SPSL. SPSL was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company shall be assigned to SPSL in which the consultants' fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. The Company then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed SPSL to process the *Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor* works.

On May 30, 2013, the Company and SPSL signed Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), in which the Company granted to SPSL the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which SPSL entered into the COA. This transaction is classified as finance lease based on PSAK 73.

In accordance with the PIA, the Company and SPSL shall then identify the existing agreements signed by the Company and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to SPSL. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to SPSL.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Perjanjian Pelaksanaan Proyek – SPSL (lanjutan)

Pada tanggal 6 Agustus 2018, novasi tidak jadi dilaksanakan dan diganti menjadi sewa/site lease yang dituangkan dalam perjanjian perubahan PIA dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai perubahan nilai dan jangka waktu sewa.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Perubahan (Amendemen) Kelima tentang Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21 dan No. PJK-621-30092021-001, yang mengatur mengenai:

- pengubahan Skema Kerja Sama yang sebelumnya Bangun Kelola Serah menjadi site lease/sewa;
- jangka waktu yang sebelumnya 70 (tujuh puluh) tahun menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun;
- jangka waktu kerjasama terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2043; dan
- besaran biaya sewa lokasi per tahun sejumlah Rp236.000.000 (belum termasuk PPN) dibayarkan setiap triwulan di setiap awal bulan berjalan.

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek - SPSL

- Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), dimana Perusahaan menunjuk SPSL untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada pendapatan untuk SPSL atas penyediaan jasa ini.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Project Implementation Agreement – SPSL (continued)

As of August 6, 2018, the novation was not carried out and was changed to a lease/site lease as outlined in the PIA amendment agreement and has undergone several changes recently on December 23, 2020 regarding changes in the value and term of the lease.

On September 30, 2021, the Company and SPSL signed the Fifth Amendment Agreement regarding the Executor of the Kalibaru Terminal Project, Tanjung Priok Port No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21 and No. PJK-621-30092021-001, which regulates:

- changing the Cooperation Scheme which was previously Build Manage Handover to site lease;
- the previous period of 70 (seventy) years to 23 (twenty three) years;
- the cooperation period is from October 1, 2020 to September 30, 2043; and
- the annual rental fee is Rp236,000,000 (excluding VAT) and is carried out on a quarterly basis at the beginning of the current month.

b) Project Management Agreement - SPSL

- On February 24, 2014, the Company and SPSL signed Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), in which the Company appointed SPSL as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project. There is no profit for SPSL for providing this service.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek – SPSL (lanjutan)

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Berita Acara No. PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 dan No. BAC-400-09102020-012 tentang Kesepakatan Bersama Rencana Pembaruan Manajemen Proyek Untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun maksud dalam Berita Acara ini adalah kesepakatan bersama untuk melakukan pembaruan terhadap PMA karena PIA telah mengalami perubahan skema kerja sama sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap PMA. Maka, Perusahaan dan SPSL bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Baru yang akan menggantikan PMA.

- Pada tanggal 18 Desember 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I di Pelabuhan Tanjung Priok No.PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 dan No.PJK-621-18122020-006.

Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan SPSL dalam pelaksanaan kerjasama manajemen proyek pembangunan Terminal Kalibaru I Pelabuhan Tanjung Priok.

- Pada tanggal 29 April 2019, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 dan No. PJK-KJG-06-29042019-010.
- Pada tanggal 23 Oktober 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.02/23/10/1/MPS/TEK/PI.II-2020 dan No.PJK-621-23102020-009.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Management Agreement- SPSL (continued)

On October 9, 2020, the Company and SPSL signed the Minutes No.PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 and No. BAC-400-09102020-012 concerning Mutual Agreement on Project Management Renewal Plan for Construction Work on Phase 1 of North Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok Port.

The intention in this Minutes is a mutual agreement to make updates to PMA because PIA has undergone a change in the cooperation scheme so that adjustments need to be made to PMA. So, the Company and SPSL agreed to make a New Cooperation Agreement that would replace PMA.

- On December 18, 2020, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction of Phase I of the North Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port No. PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 and No.PJK-621-18122020-006.

The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and SPSL in performing of cooperation in the management of the Kalibaru I Terminal construction project at the Port of Tanjung Priok.

- On April 29, 2019, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 and No. PJK-KJG-06-29042019-010.
- On October 23, 2020, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. KS.02/23/10/1/MPS/TEK/PI.II-2020 and No. PJK-621-23102020-009.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek – SPSL (lanjutan)

Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan SPSL dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan terminal Kijing pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

- Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani perjanjian Kerjasama Khusus Manajemen Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Periode 2021 sampai dengan 2022 Pelabuhan Tanjung Priok No. PD.05.01/29/9/10/MPS/TEK/PI.II-21 dan No. PJK-621-29092021-006.

Jangka waktu perjanjian ini adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) ditandatangani dengan total biaya pelaksanaan sebesar Rp20.314.227 (termasuk PPN).

- Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. PD.05.01/29/9/12/HPS/TEK/PI.II-21 dan No.PJK-621-29092021-013.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) senilai Rp18.437.391 (belum termasuk PPN).

- Pada tanggal 3 November 2022, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Khusus Manajemen Proyek Terminal Kalibaru Tahap I Periode 2022 sampai dengan 2023 Pelabuhan Tanjung Priok No. PD.05/01/3/11/1/PM01/INVS/PLND-22 dan No. PD.05.01/3/11/1/KPKB/DIUT/PLSL -22.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Management Agreement - SPSL (continued)

The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and SPSL in performing construction and development cooperation of Kijing terminal Pontianak port in West Kalimantan.

- *On September 29, 2021, Company and SPSL signed a Special Cooperation Agreement for the Management of the North Kalibaru Terminal Development Phase I for the 2021 to 2022 of Tanjung Priok Port No. PD.05.01/29/9/10/MPS/TEK/PI.II-21 and No. PJK-621-29092021-006.*

The term of agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days since the Minutes of Work Start (BAMK) is signed with a total cost of Rp20,314,227 (including VAT).

- *On September 29, 2021, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. PD.05.01/29/9/12/HPS/TEK/PI.II-21 and No. PJK-621-29092021-013.*

The term of the agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days starting from the Minutes of Starting Work (BAMK) amounted to Rp18,437,391 (excluding VAT).

- *On November 3, 2022, the Company and SPSL signed a Special Cooperation Agreement for the Management for the Kalibaru Terminal Development Phase I for the 2022 to 2023 of Tanjung Priok Port No. PD.05/01/3/11/1/PM01/INVS/PLND-22 and No. PD.05.01/3/11/1/KPKB/DIUT/PLSL-22.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek – SPSL (lanjutan)

Jangka waktu perjanjian ini adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) ditandatangani dengan total biaya pelaksanaan sebesar Rp17.260.258 (belum termasuk PPN).

Pada tanggal 3 Oktober 2023, SPSL menandatangani berita acara atas pengalihan manajemen proyek Manajemen Proyek Terminal Kalibaru Tahap I dengan Perusahaan. Berdasarkan berita acara tersebut, manajemen Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I beralih ke Perusahaan.

- Pada tanggal 14 November 2022, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. PD.05.01/14/11/1/PMO2/INVS/PLND-22 dan No. PD.05.01/14/11/1/PRTE/DIUT/PLSL-22.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) senilai Rp19.299.347 (belum termasuk PPN).

- Pada tanggal 6 September 2023, SPSL menandatangani berita acara atas pengalihan kerja sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat dengan Perusahaan. Berdasarkan berita acara tersebut, Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat yang dikelola SPSL berakhir pada tanggal 24 Oktober 2023 dan tidak dilakukan perpanjangan kerjasama melainkan beralih ke Perusahaan.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Management Agreement - SPSL (continued)

The term of agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days since the Minutes of Work Start (BAMK) is signed with a total cost of Rp17,260,258 (excluding VAT).

On October 3, 2023, SPSL signed a novation memorandum of project management for the Kalibaru Terminal Development Phase I with the Company. Based on the memorandum, project management for the Kalibaru Terminal Development Phase I is transferred to the Company.

- *On November 14, 2022, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. PD.05.01/14/11/1/PMO2/INVS/PLND-22 and No. PD.05.01/14/11/1/PRTE/DIUT/PLSL-22.*

The term of the agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days starting from the Minutes of Starting Work (BAMK) amounted to Rp19,299,347 (excluding VAT).

- *On September 6, 2023, SPSL signed a novation memorandum of the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan with the Company. Based on the memorandum, the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan, managed by SPSL, ended on October 24, 2023, and there is no extension of cooperation, instead, transferred to the Company.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1

Berdasarkan PIA (Catatan 49a), pada tanggal 9 Juni 2014, SPSL dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana SPSL menunjuk NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada SPSL.

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 ("SAA"), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan CY 570 meter. SPSL harus melakukan penyerahan dermaga 450 meter dan dermaga 850 meter kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 dan 31 Desember 2015.

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya. Pada tanggal 17 September 2014, SPSL menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1 dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 27).

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1

Based on PIA (Note 49a), on June 9, 2014, SPSL and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which SPSL appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meters quay and NPCT1 shall pay advance site rent and quarterly site rent to SPSL.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which consist of USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meters quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meters quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 ("SAA"), the final USD30,000,000 will be paid after the completion of additional yard area CY 570 meters. SPSL shall handover the 450 meters quay and the 850 meters quay to NPCT1 on July 31, 2015 and December 31, 2015, respectively.

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 meters quay up to the commencement of operation of 850 meters quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter. On September 17, 2014, SPSL received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1 and are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position (Note 27).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, SPSL menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, SPSL menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan *Liquidated Damage Event*.

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan SPSL pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, SPSL tidak menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan tersebut.

Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh SPSL kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

Pada tanggal 24 Juni 2016, SPSL menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dermaga 850 meter belum mulai beroperasi sehingga pembayaran pertama dan kedua atas sewa diterima di muka masing-masing sebesar USD30.000.000 dan USD40.000.000 tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 27).

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

The handover of 450 meters quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, SPSL received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, SPSL responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1's construction hence it is not a Liquidated Damage Event.

In addition, the handover of 850 meters quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by SPSL on January 31, 2016, did not occur as well. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the Company has not received any Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to these delays.

450 meters and 850 meters quays have been handed over by SPSL to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

On June 24, 2016, SPSL received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2016, commencement of operation of 850 meters quay has not yet occurred hence first and second payment of advance site rent amounting to USD30,000,000 and USD40,000,000, respectively, are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position (Note 27).

On August 18, 2016, 450 meters quay has started its commercial operation.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 13 Desember 2016, SPSL dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan (LOA) dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Penyediaan akses oleh SPSL kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- SPSL akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Perkuatan sisi utara tanggal 16 Maret 2017;
 - Penyediaan dan pemasangan *variable speed water drive* dan pressure tank dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
 - Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
 - Penyelesaian fase kedua dari area *common gate* tanggal 16 Oktober 2017;
 - Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017.
- Kesepakatan bahwa tanggung jawab pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;
- Jika SPSL *Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 13, 2016, SPSL and NPCT1 signed a Letter of Acceptance (LOA) which regulates items as follows:

- Provision of access to certain areas within 850 meters quay from SPSL to NPCT1;
- Agreement on the date of commencement of operations of 450 meters quay, which was August 18, 2016;
- Site Works Confirmation Notice for 850 meters quay was issued on October 16, 2016 with note on certain outstanding works;
- SPSL will complete the following works within the time specified for each item:
 - Strengthening of north side by March 16, 2017;
 - Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;
 - Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;
 - Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;
 - Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.
- Agreement that the maintenance responsibility of concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer's report;
- Agreement that the date of commencement of operations of 850 meters quay will be no later than March 16, 2017;
- If SPSL *Undertakings* have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 13 Desember 2016, SPSL dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan (LOA) dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- Jika terdapat salah satu SPSL *Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh SPSL *Undertaking* telah diselesaikan.

Pada tanggal 16 Januari 2018, SPSL dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- SPSL akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
- Jalan akses keluar sisi timur area CGA tanggal 15 Desember 2017;
- Pengoperasian *Go-live* atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
- Pengoperasian *Go-live* OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
- Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
- Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018;
- Tambahan area *buffer* untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
- Penyediaan fasilitas untuk petikemas *reefer* dan *cooling room* tanggal 30 April 2018;
- Pekerjaan perbaikan jalan akses keluar (lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
- Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
- Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 13, 2016, SPSL and NPCT1 signed a Letter of Acceptance (LOA) which regulates items as follows: (continued)

- If any one of the SPSL *Undertakings* has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 meters quay, which is USD7,000,000 until the date that all SPSL *Undertakings* have been completed.

On January 16, 2018, SPSL and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows:

- SPSL will complete the following works within the time specified for each item:
- East area exit access road of CGA by December 15, 2017;
- *Go-live* IT system operation by December 31, 2017;
- *Go-live* OCR operation at CGA by January 31, 2018;
- Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;
- Entry access road west side CGA by February 28, 2018;
- Additional *buffer* area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018;
- Facility provision for *reefer* container and cooling room by April 30, 2018;
- Reparation work of exit access road (north side behandle dockyard at CGA) by April 30, 2018;
- Reparation of north side behandle dockyard at CGA by May 31, 2018;
- Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

Pada tanggal 16 Januari 2018, SPSL dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, SPSL akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.
- Kesepakatan dalam Surat Keputusan mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.

SPSL telah berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diminta dalam MOA sebelum batas waktu yang ditentukan, walaupun masih terdapat 2 (dua) *item* yang sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian belum digunakan karena terdapat kendala administrasi yang perlu diselesaikan antara Perusahaan dengan kontraktor pelaksana pekerjaan.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, telah disepakati bersama antara SPSL dan PP terkait kelanjutan 2 (dua) *item* pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian, dimana jangka waktu pelaksanaan untuk 2 *item* pekerjaan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2022.

Pada tanggal 2 November 2020, SPSL membuat kesepakatan bersama dengan NPCT1 (SMA) mengenai sewa lokasi dimuka/*Advance Site Rent* (ASR) yang menjelaskan NPCT1 menyetujui untuk membayar kepada SPSL beberapa bagian dari sewa lokasi di muka (ASR) sebesar USD23.500.000 meskipun penyerahan CY 57 meter belum dipenuhi oleh SPSL. Sesuai dengan ketentuan SMA, SPSL diharuskan mengirimkan pemberitahuan kepada NPCT1 tentang dimulainya pelaksanaan pembangunan CY 57 meter. Pada tanggal 20 April 2020, pembangunan CY 57 meter telah dilanjutkan kembali dan ditargetkan selesai pada bulan Mei 2022.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**c) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

On January 16, 2018, SPSL and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows: (continued)

- *If the above works have not been completed on the predetermined dates, SPSL will pay USD5,000/day for each work.*
- *Agreement on the Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.*

SPSL has succeeded in completing all requested work within the MOA before the specified time limit, although there are still 2 (two) items that have not been used until completion of the consolidated financial statements because there are administrative constraints that need to be resolved between the Company and the contractor implementing the work.

On 18 August 2020, it was mutually agreed between the SPSL and PP regarding the continuation of 2 (two) work items as outlined in the Agreement Letter, where the implementation period for 2 work items will end on May 18, 2022.

On November 2, 2020, SPSL entered into a joint agreement with NPCT1 (SMA) regarding Advance Site Rent (ASR) which explained that NPCT1 agreed to pay SPSL some part of the upfront location lease (ASR) of USD23,500,000 despite submission CY 57 meters has not been fulfilled by SPSL. In accordance with SMA regulations, SPSL is required to send a notification to NPCT1 regarding the commencement of the construction of the 57 meter CY. On April 20, 2020, the construction of the 57 meter CY has been resumed and is targeted for completion in May 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2020, SPSL telah menerima ASR tersebut sebesar USD23.500.000 yang dicatat pada pendapatan diterima di muka.

Pada tanggal 30 Desember 2021, SPSL dan NPCT1 telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan tentang Serah Terima Area 57 Meter yang diantaranya menjelaskan bahwa NPCT1 telah menerima penyerahan Area 57 Meter sesuai *Site Work Confirmation Notice* (SWCN) yang diterbitkan oleh *Independent Engineer* (IE), biaya sewa *Quarterly Site Rent* (QSR) dibebaskan dari reduksi 11% menjadi sebesar USD14.000.000 (nilai penuh) mulai tanggal 27 Desember 2021, dan SPSL akan menerbitkan tagihan untuk sisa ASR sebesar USD6.500.000. Pada tanggal 2 Februari 2022, SPSL telah menerima sisa ASR sebesar USD6.500.000 tersebut.

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja antara Perusahaan dan HPI (Catatan 1c) mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja).

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Amendemennya adalah sebagai berikut:

- Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

Perusahaan	54,91%
HPI	45,09%

- Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 29, 2020, SPSL received ASR amounting to USD23,500,000 which was recorded as unearned income.

On December 30, 2021, SPSL and NPCT1 has signed *Minutes of Agreement* regarding *Handover 57 Meter area* which among others explain that NPCT1 has received the handover of 57 Meters Area according to *Site Work Confirmation Notice* (SWCN) issued by *Independent Engineer* (IE), *Quarterly Site Rent* (QSR) rental fee is free from reduction 11% which has full value of USD14,000,000 (full amount) from December 27, 2021, and SPSL will issue a bill for the remaining ASR amounting to USD6,500,000. On February 2, 2022, SPSL has received such remaining ASR amounting to USD6,500,000.

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

The *Master Cooperation Agreement* between the Company and HPI (Note 1c) sets out the terms and conditions under which *Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja* (KSO TPK Koja) is operating.

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

- The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:

The Company
HPI

- Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Amendemennya adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.
- Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.
- Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.
- Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan apabila arus petikemas tahunan yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.
- Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya.
- Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

Pada tanggal 30 Maret 2021, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2020.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows: (continued)

- *Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.*
- *The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.*
- *Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.*
- *Royalties will be paid to the Company if the annual container throughput exceeds the minimum annual target.*
- *If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.*
- *The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.*

On March 30, 2021, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2020 net income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2020 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2020 sebesar USD0,35 juta atau setara dengan Rp4,92 miliar untuk Perusahaan dan USD0,21 juta atau setara dengan Rp3,03 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2020 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 24 Mei 2022, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2021 dan 2022.

Pada tanggal 14 Desember 2022, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2021 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2021 sebesar USD4,98 juta atau setara dengan Rp78,39 miliar untuk Perusahaan dan USD4,01 juta atau setara dengan Rp63,06 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2021 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPI mengadakan Revisi atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok (Revisi Perjanjian) dimana Perusahaan dan HPI sepakat untuk memperpanjang kerjasama pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Revisi Perjanjian ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh TPK Koja kepada Perusahaan.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On December 31, 2021, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2020 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2020 of USD0.35 million or equivalent to Rp4.92 billion for the Company and USD0.21 million or equivalent to Rp3.03 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2020 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On May 24, 2022, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2021 and 2022 net income.

On December 14, 2022, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2021 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2021 of USD4.98 million or equivalent to Rp78.39 billion for the Company and USD4.01 million or equivalent to Rp63.06 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2021 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On August 5, 2014, the Company and HPI entered into a Revised Cooperation Agreement for the Management of Tanjung Priok Container Terminal III (Revised Agreement), whereby the Company and HPI agreed to extend the cooperation for operating Terminal Petikemas III Tanjung Priok until March 26, 2039. The Revised Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Revised Agreement, TPK Koja will have to pay quarterly rent fee amounting to USD8,750,000 to the Company, while royalty will no longer be paid by TPK Koja to the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPI telah melakukan perubahan terhadap Revisi Perjanjian di atas dimana pada akhir masa perjanjian, seluruh aset yang dimiliki HPI dan bagian HPI dalam aset bersama serta pekerjaan modal akan dialihkan kepada Perusahaan tanpa adanya pembebanan.

Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, KSO TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8,75 juta, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh KSO TPK Koja kepada Perusahaan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.000.000 (setara dengan Rp542,44 miliar) dan USD35.000.000 (setara dengan Rp514,88 miliar).

Dalam Revisi Perjanjian tersebut, Perusahaan berhak memperoleh pembayaran premium sebesar USD50.000.000 dari HPI sehubungan dengan dilanjutkannya kerjasama antara Perusahaan dan HPI untuk pengelolaan TPK Koja. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp27.735.417. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo yang belum diamortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp402.163.542 dan Rp429.898.958 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On June 22, 2015, the Company and HPI has amended the Revised Agreement mentioned above where at the end of the agreement period, all of the HPI's assets and HPI's interest in the joint assets and the capital works will be transferred to the Company free of encumbrances.

In consideration to the Revised Agreement, KSO TPK Koja will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD8.75 million, while royalty will no longer be paid by KSO TPK Koja to the Company.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company has recorded revenue from these quarterly rentals of USD35,000,000 (equivalent to Rp542.44 billion) and USD35,000,000 (equivalent to Rp514.88 billion) respectively.

In the Revised Agreement, the Company has the right to obtain payment of premium amounting to USD50,000,000 from HPI in relation to the continuing cooperation between the Company and HPI for the management of TPK Koja. For the year ended December 31, 2023 and 2022, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp27,735,417. As of December 31, 2023 dan 2022 the balance of unamortized premium amounted to Rp402,163,542 and Rp429,898,958 respectively, and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok ("Perjanjian Pemberian Kuasa") dimana Perusahaan menunjuk dan memberikan kuasa pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah dikuasakan (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal kontainer dan utilitas) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sehubungan dengan pemberian kuasa kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. Disamping itu, JICT juga akan membayar kepada Perusahaan atas sewa peralatan dan tenaga kerja yang ditempatkan Perusahaan di JICT.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa) dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi.

Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 (Catatan 49f), sedangkan royalti, sewa peralatan berupa 4 (empat) RTGC dan penempatan tenaga kerja tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Perjanjian jasa dan teknis "know how" yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Kuasa akan diakhiri. Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, kegiatan usaha dan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT kepada Perusahaan (Catatan 49i).

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into Authorization Agreement for The Operation and Maintenance of Container Terminal in Tanjung Priok Seaport ("Authorization Agreement") whereby the Company appointed and conferred authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement. In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthly royalties to the Company calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue. Moreover, JICT will also pay to the Company for equipment rental and Company's employee secondment in JICT.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Authorization Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (Amended Authorization Agreement), whereby the Company and JICT agreed to extend the Authorization Agreement until March 26, 2039. The Amended Authorization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent.

In consideration to the Amended Authorization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent to the Company fee amounting to USD21,250,000 (Note 49f), while royalty, equipment rental of 4 (four) RTGCs and secondment of employee will no longer be paid by JICT to the Company. As for the technical "know-how" and services agreement in Authorization Agreement, they will be terminated. Based on the Amended Authorization Agreement, Terminal 2 assets and business will be transferred from JICT to the Company (Note 49i).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, Perusahaan akan menerima pembayaran premium sebesar USD200.000.000 dari HPJ (Catatan 49h).

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diatur dalam surat Menteri BUMN dan surat Menteri Perhubungan di bawah.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan menerima surat dari Menteri BUMN tentang Kerjasama Pengelolaan/Pengoperasian JICT dan TPK Koja dimana Menteri BUMN secara prinsip menyetujui rencana kerjasama usaha pengelolaan/pengoperasian JICT dan TPK Koja, dengan kepemilikan minimal di JICT sebesar 51%, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Memperhatikan surat Menteri Perhubungan No. HK.201/3/4 Phb 2014 tanggal 18 September 2014, terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
- Melaksanakan surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama BUMN No. S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerjasama BUMN.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan dan HPJ telah menandatangani Pokok-Pokok Perjanjian menyepakati ketentuan-ketentuan utama yang diusulkan untuk diatur lebih lanjut dalam perjanjian - perjanjian perubahan terhadap amendemen perjanjian perpanjangan JICT saat ini dan dokumen-dokumen turunan yang relevan dari perjanjian perpanjangan JICT saat ini.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

Based on the Amended Authorization Agreement, the Company will receive payment of premium from HPJ amounting to USD200,000,000 (Note 49h).

On June 22, 2015, the Company and JICT entered into Amendment Agreement to the Amended Authorization Agreement which changed the amount of premium to be paid by HPJ to the Company amounting to USD215,000,000. The Amended Authorization Agreement needs to have adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping as regulated in the letter of the Minister of SOEs and letter of the Minister of Transportation below.

On June 9, 2015, the Company received a letter from the Minister of SOE regarding Cooperation of Management/ Operation of JICT and TPK Koja whereas the Minister of SOEs principally agrees with the plan of cooperation of JICT and TPK Koja management/operation, with minimum percentage of ownership of 51%, with requirements as follows:

- To comply with the letter from Minister of Transportation No. HK.201/3/4 Phb 2014 dated September 18, 2014, related to the separation of operator and regulator functions in accordance with UU No. 17 Year 2008.
- To execute letter of Vice Minister of SOE Enterprise to President Director of SOE No. S-645/MBU/WK/10/2014 dated October 9, 2014 regarding result of Assets Working Committee of SOE and Decision of Constitutional Court, especially related to State Owned Enterprises cooperation.

On September 30, 2021, the Company and HPJ have entered into the Heads of Agreement pursuant to which have agreed on the proposed key terms to be further stipulated in amendment of agreements to the existing extension agreements of JICT and the relevant derivatives documents to the existing extension agreements of JICT.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, diantaranya mengatur pengalihan aset Terminal 2 dimana pada tanggal pengalihan, kepemilikan dan penguasaan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT ke Perusahaan sesuai dengan Akta Pengalihan. Berdasarkan amendemen tersebut, nilai aset Terminal 2 akan didasarkan pada nilai barang sisa (*scrap value*) sebagaimana ditentukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Perusahaan.

f) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan.

Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan, JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

Berdasarkan amendemen Perjanjian Pemanfaatan - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 5 Agustus 2014 (sebagaimana telah diubah), ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT, antara lain menyetujui JICT atas biaya sendiri, wajib membayar dan melunasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Perusahaan tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah 20 (dua puluh tahun) dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On March 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to the Amended Authorization Agreement, among others stipulated the transfer of Terminal 2 Assets in which at the date of transfer, the ownerships and the authority of Terminal 2 assets will be transferred from JICT to the Company in accordance with the Deed of Transfer. Based on the amendment, the value of Terminal 2 assets will be based on scrap value as determined by the independent appraisal appointed by the Company.

f) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into an Agreement on Utilization of The HPL Land, Port Buildings Facility, and The Container Terminal Support Facility ("Utilization Agreement") whereby the Company granted and conferred the right to utilize and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement.

In consideration of the granting of the utilization right by the Company, JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

Based on amendment agreement to Utilisation Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok dated August 5, 2014 (as amended), signed on March 30, 2022, the Company and JICT, agreed to, among others, JICT at its owned expense, shall duly pay and discharge PBB (Tax on Land and Building).

The Company retained the rights of the properties ownership. The utilization period is 20 (twenty years) from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**f) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL,
Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas
Penunjang Terminal Petikemas lainnya -
JICT (lanjutan)**

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Penggunaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan sampai dengan tanggal berakhirnya Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa. Amendemen Perjanjian Penggunaan ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Penggunaan tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 sedangkan kompensasi 5% dari pendapatan kotor JICT tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD89.446.718.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen Perjanjian Penggunaan, diantaranya mengatur mengenai kewajiban pembayaran PBB, kewajiban-kewajiban JICT dan biaya pemeliharaan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.000.000 (setara dengan Rp1.295.230.000) dan USD35.000.000 (setara dengan Rp1.238.407.500).

**g) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham –
JICT**

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JICT tanggal 24 November 2015, para pemegang saham JICT setuju antara lain:

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**f) Utilization Agreement of Land Under HPL
Owned by the Company, Port Facilities
Building and Other Container Port
Supporting Facilities - JICT (continued)**

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Utilization Agreement whereby the Company and JICT agreed to extend the Utilization Agreement until the date of termination of Amended Authorization Agreement. The Amended Utilization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Utilization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD21,250,000 while compensation of 5% of JICT's gross revenue will no longer be paid by JICT to the Company.

For the year ended December 31, 2023 and 2022 the Company has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to USD89,446,718, respectively.

On March 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to the Utilization Agreement, among others stipulated the obligation of PBB payment, JICT's obligations and maintenance expenses.

For the year ended December 31, 2023 and 2022 the Company has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to USD35,000,000 (equivalent to Rp1,295,230,000) and USD35,000,000 (equivalent to Rp1,238,407,500) respectively.

g) Amended Shareholders Agreement - JICT

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of JICT dated November 24, 2015, the shareholders of JICT agreed among others:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

g) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT (lanjutan)

- Bergantung pada persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk meningkatkan modal dasar JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh).
- Bergantung pada persetujuan BKPM, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh).

Pada tanggal 7 Desember 2015, BKPM telah menyetujui perubahan modal JICT tersebut di atas.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan, HPJ, Kopegmar dan JICT telah menandatangani Amendemen terhadap Amendemen Perjanjian Pemegang Saham, diantaranya mengatur pengalihan saham JICT yang dimiliki HPJ kepada Perusahaan sebanyak 9.300.917 saham dengan harga pembelian sebesar USD1. Dengan demikian, kepemilikan Perusahaan di JICT menjadi 51,00% dari sebelumnya 48,90%.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas JICT No. 11 tanggal 30 Mei 2022, para pemegang saham telah menyetujui pengalihan saham tersebut di atas serta perubahan anggaran dasar JICT. Akta tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 31 Mei 2022.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g) Amended Shareholders Agreement - JICT (continued)

- Subject to approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM), to increase JICT's authorized capital from Rp221,450,406 divided into 1 (one) A Series share and 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 1 (one) A Series share and 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).
- Subject to approval from BKPM, to increase JICT's issued and paid-up capital from Rp221,450,406 divided into 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).

On December 7, 2015, BKPM has already approved the above mentioned JICT's capital changes.

On March 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to the Amended Shareholder Agreement, among others stipulated the transfer of JICT shares owned by HPJ to the Company amounting to 9,300,917 shares with purchase price of USD1. Therefore, the ownerships of the Company in JICT became 51.00% from previously 48.90%.

Based on Deed of Decision of General Meeting of Shareholder of JICT No. 11 dated May 30, 2022, the shareholders agreed to such transfer of shares as mentioned above and amendmend of the JICT's article of association. The Deed has been notified to and approved by the Ministry of Law and Human Rights dated May 31, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

h) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Pembayaran Premium dimana HPJ sepakat untuk melakukan pembayaran premium kepada Perusahaan sebesar USD200.000.000 sebagai imbalan atas tetap dilanjutkannya kerja sama usaha patungan Perusahaan dengan HPJ. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat setiap dari persyaratan pendahuluan pada Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa telah dipenuhi (Catatan 49e). Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pembayaran Premium dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Dalam keadaan tertentu dimana terjadinya pengakhiran secara lebih awal atas Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, maka premium harus dibayarkan kembali oleh Perusahaan kepada HPJ secara pro-rata. Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan telah menerima pembayaran premium tersebut.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan HPJ sepakat mengenai tambahan premium sebesar USD17.940.000 yang harus dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Milestone* pertama sebesar USD8.940.000 pada saat penandatanganan amendemen-amendemen tersebut di atas.
- 2) *Milestone* kedua sebesar USD9.000.000 setelah yang lebih awal terjadi antara: (i) merger yang disepakati dan pengalihan saham yang diusulkan menjadi efektif secara hukum dan pengalihan atas aset Terminal 2 telah seluruhnya selesai; atau (ii) 10 tahun setelah penandatanganan amendemen-amendemen tersebut.

Perusahaan telah menerima pembayaran premium *milestone* pertama sebesar USD8.940.000 pada bulan April 2022 yang diamortisasi selama sisa masa Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, yaitu sampai dengan 2039.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

h) Premium Payment Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company and HPJ entered into a Premium Payment Agreement, whereby HPJ agreed to pay premium to the Company amounting to USD200,000,000 as consideration for continuing the joint venture of the Company with HPJ. The Premium Payment Agreement will commence on the date on each of the condition precedent in the Authorization Agreement has been satisfied (Note 49e). On June 22, 2015, the Company and HPJ entered into Amendment Agreement to Premium Payment Agreement in which the amount of premium to be paid by HPJ was amended to USD215,000,000. In certain circumstances leading to early termination of the Amended Authorization Agreement, the premium shall be repaid by the Company to HPJ using a pro-rate basis. On July 2, 2015, the Company has received payment of the premium.

On March 30, 2022, the Company and HPJ agreed on additional premium of USD17,940,000 which should be paid by HPJ to the Company with terms as follows:

- 1) First milestone of USD8,940,000 at the signing of the above amendments.
- 2) Second milestone of USD9,000,000 after the earlier one occurs between: (i) the agreed merger and proposed share transfer become legally effective and the transfer of Terminal 2 assets is fully completed; or (ii) 10 years after the signing of the amendments.

The Company has received the first milestone premium payment of USD8,940,000 on April 2022 which is amortized over the remaining period of the Amendment of Authorization Agreement, which is until 2039.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

h) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp89.446.718. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp1.848.565.521 dan Rp1.967.827.813, dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

i) Perjanjian Pengalihan Aset - JICT

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Terminal 2 dari JICT kepada Perusahaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk melakukan pengalihan aset-aset milik JICT yang terdapat di Terminal 2 kepada Perusahaan pada tanggal perjanjian ini. Atas pengalihan aset-aset tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pembayaran sebesar USD2.816.526, yang akan dibayarkan kepada JICT menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 November 2015, yaitu sebesar Rp38.980.720.

Pada tanggal 30 Mei 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen Perjanjian Pengalihan Aset, diantaranya disepakati bahwa aset Terminal 2 belum dapat dialihkan secara fisik oleh JICT kepada Perusahaan berdasarkan Akta Pengalihan tanggal 14 Desember 2015 tersebut di atas karena Perusahaan belum melakukan pembayaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Akta Pengalihan tersebut. Juga disepakati bahwa pengalihan aset Terminal 2 akan didasarkan pada *scrap value* sebesar Rp20,23 miliar sebagaimana ditentukan oleh penilai independen. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pengalihan aset Terminal 2 tersebut kepada JICT di tanggal 24 Juni 2022.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h) Premium Payment Agreement - JICT (continued)

For the year ended December 31, 2023 and 2022, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp89,446,718, respectively. As of December 31, 2023 and 2022, the balance of unamortized premium amounted to Rp1,848,565,521 and Rp1,967,827,813, respectively, and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

i) Assets Transfer Agreement - JICT

On December 14, 2015, the Company and JICT entered into Terminal 2 Assets Transfer from JICT to the Company Agreement where the Company and JICT agreed to transfer assets owned by JICT at Terminal 2 to the Company on the date of this agreement. For the transfer of the assets, the Company is obliged to make payment amounting to USD2,816,526, which will be paid to JICT in Rupiah using BI middle rate as of November 30, 2015, amounted to Rp38,980,720.

On May 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to Asset Transfer Agreement, among others agreed that the transfer of Terminal 2 Assets can not be transferred physically from JICT to the Company based on the Assets Transfer Agreement dated December 14, 2015 as mentioned above because the Company has not paid as required in the Asset Transfer Agreement. It is also agreed that the transfer of Terminal 2 assets will be based on scrap value of Rp20.23 billion as determined by the independent appraisal. The Company has paid the Terminal 2 asset transfer to JICT on June 24, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

j) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan STMS

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura ("STMS") menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS.

Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

Jika dalam suatu tahun buku, Perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

Kepemilikan saham IPC TPK pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

j) Shareholders Agreement IPC TPK and STMS

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore ("STMS") signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounting to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS.

The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

If, in respect of any financial year, the Company has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships. Other term and conditions are stipulated in the agreement.

IPC TPK's ownership in the company established is not followed by control and therefore, the company's financial statements are not consolidated in the IPC TPK's financial statements.

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

k) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., (STMS) menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK. Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

Pada tanggal 10 November 2016, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk merevisi tingkat bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 menjadi 0%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang revisi tingkat bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi 0%, lalu pada tanggal 31 Desember 2020, IPC TPK dan STMS kembali menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang pengenaan bunga 0% untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 2023, IPC TPK dan STMS kembali menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang pengenaan bunga 0% untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

k) Loan Agreement - Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd., Singapore

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd. (STMS) signed a Loan Agreement where STMS provides loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

The facility will be repaid through reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and from dividends which can be distributed to IPC TPK. All interest will be paid from IPC TPK dividends.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests that was to be charged per annum.

On November 10, 2016, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2016 to December 31, 2018 to become 0%.

As of December 31, 2018, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2019 to December 31, 2020 to become 0%, then on December 31, 2020, IPC TPK and STMS re-signed the agreement to prolong the 0% interest period from January 1, 2021 to December 31, 2022. On January 1, 2023 IPC TPK and STMS re-signed the agreement to prolong the 0% interest period from January 1, 2023 to December 31, 2024.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

l) Perjanjian Penggunaan Tanah - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood)

Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Indofood atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah seluas 329.833 m² berlokasi di Jl. Sindang laut dan Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

Perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan yang digunakan oleh Indofood.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp1.041.059.197 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/jetty sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Perusahaan adalah sebesar Rp975.838.163. Pada tanggal 31 Desember 2023 and 2022, saldo yang belum diamortisasi atas penggunaan bagian tanah HPL masing-masing adalah sebesar Rp454,86 miliar dan Rp495,77 miliar (sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2).

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

l) Land Usage Agreement - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood)

On March 2, 2012, the Company entered into an agreement with Indofood for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 329,833 m² which located at Jl. Sindang Laut and Jl. Raya Cilincing, North Jakarta and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.

The agreement has been approved by the Minister of SOE through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimization of the Company's Land which is used by Indofood.

Revenue earned by the Company from the usage of land amounted to Rp1,041,059,197 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood.

Until December 31, 2023, the payment received by the Company amounted to Rp975,838,163. As of December 31, 2023, and 2022, the balance of unamortized use of a parcel of HPL land amounted to Rp454.86 billion and Rp495.77 billion, respectively, (before deducted by final income tax article 4(2)).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**m) Perjanjian Pembangunan Dermaga
Makassar New Port (MNP) Tahap I**

Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Dermaga MNP Tahap IA dengan detail pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Perjanjian pekerjaan Paket A mengenai pekerjaan reklamasi dan pembangunan dermaga MNP senilai Rp326.868.365 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 3 dari Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notaris di Cibubur, tanggal 3 Juni 2015 dengan jangka waktu selama 725 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum III No. 15/HK.301/7/Pl.IV-2018 tanggal 12 Juli 2018 menjadi senilai Rp345.785.871 dengan jangka waktu selama 1.227 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan Paket B mengenai pekerjaan reklamasi, pengerukan, lapangan kontainer dan causeway MNP senilai Rp1.076.779.375 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 05 September 2016 dengan jangka waktu selama 830 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum II No. 1/HK.301/3/Pl.IV-2019 tanggal 15 Februari 2019 menjadi senilai Rp1.119.939.158 dengan jangka waktu selama 1.022 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan Paket C mengenai pekerjaan pembangunan breakwater MNP senilai Rp226.725.699 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 30 September 2016 dengan jangka waktu selama 600 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**m) Construction Agreement of Makassar New
Port (MNP) Quay Phase I**

The Company entered into a Construction Agreement of MNP Quay Phase IA, with details of work as follows:

- Agreement of work Package A regarding reclamation and construction of MNP Quay amounted to Rp326,868,365 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk based on Deed No. 3 from Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notary from Cibubur, dated June 3, 2015 with 725 calendar days period since the agreement was signed.
- This agreement of work was last amended through Addendum III No. 15/HK.301/7/Pl.IV-2018 dated July 12, 2018 with changes on the agreement amount into Rp345,785,871 and agreement period into 1,227 calendar days since the agreement was signed.
- Agreement of work Package B regarding reclamation of dredging work, container yard, and causeway of MNP amounted to Rp1,076,779,375 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated 05 September 2016 with period of 830 calendar days since the agreement was signed.
- This agreement of work was last amended through Addendum II No. 1/HK.301/3/Pl.IV-2019 dated February 15, 2019 with changes on the agreement amount into Rp1,119,939,158 and agreement period into 1,022 calendar days since from the agreement was signed.
- Agreement of work Package C regarding construction work of MNP breakwater amounted to Rp226,725,699 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated 30 September 2016 with period of 600 calendar days since from the agreement was signed.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**m) Perjanjian Pembangunan Dermaga
Makassar New Port (MNP) Tahap I (lanjutan)**

**m) Construction Agreement of Makassar New
Port (MNP) Quay Phase I (continued)**

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum IV No. 3/HK.301/13/PI.IV-2019 tanggal 13 September 2019 dengan jangka waktu menjadi selama 1.160 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan Paket D mengenai pekerjaan bangunan fasilitas serta mekanikal dan elektrikal MNP senilai Rp258.089.700 dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 30 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 31 Januari 2018 dengan jangka waktu selama 390 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum V No. 9/HK.301/10/PI.IV-2020 tanggal 04 September 2020 menjadi senilai Rp283.679.319 dengan jangka waktu selama 1.066 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- *This agreement of work was last amended through Addendum IV No. 3/HK.301/13/PI.IV-2019 dated September 13, 2019 with changes on the agreement period into 1,160 calendar days since the agreement was signed.*
- *Agreement of work Package D regarding construction of facility building including mechanical and electrical of MNP amounted to Rp258,089,700 with PT Adhi Karya (Persero) Tbk based on Deed No. 30 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated January 31, 2018 with period of 390 calendar days since from the agreement was signed.*
- *This agreement of work was last amended through Addendum V No. 9/HK.301/10/PI.IV-2020 dated September 04, 2020 with changes on agreement amount into Rp283,679,319 and agreement period into 1,066 calendar days since the agreement was signed.*

**n) Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan
Pengoperasian Terminal Petikemas Palaran
Pelabuhan Samarinda**

**n) Cooperation Agreement for The
Construction and Operation of The Palaran
Container Terminal Samarinda Port**

Pada tanggal 20 Juli 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda dan PT Pelabuhan Samudera Palaran. Perjanjian ini berjangka waktu selama 50 tahun sejak masa uji coba, yaitu 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

On July 20, 2007, the Company entered into a cooperation agreement for the construction and operation of the Palaran Container Terminal, Samarinda Port with the Samarinda City Government and PT Pelabuhan Samudera Palaran. This agreement has a term of 50 years from the trial period, which was 3 years since the contract signing.

Dalam perjanjian, Perusahaan mendapatkan *management fee/compensation fee* sebesar 10% dari total pendapatan kotor dari hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran. Selain itu, Perusahaan juga menerima bagi hasil keuntungan sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

In this agreement, the Company received the management fee/compensation fee amounting to 10% of gross revenue of operating Palaran Container Terminal. In addition, the Company also received the profit sharing at certain percentage from gross revenue of operating Palaran Container Terminal as regulated in this agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

n) Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda (lanjutan)

Pada akhir perjanjian, Perusahaan berhak memperoleh kepemilikan bangunan infrastruktur Terminal Petikemas Palaran dari PT Pelabuhan Samudera Palaran.

o) Perjanjian Pinjaman Biaya Pergantian Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing

Berdasarkan Akta Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Penggantian Pembelian Tanah dalam Rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cibitung-Cilincing antara Badan Layanan Umum - Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") dan CTP dari Notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H., No. 2 tanggal 4 Februari 2013, CTP memperoleh pinjaman untuk penggantian pembelian tanah dengan batas maksimal biaya pergantian Rp288.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Seksi I: Cibitung - Telaga Asih sebesar Rp11.519.488.
2. Seksi II: Telaga Asih - Tembalang sebesar Rp87.445.713.
3. Seksi III: Tembalang - Tarumajaya sebesar Rp118.906.715.
4. Seksi IV: Tarumajaya - Cilincing sebesar Rp70.128.083.

Jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah. Nilai tambah pinjaman (bunga) sebesar tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") ditambah 1%. Nilai tambah diperhitungkan setiap bulan dan wajib dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Denda tunggakan pembayaran nilai tambah sebesar 2% per bulan dari nilai tambah yang tertunggak.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp464.538.398 dan Rp466.538.398.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

n) Cooperation Agreement for The Construction and Operation of The Palaran Container Terminal Samarinda Port (continued)

At the end of the agreement, the Company has the right to acquire ownership of the Palaran Container Terminal infrastructure building from PT Pelabuhan Samudera Palaran.

o) Loan Agreement for Cibitung-Cilincing Toll Road Project Replacement Cost

Based on the Notarial Deed No. 2 dated February 4, 2013 by Mrs. Trie Sulistiowarni, S.H., a Notary in Jakarta, CTP has signed an agreement with Ministry of Public Works & Human Settlements - Public Service Agencies Secretariat of Toll Road Regulatory Body ("BLU Set-BPJT"). CTP obtained expense reimbursement loan on the purchase of land for Cibitung-Cilincing toll project for a maximum expense reimbursement amount of Rp288,000,000, with the following details:

1. Section 1: Cibitung - Telaga Asih amounting to Rp11,519,488.
2. Section 2: Telaga Asih - Tembalang amounting to Rp87,445,713.
3. Section 3: Tembalang - Tarumajaya amounting to Rp118,906,715.
4. Section 4: Tarumajaya - Cilincing amounting to Rp70,128,083.

The term of the loan is from the date the agreement was signed until the completion of the land acquisition process. The added value of the loan (interest) is the interest rate of the Deposit Insurance Corporation ("LPS") plus 1%. Value added is calculated every month and must be paid every 3 (three) months. The penalty for arrears in payment of value added is 2% per month of the value added in arrears.

As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding balance of the payable amounting to Rp464,538,398 and Rp466,538,398, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**p) Perjanjian Konstruksi dan Penggunaan
Infrastruktur BMS dan PT Freeport
Indonesia (PTFI)**

Pada tanggal 3 September 2021, BMS dan PT Freeport Indonesia ("PTFI") mengadakan perjanjian konstruksi dan penggunaan infrastruktur dimana BMS merancang, mengadakan, membangun, menguji dan melakukan uji kelayakan operasi atas pekerjaan sipil pada infrastruktur BMS sesuai dengan desain final, yang terdiri dari dermaga, trestle, jembatan, dan SWI (*sea water intake*), yang pelaksanaannya sesuai jadwal konstruksi yang tertuang di jadwal perjanjian, yaitu Desember 2021 - November 2022 untuk SWI, Desember 2021 - Desember 2022 untuk *trestle* dan jembatan, dan Desember 2021 - April 2023 untuk dermaga.

Pada tanggal 11 Mei 2023, BMS telah menerima Sertifikat Penerimaan Akhir dari PTFI dengan nomor MS-DD-0000-DCM-LTR-8606 dan mulai menerima *capacity payment*.

Beberapa ketentuan penting dalam perjanjian ini antara lain:

1. *Lease term* untuk perjanjian ini adalah 40 tahun terdiri dari 20 tahun jangka waktu awal ditambah 10 tahun perpanjangan pertama dan 10 tahun perpanjangan kedua.
2. Terdapat penalti yang akan dikenakan apabila PTFI membatalkan sewa pada 10 tahun awal dalam jangka waktu awal 20 tahun.
3. Pembatalan perjanjian harus disetujui kedua belah pihak atau tidak dapat dibatalkan sepihak saja, serta wajib memberikan pemberitahuan tertulis 180 hari sebelum tanggal pembatalan.
4. BMS membangun dermaga, trestle, jembatan, dan SWI (*sea water intake*). Freeport membangun alat-alat untuk menunjang operasionalnya seperti, *conveyer*, pipa, dan alat bongkar muat.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**p) BMS and PT Freeport Indonesia (PTFI)
Infrastructure Construction and Use
Agreement**

On September 3, 2021, BMS and PT Freeport Indonesia ("PTFI") entered into Construction and Utilisation Agreement where BMS is responsible for designing, procuring, constructing, testing, and conducting operational feasibility tests on civil works on BMS infrastructure, such as the wharf, trestle, bridge, and SWI (*sea water intake*), which will be put into operation according to the agreement construction schedule, which is December 2021 to November 2022 for the SWI, December 2021 to December 2022 for the trestle and bridge, and December 2021 to April 2023 for the wharf.

On May 11, 2023, BMS has received Final Acceptance Certificate from PTFI with document number MS-DD-0000-DCM-LTR-8606 and began receiving its *capacity payment*.

The following are key points in this agreement:

1. The lease term for this agreement is 40 years, which includes a 20-year initial term plus ten years for the first and ten years for the second extensions.
2. If PTFI terminates the lease during the first ten years of the initial 20-year term, a penalty will be applied.
3. The agreement cannot be canceled unilaterally, and written notice must be received 180 days before the cancellation date. Both parties must agree to the cancellation.
4. BMS will build the wharf, bridge, trestle, and SWI (*sea water intake*). Freeport builds equipment to support its operations, such as *conveyers*, pipes and loading and unloading equipment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

p) Perjanjian Konstruksi dan Penggunaan Infrastruktur BMS dan PT Freeport Indonesia (PTFI) (lanjutan)

Terdapat arus kas masuk yang diterima oleh BMS atas proyek ini:

- *Capacity payment* merupakan kas yang diterima oleh BMS karena memberikan hak eksklusif penggunaan infrastruktur kepada PTFI, di mana *capacity payment* dapat diterima setelah sertifikat penerimaan akhir diterbitkan, estimasi pada April 2023. BMS akan menerima sebesar USD7.936.000 per tahunnya selama 20 tahun, untuk 10 tahun perpanjangan pertama BMS akan menerima USD9.920.000/tahun, masa perpanjangan 10 tahun kedua adalah USD12.400.000/tahun. Apabila PTFI melakukan pembatalan sewa selama masa sewa 10 tahun (dalam jangka waktu sewa 20 tahun) maka akan dikenakan denda sesuai Perjanjian Konstruksi pasal 14.8.
- *Milestone I* yaitu kas yang diterima atas pencapaian pembangunan tahun pertama sebesar 12% dari keseluruhan biaya konstruksi yang dikeluarkan pada periode 12 bulan sejak tanggal 3 September 2021. *Milestone II* yaitu kas yang diterima atas pencapaian pembangunan tahun kedua sebesar 12% dari keseluruhan biaya konstruksi yang dikeluarkan BMS untuk periode 24 bulan sejak 3 September 2021. Sampai dengan periode November 2022, BMS telah menerima *milestone payment* sebesar Rp55 miliar atas *Milestone I* yang dengan progres penyelesaian telah mencapai 70,476%. Apabila BMS mengalami keterlambatan dalam penyerahan akhir aset di mana tidak sesuai dengan jadwal konstruksi, maka akan dikenakan denda sebesar Rp700 juta per hari, maksimal Rp63 miliar (Perjanjian Konstruksi pasal 4.2.3).
- Kompensasi sebesar Rp36 miliar, merupakan kompensasi tambahan untuk biaya konstruksi. BMS telah menerima kompensasi ini pada tanggal 30 September 2022.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

p) BMS and PT Freeport Indonesia (PTFI) Infrastructure Construction and Use Agreement (continued)

There are cash inflows received by BMS for this project:

- In exchange for granting PTFI exclusive use of infrastructure, BMS will receive capacity payments once the final acceptance certificate is issued in April 2023. BMS will earn USD7,936,000 annually for the next twenty years, USD9,920,000 annually for the first ten-year extension, and USD12,400,000 annually for the second 10 year extension. If PTFI terminates the lease within the initial ten years, Article 14.8 of the Construction and Use Agreement about the penalty will apply (within the 20 year lease duration).
- *Milestone I* is the cash payment of 12% of total construction expenses incurred over a 12-month period beginning on September 3, 2021, for the first year's construction. *Milestone II* is the payment for the second year's construction of 12% of BMS's total construction expenses for a period of 24 months beginning September 3, 2021. BMS has received Rp55 billion for *Milestone I* on November 17, 2022, according to the construction progress up to 70.476% by November 2022. BMS will be penalized Rp700 million per day, up to a maximum of Rp63 billion, if the final handover of assets is delayed and not in accordance with the construction schedule (Construction and Use Agreement article 4.2.3).
- The additional compensation for construction costs is Rp36 billion. This payment has been received by BMS on September 30, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

q) Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing

CTP menunjuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian No. 007/KONTRAK/WK-CTP/VII/2017 sebagai kontraktor pembangunan jalan tol Cibitung - Cilincing dengan nilai kontrak Rp5.591.934.626 (termasuk PPN).

Perjanjian ini telah mengalami beberapa addendum dengan addendum yang terakhir yaitu addendum XV pada tanggal 30 September 2021 dengan nilai kontrak Rp8.638.699.442 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai dari tanggal ditandatangani kontrak yakni 7 Juli 2017 sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir yang terbagi menjadi 4 seksi, yaitu seksi I Interchange Cibitung sampai dengan Interchange Telaga Asih (STA -0+440 s/d STA 2+700), seksi II Interchange Telaga Asih sampai dengan Interchange Tambelang (STA 2+700 s/d STA 13+140), seksi III Interchange Tambelang sampai dengan Interchange Tarumajaya (STA 13+140 s/d STA 27+150), dan seksi IV Interchange Tarumajaya sampai dengan Interchange Cilincing (STA 27+150 s/d STA 34+385).

Pada tanggal 29 Juli 2022, mengubah nilai kontrak menjadi sebesar Rp9.351.671.626 (termasuk PPN), dan pada tanggal 27 Januari 2023 mengubah target penyelesaian menjadi 10 Maret 2023.

CTP juga menunjuk PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan Perjanjian No. CTP-ADM-XII-2017-WBP-00001 tanggal 23 Desember 2017 sebagai kontraktor pembangunan jalan tol Cibitung - Cilincing (STA 30+200 s/d STA 32+800) dengan nilai kontrak Rp635.173.781 (termasuk PPN).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

q) Construction Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road

CTP appointed PT Waskita Karya (Persero) Tbk based on Agreement No. 007/KONTRAK/WK-CTP/VII/2017 as a construction contractor for the Cibitung - Cilincing toll road with a contract value of Rp5,591,934,626 (including VAT).

This agreement has been amended several times, the latest addendum of which is addendum XV dated September 30, 2021 with a contract value of Rp8,638,699,442 (including VAT) with the exercise period from the date of signing which was on July 7, 2017 until the signing of Final Hand Over which divided into 4 sections, which are section I Interchange Cibitung - Interchange Telaga Asih (STA -0+440 s/d STA 2+700), section II Interchange Telaga Asih - Interchange Tambelang (STA 2+700 s/d STA 13+140), section III Interchange Tambelang - Interchange Tarumajaya (STA 13+140 s/d STA 27+150), dan section IV Interchange Tarumajaya - Interchange Cilincing (STA 27+150 s/d STA 34+385).

On July 29, 2022, the contract value was changed to Rp9,351,671,626 (including VAT), and on January 27, 2023, the completion target was changed to March 10, 2023.

CTP appointed PT Waskita Beton Precast Tbk based on Agreement No. CTP- ADM-XII-2017-WBP-00001 dated on December 23, 2017, as a construction contractor for the Cibitung - Cilincing toll road (STA 30+200 s/d STA 32+800) with a contract value of Rp635,173,781 (including VAT).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**q) Perjanjian Pembangunan Jalan Tol
Cibitung-Cilincing (lanjutan)**

Berdasarkan Addendum V Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing dengan PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-XI-2020-WBP-0000006 tanggal 25 November 2020 nilai kontrak menjadi Rp422.155.854 (termasuk PPN).

Berdasarkan Addendum VII Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing dengan PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-V-2021-WBP-0000008 tanggal 31 Mei 2021 jangka waktu pelaksanaan menjadi 1.369 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2021.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir pada tanggal 29 Juli 2022 dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp423.273.100 (termasuk PPN) dan mengubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 1.775 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Pada tanggal 4 Agustus 2021, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance terkait Pekerjaan Jembatan Overpass pada Seksi II Jalan Tol Cibitung-Cilincing dengan nilai kontrak Rp97.280.699 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*Final Hand Over*) hasil pekerjaan.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan pada tanggal 30 Mei 2022, dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp100.766.233 (termasuk PPN) dan untuk mengubah jangka waktu kontrak menjadi 210 hari berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*Final Hand Over*) hasil pekerjaan.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**q) Construction Agreement of Cibitung-
Cilincing Toll Road (continued)**

Based on Addendum V of the Contract for construction of Cibitung - Cilincing toll road with PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-XI-2020-WBP-0000006 dated November 25, 2020, the contract value is Rp422,155,854 (including VAT).

Based on Addendum VII of the Contract for construction of Cibitung - Cilincing toll road with PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-V-2021-WBP-0000008 dated May 31, 2021, the period of execution of the work is 1,369 calendar days commencing from December 21, 2017 up to September 30, 2021.

This agreement has been amended several times, most recently on July 29, 2022, wherein both parties agreed to change the total contract value to become Rp423,273,100 (including VAT) and to change the implementation period to become 1,775 days from December 21, 2017 to October 31, 2022.

On August 4, 2021, CTP entered into an agreement with PT Jasamarga Tollroad Maintenance regarding the work of overpass at the Section II Cibitung-Cilincing Toll Road Construction Project with a contract value amounting to Rp97,280,699 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Final Hand Over of work.

This agreement has been amended on May 30, 2022, wherein both parties agreed to change the contract value to become Rp100,766,233 (including VAT), and to change the term of the contract to become 210 days from the date the contract is signed until the Final Hand Over of work.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**q) Perjanjian Pembangunan Jalan Tol
Cibitung-Cilincing (lanjutan)**

Pada tanggal 21 Februari 2023, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance terkait Pekerjaan Pengaspalan dan Expansion Joint Pada Seksi IV Jalan Tol Cibitung-Cilincing dengan nilai kontrak Rp9.529.163.000 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*Final Hand Over*) hasil pekerjaan.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan pada tanggal 8 Maret 2023, dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp14.780.943 (termasuk PPN).

**r) Perjanjian Kerjasama Khusus
Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub
(BMTH)**

Pada tanggal 27 Mei 2022, Perusahaan membuat kesepakatan bersama dengan SPSL mengenai pelaksanaan kerjasama khusus pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang menjelaskan perjanjian dengan jenis kontrak biaya tambah imbalan jasa sebesar Rp18.186.625 di area Pelabuhan Benoa, Bali. Perusahaan menyetujui melakukan pembayaran secara bertahap kepada SPSL dengan *management fee* sebesar 15% dari komponen biaya langsung non personil dan biaya penunjang lainnya setiap akhir triwulan. Jangka waktu perjanjian ini selama satu tahun dan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan kesepakatan.

Pada tanggal 11 Mei 2023, SPSL menandatangani berita acara atas Penyelesaian Kontrak Kerjasama Khusus Manajemen Proyek BMTH dengan Perusahaan. Berdasarkan berita acara tersebut, Kerjasama Khusus Manajemen Proyek BMTH yang dikelola SPSL berakhir pada tanggal 6 Juni 2023 dan tidak dilakukan perpanjangan kerjasama.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**q) Construction Agreement of Cibitung-
Cilincing Toll Road (continued)**

On February 21, 2023, CTP entered into an agreement with PT Jasamarga Tollroad Maintenance regarding Asphalt Work and Expansion joints on Section IV of the Cibitung-Cilincing Toll Road with a contract value of Rp9,529,163,000 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Minutes of Final Handover of the Work are signed.

This agreement was amended on March 8, 2023, when the parties agreed to change the contract value to Rp14,780,943 (including VAT).

**r) Bali Maritime Tourism Hub Construction
Special Cooperation Agreement**

On May 27, 2022, the Company entered into a joint agreement with SPSL regarding the implementation of a special cooperation in the development of Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) which explained that agreement with the cost plus fee contract of Rp18,186,625 in the Benoa Port Area, Bali. The Company agreed to make incremental payments to SPSL with a management fee 15% of non-personnel direct cost component and other support cost every end of the quarter. The term of this agreement is one year and can be extended under the agreement.

On May 11, 2023, SPSL signed a memorandum of completion of the the Cooperation Agreement for the Management of the BMTH with the Company. Based on the memorandum, Agreement for the Management of the BMTH, managed by SPSL, ended on June 6, 2023, and there is no extension of cooperation.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

s) Perjanjian Proyek Pembangunan Pelindo Tower dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Barang dan Jasa Kontraktor Terintegrasi Rancang Bangun (*Design and Build*) Proyek Pembangunan Pelindo Tower tanggal 6 Desember 2018 antara MMI dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP"), MMI mempekerjakan PP untuk melaksanakan proyek pembangunan Maritime Tower. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 730 hari. Nilai kontrak adalah sebesar Rp664,29 miliar (termasuk PPN) yang akan dibayarkan berdasarkan progres fisik pekerjaan setiap bulan.

Pada tanggal 20 Desember 2018, MMI telah melakukan pembayaran uang muka kepada PP sebesar Rp60,39 miliar belum termasuk PPN dan disajikan sebagai uang muka pembangunan aset tetap dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Berdasarkan addendum tanggal 26 November 2020, MMI dan PP sepakat untuk menambah dan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian diantaranya, jangka waktu perjanjian adalah selama 730 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 31 Desember 2020, diperpanjang menjadi 993 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 31 Agustus 2021, serta nilai pekerjaan berubah dari Rp664,29 miliar (termasuk PPN) menjadi Rp706,13 miliar (termasuk PPN).

Berdasarkan addendum No. KS.02/6/12/1/A1.MMI-18 tanggal 16 Agustus 2021, MMI dan PP sepakat untuk menambah dan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian, diantaranya, jangka waktu perjanjian adalah selama 993 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 31 Agustus 2021, diperpanjang menjadi 1.023 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 30 September 2021.

Berdasarkan berita acara serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan No. 705.1/C-139/18/FNC/IX/2021 tanggal 30 September 2021, PP menyerahkan kepada MMI seluruh pekerjaan pelaksanaan untuk pengadaan barang dan jasa kontraktor terintegrasi rancang bangun (*design and build*) proyek pembangunan Maritime Tower.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

s) Construction of Pelindo Tower Agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Based on Procurement Agreement on Integrated Design and Build of Goods and Contractor Services for Pelindo Tower Construction Project dated December 6, 2018, between MMI and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP"), MMI engaged PP to conduct the construction of Maritime Tower. The period of work is 730 days. The contract price is Rp664.29 billion (including VAT) which shall be paid based on monthly physical progress.

On December 20, 2018, MMI paid advances to PP amounting to Rp60.39 billion excluding VAT and presented as advance for construction of fixed assets in the consolidated statement of financial position.

Based on addendum dated November 26, 2020, MMI and PP agreed to add and change several articles in the agreement, among others, the term of agreement is 730 days with the handover of the construction work not later than December 31, 2020, extended to 993 days with the handover not later than August 31, 2021, and the contract price change from Rp664.29 billion (including VAT) to Rp706.13 billion (including VAT).

Based on addendum No. KS.02/6/12/1/A1.MMI-18 dated August 16, 2021, MMI and PP agreed to add and change several articles in the agreement, among others, the term of agreement is 993 days with the handover of the construction work not later than August 31, 2021, extended to 1,023 days with the handover not later than September 30, 2021.

Based on the first handover minutes of work implementation No. 705.1/C-139/18/FNC/IX/2021 dated September 30, 2021, PP handed over to MMI all implementation work for the procurement of goods and services of an integrated contractor for design and build of the Maritime Tower project.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

s) Perjanjian Proyek Pembangunan Pelindo Tower dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan berita acara serah terima kedua pekerjaan pelaksanaan No. 242.2/C-139/18/FNC/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, PP menyerahkan kepada MMI seluruh hasil perbaikan pekerjaan yang di timbul selama masa pemeliharaan Maritime Tower.

MMI tidak melakukan perpanjangan perjanjian dengan PP, dan seluruh kewajiban sudah diselesaikan oleh MMI.

t) Garungkong

Pada tanggal 14 Juni 2022, Perusahaan dan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan barang milik negara bersifat khusus dalam rangka penyediaan infrastruktur pada kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas II Garungkong.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Perusahaan berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan di area pelabuhan Garungkong dengan skema Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Perusahaan diharuskan untuk membayar kontribusi tetap sebesar Rp2,66 miliar per tahun yang selanjutnya naik setiap tahun sebesar 5%, dan melakukan pembayaran pembagian keuntungan sebesar 5,25% dari pendapatan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan investasi awal dengan total sebesar Rp739,83 miliar selama 9 tahun pertama.
- Jangka waktu perjanjian adalah selama 50 tahun, terhitung sejak 14 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

s) Construction of Pelindo Tower Agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (continued)

Based on the second handover minutes of work implementation No. 242.2/C-139/18/FNC/XII/2022 dated December 22, 2022, PP handed over to MMI all the results of corrective work carried out during the maintenance period of the Maritime Tower.

MMI did not extend the agreement with PP, and all obligations have been completed by MMI.

t) Garungkong

On June 14, 2022, the Company and Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation entered into a cooperation agreement regarding the use of special state property in the context of providing infrastructure at the unit management office of class II Garungkong port .

Important provisions in the Agreement are as follows:

- The company has the right to operate and carry out port service activities in the Garungkong port area under the State Property Utilization Cooperation scheme.
- The Company is required to pay a fixed contribution amounting to Rp2.66 billion per annum which will increase by 5% annually, and makes a profit sharing payment of 5.25% from the revenues. The Company is also required to make an initial investment totaling Rp739.83 billion for the first 9 years.
- The term of the agreement is 50 years, starting from June 14, 2022 and can be extended based on a written application by the Company to the Ministry of Sea Transportation no later than 3 months before the end of the agreement period.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

t) Garongkong (lanjutan)

Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan belum melakukan investasi sesuai yang disepakati dalam perjanjian karena kinerja Garongkong yang merugi. Pada tanggal 31 Juli 2023, Perusahaan menunjuk konsultan PT Yuchi Kaji Tama (pihak ketiga) untuk melakukan kajian rivi u kerjasama Pelabuhan Garongkong untuk rekomendasi kedepan. Hasil kajian rivi u tersebut telah terbit pada 20 Maret 2024. Sampai dengan laporan keuangan konsolidasian ini terbit, Perusahaan masih melakukan rivi u atas kajian tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya.

u) Perjanjian Kerja Sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) tentang Layanan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pada tanggal 8 Februari 2023, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) tentang Layanan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pengelolaan dana PPIP karyawan Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan berhak menentukan usia pensiun normal dan mengubah pilihan paket investasi, serta berhak menerima pemberitahuan mengenai hasil pengelolaan dana setiap bulan.
- Perusahaan juga dapat menyampaikan perubahan dan penambahan daftar rincian data karyawan dan jumlah iuran, serta karyawan Perusahaan memperoleh manfaat perlindungan jiwa dengan uang pertanggungan jiwa senilai Rp10.000.000 dan tidak dikenakan premi dan/atau biaya apapun.
- Perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan iuran untuk dan atas nama karyawan Perusahaan serta daftar rincian data karyawan dan jumlah iuran kepada DPLK BNI.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

t) Garongkong (continued)

As of December 31, 2023, the Company has not made the investment as agreed in the agreement due to Garongkong's loss-making performance. On July 31 2023, the Company appointed consultant PT Yuchi Kaji Tama (third party) to conduct a review study of the Garongkong Port collaboration for future recommendations. The results of the review study were published on March 20, 2024. Until this consolidated financial report is published, the Company is still conducting a review of the review study to determine the next steps.

u) Cooperation agreement with Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) regarding Defined Contribution Pension Program Services (PPIP)

On February 8, 2023, the Company entered into a cooperation agreement with Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) regarding Defined Contribution Pension Program Services (PPIP).

The scope of this agreement is the management of PPIP funds of the Company's employee, with the following conditions:

- *The Company has the right to determine the normal retirement age and change the choice of investment packages, and has the right to receive notifications about the results of fund management on monthly basis.*
- *The Companies can also submit changes and additions to the list of employee data and the amount of contributions, and the Company's employees receive life protection benefits with a sum of life insurance amounting to Rp10,000,000 and are not subject to any premiums and/or fees.*
- *The Company are required to deposit contributions for and on behalf of the Company's employees as well as a detailed list of employee data and the amount of contributions to DPLK BNI.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

v) Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Operasi dan Pemeliharaan

Pada tanggal 23 Desember 2019, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Jasamarga Tol Road Operator terkait Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Operasi dan Pemeliharaan Pada Jalan Tol Cibitung-Cilincing dengan nilai kontrak Rp244.082.023 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Pengakhiran Kontrak.

Pada tanggal 23 Maret 2022, kontrak ini diamendemen dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp125.494.149 (termasuk PPN).

Total biaya yang dibayarkan oleh CTP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing berjumlah Rp10.687.968 dan Rp12.771.420, yang dicatat sebagai biaya jasa.

w) Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat CTP

Pada tanggal 15 Juni 2021, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Mobyco Magno Indonesia, No. CTP-ADM-CTR-VI-2021-KTR-00001, terkait Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat CTP, Kantor Operasional, dan Bangunan Penunjang Lainnya dengan nilai kontrak Rp50.476.800.000 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Final Hand Over) hasil pekerjaan. Jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan adalah 180 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

Berdasarkan Addendum I No. CTP-ADM-CTR-XII-2021-KTR-00002 tanggal 10 Desember 2021 jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan (construction period) menjadi 230 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

v) Agreement of Procurement of Operating and Maintenance Service

On December 23, 2019, CTP entered into an agreement with PT Jasamarga Tollroad Operator regarding the work of Procurement of Operating and Maintenance Service at the Cibitung-Cilincing Toll Road Construction Project with a contract value of Rp244,082,023 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Minutes of Termination are signed.

On March 23, 2022, this contract was amended wherein both parties agreed to change the contract value to become Rp125,494,149 (including VAT).

The total expenses paid by CTP for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp10,687,968 and Rp12,771,420, respectively, which are recorded under cost of services.

w) Agreement for CTP Head Office Building Construction Services

On June 15, 2021, CTP entered into an agreement with PT Mobyco Magno Indonesia regarding Head Office, Operational Office, and Other Supporting Buildings of CTP, Construction Services with a contract value of Rp50,476,800,000 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Final Hand Over of work. The construction period is 180 calendar days commencing after the date of issuance of better work to Proceed ("SPMK").

Based on Addendum I No. CTP-ADM-CTR-XII-2021-KTR-00002 dated December 10, 2021, the construction period will be 230 calendar days from the issuance of the Work Commencement Order (SPMK).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**w) Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi
Pembangunan Gedung Kantor Pusat CTP
(lanjutan)**

Berdasarkan Addendum II No. CTP-ADM-CTR-I-2022-KTR-00003 tanggal 28 Januari 2022 nilai kontrak menjadi Rp32.058.124.000 (belum termasuk PPN) dan jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan (construction period) menjadi 319 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

x) Perjanjian Konstruksi dan Operasi BNCT

Pada tanggal 27 September 2023, PTP1 dan BNCT menandatangani Perjanjian Konstruksi dan Operasi ("COA") - Belawan New Container Terminal dimana PTP1, pada tanggal mulai, akan menyerahkan hak atas:

1. Lokasi Terminal Petikemas Belawan Fase I dan Fase II;
2. Seluruh peralatan awal yang berkaitan dengan kegiatan operasional terminal.

Selain itu, PTP1 juga memberikan, selama jangka waktu perjanjian, hak untuk:

1. Membangun dan menjalankan kegiatan operasional terminal;
2. Menjalankan usaha sesuai dengan Rencana Usaha Perpanjangan jika ada perpanjangan;
3. Menempati dan menggunakan lokasi terminal untuk kegiatan usaha;
4. Berbagi penggunaan akses jalan Pelindo;
5. Menggunakan peralatan awal yang tersedia.

Atas perjanjian ini, BNCT diwajibkan untuk melakukan pembayaran Uang Muka Sewa sebesar USD70.000.000 (nilai penuh) ke rekening escrow. Selain itu, BNCT diwajibkan untuk membayar sewa lokasi per triwulan untuk periode sejak tanggal mulai hingga tanggal penyesuaian sewa lokasi triwulan pertama dalam rupiah yang setara dengan USD8.750.000 (nilai penuh) pada nilai tukar. Setelah tanggal penyesuaian pertama, BNCT harus membayar kepada PTP1 dalam rupiah yang setara dengan USD10.000.000 (nilai penuh) pada nilai tukar.

Periode perjanjian ini adalah 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan periode 20 (dua puluh) tahun berikutnya.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**w) Agreement for CTP Head Office Building
Construction Services (continued)**

Based on Addendum II No. CTP-ADM-CTR-I-2022-KTR-00003 dated January 28, 2022 the contract value is Rp32,058,124,000 (excluding VAT) and the construction period is 319 calendar days from the issuance of the Work Commencement Order (SPMK).

**x) Construction and Operation Agreement
BNCT**

On September 27, 2023, PTP1 and BNCT entered into the Construction and Operation Agreement ("COA") - Belawan New Container Terminal whereby PTP1, on the commencement date, will assign the rights to:

1. Location of Belawan Container Terminal Phase I and Phase II;
2. All initial equipments related to terminal operations.

In addition, PTP1 also grants, during the term of the agreement, the rights to:

1. Build and conduct terminal operation activities;
2. Conduct business in accordance with the Extension Business Plan if there is an extension;
3. Occupy and use the terminal location for business activities;
4. Share the Pelindo road access usage;
5. Use initial equipment available.

For this agreement, BNCT is required to pay Advanced Site Rent ("ASR") fee of USD70,000,000 (full amount) into an escrow account. In addition, BNCT is required to pay Quarterly Site Rent ("QSR") for the period from the commencement date to the first quarterly site rent adjustment date in rupiah equivalent to USD8,750,000 (full amount) at the exchange rate. After the first adjustment date, BNCT must pay to PTP1 in rupiah equivalent to USD10,000,000 (full amount) at the exchange rate.

The period of this agreement is 30 (thirty) years and may be extended for up to a further period of 20 (twenty) years.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

y) Perjanjian Pemanfaatan Dermaga - BNCT

Pada tanggal 27 September 2023, PTP1 dan BNCT menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Dermaga ("WUA") – Terminal Petikemas Belawan Internasional ("TPKB") dengan jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) tahun. Dalam perjanjian ini PTP1, pada tanggal mulai, akan menyerahkan hak atas:

1. Lokasi TPKB;
2. Seluruh peralatan awal yang berkaitan dengan kegiatan operasional terminal.

Selain itu, PTP1 juga memberikan, selama jangka waktu perjanjian, hak untuk:

1. Membangun dan menjalankan kegiatan operasional terminal;
2. Menempati dan menggunakan lokasi terminal untuk kegiatan usaha;
3. Berbagi hak untuk menggunakan atau menempati yang manapun dari Fasilitas Bersama;
4. Berbagi penggunaan akses jalan Pelindo dan gerbang akses utama;
5. Menggunakan peralatan awal, jaringan TI dan perangkat keras yang tersedia.

50. PERKARA HUKUM

a) Gugatan dari Sapriadi dkk atas tuntutan ganti rugi atas pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung

Sapriadi dkk mengajukan gugatan kepada Perusahaan dengan nomor register 95/Pdt.G/2021/PN.KIS di Pengadilan Negeri Kisaran. Gugatan tersebut berkaitan dengan keberatan penggugat atas nilai ganti rugi tanah yang diberikan oleh Perusahaan atas pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Multipurpose pada Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pada tanggal 8 Maret 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, memutuskan perkara tersebut, dengan amar putusan:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar baya perkara sejumlah Rp2.024.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

y) Wharf Utilization Agreement - BNCT

On September 27, 2023, PTP1 and BNCT signed Wharf Utilization Agreement ("WUA") - Belawan International Container Terminal ("BICT") with period of the agreement is 6 (six) years. Under this agreement PTP1, on the commencement date, will grants the rights of:

1. Location of BICT;
2. All initial equipment related to terminal operations.

In addition, PTP1 also grants, during the term of the agreement, the rights to:

1. Build and conduct terminal operation activities;
2. Occupy and use the terminal premises for business activities;
3. Occupy and use the terminal location for business activities;
4. Share the Pelindo road access and main gate access usage;
5. Use initial equipment, IT network and hardware equipment available.

50. LAWSUIT

a) The lawsuit from Sapriadi et al to claim for compensation for the construction of the Kuala Tanjung Port

Sapriadi et al filed a lawsuit against the Company with registration number 95/Pdt.G/2021/PN.KIS at the Kisaran District Court. The lawsuit regarding to the plaintiff's objection to the value of land compensation provided by the Company for land acquisition for the construction of the Multipurpose Terminal at the Port of Kuala Tanjung.

On March 8, 2022, the Panel of Judges at the Kisaran District Court decided on this case, with the verdict:

- a. Declare that the plaintiff's lawsuit is unacceptable (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- b. Punish the Plaintiff to pay court fees in the amount of Rp2,024.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

a) Gugatan dari Sapriadi dkk atas tuntutan ganti rugi atas pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung (lanjutan)

Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum Banding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 5 April 2022.

Kemudian, penggugat menyampaikan Kontra Memori Banding melalui kepanitraan Pengadilan Negeri kisaran kepada Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 Juni 2022.

Pada tanggal 7 September 2022, perkara telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor register 415/Pdt/2022/PT MDN dengan amar putusan yang intinya menerima permohonan banding, yang mana menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 95/Pdt.G/2021/PN Kis.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi sebagaimana Relaas Pemberitahuan pernyataan kasasi dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2022. Perusahaan telah menyampaikan kontra memori kasasi pada tanggal 9 November 2022.

Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b) Gugatan dari Ramadhan Abadi atas tuntutan ganti rugi atas pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung

Ramadhan Abadi mengajukan gugatan kepada Perusahaan dengan register no 82/Pdt.G/2021/PN.KIS di Pengadilan Negeri Kisaran. Gugatan tersebut berkaitan dengan keberatan penggugat atas nilai ganti rugi yang diberikan oleh Perusahaan atas penggantian pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Terminal Multipurpose pada Pelabuhan Kuala Tanjung. Gugatan tersebut ditetapkan berdasarkan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Kisaran No. 23/Pdt.P.Kos/2021/PN.Kis.

50. LAWSUIT (continued)

a) The lawsuit from Sapriadi et al to claim for compensation for the construction of the Kuala Tanjung Port (continued)

The plaintiff then submitted an appeal as referred to in the Relaas Notice of Appeal Statement on April 5, 2022.

Then, the plaintiff submitted a Counter Memorandum of Appeal through the Partnership of the District Court to the Medan High Court on June 2, 2022.

On September 7, 2022, the case was decided by the Panel of Judges of the Medan High Court with register number 415/Pdt/2022/PT MDN with a decision which basically accepted the appeal, which upheld the decision of the Kisaran District Court number 95/Pdt.G/2021/PN Kis.

Based on the High Court's decision, the plaintiff filed a cassation as referred to in the Notification Release of the cassation statement from the Medan District Court on October 24, 2022. The Company has submitted a counter cassation memorandum on November 9, 2022.

As of the date of publication of these consolidated financial statements, the Company is still waiting for the cassation decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

b) Lawsuit from Ramadhan Abadi over demands for compensation for the construction of Kuala Tanjung Port

Ramadhan Abadi filed a lawsuit against the Company with register no 82/Pdt.G/2021/PN.KIS at the Kisaran District Court. The lawsuit relates to the plaintiff's objection to the value of compensation given by the Company for compensation for land acquisition for the benefit of the construction of the Multipurpose Terminal at the Port of Kuala Tanjung. The lawsuit was determined based on the Kisaran District Court Consignment Decree No. 23/Pdt.P.Kos/2021/PN.Kis.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM

b) Gugatan dari Ramadhan Abadi atas tuntutan ganti rugi atas pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung (lanjutan)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah memutuskan Perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Kis Tanggal Putusan tgl 8 Maret 2022 dengan Amar Putusan:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.034;

Pada tanggal 1 April 2022, penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding.

Kontra Memori Banding Telah disampaikan melalui kepanitraan Pengadilan Negeri Kisaran kepada Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 Juni 2022.

Perkara telah diputus oleh Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan nomor register perkara 277/Pdt/2022/PT MDN, dengan amar putusan yang pada intinya menerima permohonan banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 82/Pdt.G/2021/PN Kis.

Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan kasasi dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2022.

Perusahaan telah menyampaikan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022. Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c) Gugatan dari PT Artha Sempana tentang pemberian Hak Penggunaan Lahan

Gugatan dari PT Artha Sempana yang meminta pembatalan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 tanggal 18 Desember 1986 tentang pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m² di Pelabuhan Sunda Kelapa.

50. LAWSUIT

b) Lawsuit from Ramadhan Abadi over demands for compensation for the construction of Kuala Tanjung Port (continued)

The Panel of Judges at the Kisaran District Court has decided on Case Number 82/Pdt.G/2022/PN Kis Decision Date March 8, 2022 with the Decision Verdict:

- Declare that the plaintiff's lawsuit is unacceptable (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Punish the Plaintiff to pay court fees in the amount of Rp2,034;

On April 1, 2022 the Plaintiff filed an Appeal as referred to in the Relas Notification of Statement of Appeal.

Counter Memorandum of Appeal It has been submitted through the partnership of the District Court to the Medan High Court on June 2, 2022.

The case was decided by the Panel of Judges of the Medan High Court on August 1, 2022 with case register number 277/Pdt/2022/PT MDN, with a decision which essentially accepted the appeal request which upheld the Kisaran District Court decision number 82/Pdt.G/2021/PN Kis.

The plaintiff then filed an appeal for cassation in accordance with the release of the notification of the cassation statement from the Medan District Court on September 14, 2022.

The Company has submitted a counter cassation memorandum on October 10, 2022. As of the date of publication of these consolidated financial statements, the Company is still waiting for the cassation decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

c) Lawsuit from PT Artha Sempana regarding the granting of Land Use Rights

Lawsuit from PT Artha Sempana requesting cancellation of Minister of Home Affairs Decree No.128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 regarding the granting of Land Management Rights (HPL) to the Company over a land area of 592,771 m² in Sunda Kelapa Port.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

c) Gugatan dari PT Artha Sempana tentang pemberian Hak Penggunaan Lahan (lanjutan)

Pada tahun 2019, PT Artha Sempana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dengan pokok gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian HPL kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m² di Pelabuhan Sunda Kelapa dan permintaan ganti kerugian terhadap lahan yang dikuasai oleh PT Artha Sempana apabila Perusahaan ingin menguasai lahan tersebut.

Pada tanggal 23 April 2019, Direktur Utama Perusahaan menerbitkan Surat Kuasa khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara dengan nomor surat KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 tanggal 23 April 2019.

Pada tanggal 24 November 2021, Perusahaan menerima salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 450/Pdt/2021/PT.DKI, yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Juni 2020.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Perusahaan menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi No. 3200K/Pdt/2022 yang amar putusannya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat sehingga Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) (Perusahaan menang).

Pada tanggal 12 April 2023, Penggugat mengajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali. Perusahaan mengajukan kontra memori atas peninjauan kembali.

Pada tanggal 23 November 2023, Perusahaan menerima putusan atas Peninjauan Kembali yang dalam inti amar putusannya menolak permohonan peninjauan kembali dari Penggugat (Perusahaan menang).

50. LAWSUIT (continued)

c) Lawsuit from PT Artha Sempana regarding the granting of Land Use Rights (continued)

In 2019, PT Artha Sempana filed a lawsuit with the North Jakarta District Court No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr with the principal claim for canceling the Decree of the Minister of Home Affairs No. 128/HPL/DA/86 on December 18, 1986 which contained the granting of HPL to the Company for a land area of 592,771 m² in Sunda Kelapa Port and a request for compensation for land controlled by PT Artha Sempana if the Company wants to control the land.

On April 23, 2019, the President Director of the Company issued a special Power of Attorney to the North Jakarta District Attorney's Head as State Attorney Attorney with letter number KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 dated April 23, 2019.

On November 24, 2021, the Company received a copy of the DKI Jakarta High Court Decision No. 450/Pdt/2021/PT.DKI, which in essence strengthens the North Jakarta District Court Decision No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dated June 18, 2020.

*On October 17, 2022, the Company received a copy of the Supreme Court's decision at cassation level no. 3200K/Pdt/2022 whose ruling rejected the Cassation Application from the Cassation Appellant/Plaintiff so that the Decision has permanent legal force (*In Kracht Van Gewijsde*) (the Company won).*

On April 12 2023, the Plaintiff submitted a request for legal action for judicial review. The Company filed a counter memo for judicial review

On November 23 2023, the Company received a decision on Judicial Review which in essence of the decision rejected the Plaintiff's request for reconsideration (the Company won).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

d) Gugatan dari Siti Hawa binti Umar dkk tentang sengketa kepemilikan tanah di Kotawaringin Barat

Gugatan yang diajukan oleh Siti Hawa Binti Umar, dkk di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan nomor register 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu terkait dengan sengketa kepemilikan tanah dengan seluas 14.150 M² yang terletak di Sungai Kalap/ Sungai Kumai RT.12, kelurahan Kumai Hulu, kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Majelis Hakim PN Pangkalan Bun telah memutuskan perkara No. 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu tanggal 6 Oktober 2022 dengan Amar Putusan:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam subjek kasus:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagian tanah terletak di Sungai Kumai Rt.18, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 14.150 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kumai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perusahaan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ahli Waris dan KPC; belum terbayar oleh Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan batal sebagian Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi atas sebagian bidang tanah seluas 14.150 m² dari total keseluruhan seluas seluas 273.728 m²;
5. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan sisa sebagian tanah seluas 14.150 m² yang dikuasai kepada Para Penggugat (Ahli Waris) Alm. Muhammad bin Mat Amin secara suka rela tanpa dibebani kewajiban apa pun untuk digunakan secara bebas;

50. LAWSUIT (continued)

d) Lawsuit from Siti Hawa binti Umar et al regarding disputes over land ownership in West Kotawaringin

The lawsuit filed by Siti Hawa Binti Umar, DKK at the Pangkalan Bun District Court with register number 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu is related to a land ownership dispute with an area of 14,150 M² which is located in Sungai Kalap/ Sungai Kumai RT. 12, Kumai Hulu sub-district, Kumai sub-district, West Kotawaringin Regency.

The Panel of Judges for the Pangkalan Bun District Court has decided on case Number 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu on October 6, 2022 with the following verdict:

In exception:

- Rejected the exceptions of Defendant I, Defendant III, Defendant IV and Defendant V;

In subject of the case:

1. Partially granted the Plaintiff's lawsuit;
2. Declare that part of the land is located in Sungai Kumai RT.18, Kumai Hulu Village, Kumai District, Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan Province, with an area of 14,150 m² with the following boundaries:
 - To the east it is bordered by Kumai River;
 - West side is bordered by Road;
 - North side is bordered by the Company;
 - South side is bordered by Land owners by heirs and KPC; has not been paid by the defendant I;
3. Declare that Defendant I has defaulted;
4. Declare the cancellation of part of the land acquisition agreement with compensation for a portion of the land area of 14,150 m² out of a total area of 273,728 m²;
5. Punish by ordering Defendant I to voluntarily return the remaining portion of the land area of 14,150 m² which owned to the Plaintiffs (Heirs) of the late Muhammad bin Mat Amin without being burdened with any obligation to use it by free;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

**d) Gugatan dari Siti Hawa binti Umar dkk
tentang sengketa kepemilikan tanah di
Kotawaringin Barat (lanjutan)**

Dalam subjek kasus: (lanjutan)

6. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Penilaian Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Lokasi Pelabuhan CPO milik Perusahaan Cabang Kumai yang terletak di Sungai Kalap/Sungai Kumai, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor: 295.580.42/PAN-PT/2000;
7. Menyatakan Sertifikat HPL No.5 Tahun 2001 atas nama Tergugat I (Perusahaan) yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak memiliki nilai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Perusahaan telah menyatakan Banding sebagai Akta pernyataan Banding pada tanggal 20 Oktober 2022 dan telah menyampaikan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2022.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memutuskan Perkara Nomor 97/PDT/2022/PT.PLK tanggal 15 Desember 2022 dengan amar putusan yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 13/Pdt.G/2022/P.Pbu yang dimohonkan banding tersebut.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 97/PDT/2022/PT.PLK tanggal 15 Desember 2022, Siti Hawa Binti Umar, dkk mengajukan upaya hukum kasasi melalui Paniteria Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 2 Januari 2023.

Pada tanggal 23 Februari 2023, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mengirimkan dokumen konsesi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

50. LAWSUIT (continued)

**d) Lawsuit from Siti Hawa binti Umar et al
regarding disputes over land ownership in
West Kotawaringin (continued)**

In subject of the case: (continued)

6. Declare legally valid Minutes of Assessment of Compensation for Land, Buildings and Growing Planting for the CPO Port Location of the Company Kumai Branch located on the Kalap River/Kumai River, Kumai Hulu Village, Kumai District, West Kotawaringin Regency, Number: 295.580.42/PAN-PT/2000;
7. Declare the HPL Certificate No. 5 Year 2001 on behalf of Defendant I (the Company) issued by Defendant III has no binding legal force value;
8. Punish Defendant I to submit and comply with the contents of this decision;
9. Rejecting the Plaintiff's claim for other than and the rest;

The Company has stated the Appeal as a Deed of Appeal statement on October 20, 2022 and has submitted a memory of appeal on October 25, 2022.

The Panel of Judges of the Palangka Raya High Court has decided on Case Number 97/PDT/2022/PT.PLK dated December 15, 2022 with a decision which essentially cancels the decision of the Pangkalan Bun District Court number 13/Pdt.G/2022/P.Pbu which is being appealed.

Based on the Decision of the Palangka Raya High Court Number 97/PDT/2022/PT.PLK dated December 15, 2022, Siti Hawa Binti Umar, et al filed an appeal through the Pangkalan Bun District Court Committee on January 2, 2023.

On February 23 2023, the Pangkalan Bun District Court sent the concession documents to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. As of the date of publication of these consolidated financial statements, the Company is still waiting for the cassation decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

e) Gugatan dari PT Kapuas Prima Coal Tbk

Penggugat mengajukan gugatan kepada Perusahaan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan tanah dengan seluas 3.029 m²/0,39 Ha yang terletak di Jalan CPO Pelabuhan Kalap, RT 018, Kumai Hulu, Kumai, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada 27 Oktober 2022, telah dibacakan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbu yang amar putusannya menyatakan Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan penyerobotan tanah milik penggugat dengan luas 0,39 Ha. Atas putusan tersebut, Perusahaan menyampaikan upaya hukum banding.

Pada 26 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memutus Perkara Nomor 102/PDT/2022/PT PLK dengan amar Putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbu yang dimohonkan banding tersebut.

Pada tanggal 5 Januari 2023, penggugat mengajukan upaya hukum kasasi melalui Paniteria Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pada tanggal 15 Februari 2023, Perusahaan telah mengajukan kontra memori konsesi. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2023, dokumen konsesi telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Februari 2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan dengan amar putusan pada intinya menolah permohonan kasasi dari Penggugat (Perusahaan menang) atas gugatan dari PT Kapuas Prima Coal Tbk.

50. LAWSUIT (continued)

e) The lawsuit filed by PT Kapuas Prima Coal Tbk

The plaintiff has filed a lawsuit to Pangkalan Bun District Court Number 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu related to an Act Against Law a land ownership dispute with an area of 3,029 m²/0.39 Ha which located on Jalan CPO Pelabuhan Kalap, RT 018, Kumai Hulu, Kumai, West Kotawaringin, Central Kalimantan Province.

On October 27, 2022, has been read the Decision of the Pangkalan Bun District Court Number 37/Pdt.G/2022/PN Pbu dated which in stated that the Company had conducted illegal act by expropriating land belonging to PT Kapuas Prima Coal Tbk with an area of 0.39 Ha. Based on this decision, the Company submitted an appeal.

On December 26, 2022, the Panel of Judges of the Palangka Raya High Court has decided on Case Number 102/PDT/2022/PT PLK with a ruling that cancels the decision of the Pangkalan Bun District Court number 37/Pdt.G/2022/PN Pbu which the appeal was filed for.

On January 5, 2023, the plaintiff filed a cassation through the Pangkalan Bun District Court Committee.

On February 15, 2023, the Company submitted a concession counter. Then on March 3 2023, the concession documents were sent by the Pangkalan Bun District Court to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

On February 19, 2024, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued a Letter of Notification of the Contents of the Decision with a ruling in essence rejecting the Plaintiff's cassation request (the Company won) for the lawsuit filed by PT Kapuas Prima Coal Tbk.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

f) Gugatan dari Ibrahim L Dg Sitaba

Penggugat mengajukan gugatan kepada Perusahaan di Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan klaim tanah milik Perusahaan yang terletak di Kelurahan Ujung Tanah berdasarkan sertifikat HPL No. 1. Penggugat klaim atas 14,57 Ha berdasarkan Surat "Simana Boetaja Tanae" dari Hoofd Van Landreate Makassar, Cap Crown tanggal 27/09/1858 an. Ipadjallo, Persil No.24, dvv III, Kohir No. 9 CI (Lampok Camboko). Tanah tersebut merupakan tanah milik adat a.n. Ipadjallo. Penggugat mempermasalahkan tanah seluas 5 Ha yang disewakan ke Pertamina, menurut Penggugat tanah tersebut merupakan bagian dari luasan 14,57 Ha.

Pada 7 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri makassar memutus Perkara Nomor 358/Pdt.G/2019/PN.Mks dengan amar putusan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.886.

Pada 14 Desember 2020, penggugat mengajukan banding dan Perkara telah diputus pada Tingkat Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 346/PDT/2020/PT MKS dengan amar putusan:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 7 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.

Pada tanggal 10 Februari 2021, penggugat mengajukan kasasi dan Perusahaan sudah menyerahkan kontra memori kasasi pada tanggal 1 April 2021.

Pada 21 April 2022, Mahkamah Agung telah memutus perkara tingkat Kasasi Nomor 1664K/PDT/2022 yang pada amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Salinan putusan resmi telah diterima oleh kuasa hukum Perusahaan pada tanggal 27 Juli 2022.

50. LAWSUIT (continued)

f) The lawsuit by Ibrahim L Dg Sitaba

The plaintiff has filed a lawsuit to the Makassar District Court is related to land claims owned by the Company which is located in Ujung Tanah Village based on HPL certificate No. 1. The Plaintiff claims on 14.57 Ha are based on Letter "Simana Boetaja Tanae" from Hoofd Van Landreate Makassar, Stamp Crown dated 27/09/1858 an. Ipadjallo, Persil No. 24, dvv III, Kohir No. 9 CI (Lampok Camboko). The land is owned by customary land on behalf of Ipadjallo. The Plaintiff disputed the 5 Ha land that was leased to Pertamina which according to the Plaintiff the land was part of an area of 14.57 Ha.

On 7 July 2020, the Makassar District Court Panel of Judges decided on Case Number 358/Pdt.G/2019/PN.Mks with the verdict:

- Rejecting the plaintiff's lawsuit in its entirety;
- Punish the plaintiff to pay court fees incurred in this case which until now has been estimated at Rp2,886.

On December 14, 2020, the plaintiff filed an appeal and the case was decided at the Makassar High Court with Number 346/PDT/2020/PT MKS with the verdict:

- Received the original Appellant's appeal from the Plaintiff;
- Strengthening the decision of the Makassar District Court Number 358/Pdt.G/2019/PN Mks dated July 7, 2020 which is being appealed;
- Sentenced the plaintiff's original appellant to pay the costs of the case at both court levels which at the appeal level was set at Rp150.

On February 10, 2021, the plaintiff filed an appeal and the Company has submitted a counter cassation memorandum on April 1, 2021.

On April 21, 2022, The Supreme Court has decided on the cassation case Number 1664K/PDT/2022 that rejected the cassation request from the Cassation Appellant. The copy of the official decision was received by the Company's attorney on July 27, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

f) Gugatan dari Ibrahim L Dg Sitaba (lanjutan)

Pada 6 Desember 2022, Penggugat mengajukan upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali sebagaimana Relas pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Makassar. Perusahaan telah menyampaikan Kontra memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2023.

Pada tanggal 3 Januari 2023, Perusahaan telah menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 31 Oktober 2023, Mahmah Agung telah memutuskan perkara Peninjauan Kembali No 1042 PK/PDT/2023 dengan amar putusan yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Penggugat (Perusahaan menang).

g) Gugatan dari Makis Sasambe/ PT Dian Osiania

Penggugat mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait kerugian yang dialami penggugat atas rusaknya kapal milik penggugat yang diklaim akibat dari kegiatan tergugat dengan nomor perkara 384/ptd.G/2017/PN.Mnd.

Pada 22 Maret 2018, Pengadilan Negeri Manado telah memutuskan perkara nomor 384/ptd.G/2017/PN.Mnd dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklaard*).

Pada 17 Januari 2019, penggugat mengajukan upaya hukum banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah memutuskan Perkara Nomor 176/PDT/2018/PT MND dengan amar putusan:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.

Pada 12 Juni 2019, penggugat mengajukan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 19 Oktober 2023, Mahkama Agung telah memutus perkara kasasi dengan nomor perkara 2605 k/PDt/2023 yang pada amar putusannya menolak permohonan kasasi dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara.

Pada tanggal 11 Januari 2024, kuasa hukum Perusahaan telah menerima salinan putusan resmi atas gugatan dari Makis Sasambe/PT Dian Osiania.

50. LAWSUIT (continued)

f) The lawsuit by Ibrahim L Dg Sitaba (continued)

On December 6, 2022, the Plaintiff filed an Extraordinary Judicial Review Remedy according to the Relas notification from the Makassar District Court. The Company has submitted a Judicial Review Counter memory on January 5, 2023.

On January 3, 2023, the Company submitted its Counter Memorandum of Judicial Review to the Supreme Court.

On October 31 2023, the Supreme Court decided the case for judicial review No. 1042 PK/PDT/2023 with a decision which essentially rejected the Plaintiff's request for judicial review (the Company won).

g) The lawsuit by Makis Sasambe/ PT Dian Osiania

The plaintiff has filed a lawsuit the Company regarding the loss suffered by the plaintiff due to the damage to the plaintiff's ship claimed as a result of the activities of the defendant with case number 384/ptd.G/2017/PN.Mnd.

On March 22, 2018, the Manado District Court decided case number 384/ptd.G/2017/PN.Mnd with a ruling declaring the plaintiff's claim unacceptable (Niet On Vanklijke Verklaard).

On January 17 2019, the plaintiff filed an appeal. The Panel of Judges of the Manado High Court decided on Case Number 176/PDT/2018/PT MND with the following verdict:

- *Declare that the lawsuit was unacceptable (Niet Ontvankelijke Verklaard);*
- *Penalize the plaintiff's to pay court costs at the appeal level which is Rp150.*

On June 12, 2019, the plaintiff filed a Memorandum of Cassation to the Supreme Court. On October 19 2023, the Supreme Court has decided on the cassation case with case number 2605 k/PDt/2023, which in its decision rejected the cassation petition and sentenced the cassation applicant to pay court fee.

On January 11, 2024, the Company's attorney has received the copy of the official decision for the lawsuit by Makis Sasambe/ PT Dian Osiania.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

51. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-2/MBU/01/2024 tanggal 3 Januari 2024, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Ellies Daini, S.H.,M.Kn No.12 tanggal 22 Januari 2024, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen	Agus Suhartono
Komisaris	Andus Winarno
Komisaris	Arif Toha Tjahjagama
Komisaris	Didi Sumedi
Komisaris	Jodi Mahardi
Komisaris Independen	Sudung Situmorang
Komisaris Independen	Heru Sukanto

Direksi

Direktur Utama	Arif Suhartono
Wakil Direktur Utama	Hambra
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Mega Satria
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Ihsanuddin Usman
Direktur Strategi	Prasetyo
Direktur Investasi	Boy Robyanto
Direktur Pengelola	Putut Sri Muljanto

- b. Pada tanggal 11 Januari 2024, PTP1 dan BNCT menandatangani Berita Acara Serah Terima Lokasi dan Peralatan Awal - Belawan New Container Terminal No. KS.02/11/1/2/OT.2/DU/TPTP-24. Berdasarkan berita acara ini, PTP1 dan BNCT sepakat bahwa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2024, PTP1 menyerahkan lokasi dan peralatan awal kepada BNCT, bebas dari segala pembebanan serta memberikan hak atas lokasi dan peralatan awal untuk dioperasikan dan digunakan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan COA.
- c. Pada tanggal 11 Januari 2024, PTP1 dan BNCT menandatangani Berita Acara Serah Terima Lokasi dan Peralatan Awal - Kawasan International TPKB No. KS.02/11/1/1/OT.2/DU/TPTP-24. Berdasarkan berita acara ini, PTP1 dan BNCT sepakat bahwa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2024, PTP1 menyerahkan lokasi dan peralatan awal kepada BNCT, bebas dari segala pembebanan serta memberikan hak atas lokasi dan peralatan awal untuk dioperasikan dan digunakan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan WUA.

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-2/MBU/01/2024 dated January 3, 2024 which notarized through Notarial Deed of Ellies Daini, S.H.,M.Kn., No. 12 dated January 22, 2024, the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commissioners and Directors as follows:

Board of Commissioners

President/Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Directors

President Director
Vice President Director
Director of Finance and Risk Management
Director of Human Resources and General Affair
Strategy Director
Investment Director
Managing Director

- b. On January 11, 2024, PTP1 and BNCT signed the Minutes of Handover of of Site and Initial Equipment of Belawan New Container Terminal No. KS.02/11/1/2/OT.2/DU/TPTP-24. Based on this minute, PTP1 and BNCT agree that as of January 12, 2024 PTP1 will hand over the initial location and equipment to BNCT, free from all burden and give the rights to the initial location and equipment to be operated and used in accordance with the terms and conditions based on the COA.
- c. On January 11, 2024, PTP1 and BNCT signed the Minutes of Handover of of Site and Initial Equipment of TPKB International Space No. KS.02/11/1/1/OT.2/DU/TPTP-24. Based on this minute, PTP1 and BNCT agree that as of January 12, 2024 PTP1 will hand over the initial location and equipment to BNCT, free from all burden and give the rights to the initial location and equipment to be operated and used in accordance with the terms and conditions based on the WUA.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**51. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- d. Pada tanggal 29 Januari 2024, Perusahaan melakukan addendum II Perjanjian Konsesi Pengusahaan Terminal Perikemas Makassar New Port (MNP) Tahap I dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang pada intinya menambah ruang lingkup area konsesi dari semula tahap 1A menjadi tahap 1A, 1B, 1C dan 1D.
- e. Pada tanggal 1 Februari 2024, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) No. 01, para pihak menyetujui pemindahan hak atas seluruh saham milik Perusahaan dalam PDS sebanyak 31.500 lembar saham atau setara dengan 90,00% dengan nilai nominal Rp15.750.000.000 (nilai penuh) ke PMLI. Sehingga susunan pemegang saham PDS menjadi sebagai berikut:
- PMLI memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 31.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp15.750.000.000 (nilai penuh).
 - Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia sebesar 10,00% atau sebanyak 3.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.750.000.000 (nilai penuh).
- f. Pada tanggal 27 Februari 2024, EDII menerima surat pemberitahuan persetujuan perpanjangan sementara jangka waktu fasilitas pinjaman sehingga waktu fasilitas pinjaman tersebut berlaku sampai dengan 10 Maret 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
- EDII harus melunasi fasilitas KRK hingga outstanding berjumlah Rp3.000.000 pada saat realisasi PPJS, kemudian sisa outstanding diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
 - seluruh available limit fasilitas DL CPF, fasilitas BG, dan fasilitas KRK di blokir;
 - perpanjangan sementara untuk fasilitas DL CPF, fasilitas BG, dan fasilitas KRK berikut seluruh turunan akseptasi/multiple drawdown fasilitas terkait (jika ada);
 - wajib terdapat surat permohonan perpanjangan sementara atas fasilitas berjalan dari EDII;
 - tidak terdapat perubahan syarat dan ketentuan kredit dari sebelumnya, dan tidak terdapat default termasuk keterlambatan pembayaran pokok dan bunga.

**51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- d. On January 29, 2024, the Company entered into addendum II to the Makassar New Port (MNP) Terminal Concession Agreement Phase I with the Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar which essentially increased the scope of the concession area from originally stage 1A to stages 1A, 1B, 1C and 1D.
- e. On February 1, 2024, based on the Shareholders' Decision Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS Decision) No. 01, the parties agreed to transfer rights to all shares owned by the Company in PDS totaling 31,500 shares or the equivalent of 90.00% with a nominal value of Rp15,750,000,000 (full amount) to PMLI. So the composition of PDS shareholders is as follows:
- PMLI owns 90.00% or 31,500 shares with total amount of Rp15,750,000,000 (full amount).
 - Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia owns 10.00% or 3,500 shares with total amount of Rp1,750,000,000 (full amount).
- f. On February, 2024, EDII received an approval notification letter for a temporary extension of the loan facility term stating that the loan facility is valid until March 10, 2024, with the following conditions.
- EDII must pay off the KRK facility until the outstanding amount is Rp3,000,000 at the time of PPJS realization, then the remaining outstanding amount is extended until March 10, 2024;
 - all available limits for DL CPF facilities, BG facilities and KRK facilities are blocked;
 - temporary extension for DL CPF facilities, BG facilities and KRK facilities along with all acceptance derivatives/multiple drawdowns of related facilities (if any);
 - there must be a letter requesting a temporary extension of current facilities from EDII;
 - there is no changes to the previous credit terms and conditions, and there are no defaults including late payments of principal and interest.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**51. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- g. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.2/29/2/1/RKTK/UTMA/PLND-24 tanggal 29 Februari 2024, mengalih tugaskan pekerja Ardhy Wahyu Basuki dengan jabatan lama sebagai Regional Head 3 pada Regional 3 menjadi jabatan baru sebagai Group Head Sekretariat Perusahaan pada Group Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) efektif per tanggal 1 Maret 2024.
- h. Pada tanggal 7 Maret 2024, EDII menerima surat pemberitahuan persetujuan perpanjangan sementara jangka waktu fasilitas pinjaman sehingga waktu fasilitas pinjaman tersebut berlaku sampai dengan 28 Juni 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
- perpanjangan sementara jangka waktu fasilitas pinjaman dengan kondisi fasilitas diblokir;
 - seluruh fasilitas DL CFPF dan fasilitas BG diblokir;
 - EDII diharapkan melakukan angsuran secara bertahap atas outstanding Fasilitas KRK dengan skema dibawah ini:
 - Rp500.000 pada tanggal 30 April 2024
 - Rp500.000 pada tanggal 31 Mei 2024
 - Sisa outstanding wajib dilunasi pada tanggal 28 Juni 2024Setiap adanya pelunasan bertahap maka limit akan diblokir sebesar pelunasan yang sudah dijalankan.
 - perpanjangan sementara untuk fasilitas KRK, fasilitas DL CFPF, dan fasilitas BG berikut seluruh turunan akseptasi/*multiple drawdown* fasilitas terkait (jika ada);
 - wajib terdapat surat permohonan perpanjangan sementara atas fasilitas berjalan dari EDII; dan
 - tidak terdapat perubahan syarat dan ketentuan kredit dari sebelumnya, dan tidak terdapat default termasuk keterlambatan pembayaran pokok dan bunga.

**51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- g. Based on The Decree of the Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No: KP.10.2/29/2/1/RKTK/UTMA/PLND-24 dated 29 February 2024, transferring worker Ardhy Wahyu Basuki from his old position as Regional Head 3 at Regional 3 to new position as Group Head of Corporate Secretariat at the Corporate Secretariat Group Head Office of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) effective March 1, 2024.
- h. On March 7, 2024, EDII received an approval notification letter for a temporary extension of the loan facility term stating that the loan facility is valid until June 28, 2024, with the following conditions:
- temporary extension of the term of the loan facility with the condition that the facility is blocked;
 - all DL CFPF facilities and BG facilities are blocked;
 - EDII are expected to make installments in stages for the outstanding KRK Facilities using the scheme below:
 - Rp500,000 on April 30, 2024
 - Rp500,000 on May 31, 2024
 - The remaining balance must be paid by June 28, 2024Every time there is a gradual repayment, the limit will be blocked in the amount of the repayment that has been made.
 - temporary extension for KRK facilities, DL CFPF facilities, and BG facilities along with all related facility acceptance derivatives/*multiple drawdowns* (if any);
 - there must be a letter requesting a temporary extension of current facilities from EDII; and
 - there are no changes to the previous credit terms and conditions, and there are no defaults including late payments of principal and interest.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

52. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang menyangkut segmen usaha Grup adalah sebagai berikut:

52. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Group's business segments is as follows:

	31 Desember/December 31, 2023					
	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	29.451.930.330	1.566.287.372	31.018.217.702	-	31.018.217.702	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	9.246.559.197	4.210.107.472	13.456.666.669	(13.456.666.669)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	38.698.489.527	5.776.394.844	44.474.884.371	(13.456.666.669)	31.018.217.702	Total segment operating revenues
Beban operasi	(32.928.997.190)	(4.438.766.463)	(37.367.763.653)	13.024.532.182	(24.343.231.471)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	898.965.716	36.410.459	935.376.175	(624.779.982)	310.596.193	Other operating income - net
Laba usaha	6.668.458.053	1.374.038.840	8.042.496.893	(1.056.914.469)	6.985.582.424	Operating income
Pendapatan keuangan	958.854.788	45.257.489	1.004.112.277	(376.816.845)	627.295.432	Finance income
Beban keuangan	(2.658.904.342)	(999.659.646)	(3.658.563.988)	798.444.135	(2.860.119.853)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	3.624.842.044	11.741.432	3.636.583.476	(3.266.205.916)	370.377.560	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan	8.593.250.543	431.378.115	9.024.628.658	(3.901.493.095)	5.123.135.563	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(379.564.883)	(137.688.334)	(517.253.217)	1.771.849	(515.481.368)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan	8.213.685.660	293.689.781	8.507.375.441	(3.899.721.246)	4.607.654.195	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(917.092.565)	(83.817.991)	(1.000.910.556)	1.364.854	(999.545.702)	Current
Tangguhan	302.756.394	101.716.376	404.472.770	-	404.472.770	Deferred
Laba tahun berjalan	7.599.349.489	311.588.166	7.910.937.655	(3.898.356.392)	4.012.581.263	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	136.898.730.984	22.076.667.455	158.975.398.439	(40.634.332.764)	118.341.065.675	Segment assets
Liabilitas segmen	70.581.813.990	18.596.255.902	89.178.069.892	(17.678.219.375)	71.499.850.517	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	(3.841.177.585)	(300.275.350)	(4.141.452.935)	467.616.743	(3.673.836.192)	Segment depreciation and amortization

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

52. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

52. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2022						
	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	26.781.758.791	2.918.845.344	29.700.604.135	-	29.700.604.135	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	8.981.833.109	2.018.437.644	11.000.270.753	(11.000.270.753)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen					29.700.604.135	Total segment operating revenues
Beban operasi	(29.756.772.868)	(4.038.359.251)	(33.795.132.119)	10.640.702.928	(23.154.429.191)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	372.153.179	193.379.261	565.532.440	3.113.057	568.645.497	Other operating income - net
Laba usaha					7.114.820.441	Operating income
Pendapatan keuangan	759.759.720	42.360.298	802.120.018	(421.629.748)	380.490.270	Finance income
Beban keuangan	(2.723.614.361)	(685.118.179)	(3.408.732.540)	837.689.572	(2.571.042.968)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	3.194.119.075	(256.639.058)	2.937.480.017	(2.634.864.325)	302.615.692	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					5.226.883.435	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(375.850.289)	(112.379.013)	(488.229.302)	-	(488.229.302)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					4.738.654.133	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(898.369.096)	(59.968.402)	(958.337.498)	-	(958.337.498)	Current
Tangguhan	43.164.362	84.988.860	128.153.222	-	128.153.222	Deferred
Laba tahun berjalan					3.908.469.857	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	134.500.471.592	25.724.382.172	160.224.853.764	(41.874.275.858)	118.350.577.906	Segment assets
Liabilitas segmen	71.737.725.596	21.366.079.896	93.103.805.492	(17.557.920.361)	75.545.885.131	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	3.701.971.300	335.928.632	4.037.899.932	(470.037.799)	3.567.862.133	Segment depreciation and amortization
Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year then Ended December 31,						
	2023		2022			
Pendapatan Operasi						Operating Revenues
Regional 1		4.436.095.246		3.854.214.067		Region 1
Regional 2		11.546.506.772		11.584.512.249		Region 2
Regional 3		9.809.747.824		9.123.938.134		Region 3
Regional 4		5.225.867.860		5.137.939.685		Region 4
Total		31.018.217.702		29.700.604.135		Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

52. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Aset tidak lancar		
Regional 1	12.802.718.063	14.719.906.514
Regional 2	50.379.896.561	42.940.361.555
Regional 3	24.106.205.318	27.859.314.239
Regional 4	10.733.144.759	11.210.828.204
Total	98.021.964.701	96.730.410.512

52. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

Non-current asset
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Total

53. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year then Ended December 31,	
	2023	2022
Penambahan aset tetap melalui penambahan utang	204.146.503	933.015.517
Penambahan aset takberwujud melalui kapitalisasi bunga pinjaman	423.995.273	325.254.601
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap	71.560.858	47.306.746
Penambahan aset tetap melalui uang muka	2.454.975	248.304.048
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	42.703.592	38.288.643

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Non- arus kas/Non-cash flow			31 Desember 2023/ December 31, 2023	
		Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others		
Pinjaman bank jangka pendek	105.361.831	(102.031.659)	-	-	3.330.172	Short-term bank loans
Utang bank	7.842.812.658	6.469.255.760	84.794.235	-	14.396.862.653	Bank loan
Utang obligasi	42.754.634.125	(8.928.084.369)	(702.497.259)	-	33.124.052.497	Bonds payable
Dividen	-	(1.453.964.849)	-	-	(1.453.964.849)	Dividend
Liabilitas sewa	435.135.812	(417.597.215)	-	470.184.867	487.723.464	Lease liabilities
Total	51.137.944.426	(4.432.422.332)	(617.703.024)	470.184.867	46.558.003.937	Total

Non-cash of investing activities for the year ended December 31, 2023 and 2022, are as follow:

Non-cash of investing activities for the year ended December 31, 2023 and 2022, are as follow:

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

53. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Arus kas/ Cash flow	Non- arus kas/Non-cash flow		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
			Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others		
Pinjaman bank jangka pendek	138.493.774	(33.131.943)	-	-	105.361.831	Short-term bank loans
Utang bank	8.888.945.339	(1.046.132.681)	-	-	7.842.812.658	Bank loan
Utang obligasi	40.176.176.480	(1.272.889.596)	3.851.347.241	-	42.754.634.125	Bonds payable
Dividen	-	(1.316.854.000)	-	-	1.316.854.000	Dividend
Liabilitas sewa	333.885.712	(138.892.333)	-	240.142.433	435.135.812	Lease liabilities
Total	49.537.501.305	(3.807.900.553)	3.851.347.241	240.142.433	52.454.798.426	Total

**53. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS
INFORMATION (continued)**

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows: (continued)

**54. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**54. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2.455.790.931	3.095.425.541	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	3.754.582.414	3.908.050.108	Short-term investment
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak ketiga	360.361.482	352.615.665	Third parties
Pihak berelasi	1.044.698.818	652.391.728	Related parties
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak ketiga	11.081.743	23.013.642	Third parties
Pihak berelasi	12.663.900	274.544.601	Related parties
Uang muka dan beban dibayar di muka	84.754.820	197.320.412	Advance payments and prepaid expenses
Pendapatan yang masih akan diterima	839.627.778	1.054.631.247	Accrued income
Persediaan	15.249.031	17.566.041	Inventories
Pajak dibayar di muka	374.438.590	313.352.611	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	43.492.609	48.829.587	Other current assets
Total Aset Lancar	8.996.742.116	9.937.741.183	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	20.396.242.387	22.420.232.719	Investment in associate entities
Piutang non-usaha jangka panjang	5.866.721.251	5.849.630.586	Long-term non-trade receivable
Properti investasi - neto	670.576.654	554.796.272	Investment properties - net
Aset tetap - neto	35.303.318.734	39.748.711.315	Fixed assets - net
Aset kerjasama operasi - neto	352.176.368	372.763.800	Joint operation assets - net
Aset hak-guna - neto	391.272.216	250.119.499	Right-of-use assets - net
Aset pajak tangguhan	213.968.728	230.779.774	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	26.895.056.996	22.277.683.302	Intangible assets - net
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.120.296.351	777.567.551	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	345.561.265	655.520.491	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	91.555.190.950	93.137.805.309	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	100.551.933.066	103.075.546.492	TOTAL ASSETS

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**54. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
(lanjutan)**

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

**54. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha			Trade payables
Pihak ketiga	252.824.154	298.285.704	Third parties
Pihak berelasi	675.458.094	800.085.305	Related parties
Pendapatan diterima di muka			Short-term unearned revenues
jangka pendek	1.173.962.078	1.136.275.202	Taxes payable
Utang pajak	375.201.815	372.032.518	Accrued expenses
Beban akrual	2.535.566.428	4.179.654.354	Current maturities of long-term liabilities:
Bagian lancar atas liabilitas			Bonds payable
jangka panjang			Bank loans
Utang obligasi	7.574.312.147	8.637.804.928	Lease liabilities
Utang bank	369.670.832	-	Other current liabilities
Liabilitas sewa	47.273.867	15.708.590	Third parties
Liabilitas jangka pendek lainnya			Related parties
Pihak ketiga	293.300.776	401.031.506	Total Current Liabilities
Pihak berelasi	90.292.678	133.124.727	
Total Liabilitas Jangka Pendek	13.387.862.869	15.974.002.834	NON-CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG			Long-term liabilities - net of
Liabilitas jangka panjang - setelah			of current maturities
dikurangi bagian lancar			Bonds payable
Utang obligasi	25.659.903.374	34.229.532.153	Bank loans
Utang bank	7.293.292.708	-	Lease liabilities
Liabilitas sewa	391.369.245	256.310.102	Deferred tax liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	-	135.184.367	Long-term unearned revenues
Pendapatan diterima di muka			Other non - current liabilities
jangka panjang	3.344.527.965	3.399.845.605	Employee benefit liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	237.535.798	170.012.480	Total Non-current Liabilities
Liabilitas imbalan kerja	5.733.068.589	5.307.891.454	
Total Liabilitas Jangka Panjang	42.659.697.679	43.498.776.161	TOTAL LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	56.047.560.548	59.472.778.995	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**54. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
(lanjutan)**

**54. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)**

**31 Desember 2023/
December 31, 2023**

**31 Desember 2022/
December 31, 2022**

EKUITAS

EQUITY

**Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk**

**Equity attributable to owners
of the parent entity**

Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B		
Modal dasar - 156.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 155.999.999 saham Seri B		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.575.584 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri dari: 1 saham Seri A Dwiwarna dan 40.575.583 saham Seri B	40.575.584.000	
Modal donasi	26.825.982	
Tambahan modal disetor	(31.573.383.783)	
Komponen ekuitas lainnya	1.466.121	
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	836.072.934	
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	34.149.265.425	
Belum ditentukan penggunaannya	1.090.227.825	
Penghasilan komprehensif lain	(601.685.986)	
Ekuitas - neto	44.504.372.518	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	100.551.933.066	

Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively		
Authorized capital - 156,000,000 shares as of December 31, 2022 and 2023, consist of: 1 Series A Dwiwarna share and 155,999,999 Series B shares		
Issued and fully paid - 40,575,584 shares as of December 31, 2023 and 2022 consists of: 1 Series A Dwiwarna share and 40,575,583 Series B shares	40.575.584.000	
Donated capital	26.825.982	
Additional paid-in capital	(31.573.383.783)	
Other equity component	1.466.121	
Difference in value of transactions with non-controlling interest	836.072.934	
Retained earnings		
Appropriated	34.502.497.085	
Unappropriated	1.023.968.341	
Other comprehensive income	(1.790.263.183)	
Equity - net	43.602.767.497	
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	103.075.546.492	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**54. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
(lanjutan)**

**54. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

	2023	2022	
Pendapatan operasi	15.052.941.466	15.475.961.876	Operating revenue
Pendapatan konstruksi	2.493.123.587	787.426.308	Construction revenues
Beban operasi	(13.083.801.925)	(13.219.160.193)	Operating expense
Beban konstruksi	(2.493.123.587)	(787.426.308)	Construction expense
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	868.313.858	726.619.042	Others operating income (expense) - net
LABA USAHA	2.837.453.399	2.983.420.725	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	632.698.043	551.924.719	Finance income
Beban keuangan	(2.214.059.347)	(2.112.208.142)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.256.092.095	1.423.137.302	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(340.249.585)	(333.173.903)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	915.842.510	1.089.963.399	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN			CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
Kini	-	(22.835.917)	Current
Tangguhan	174.385.315	(43.159.143)	Deferred
LABA PERIODE BERJALAN	1.090.227.825	1.023.968.339	INCOME FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbangan pasti - neto setelah pajak	(124.680.593)	787.157.534	Remeasurements of defined benefit plans - net off tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	1.313.257.791	(2.820.468.471)	Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	2.278.805.023	(1.009.342.599)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**54. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
(lanjutan)**

**54. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOW

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	18.198.063.921	15.974.163.474	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(8.125.361.579)	(5.088.442.896)	Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(1.897.796.526)	(2.266.478.971)	Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(2.718.739.827)	(1.931.386.284)	Payment for income taxes
Penerimaan pendapatan bunga	43.270.021	90.827.895	Receipt of interest income
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	5.499.436.010	6.778.683.218	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pencairan investasi jangka pendek	192.609.825	2.241.101.132	Withdrawal of short-term investments
Penerimaan dividen	585.771.970	44.254.802	Receipt of dividend
Hasil penjualan aset tetap	284.197	-	Proceed on sales assets
Perolehan aset tetap, properti investasi dan aset takberwujud	(2.288.142.827)	(3.737.146.084)	Acquisition of fixed assets, investment properties and intangible assets
Penjualan (penambahan) pada penyertaan saham	76.636.727	(2.570.123.049)	Sale (addition) to investment in shares
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.432.840.108)	(4.021.913.199)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	7.531.000.000	-	Receipt of loans
Pembayaran pinjaman bank dan utang obligasi	(8.938.521.869)	(1.975.328.801)	Payment of bank loans and bonds payable
Pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya	(1.907.777.227)	(1.164.210.682)	Interest payment and other finance expense
Pembayaran dividen	(1.377.200.000)	(1.316.854.000)	Payment of dividend
Pembayaran liabilitas sewa	(13.672.211)	(5.654.095)	Payments of lease liabilities
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(4.706.171.307)	(4.462.047.578)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(639.575.406)	(1.705.277.559)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(59.205)	(50.361)	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3.095.425.541	4.800.753.461	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.455.790.931	3.095.425.541	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Solid Performance for a Progressive Indonesian Maritime Growth

Kinerja Solid untuk Kemajuan Pertumbuhan Maritim Indonesia



BUMN UNTUK
INDONESIA

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso No.9,
Jakarta Utara 14230, Indonesia

Telp : 021 4301080

Email : info@pelindo.co.id



pelindo.co.id